GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Provinsi yang telah diverifikasi dan disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 18);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 selanjutnya disebut P-Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Pasal 2

(1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
BAB I. Pendahuluan;
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan; dan
BAB IV. Penutup.

(2) P-Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

P-Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Dinas Kesehatan;
c. RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda;
d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
g. Satuan Polisi Pamong Praja;
h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
i. Dinas Sosial;
j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
m. Dinas Lingkungan Hidup;
n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
t. Dinas Kelautan dan Perikanan;
u. Dinas Pariwisata;
v. Dinas Perkebunan;
w. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
x. Dinas Kehutanan;
y. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
z. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
aa. Sekretariat Daerah;

bb. Sekretariat DPRD;
cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
dd. Badan Pendapatan Daerah;
ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
ff. Badan Kepegawaian Daerah;
gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
ii. Badan Penghubung Provinsi;
jj. Inspektorat;
kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Agustus 2023
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 39.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap PD wajib membuat dokumen perencanaan lima tahunnya yaitu rencana Strategis (Renstra PD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara spesifik dan terukur serta dilengkapi den gan sasaran yang hendak dicapai yang setiap tahunnya dituangkan dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) PD yang berpedoman pada Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah (RKPD) . Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) PD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur disusun berdasarkan Rencana Kerja Perubahan PD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Untuk itu perlu disusun Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) PD sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan keberlanjutan perencanaan jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2023. Sehingga diharapkan seluruh PD Provinsi Kalimantan Timur dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) PD Tahun 2023 dengan mudah, sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu.

Pengertian (Renja-P) PD adalah Rencana Kerja Perubahan yang selanjutnya disingkat (Renja-P) PD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan (Renja-P) PD Tahun 2023 disusun melalui 5 (lima) tahapan, yakni :

1. Penyusunan Rencana;
2. Penetapan Rencana;
3. Sosialisasi Rencana;

4. Pengendalian Pelaksanaan Rencana, dan;
5. Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Kelima tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap Penyusunan Rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 3 (tiga) langkah, yaitu:

1. Menyusun Rencana Kerja Perubahan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur;
2. Menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing - masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders);
3. Menyusun Rencana Kerja Perubahan rencana pembangunan .

Tahap berikutnya adalah Penetapan Rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya, yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala PD setelah diverifikasi oleh Kepala Bappeda untuk selanjutnya mem peroleh pengesahan dari Kepala Daerah.

Tahap berikutnya adalah Sosialisasi Rencana yang dimaksudkan untuk menyampaikan dan menjelaskan (Renja-P) kepada pemangku kepentingan (stakeholders) agar mengetahui, memahami dan bersama - sama melaksanakan rencana.

Tahap berikutnya adalah Pengendalian Pelaksanaan Rencana yang dimaksud untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam (Renja-P) PD melalui kegiatan - kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Kepala PD. Selanjutnya, Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing - masing Kepala PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tahap berikutnya adalah Evaluasi Pelaksanaan Rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis, mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi serta untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.

Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap PD, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, PD mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing - masing jangka waktu sebuah rencana. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan sebagai kegiatan penilaian kinerja yang terukur dengan efisiensi, efektifitas, dan kemanfaatan program serta pembangunan yang berkelanjutan. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang dan jasa dan terhadap hasil (outcome) program pembangunan yang berupa dampak dan manfaat.

Tahapan penyusunan, penetapan dan sosialisasi (Renja-P) PD Tahun 2023 dilaksanakan untuk menghasilkan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) PD. Tahapan dan langkah - langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) PD
    a. Kepala PD membentuk Tim Fasilitas Penyusunan (Renja-P) PD;
    b. Tim Fasilitas merumuskan tim fasilitas Akhir (Renja-P) PD dengan ;
        1. Memperhatikan tugas pokok dan fungsi PD;
        2. Memperhatikan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya;
        3. Memperhatikan prioritas dalam RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025 sesuai dengan tahapan jangka menengah rencana;
        4. Mengacu pada RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023;
        5. Memperhatikan dan mempertimbangkan (Renja-P) KL dalam menyusun (Renja-P) PD;

6. Melakukan konsultasi kepada Bappeda Provinsi dan Kementerian/Lembaga yang memiliki keterkaitan bidang kerja dalam menyusun (Renja-P) PD.
7. Kepala PD menyampaikan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) PD kepada Kepala Bappeda sebagai bahan informasi pelaksanaan forum PD dan atau forum gabungan PD.

2. (Renja-P) PD dan atau Forum Gabungan (Renja-P) PD tentang Pembahasan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) PD
   a. Forum (Renja-P) PD dan atau Forum Gabungan (Renja-P) PD merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas Rancangan (Renja-P) PD yang memuat strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJM daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD. Forum Gabungan (Renja-P) PD dilakukan sepertinya Forum (Renja-P) PD, yang dikelompokkan berdasarkan misi, urusan, fungsi, atau bidang untuk menjaga sinergitas antar pelaku pembangunan;
   b. Tujuan dilaksanakannya Forum (Renja-P) PD dan atau Forum Gabungan (Renja-P) PD adalah mensinergikan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dari berbagai pelaku pembangunan untuk mencapai visi dan misi dalam RPJM Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD;
   c. Keluaran yang dihasilkan dari Forum (Renja-P) PD dan atau Forum Gabungan (Renja-P) PD adalah Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) PD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil pembahasan dalam Forum (Renja-P) PD dan atau Forum Gabungan (Renja-P) PD;
   d. Peserta Forum PD terdiri dari PD Kabupaten/Kota Kelompok Masyarakat di tingkat Provinsi yang berkaitan langsung dengan fungsi PD, instansi vertical tingkat Provi nsi, Ikatan/Asosiasi Profesi lainnya, Anggota DPRD dari Komisi Mitra Kerja PD Provinsi, dan Ahli/Profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademis. Sedangkan peserta Forum Gabungan (Renja-P) PD adalah peserta Forum (Renja-P) PD ditambah PD Provinsi yang memiliki keterkaitan fungsi;

e. Penyelenggaraan Forum (Renja-P) PD dilakukan oleh PD yang bersangkutan, sementara Forum Gabungan (Renja-P) PD diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi.

3. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) PD:

a. Tim Fasilitasi Penyusunan (Renja-P) PD menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) PD berdasarkan hasil Forum PD dan atau Forum Gabungan PD;
b. Kepala PD menyampaikan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) PD kepada Kepala Bappeda (dibantu external adviser) untuk dilakukan verifikasi. Verifikasi terhadap Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) PD bertujuan untuk menjamin keselarasan, keterpaduan dan harmonisasi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang diamanatkan RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;
c. Verifikasi terhadap Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) PD dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah rancangan (Renja-P) PD diterima Kepala Bappeda.

Tahap Penetapan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) PD dilaksanakan untuk menetapkan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) PD menjadi Peraturan Kepala PD setelah diverifikasi oleh Kepala Bappeda untuk selanjutnya memperoleh pengesahan dari Kepala Daerah. Tahapan dan langkah langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Tim Fasilitasi Penyusunan (Renja-P) PD menyempurnakan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) PD sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan Bappeda dan menyusun rancangan Peraturan Kepala PD tentang (Renja-P) PD;
2. Kepala PD menetapkan Peraturan Kepala PD tentang (Renja-P) PD;
3. Kepala PD menyampaikan Peraturan Kepala PD tentang (Renja-P) PD untuk diajukan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bappeda;
4. Kepala Bappeda mengumpulkan seluruh Peraturan Kepala PD tentang (Renja-P) PD untuk diajukan kepada Kepala Daerah dalam rangka memperoleh pengesahan;

5. Kepala Bappeda menyebarluaskan hasil pengesahan oleh Kepala Daerah tentang (Renja-P) PD kepada Kepala PD.

Tahap Sosialisasi Rencana Kerja Perubahan ((Renja - P)) PD dilaksanakan menyampaikan dan menjelaskan (Renja-P) PD kepada pemangku kepentingan (stakeholders) agar mengetahui, memahami dan Bersama sama melaksanakan (Renja-P) PD. Tahapan dan langkah - langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Tim Fasilitasi menyusun rencana sosialisasi (Renja-P) PD yang disetujui oleh Kepala PD;
2. Sosialisasi dilakukan melalui komunikasi langsung (seperti Forum Komunikasi Publik, Rapat Kerja dan Seminar), maupun Komunikasi Tidak Langsung (seperti Media Masa, Media Elektronik/Internet, Leflet dan Booklet) kepada pemangku kepentingan (stakeholders).

Untuk pedoman tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan (Renja-P) PD akan disusun tersendiri. Penyusunannya akan dilakukan oleh Kepala Bappeda paling lambat Akhir minggu kedua Bulan April Tahun 2023.

Jadwal penyusunan (Renja-P) PD Tahun 2023 dimulai pada minggu ketiga bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan minggu pertama bulan Januari Tahun 2023. Rincian jadwal terlampir.
Sedangkan secara umum jadwal penyusunan (Renja-P) PD berdasarkan tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) PD, selesai pada minggu ketiga bulan Juni 2023;
2. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) PD, selesai pada minggu Pertama bulan Juli 2023;
3. Penetapan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) PD, selesai pada minggu kedua bulan Juli 2023;
4. Sosialisasi (Renja-P) PD, dilaksanakan mulai minggu kedua bulan Juli Tahun 2023.

a. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan (Renja-P) PD Tahun 2023 adalah:

1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700) ;
5. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 T ahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri N omor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peretauran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja-P) PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur adalah mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan keberlanjutan antara Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2023 dengan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2023, terhadap Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023,sehingga ada keterkaitan dan kesinambugan dari segi program dan kegiatannya.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja-P) PD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah untuk melaksanakan amanat Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Satuan Perangkat Daerah telah mengikuti aturan yang berlaku yaitu sesuai Permendagri nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematikanya sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan (Renja-P) Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II : Hasil Evaluasi (Renja-P) Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan (Renja-P) Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan (Renja-P) Perangkat Daerah sudah disahkan.

Bab III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan (Renja-P) Perangkat Daerah.

Bab IV : Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang Rencana Kerja Perubahan dan pendanaan perangkat daerah

Bab V : Penutup

Berisikan uraian penutup.

BAB II

HASIL KINERJA DISDIKBUD TAHUN 2021

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN (Renja-P) DISKDIKUD TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2019-2023

Menurut SK LAN Nomor 239 Tahun 2003 agar masing -masing instansi dapat menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalannya secara lebih luas dan mendalam, maka diharapkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dapat menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja unit organisasi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Stratejik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapa ian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat; dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaanya

Sebagaimana telah diuraikan di atas dari sasaran yang ada dengan indikator kinerjanya, semuanya telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Begitu juga dengan pencapaian kinerja kegiatan tahun 2021 berjumlah sebanyak 56 kegiatan, 15 program dan 3 UPTD semuanya juga menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, kalaupun ada target program dan kegiatan yang belum maksimal adalah hal yang masih wajar.

Pembahasan Sasaran dalam analisis pencapaian kinerja lebih diarahkan pada sasaran utama Dinas Pendidikan Prov. Kaltim terutama yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Dasar dan Menengah serta terget -target

yang telah di tetapkan dalam RPJMD 2019-2023 selanjutnya dituangkan dalam Renstra PD Tahun 2019-2023 serta (Renja-P) PD Tahun 2021.

Pada umumnya realisasi capaian kinerja utama pada tahun 2021 telah menunjukkan hasil yang baik, namun belum dapat mencapai target yang diinginkan. Hal ini dikarenakan karena tingginya target yang ditetapkan dalam Rencana Strategi Dinas Pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat kami uraikan sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Budaya Dan Keagamaan Di Masyarakat**

   Satu di antara misi Kalimantan Timur Berdaulat 2023 adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia, dengan sasaran Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Luar Biasa. Pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 70% dengan capaian sebesar 100%.

2. **Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan Vokasi/Kejuruan Selaras Kebutuhan Pasar Kerja Dan Perkembangan Teknologi Dengan Penguatan Kemitraan Swasta/Industri (Kurikulum, Tenaga Pendidik Dan Sarana Prasarana).**

   Satu di antara misi Kalimantan Timur Berdaulat 2023 adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia. Dengan sasaran meningkatkan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi dengan penguatan kemitraan swasta/industri (kurikulum, tenaga pendidik dan sarana prasarana) pada Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pada tahun 2021 terdapat 70 SMK yang sudah bekerjasama dengan DUDI (Dunia Usaha & Dunia Industri), sedangkan pada tahun 2021 ditargetkan 86 SMK dan telah melakukan kerjasama sebanyak 55 SMK dengan capaian kinerja sebesar 100%.

3. Peningkatan APK/APM SMA/SMK

Tabel 1

Data Pokok SMA/SMALB dan SMK Tahun 2021

No.	Komponen	SMA/SMALB	SMK	Total
1.	Sekolah	231	223	453
2.	Siswa	78.413	80.119	158.532
3.	Ruang Kelas	2.706	3.111	5.817
	a. Baik	1.262	1.705	2.967
	b. Rusak Ringan	1.444	1.406	2.850
	c. Rusak Sedang	0	7	7
	d. Rusak Berat	0	1	1
4.	Guru	5.390	5.736	11.148

Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMALB/SMK dengan target 94% dan realisasi 96,77% dengan capaian 102,9%. Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA target 77% dan realisasi 78,15% dengan capaian 101,49%.

Berdasarkan data yang ada pada Tahun 2021, jumlah sekolah SMA dan SMK sebanyak 453 unit, siswa seluruhnya sebanyak 158.532 siswa dan untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 5.817 ruang dengan rincian 2.967 ruang dengan kondisi baik, 2.850 ruang dengan kondisi rusak ringan, *7* ruang dengan kondisi rusak sedang dan 1 ruang dengan kondisi rusak berat. Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pembagian urusan dalam hal pengelolaan pendidikan menengah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Kaltim pada sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2019.

Angka rata-rata lama sekolah adalah jumlah penduduk Kalimantan Timur usia sekolah yang berhak mendapatkan pendidikan, diharapkan pada Tahun 2021 sudah tidak ada lagi penduduk di Kalimantan Timur usia sekolah dengan ijazah lulusan minimal SMP melainkan minimal lulusan SMA.

Pemerintah Kalimantan Timur terus berusaha untuk menaikkan capaian pada tingkat SMA yang merupakan program Gubernur yakni penuntasan Wajar Sembilan Tahun menjadi Wajar 12 Tahun. Untuk itu Pemerintah Provinsi menyalurkan dana BOSDA bagi siswa SMA dan SMK di Kalimantan Timur dengan anggaran dana sebesar 163.121.008.627,00,- pada tahun 2021. Serta dengan adanya program peningkatan SDM melalui

beasiswa atau “Beasiswa Kaltim” yang disusun berdasarkan 5 (lima) pilar pembangunan pendidikan nasional yakni :

a) Ketersediaan sarana pendidikan.
b) Kemampuan murid/orang tua mendapatkan akses terhadap sarana pendidikan nasional.
c) Mutu pelayanan sarana pendidikan.
d) Kesetaraan dalam pendidikan.
e) Keterjaminan 4 pilar sebelumnya dapat berjalan dengan baik

4. Peningkatan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Melalui Pemenuhan Kualifikasi Pendidikan.

Jumlah tenaga pendidik (guru) di Prov.Kaltim di seluruh jenjang pendidikan dari tingkat TK, SD/MI, SMP/MTs, hingga jenjang SMA/MA/SMK sebanyak **52.401** guru. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus meningkatkan kualifikasi guru sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur jenjang SMA/SMK sebanyak 9.977 Guru dan jenjang SLB sebanyak 397 guru, tercatat ada sebanyak 9.554 guru yang telah terkualifikasi di Provinsi Kalimantan Timur. Apabila diakumulasikan penyelenggaraan kualifikasi guru yang dananya dari Pusat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kab/Kota maka jumlah guru kualifikasi D4/S1/S2 di Kalimantan Timur Tahun 2021 sebanyak 9.554 guru atau *98%*, yakni dari target 98% dengan realisasi 100%.

Tabel 2

Data Pokok Guru SMA/SMK/SLB Tahun 2021

No.	Kab/Kota	SMA		SMK		SLB	
		Guru	<D4/S1	Guru	<D4/S1	Guru	<D4/S1
1	Kabupaten Berau	439	431	295	286	20	17
2	Kabupaten Kutai Barat	339	324	281	256	18	10
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	990	954	884	801	52	44
4	Kabupaten Kutai Timur	416	410	412	396	17	16
5	Kabupaten Mahakam Ulu	105	96	31	31	3	3
6	Kabupaten Paser	387	379	327	312	17	16
7	Kabupaten Penajam Paser Utara	202	198	270	260	10	9
8	Kota Balikpapan	642	612	920	875	75	69
9	Kota Bontang	305	299	329	307	51	43
10	Kota Samarinda	1.016	987	1.427	1.340	134	121
JUMLAH		**4.841**	**4.690**	**5.136**	**4.864**	**397**	**348**

5. **Mempercepat Wajib Belajar 12 Tahun Dengan Keberpihakan Terhadap Anak Keluarga Miskin, Disabilitas, Pekerja Anak Dan Anak Tidak Sekolah Melalui Beasiswa Kaltim Tuntas.**

Satu di antara misi Kalimantan Timur Berdaulat 2023 adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.

Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia dengan penerapan pendidikan agama dan moral dalam sistem pendidikan yang terpadu dengan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kalimantan Timur yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing. Pemerintah Kalimantan Timur akan membantu putera-puteri Kalimantan Timur mengikuti pendidikan tinggi sampai tuntas melalui pemberian beasiswa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jumlah penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS & STIMULAN sebesar 15.386 lebih besar 78,9% dari target yang telah ditetukan yaitu 19.500.

6. **Penyediaan Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin.**

Masih sedikitnya masyarakat miskin yang mendaftar /mendapatkan penerima beasiswa tersebut, dikarenakan akses pendidikan, daerah dan geografis yang sulit. Dilihat dari kuota uang didasarkan pada jumlah anggaran tidak terserap/silpa.

Satu di antara misi Kalimantan Timur Berdaulat 2023 adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.

Beasiswa miskin sendiri diperuntukkan untuk Siswa dan Mahasiswa yang berkategori masyarakat miskin yang berdomisili diprovinsi Kalimantan Timur. Adapun rincian penyaluran beasiswa Siswa SD/SMP/SMA/SMK Miskin 2.430 dan Mahasiswa Miskin 939 total penerima beasiswa miskin 3.369 dan telah mencapai target tahunan yang telah ditentukan sebesar 2.500 orang presentase capaian targetnya 134,76%.

7. **Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Jarak Jauh.**

Satu di antara misi Kalimantan Timur Berdaulat 2023 adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia, dengan sasaran Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jarak Jauh. Pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 95% dan pelaksanaan kegiatan pada pemenuhan infrastruktur untuk persiapan penggunaan pembelajaran jarak jauh dengan persentasi capaian kinerja sebesar 100%.

8. **Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Luar Biasa.**

Satu di antara misi Kalimantan Timur Berdaulat 2023 adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia, dengan sasaran Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Luar Biasa. Pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 70% dengan capaian sebesar 100%.

9. **Rasio siswa SMK terhadap siswa SMA**

Kebijakan pengembangan rasio SMK terhadap SMA yang sesuai dengan potensi daerah dan keterserapan lulusan oleh dunia kerja tidak dapat terlepas dari 3 kata kunci yakni, keterserapan lulusan, kualitas guru, ketersediaan sarana prasarana SMK.

Fasilitas pembelajaran merupakan bagian penting pada penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran dan memerlukan pengelolaan dan pemanfaatan yang efektif dan efisien. Juga fasilitas praktikum juga sangat penting dalam pengembangan kompetensi siswa. Sebagai sekolah kejuruan siswa dituntut untuk dapat mengoptimalkan kegiatan praktek disekolah, dimana perbandingan teori dan praktek 30:70, dimana kegiatan praktikum adalah ciri dari pendidikan kejuruan.

Dengan diterapkannya sistem desentralisasi pendidikan dan disisi lain dengan diterapkannya pengelolaan pendidikan yang mengacu pada pencapaian standar kompetensi tertentu sangat berdampak pada pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pembelajaran di sekolah. Di Kalimantan Timur tercatat jumlah sekolah SMK baik negeri maupun swasta sebanyak 223 unit sekolah dengan daya tampung siswa-siswi sebanyak 80.119 orang. Sedangkan jumlah sekolah SMA Negeri dan Swasta sebanyak 231 unit sekolah dan jumlah siswa SMA di Kalimantan Timur sebanyak 78.413 siswa-siswi, sehingga dari target Rasio siswa SMK terhadap SMA

sebesar 55,30%, maka realisasinya sebesar 52,40% maka capaian sebesar 94,75%.

10. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah jumlah penduduk Kalimantan Timur usia sekolah yang berhak mendapatkan pendidikan, diharapkan pada Tahun 2021 sudah tidak ada lagi penduduk di Kalimantan Timur usia sekolah dengan ijazah lulusan minimal SMP melainkan minimal lulusan SMA.

Pemerintah Kalimantan Timur terus berusaha untuk menaikkan capaian pada tingkat SMA yang merupakan program Gubernur yakni penuntasan Wajar Sembilan Tahun menjadi Wajar 12 Tahun. Untuk itu Pemerintah Provinsi menyalurkan dana BOSDA bagi siswa SMA dan SMK di Kalimantan Timur dengan anggaran dana sebesar 170 Miliar setiap tahun. Serta dengan adanya program peningkatan SDM melalui beasiswa atau "Beasiswa Kaltim Tuntas" yang disusun berdasarkan 5 (lima) pilar pembangunan pendidikan nasional yakni :

1. Ketersediaan sarana pendidikan.
2. Kemampuan murid/orang tua mendapatkan akses terhadap sarana pendidikan nasional.
3. Mutu pelayanan sarana pendidikan.
4. Kesetaraan dalam pendidikan.
5. Keterjaminan 4 pilar sebelumnya dapat berjalan dengan baik.

Dengan adanya 5 (lima) pilar di atas, maka Dinas Pendidikan Prov.Kaltim melalui Tim Beasiswa Kaltim Cemerlang memberikan beasiswa kepada siswa-siswi dari jenjang SD/Mi, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan mahasiswa jenjang D3, D4, sarjana, koas, magister, spesialis dan doktor.

11. Persentase Siswa SLB yang Tertampung

Sesuai dengan amanat UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan bagi daerah provinsi disamping pengelolaan pendidikan menengah juga pengelolaan pendidikan khusus. Berikut ini kami uraikan jumlah penyandang ketunaan dan penduduk penyandang ketunaan per jenjang pendidikan.

- Jenjang SD/MI, jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI sebanyak 42.028 orang dari jumlah

penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI sebanyak 45.683 orang atau sebesar 92%.

- Jenjang SMP, jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP sebanyak 9.176 orang dari jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP sebanyak 17.994 orang atau sebesar 51%.
- Jenjang SMA, jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA sebanyak 4.661 orang dari jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA sebanyak 17.264 orang atau sebesar 27%.

12. Jumlah Sekolah Berasrama / Boarding School

Target jumlah sekolah unggulan di Kalimantan Timur Tahun 2021 sebanyak *10* sekolah dan realisasi jumlah sekolah unggulan sebanyak *4* sekolah atau sebesar 40%. Berikut data sekolah Berasrama di Kalimantan Timur, sebagai berikut:

Tabel 3

Data Sekolah Unggulan/Binaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

NO	NAMA SEKOLAH	KAB/KOTA	KETERANGAN
1.	SMA NEGERI 10 SAMARINDA	SAMARINDA	JENJANG SMA
2.	SMA NEGERI 3 TENGGARONG	TENGGARONG	JENJANG SMA
3.	SMA NEGERI 2 TANAH GROGOT	PASER	JENJANG SMA
4.	SMA NEGERI 2 SANGATTA UTARA	KUTAI TIMUR	JENJANG SMA

13. Perolehan Medali Kejuaraan di Tingkat Nasional

Perolehan medali sebagai salah satu tolak ukur evaluasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 karena prestasi merupakan salah satu cerminan keberhasilan siswa-siswi di Kalimantan Timur. Tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim mentargetkan perolehan medali sebanyak 32 medali dan realisasi sebanyak 198 medali sehingga capaian 618,75%. berikut ini daftar jumlah perolehan medali pada kegiatan OSN, O2SN dan FLS2N Tahun 2021.

Tabel 4

DAFTAR PENERIMA MEDALI KEJUARAAN DI TINGKAT NASIONAL

1. Daftar Pemenang FLS2N Dan KSN Tingkat Sekolah Dasar (SD) dan SDLB

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	KEJUARAAN	MEDALI
1	Dedy Yusup	SDN 005 Teluk Pandan	Krinya anyam	Kreativitas terteinggi
2	Yuriko Khang	SD Nasional KPS	Matematika	Perak
3	Kimberly Natanie Yohansyah	SD Kristen Sunodia Samarinda	Matematika	Perunggu
4	Nadhila Althafunnisa Ariyanto	SD Nasional KPS	Ilmu Pengetahuan Alam	Perunggu
5	Hadid Al-Fhatir	SLBN Penajam Paser Utara	Menyanyi	Emas
6	Yehezkiel Giovani Simanjorang	SKh Santo Fransiskus Assisi	Menyanyi	Perak
7	Agnesia Marcelin Mbigho	SKh Santo Fransiskus Assisi	Menyanyi	Perunggu
8	Nur Rahman Adinda	SLBN Tanjung Redep	Menyanyi	Harapan I
9	Dafa Abdul Ghafur Asyauri	SLBN Pembina	Menyanyi	Harapan II
10	Darrel Shean Tivadar	SLBN Kutai Barat	Menyanyi	Harapan III
11	Nisa Alawiyah	SLBN Balikpapan	Melukis	Emas
12	Novi Ananda Arumsari	SLB YPK Bontang	Melukis	Perak
13	Muhammad Dhafa Akbari	SLBN Pembina	Melukis	Perunggu
14	Alicia Balqish Quinn	SLB Bhakti Pertiwi Kaltim	Melukis	Harapan I

2. Daftar Pemenang FLS2N, LKSN dan KSN Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), SMPLB/SMALB

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	KEJUARAAN	MEDALI
1	Magdalena Ariadne Sinaga	SMP YPPSB Sangatta Utara	Ilmu Pengetahuan Alam	Perunggu
2	Hesed Syalom Sarungallo Lelono	SMP Katolik Santo Fransiskus Assisi	Ilmu Pengetahuan Sosial	Perak
3	Go Nadine Audelia	SMPN 1 Balikpapan	Ilmu Pengetahuan Sosial	Perunggu
4	Amalia Putri	MTsN Samarinda	Maatematika	Perunggu
5	Yeremia	SMP Yayasan Pupuk Kaltim	Gitar Duet	Perak
6	Mattew	SMP Yayasan Pupuk Kaltim	Gitar Duet	Perak
7	Irfan Kamil AL-Maududi	SLB Dharma Kencana Balikpapan	Membatik	Emas
8	Endar Prasselisna Wati	SLB Negeri Penajam Paser Utara	Membatik	Perak
9	Siti Nurhasana	SLB Negeri Balikpapan	Membatik	Perunggu
10	Ridhourrahman	SLB Negeri Pembina	Membatik	Harapan I
11	Jurni	SLB Negeri Tanah Grogot	Membatik	Harapan II
12	Rahmad Ali	SLB Negeri Pembina	Kriya Kayu	Emas
13	Fatur Rahman	SLB Negeri Kutai Timur	Kriya Kayu	Perak
14	Inna Irahayu Kasana	SLB Negeri Balikpapan	Tata Boga	Emas
15	Hesti Wahyuni	SLB Negeri Tenggarong	Tata Boga	Perak
16	Siti Nuraisyah	SLB Negeri Kutai Timur	Tata Boga	Perunggu
17	Riska Amalia	SLB Negeri Pembina	Tata Boga	Harapan I
18	Nur Azizah Syarfiah	SLB Negeri Penajam Paser Utara	Tata Boga	Harapan II
19	Nur Maulidina	SLB Negeri Pembina	Kecantikan	Emas
20	Mahardika Nurul.P	SLB Negeri Balikpapan	Kecantikan	Perak
21	Indah Ayu Setiawati	SLB Negeri Tenggarong	Kecantikan	Perunggu
22	Nadila Indriyan	SLB Untung Tuah	Kecantikan	Harapan I

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	KEJUARAAN	MEDALI
23	Pendi	SLB Negeri Pembina	Merangkai Bunga Buatan	Emas
24	Muhammad Wafiurahman	SLB Negeri Tanjung Redeb Berau	Merangkai Bunga Buatan	Perak
25	Yakobus Kurniawan. Y	SLB Negeri Balikpapan	Merangkai Bunga Buatan	Perunggu
26	Georging Auralia.D	SLB Tunas Bangsa	Merangkai Bunga Buatan	Harapan I
27	Rezeki Farsa.H	SLB Negeri Tenggarong	Merangkai Bunga Buatan	Harapan II
28	Masliana	SLB Negeri Kutai Timur	Merangkai Bunga Buatan	Harapan III
29	Misna	SLB Negeri Balikpapan	Menjahit	Emas
30	Wirda Amalia	SLB Negeri Bontang	Menjahit	Perak
31	Amelia Putri	SLB Negeri Pembina	Menjahit	Perunggu
32	Melindah Sovitri	SLB Negeri Tenggarong	Menjahit	Harapan I
33	Andra Ramadhani	SLB Negeri Pembina	Teknologi informasi	Emas
34	Abdul Alim T.W	SLB C Ruhui Rahayu	Teknologi informasi	Perak
35	Hidayatul Mukarimah	SLB negeri Balikpapan	Hantaran	Emas
36	Annisa Nur Fadila	SLB Negeri Pembina	Hantaran	Perak
37	Septo Kuncahyo	SLB C Ruhui Rahayu	Hantaran	Perunggu
38	Dimas Syariful Aqil	SLB Negeri Tanjung Redeb Berau	Hantaran	Harapan I
39	Denish Pranata	SLB Negeri Tenggarong	Hantaran	Harapan II
40	Grace Gabriela Mangalla	SLB C-D Untung Tuah Samarinda	Hantaran	Harapan III
41	Mohammad Khairuddin	SLB C Ruhui Rahayu	Kreasi Barang Bekas	Emas
42	Gina Sundari	SLB Dharma Kencana	Kreasi Barang Bekas	Perak
43	Charin Feby Lian	SLB Negeri Bontang	Kreasi Barang Bekas	Perunggu
44	Yoga Arbi Nugroho	SLB Negeri Pembina	Kreasi Barang Bekas	Harapan I
45	Siti Nur Hasanah Bulqiah	SLB Negeri Penajam Paser Utara	Kreasi Barang Bekas	Harapan II

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	KEJUARAAN	MEDALI
46	Kurnianto Sulfino Amon	SLB C-D Untung Tuah Samarinda	Kreasi Barang Bekas	Harapan III
47	Pendi	SLB Negeri Pembina Prov. KALTIM	Merangkai Bunga Buatan	Harapan III
48	Hidayatul Mukarimah	SLB Negeri Balikpapan Prov. KALTIM	Hantaran	Harapan II
49	Muhammad Ibnu Adam Malik	SLB Untung Tuah Samarinda	Menyanyi	Emas
50	Muhammad Fazliandra	SLB Tunas Bangsa Samarinda	Menyanyi	Perak
51	Sarif Hanafi	SLB C Ruhui Rahayu Samarinda	Menyanyi	Perunggu
52	Avira Mahmuda	SLB YPK Bontang	Menyanyi	Harapan I
53	Ni Putu Julia Dara Puspita	SLB Cemara Wilis Samarinda	Menyanyi	Harapan II
54	Andrianus Indra Saputra	SLBN Kutai Barat	Menyanyi	Harapan III
55	Gina Sundari	SLB Dharma Kencana Balikpapan	Melukis	Emas
56	Aidil Anwar	SLB Tunas Bangsa Balikpapan	Melukis	Perak
57	Nazwa Al Aulia	SLBN Balikpapan	Melukis	Perunggu
58	Apritwo Nazhira Vepriyangga	SLB YPK Bontang	Melukis	Harapan I
59	Endar Prasselisna Wati	SLBN Penajam Paser Utara	Melukis	Harapan II
60	Wirda Amalia	SLBN Bontang	Melukis	Harapan III
61	Muhammad Yasser Qolbin A	SLBN Pembina Samarinda	Desain Grafis	Emas
62	Aurelia Viandrasari Ningtyas	SLBN Balikpapan	Desain Grafis	Perak
63	Dhea Tamara Violetha	SLBN Pembina Samarinda	Desain grafis	Emas
64	Dito Candra Yasa	SLBN Balikpapan	Desain grafis	Perak
65	Irfan Kamil Al-Maududi	SLB Dharma Kencana Balikpapan	Desain grafis	Perunggu
66	Muhammad Wafiurrahman	SLBN Tanjung Redeb	Desain grafis	Harapan I

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	KEJUARAAN	MEDALI
67	Wiranto	SLB Untung Tuah Samarinda	Desain grafis	Harapan II
68	Fathur Ramadhan	SLB Untung Tuah Samarinda	Desain grafis	Harapan III
69	Rusmin Nuryanto	SLBN Balikpapan	Menari	Emas
70	Fabrian Aditia	SLBN Pembina Samarinda	Menari	Perak
71	Tri Wahyuni Rahmawati	SLB C Ruhui Rahayu Samarinda	Menari	Perunggu
72	Lilis Celfiana	SLB Tunas Harapan	Menari	Harapan I
73	Muhammad Guntur Mulyadi	SLBN Bontang	Menari	Harapan II
74	Maulis Setiyawati	SLBN Tanah Grogot	Menari	Harapan III
75	Andra Ramadhani	SLBN Pembina Samarinda	MTQ	Emas
76	Nur Sultan Fasha	SLBN Tenggarong	MTQ	Perak
77	Muhammad Baihaqi	SLB Tunas Harapan	MTQ	Perunggu
78	Shalits Al Falahi	SLB C-D Untung Tuah Samarinda	MTQ	Harapan I
79	Kholiq Mulyana Mughni Ghony	SLB YPK Bontang	MTQ	Harapan II
80	Daffa Fadhil Muzaki	SLBN Balikpapan	Pantomim	Emas
81	Muhammad Fathurrozi	SLBN Bontang	Pantomim	Perak
82	Prio Bagus Setiono	SLBN Penajam Paser Utara	Pantomim	Perunggu
83	Ridhourrahman	SLBN Pembina	Pantomim	Harapan I
84	Tri Atmoko Dewantara	SLB Tunas Bangsa	Cipta Komik Strip	Emas
85	Nurul Huda	SLBN Pembina	Cipta Komik Strip	Perak
86	Meilindah Sovitri	SLBN Tenggarong	Cipta Komik Strip	Perunggu
87	Muhammad Nor Syahdan	SLB C Ruhui Rahayu	Cipta Komik Strip	Harapan I
88	Viqhli Alif Nur Restu Wardana	SLBN Balikpapan	Baca Puisi	Emas
89	Muhammad Ary Setyawan	SLB YPK Bontang	Baca Puisi	Perak

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	KEJUARAAN	MEDALI
90	Stanislaus Alfino Larantukan	SKh Santo Fransiskus Assisi	Baca Puisi	Perunggu
91	Muhammad Ihsan Faqih	SLB C-D Untung Tuah	Baca Puisi	Harapan I
92	Juliana Lukas	SLBN Kutai Barat	Baca Puisi	Harapan II
93	Agung Nugrah Grabiel Lembang	SLB Bahasa Hati Sangatta	Baca Puisi	Harapan III
94	Rusmin Nuryanto	SLBN Balikpapan	Menari	Harapan III

3. Daftar Pemenang FLS2N, KOSN dan KSN Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	KEJUARAAN	MEDALI
1	M. Novil Fahlevi	SMKN 7 Samarinda	Cloud Computing	Perak
2	Dewi Raodah	SMK Kesehatan Airlangga Balikpapan	Healt & Social Care	Perunggu
3	Herlindah	SMKN 5 Berau	Pengolahan Pangan	Terkreatif
4	Asman	SMKN 3 Berau	Nautika	Medallion For Excellence
5	Najibullah Muhariri	SMK IT Airlangga Samarinda	Cyber Security	Medallion For Excellence
6	Rely Anto Pratama	SMK IT Airlangga Samarinda	Cyber Security	Medallion For Excellence
7	Joy Disanto Nupa	SMK IT Airlangga Samarinda	Sistem Keamanan Perusahaan	Medallion For Excellence
8	Ega Ramadhan	SMKN 6 Balikpapan	Teknik Perawatan dan Perbaikan Sepeda Motor	Medallion For Excellence
9	Rindi Anggriyani	SMKN 2 Berau	Teknologi Peternakan	Medallion For Excellence
10	Muhammad Farid Rasydi	SMK Panca Dharma Balikpapan	Cooking (Kuliner)	Medallion For Excellence

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	KEJUARAAN	MEDALI
11	Mutmainnah Nur Sinta Putri	SMKN 2 Balikpapan	Menyanyi Solo	Emas

4. Daftar Pemenang FLS2N, KOSN dan KSN Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	KEJURAAN	MEDALI
1	Fenty Leonika	SMAN 3 Samarinda	Baca Puisi	Emas
2	Arumdani Dyah Pramesti	SMA YPK Bontang	Baca Puisi	Perak
3	Oktavianus Claudio	SMAN 1 Rantau Pulung	Baca Puisi	Perunggu
4	Jeremy Jeevan Uktolseya	SMAN 10 Samarinda	Gitar Solo	Emas
5	Feldy Abihud Uwelfi	SMAN 1 Bontang	Gitar Solo	Perak
6	Felix Anthony Nathaniel Liang	SMA Kristen Harapan Bangsa	Gitar Solo	Perunggu
7	Agung Dwiza Maulana	SMAN 1 Berau	Monolog	Emas
8	Awaliyah Rahman	SMAN 1 Sangatta Selatan	Monolog	Perak
9	Devya MalikaAyuningtyas	SMAN 1 Bontang	Monolog	Perunggu
10	Muhammad Fajar Anugrah	SMAN 3 Samarinda	Tari Kreasi	Emas
11	Ferina Meldy Perdana	SMAN 1 Berau	Tari Kreasi	Perak
12	Mutiara Sabrina	SMAN 2 Sangatta Utara	Tari Kreasi	Perunggu
13	Muhammad Hafizh Zulkarnain	SMAN 4 Berau	Vokal Solo Putra	Emas
14	Razky Ramadhan	SMAN 5 Balikpapan	Vokal Solo Putra	Perak
15	Krisna Timothy Putra Komara Aray	SMAN 3 Bontang	Vokal Solo Putra	Perunggu
16	Claudea Todang	SMAN 1 Sangatta Utara	Vokal Solo Putri	Emas
17	Raisa Syarla Martiza	SMAN 1 Tenggarong	Vokal Solo Putri	Perak
18	Diva Swaranugrah	SMAN 1 Samarinda	Vokal Solo Putri	Perunggu

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	KEJURAAN	MEDALI
19	Fariz Galang Rizqi	SMAN 3 Samarinda	Desain Poster	Emas
20	Fidelia Lovely Hosensyah	SMAS K Kolese ST Yusup	Desain Poster	Perak
21	Desfilia Salsabiilaa	SMAN 4 Berau	Desain Poster	Perunggu
22	Akmal Rafif Hibatullah	SMAN IT Ash Shohwah	Film Pendek	Emas
23	Rian Rinaldi	SMAN 2 Bontang	Film Pendek	Perak
24	Helbert Tanuji	SMAN Katolik SF Assisi	Film Pendek	Perunggu
25	Ajeng Ayu Wulaningtyas	SMAN 1 Bontang	Kriya	Emas
26	Muhammad Yunus	SMAN 1 Kuaro	Kriya	Perak
27	Muhammad Insan Ridho	SMAN 4 Berau	Kriya	Perunggu
28	Dede Lisan Ramadhan	SMAN 2 Balikpapan	Komik Digital	Emas
29	Natasya Arum Billah	SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot	Komik Digital	Perak
30	Viona Avrillia Susanto	SMA Patra Dharma	Komik Digital	Perunggu
31	Richard Augustiano Lukas	SMAN 1 Samarinda	Karate Perorangan Putra	Emas
32	Alfonso Joshua Nosa	SMAN 1 Sendawar	Karate Perorangan Putra	Perak
33	Maya Sentiya Rahmayanti	SMAN 1 Sanga-sanga	Karate Perorangan Putri	Emas
34	Arseliyona Yusma Andara	SMAN 1 Samarinda	Karate Perorangan Putri	Perak
35	Ahmad Sabaruddin	SMA Harapan Samboja	Pencak Silat Putra	Emas
36	Fadhil Ramadhan	SMAN 1 Sangatta Utara	Pencak Silat Putra	Perak
37	Handini handayani	SMAN 1 Samboja	Pencak Silat Putri	Emas
38	Nur Hikmah	SMAN 3 Bontang	Pencak Silat Putri	Perak
39	Christopher Chang	SMAN 10 Samarinda	Matematika	Emas

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	KEJURAAN	MEDALI
40	Arya Kusuma Wardhana	SMAN 1 BONTANG	Matematika	Perak
41	Muhammad Rifan Fathoni	SMAN 1 Samarinda	Matematika	Perunggu
42	Muttaqin	MAN 2 Samarinda	Fisika	Emas
43	I Putu Buddhi Gunawan	SMA YPVDP Bontang	Fisika	Perak
44	Muhammad Ihsan	SMAN 2 Balikpapan	Fisika	Perunggu
45	Ardika Dhafka Alhaqie	SMA YPVDP Bontang	Kimia	Emas
46	Dafina Aisya Fitri	SMAN 3 Samarinda	Kimia	Perak
47	Augie Davin Siagian	SMAN 5 Balikpapan	Kimia	Perunggu
48	Austin Anderson	SMAK Harapan Bangsa Balikpapan	Biologi	Emas
49	Risa Utami	SMAN 1 Sangatta Utara	Biologi	Perak
50	Catellia Auliany Achyar	SMAN 10 Samarinda	Biologi	Perunggu
51	Fio Mel Nathany	SMA YPK Bontang	Kimia	Perak
52	Fio Mel Nathany	SMA YPK Bontang	Informatika Komputer	Emas
53	Sefriano Edsel Jieftara Djie	SMAN 1 Balikpapan	Informatika Komputer	Perak
54	Muhammad Alridz Alfarabi Pasha	SMAN 1 Balikpapan	Informatika Komputer	Perunggu
55	Muhammad Zukhrufillah A	MAN IC Paser	Astronomi	Emas
56	Muhammad Jundi Al Ghifari	SMAN 4 Berau	Astronomi	Perak
57	Ammer Anbiyya Yusuf	SMAN 10 Samarinda	Astronomi	Perunggu
58	Putri Hana Pratiwi	SMAN 1 Tenggarong	Ekonomi	Emas
59	Fitrah Agfi	SMAN 1 Berau	Ekonomi	Perak
60	Toni Andreas Susanto	SMAN 3 Samarinda	Ekonomi	Perunggu
61	Bunga Ajeng Aninditria	SMAN 10 Samarinda	Ekonomi	Perunggu

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	KEJURAAN	MEDALI
62	Muhammad Fatahillah Mubarak	MAN IC Paser	Kebumian	Emas
63	Agrilia Gracia	SMAN 10 Samarinda	Kebumian	Perak
64	Dony Andry	SMAN 3 Tenggarong	Kebumian	Perunggu
65	Go Dillon Audris	SMAN 1 Balikpapan	Geografi	Emas
66	Hanif Dzul Fadhli	SMA YPK Bontang	Geografi	Perak
67	Hanif Halim Wicaksono	SMAN 10 Samarinda	Geografi	Perunggu
68	Arinda Mauliya Puteri	SMAN 1 Samarinda	LDBI	Emas
69	Rizky Austin Lukman	SMAN 1 Samarinda	LDBI	Perak
70	Raden Almadea Putri Warganegara	SMAN 10 Samarinda	LDBI	Perunggu
71	Prashanti Lakshita Putri Ariadhi	SMAN 1 Samarinda	NSDC	Emas
72	Fiona Sastrit	SMAN 1 Samarinda	NSDC	Perak
73	Vanness Erwid Wu	SMA Kr. Sunodia Samarinda	NSDC	Perunggu
74	Ahmad Zulfiandy	SMAN 4 Berau	Ceramah	Emas
75	Ambo Tang	SMK TI Labbaika Samarinda	Ceramah	Perak
76	Irvan Wahyudi	SMK Muhammadiyah 1 Balikpapan	Ceramah	Perunggu
77	Deajeng Azura Faradiba	SMAN 1 Muara Jawa	Ceramah	Emas
78	Fidela Anindya	SMAN 1 Berau	Ceramah	Perak
79	Munawarah	SMAN 2 Muara Kaman	Ceramah	Perunggu

14. PEMERATAAN PENDIDIKAN

Kinerja pendidikan dasar dan menengah pada Pada Tahun 2021 Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur akan dimulai dan dipandang dari sudut pemerataan pendidikan dilanjutkan dengan peningkatan mutu

pendidikan, relevansi pendidikan dan diakhiri dengan efisiensi internal pendidikan. Untuk pemerataan, peningkatan mutu dan efisiensi internal kinerja yang dilihat adalah menurut jenjang pendidikan yaitu tingkat SD, SMP dan SMA sedangkan untuk relevansi yang dilihat hanyalah SD, SMA dan SMK.

Berdasarkan realisasi APK yang ada, ternyata realisasi APK tertinggi terdapat ditingkat SD yaitu 99.52% – APM 90,82%. APK SMP/MTs 90,75% – APM 72,14%, ditingkat SM yaitu APK 94% – APM 77%. Tingginya APK SD adalah akibatnya banyak siswa usia di luar usia sekolah yang berada di jenjang tersebut. Bila dilihat perjenis kelamin ternyata masih ada perbedaan gender dilihat APK pada tingkat SD. Dibandingkan dengan tingkat SMP bila dilihat dari Desa dan Kota. APK yang lebih tinggi terdapat di desa dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat SD mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat SMP dan SMA. Tingkat SM (SMA, SMK, dan MA)

Berdasarkan APK yang ada, ternyata porsi APK SMA jika dibandingkan dengan SMK hampir sama, kecuali MA. Hal itu yang sama juga terjadi pada APM. Tingginya porsi APK dan APM pada SMA dan SMK disebabkan banyaknya siswa yang bersekolah di SMA dan SMK dibandingkan dengan MA.

Untuk melihat kinerja SMA, SMK dan MA, indikator berikut membicarakan tentang rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas dan kelas per guru. Hal ini menunjukkan bahwa SMA dan SMK lebih banyak diminati. Siswa perkelas yang pada saat pembangunan sekolah seharusnya diisi dengan 40 anak.

Melihat pencapaian setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa SMA dan SMK mempunyai kinerja yang lebih unggul dibanding dengan MA. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi pada tingkat tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara angka partisipasi dengan keadaan sekolah. Bila APK tingkat SM lebih rendah rendah ternyata rasio siswa per kelas juga rendah. Dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara angka partisipasi dengan keadaan daerah APK tingkat SM rendah, hal ini disebabkan karena kesulitan ke sekolah yang berarti di daerah ini merupakan daerah sulit sehingga anak tidak bersekolah. Selain itu, bila dilihat dari desa tertinggal ternyata hampir sebagian sekolah tersebut SM terdapat di daerah tertinggal. Oleh karena itu dalam pemecahannya perlu dibangun sekolah baru sehingga anak dapat tertampung lebih banyak lagi.

Selanjutnya dapat dilihat pada kepadatan anak usia 16 – 18 tahun memang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan kondisi daerah. Bila hanya dilihat pendidikan semata, maka akan sulit dilakukan pemecahannya tanpa mengikutsertakan faktor di luar pendidikan yang mempengaruhi.

Dengan melihat permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk usia sekolah dan banyaknya desa tertinggal kelihatannya memberi pengaruh terhadap pencapaian indikator pemerataan. Hal ini ditujukan dengan rendahnya angka partisipasi bersekolah di tingkat SM.

Tabel 5

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar/Murni (APK/APM) SMA/MA/SMK

Tahun	Variabel	
	Angka Partisipasi Kasar (%)	Angka Partisipasi Murni (%)
2020	92%	73%
2021	96,77%	78.15%

15. ASPEK KEUANGAN

Secara rinci alokasi anggaran pembangunan dan rutin sektor pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur berasal dari berbagai sumber dari APBN dan APBD. Pada tahun 2021 Anggaran Pendidikan baik alokasi maupun realisasi adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

TABEL 6

Program APBD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2021

No	Sumber Dana	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
A	DISDIKBUD	1.710.484.317.145,00	1.483.144.408.775,57	86,71%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.064.656.573,00	2.143.557.730,00	42,32%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	865.770.474.150,00	769.299.561.542,00	88,86%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	581.998.400,00	405.544.900,00	69,68%

No	Sumber Dana	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.345.471.180,00	6.377.431.392,00	68,24%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.453.809.438,00	2.864.118.058,00	96,87
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.771.836.850,00	14.753.833.833,00	90,93
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.741.730.823,00	181.219.979.741,00	85,45
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.093.757.175,00	2.528.305.184,00	89,66
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	346.164.456.815,00	319.019.185.997,22	97,90
10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	234.380.934.553,00	162.426.545.766,67	84,34
11	Pengelolaan Pendidikan Khusus	20.485.924.328,00	14.328.720.256,69	98,71
12	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	2.283.600.000,00	527.578.898,00	97,97
13	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	3.233.218.400,00	2.071.900.161,00	54,10
14	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	921.277.170,00	429.176.090,00	89,30
15	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah	75.000.000,00	4.580.000,00	81,81

No	Sumber Dana	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
16	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.554.803.200,00	863.678.350,00	33,81%
17	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	1.188.704.200,00	474.144.900,00	39,89%
18	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	1.750.000.000,00	870.440.799,00	49,74%
19	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	2.091.375.000,00	956.915.373,00	45,76%
20	Pengelolaan Museum Provinsi	500.000.000,00	0	0%
21	Fasilitasi Keprotokolan	2.031.288.890,00	1.579.209.804,00	77,74%
B.	**UPTD TEKKOM**	**53.600.944.464,00**	**34.758.950.217,73**	**64,85%**
C.	**UPTD TAMAN BUDAYA**	**5.173.431.133,00**	**4.155.093.142,00**	**80,32%**
D.	**UPTD MUSEUM MULAWARMAN**	**5.574.178.373,00**	**4.800.547.651,00**	**86,12%**
E.	**CABANG DINAS I**	**3.831.752.685,00**	**2.682.767.087,00**	**70,01%**
F.	**CABANG DINAS II**	**3.508.286.095,00**	**1.318.166.045,00**	**37,57%**
G.	**CABANG DINAS III**	**3.788.210.889,00**	**2.883.440.114,00**	**76,12%**
H.	**CABANG DINAS IV**	**3.366.704.487,00**	**1.937.188.668,00**	**57,54%**
I.	**CABANG DINAS V**	**3.470.730.580,00**	**1.551.712.233,00**	**44,71%**
J.	**CABANG DINAS VI**	**3.833.839.400,00**	**1.376.007.188,00**	**35,89%**
	TOTAL	**1.796.632.395.251,00**	**1.538.452.875.588,30**	**85,63%**

Reakpitulasi Hasil Pelaksanaan (Renja-P) Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Tahun 2019- 2023 adalah sebagimana dalam tabel 7 dibawah ini:

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan (Renja-P)
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Tahun 2019- 2023

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov. Kaltim

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan ((Renja-P) Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target (Renja-P) 2021	Realisasi (Renja-P) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									
1.01.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	
1.01.01.1.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	Tersusunnya Laporan Tahunan			100%	100%	100%	100%	100%	
1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Prencanan Perangkat Daerah			5 Dokumen	5 Dokumen	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi Dan Penyusunan RKA-SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	100%	239 Dokumen	239 Dokumen	
1.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKD			2 Dokumen	2 Dokumen	100%	239 Dokumen	239 Dokumen	
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	100%	239 Dokumen	239 Dokumen	
1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	100%	239 Dokumen	239 Dokumen	
1.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Dokumen	12 Dokumen	100%	239 Dokumen	239 Dokumen	
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja 6 Cabang Dinas			72 Dokumen	72 Dokumen	100%	239 Dokumen	239 Dokumen	
		Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan			12 Dokumen	12 Dokumen	100%			
		Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja SMA/SMK/SLB Negeri Se-Kaltim			2868 Dokumen	2868 Dokumen	100%			

1.01.01.1.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 161.248.100.000,00 GAJI GURU dan TENAGA PENDIDIK			54977 OB	54977 OB	100%	14 Bulan	14 Bulan	
		Rp. 5.183.800.000,00 GAJI NON PNS DISDIKBUD PROV. KALTIM			1790 OB	1790 OB	100%			
		Rp. 848,644,185,000 Gaji dan Tunjangan ASN (PNS)			14 Bulan	14 Bulan	100%			
		Rp. 9.429.396.480,00 BPJS			12 Bulan	12 Bulan	100%			
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan Disdikbud Prov (PA, KPA, Dll)			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	
		Kegiatan Keuangan			103200000 Rupiah	103200000 Rupiah	100%			
1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
1.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Hasil Tindak Lanjut Temuan			50 Dokumen	50 Dokumen	100%	50 Dokumen	50 Dokumen	
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	
1.01.01.1.03	**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	Tersedianya Laporan Data Aset			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	
1.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Data Aset Dinas Dan Cabang Dinas Serta Sekolah			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	
1.01.01.1.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Nerserta Atributnya			859 Stel	859 Stel	100%	12 Bulan	12 Bulan	
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	
1.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 1.000.000.000 Sosialisasi Perundang-undangan Kepolisian			10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	12 Bulan	12 Bulan	
		Rp. 2.500.000.000 Sosialisasi Perundang-undangan			10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%			
		Rp. 3.000.000.000 Sosialisasi Perundang-Undangan Sadar Hukum			3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%			
1.01.01.1.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DISDIKBUD, EDUCATION CENTER			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK, MATERAI, TABUNG PEMADAM, PLAKAT/SOUVENIR, BAHAN dan			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	

		ALAT KEBERSIHAN DISDIKBUD & EDUCATION Rp. 1.039.300.000								
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	CETAK DAN FOTOKOPI DISDIKBUD PROV			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Bahan Instalasi Air (Kran,Pipa,Paralon,Shower,Lem Pipa,Klep Selang,dll)			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PERJALANAN LUAR DAN DALAM DAERAH Rp. 200.000.000			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	
1.01.01.1.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	
1.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hiace SLB (7 unit x 500 jt)			7 Unit	0 Unit	0	12 Bulan	12 Bulan	
		Mobil Operasional disdik Hilux (1 unit x 500 jta)			1 Unit	0 Unit	0	12 Bulan	12 Bulan	
		Motor Pengawas (64 unit x 25 jt)			64 Unit	64 Unit	100%	12 Bulan	12 Bulan	
1.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Tersedia			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	
1.01.01.1.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Administrasikan			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 120.000.000 Bandwidth Hosting wrbsite Disdikbud			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	
		Rp. 30.000.000 Pembuatan aplikasi berbasis web Sistem Penunjang Pengambilan Keputusan Berbasis Elektronik (SIPUBER)								
		Rp. 30.000.000 Penambahan Bandwidth Internet Perencanaan								
		Rp. 50.000.000 Pembuatan website pelayanan PPID Pembantu Disdikbud								
		TELEPON, AIR, LISTRIK, INTERNET, SURAT KABAR, KERJASAMA MEDIA CETAK								
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penunjang Kerja Non ASN			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penunjang Kerja Non ASN			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	
1.01.01.1.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	

1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Service, Ganti Suku Cadang, Pajak Kendaraan, dan BBM Pelumas, BBM Genset			100 %	100 %	100%	12 Bulan	12 Bulan	
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	100 %	100%	12 Bulan	12 Bulan	
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor, Rumah Dinas, Education Center			100 %	100 %	100%	12 Bulan	12 Bulan	
1.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Taman Disdik Dan Educaion			100 %	100 %	100%	12 Bulan	12 Bulan	
1.01.01.1.14	**FASILITASI KEPROTOKOLAN**	Tersedianya Fasilitas Dan Kordinasi Yang Baik Dalama Pelaksanaan Acara			12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	
1.01.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Penyelenggaraan Dan Pelatihan Seminar Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Isu Pendidikan PANJI-PANJI (500 JUTA) PAK Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat (Pihak Ketiga)			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APM SMA/SMK/SLB**	85%	73%	77%	78,15%	101,49%	82%	82%	82%
1.01.02.1.01	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS**	APM SMA			77%	78,15%	100%	30 laporan	30 laporan	
1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)			4 Sekolah	4 Sekolah	100%	4 Sekolah	4 Sekolah	
1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya (DAK)			3 Sekolah	3 Sekolah	100%	3 Sekolah	3 Sekolah	
		Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya (DAK)			1 Sekolah	1 Sekolah	100%	1 Sekolah	1 Sekolah	
		Pembangunan Ruang Tata Usaha beserta perabotnya (DAK)			3 Sekolah	3 Sekolah	100%	3 Sekolah	3 Sekolah	
1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi beserta perabotnya (DAK)			11 Sekolah	11 Sekolah	100%	11 Sekolah	11 Sekolah	
1.01.02.1.01.05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika beserta perabotnya (DAK)			9 Sekolah	9 Sekolah	100%	9 Sekolah	9 Sekolah	
1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia beserta perabotnya (DAK)			10 Sekolah	10 Sekolah	100%	10 Sekolah	10 Sekolah	
1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Pembangunan Laboratorium Komputer Sekolah Menengah Atas			150 Sekolah	150 Sekolah	100%	15 Sekolah	15 Sekolah	
		Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta perabotnya (DAK)			4 Sekolah	4 Sekolah	100%			
1.01.02.1.01.08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa beserta perabotnya (DAK)			3 Sekolah	3 Sekolah	100%	10 Sekolah	10 Sekolah	

1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya (DAK)			7 Sekolah	7 Sekolah	100%	7 Sekolah	7 Sekolah	
1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya (DAK)			1 Sekolah	1 Sekolah	100%	1 Sekolah	1 Sekolah	
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah			10 Sekolah	10 Sekolah	100%	10 Sekolah	10 Sekolah	
		Pembangunan Ruang Belajar			12 Ruang	12 Ruang	100%	12 Ruang	12 Ruang	
		Pembangunan Toilet (Jamban) beserta perabotnya (DAK)			13 Sekolah	13 Sekolah	100%	13 Sekolah	13 Sekolah	
1.01.02.1.01.17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Pembangunan Rumah Dinas Guru beserta perabotnya (DAK)			1 Sekolah	1 Sekolah	100%	5 Sekolah	5 Sekolah	
1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)			17 Sekolah	17 Sekolah	100%	17 Sekolah	17 Sekolah	
1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)			3 Sekolah	3 Sekolah	100%	3 Sekolah	3 Sekolah	
		Rehabilitasi Ruang Ruang Guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)			4 Sekolah	4 Sekolah	100%	4 Sekolah	4 Sekolah	
		Rehabilitasi Ruang Tata Usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)			4 Sekolah	4 Sekolah	100%	4 Sekolah	4 Sekolah	
1.01.02.1.01.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)			0	0	0	1 Sekolah	1 Sekolah	
1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)			4 Sekolah	4 Sekolah	100%	4 Sekolah	4 Sekolah	
1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)			2 Sekolah	2 Sekolah	100%	2 Sekolah	2 Sekolah	
1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Bahasa dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)			4 Sekolah	4 Sekolah	100%	4 Sekolah	4 Sekolah	
1.01.02.1.01.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rehabilitasi Ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)			1 Sekolah	1 Sekolah	100%	1 Sekolah	1 Sekolah	

1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)			4 Sekolah	4 Sekolah	100%	4 Sekolah	4 Sekolah	
1.01.02.1.01.30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Rehabilitasi Ruang Asrama Siswa dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya			1 Sekolah	1 Sekolah	100%	1 Sekolah	1 Sekolah	
1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pagar Sekolah			150 Sekolah	150 Sekolah	100%	150 Sekolah	150 Sekolah	
		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			150 Ruang	150 Ruang	100%	150 Ruang	150 Ruang	
		Rehabilitasi Ruang Ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK)			8 Sekolah	8 Sekolah	100%	8 Sekolah	8 Sekolah	
		Rehabilitasi Toilet(jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)			8 Sekolah	8 Sekolah	100%	8 Sekolah	8 Sekolah	
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Meubelair Sekolah Menengah Atas			5.000 Set	5.000 Set	100%	5.000 Set	5.000 Set	
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Beasiswa Boarding School SMA/SMK Negeri			10000000000 Rupiah	10000000000 Rupiah	100%	1200 Siswa	1200 Siswa	
		Beasiswa Miskin (SD, SMP,SMA/SMK/SLB, DIKTI)	2500 Penerima	2196 Penerima	53718361600 Rupiah	53718361600 Rupiah	100%	2500 Penerima	2500 Penerima	2500 Penerima
		Beasiswa Umum (SD, SMP,SMA/SMK/SLB, DIKTI)	31.700 Penerima	28235 Penerima	90000000000 Rupiah	90000000000 Rupiah	100%	26000 Penerima	26000 Penerima	26000 Penerima
		jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri			62996 Siswa	76871 Siswa	153,39	62996 Siswa	62996 Siswa	
		Rp. 150767600000 DANA BOSDA SMA			1 Tahun	1 Tahun	100%	76871 Siswa	76871 Siswa	
		Rp. 96.300.000.000 Dana BOS SMA			1 Tahun	1 Tahun	100%	76871 Siswa	76871 Siswa	
		Rp 96.916.500.000,00 jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri			64611 Siswa	76871 Siswa	153,39	64611 Siswa	64611 Siswa	
		Rutin Sekolah Khusus Olahraga Internasional			39712538720 Rupiah	39712538720 Rupiah	100%	-	-	
1.01.02.1.01.46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah penerima Alat Praktik Peraga Siswa			219 Sekolah	219 Sekolah	100%	219 Sekolah	219 Sekolah	
		Pengadaan Media Pendidikan			14 Sekolah	14 Sekolah	100%	14 Sekolah	14 Sekolah	
		Pengadaan peralatan pendidikan IPA (DAK)			8 Sekolah	8 Sekolah	100%	8 Sekolah	8 Sekolah	
		Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) (DAK)			11 Sekolah	11 Sekolah	100%	11 Sekolah	11 Sekolah	

		Rp. 1.000.000.000 Pengadaan APE Boardgame Pendidikan Kebencanaan			10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	
1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksanakannya Pemberian Beasiswa Boarding School			5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	5 Kegiatan	
		Jumlah SMA Negeri yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)			142 Sekolah	142 Sekolah	100%	142 Sekolah	142 Sekolah	
		Rp. 2.500.000.000,- BIMTEK Asesmen Minat dan Bakat Siswa			10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kab/kota yang mengikuti lomba jenjang SMA			10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	
		Jumlah penerima penghargaan siswa berprestasi			1824 Siswa	1824 Siswa	100%	1824 Siswa	1824 Siswa	
		Jumlah Siswa SMA Yang mengikuti Pendidikan Karakter			3600 Siswa	3600 Siswa	100%	3600 Siswa	3600 Siswa	
		Jumlah SMA Yang Melaksanakan Ekstrakulikuler Keagamaan	233 Sekolah	100 Sekolah	100 Sekolah	100 Sekolah	100%	100 Sekolah	100 Sekolah	200 Sekolah
		Jumlah SMA yang mengembangkan Ekstrakurikuler budaya lokal	300 Sekolah	150 Sekolah	50 Sekolah	50 Sekolah	100%	-	-	-
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Beasiswa S1-S2 Pendidik	100%		1000000000 Rupiah	1000000000 Rupiah	100%	1000 orang	1000 orang	97%
		Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang dilatih			1000 orang	1000 orang	100%			
		Rp. 1.500.000.000 Fasilitasi Peserta Pelatihan PTK untuk Guru SMA secara daring			10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%			
		Rp. 1.500.000.000 Pelatihan PTK untuk Guru SMA secara daring			10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%			
		Rp. 2.500.000.000 BIMTEK Penelusuran Minat Bakat Siswa untuk Tenaga Kependidikan, Guru, dan Kepala Sekolah SMA			10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%			
		Rp. 500.000.000 Fasilitasi Pelatihan Konten Creator SMA Se-Kaltim			10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%			
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kab/Kota UKS Sekolah yang dibina dan dikembangkan			10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Pmenerima BOS			12 Bulan	12 Bulan	100%	22.165 Siswa	22.165 Siswa	
1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Ptk Sma Swasta			12 Bulan	12 Bulan	100%	2000 Orang	2000 Orang	
1.01.02.1.02	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**	APM		73%	77%	78.15%	101.49%	20 Laporan	20 Laporan	

1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)			4 Sekolah	4 Sekolah	100%	10 Sekolah	10 Sekolah	
1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah			4 Sekolah	4 Sekolah	100%	4 Sekolah	4 Sekolah	
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Pembangunan Ruang Praktikum sekolah			9 Gedung	9 Gedung	100%	20 Sekolah	20 Sekolah	
		Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta Prabotnya (DAK)			20 Sekolah	20 Sekolah	100%			
1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi beserta prabotnya (DAK)			3 Ruang	3 Ruang	100%	4 Sekolah	4 Sekolah	
		Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta prabotnya (DAK)			5 Ruang	5 Ruang	100%			
		Pembangunan ruang labotarium fisika beserta perabotnya (DAK)			1 Ruang	1 Ruang	100%			
		Pembangunan ruang labotarium kimia beserta perabotanya (DAK)			1 Ruang	1 Ruang	100%			
1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Ruang UKS Beserta Prabotnya (DAK)Kesehatan Sekolah			7 Ruang	7 Ruang	100%	2 Sekolah	2 Sekolah	
1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Prabotnya (DAK)			2 Ruang	2 Ruang	100%	2 Sekolah	2 Sekolah	
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif beserta prabotnya (DAK)			2 Ruang	2 Ruang	100%	20 Sekolah	20 Sekolah	
		Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya (DAK)			10 Paket	10 Paket	100%			
1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			20 Ruang	20 Ruang	100%	22 Sekolah	22 Sekolah	
		Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)			42 Ruang	42 Ruang	100%			
1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)			7 Ruang	7 Ruang	100%	5 Sekolah	5 Sekolah	
		Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah/Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)			3 Ruang	3 Ruang	100%			
		Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)			4 Ruang	4 Ruang	100%			
1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Rehabilitas ruang praktik kejuruan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta prabotnya (DAK)			6 Ruang	6 Ruang	100%	4 Sekolah	4 Sekolah	

1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Rehabilitasi ruang laboratorium bahasa dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)			1 Ruang	1 Ruang	100%	1 Sekolah	1 Sekolah	
		Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)			1 Ruang	1 Ruang	100%			
1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Ruang Ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK)			2 Ruang	2 Ruang	100%	6 Sekolah	6 Sekolah	
		Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya (DAK)			15 Ruang	15 Ruang	100%	15 Ruang	15 Ruang	
1.01.02.1.02.33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah alat praktik dan peraga			40 Sekolah	40 Sekolah	100%	40 Sekolah	40 Sekolah	
		Pengadaan Media Pendidikan (DAK)			26 Paket	26 Paket	100%			
		Pengadaan Peralatan Praktik Utama (DAK)			27 Paket	27 Paket	100%			
		Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) (DAK)			20 Paket	20 Paket	100%			
		Rp. 1.000.000.000 Pengadaan APE Boardgame Pendidikan Kebencanaan			10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%			
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri			50250 Siswa	78456 Siswa	156,13%	78456 Siswa	78456 Siswa	
		Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri			51149 Siswa	78456 Siswa	153,39%			
		Rp. 100.000.000.000 BOS SMK			1 Tahun	1 Tahun	100%			
		Rp. 159.829.008.000,00 BOSDA SMK			1 Tahun	1 Tahun	100%	78456 Siswa	78456 Siswa	
		Rutin SMK Pelayaran			7270813920 Rupiah	7270813920 Rupiah	100%			
		Rutin SMK SPP			12766338560 Rupiah	12766338560 Rupiah	100%			
1.01.02.1.02.39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kompetensi dasar muatan lokal pendidikan Menengah yang disusun			7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	
1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa SMK Yang mengikuti Pendidikan Karakter			870 Siswa	870 Siswa	100%	6 Laporan	6 Laporan	
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyebar luasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah			4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	7 Laporan	7 Laporan	

		Rp. 190.000.000 Pengadaan Pakaian Uniform SMK Jurusan Kemaritiman			10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%			
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Beasiswa S1-S2 Pendidik	100%	92%	1000000000 Rupiah	1000000000 Rupiah	100%	1200 Orang	1200 Orang	97%
		Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang dilatih			1300 Orang	1300 Orang	100%			
		Rp. 1.500.000.000 Fasilitasi Peserta Pelatihan PTK untuk Guru SMK secara daring			10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%			
		Rp. 1.500.000.000 Pelatihan PTK untuk guru SMK secara daring			10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%			
		Rp. 2.500.000.000 BIMTEK Penelusuran Minat Bakat Siswa untuk Tenaga Kependidikan, Guru, dan Kepala Sekolah			10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%			
		Rp. 500.000.000 Fasilitasi Peserta Pelatihan Konten Creator SMK se-Kaltim			10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%			
1.01.02.1.02.46	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	Pengelolaan Dana BOS SMK			12 Bulan	12 Bulan	100%	28.952 Siswa	28.952 Siswa	
1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Kapasitas Peningkatan Pengelolaan Dana BOS SMK			12 Bulan	12 Bulan	100%	2200 Orang	2200 Orang	
1.01.02.1.03	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS**	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80%	66,26%	70%	87.61%	125,16	75%	75%	75%
1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Penambahan Ruang Kelas Inklusi			4 Lokal	4 Lokal	100%	100%	0	
					12 Ruang	12 Ruang	100%			
1.01.02.1.03.18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal dengan Perabotnya (DAK)			7 sekolah	7 sekolah	100%	5 Sekolah	5 Sekolah	
1.01.02.1.03.19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kapasitas Peningkatan Pengelolaan Dana BOS SMK			2 Ruang	2 Ruang	100%	5 Sekolah	5 Sekolah	
		Rehabilitasi Ruang Guru SLB (DAK)			1 Ruang	1 Ruang	100%			
		Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK)			4 Ruang	4 Ruang	100%			
1.01.02.1.03.20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rehabilitasi Ruang Tata Usaha (DAK)			1 Ruang	1 Ruang	100%	10 Sekolah	10 Sekolah	
1.01.02.1.03.21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)			2 Ruang	2 Ruang	100%	10 Sekolah	10 Sekolah	
1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana dan prasarana sekolah direhab			3 Sekolah	3 Sekolah	100%	5 Sekolah	5 Sekolah	

		Jumlah Sarana dan prasarana sekolah direhab			25 Ruang	25 Ruang	100%			
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Minat, Bakat dan Kreativitas siswa SLB			300 Siswa	300 Siswa	100%	100 Siswa	100 Siswa	
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Beasiswa S1-S2 Pendidik			500000000 Rupiah	500000000 Rupiah	100%	200 Siswa	200 Siswa	
		Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB yang dilatih			150 Orang	150 Orang	100%			
1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Pengelolaan Dana BOS SLB			12 Bulan	12 Bulan	100%	1.025 Siswa	1.025 Siswa	
1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SLB			12 Bulan	12 Bulan	100%	300 Orang	300 Orang	
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			70%	70%	100%	86%	86%	
1.01.03.1.01	**PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH**	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal			70%	70%	100%	86%	86%	
1.01.03.1.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah sekolah yang melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan industri	92 Sekolah	55 Sekolah	100 Sekolah	100 Sekolah	100%	1 Laporan	1 Laporan	86Sekolah
1.01.03.1.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah kompetensi dasar muatan lokal pendidikan Menengah yang disusun			219 Dokumen	219 Dokumen	100%	219 Dokumen	219 Dokumen	
1.01.03.1.02	**PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KHUSUS**	Presentase kompetensi dasar muatan lokal sekolah menengah yang disusun			70%	70%	100%	86%	86%	
1.01.03.1.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Peltihan Kurikulum Mulok Sekolah Luar Biasa			100 Guru	100 Guru	100%	1 Laporan	1 Laporan	
		Penyusunan SK-KD Muatan Lokal Sekolah Luar Biasa			100 Guru	100 Guru	100%			
1.01.03.1.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Guru penyusunan silabus muatan lokal pendidikan khusus			100 Guru	100 Guru	100%	1 Laporan	1 Laporan	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan			**70%**	**70%**	100%	85%	85%	
2.22.02.1.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Kesenian trasional yang dilestarikan			**55%**	**55%**	100%	60%	60%	
2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Sekolah Mengikuti Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			50 Sekolah	50 Sekolah	100%	50 Sekolah	50 Sekolah	
		Jumlah yang Dokumen yang dihasilkan			12 Dokumen	12 Dokumen	100%			

2.22.02.1.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah kab/kota yang dibina			10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	
2.22.02.1.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Lembaga Adat			5 Lembaga Adat	5 Lembaga Adat	100%	10 Lembaga Adat	10 Lembaga Adat	
02.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	70%		65%	65%	100%	65%	65%	65%
2.22.03.1.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian trasional			65%	65%	100%	70%	70%	
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Siswa/Siswi yang melestarikan kesenian tradisional			400 orang	400 orang	100%	100 Orang	100 Orang	
2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Kab/Kota yang di tingkatkan kapasitas tata kelola objek pemajuan kebudayaan			10 Kab/ Kota	10 Kab/ Kota	100%	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	
02.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina			65%	65%	100%	75%	75%	
2.22.04.1.01	**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	Presentase jumlah sejarah lokal yang dibina			65%	65%	100%	70%	70%	
2.22.04.1.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Siswa yang mengakses data			100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	100 Orang	
02.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Dikelola			65%	65%	100%	55%	55%	
2.22.05.1.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola			65 %	65 %	100%	70%	70%	
2.22.05.1.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang terdaftar (Regnas)			40 Cagar Budaya	40 Cagar Budaya	100%	40 Cagar Budaya	40 Cagar Budaya	
		Jumlah Cagar Budaya yang terdata			40 Cagar Budaya	40 Cagar Budaya	100%			
2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya	FGD Penetapan Warisan Dunia Sangkulirang Mangkalihat Dan Sidang Penetapan Cagar Budaya			12 Cagar Budaya	12 Cagar Budaya	100%	12 Cagar Budaya	12 Cagar Budaya	
2.22.05.1.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola			65%	65%	100%	70%	70%	
2.22.05.1.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah sarana yang dibangun			2 Sarana	2 Sarana	100%	2 Sarana	2 Sarana	
2.22.05.1.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Sekolah yang mengikuti pemanfaatan cagar budaya			75 Sekolah	75 Sekolah	100%	75 Sekolah	75 Sekolah	
2.22.05.1.02.04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Juru Pelihara yang ditingkatkan kompetensinya			80 Orang	80 Orang	100%	220 Orang	220 Orang	
		Jumlah sekolah yang mengikuti sosialiasi			50 Sekolah	50 Sekolah	100%			
02.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Persentase Benda Koleksi Museum yang Dilindungi			65%	0	0%	45%	45%	

2.22.06.1.01	**Pengelolaan Museum Provinsi**	Persentase Pengelolaan Museum Provinsi			65%	0	0%	70%	70%	
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah sekolah yang mendapat akses museum			50 Sekolah	0	0%	50 Sekolah	50 Sekolah	

2.2 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan stratejik instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana stratejik.

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021, mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang dilanjutkan dengan formulir Penilaian Pencapaian Sasaran (PPS). Berbeda dengan Indikator Kinerja pada kegiatan yang bisa terdiri dari input, output dan outcome, indikator kinerja pada sasaran lebih banyak mengarah pada indikator output, outcome, bahkan bisa benefit atau impact.

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir PKK tersebut, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal -hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Sel ain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Tahap berikutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat, atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap

penyebab terjadi gap maupun strateji pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan - pembandingan antara :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun -tahun sebelumnya.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Penjelasan lebih mendalam atas penetapan indikator kinerja baik input, output, outcome pada Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator masukan (*Inputs*)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini terdiri dari anggaran (dana), sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut baik Kepala Dinas, Kepala Bagian/Kasubbag, beserta staf, sarana dan prasarana yang digunakan baik komputer, kendaraan, proyektor digital sesuai dengan kebutuhan masing-masing kegiatan. Pengukuran kinerja yang dilakukan atas indikator inputs ini adalah rencana pengalokasian yang dilakukan dibandingkan dengan realisasi baik dari ketepatan pengalokasian maupun ketepatan dengan sumber daya yang tersedia.

Nilai capaian indikator inputs diperoleh dengan *membandingkan realisasi dengan rencana* dengan asumsi semakin tinggi nilai capaian. realisasi menggambarkan pencapaian kinerja lebih baik dengan formulasi:

$$\textbf{Nilai Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\textbf{Realisasi}}{\textbf{Rencana}} \times 100\%$$

2. **Indikator Keluaran (Output)**

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik, contohnya berapa buah bangunan yang terlaksana, jumlah orang yang dikirim dalam diklat dsb.

Nilai capaian indikator outputs diperoleh dengan cara yaitu pertama, *membandingkan realisasi dengan rencana* dengan asumsi semakin tinggi nilai capaian realisasi menggambarkan pencapaian kinerja lebih baik dengan formulasi:

$$\textbf{Nilai Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\textbf{Realisasi}}{\textbf{Rencana}} \times 100\%$$

3. **Indikator Hasil (Outcome**)

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Contohnya antara lain meningkatnya pemahaman peserta Diklat terhadap materi yang diajarkan atau berkurangnya keluhan masyarakat akan pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat, meningkatnya pelayanan yang dilakukan atas kegiatan penyederhanaan prosedur pelayanan, berkurangnya tingkat kesalahan pelaksana dari hasil kegiatan pengawasan.

Nilai capaian indikator outcome diperoleh dengan dua cara yaitu pertama; *membandingkan realisasi dengan rencana dengan asu msi semakin tinggi nilai capaian realisasi menggambarkan pencapaian kinerja* lebih baik dengan formulasi:

$$\textbf{Nilai Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\textbf{Realisasi}}{\textbf{Rencana}} \times 100\%$$

Kedua, dengan asumsi *semakin tinggi nilai pencapaian semakin rendah nilai kinerja* hal ini terutama **berhubungan dengan keluhan masyarakat** dan **tingkat kesalahan dengan** formulasi:

$$\textbf{Nilai Capaiaan Indikator Kinerja} = \frac{\textbf{Rencana} - (\textbf{Rencana} - \textbf{Realisasi})}{\textbf{Rencana}} \textbf{ X 100 \%}$$

Adapun hubungan antara indikator yang ada pada kegiatan dengan indikator kinerja pada tingkat sasaran adalah hubungan sebab akibat. Artinya keberhasilan pencapaian kinerja pada kegiatan (formulir PKK) akan sangat berpengaruh pada keberhasilan pencapaian sasaran (formulir PPS).

Secara umum, pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2021 telah dapat memenuhi tugas fungsi yang telah dibebankan. Hal ini dapat tercermin dari dapat dicapainya 8 sasaran yang telah ditargetkan dengan rentang capaian kinerja sasaran bervariasi dari 97,7-217,19%. Secara lebih lengkap perolehan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator kinerja tersebut dapat digambarkan pda tabel 8 sebagai berikut:

No	Indikator	Spm/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan
				2020	2021	2022	2023	2021	2022	2022	2023	
1	Jumlah Sekolah yang mengembangkan Ekstrakurikuler Berbasis Agama		Sekolah yang mengembangkan Ekstrakurikuler Berbasis Agama	100 Sekolah	150 Sekolah	200 Sekolah	233 Sekolah	150 Sekolah	-	200 Sekolah	233 Sekolah	
2	Kesenian Tradisional yang Dikembangkan		Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	-	60%	65%	70%	60%	-	65%	70%	
3	Jumlah SMK yang memiliki jurusan sesuai kebutuhan pasar / Jumlah SMK yang bekerjasama dengan dunia usaha dan industri		Sekolah yang bekerjasama dengan dunia usaha dan industri	55 Sekolawh	70 Sekolah	86 Sekolah	92 Sekolah	70 Sekolah	-	86 Sekolah	92 Sekolah	
4	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/SLB	67,14%	Angka Partisipasi Sekolah	73%	77%	82%	85%	78,15%	-	82%	85%	
5	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana (%)	94,80%	Peningkatan Kualifikasi Guru (D4/S1/S2)	-	95%	97%	100%	95%	-	97%	100%	
6	Jumlah Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS		Jumlah Penerima Beasiswa	13.000	19.500	26.000	31.700	15.386	-	26.000	31.700	
7	Jumlah Siswa SMA/SMK Miskin penerima sebanyak		Jumlah Penerima Beasiswa	2500	2500	2500	2500	3.369	-	2500	2500	
8	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Pendidikan jarak jauh Berbasis Internet		Sekolah yang menerapkan Sistem Pendidikan jarak jauh Berbasis Internet	90%	95%	97%	100%	95%	-	97%	100%	
9	persentase pelayanan pendidikan luas biasa		Angka Partisipasi Sekolah	65%	70%	75%	80%	87,61%	-	75%	80%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, maka prioritas Pembangunan Pendidikan senantiasa diarahkan dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional yang bertumpu pada tiga pilar pendidikan yaitu:

1. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan;
2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan;
3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan.

Sesuai dengan misi pembangunan pendidikan nasional, maka Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada Rencana Strategis PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur 2021 diarahkan pada isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Belum meratanya akses PAUD;
2. Belum tuntasnya Wajar Pendidikan 9 Tahun di beberapa Kabupaten/Kota;
3. Belum meratanya Wajar Pendidikan 12 Tahun;
4. Kurang berkembangannya Sekolah Menengah Kejuruan;
5. Belum memenuhi SPM jenjang pendidikan Menengah;
6. Rendahnya kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Pembangungan Pendidikan Kalimantan Timur diarahkan pada sistem pendidikan yang berorientasi kualitas, dan bukan kuantitas semata. Secara global, sistem pendidikan, database pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, peserta didik dan pengendali mutu lulusan serta peran serta masyarakat merupakan unsur-unsur yang harus ditata dan diperhatikan secara bersamaan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdapat beberapa isu-isu strategis yang memperoleh perhatian serius :

1. Masih rendahnya akses Pendidikan Anak Usia Dini
2. Belum meratanya Program Wajib Belajar Sembilan Tahun
3. Rendahnya Kualifikasi Guru SD yang berpendidikan S1/D4 Provinsi Kalimantan Timur
4. Daya saing keluaran satuan Pendidikan yang masih rendah
5. Pelaksanaan Kurikulum Tahun 2013

6. Konsistensi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam mengalokasikan Anggaran Pendidikan minimal 20%.
7. Dilaksanakanya secara sunguh- sunguh Peraturan Daerah (PERDA) tentang strategi dan kebijakan pendidikan, yang menjadi acuan dan payung hukum penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Timur .
8. Dibuatnya Grand Design Pendidikan Kalimantan Timur yang memuat arah dan strategi operasional kebijakan pendidikan yang melibatkan seluruh stakeholders Pendidikan dengan Dinas pendidikan sebagai Leading Sector .
9. Dituntaskannya Wajib Belajar 9 tahun dan mulai dilaksanakannya Wajib Belajar 12 Tahun di Seluruh Wilayah di Kalimantan Timur .
10. Terpenuhinya akses bagi masyarakat hingga usia wajib belajar 12 tahun (SMA/SMK/MA) .
11. Peningkatan Kualifikasi, Kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang berpatokan pada standar nasional pendidikan .
12. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan disemua jenjang .
13. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap harus dilakukan termasuk didalamnya melengkapi sarana pembelajaran pada semua jenjang satuan pendidikan.
14. Reformasi Perbukuan yang bertujuan un tuk meningkatkan daya baca masyarakat dalam menuju Reading Society dalam kerangka Learning Society .
15. Tersedianya sarana pendidikan berkeunggulan lokal, nasional dan internasional.
16. Pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan secara periodik, tidak hanya pada proses tetapi juga luaran satuan pendidikan pada semua jenjang.
17. Sistem rewards bagi peserta didik dan tenaga kependidikan harus dilakukan dengan memberikan penghargaan yang layak dan sesuai bagi mereka yang berprestasi .
18. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan harus dijaga dan diaktifkan, khususnya dalam bidang pendidikan luar sekolah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, terdapat perubahan rumusan program dan kegiatan yang telah disusun. Proses perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui sesuai/tidak sesuai, cocok/ketidakcocokan besarannya (anggaran/volume/satuan) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan.

Hasil dari analisis kebutuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalimantan Timur, ada beberapa sub kegiatan yang dihapus dari rancangan awal (Renja-P) dikarenakan lebih mengutamakan pada kegiatan-kegiatan yang prioritas untuk tahun 2023 seperti contoh pada sub kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah. Didalam sub kegiatan ini memuat kegiatan untuk sekolah mandiri dan kurikulum merdeka belajar yang ditambah anggaranya sesuai kebutuhannya dikarenakan ditahun 2023 akan memfokuskan semua sekolah untuk menerapkan kurikulum tersebut. Masih banyak sub kegiatan yang kami alihkan anggaranya dan menghapus beberapa sub kegiatan yang tidak kami aanggrankan pada tahun 2023, karena sudah di anggarkan pada tahun 2022 dan mengalihkan dana tersebut untuk mendukung program prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalimantan Timur.

Berikut ini akan diuraikan review terhadap rancangan awal (Renja-P) RKPD tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan table 9 di bawah ini :

Riview Terhadap Rancangan RKPD-P Terhadap Rencana Kerja Perubahan RKPD

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD Perubahan			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	10 Kab/Kota		**3,741,470,819,516**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	10 Kab/Kota	85%	**3,579,398,763,771**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan			**1,435,059,750,329**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		100 %	**1,434,039,726,389**
	PERENCANAAN. PENGANGGARAN. DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Dokuman Perencanaan		100 %	**10,922,951,960**	**PERENCANAAN. PENGANGGARAN. DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	Dokuman Perencanaan		100 %	**10,161,003,960**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Kab/Kota	10 Dokumen	6,762,961,960	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Kab/Kota	10 Dokumen	6,001,013,960
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Kab/Kota	239 Dokumen	1,178,575,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Kab/Kota	239 Dokumen	1,178,575,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Kab/Kota	239 Dokumen	1,177,669,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Kab/Kota	239 Dokumen	1,177,669,000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Kab/Kota	239 Dokumen	271,005,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Kab/Kota	239 Dokumen	271,005,000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Kab/Kota	239 Dokumen	452,237,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Kab/Kota	239 Dokumen	452,237,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Kab/Kota	239 Laporan	544,410,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Kab/Kota	239 Laporan	544,410,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Kab/Kota	239 Laporan	536,094,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Kab/Kota	239 Laporan	536,094,000
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai		12 Bulan	**1,072,882,172,039**	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai		12 Bulan	**1,072,050,392,039**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Kab/Kota	110 Orang/ Bulan	1,060,946,842,039	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Kab/Kota	110 Orang/ Bulan	1,060,946,842,039

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD Perubahan			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Kab/Kota	12 Dokumen	2,681,286,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Kab/Kota	12 Dokumen	2,736,726,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Kab/Kota	1 Laporan	1,297,315,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Kab/Kota	1 Laporan	1,010,395,000
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Kab/Kota	50 Dokumen	214,075,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Kab/Kota	50 Dokumen	214,075,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesterSKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesterSKPD	10 Kab/Kota	12 Laporan	7,742,654,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesterSKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesterSKPD	10 Kab/Kota	12 Laporan	7,142,354,000
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Tersedianya Laporan Data Aset		12 Bulan	**1,661,248,390**	**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	Tersedianya Laporan Data Aset		12 Bulan	**1,706,018,390**
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Kab/Kota	12 Laporan	1,661,248,390	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Kab/Kota	12 Laporan	1,706,018,390
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai		12 Bulan	**11,459,181,700**	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai		12 Bulan	**12,499,431,700**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	10 Kab/Kota	50 Orang	6,223,531,700	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Kab/Kota	50 Orang	7,263,781,700
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Perundang-undangan	10 Kab/Kota	5000 Orang	5,235,650,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Kab/Kota	5000 Orang	5,235,650,000
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**7,137,959,700**	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**7,137,959,700**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Paket	99,970,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Paket	99,970,500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Paket	4,362,789,900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Paket	4,362,789,900
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	10 Kab/Kota	500 Paket	689,551,200	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	10 Kab/Kota	500 Paket	689,551,200
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Paket	99,968,100	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Paket	99,968,100

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD Perubahan			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Kab/Kota	1 Laporan	1,885,680,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Kab/Kota	1 Laporan	1,885,680,000
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		12 Bulan	**98,484,443,000**	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		12 Bulan	**98,881,499,300**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Kab/Kota	75 Unit	72,600,177,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Kab/Kota	75 Unit	72,600,177,000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Kab/Kota	10 Paket	7,035,123,500	Pengadaan Mebel	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	10 Kab/Kota	10 Paket	6,190,858,500
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Kab/Kota	5 Unit	9,592,414,900	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Kab/Kota	5 Unit	10,704,881,200
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Kab/Kota	2 Unit	9,256,727,600	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Kab/Kota	2 Unit	9,385,582,600
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**219,185,619,500**	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Bulan	**219,185,619,500**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Laporan	34,972,400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Laporan	34,972,400
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Laporan	6,877,131,300	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Laporan	6,877,131,300
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Laporan	452,032,600	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Laporan	452,032,600
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Laporan	211,821,483,200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Laporan	211,821,483,200
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan		12 Bulan	**1,581,176,990**	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan		12 Bulan	**1,581,176,990**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Kab/Kota	75 Unit	785,826,800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Kab/Kota	75 Unit	785,826,800
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Kab/Kota	10 Unit	335,698,800	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Kab/Kota	10 Unit	335,698,800
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Kab/Kota	2 Unit	309,673,890	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Kab/Kota	2 Unit	309,673,890

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD Perubahan			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Kab/Kota	1 Unit	149,977,500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Kab/Kota	1 Unit	149,977,500
	FASILITASI KEPROTOKOLAN	Tersedianya Fasilitas Dan Kordinasi Yang Baik D alama Pelaksanaan Acara		100 %	**11,744,997,050**	**FASILITASI KEPROTOKOLAN**	Tersedianya Fasilitas Dan Kordinasi Yang Baik D alama Pelaksanaan Acara		100 %	**10,836,624,810**
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	10 Kab/Kota	12 Laporan	11,744,997,050	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	10 Kab/Kota	12 Laporan	10,836,624,810
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK**		**85%**	**2,278,338,676,187**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK**		**85%**	**2,121,286,644,382**
	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	Laporan Kegiatan		30 Laporan	**1,158,621,388,965**	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS**	Laporan Kegiatan		30 Laporan	**1,095,833,147,965**
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	4 Unit	67,645,600,100	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	4 Unit	67,645,600,100
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Kab/Kota	1 Ruang	19,664,186,908	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Kab/Kota	10 Ruang	18,871,241,908
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	10 Ruang	5,177,955,000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	10 Ruang	5,060,250,000
	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	10 Ruang	7,222,935,000	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	10 Ruang	7,168,605,000
	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	19 Ruang	13,617,823,200	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	19 Ruang	13,617,823,200
	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	14 Ruang	9,555,054,000	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	14 Ruang	9,500,724,000
	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	6 Ruang	6,041,730,000	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	6 Ruang	6,041,730,000
	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	10 Sekolah	0	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	10 Sekolah	0
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	12 Ruang	5,151,749,000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	12 Ruang	5,124,584,000
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	5 Sekolah	60,120,000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kukar, Kubardan Kutim	5 Sekolah	60,120,000
	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	4 Unit	4,579,700,000	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	4 Unit	4,579,700,000
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	46 Unit	42,862,473,820	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	46 Unit	33,435,343,820

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD Perubahan			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	6 Unit	2,526,072,000	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	6 Unit	2,526,072,000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Kab/Kota	9 Ruang	8,246,152,640	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Kab/Kota	9 Ruang	8,266,872,640
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Kab/Kota	1 Ruang	451,109,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Kab/Kota	1 Ruang	451,109,000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Kab/Kota	5 Sekolah	230,856,020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Kab/Kota	5 Sekolah	267,076,020
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Kab/Kota	5 Sekolah	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kukar dan Kubar	5 Sekolah	0
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Kab/Kota	2 Sekolah	379,044,520	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Kab/Kota	2 Sekolah	379,044,520
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Kab/Kota	4 Sekolah	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Kab/Kota	4 Sekolah	0
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Kab/Kota	1 Sekolah	236,709,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Saamrinda	1 Sekolah	236,709,000
	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	1 Sekolah	100,000,000	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	1 Sekolah	99,120,000
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Akan Direhabilitasi	10 Kab/Kota	15 Sekolah	25,043,415,590	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Akan Direhabilitasi	-	15 Sekolah	25,068,195,590
	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	1 Unit	452,115,000	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	1 Unit	445,920,000
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Akan Disediakan	10 Kab/Kota	10 Paket	94,681,102,590	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Akan Disediakan	10 Kab/Kota	30 Paket	94,026,512,590
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10 Kab/Kota	76871 Peserta didik	500,166,027,687	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10 Kab/Kota	76871 Peserta didik	524,239,056,187
	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Akan Tersedia	10 Kab/Kota	23 Paket	146,450,671,090	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Akan Tersedia	10 Kab/Kota	23 Paket	77,377,642,590
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	10 Kab/Kota	233 Satuan Pendidikan	28,102,257,000	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	10 Kab/Kota	233 Satuan Pendidikan	18,102,257,000
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Kab/Kota	4200 Peserta Didik	27,162,570,000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Kab/Kota	4200 Peserta Didik	23,162,570,000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD Perubahan			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Kab/Kota	1000 Orang	5,718,428,300	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Kab/Kota	1000 Orang	5,718,428,300
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Kab/Kota	25 Satuan Pendidikan	4,649,886,500	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Kab/Kota	25 Satuan Pendidikan	4,649,886,500
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	10 Kab/Kota	229 Satuan Pendidikan	104,791,145,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	10 Kab/Kota	229 Satuan Pendidikan	112,056,454,000
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	10 Kab/Kota	2000 Orang	27,654,500,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	10 Kab/Kota	2000 Orang	27,654,500,000
	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN				**409,698,386,990**	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**	Laporan Kegiatan		20 Laporan	**944,323,648,201**
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	1 Sekolah	12,947,665,000	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	1 Sekolah	35,249,248,038
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	10 Kab/Kota	14 Sekolah	14,473,296,000	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	10 Kab/Kota	14 Sekolah	31,172,982,400
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	14 Sekolah	4,865,384,000	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	14 Sekolah	27,650,498,400
	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	46 Ruang	4,000,000,000	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	46 Ruang	28,598,103,900
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	10 Ruang	1,962,191,000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Berau dan Bontang	10 Ruang	2,040,676,000
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	6 Ruang	1,000,000,000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kubar dan Kutim	6 Ruang	3,534,933,400
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	42 Ruang	27,723,111,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	42 Ruang	76,607,485,400
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	5 Ruang	2,547,934,000	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	5 Ruang	3,503,472,320
	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	5 Ruang	2,000,000,000	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	5 Ruang	0
	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	1 Ruang	2,200,000,000	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	1 Ruang	1,653,400,360
	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	1 Ruang	1,000,000,000	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Kukar	1 Ruang	639,948,000
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	9 Ruang	1,399,300,000	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	9 Ruang	20,596,887,560

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD Perubahan			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Kab/Kota	12 Paket	0	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Kab/Kota	30 Paket	96,387,311,150
	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Kab/Kota	120 Paket	55,410,030,900	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Kab/Kota	120 Paket	481,995,479,798
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10 Kab/Kota	78.456 Peserta didik	96,354,984,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10 Kab/Kota	78.456 Peserta didik	1,154,976,000
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	10 Kab/Kota	221 Satuan Pendidikan	5,536,482,000	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	10 Kab/Kota	221 Satuan Pendidikan	27,932,784,725
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	10 Kab/Kota	221 Satuan Pendidikan	299,996,800	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	10 Kab/Kota	221 Satuan Pendidikan	299,994,500
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Kab/Kota	1000 Peserta Didik	11,058,719,000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Kab/Kota	1000 Peserta Didik	38,068,917,750
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Kab/Kota	1200 Orang	3,607,150,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Kab/Kota	1200 Orang	7,140,405,500
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	10 Kab/Kota	221 Satuan Pendidikan	134,805,543,290	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	10 Kab/Kota	221 Satuan Pendidikan	33,589,543,000
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	10 Kab/Kota	2200 Orang	26,506,600,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	10 Kab/Kota	2200 Orang	26,506,600,000
	PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa		**80%**	**86,343,671,016**	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS**	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa		**80%**	**81,129,848,216**
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	10 Kab/Kota	6 Ruang	6,411,094,800	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	10 Kab/Kota	6 Ruang	6,411,094,800
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	4 Unit	13,749,468,548	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	4 Unit	13,749,468,548
	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	3 Unit	1,711,740,800	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	3 Unit	1,711,740,800
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	5 Ruang	0	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	5 Ruang	0
	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	5 Ruang	0	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	5 Ruang	0
	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	10 Ruang	0	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	10 Ruang	0

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD Perubahan			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	10 Ruang	0	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	10 Ruang	0
	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	1 Unit	718,188,880	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	1 Unit	718,188,880
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	4 Unit	13,407,120,568	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	4 Unit	13,407,120,568
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Kab/Kota	10 Sekolah	6,950,000,000	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Kab/Kota	10 Sekolah	6,950,000,000
	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Kab/Kota	5 Paket	22,535,130,000	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Kab/Kota	5 Paket	22,535,130,000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10 Kab/Kota	2498 Peserta Didik	0	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10 Kab/Kota	2498 Peserta Didik	0
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah yang mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Kab/Kota	600 Orang	7,085,900,000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah yang mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Kab/Kota	1200 Orang	7,411,792,200
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Kab/Kota	200 Orang	1,103,423,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangka t/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Kab/Kota	200 Orang	1,103,423,000
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	10 Kab/Kota	34 Satuan Pendidikan	1,454,685,500	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	10 Kab/Kota	34 Satuan Pendidikan	1,914,970,500
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	10 Kab/Kota	300 Orang	11,216,918,920	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	10 Kab/Kota	300 Orang	5,216,918,920
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		86%	**12,475,546,500**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		86%	**12,475,546,500**
	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal		86%	**8,221,560,000**	**PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH**	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal		86%	**8,221,560,000**
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	10 Kab/Kota	1 Dokumen	1,937,960,000	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	10 Kab/Kota	1 Dokumen	1,937,960,000
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	10 Kab/Kota	70 Orang	6,283,600,000	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	10 Kab/Kota	70 Orang	6.283.600.000
		Jumlah Satuan Pendidikan Pelaksana IKM Mandiri		150 Satuan Pendidikan			Jumlah Satuan Pendidikan Pelaksana IKM Mandiri		150 Satuan Pendidikan	
		Jumlah Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Dual Track		20 Satuan Pendidikan			Jumlah Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Dual Track		20 Satuan Pendidikan	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD Perubahan			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal		120 Satuan Pendidikan			Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal		120 Satuan Pendidikan	
	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KHUSUS	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal		86%	**4,253,986,500**	**PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KHUSUS**	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal		86%	**4,253,986,500**
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Meningkatnya Kompetensi Guru Pendidikan Khusus Dalam Memberikan Pelayanan Pendidikan Khusus Kepada Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus (Abk)	10 Kab/Kota	378 GURU	**3.203.509.000**	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Meningkatnya Kompetensi Guru Pendidikan Khusus Dalam Memberikan Pelayanan Pendidikan Khusus Kepada Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus (Abk)	10 Kab/Kota	378 GURU	3,203,509,000
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Meningkatnya Kompetensi Guru Slb/Skh Dan Sma/Smk Penyelenggara Pendidikan Inklusi Dalam Memberikan Layanan Pendidikan Khusus Di Provinsi Kalimantan Timur	10 Kab/Kota	54 GURU	**1,050,477,500**	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Meningkatnya Kompetensi Guru Slb/Skh Dan Sma/Smk Penyelenggara Pendidikan Inklusi Dalam Memberikan Layanan Pendidikan Khusus Di Provinsi Kalimantan Timur	10 Kab/Kota	54 GURU	1,050,477,500
		Meningkatnya Kompetensi Kepala Sekolah Slb/Skh Dan Sma/Smk Penyelenggara Pendidikan Inklusi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Khusus Di Provinsi Kalimantan Timur		54 GURU			Meningkatnya Kompetensi Kepala Sekolah Slb/Skh Dan Sma/Smk Penyelenggara Pendidikan Inklusi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Khusus Di Provinsi Kalimantan Timur		54 GURU	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA	**Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana**		100%	**15,596,846,500**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA**	**Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana**		100%	**11,596,846,500**
	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Presentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana		100%	**15,596,846,500**	**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten Kota dalam 1 (satu) Provinsi**	Presentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana		100%	**11,596,846,500**
	10 Laporan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Meningkatnya Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10 Kab/Kota	10 Laporan	15,596,846,500	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	10 Kab/Kota	10 Laporan	11,596,846,500
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				**8,437,625,500**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**11,484,887,100**
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan		88 %	**2,181,203,500**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan		88 %	**2,657,703,400**
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah	Jumlah Kesenian trasional yang dilestarikan		60 %	**1,764,352,500**	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah**	Jumlah Kesenian trasional yang dilestarikan		60 %	**2,000,852,400**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD Perubahan			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					**Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				
	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	10 Kab/Kota	10 Dokumen	1,764,352,500	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	10 Kab/Kota	10 Dokumen	2,000,852,400
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan		5 Objek			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan		5 Objek	
		Jumlah Siswa/Guru/Masyarakat yang mengikuti Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		280 Orang			Jumlah Siswa/Guru/Masyarakat yang mengikuti Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		280 Orang	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian trasional		70 %	**416,851,000**	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian trasional		70 %	**656,851,000**
	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan.	10 Kab/Kota	10 orang	416,851,000	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan.	10 Kab/Kota	10 orang	656,851,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan		70 %	**2,960,487,000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan		70 %	**4,211,533,700**
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian trasional		70 %	**2,960,487,000**	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian trasional		70 %	**4,211,533,700**
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	10 Kab/Kota	500 Orang	1,094,007,000	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	10 Kab/Kota	500 Orang	1,834,986,800
	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	10 Kab/Kota	100 Sertifikat	891,140,000	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	10 Kab/Kota	100 Sertifikat	0
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga Kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Kab/Kota	35 Lembaga	975,340,000	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga Kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Kab/Kota	35 Lembaga	2,376,546,900
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina		80 %	**768,067,000**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina		80 %	**768,490,600**
	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Presentase jumlah sejarah lokal yang dibina		70 %	**768,067,000**	**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	Presentase jumlah sejarah lokal yang dibina		70 %	**768,490,600**
	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Data/Dokumen yang dapat diakses masyarakat	10 Kab/Kota	20 Dokumen	768,067,000	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Data/Dokumen yang dapat diakses masyarakat	10 Kab/Kota	20 Dokumen	768,490,600

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD Perubahan			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	10 Kab/Kota	65 %	**2,122,918,000**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan		65 %	**3,042,209,600**
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola		70 %	**512,350,000**	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola		70 %	**845,049,600**
	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Kab/Kota	5 Objek	512,350,000	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Kab/Kota	5 Objek	845,049,600
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola		70 %	**1,610,568,000**	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola		70 %	**2,197,160,000**
	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya	10 Kab/Kota	140 Orang	795,400,000	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya	10 Kab/Kota	140 Orang	1,082,010,000
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya dan Permuseuman yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	10 Kab/Kota	150 Orang	815,168,000	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya dan Permuseuman yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	10 Kab/Kota	150 Orang	1,115,150,000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman		65 %	**404,950,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Persentase Pengelolaan Permuseuman		65 %	**804,949,800**
	Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase Pengelolaan Museum Provinsi		70 %	**404,950,000**	**Pengelolaan Museum Provinsi**	Persentase Pengelolaan Museum Provinsi		70 %	**804,949,800**
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	10 Kab/Kota	4 Museum	404,950,000	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	10 Kab/Kota	4 Museum	804,949,800
	Dinas Pendidikan Wilayah I				**16,896,207,084**	**Dinas Pendidikan Wilayah I**				**16,896,207,084**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				**16,896,207,084**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**16,896,207,084**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		100%	**11,043,343,284**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		100 %	**11,043,343,284**
	-	-	**-**	**-**	**-**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai		12 Bulan	**0**
	-	-	-	-	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Balikpapan.	0 Paket	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**981,100,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**981,100,000**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan.	1 Laporan	981,100,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan.	1 Laporan	981,100,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		12 Bulan	**9,156,572,004**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		12 Bulan	**9,156,572,004**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Balikpapan.	34 Unit	9,156,572,004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Balikpapan.	34 Unit	9,156,572,004

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD Perubahan			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**746,283,280**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**746,283,280**
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Balikpapan.	12 Laporan	88,665,600	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Balikpapan.	12 Laporan	88,665,600
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan.	12 Laporan	657,617,680	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan.	12 Laporan	657,617,680
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan		12 Bulan	**159,388,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan		12 Bulan	**159,388,000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Balikpapan.	10 Unit	159,388,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Balikpapan.	10 Unit	159,388,000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK		0%	**5,852,863,800**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK		85 %	**5,852,863,800**
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		0%	**2,764,098,200**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %	**2,764,098,200**
	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksanaanya Lomba Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa SMA	Kota Balikpapan.	0 Sekolah	913,900,200	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksanaanya Lomba Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa SMA	Kota Balikpapan.	190 Peserta Didik	913,900,200
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kota Balikpapan	0 Orang	1,850,198,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kota Balikpapan	200 Orang	1,850,198,000
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		0%	**2,947,595,200**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %	**2,947,595,200**
	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksanaanya Lomba Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa SMK	Kota Balikpapan	0 Sekolah	1,097,397,200	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksanaanya Lomba Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa SMK	Kota Balikpapan	250 Peserta Didik	1,097,397,200
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kota Balikpapan	0 Orang	1,850,198,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kota Balikpapan	200 Orang	1,850,198,000
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		0%	**141,170,400**	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %	**141,170,400**
	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksanaanya Lomba Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa SLB	Kota Balikpapan	0 Sekolah	141,170,400	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksanaanya Lomba Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa SLB	Kota Balikpapan.	20 Peserta Didik	141,170,400
	Dinas Pendidikan Wilayah II				**6,949,218,000**	**Dinas Pendidikan Wilayah II**				**1.775.000.000**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD Perubahan			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				**6,949,218,000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**6,949,218,000**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		100 %	**2,079,536,400**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		100 %	**2,079,536,400**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai		12 Bulan	**79,290,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai		12 Bulan	**79,290,000**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kutim dan Bontang	30 Paket	79,290,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kutim dan Bontang	30 Paket	79,290,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		12 Bulan	**92,059,300**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		12 Bulan	**92,059,300**
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasaran pendukung Kantor tersedia	Kutim dan Bontang	1 set	92,059,300	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasaran pendukung Kantor tersedia	Kutim dan Bontang	1 set	92,059,300
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**1,908,187,100**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**1,908,187,100**
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kutim dan Bontang	12 Laporan	93,658,400	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kutim dan Bontang	12 Laporan	93,658,400
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kutim dan Bontang	12 Laporan	1,814,528,700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kutim dan Bontang	12 Laporan	1,814,528,700
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK**		85%	**4,869,681,600**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK**		85 %	**4,869,681,600**
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100%	**2,336,027,300**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %	**2,336,027,300**
	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksanaanya Lomba Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa SMA	Kutim dan Bontang	150 Peserta Didik	1,541,496,100	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksanaanya Lomba Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa SMA	Kutim dan Bontang	150 Peserta Didik	1,541,496,100
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kutim dan Bontang	25 Orang	794,531,200	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kutim dan Bontang	25 Orang	794,531,200
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %	**1,987,496,200**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %	**1,987,496,200**
	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksanaanya Lomba Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa SMK	Kutim dan Bontang	50 Peserta Didik	1,187,496,200	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksanaanya Lomba Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa SMK	Kutim dan Bontang	50 Peserta Didik	1,187,496,200
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kutim dan Bontang	150 Orang	800,000,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kutim dan Bontang	150 Orang	800,000,000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD Perubahan			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa		80%	**546,158,100**	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa		80 %	**546,158,100**
	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksanaanya Lomba Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa SLB	Kutim dan Bontang	50 Peserta Didik	546,158,100	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksanaanya Lomba Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa SLB	Kutim dan Bontang	50 Peserta Didik	546,158,100
	-	-	-	-	-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kutim dan Bontang	0 Orang	0
	Dinas Pendidikan Wilayah III				**8,718,898,432**	**Dinas Pendidikan Wilayah III**				**8,718,898,432**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				**8,718,898,432**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**8,718,898,432**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		100 %	**2,569,407,032**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		100 %	**2,569,407,032**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai		12 Bulan	**86,640,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai		12 Bulan	**86,640,000**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Kartanegara.	12 Dokumen	86,640,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Kartanegara.	12 Dokumen	86,640,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai		12 Bulan	**75,336,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai		12 Bulan	**75,336,000**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Kartanegara.	30 Paket	75,336,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Kartanegara.	30 Paket	75,336,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**819,060,700**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**819,060,700**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	30 Paket	21,060,700	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	30 Paket	21,060,700
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara.	1 Laporan	798,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara.	1 Laporan	798,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**1,425,732,532**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**1,425,732,532**
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	12 Laporan	82,812,000	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	12 Laporan	82,812,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	12 Laporan	630,356,032	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	12 Laporan	630,356,032
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	12 Laporan	712,564,500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	12 Laporan	712,564,500

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD Perubahan			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan		12 Bulan	**162,637,800**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan		12 Bulan	**162,637,800**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara.	10 Unit	86,395,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara.	10 Unit	86,395,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara.	1 Unit	76,242,800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara.	1 Unit	76,242,800
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK		85 %	**6,149,491,400**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK		85 %	**6,149,491,400**
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %	**2,794,690,700**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %	**2,794,690,700**
	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai	250 Peserta Didik	1,584,209,400	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai	250 Peserta Didik	1,584,209,400
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Kartanegara.	100 Orang	1,210,481,300	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Kartanegara.	100 Orang	1,210,481,300
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %	**3,039,558,500**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %	**3,039,558,500**
	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Kartanegara.	250 Peserta Didik	1,600,039,000	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Kartanegara.	250 Peserta Didik	1,600,039,000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Kartanegara.	100 Orang	699,972,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Kartanegara.	100 Orang	699,972,000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Kutai Kartanegara.	15 Satuan Pendidikan	739,547,500	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Kutai Kartanegara.	15 Satuan Pendidikan	739,547,500
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa		80 %	**315,242,200**	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa		80 %	**315,242,200**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD Perubahan			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Kartanegara	100 Peserta Didik	315,242,200	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Kartanegara	100 Peserta Didik	315,242,200
	Dinas Pendidikan Wilayah IV				**12,438,762,616**	**Dinas Pendidikan Wilayah IV**				**12,328,992,616**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				**12,438,762,616**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**12,328,992,616**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		100 %	**8,263,849,716**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		100 %	**8,154,079,716**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai		12 Bulan	**45,892,500**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai		12 Bulan	**45,892,500**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Barat.	14 Paket	45,892,500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Barat.	14 Paket	45,892,500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**1,406,069,100**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**1,406,069,100**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kutai Barat.	25 Paket	8,257,100	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kutai Barat.	25 Paket	8,257,100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Barat.	1 Laporan	1,397,812,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Barat.	1 Laporan	1,397,812,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		12 Bulan	**5,983,881,800**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		12 Bulan	**5,874,111,800**
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Barat.	1 Unit	170,192,200	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Barat.	1 Unit	170,192,200
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Barat.	3 Unit	5,813,689,600	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Barat.	1 Unit	5,703,919,600
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**734,611,216**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**734,611,216**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Barat.	12 Laporan	3,609,900	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Diadministrasikan	Kab. Kutai Barat.	12 Laporan	3,609,900
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Barat.	12 Laporan	21,353,600	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyedia Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Barat.	12 Laporan	21,353,600
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat.	12 Laporan	44,949,876	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Barat.	12 Laporan	44,949,876
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat.	12 Laporan	664,697,840	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai	Kab. Kutai Barat.	12 Laporan	664,697,840

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD Perubahan			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan		12 Bulan	**93,395,100**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan		12 Bulan	**93,395,100**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Barat.	10 Unit	93,395,100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Barat.	10 Unit	93,395,100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Barat.	1 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Barat.	1 Unit	0
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK		85 %	**4,174,912,900**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK		85 %	**4,174,912,900**
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %	**2,962,536,600**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %	**2,962,536,600**
	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Barat.	50 Peserta Didik	1,383,709,600	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Barat.	50 Peserta Didik	1,383,709,600
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Barat.	100 Orang	1,578,827,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Barat.	100 Orang	1,578,827,000
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %	**1,212,376,300**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %	**1,212,376,300**
	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Barat.	50 Peserta Didik	513,500,300	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Barat.	50 Peserta Didik	513,500,300
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Barat.	100 Orang	698,876,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Barat.	100 Orang	698,876,000
	Dinas Pendidikan Wilayah V				**5,022,949,720**	**Dinas Pendidikan Wilayah V**				**5,022,949,720**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				**5,022,949,720**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**5,022,949,720**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		100 %	**1,655,457,420**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		100 %	**1,655,457,420**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai		12 Bulan	**60,720,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai		12 Bulan	**60,720,000**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD Perubahan			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Paser	12 Dokumen	60,720,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Paser	12 Dokumen	60,720,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai		12 Bulan	**59,094,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai		12 Bulan	**59,094,000**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Paser	50 Paket	59,094,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Paser	50 Paket	59,094,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Paser	50 Orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Paser	50 Orang	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**852,840,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**852,840,000**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Paser	35 Paket	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Paser	35 Paket	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	1 Laporan	852,840,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	1 Laporan	852,840,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		12 Bulan	**53,749,800**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		12 Bulan	**53,749,800**
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kab. Paser	2 Unit	53,749,800	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kab. Paser	2 Unit	53,749,800
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**536,211,620**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**536,211,620**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser	12 Laporan	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser	12 Laporan	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Paser	12 Laporan	39,122,600	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Paser	12 Laporan	39,122,600
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	12 Laporan	65,802,300	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	12 Laporan	65,802,300
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	12 Laporan	431,286,720	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	12 Laporan	431,286,720
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan		12 Bulan	**92,842,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan		12 Bulan	**92,842,000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Paser	10 Unit	92,842,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Paser	10 Unit	92,842,000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD Perubahan			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK		85 %	**3,367,492,300**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK		85 %	**3,367,492,300**
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %	**1,670,053,200**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %	**1,670,053,200**
	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Paser	200 Peserta Didik	478,464,000	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Paser	200 Peserta Didik	478,464,000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Paser	100 Orang	991,589,200	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Paser	100 Orang	991,589,200
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Paser	12 Satuan Pendidikan	200,000,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Paser	12 Satuan Pendidikan	200,000,000
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %	**1,697,439,100**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %	**1,697,439,100**
	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Paser	200 Peserta Didik	497,682,700	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Paser	200 Peserta Didik	497,682,700
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Paser	100 Orang	999,756,400	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Paser	100 Orang	999,756,400
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Paser	12 Satuan Pendidikan	200,000,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Paser	12 Satuan Pendidikan	200,000,000
	Dinas Pendidikan Wilayah VI				**10,436,366,304**	**Dinas Pendidikan Wilayah VI**				**10,436,366,304**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				**10,436,366,304**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**10,436,366,304**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		100 %	**7,496,366,304**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		100 %	**7,496,366,304**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai		12 Bulan	**101,861,200**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai		12 Bulan	**101,861,200**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Berau	12 Dokumen	101,861,200	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Berau	12 Dokumen	101,861,200
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**1,591,482,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**1,591,482,000**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD Perubahan			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Berau	2 Paket	3,506,300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Berau	2 Paket	3,506,300
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Berau	18 Paket	7,455,700	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Berau	18 Paket	7,455,700
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Berau	1 Laporan	1,580,520,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Berau	1 Laporan	1,580,520,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		12 Bulan	**4,887,328,400**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		12 Bulan	**4,887,328,400**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Berau	3 Unit	4,887,328,400	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Berau	3 Unit	4,887,328,400
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**836,675,704**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**836,675,704**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Berau	12 Laporan	8,235,600	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Berau	12 Laporan	8,235,600
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Berau	12 Laporan	423,307,304	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Berau	12 Laporan	423,307,304
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Berau	12 Laporan	405,132,800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Berau	12 Laporan	405,132,800
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan		12 Bulan	**79,019,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan		12 Bulan	**79,019,000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Berau	7 Unit	79,019,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Berau	7 Unit	79,019,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Berau	1 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Berau	1 Unit	0
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK		85 %	**2,940,000,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK		85 %	**2,940,000,000**
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %	**2,940,000,000**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %	**2,940,000,000**
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Berau	34 Satuan Pendidikan	2,940,000,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Berau	34 Satuan Pendidikan	2,940,000,000
	UPTD Taman Budaya				**15,459,812,142**	**UPTD Taman Budaya**				**15,459,812,142**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD Perubahan			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				**15,459,812,142**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**15,459,812,142**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		100 %	**15,459,812,142**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		100 %	**15,459,812,142**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai		12 Bulan	**235,320,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai		12 Bulan	**235,320,000**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	12 Dokumen	235,320,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	12 Dokumen	235,320,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**1,463,605,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai		12 Bulan	**1,463,605,000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	3 Paket	38,490,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	3 Paket	38,490,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	3 Paket	158,987,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	3 Paket	158,987,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda	8 Paket	8,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda	8 Paket	8,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	1 Laporan	1,258,128,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	1 Laporan	1,258,128,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		12 Bulan	**7,430,299,302**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan		12 Bulan	**7,430,299,302**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	84 Unit	7,430,299,302	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	84 Unit	7,430,299,302
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**2,107,924,840**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**2,107,924,840**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda	12 Laporan	6,212,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda	12 Laporan	6,212,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Laporan	264,880,000	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Laporan	264,880,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Laporan	85,365,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Laporan	85,365,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Laporan	1,751,467,840	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Laporan	1,751,467,840
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan		12 Bulan	**4,222,663,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan		12 Bulan	**4,222,663,000**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD Perubahan			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda	10 Unit	189,387,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda	10 Unit	189,387,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda	8 Unit	4,033,276,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda	8 Unit	4,033,276,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		85 %	**5,608,762,900**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Presentase Kebudayaan yang dikembangkan**		88 %	**5,608,762,900**
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		60 %	**2,000,000,000**	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		60 %	**2,000,000,000**
	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi. Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Kota Samarinda	40 Objek	2,000,000,000	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi. Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Kota Samarinda	40 Objek	2,000,000,000
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	**Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan**		70 %	**3,608,762,900**	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	**Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan**		70 %	**3,608,762,900**
	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan. Pengembangan dan Pemanfaatan	Kota Samarinda	12 Objek	3,608,762,900	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan. Pengembangan dan Pemanfaatan	Kota Samarinda	12 Objek	3,608,762,900
	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan				**59,142,444,108**	**UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan**				**55,231,844,108**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				**59,142,444,108**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**55,231,844,108**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		100 %	**54,260,622,908**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		100 %	**51,032,502,908**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai		12 Bulan	**165,840,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai		12 Bulan	**165,840,000**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Kab/Kota	12 Dokumen	165,840,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Kab/Kota	12 Dokumen	165,840,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai		12 Bulan	**77,754,600**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai		12 Bulan	**77,754,600**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10 Kab/Kota	30 Paket	77,754,600	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10 Kab/Kota	30 Paket	77,754,600
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**32,821,191,648**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**29,592,123,648**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD Perubahan			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda.	4 Paket	16,972,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda.	4 Paket	16,972,500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota	8 Paket	29,596,858,097	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota	8 Paket	26,367,790,097
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Kab/Kota	130 Paket	122,621,851	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Kab/Kota	130 Paket	122,621,851
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Samarinda.	1 Dokumen	1,939,200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Samarinda.	1 Dokumen	1,939,200
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kab/Kota	1 Laporan	3,082,800,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kab/Kota.	1 Laporan	3,082,800,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		12 Bulan	**267,626,500**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		12 Bulan	**267,626,500**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda.	2 Unit	267,626,500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda.	2 Unit	267,626,500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**20,655,338,160**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**20,656,286,160**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Kab/Kota	12 Laporan	10,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Kab/Kota	12 Laporan	10,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda.	12 Laporan	19,810,107,600	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda.	12 Laporan	19,811,055,600
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda.	12 Laporan	835,230,560	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda.	12 Laporan	835,230,560
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan		12 Bulan	**272,872,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan		12 Bulan	**272,872,000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda.	10 Unit	57,252,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda.	10 Unit	57,252,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda.	10 Unit	27,600,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda.	10 Unit	27,600,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kota Samarinda.	2 Unit	188,020,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda.	2 Unit	188,020,000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK		85 %	**4,881,821,200**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK		85 %	**4,199,341,200**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD Perubahan			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %	**3,751,066,000**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %	**3,068,586,000**
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Kab/Kota	1000 Orang	3,751,066,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Kab/Kota	1000 Orang	3,068,586,000
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa		80 %	**1,130,755,200**	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa		80 %	**1,130,755,200**
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	10 Kab/Kota	239 Satuan Pendidikan	1,130,755,200	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	10 Kab/Kota	239 Satuan Pendidikan	1,130,755,200
	UPTD Museum Negeri Mulawarman				**10,659,042,060**	**UPTD Museum Negeri Mulawarman**				**11,171,875,388**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				**10,659,042,060**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**11,171,875,388**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan**		100 %	**10,659,042,060**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan**		100 %	**11,171,875,388**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai		12 Bulan	**218,280,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai		12 Bulan	**218,280,000**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Kartanegara.	12 Dokumen	218,280,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Kartanegara.	12 Dokumen	218,280,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai**		12 Bulan	**14,140,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai**		12 Bulan	**14,140,000**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Kartanegara.	100 Paket	14,140,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Kartanegara.	100 Paket	14,140,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai**		12 Bulan	**1,251,977,200**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai**		12 Bulan	**1,251,977,200**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	4 Paket	64,827,200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	4 Paket	64,827,200
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	7 Paket	69,950,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	7 Paket	69,950,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	90 Paket	15,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	90 Paket	15,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara.	1 Laporan	1,102,200,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara.	1 Laporan	1,102,200,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai**		12 Bulan	**5,778,676,860**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai**		12 Bulan	**6,291,510,188**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD Perubahan			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara.	12 Laporan	10,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara.	12 Laporan	10,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	12 Laporan	708,641,500	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	12 Laporan	708,641,500
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	12 Laporan	3,771,617,520	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	12 Laporan	4,284,450,848
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	12 Laporan	1,288,417,840	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	12 Laporan	1,288,417,840
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan**		12 Bulan	**3,395,968,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan**		12 Bulan	**3,395,968,000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara.	10 Unit	171,850,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara.	10 Unit	171,850,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara.	1 Unit	3,224,118,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara.	1 Unit	3,224,118,000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	**Persentase Pengelolaan Permuseuman**		45 %	**2,128,000,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Persentase Pengelolaan Permuseuman		65 %	**2,173,527,000**
	Pengelolaan Museum Provinsi	**Meningkatnya Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman**		12 Bulan	**2,128,000,000**	**Pengelolaan Museum Provinsi**	Meningkatnya Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman		12 Bulan	**2,173,527,000**
	Pelindungan. Pengembangan. dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	Kab. Kutai Kartanegara.	40 Unit	552,564,000	Pelindungan. Pengembangan. dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan. Pengembangan. dan Pemanfataan	Kab. Kutai Kartanegara.	40 Unit	552,564,000
	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Kab. Kutai Kartanegara.	50 Orang	328,000,000	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Kab. Kutai Kartanegara.	50 Orang	373,527,000
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Kab. Kutai Kartanegara.	5 Unit	987,436,000	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Kab. Kutai Kartanegara.	5 Unit	987,436,000
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Kab. Kutai Kartanegara.	2 Unit	260,000,000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Kab. Kutai Kartanegara.	2 Unit	260,000,000
	SMAN Khusus Olahragawan				**38,696,268,845**	**SMAN Khusus Olahragawan**				**37,210,985,522**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan**		**100%**	**38,696,268,845**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan**		**100%**	**37,210,985,522**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	38,696,268,845	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	37,210,985,522

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD Perubahan			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	38,696,268,845	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	37,210,985,522
	SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda				**3,535,231,400**	**SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda**				**3,535,231,400**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan**		**100%**	**3,535,231,400**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan**		**100%**	**3,535,231,400**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**3,535,231,400**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**3,535,231,400**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	3,535,231,400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	3,535,231,400
	SMK-SPP Negeri Samarinda				**9,562,832,712**	**SMK-SPP Negeri Samarinda**				**9,062,570,710**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		100%	**9,562,832,712**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		100%	**9,062,570,710**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**9,562,832,712**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**9,062,570,710**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	9,562,832,712	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	9,062,570,710
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK		85 %		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK		85 %	
	PAGU DANA BOS	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	10 Kab/Kota	244 Satuan Pendidikan	215.165.894.228,00	PAGU DANA BOS	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	10 Kab/Kota	244 Satuan Pendidikan	215.165.894.228,00
	PAGU DANA BOSDA	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	10 Kab/Kota	244 Satuan Pendidikan	139.791.243.000,00	PAGU DANA BOSDA	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	10 Kab/Kota	244 Satuan Pendidikan	139.791.243.000,00

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah yang dilaksanakan antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota telah menghasilkan beberapa kesepakatan tentang rencana pembangunan bidang Pendidikan pada Tahun 2017.

Diantara kesepakatan itu adalah disiapkannya dana sharing untuk beberapa program dan kegiatan antara lain program beasiswa miskin, pembangunan unit ruang kelas baru serta program rehabilitasi ruang kelas yang rusak dari tingkat Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Dalam perkembangan Musrenbangda selain kesepakatan yang telah dituangkan dalam bentuk matrik dan telah ditandatangani oleh pihak yang terkait, masih ada usulan program dan kegiatan dari elemen masyarakat yang perlu mendapat perhatian. Adapun jenis usulan dari luar musrenbangda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10

USULAN PROPOSAL DARI MASYARAKAT

NO	KAB./KOTA	SEKOLAH	JENIS PROPOSAL	NILAI
1	Kutai Kartanegara	SLB Mutmainnah Pratiwi	Pembuatan Ruang RKB	220.667.000,00
2	Samarinda	SLB Untung Tuah Samarinda	permohonan Bantuan Ruang Kelas Baru	2.356.139.000,00
3	Samarinda	SLB Untung Tuah Samarinda	Permohonan Bantuan Meja dan Kursi Belajar	16.000.000,00
4	Samarinda	SLB Untung Tuah Samarinda	Permohonan Bantuan Rehabilitasi Toilet	9.650.000,00
5	Berau	SMAN 10 Berau	Permohonan Bantuan Pagar Sekolah	783.400.000,00
6	Kutai Kartanegara	SMKN 2 Sebulu	Permohonan Ruang Kelas Baru & Rehabilitasi Gedung SMKN 2 Sebulu	3.946.065.444,00

NO	KAB./KOTA	SEKOLAH	JENIS PROPOSAL	NILAI
7	Kutai Kartanegara	SMKN 1 Muara Jawa	Permohonan Bantuan Pembangunan Ruang Kegiatan Belajar	541.798.200,00
8	Kutai Kartanegara	SMK Tunas Etam	permohonan bantuan pembangunan perpustakaan	498.413.000,00
9	Kutai Barat	SMAN 2 Linggang Bigung	Permohonan bantuan pembangunan gedung kepsek, guru,TU	304.405.000,00
10	Balikpapan	SMA AL Hassan Balikpapan	permohonan Pengadaan peralatan PJOK	30.000.000,00
11	Penajam Paser Utara	SMAN 6 Penajam Paser Utara	Permohonan Bantuan Ruang Laboraturium Komputer	338.455.000,00
12	Penajam Paser Utara	SMAN 6 Penajam Paser Utara	Permohonan Bantuan Laboraturium Kimia	542.758.000,00
13	Penajam Paser Utara	SMAN 6 Penajam Paser Utara	Permohonan Bantuan Pengadaan Peralatan TIK	210.000.000,00
14	Penajam Paser Utara	SMAN 6 Penajam Paser Utara	Permohonan Bantuan Pengadaan Peralatan Laboraturium IPA	130.000.000,00
15	Penajam Paser Utara	SMAN 6 Penajam Paser Utara	Permohonan Bantuan Pengadaan Media Pendidikan	270.000.000,00
16	Penajam Paser Utara	SMAN 6 Penajam Paser Utara	Rehabilitasi Ruang Kelas	507.681.000,00
17	Penajam Paser Utara	SMAN 6 Penajam Paser Utara	Rehabilitasi Toilet Guru	262.874.000,00
18	Penajam Paser Utara	SMAN 6 Penajam Paser Utara	Rehabilitasi Laboraturium Biologi	271.379.000,00
19	Penajam Paser Utara	SMAN 6 Penajam Paser Utara	Rehabilitasi Ruang Ibadah (mushola)	38.700.000,00
20	Bontang	SMK PUTRA BANGSA BONTANG	Permohonan Bantuan Ruang Kelas Baru (RKB)	3.005.704.000,00
21	Samarinda	SMKN 18 Samarinda	permohonan pembangunan fisik	3.374.098.000,00
22	Samarinda	SMAN 6 Samarinda	permohonan bantuan dana pembangunan musholla	1.438.867.000,00
23	Samarinda	SMAN 6 Samarinda	permohonan pembangunan lamin	1.577.950.000,00
24	Samarinda	SMAN 6 Samarinda	permohonan rehabilitasi kantor	3.518.640.000,00

NO	KAB./KOTA	SEKOLAH	JENIS PROPOSAL	NILAI
25	Samarinda	SMAN 1 Samarinda	permohonan pembangunan dan pengadaan pagar	200.000.000,00
26	Kutai Kartanegara	SMAN 3 Marangkayu	Permohonan Bantuan pembuatan pagar depan	157.100.000,00
27	Kutai Timur	SMAN 1 Kaubun	Permohonan Pembangunan Pagar Sekolah dan Pos Scurity	0
28	Penajam Paser Utara	SMKN 1 PPU	Permohonan Bantuan Revitalisasi Pendidikan SMK Rujukan dan Sebagai Calon Ibu Kota Negara (IKN)	0
29	Samarinda	SMKN 18 Samarinda	Permohonan Rehabilitasi	0
30	Kutai Kartanegara	SMAN 1 Tenggarong	Permohonan Satu unit bus pelajar	0

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional di Bidang Pendidikan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapan tujuan strategis yang telah tercantum dalam Rencana Strategis kementerian Pendidikan Nasional 2019 – 2023.

Tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional merupakan salah satu acuan pemerintah Daerah dalam menetapkan arah kebijakan di bidang pendidikan, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam (Renja-P) PD khususnya pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Hal itu penting agar Rencana Kerja Perubahan Dinas pendidikan tidak bertentangan dan sejalan dengan arah tujuan Kebijakan Nasional di Bidang pendidikan, sehingga program Nasional akan sejalan dengan program di Daerah.

Adapun Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan.
2. Peningkatan akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan pendidikan anak berkebutuhan khusus.
3. Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter.
4. Peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan.
5. Peningkatan system tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.
6. Pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran (Renja-P) PD

Sesuai dengan Visi dan Misi Renstra PD Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim tersebut di atas, maka Tujuan dan sasaran PD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai berikut:

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Kab/Kota	50 Dokumen	214,075,000	50 Dokumen	550,000,000
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Kab/Kota	12 Laporan	7,742,654,000	12 Laporan	3,081,209,670
1.01.01.1.03	**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	Tersedianya Laporan Data Aset		12 Bulan	**1,661,248,390**	12 Bulan	**640,198,240**
1.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Kab/Kota	12 Laporan	1,661,248,390	12 Laporan	640,198,240
1.01.01.1.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai		12 Bulan	**11,459,181,700**	12 Bulan	**9,620,018,298**
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Kab/Kota	50 Orang	6,223,531,700	50 Orang	3,827,449,923
1.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Kab/Kota	5000 Orang	5,235,650,000	5000 Orang	5,792,568,375
1.01.01.1.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**7,137,959,700**	12 Bulan	**3,790,939,282**
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Paket	99,970,500	12 Paket	226,982,796
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Paket	4,362,789,900	12 Paket	1,143,120,000
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Kab/Kota	500 Paket	689,551,200	500 Paket	566,333,286
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Paket	99,968,100	12 Paket	156,720,300
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kab/Kota	1 Laporan	1,885,680,000	1 Laporan	1,697,782,900
1.01.01.1.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		12 Bulan	**98,484,443,000**	12 Bulan	**18,449,020,535**
1.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Kab/Kota	75 Unit	72,600,177,000	75 Unit	7,078,079,745
1.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Kab/Kota	10 Paket	7,035,123,500	10 Paket	550,000,000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Kab/Kota	5 Unit	9,592,414,900	5 Unit	8,233,443,790
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Kab/Kota	2 Unit	9,256,727,600	2 Unit	2,587,497,000
1.01.01.1.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**219,185,619,500**	12 Bulan	**207,615,903,906**
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Kab/Kota	12 Laporan	34,972,400	12 Laporan	142,972,500
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Laporan	6,877,131,300	12 Laporan	3,241,347,413
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Laporan	452,032,600	12 Laporan	300,300,000
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Laporan	211,821,483,200	12 Laporan	203,931,283,993
1.01.01.1.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan		12 Bulan	**1,581,176,990**	12 Bulan	**3,403,132,893**
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Kab/Kota	75 Unit	785,826,800	75 Unit	824,996,040
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Kab/Kota	10 Unit	335,698,800	10 Unit	547,827,500
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Kab/Kota	2 Unit	309,673,890	2 Unit	1,865,317,300
1.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Kab/Kota	1 Unit	149,977,500	1 Unit	164,992,053
1.01.01.1.14	**FASILITASI KEPROTOKOLAN**	Tersedianya Fasilitas Dan Kordinasi Yang Baik Dalam Pelaksanaan Acara		100 %	**11,744,997,050**	100 %	**2,031,288,890**
1.01.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	10 Kab/Kota	12 Laporan	11,744,997,050	12 Laporan	2,031,288,890
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK**		**85%**	**2,121,286,644,382**	85 %	**1,885,540,715,914**
1.01.02.1.01	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS**	Laporan Kegiatan		30 Laporan	**1,095,833,147,965**	30 Laporan	**1,397,203,776,450**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kukar, Paser dan Samarinda	4 Unit	67,645,600,100	4 Unit	110,777,700,000
1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Kab/Kota	10 Ruang	18,871,241,908	10 Ruang	18,871,241,908
1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	10 Ruang	5,060,250,000	10 Ruang	5,060,250,000
1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	10 Ruang	7,168,605,000	10 Ruang	7,168,605,000
1.01.02.1.01.05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	Kukar,Kubar , Kutim, Paser, Bontang PPU dan Mahulu	19 Ruang	13,617,823,200	19 Ruang	5,672,708,800
1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	14 Ruang	9,500,724,000	14 Ruang	9,500,724,000
1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	6 Ruang	6,041,730,000	6 Ruang	17,573,859,600
1.01.02.1.01.08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	10 Sekolah	0	10 Sekolah	1,091,915,000
1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kukar, Kubar, Kutim,Paser, Bontang dan Mahulu	12 Ruang	5,124,584,000	12 Ruang	5,124,584,000
1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kukar, Kubardan Kutim	5 Sekolah	60,120,000	5 Sekolah	484,667,700
1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	4 Unit	4,579,700,000	4 Unit	2,903,464,000
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	46 Unit	33,435,343,820	46 Unit	33,435,343,820
1.01.02.1.01.17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah. Guru. Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah. Guru. Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Kukar, Kubar, Kutim,PPU dan Mahulu	6 Unit	2,526,072,000	6 Unit	971,542,000
1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Kab/Kota	9 Ruang	8,266,872,640	9 Ruang	16,970,091,600
1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Kab/Kota	1 Ruang	451,109,000	1 Ruang	2,727,077,100

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.02.1.01.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kukar, Kubar, Kutim dan Balikpapan	5 Sekolah	267,076,020	5 Sekolah	282,799,000
1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kukar, Kubar, Kutim dan Balikpapan	5 Sekolah	0	5 Sekolah	1,118,481,100
1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kukar dan Kubar	2 Sekolah	379,044,520	2 Sekolah	350,502,900
1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kukar, Kubar, Kutim dan Balikpapan	4 Sekolah	0	4 Sekolah	792,424,600
1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kukar, Kutim, Balikpapan dan Smarinda	1 Sekolah	236,709,000	1 Sekolah	857,374,100
1.01.02.1.01.30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Saamrinda	1 Sekolah	99,120,000	1 Sekolah	500,867,400
1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	15 Sekolah	25,068,195,590	15 Sekolah	25,068,195,590
1.01.02.1.01.34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	1 Unit	445,920,000	1 Unit	445,920,000
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Akan Disediakan	10 Kab/Kota	30 Paket	94,026,512,590	30 Paket	94,026,512,590
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10 Kab/Kota	76871 Peserta didik	524,239,056,187	76871 Peserta didik	705,072,500,352
1.01.02.1.01.46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10 Kab/Kota	23 Paket	77,377,642,590	23 Paket	146,450,671,090
1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	10 Kab/Kota	233 Satuan Pendidikan	18,102,257,000	233 Satuan Pendidikan	6,010,424,200
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Kab/Kota	4200 Peserta Didik	23,162,570,000	4200 Peserta Didik	8,411,375,000
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan. Pemberian Promosi.	10 Kab/Kota	1000 Orang	5,718,428,300	1000 Orang	11,000,000,000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Kab/Kota	25 Satuan Pendidikan	4,649,886,500	25 Satuan Pendidikan	1,325,500,000
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	10 Kab/Kota	229 Satuan Pendidikan	112,056,454,000	229 Satuan Pendidikan	112,056,454,000
1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	10 Kab/Kota	2000 Orang	27,654,500,000	2000 Orang	45,100,000,000
1.01.02.1.02	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**	Laporan Kegiatan		20 Laporan	**944,323,648,201**	20 Laporan	**352,814,748,889**
1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Paser, Balikpapam dan Mahulu	1 Sekolah	35,249,248,038	1 Sekolah	31,188,597,600
1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kukar,Kutim, Paser, Samarinda dan PPU	14 Sekolah	31,172,982,400	14 Sekolah	20,558,285,600
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	14 Sekolah	27,650,498,400	14 Sekolah	27,500,000,000
1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Berau, Kutim, Paser, Samarinda dan PPU	46 Ruang	28,598,103,900	46 Ruang	23,216,448,000
1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Berau dan Bontang	10 Ruang	2,040,676,000	10 Ruang	1,855,160,000
1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kubar dan Kutim	6 Ruang	3,534,933,400	6 Ruang	4
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	42 Ruang	76,607,485,400	42 Ruang	20,000,000,000
1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	5 Ruang	3,503,472,320	5 Ruang	13,200,000,000
1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Kukar, Kutim, Samarinda dan PPU	5 Ruang	0	5 Ruang	2,200,000,000
1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Berau, Paser, Balikpapan dan PPU	1 Ruang	1,653,400,360	1 Ruang	2,000,000,000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Kukar	1 Ruang	639,948,000	1 Ruang	1,100,000,000
1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Kubar, Kutim, PPU, Paser, Balikpapan dan Samarinda	9 Ruang	20,596,887,560	9 Ruang	1,100,000,000
1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Kab/Kota	30 Paket	96,387,311,150	30 Paket	11,500,000,000
1.01.02.1.02.33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Kab/Kota	120 Paket	481,995,479,798	120 Paket	66,000,000,000
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10 Kab/Kota	78.456 Peserta didik	1,154,976,000	78.456 Peserta didik	5,500,000,000
1.01.02.1.02.39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	10 Kab/Kota	221 Satuan Pendidikan	27,932,784,725	221 Satuan Pendidikan	11,000,000,000
1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	10 Kab/Kota	221 Satuan Pendidikan	299,994,500	221 Pendidikan	3,300,000,000
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Kab/Kota	1000 Peserta Didik	38,068,917,750	1000 Peserta Didik	8,250,000,000
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Kab/Kota	1200 Orang	7,140,405,500	1200 Orang	14,300,000,000
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Penerima Hibah Bosda SMK Swasta	10 Kab/Kota	221 Satuan Pendidikan	33,589,543,000	221 Satuan Pendidikan	41,746,257,685
1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	10 Kab/Kota	2200 Orang	26,506,600,000	2200 Oran g	47,300,000,000
1.01.02.1.03	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS**	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa		**80%**	**81,129,848,216**	80 %	**135,522,190,575**
1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	10 Kab/Kota	6 Ruang	6,411,094,800	6 Ruang	1,100,000,000
1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	4 Unit	13,749,468,548	4 Unit	5,265,971,250

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.02.1.03.10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	3 Unit	1,711,740,800	3 Unit	1,576,200,000
1.01.02.1.03.18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	5 Ruang	0	5 Ruang	2,411,310,000
1.01.02.1.03.19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	5 Ruang	0	5 Ruang	1,294,458,000
1.01.02.1.03.20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	10 Ruang	0	10 Ruang	199,815,000
1.01.02.1.03.21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	10 Ruang	0	10 Ruang	471,889,000
1.01.02.1.03.23	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	1 Unit	718,188,880	1 Unit	790,020,000
1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	4 Unit	13,407,120,568	4 Unit	5,990,369,000
1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Kab/Kota	10 Sekolah	6,950,000,000	10 Sekolah	5,000,000,000
1.01.02.1.03.40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Kab/Kota	5 Paket	22,535,130,000	5 Paket	1,543,439,000
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10 Kab/Kota	2498 Peserta Didik	0	2498 Peserta Didik	97,887,050,732
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah yang mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Kab/Kota	1200 Orang	7,411,792,200	1200 Orang	3,368,262,871
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Kab/Kota	200 Orang	1,103,423,000	200 Orang	3,300,000,000
1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	10 Kab/Kota	34 Satuan Pendidikan	1,914,970,500	34 Satuan Pendidikan	1,990,905,722
1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	10 Kab/Kota	300 Orang	5,216,918,920	300 Orang	3,332,500,000
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		86%	**12,475,546,500**	90 %	**7.168.500.240**
1.01.03.1.01	**PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH**	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal		86%	**8,221,560,000**	86 %	**3.611.960.000**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.03.1.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	10 Kab/Kota	1 Dokumen	1,937,960,000	1 Dokumen	2.200.000.000
1.01.03.1.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	10 Kab/Kota	70 Orang	6.283.600.000	70 Orang	1.411.960.000
		Jumlah Satuan Pendidikan Pelaksana IKM Mandiri		150 Satuan Pendidikan		0	
		Jumlah Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Dual Track		20 Satuan Pendidikan		0	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal		120 Satuan Pendidikan		0	
1.01.03.1.02	**PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KHUSUS**	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal		86%	**4,253,986,500**	86 %	**3.556.540.240**
1.01.03.1.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Meningkatnya Kompetensi Guru Pendidikan Khusus Dalam Memberikan Pelayanan Pendidikan Khusus Kepada Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus (Abk)	10 Kab/Kota	378 GURU	3,203,509,000	378 GURU	2.398.808.940
1.01.03.1.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Meningkatnya Kompetensi Guru Slb/Skh Dan Sma/Smk Penyelenggara Pendidikan Inklusi Dalam Memberikan Layanan Pendidikan Khusus Di Provinsi Kalimantan Timur	10 Kab/Kota	54 GURU	1,050,477,500	54 GURU	1.157.731.300
		Meningkatnya Kompetensi Kepala Sekolah Slb/Skh Dan Sma/Smk Penyelenggara Pendidikan Inklusi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Khusus Di Provinsi Kalimantan Timur		54 GURU		54 GURU	
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA**	**Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana**		100%	**11,596,846,500**	100 %	**1.100.000.000**
1.01.04.01	**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi**	Presentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana		100%	**11,596,846,500**	100 %	**1.100.000.000**
1.01.04.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	10 Kab/Kota	10 Dokumen	11,596,846,500	10 Laporan	1.100.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**11,484,887,100**		**11.982.723.500**
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan		88 %	**2,657,703,400**	88 %	**2.445.723.500**
2.22.02.1.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Kesenian trasional yang dilestarikan		60 %	**2,000,852,400**	60 %	**1.100.000.000**
2.22.02.1.01.01	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	10 Kab/Kota	10 Dokumen	2,000,852,400	10 Dokumen	1.100.000.000
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan		5 Objek		5 Objek	
		Jumlah Siswa/Guru/Masyarakat yang mengikuti Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		280 Orang		280 Orang	
2.22.02.1.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian trasional		70 %	**656,851,000**	70 %	**1.345.723.500**
2.22.02.1.02.03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan.	10 Kab/Kota	10 orang	656,851,000	10 orang	1.345.723.500
02.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan		70 %	**4,211,533,700**	70 %	**4.180.000.000**
2.22.03.1.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian trasional		70 %	**4,211,533,700**	70 %	**4.180.000.000**
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	10 Kab/Kota	500 Orang	1,834,986,800	500 Orang	1.760.000.000
2.22.03.1.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	10 Kab/Kota	100 Sertifikat	0	100 Sertifikat	1.100.000.000
2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga Kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Kab/Kota	35 Lembaga	2,376,546,900	35 Lembaga	1.320.000.000
02.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina		80 %	**768,490,600**	80 %	**1.430.000.000**
2.22.04.1.01	**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	Presentase jumlah sejarah lokal yang dibina		70 %	**768,490,600**	70 %	**1.430.000.000**
2.22.04.1.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Data/Dokumen yang dapat diakses masyarakat	10 Kab/Kota	20 Dokumen	768,490,600	20 Dokumen	1.430.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
02.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan		65 %	**3,042,209,600**	65 %	**3.267.000.000**
2.22.05.1.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola		70 %	**845,049,600**	70 %	**1.320.000.000**
2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Kab/Kota	5 Objek	845,049,600	5 Objek	1.320.000.000
2.22.05.1.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola		70 %	**2,197,160,000**	70 %	**1.947.000.000**
2.22.05.1.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya	10 Kab/Kota	140 Orang	1,082,010,000	140 Orang	1.320.000.000
2.22.05.1.02.04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya dan Permuseuman yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	10 Kab/Kota	150 Orang	1,115,150,000	150 Orang	627.000.000
02.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Persentase Pengelolaan Permuseuman		65 %	**804,949,800**	65 %	**660.000.000**
2.22.06.1.01	**Pengelolaan Museum Provinsi**	Persentase Pengelolaan Museum Provinsi		70 %	**804,949,800**	70 %	**660.000.000**
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	10 Kab/Kota	4 Museum	804,949,800	4 Museum	660.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0005	**Dinas Pendidikan Wilayah I**				**16,896,207,084**		**2.357.988.403**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**16,896,207,084**		**2.357.988.403**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		100%	**11,043,343,284**	100 %	**2,357,988,403**
1.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai		12 Bulan	**0**	12 Bulan	**0**
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Balikpapan.	0 Paket	0	0 Paket	0
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**981,100,000**	12 Bulan	**623,382,210**
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan	1 Laporan	981,100,000	1 Laporan	623,382,210
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		12 Bulan	**9,156,572,004**	12 Bulan	**940,500,000**
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Balikpapan.	34 Unit	9,156,572,004	34 Unit	940,500,000
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**746,283,280**	12 Bulan	**741,856,924**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Balikpapan.	12 Laporan	88,665,600	12 Laporan	168,782,900
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan	12 Laporan	657,617,680	12 Laporan	573,074,024
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan		12 Bulan	**159,388,000**	12 Bulan	**52,249,269**
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Balikpapan	10 Unit	159,388,000	10 Unit	52,249,269
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APM		85 %	**5,852,863,800**	85 %	**0**
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		100 %	**2,764,098,200**	100 %	**0**
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kota Balikpapan	190 Peserta Didik	913,900,200	190 Peserta Didik	0
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kota Balikpapan	200 Orang	1,850,198,000	200 Orang	0
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		100 %	**2,947,595,200**	100 %	**0**
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kota Balikpapan	250 Peserta Didik	1,097,397,200	250 Peserta Didik	0
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kota Balikpapan	200 Orang	1,850,198,000	200 Orang	0
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa		100 %	**141,170,400**	100 %	**0**
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kota Balikpapan	20 Peserta Didik	141,170,400	20 Peserta Didik	0
1.01.2.22.0.00.01.0006	**Dinas Pendidikan Wilayah II**				**6,949,218,000**		**5,971,618,600**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**6,949,218,000**		**5,971,618,600**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		100 %	**2,079,536,400**	100 %	**651,618,600**
1.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai		12 Bulan	**79,290,000**	12 Bulan	**88,000,000**
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kutim dan Bontang	30 Paket	79,290,000	30 Paket	88,000,000
1.01.01.1.07	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		12 Bulan	**92,059,300**	12 Bulan	**184,118,600**
1.01.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kutim dan Bontang	1 set	92,059,300	1 set	184,118,600
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**1,908,187,100**	12 Bulan	**379,500,000**
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kutim dan Bontang	12 Laporan	93,658,400	12 Laporan	137,500,000
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kutim dan Bontang	12 Laporan	1,814,528,700	12 Laporan	242,000,000
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APM		85 %	**4,869,681,600**	85 %	**5,320,000,000**
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		100 %	**2,336,027,300**	100 %	**2,500,000,000**
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kutim dan Bontang	150 Peserta Didik	1,541,496,100	150 Peserta Didik	1,500,000,000
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kutim dan Bontang	25 Orang	794,531,200	25 Orang	1,000,000,000
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %	**1,987,496,200**	100 %	**2,470,000,000**
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kutim dan Bontang	50 Peserta Didik	1,187,496,200	50 Peserta Didik	1,150,000,000
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kutim dan Bontang	150 Orang	800,000,000	150 Orang	1,320,000,000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa		80 %	**546,158,100**	80 %	**350,000,000**
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kutim dan Bontang	50 Peserta Didik	546,158,100	50 Peserta Didik	200,000,000
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kutim dan Bontang	0 Orang	0	0 Orang	150,000,000
1.01.2.22.0.00.01.0006	**Dinas Pendidikan Wilayah III**				**8,718,898,432**		**3.956.816.600**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**8,718,898,432**		**3.956.816.600**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan**		100 %	**2,569,407,032**	100 %	**2.777.616.600**
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai**		12 Bulan	**86,640,000**	12 Bulan	**110.000.000**
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Kartanegara.	12 Dokumen	86,640,000	12 Dokumen	110.000.000
1.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai**		12 Bulan	**75,336,000**	12 Bulan	**88.000.000**
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Kartanegara.	30 Paket	75,336,000	30 Paket	88.000.000
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai**		12 Bulan	**819,060,700**	12 Bulan	**913.000.000**
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	30 Paket	21,060,700	30 Paket	33.000.000
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara.	1 Laporan	798,000,000	1 Laporan	880.000.000
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai**		12 Bulan	**1,425,732,532**	12 Bulan	**1.452.116.600**
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	12 Laporan	82,812,000	12 Laporan	88.000.000
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	12 Laporan	630,356,032	12 Laporan	701.800.000
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	12 Laporan	712,564,500	12 Laporan	662.316.600

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan**		12 Bulan	**162,637,800**	12 Bulan	**214.500.000**
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara.	10 Unit	86,395,000	10 Unit	104.500.000
1.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara.	1 Unit	76,242,800	1 Unit	110.000.000
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK**		85 %	**6,149,491,400**	85 %	**1.179.200.000**
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan**		100 %	**2,794,690,700**	100 %	**440.000.000**
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai	250 Peserta Didik	1,584,209,400	400 Peserta Didik	275.000.000
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Kartanegara.	100 Orang	1,210,481,300	180 Orang	165.000.000
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan**		100 %	**3,039,558,500**	100 %	**660.000.000**
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Kartanegara.	250 Peserta Didik	1,600,039,000	250 Peserta Didik	275.000.000
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Kartanegara.	100 Orang	699,972,000	100 Orang	165.000.000
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Kutai Kartanegara.	15 Satuan Pendidikan	739,547,500	25 Satuan Pendidikan	220.000.000
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa**		80 %	**315,242,200**	80 %	**79.200.000**
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Kartanegara	100 Peserta Didik	315,242,200	150 Peserta Didik	79.200.000
1.01.2.22.0.00.01.0008	**Dinas Pendidikan Wilayah IV**				**12,328,992,616**		**9,739,043,505**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**12,328,992,616**		**9,739,043,505**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan**		100 %	**8,154,079,716**	100 %	**8,235,791,563**
1.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai**		12 Bulan	**45,892,500**	12 Bulan	**37,237,200**
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Barat.	14 Paket	45,892,500	14 Paket	37,237,200
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai**		12 Bulan	**1,406,069,100**	12 Bulan	**868,147,520**
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kutai Barat.	25 Paket	8,257,100	25 Paket	27,500,020
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Barat.	1 Laporan	1,397,812,000	1 Laporan	840,647,500
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor**		12 Bulan	**5,874,111,800**	12 Bulan	**6,559,004,000**
1.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Barat.	1 Unit	170,192,200	1 Unit	59,004,000
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Barat.	1 Unit	5,703,919,600	1 Unit	6,500,000,000
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai**		12 Bulan	**734,611,216**	12 Bulan	**745,530,843**
1.01.01.1.08.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Diadministrasikan	Kab. Kutai Barat.	12 Laporan	3,609,900	12 Laporan	11,000,000
1.01.01.1.08.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Penyedia Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Barat.	12 Laporan	21,353,600	12 Laporan	81,626,160
1.01.01.1.08.3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Barat.	12 Laporan	44,949,876	12 Laporan	38,396,732
1.01.01.1.08.4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Pegawai	Kab. Kutai Barat.	12 Laporan	664,697,840	12 Laporan	614,507,951
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan**		12 Bulan	**93,395,100**	12 Bulan	**25,872,000**
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Barat.	10 Unit	93,395,100	10 Unit	4,752,000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Barat.	1 Unit	0	1 Unit	21,120,000
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK**		85 %	**4,174,912,900**	85 %	**1,503,251,942**
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan**		100 %	**2,962,536,600**	100 %	**756,180,858**
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Barat.	50 Peserta Didik	1,383,709,600	50 Peserta Didik	536,180,858
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Barat.	100 Orang	1,578,827,000	100 Orang	220,000,000
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan**		100 %	**1,212,376,300**	100 %	**747,071,084**
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Barat.	50 Peserta Didik	513,500,300	50 Peserta Didik	527,071,084
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Barat.	100 Orang	698,876,000	100 Orang	220,000,000
1.01.2.22.0.00.01.0009	**Dinas Pendidikan Wilayah V**				**5,022,949,720**		**5,023,500,000**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**5,022,949,720**		**5,023,500,000**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan**		100 %	**1,655,457,420**	100 %	**2,898,500,000**
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai**		12 Bulan	**60,720,000**	12 Bulan	**110,000,000**
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Paser	12 Dokumen	60,720,000	12 Dokumen	110,000,000
1.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai**		12 Bulan	**59,094,000**	12 Bulan	**297,000,000**
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Paser	50 Paket	59,094,000	50 Paket	77,000,000
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Paser	50 Orang	0	50 Orang	220,000,000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai**		12 Bulan	**852,840,000**	12 Bulan	**1,138,500,000**
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Paser	35 Paket	0	35 Paket	38,500,000
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	1 Laporan	852,840,000	1 Laporan	1,100,000,000
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor**		12 Bulan	**53,749,800**	12 Bulan	**550,000,000**
1.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kab. Paser	2 Unit	53,749,800	2 Unit	550,000,000
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai**		12 Bulan	**536,211,620**	12 Bulan	**638,000,000**
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser	12 Laporan	0	12 Laporan	44,000,000
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Paser	12 Laporan	39,122,600	12 Laporan	77,000,000
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	12 Laporan	65,802,300	12 Laporan	22,000,000
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	12 Laporan	431,286,720	12 Laporan	495,000,000
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan**		12 Bulan	**92,842,000**	12 Bulan	**165,000,000**
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Paser	10 Unit	92,842,000	10 Unit	165,000,000
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK**		85 %	**3,367,492,300**	85 %	**2,125,000,000**
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan**		100 %	**1,670,053,200**	100 %	**1,075,000,000**
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Paser	200 Peserta Didik	478,464,000	200 Peserta Didik	525,000,000
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Paser	100 Orang	991,589,200	100 Orang	330,000,000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Paser	12 Satuan Pendidikan	200,000,000	12 Satuan Pendidikan	220,000,000
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan**		100 %	**1,697,439,100**	100 %	**1,050,000,000**
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Paser	200 Peserta Didik	497,682,700	200 Peserta Didik	500,000,000
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Paser	100 Orang	999,756,400	100 Orang	330,000,000
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Paser	12 Satuan Pendidikan	200,000,000	12 Satuan Pendidikan	220,000,000
1.01.2.22.0.00.01.0010	**Dinas Pendidikan Wilayah VI**				**10,436,366,304**		**12,609,812,944**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**10,436,366,304**		**12,609,812,944**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		100 %	**7,496,366,304**	100 %	**9,208,843,944**
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai		12 Bulan	**101,861,200**	12 Bulan	**220,000,000**
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Berau	12 Dokumen	101,861,200	12 Dokumen	220,000,000
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**1,591,482,000**	12 Bulan	**1,617,058,112**
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Berau	2 Paket	3,506,300	2 Paket	16,302,000
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Berau	18 Paket	7,455,700	18 Paket	20,236,112
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Berau	1 Laporan	1,580,520,000	1 Laporan	1,580,520,000
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		12 Bulan	**4,887,328,400**	12 Bulan	**6,500,000,000**
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Berau	3 Unit	4,887,328,400	3 Unit	6,500,000,000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**836,675,704**	12 Bulan	**758,804,332**
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Berau	12 Laporan	8,235,600	12 Laporan	8,235,600
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Berau	12 Laporan	423,307,304	12 Laporan	345,435,932
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Berau	12 Laporan	405,132,800	12 Laporan	405,132,800
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan		12 Bulan	**79,019,000**	12 Bulan	**112,981,500**
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Berau	7 Unit	79,019,000	7 Unit	79,019,000
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Berau	1 Unit	0	1 Unit	33,962,500
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK		85 %	**2,940,000,000**	85 %	**3,400,969,000**
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %	**2,940,000,000**	100 %	**3,400,969,000**
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Berau	34 Satuan Pendidikan	2,940,000,000	34 Satuan Pendidikan	3,400,969,000
1.01.2.22.0.00.01.0002	**UPTD Taman Budaya**				**15,459,812,142**		**4,872,920,000**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**15,459,812,142**		**4,872,920,000**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		100 %	**15,459,812,142**	100 %	**4,872,920,000**
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai		12 Bulan	**235,320,000**	12 Bulan	**240,000,000**
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	12 Dokumen	235,320,000	12 Dokumen	240,000,000
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai		12 Bulan	**1,463,605,000**	12 Bulan	**459,800,000**
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	3 Paket	38,490,000	3 Paket	60,500,000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	3 Paket	158,987,000	3 Paket	82,500,000
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda	8 Paket	8,000,000	8 Paket	8,800,000
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	1 Laporan	1,258,128,000	1 Laporan	308,000,000
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan		12 Bulan	**7,430,299,302**	12 Bulan	**1,200,000,000**
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	84 Unit	7,430,299,302	84 Unit	1,200,000,000
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**2,107,924,840**	12 Bulan	**1,396,120,000**
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda	12 Laporan	6,212,000	12 Laporan	6,820,000
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Laporan	264,880,000	12 Laporan	150,700,000
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Laporan	85,365,000	12 Laporan	94,600,000
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Laporan	1,751,467,840	12 Laporan	1,144,000,000
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan		12 Bulan	**4,222,663,000**	12 Bulan	**1,577,000,000**
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda	10 Unit	189,387,000	10 Unit	77,000,000
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda	8 Unit	4,033,276,000	8 Unit	1,500,000,000
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan**		88 %	**5,608,762,900**	88 %	**3,047,000,000**
2.22.02.1.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		60 %	**2,000,000,000**	60 %	**1,925,000,000**
2.22.02.1.01.01	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi. Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Kota Samarinda	40 Objek	2,000,000,000	40 Objek	1,925,000,000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
2.22.002.1.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	**Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan**		70 %	**3,608,762,900**	70 %	**1,122,000,000**
2.22.002.1.02.01	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan. Pengembangan dan Pemanfaatan	Kota Samarinda	12 Objek	3,608,762,900	12 Objek	1,122,000,000
1.01.2.22.0.00.01.0003	**UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan**				**55,231,844,108**		**58.854.636.257**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**55,231,844,108**		**58.854.636.257**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		100 %	**51,032,502,908**	100 %	**35,203,449,214**
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai		12 Bulan	**165,840,000**	12 Bulan	**225,495,600**
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Kab/Kota	12 Dokumen	165,840,000	12 Dokumen	225,495,600
1.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai		12 Bulan	**77,754,600**	12 Bulan	**116,841,230**
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10 Kab/Kota	30 Paket	77,754,600	30 Paket	116,841,230
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**29,592,123,648**	12 Bulan	**13,173,715,461**
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda.	4 Paket	16,972,500	4 Paket	18,149,954
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota	8 Paket	26,367,790,097	8 Paket	11,327,379,257
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Kab/Kota	130 Paket	122,621,851	130 Paket	153,670,000
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Samarinda.	1 Dokumen	1,939,200	1 Dokumen	3,660,250
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kab/Kota.	1 Laporan	3,082,800,000	1 Laporan	1,670,856,000
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		12 Bulan	**267,626,500**	12 Bulan	**168,746,025**
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda.	2 Unit	267,626,500	2 Unit	168,746,025

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**20,656,286,160**	12 Bulan	**20,954,670,618**
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Kab/Kota	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	4,719,000
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda.	12 Laporan	19,811,055,600	12 Laporan	20,204,683,349
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda.	12 Laporan	835,230,560	12 Laporan	745,268,269
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan		12 Bulan	**272,872,000**	12 Bulan	**563,980,280**
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda.	10 Unit	57,252,000	10 Unit	79,101,600
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda.	10 Unit	27,600,000	10 Unit	30,247,800
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda.	2 Unit	188,020,000	2 Unit	454,630,880
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK		85 %	**4,199,341,200**	85 %	**23,651,187,043**
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %	**3,068,586,000**	100 %	**8,621,250,000**
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Kab/Kota	1000 Orang	3,068,586,000	1000 Orang	8,621,250,000
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa		80 %	**1,130,755,200**	80 %	**15,029,937,043**
1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	10 Kab/Kota	239 Satuan Pendidikan	1,130,755,200	239 Satuan Pendidikan	15,029,937,043
1.01.2.22.0.00.01.0004	**UPTD Museum Negeri Mulawarman**				**11,171,875,388**		**4.367.000.000**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**11,171,875,388**		**4.367.000.000**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan**		100 %	**11,171,875,388**	100 %	**4,367,000,000**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai		12 Bulan	**218,280,000**	12 Bulan	**385,000,000**
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Kartanegara.	12 Dokumen	218,280,000	12 Dokumen	385,000,000
1.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai**		12 Bulan	**14,140,000**	12 Bulan	**55,000,000**
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Kartanegara.	100 Paket	14,140,000	100 Paket	55,000,000
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai**		12 Bulan	**1,251,977,200**	12 Bulan	**726,000,000**
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	4 Paket	64,827,200	4 Paket	110,000,000
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	7 Paket	69,950,000	7 Paket	77,000,000
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	90 Paket	15,000,000	90 Paket	99,000,000
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara.	1 Laporan	1,102,200,000	1 Laporan	440,000,000
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai**		12 Bulan	**6,291,510,188**	12 Bulan	**2,816,000,000**
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara.	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	11,000,000
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	12 Laporan	708,641,500	12 Laporan	990,000,000
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	12 Laporan	4,284,450,848	12 Laporan	165,000,000
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara.	12 Laporan	1,288,417,840	12 Laporan	1,650,000,000
2.22.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan**		12 Bulan	**3,395,968,000**	12 Bulan	**385,000,000**
2.22.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara.	10 Unit	171,850,000	10 Unit	165,000,000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara.	1 Unit	3,224,118,000	1 Unit	220,000,000
02.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Persentase Pengelolaan Permuseuman		65 %	**2,173,527,000**	65 %	**3,732,520,000**
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Meningkatnya Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman		12 Bulan	**2,173,527,000**	12 Bulan	**3,732,520,000**
2.22.06.1.01.01	Pelindungan. Pengembangan. dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan. Pengembangan. dan Pemanfataan	Kab. Kutai Kartanegara.	40 Unit	552,564,000	40 Unit	525,756,000
2.22.06.1.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Kab. Kutai Kartanegara.	50 Orang	373,527,000	50 Orang	1,980,000,000
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Kab. Kutai Kartanegara.	5 Unit	987,436,000	5 Unit	876,260,000
2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Kab. Kutai Kartanegara.	2 Unit	260,000,000	2 Unit	350,504,000
01.00	**SMAN Khusus Olahragawan**				**15.999.999.626**		**16.000.000.000**
1.01.001	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan**		**100%**	**15.999.999.626**	**100%**	**16.000.000.000**
1.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**15.999.999.626**	12 Bulan	16.000.000.000
1.01.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	15.999.999.626	12 Laporan	16.000.000.000
01.00	**SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda**				**37,822,152,522**		**14,658,669,750**
1.01.001	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan**		**100%**	**37,210,985,522**	**100%**	**14,081,589,750**
1.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	Samarinda	**100%**	**37,210,985,522**	**100%**	**14,081,589,750**
1.01.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	**37,822,152,522**	12 laporan	14,081,589,750
01.00	**SMK-SPP Negeri Samarinda**				**9,750,401,308**		**9,721,960,710**
1.01.001	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		100%	**9,062,570,710**	100%	**9,062,570,710**
1.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	**9,062,570,710**	12 Bulan	**9,062,570,710**
1.01.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	9,062,570,710	12 Laporan	9,062,570,710

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.001	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK		85 %		85 %	
	PAGU DANA BOS	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	10 Kab/Kota	244 Satuan Pendidikan	215.165.894.228,00	244 Satuan Pendidikan	215.165.894.228,00
	PAGU DANA BOSDA	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	10 Kab/Kota	244 Satuan Pendidikan	139.791.243.000,00	244 Satuan Pendidikan	139.791.243.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN

4.1 Uraian Pertimbangan Rumusan Dan Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

- Pengelolaan Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan proses atau aktivitas Pendidikan di unit organisasi yang dikelola. Ketercapaian tujuan Pendidikan di setiap unit Pendidikan tidak terlepas dari kajian teori dan penerapan pengelolaan Pendidikan. Jika pengelolaan Pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik, sistematis, efektif dan efisien, maka seluruh komponen sumber daya yang ada dalam unit organisasi tersebut dapat digerakkan Bersama untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Tentu, keberhasilan di setiap unit organisasi Pendidikan ini akan berkontribusi pada pencapaian tujuan Pendidikan secara nasional. Pengelolaan Pendidikan itu merupakan salah satu Program Kegiatan Prioritas Disdikbud Provinsi Kaltim yang meliputi :

  A. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
  B. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
  C. Pengelolaan Pendidikan Khusus

  Didalam Program Pengelolaan Pendidikan ada salah satu Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang merupakan kegiatan yang salah satu sub kegiatanya adalah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang mencangkup salah satu Program Prioritas Gubernur yaitu Pengelolaan Beasiswa KALTIM TUNTAS yang setiap tahunnya mempunyai target 6500 penerima.
- Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum (*curriculum developer*) dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum, sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis, karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara kepada kurikulum. Begitu pentingnya kurikulum

sebagai sentra kegiatan pendidikan maka harus benar-benar dikembangkan. Pengembangan kurikulum dilakukan karena sifat kurikulum yang dinamis, selalu berubah, menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka yang belajar. Dalam Dinas Pendidikann Dan Kebudayaan Prov. Kaltim Memepunyai salah satu program yaitu program pengembangan kurikulum. Program ini merupakan salah satu Program Kegiatan Prioritas Disdikbud Provinsi Kaltim yang meliputi:

A. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah.
B. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus.

- Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.Yang termasuk kedalam tenaga kependidikan adalah
- Kepala Satuan Pendidikan yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut. Kepala Satuan Pendidikan harus mampu melaksanakan peran dan tugasnya sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, figur dan mediator (Emaslim-FM) Istilah lain untuk Kepala Satuan Pendidikan adalah:
  - Kepala Sekolah
- Pendidik atau di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya yaitu Guru.
- Orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, di antaranya Tata Usaha
- Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Seseorang bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaan di antara mereka, sehingga membuktikan bahwa budaya bisa dipelajari.

- Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Antropolog Melville J. Herskovits dan Bronisław Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah determinisme budaya.

4.2 Tabel Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan Rencana Kerja Perubahan Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 telah ditetapkan Program dan Kegiatan Pokok yang tertuang dalam Rencana Stategis 2019 – 2023. Adapun Program dan Kegiatan Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

Tabel 11

Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Kaltim Tahun 2023

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**3,741,470,819,516**
1.01.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100%	**1,435,059,750,329**
1.01.01.1.01	**PERENCANAAN. PENGANGGARAN. DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	Dokuman Perencanaan	100 %	**10,922,951,960**
1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	6,762,961,960
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	239 Dokumen	1,178,575,000
1.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	239 Dokumen	1,177,669,000
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	239 Dokumen	271,005,000

1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	239 Dokumen	452,237,000
1.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	239 Laporan	544,410,000
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	239 Laporan	536,094,000
1.01.01.1.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	**1,072,882,172,039**
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang / Bulan	1,060,946,842,039
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2,681,286,000
1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,297,315,000
1.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	50 Dokumen	214,075,000
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	7,742,654,000
1.01.01.1.03	**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	Tersedianya Laporan Data Aset	12 Bulan	**1,661,248,390**
1.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1,661,248,390
1.01.01.1.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	**11,459,181,700**
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	6,223,531,700
1.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5000 Orang	5,235,650,000
1.01.01.1.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	**7,137,959,700**
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	99,970,500
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4,362,789,900

1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	500 Paket	689,551,200
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	99,968,100
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,885,680,000
1.01.01.1.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	**98,484,443,000**
1.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	75 Unit	72,600,177,000
1.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	7,035,123,500
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	9,592,414,900
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	9,256,727,600
1.01.01.1.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	**219,185,619,500**
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	34,972,400
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6,877,131,300
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	452,032,600
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	211,821,483,200
1.01.01.1.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	**1,581,176,990**
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	75 Unit	785,826,800
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	335,698,800
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	309,673,890
1.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	149,977,500

1.01.01.1.14	**FASILITASI KEPROTOKOLAN**	Tersedianya Fasilitas Dan Kordinasi Yang Baik Dalam Pelaksanaan Acara	100 %	**11,744,997,050**
1.01.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Laporan	11,744,997,050
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK**	**85%**	**2,121,286,644,382**
1.01.02.1.01	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS**	Laporan Kegiatan	30 Laporan	**1,095,833,147,965**
1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	67,645,600,100
1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	18,871,241,908
1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang	5,060,250,000
1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	10 Ruang	7,168,605,000
1.01.02.1.01.05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	19 Ruang	13,617,823,200
1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	14 Ruang	9,500,724,000
1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	6 Ruang	6,041,730,000
1.01.02.1.01.08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun	10 Sekolah	0
1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	12 Ruang	5,124,584,000
1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Sekolah	60,120,000
1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	4,579,700,000
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	46 Unit	33,435,343,820
1.01.02.1.01.17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah. Guru. Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah. Guru. Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	2,526,072,000
1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	8,266,872,640
1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	451,109,000
1.01.02.1.01.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Sekolah	267,076,020
1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Sekolah	0
1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Sekolah	379,044,520

1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Sekolah	0
1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Sekolah	236,709,000
1.01.02.1.01.30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Sekolah	99,120,000
1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	15 Sekolah	25,068,195,590
1.01.02.1.01.34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	445,920,000
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Akan Disediakan	30 Paket	94,026,512,590
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	76871 Peserta didik	524,239,056,187
1.01.02.1.01.46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	23 Paket	77,377,642,590
1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	233 Satuan Pendidikan	18,102,257,000
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4200 Peserta Didik	23,162,570,000
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	5,718,428,300
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	25 Satuan Pendidikan	4,649,886,500
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	229 Satuan Pendidikan	112,056,454,000
1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	2000 Orang	27,654,500,000
1.01.02.1.02	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**	Laporan Kegiatan	20 Laporan	**944,323,648,201**
1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Sekolah	35,249,248,038
1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	14 Sekolah	31,172,982,400
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	14 Sekolah	27,650,498,400
1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	46 Ruang	28,598,103,900

1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	2,040,676,000
1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	3,534,933,400
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	42 Ruang	76,607,485,400
1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	3,503,472,320
1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	0
1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1,653,400,360
1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	639,948,000
1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	9 Ruang	20,596,887,560
1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	30 Paket	96,387,311,150
1.01.02.1.02.33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	120 Paket	481,995,479,798
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	78.456 Peserta didik	1,154,976,000
1.01.02.1.02.39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	221 Satuan Pendidikan	27,932,784,725
1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	221 Satuan Pendidikan	299,994,500
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	38,068,917,750
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1200 Orang	7,140,405,500
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Penerima Hibah Bosda SMK Swasta	221 Satuan Pendidikan	33,589,543,000
1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	2200 Orang	26,506,600,000
1.01.02.1.03	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS**	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	**80%**	**81,129,848,216**
1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	6 Ruang	6,411,094,800

1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	13,749,468,548
1.01.02.1.03.10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	1,711,740,800
1.01.02.1.03.18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	0
1.01.02.1.03.19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	0
1.01.02.1.03.20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	0
1.01.02.1.03.21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	0
1.01.02.1.03.23	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Unit	718,188,880
1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	4 Unit	13,407,120,568
1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Sekolah	6,950,000,000
1.01.02.1.03.40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	22,535,130,000
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2498 Peserta Didik	0
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah yang mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1200 Orang	7,411,792,200
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	1,103,423,000
1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	1,914,970,500
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	86%	**12,475,546,500**
1.01.03.1.01	**PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH**	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	86%	**8,221,560,000**
1.01.03.1.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	1,937,960,000
1.01.03.1.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	70 Orang	**2.181.203.500**

		Jumlah Satuan Pendidikan Pelaksana IKM Mandiri	150 Satuan Pendidikan	
		Jumlah Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Dual Track	20 Satuan Pendidikan	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	120 Satuan Pendidikan	
1.01.03.1.02	**PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KHUSUS**	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	86%	**4,253,986,500**
1.01.03.1.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Meningkatnya Kompetensi Guru Pendidikan Khusus Dalam Memberikan Pelayanan Pendidikan Khusus Kepada Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus (Abk)	378 GURU	3,203,509,000
1.01.03.1.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Meningkatnya Kompetensi Guru Slb/Skh Dan Sma/Smk Penyelenggara Pendidikan Inklusi Dalam Memberikan Layanan Pendidikan Khusus Di Provinsi Kalimantan Timur	54 GURU	1,050,477,500
		Meningkatnya Kompetensi Kepala Sekolah Slb/Skh Dan Sma/Smk Penyelenggara Pendidikan Inklusi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Khusus Di Provinsi Kalimantan Timur	54 GURU	
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA**	**Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana**	100%	**11,596,846,500**
1.01.04.01	**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi**	Presentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	100%	**11,596,846,500**
1.01.04.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	10 Dokumen	11,596,846,500
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**11,484,887,100**
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	88 %	**2,657,703,400**
2.22.02.1.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Kesenian trasional yang dilestarikan	60 %	**2,000,852,400**
2.22.02.1.01.01		Jumlah Dokumen yang dihasilkan	10 Dokumen	2,000,852,400

	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	5 Objek	
		Jumlah Siswa/Guru/Masyarakat yang mengikuti Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	280 Orang	
2.22.02.1.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian trasional	70 %	**656,851,000**
2.22.02.1.02.03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan.	10 orang	656,851,000
02.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	70 %	**4,211,533,700**
2.22.03.1.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian trasional	70 %	**4,211,533,700**
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	500 Orang	1,834,986,800
2.22.03.1.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	100 Sertifikat	0
2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga Kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	35 Lembaga	2,376,546,900
02.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	80 %	**768,490,600**
2.22.04.1.01	**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	Presentase jumlah sejarah lokal yang dibina	70 %	**768,490,600**
2.22.04.1.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Data/Dokumen yang dapat diakses masyarakat	20 Dokumen	768,490,600
02.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	65 %	**3,042,209,600**
2.22.05.1.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola	70 %	**845,049,600**
2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	845,049,600
2.22.05.1.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola	70 %	**2,197,160,000**
2.22.05.1.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya	140 Orang	1,082,010,000
2.22.05.1.02.04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya dan Permuseuman yang	150 Orang	1,115,150,000

		dibina dan ditingkatkan kapasitasnya		
02.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Persentase Pengelolaan Permuseuman	65 %	**804,949,800**
2.22.06.1.01	**Pengelolaan Museum Provinsi**	Persentase Pengelolaan Museum Provinsi	70 %	**804,949,800**
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	4 Museum	804,949,800
1.01.2.22.0.00.01.0005	**Dinas Pendidikan Wilayah I**			**16,896,207,084**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**16,896,207,084**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100%	**11,043,343,284**
1.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	**0**
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	**981,100,000**
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	981,100,000
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	**9,156,572,004**
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 Unit	9,156,572,004
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	**746,283,280**
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	88,665,600
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	657,617,680
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	**159,388,000**
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	159,388,000
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APM	85 %	**5,852,863,800**
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	**2,764,098,200**

1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	190 Peserta Didik	913,900,200
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	1,850,198,000
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	**2,947,595,200**
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	1,097,397,200
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	1,850,198,000
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	100 %	**141,170,400**
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	20 Peserta Didik	141,170,400
1.01.2.22.0.00.01.0006	**Dinas Pendidikan Wilayah II**			**6,949,218,000**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6,949,218,000**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	**2,079,536,400**
1.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	**79,290,000**
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	79,290,000
1.01.01.1.07	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	**92,059,300**
1.01.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 set	92,059,300
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	**1,908,187,100**
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	93,658,400
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,814,528,700
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APM	85 %	**4,869,681,600**

1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	**2,336,027,300**
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta Didik	1,541,496,100
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	25 Orang	794,531,200
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	**1,987,496,200**
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	1,187,496,200
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	800,000,000
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	**546,158,100**
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	546,158,100
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0
1.01.2.22.0.00.01.0006	**Dinas Pendidikan Wilayah III**			**8,718,898,432**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**8,718,898,432**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan**	100 %	**2,569,407,032**
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai**	12 Bulan	**86,640,000**
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	86,640,000
1.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai**	12 Bulan	**75,336,000**
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	75,336,000
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai**	12 Bulan	**819,060,700**

1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	21,060,700
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	798,000,000
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai**	12 Bulan	**1,425,732,532**
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	82,812,000
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	630,356,032
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	712,564,500
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan**	12 Bulan	**162,637,800**
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	86,395,000
1.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	76,242,800
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK**	85 %	**6,149,491,400**
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan**	100 %	**2,794,690,700**
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	1,584,209,400
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	1,210,481,300
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan**	100 %	**3,039,558,500**
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	1,600,039,000
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	699,972,000

1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	15 Satuan Pendidikan	739,547,500
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa**	80 %	**315,242,200**
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	315,242,200
1.01.2.22.0.00.01.0008	**Dinas Pendidikan Wilayah IV**			**12,328,992,616**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**12,328,992,616**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan**	100 %	**8,154,079,716**
1.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai**	12 Bulan	**45,892,500**
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	14 Paket	45,892,500
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai**	12 Bulan	**1,406,069,100**
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	8,257,100
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,397,812,000
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor**	12 Bulan	**5,874,111,800**
1.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	170,192,200
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5,703,919,600
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai**	12 Bulan	**734,611,216**
1.01.01.1.08.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Diadministrasikan	12 Laporan	3,609,900
1.01.01.1.08.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Penyedia Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	21,353,600
1.01.01.1.08.3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	44,949,876
1.01.01.1.08.4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Pegawai	12 Laporan	664,697,840
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan**	12 Bulan	**93,395,100**
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	10 Unit	93,395,100

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK**	85 %	**4,174,912,900**
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan**	100 %	**2,962,536,600**
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	1,383,709,600
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	1,578,827,000
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan**	100 %	**1,212,376,300**
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	513,500,300
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	698,876,000
1.01.2.22.0.00.01.0009	**Dinas Pendidikan Wilayah V**			**5,022,949,720**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**5,022,949,720**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan**	100 %	**1,655,457,420**
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai**	12 Bulan	**60,720,000**
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	60,720,000
1.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai**	12 Bulan	**59,094,000**
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	59,094,000
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	0
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai**	12 Bulan	**852,840,000**

1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket	0
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	852,840,000
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor**	12 Bulan	**53,749,800**
1.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	53,749,800
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai**	12 Bulan	**536,211,620**
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39,122,600
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	65,802,300
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	431,286,720
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan**	12 Bulan	**92,842,000**
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	92,842,000
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK**	85 %	**3,367,492,300**
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan**	100 %	**1,670,053,200**
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	478,464,000
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	991,589,200
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan	200,000,000
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan**	100 %	**1,697,439,100**
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	497,682,700

1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	999,756,400
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan	200,000,000
1.01.2.22.0.00.01.0010	**Dinas Pendidikan Wilayah VI**			**10,436,366,304**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**10,436,366,304**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	**7,496,366,304**
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	**101,861,200**
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	101,861,200
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	**1,591,482,000**
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3,506,300
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	7,455,700
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,580,520,000
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	**4,887,328,400**
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	4,887,328,400
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	**836,675,704**
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8,235,600
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	423,307,304
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	405,132,800
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	**79,019,000**

1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	79,019,000
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	**2,940,000,000**
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	**2,940,000,000**
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	34 Satuan Pendidikan	2,940,000,000
1.01.2.22.0.00.01.0002	**UPTD Taman Budaya**			**15,459,812,142**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**15,459,812,142**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	**15,459,812,142**
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	**235,320,000**
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	235,320,000
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	**1,463,605,000**
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	38,490,000
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	158,987,000
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8,000,000
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,258,128,000
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	**7,430,299,302**
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84 Unit	7,430,299,302
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	**2,107,924,840**
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6,212,000
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	264,880,000

1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	85,365,000
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,751,467,840
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	**4,222,663,000**
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	189,387,000
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	4,033,276,000
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan**	88 %	**5,608,762,900**
2.22.02.1.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	60 %	**2,000,000,000**
2.22.02.1.01.01	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi. Dikembangkan dan Dimanfaatkan	40 Objek	2,000,000,000
2.22.002.1.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	**Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan**	70 %	**3,608,762,900**
2.22.002.1.02.01	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan. Pengembangan dan Pemanfaatan	12 Objek	3,608,762,900
1.01.2.22.0.00.01.0003	**UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan**			**55,231,844,108**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**55,231,844,108**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	**51,032,502,908**
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	**165,840,000**
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	165,840,000
1.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	**77,754,600**
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	77,754,600
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	**29,592,123,648**

1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16,972,500
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	26,367,790,097
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	130 Paket	122,621,851
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,939,200
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3,082,800,000
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	**267,626,500**
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	267,626,500
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	**20,656,286,160**
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10,000,000
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19,811,055,600
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	835,230,560
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	**272,872,000**
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	57,252,000
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	27,600,000
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	188,020,000
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	**4,199,341,200**
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	**3,068,586,000**
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian	1000 Orang	3,068,586,000

		Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	**1,130,755,200**
1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	239 Satuan Pendidikan	1,130,755,200
1.01.2.22.0.00.01.0004	**UPTD Museum Negeri Mulawarman**			**11,171,875,388**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**11,171,875,388**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan**	100 %	**11,171,875,388**
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	**218,280,000**
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	218,280,000
1.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai**	12 Bulan	**14,140,000**
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	14,140,000
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai**	12 Bulan	**1,251,977,200**
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	64,827,200
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	69,950,000
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	90 Paket	15,000,000
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,102,200,000
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai**	12 Bulan	**6,291,510,188**
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10,000,000
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	708,641,500
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,284,450,848
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,288,417,840
2.22.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan**	12 Bulan	**3,395,968,000**

2.22.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	171,850,000
2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3,224,118,000
02.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Persentase Pengelolaan Permuseuman	65 %	**2,173,527,000**
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Meningkatnya Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman	12 Bulan	**2,173,527,000**
2.22.06.1.01.01	Pelindungan. Pengembangan. dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan. Pengembangan. dan Pemanfataan	40 Unit	552,564,000
2.22.06.1.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	50 Orang	373,527,000
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	5 Unit	987,436,000
2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	2 Unit	260,000,000
01.00	**SMAN Khusus Olahragawan**			**15.999.999.626**
1.01.001	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan**	**100%**	**15.999.999.626**
1.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	**15.999.999.626**
1.01.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.999.999.626
01.00	**SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda**			**37,822,152,522**
1.01.001	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan**	**100%**	**37,210,985,522**
1.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	**100%**	**37,210,985,522**
1.01.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	**37,822,152,522**
01.00	**SMK-SPP Negeri Samarinda**			**9,750,401,308**
1.01.001	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100%	**9,062,570,710**
1.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	**9,062,570,710**
1.01.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9,062,570,710
1.01.001	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	

	PAGU DANA BOS	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	244 Satuan Pendidikan	215.165.894.228,00
	PAGU DANA BOSDA	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	244 Satuan Pendidikan	139.791.243.000,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Perubahan ini memuat tujuan. sasaran. program dan kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai selama satu tahun anggaran dalam pelaksanaan pembangunan Pendidikan Kalimantan Timur Tahun 2023.

Renja disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini sekaligus juga merupakan rambu - rambu yang ditetapkan untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kerja Perubahan ini dapat menjadi referensi dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Samarinda, 18 Agustus 2023

Kepala,



Muhammad Kurniawan,S.E,.AK.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701028 199703 1 008

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Diterapkannya otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah membawa banyak perubahan sistem dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan di Provinsi. Prinsip dasar desentralisasi adalah setiap daerah memiliki kewenangan (administrative, keuangan dan bahkan politik) yang cukup besar untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan daerahnya. Desentralisasi merubah sistem yang semula sentralistik sehingga dengan desentralisasi diharapkan akan membawa perubahan peran pemerintah dalam sistem pelayanan kesehatan. Namun kewenangan pembangunan yang dapat dijalankan tersebut harus tetap sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pada konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada setiap daerah, untuk menyusun rencana pembangunan berjangka secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan.

Program-program pembangunan yang disusun secara keseluruhan dirangkum dalam satu bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja merupakan sebuah proses dalam mencapai tujuan pembangunan dalam kurun waktu jangka pendek (1 tahun). Rencana Kerja Dinas Kesehatan pada prinsipnya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksana sebagian tugas pemerintah daerah di bidang kesehatan telah menyusun suatu rencana strategis di bidang kesehatan sebagai kerangka perencanaan pembangunan daerah. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan Provinsi dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang disepakati bersama. Dengan demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mensinergikan perencanaan pembangunan kesehatan nasional dan daerah melalui program-program kesehatan dan merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan adanya perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, maka kebijakan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2021 digunakan sebagai rujukan utama perubahan dan dilanjutkan dengan analisis konsistensinya pada rumusan kebijakan dan prioritas pembangunan Tahun 2022 dan Tahun 2023 dengan memperhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sistem perencanaan pembangunan merupakan rangkaian dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, dimulai dari perencanaan pembangunan jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang sinergis antara nasional dan daerah. Oleh karena itu penyusunan dokumen Renja Tahun 2023 berpedoman pada :

A. Kebijakan tahapan RPJMD 2019-2023 tahun keempat, yaitu penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, serta

penyelarasan prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan kabupaten/Kota;

B. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yaitu penyelarasan prioritas pembangunan, program dan kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan, sasaran pengembangan wilayah dan program strategis nasional dalam RKP tahun 2023;

C. Selanjutnya RKPD tahun 2023 dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Adapun hubungan keterkaitan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.1. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri. Sistem ini dimulai dari tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Selanjutnya hasil perencanaan ini dijadikan sebagai acuan pada tahap penganggaran dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Gambar 1.1

Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

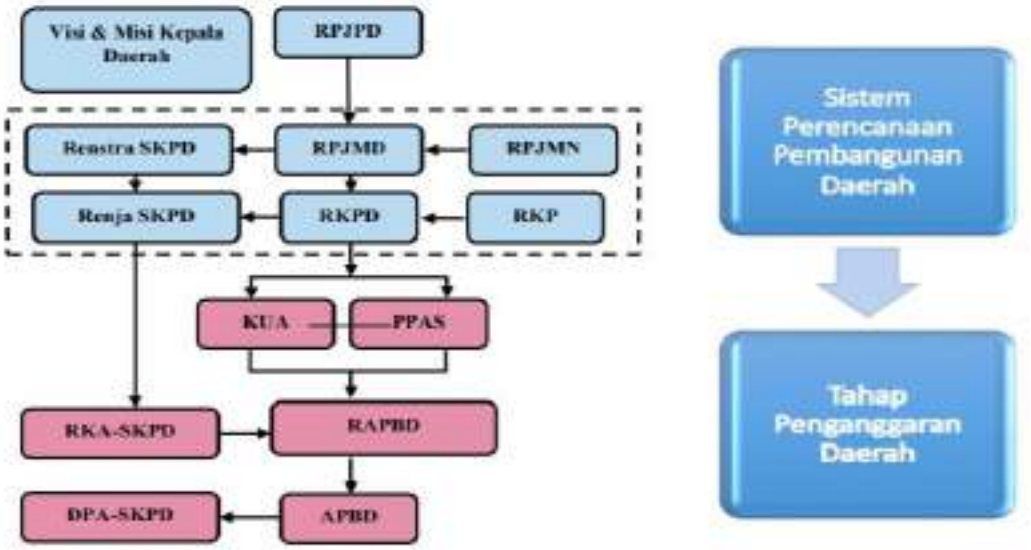

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan rancangan akhir rencana kerja pada tahun 2023 ini didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang ada agar mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi bisa sinkron dengan peraturan di tingkat Pusat maupun daerah. Adapun landasan hukum untuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan; Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten dan Kota.
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 55 tahun 2016 tentang Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 90 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) tahun 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

Maksudnya : sebagai kerangka acuan dalam penyusunan perencanaan dan menjalankan program dan kegiatan bidang kesehatan tahun 2023.

Tujuannya : untuk lebih terarah dan terukurnya kinerja program di sektor kesehatan sesuai target-target yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun kedepan yang disinkronkan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari V (lima) BAB, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistimatika Penulisan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Tahun Lalu dan

2.2 Capaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Uraian garis besar tentan pertimangan rumusan, dan dekapitulasi program, kegiatan, sub kegiatan, serta penejelasan pendanaan dan kesesuaian dengan RKPD.

4.2 Tabel rencana program, kegiatan, sub kegiatan dilengkapi dengan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

A. Catatan Penting

B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

C. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan pada Tahun 2023 tetap mengacu pada pencapaian indikator program kesehatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2019-2023 maupun dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Berdasarkan APBD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 050/1390/B.PPEPD-Bapp/2022, Dinas Kesehatan mendapatkan alokasi Belanja Sebesar Rp. 151.180.530.000 , untuk melaksanakan 5 Program yang dijabarkan dalam 15 Kegiatan dengan 53 Sub Kegiatan. Data selengkapnya mengenai perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Dinas Kesehatan yang mengacu pada target program/kegiatan Renja Dinas Kesehatan tahun 2023 disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**		**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**		**10=(5+7+9)**	**11=(10/4)**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	%	0	0	0	0	100	%	0	0

	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	0	0	0	0	100	%	0	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	0	0	0	0	10	Dokumen	0	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Laporan	0	0	0	0	8	Laporan	0	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	%	0	0	0	0	100	%	0	0
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194	Orang/ Bulan	0	0	0	0	194	Orang/ Bulan	0	0
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	0	0	0	0	12	Dokumen	0	0

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	0	0	0	0	1	Laporan	0	0
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	0	0	0	0	1	Laporan	0	0
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksnaan kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	100	%	0	0	0	0	100	%	0	0
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	0	0	0	0	1	Paket	0	0

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	Orang	0	0	0	0	50	Orang	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	0	0	0	0	100	%	0	0
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	0	0	0	0	1	Paket	0	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	0	0	0	0	5	Paket	0	0
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	0	0	0	0	12	Paket	0	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	0	0	0	0	12	Dokumen	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	0	0	0	0	12	Laporan	0	0

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	0	0	0			0	0
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	Unit	0	0	0	0	2	Unit	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	0	0	0	0	12	Bulan	0	0
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	0	0	0	0	12	Laporan	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	0	0	0	0	12	Laporan	0	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	0	0	0	0	12	Laporan	0	0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang dan Jasa Milik Daerah	1	Laporan	0	0	0	0	1	Laporan	0	0

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	0	0	0	0	25	Unit	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	0	0	0	0	1	Unit	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	0	0	0	0	1	Unit	0	0
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh Kab/Kota	100	%	0	0	0	0	100	%	0	0
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan. Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM	Persentase Pkm yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	68	%	0	0	0	0	68	%	0	0

	Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											
		Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	80	%	0	0	0	0	80	%	0	0
	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak. Gugus Pulau. Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine . dll) yang Dilakukan Pengembangan	1	Layanan	0	0	0	0	1	Layanan	0	0
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25	Unit	0	0	0	0	25	Unit	0	0

	Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	Dokumen	0	0	0	0	2	Dokumen	0	0
	Pengadaan Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	10	Paket	0	0	0	0	10	Paket	0	0
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya layanan Kesehatan Perorangan dan layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar oleh Kab/Kota	2	Layanan	0	0	0	0	2	Layanan	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	833,578	Orang	0	0	0	0	833,578	Orang	0	0

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75	Orang	0	0	0	0	75	Orang	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2	Dokumen	0	0	0	0	2	Dokumen	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2	Dokumen	0	0	0	0	2	Dokumen	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0

	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2	Dokumen	0	0	0	0	2	Dokumen	0	0
	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	2	Dokumen	0	0	0	0	2	Dokumen	0	0
	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	8	Dokumen	0	0	0	0	8	Dokumen	0	0
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia. Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5	Unit	0	0	0	0	5	Unit	0	0
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12	Paket	0	0	0	0	12	Paket	0	0
	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0

	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100	%	0	0	0	0	100	%	0	0
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3	Dokumen	0	0	0	0	3	Dokumen	0	0
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1	Unit	0	0	0	0	1	Unit	0	0
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1	Unit	0	0	0	0	1	Unit	0	0
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	6	Unit	0	0	0	0	6	Unit	0	0

	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatn**	**50**	**%**	0	0	0	0	**40**	**%**	0	0
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	**Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan**	**200**	**Orang**	0	0	0	0	**175**	**Orang**	0	0
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	400	Orang	0	0	0	0	400	Orang	0	0
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial	94	%	0	0	0	0			0	0

	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang PAK yang mendapatkan Sertifikat Distribusi	100	%	0	0	0	0	100	%	0	0
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	30	Sarana	0	0	0	0	30	Sarana	0	0
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	2	Dokumen	0	0	0	0	2	Dokumen	0	0
	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang mendapatkan Sertifikat Produksi UKOT	100	%	0	0	0	0	100	%	0	0

	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	2	Sarana	0	0	0	0	2	Sarana	0	0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS	4	Kab/Kota	0	0	0	0	4	Kab/Kota	0	0
	Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	60	%	0	0	0	0	60	%	0	0
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan. Pemberdayaan. Penggalangan Kemitraan. Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan. Pemberdayaan. Penggalangan Kemitraan. Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0

	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase saluran media yang digunakan untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS	**100**	**%**	0	0	0	0	**100**	**%**	0	0
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	100	%	0	0	0	0	**100**	**%**	0	0
	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaiannya mengalami beberapa hambatan yang cukup signifikan seperti penyediaan dan pemerataan fasilitas kesehatan khususnya di daerah 3T belum optimal, distribusi tenaga kesehatan masih belum merata khususnya pada daerah terdepan, terpencil dan terisolir (3T), alat kesehatan pada puskesmas dan Rumah Sakit Pratama belum memadai, akses jalan/infrastruktur yang menuju tempat pelayanan kesehatan kurang memadai khususnya pada daerah terdepan, terpencil dan terisolir (3T), kesadaran perilaku masyarakat hidup sehat masih kurang, Belum optimalnya dukungan lintas sektor terkait dalam upaya penyelesaian masalah isu kesehatan nasional, pandemi Covid 19 menyebabkan perubahan di berbagai aspek kehidupan, terutama sangat berpengaruh signifikan di aspek kesehatan masyarakat. Sehingga pelaksanaan program bidang kesehatan berfokus pada penanganan Covid-19. Saat ini bidang Kesehatan merupakan salah satu bidang yang mempunyai tugas dan beban cukup berat dalam menangani dampak pandemi Covid-19, dimana perlu perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di masyarakat. Untuk menanggulangi dampak Covid-19, perlu adanya reformasi di bidang Kesehatan yang ditekankan pada pengendalian penyebaran penyakit menular. Pelayanan Kesehatan dan surveilens. Sehingga pasca Covid-19 akan difokuskan kepada Gerakan Masyarakat (GERMAS) Hidup Sehat, penanganan penyakit menular, ketersediaan alat Kesehatan, kesiapan sarana dan prasarana Kesehatan serta masyarakat keluarga miskin yang terdampak penyakit menular.

Kesehatan merupakan modal dasar bagi manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pergerakan perekonomian maupun pembangunan daerah sangat tergantung pada derajat Kesehatan suatu masyarakat. Adapun beberapa capaian pada indikator kinerja pembangunan daerah pada bidang Kesehatan yaitu :

Kematian Ibu, Bayi dan Stunting masih tetap menjadi tantangan utama di sektor Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Tren jumlah Kematian Ibu dari tahun 2017-2018 sudah terjadi penurunan, namun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah kematian ibu. Sedangkan jumlah kematian bayi (0-11) bulan sudah mengalami penurunan. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari 34 Provinsi, hanya Provinsi Kalimantan Timur yang Prevalensi Stunting pada anak balitanya meningkat, yaitu dari 27,6 persen pada tahun 2017 meningkat menjadi 29,40 persen pada tahun 2018, walaupun hasil Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019 turun menjadi 28,10 persen, tapi masih diatas rata-rata nasionl (27 persen) dan bila dibandingkan dengan Cut of Point menurut Rekomendasi WHO bahwa stunting tidak bermasalah apabila <20 persen. Rata-rat prevalensi stunting Kab/Kota pada tahun 2019 masih tinggi yaitu diatas 20 persen, kecuali kota Balikpapan sudah mencapai 14 persen.

Angka Kematian Ibu dan Stunting merupakan Major Project sedangkan Angka Kematian Bayi dan Wasting merupakan Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024. Sejak tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Timur memiliki 2 lokus yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Tahun 2020 bertambah 2 lokus yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kertanegara sehingga menjadi 4 lokus, sementara tahun 2021 bertambah 2 lokus lagi yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda dan pada tahun 2022 seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur menjadi daerah lokus stunting. Hasil Riskesdas 2018 angka stunting di Provinsi Kalimantan

Timur sebesar 29,20 persen sementara Hasil SGGBI tahun 2019 sebesar 28,10 persen dan hasil e-PPGBM sebesar 22,80 persen dari 36,62 persen yang diukur. Untuk wasting sendiri hasil Riskesdas 2018 sebesar 7,60 persen dan dari ePPGM 7,2 persen dari target 9 persen. Hal ini merupakan tantangan bagi Provinsi Kalimantan Timur bagaimana agar semua balita yang ada dalam sasaran untuk dilakukan pengukuran setiap bulan agar terlihatt data stunting dan wasting yang sebenarnya. Perlu adanya dukungan dan sinergitas antar Perangkat daerah terkait dalam rangka Percepatan Penurunan Jumlah Kematian Ibu, Bayi dan Stunting di Provinsi Kalimantan Timur.

Realisasi pencapaian kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK/PP06/08	Target Renstra OPD				Realisasi Renstra OPD		Proyeksi	
				Tahun 2021 (tahun N-2)	Tahun 2022 (tahun N-1)	Tahun 2023 (tahun N)	Tahun 2024 (tahun N+1)	Tahun 2021 (tahun N-2)	Tahun 2022 (tahun N-1)	Tahun 2023 (tahun N)	Tahun 2024 (tahun N+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	10	10	0	0	10	10
2	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	8	8	0	0	8	8
3	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	0	0	0	0	194	194	0	0	194	194

	dan Tunjangan ASN										
4	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0	0	12	12	0	0	12	12
5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
6	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
7	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
8	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
9	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1

10	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	0	50	50	0	0	50	50
11	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
12	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	5	5	0	0	5	5
13	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	0	0	12	12	0	0	12	12
14	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	0	0	12	12	0	0	12	12
15	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	0	12	12	0	0	12	12
16	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
17	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	0	0	12	12	0	0	12	12

18	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	12	12	0	0	12	12
19	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	0	0	25	25	0	0	25	25
20	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
21	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
22	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak. Gugus Pulau. Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine . dll) yang Dilakukan Pengembangan	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
23	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang	0	0	0	0	25	25	0	0	25	25

	Terpelihara Sesuai Standar										
24	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
25	Jumlah Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	10	10	0	0	10	10
26	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	0	0	0	0	833.578	833578	0	0	833.578	833578
27	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	0	0	0	75	75	0	0	75	75
28	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2

	Kesehatan Ibu dan Anak										
29	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
30	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
31	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
32	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
33	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
34	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
35	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1

36	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
37	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
38	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
39	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
40	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
41	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
42	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2

43	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
44	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	0	0	0	0	8	8	0	0	8	8
45	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia. Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	0	0	0	0	5	5	0	0	5	5
46	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0	0	0	0	12	12	0	0	12	12
47	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
48	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
49		0	0	0	0			0	0		

50	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	0	0	0	0	3	3	0	0	3	3
51		0	0	0	0			0	0		
52	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
53	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	0	0	0	0	6	6	0	0	6	6
54	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	0	0	0	0	400	400	0	0	400	400
55	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
56	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	0	0	0	0	30	30	0	0	30	30

57	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
58	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
59	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan. Pemberdayaan. Penggalangan Kemitraan. Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
60	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
61	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1

	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										
62	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1

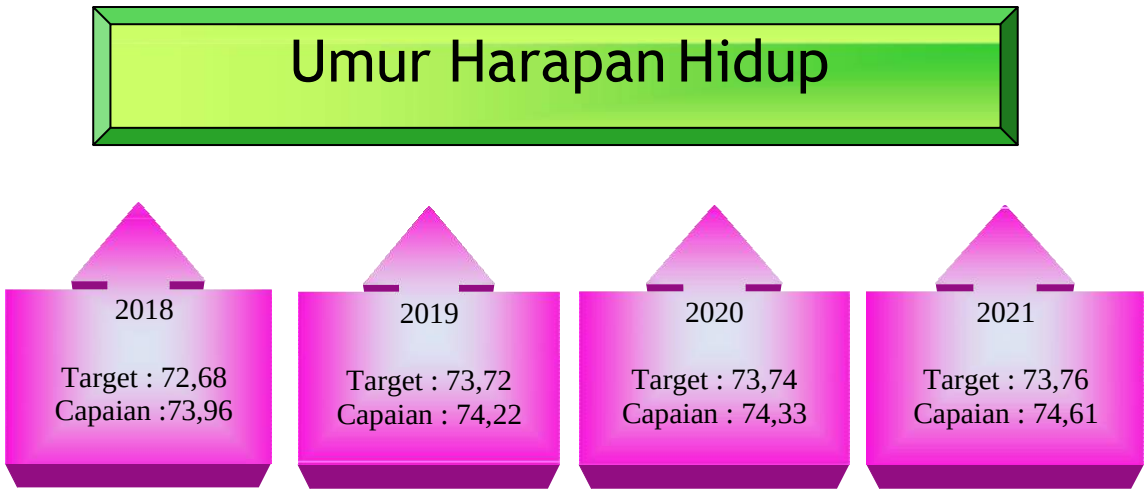

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Umur Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup sekian tahun.

Di Provinsi Kalimantan Timur, Umur Harapan Hidup mengalami kenaikan di setiap tahunnya pada tahun 2020 mencapai 74,33 tahun dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 74,61 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2021 akan memiliki harapan hidup hingga usia 74 tahun. Sehingga angka ini bisa dikatakan melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 74,75 tahun. Sedangkan jika dirinci menurut Kabupaten/Kota, Kota

Balikpapan memiliki usia harapan hidup tertinggi yaitu mencapai 74,76 tahun dan Kabupaten Berau memiliki usia harapan hidup mencapai 72,32 tahun merupakan usia harapan hidup terendah dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Berau pada tahun 2021 akan memiliki harapan hidup hingga usia 72 tahun.

Jika dibandingkan dengan Provinsi di Regional Kalimantan, Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur masih menjadi yang tertinggi dan masih berada di atas capaian nasional sebesar 73,46 tahun. Namun laju pertumbuhan terendah lima tahun terakhir terjadi di Kalimantan Selatan.

Pola spasial capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota tahun 2021 menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu wilayah maupun negara menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat didalamnya.

Dalam upaya mencapai peningkatan tersebut maka dilakukan kerja sama lintas sektor, karena Umur Harapan Hidup dipengaruhi banyak faktor. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai SKPD Utama untuk mencapai indikator tersebut, melakukan berbagai upaya melalui program-program kegiatan yang ada di dalam Renstra SKPD. Berikut capaian kinerja SKPD yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja SKPD tahun 2021:

Tabel Pencapaian Kinerja OPD selama 3 tahun terakhir berdasarkan Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2019			2020			2021		
				Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1.	Meningkatnya Status Kesehatan & Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Stunting	%	30,08	28,1	93,42	29,56	28,1	95,06	29,04	22,8	78,51
		Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	90	79	87,78	85	92	108,24	80	161	201,25
		Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	581	688	118,42	557	662	118,85	533	557	104,5
2	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	%	50	88,29	176,58	60	88,29	147,15	70	84,66	120,94

		Persentase Pengobatan HIV dengan Anti Retroviral (ARV)	%	57	67,3	118,07	58	28,2	48,62	59	25,72	43,59
3	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular	TBC/Case Detection Rate (CDR) Persentase Temuan kasus	%	50	54	108,00	55	27	49,09	60	32,28	53,8
		Persentase penderita Hipertensi yang mendapat layanan sesuai standar	%	55	53,1	96,55	60	31,2	52,00	75	5,19	6,92
		Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapat layanan sesuai standar	%	55	78,94	143,53	60	59,1	98,50	75	7,07	9,43

Dari data diatas untuk balita stunting trend capaian dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan/perbaikan, hal ini menunjukan semakin meningkatnya status gizi balita di Provinsi Kalimantan Timur. Prevalensi Stunting tahun 2018 adalah data hasil survei Riskesdas, tahun 2019 dan 2020 adalah dari Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI). Tahun 2021 tidak dilaksanakan survey terkait status gizi, sehingga masih menggunakan data survey tahun sebelumnya. Kematian Ibu dan kematian bayi jumlah kasusnya setiap tahun berfluktuatif, dan untuk tahun 2020 capaian mengalami penurunan dimana lebih banyak kasus dari target yang ditetapkan, namun jumlah kasus kematian ibu meningkat dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari penyebab kematian ibu terbesar adalah Perdarahan, hal ini erat kaitan dengan bagaimana antenatal care selama kehamilan ibu, penyebab tidak langsung peningkatan kasus kematian ibu adalah masih kurangnya kesadaran ibu hamil untuk rutin memeriksakan diri selama kehamilan; nutrisi ibu yang tidak adekuat selama kehamilan dan kondisi penyakit penyerta selama kehamilan ibu. Begitu pula dengan kematian bayi jumlah kasus meningkat dari tahun sebelumnya, penyebab kematian tertinggi adalah karena Diare dan pneumonia. Status gizi balita sangat terkait erat terhadap kejadian diare dan pneumonia serta faktor sanitasi lingkungan. Untuk capaian persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi sudah mencapai target. Fasilitas kesehatan yang terkreditasi adalah Rumah Sakit dan Puskesmas, hal ini didukung dengan Pembinan dan pengawasan dilakukan secara berkala oleh Dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Untuk

Akreditasi Rumah Sakit, capaian 2019 dan 2020 tidak terjadi kenaikan/penurunan capaian, hal ini disebabkan karena mengacu surat edaran nomor : HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang perizinan, dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan penetapan rumah sakit pendidikan pada masa pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), dinyatakan bahwa Rumah sakit yang masa berlaku sertifikat akreditasinya berakhir baik sebelum maupun sesudah Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 dinyatakan dicabut oleh Pemerintah, maka sertifikat akreditasinya masih tetap berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan dicabut. Pada Akreditasi Puskesmas, untuk realisasi target thn 2019 capaian melebihi target karena ditahun tersebut segala upaya dan dukungan telah dilakukan disamping sumber daya relatif tersedia. Prestasi kerja ditahun 2019 merupakan hasil kerjasama optimal antara Provinsi dan Kabupaten Kota dengan dukungan kebijakan dari Kemenkes RI. Sementara untuk capaian tahun 2020 tidak ada penambahan capaian karena pada tahun 2020 ada bencana pandemi covid-19 sehingga Kemenkes RI mengeluarkan kebijakan penundaan survei akreditasi puskesmas di tahun 2020 sampai dengan sekarang, sehingga rencana survei untuk puskesmas yang tersisa tidak dapat dilaksanakan dan otomatis status puskesmas terakreditasi tidak dapat diperoleh. Terkait capaian pengobatan HIV dan temuan kasus TBC dengan terjadinya Pandemi Covid-19 membuat kunjungan pasien termasuk ODHA maupun pasien TBC berkurang, baik untuk yang memulai pengobatan maupun yang melanjutkan pengobatan. Adanya pembatasan kegiatan kunjungan rumah selama pandemi membuat penemuan kasus TBC maupun kasus pemeriksaan pada populasi beresiko HIV tidak dilakukan Petugas kesehatan di fasilitas kesehatan & Dinas Kesehatan. Dilihat dari realisasi tahun 2020 persentase penderita hipertensi yang mendapat layanan sesuai standart sebesar 31,2% artinya 50% menurun dibandingkaan dua tahun sebelumnya yakni Tahun 2018 sebesar 56,86% dan tahun 2019 sebesar 53,10%. Hal ini dikarenakan

situasi Pandemi Wabah Covid-19 sehingga kunjungan Posbindu sempat ditiadakan dan kunjungan ke Puskesmas juga berkurang dari biasanya. Sedangkan untuk Persentase Penderita Diabetes Melitus yang mendapat layanan sesuai standart realisasi Tahun 2020 sebesar 59,1% yang artinya realisasi hampir mencapai target, berbeda dengan realisasi Tahun dua tahun sebelumnya Tahun 2018 sebesar 70% dan 2019 sebesar 78,94% yang mencaapai target. Hal ini juga dikarenakan situasi pandemi Wabah Covid-19 sehingga realisasi dibawah target, dikarenakan Posbindu tidak semua Kabupaten kota berjalan, dan kunjungan ke Puskesmas juga menurun.

Tabel Capaian Kinerja Dibandingkan dengan target RPJMD/RENSTRA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi	% Capaian Kinerja	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Status Kesehatan & Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Stunting	%	29,04			Capaian tahun 2021 belum optimal, namun telah menunjukkan progres yang cukup baik
		Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	80			
		Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	533			
2	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	%	70			
3	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Persentase Pengobatan HIV dengan Anti Retroviral (ARV)	%	59			
		TBC/Case Detection Rate (CDR) Persentase Temuan kasus	%	60			
		Persentase penderita Hipertensi yang mendapat layanan sesuai standar	%	75			
		Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapat layanan sesuai standar	%	75			

1) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja pada Dinas Kesehatan adalah :

a) Dukungan dan komitmen Pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi isu-isu kesehatan nasional.
b) Tersedianya sumber pendanaan yang memadai baik dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
c) Sumber daya manusia kesehatan yang tersedia meliputi berbagai latar belakang pendidikan bidang kesehatan yang berada di fasilitas kesehatan.
d) Tersedianya regulasi yang mengatur pelaksanaan program-program di bidang kesehatan
e) Adanya dukungan lintas sektor terkait dalam upaya penyelesaian isu kesehatan nasional.

Dalam pencapaian target kinerja juga dihadapkan pada beberapa permasalahan/kendala antara lain :

a) Penyusunan rencana kegiatan yang belum optimal,dimana kegiatan yang dilaksanakan belum menyasar pada indikator yang ingin dicapai.
b) Penyusunan rencana kegiatan yang masih belum mengacu pada RENSTRA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan
c) Belum terdistribusinya tenaga kesehatan secara merata terutama di daerah- daerah perbatasan & terpencil.
d) Belum optimalnya dukungan lintas sektor terkait dalam upaya pnyelesaian masalah isu kesehatan nasional
e) Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 yang lalu menyebabkan perubahan di berbagai aspek kehidupan, terutama sangat berpengaruh signifikan di asfek kesehatan masyarakat. Sehingga pelaksanaan program-program bidang kesehatan kini terfokus pada penanganan Covid-19.

Dalam upaya mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi dilakukan beberapa upaya alternatif solusi yaitu :

a) Komitmen bersama dalam penetapan rencana kegiatan yang

mengacu pada RENSTRA yang telah ditetapkan.

b) Advokasi ke pemerintah daerah terkait pemenuhan tenaga kesehatan dan menyediakan informasi yang valid tentang kondisi tenaga kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan.

c) Mengoptimalkan upaya terintegrasi dengan lintas program maupun lintas sektor dengan sektor terkait lainnya, melalui upaya pertemuan lintas sektor terkait.

d) Pandemi Covid-19 menuntut untuk melakukan perubahan, baik dalam hal cara berpikir, cara berprilaku dan cara bekerja. Tantangan selanjutnya adalah cara berpikir dan cara berprilaku yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan tangguh terhadap ancaman penyakit termasuk dari penyakit hari esok.

2) Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam Perubahan RENSTRA 2019-2023 terdapat 5 program yang dilaksanakan yaitu:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada program ini merupakan program pendukung dalam kegiatan utama di SKPD yang harus ada untuk menunjang pelaksanaan bidang Kesehatan dimana didalamnya mencakup gaji, tunjangan, pengadaan/pemeliharaan peralatan dan sarana prasarana aparatur dan perkantoran.

b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Pada program ini berisi kegiatan distribusi obat ke kabupaten/kota, pengadaan obat buffer stok obat dan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian obat di kabupaten/kota. Program ini mendukung pencapaian indikator kinerja utama dimana memastikan ketersediaan obat & vaksin di fasiitas kesehatan. Penguatan pada program ini adalah untuk menyiapkan data rencana

kebutuhan obat (RKO), untuk itu perlu pendampingan dan pembinaan provinsi ke kab/kota dalam menghitung kebutuhan obat & vaksin di faskes, selain itu juga perlu penguatan dalam menjaga mutu dan kualitas vaksin melalui upaya peningkatan kualitas penyimpanan vaksin yang baik.

Pada program ini dilaksanakan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan terhadap capaian program kesehatan ibu & anak dan peningkatan status gizi masyarakat.

Penguatan yang perlu dilakukan adalah fokus & lokus kegiatan yang dilakukan berbasis pada data capaian yang terupdate sehingga pelaksanaan kegiatan lebih tepat sasaran.

Pada program ini dilaksanakan upaya pemenuhan pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin & tidak mampu. Pelaksanaan program ini sangat tergantung pada data penerima bantuan iuran (PBI) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, sehingga perlu koordinasi yang intens dengan Dinas sosial dalam upaya pencapaian target sasaran.

Penguatan upaya promotif & preventif serta pemberdayaan masyarakat dan sektor terkait guna menyelesaikan masalah kesehatan yang menjadi indikator kinerja utama yang memerlukan dukungan sektor lain. Selain itu perlu dilakukan penguatan komitmen lintas sektor terkait untuk membantu penyelesaian masalah kesehatan yang memerlukan dukungan berbagai sektor seperti pada penangganan Stunting dan mengurangi kematian ibu melahirkan.

Pada program ini dilaksanakan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan terhadap capaian program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, penguatan pada program ini adalah fokus & lokus kegiatan yang dilakukan berbasis pada data

capaian yang terupdate sehingga pelaksanaan kegiatan lebih tepat sasaran.

Pada program ini dilaksanakan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan terhadap capaian program pelayanan kesehatan dan memacu kab/kota agar dapat meningkatkan status akreditasi fasilitas kesehatan, baik di tingkat dasar maupun di fasilitas rujukan. Penguatan yang perlu dilakukan adalah fokus & lokus pada fasilitas kesehatan yang akan ditingkatkan status akreditasinya.

Pada program ini dilaksanakan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan terhadap capaian program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, penguatan pada program ini adalah fokus & lokus kegiatan yang dilakukan berbasis pada data capaian yang terupdate sehingga pelaksanaan kegiatan lebih tepat sasaran.

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pada program ini dilaksanakan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan terhadap capaian program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan dan penyediaan data ketersediaan tenaga kesehatan di provinsi Kalimantan Timur. Penguatan yang perlu dilakukan adalah fokus & lokus kegiatan yang dilakukan berbasis pada data capaian yang terupdate sehingga pelaksanaan kegiatan lebih tepat sasaran dan penguatan advokasi ke pemerintah daearah terkait pendistribusian tenaga dengan basis data tenaga kesehatan yang akurat.

d) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

e) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

3) Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pemanfaatan sumber daya baik dari segi sumber daya manusia dan pengangguran telah dilaksanakan secara optimal di tahun 2021 dengan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya status kesehatan Ibu dan Anak	Prevalensi Balita Stunting	95,06	72,36	1,31
		Jumlah Kematian Ibu	108,24		
		Jumlah Kematian Bayi	118,85		
2	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	147,15		
3	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Persentase Pengobatan HIV dengan Anti Retroviral (ARV)	48,62		
		TBC/Case Detection Rate (CDR) Persentase Temuan kasus	49,09		
		Persentase penderita Hipertensi yang mendapat layanan sesuai standar	52,00		
		Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapat layanan sesuai standar	98,50		

Dari tabel diatas tergambar bahwa serapan anggaran cukup baik, namun untuk capaian realisasi keuangan masih belum optimal, hal ini dikarenakan masih adanya beberapa kendala terkait pelaksanaan kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Dinas Kesehatan, pagu anggaran sebesar Rp. 81.545.120.786,- realisasi sebesar Rp. 64.148.307.909,40- (78,67%).
b) BAPELKES, pagu sebesar Rp. 4.150.613.573,- realisasi sebesar Rp.3.490.103.558 (84,09%).
c) UPTD LABKES : pagu sebesar Rp. 7.162.799.697,- realisasi sebesar Rp.6.038.793.966,- (84,31%).

d) RSUD KORPRI , pagu anggaran sebesar Rp. 10.394.293.181,- realisasi sebesar Rp. 8.848.117.457,- (85,12%).

e) RS. Mata dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.043.825.080,- dan realisasi sebesar Rp. 4.662.247.218,- (92,43%).

f) BLUD Laboratorium dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.865.123.001,- dan realisasi sebesar Rp. 5.077.561.536,- (86,57%).

g) BLUD RS. Mata dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.481.618.267,- dan realisasi sebesar Rp. 3.397.237.754,- (61,98%).

4) Realisasi Anggaran

a) Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Efisiensi	%	Total APBD Non Gaji		Jumlah Program/Kegiatan yang dialokasikan		Total Program/Kegiatan dalam Renstra		Ket
					Belanja Pegawai	Belanja Gaji & Tunjangan	Prog	Keg	Prog	Keg	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2019	154.858.446.701	85.812.663.725	69.045.782.976	55,41	7.794.298.812	32.852.611.350	19	26	19	26	
2020	121.643.393.583	88.017.402.035	33.625.991.548	72,36	8.481.850.000	29.024.001.000	12	30	12	30	
2021	202.945.289.806	163.657.247.815	39.288.041.991,30	80,64	0	36.438.671.000	12	30	12	30	

b) Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

kode Rekening	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2022			SISA DANA
			KEUANGAN (RP)	KEU (%)	FISIK (%)	
'1.02.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kesehatan**	**122,602,505,708**	**102,541,803,628**	**83.64**	**89.76**	**20,060,702,080**
'1.02.001	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**56,621,398,428**	**38,842,275,986**	**68.60**	**80.75**	**17,779,122,442**
'1.02.001.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1,160,244,000**	**1,015,905,416**	**87.56**	**91.82**	**144,338,584**
1.02.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	908,244,000	833,221,516	**91.74**	**95.66**	**75,022,484**
1.02.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	252,000,000	182,683,900	**72.49**	**78.00**	**69,316,100**
1.02.001.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**48,786,841,501**	**31,883,626,360**	**65.35**	**78.57**	**16,903,215,141**
1.02.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48,418,001,501	31,520,244,625	**65.10**	**78.41**	**16,897,756,876**
1.02.001.1.02.003	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	318,840,000	318,840,000	**100.00**	**100.00**	-

kode Rekening	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2022			SISA DANA
			KEUANGAN (RP)	KEU (%)	FISIK (%)	
1.02.001.1.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,000,000	9,054,700	**90.55**	**100.00**	**945,300**
1.02.001.1.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10,000,000	8,950,960	**89.51**	**100.00**	**1,049,040**
1.02.001.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10,000,000	7,821,650	**78.22**	**100.00**	**2,178,350**
1.02.001.1.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20,000,000	18,714,425	**93.57**	**99.26**	**1,285,575**
1.02.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	486,213,000	424,629,204	**87.33**	**99.73**	**61,583,796**
1.02.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	157,653,000	157,547,850	**99.93**	**100.00**	**105,150**
1.02.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	328,560,000	267,081,354	**81.29**	**99.61**	**61,478,646**
1.02.001.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2,395,799,300**	**2,308,246,945**	**96.35**	**92.67**	**87,552,355**
1.02.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40,814,800	37,228,875	**91.21**	**100.00**	**3,585,925**
1.02.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	899,234,000	860,449,745	**95.69**	**80.48**	**38,784,255**
1.02.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53,766,500	50,879,775	**94.63**	**100.00**	**2,886,725**
1.02.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38,400,000	21,378,500	**55.67**	**100.00**	**17,021,500**
1.02.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,363,584,000	1,338,310,050	**98.15**	**100.00**	**25,273,950**
1.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,212,291,027	2,865,845,245	**89.21**	**96.32**	**346,445,782**
1.02.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18,743,000	15,152,000	**80.84**	**100.00**	**3,591,000**
1.02.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	806,163,939	583,875,107	**72.43**	**100.00**	**222,288,832**
1.02.001.1.08.004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**2,387,384,088**	**2,266,818,138**	**94.95**	**95.05**	**120,565,950**
1.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	580,009,600	344,022,816	**59.31**	**90.16**	**235,986,784**
1.02.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177,236,000	110,014,413	**62.07**	**82.76**	**67,221,587**
1.02.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	211,380,000	80,053,128	**37.87**	**100.00**	**131,326,872**
1.02.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	191,393,600	153,955,275	**80.44**	**86.14**	**37,438,325**
1.02.002	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**64,499,055,630**	**62,420,498,641**	**96.78**	**97.62**	**2,078,556,989**
1.02.002.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	5,039,783,000	4,530,990,001	**89.90**	**92.64**	**508,792,999**
1.02.002.1.01.006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	96,754,000	82,821,800	**85.60**	**100.00**	**13,932,200**

kode Rekening	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2022			SISA DANA
			KEUANGAN (RP)	KEU (%)	FISIK (%)	
1.02.002.1.01.007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	90,688,500	83,721,200	**92.32**	**91.74**	**6,967,300**
1.02.002.1.01.017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	7,500,000	5,100,000	**68.00**	**100.00**	**2,400,000**
1.02.002.1.01.021	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,041,539,500	595,607,860	**57.19**	**65.13**	**445,931,640**
1.02.002.1.01.022	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	3,803,301,000	3,763,739,141	**98.96**	**100.00**	**39,561,859**
1.02.002.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**59,083,312,630**	**57,611,508,370**	**97.51**	**98.18**	**1,471,804,260**
1.02.002.1.02.001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	222,987,760	194,015,955	**87.01**	**94.29**	**28,971,805**
1.02.002.1.02.002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	781,961,260	440,443,320	**56.33**	**52.93**	**341,517,940**
1.02.002.1.02.003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	785,500,000	623,681,802	**79.40**	**99.92**	**161,818,198**
1.02.002.1.02.006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	762,233,000	595,357,628	**78.11**	**89.44**	**166,875,372**
1.02.002.1.02.007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	251,169,000	215,025,700	**85.61**	**100.00**	**36,143,300**
1.02.002.1.02.008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	179,287,000	144,247,100	**80.46**	**85.09**	**35,039,900**
1.02.002.1.02.009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	150,000,000	73,981,380	**49.32**	**49.32**	**76,018,620**
1.02.002.1.02.010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	382,611,000	353,746,700	**92.46**	**92.56**	**28,864,300**
1.02.002.1.02.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1,085,094,000	846,516,577	**78.01**	**80.34**	**238,577,423**
1.02.002.1.02.012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	120,319,000	116,274,980	**96.64**	**98.63**	**4,044,020**
1.02.002.1.02.013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	110,457,000	104,784,975	**94.86**	**100.00**	**5,672,025**
1.02.002.1.02.014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	104,828,000	97,732,100	**93.23**	**90.39**	**7,095,900**
1.02.002.1.02.016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	52,481,598,010	52,427,085,300	**99.90**	**99.90**	**54,512,710**
1.02.002.1.02.017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	169,470,000	128,869,045	**76.04**	**86.28**	**40,600,955**
1.02.002.1.02.019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	427,395,400	425,752,000	**99.62**	**98.55**	**1,643,400**
1.02.002.1.02.020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	422,882,200	411,893,650	**97.40**	**96.81**	**10,988,550**
1.02.002.1.02.023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	108,520,000	61,210,600	**56.40**	**52.21**	**47,309,400**
1.02.002.1.02.027	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	437,000,000	350,889,558	**80.30**	**98.29**	**86,110,442**
1.02.002.1.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**375,960,000**	**278,000,270**	**73.94**	**75.50**	**97,959,730**

kode Rekening	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2022			SISA DANA
			KEUANGAN (RP)	KEU (%)	FISIK (%)	
1.02.002.1.03.001	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	375,960,000	278,000,270	**73.94**	**75.50**	**97,959,730**
1.02.003	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**879,107,800**	**780,320,306**	**88.76**	**92.30**	**98,787,494**
1.02.003.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	18,000,000	15,320,000	**85.11**	**100.00**	**2,680,000**
1.02.003.1.01.001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	18,000,000	15,320,000	**85.11**	**100.00**	**2,680,000**
1.02.003.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	861,107,800	765,000,306	**88.84**	**92.14**	**96,107,494**
1.02.003.1.02.001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	861,107,800	765,000,306	**88.84**	**92.14**	**96,107,494**
1.02.004	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**133,420,500**	**110,181,150**	**82.58**	**90.89**	**23,239,350**
1.02.004.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	126,640,200	104,897,525	**82.83**	**90.83**	**21,742,675**
1.02.004.1.01.001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	126,640,200	104,897,525	**82.83**	**90.83**	**21,742,675**
1.02.004.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	6,780,300	5,283,625	**77.93**	**91.96**	**1,496,675**
1.02.004.1.02.001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	6,780,300	5,283,625	**77.93**	**91.96**	**1,496,675**
1.02.005	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**469,523,350**	**388,527,545**	**82.75**	**91.14**	**80,995,805**
1.02.005.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	469,523,350	388,527,545	**82.75**	**91.14**	**80,995,805**
1.02.005.1.02.001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	469,523,350	388,527,545	**82.75**	**91.14**	**80,995,805**

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan berbagai pengamatan terhadap berbagai kondisi yang ada di Provinsi kalimantan Timur maka beberapa isu penting yang hendaknya mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Perlunya peningkatan upaya keterjaminan ketersediaan pelayanan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem penjaminan pelayanan kesehatan yang mencakup seluruh

masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, melalui JKN (BPJS);

b. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, dimana masih tingginya kejadian penyakit menular seperti TB Paru, Demam berdarah, dll yang harus dilakukan surveilans pengawasan secara lebih baik sehingga dapat ditanggulangi dan diintervensi secara dini sehingga tidak menjadi wabah serta masih tingginya insiden / prevalensi penyakit menular yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa;
c. Perlunya peningkatan upaya promotif dan preventif kesehatan yang lebih maksimal dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat sehingga masyarakat tidak mengalami kesakitan, karena upaya pengobatan penyakit akan membutuhkan dana yang sangat tinggi;
d. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih baik sehingga mutu pelayanan kesehatan dan cakupan pelayanan kesehatan dapat lebih ditingkatkan secara lebih baik, ketersediaan aset berupa lahan/tanah untuk pengembangan bangunan sarana kesehatan yang terbatas;
e. Sumber anggaran sektor kesehatan yang belum mencukupi;
f. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti: penduduk miskin dan daerah terpencil, terluar dan terdepan;
g. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh;
h. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan;
i. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat esensial, penggunaan obat yang tidak rasional, dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas;
j. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi dan hukum

kesehatan;

k. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program, dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi Lintas Sektor;

l. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal serta masih rendahnya kesadaran untuk hidup masyarakat dalam lingkungan yang sehat;

m. Belum optimalnya pendataan kesehatan yang cepat, akurat dan valid yang berakibat terlambatnya penetapan kebijakan dan intervensi.

n. Adanya wabah pandemi Covid-19 yang melanda wilayah Kalimantan Timur sehingga menyebabkan perubahan di berbagai aspek kehidupan, serta berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan.

2.4 Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis

1) Permasalahan

Dari analisis perkembangan dan masalah pembangunan kesehatan, dan peran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam pembangunan kesehatan, dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur ke depan dan harus menjadi perhatian adalah :

a. Derajat kesehatan masyarakat meningkat tetapi beberapa penyakit menular seperti Demam Berdarah, TB Paru, Malaria, HIV-AIDS masih tinggi dan cenderung meningkat. Demikian juga dengan penyakit tidak menular seperti Jantung, Hipertensi, Diabetes Militus, Kanker, ganguan kejiwaan cenderung mengalami peningkatan. Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular bahkan akhir-akhir ini timbul Kejadian Luar Biasa Penyakit Difteri.

b. Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan rujukan masih belum memenuhi standar pelayanan. Terbatasnya dan kurang meratanya distribusi tenaga kesehatan. Jauhnya jarak dari pemukiman ke pusat pelayanan kesehatan di daerah 3T. Terbatasnya pelayanan jaringan telekomunikasi untuk penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan.
c. Citra pelayanan yang masih kurang memuaskan yang ditandai dengan banyaknya keluhan terutama pada pelayanan yang lambat, berbelit-belit.
d. Perilaku masyarakat dan lingkungan yang kondusif untuk hidup sehat belum menunjukkan peningkatan sesuai dengan harapan yang memberikan kontribusi terhadap kualitas air permukaan, dan air tanah sehingga berakibat terhadap pencemaran, pemanasan global, rusaknya lingkungan dan tidak tertatanya sistem pembuangan limbah rumah tangga.
e. Perkembangan daerah menuju perkotaan baru, pengaruh budaya dari luar dalam penggunaan IPTEK tanpa batas, berpotensi sebagai ancaman bagi masyarakat kedepan akan munculnya penyakit menular seperti DBD, malaria dan penyakit yang berdampak sosial besar seperti HIV-AIDS, penyalahgunaan NAPZA (narkotika).
f. Sumber daya kesehatan berupa tenaga kesehatan, dana dan peralatan medis belum mencukupi sesuai standar kebutuhan, sementara itu bermunculan sarana pelayanan kesehatan baru dengan pesatnya termasuk yang tradisional, dimana pengawasan dan pengendalian masih lemah dan regulasi belum menjamin kepastian pemberian pelayanan yang aman dan berkualitas. Distribusi jumlah tenaga kesehatan belum merata, lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan.
g. Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan kinerja

minimal yang dilakukan di pelayanan kesehatan dasar untuk menjamin kualitas pelayanan. Rumah Sakit pemerintah yang ada di Kalimantan Timur sebanyak 46 buah baik milik Pemerintah maupun swasta. Pelayanan gawat darurat di UGD merupakan salah satu standar pelayanan minimal yang harus dicapai seluruh Rumah Sakit. Saat ini rata-rata Rumah sakit yang memiliki pelayanan kegawatdaruratan masih dengan level 1, sedangkan tuntutan dan teknologi pelayanan kesehatan semakin berkembang. Persaingan semakin ketat dengan pelayanan pihak swasta. Pengembangan tempat pelayanan, jenis, kualitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah sangat diperlukan khususnya juga di daerah perbatasan, terpencil, tertinggal dan kepulauan.

2). Isu Strategis

a. Draft Rancangan Awal RKP 2019 dengan TEMA: ”Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Kesehatan merupakan bagian dari PN 1: Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dengan Kegiatan Prioritas:

- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
- Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana.
- Pencegahan dan pengendalian penyakit
- Percepatan penurunan stunting
- Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Selanjutnya hasil forum SKPD telah menghasilkan kesepakatan dengan pemerintah kabupaten dan kota sebagai berikut :

- Distribusi Tenaga kesehatan masih belum merata

- Angka kematian ibu masih tinggi

- Sarana dan prasarana di daerah tertinggal masih belum sesuai standart Pemerintah Kab/Kota memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi berupa:

1) Pengadaan sanitarian kit.
2) Pengadaan Blanko TB dan KIE
3) Pendampingan akreditasi puskesmas
4) Pelatihan bagi petugas SIK puskesmas dan Dinkes
5) Pemenuhan sarana prasarana dan alkes puskesmas dan RS : alkes, ambulance, kendaraan operasional air dan roda dua, pembangunan puskesmas dan pembangunan rumah dinas nakes (Bankeu)

Rakerkesnas 2019 memfokuskan penuntasan permasalahan kesehatan dengan menetapkan prioritas pada :

1. Percepatan Eliminasi Tuberculosis dengan pokok bahasan: ***Missing Cases***, ***Compliance*** dan **MDR-TB.**
2. Penurunan Stunting dengan pokok bahasan : **Pencegahan** dan

   Intervensi.
3. Peningkatan Cakupan dan Mutu Imunisasi dengan pokok bahasan: **Peningkatan Cakupan, Peningkatan Mutu Imunisasi** dan **Penguatan Surveilans.**

Dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Rakerkesda 2019 dengan menghasilkan kesepakatan :

1. Penanganan TBC yang lebih serius untuk menjangkau kasus yang belum terdeteksi, melalui PIS-PK termasuk pelacakan kasus gizi, Pemberdayaan masyarakat melalui kader dalam Penanggulangan TBC.

2. Perluasan penemuan kasus pada kelompok berisiko seperti pada Warga Binaan Rutan/Lapas, Sekolah Berasrama, Masyarakat yang tinggal di Lingkungan Padat Kumuh.
3. Pemantapan pelaksanaan *Public Privat Mix***.**
4. Sosialisasi dan *law enforcement* tentang kewajiban untuk melaporkan kasus TBC (*mandatory notification*).
5. Sistim akreditasi RS seharusnya dikaitkan dengan notifikasi kasus TBC dan dilaksanakannya pelayanan kasus TBC sesuai standar.
6. Kepatuhan pengobatan TBC perlu melibatan kader, peran keluarga, petugas Puskesmas sebagai PMO (Pemantau Menelan Obat), pelacakan kasus TBC mangkir oleh Puskesmas dan Pemberian konseling harus dilakukan sebelum pengobatan TBC dimulai.
7. Penanggulangan **TBC RO (TBC MDR)** dilakukan perluasan pembentukan kelompok *peer group* bagi pasien dan mantan pasien MDR, Penyediaan rumah singgah bagi pasien MDR, mendorong terlaksananya layanan TBC RO di Rumah Sakit sesuai Kepmenkes No. 350 tahun 2017.
8. Upaya menurunkan Stunting melalui **pencegahan dan intervensi gizi** dilakukan dengan upaya-upaya melalui pendekatan "**Lifecycle**" utamanya pada **remaja** melalui transformasi UKS, pemberantasan kecacingan, Tablet Tambah Darah, KIE kesehatan bagi calon pengantin, Penundaan Perkawinan atau kehamilan sampai usia 20 tahun.
9. Peningkatan mutu Antenatal care dalam penerapan 10T, Seluruh Ibu Hamil melaksanakan Kelas Ibu Hamil, Peningkatan cakupan dan *compliance* tablet tambah darah, Pemberian makanan tambahan kepada seluruh Ibu hamil, Ibu menyusui diperlukan untuk kecukupan gizi terpenuhi.

10. Pada **bayi 0 – 5 bulan**: Menjamin semua bayi baru lahir mendapat IMD, mendapatkan ASI Ekslusif, menjamin semua bayi mendapat pelayanan KN1, dan mendapatkan pelayanan dan pemantauan pertumbuhan dan SDIDTK. **Bayi 6 – 23 bulan**; Menjamin semua mendapat ASI, makanan Pendamping ASI, vitamin dan mendapatkan pelayanan pemantauan pertumbuhan dan SDIDTK.

APBD 2022 yang merupakan pelaksanaan RKPD 2022 disusun berdasarkan asumsi atas kondisi perekonomian yang terjadi sampai dengan akhir tahun 2021. Namun ketika pelaksanaan APBD 2021 terjadi perubahan dari beberapa indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, realisasi PDRB dengan migas yang didominasi *lifting* minyak dan produksi batubara, tingkat inflasi, nilai ekspor impor daerah, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu, terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia bulan Maret 2020. Berdasarkan kondisi tersebut, maka sejalan dengan Permendagri Nomor : 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan diperoleh berdasar hasil usulan dari Bidang-Bidang di Dinas Kesehatan. Usulan dari luar Dinas Kesehatan diperoleh dari hasil Musrenbang Kabupaten/Kota, dan Forum Perangkat Daerah. Proses penyampaian usulan kegiatan dan program tersebut dilaksanakan dengan maksud bisa dilakukan perencanaan dengan sistem bottom up baik dari UPTD maupun dari masyarakat langsung, sehingga perencanaan tidak dilakukan Sentralistik di Provinsi. Hasil usulan kemudiaan ditentukan

skala prioritasnya berdasarkan ketersediaan pagu anggaran dan juga pada kegiatan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan kesehatan yang akan dicapai tanpa meninggalkan pencapaian indikator yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Renstra Dinas Kesehatan.

Setelah melalui pembahasan yang intensif dan rasionalisasi program untuk mencapai efektifitas dan efisiensi yang optimal, maka Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan pada Tahun 2023 dengan pagu indikatif sejumlah Rp. 639.539.327.997. Data selengkapnya mengenai perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Dinas Kesehatan yang mengacu pada target program/kegiatan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.4:

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	MURNI	PERUBAHAN	INPUTAN
	Dinas Kesehatan + UPTD	**370,092,982,303**	**551,878,137,252**	**551,878,137,252**
1.02.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kesehatan**	**212,856,688,784**	**340,404,122,956**	**340,404,122,956**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**90,551,349,960.00**	**95,686,507,320.00**	**95,686,507,320.00**
1.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1,647,997,000.00**	**2,082,067,000.00**	**2,082,067,000.00**
1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,172,000,000.00	1,606,070,000.00	1,606,070,000.00
1.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	475,997,000.00	475,997,000.00	475,997,000.00
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**62,884,402,837.00**	**63,160,082,837.00**	**63,160,082,837.00**
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	62,515,562,837.00	62,755,962,837.00	62,755,962,837.00
1.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	318,840,000.00	354,120,000.00	354,120,000.00
1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
1.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
1.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
1.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
1.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1,016,888,000.00**	**1,016,888,000.00**	**1,016,888,000.00**
1.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	266,888,000.00	266,888,000.00	266,888,000.00
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**11,095,442,900.00**	**15,203,208,900.00**	**15,203,208,900.00**
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7,683,747,400.00	9,150,757,400.00	9,150,757,400.00
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,281,695,500.00	5,922,451,500.00	5,922,451,500.00
1.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1,834,843,500.00**	**2,577,823,500.00**	**2,577,823,500.00**

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	MURNI	PERUBAHAN	INPUTAN
1.02.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,834,843,500.00	2,577,823,500.00	2,577,823,500.00
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7,277,017,803.00**	**6,660,594,763.00**	**6,660,594,763.00**
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,710,000,000.00	1,713,120,000.00	1,713,120,000.00
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,547,017,803.00	4,927,474,763.00	4,927,474,763.00
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4,794,757,920.00**	**4,985,842,320.00**	**4,985,842,320.00**
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325,000,000.00	325,000,000.00	325,000,000.00
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4,044,757,920.00	4,235,842,320.00	4,235,842,320.00
1.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	425,000,000.00	425,000,000.00	425,000,000.00
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**116,163,434,824.00**	**231,652,817,964.00**	**231,652,817,964.00**
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**11,891,452,500.00**	**17,079,409,540.00**	**17,079,409,540.00**
1.02.02.1.01.06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	33,600,000.00	33,600,000.00	33,600,000.00
1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	150,880,000.00	150,880,000.00	150,880,000.00
1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2,128,865,194.00	2,784,065,194.00	2,784,065,194.00
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	9,578,107,306.00	14,110,864,346.00	14,110,864,346.00
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**103,272,690,324.00**	**213,574,116,424.00**	**213,574,116,424.00**
1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	211,338,500.00	304,438,500.00	304,438,500.00
1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1,055,701,500.00	1,055,701,500.00	1,055,701,500.00
1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3,261,570,328.00	11,422,540,728.00	8,375,990,328.00
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2,982,850,900.00	3,604,197,756.00	6,650,748,156.00
1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2,423,846,100.00	3,845,830,100.00	3,845,830,100.00
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1,375,000,000.00	8,875,000,000.00	8,875,000,000.00
1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2,080,000,000.00	2,465,000,000.00	2,465,000,000.00
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,543,258,900.00	15,022,180,156.00	15,022,180,156.00
1.02.02.1.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	309,919,000.00	309,919,000.00	309,919,000.00
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	577,124,000.00	577,124,000.00	577,124,000.00
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	77,484,741,324.00	73,010,670,924.00	73,010,670,924.00
1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	248,311,600.00	248,311,600.00	248,311,600.00
1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2,938,558,000.00	89,872,637,660.00	89,872,637,660.00
1.02.02.1.02.20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	161,442,000.00	161,442,000.00	161,442,000.00
1.02.02.1.02.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	465,452,500.00	465,452,500.00	465,452,500.00

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	MURNI	PERUBAHAN	INPUTAN
1.02.02.1.02.23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	84,699,000.00	753,517,000.00	753,517,000.00
1.02.02.1.02.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	55,863,500.00	55,863,500.00	55,863,500.00
1.02.02.1.02.27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1,524,289,500.00	1,524,289,500.00	1,524,289,500.00
1.02.02.1.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**957,292,000.00**	**957,292,000.00**	**957,292,000.00**
1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	957,292,000.00	957,292,000.00	957,292,000.00
1.02.02.1.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**42,000,000.00**	**42,000,000.00**	**42,000,000.00**
1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**2,888,750,000.00**	**5,465,364,672.00**	**5,465,364,672.00**
1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**2,888,750,000.00**	**5,465,364,672.00**	**5,465,364,672.00**
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	4,317,994,672.00	4,317,994,672.00	4,317,994,672.00
1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	124,700,000.00	1,147,370,000.00	1,147,370,000.00
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**737,434,000.00**	**737,434,000.00**	**737,434,000.00**
1.02.04.1.01	**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	**597,242,000.00**	**597,242,000.00**	**597,242,000.00**
1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	597,242,000.00	597,242,000.00	597,242,000.00
1.02.04.1.02	**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**	**140,192,000.00**	**140,192,000.00**	**140,192,000.00**
1.02.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	140,192,000.00	140,192,000.00	140,192,000.00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**2,515,720,000.00**	**6,861,999,000.00**	**6,861,999,000.00**
1.02.05.1.02	**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	**930,448,100.00**	**5,201,568,100.00**	**5,201,568,100.00**
1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	790,068,100.00	5,201,568,100.00	5,201,568,100.00
1.02.05.1.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi**	**1,585,271,900.00**	**1,585,271,900.00**	**1,585,271,900.00**
1.02.05.1.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1,585,271,900.00	1,585,271,900.00	1,585,271,900.00
1.02.05.1.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	**1,585,271,900.00**	**75,159,000.00**	**75,159,000.00**
1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	75,159,000.00	75,159,000.00	75,159,000.00
1.02.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Balai Latihan Kesehatan**	**14,159,394,400.00**	**18,025,973,223.00**	**18,025,973,223.00**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**12,910,105,592.00**	**16,384,914,415.00**	**16,384,914,415.00**
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**93,120,000.00**	**120,600,000.00**	**120,600,000.00**
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93,120,000.00	120,600,000.00	120,600,000.00
1.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**269,499,000.00**	**269,499,000.00**	**269,499,000.00**
1.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66,513,000.00	66,513,000.00	66,513,000.00
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	202,986,000.00	202,986,000.00	202,986,000.00
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4,295,313,700.00**	**6,437,607,795.00**	**6,628,349,718.00**
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37,118,000.00	37,118,000.00	37,118,000.00
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,962,578,900.00	4,811,722,995.00	5,002,464,918.00
1.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	802,330,300.00	802,330,300.00	802,330,300.00
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	61,486,500.00	61,486,500.00	61,486,500.00
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	391,800,000.00	684,950,000.00	684,950,000.00
1.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**99,169,800.00**	**99,169,800.00**	**99,169,800.00**

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	MURNI	PERUBAHAN	INPUTAN
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	99,169,800.00	99,169,800.00	99,169,800.00
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2,176,500,492.00**	**2,296,650,492.00**	**2,301,761,052.00**
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	780,675,400.00	818,925,400.00	818,925,400.00
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,385,825,092.00	1,467,725,092.00	1,472,835,652.00
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5,976,502,600.00**	**7,161,387,328.00**	**6,965,534,845.00**
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65,652,000.00	65,652,000.00	65,652,000.00
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151,790,000.00	151,790,000.00	151,790,000.00
1.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,759,060,600.00	6,943,945,328.00	6,748,092,845.00
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**1,249,288,808.00**	**1,641,058,808.00**	**1,641,058,808.00**
1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**1,249,288,808.00**	**1,641,058,808.00**	**1,641,058,808.00**
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,249,288,808.00	1,641,058,808.00	1,641,058,808.00
1.02.0.00.0.00.01.0004	**UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim**	**72,311,924,750.00**	**81,078,989,066.00**	**81,078,989,066.00**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**22,507,015,440.00**	**30,280,889,151.00**	**30,280,889,151.00**
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4,927,181,040.00**	**5,163,431,040.00**	**5,163,431,040.00**
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,927,181,040.00	5,163,431,040.00	5,163,431,040.00
1.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1,490,943,000.00**	**1,490,943,000.00**	**1,490,943,000.00**
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,490,943,000.00	1,490,943,000.00	1,490,943,000.00
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**8,656,422,500.00**	**8,656,422,500.00**	**8,656,422,500.00**
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	93,111,200.00	93,111,200.00	93,111,200.00
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,332,987,300.00	6,332,987,300.00	6,332,987,300.00
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,230,324,000.00	2,230,324,000.00	2,230,324,000.00
1.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**41,532,300.00**	**41,532,300.00**	**41,532,300.00**
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	41,532,300.00	41,532,300.00	41,532,300.00
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1,517,613,600.00**	**1,662,187,485.00**	**1,662,187,485.00**
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,517,613,600.00	1,662,187,485.00	1,662,187,485.00
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1,873,323,000.00**	**2,321,723,000.00**	**2,321,723,000.00**
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	272,413,000.00	272,413,000.00	272,413,000.00
1.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1,600,910,000.00	2,049,310,000.00	2,049,310,000.00
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**4,000,000,000.00**	**10,944,649,826.00**	**10,944,649,826.00**
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4,000,000,000.00	10,944,649,826.00	10,944,649,826.00
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**49,804,909,310.00**	**50,798,099,915.00**	**50,798,099,915.00**
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**49,804,909,310.00**	**50,798,099,915.00**	**50,798,099,915.00**
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	49,804,909,310.00	50,798,099,915.00	50,798,099,915.00
1.02.0.00.0.00.01.0005	**UPTD Laboratorium Kesehatan**	**44,589,750,564.00**	**84,792,099,906.00**	**84,792,099,906.00**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**9,402,599,064.00**	**26,216,216,210.00**	**21,026,385,308.00**
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2,902,599,064.00**	**13,045,487,820.00**	**7,855,656,917.00**
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	775,576,584.00	889,076,584.00	894,685,000.00
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,127,022,480.00	9,898,046,356.00	3,284,507,267.00

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	MURNI	PERUBAHAN	INPUTAN
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	2,258,364,880.00	3,676,464,650.00
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**6,500,000,000.00**	**13,170,728,390.00**	**13,170,728,391.00**
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6,500,000,000.00	13,170,728,390.00	13,170,728,391.00
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**35,187,151,500.00**	**58,575,883,696.00**	**63,765,714,598.00**
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**35,187,151,500.00**	**58,575,883,696.00**	**63,765,714,598.00**
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	35,187,151,500.00	58,575,883,696.00	63,765,714,598.00
1.02.0.00.0.00.01.0007	**Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI**	**26,175,223,805.00**	**27,576,952,101.00**	**27,576,952,101.00**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**17,218,892,540.00**	**18,219,370,836.00**	**18,175,120,836.00**
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**199,769,500.00**	**199,769,500.00**	**199,769,500.00**
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	199,769,500.00	199,769,500.00	199,769,500.00
1.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1,822,751,500.00**	**1,822,751,500.00**	**1,822,751,500.00**
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,822,751,500.00	1,822,751,500.00	1,822,751,500.00
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4,258,995,180.00**	**5,913,569,080.00**	**5,914,923,200.00**
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24,944,000.00	24,944,000.00	24,944,000.00
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	309,854,410.00	1,964,428,310.00	1,963,916,210.00
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	309,023,876.00	309,023,876.00	309,023,876.00
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	267,208,054.00	267,208,054.00	269,074,274.00
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,347,964,840.00	3,347,964,840.00	3,347,964,840.00
1.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**79,542,700.00**	**79,542,700.00**	**79,542,700.00**
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	79,542,700.00	79,542,700.00	79,542,700.00
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7,508,430,960.00**	**7,948,188,060.00**	**7,902,583,940.00**
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	723,730,800.00	1,985,683,150.00	1,765,042,900.00
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6,784,700,160.00	5,962,504,910.00	6,137,541,040.00
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**349,402,700.00**	**349,402,700.00**	**349,402,700.00**
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	201,817,200.00	201,817,200.00	201,817,200.00
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	147,585,500.00	147,585,500.00	147,585,500.00
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**3,000,000,000.00**	**1,906,147,296.00**	**1,906,147,296.00**
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3,000,000,000.00	1,906,147,296.00	1,906,147,296.00
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**6,364,331,265.00**	**6,364,331,265.00**	**6,364,331,265.00**
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**5,404,748,665.00**	**5,404,748,665.00**	**5,404,748,665.00**
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	2,436,193,965.00	2,436,193,965.00	2,436,193,965.00
1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	259,246,000.00	259,246,000.00	259,246,000.00
1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	117,537,700.00	117,537,700.00	117,537,700.00
1.02.02.1.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	85,280,000.00	85,280,000.00	85,280,000.00
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2,506,491,000.00	2,506,491,000.00	2,506,491,000.00
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**276,382,600.00**	**276,382,600.00**	**276,382,600.00**
1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	276,382,600.00	276,382,600.00	276,382,600.00
1.02.02.1.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**683,200,000.00**	**683,200,000.00**	**683,200,000.00**
1.02.02.1.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	683,200,000.00	683,200,000.00	683,200,000.00

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	MURNI	PERUBAHAN	INPUTAN
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**2,592,000,000.00**	**2,993,250,000.00**	**3,037,500,000.00**
1.02.03.1.01	**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	**2,592,000,000.00**	**2,993,250,000.00**	**3,037,500,000.00**
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2,592,000,000.00	2,993,250,000.00	3,037,500,000.00

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Kesehatan, terlebih dahulu telah dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan OPD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari lapangan dan pengamtanan pelaksanaan musrenbang Provinsi. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan hasil analisis kebutuhan PD.

Usulan awal PD kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui Forum PD dan Forum Musrenbang, baik musrenbang kab/kota dan Provinsi. Dalam kegiatan ini kemudian diinventarisir pula usulan yang masuk melalui Pagu Indikatif Wilayah Provinsi dan Pagu Indikatif Sektoral.

Tabel 2.5 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Timur

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	MURNI	PERUBAHAN	INPUTAN
	Dinas Kesehatan + UPTD	**370,092,982,303**	**551,878,137,252**	**551,878,137,252**
1.02.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kesehatan**	**212,856,688,784**	**340,404,122,956**	**340,404,122,956**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**90,551,349,960.00**	**95,686,507,320.00**	**95,686,507,320.00**
1.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1,647,997,000.00**	**2,082,067,000.00**	**2,082,067,000.00**
1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,172,000,000.00	1,606,070,000.00	1,606,070,000.00
1.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	475,997,000.00	475,997,000.00	475,997,000.00

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	MURNI	PERUBAHAN	INPUTAN
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**62,884,402,837.00**	**63,160,082,837.00**	**63,160,082,837.00**
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	62,515,562,837.00	62,755,962,837.00	62,755,962,837.00
1.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	318,840,000.00	354,120,000.00	354,120,000.00
1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
1.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
1.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
1.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
1.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1,016,888,000.00**	**1,016,888,000.00**	**1,016,888,000.00**
1.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	266,888,000.00	266,888,000.00	266,888,000.00
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**11,095,442,900.00**	**15,203,208,900.00**	**15,203,208,900.00**
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7,683,747,400.00	9,150,757,400.00	9,150,757,400.00
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,281,695,500.00	5,922,451,500.00	5,922,451,500.00
1.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1,834,843,500.00**	**2,577,823,500.00**	**2,577,823,500.00**
1.02.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,834,843,500.00	2,577,823,500.00	2,577,823,500.00
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7,277,017,803.00**	**6,660,594,763.00**	**6,660,594,763.00**
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,710,000,000.00	1,713,120,000.00	1,713,120,000.00
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,547,017,803.00	4,927,474,763.00	4,927,474,763.00
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4,794,757,920.00**	**4,985,842,320.00**	**4,985,842,320.00**
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325,000,000.00	325,000,000.00	325,000,000.00
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4,044,757,920.00	4,235,842,320.00	4,235,842,320.00
1.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	425,000,000.00	425,000,000.00	425,000,000.00
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**116,163,434,824.00**	**231,652,817,964.00**	**231,652,817,964.00**
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**11,891,452,500.00**	**17,079,409,540.00**	**17,079,409,540.00**
1.02.02.1.01.06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	33,600,000.00	33,600,000.00	33,600,000.00
1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	150,880,000.00	150,880,000.00	150,880,000.00
1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2,128,865,194.00	2,784,065,194.00	2,784,065,194.00
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	9,578,107,306.00	14,110,864,346.00	14,110,864,346.00
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**103,272,690,324.00**	**213,574,116,424.00**	**213,574,116,424.00**

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	MURNI	PERUBAHAN	INPUTAN
1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	211,338,500.00	304,438,500.00	304,438,500.00
1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1,055,701,500.00	1,055,701,500.00	1,055,701,500.00
1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3,261,570,328.00	11,422,540,728.00	8,375,990,328.00
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2,982,850,900.00	3,604,197,756.00	6,650,748,156.00
1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2,423,846,100.00	3,845,830,100.00	3,845,830,100.00
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1,375,000,000.00	8,875,000,000.00	8,875,000,000.00
1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2,080,000,000.00	2,465,000,000.00	2,465,000,000.00
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,543,258,900.00	15,022,180,156.00	15,022,180,156.00
1.02.02.1.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	309,919,000.00	309,919,000.00	309,919,000.00
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	577,124,000.00	577,124,000.00	577,124,000.00
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	77,484,741,324.00	73,010,670,924.00	73,010,670,924.00
1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	248,311,600.00	248,311,600.00	248,311,600.00
1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2,938,558,000.00	89,872,637,660.00	89,872,637,660.00
1.02.02.1.02.20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	161,442,000.00	161,442,000.00	161,442,000.00
1.02.02.1.02.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	465,452,500.00	465,452,500.00	465,452,500.00
1.02.02.1.02.23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	84,699,000.00	753,517,000.00	753,517,000.00
1.02.02.1.02.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	55,863,500.00	55,863,500.00	55,863,500.00
1.02.02.1.02.27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1,524,289,500.00	1,524,289,500.00	1,524,289,500.00
1.02.02.1.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**957,292,000.00**	**957,292,000.00**	**957,292,000.00**
1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	957,292,000.00	957,292,000.00	957,292,000.00
1.02.02.1.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**42,000,000.00**	**42,000,000.00**	**42,000,000.00**
1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**2,888,750,000.00**	**5,465,364,672.00**	**5,465,364,672.00**
1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**2,888,750,000.00**	**5,465,364,672.00**	**5,465,364,672.00**
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	4,317,994,672.00	4,317,994,672.00	4,317,994,672.00
1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	124,700,000.00	1,147,370,000.00	1,147,370,000.00
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**737,434,000.00**	**737,434,000.00**	**737,434,000.00**
1.02.04.1.01	**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	**597,242,000.00**	**597,242,000.00**	**597,242,000.00**
1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	597,242,000.00	597,242,000.00	597,242,000.00
1.02.04.1.02	**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**	**140,192,000.00**	**140,192,000.00**	**140,192,000.00**
1.02.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	140,192,000.00	140,192,000.00	140,192,000.00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**2,515,720,000.00**	**6,861,999,000.00**	**6,861,999,000.00**

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	MURNI	PERUBAHAN	INPUTAN
1.02.05.1.02	**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	**930,448,100.00**	**5,201,568,100.00**	**5,201,568,100.00**
1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	790,068,100.00	5,201,568,100.00	5,201,568,100.00
1.02.05.1.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi**	**1,585,271,900.00**	**1,585,271,900.00**	**1,585,271,900.00**
1.02.05.1.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1,585,271,900.00	1,585,271,900.00	1,585,271,900.00
1.02.05.1.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	**1,585,271,900.00**	**75,159,000.00**	**75,159,000.00**
1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	75,159,000.00	75,159,000.00	75,159,000.00
1.02.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Balai Latihan Kesehatan**	**14,159,394,400.00**	**18,025,973,223.00**	**18,025,973,223.00**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**12,910,105,592.00**	**16,384,914,415.00**	**16,384,914,415.00**
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**93,120,000.00**	**120,600,000.00**	**120,600,000.00**
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93,120,000.00	120,600,000.00	120,600,000.00
1.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**269,499,000.00**	**269,499,000.00**	**269,499,000.00**
1.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66,513,000.00	66,513,000.00	66,513,000.00
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	202,986,000.00	202,986,000.00	202,986,000.00
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4,295,313,700.00**	**6,437,607,795.00**	**6,628,349,718.00**
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37,118,000.00	37,118,000.00	37,118,000.00
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,962,578,900.00	4,811,722,995.00	5,002,464,918.00
1.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	802,330,300.00	802,330,300.00	802,330,300.00
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	61,486,500.00	61,486,500.00	61,486,500.00
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	391,800,000.00	684,950,000.00	684,950,000.00
1.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**99,169,800.00**	**99,169,800.00**	**99,169,800.00**
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	99,169,800.00	99,169,800.00	99,169,800.00
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2,176,500,492.00**	**2,296,650,492.00**	**2,301,761,052.00**
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	780,675,400.00	818,925,400.00	818,925,400.00
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,385,825,092.00	1,467,725,092.00	1,472,835,652.00
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5,976,502,600.00**	**7,161,387,328.00**	**6,965,534,845.00**
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65,652,000.00	65,652,000.00	65,652,000.00
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151,790,000.00	151,790,000.00	151,790,000.00
1.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,759,060,600.00	6,943,945,328.00	6,748,092,845.00
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**1,249,288,808.00**	**1,641,058,808.00**	**1,641,058,808.00**
1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**1,249,288,808.00**	**1,641,058,808.00**	**1,641,058,808.00**
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,249,288,808.00	1,641,058,808.00	1,641,058,808.00
1.02.0.00.0.00.01.0004	**UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim**	**72,311,924,750.00**	**81,078,989,066.00**	**81,078,989,066.00**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**22,507,015,440.00**	**30,280,889,151.00**	**30,280,889,151.00**
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4,927,181,040.00**	**5,163,431,040.00**	**5,163,431,040.00**
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,927,181,040.00	5,163,431,040.00	5,163,431,040.00

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	MURNI	PERUBAHAN	INPUTAN
1.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1,490,943,000.00**	**1,490,943,000.00**	**1,490,943,000.00**
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,490,943,000.00	1,490,943,000.00	1,490,943,000.00
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**8,656,422,500.00**	**8,656,422,500.00**	**8,656,422,500.00**
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	93,111,200.00	93,111,200.00	93,111,200.00
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,332,987,300.00	6,332,987,300.00	6,332,987,300.00
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,230,324,000.00	2,230,324,000.00	2,230,324,000.00
1.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**41,532,300.00**	**41,532,300.00**	**41,532,300.00**
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	41,532,300.00	41,532,300.00	41,532,300.00
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1,517,613,600.00**	**1,662,187,485.00**	**1,662,187,485.00**
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,517,613,600.00	1,662,187,485.00	1,662,187,485.00
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1,873,323,000.00**	**2,321,723,000.00**	**2,321,723,000.00**
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	272,413,000.00	272,413,000.00	272,413,000.00
1.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1,600,910,000.00	2,049,310,000.00	2,049,310,000.00
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**4,000,000,000.00**	**10,944,649,826.00**	**10,944,649,826.00**
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4,000,000,000.00	10,944,649,826.00	10,944,649,826.00
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**49,804,909,310.00**	**50,798,099,915.00**	**50,798,099,915.00**
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**49,804,909,310.00**	**50,798,099,915.00**	**50,798,099,915.00**
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	49,804,909,310.00	50,798,099,915.00	50,798,099,915.00
1.02.0.00.0.00.01.0005	**UPTD Laboratorium Kesehatan**	**44,589,750,564.00**	**84,792,099,906.00**	**84,792,099,906.00**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**9,402,599,064.00**	**26,216,216,210.00**	**21,026,385,308.00**
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2,902,599,064.00**	**13,045,487,820.00**	**7,855,656,917.00**
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	775,576,584.00	889,076,584.00	894,685,000.00
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,127,022,480.00	9,898,046,356.00	3,284,507,267.00
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	2,258,364,880.00	3,676,464,650.00
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**6,500,000,000.00**	**13,170,728,390.00**	**13,170,728,391.00**
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6,500,000,000.00	13,170,728,390.00	13,170,728,391.00
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**35,187,151,500.00**	**58,575,883,696.00**	**63,765,714,598.00**
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**35,187,151,500.00**	**58,575,883,696.00**	**63,765,714,598.00**
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	35,187,151,500.00	58,575,883,696.00	63,765,714,598.00
1.02.0.00.0.00.01.0007	**Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI**	**26,175,223,805.00**	**27,576,952,101.00**	**27,576,952,101.00**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**17,218,892,540.00**	**18,219,370,836.00**	**18,175,120,836.00**
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**199,769,500.00**	**199,769,500.00**	**199,769,500.00**
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	199,769,500.00	199,769,500.00	199,769,500.00
1.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1,822,751,500.00**	**1,822,751,500.00**	**1,822,751,500.00**
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,822,751,500.00	1,822,751,500.00	1,822,751,500.00
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4,258,995,180.00**	**5,913,569,080.00**	**5,914,923,200.00**
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24,944,000.00	24,944,000.00	24,944,000.00
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	309,854,410.00	1,964,428,310.00	1,963,916,210.00

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	MURNI	PERUBAHAN	INPUTAN
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	309,023,876.00	309,023,876.00	309,023,876.00
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	267,208,054.00	267,208,054.00	269,074,274.00
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,347,964,840.00	3,347,964,840.00	3,347,964,840.00
1.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**79,542,700.00**	**79,542,700.00**	**79,542,700.00**
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	79,542,700.00	79,542,700.00	79,542,700.00
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7,508,430,960.00**	**7,948,188,060.00**	**7,902,583,940.00**
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	723,730,800.00	1,985,683,150.00	1,765,042,900.00
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6,784,700,160.00	5,962,504,910.00	6,137,541,040.00
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**349,402,700.00**	**349,402,700.00**	**349,402,700.00**
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	201,817,200.00	201,817,200.00	201,817,200.00
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	147,585,500.00	147,585,500.00	147,585,500.00
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**3,000,000,000.00**	**1,906,147,296.00**	**1,906,147,296.00**
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3,000,000,000.00	1,906,147,296.00	1,906,147,296.00
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**6,364,331,265.00**	**6,364,331,265.00**	**6,364,331,265.00**
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**5,404,748,665.00**	**5,404,748,665.00**	**5,404,748,665.00**
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	2,436,193,965.00	2,436,193,965.00	2,436,193,965.00
1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	259,246,000.00	259,246,000.00	259,246,000.00
1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	117,537,700.00	117,537,700.00	117,537,700.00
1.02.02.1.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	85,280,000.00	85,280,000.00	85,280,000.00
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2,506,491,000.00	2,506,491,000.00	2,506,491,000.00
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**276,382,600.00**	**276,382,600.00**	**276,382,600.00**
1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	276,382,600.00	276,382,600.00	276,382,600.00
1.02.02.1.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**683,200,000.00**	**683,200,000.00**	**683,200,000.00**
1.02.02.1.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	683,200,000.00	683,200,000.00	683,200,000.00
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**2,592,000,000.00**	**2,993,250,000.00**	**3,037,500,000.00**
1.02.03.1.01	**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	**2,592,000,000.00**	**2,993,250,000.00**	**3,037,500,000.00**
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2,592,000,000.00	2,993,250,000.00	3,037,500,000.00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan selama periode sebelumnya. Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2020-2024, Kementerian Kesehatan telah menyusun Renstra tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan.

Renstra Kementerian Kesehatan juga menjadi salah satu acuan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Perencanaan yang disusun oleh pemerintah disusun berdasarkan peran dan fungsi serta kewenangan masing-masing bersama

stakeholder terkait dengan mempertimbangkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Perencanaan pembangunan tersebut disusun dengan memperhatikan unsur integrasi dan sinergi sehingga ada keterkaitan antar dokumen perencanaan.

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan merupakan penjabaran teknis bidnag kesehatan atas RPJM nasional. Dokumen perencanaan tersebut merupakan dokumen perencanaan teknis bidang kesehatan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah kebijakan pembangunan kesehatan yang diuraikan dalam rencana program bidang kesehatan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 tidak ada visi dan misi namun mengikuti visi dan misi Presiden yaitu:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan gotong-royong".

Sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 meliputi 12 (dua belas) sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat;
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit;
3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
4. Meningkatnya Akses, Kemandirian dan mutu sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
5. Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan;
6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga;
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri;
8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi;
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan;
10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih;

11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan;
12. Meningkatkan system informasi kesehatan integrasi.

Adapun prioritas pembangunan kesehatan pada tahun 2020-2024 difokuskan pada enam fokus prioritas yaitu:

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;
2. Meningkatnya pengendalian penyakit;
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan Kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan;
5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan Vaksin; serta
6. Meningkatkan responsivitas system kesehatan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur disusun dengan tetap mengacu pada dokumen Rencana strategis Kementerian Kesehatan. Dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan juga menjadi rujukan dalam penyusunan jenis program dan kegiatan serta indikator yang akan dicapai terutama untuk indikator program yang termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

a. Tujuan



Upaya perwujudan Misi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 ditetapkan tujuan sebagai berikut :

"**Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat**"

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Peningkatan mutu dan pelayanan sumber daya kesehatan pada tingkat dasar dan rujukan;
b. Peningkatan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta wabah sejak

dini dengan penguatan system surveillance melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat;

c. Peningkatan pencapaian derajat kesehatan melalui promosi kesehatan dan membangun kemitraan dengan lintas sektor.

b. Sasaran





Untuk mencapai Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan sasaran- sasaran strategis dengan indikator sasaran utama sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat melalui kegiatan :
    1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
    7) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
    8) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

9) Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
10) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
11) Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
12) Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
13) Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
14) Peningkatan Pelayanan BLUD

Melalui Program :

1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
2) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
3) Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
4) Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
5) Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

3.3 Program dan Kegiatan

Kegiatan masing-masing dari seluruh program yang akan dilaksanakan di tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
    - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Peningkatan Pelayanan BLUD

2) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
    - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
    - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan,

UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan

- Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

4) Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman

- Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
- Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)

5) Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

- Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi

Tabel 3.3 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Perubahan tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD Perubahan Tahun 2023, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2023, serta kesepakatan Pemerintah dan DPRD dalam seluruh pembahasan APBD Tahun 2023. Namun, sejalan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, politik baik daerah maupun nasional, evaluasi kinerja Renja Perangkat Daerah, Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat serta kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022, maka diperlukan berbagai langkah respon dan antisipasi terhadap berbagai kondisi tersebut. Langkah-langkah antisipasi tersebut utamanya adalah merubah arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Hal tersebut berdampak pada diperlukannya perubahan terhadap struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam RKPD Perubahan 2023.

4.1 Pagu Indikatif Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Secara garis besar, belanja pemerintah daerah dialokasikan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Kode	Organisasi	RKPD-P 2023 (Rp)
1.02.01	**Dinas Kesehatan**	**Rp. 551.878.137.252,-**
1.02.01.01	Dinas Kesehatan	Rp. 340.404.122.956,-
1.02.01.02	UPTD Balai Latihan Kesehatan	Rp. 18.025.973.223,-
1.02.01.02	UPTD Rumah Sakit Mata	Rp. 81.078.989.066,-
1.02.01.03	UPTD Laboratorium Kesehatan	Rp. 84.792.099.906,-
1.02.01.04	UPTD Rumah Sakit Daerah KORPRI	Rp. 27.576.952.101,-

4.2 Program Kegiatan Belanja Langsung Perangkat Daerah yang Disesuaikan

Secara garis besar, pemerintah daerah telah berupaya optimal menekan adanya SILPA pada tahun sebelumnya. Namun pada beberapa Perangkat Daerah memerlukan strategi yang relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah yang pada akhirnya bermuara pada pengoptimalan capaian positif kinerja pembangunan di tahun berkenaan.

Program/kegiatan yang merupakan penjabaran pagu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 dituangkan pada lampiran RKPD Perubahan 2023 (terlampir)

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	MURNI	PERUBAHAN	INPUTAN
	Dinas Kesehatan + UPTD	**370,092,982,303**	**551,878,137,252**	**551,878,137,252**
1.02.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kesehatan**	**212,856,688,784**	**340,404,122,956**	**340,404,122,956**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**90,551,349,960.00**	**95,686,507,320.00**	**95,686,507,320.00**
1.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1,647,997,000.00**	**2,082,067,000.00**	**2,082,067,000.00**
1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,172,000,000.00	1,606,070,000.00	1,606,070,000.00
1.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	475,997,000.00	475,997,000.00	475,997,000.00
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**62,884,402,837.00**	**63,160,082,837.00**	**63,160,082,837.00**
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	62,515,562,837.00	62,755,962,837.00	62,755,962,837.00
1.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	318,840,000.00	354,120,000.00	354,120,000.00
1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
1.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
1.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
1.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
1.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1,016,888,000.00**	**1,016,888,000.00**	**1,016,888,000.00**
1.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	266,888,000.00	266,888,000.00	266,888,000.00
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**11,095,442,900.00**	**15,203,208,900.00**	**15,203,208,900.00**
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7,683,747,400.00	9,150,757,400.00	9,150,757,400.00
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,281,695,500.00	5,922,451,500.00	5,922,451,500.00
1.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1,834,843,500.00**	**2,577,823,500.00**	**2,577,823,500.00**

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	MURNI	PERUBAHAN	INPUTAN
1.02.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,834,843,500.00	2,577,823,500.00	2,577,823,500.00
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7,277,017,803.00**	**6,660,594,763.00**	**6,660,594,763.00**
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,710,000,000.00	1,713,120,000.00	1,713,120,000.00
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,547,017,803.00	4,927,474,763.00	4,927,474,763.00
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4,794,757,920.00**	**4,985,842,320.00**	**4,985,842,320.00**
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325,000,000.00	325,000,000.00	325,000,000.00
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4,044,757,920.00	4,235,842,320.00	4,235,842,320.00
1.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	425,000,000.00	425,000,000.00	425,000,000.00
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**116,163,434,824.00**	**231,652,817,964.00**	**231,652,817,964.00**
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**11,891,452,500.00**	**17,079,409,540.00**	**17,079,409,540.00**
1.02.02.1.01.06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	33,600,000.00	33,600,000.00	33,600,000.00
1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	150,880,000.00	150,880,000.00	150,880,000.00
1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2,128,865,194.00	2,784,065,194.00	2,784,065,194.00
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	9,578,107,306.00	14,110,864,346.00	14,110,864,346.00
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**103,272,690,324.00**	**213,574,116,424.00**	**213,574,116,424.00**
1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	211,338,500.00	304,438,500.00	304,438,500.00
1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1,055,701,500.00	1,055,701,500.00	1,055,701,500.00
1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3,261,570,328.00	11,422,540,728.00	8,375,990,328.00
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2,982,850,900.00	3,604,197,756.00	6,650,748,156.00
1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2,423,846,100.00	3,845,830,100.00	3,845,830,100.00
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1,375,000,000.00	8,875,000,000.00	8,875,000,000.00
1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2,080,000,000.00	2,465,000,000.00	2,465,000,000.00
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,543,258,900.00	15,022,180,156.00	15,022,180,156.00
1.02.02.1.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	309,919,000.00	309,919,000.00	309,919,000.00
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	577,124,000.00	577,124,000.00	577,124,000.00
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	77,484,741,324.00	73,010,670,924.00	73,010,670,924.00
1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	248,311,600.00	248,311,600.00	248,311,600.00
1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2,938,558,000.00	89,872,637,660.00	89,872,637,660.00
1.02.02.1.02.20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	161,442,000.00	161,442,000.00	161,442,000.00
1.02.02.1.02.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	465,452,500.00	465,452,500.00	465,452,500.00
1.02.02.1.02.23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	84,699,000.00	753,517,000.00	753,517,000.00

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	MURNI	PERUBAHAN	INPUTAN
1.02.02.1.02.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	55,863,500.00	55,863,500.00	55,863,500.00
1.02.02.1.02.27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1,524,289,500.00	1,524,289,500.00	1,524,289,500.00
1.02.02.1.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**957,292,000.00**	**957,292,000.00**	**957,292,000.00**
1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	957,292,000.00	957,292,000.00	957,292,000.00
1.02.02.1.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**42,000,000.00**	**42,000,000.00**	**42,000,000.00**
1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**2,888,750,000.00**	**5,465,364,672.00**	**5,465,364,672.00**
1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**2,888,750,000.00**	**5,465,364,672.00**	**5,465,364,672.00**
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	4,317,994,672.00	4,317,994,672.00	4,317,994,672.00
1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	124,700,000.00	1,147,370,000.00	1,147,370,000.00
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**737,434,000.00**	**737,434,000.00**	**737,434,000.00**
1.02.04.1.01	**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	**597,242,000.00**	**597,242,000.00**	**597,242,000.00**
1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	597,242,000.00	597,242,000.00	597,242,000.00
1.02.04.1.02	**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**	**140,192,000.00**	**140,192,000.00**	**140,192,000.00**
1.02.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	140,192,000.00	140,192,000.00	140,192,000.00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**2,515,720,000.00**	**6,861,999,000.00**	**6,861,999,000.00**
1.02.05.1.02	**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	**930,448,100.00**	**5,201,568,100.00**	**5,201,568,100.00**
1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	790,068,100.00	5,201,568,100.00	5,201,568,100.00
1.02.05.1.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi**	**1,585,271,900.00**	**1,585,271,900.00**	**1,585,271,900.00**
1.02.05.1.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1,585,271,900.00	1,585,271,900.00	1,585,271,900.00
1.02.05.1.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	**1,585,271,900.00**	**75,159,000.00**	**75,159,000.00**
1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	75,159,000.00	75,159,000.00	75,159,000.00
1.02.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Balai Latihan Kesehatan**	**14,159,394,400.00**	**18,025,973,223.00**	**18,025,973,223.00**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**12,910,105,592.00**	**16,384,914,415.00**	**16,384,914,415.00**
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**93,120,000.00**	**120,600,000.00**	**120,600,000.00**
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93,120,000.00	120,600,000.00	120,600,000.00
1.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**269,499,000.00**	**269,499,000.00**	**269,499,000.00**
1.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66,513,000.00	66,513,000.00	66,513,000.00
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	202,986,000.00	202,986,000.00	202,986,000.00
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4,295,313,700.00**	**6,437,607,795.00**	**6,628,349,718.00**
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37,118,000.00	37,118,000.00	37,118,000.00
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,962,578,900.00	4,811,722,995.00	5,002,464,918.00
1.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	802,330,300.00	802,330,300.00	802,330,300.00
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	61,486,500.00	61,486,500.00	61,486,500.00
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	391,800,000.00	684,950,000.00	684,950,000.00
1.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**99,169,800.00**	**99,169,800.00**	**99,169,800.00**
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	99,169,800.00	99,169,800.00	99,169,800.00
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2,176,500,492.00**	**2,296,650,492.00**	**2,301,761,052.00**

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	MURNI	PERUBAHAN	INPUTAN
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	780,675,400.00	818,925,400.00	818,925,400.00
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,385,825,092.00	1,467,725,092.00	1,472,835,652.00
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5,976,502,600.00**	**7,161,387,328.00**	**6,965,534,845.00**
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65,652,000.00	65,652,000.00	65,652,000.00
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151,790,000.00	151,790,000.00	151,790,000.00
1.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,759,060,600.00	6,943,945,328.00	6,748,092,845.00
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**1,249,288,808.00**	**1,641,058,808.00**	**1,641,058,808.00**
1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**1,249,288,808.00**	**1,641,058,808.00**	**1,641,058,808.00**
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,249,288,808.00	1,641,058,808.00	1,641,058,808.00
1.02.0.00.0.00.01.0004	**UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim**	**72,311,924,750.00**	**81,078,989,066.00**	**81,078,989,066.00**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**22,507,015,440.00**	**30,280,889,151.00**	**30,280,889,151.00**
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4,927,181,040.00**	**5,163,431,040.00**	**5,163,431,040.00**
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,927,181,040.00	5,163,431,040.00	5,163,431,040.00
1.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1,490,943,000.00**	**1,490,943,000.00**	**1,490,943,000.00**
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,490,943,000.00	1,490,943,000.00	1,490,943,000.00
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**8,656,422,500.00**	**8,656,422,500.00**	**8,656,422,500.00**
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	93,111,200.00	93,111,200.00	93,111,200.00
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,332,987,300.00	6,332,987,300.00	6,332,987,300.00
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,230,324,000.00	2,230,324,000.00	2,230,324,000.00
1.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**41,532,300.00**	**41,532,300.00**	**41,532,300.00**
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	41,532,300.00	41,532,300.00	41,532,300.00
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1,517,613,600.00**	**1,662,187,485.00**	**1,662,187,485.00**
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,517,613,600.00	1,662,187,485.00	1,662,187,485.00
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1,873,323,000.00**	**2,321,723,000.00**	**2,321,723,000.00**
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	272,413,000.00	272,413,000.00	272,413,000.00
1.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1,600,910,000.00	2,049,310,000.00	2,049,310,000.00
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**4,000,000,000.00**	**10,944,649,826.00**	**10,944,649,826.00**
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4,000,000,000.00	10,944,649,826.00	10,944,649,826.00
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**49,804,909,310.00**	**50,798,099,915.00**	**50,798,099,915.00**
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**49,804,909,310.00**	**50,798,099,915.00**	**50,798,099,915.00**
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	49,804,909,310.00	50,798,099,915.00	50,798,099,915.00
1.02.0.00.0.00.01.0005	**UPTD Laboratorium Kesehatan**	**44,589,750,564.00**	**84,792,099,906.00**	**84,792,099,906.00**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**9,402,599,064.00**	**26,216,216,210.00**	**21,026,385,308.00**
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2,902,599,064.00**	**13,045,487,820.00**	**7,855,656,917.00**
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	775,576,584.00	889,076,584.00	894,685,000.00
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,127,022,480.00	9,898,046,356.00	3,284,507,267.00
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	2,258,364,880.00	3,676,464,650.00
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**6,500,000,000.00**	**13,170,728,390.00**	**13,170,728,391.00**
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6,500,000,000.00	13,170,728,390.00	13,170,728,391.00

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	MURNI	PERUBAHAN	INPUTAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**35,187,151,500.00**	**58,575,883,696.00**	**63,765,714,598.00**
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**35,187,151,500.00**	**58,575,883,696.00**	**63,765,714,598.00**
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	35,187,151,500.00	58,575,883,696.00	63,765,714,598.00
1.02.0.00.0.00.01.0007	**Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI**	**26,175,223,805.00**	**27,576,952,101.00**	**27,576,952,101.00**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**17,218,892,540.00**	**18,219,370,836.00**	**18,175,120,836.00**
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**199,769,500.00**	**199,769,500.00**	**199,769,500.00**
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	199,769,500.00	199,769,500.00	199,769,500.00
1.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1,822,751,500.00**	**1,822,751,500.00**	**1,822,751,500.00**
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,822,751,500.00	1,822,751,500.00	1,822,751,500.00
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4,258,995,180.00**	**5,913,569,080.00**	**5,914,923,200.00**
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24,944,000.00	24,944,000.00	24,944,000.00
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	309,854,410.00	1,964,428,310.00	1,963,916,210.00
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	309,023,876.00	309,023,876.00	309,023,876.00
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	267,208,054.00	267,208,054.00	269,074,274.00
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,347,964,840.00	3,347,964,840.00	3,347,964,840.00
1.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**79,542,700.00**	**79,542,700.00**	**79,542,700.00**
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	79,542,700.00	79,542,700.00	79,542,700.00
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7,508,430,960.00**	**7,948,188,060.00**	**7,902,583,940.00**
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	723,730,800.00	1,985,683,150.00	1,765,042,900.00
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6,784,700,160.00	5,962,504,910.00	6,137,541,040.00
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**349,402,700.00**	**349,402,700.00**	**349,402,700.00**
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	201,817,200.00	201,817,200.00	201,817,200.00
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	147,585,500.00	147,585,500.00	147,585,500.00
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**3,000,000,000.00**	**1,906,147,296.00**	**1,906,147,296.00**
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3,000,000,000.00	1,906,147,296.00	1,906,147,296.00
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**6,364,331,265.00**	**6,364,331,265.00**	**6,364,331,265.00**
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**5,404,748,665.00**	**5,404,748,665.00**	**5,404,748,665.00**
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	2,436,193,965.00	2,436,193,965.00	2,436,193,965.00
1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	259,246,000.00	259,246,000.00	259,246,000.00
1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	117,537,700.00	117,537,700.00	117,537,700.00
1.02.02.1.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	85,280,000.00	85,280,000.00	85,280,000.00
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2,506,491,000.00	2,506,491,000.00	2,506,491,000.00
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**276,382,600.00**	**276,382,600.00**	**276,382,600.00**
1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	276,382,600.00	276,382,600.00	276,382,600.00
1.02.02.1.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**683,200,000.00**	**683,200,000.00**	**683,200,000.00**
1.02.02.1.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	683,200,000.00	683,200,000.00	683,200,000.00
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**2,592,000,000.00**	**2,993,250,000.00**	**3,037,500,000.00**
1.02.03.1.01	**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	**2,592,000,000.00**	**2,993,250,000.00**	**3,037,500,000.00**
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2,592,000,000.00	2,993,250,000.00	3,037,500,000.00

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2023 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Dinas Kesehatan disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Perubahan).

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2023 mencakup tiga bahasan yaitu:

A. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang.

B. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholder), tetap harus dikedepankan.

C. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan

untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrument pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja Perubahan ini disusun untuk dijadikan pedoman dan anggaran tahun 2023.

Samarinda, Agustus 2023

Kepala Dinas Kesehatan,

Dr. dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
Pembina Tingkat I / IV B
NIP. 19710720 200604 1 002

PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD. A. WAHAB SYAHRANIE SAMARINDA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 RSUD A.W. Sjahranie Kalimantan Timur merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan yang disusun dan juga merupakan tahapan kedua dari Renstra RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2019-2023. Penyusunan Renja RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2023 memiliki posisi strategis dalam perumusan program dan kegiatan. Kebijakan yang akan diambil dalam periode ini menjadi indikator keberhasilan rencana strategis RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2019 – 2023, sehingga memerlukan optimalisasi dalam mengevaluasi rencana kerja (Renja) periode sebelumnya serta memonitor pelaksanaan pembangunan tahun berjalan.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Perubahan RKPD yang telah disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a) Perkembangan isu strategis global dan nasional yang mempengaruhi arah kebijakan pembangunan nasional, asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
b) Terdapatnya Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya (SiLPA Tahun 2022) berdasarkan hasil Audit BPK yang harus digunakan pada tahun 2023 dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan pada RPJMD Kaltim 2019-2023;
c) Capaian realisasi kinerja pembangunan Tahun 2023 yang berdasarkan hasil evaluasi triwulan II belum mencapai target yang

ditentukan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian program/kegiatan dan target kinerja yang telah direncanakan.

Adapun penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja dilakukan simultan dengan Perubahan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada :

a. Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja RSUD A. W. Sjahranie hingga triwulan II tahun 2023

Renja RSUD A. W. Sjahranie Tahun 2023 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pagu indikatif dan prakiraan maju. Sebagai penjabaran dari pelaksanaan Renstra Tahun kedua, maka Renja menjadi pedoman penyusunan RKA Tahun 2024. Demikian Renja RSUD A. W. Sjahranie disusun mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Prioritas Renja Tahun 2023 diarahkan untuk memanfaatkan potensi unggulan pelayanan medis dengan menggunakan alat canggih serta dukungan percepatan pembangunan konektifitas infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana. Pada tahun ini juga dilaksanakan pembangunan Gedung Perawatan Pandurata yang menjadi program Prioritas RSUD A. W. Sjahranie dan rencananya dilaksanakan di tahun 2023 dan selesai pada tahun 2026.

Dokumen Perubahan Renja RSUD A. W. Sjahranie Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sehingga penetapan target tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renja harus mendukung percepatan pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023. Selanjutnya Perubahan Renja dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2023 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 melalui penetapan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Kalimanran Timur Tahun 2023

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 RSUD A. W. Sjahranie Kalimantan Timur mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
11. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
17. Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Program, yang menjelaskan secara rinci tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegaiatan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2024-2026. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Permendagri No 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2022.
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
21. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur; Tahun 2005-2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD A. W. Sjahranie Tahun 2023 adalah untuk melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan Program/Kegiatan/Subkegiatan sebagai pedoman dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan RSUD A. W. Sjahranie untuk periode 1 (satu) tahun.

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Renja RSUD A. W. Sjahranie Tahun 2023 antara lain:

1. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/ kinerja;
2. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan RSUD A. W. Sjahranie yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
3. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit yang efektif dan efisien;
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Renja RSUD A. W. Sjahranie Tahun 2024 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan;

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen Perubahan Renja

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023;

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 pada Triwulan I dan Triwulan II;

BAB III Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah;

Memuat Tujuan dan Sasaran perangkat daerah serta program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2022 yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan

BAB IV Penutup

Memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2022.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan RSUD A. W. Sjahranie melalui pencapaian target tujuan dan sasaran perangkat daerah pada tahun 2023 serta capaian program/ kegiatan/subkegiatan yang telah ditetapkan pada Renja tahun 2023. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 diharapkan mampu mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan pada dokumen perencanaan menengah perangkat daerah yakni Renstra RSUD A. W. Sjahranie Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja RSUD A.W. Sjahranie Kalimantan Timur Tahun 2023 dilakukan untuk menyusun prioritas dan sasaran program dan kegiatan Tahun 2023, serta untuk menjamin konsistensi pelaksanaan antara RKA-PD dan Renja-PD, yang merupakan pelaksanaan dari Renstra RSUD AWS Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Pada bagian ini dianalisa seberapa besar tingkat capaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, kendala-kendala yang dihadapi, serta prioritas dan sasaran pembangunan yang masih membutuhkan tindakan lebih lanjut. Dari hasil evaluasi tersebut selanjutnya ditentukan prioritas dan sasaran program serta kegiatan di Tahun 2023.

Pelaksanaan Renja RSUD A. W. Sjahranie Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 diharuskan untuk selaras dengan yang akan dilaksanakan melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023. Program/ Kegiatan/Subkegiatan yang dilaksanakan pada APBD tahun anggaran 2023 harus telah direncanakan pada Renja tahun 2023 dan tidak ada penambahan program/kegiatan/subkegiatan. Secara rinci gambaran pelaksanaan Renja tahun 2023 pada APBD Tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut berikut:

Tabel 2.1
Konsistensi Program/Kegiatan/Subkegiatan Renja Tahun 2023 dengan APBD Tahun 2023

Kode			Program dan Kegiatan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun Anggaran 2023				Keterangan
				Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan**	**88,70** **Nilai**	**592.688.123.350**	**Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan**	**88,70**	**Nilai**	**626.691.815.726**	**Konsisten**
	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	78 Nilai	381.470.000	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	78	Nilai	405.754.000	Konsisten
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	260.220.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	263.504.000	Konsisten
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42 Laporan	121.250.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42	Laporan	142.250.000	Konsisten
	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan RS	80 Persen	171.121.349.342	Presentase Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan RS	80	Persen	201.223.827.268	Konsisten
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	854 Orang / Bulan	170.670.339.071	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	910	Orang / Bulan	200.843.737.268	Perubahan Target Kinerja
		03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	346.680.271	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	Dokumen	276.960.000	Konsisten

Kode			Program dan Kegiatan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun Anggaran 2023				Keterangan
				Indikator	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
		05	Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	21	Dokumen	104.330.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	21	Dokumen	103.130.000	Konsisten
	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian jumlah laporan administrasi barang RS	100	Persen	7.170.000	Persentase capaian jumlah laporan administrasi barang RS	100	Persen	7.170.000	Konsisten
		04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	2	Laporan	7.170.000	Jumlah Laporan hasil Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	1	Laporan	7.170.000	Perubahan Target Kinerja
	1.05		Administrasi kepegawaian Daerah	Persentase kinerja kepegawaian RS	85	Persen	67.120.000	Persentase kinerja kepegawaian RS	85	Persen	827.190.000	Konsisten
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	3	Paket	10.000.000	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1	Paket	827.190.000	Perubahan Target Kinerja
		09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8	Orang	53.460.000	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8	Orang	-	Tidak dilaksanakan
		10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	40	Orang	3.660.000	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	40	Orang	-	Tidak dilaksanakan

Kode			Program dan Kegiatan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun Anggaran 2023			Keterangan
				Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS	90 Persen	999.019.500	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS	90 Persen	1.063.854.558	Konsisten
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	274 Paket	229.000.000	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	2 Paket	204.000.000	Perubahan Target Kinerja
		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggadaaan yang di sediakan	1 Paket	61.947.500	Jumlah paket barang cetakan dan penggadaaan yang di sediakan	3 Paket	58.782.558	Perubahan Target Kinerja
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraaan rapat kordinasi dan konslutasi SKPD	63 Laporan	708.072.000	Jumlah laporan penyelenggaraaan rapat kordinasi dan konslutasi SKPD	99 Laporan	801.072.000	Perubahan Target Kinerja
	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan	100 Persen	1.041.030.000	Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan	100 Persen	3.578.150.900	Konsisten
		01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	3 Unit	523.750.000	Jumlah Unit kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	4 Unit	2.095.000.000	Perubahan Target Kinerja
		02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaran dinas operasional atau lapangan yang disediakan	3 Unit	206.000.000	Jumlah Unit kendaran dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	830.590.800	Perubahan Target Kinerja
		05	Pengadaan Mebel	Jenis Paket Mabel yang disediakan	29 Paket	59.740.000	Jenis Paket Mabel yang disediakan	10 Paket	170.551.000	Perubahan Target Kinerja

Kode			Program dan Kegiatan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun Anggaran 2023				Keterangan
				Indikator	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	50	Unit	251.540.000	Jenis Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	70	Unit	482.009.100	Perubahan Target Kinerja
	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .	Persentase capaian jasa penunjang rumah sakit	100	Persen	10.000.000	Persentase capaian jasa penunjang rumah sakit	0	Persen	-	Tidak dilaksanakan
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	10.000.000	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	0	Laporan	-	Tidak dilaksanakan
	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	100	Persen	1.060.964.508	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	100	Persen	1.585.869.000	Konsisten
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	31	Unit	277.656.000	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	31	Unit	279.921.000	Konsisten
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	10	Unit	317.700.000	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	4	Unit	317.000.000	Perubahan Target Kinerja
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitas	1	Unit	465.608.508	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitas	4	Unit	988.948.000	Perubahan Target Kinerja
	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase capaian hasil kinerja BLUD	80	Persen	418.000.000.000	Persentase capaian hasil kinerja BLUD	80	Persen	418.000.000.000	Konsisten

Kode			Program dan Kegiatan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun Anggaran 2023				Keterangan
				Indikator	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
		01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	418.000.000.000	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	418.000.000.000	Konsisten
02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Nilai capaian Indikator Kinerja Utama [IKU] Rumah Sakit Sesuai standar**	**80**	**Persen**	**1.637.145.650**	**Nilai capaian Indikator Kinerja Utama [IKU] Rumah Sakit Sesuai standar**	**80**	**Persen**	**90.458.660.065**	**Konsisten**
	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan RS yang dimanfaatkan	100	Persen	661.335.650	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan RS yang dimanfaatkan	100	Persen	89.451.466.665	Konsisten
		01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi Rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:100	1	Unit	294.859.750	Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi Rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:100	1	Unit	7.081.308.700	Konsisten
		10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	139	Unit	259.025.900	Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	139	Unit	81.145.157.965	Konsisten
		17	Pemeliharaan alat Kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas layanan	Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	1299	Unit	10.000.000	Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	1299	Unit	1.225.000.000	Konsisten

Kode			Program dan Kegiatan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun Anggaran 2023				Keterangan
				Indikator	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
		22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, makanan dan Minumam serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang disediakan	1	Paket	97.450.000	Jumlah Obat, Vaksin, makanan dan Minumam serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang disediakan	0	Paket	-	Tidak dilaksanakan
	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal [SPM] RS	87	Nilai	288.200.000	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal [SPM] RS	87	Nilai	283.200.000	Konsisten
		09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	5	Dokumen	5.000.000	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	0	Dokumen	-	Tidak dilaksanakan
		28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah dokumen pengelolaan penelitian kesehatan	11	Dokumen	283.200.000	Jumlah dokumen pengelolaan penelitian kesehatan	11	Dokumen	283.200.000	Konsisten
	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Pelaksanaan Sistem informasi RS	100	Persen	189.190.000	Persentase Pelaksanaan Sistem informasi RS	100	Persen	230.915.400	Konsisten
		1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3	Dokumen	2.500.000	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	0	Dokumen	-	Tidak dilaksanakan
		2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolalan Sistem Informasi Kesehatan	2	Dokumen	2.500.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolalan Sistem Informasi Kesehatan	0	Dokumen	-	Tidak dilaksanakan
		3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internat yang tersedia	1	Unit	184.190.000	Jumlah Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internat yang tersedia	30	Unit	230.915.400	Perubahan Target Kinerja

Kode			Program dan Kegiatan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun Anggaran 2023			Keterangan
				Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase capaian tata kelola dan mutu pelayanan Rumah Sakit	85 Persen	498.420.000	Persentase capaian tata kelola dan mutu pelayanan Rumah Sakit	85 Persen	493.078.000	Konsisten
		02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah RS yang melakukan Peningkatan tata kelola sesuai standar	1 Unit	138.420.000	Jumlah RS yang melakukan Peningkatan tata kelola sesuai standar	1 Unit	121.260.000	Konsisten
		03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	1 Unit	360.000.000	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	1 Unit	371.818.000	Konsisten
03			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS**	**85 Persen**	**989.950.000**	**Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS**	**85 Persen**	**1.267.364.000**	**Konsisten**
	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase jumlah SDM yang terlatih sesuai kompetensinya	65 Persen	989.950.000	Persentase jumlah SDM yang terlatih sesuai kompetensinya	65 Persen	1.267.364.000	Konsisten
		01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase jumlah SDM yang terlatih sesuai kompetensinya	386 Orang	989.950.000	Persentase jumlah SDM yang terlatih sesuai kompetensinya	386 Orang	1.267.364.000	Konsisten
TOTAL						**595.315.219.000**	**TOTAL**		**718.417.839.791**	

Berdasarkan data di atas, terdapat beberapa Program/Kegiatan/ Subkegiatan yang tidak sesuai antara Indikator pada Renja Tahun 2023 dengan APBD Tahun 2023, juga ada beberapa sub kegiatan yang tidak dilaksanakan. Adapun penyebab inkonsistensi yang terjadi pada pelaksanaan renja yang dimaksud dikarenakan :

1. Terdapat penggabungan target kinerja beberapa sub kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil asistensi RKA tahun 2023;
2. Inkonsistensi pada indikator dan target kinerja dikarenakan kesalahan dalam perumusan target dan indikator kinerja pada tahap penyusunan Renja tahun 2023;
3. Beberapa subkegiatan telah terakomodir di BLUD sehingga pelaksanaan subkegiatan tersebut menggunakan anggaran BLUD.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 bertujuan untuk memastikan pagu indikatif yang telah dianggarkan pada APBD tahun 2023 atau DPA tahun 2023 telah efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja (output) yang telah direncanakan pada Renja serta memastikan target kinerja sub kegiatan yang telah direncanakan efektif dalam pencapaian target kinerja pada kegiatan dan program.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 sampai dengan triwulan II ini diharapkan akan menjadi bahan untuk penyusunan perubahan Renja tahun 2023, sehingga rencana pembangunan yang ditetapkan dapat direalisasikan pada tahun 2023. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 sampai dengan triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Pagu Renja 2023			Realisasi 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran		Predikat	
								Triwulan I		Triwulan II					
					K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)		(8)	
01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan**	**88,70**	**Nilai**	**592.688.123.350**	**0,00**	**152.043.479.416**	**77,70**	**327.090.039.061**	**88,30**	**52,19**	**T**	**R**
	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	78	Nilai	381.470.000	17	62.490.416	76	135.852.650	97,92	33,48	ST	SR
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	260.220.000	4	27.260.043	10	96.872.277	100,00	36,76	ST	SR
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42	Laporan	121.250.000	26	35.230.373	30	38.980.373	71,43	27,40	S	SR
	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan RS	80	Persen	171.121.349.342	15	28.577.441.129	73	80.152.086.689	91,25	39,83	ST	SR
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	854	Orang / Bulan	170.670.339.071	910	28.529.595.629	896	79.991.114.992	98,46	39,83	ST	SR
		03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	Dokumen	346.680.271	2	47.845.500	18	132.038.510	75,00	47,67	S	SR
		05	Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	21	Dokumen	104.330.000	0	-	15	28.933.187	71,43	28,06	S	SR
	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian jumlah laporan administrasi barang RS	100	Persen	7.170.000	0	-	50	-	50,00	0,00	SR	SR
		04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	2	Laporan	7.170.000	0	-	5	-	500,00	0,00	ST	SR
	1.05		Administrasi kepegawaian Daerah	Persentase kinerja kepegawaian RS	85	Persen	67.120.000	0	-	34	-	40,00	0,00	SR	SR

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Pagu Renja 2023			Realisasi 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran		Predikat	
								Triwulan I		Triwulan II					
					K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)		(8)	
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	3	Paket	10.000.000	0	-	0	-	0,00	0,00	SR	SR
		09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8	Orang	53.460.000								
		10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	40	Orang	3.660.000								
	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS	90	Persen	999.019.500	9	94.200.309	46	411.464.633	51,11	38,68	R	SR
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	274	Paket	229.000.000	1	5.000.000	1	96.999.575	50,00	47,55	SR	SR
		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggadaaan yang di sediakan	1	Paket	61.947.500	0	-	2	52.962.700	66,67	90,10	S	T
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraaan rapat kordinasi dan konslutasi SKPD	63	Laporan	708.072.000	10	89.200.309	26	261.502.358	26,26	32,64	SR	SR
	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan	100	Persen	1.041.030.000	0	-	46	1.659.648.000	46,00	46,38	SR	SR
		01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	3	Unit	523.750.000	0	-	4	1.473.600.000	100,00	70,34	ST	S
		02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaran dinas operasional atau lapangan yang disediakan	3	Unit	206.000.000	0	-	0	-	0,00	0,00	SR	SR
		05	Pengadaan Mebel	Jenis Paket Mabel yang disediakan	29	Paket	59.740.000	0	-	0	-	0,00	0,00	SR	SR
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	50	Unit	251.540.000	0	-	27	186.048.000	38,57	38,60	SR	SR

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Pagu Renja 2023			Realisasi 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran		Predikat	
								Triwulan I		Triwulan II					
					K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)		(8)	
	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .	Persentase capaian jasa penunjang rumah sakit	100	Persen	10.000.000								
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	10.000.000								
	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	100	Persen	1.060.964.508	1	2.253.371	20	3.023.371	20,00	0,19	SR	SR
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	31	Unit	277.656.000	1	2.253.371	19	3.023.371	61,29	1,08	R	SR
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	10	Unit	317.700.000	0	-	0	-	0,00	0,00	SR	SR
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitas	1	Unit	465.608.508	0	-	2	-	50,00	0,00	SR	SR
	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase capaian hasil kinerja BLUD	80	Persen	418.000.000.000	33	123.307.094.191	74	244.727.963.718	93,00	58,55	ST	R
		01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	418.000.000.000	1	123.307.094.191	1	244.727.963.718	100,00	58,55	ST	R
02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Nilai capaian Indikator Kinerja Utama [IKU] Rumah Sakit Sesuai standar**	**80**	**Persen**	**1.637.145.650**	**0**	**1.330.000**	**50**	**1.330.000**	**62,50**	**0,00**	**R**	**SR**
	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan RS yang dimanfaatkan	100	Persen	661.335.650	0	-	45	-	45,00	0,00	SR	SR

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Pagu Renja 2023			Realisasi 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran		Predikat	
								Triwulan I		Triwulan II					
					K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)		(8)	
		01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi Rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:100	1	Unit	294.859.750		-		-		0,00	SR	SR
		10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	139	Unit	259.025.900	0	-	96	-	63,58	0,00	R	SR
		17	Pemeliharaan alat Kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas layanan	Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	1299	Unit	10.000.000	0	-	0	-	0,00	0,00	SR	SR
		22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, makanan dan Minumam serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang disediakan	1	Paket	97.450.000								
	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal [SPM] RS	87	Nilai	288.200.000	0	-	78	-	88,64	0,00	T	SR
		09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	5	Dokumen	5.000.000								
		28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah dokumen pengelolaan penelitian kesehatan	11	Dokumen	283.200.000	0	-	0	-	0,00	0,00	SR	SR
	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Pelaksanaan Sistem informasi RS	100	Persen	189.190.000	1	1.330.000	1	1.330.000	1,25	0,58	SR	SR
		1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3	Dokumen	2.500.000								
		2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolalan Sistem Informasi Kesehatan	2	Dokumen	2.500.000								
		3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem	Jumlah Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan	1	Unit	184.190.000	2	1.330.000	10	1.330.000	33,33	0,58	SR	SR

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Pagu Renja 2023			Realisasi 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran		Predikat	
								Triwulan I		Triwulan II					
					K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)		(8)	
			Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jaringan Internat yang tersedia											
	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase capaian tata kelola dan mutu pelayanan Rumah Sakit	85	Persen	498.420.000	0	-	10	-	11,76	0,00	SR	SR
		02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah RS yang melakukan Peningkatan tata kelola sesuai standar	1	Unit	138.420.000	0	-	1	-	100,00	0,00	ST	SR
		03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	1	Unit	360.000.000	0	-	0	-	0,00	0,00	SR	SR
03			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS**	**85**	**Persen**	**989.950.000**	**18**	**159.967.266**	**25**	**353.434.373**	**29,41**	**27,89**	**SR**	**SR**
	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase jumlah SDM yang terlatih sesuai kompetensinya	65	Persen	989.950.000	18	159.967.266	25	353.434.373	38,46	27,89	SR	SR
		01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase jumlah SDM yang terlatih sesuai kompetensinya	386	Orang	989.950.000	69	159.967.266	270	353.434.373	69,95	27,89	S	SR
TOTAL							**595.315.219.000**						**45,58**		**SR**

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan antara lain :

1. Keterlambatan terbitnya DPA sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan;
2. Keterlambatan pada pengadaan barang modal karena adanya kebijakan pemerintah pusat yang harus memenuhi proporsi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pembelian barang;
3. Beberapa pengadaan barang masih berproses, ada yang sedang dalam pengiriman.
4. Pembangunan fisik masih dalam proses lelang.

Berdasarkan beberapa penghambat yang menjadi penyebab dalam rendahnya realisasi kinerja keuangan hingga triwulan II tahun 2023, beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian dan memaksimalkan penyerapan anggaran antara lain :

1. Melakukan evaluasi realisasi belanja yang dilakukan secara periodik kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selaku pelaksana kegiatan yang disesuaikan dengan rencana realisasi kegiatan dan rencana aliran kas;
2. Melakukan percepatan pelaksanaan belanja modal dan belanja barang jasa pada masing-masing sub kegiatan.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran ouput kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara rinci, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada perubahan Rencana Kerja RSUD A. W. Sjahranie Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah RSUD A. W. Sjahranie Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja		Target			Lokasi	Pagu Indikatif	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Satuan		Sebelum	Sesudah
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan**	**Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan**	**88,70**	**88,70**	**Nilai**	**Samarinda**	**592.688.123.350**	**704.108.637.669**
	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	78	78	Nilai	Samarinda	381.470.000	405.754.000
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	10	Dokumen	Samarinda	260.220.000	263.504.000
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42	42	Laporan	Samarinda	121.250.000	142.250.000
	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan RS	Presentase Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan RS	80	80	Persen	Samarinda	171.121.349.342	201.332.067.268
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	854	910	Orang / Bulan	Samarinda	170.670.339.071	200.843.737.268
		03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	24	Dokumen	Samarinda	346.680.271	385.200.000

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja		Target			Lokasi	Pagu Indikatif	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Satuan		Sebelum	Sesudah
		05	Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	21	21	Dokumen	Samarinda	104.330.000	103.130.000
	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian jumlah laporan administrasi barang RS	Persentase capaian jumlah laporan administrasi barang RS	100	100	Persen	Samarinda	7.170.000	7.170.000
		04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	2	1	Laporan	Samarinda	7.170.000	7.170.000
	1.05		Administrasi kepegawaian Daerah	Persentase kinerja kepegawaian RS	Persentase kinerja kepegawaian RS	85	85	Persen	Samarinda	67.120.000	827.190.000
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	3	1	Paket	Samarinda	10.000.000	827.190.000
		09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8	8	Orang	Samarinda	53.460.000	-
		10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	40	40	Orang	Samarinda	3.660.000	-

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja		Target			Lokasi	Pagu Indikatif	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Satuan		Sebelum	Sesudah
	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS	90	90	Persen	Samarinda	999.019.500	1.063.854.558
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	274	2	Paket	Samarinda	229.000.000	204.000.000
		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggadaaan yang di sediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggadaaan yang di sediakan	1	3	Paket	Samarinda	61.947.500	58.782.558
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraaan rapat kordinasi dan konslutasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraaan rapat kordinasi dan konslutasi SKPD	63	99	Laporan	Samarinda	708.072.000	801.072.000
	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan	Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan	100	100	Persen	Samarinda	1.041.030.000	3.869.684.900
		01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Jumlah Unit kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	3	4	Unit	Samarinda	523.750.000	2.095.000.000
		02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaran dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah Unit kendaran dinas operasional atau lapangan yang disediakan	3	1	Unit	Samarinda	206.000.000	830.590.800
		05	Pengadaan Mebel	Jenis Paket Mabel yang disediakan	Jenis Paket Mabel yang disediakan	29	10	Paket	Samarinda	59.740.000	170.551.000

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja		Target			Lokasi	Pagu Indikatif	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Satuan		Sebelum	Sesudah
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jenis Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	50	92	Unit	Samarinda	251.540.000	773.543.100
	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .	Persentase capaian jasa penunjang rumah sakit	Persentase capaian jasa penunjang rumah sakit	100	0	Persen	Samarinda	10.000.000	-
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	0	Laporan	Samarinda	10.000.000	-
	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	100	100	Persen	Samarinda	1.060.964.508	1.585.869.000
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	31	31	Unit	Samarinda	277.656.000	279.921.000
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	10	4	Unit	Samarinda	317.700.000	317.000.000
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitas	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitas	1	4	Unit	Samarinda	465.608.508	988.948.000
	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase capaian hasil kinerja BLUD	Persentase capaian hasil kinerja BLUD	80	80	Persen	Samarinda	418.000.000.000	495.017.047.943

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja		Target			Lokasi	Pagu Indikatif	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Satuan		Sebelum	Sesudah
		01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	Unit Kerja	Samarinda	418.000.000.000	495.017.047.943
02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Nilai capaian Indikator Kinerja Utama [IKU] Rumah Sakit Sesuai standar**	**Nilai capaian Indikator Kinerja Utama [IKU] Rumah Sakit Sesuai standar**	**80**	**80**	**Persen**	**Samarinda**	**1.637.145.650**	**110.058.886.066**
	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan RS yang dimanfaatkan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan RS yang dimanfaatkan	100	100	Persen	Samarinda	661.335.650	109.051.692.666
		01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi Rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:100	Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi Rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:100	1	1	Unit	Samarinda	294.859.750	7.081.308.700
		10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	139	337	Unit	Samarinda	259.025.900	100.745.383.966
		17	Pemeliharaan alat Kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas layanan	Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	1299	1299	Unit	Samarinda	10.000.000	1.225.000.000

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja		Target			Lokasi	Pagu Indikatif	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Satuan		Sebelum	Sesudah
		22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, makanan dan Minumam serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang disediakan	Jumlah Obat, Vaksin, makanan dan Minumam serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang disediakan	1	0	Paket	Samarinda	97.450.000	-
	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal [SPM] RS	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal [SPM] RS	87	87	Nilai	Samarinda	288.200.000	283.200.000
		09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	5	0	Dokumen	Samarinda	5.000.000	-
		28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah dokumen pengelolaan penelitian kesehatan	Jumlah dokumen pengelolaan penelitian kesehatan	11	11	Dokumen	Samarinda	283.200.000	283.200.000
	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Pelaksanaan Sistem informasi RS	Persentase Pelaksanaan Sistem informasi RS	100	100	Persen	Samarinda	189.190.000	230.915.400
		1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3	0	Dokumen	Samarinda	2.500.000	-
		2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolalan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolalan Sistem Informasi Kesehatan	2	0	Dokumen	Samarinda	2.500.000	-
		3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internat yang tersedia	Jumlah Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internat yang tersedia	1	30	Unit	Samarinda	184.190.000	230.915.400

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja		Target			Lokasi	Pagu Indikatif	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Satuan		Sebelum	Sesudah
	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase capaian tata kelola dan mutu pelayanan Rumah Sakit	Persentase capaian tata kelola dan mutu pelayanan Rumah Sakit	85	85	Persen	Samarinda	498.420.000	493.078.000
		02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah RS yang melakukan Peningkatan tata kelola sesuai standar	Jumlah RS yang melakukan Peningkatan tata kelola sesuai standar	1	1	Unit	Samarinda	138.420.000	121.260.000
		03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	1	1	Unit	Samarinda	360.000.000	371.818.000
03			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS**	**Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS**	**85**	**85**	**Persen**	**Samarinda**	**989.950.000**	**1.267.364.000**
	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase jumlah SDM yang terlatih sesuai kompetensinya	Persentase jumlah SDM yang terlatih sesuai kompetensinya	65	65	Persen	Samarinda	989.950.000	1.267.364.000
		01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase jumlah SDM yang terlatih sesuai kompetensinya	Persentase jumlah SDM yang terlatih sesuai kompetensinya	386	386	Orang	Samarinda	989.950.000	1.267.364.000
TOTAL										**595.315.219.000**	**815.434.887.735**

BAB IV
PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja

Perubahan Rencana Kerja RSUD A.W. Sjahranie menjadi penting dan harus dilaksanakan sebagai langkah pengambilan kebijakan dalam menangani persoalan–persoalan terkait penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab pemerintah dalam bidang kesehatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dengan ketersediaan dana yang telah ditetapkan.

4.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan untuk:

1. Bahan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023
2. Acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran & Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (RKA/DPA–SKPD) RSUD A.W. Sjahranie
3. Acuan pelaksanaan program & kegiatan bagi RSUD A.W. Sjahranie di 2023

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Perubahan RSUD A. W. Sjahranie Tahun 2023 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja RSUD A.W. Sjahranie. Semoga Renja RSUD. A. W. Sjahranie periode tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2023.

Samarinda, 16 Agustus 2023

Direktur

dr. David Hariadi M., Sp.OT., M.K.M (MARS)

NIP. 196503141998031001

PERUBAHAN RENCANA KERJA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
BALIKPAPAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Perkembangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar terjadi setiap saat bahkan sangat cepat. Adaptasi untuk mengimbangi terjadinya perubahan tersebut sangat dibuuthkan agar semua yang akan dilaksakanan dapat sesuai dengan perubahan yang terjadi. Demikian juga denga perkembangan dalam suatu organisasi tentu sangat dipegaruhi oleh lingkungan sekitar nya. Untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi dibutuhkan suatu Langkah yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Langkah awal dibutuhkan suatu perencanaan yang aktif, dinamis, berkesinambungan, serta lebih kreatif.

Langkah atau kebijakan yang dilakukan dalam upaya menjalankan rencanan dan tujuan organisasi megacu pada prioritas yang dihadapi. Setiap Langkah yang diambil dipastikan bahwa prioritas telah sesuai dengna koridornya. Penetapan program dan kegiatan disesuaiakan dengan alokasi anggaran yang akan ditetapkan agar semua yang direncanakan dapat berjalan dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan mengacu kepada RPJPD maupun RPJMD pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan memperhatikan perubahan serta perkembangan yang terjadi di Masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang mengakomodir kebutuhan perangkat daerah disesuaikan dengan dinamika yang terjadi dalam kurun waktu berjalan. Perubahan target realisasi dan penyesuaian belanja mempertimbangkan kebutuhan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat. Pada periode Renja Perubahan kali ini telah menggunakan pedoman atau penyusunan nomenklatur berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan rincian implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur. Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 merupakan bagian dari

Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tahun 2019 – 2023 untuk mencapai Visi rumah sakit **“Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Yang Unggul Dengan Pelayanan Dan Teknologi Kedokteran Yang Bermutu”**. Selain itu juga merupakan upaya SKPD untuk mencapai visi gubernur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 - 2023 dengan Visi “**Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat”**

Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 yang dibuat mengacu pada RKPD yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 ini menyesuaikan serta menjabarkan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub. Kegiatan yang akan dicapai dan dilaksanakan oleh RSKD Balikpapan sepanjang tahun 2023. Dengan disusunnya perubahan rencana kerja tahun 2023 ini diharapkan menjadi pedoman perbaikan serta penyasuaian pelaksanaan program, kegiatan, dan Sub. Kegiatan di RSKD Balikpapan.

1.2. Landasan Hukum.

Perubahan Rencana Kerja RSUD Dr.Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tahun 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, Peraturan daerah dan pedoman yang berlaku yaitu:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 69 ayat (1) dan(2).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 32 dan 33.
4. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 81 dan 82.
5. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006;
6. Peraturan Pemerintah Nomer 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
10. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
12. Lampiran Perda Nomor 34 tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Kaltim;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 90 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2019;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja tahun 2023, RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dari setiap program serta kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023, RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan:

1. Menterjemahkan Tujuan, Sasaran, Indikator kinerja, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil kinerja.

3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 yang lebih terarah.
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
5. Sebagai pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program serta kegiatan pada tahun 2023.

1.4. 1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan secara garis besar terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 4.1 Uraian garis besar tentan pertimangan rumusan, dan dekapitulasi program, kegiatan, sub kegiatan, serta penejelasan pendanaan dan kesesuaian dengan RKPD.
- 4.2 Table rencana program, kegiatan, sub kegiatan dilengkapi dengan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

Catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2022)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya dan capaian Renstra RSUD dr. Kanujoso Dajtiwibowo pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sangat diperlukan. Untuk Renja tahun 2023 ini digunakan hasil evaluasi anggaran tahun 2022. Dengan melihat hasil realisasi tahun 2022 diharapkan dapat dijadikan evaluasi kinerja RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dalam mencapai Visi dan Misi rumah sakit yang telah ditetapkan.

Beberapa hasil evaluasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Evaluasi terhadap program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

Pada tahun 2022 terdapat 2 (Dua) program yang dilaksanakan melalui anggaran APBD Pemprov Kalimantan Timur, untuk menunjang operasional dan kegiatan selama tahun 2022 ditunjang dengan dana BLUD. Persentase realisasi keuangan pada Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebesar 87.79% sampai dengan Desember tahun 2022. Untuk BLUD Rumah Sakit terjadi perubahan karena adanya sisa dana anggaran pada tahun 2021 yang digunakan pada tahun 2022 serta perubahan proyeksi pendapatan telah ditetapkan sebelumnya yaitu Rp240.000.000.000,- menjadi sebesar Rp320.000.000.000,- dengan silpa tahun 2021 yang digunakan pada tahun 2022 sebesar Rp. Rp172.527.711.262,40.

Dengan kesimpulan bahwa dari total anggaran APBD dan BLUD Rumah Sakit tahun 2022 sebesar Rp714.154.415.562,- terealisasi anggaran sebesar Rp626.956.055.170,68 dengan persentase 87,79%.

Program dan kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2022 yang dilaksanakan di RSKD Balikapan adalah sebagai berikut:

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

   Kegiatan :

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

   c. Peningkatan Pelayanan BLUD

      Sub Kegiatan :

      - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2) **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.**

   Kegiatan :

   Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

   Sub. Kegiatan :

   a. Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

      - Pengadaan alat Kesehatan

   b. Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan

      - Pengadaan Pencacah Limbah non incinerator

Selama tahun 2022 dalam pelaksanaan program dan kegiatan di RSKD Balikpapan yang memenuhi target adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Uraian diatas secara jelas dapat kita lihat dalam Tabel T-C. 29:

Tabel. T-C.29

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Dan Pencapaian RENSTRA
Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Propinsi Kalimantan Timur

SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun 2022	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2022	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat realisasi		realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11=(10 / 4)
1	Wajib									
1.02	Kesehatan									
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome : Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	78,6%		79%	79%	100%	79.3%		
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Output : Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran"								
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Outcome: Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	80%		85%			90%		

SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun 2022	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2022	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat realisasi		realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11=(10 / 4)
1.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	output: Jumlah Peralatan , Kelengkapan sarana dan prasarana yang dipenuhi			200		-			
1.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	output: Jumlah perlengkapan dan peralatan RS yang terpelihara secara rutin dan berkala			130		-			
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Outcome : Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	100%	100%	100%			100%		
1.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Output: Jumlah koordinasi dan konsultasi pemerintah daerah			390 org					
1.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Output : Rasio peserta diklat sesuai			650 org					

SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun 2022	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2022	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat realisasi		realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11=(10 / 4)
		kompetensi								
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Outcome: Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72%		72.50 %			73%		
1.02.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Output: Jumlah Dokumen Perencanaan			4	4	100%			
1.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Output: Jumlah laporan capaian kinerja	4	4	4				-	
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Outcome : Pelayanan sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS)	100	1	100			100		
1.02.23.08	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Output: Akreditasi Rumah Sakit SNARS	1	1	1					

SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun 2022	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2022	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat realisasi		realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11=(10 / 4)
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Outcome : Meningkatnya Sarana prasarana RS	80%		80%			85%		
1.02.26.01	Pembangunan Rumah Sakit	Output : Gedung/Dokumen Perencanaan	1	1	2					
1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Output : Tersedianya Alat Kesehatan	3	3	30			7 Unit		
1.02.26.24	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Output : Tersedianya Alat Kesehatan		3	85					
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Outcome: Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit	91%		92%			93%		
1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Output : Jumlah Alat Medis yang dilakukan pemeliharaan			500					

SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun 2022	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2022	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat realisasi		realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11=(10 / 4)
1.02.27.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	Output : Jumlah Alat Non Medis yang dipelihara			2					
1.02.27.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Output : Instalasi IPAL yang terpelihara			4					
1.02.62	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Outcome : Meningkatnya pengetahuan tenaga medis	40%		40%			60%		
1.02.62.63	Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	Output : Jumlah Faskes yang melakukan kerja sama	3	3	10				-	-
1.02.102	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Outcome: Indek Kepuasan Pelanggan	78.6%		79%			79.3%		
1.02.102.01	Penyusunan Indek Kepuasan	Output: Jumlah Survey	300	300	300	300	100			

SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun 2022	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2022	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat realisasi		realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11=(10 / 4)
	Masyarakat									
1.02.103	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	outcome: Penilalian Proper Hijau			Hijau			Hijau		
1.02.103.01	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	Output : sertifikat Proper lingkungan	Hijau	Hijau						
1.02.103.02	Pemusnahan B3 dan Limbah B3, Limbah Medis dan Lain-lain	Output : Jumlah limbah B3	100%	100%	10.000 kg	10.000	100%			
1.02.104	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Outcome: Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	80%		85%			90%		
1.02.104.01	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit	Output: Jumlah pasien kasus KDRT dan kasus lainnya	15	15	15					
1.02.104.03	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit	Output: Jumlah Kegiatan Penyuluhan/pencegahan	5	5	5					

SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun 2022	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2022	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat realisasi		realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11=(10 / 4)
		Infeksi/Pemeriksaan								
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Outcome : Jumlah unit/instalasi sesuai dengan standar rumah sakit kelas B	100	100	90			90		
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Output : Jumlah Kunjungan	158.188	179.940	163859					

Tabel. T-C.29 (B)

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Dan Pencapaian RENSTRA
Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Propinsi Kalimantan Timur

SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Prgram/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2022	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2022	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat realisasi		realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11=(10 / 4)
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Outcome: Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan (RS Kanujoso)**	**80%**					**80%**	**79%**	
1.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Output : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4 Laporan**					**4 Laporan**		
1.02.01.1.01.07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan					4 Laporan	-	-

SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Prgram/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2022	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2022	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat realisasi		realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11=(10 / 4)
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN**	**14 Bulan**					**14 Bulan**	**14 bln**	
1.02.01.1.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	565 orang/ bulan					565 orang/ Bulan	565 orang/ Bulan	
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Output : Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan**	**21 unit kerja**					**20 unit kerja**	**22 unit kerja**	**100 %**
1.02.01.1.10.01	- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Output : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	194.900 Kunjungan					191.078 kunjungan		
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Outcome : Terlaksananya Penyelenggaraan**	**1 Laporan**					**1 Laporan**		

SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Prgram/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2022	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2022	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat realisasi		realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11=(10 / 4)
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan					12 Laporan		
	- Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Ke Luar daerah								
	- Rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Ke dalam daerah								
01.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Outcome: Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Akreditasi Pelayanan RS (SNARS) - (RS Kanujoso).**	**1 sertifikat**		**1**	**-**	**-**	**1 sertifikat**	**1 sertifikat**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan,**	**Output :**	**90%**					**85%**		

SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Prgram/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2022	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2022	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat realisasi		realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11=(10 / 4)
	Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	**Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000**								
1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Output: Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana. Prasarana. Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit					1 Unit		

SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Prgram/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2022	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2022	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat realisasi		realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11=(10 / 4)
		Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000								
	- Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah pembangunan/pengembangan gedung rumah sakit	1 Unit					1 Unit		
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit		25	25	100%			
	- Pengadaan alat kedokteran		50 Unit					7 unit	25 unit	90%

SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Prgram/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2022	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2022	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat realisasi		realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11=(10 / 4)
1.02.02.1.01.12	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Output: Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan.	3 Unit					3 Unit		
	- Pengadaan peralatan gedung kantor		1 Unit					1 Unit		
	- Pengadaan Perlengkapan Rumah tangga	Alat Pencacah limbah	2 Unit					2 Unit	-	-
1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1050 Unit					850 Unit		
	- Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehtan yang dilakukan pemeliharaan	1000 Unit					800 Unit		

SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Prgram/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2022	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2022	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat realisasi		realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11=(10 / 4)
	- Pemeliharaan dan Perbaikan alat non medis.	Jumlah alat-alat non medis yang dilakukan pemeliharaan	50 Unit					50 Unit		
1.02.02.1.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	2 Unit					2 Unit		
	- Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah fasilitas yang dilakukan pemeliharaan	2 Unit					2 Unit		
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Tercapainya Penilaian Proper Lingkungan**	Gold					Hijau		
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen					4 Dokumen		

SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Prgram/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2022	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2022	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat realisasi		realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11=(10 / 4)
	- Pemeriksaan Berkala Kualitas baku mutu air, udara di rumah sakit	Jumlah kegiatan pemeriksaan baku mutu air, udara dan limbah cair	4 Kegiatan					4 Kegiatan		
	- Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah pemusnahan limbah B3 / Limbah Medis	10.000kg					10.000kg		
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen					5 Dokumen		
	- Promosi Kesehatan Masyarakat	Jumlah kegiatan promosi di rumah sakit	5 Kegiatan					5 Kegiatan		
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen					4 Dokumen		

SKPD : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Prgram/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2022	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2022	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat realisasi		realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11=(10 / 4)
	- Pengendalian dan Pencegahan Infeksi di Rumah Sakit	Jumlah kegiatan Pengendalian dan pencegahan infeksi di Rumah Sakit	4 Kegiatan					4 Kegiatan		
1.02.02.1.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Tercapainya Nilai Rata-rata Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit .**	**95**			**88,3**		**90**		
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit					3 Kegiatan		
	- Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah kegiatan survey akreditasi	1 Kegiatan					1 Kegiatan		
	- Survey IKM	Jumlah Responden	300 org					300 org		

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

Analisa Kinerja pelayanan RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan selama tahun 2022 yang sesuai Renstra 2019-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia (SDM).

Sasaran meningkatkan kualitas SDM rumah sakit mempunyai indikator kinerja prosentase SDM yang mendapatkan pelatihan sesuai kompetensi. Selama tahun 2022 jumlah SDM yang dilatih sebanyak 1.255 orang dengan persentase (58,8%) dari jumlah karyawan sebesar 1.544 orang.

b. Mutu Pelayanan

Pelayanan rumah sakit dituntut untuk selalu menjadi lebih baik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Akreditasi Rumah Sakit. Terhadap Capaian Kinerja dari sasaran meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit dapat dilihat dari Mutu Pelayanan yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit antara lain :

NO	INDIKATOR		Standar Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Standar Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**Instalasi Gawat Darurat / IGD**	Nilai Standar				
1	Kemampuan menangani *life saving* anak dan dewasa	100%	100	100	100	100
2	Jam Buka Pelayanan Gawat Darurat	24 jam	24	24	24	24
3	Pemberian Pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD	100%	100	100	100	100
4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 Tim	1	1	1	1
5	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat ≤ 5 menit	≤ 5 menit terlayani, setelah pasien datang	≤ 5	4	≤ 5	≤5
6	Kepuasan pelanggan gawat darurat	≥ 70	≥ 70	90	≥ 70	89,39
7	Kematian pasien ≤ 24 jam di gawat darurat	≤ 0.2 ‰	≤2	3.1	≤2	-
8	Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka	100%	100	100	100	-
2	**Instalasi Rawat Jalan / IRJA**	Nilai Standar				
1	Dokter Pemberi pelayanan di Poliklinik spesialis	100%	100	100	100	-

NO	INDIKATOR		Standar Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Standar Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
2	Ketersediaan pelayanan	Klinik anak, klinik penyakit dalam, klinik kebidanan, klinik bedah	Lengkap	Lengkap	Lengkap	-
3	Jam buka pelayanan sesuai ketentuan	08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 - 11.00	100	100	100	-
4	Waktu tunggu dirawat jalan	≤ 60 Menit	60	60	60	-
5	Kepuasan pelanggan di pelayanan rawat jalan	≥ 90%	≥90	99.25	≥90	91,59
6	Penegakan diagnosis TB melalui periksaan mikroskopis TB	≥ 60 %	60	30	60	-
	Kegiatan Pencatatan dan pelaporan Tuberculosis (TB) di Rumah Sakit	≤ 60%	60	100	60	-
3	**Instalasi Rawat Inap / IRNA**	Nilai Standar				
1	Pemberi pelayanan Rawat Inap	1. Dokter Spesialis 2. Perawat Minimal D3	Tersedia	Tersedia	Tersedia	-
2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100	100	100	-
3	Ketersediaan pelayanan Rawat Inap	1. Kesehatan anak 2. Penyakit dalam 3. Kebidanan dan 4. Bedah	Lengkap	Lengkap	Lengkap	-
4	Jam visite dokter spesialis	08.00 s/d 14.00 Setiap Hari Kerja	100	100	100	-
5	Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %	≤ 1,5	0,5	≤ 1,5	-
6	Angka kejadian infeksi nosokomial	≤ 1,5 %	≤ 1,5	1	≤ 1,5	-
7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	100	100	100	-
8	Kematian pasien ≥ 48 jam	≤ 0.24 %	≤ 0,24	3,1	≤ 0,24	-
9	Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	≤ 5	2	≤ 5	-
10	Kepuasan pelanggan di pelayanan rawat inap	≥ 90 %	≥90	98.7	≥90	96,00
11	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60 %	60	15	60	-
	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit	≥ 60 %	100	100	100	-
12	Ketersediaan pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan pelayanan jiwa	NAPSA,Gangguan psikotik, Gangguan Nerotik dan Gangguan Mental Organik	Ada	Belum	Ada	-

NO	INDIKATOR		Standar Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Standar Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
4	***Instalasi Bedah Sentral / COT***	Nilai Standar				
1	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 Hari	≤ 2	1	≤ 2	-
2	Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %	≤ 1	0	≤ 1	-
3	Tidak ada kejadian operasi salah sisi	100 %	100	100	100	-
4	Tidak ada kejadian operasi salah orang	100 %	100	100	100	-
5	Tidak ada kejadian salah tindakan pada operasi	100 %	100	100	100	-
6	Tidak ada kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100 %	100	100	100	-
7	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan *Endotraceal Tube*	≤ 6 %	≤ 6	0	≤ 6	-
5	**Pelayanan Persalinan & Perinatologi**	Nilai Standar				
1	- Kejadian kematian ibu karena persalinan	a.Perdarahan ≤ 1 %	Pendara han ≤1	0,09	Pendaraha n ≤1	-
	- Kejadian kematian ibu karena persalinan	b. Pre-eklamsia ≤ 30%,	Pre-eklampsi a ≤ 30	0,19	Pre-eklampsia ≤ 30	-
	- Kejadian kematian ibu karena persalinan	c. Sepsis ≤ 0,2%	sepsis ≤ 0,2	0	sepsis ≤ 0,2	-
2	Pemberi pelayanan persalinan normal	a. Dokter Sp.OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan	100	100	100	100
3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit (Tim PONEK yang terlatih)	Tim PONEK yang terlatih	100	100	100	100
4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	1.Dokter SpOG 2.Dokter SpA 3.Dokter Sp.An	100	100	100	100
5	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	100%	100	100	100	100
6	Pertolongan Persalinan Melalui Seksio Cesaria	≤ 20%	≤ 20	17	≤ 20	-
7	Keluarga Berencana Mantap	100%	100	100	100	100
	Konseling KB Mantap (Keluarga Berencana Mantap)	100%	100	100	100	100
8	Kepuasan pelanggan di pelayanan persalinan	≥ 80%	≥ 80	87	≥ 80	100
6	**Pelayanan Perawatan Intensif**	Nilai Standar				

NO	INDIKATOR		Standar Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Standar Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	≤ 3	0,2	≤ 3	< 3
2	Pemberi pelayanan unit intensif Oleh Dokter Sp.Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani	100 %	100 %	100	100 %	100
	Pemberi pelayanan unit intensif Oleh Perawat Mahir	100 %	100 %	60	100 %	100
7	**Pelayanan Radiologi**	Nilai Standar				
1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam	≤ 3	0,3	≤ 3	-
2	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen	Dokter Sp.Rad	100	98	100	-
3	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	≤ 2 %	≤ 2	1	≤ 2	-
4	Kepuasan pelanggan di pelayanan radiologi	≥ 80 %	80	96	80	89,11
8	**Pelayanan Laboratorium Klinik**	Nilai Standar				
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 Menit Kimia darah & darah rutin	120	95	120	-
2	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	100% Dokter Spesialis PK	100	90	100	-
3	Tidak ada kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	100 %	100	100	100	-
4	Kepuasan pelanggan di pelayanan laboratorium	≥ 80	≥ 80	95	≥ 80	89,32
9	**Pelayanan Rehabilitasi Medik**	Nilai Standar				
1	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan	≤ 50 %	≤ 50	20	≤ 50	-
2	Tidak ada kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100 %	100	99	100	-
3	Kepuasan pelanggan di pelayanan rehabilitasi medik	≥ 80 %	≥ 80	99	≥ 80	89,85
10	**Pelayanan Farmasi**	Nilai Standar				
1	Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 30 Menit	≤ 30	40	≤ 30	-
	Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤ 60 Menit	≤ 60	50	≤ 60	-
2	TIdak ada kesalahan pemberian obat	100 %	100	100	100	-

NO	INDIKATOR		Standar Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Standar Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
3	Penulisan resep sesuai formularium	100 %	100	100	100	-
4	Kepuasan pelanggan di pelayanan farmasi	≥ 80 %	≥ 80	93	≥ 80	88,45
11	**Pelayanan Gizi**	Nilai Standar				
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	≥90	100	≥90	-
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	≤20	9	≤20	-
3	Tdak ada kesalahan pemberian diet	100 %	100	100	100	-
12	**Pelayanan Transfusi Darah**	Nilai Standar				
1	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100% Terpenuhi	100	35	100	-
2	Kejadian reaksi transfusi	≤ 0,01%	≤ 0,01	0.59	≤ 0,01	-
XIII	**Pelayanan Gakin**	Nilai Standar				
1	Pelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	%	100	100	100	-
14	**Pelayanan Rekam Medik**	Nilai Standar				
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 2 x 24 jam setelah selesai pelayanan	100 %	100	99	100	-
2	Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100 %	100	100	100	-
3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 Menit	≤10	9	≤10	-
4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 Menit	≤15	10	≤15	-
15	**Pengolahan Limbah**	Nilai Standar				
1	Baku Mutu Limbah Cair (STP)	a. BOD < 30 mg/l	<30 mg/l	26,40 (Aman)	<30 mg/l	-
		b. COD < 80 mg/l	<80 mg/l	13,99 (Aman)	<80 mg/l	-
		c. TSS < 30 mg/l	<30 mg/l	7,24 (Aman)	<30 mg/l	-
		d. PH 6-9	PH 6-9			-
2	Pengolahan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100 %	100	100	100	-

NO	INDIKATOR		Standar Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Standar Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
16	**Pelayanan Adm Manajemen**	Nilai Standar				
1	Tindak lanjut hasil rapat direksi	100%	100	100	100	-
2	Kelengkapan lap. Akuntabilitas kinerja	100%	100	100	100	-
3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100	100	100	-
4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100	100	100	-
5	Pegawai mendapat pelatihan.	≥ 60 %	≥60	61	≥60	-
6	*Cost recovery*	≥ 40 %	≥40	65	≥40	-
7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100 %	100	100	100	-
8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 Jam	≤2	3	≤2	-
9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100 %	100	100	100	-
17	**Pelayanan Ambulance**	Nilai Standar				
1	Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah	24 jam	24	24	24	-
2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah	≤ 230 Menit	≤30	25	≤30	-
3	Respon time pelayanan ambulan oleh masyarakat yang membutuhkan	Menit (Sesuai ketentuan daerah)	60	55	60	-
18	**Pelayanan Kedokteran Forensik / Mourtuary**	Nilai Standar				
1	Waktu tanggap pelayan pemulsaran jenazah	≤ 2 Jam	≤ 2	0,1	≤ 2	-
19	**Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit**	Nilai Standar				
1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80 %	≥80	95/Tph	≥80	-
2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	100	98	100	-
3	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi.	100%	100	95	100	-
20	**Pelayanan Loundry**	Nilai Standar				
1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100	100/Tph	100	-

NO	INDIKATOR		Standar Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Standar Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100 %	100	100/Tph	100	-
21	**Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)**	Nilai Standar				
1	Tersedianya anggota tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI) yang terlatih	75%	≥75	100	≥75	-
2	Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri) di setiap instalasi / Departemen	60%	60	95%	60	-
3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	75%	75	100	75	-
	Total Capaian SPM			**83.5%**		

Tabel T-C. 30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAN RSUD Dr.KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Catatan analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)*	(11)	(12)	(13)
1	Akreditasi Rumah Sakit	Sertifikat			1			1			1	
3	Angka kematian ibu dlm persalinan			0.39		0.35	0,34	0.35	0	0.35	0,34	
4	Proporsi kelahiran yang beresiko yang ditolong oleh spesialis			88	90	93	95	95	95	95	95	
5	Angka kematian bayi baru lahir			4.5	4.3	4.2	4,10	4.2	4.2	4.2	4,10	
6	Proporsi Kasus TB yang diobati dan sembuh dengan program DOT			90	92	93	94	93	93	93	94	
7	Proporsi angka kematian malaria			3.9	3.8	3.7	3,5	3,7	3,7	3,7	3,5	
8	Proporsi pasien yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral			98,2	98,4	98,6	98,80	98,6	98,6	98,6	98,80	
9	Efektifitas kinerja RS :											
	- BOR	65-85	75-85	75.99	76.11	64	66	71	53,23	76.23	76,32	
	- LOS	4-6 Hari	4-6	6.48	6.29	4,8	4,6	4	3,90	5.92	5,64	

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Catatan analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)*	(11)	(12)	(13)
			Hari									
	- BTO			42.78	44.22	46,5	47	42.78	49,16	46.97	49,12	
	- TOI	1-3 Hari	1-3 Hari	2.05	1.97	2,5	2,3	2.05	3,43	1.87	1,76	
	- GDR	4,5	4,5	4.9	4.6	52	49	4.9	60,51	4.55	45,2	
10	Ratio tempat tidur kelas III	30%	60	50	53	55	50	50	45	40	40	
11	Indek Kepuasan Masyarakat	≥ 90	≥ 90	79.5	79.75	79.8	80,5	79.5	93.62	79.8	80,5	
12	Prosentase sertifikasi kompetensi	60%	60	51	60	60	60	51	58,8	60	60	
13	Prosentase Sarana Dan Prasarana Penunjang Pelayanan			55,64	69,24	85,60	98	55,64	97,13	85,60	98	
14	Penilaian Proper Hijau			Proper hijau	Proper hijau	Proper hijau	Proper hijau	Proper hijau	Proper hijau	Proper hijau	Proper hijau	
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)												
1	**INSTALASI RAWAT DARURAT**											
1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100 %		100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	
2	Jam Buka Pelayanan Gawat Darurat	24 jam		24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Catatan analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)*	(11)	(12)	(13)
3	Pemberian Pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 Tim		1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	
5	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat ≤ 5 menit	≤ 5 menit terlayani, setelah pasien datang		≤ 5 Menit	≤ 5 Menit	≤ 5 Menit	≤ 5 Menit	4 Menit	4 Menit	≤ 5 Menit	≤ 5 Menit	
6	Kepuasan pelanggan gawat darurat	≥ 70		80%	80%	80%	80%	86,5	94,20	80%	80%	
7	Kematian pasien ≤ 24 jam di gawat darurat	≤ 0.2 ‰		≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2	0,38	0,38	≤0.2	≤0.2	
8	Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka	100%		100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	
2	**INSTALASI RAWAT JALAN**											
1	Dokter Pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis	100%		98%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Catatan analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)*	(11)	(12)	(13)
2	Ketersediaan pelayanan	Klinik anak, klinik penyakit dalam, klinik kebidanan, klinik bedah		Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	
3	Jam buka pelayanan sesuai ketentuan	08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 - 11.00		100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	
4	Waktu tunggu dirawat jalan	≤ 60 Menit		60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60	60 menit	60 menit	60 menit	
5	Kepuasan pelanggan di pelayanan rawat jalan	90%		90%	90%	90%	90%	86	91,32	90%	90%	
6	Penegakan diagnosis TB melalui periksaan mikroskopis TB	≥ 60 %		55%	60%	60%	60%	52	53	60%	60%	
7	Kegiatan Pencatatan dan pelaporan Tuberculosis (TB) di Rumah Sakit	≤ 60%		60%	60%	60%	60%	100	100	60%	60%	
3	**INSTALASI RAWAT IRNA**											

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Catatan analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)*	(11)	(12)	(13)
1	Pemberi pelayanan Rawat Inap	1. Dokter Spesialis 2. Perawat Minimal D3		Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100 %		100%	100%	100%	100%	100	100/ Tph	100%	100	
3	Ketersediaan pelayanan rawat inap	1. Kesehatan anak 2. Penyakit dalam 3. Kebidanan dan Bedah		Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	100	Lengkap	Lengkap	Lengkap	
4	Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 Setiap Hari Kerja		100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	
5	Kejadian Infeksi Pasca Operasi	≤ 1,5 %		≤ 1,5%	≤ 1,5%	≤ 1,5%	≤ 1,5%	0,8	0,8%	≤ 1,5%	0,5	
6	Angka Kejadian Infeksi Nosokomial	≤ 1,5 %		≤ 1,5%	≤ 1,5%	≤ 1,5%	≤ 1,5%	0,9	0,9%	≤ 1,5%	1	
7	Tidak Adanya Kejadian Pasien Jatuh Yang Berakibat Kecacatan/Kematian	100 %		100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	
8	Kematian Pasien ≥ 48 Jam	≤ 0.24 %		0.3%	0.3%	≤ 0.24%	≤ 0.24%	5,3	5,3	≤ 0.24%	3,1	
9	Kejadian Pulang Paksa	≤ 5 %		≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	1,1	1,1	≤ 5%	2	

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Catatan analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)*	(11)	(12)	(13)
10	Kepuasan pelanggan di pelayanan rawat inap	≥ 90 %		90%	90.0%	90%	90%	90	92,33	90%	98,7	
11	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60 %		60%	60%	60%	60%	100	100	60%	15	
12	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit	≥ 60 %		100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	
13	Ketersediaan pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan pelayanan jiwa	NAPZA, Gangguan Psikotik, Gangguan Nerotik, dan Gangguan Mental Organik						Ada	Ada	Ada	Ada	
4	**INSTALASI BEDAH CENTRAL**											
1	Waktu Tunggu Operasi Elektif	≤ 2 Hari		≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	1	1	≤ 2 hari	≤ 2 hari	
2	Kejadian Kematian Di Meja Operasi	≤ 1 %		≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	0	0	≤ 1%	≤ 1%	
3	Tidak ada kejadian operasi salah sisi	100 %		100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Catatan analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)*	(11)	(12)	(13)
4	Tidak ada kejadian operasi salah orang	100 %		100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	
5	Tidak ada kejadian salah tindakan pada operasi	100 %		100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	
6	Tidak ada kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100 %		100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	
7	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotraceal tube	≤ 6 %		≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	0	0	≤ 6%	≤ 6%	
5	**PELAYANAN PERSALINAN & PERINATALOGI**											
	1. Kejadian kematian ibu karena persalinan	a.Perdarahan ≤ 1 %		Pendarahan ≤1%,	Pendarahan ≤1%,	Pendarahan ≤1%,	Pendarahan ≤1%,	0	0	Pendarahan ≤1%,	Pendarahan ≤1%,	
	2. Kejadian kematian ibu karena persalinan	b. Pre-eklamsia ≤ 30%,		Pre-eklampsia ≤ 30%,	Pre-eklampsia ≤ 30%,	Pre-eklampsia ≤ 30%,	Pre-eklampsia ≤ 30%,	0,09	0,09	Pre-eklampsia ≤ 30%,	Pre-eklamp sia ≤ 30%	
	3. Kejadian kematian ibu karena persalinan	c. Sepsis ≤ 0,2%		sepsis ≤ 0,2%	sepsis ≤ 0,2%	sepsis ≤ 0,2%	sepsis ≤ 0,2%	0	0	sepsis ≤ 0,2%	sepsis ≤ 0,2%	
	4. Pemberi pelayanan persalinan normal	a. Dokter Sp.OG b. Dokter		100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Catatan analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)*	(11)	(12)	(13)
		umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan										
	5. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit (Pemberi pelayanan di Rawat Inap)	Tim PONEK yang terlatih		100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	
	6. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi (Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi)	a. Dokter Sp.OG b. Dokter Sp.A c. Dokter Sp.An		100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	
	7. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	100 %		100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	
	8. Pertolongan Persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20%		≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	22,1	22,1	≤ 20%	≤ 20%	
	9. Keluarga Berencana Mantap	100%		100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	
	10. Konseling KB Mantap (Keluarga Berencana Mantap)	100%		100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	
	11. Kepuasan pelanggan di pelayanan persalinan	≥ 80%		90%	90%	90%	90%	92,4	93,47	90%	90%	

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Catatan analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)*	(11)	(12)	(13)
6	**PELAYANAN INTENSIF**											
	1.Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %		≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	0,7	0,7	≤ 3%	≤ 3%	
	2.Pemberi pelayanan unit intensif Oleh Dokter Sp.Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani	100 %		100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	
	3.Pemberi pelayanan unit intensif Oleh Perawat Mahir	100 %		100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	
7	**PELAYANAN RADIOLOGI**											
1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3		≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	
2	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen	Dokter Sp.Rad		100%	95%	100%	100%	100	100	100%	100%	
3	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	≤ 2		0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	1,5	1,5	0.5%	0.5%	

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Catatan analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)*	(11)	(12)	(13)
4	Kepuasan pelanggan di pelayanan radiologi	≥ 80		90%	80%	90%	90%	92,5	95,59	90%	90%	
8	**PELAYANAN LABORATORIUM**											
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 Menit Kimia darah & darah rutin		120 menit	120 menit	120 menit	120 menit	97	97	120 menit	120 menit	
2	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	100 % Dokter Spesialis PK		100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	
3	Tidak ada kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	100 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100	100	100.0 %	100%	
4	Kepuasan pelanggan di pelayanan laboratorium	≥ 80		80%	80%	80%	80%	86,6	96,04	80%	80%	
9	**PELAYANAN REHAB MEDIK**											
1	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan	≤ 50 %		10%	20%	10%	10%	49,8	49,8	10%	10%	
2	Tidak ada kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medic	100 %		100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	
3	Kepuasan pelanggan di pelayanan rehabilitasi medic	≥ 80 %		≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	86	89,54	≥ 80%	≥ 80%	

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Catatan analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)*	(11)	(12)	(13)
10	**PELAYANAN FARMASI**											
1	Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 30 Menit		≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	27	27	≤ 30 menit	≤ 30 menit	
2	Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤ 60 Menit		≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	55	55	≤ 60 menit	≤ 60 menit	
3	Tdak ada kesalahan pemberian obat	100 %		100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	
4	Penulisan resep sesuai formularium	100 %		100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	
5	Kepuasan pelanggan di pelayanan farmasi	≥ 80 %		≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	92,3	92,25	≥ 80%	≥ 80%	
11	**PELAYANAN GIZI**											
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %		95%	95%	95%	95%	100	100	95 %	95%	
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %		10%	10%	10%	10%	8	8	5 %	10%	
3	Tdak ada kesalahan pemberian diet	100 %		100%	100%	100%	100%	99,5	100	100%	100%	

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Catatan analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)*	(11)	(12)	(13)
12	**PELAYANAN TRANSFUSI DARAH**											
1	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100% Terpenuhi		100%	100%	100%	100%	38	38	40	40	
2	Kejadian reaksi transfusi	≤ 0,01%		≤ 0,01%	≤ 0,01%	≤ 0,01%	≤ 0,01%	1,1	1,1	0/Tph	0/Tph	
13	**PELAYANAN GAKIN**											
1	Pelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke RSKD pada setiap unit pelayanan	100 % Terlayani		100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	
14	**PELAYANAN REKAM MEDIK**											
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 2 x 24 jam setelah selesai pelayanan	100 %		100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	
2	Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100 %		100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	
3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 Menit		10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	5 menit	5	10 menit	10 menit	
4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 Menit		15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	5 menit	5	15 menit	15 menit	

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Catatan analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)*	(11)	(12)	(13)
15	**PENGOLAHAN LIMBAH**											
	1. Baku mutu limbah cair (STP)											
	a. BOD	< 30 mg/l		30Mg/L	30Mg/L	30Mg/L	30Mg/L	7(aman)	26,40	30Mg/L	30Mg/L	
	b. COD	< 80 mg/l		80Mg/L	80Mg/L	80Mg/L	80Mg/L	12,3 (aman)	13,99	80Mg/L	80Mg/L	
	c. TSS	< 30 mg/l		30Mg/L	30Mg/L	30Mg/L	30Mg/L	3,5 (aman)	7,24	30Mg/L	30Mg/L	
	d. PH 6-9	6-9		6-9	6-9	6-9	6-9	6,9	26,40	6-9	6-9	
	2. Pengolahan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100 %		100/Tph	100/Tph	100/Tph	100/Tph	100/Tph	100/Tph	100/Tph	100/Tph	
16	**PELAYANAN ADM MANAJEMEN**											
1	Tindak lanjut hasil rapat direksi	100%		100%	100%	100%	100%	100	100	50%	100%	
2	Kelengkapan lap. Akuntabilitas kinerja	100%		100%	100%	100%	100%	100	100	40%	100%	
3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%		100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	
4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%		100%	100%	100%	100%	100	100	60%	100%	
5	Pegawai mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	≥ 60 %		60%	60%	60%	60%	52	60	60%	60%	

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Catatan analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)*	(11)	(12)	(13)
6	Cost recovery	≥ 40 %		100%	100%	100%	100%	75	75	100%	100%	
7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100 %		100%	100%	100%	100%	100	100	50%	100%	
8	Ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 Jam		1jam	1jam	1jam	1jam	1,9	1,9	45 Menit	45 Menit	
9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100 %		100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	
17	**PELAYANAN AMBULANCE**											
1	Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah	24 jam		24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24	24	24 jam	24 jam	
2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di RSKD	≤ 230 Menit		100%	100%	100%	100%	15	15	≥ 20 Menit	≥ 20 Menit	
3	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah oleh masyarakat yg membutuhkan	100 %		100%	100%	100%	100%	55	54	100%	100%	

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Catatan analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)*	(11)	(12)	(13)
18	**PELAYANAN MOURTUARY**											
1	waktu tanggap pelayan pemulsaran jenazah	≤ 2 Jam		≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	15 menit	0,1	15 menit	15 menit	
19	**PELAYANAN LOUNDRY**											
1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%		100%	100%	100%	100%	100	100	40%	100%	
2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100 %		100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	
20	**PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT**											
1	Ketepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80 %		80%	75%	80%	80%	95	96	90	80%	
2	Peralatan Medik (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%		100%	80%	100%	100%	97	98	90	100%	

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Catatan analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)*	(11)	(12)	(13)
3	Ketepatan waktu pemeliharaan alat (non medik)	100%		100%	100%	100%	100%	100	100	50	100%	
21	**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN**											
1	Tersedianya anggota tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI) yang terlatih	75%		75%	75%	75%	75%	100	100	40	100	
2	Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri)	60%		60%	60%	60%	60%	96	97	40	95	
3	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit	75%		75%	75%	75%	75%	100	100	40	100	

*Catatan : kolom 11 adalah perkiraan realisasi

d. Terselenggaranya Penelitian di Rumah Sakit.

Pelaksanaan peneitian klinis di rumah sakit masih belum dilaksanakan secara baik oleh peneliti internal rumah sakit. Hal ini merupakan pekerjaan rumah tersendiri yang sebaiknya selalu dilaksanakan untuk mengetahui kasus-kasus dan metode pengobatan yang dilaksanakan. Selain itu untuk menunjangn peningkatan kualitas pelayanan. Penelitian ekternal selama ini telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa dari strata S3, S2, S1 dan juga DIII. Hasil penelitian tersebut disampaikan kepada manajemen rumah sakit untuk dijadikan bahan masukan untuk selalu memperbaiki pelayanan, melengkapi fasilitas dan perbaikan pelaksanaan pada tahun-tahun mendatang.

Namun data dari hasil penelitian masih belum dilakukan publikasi secara terbuka. Dan menjadi salah satu program, yang akan dilaksanakan pada masa-masa yang akan datang.

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

Kinerja RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dalam beberapa tahun memang terdapat perkembangan sebagai rumah sakit milik Provinsi yang berada di kota Balikpapan dengan didukung peralatan canggih yang dapat melayani tidak hanya warga Balikpapan tetapi juga masyarakat dari wilayah lain seperti Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Berau, dan juga dari wilayah Kaltara.

a. Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis

1). Permasalahan

Dari analisis perkembangan dan permasalahan yang sering ditemukan di rumah sakit adalah adalah :

a. Masih adanya angka kasus penyakit pandemic covid-19 yang masih tetap menjadi perhatian bagi seluruh pemangku kebijakan. Selain itu masih adanya angka kematian akibat

penyakit jantung, diabetes militus, kenker dan stroke yang terjadi.

b. Selain itu dengan banyaknya dokter spesilias yang ada dirumah sakit, tentu juga membutuhkan sarana penunjang untuk memperlancar kerja dari para dokter spesialis/sub spesialis. Demikian juga untuk ruang perawatan masih membutuhkan beberapa penyesuaian atau penambahan karena kapasitas yang masih sering terjadi kekurangan.
c. Citra pelayanan yang masih kurang memuaskan yang ditandai dengan banyaknya keluhan terutama pada pelayanan yang lambat, berbelit-belit.
d. Perilaku masyarakat dan lingkungan yang kondusif untuk hidup sehat belum menunjukkan peningkatan sesuai dengan harapan yang memberikan kontribusi terhadap kualitas air permukaan, dan air tanah sehingga berakibat terhadap pencemaran, pemanasan global, rusaknya lingkungan dan tidak tertatanya sistem pembuangan limbah rumah tangga.
e. Penyebaran Wabah Virus Corona.

Selain itu dengan semakin berkembangnya penyebaran wabah virus corona atau covid-19 yang melanda seluruh dunia. Indonesia saat ini tercatat cukup tinggi angka kejadiannya. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang cukup besar penyebaran covid-19 dan beberapa rumah sakit telah merawat pasien positif covid-19. Yang menjadi kendala saat ini adalah ruangan yang khusus disediakan bagi penderita covid-19 masih belum memadai sesuai dengan sandar. Adapun standar pembuatan ruangan rumah sakti telah diatur dalam keputusan Menteri kesehatan.

RSKD Balikpapan sebagai salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 yang ada di Kalimantan Timur telah mempersiapkan diri dengan memanfaatkan ruang perawatan yang telah ada untuk menampung pasien jika terjadi lonjakan

pasien. Selain itu kedepan telah dipersiapkan rencana pembangunan Gedung isolasi. Gedung isolasi ini digunakan untuk merawat pasien-pasien dengan kasus infeksi yang terpusata dalam satu Gedung sehingga jika terjadi wabah atau penyebaran penyakit bisa diantisipasi dengan baik dan pelayanan dapat diberikan dengan maksimal.

f. Perkembangan daerah menuju perkotaan baru, pengaruh budaya dari luar dalam penggunaan IPTEK tanpa batas, berpotensi sebagai ancaman bagi masyarakat kedepan.
g. Sumber Daya Kesehatan berupa tenaga kesehatan, dana dan peralatan medis belum mencukupi jika dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
h. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kinerja minimal yang dilakukan di pelayanan kesehatan di rumah sakit.
i. Pemindahan Ibu Kota Negara.

   Rencana pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara turut mempengaruhi terhadap rencana pengembangan pelayanan di RSKD Balikpapan pada tahun-tahun mendatang. Sebagai rumah sakit yang berdampingan dengan rencana lokasi Ibukota Negara yang baru, dan sebagai daerah penyangga ibu kota tentu harus mempersiapkan diri untuk mendukung program pemerintah. Pemindahan Ibukota ini akan berdampak besar terhadap peningkatan pelayanan. Bertambahnya jumlah penduduk juga harus dipersiapkan sarana pendukung sebagai antisipasi rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Penambahan unit-unit pelayanan baru menjadi prioritas guna mengantisipasi terhadap betambahnya jumlah pendududk dalam jumlah besar pada tahun-tahun yang akan datang.

2). Langkah strategis

Pengembangan layanan di RSKD Balikpapan yang menjadi target prioritas selama lima tahun (periode renstra 2019 – 2023) kedepan adalalah:

1. Pemenuhan jumlah SDM Dokter, Dokter Umum, Spesialis, Sub Spesialis, Dokter Gigi Dan Dokter Gigi Spesialis juga perawat.
2. Pembangunan Gedung Isolasi
3. Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu
4. Pembangunan Gedung Rawat Jalan
5. Pembangunan Gedung Perawatan Jiwa.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan bidang perumahsakitan.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, rumah sakit berkewajiban untuk meberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai denga mutu pelayanan rumah sakit. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu rumah sakit harus terakreditasi oleh lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit yaitu:

- Pelayanan medik dan penunjang medik;
- Pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- Pelayanan kefarmasian; dan
- Pelayanan penunjang

Selain itu kelengkapan peralatan medis dan juga peralatan non medis menjadi hal yang perlu diperhatikan. Mengingat peralatan tersebut dibutuhkan untuk menunjang keseluruhan pelayanan di rumah sakit.

c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, dengan jumlah tempat tidur minimal 250 tempat tidur sudah dapat menjadi Rumah Sakit kelas A. Menindaklanjuti hal tersebut, RSKD mempersiapkan diri untuk menuju pada pembentuan Rumah Sakit kelas A dengan menambah jumlah tenaga serta melakukan pengembangan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Layanan baru serta peningkatan kelas rumah sakit menjadi pertimbangan tersendiri yang sudah tentu akan berpengaruh terhadap perencanaan program yang ditetapkan. Untuk mempersiapkan menuju Rumah Sakit kelas A beberapa pembenahan dan penambahan SDM serta layanan baru terus dilakukan.

Salah satu bentuk pelayanan baru yang sedang dilaksanakan adalah pelayanan radioterapi dan Kemoterapi Anak atau Hemato Onkologi anak. Pelayanan ini terintegrasi dalam satu Gedung perawatan dan tindakan radioterapi. Penambahan pusat kanker terpadu merupakan visi rumah sakit yang akan dicapai sepanjang periode renstra tahun 2019 – 2023. Disamping itu pada tahun 2021 telah dimulai pembangunan Gedung Isolasi yang akan diselesaikan pada tahun 2022 dan diharapkan pada tahun 2023 sudah dapat beroperasi.

Selain itu RSKD Balikpapan juga ditunjuk oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia sebagai salah satu rumah sakit rujukan Pelayanan Kardiovasculer atau Pelayanan Jantung terpadu di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai Rumah Sakit yang berada sangat dekat dengan lokasi rencana Ibukota Negara yang baru, RSKD memiliki tempat yang sangat strategis untuk pelayanan jantung dan merupakan pendukung dalam pelayanan Kesehatan di Ibukota Negara yang baru. Untuk itu sejak dini harus mempersiapkan diri dengan melengkapi sumber daya manusia

(dokter spesialis, perawat, penunjang), peralatan medis dan penunjang, dan juga gedungnya.

Berdasar hal tersebut, kedepan RSKD Balikpapan telah menetapkan rencana pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu yang diharapkan akan mampu melaksanakan seluruh Tindakan kepada pasien sampai dengan Tindakan operasi bedah jantung.

2.4. Review Renja RKPD.

Review Renja RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 merupakan acuan bagi SKPD Povinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang terdapat pada Renja RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tahun 2023 sudah memuat kegiatan prioritas yang singkron dengan Renja RKPD Provinsi Kalimantan Timur.

Pada tahun 2023 RSKD Balikpapan membutuhkan anggaran yang cukup besar mengingat persiapan pembentukan pelayanan jantung terpadu. Untuk mewujudkan hal itu kami membutuhkan pembangunan Gedung dan juga melengkapi peralatan medis dan peralatan penunjangnya. Namun dalam penetapan RKPD tahun 2023 hal tersebut masih belum terakomodir mengingat keterbatasan anggaran yang ada di pemerintah Provinsi Kalimanatan timur dan banyaknya SKPD yang juga membututhkan anggaran cukup besar untuk operasionalnya.

Dengan kondisi demikian kedepan RSKD akan membuat perencaan bertahap mengikuti tahun anggaran selama periode renstra 2019 – 2023 dan juga periode berikutnya sampai terwujud pelayanan jantung terpadu di RSKD Balikpaan dan merupakan yang kedua setelah RS AW Syahrani Samarinda.

Review Renja RKPD tahun 2023 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel T-C.31.

REVIEW TERHADAP RENJA RKPD PERUBAHAN TAHUN 2023
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Lembar 1 dari 10

RENJA RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Prgram/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	TOTAL PAGU ANGGARAN				**691.347.699.536,00**	**TOTAL PAGU ANGGARAN**				**710.391.858.430,00**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**Bpn**	**Outcome: Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan (RS Kanujoso)**		**595.680.126.048,00**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Bpn**	**Outcome: Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan (RS Kanujoso)**		**595.680.126.048,00**	

RENJA RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Prgram/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Output : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 Laporan**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Output : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 Laporan**		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bpp	Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bln	**117.018.866.512,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bpp	Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bln	**117.018.866.512,00**	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	611 Orang/ bulan	117.018.866.512,00	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	611 Orang/ bulan	117.018.866.512,00	
	- Tambahan tunjangan					- Tambahan tunjangan					

RENJA RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Prgram/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	penghasilan					penghasilan					
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Bpp	Output : Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	21 unit kerja	**478.661.259.536,00**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Bpp	Output : Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	21 unit kerja	**478.661.259.536,00**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Bpp	Output : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	194.900	478.661.259.536,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Bpp	Output : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	194.900	478.661.259.536,00	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**Balikpapan**	**Outcome: Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Akreditasi**		**95.667.573.488,00**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya**	**Balikpapan**	**Outcome: Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Akreditasi Pelayanan**		**114.711.732.382,00**	

RENJA RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Prgram/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
			Pelayanan Rumah Sakit (SNARS)			**Kesehatan Masyarakat**		**Rumah Sakit (SNARS)**			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Bpp	Output : Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah	90%	95.667.573.488,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Bpp	Output : Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk	90%	114.711.732.382,00	

RENJA RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Prgram/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
			Penduduk Minimal 1:1000					Minimal 1:1000.			
	- Pengembangan Rumah Sakit	Bpp	Output: Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk	1 Unit		- Pengembangan Rumah Sakit	Bpp	Output: Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit		

RENJA RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Prgram/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
			Minimal 1:1000								
	- Pengembangan Rumah Sakit	Bpp	Pembangunan Gedung rumah sakit	1 Unit		- Pengembangan Rumah Sakit	Bpp	Pembangunan Gedung rumah sakit	1 Unit		
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Bpp	Output: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	588 Unit	95.667.573.488,00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Bpp	Output: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	588 Unit	114.711.732.382,00	
	- Pengadaan alat kedokteran		Output: Jumlah alat Kesehatan	588 Unit	95.667.573.488,00	- Pengadaan alat kedokteran		Output: Jumlah alat Kesehatan	588 Unit	114.711.732.382,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan merupakan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berlokasi di Balikpapan, oleh karena itu RSUD Dr Kanujoso mempunyai cakupan memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Balikpapan dan sekitarnya dan juga harus mendukung program dan kegiatan pemerintah Kota Balikpapan dalam mewujutkan Balikpapan Madinatul Iman.

Sebagai perangkat daerah dilingkungan Kesehatan, RSKD Balikpapan tidak melakukan Musrenbang ataupun forum perangkat daerah setiap tahunnya. Namun kami menerima usulan / masukan dari Koalisi Perempuan Balikpapan (KPB) berupa pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan juga korban terhadap anak-anak yang teah disampaikan sejak tahun 2008. Kegiatan tersebut selalu diakomodir dan dilaksanakan di RSKD Balikpapan. Namun untuk tahun 2023 kegiatan tersebut tidak masuk ke dalam usulan kegiatan mengingat keterbatasan anggaran dan juga telah di laksanakan oleh RSUD Beriman yang merupkana rumah sakit milik pemerintah Kota Balikpapan.

Table 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah : RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran / volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Tidak melakukan forum SKPD dan usulan tidak masuk ke dalam program / kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahan terhadap Kebijakan Nasional

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan serta pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai dimaksud diatas maka Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan Pelayanan Medik.
b. Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik.
c. Menyelenggarakan Pelayanan Asuhan Keperawatan.
d. Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan.
e. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan, penelitian dan pengembangan.
f. Pengelolaan urusan ketatausahaan rumah sakit.

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan merupakan penjabaran teknis bidang kesehatan atas RPJM nasional. Dokumen perencanaan tersebut merupakan dokumen perencanaan teknis bidang kesehatan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah kebijakan pembangunan kesehatan yang diuraikan dalam rencana program bidang kesehatan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 tidak ada visi dan misi namun mengikuti visi dan misis Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan gotong-royong”.

Sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Kementerian Kesehatan meliputi 12 (dua belas) sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat;
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit;
3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
4. Meningkatnya Akses, Kemandirian dan mutu sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

5. Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan;
6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga;
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri;
8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi;
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan;
10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih;
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan;
12. Meningkatkan system informasi kesehatan integrasi.

Adapun prioritas pembangunan kesehatan pada tahun 2015-2019 difokuskan pada enam fokus prioritas yaitu:

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;
2. Meningkatnya pengendalian penyakit;
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan Kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan;
5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan Vaksin; serta
6. Meningkatkan responsivitas system kesehatan.

Rencana kerja RSKD Balikpapan juga mempertimbangkan terhadap rencana strategis dari Kementrian Kesehatan dan juga Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur . Dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan juga menjadi rujukan dalam penyusunan jenis program dan kegiatan serta indikator yang akan dicapai terutama untuk indikator program yang termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

3.2. Tujuan dan sasaran Perubahan Renja RSKD Balikpapan.

Tujuan yang ditetapkan manajemen RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan (RSKD) dalam rangka mewujudkan rencana jangka menengah RSKD 2019-2023 dan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur menuju adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit dan unggulan kanker terpadu.

2. Meningkatnya kinerja keuangan yang akuntabel dan transparan.
3. Terwujudnya Rumah sakit yang ramah lingkungan

3.3. Program dan kegiatan

Mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomer 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, pada tahun 2023 ditetapkan 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan serta 3 (tiga) sub Kegiatan dengan total Pagu Anggaran sebesar **Rp695.829.310.876,00,-**

Rincian Program dan kegiatan RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**

   Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

   a. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

      Output : Gaji dan tunjangan ASN

      Target : 611 Orang

      Anggaran : Rp. 121.500.477.852,00

   b. **Peningkatan Pelayanan BLUD**

      Output : Pelayanan sesuai dengan standar RS kelas B

      Target : 194.900 Kunjungan

      Anggaran : Rp. 478.661.259.536,00

2. **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

   Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

   a. **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.**

      1) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan.

         Output : Tersedianya peralatan Kesehatan

         Target : 651 unit/set

         Anggaran : Rp. 95.667.573.488,00,-

Tabel T-C. 33
Program Dan Kegiatan RSKD Balikpapan Tahun 2023 Perubahan Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kalimantan Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Prgram/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Perubahan 2023					Perkiraan Maju 2024	
			lokasi	Target	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Rp.
	TOTAL PAGU ANGGARAN				**695.829.310.876,00**				**448.195.547.000,00**
1.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Outcome: Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan (RS Kanujoso)**	**Bpn**	**80%**	**600.161.737.388,00**				**429.418.866.512,00**
1.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Output : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**4 Dokumen**	**50.000.000,00**
1.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4 Laporan	50.000.000,00
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN**	**Bpn**	**14 Bulan**	**121.500.477.852,00**	**APBD**		**14 Bulan**	**117.018.866.512,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Prgram/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Perubahan 2023					Perkiraan Maju 2024	
			lokasi	Target	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Rp.
1.02.01.1.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		611 Orang/ bulan	121.500.477.852,00			670 Orang/Bulan	117.018.866.512,00
1.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Output : Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan**						**1192 Stell**	**100.000.000,00**
1.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stell Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan						1192 Stell	100.000.000,00
1.02.1.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**				**APBD**		**12 Laporan**	**100.000.000,00**
1.02.1.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan	100.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Prgram/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Perubahan 2023					Perkiraan Maju 2024	
			lokasi	Target	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Rp.
1.02.1.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Output : Tersedianya Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik**				**APBD**		**12 Laporan**	**150.000.000,00**
1.02.1.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Bulan	150.000.000,00
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Output : Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Bpp	21 Unit Kerja	**478.661.259.536,00**	**BLUD**		22 Unit Kerja	**312.000.000.000,00**
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Output : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Bpp	194.900 Kunjungan	478.661.259.536,00			22 Unit Kerja	312.000.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Prgram/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Perubahan 2023					Perkiraan Maju 2024	
			lokasi	Target	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Rp.
01.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Outcome: Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Akreditasi Pelayanan Rumah Sakit (SNARS)**	**Bpp**	**1 Sertifikat**	**95.667.573.488,00**	**APBD**			**18.276.680.488,00**
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Output : Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Bpp	90%	**95.667.573.488,00**	APBD			**17.756.680.488,00**
1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Output: Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana. Prasarana. Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis	Bpp	1 Unit				**1 Unit**	**10.000.000.000,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Prgram/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Perubahan 2023					Perkiraan Maju 2024	
			Iokasi	Target	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Rp.
		Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000							
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Output: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Bpp	588 Unit	**95.667.573.488,00**			**93 Unit /Set/ Paket**	**7.000.000.000,00**
1.02.02.1.01.12	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Output: Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan	Bpp					2 **Unit**	**656.680.488,00**
1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Output: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Bpp					**1523 Unit**	**50.000.000,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Prgram/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Perubahan 2023					Perkiraan Maju 2024	
			lokasi	Target	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Rp.
1.02.02.1.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Output: Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	Bpp					**8 Unit**	**500.000.000,00**
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Output : Tercapainya Penilaian Proper Lingkungan**				**APBD**		**680 Orang/ Tahun**	**520.000.000,00**
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Output: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	BPP					Hijau	**80.000.000,00**
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Output: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	BPP					4 Dokumen	**10.000.000,00**
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Output: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	BPP						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Prgram/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Perubahan 2023					Perkiraan Maju 2024	
			lokasi	Target	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Rp.
1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Sub Output : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit						3 Dokumen	**430.000.000,00**
1.02.02.1.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Output : Tercapainya Nilai Rata-rata Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit .**	**BPP**			**APBD**			**600.000.000,00**
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Output: Jumlah kegiatan Akreditasi dan survey Indeks kepuasan masyarakat							**600.000.000,00**
1.02.03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Outcome : Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya**	**Bpp**					**60%**	**500.000.000,00**
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya	Output : Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya	Bpp					60%	**500.000.000,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Prgram/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Perubahan 2023					Perkiraan Maju 2024	
			lokasi	Target	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Rp.
	Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Manusia Kesehatan							
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sub Output : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Bpp					923 Orang	**500.000.000,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan Progam / Kegiatan / Sub. Kegiatan serta alokasi anggaran belanja daerah dalam perubahan APBD tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023. Sejalan pula dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, politik baik daerah maupun Nasional, Evaluasi Kinerja Renja Perangkat Daerah, Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat diperlukan berbagai langkah respon dan antisipasi terhadap berbagai kondisi tersebut.

4.1. Pagu Indikastif anggaran Perubahan tahun 2023 RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

Berdasarkan RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, alokasi pagu anggaran perubahan yang dialokasikan untuk RSKD Balikpapan sebesar **Rp695.829.310.876,00**

4.2. Program / Kegiatan /Sub Kegiatan RSKD Balikpapan.

Rencana Kerja Perubahan RSKD Balikpapan pada tahun 2023 akan menggunakan sumber pendanaan berasal dari PAD Pemerintah Propinsi Kalimantan timur dan dana BLUD RSKD Balikpapan. Pada anggaran tahun 2023 ada 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan, dan 3 (tiga) sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun rincian dari program dan kegiatan pada tahun 2023 seperti yang ada pada tabel berikut ini:

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Prgram/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RKPD Perubahan Tahun 2023		
			lokasi	Target	Kebutuhan Pagu Indikatif
	TOTAL PAGU ANGGARAN				**695.829.310.876,00**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Outcome:** **Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan (RS Kanujoso)**	**Balikpapan**		**600.161.737.388,00**
1.02.01.1.01.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	14 Bln	**121.500.477.852,00**
1.02.01.1.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		611 Orang/bulan	121.500.477.852,00
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Output : Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	21 unit kerja	**478.661.259.536,00**
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Output : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	194.900 Kunjungan	478.661.259.536,00

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Prgram/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RKPD Perubahan Tahun 2023		
			lokasi	Target	Kebutuhan Pagu Indikatif
01.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Outcome:** **Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Akreditasi Pelayanan Rumah Sakit (SNARS)**	**Balikpapan**	**1 sertifikat**	**95.667.573.488,00**
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Output :** **Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000**	**Bpp**	**90%**	**95.667.573.488,00**
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Output: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan.	Bpp	650 Unit	95.667.573.488,00
	- Pengadaan alat kedokteran	Output: Jumlah alat Kesehatan yang di adakan		650 Unit	95.667.573.488,00

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 ini merupakan penjabaran program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yang sejalan dengan Rencana Strategis 2019-2023 RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Beberapa program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan di RSKD Balikpapan masih belum terakomodir mengingat penyesuaian terhadap anggaran yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Namun kami tetap berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan memanfaatkan dana yang bersumber dari BLUD Rumah Sakit.

Selain itu, dalam upaya memenuhi peralatan kesehatan di rumah sakit juga diupayakan pengajuan dana yang bersumber dari dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus selama ini lebih banyak digunakan untuk mengadakan alat kesehatan. Penggunaan anggaran mengacu pada peraturan yang berlaku dengan prinsip transparan, efektif dan efisien sehingga seluruh pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan ini kami susun, dengan harapan serta kerja keras yang kami lakukan semoga target kinerja yang kita tetapkan tahun 2023 ini dapat dicapai untuk **Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Yang Unggul Dengan Pelayanan Dan Teknologi Kedokteran Yang Bermutu** pada tahun 2023.

Balikpapan, Agustus 2023
Direktur
RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo

dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM.,MARS
Pembina Utama Muda
NIP. 196505281997071001

PERUBAHAN RENCANA KERJA RUMAH SAKIT JIWA ATMA HUSADA MAHAKAM

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ranhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan yang disusun untuk melaksanakan rencana tahun kelima Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2023. Renja dan Renstra merupakan dokumen yang disusun untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian target pembangunan yang telah direncanakan pada RPJMD tahun 2019-2023 dan RKPD tahun 2023.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Perubahan RKPD yang telah disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a) Perkembangan isu strategis global dan nasional yang mempengaruhi arah kebijakan pembangunan nasional, asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
b) Terdapatnya Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya (SiLPA Tahun 2022) berdasarkan hasil Audit BPK yang harus digunakan pada tahun 2023 dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan pada RPJMD Kaltim 2019-2023;
c) Capaian realisasi kinerja pembangunan Tahun 2023 yang berdasarkan hasil evaluasi triwulan II belum mencapai target yang ditentukan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian program/kegiatan dan target kinerja yang telah direncanakan.

Adapun penyusunan Perubahan Renja dilakukan simultan dengan Perubahan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada :

a) Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023; dan
b) Hasil pengendalian pelaksanaan Renja RSJD Atma Husada Mahakam hingga triwulan II tahun 2023.

Proses penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan yakni :

a) Penyusunan rancangan perubahan Renja;
b) Perumusan rancangan akhir perubahan Renja; dan
c) Penetapan perubahan Renja.

Dokumen Perubahan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sehingga penetapan target tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renja harus mendukung percepatan pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023. Selanjutnya Perubahan Renja dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2023 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Kalimanran Timur Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur berpedoman kepada peraturan yang berlaku antara lain :

1.2.1 Undang-undang :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

1.2.2 Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara No. 4817);
3. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 Tentang Perubahanan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

1.2.3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025;
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

1.2.4 Peraturan Lainnya tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1. Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 06 Tahun 2011 tentang Perubahan PERDA No 10 Tahun 2008 tentang SOTK RSJD Atma Husada Mahakam Prov Kal-Tim;
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 81 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Rumah Sakit Jiwa daerah Atma Husada Mahakam;
4. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.44/K.620/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah. dengan status Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tiur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Ranhir Perubahan Renja adalah untuk melakukan
penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan Program/Kegiatan/Subkegiatan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Ranhir Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 serta penyesuaian target tujuan dan sasaran Bappeda Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Ranhir Perubahan Renja adalah untuk menyesuaikan target kinerja dan pagu program / kegiatan / subkegiatan, menjadi dokumen perencanaan perangkat daerah yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun 2023, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2023 dan menjaga konsistensi capaian kinerja RSJD Atma Huasada Mahakam yang telah ditetapkan dalam Renstra.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

BAB III. Rencana Program dan Kegiatan Dalam Ranhir Perubahan Renja Perangkat Daerah

BAB IV. PENUTUP
- 4.1 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Ranhir Perubahan Renja Tahun 2023

BAB II
HASIL RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan RSJD Atma Husada Mahakam melalui pencapaian target tujuan dan sasaran perangkat daerah pada tahun 2023 serta capaian program/ kegiatan/subkegiatan yang telah ditetapkan pada Renja tahun 2023. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 diharapkan mampu mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan pada dokumen perencanaan menengah perangkat daerah yakni Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran pada Renstra dan Renja
RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Pada Tahun 2023		Realisasi Tahun 2023 TW II
			Renstra	Renja	
1	2	3	4	5	6
1	Tujuan 1 : Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Nilai SPM	88	88	96,99%_**
2	Sasaran 1 : Meningkatnya capaian mutu pelayanan rumah sakit	Capaian indikator nasional mutu pelayanan kesehatan rumah sakit	88,5	88,5	94,24%_**
3	Sasaran 2 : Optimalnya Kualitas SDM Rumah Sakit	Capaian Kompetensi Pegawai	92	92	75%_**
4	Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Rumah sakit yang transparan dan akuntabel	Indeks Persepsi Korupsi	13	13	12.99_**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Pada Tahun 2023		Realisasi Tahun 2023 TW II
			Renstra	Renja	
5	Sasaran 3 : Terlaksanannya Pengelolaan Manajemen Rumah Sakit Yang Baik	Nilai Lakip	81	81	-*

Keterangan :

* = Capaian indikator diukur pada akhir pelaksanaan renja

** = Capaian sementara hingga semester pertama

Terdapat kesesuaian tujuan dan sasaran serta target kinerja yang telah ditetapkan pada pada tahun kelima Renstra (tahun 2023) dengan yang ditetapkan pada Renja 2023. Hal ini sebagai upaya dalam menjaga keselarasan dalam pencapaian target pembangunan perangkat daerah.

Pelaksanaan Renja RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 diharuskan untuk selaras dengan yang akan dilaksanakan melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023. Program/ Kegiatan/Subkegiatan yang dilaksanakan pada APBD tahun anggaran 2023 harus telah direncanakan pada Renja tahun 2023 dan tidak ada penambahan program/kegiatan/subkegiatan. Secara rinci gambaran pelaksanaan Renja tahun 2023 pada APBD Tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut berikut:

Tabel 2.2

Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja RSJD AHM Tahun 2023 dengan APBD RSJD AHM Tahun 2023

Kode	Program/Kegiiataan/Sub kegiatanan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Atma Husada)	86,25%	61.588.407.000	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Atma Husada)	86%	72.534.833.442	Inkonsistensi pada target kinerja
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kinerja RSJD Atma Husada Mahakam	1 Laporan	9.000.000	Jumlah Laporan Kegiatan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kinerja RSJD Atma Husada Mahakam	3 Laporan	54.000.000	Inkonsistensi pada target kinerja
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laooran	9.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	54.000.000	Inkonsistensi pada target kinerja
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu	100%	30.091.346.678	Penyediaan Gaji dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu	100%	34.250.077.892	Konsistensi
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2366 Orang/Bulan	29.909.426.678	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	234 Orang / Bulan	33.996.397.892	Inkonsistensi pada target kinerja
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	160.320.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	197.280.000	Konsistensi
	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	4 Dokumen	21.600.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	10 Dokumen	56.400.000	Inkonsistensi pada target kinerja

Kode	Program/Kegiiataan/Sub kegiatanan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Keuangan SKPD	Keuangan SKPD			Keuangan SKPD			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	36.950.350	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	744.819.700	Konsistensi
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.033.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 paket	96.098.400	Inkonsistensi pada target kinerja
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	17.952.350	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	540.749.800	Inkonsistensi pada target kinerja
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8.965.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket	107.971.500	Inkonsistensi pada target kinerja
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketepatan Pengadaan Sesuai Perencanaan	100%	5.650.000	Ketepatan Pengadaan Sesuai Perencanaan	100%	327.793.200	Konsistensi
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.650.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	327.793.200	Inkonsistensi pada target kinerja
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Survei Kepuasan Pegawai Terhadap Kenyamanan Ditempat Kerja	78%	11.931.578.040	Nilai Survei Kepuasan Pegawai Terhadap Kenyamanan Ditempat Kerja	78%	15.781.853.880	Konsistensi

Kode	Program/Kegiiataan/Sub kegiatanan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.998.812.016	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.017.624.200	Konsistensi
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.932.766.024	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	13.764.229.680	Konsistensi
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung dan Sarana/Prasarana Yang Berfungsi Dengan Baik	26 Gedung	13.881.932	Jumlah Gedung dan Sarana/Prasarana Yang Berfungsi Dengan Baik	26 Gedung	1.876.288.770	Konsistensi
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Gedung	13.881.932	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1.876.288.770	Inkonsistensi pada target kinerja
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pendapatan Terhadap Target	100%	19.500.000.000	Persentase Pendapatan Terhadap Target	100%	19.500.000.000	Konsistensi
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	19.500.000.000	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	19.500.000.000	Konsistensi
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Capaian nilai indikator mutu pelayanan (Atma Husada)	92%	19.918.000	Presentase Capaian nilai indikator mutu pelayanan (Atma Husada)	92%	9.087.762.900	Konsistensi

Kode	Program/Kegiiataan/Sub kegiatanan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	85%	8.851.000	Nilai Aspak	85 %	9.031.718.100	Konsistensi
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	910.000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	15 unit	8.714.856.900	Inkonsistensi pada target kinerja
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	1 Unit	961.000	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	99 Unit	118.800.000	Inkonsistensi pada target kinerja
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	40 Unit	6.980.000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	345 Unit	198.061.200	Inkonsistensi pada target kinerja
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	100%	11.067.000	Persentase Capaian Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	100%	56.044.800	Konsistensi

Kode	Program/Kegiiataan/Sub kegiatanan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	11.067.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	326 Dokumen	56.044.800	Inkonsistensi pada target kinerja
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM terlatih 20 jam pertahun (Atma Husada)	86,5%	11.000.000	Persentase SDM terlatih 20 jam pertahun (Atma Husada)	86%	99.000.000	Inkonsistensi pada target kinerja
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah laporan Bimtek yang dilaksanakan	1 Bidang	11.000.000	Jumlah laporan Bimtek yang dilaksanakan	5 Bidang	99.000.000	Inkonsistensi pada target kinerja
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	2 Orang	11.000.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	11 Orang	99.000.000	Inkonsistensi pada target kinerja

Berdasarkan Renja RSJD Atma Husada Mahakam Tahun 2023, terdapat 3 program, 10 kegiatan dan 17 sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada APBD tahun anggaran 2023. Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan pada Renja dilaksanakan pada APBD, Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Gambaran Konsistensi Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renja RSJD AHM Tahun 2023 dengan APBD RSJD AHM Tahun 2023

No	Uraian	Program	Kegaitaan	Sub Kegaitan
1	2	3	4	5
1	Konsisten	1	7	5
2	Inkonsistensi pada indicator dan target kinerja	-	-	-
3	Inkonsistensi pada indicator kinerja		-	-
4	Inkonsistensi pada indicator target kinerja	2	2	13
5	Tidak dilaksanakan	-	-	
	Jumlah	3	9	18

Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan Renja tahun 2023 pada APBD tahun 2023, terdapat inkonsistensi pada sub kegiatan dengan rincian 17 sub kegiatan yang inkonsistensi karena perbedaan target kinerja pada pelaksanaan APBD.

Adapun penyebab inkonsistensi yang terjadi pada pelaksanaan renja yang dimaksud karena :

1. Bahwa pada dasarnya untuk di SIPD maupun di Renstra terget sesuai 86,25 % tetapi ada kesalahan penginputan pada aplikasi evdoren di APBD
2. Terget dan pagu bertambah karena menyesuaikan jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas sehingga jumlah laporan bertambah
3. Terjadi penyesuain terget indikator
4. Nilai 2366 didapat dari jumlah PNS tahun 2022 sebanyak 169 orang dikali 14 bulan sehingga pada awal penyusunan renja 2023 menggunakan target 2366 orang perbulan kemudian dalam peoses asistensi dirubah menjadi 234 orang / bulan dengan asumsi jumlah real PNS saat itu yaitu 167 orang ditambah 67 P3K sehingga total 234 orang, dituangkan dalam target menjadi 234 orang/bulan
5. Perubahan terjadi karena terdapat penambahan jumlah perjalan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
6. Adanya penambahan rinciaan belanja sehingga pagu anggaran bertambah
7. Sebelumnya 4 gedung untuk kegiatan renovasi bangunan ruang Punai, Tiung, Enggan dan upip. Kemudian berubah sesuai dengan kebutuhan dan penambahan anggran sehingga kegiatan renovasi gedung menjadi 1

gedung yaitu penambahan atap gedung instlasi gizi dan DED renovasi gedung pelayanan.

8. Sebelumnya target 1 dokumen hanya berisi dokumen pengadaan bahan habis pakai tetapi bertambah rincian belanja menjadi home visite 326 dokumen
9. Bahwa pada dasarnya untuk di SIPD maupun di Renstra terget sesuai 86,5 % tetapi ada kesalahan penginputan pada aplikasi evdoren di APBD.
10. Terget dan pagu bertambah karena menyesuaikan jumlah orang yang melakukan bimtek.

Adanya inkonsistensi dalam pelaksanaan Renja rsjd Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 pada APBD Tahun Anggaran 2023 akan menjadi catatan yang harus diperbaiki dan ditindak lanjuti dalam perubahan Renja tahun 2023 dan menjadi catatan dalam penyusunan Renja tahun berikutnya. Konsistensi perencanaan dengan penganggaran harus diwujudkan untuk menjamin perencanaan yang dilakukan lebih berkualitas, tepat dan terarah.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 bertujuan untuk memastikan pagu indikatif yang telah dianggarkan pada APBD tahun 2023 atau DPA tahun 2023 telah efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja (output) yang telah direncanakan pada Renja serta memastikan target kinerja sub kegiatan yang telah direncanakan efektif dalam pencapaian target kinerja pada kegiatan dan program.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 sampai dengan triwulan II ini diharapkan akan menjadi bahan untuk penyusunan perubahan Renja tahun 2023, sehingga rencana pembangunan yang ditetapkan dapat direalisasikan pada tahun 2023.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 sampai dengan triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Laporan Apbd Triwulan 2 2023 [1.02.0.00.0.00.01.0011] Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023 Triwulan 2		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023		Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)			(9)		(10)	(11)	(12)		(13)	
				K		RP	K	RP			K	RP	K	RP
1.02.0.00.0.00.01.0011	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam					81.721.596.342		43.948.328.757				53,78		SR
1.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Atma Husada)	positif	86	%	72.534.833.442	89,33	35.397.383.606			103,87	48,80	ST	SR
1.02.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kinerja RSJD Atma Husada Mahakam	positif	3	Laporan	54.000.000	1	0	1 laporan LKJiP sdh terresalsi dan 2 laporan evaluasi kinerja terrealisasi dibulan desember		33,33	0,00	SR	SR
1.02.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	positif	3	Laporan	54.000.000	1	0			33,33	0,00	SR	SR
1.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu	positif	100	%	34.250.077.892	50	14.957.879.798	Proses pembayaran gaji sesuai tepat waktunya setiap bulanya yang di bayarkan sebanyak 234 orang/bulan		50,00	43,67	SR	SR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023 Triwulan 2		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023		Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)			(9)		(10)	(11)	(12)		(13)	
				K		RP	K	RP			K	RP	K	RP
1.02.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	positif	234	Orang/ Bulan	33.996.397.892	234	14.905.570.016			100,00	43,84	ST	SR
1.02.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	12	Dokumen	197.280.000	6	39.360.000			50,00	19,95	SR	SR
1.02.001.1.02.003	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	positif	10	Dokumen	56.400.000	2	12.949.782			20,00	22,96	SR	SR
1.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	positif	100	%	744.819.700	100	629.866.028		Koordinasi dengan pihak ketiga berjalan dengan baik	100,00	84,57	ST	T
1.02.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	positif	22	Paket	96.098.400	22	94.920.873			100,00	98,77	ST	ST
1.02.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	17	Paket	540.749.800	17	432.949.775			100,00	80,06	ST	T
1.02.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	positif	23	Paket	107.971.500	23	101.995.380			100,00	94,47	ST	ST
1.02.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketepatan Pengadaan Sesuai Perencanaan	positif	100	%	327.793.200	100	309.840.871		Koordinasi dengan pihak ketiga berjalan dengan baik	100,00	94,52	ST	ST
1.02.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Unit Peralatan	positif	28	Unit	327.793.200	28	309.840.871			100,00	94,52	ST	ST

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023 Triwulan 2		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023		Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)			(9)		(10)	(11)	(12)		(13)	
				K		RP	K	RP			K	RP	K	RP
	Mesin Lainnya	dan Mesin Lainnya yang Disediakan												
1.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Survei Kepuasan Pegawai Terhadap Kenyamanan Ditempat Kerja	positif	78	%	15.781.853.880	77,2	7.548.332.478	Untuk kegiatan survei dilakukan 1 tahun sekali nilai survei keluar di akhir bulan desember, sementara masih menggunakan nilai realisasi tahun 2022		98,97	47,83	ST	SR
1.02.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	12	Laporan	2.017.624.200	6	610.457.312			50,00	30,26	SR	SR
1.02.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	12	Laporan	13.764.229.680	6	6.937.875.166			50,00	50,41	SR	SR
1.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung dan Sarana/Prasarana Yang Berfungsi Dengan Baik	positif	26	Gedung	1.876.288.770	26	213.143.850	Jasa konsultasi DED Perencanaan dalam proses		100,00	11,36	ST	SR
1.02.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	positif	1	Gedung	1.876.288.770	1	213.143.850			100,00	11,36	ST	SR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023 Triwulan 2		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023		Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)			(9)		(10)	(11)	(12)		(13)	
				K		RP	K	RP			K	RP	K	RP
	Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi												
1.02.001.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pendapatan Terhadap Target	positif	100	%	19.500.000.000	62,89	11.738.320.581			62,89	60,20	R	R
1.02.001.1.10.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	positif	25	Unit Kerja	19.500.000.000	20	11.738.320.581			80,00	60,20	T	R
1.02.002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Capaian nilai indikator mutu pelayanan (Atma Husada)	positif	92	%	9.087.762.900	96,82	8.504.305.662			105,24	93,58	ST	ST
1.02.002.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	positif	85	%	9.031.718.100	93,18	8.499.971.262	Untuk pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan dilakukan dibulan september sehubungan dengan Expired date sertifikat kalibrasi dibulan oktober		109,62	94,11	ST	ST
1.02.002.1.01.010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang	positif	15	Unit	8.714.856.900	15	8.440.919.012			100,00	96,86	ST	ST

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023 Triwulan 2		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023		Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)			(9)		(10)	(11)	(12)		(13)	
				K		RP	K	RP			K	RP	K	RP
		Disediakan												
1.02.002.1.01.016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	positif	99	Unit	118.800.000	49	59.052.250			49,49	49,71	SR	SR
1.02.002.1.01.017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	positif	345	Unit	198.061.200	0	0			0,00	0,00	SR	SR
1.02.002.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	positif	100	%	56.044.800	13,49	4.334.400	Kegiatan home visite masih dalam proses pendataan untuk kunjunagan ke rumah pasien.		13,49	7,73	SR	SR
1.02.002.1.02.013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	positif	326	Dokumen	56.044.800	44	4.334.400			13,50	7,73	SR	SR
1.02.003	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM terlatih 20 jam pertahun (Atma Husada)	positif	86	%	99.000.000	21,95	46.639.489			25,52	47,11	SR	SR
1.02.003.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi	Jumlah laporan Bimtek yang dilaksanakan	positif	5	Bidang	99.000.000	5	46.639.489		Kegiatan bimtek	100,00	47,11	ST	SR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023 Triwulan 2		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023		Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)			(9)		(10)	(11)	(12)		(13)	
				K		RP	K	RP			K	RP	K	RP
	Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi									dibantu dengan dana BLUD				
1.02.003.1.02.001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	positif	11	Orang	99.000.000	5	46.639.489			45,45	47,11	SR	SR

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan antara lain :

1. Untuk kegiatan survei dilakukan 1 tahun sekali nilai survei keluar di akhir bulan desember, sementara masih menggunakan nilai realisasi tahun 2022
2. Untuk kegiatan survei dilakukan 1 tahun sekali nilai survei keluar di akhir bulan desember, sementara masih menggunakan nilai realisasi tahun 2022
3. Jasa konsultasi DED Perencanaan dalam proses
4. Untuk pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan dilakukan dibulan september sehubungan dengan Expired date sertifikat kalibrasi dibulan oktober
5. Kegiatan home visite masih dalam proses pendataan untuk kunjunagan ke rumah pasien.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 sampai dengan triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran ouput kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

Secara rinci, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dapaat terlihat pada tabel berikut ini:

TABEL 3.1

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Ranhir Rencana Perubahan Tahun 2023 (Tahun Rencana)					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja Sebelum	Target Capaian Kinerja Sesudah	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sebelum	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sesudah	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7	8	9
1	**02**	**03**				**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persentase SDM terlatih 20 jam pertahun**	**Samarinda**	**86,5%**	**86,5%**	**99,000,000**	**419,747,000**	**APBD**
1	**02**	**03**	**1**	**02**		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah laporan bimtek yang dilaksanakan	Samarinda	5 Bidang	5 Bidang	99,000,000	419,747,000	**APBD**
1	**02**	**03**	**1**	**02**	**01**	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Samarinda	11 Orang	47 Orang	99,000,000	419,747,000	**APBD**
1	**02**	**02**				**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Persentase capaian nilai indikator mutu pelayanan**	**Samarinda**	**92%**	**92%**	**56,044,800**	**11,523,100,025**	**APBD**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Ranhir Rencana Perubahan Tahun 2023 (Tahun Rencana)					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja Sebelum	Target Capaian Kinerja Sesudah	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sebelum	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sesudah	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7	8	9
1	**02**	**02**	1	02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase capaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa	Samarinda	100 %	100 %	56,044,800	371,494,800	**APBD**
1	**02**	**02**	1	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Samarinda	326 Dokumen	327 Dokumen	56,044,800	371,494,800	**APBD**
1	**02**	**02**	1	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	Samarinda	85 %	85 %		11,151,605,225	**APBD**
1	**02**	**02**	1	01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas	Samarinda	15 Unit	87 unit	8,714,856,900	10,441,774,312	APBD

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Ranhir Rencana Perubahan Tahun 2023 (Tahun Rencana)					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja Sebelum	Target Capaian Kinerja Sesudah	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sebelum	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sesudah	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7	8	9
							Layanan Kesehatan yang Disediakan						
1	**0 2**	**0 2**	1	0 1	1 7	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Samarinda	345 Unit	345 Unit	198,061,200	198,061,200	APBD
						Pengadaan barang penunjang operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Samarinda	99 Unit	602 Unit	118,800,000	511,769,713	**APBD**
1	**0 2**	**0 1**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan**	**Samarinda**	**86,25%**	**86,25%**		**81,454,499,689**	**APBD**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Ranhir Rencana Perubahan Tahun 2023 (Tahun Rencana)					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja Sebelum	Target Capaian Kinerja Sesudah	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sebelum	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sesudah	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7	8	9
1	**02**	**01**	**1**	**01**		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah laporan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas kinerja Rumah Sakit Jiwa	Samarinda	3 Laporan	3 Laporan	54,000,000	54,000,000	**APBD**
1	**02**	**01**	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	3 Laporan	3 Laporan	54,000,000	54,000,000	**APBD**
1	**02**	**01**	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyedian gaji dan pelaksanaan penatausahan keuangan tepat waktu	Samarinda	100%	100%	35,145,084,867	35,145,084,867	**APBD**
1	**02**	**01**	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	234 Orang/Bulan	234 Orang/Bulan	34,891,404,867	34,891,404,867	**APBD**
1	**02**	**01**	1	02	02	Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen	Samarinda	12	12	197,280,000	197,280,000	**APBD**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Ranhir Rencana Perubahan Tahun 2023 (Tahun Rencana)					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja Sebelum	Target Capaian Kinerja Sesudah	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sebelum	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sesudah	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7	8	9
						Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen	Dokumen			
1	**02**	**01**	1	02		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	10 Dokumen	10 Dokumen	56,400,000	56,400,000	**APBD**
1	**02**	**01**	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Samarinda	100%	100%		1,069,837,200	**APBD**
1	**02**	**01**	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	22 Paket	39 Paket	96,098,400	144,487,800	**APBD**
1	**02**	**01**	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Samarinda	17 Paket	27 Paket	540,749,800	817,377,900	**APBD**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Ranhir Rencana Perubahan Tahun 2023 (Tahun Rencana)					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja Sebelum	Target Capaian Kinerja Sesudah	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sebelum	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sesudah	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7	8	9
							Kantor yang Disediakan						
1	**02**	**01**	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Samarinda	23 Paket	23 Paket	107,971,500	107,971,500	**APBD**
1	**02**	**01**	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketepatan pengadaan sesuai perencanaan	Samarinda	100%	100%	327,793,200	1,191,306,725	**APBD**
1	**02**	**01**	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Samarinda	28 Unit	127 Unit	327,793,200	1,191,306,725	**APBD**
1	**02**	**01**	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja	Samarinda	78%	78%		14,684,855,640	**APBD**
1	**02**	**01**	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi.	Samarinda	12 Laporan	12 Laporan	2,017,624,200	2,017,624,200	**APBD**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Ranhir Rencana Perubahan Tahun 2023 (Tahun Rencana)					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja Sebelum	Target Capaian Kinerja Sesudah	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sebelum	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sesudah	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7	8	9
							Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
1	**02**	**01**	1	08		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	12 Laporan	13,764,229,680	12,667,231,440	**APBD**
1	**02**	**01**	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah gedung dan sarana/prasarana yang berfungsi dengan baik	Samarinda	26 Gedung	26 Gedung	1,876,288,770	2,133,664,885	**APBD**
1	**02**	**01**	1	09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dirahabilitasi	Samarinda	1 Gedung	2 Gedung	1,876,288,770	2,133,664,885	**APBD**
1	**02**	**01**	1	10		Peningkatan pelayanan BLUD	Persentase pendapatan terhadap target	Samarinda	100 %	100%	19,500,000,000	27,175,750,372	**BLUD**
1	**02**	**01**	1	10	01	Pelayanan dan penunjang pelayanan	Jumlah BLUD yang	Samarinda	25 Unit Kerja	25 Unit Kerja	19,500,000,000	27,175,750,372	**BLUD**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Ranhir Rencana Perubahan Tahun 2023 (Tahun Rencana)					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja Sebelum	Target Capaian Kinerja Sesudah	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sebelum	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sesudah	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7	8	9
						BLUD	Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						
TOTAL RANHIR RENJA PERUBAHAN APBD DAN BLUD											**81,721,596,342**	**93,397,346,714**	

BAB IV
PENUTUP

Ranhir Perubahan Rencana Kerja RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisieni pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Perubahan Rencana Kerja RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah prioritas dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dalam rangka menyusun Rencana PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi perangkat daerah untuk tahun anggaran 2023. Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman agar aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing masing aparatur RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Samarinda, 2023
Direktur RSJD Atma Husada Mahakam
Provinsi Kalimantan Timur



dr. Indah Puspitasari, MARS
Pembina Utama Muda
NIP. 19670530 199803 2 003

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran pelaksanaan tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2019-2023, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Renja 2023 ini selanjutnya dijadikan sebagai pedoman Kepala Dinas dalam menyusun program dan kegiatan yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (RKA-APBD). Penyusunan Renja 2023 juga mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 dan program strategis Provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Dalam dokumen Renja 2023, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-PERA) Provinsi Kalimantan Timur melakukan perumusan rencana kerja dan anggaran tahun 2023, dengan mempertimbangkan perubahan kondisi kehidupan sosial ekonomi di daerah dampak dari Pandemi Covid-19. Dampak yang dirasakan Kalimantan Timur cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan melambatnya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri, pariwisata, perdagangan dan jasa yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada gilirannya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Renja tahun 2023 difokuskan pada pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksebilitas antar daerah dan kawasan pendukung IKN, sesuai tema RKPD tahun 2023 “**Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat**”. Renja 2023 merupakan terjemahan lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai bersifat realistis dan dapat mengantisipasi perkembangan global masa depan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rancangan Perubahan Renja tahun 2023 DPUPR-PERA ini adalah berdasarkan kepada Pancasila sebagai Landasan Idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan sebagai landasan operasional, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 58);
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur;
29. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019); serta
31. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Perubahan Renja DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk memberikan acuan, arahan dan pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung program kerja Kepala Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renja SKPD, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur yang telah dijabarkan dalam RPJMD.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Renja DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur 2023 adalah :

1. Sebagai pedoman dan pengarah penyelenggaraan pembangunan infastruktur dasar bidang ke-PU-an di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan prasarana sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat yang berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
3. Memberikan gambaran umum tentang kinerja pelayanan DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur;
4. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur; serta
6. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rancangan Perubahan Renja tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menjelaskan tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan, Capaian Target Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN SERTA RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang penjelasan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan Tahun Berjalan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian rencana kerja program, kegiatan dan pendanaan tahun berjalan

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur tahun sebelumnya.

Pada dokumen Rancangan Renja DPUPR PERA Tahun 2023 ini disusun :

1. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur telah menggunakan Perubahan Renstra 2019-2023
2. Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 masih berjalan.

Sehingga hasil review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur (masih menggunakan hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 Triwulan II Bulan Juni Tahun 2023) dan pencapaian target Renstra maka rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renstra dan renja dan pencapaian renstra s/d tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 2.1 , berikut ini **:**

TABEL E 55 PERMENDAGRI 96 TAHUN 2017

EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI

RENJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERIODE PELAKSANAAN BULAN JUNI TAHUN 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Output Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Output Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sd Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV									
1	2	3	5		6		7			8		9		10		11		12		13 (5+12)		14 (10/5)x100			
			K	Rp	K	Rp	Target	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
0.01.0.04.5.05.0.1.0.0.04	Dinas Pekerjaan Umum/Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat								##########		473,894,783,810.00		124,267,622,665.00					0	##########	0	##########	0	-			
0.01.0.04.5.05.0.1.0.0.05	Dinas Pekerjaan Umum/Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat								62,000,000,836.00		8,010,736,240.00		37,916,600,000.00					0	36,673,300,000.00	0	36,673,300,000.00	0	-			
0.01.268	PROGRAM PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jika kepemerintahan daerah di kabupaten/kota tidak melaksanakan	960	1,910,857,000.00	59		96	%	1,644,568,836.00	0	831,900,365.00	44.22	5,009,347,345.00					44.22	5,425,347,220.00	114.22	5,425,347,220.00	0	-			
0.01.0.01.1.18	Perencanaan, Pengawasan, dan Pelaporan Bidang Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan (LPPD)	960	1,910,857,000.00	960	1,713,935,836.00	100	%	643,268,836.00	0	48,346,400.00	10.00	95,250,600.00					10.01	96,096,000.00	10.01	473,425,836.00	10.01	45.15			
0.01.0.01.1.18.001	Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Anggaran	1	1,000,000,000.00			1	Laporan	643,268,836.00	1	48,346,400.00	1	95,250,600.00					2	96,096,000.00	2	96,096,000.00	2	9.54			
0.01.0.01.1.18.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	5	910,857,000.00			100	%	955,315,000.00	0	-	45.22	101,700,344.00					45.27	101,700,344.00	45.27	101,700,344.00	90.75	89.9			
0.01.0.01.1.20	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan waktu Keuangan tepat	960	10,770,470,784.00	960	##########	96	Orang	230,137,000.00	0	-	9	101,700,344.00					9	101,700,344.00	96	10,402,700,360.00	2000	96.61			
0.01.0.01.1.20.01	Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	64,615,845,784.00			100	%	480,616,786.00	0	195,000,000.00	58.33	485,174,787.00					58.75	680,000,000.00	58.75	680,000,000.00	58.75	1.05			
0.01.0.01.1.20.01.962	Pengelola Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pengelolaan Administrasi Pegawai Pengelola Keuangan Daerah	12	195,240,000.00			1	Paket	1,658,000.00	0	-	4	-					0	-	4	-	0	-			
0.01.0.01.1.20.02	Administrasi Kegiatan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas ASN	960	1,347,926,000.00	960	1,713,935,836.00	8	Paket	320,000,000.00	0	-	4	92,000,000.00					4	123,000,000.00	964	1,836,250,000.00	960.6667	136.36			
0.01.0.01.1.20.02.963	Pengelola Pelaksana Dasar Administrasi Pelaksana Ordinasi Kepegawaian	Pengelolaan Pelaksana Dasar Administrasi Pelaksana Ordinasi	600	907,500,000.00			2	Paket	32,000,000.00	0	12,000,000.00	3	16,500,000.00					3	160,625,000.00	3	160,625,000.00	3	16.67			
0.01.0.01.1.20.03	Distribusi Peralatan Perlindungan Gubernur	Pelaksanaan Distribusi Peralatan Perlindungan Gubernur	200	160,000,000.00			2	Paket	20,000,000.00	0	-	0	-					0	-	0	-	0	-			
0.01.0.01.1.20.05	Administrasi Gaji Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas ASN	960	3,307,205,784.00	960	1,713,935,836.00	12	Dokumen	8,616,000.00	0	956,000.00	12	4,000,000.00					14	1,760,000.00	116	11,081,640,000.00	20.37037	336.32			
0.01.0.01.1.20.05.006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	100,000,000.00			12	Laporan	384,768,836.00	3	824,836,365.00	4	289,258,587.00					9	49,774,365.00	9	49,774,365.00	9	386.40			
0.01.0.01.1.20.05.962	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	20	1,914,815,000.00			100	%	192,000,000.00	0	-	0	-					0	-	0	-	0	-			
0.01.0.01.1.20.05.963	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga dan Rumah Tangga	12	160,750,000.00			2	Paket	154,000,000.00	0	-	0	-					0	-	0	-	0	-			
0.01.0.01.1.20.05.964	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan	2	150,000,000.00			100	%	2,212,000,786.00	0	36,660,736.00	53.33	1,805,600,437.00					53.33	1,782,260,437.00	53.33	1,782,260,437.00	426.4567	386.33			
0.01.0.01.1.20.05.965	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9	150,000,000.00			12	Laporan	52,000,000.00	3	4,500,000.00	4	6,500,000.00					9	9,000,000.00	9	9,000,000.00	100	4.62			
0.01.0.01.1.20.05.965	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Lain dan Dalam Daerah	4	1,000,000,000.00			12	Laporan	240,000,000.00	3	48,207,736.00	4	66,345,600.00					9	157,222,264.00	9	157,222,264.00	415.8889	65.55			
0.01.0.01.1.20	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas ASN	960	120,234,000,000.00	960	##########	12	Laporan	2,150,378,000.00	3	415,000,000.00	4	1,730,178,000.00					9	1,915,855,345.00	969	10,450,410,345.00	8715	4,861.82			
0.01.0.01.1.20.962	Pengadaan Kendaraan Bina Operasional dan Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Operasional Pada 2 dan Pada 4	9	937,200,000.00			100	%	2,060,376,000.00	0	-	33.33	615,281,000.00					33.33	615,281,000.00	33.33	615,281,000.00	33.33	29.89			
0.01.0.01.1.20.963	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2	90,000,000.00			12	Unit	252,000,000.00	0	-	50	340,000,000.00					50	340,000,000.00	50	340,000,000.00	100.2222	37.66			
0.01.0.01.1.20.05	Pengadaan Jaringan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas ASN	960	8,360,000,000.00	960	24,854,000,000.00	20	Unit	696,000,000.00	0	-	4	240,000,000.00					8	240,000,000.00	968	24,618,000,000.00	5040	98.93			
0.01.0.01.1.20.05.966	Pengadaan Jaringan Sarana Prasarana	Jaringan Sarana Penunjang yang Disediakan	12	40,000,000.00			24	Unit	41,000,000.00	0	-	20	97,000,000.00					20	97,000,000.00	20	97,000,000.00	20	48.05			
0.01.0.01.1.20.962	Pengadaan Jaringan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pengadaan Jaringan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	2,000,000,000.00			4	Unit	1,001,000,000.00	0	-	1	241,940,000.00					1	241,940,000.00	1	241,940,000.00	16.34667	12.1			
0.01.0.01.1.20.964	Pengadaan Jaringan Komputer dan Internet	Jumlah Unit Komputer	60	60,000,000.00			75.34	Unit	2,100,000,000.00	0	1,660,000,000.00	17.66	4,000,000,000.00					17.66	5,660,000,000.00	17.66	5,660,000,000.00	470.0833	69.35			
0.01.0.01.1.20.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas ASN			960	3,201,000,000.00	8	Unit	166,274,000.00	0	-	0	800,000,000.00					0	800,000,000.00	968	8,864,220,000.00	0	-			
0.01.0.01.1.20.05.963	Pemeliharaan Jaringan Pendukung Kantor	Jumlah Jaringan Pendukung Kantor yang Dipelihara	20	100,000,000.00			1	Unit	50,000,000.00	0	-	1	800,000,000.00					1	800,000,000.00	1	800,000,000.00	0	800.64			
0.01.0.01.1.20.05.966	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	200,000,000.00			5036	meter	1,000,000,000.00	0	1,200,000,000.00	0	4,000,000,000.00					0	5,200,000,000.00	0	5,200,000,000.00	0	2,222.03			
0.01.0.01.1.20.05.965	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	1	910,857,784.00			25	M2	4,000,000,000.00	11.75	1,960,000,000.00	0	4,000,000,000.00					14.25	5,960,000,000.00	33.75	5,960,000,000.00	0.00949	336.04			
0.01.0.01.1.20.05.966	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Bangunan Instalasi dan Prasarana yang Dipelihara/Direhabilitasi (40 KSP, 40 Unit Kendaraan, 1 Landscape yang Dipelihara, 10 Unit AC, 1 Unit Komputer, 1 Printer/Plotter, 1 Unit Kendaraan Dinas Operasional Pada 2 dan Pada 4, 10 Unit Mobil Jenis Pick Up

1.03.002.103.006	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang disusun	0	-			3	OPD	18,443,881,000.00	0.03	3,436,871,500.00	1.478	50,808,842,000.00				100	50,808,842,000.00	1.63	82,838,881,000.00	0.17777	-		
1.03.001.103.005	Pembangunan Bendungan	Jumlah Bidang yang dibangun	0	-			15	OPD	8,191,537,000.00	1	8,052,120,000.00	0.98	8,396,850,500.00				1141	8,649,979,200.00	1141	82,049,779,700.00	0	-		
1.00.000.1.00.002	Pembangunan Irigasi Baru	Jumlah Dokumen Laporan Pembangunan Infrastruktur					3934	M	33,343,190,200.00	100	3966,670,000.00	0.101	6,346,200,300.00				2000	5,029,334,000.00	2000	5,029,334,000.00	0	-		
		Paguag/Kontribusi yang terbangun							0.00	0.00	130,000,000.00		1,098,700,000.00				0	3,700,307,000.00	0	20,000,307,000.00	0	-		
1.00.000.1.00.003	Pembangunan Irigasi dan Bangunan Pengairan Lainnya	Paguag/Jaringan pengairan yang terbangun	1.97				91	%	7,247,211,000.00	0	750,000,000.00	10.35	1,250,000,000.00				10.35	2,200,000,000.00	10.35	2,200,000,000.00	0	5.57		
		Jumlah Dokumen Laporan Pembangunan Infrastruktur Irigasi Kewenangan Provinsi yang disusun	1	18,200,000,000.00			100	%	100,000,000.00	0	10,000,000.00	10	20,000,000.00				20	50,000,000.00	20	50,000,000.00	2053.336	-		
1.00.000.1.00.004	Pembangunan Flood Forecasting and Warning System (FFWS)	Jumlah Unit Flood Forecasting and Warning System (FFWS) yang dibangun	1	-			1	Dokumen	100,000,000.00	1	10,000,000.00	1	20,000,000.00				2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	200	-		
1.03.002.103.006	Normalisasi Sungai	Panjang Irigasi yang dibangun kembali/rehabilitasi	4.2	20,170,200,000.00			100	%	217,000,000.00	0	-	0	-				0	-	0	-	0	-		
		Jumlah Dokumen Laporan Pembangunan Infrastruktur Normalisasi Sungai	0				1	Paket	321,000,000.00	0	-	0	-				0	-	0	-	0	-		
1.03.002.103.008	Pengelolaan Kelompok Pengelola Irigasi	Jumlah Perkumpulan yang dibentuk	1	1,000,000,000.00			100	%	2,000,000,000.00	0	70,000,000.00	20.00	100,000,000.00				20.00	400,000,000.00	20.00	400,000,000.00	0	10.00		
1.00.000.1.00.009	Pembinaan dan Pendampingan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Didampingi	1	2,500,000,000.00			5	Paket	50,000,000.00	0	-	0	-				0	-	0	-	0	-		
1.03.002.103.010	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1	200,000,000.00			1	paket	47,000,000.00	0	-	1	0.200,000.00				1	0.200,000.00	1	0.200,000.00	100	0.01		
1.03.002.103.012	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kegiatan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasi	1	217,200,000.00			9	Paket	100,000,000.00	0	-	0	-				0	-	0	-	0	-		
1.03.001.102	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah (SR)	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	400	50,040,000,000.00	2.84	512,960,000,000.00	0.2	Paket	50,040,000.00	0	-	1	10,000,000.00				1	10,000,000.00	2.85	97,307,200,700.00	0.0500	79.91		
1.03.002.103.009	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	2	200,000,000.00			2	Paket	100,000,000.00	0	-	1	0,720,000.00				1	0,500,000.00	1	0,720,000.00	0.01	0.01		
1.03.002.103.013	Pembangunan Jaringan Irigasi Pemerintah	Jumlah Dokumen Laporan	0	50,040,000,000.00			7	Paket	800,000,000.00	0	-	1	22,000,000.00				1	22,000,000.00	1	22,000,000.00	20	0.04		
		Paguag/Jaringan Irigasi yang terbangun	1000				10	Laporan	1,000,000,000.00	2	70,000,000.00	5	100,000,000.00				0	500,000,000.00	0	500,000,000.00	0	-		
1.00.000.1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR IRIGASI	Dapatkan akses Air Minum Layak Penduduk	80.06	800,000,000,000.00	65.00	130,000,000,000.00	100	%	770,000,000.00	0	-	0.01	6,000,000.00				0.05	6,000,000.00	12.50	100,000,000,000.00	0.0500	66.33		
1.00.000.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Dapatkan Akses Air Minum Layak Penduduk	1	200,000,000,000.00	65.00	130,000,000,000.00	1	Unit	200,000,000.00	0	-	1	0,720,000.00				1	0,500,000.00	12.50	100,000,000,000.00	0.0500	66.33		
1.00.000.1.01.001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Pembangunan SPAM	1	500,000,000.00			91	Unit	400,000,000.00	0	-	1	0,000,000.00				1	0,000,000.00	1	0,000,000.00	16.0000	0.00		
1.03.001.103.002	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perbaikan Prasarana (SNP)	Jumlah Kendaraan Operasional Pembangunan/Peningkatan/Perbaikan/Optimalisasi SPAM Regional	1	9,197,000,000.00			100	%	2,000,000,000.00	0	450,000,000.00	41.25	900,000,000.00				41.25	1,050,000,000.00	41.25	1,000,000,000.00	41.25	12.3		
1.03.001.103.003	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional		500,000,000,000.00			10	Laporan	200,000,000.00	0	-	0	0.000,000.00				0	0,000,000.00	0	0,000,000.00	10	0.00		
1.03.001.103.004	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Dibangun/Ada	0	10,000,000,000.00			10	Laporan	200,000,000.00	2	20,000,000.00	0	50,000,000.00				1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	0	0.01		
		Jumlah Kapasitas Air Baku Terpasang dan Terdistribusi	0				10	Laporan	1,000,000,000.00	0	400,000,000.00	0	0.000,000.00				1	0,000,000.00	1	0,000,000.00	0	-		
		Paguag/Unit Distribusi Terbangun	0				100	%	500,000,000.00	0	0.000,000.00	41.25	200,000,000.00				41.25	225,000,000.00	41.25	225,000,000.00	0	-		
1.03.001.103.005	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Dibangun/Ada	0	10,000,000,000.00			20	Unit	200,000,000.00	0	-	1	0.000,000.00				1	0,000,000.00	1	0,000,000.00	0	0.01		
		Paguag/Pipa Distribusi Terbangun	0				100	Unit	10,000,000.00	0	0.000,000.00	1	10,000,000.00				1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	0	-		
1.03.001.103.001	Pembinaan Unit Usaha Pengelolaan SPAM Regional (untuk Kabupaten/Kota)	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bantuan/pendampingan pengembangan SPAM	0	450,000,000.00			1	Unit	150,000,000.00	0	-	1	0.000,000.00				1	0,000,000.00	1	0,000,000.00	0	0.01		
1.03.001.103.008	Pembinaan Teknis SPAM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM	0	100,000,000.00			10	%	1,000,000,000.00	0	60,000,000.00	10.00	100,000,000.00				10.00	200,000,000.00	10.00	200,000,000.00	0	200.00		
1.00.004	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR IRIGASI (PKPI)	Dapatkan akses pelayanan sanitasi domestik	71.23	1,000,000,000.00	0.00	30,000,000.00	10	%	1,000,000,000.00	0	40,000,000.00	10.00	100,000,000.00				10.00	200,000,000.00	10.00	200,000,000.00	0	20.00		
1.00.004.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Pengembangan Regional	Dapatkan akses Pelayanan Sanitasi Domestik	40	1,000,000,000.00	0.00	30,000,000.00	1	Dokumen	1,000,000,000.00	1	40,000,000.00	1	100,000,000.00				2	200,000,000.00	2.50	200,000,000.00	100.0000	20.00		
1.00.004.1.01.001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Pengembangan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan SPAM/PKPI/Sistem Kewenangan Provinsi yang	1	1,000,000,000.00					[redacted]		50,000,000,000.00		100,000,000,000.00				0	100,000,000,000.00	4	100,000,000,000.00	0	100.00		
1.03.004	Pembinaan Teknis dan Pendampingan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Perdesaan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat dalam Pengelolaan Perdesaan	1	100,000,000.00			100	%	50,000,000,000.00	0	12,000,000,000.00	41.25	41,000,000,000.00				41.25	82,500,000,000.00	41.25	82,500,000,000.00	41.25	82.50		
		Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Perdesaan					100	%	1,000,000,000.00	0	50,000,000.00	10.00	200,000,000.00				10.00	400,000,000.00	10.00	400,000,000.00	0	-		
1.00.005	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dapatkan akses terhadap domestik layak	71.23	1,000,000,000.00	41.10	100,000,000.00	4	Dokumen	1,000,000,000.00	1	50,000,000.00	1	100,000,000.00				4	200,000,000.00	10.00	200,000,000.00	20.00	20.00		
1.00.005.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Dapatkan akses air limbah domestik layak	40	1,000,000,000.00	41.10	100,000,000.00	5	Dokumen	100,000,000.00	4	-	2	10,000,000.00				2	50,000,000.00	10.00	150,000,000.00	40.0000	0.01		



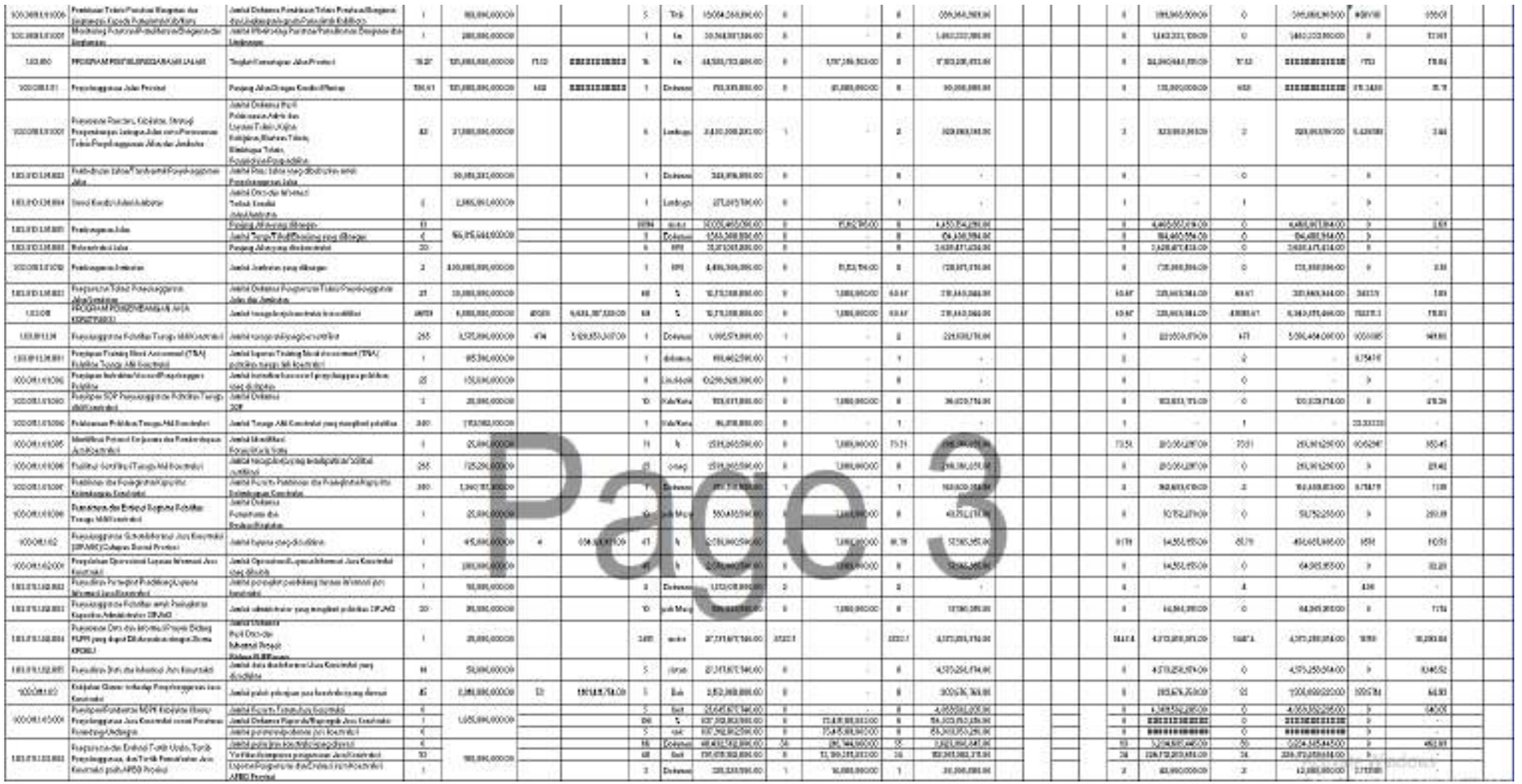

Page 3

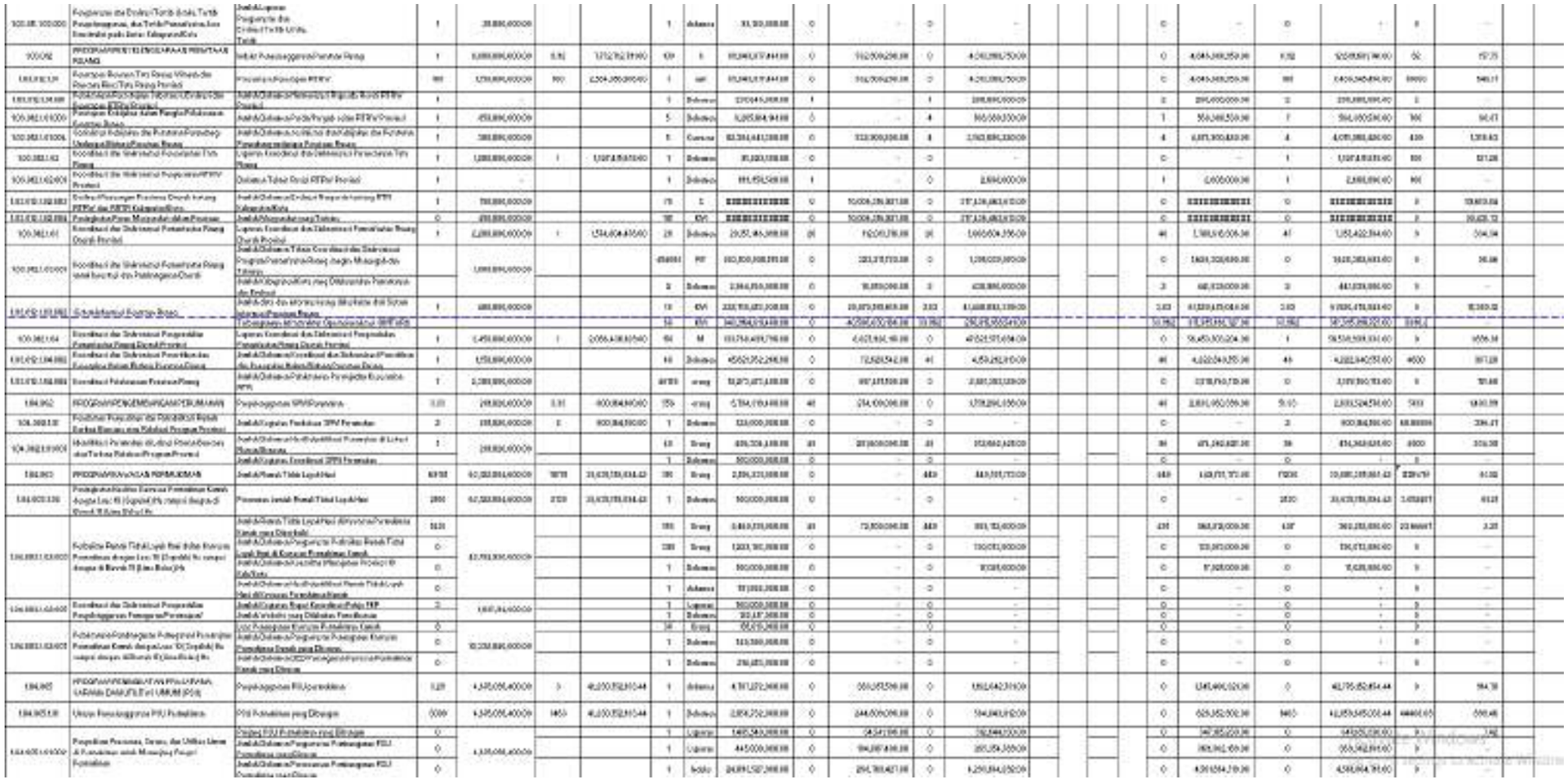

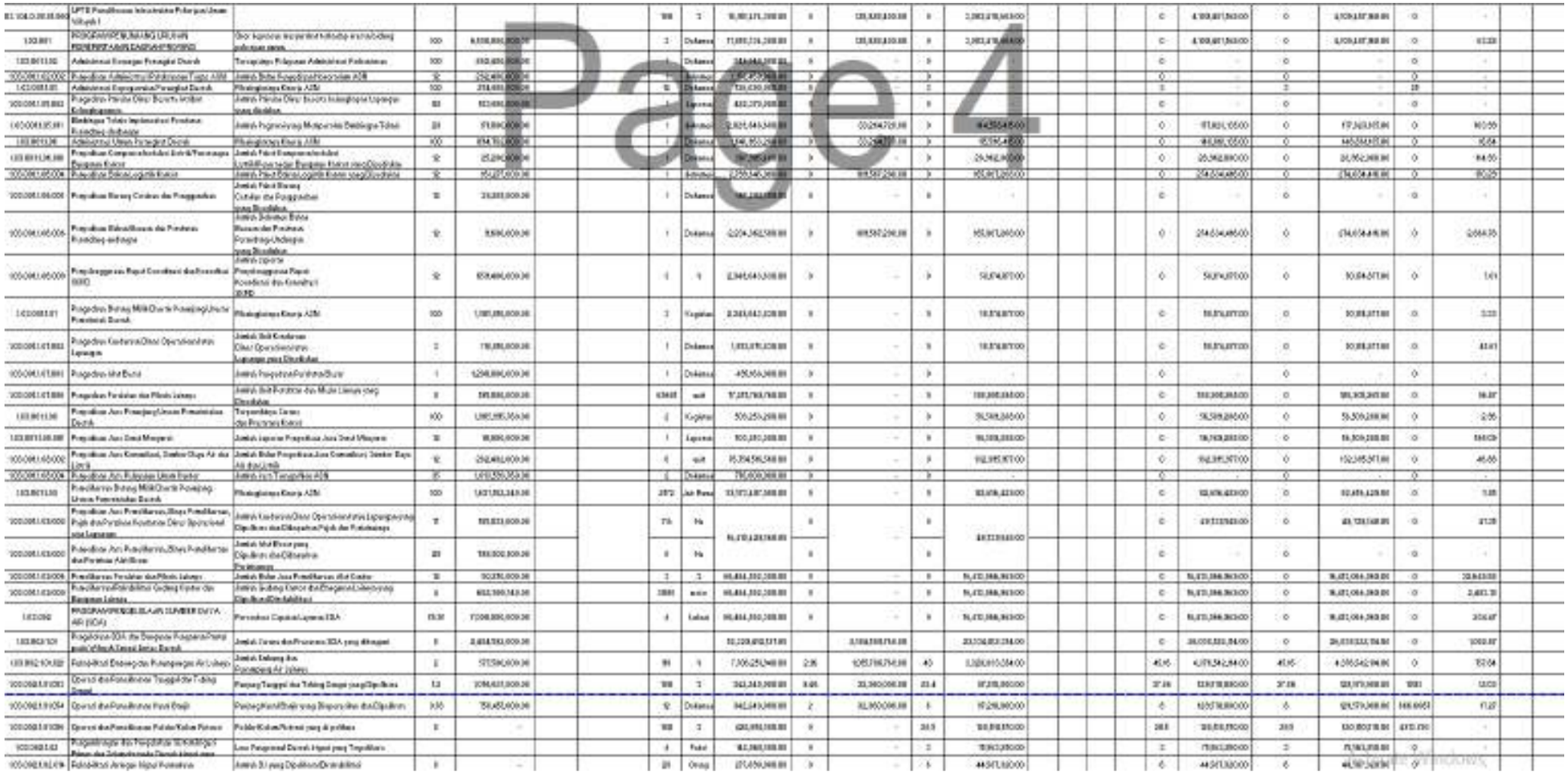

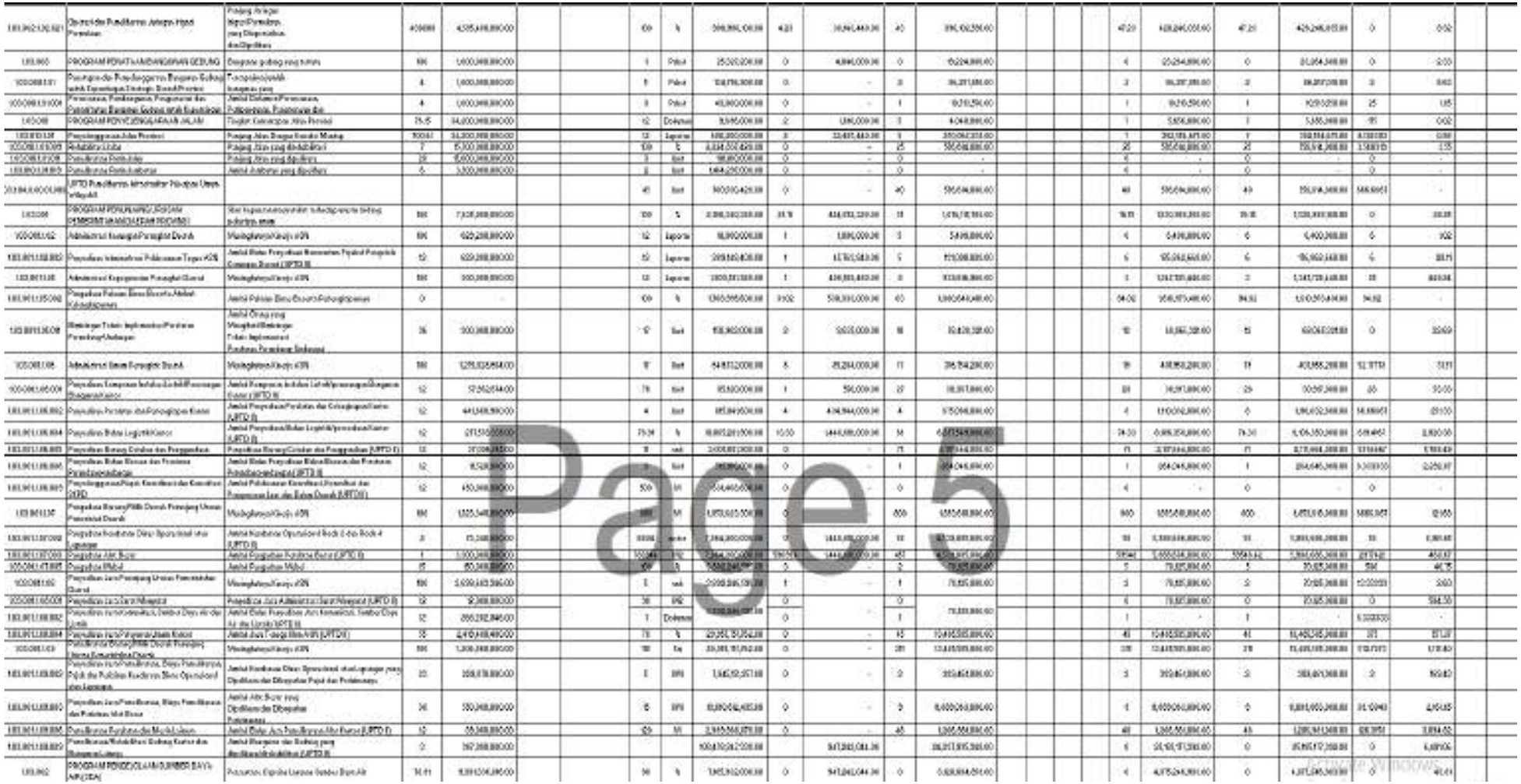

Page 5

1.03.0001.01	Penyelesaian DED dan Ringkasan Pengelolaan Pantai pada Wilayah Dinas Sektor Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen dan Perencana DED yang dikerjakan	10	800,780,676.00			100	Dokumen	200,780,000.00	0	--	0	800,780,000.00				4	800,780,000.00	4	800,780,000.00	0	15.02								
1.03.0001.10.0001	Operasi dan Pemeliharaan Bendung dan Pengamanan Air Lainnya	Bendung dan Pengamanan air Lainnya yang Dipelihara (UPTD II)	1	150,000,000.00			1	Bendung	200,780,000.00	0	--	1	800,780,000.00				1	800,780,000.00	1	800,780,000.00	100	20.00								
1.03.0001.10.0002	Operasi dan Pemeliharaan Pintu Air/Alat Bantu	Pintu Air/Alat Bantu yang Dipelihara (UPTD II)	1	350,445,676.00			100	Unit	200,780,000.00	0	--	1	800,780,000.00				4	800,780,000.00	4	800,780,000.00	0	15.24								
1.03.0001.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	10	5,100,344,000.00			3	Paket	44,000,000.00	0	--	3	43,000,000.00				3	43,000,000.00	3	43,000,000.00	200	8.00								
1.03.0001.02.0001	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemukiman	Jumlah Daerah Irigasi yang Direhabilitasi (UPTD II)	0	5,100,344,000.00			10	Orang	200,220,000.00	0	--	9	80,700,700.00				3	80,700,700.00	3	10,700,700.00	10.30266	100								
1.03.0006	PROGRAM PENGELOLAAN SAH PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Capaian Layanan SDM	10	8,000,000,000.00			100	%	9,000,000,000.00	0	90,000,000.00	0	900,000,000.00				9	900,000,000.00	9	900,000,000.00	0	10.00								
1.03.0006.1.01	Penyelesaian dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terintegrasi Lingkup dengan Sangat Lengu Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah dokumen drainase yang terhubung di kawasan strategis dan kawasan cepat provinsi Kabupaten/Kota		8,000,000,000.00			3	Paket	37,000,000.00	0	--	1	850,000.00				1	850,000.00	1	850,000.00	1,000.00	0.02								
		Jaringan Drainase Daerah yang terbangun					8	Paket	1,700,000,000.00	0	--	2	1,700,000,000.00				2	450,000,000.00	2	450,000,000.00	0	0.26								
		Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	0.000				4	Paket	52,000,000.00	0	--	0	4,000,000.00				2	4,000,000.00	2	4,000,000.00	0	0.09								
		Jumlah dokumen drainase yang terhubung di kawasan strategis dan kawasan cepat provinsi Kabupaten/Kota					3	Paket	60,000,000.00	1	1,100,000.00	1	23,000,000.00				2	23,000,000.00	2	10,000,000.00	0.0000333	0.03								
1.03.0006.1.01.0001	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Drainase yang Dipelihara (UPTD II)	0.000	8,000,000,000.00			3	Paket	70,000,000.00	1	600,000.00	1	6,000,000.00				2	6,000,000.00	2	6,000,000.00	0	0.10								
1.03.03	PROGRAM PEMELIHARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	75.10	68,280,001,300.00			1	Dokumen	2,000,000.00	0	--	1	1,200,000.00				1	1,200,000.00	1	1,200,000.00	0.000667	0.06								
1.03.03.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	100.01	68,280,001,300.00			12	Laporan	81,000,000.00	5	30,545,000.00	6	480,000,700.00				3	170,643,300.00	3	137,643,300.00	0.4167	0.24								
1.03.03.1.01.0002	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (UPTD II)	2.3	31,000,000,000.00			100	%	40,000,000.00	0	--	0	80,000,000.00				4	80,000,000.00	4	80,000,000.00	0	0.18								
1.03.03.1.01.0003	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara (UPTD II)	10	(4,000,000,000.00)			3	Ruas	40,000,000.00	0	--	3	60,000,000.00				3	60,000,000.00	3	60,000,000.00	15.42857	0.33								
1.03.03.1.01.0005	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara (UPTD II)	25	5,040,000,000.00			100	%	5,040,000,000.00	0	700,000,000.00	0	1,004,700,000.00				4	2,500,004,004.00	4	2,500,004,004.00	0	50.06								
1.03.1004.0000.0.0000	UPTD Pemeliharaan Jaringan dan Peralatan Unit Wilayah III						12	Laporan	22,700,000.00	2	1,000,000.00	0	10,000,000.00				3	17,000,000.00	3	10,000,000.00	333.3333	-								
1.03.03	PROGRAM PEMELIHARAAN JALAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai kepuasan masyarakat terhadap sarana, bidang pelayanan umum	90	8,000,000,000.00			12	Laporan	200,000,000.00	2	22,000,000.00	0	90,000,000.00				4	34,000,000.00	4	30,000,000.00	0	37								
1.03.0001.1.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja UPK	100	400,000,000.00			1	Laporan	1,000,000.00	0	--	0	-				0	-	0	-	0	--								
1.03.0001.03.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Unit	Jumlah Buku Pelayanan Masyarakat Kepala Pangkalan Gerakan Daerah	12	400,000,000.00			12	Laporan	2,000,000,000.00	2	200,000,000.00	0	3,000,000,000.00				3	2,000,000,000.00	3	2,000,000,000.00	0	100.00								
1.03.0001.1.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja UPK	100	37,750,000.00			100	%	1,000,000,000.00	0	100,000,000.00	0	400,000,000.00				4	100,000,000.00	4	100,000,000.00	0	10.00								
1.03.0001.03.0003	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Harian	10	10,000,000.00			10	Unit	10,000,000.00	0	1,000,000.00	0	10,000,000.00				10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	2.00								
1.03.0001.03.0004	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis, pendidikan dan pelatihan formal (Orang)	10	40,000,000.00			25	Unit	200,000,000.00	0	--	10	200,000,000.00				0	200,000,000.00	10	200,000,000.00	50	100.00								
1.03.0001.1.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100	700,000,000.00			10	Unit	60,000,000.00	20	6,000,000.00	20	80,000,000.00				60	80,000,000.00	60	80,000,000.00	600	0.20								
1.03.0001.1.03.0006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Buku Pelayanan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	60,000,000.00			12	Unit	100,000,000.00	10	10,000,000.00	10	80,000,000.00				20	100,000,000.00	20	100,000,000.00	20	10.00								
1.03.0001.03.0002	Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhi perabotan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	12	2,000,000.00			6	Unit	40,000,000.00	0	10,000,000.00	0	100,000,000.00				0	100,000,000.00	10	100,000,000.00	100	0.05								
1.03.0001.03.0001	Penyediaan Perlengkapan Rapat Tenaga	Jumlah Buku Pelayanan Perabotan Kebutuhan Rumah Tangga	12	100,000,000.00			75.00	%	5,000,000,000.00	0	--	0	2,000,000,000.00				4	2,000,000,000.00	4	2,000,000,000.00	0	1,000.00								
1.03.0001.03.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Buku Pelayanan Alat Tulis Kantor	12	10,000,000.00			1000	unit	5,000,000,000.00	0	--	0	3,000,000,000.00				0	3,000,000,000.00	0	3,000,000,000.00	0	4,000.00								
1.03.0001.03.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Buku Pelayanan Barang Cetakan dan	12	20,000,000.00			2	Unit	200,000,000.00	0	--	0	-				0	-	0	-	0	--								
1.03.0001.03.0006	Penyediaan Bahan/Alat-alat dan Peralatan Pendukung Administrasi	Jumlah Buku Pelayanan bahan kantor dan Peralatan Pendukung administrasi yang disediakan	12	5,000,000.00			12	Unit	2,000,000,000.00	10	--	10	2,000,000,000.00				10	2,000,000,000.00	10	2,000,000,000.00	833.3333	40,000.00								
1.03.0001.03.0007	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Buku Pelayanan koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	12	200,000,000.00			10	%	50,000,000,000.00	0	--	0	80,000,000,000.00				4	80,000,000,000.00	4	80,000,000,000.00	0	0.20								
1.03.0001.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100	20,000,000.00			100	Unit	30,000,000,000.00	0	--	0	80,000,000,000.00				4	80,000,000,000.00	4	80,000,000,000.00	0	50.00								
1.03.0001.07.0001	Pengadaan Alat Rumah	Jumlah alat Rumah Akademik Buku Pengadaan	0				2	Unit	80,000,000,000.00	0	--	0.2	2,440,000,000.00				0.2	2,440,000,000.00	0.2	2,440,000,000.00	0.2	--								
1.03.0001.07.0002	Pengadaan Bendera dan Pilihan Lainnya	Jumlah Perangkat Mobil yang disediakan	5	20,000,000.00			10	Unit	50,000,000,000.00	2	--	20	2,000,000,000.00				42	2,000,000,000.00	42	2,000,000,000.00	0	1,000.00								
1.03.0001.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100	1,000,000,000.00			100	M	2,000,000,000.00	100	--	105	2,000,000,000.00				105	2,000,000,000.00	105	2,000,000,000.00	1050	10.5								
1.03.0001.05.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Buku Pelayanan Jasa Administrasi Kantor	12	5,000,000.00													0	-	0	-	0	--								
1.03.0001.05.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Buku Pelayanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	270,000,000.00			12	Bulan	240,000,000.00	0	20,000,000.00	0	80,000,000.00				4	80,000,000.00	4	80,000,000.00	33	33.00								
1.03.0001.05.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan	Jumlah Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan dan perlengkapan	2	1,000,000.00			2	Unit	1,000,000.00	0	--	0	-				0	-	0	-	0	--								
1.03.0001.05.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Non PNS	10	2,000,000,000.00			10	Orang	2,000,000,000.00	10	200,000,000.00	10	1,000,000,000.00				100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	1000	100.00								
1.03.0001.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100	2,000,000,000.00			100	%	2,000,000,000.00	0	--	0	200,000,000.00				4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	0	20.00								

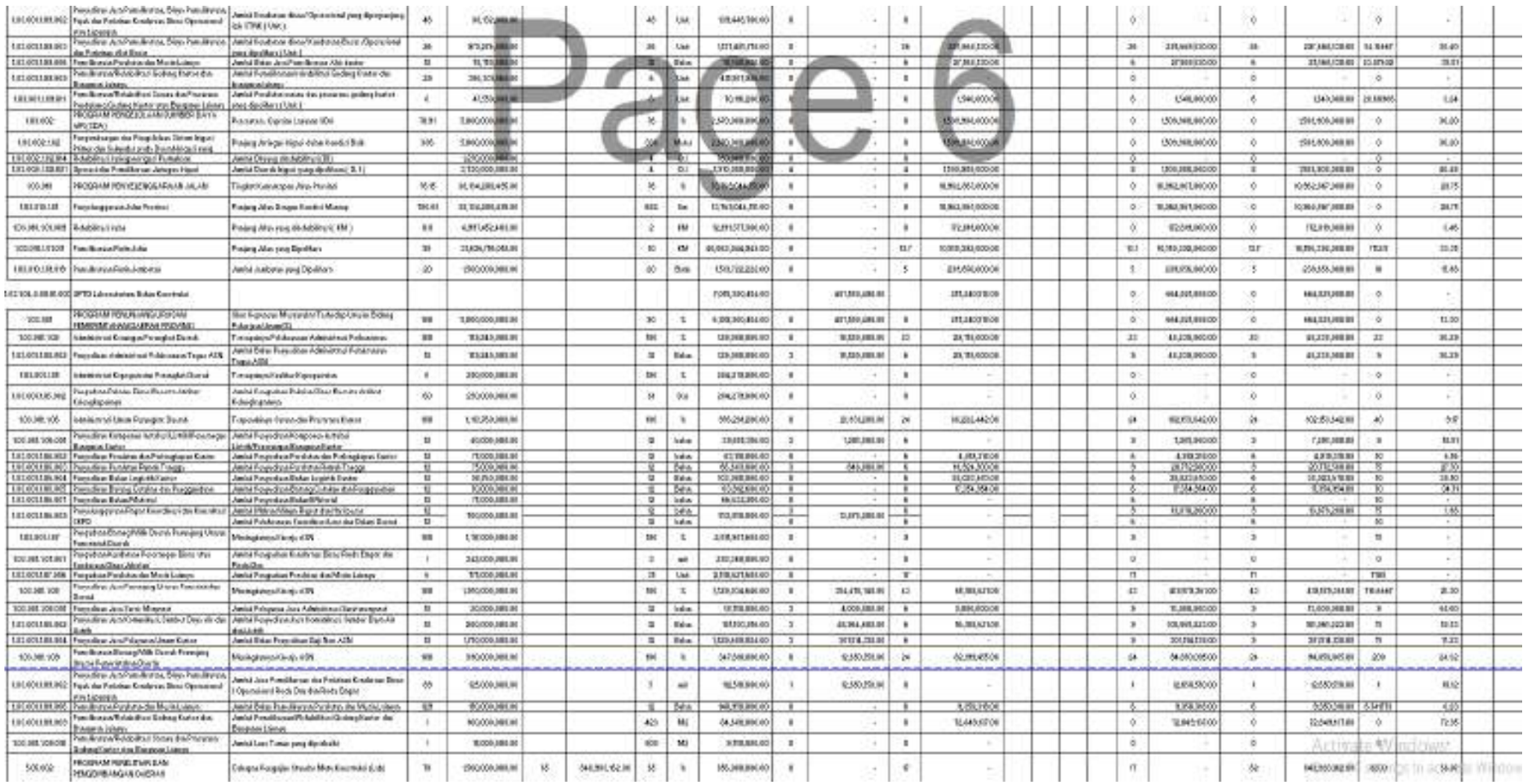

5,05,002,0,001	Fasilitasi dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Pengembangan Pekerjaan Umum	65	1,500,000,000.00	70	840,000,162.00	100	Dokumen	896,000,000.00	0	-	4	-				0	-	70	840,000,162.00	100	56.00		
5,05,002,0,001,0001	Fasilitasi dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Pengelola Sistem Manajemen Mutu	3	-			3	Dokumen	896,000,000.00	0	-	4	-				0	-	3	-	3	-		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelola Mutu Konstruksi	3				75	Dokumen		0		4					4	-	4	-	3	-		
		Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Pelanggan	3				1	Dokumen		0		4					0	-	3	-	3	-		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan Pengembangan Pekerjaan Umum	6	1,500,000,000.00													0	-	3	-	3	-		

Page 7

Faktor Pendorong :

Sumber Daya Manusia yang mampu dan terampil

Koordinasi SKPD yang baik

Sarana dan prasarana kantor yang mendukung kinerja dilapangan

Faktor Penghambat :

Terlambatnya pengesahan Anggaran SKPD

Alokasi anggaran yang tidak dapat dilaksanakan dengan cepat

Pembebasan tanah yang tidak dapat dilaksanakan dengan cepat

Masalah sosial lainnya

Tindak lanjut :

Koordinasi dengan Instansi lain yang terkait

Sosialisasi kepada masyarakat

percepatan progres sesuai rencana

Kepala Dinas PUPR dan PERA
Provinsi Kalimantan Timur

A.M. FITRA FIRNANDA, ST, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740405 200003 1 004

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat tahun 2023 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat tahun 2023. Sebagaimana tabel 2.1 tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

    a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik dengan capaian realisasi sebesar 83.5 % (167 meter)

    b. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator program nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan tingkat realisasi sebesar 100 %

    c. Program Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dengan indikator Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi (212 orang) dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100 %

    d. Program Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi indikator kegiatan Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi (207 orang) dengan capaian tingkat realisasi sebesar 100 %

    e. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah I , Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah I dengan indikator kegiatan Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik dengan capaian tingkat realisasi sebesar (105,95 m) 52,97 %

2. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

   a. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran dan Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.

   b. Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung, Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

   c. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan , Kegiatan Pembangunan Jalan, Kegiatan Pembangunan Jembatan, Pembangunan Turap/Talut/Bronjong dan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, Kegiatan Perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan, dan Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK).

   d. Program Pengelolaan Sumber daya Air, Kegiatan Pembangunan Prasarana Air Baku, Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai dan Kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Air

   e. Program Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kegiatan Pembangunan Rumah Layak & Prasarana Sarana dan Utilitas, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh dan Kegiatan Perencanaan & pengawasan pembangunan perumahan dan kawasan kumuh.

   f. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Kegiatan Perencanaan Penataan Ruang, Kegiatan Pemanfaatan Ruang & Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

   g. Program Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Kegiatan Pengawasan Jasa Konstruksi

   h. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah II, Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan

jalan dan Jembatan Wilayah II dan Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah II

i. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah III, Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan Wilayah III dan Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah III

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

a. Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan, Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan

b. Program Pengelolaan Sumber daya Air, Kegiatan Pembangunan Prasarana Air Baku, Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai dan Kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Air

c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah I, Kegiatan Rehabitilasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I

d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah II, Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan Wilayah II dan Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah II

4. Persandingan Program maupun Kegiatan antara Renstra dengan Renja Tahun 2023 sudah sesuai, untuk persandingan program dan kegiatan antara renstra dan renja 2023 sd level kegiatan

5. Ada beberapa kegiatan ang muncul diluar dari Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat tahun 2023 dikarenakan kegiatan tersebut masih dipandang perlu untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur, juga mengingat kegiatan-kegiatan tersebut sangat diperlukan untuk menunjang kebutuhan masyarakat

6. Faktor Penyebab Terpenuhinya maupun Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan
   - Sumber Daya Manusia yang mampu dan terampil
   - Koordinasi yang baik antar stakeholder
   - Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja dilapangan
7. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan
   - Terlambatnya pengesahan anggaran murni dan anggaran perubahan perangkat daerah
   - Proses pengadaan barang dan jasa yang terlambat
   - Masalah sosial budaya yang menghambat pelaksanaan program/kegiatan (seperti pembebasan tanah, dll)
   - Kurang tersedianya alokasi dana untuk pembangunan secara maksimal
   - Peraturan yang membatasai kewenangan daerah
   - Adanya Refocusing Anggaran karena Pandemi Covid-19 pada Triwulan ketiga Tahun 2020.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

1. Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur merupakan lembaga teknis daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun tugas dan fungsi DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pekerjaan umum sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;

2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidangbina marga;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang cipta karya;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidangsumberdaya air;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penataan ruang;
8. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang perumahan dan permukiman;
9. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang bina konstruksi;
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
11. Pelaksanaan unit pelaksana teknis dinas;
12. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Melihat fungsi dan tugas di atas, dalam pelaksanaan kinerjanya, DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh manajemen dengan struktur organisasi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksanan Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut.

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat,terdiri dari:
    a. Subbagian Umum;
    b. Subbagian Perencanaan Program; dan

c. Subbagian Keuangan.

3. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan Bina Marga;
   b. Seksi Jalan; dan
   c. Seksi Jembatan dan Bangunan Pelengkap.
4. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan Cipta Karya;
   b. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan; dan
   c. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
5. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
   a. Seksi Perencanaan SDA;
   b. Seksi Irigasi dan Rawa; dan
   c. Seksi Sungai dan Pantai.
6. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
   b. Seksi Pemanfaatan RuangdanPengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
   c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
7. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan Perumahan dan Permukiman;
   b. Seksi Perumahan; dan
   c. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.
8. Bidang Bina Konstruksi, terdiri dari:
   a. Seksi Pengkajian Usaha Jasa Konstruksi;
   b. Seksi Pemberdayaan dan Informasi Jasa Konstruksi; dan
   c. Seksi Pengendalian Mutu.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Struktur organisasi DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Struktur Organisasi DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur

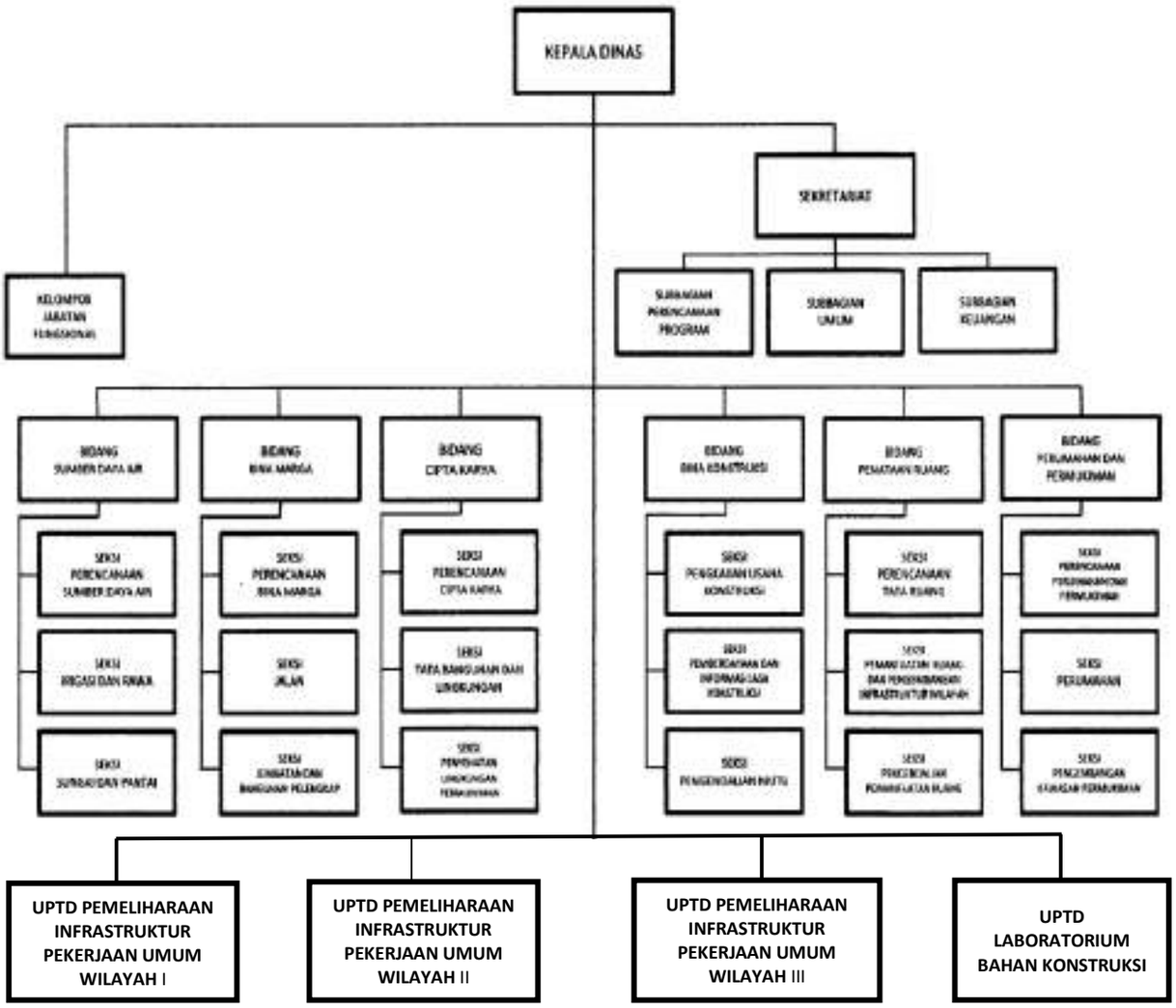

Sumber : Dinas PUPR-PERA, 2020

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Kinerja DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2013-2018 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa titik penting yang harus dipercepat progres pencapaiannya. Pada tahun 2021, arah pelayanan DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dalam bidang peningkatan dan pemerataan hasil pembangunan sarana prasarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat, membutuhkan perhatian yang serius dan harus diselaraskan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur serta harus pula dikondisikan sesuai realisasi pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini dengan tetap berdasar kepada prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Terlebih lagi pada tahun 2020, sejak bulan Januari 2020, telah terjadi Pandemi Covid-2019 yang berdampak luas sehingga turut mempengaruhi capaian kinerja Dinas PUPR-PERA yang telah ditetapkan pada Renstra 2019 – 2023, yakni dengan diberlakukannya Rasionalisasi dan Refocussing Anggaran Tahun 2020.

Oleh karena itu, perlu adanya gambaran capaian pelayanan DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur tahun sebelumnya sebagai acuan dan panduan dalam menyusun kebijakan tahun berikutnya agar rumusan program dan kegiatan yang ditetapkan memiliki relevansi terhadap target kinerja pembangunan yang ditetapkan. Gambaran umum penyelenggaraan tugas dan fungsi DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada analisis indikator capaian kinerja pelayanan, khususnya terkait dengan peran, tugas dan fungsi DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur pelaksana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, segala sumber daya yang dimiliki oleh DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, serta mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan

dinilai perlu diatasi melalui Renja DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur ini.

Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah kondisi pelayanan pada bidang infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan, perumahan dan permukiman, jasa konstruksi serta penataan ruang.

A. Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis rencana kerja DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2023 disusun berdasarkan analisis capaian yang telah dilaksanakan pada periode rencana kerja sebelumnya tahun 2022 Untuk itu perlu dilakukan pengolahan data yang terdapat dalam rencana kerja sesuai dengan sasaran strategisnya.

1. Capaian Indikator Kinerja

Provinsi Kalimantan Timur, secara geostrategis, memiliki potensi dalam perdagangan internasional karena berada di tengah-tengah wilayah NKRI dan sangat strategis sebagai jalur transportasi laut internasional karena berbatasan langsung dengan wilayah perairan Selat Makasar dan Laut Sulawesi yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II). Oleh karena itu,dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 telah dikembangkan struktur ruang yang dilengkapi dengan jaringan infrastruktur untuk mendukung pengembangan sektor unggulan daerah pada kawasan strategis dan kawasan pusat kegiatan ekonomi daerah.

Berdasarkan deskripsi kondisi fisik wilayah, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Dalam hal ini, tugas pembangunan jaringan infrastruktur untuk mendukung pengembangan sektor unggulan daerah merupakan tanggung jawab DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian, seberapa besar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, sangat bergantung pada keberhasilan DPUPR-PERA Provinsi

Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memajukan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.3. 1 (T-C. 30 Permendagri 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PUPR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET PADA TAHUN				REALISASI PADA TAHUN				CAPAIAN PADA TAHUN			
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan konektivitas antar kawasan	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubungkan	Kawasan	2	3	4	5	2	2	4	5	100 %	166,67	100 %	100 %
		Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	%			75.02	76.15	61.45	69.77	75.20	77.52			100.2 %	101.79 %
2	Menurunnya kawasan kumuh dan Tidak Layak Huni	Luas Kawasan Kumuh	Ha	620,06	533.56	1.237,82	1.187,82	661.19	518,78	1.190.14	1.185,14	22,92 %	97,23	195.36 %	100,2%
3	Meningkat nya akses masyarakat terhadap infrastruktur ke-cipta karya-an	Persentase Jumlah Gedung dan Bangunan Lingkungan yang Tertata	%	21,27	22,29	81.45	95.16	21,27	22,29	81.45	95.16	100 %	100	100%	100%
		Cakupan Akses Air Minum Layak	%	73,33	75,00	66.53	68.53	65,25	73,03	70.78	78	88,98 %	97,37	106%	113,82 %
4	Meningkat nya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Presentase Capaian Layanan Sumber Daya Air	%				76				76.95				101,25 %
		Panjang Saluran Drainaseyang Berfungsi baik	Meter				3.020				2.723,70				90.19%
		Luas lahan pertanian yang beririgasi.	Ha	14.008.5	14.808,5	14.028,50		13.378,11	14.024,11	14.078,50		95,50 %	94,70	100,35 %	
		Luas genangan banjir perkotaan.	Ha	664	575	420		641	477	406,3		96,54 %	82,96	96,73%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET PADA TAHUN				REALISASI PADA TAHUN				CAPAIAN PADA TAHUN			
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
		Panjang pantai kritis.	Km	12.933	11,733	340		12.966	12.913,94	359		57,14 %	110	100	
5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Skor penyelenggaraan penataan ruang	%	66,68	69,01	75.94	76.74	66,46	67,57	75,38	78.57	100.00	97,91	99,26%	102.38 %
6	Meningkatnya daya saing tenaga kerja jasa konstruksi	Presntase Jumlah tenaga Kerja konstruksi yang bersertifikat	%				33.27				36.51				109,74 %
		Persentase peluang kerja bagi masyarakat jasa konstruksi	%	25,88	28,55	31,29	33.27	25,089	28,5	33	36.51	100.00	101,9	105,4%	109,74 %

Untuk kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur secara program prioritas masih belum bisa berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih terkendala atas beberapa permasalahan seperti permasalahan dan hambatan yang kami uraikan dibawah ini.

Pemetaan Permasalahan DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur

Permasalahan Pokok		**Permasalahan**	**Akar masalah**
Pelayaan infrastruktur PU, Perumahan dan pemukiman serta tata ruang belum optimal dan menjangka seluruh wilayah kaltim			
1	Masih rendahnya konektivitas wilayah kaltim	**Bidang Bina Marga:** Belum berkualitasnya infrastruktur dasar pelayanan masyarakat	Belum optimalnya implementasi perencanaan dalam memenuhi infrastruktur dasar pelayanan masyarakat
			Belum optimalnya pembangunan infrastruktur jalan yang mendukung konektivitas
			beban kendaraan yang melalui sarana dan prasaran jalan dan jembatan melebihi kapasitas yang direncanakan
2	Masih rendahnya akses masyarakat terhadap infrastruktur ke-cipta karya-an	**Bidang Cipta Karya:** Belum optimalnya distribusi air minum bersih ke masyarakat	Belum optimalnya implementasi perencanaan dalam memeratakan distribusi air minum bersih
			Rendahnya kualitas tata bangunan dan lingkungan masyarakat
			Rendahnya kualitas sanitasi kawasan permukiman
3	Masih rendahnya utilitas infrastruktur sumber daya air	**Bidang SDA**: Pelayanan jaringan irigasi dan sumber air belum optimal	Belum optimalnya implementasi perencanaan infrastruktur irigasi dan kapasitas tampung sumber daya air

Permasalahan Pokok		Permasalahan	Akar masalah
			Rendahnya kualitas infrastruktur irigasi dan kapasitas sumber daya air baku
			Minimnya pengendalian banjir serta kualitas pengawasan sungai dan pantai
4	belum otimalnya pemanfaatan tata ruang Kaltim yang mendukung pembangunan berkelanjutan	**Bidang Penataan Ruang:**Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang	Belum disusun dan ditetapkannya Perda terkait RRTR sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
			Belum optimalnya kesesuaian Pola Ruang antara RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota
5	Rendahnya daya saing tenaga kerja jasa konstruksi	**Bidang Bina Konstruksi:** Minimnya peningkatan kualitas tenaga kerja jasa konstruksi	
			Minimnya pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi
			Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi
6	Masih tingginya kawasan kumuh	**Bidang Perumahan & Pemukiman:** Penanganan kawasan kumuh belum optimal	Belum optimalnya implementasi perencanaan dalam mewujudkan pemerataan kawasan pemukiman layak huni
			Belum meratanya kualitas perumahan rakyat yang layak huni
			Belum meratanya kualitas kawasan permukiman penduduk yang sehat

B. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Capaian Program Nasional.

Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 memiliki visi “Terwujudnya Masyarakat

yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan". Visi tersebut didukung oleh berbagai misi berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Visi jangka panjang tersebut didesain akan dicapai melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri. Pada periode 2019-2023, Provinsi Kalimantan Timur berada dalam tahapan pembangunan yang ke-5 sesuai dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Tahapan ini menekankan pembangunan untuk peningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatkan efisiensi danefektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Oleh karena itu pemerintah daerah maupun masyarakat harus berperan aktif dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk mencapai kemajuan daerah.

Memasuki era pembangunan lima tahun keempat RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025, Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala sebagaimana yang telah ditetapkan dan tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, yaitu:

"Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat"

Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan

mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Guna mewujudkan visi Gubenur dan Wakil Gubenur Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. **Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan**;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mendukung seluruh misi Gubernur Kalimantan Timur terutama misi ke tiga “Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan” dimana pembangunan diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis.

Adapun prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, meliputi:

1. Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing;
2. Penguatan ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan masyarakat;
3. Peningkatan produktifitas kawasan industri pengolahan berbasis lingkungan;

4. Penguatan ekspor komoditi unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi;
5. Pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesbilitas antar daerah dan kawasan pendukung IKN; dan
6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan public yang berpihak pada kedaulatan daerah.

Prioritas kelima "5. Pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesbilitas antar daerah dan kawasan pendukung IKN" tekait langsung dengan DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaanya dan capaian keberhasilannya.

Lebih lanjut, dari 38 (tiga puluh delapan) Program Unggulan Gubernur Kaltim 2019-2023 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, terdapat 9 (sembilan) Program Unggulan Gubernur yang juga terkait langsung dengan DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaanya dan capaian keberhasilannya, yakni:

Program Unggulan ketiga : Terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih untuk Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda;

Program Unggulan keempat : Penanganan banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang;

Program Unggulan kelima : Membangun dan meningkatkan kelas jalan Provinsi dan jalan produksi di Kalimantan Timur;

Program Unggulan ketujuh : Percepatan penyelesaian pembangunan akses jalan pendekat jembatan Pulau Balang;

Program Unggulan kedelapan : Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan harmonis ; dan

Program Unggulan kesembilan : Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata.

Pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan dan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas wilayahyang baik menuju pusat produksi dan pemasaran serta kawasan strategis provinsi merupakan tuntutan masyarakat sekaligus termasuk dalam lima

permasalahan utama pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaima tertuang dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, yaitu: (1) lambannya transformasi ekonomi menuju sumber daya alam berkelanjutan, (2) masih belum merata dan kuatnya daya saing sumber daya manusia, (3) **belum meratanya aksesibilitas dan konektivitas**, (4) semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta (5) belum tercapainya pelayanan publik yang optimal.

Belum meratanya aksesibilitas dan konektivitas di Kalimantan Timur disebabkan karena rendahnya ketersediaan serta kualitas infrastruktur dasar antara lain prasarana jalan, air bersih, sanitasi layak, perumahan dan permukiman yang layak huni dan ketenagalistrikan. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat, serta pada memberikan dukungan yang baik terhadap tumbuhnya pusat-pusat produksi pertanian dalam arti luas di Kalimantan Timur. Ketersediaan perumahan yang layak huni, air baku dan air minum bersih, serta listrik, dan disertai dengan infrastruktur jalan dan jembatan, serta fasilitas perhubungan pelayaran, menjadi perhatian penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang termuat di dalam RTRW Kaltim, dikuatkan oleh infrastruktur yang optimal, menjadi denyut nadi tranformasi ekonomi hijau Kalimantan Timur.

Merujuk kepada hasil analisis permasalahan pembangunan daerah per-urusan pemerintahan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 maka terdapat berbagai permasalahan terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan dan kawasan pemukiman yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini oleh DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel. 2.3. 2
Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Pada P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Urusan	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	Belum Optimalnya Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Rendahnya Konektivitas antar wilayah dalam mendukung ekonomi kawasan	Belum optimalnya pelayanan infrastruktur dasar perhubungan
			Tingginya kerusakan fasilitas Jalan Provinsi
		Belum optimalnya pemerataan infrastruktur sumber daya air.	Terbatasnya kapasitas air baku daerah
			Belum optimalnya distribusi air bersih ke masyarakat
			Belum optimalnya peningkatan kualitas DAS dan subsistemnya
		Belum optimalnya Penanganan terhadap kawasan kumuh.	Masih banyaknya penduduk miskin yang belum memiliki rumah layak huni
		Belum optimalnya infrastruktur pengendali bencana banjir.	Belum optimalnya peningkatan kualitas DAS dan subsistemnya
		Belum optimalnya penyelenggaraan Penataan Ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang).	Belum Selarasnya RTRWN, RTRWP, RTRWK dan Belum Optimalnya RDTR yang mendukung IKN.
			Rencana Tata Ruang Belum menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang
			Belum Optimalnya fungsi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Sumber : P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Berpijak pada permasalahan pembangunan di atas dan berdasar pada permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dalam implementasi renstra periode lalu dan segala potensi keberlanjutannya menjadi dasar penting untuk mengetahui lingkungan strategis organisasi di masa datang. Secara umum potensi dan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dipandang dapat memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan jika dilakukan secara sistemik.Analisis permasalahan dan isu strategis yang tepat akan meningkatkan efektivitas perencanaan dalam mencapai sasaran dan memecahkan permasalahan yang dihadapi DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dalam turut menopang kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timurdalam meningkatkan kualitas layanan publik dalam lima tahun ke depan.

C. Tantangan dan Peluang

Tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terusmeningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat terus meningkat. Demikian pula dengan infrastruktur yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah diharapkan akan dapat terus mendorong percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial dan kenyamanan lingkungan. Tantangan umum lainnya yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, khusunya bidang PU dan permukiman di Indonesia adalah kendala alamiah berupastruktur wilayah geografis; disparitas dan distribusi penduduk di Jawa dan luar Jawa; menurunnya kinerja infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerahseperti jalan provinsi/kabupaten/kota; serta sulitnya pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang menyebabkan terhambatnya kelancaran pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.

Dari kajian terhadap kinerja output pada rencana strategis sebelumnya memperlihatkan bahwa sebagian besar kegiatan telah tercapai penyerapan anggaran yang ditetapkan dan jumlah kegiatan sebesar 100%. Hal ini memperlihatkan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastuktur Pekerjaan Umum dapat dilaksanakan dengan baik.

Namun dari berbagai pencapaian tersebut tidak ditunjang dengan keberadaan sumberdaya manusia khususnya pada kondisi kompetensi dan jumlah. Dari hasil wawancara terlihat kompetensi sumberdaya tidak sesuai dengan kebutuhan pada setiap Perangkat Daerah meskipun dari sisi tingkat pendidikan yang dibutuhkan telah sesuai, misal: tingkat pendidikan S1 atau S2. Ketidaksesuaian tersebut terlihat pada lingkup tupoksi di masing-masing bidang, misal: di bidang tata ruang belum sepenuhnya didukung oleh kompetensi bidangnya seperti: planologi, geografi dan atau geodesi yang terkait dengan analisis pemetaan terhadap pengawasan dan pengendalian tata ruang. Demikian juga terjadi pada bidang lainnya. Dengan kurangnya daya dukung terhadap kompetensi maka penyelenggaraan pasca pelaksanaan kegiatan seperti pengawasan, pengendalian dan monitoring terhadap pencapaian kinerja outcome dan dampak kurang dapat dilaksanakan secara simultan dan berkelanjutan.

Tantangan terhadap kinerja pelayanan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah adalah:

1. Adanya tenaga yang tidak sesuai dengan bidangnya sehingga peningkatan kualitas kegiatan menjadi lemah, khususnya pada kegiatan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di lapangan sehingga yang dapat dilihat adalah kinerja output.

2. Kurangnya jumlah tenaga pendukung yang bersifat tetap sehingga pelaksanaan kegiatan di masing-masing bidang dalam hal peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan menjadi kurang berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena masing-masing tenaga sudah over load.

3. Bantuan tenaga tidak tetap (honorer) pada masing-masing bidang kurang efektif karena tenaga tidak tetap bersifat sementara, padahal dalam penyelenggaraan pembangunan diharapkan dapat dilakukan dengan proses yang meningkat efektifivitasnya.

4. Peningkatan pembangunan dibutuhkan daya dukung sumber daya manusia yang handal dan sesuai dengan kompetensi sehingga pembangunan dapat dilakukan secara berkualitas dan efektif, misal kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi sistem informasi manajemen sebagai salah satu perangkat untuk dokumentasi (data base) dan pemantauan.

D. Isu Strategis

Isu strategis adalah hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendesak, mendasar, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelanggaraan pemerintah daerah di masa mendatang. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah ke depan.

1. Penguatan Pusat Pertumbuhan Wilayah
   Infrastruktur pendukung konektifitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan di beberapa KSP masih belum optimal oleh karena itu penguatan Kawasan Strategis Provinsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daaerah perlu dilakukan melalui peningkatan akses dan konektifitas antar kawasan untuk mendukung percepatan realisasi investasi industri pengolahan produk unggulan daerah pada masing-masing kawasan. Di samping itu pula pengembangan sosial ekonomi perdesaan, wilayah pedalaman dan tertinggal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konektifitas antar kawasan.

2. Peningkatan Daya Saing Daerah
   Keterbatasan infrastruktur, baik infrastruktur fisik, teknologi dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu faktor internal yang mempengaruhi rendahnya daya saing daerah. Oleh karena itu, peningkatan daya saing daerah harus dilakukan melalui serangkaian upaya terpadu antara pemerintah pusat, daerah dan

swasta dalam mendukung kemandirian daerah, tidak hanya berorientasi pada indikator perekonomian saja, melainkan lebih luas yang didalamnya mencakup pula upaya untuk meningkatkan pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar, pendidikan dan kesehatan melalui percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama di daerah pedalaman dan tertinggal.

3. Pemanfaatan ruang
   Daya dukung dan daya tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (*Carrying Capacity*) menjadi pertimbangan dalam kebijakan pembangunan kewilayahan. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kalimantan Timur menjadi sangat penting dan strategis untuk peningkatan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan. Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan untuk mengendalikan kegiatan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Pengendalian pemanfaatan ruang perlu diarahkan pada penataan kembali pola pengelolaan sumber daya alam melalui pengendalian perijinan investasi dengan mempertimbangkan kapasitas regenerasi sumber daya alam dan keragaman lingkungan hidup, penegakan penataan ruang yang berbasis kebencanaan, peningkatan kepastian hukum hak atas tanah. Harmonisasi peraturan perundangan terkait pemanfaatan ruang merupakan faktor kunci yang mampu mendorong upaya penurunan ketimpangan antar wilayah.

Selain isu strategis kewilayahan, isu strategis dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya oleh Provinsi Kalimantan Timur dalam masa pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
2. Percepatan Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan secara vertikal maupun horizontal;
3. Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas serta pengembangan infrastruktur dasar pembangunan;
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

5. Pemerintahan yang profesional dan akuntabel
6. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Pembangunan Ibukota Negara (IKN)
8. Reformasi Struktural menuju Tatanan Normal Baru Pasca COVID-19

Berpijak pada isu strategis di atas, jelas bahwa penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan dukungan yang baik terhadap tumbuhnya pusat-pusat produksi pertanian dalam arti luas di Kalimantan Timur. Ketersediaan perumahan yang layak huni, air baku dan air minum bersih, serta listrik, dan disertai dengan infrastruktur jalan dan jembatan, serta fasilitas perhubungan pelayarah, menjadi perhatian penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang termuat di dalam RTRW Kaltim, dikuatkan oleh infrastruktur yang optimal, menjadi denyut nadi tranformasi ekonomi hijau Kalimantan Timur.

Tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat terus meningkat. Demikian pula dengan infrastruktur yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah diharapkan akan dapat terus mendorong percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial dan kenyamanan lingkungan. Tantangan umum lainnya yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, khususnya bidang PU dan permukiman di Indonesia adalah kendala alamiah berupa struktur wilayah geografis; disparitas dan distribusi penduduk di Jawa dan luar Jawa; menurunnya kinerja infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah seperti jalan provinsi/kabupaten/kota; serta sulitnya pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang menyebabkan terhambatnya kelancaran pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya

Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan per bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, yaitu:

Bidang Bina Marga

1. Rendahnya daya dukung infrastruktur jalan untuk mendukung kawasan pertumbuhan ekonomi dan pusat-pusat Produksi.
2. Fungsi jalan sebagai pembuka daerah terisolir dan terpencil agar dapat bersama menikmati pembangunan dan mengembangkan potensi suatu wilayah. Hal ini sangat penting bagi wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang luas dan masih banyak wilayah yang terisolir, terpencil serta terluar (3T)
3. Perkembangan jumlah beban angkutan yang semakin meningkat akibat peningkatan pembangunan berpengaruh terhadap kinerja jalan dan jembatan dalam melayani pergerakan barang dan manusia di kemudian hari.
4. Kurangnya pemeliharaan dan perawatan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan perekonomian di semua kota, kabupaten dan kecamatan.

Bidang Cipta Karya

1. Belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk penyediaan air bersih dan sanitasi yg layak bagi masyarakat.
2. Meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan berpengaruh terhadap jumlah limbah KM/WC berupa : air sabun, limbah padat dan limbah cair
3. Meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah sampah rumah tangga yang berupa sampah organik dan non organic
4. Kurang optimalnya fungsi drainase di perkotaan

Bidang Sumber Daya Air

1. Perlunya penguatan infrastruktur irigasi pada lahan pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
2. Fungsi pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal yang diakibatkan oleh kerusakan jaringan irigasi, berkurangnya pasokan air dan sebagainya
3. Belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk lahan pertanian dan air baku untuk konsumsi air minum masyarakat.
4. Fasilitas sarana dan prasarana pengendali banjir belum berfungsi optimal

Bidang Penataan Ruang

1. Terdapat beberapa ketidaksesuaian antara Perda RTRW Provinsi Kalimantan Timur dengan Perda RTRW Kabupaten/Kota, khususnya pada Struktur dan Pola Ruang. Dimana sebagian besar Perda RTRW Kabupaten/Kota sudah terlebih dahulu ditetapkan menjadi Perda sebelum diterbitkanya Perda RTRW Provinsi.
2. Peraturan Daerah RTRW Provinsi Kalimantan Timur belum dapat diterapkan sepenuhnya sebagai faktor pengawasan dan pengendalian karena belum sepenuhnya Rencana Rinci Tata Ruang KSP ada dan berkekuatan hukum sehingga Pengendalian dan pengawasan belum dilakukan secara terstruktur, akurat dan cepat
3. Tingginya perubahan alih fungsi lahan, dari kawasan Lindung menjadi Kawasan Budidaya, dan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Hal ini disebabkan tidak tersampaikannya informasi tentang peraturan penataan ruang dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang
5. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya adalah inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Bidang Bina Kontruksi

1. Fungsi pembinaan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya menyentuh masyarakat jasa konstruksi, sementara kemampuan pemerintah pusat terbatas.
2. Pengembangan usaha jasa konstruksi melalui investasi belum diatur di dalam regulasi konstruksi sebelumnya.
3. Masih sedikitnya tenaga kerja konstruksi bersertifikat sehingga perlu penataan ulang pengaturan terhadap sistem sertifikasi.
4. Kurangnya pengetahuan tenaga kerja konstruksi di Provinsi Kalimantan Timur terhadap kualitas pembangunan.

Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Berkembangannya kawasan kumuh di perkotaan seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali di kota-kota Provinsi Kalimantan Timur

yang dapat mempengaruhi beban terhadap infrastruktur permukiman. Kawasan ini berkembang karena adanya migrasi dan tingkat ekonomi, sosial dan keahlian sumber daya manusia migran.

2. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik
3. Lingkungan yang layak anak dan bagi masyarakat berkebutuhan khusus menjadi standar dalam pelayanan infrastruktur yang diwujudkan dalam keandalan bangunan dan penataan lingkungan
4. Bencana alam menjadi bagian dalam kinerja pelayanan infrastruktur telah menjadi standar dalam pelayanan infrastruktur.

E. SOLUSI DAN SARAN :

a. Sebelum pelaksanaan pembangunan fisik, harus menyelesaikan terlebih dahulu pembebasan lahan, sehingga alokasi fisik yang telah dianggarkan dapat digunakan tepat waktu dan tepat sasaran.
b. Perlu segera dibangun bangunan penangkap air sementara (sebelum di alirkan ke sungai) dan sungai yang sudah dangkal agar segera dilakukan pengerukan. Demikian juga dengan saluran drainase agar dapat dibuat sebagaimana mestinya sehingga air hujan dapat segera mengalir ke sungai.
c. Rencana ruas jalan yang akan di bangun di desain yang bagus sesuai dengan standar alinyemen horisontal dan vertikal menurut standar Bina Marga tanpa memperhatikan eksisting ruas jalan tersebut.
d. Perlu adanya investor yang berani menanamkan modalnya untuk mengeksploitasi material yang berada di Kalimantan Timur sehingga tidak perlu ada ketergantungan material di daerah luar Provinsi Kalimantan Timur.
e. Untuk daerah perdesaan yang rawan air secara bertahap perlu dibangun embung, jaringan irigasi, sumur pompa dan bangunan pelengkap lainnya sesuai dengan jumlah penduduk yang akan di siapkan air baku, untuk dapat diolah menjadi air bersih

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Uraian Garis Besar Tentang Pertimbangan Rumusan dan Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Serta Penjelasan Pendanaan dan Kesesuaian Dengan RKPD

Kedudukan Rencana Kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, dalam rangka pencapaian visi dan misi yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan kualitas Insfrastruktur Pekerjaan Umum. Pembangunan wilayah di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur pada dasarnya merupakan upaya untuk pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan Arah kebijakan yang ditetapkan disesuaikan dengan fungsi masing-masing. Pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur menjadi acuan penentuan pilihan program kegiatan tahunan yang akan dibahas dalam serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang. Lebih lanjut, isi dan substansi dari Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur

Pendanaan Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sesuai RKPD Perubahan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.448.999.882.404 mencakup 3 Urusan, 27 Program, 61 Kegiatan dan 186 Sub Kegiatan pada 5 Sub Unit Organisasi Dinas PUPR-PERA, UPTD PIPU Wilayah I, UPTD PIPU Wilayah II, UPTD PIPU Wilayah III dan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi. Penyusunan pendanaan , perumusan prioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program yaitu dengan menetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut maka dialokasikan pagu dana dimana, pagu dana dan target merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

SUB UNIT ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
URUSAN : PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1. Penyelenggaraan Jalan Provinsi

    - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
    - Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
    - Survey Kondisi Jalan/Jembatan
    - Pembangunan Jalan
    - Rekonstruksi Jalan
    - Pembangunan Jembatan
    - Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

    - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
    - Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
    - Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
    - Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan
    - Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
    - Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota
    - Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
2. Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
    - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
    - Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
    - Pengembangan SDM dan Kelembangaan Pengelolaan Air Limbah Domestik

5. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

1. Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
    - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
    - Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
    - Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Untuk Kepentingan Strategis Provinsi
    - Penyelenggaraan Penertiban dan Perpanjangan Lisensi Arsitek

6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
    - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
    - Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

- Penataan Bangunan dan Lingkungan
- Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota
- Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

7. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
    - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
    - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
    - Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku
    - Pembangunan Kanal Banjir
    - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
    - Normalisasi/Restorasi Sungai
    - Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
    - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
    - Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
    - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
    - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa

8. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi

    - Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

    - Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya

9. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi

    - Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang

    - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang

    - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota

    - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi

    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

    - Sistem Informasi Penataan Ruang

4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi

    - Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang

    - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

10. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

    - Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
    - Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan
    - Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
    - Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
    - Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
    - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi
    - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
    - Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi

    - Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
    - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
    - Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
    - Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat dilaksanakan dengan Skema KPDBU
    - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi

3. Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

    - Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan
    - Pengawasan dan Evaluasi Tetib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Pada APBD Provinsi

11. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

URUSAN : PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
    - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi

2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha
3. Pelakasanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha

3. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
    - Penyediaan Prasarana, sarana, dan utilitas umum dipermukiman untuk menunjang fungsi permukiman

URUSAN : PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SUB UNIT ORGANISASI : UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Pengadaan Alat Besar
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
    - Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
    - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

3. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

1. Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
    - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1. Penyelenggaraan Jalan Provinsi
    - Rehabilitasi Jalan
    - Pemeliharaan Rutin Jalan
    - Pemeliharaan Rutin Jembatan

SUB UNIT ORGANISASI : UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - Pengadaan Alat Besar
    - Pengadaan Mebel
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
    - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
    - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
    - Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi

2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

    - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi

    - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1. Penyelenggaraan Jalan Provinsi

    - Rehabilitasi Jalan
    - Pemeliharaan Rutin Jalan
    - Pemeliharaan Rutin Jembatan

SUB UNIT ORGANISASI : UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

    - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

    - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Pengadaan Alat Besar
    - Pengadaan Peralatam dan Mesin Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
    - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
    - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
    - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1. Penyelenggaraan Jalan Provinsi

- Rehabilitasi Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jembatan

SUB UNIT ORGANISASI : UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - Penyediaan bahan Material
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

URUSAN : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUB UNIT ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

    - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0003 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											63,539,593,896	67,097,483,572					60,224,569,700
1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											7,088,910,696	7,135,810,696					6,261,668,000
1	03	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											342,200,000	342,200,000					629,280,000
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tercapainya pelaksanaan Administrasi perkantoran	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	342,200,000	342,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	629,280,000
1	03	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											295,335,000	295,335,000					500,000,000
1	03	01	1.05	11	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 Orang	30 Orang	100 %	100 %	295,335,000	295,335,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	500,000,000
1	03	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											340,497,796	340,497,796					1,275,828,654
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	11,816,000	11,816,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	57,972,674
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 Paket	8 Paket	100 %	100 %	220,405,000	220,405,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	441,680,980
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	92,850,000	92,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	277,578,535

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.05.1.04.0.00.01.0005 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Cadangan Pendanaan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	1.05	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	39.833.595	39.833.595	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	37.096.740
1	03	01	1.05	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan-Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	72 Dokumen	72 Dokumen	100 %	100 %	11.655.280	11.655.280	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	11.320.000
1	03	01	1.05	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	564.760.000	564.760.000	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	450.000.000
1	03	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											184.585.690	184.585.690					150.888.000
1	03	01	1.07	03	Pengadaan Mebel	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	184.585.690	184.585.690	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	150.000.000
1	03	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											3.219.015.760	3.189.910.760					2.099.683.560
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	12.000.000	12.000.000	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	13.000.000
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	246.136.600	339.036.680	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	356.202.940

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0003 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Lokasi Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	2.958.878.960	2.958.878.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	2.415.480.400
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2.662.276.540	2.662.276.540					1.206.868.000
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	22 Unit	22 Unit	100 %	100 %	363.106.000	363.106.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	229.870.000
1	03	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Unit	20 Unit	100 %	100 %	656.172.500	656.172.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	550.000.000
1	03	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	134 Unit	134 Unit	100 %	100 %	413.610.000	413.610.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	39.690.000
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	1.001.188.040	1.001.188.040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	287.990.000
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)											8.931.260.500	8.931.260.500					8.901.920.800
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengairan Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota											549.378.500	549.378.500					556.376.800
1	03	02	1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Persentase Capaian Layanan SDA	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Sarana dan Prasarana SDA yang dirangani	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,91 %	78,91 %	1 Unit	1 Unit	18 unit	18 unit	549.378.500	549.378.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Layanan SDA	78,91 %	556.376.800
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang kewenangannya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota											8.381.882.000	8.381.882.000					8.345.544.000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0009 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catatan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Capaian Layanan SDA	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.91 0%	79.91 0%	20 KM	20 KM	8892 meter	8812 meter	8.281.882.000	8.281.882.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Layanan SDA	79.91 0%	9.345.543.000
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE											6,203,283,500	6,203,283,500					4,800,000,000
1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kewasan Strategis Provinsi											6,203,283,500	6,203,283,500					4,800,000,000
1	03	06	1.01	08	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara	sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3855 meter	3855 meter	9 Unit	9 Unit	1 sistem	1 sistem	6.203.283.500	6.203.283.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3855 meter	4.800.000.000
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											41,130,539,200	44,827,128,876					40,260,988,940
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi											41,130,539,200	44,827,128,876					40,260,988,940
1	03	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,27 %	79,27 %	2 KM	2.3 KM	700.61 Km	700.61 Km	19.602.601.600	22.299.d31.676	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	79,27 %	24.581.882.000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0003 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,27 %	78,27 %	10 KM	10 KM	700.01 Km	700.01 Km	11,179,537,100	11,179,537,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78,27 %	7,692,052,840
1	03	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,27 %	78,27 %	367.1 M	367.1 M	700.01 Km	700.01 Km	10,368,160,200	10,368,160,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78,27 %	8,046,153,970
															TOTAL	63,309,993,896	67,097,483,572					60,224,569,700

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.06.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.06.0.00.01.0005 UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											5,745,251,182	6,080,097,182					6,994,516,700
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											5,745,251,182	6,080,097,182					6,954,516,700
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											120,840,000	120,840,000					159,240,000
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	90,00 %	93,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	120,840,000	120,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90,00 %	159,240,000
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											227,856,200	227,856,200					300,000,000
1	03	01	1.05	03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	90,00 %	93,00 %	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	227,856,200	227,856,200			Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90,00 %	300,000,000
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											2,030,334,422	2,310,836,422					2,298,276,700
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	90,00 %	93,00 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	52,322,500	52,322,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90,00 %	50,000,000
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	90,00 %	93,00 %	2 paket	2 paket	100 %	100 %	41,500,800	41,843,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90,00 %	190,000,000
1	03	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	90,00 %	93,00 %	6 Paket	6 Paket	100 %	100 %	169,585,500	169,585,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90,00 %	180,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0005 UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bahu	80,00 %	80,00 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	83.040.133	83.040.133	PEN DAKATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	80,00 %	165.000.000
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bahu	80,00 %	80,00 %	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	103.920.800	103.920.800	PEN DAKATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	80,00 %	100.000.000
1	03	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bahu	80,00 %	80,00 %	7 Paket	7 Paket	100 %	100 %	180.265.000	180.265.000	PEN DAKATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	80,00 %	100.000.000
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bahu	80,00 %	80,00 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	1.410.178.700	1.890.278.700			Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	80,00 %	1.890.278.700
1	03	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											771.238.300	771.238.300					1.410.888.000
1	03	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bahu	80,00 %	80,00 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	350.160.000	350.160.000	PEN DAKATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	80,00 %	410.000.000
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bahu	80,00 %	80,00 %	61 Unit	61 Unit	100 %	100 %	421.078.300	421.078.300	PEN DAKATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	80,00 %	1.000.000.000
1	03	01	1.09		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											2.883.558.560	2.907.124.560					2.275.888.000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0005 UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Rincian			Rencana Tahun 2023									Catatan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	01	1.08	01	Penyelisikan Jasa Surat Menyurat	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	90.00 %	90.00 %	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	20,280,000	20,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90.00 %	25,000,000
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	90.00 %	90.00 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	200,440,000	220,024,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90.00 %	250,000,000
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	90.00 %	90.00 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	1,866,018,060	1,866,018,060	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90.00 %	2,000,000,000
1	03	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											531,405,700	531,405,700					500,000,000
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	90.00 %	90.00 %	26 Unit	26 Unit	100 %	100 %	206,525,000	206,525,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90.00 %	150,000,000
1	03	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	90.00 %	90.00 %	159 Unit	159 Unit	100 %	100 %	144,731,500	144,731,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90.00 %	200,000,000
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	90.00 %	90.00 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	160,147,400	160,147,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90.00 %	160,000,000
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	05				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**											1,110,096,000	1,210,206,000					1,210,206,000
5	05	02			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**											1,110,096,000	1,210,206,000					1,210,206,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.8.00.01.0005 UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan											1,115,096,000	1,210,206,000					1,210,206,000
5	05	02	1.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Tesusunnya dokumen hasil penelitian dan pengembangan pekerjaan umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	1 Dokumen	1 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	1,115,096,000	1,210,206,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)	70 %	1,210,206,000
															TOTAL	6,860,327,182	7,249,103,182					8,144,722,700

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											2,699,334,666,639	3,005,368,488,016					1,236,290,584,173
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											96,188,496,375	97,522,556,904					94,019,162,708
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											1,869,857,000	1,869,857,000					1,932,857,000
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya Penyusunan Anggaran dan Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi Bidang ke-PU-an	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.00 %	90.00 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	1,289,236,000	1,289,236,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90.00 %	1,300,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2025

Unit Organisasi : 1.03.1.04.1.01.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.1.01.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025								Catatan Perubahan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terciptanya Penyusunan Anggaran dan Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi Bidang kePU-an	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	90,00 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	900.621.000	900.621.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90,00 %	652.857.000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											98,178,865,249	94,419,679,774				65,750,676,794
Unit Organisasi : 1.01.1.04.5.05.01.0009 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Sub Unit Organisasi : 1.01.1.04.5.05.01.0010 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat																					
1	02	01	1.02	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Perencanaan dan Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,00 %	90,00 %	4862 Orang	4862 Orang	100 %	100 %	51,737,545,245	52,845,585,774	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90,00 %	65,750,676,794
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Indikator Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	1.02	02	Penyusunan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,00 %	90,00 %	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	100 %	1,681,820,000	1,998,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90,00 %	1,119,040,000
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											1,589,505,500	1,589,505,500					1,002,120,000
1	02	01	1.05	03	Pengadaan Sebelas Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,00 %	90,00 %	8 Paket	8 Paket	100 %	100 %	1,543,685,500	1,543,685,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90,00 %	601,120,000
1	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,00 %	90,00 %	300 Orang	300 Orang	100 %	100 %	206,820,000	206,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90,00 %	160,000,000
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											6,079,019,359	6,079,910,359					3,790,925,956
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,00 %	90,00 %	7 Paket	7 Paket	100 %	100 %	128,039,100	128,039,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90,00 %	100,000,000
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,00 %	90,00 %	23 Paket	23 Paket	100 %	100 %	3,668,714,759	3,668,714,759	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90,00 %	1,567,143,000
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,00 %	90,00 %	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	270,016,100	270,016,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90,00 %	166,782,956

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.1.04.5.01.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.01.1.04.5.01.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Sahan Logistik Kantor	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Dokumen Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.00 %	90.00 %	500 Paket	500 Paket	100 %	100 %	265.000.000	265.000.000	DINDAERAH ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90.00 %	160.000.000
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.00 %	90.00 %	11 Paket	11 Paket	100 %	100 %	268,972,400	268,972,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90.00 %	160.000.000
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.00 %	90.00 %	381 Laporan	381 Laporan	100 %	100 %	3,479,466,000	3,479,466,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90.00 %	1.500.000.000
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**5,283,456,200**	**5,283,456,200**					**627,240,000**
1	03	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.00 %	90.00 %	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	5,283,456,200	5,283,456,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90.00 %	627.240.000
1	**03**	**01**	**1.08**		**Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**20,991,333,000**	**21,098,913,000**					**16,316,392,25**
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.00 %	90.00 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	98,429,000	85,429,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90.00 %	40.590.000
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.00 %	90.00 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	2,907,881,000	2,011,881,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90.00 %	2.100.000.000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja									Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dipelihara	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.00 %	90.00 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	18,585,052,480	18,585,052,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90.00 %	14,171,287,256
1	03	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											5,235,021,000	5,235,021,000					4,604,953,708
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.00 %	90.00 %	116 Unit	116 Unit	100 %	100 %	1,603,369,000	1,603,369,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90.00 %	650,000,000
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.00 %	90.00 %	457 Unit	457 Unit	100 %	100 %	691,110,000	691,110,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90.00 %	396,880,000
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.00 %	90.00 %	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	451,204,000	451,204,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90.00 %	1,238,252,788
1	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.00 %	90.00 %	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	2,688,559,000	2,688,559,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90.00 %	2,347,821,000
1	03	02			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**											145,094,526,138	167,844,363,607					220,886,316,981
1	03	02	1.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											112,059,058,088	131,796,083,019					169,201,095,026

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Persentase Capaian Layanan SDA (%)	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Sarana dan Prasarana SDA yang tersangani	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Kaliorang Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Suka Rahmat Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Bontang Barat, Bontang Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	78,91 %	78,91 %	8 Dok	8 Dok	11 unit	18 Unit	9,377,216,691	10,607,477,082	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Layanan SDA (%)	78,91 %	27,683,087,895

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2025

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Kelurahan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	02	1.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Persentase Capaian Layanan SDA (%)	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Sarana dan Prasarana SDA yang tertangani	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Berau Talisayan, Dumaring Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Kota Bontang, Bontang Barat, Kanaan Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,91 %	78,91 %	6 Dokumen	6 Dokumen 13 Dokumen	11 unit	18 unit	6.850.068.788	12.101.081.788	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Layanan SDA (%)	78,91 %	7.228.284.000
1	03	02	1.01	02	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Persentase Capaian Layanan SDA (%)	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Sarana dan Prasarana SDA yang tertangani	Kab. Berau Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,91 %	78,91 %	1 Dokumen	1 Dokumen	11 unit	18 unit	1.060.675.000	1.060.675.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Layanan SDA (%)	78,91 %	1.060.675.000

Pembahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	02	1.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Persentase Capaian Layanan SDA (%)	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Sarana dan Prasarana SDA yang tertangani	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Benuah Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ilir Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	78,91 %	78,91 %	5 Titik	5 Titik	11 unit	18 unit	15.984.389.100	25.092.656.120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Capaian Layanan SDA (%)	78,91 %	20.536.645.700
1	03	02	1.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Persentase Capaian Layanan SDA (%)	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Sarana dan Prasarana SDA yang tertangani	Kab. Berau, Biduk-Biduk, Pantai Harapan Kab. Kutai Timur, Sandaran, Manubar Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotu Luang	78,91 %	78,91 %	1,25 Km	1,25 Km	11 unit	18 unit	80.764.907.140	80.764.907.140	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Layanan SDA (%)	78,91 %	80.189.790.000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	02	3.01	46	Normalisasi/Rekonstruksi Sungai	Persentase Capaian Layanan SDA (%)	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direkonstruksi	Sarana dan Prasarana SDA yang terlangani	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Makarti Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bahu Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	78,91 %	78,91 %	16,07 Km	16,53 Km	11 unit	18 unit	44.520.700.400	58.209.526.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Layanan SDA (%)	78,91 %	78.165.478.520
1	03	02	3.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Persentase Capaian Layanan SDA (%)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Sarana dan Prasarana SDA yang terlangani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,91 %	78,91 %	1 Dokumen	1 Dokumen	11 unit	18 unit	758.995.000	758.995.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Layanan SDA (%)	78,91 %	1.159.021.400
1	03	02	3.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Persentase Capaian Layanan SDA (%)	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Sarana dan Prasarana SDA yang terlangani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,91 %	78,91 %	6 Lembaga	6 Lembaga	11 unit	18 unit	2.403.066.293	2.403.066.293	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Layanan SDA (%)	78,91 %	6.780.615.840

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.01.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.01.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024								Catatan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Kelurahan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Kelurahan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Untuk Lokal	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	02	1.01	02	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Persentase Capaian Layanan SDA (%)	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Sarana dan Prasarana SDA yang tersimpan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,91 %	78,81 %	1 Dokumen	1 Dokumen	11 unit	10 unit	249.956.000	249.956.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Layanan SDA (%)	78,81 %	249.956.000
1	03	02	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Persentase Capaian Layanan SDA (%)	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Sarana dan Prasarana SDA yang tersimpan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Kandacas Ulu	78,91 %	78,81 %	1 Lembaga	1 Lembaga	11 unit	10 unit	277.289.700	277.289.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Layanan SDA (%)	78,81 %	277.514.000
1	03	02	1.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**37.635.468.050**	**35.240.280.500**					**34.595.224.955**
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Persentase Capaian Layanan SDA	Jumlah Rencana teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Kab. Berau, Gunung Tabur, Menanviang Ulu; Kab. Bulungan, Bulungan, Bulungan Lempake; Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Sebulu Ilir; Kab. Kutai Barat, Barong, Resak	76,91 %	78,81 %	3 Dokumen	4 Dokumen	8894 meter	8814 meter	1.300.060.000	1.566.023.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Layanan SDA	78,81 %	1.300.060.000
1	03	02	1.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Bendungan	Persentase Capaian Layanan SDA	Panjang Jaringan Irigasi Pembukaan yang Dibangun	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Sebulu Ilir	78,91 %	78,81 %		2839 Meter	8882 meter	8812 meter	0	890.188.118	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Layanan SDA	78,81 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Kelurahan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Capaian Layanan SDA	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Kab. Berau, Gunung Tabur, Mewancang Ulu Kab. Berau, Teluk Bayur, Labanan Makmur Kab. Berau, Tabalar, Semurut Kab. Berau, Biatan, Biatan Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Sawaoja, Sungai Merdeka	78,91 %	78,91 %	5,66 KM	7,51 KM	8884 meter	8614 meter	31,211,581,200	28,322,936,620	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Layanan SDA	78,91 %	45,739,211,955
1	03	02	1.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Persentase Capaian Layanan SDA	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Kab. Paser, Paser Belengkong, Sulibrin	78,91 %	78,91 %	1,11 KM	1,11 KM	8884 meter	8614 meter	4,454,306,650	4,454,306,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Layanan SDA	78,91 %	4,397,000,000
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**											**12,511,300,000**	**32,020,221,606**					**201,689,552,000**
1	**03**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**											**12,511,300,000**	**32,020,221,606**					**201,689,552,000**
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, kebijakan, strategi dan Teknis SPAM	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	air minum layak perpipaan yang tercapai	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,62 %	68,62 %	1 Dokumen	5 Dokumen	68,62 %	68,62 %	1,306,571,000	1,306,571,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	68,62 %	813,036,000
1	03	03	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/ Perbaikan SPAM	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional	air minum layak perpipaan yang tercapai	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,62 %	68,62 %	1 dokumen	4 dokumen	68,62 %	68,62 %	106,462,600	314,465,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	68,62 %	204,864,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja											
										Program		Kelurahan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	03	1.01	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAVI Regional	air minum layak perpipaan yang tercapai	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,64 %	69,64 %	0 Liter/detik	0 Liter/detik	69,64 %	69,64 %	10,290,920,300	29,143,849,108	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	69,64 %	200,000,000,000
1	03	03	1.01	07	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAVI Regional Lintas Kabupaten/Kota	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAVI	air minum layak perpipaan yang tercapai	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,64 %	69,64 %	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	69,64 %	69,64 %	709,697,000	709,697,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	69,64 %	912,475,000
1	03	03	1.01	08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAVI Provinsi	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAVI	air minum layak perpipaan yang tercapai	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,64 %	69,64 %	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	69,64 %	69,64 %	99,250,000	99,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	69,64 %	117,475,000
1	03	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL											1,539,208,500	1,539,208,500					1,475,975,000
1	03	1.04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional											1,539,208,500	1,539,208,500					1,475,975,000
1	03	05	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Capaian akses penanganan sampah domestik	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Pembinaan Teknis Persampahan	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,27 %	71,27 %	1 Dokumen	1 Dokumen	25 orang	50 orang	958,792,000	958,792,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian akses penanganan sampah domestik	71,27 %	975,975,000
1	03	05	1.01	04	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Capaian akses penanganan sampah domestik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Pembinaan Teknis Persampahan	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,27 %	71,27 %	10 Kelompok Masyarakat	10 Kelompok Masyarakat	25 orang	50 orang	580,458,500	580,458,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian akses penanganan sampah domestik	71,27 %	900,000,000
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH											2,370,868,500	2,370,868,500					1,912,213,000
1	03	05	1.04		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional											2,370,868,500	2,370,868,500					1,912,213,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	05	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Capaian akses limbah domestik layak	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	Progres penyelenggaraan Air Limbah Domestik Regional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87,27 %	87,27 %	2 Dokumen	2 Dokumen	45 %	45 %	1.872.011.000	1.872.011.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian akses limbah domestik layak	87,27 %	1.712.213.000
1	03	05	1.01	06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Capaian akses limbah domestik layak	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Progres penyelenggaraan Air Limbah Domestik Regional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87,27 %	87,27 %	10 Kelompok Masyarakat	10 Kelompok Masyarakat	45 %	45 %	506.049.500	506.049.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian akses limbah domestik layak	87,27 %	200.000.000
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE											27.797.677.746	25.086.048.826					50.077.404.296
1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi											27.797.677.746	25.086.048.826					50.077.404.296
1	03	06	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Loa Ipuh Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Rapak Dalam	3455 meter	3455 meter	5 Dok	5 Dok	4 sistem	5 sistem	2.152.000.000	2.152.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3455 meter	1.591.720.000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Kelurahan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Kelurahan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	08	1.01	05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Direalisasi	sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Kapak Dalam	3,111 meter	5,855 meter	5 Unit	5 Unit	5 sistem	5 sistem	28,665,877,748	28,654,048,824	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	5855 meter	48,491,462,306
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG											827,912,012,500	850,627,179,347					11,281,834,69 6
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi											827,912,012,500	850,627,179,347					11,281,834,69 6
1	03	08	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Bangunan gedung yang tertata	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata	Kota Samarinda, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	66 Dokumen	66 Dokumen	0 unit	48 unit	40,482,960,000	40,850,900,381	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bangunan gedung yang tertata	100 %	3,613,619,000
1	03	08	1.01	03	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Bangunan gedung yang tertata	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata	Kota Samarinda, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	48 Unit	50 Unit	0 unit	48 unit	797,055,102,000	809,176,030,299	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bangunan gedung yang tertata	100 %	7,233,280,000
1	03	08	1.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Bangunan gedung yang tertata	Jumlah konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk kepentingan Strategis Provinsi	jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata	Semua Kab/Kota Semua kecamatan, Semua kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	0 unit	48 unit	325,228,500	325,228,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bangunan gedung yang tertata	100 %	295,075,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	08	1.01	11	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Asistek	Bangunan gedung yang tertata	Jumlah Lisensi Asistek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	5 unit	48 unit	99,120,000	269,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bangunan gedung yang tertata	100 %	117,475,000
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA											89,043,877,441	89,043,877,441					8,369,153,492
1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota											89,043,877,441	89,043,877,441					8,369,153,492
1	03	09	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 unit	2 unit	237,648,000	237,648,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	100 %	273,825,000
1	03	09	1.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	1 unit	5 unit	8,205,814,141	8,205,814,141	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	100 %	2,240,179,602
1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Kawasan	5 Kawasan	1 unit	5 unit	82,304,641,300	82,304,641,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	100 %	5,555,157,890

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	00	1.01	06	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 unit	5 unit	96,823,500	96,823,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	100 %	100,000,000
1	03	09	1.01	07	Monitoring Penataan,Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan,Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 unit	5 unit	199,958,500	199,958,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	100 %	199,994,200
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**1,453,084,522,039**	**1,699,152,638,582**					**625,000,000,000**
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**											**1,453,084,522,039**	**1,699,152,638,582**					**625,000,000,000**

Penetapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2025

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
										Target Capaian Kinerja									Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Kelurahan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Kandkur Dana				
						Capaian Program	Kelurahan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Aktiv dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan, Pengendalian	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,27 %	79,27 %	29 Dokumen	41 Dokumen	780,61 KM	780,61 KM	20.157.146.000	32.648.481.148	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	79,27 %	34.523.379.000
1	03	10	1.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,27 %	79,27 %	454061 M²	454061 M²	780,61 KM	780,61 KM	180.765.348.555	288.509.099.555	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	79,27 %	84.291.551.500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Teknik Ukur	Target	
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,27 %	78,27 %	2 Dokumen	2 Dokumen	700.61 KM	700.61 KM	2.984.790.000	2.984.790.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (DAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78,27 %	2,866.065.000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	10	1.01	05	Pembangunan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Dibangun	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,27 %	78,27 %	18,9 KM	18,9 KM	700,61 KM	700,61 KM	222.750.453.930	223.391.888.264	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78,27 %	139.652.930.500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	10	1.01	09	Rekonstruksi Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,27 %	78,27 %	67,65 KM	75,65 KM	700,61 KM	700,61 KM	841,084,611,400	961,338,428,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78,27 %	285,196,900,000
1	03	10	1.01	12	Pembangunan Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jembatan yang Dibangun	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	Kab. Kutai Timur, Semua KECAMATAN, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,27 %	78,27 %	150 M	158 M	700,61 KM	700,61 KM	133,760,438,798	133,880,438,798	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78,27 %	60,500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2026

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Kabupaten	Kecamatan	Kabupaten	Kecamatan	Kabupaten	Kecamatan	Kabupaten	Kecamatan					
1	03	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Ranjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,27 %	78,27 %	40 Dokumen	40 Dokumen	700,61 KM	700,61 KM	45.821.782.286	45.821.782.286	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78,27 %	20.970.572.000
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI											12.273.473.400	12.950.764.800					12.719.972.000
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi											6,756,319,400	7,371,610,800					7,865,972,000
1	03	11	1.01	01	Penyelenggaraan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46159 orang	46159 orang	1 Dokumen	1 Dokumen	556 orang	556 orang	122.000.000	122.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	46159 orang	211.560.000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catatan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	11	1.01	02	Penyelenggaraan Konstruksi/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	Jumlah Instruktur/Asesor/ Pelatihan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65199 orang	65199 orang	48 Orang	88 Orang	555 orang	555 orang	886.305.400	1.073.395.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	65199 orang	991.232.000
1	05	11	1.01	03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65199 orang	65199 orang	1 Dokumen	1 Dokumen	558 orang	555 orang	100.000.000	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	65199 orang	50.000.000
1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48159 orang	48159 orang	510 Orang	510 Orang	556 orang	556 orang	2.166.231.000	2.166.231.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	48159 orang	2.345.164.200
1	06	11	1.01	05	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	Jumlah Identifikasi Potensi kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48159 orang	48159 orang	1 Dokumen	1 Dokumen	555 orang	555 orang	100.000.000	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	48159 orang	60.000.000

Penetapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	11	1.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi	Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46159 orang	46159 orang	558 Orang	558 Orang	558 orang	558 orang	2.460.001.000	2.460.001.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	46159 orang	1.460.600.000
1	03	11	1.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46159 orang	46159 orang	590 Orang	590 Orang	558 orang	558 orang	1.229.195.000	1.229.195.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	46159 orang	2.721.515.800

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Kelurahan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Kelurahan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	11	1.01	06	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46159 orang	46159 orang	1 Dokumen	1 Dokumen	668 orang	668 orang	100.000.000	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	46159 orang	50.000.000
1	**03**	**11**	**1.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**											**781.882.000**	**781.882.000**					**830.000.000**
1	03	11	1.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46159 orang	46159 orang	1 Laporan	1 Laporan	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	46159 orang	200.000.000
1	03	11	1.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46159 orang	46159 orang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	122.617.000	122.617.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	46159 orang	100.000.000
1	03	11	1.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46159 orang	46159 orang	30 Orang	30 Orang	1 dokumen	1 dokumen	195.013.000	195.013.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	46159 orang	150.000.000
1	03	11	1.02	04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan Dengan Skema KPBU	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46159 orang	46159 orang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	149.999.000	149.999.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	46159 orang	50.000.000
1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46159 orang	46159 orang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	214.453.000	214.453.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	46159 orang	100.000.000
1	**03**	**11**	**1.03**		**Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**											**4.707.272.000**	**4.707.272.000**					**8.920.000.000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Kekuasan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana				
1	03	11	1.03	01	Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	Jumlah NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Tersusunnya NSPK Penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi dan pengawasan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65159 orang	65159 orang	1 Dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2,856,732,000	2,856,732,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	65159 orang	2,570,000,000
1	03	11	1.03	02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Tersusunnya NSPK Penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi dan pengawasan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65159 orang	65159 orang	1 Laporan	1 Laporan	2 dokumen	2 dokumen	1,405,540,000	1,405,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	65159 orang	1,480,000,000
1	03	11	1.03	02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas kab/kota	Tersusunnya NSPK Penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi dan pengawasan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46159 orang	46159 orang	1 Laporan	1 Laporan	2 dokumen	2 dokumen	440,000,000	440,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	46159 orang	50,000,000
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG											12,591,511,200	24,093,527,900					6,100,000,000
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi											11,603,457,600	18,105,474,300					1,450,000,000
1	03	12	1.01	01	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Indeks penyelenggaraan tata ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Pentaan/Pengaturan lebih RTRW Provinsi	Prosentase Penyusun RTRW	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	100 %	11,603,457,600	17,955,784,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks penyelenggaraan tata ruang	1 Indeks	1,150,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Kelauran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	12	1.01	01	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Indeks penyelenggaraan tata ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Prosentase Penetapan RTRW	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	320,740,000	320,740,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks penyelenggaraan tata ruang	1 Indeks	300,000,000
1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang											1,158,460,000	1,158,460,000					1,200,000,000
1	03	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR kabupaten/kota	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR kabupaten/kota	Tersusunnya Laporan koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	12 Dokumen	12 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	720,000,000	720,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Indeks	750,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	12	1.03	04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 indeks	1 indeks	1 Laporan	1 Laporan	1 dokumen	1 dokumen	422.370.000	422.370.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 indeks	450.000.000
1	05	12	1.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi**											2,039,988,600	2,039,988,600					2,200,000,000
1	05	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 indeks	1 indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.621.963.200	1.621.963.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 indeks	1.800.000.000
1	05	12	1.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 indeks	1 indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	387.985.400	387.985.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 indeks	400.000.000
1	05	12	1.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi**											2,799,645,000	2,799,645,000					3,250,000,000
1	05	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	585.282.500	585.282.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 dokumen	750.000.000
1	03	12	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.234.362.500	2.234.362.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 dokumen	2.500.000.000
1	04				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**											146,971,395,699	296,165,165,899					125,903,025,518

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN											2,349,043,830	2,349,043,830				1,886,720,000
1	04	02	1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi											2,349,043,830	2,349,043,830				1,886,720,000

Penetapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.01.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tahun Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	03	1.01	01	Identifikasi Permukiman di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Penyelenggaraan SPM Perumahan	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya kegiatan pendataan SPM Perumahan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,33 %	3,33 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1.883.875.810	1.883.875.810	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyelenggaraan SPM Perumahan	3,33 %	926.160.000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	02	1.01	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Penyelenggaraan SPNI Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Terlaksananya kegiatan pendataan SPNI Perumahan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,33 %	3,33 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Kegiatan	3 Kegiatan	495.168.000	495.168.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyelenggaraan SPM Perumahan	3,33 %	941.360.000
1	04	05			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN										77,257,769,760	75,015,391,469					75,453,815,518
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha										503,253,200	503,253,200					949,846,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.05.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	QQ	02	1.07	09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Koordinasi Pelaksan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan 15 (lima belas) Ha	Kab. Berau, Semua kecamatan, Semua kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65681 Unit	65681 Unit	1 Laporan	1 Laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	808.293.000	808.293.000	OPD/BANTUAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	65681 Unit	808.845.000

1	04	03	1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur						76,754,516,560	78,512,138,269					74,503,969,118
Unit Organisasi : 1.03 1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Sub Unit Organisasi : 1.03 1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat										Tahun 2023													
										Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
										Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja			
1	04	05	1.02	01	Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Semua Kelurahan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Kelusan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Kelusan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	05	1.02	05	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6968/1 unit	6968/1 unit	2172 Unit Rumah	2172 Unit Rumah	0 unit	0 unit	55.573.497.000	61.331.105.705	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	6968/1 unit	55,446,911,215

Unit Organisasi : 1.07.1.02.1.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Sub Unit Organisasi : 1.07.1.02.1.01.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan										Penyelaraan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023											
										Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
1	04	05	1.01	07	Penyelesaian Sisa Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Tanjung Redeb Ke Simpang Bidang Ha sampai dengan di sawah 1k Lanta Belau Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Capaian Program	Jumlah Lokasi Pemukiman yang Direalisasikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Dimanajemen/Dipe GR	Masyarakat Jumlah rumah	Kab. Berau, Samarinda, Samarinda, Kota Samarinda, Samarinda, Kota, Kabupaten Kutai Kartanegara

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.03.1.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0002 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											52.325.452.197	54.325.452.197					41.744.010.78 8
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											7.706.211.940	7.706.211.940					8.101.479.880
1	03	01	1.03		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											342.340.000	342.340.000					282.480.000
1	03	01	1.03	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaporkannya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	98 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	342.340.000	342.340.000	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	282.480.000
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											420.858.500	420.858.500					274.650.000
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapan	Terlaporkannya kualitas kepegawaian	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, semua kelurahan	100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	142.968.500	142.968.500	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	103.650.000
1	03	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Skor kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaporkannya kualitas kepegawaian	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua kelurahan	100 %	100 %	20 Orang	20 Orang	100 %	100 %	277.890.000	277.890.000	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	171.000.000
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											900.980.100	900.980.100					915.230.000
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	93 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	28.827.200	28.827.200	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	28.300.000
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	93 %	5 Paket	5 Paket	100 %	100 %	154.756.900	154.756.900	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	181.755.000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0002 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Kelusan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Kelusan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	42.000.000	42.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	39.265.000
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan-Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	9.696.000	9.696.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	9.800.000
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	668.200.000	668.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	659.400.000
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**2,224,837,420**	**2,224,837,420**					**2,005,010,000**
1	03	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	110.810.000	110.810.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	110.010.000
1	03	01	1.07	03	Pengadaan Alat Berat	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Unit Alat Berat yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	1.414.297.000	1.414.297.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	2.000.000.000
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	45 Unit	45 Unit	100 %	100 %	700.530.420	700.530.420	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	195.000.000
1	**05**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2,108,540,520**	**2,108,540,520**					**1,955,210,980**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Ruang dan Penataan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0002 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja									Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	01	1.05	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	10,000,000
1	03	01	1.05	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	280,148,400	280,148,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	313,466,220
1	03	01	1.05	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	1,809,191,920	1,809,191,920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	1,631,795,780
1	**03**	**01**	**1.05**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,708,955,600**	**1,708,955,600**					**2,268,841,500**
1	03	01	1.05	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	17 Unit	17 Unit	100 %	100 %	100,992,000	100,992,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	105,039,000
1	03	01	1.05	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Alat Berat yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	17 Unit	17 Unit	100 %	100 %	649,132,000	649,132,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	798,802,500

Penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.04.0002 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rincian Tahun 2023								Catatan Penting	Perkiraan Maju Rincian Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	1.03	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	78 Unit	78 Unit	100 %	100 %	88.120.000	88.120.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	800.000.000
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Kab. Kutai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	815.841.600	815.841.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	1.065.000.000
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**											**10.060.221.900**	**10.060.221.900**					**6.242.371.938**
1	**03**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**3.001.001.500**	**3.001.001.500**					**1.647.165.938**
1	03	02	1.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Persentase Capaian Layanan SDA	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang dioangani	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	78,91 %	78,91 %	5 Unit	5 Unit	11 unit	18 unit	515.010.000	515.010.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Layanan SDA	78,91 %	515.737.938
1	03	02	1.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Persentase Capaian Layanan SDA	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang dioangani	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gn Mulia	78,91 %	78,91 %	500 M	500 M	11 unit	18 unit	631.459.600	631.459.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Layanan SDA	78,91 %	631.426.000
1	03	02	1.01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Persentase Capaian Layanan SDA	Panjang Kanal Benjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang dioangani	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,91 %	78,91 %	800 M	800 M	11 unit	18 unit	1.855.825.300	1.855.825.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Layanan SDA	78,91 %	500.000.000
1	**03**	**02**	**1.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**7.058.200.000**	**7.058.200.000**					**4.595.205.000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0002 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Capaian Layanan SDA	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan Kab. Paser, Paser Belengkong, Sulikan Kab. Paser, Paser Belengkong, Laburan Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.91 %	78.91 %	787962.903 732459 M2	787962.903 732459 M2	8864 meter	8614 meter	7,864,200,000	7,864,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Layanan SDA	78.91 %	4,595,600,000
1	03	06			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG											3,802,246,595	3,802,246,595				500,000,000
1	03	06	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi											3,802,246,595	3,802,246,595				500,000,000
1	03	06	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Bangunan gedung yang tertata	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sarana dan Prasarana yang Direhabilitasi	Jumlah bangunan yang diatur	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	100 %	100 %	1 Dokumen 60 M2	1 Dokumen 60 M2	5 unit	5 unit	3,802,246,595	3,802,246,595	Pajak Daerah		Bangunan gedung yang tertata	100 %	500,000,000
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											29,969,751,762	31,969,751,762				26,500,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi											29,969,751,762	31,969,751,762				26,500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0002 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	10	1.01	08	Rehabilitasi Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang direhabilitasi	Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,27 %	78,27 %	5 KM	5 KM	700,61 Km	700,61 Km	7.045.161.267	7.045.161.267	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78,27 %	10,000,000,000
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,27 %	78,27 %	15 KM	15 KM	700,61 Km	700,61 Km	69.010.612.425	21.010.612.425	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78,27 %	15,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0002 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,27 %	78,27 %	120 M	120 M	700.61 Km	700.61 Km	2,999,988,070	2,999,988,070	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78,27 %	1,500,000,000
															TOTAL	52,329,652,197	54,329,652,197					41,744,050,708

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0004 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											888,879,247,338	888,779,206,338					57,500,000,000
1	03	09			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											7,165,532,888	7,457,691,000					5,576,525,000
1	03	09	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											291,140,888	366,020,000					244,540,000
1	03	09	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	291,140,000	366,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	244,540,000
1	03	09	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											265,280,888	536,055,000					247,550,000
1	03	09	1.05	03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	44,955,000	44,955,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	49,500,000
1	03	09	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	15 Orang	15 Orang	100 %	100 %	219,325,000	291,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	169,750,000
1	03	09	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,093,416,760	1,093,416,760					876,270,000
1	03	09	1.06	01	Penyediaan Komposen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Paket Komposen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	31,004,900	31,004,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	38,394,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kalprov
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0004 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	28.762.000	28.762.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	60.800.000
1	03	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	82.382.000	82.382.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	81.414.000
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	62.100.760	62.100.760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	51.000.000
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	72.508.000	72.508.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	20.828.000
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	3.878.400	3.878.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	5.040.000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0004 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Kelurahan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	1.06	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	811,000,000	811,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	650,000,000
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											40,170,000	40,170,000					40,680,000
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	40,170,000	40,170,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	40,680,000
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											3,548,010,000	3,548,010,000					2,892,680,302
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	25,169,200	25,169,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	9,567,000
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Konsultasi Sumber Daya Air dan Listrik	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konsultasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	206,668,000	206,668,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	227,661,734
1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Pelatihan dan Perlengkapan Kantor	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelatihan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,355,200	1,355,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	1,355,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0004 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Terkait Ulasan	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	3,236,775,200	3,236,775,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	2,654,815,568
1	03	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											1,927,900,640	2,882,204,640					3,274,774,608
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	47 Unit	47 Unit	100 %	100 %	105,000,000	105,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	83,750,000
1	03	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Alat Berat yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	28 Unit	28 Unit	100 %	100 %	868,626,900	868,626,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	734,826,819
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	65 Unit	65 Unit	100 %	100 %	62,265,100	62,265,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	69,851,000
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	24 Unit	24 Unit	100 %	100 %	765,758,240	810,982,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	347,777,953

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0004 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catatan Perubahan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	1.03	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	37.283.000	37.283.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	80 %	41.060.000
1	05	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)											6,412,180,000	6,412,180,000					3,412,180,000
1	05	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang kurang 1000 Ha, 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota											6,412,180,000	6,412,180,000					3,412,180,000
1	05	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Capaian Layanan SDA (%)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,81 %	78,81 %	1,58 KM	1,58 KM	8804 meter	8814 meter	2.577.900.000	2.577.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Layanan SDA (%)	78,81 %	889.000.000
1	05	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Capaian Layanan SDA (%)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,81 %	78,81 %	37,49 KM	37,49 KM	8804 meter	8814 meter	2.834.280.000	2.834.280.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Layanan SDA (%)	78,81 %	2.523.180.000
1	05	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											94,900,135,338	94,900,135,338					28,511,457,000
1	05	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi											94,900,135,338	94,900,135,338					28,511,457,000
1	05	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan	Tingkat Ketersediaan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,27 %	78,27 %	2 KM	2 KM	700,61 Km	788,61 Km	16.727.280.000	16.727.280.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Jalan Provinsi	78,27 %	4.997.652.263

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.5.05.01.0004 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	18	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,27 %	78,27 %	88 KM	88 KM	700.61 Km	700.61 Km	76,172,855,338	76,172,855,338	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78,27 %	22,014,044,517
1	03	18	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,27 %	78,27 %	950 M	950 M	700.61 Km	700.61 Km	2,000,000,000	2,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78,27 %	1,500,000,000
															TOTAL	108,678,247,338	108,770,206,338					37,500,000,000

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan Rencana Strategis Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 juga merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan dan target tahun 2023.

Sebagaimana tema Pembangunan RKPD tahun 2023 **"Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat"**, mengandung substansi pokok pembangunan tahun 2023 yaitu menumbuhkan industri hilir yang berbasis potensi sumberdaya lokal melalui optimalisasi peran ekonomi kawasan dan ekonomi kerakyatan. Optimalisasi ekonomi Kawasan dan ekonomi kerakyatan difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah yang berdampak langsung kepada upaya percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial pasca Pandemi COVID-19.

Penyusunan Perubahan Renja tahun 2023, dilakukan melalui berbagai tahapan dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, memuat program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Merupakan rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi

Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Keberhasilan pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 ini sangat bergantung pada itikad dan komitmen bersama antar pelaku pembangunan dalam mengawal, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanakan semua rencana program/kegiatan yang telah disusun ini.

Samarinda, September 2023
Kepala Dinas PUPR dan PERA
Provinsi Kalimantan Timur

A.M. FITRA FIRNANDA, ST, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740405 200003 1 004

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan Rancangan Awal;
c. Penyusunan Rancangan;
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
e. Perumusan Rancangan Akhir dan;
f. Penetapan.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah

dan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.

I.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

I.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Rancangan Akhir RENJA PD Tahun 2023 sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan :

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Penyusunan Renja dimulai dengan melakukan pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu.

Adapun penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Rencana Kerja PD

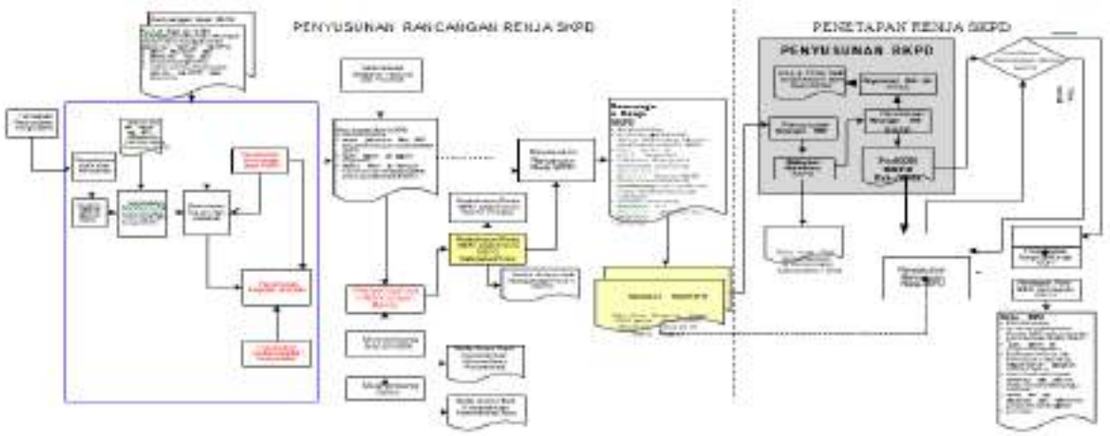

I.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 -2023.

Pada lingkup pemerintahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1(satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Gambaran tentang hubungan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.2

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

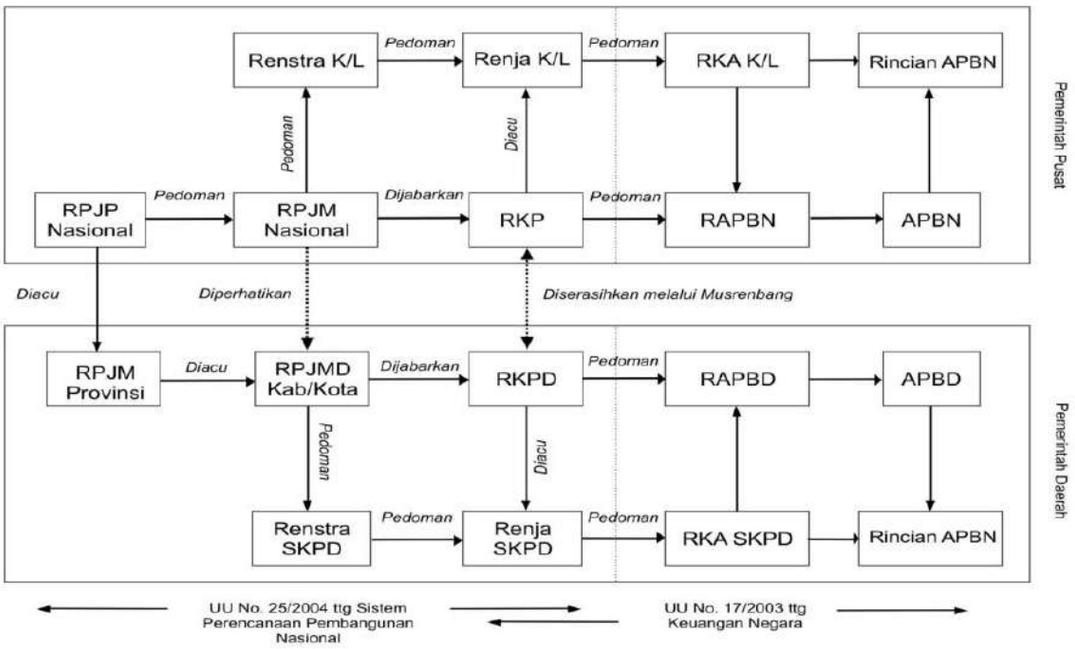

I.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 meliputi:

a. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.
b. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran
c. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
d. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK)

I.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah.

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur meliputi :

1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.

Berikut akan disampaikan Susunan, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.

Susunan Organisasi Satuan terdiri atas :

a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat, membawahi :
   1) Sub Bagian Perencanaan Program;
   2) Sub Bagian Umum;
   3) Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, membawahi :
   1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
   2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
   1) Seksi Pengendalian dan Operasional;
   2) Seksi Pengamanan dan Pengawalan Protokoler.
e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
   1) Seksi Bina Potensi Masyarakat:
   2) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat.
f. Bidang Kebakaran, membawahi
   1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
   2) Seksi Pelatihan dan Pembinaan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.3
Bagan Organisasi Perangkat Daerah

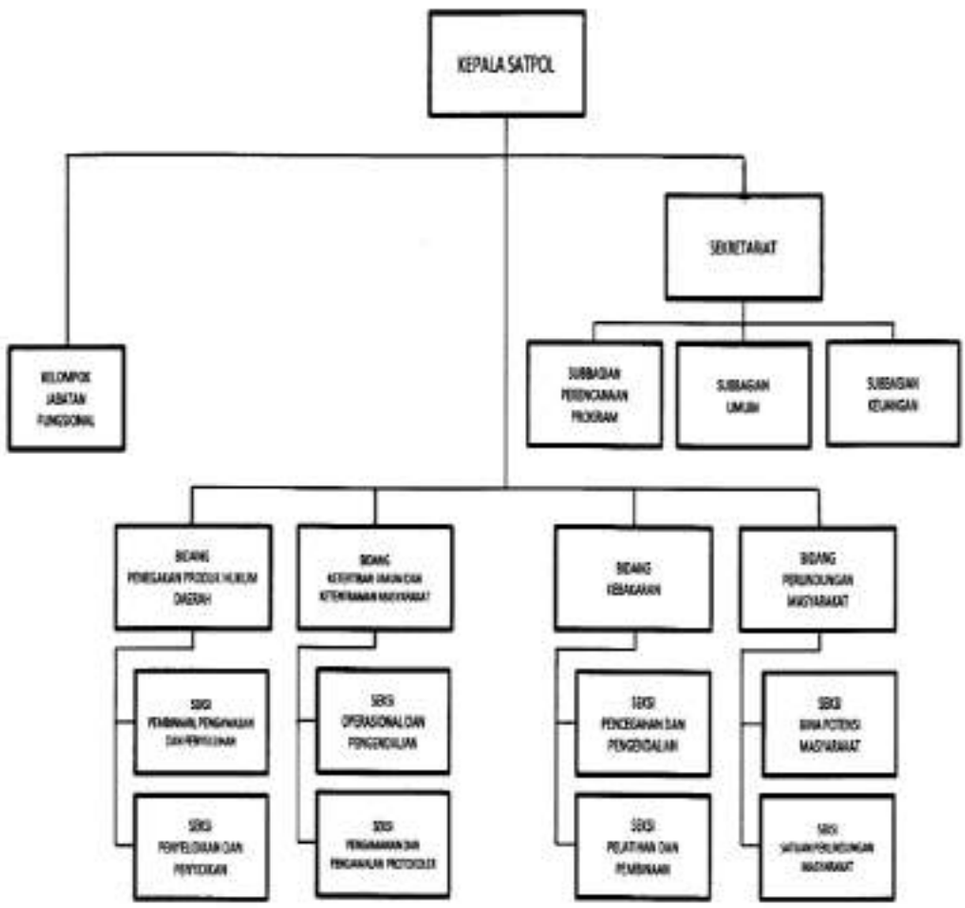

<u>Uraian Tugas dan Fungsi</u>

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian Perangkat Daerah dan dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai ***tugas*** untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala

daerah;

c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;

d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;

f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan

g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Adapun yang menjadi tugas pokok dari pejabat struktural pada bagan struktur organisasi, sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

a) Tugas Pokok :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

b) Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan dibidang penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

2) Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

3) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang penegakan produk hukum daerah.

4) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

5) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang Kebakaran

6) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang perlindungan masyarakat.

7) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

8) Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional

9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris.

a) Tugas Pokok.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, urusan umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan.

b) Fungsi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris berfungsi :

1) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring evaluasi, dan pelaporan.

2) Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

3) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan akutansi keuangan.

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- Kepala Sub Bagian Perencanaan Program.

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.

- Kepala Sub Bagian Umum.

  Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

- Kepala Sub Bagian Keuangan.

  Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.

3. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.

   a) Tugas Pokok.

      Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan penuluhan penegakan peraturan perundang-undangan, serta melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda dan perkada.

   b) Fungsi.

      Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah berfungsi :

      1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan penegakan produk hukum daerah;

      2) Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama dibidang penegakan produk hukum daerah;

      3) Penyiapan bahan Pembinaan, bimbingan, pengendalian, penyidikan, dan penindakan terhadap pelanggaran produk hukum daerah.

4) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengawasan aset milik pemerintah daerah sesuai produk hukum daerah.

5) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan penegakan produk hukum daerah; dan

6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

  Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan produk hukum daerah kepada masyarakat dan badan hukum.

- Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

  KepalaSeksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang produk hukum daerah meliputi pelaksanaan, pemeriksaan, dan melakukan tindakan hukum terhadap masyarakat dan badan hukum baik yustisial dan non yustisial.

4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

a) Tugas Pokok.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapkan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

b) Fungsi.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berfungsi :

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

2) Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi

operasional pengendalian, pengamanan protokoler dan obyek vital.

3) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian kegiatan operasional ketentraman umum dan ketertiban masyarakat dan pengamanan obyek vital.

4) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi operasional pengendalian dan pengamanan obyek vital.

5) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan ketertiban umum dan ketentraman masayarakat.

6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

- Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian.

  Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan operasional dan pengendalian ketentraman umum dan ketertiban masyarakat.

- Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan Protokoler.

  KepalaSeksi Pengamanan dan Pengawalan Protokoler mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengamanan dan protokoler.

5. Kepala Bidang Kebakaran.

a) Tugas Pokok.

Kepala Bidang Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, fasilitasi pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan dalam menghadapi gangguan, ancaman, perlindungan masyarakat, bahaya dan bencana kebakaran.

b) Fungsi.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Kebakaran berfungsi :

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perlindungan bencana kebakaran.

2) Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan perlindungan bencana kebakaran.

3) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pencegahan kebakaran.

4) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pelatihan kebakaran.

5) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bencana kebakaran.

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian.

  Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi,

- Kepala Seksi Pelatihan dan Pembinaan.

  Kepala Seksi Pelatihan dan Pembinaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pelatihan serta pembinaan petugas pemadam kebakaran dan masyarakat.

6. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

a) Tugas Pokok.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan dalam menghadapi gangguan, ancaman perlindungan masyarakat, bahaya dan bencana serta membina potensi masyarakat.

b) Fungsi.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat berfungsi :

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perlindungan Masyarakat;

2) Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan perlindungan masyarakat;

3) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian satuan perlindungan masyarakat;

4) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan perlindungan masyarakat; dan

5) Pelaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan Pol PP sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat.

  Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanan bimbingan masyarakat.

- Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat.

Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan bimbingan serta pengendalian perlindungan masyarakat.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(1) Saat ini sudah terbentuk Kelompok Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang mewadahi JFT Pol.PP Ahli dan JFT Pol.PP Terampil;

(2) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur sudah memiliki Tim Penilai Angka Kredit JFT Pol.PP berdasarkan SK Gubernur .

I.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran.

Peraturan-peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:
Peraturan yang memayungi perencanaan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalidengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

I.2.3 Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur pengampu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas :

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
f. Sosial.

Atas hal tersebut Kementrian Dalam Negeri telah membuat Petunjuk Teknis Pemenuhan SPM yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten Kota.

Tabel 1.4

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

TARGET CAPAIAN KINERJA (SPM) URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
Jenis Pelayanan Dasar	**Standar Pelayanan Minimal**					**Satuan Kerja / Lembaga Penanggung Jawab**
	Indikator	**Komponen**		**Nilai**		
1	*2*	*3*		*4*		*5*
Pelayanan Ketentraman & Ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah warga negara yang menerima layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan		100		Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan pada kawasan yang terkena dampak akibat dari	x 100%	100	%	

		penegakan hukum dan perkada				

I.2.4 Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan upaya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.5

Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020

Konsep/Definisi : Mengukur persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		
RUMUS/PERHITUNGAN	**CAPAIAN KINERJA**	**KETERANGAN**
$\frac{\text{Jumlah 14 Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah 2 Perda dan Perkada yang memuat sanksi}}$ x100%	63.63%	8 Perda dan 6 Perkada yang telah ditegakkan tahun 2020 berupa penyuluhan dan pendampingan bersama Instansi/OPD teknis dari Jumlah 8 Perda dan 6 Perkada yang akan ditegakkan memuat sanksi pada Tahun 2018 s.d 2021.
$\frac{\text{Jumlah 5 Personil Satpol PP Berkualitas PPNS}}{\text{Jumlah 71 Personil Satpol PP}}$ x 100%	7%	5 orang PPNS dari 71 personil Satpol PP.
$\frac{\text{Jumlah 42 pengaduan yang ditindaklkan}}{\text{Jumlah 42 pengaduan yang masuk}}$ x100%	100%	Capaian Kinerja tidak dapat terukur, dikarenakan jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk terdapat di Satpol PP Kota Samarinda. Sedangkan Satpol PP Provinsi berperan sebagai pendamingan Pengamanan Pengaduan gangguan Trantibum.

I.2.5 Ketentuan Indikator Lainnya terkait Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur tidak masuk dalam program yang tercantum dalam MDG's

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan Program/ Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta, terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

I.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah Menyelaraskan Rencana Strategis dengan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi Rencana Strategis Perangkat Daerah.

I.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

a. Terwujudnya capaian tujuan dan sasaran Renstra Satpol PP Prov. Kaltim;
b. Menjadi arahan dan pedoman bagi OPD dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu satu tahunan;
c. Menjadi tolak ukur keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja impact dan outcome dalam Renstra SKPD, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian visi dan misi serta janji politik Gubernur yang telah dijabarkan dalam RPJMD.
d. Penilaian pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur kepada Gubernur atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan OPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

1.2. Landasan Hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

Proses penyusunan Program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 merupakan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai program tahun kedua pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dimana program ini diharapkan dapat menyesuaikan dengan Renstra (2019-2023), visi dan misi serta program kerja dan disesuaikan dengan pagu anggaran indikatif pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Renja ini juga tidak lepas dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu yang mengacu pada hasil laporan kinerja/realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur ditunjang dengan Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah dengan ruang lingkup kegiatannya. Selanjutnya evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah itu sendiri adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk evaluasi perencanaan periode 1 tahun. Evaluasi pelaksanaan rencana yang dimaksud disini adalah evaluasi usulan program dan kegiatan Tahun 2022 didasarkan pada hasil penetapan APBD tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur dilihat dari hasil penetapan APBD dalam DPA Murni Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan mengacu pada pagu indikatif pada RKPD Tahun 2023 yang bisa dijelaskan pada tabel 1 dibawah ini, serta dengan penjelasannya sebagai berikut :

TABEL 2.1. EVALUASI CAPAIAN RENJA TRIWULAN 2 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALTIM TAHUN 2022.

NO.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI			
			KEUANGAN PER 30 JUNI 2022	FISIK	KEU	SISA DANA
				(%)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I	BELANJA	**19,873,175,836**	**9,010,975,356**	**31**	**45**	10,862,200,480
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	18,540,024,579	8,447,221,870			10,092,802,709
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	198,748,500	163,126,100	86	82	35,622,400
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	172,533,500	149,816,100	100	87	22,717,400
	– Jumlah laporan perencanaan perangkat daerah					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26,215,000	13,310,000	50	51	12,905,000
	– Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah					
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	12,965,733,575	5,523,208,476	54	43	7,442,525,099
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,695,373,575	5,400,028,476	57	43	7,295,345,099
	– Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	270,360,000	123,180,000	50	46	147,180,000
	– Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	201,000,000	6,636,500	0	3	194,363,500
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	153,600,000	6,636,500	0	4	146,963,500
	– Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut					

	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	47,400,000	0	0	0	47,400,000
	– Jumlah dokumen Informasi Personil Satpol PP Se-Kaltim					
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	442,837,400	252,255,838	59	57	190,581,562
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,100,000	1,740,000	100	34	3,360,000
	– Jumlah dokumen komponen instalasi listrik/penerangan kantor					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	171,200,000	40,354,600	50	24	130,845,400
	– Jumlah dokumen pengadaan Kupon BBM, Alat Tulis Kantor dan makan minum					
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42,837,400	8,453,000	100	20	34,384,400
	– Jumlah dokumen bahan cetakan dan penggandaan					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223,700,000	201,708,238	50	90	21,991,762
	– Jumlah laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	35,594,200	0	9	0	35,594,200
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35,594,200	0	9	0	35,594,200
	– Jumlah pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	4,397,356,904	2,329,860,756	52	53	2,067,496,148
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173,141,000	78,952,952	50	46	94,188,048
	– Jumlah laporan Layanan Jasa Internet, Air Bersih, Listrik,Telekomunikasi dan TV Kabel					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,224,215,904	2,250,907,804	54	53	1,973,308,100
	– Jumlah laporan Gaji Tenaga Teknis Non ASN					

7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	298,754,000	172,134,200	33	58	126,619,800
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132,374,000	31,500,000	50	24	100,874,000
	– Jumlah laporan Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	137,130,000	114,864,200	50	84	22,265,800
	– Jumlah laporan pemeliharaan kendaraan operasional dan pajak					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29,250,000	25,770,000	50	88	3,480,000
	– Jumlah laporan pemeliharaan peralatan dan mesin kantor					
B.	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	1,068,949,257	560,834,486	12	52	508,114,771
8	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	673,911,257	395,354,329	20	59	278,556,928
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	240,394,000	153,524,125	42	64	86,869,875
	– Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan					
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	5,400,000	0	0	0	5,400,000

	– Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	114,600,000	0	0	0	114,600,000
	– Jumlah rapat Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi					
Linmas	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	155,652,557	117,220,204	42	75	38,432,353
	– Jumlah anggota Satlinmas yang mengikuti pelatihan mitigasi dan evakuasi bencana					
Linmas	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	153,380,700	124,610,000	13	81	28,770,700
	– Jumlah Orang yang mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas dengan Nuansa HAM					
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1,014,000	0	0	0	1,014,000
	– Jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat					
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3,470,000	0	0	0	3,470,000
	– Jumlah warga negara yang memperoleh layanan dampak penegakan Perda dan Perkada					

9	**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	228,299,800	121,062,600	38	53	107,237,200
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	67,871,800	24,913,900	40	37	42,957,900
	– Jumlah warga negara atau masyarakat yang memperoleh sosialisasi penegakan Perda/Perkada					
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	60,370,000	22,530,000	33	37	37,840,000
	– Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur					
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	100,058,000	73,618,700	60	74	26,439,300
	– Jumlah Laporan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur					
10	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	166,738,200	44,417,557	50	27	122,320,643
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	47,292,000	37,937,557	100	80	9,354,443
	– Jumlah Personil yang telah dibentuk menjadi PPNS					
	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	119,446,200	6,480,000	40	5	112,966,200
	– Jumlah laporan administrasi penyidikan PPNS Penegakan Perda dan Perkadaran administrasi penyidikan PPNS Penegakan Perda dan Perkada					
C.	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	264,202,000	2,919,000	0	1	261,283,000
11	**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	264,202,000	2,919,000	0	1	261,283,000
	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	102,058,000	0	0	0	102,058,000

	– Jumlah Laporan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran					
	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	86,988,000	0	0	0	86,988,000
	– Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran					
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1,008,000	0	0	0	1,008,000
	– Jumlah Laporan Koordinasi Bidang Kebakaran					
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	74,148,000	2,919,000	0	4	71,229,000
	– Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Kebakaran					

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian keseluruhan rencana kerja Satpol PP Prov. Kaltim hampir memenuhi target, namun terdapat sub kegiatan yang belum mencapai target realisasi. Adapun faktor - faktor penyebab dan kebijakannya dapat diuraikan di bawah ini:

1. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau tidak terpenuhinya target kinerja program/kegiatan :**

   Pada triwulan ke-2 Tahun 2022 Dari 11 Kegiatan yang menjadi mandat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan telah ***memenuhi target yakni mencapai 45 %***.

   Namun ada beberapa kegiatan yang belum memenuhi capaian target, adapun faktor-faktor penyebab dapat diuraikan sebagai berikut :
   - Adanya pergeseran anggaran yang menyebabkan target dan realisasi keuangan belum tercapai.
   - Adanya kegiatan yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada triwulan ke-4 menunggu anggaran perubahan.
   - Adanya pembatasan kegiatan (PPKM).

2. **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.**

   Dengan tercapainya sebagian program pada Triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2022 maka implikasi yang timbul adalah realisasi capaian kinerja tersebut sebagai dasar perencanaan kegiatan tahun depan.

3. **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.**
   - Melaksanakan rencana kerja agar tercapainya realisasi output kegiatan dan anggaran sesuai target;
   - Perencanaan anggaran diharapkan lebih lebih efisien dan efektif.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta pelindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di

daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian Perangkat Daerah dan dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai Tugas untuk Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman, serta Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat, Sebagian isu-isu penting dalam penyelenggaran Tupoksi adalah :

a. Program dan Kegiatan terkait SPM Tibumtranmas yang sangat bervariasi di setiap Daerah sehingga mempersulit evaluasi capaian SPM baik di tingkat Provinsi maupun Nasional;

b. Alokasi anggaran untuk SPM terkait Trantibumlinmas, Perumahan rakyat, dan sosial yang cenderung minim dengan kisaran di bawah 2% (dua persen) dari total belanja dibandingkan dengan Pendidikan, Kesehatan dan PUPR dengan kisaran di atas 9% (sembilan persen) dari total belanja (TA 2019) yang menyebabkan target SPM pada bidang pelayanan dasar tersebut sulit untuk dicapai;

c. Tim Penerapan SPM daerah Provinsi (Pasal 16 Permendagri 100 Tahun 2018) belum optimal dalam mengawal dan mengintegrasikan penerapan SPM pada dokumen perencanaan dan penganggaran;

d. Regulasi SPM Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, meliputi :

(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;

(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

(4) Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya;

(5) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyelenggara Urusan Pemerintahan Wajib dalam Pelayanan Dasar di Bidang Ketertiban Umum, dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dituntut untuk siap dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Target Pemenuhan SPM Urusan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

1. Pemenuhan mutu pelayanan dasar peningkatan sarana prasarana Satpol PP
   a. Penyediaan seragam dinas harian,lapangan,upacara,olah raga satgas tertentu dan seragam PPNS (Program Sekretariat Sub Kegiatan Subbag Umum).

   b. Penyediaan perlengkapan Patroli, Deteksi Dini, Pengamanan, Sosialisasi, Pengawasan, Pembinaan, Penyuluhan, Pengawalan Dan Pengendalian Massa yang terdiri dari penyediaan biaya bahan bakar kendaraan, biaya makan minum, biaya perjalanan dinas, honorarium Tim Satgas Trantibum Terpadu (Unsur Lintas OPD,Satpol PP Kab/Kota,TNI,POLRI dan Kejaksaan Tinggi), biaya pembuatan aplikasi Sistem Pelaporan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (SITIBUM)
   (Biaya Pengadaan Aplikasi,Biaya Sosialisasi dan Biaya Pemeliharaan), dan biaya rapat Satgas Trantibum Terpadu 2 Kali setahun (Program Bidang Trantib).

c. Penyediaan pemeliharaan kendaraan operasional, pemeliharaan peralatan satpol PP, dan penyediaan pemeliharaan gedung kantor Satpol PP (Program Sekretariat Sub Kegiatan Subbag Umum).
d. Pengadaan Kendaraan Operasional Bidang PPHD,Bidang Trantib,Bidang Linmas, Bidang Kebakaran dan Sekretariat (Program Sekretariat Sub Kegiatan Subbag Umum).
e. Pengadaan Meubelair dan Peralatan Elektronik Perkantoran (Program Sekretariat Sub Kegiatan Subbag Umum

2. Pemenuhan mutu pelayanan dasar peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP
   a) Pelaksanaan kegiatan peningkatan Kapasitas untuk Bantuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Polda Kalimantan Timur (SPN Polda Kaltim) atau Kodam Mulawarman (Korem ASN) (Program Sekretariat Sub Kegiatan Subbag Umum).
   b) Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Diklat Dasar Pol.PP untuk Pejabat Administratur,Pejabat Pengawas,Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana) bekerjasama dengan BPSDM Kemendagri (Program Sekretariat Sub Kegiatan Subbag Umum).
   c) Pelaksanaan kegiatan fasiltasi kemampuan teknis tertentu dalam bentuk Bimtek,Workshop, Outbond dan Bimbingan Mental untuk Satpol PP dan Banpol PP bekerjasama dengan pihak profesional (Program Sekretariat Sub Kegiatan Subbag Umum).
   d) Pelaksanaan Jambore Satpol PP dan Linmas meliputi penilaian poskamling terbaik, Inovasi penanganan gangguan trantibum, Pengelolaan Satgas Linmas Kab/Kota Terbaik, Pengelolaan SIMPOLPP terbaik dan teraktif (Program Sekretariat Sub Kegiatan Subbag Umum).
   e) Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas melalui pelatihan mitigasi bencana, pengamanan lingkungan, deteksi dini dan pembentukan Satgas Linmas Kab/Kota (Program Bidang Linmas).
   f) Pembuatan Rancangan Perda Ketertiban Umum dan Ketentaraman Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur meliputi biaya pembuatan naskah akedemik, biaya honorarium tim penyusun Raperda, biaya studi banding tim penyusunan Perda, biaya makan minum rapat tim penyusunan perda, biaya uji publik

raperda dan biaya fasilitasi raperda ke Kemendagri (Program Bidang PPHD).

g) Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS meliputi kegiatan Rapat Teknis PPNS Se-Kaltim, Pelatihan Kegiatan Yustisi dan Non Yustisi bekerjama sama dengan POLRI / BPSDM Kemendagri /Kemenkum HAM (Program Bidang PPHD).
h) Peningkatan Kapasitas Relawan Pemadam Kebakaran Non Pemerintah (LSM atau Kelompok Masyarakat) meliputi kegiatan Pelatihan Penanganan kebakaran kecil,sedang dan berat bekerjasama dengan PMK Pemerintah (Program Bidang Kebakaran)
i) Pembentukan Informan Pemetaan Bahaya Kebakaran melalui kegiatan Pembuatan WAG berdasarkan wilayah Kab/Kota yang menginput kejadian kebakaran dengan format yang mudah digunakan contoh google form (Program Bidang Kebakaran).
j) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah untuk menjaring dan menyamakan persepsi rencana kerja Satpol PP Prov.kaltim,Satpol PP Kab/Kota dan Ditpol PP Linmas Kemendagri (Program Sekretariat Subbag Perencanaan Program).
k) Pelaksanaan Rapat Evaluasi dan Monitoring Capaian SPM Urusan Trantibum yang diemban Satpol PP melibatkan Satpol PP Kab/Kota dan OPD lainnya (Program Sekretariat Subbag Perencanaan Program).

3. Pemenuhan mutu pelayanan dasar biaya pengobatan dan biaya ganti kerugian materil terdampak penegakan Perda / Perkada Kalimantan Timur
   a) Penyediaan biaya pengobatan ringan,sedang dan berat bagi warga atau petugas meliputi biaya belanja obat P3K, biaya belanja vitamin, biaya belanja masker,hand sanitizer dan sabun cuci tangan. (Progam Bidang PPHD)
   b) Penyediaan biaya ganti rugi materil ringan ,sedang dan berat terdiri dari biaya semen,pasir, cat dan jasa tukang / Kayu, plywood, paku dan Jasa Tukang (Progam Bidang PPHD)

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi adalah :

1. Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada.
2. Pagu anggaran yang belum selaras dengan penerapan SPM.
3. Keberanian dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar Perda dan Perkada.
4. Kurangnya kerjasama antar bidang.
5. Keberadaan PPNS belum cukup teruji dalam menegakkan Perda dan Perkada.
6. Status SDM Polisi Pamong Praja belum memadai masih menggunakan tenaga kontrak.
7. Kualitas kompetensi PNS belum merata.
8. Sarana dan Prasarana minimal yang harus ditingkatkan.

Tantangan kedepan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah adalah dalam hal penegakan Perda dan Perkada yang tujuan akhirnya adalah ketentraman dan ketertiban serta pelindungan masyarakat untuk meningkatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rencana kedepan, memastikan program dan kegiatan yang telah disusun benar-benar terlaksana dan dapat bermanfaat baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat sehingga Visi dan Misi Kepala Daerah terasa bagi Warga Kalimantan Timur.

Belum terakomodir secara komprehensif untuk rancangan awal RKPD diantaranya belum masuknya program kegiatan sebagai berikut :

a. Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Tramtibumlinmas Sub Urusan Trantibum;

- Pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah provinsi;
- Pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan umum Daerah kab/kota.

b. Mutu Pelayanan Dasar

- Ditetapkan dengan Standar Teknis, dan sekurang2nya memuat:
  1) Standar jumlah & kualitas barang/jasa;

2) Standar jumlah & kualitas personil/SDM, dan

3) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

c. Penerima Pelayanan Dasar

– Warga Negara dengan ketentuan yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap:

1) pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi dan peraturan kepala Daerah Provinsi;dan

2) Pelanggaran Peraturan Daerah Kab/Kota dan peraturan kepala Daerah Kab/Kota.

APBD harus fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk mendukung program prioritas pemerintah berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah serta mengurangi tingkat pengangguran.

TABEL 2.2. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH (%)				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CAPAIAN ANALISIS
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	TINGKAT KEPUASAN BADAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	78 %	77.75	78.50	79.25	84.25	90.74	84.90	100	100	

Berdasarkan Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur indikator kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur adalah Survei Kepuasan Masyarakat, dalam hal ini Tingkat Kepuasan Organisasi Perangkat Daerah terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur. Pada Tahun 2021 di peroleh Indeks Kepuasan Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur sebesar 84.90% dengan predikat sangat baik. Adapun Capaian Realisasi 2020 sebesar 90.74 hal ini disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga Realisasi Capaian tidak mencapai diatas 95%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Permasalahan dalam pelaksanaan tugas fungsi dan pelayanan yang bersumber dari internal

1. Penyajian laporan kegiatan yang telah dilaksanakan belum terdokumentasikan dengan baik;
2. Pemahaman tentang penanganan gangguan trantibum lintas kab/kota dalam 1 (satu) provinsi belum optimal;
3. Tampilan website perlu ditingkatkan lagi dengan menggunakan jasa konsultan bidang IT;
4. Layanan Pengaduan Gangguan Trantibum belum dibuatkan tempat atau portal di website yang tersedia saat ini hanya Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda/Perkada;
5. Belum optimalnya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pengelolaan laporan kegiatan Satpol PP Prov. Kaltim.

Hambatan bersumber dari eksternal

1. Belum adanya Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepahaman antar OPD Pemangku Perda/Perkada;
2. Belum adanya Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepahaman antar instansi Penegak Hukum, Satpol PP Kab/Kota.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah rencana kerja perubahan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan didalam dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan

Satpol PP Provinsi Kaltim melakukan perubahan pada Renja 2023 dengan menyesuaikan kebutuhan dan pagu penyesuaian anggaran yang disampaikan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan perbaikan-perbaikan yang disusun dalam dokumen Renstra 2019-2023. Perbaikan tersebut bermaksud untuk menyesuaikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja yang sesuai dengan perkembangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur dengan maksud rincian sebagai berikut :

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tahun 2023

Kebijakan Nasional Kementrian Dalam Negri Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Direktorat Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yaitu "**Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Satpol PP sesuai Standar"** yang menjadi telaahan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dan sejalan dengan RPJMD. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur arah kebijakannya telah sesuai pula dengan arah kebijakan pembangunan lima tahunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur yaitu pada strategi 'Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis risiko".

Tabel 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional Tahun 2023, Tujuan, Sasaran , Strategi dan Kebijakan.

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Berani Untuk Kaltim Berdaulat

MISI V : Berdaulat dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Penyelenggaraan Penegakan Produk Hukum Daerah Provinsi Kalimantan Timur	1. Koordinasi penegakan produk hukum daerah dan peraturan Kepala Daerah dengan instasi terkait (Satpol PP Kabupaten/Kota, OPD Provinsi Kalimantan Timur, Kepolisian,	1. Mefasilitasi Sekretariat PPNS ; 2. Membuat MOU dengan Instansi yang terkait ; 3. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan

		Kejaksanaan dan Pengadilan) ; 2. Melakukan kerjasama (MOU) dengan OPD pemangku Perda Provinsi Kalimantan Timur ; 3. Menyiapkan Tim Penilai Provinsi untuk Panji Keberhasilan dan Penghargaan Karya Bhakti Satpol PP Provinsi/Kabupaten/Kota ; 4. Mengoptimalkan keberadaan PPNS dan Sekretariat PPNS ; 5. Menyusun rencana aksi bersama dengan OPD terkait penegakan Produk Hukum Daerah Provinsi Kalimantan Timur ; 6. Melaksanakan penegakan produk Hukum Daerah Provinsi Kalimantan Timur bersama-sama dengan OPD terkait.	kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda.
	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1. Memaksimalkan dukungan unsur pimpinan di daerah dalam mewujudkan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan pelidungan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur ; 2. Koordinasi penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban umum dengan Satpol PP Kabupaten/Kota dan unsur instansi terkait ; 3. Menyiapkan Tim Satgas Trantibum ;	1. Mendukung Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Perda dan Perkada ;
	Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	1. Koordinasi penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dengan Satpol PP Kabupaten/Kota dan unsur instansi yang terkait ;	1. Melaksanakan peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang

			Bernuansa Hak Asasi Manusia.
	Penyelenggaraan Penanganan Bencana Kebakaran	1. Koordinasi penyelenggaraan Pemadaman Kebakaran dengan Satpol PP Kabupaten/Kota dan unsur instansi yang terkait ; 2. Menyiapkan Tim Reaksi Cepat Penanganan Kebakaran ;	1. Melaksanakan Standarisasi Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Pemadam Kebakaran ; 2. Mengusulkan Sistem Informasi Kebakaran.
	Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Tugas Satpol PP dalam Pemenuhan SPM	1. Mengusulkan Sarana dan Prasarana yang belum memadai; 2. Menyiapkan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP tingkat Provinsi yang ditanda tangani Kepala Daerah.	1. Mengusulkan formasi CPNS Jabatan Fungsional Pol.PP 2. Melaksanakan Diklat Dasar Polisi Pamong Praja ; 3. Melaksanakan Diklat Kompetensi Intelijen ; 4. Melaksanakan Diklat Kompetensi Negosiator ; 5. Melaksanakan Diklat Kompetensi Penanganan Unjuk Rasa; 6. Mengajukan permintaan pendanaan yang memadai kepada Kepala Daerah atau Gubernur kalimantan Timur.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Renja yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur adalah menegakan Perda/Perkada,Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentaraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, dan Menyelenggarakan Pemetaan Rawan Kebakaran untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

- *Tujuan*

  Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi OPD bersifat spesifik, realistis dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai. Karakteristik tujuan adalah sebagai berikut :

  1. Selaras dengan Visi, Misi dan nilai-nilai luhur organisasi;
  2. Jelas dan mengarah pada kondisi yang ingin diperbaiki;
  3. Menggambarkan suatu hasil akhir yang akan diwujudkan oleh organisasi, BUKAN PROSES;
  4. Terkait dengan penilaian lingkungan secara internal, eksternal, dan isu strategis.

  Adapun tujuan dari Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur adalah "**Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas**".

- *Sasaran*

  Sasaran adalah sesuatu yang terarah dan terukur dari tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur. Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah "**Meningkatkan pelayanan terhadap Warga,Aparatur dan Badan Hukum**".

3.3. Program dan Kegiatan

Kegiatan adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi perangkat daerah atau pun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Penetapan prioritas Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur perlu diselaraskan dengan perkembangan makro ekonomi dan perkembangan kehidupan nasional secara umum. Karena itu perencanaan program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan inventarisasi dan evaluasi dari program dan Kegiatan yang telah ada sebelumnya khususnya untuk memberikan penajaman terdapat beberapa program yang masih perlu dilanjutkan, dikembangkan dan bahkan diperluas

cakupannya.

Memperhatikan masalah-masalah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu ditentukan strategi dan kebijakan yang dituangkan kedalam program - program dan kegiatan - kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebagai berikut :

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain :

a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatannya :

1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.
2. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.
3. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
4. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.
5. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

Sub Kegiatannya :

1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

Sub Kegiatannya :

1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.
2. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS.

d. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

Sub Kegiatannya :

1. Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran.
2. Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.
3. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Program Penunjang dan Kegiatannya. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas pada setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong PrajaProvinsi Kalimantan Timur. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatannya :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatannya :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.
2. Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.
4. Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatannya :

1. Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatannya :

1. Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatannya :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Sub Kegiatannya :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maka program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur, perlu didukung dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran pendapatan belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini melalu anggaran perubahan Tahun 2023. Rencana Kerja dan Pendanaan Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur pada Anggaran perubahan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Tahun 2023

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran SubKegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Catat an Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											28,434,198,616	55,672,154,104					22,422,040,125
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											22,856,788,616	24,857,604,704					20,772,039,905
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											750,100,000	780,935,280					411,103,000
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98%	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	284,776,000	284,776,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan publik pada tugas SatpolPP	98 %	275,000,000
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98%	100%	5 Laporan	5 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	465,324,000	496,159,280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan publik pada tugas SatpolPP	98 %	136,103,000
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											12,667,347,926	14,212,099,930					12,735,547,926
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Satpol PP	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	98%	100%	74 Orang	74 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	12,350,547,926	13,853,719,930	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan publik pada tugas SatpolPP	98 %	12,350,547,926
1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi PelaksanaanTugas ASN	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Satpol PP	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	316,800,000	358,380,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan publik pada tugas SatpolPP	98 %	385,000,000
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											605,383,100	605,383,100					637,824,000
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98%	100%	3 Paket	3 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	502,358,100	502,358,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan publik pada tugas SatpolPP	98 %	453,684,000

1	05	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	21,650,000	21,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan publik pada tugas SatpolPP	98 %	52,140,000
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsiyang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98%	100%	11 Orang	11 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	81,375,000	81,375,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan publik pada tugas SatpolPP	98 %	132,000,000
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,470,164,450	1,456,204,450					1,262,589,884
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98%	100%	1 Paket	1 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	10,842,400	10,842,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan publik pada tugas SatpolPP	98 %	15,400,000
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98%	100%	1 Paket	1 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	125,810,472	125,810,472	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan publik pada tugas SatpolPP	98 %	317,689,884
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98%	100%	4 Paket	4 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	32,887,000	32,887,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan publik pada tugas SatpolPP	98 %	49,500,000
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98%	100%	12 Laporan	12 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1,300,624,578	1,286,664,578	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan publik pada tugas SatpolPP	98 %	880,000,000
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											807,108,300	807,108,300					377,822,500
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98%	100%	39 Unit	39 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen	807,108,300	807,108,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan publik pada tugas SatpolPP	98 %	377,822,500
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											5,481,691,040	5,920,879,844					4,942,352,595
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98%	100%	12 Laporan	12 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	184,308,800	269,296,484	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan publik pada tugas SatpolPP	98 %	266,889,059
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98%	100%	12 Laporan	12 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	5,297,382,240	5,651,583,360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan publik pada tugas SatpolPP	98 %	4,675,463,536

							yang Disediakan	Pemerintah Daerah												
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,074,993,800	1,074,993,800				404,800,000
1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98%	100%	1 Unit	1 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen	26,831,000	26,831,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	98 %	16,500,000
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98%	100%	21 Unit	21 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen	408,762,000	408,762,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	98 %	124,300,000
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98%	100%	95 Unit	95 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen	29,860,000	29,860,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	98 %	44,000,000
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98%	100%	3 Unit	3 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen	609,540,800	609,540,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	98 %	220,000,000
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											5,225,960,000	30,471,499,400				1,430,000,220
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi											4,099,995,800	29,362,335,200				909,370,000
1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Aduan Warga, Aparatur dan Badan Hukum Terhadap Adanya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	100%	4 Kasus	4 Kasus	1 Dokumen	1 Dokumen	2,248,778,000	2,210,978,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif	95 %	365,153,800
1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Aduan Warga, Aparatur dan Badan Hukum Terhadap Adanya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	100%	1Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	259,200,000	259,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif	95 %	126,060,000

						yang Aktif														
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Aduan Warga, Aparatur dan Badan Hukum Terhadap Adanya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	797,594,000	26,097,733,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif	95 %	203,641,900
1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Jumlah Aduan Warga, Aparatur dan Badan Hukum Terhadap Adanya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	100%	30 Orang	30 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	752,405,600	752,405,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif	95 %	203,641,900
1	05	02	1.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Jumlah Aduan Warga, Aparatur dan Badan Hukum Terhadap Adanya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	100%	2 Laporan	2 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	42,018,200	42,018,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif	95 %	10,872,400
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur											845,888,150	833,288,150					337,218,200
1	05	02	1.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi, Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	100%	2 Laporan	2Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	240,993,100	236,793,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif	95 %	114,974,200

						yang Aktif														
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi, Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	100%	2 Laporan	2 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	239,984,500	239,984,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif	95 %	112,180,200
1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi, Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	100%	2 Laporan	2 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	364,910,550	356,510,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif	95 %	110,063,800
1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi											280,076,050	275,876,050					183,412,020
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Jumlah Dokumen Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	100%	2 Laporan	2 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	120,050,000	120,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif	95 %	52,021,200

1	05	02	1.03	02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	Jumlah Dokumen Pembinaan Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS) Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	160,026,050	155,826,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif	95 %	131,390,820
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN										351,450,000	343,050,000					220,000,000
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran										351,450,000	343,050,000					220,000,000
1	05	04	1.01	01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Persentase daerah rawan bencana	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota)Rawan Kebakarandan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	112,200,000	112,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase daerah rawan bencana	95 %	55,000,000
1	05	04	1.01	02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Persentase daerah rawan bencana	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	104,400,000	96,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase daerah rawan bencana	95 %	55,000,000
1	05	04	1.01	03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase daerah rawan bencana	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	57,550,000	57,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase daerah rawan bencana	95 %	55,000,000
1	05	04	1.01	04	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase daerah rawan bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	77,300,000	77,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase daerah rawan bencana	95 %	55,000,000
														TOTAL		28,434,198,616	55,672,154,104			22,422,040,125		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 merupakan suatu dokumen perencanaan yang bersifat taktis dan strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur merupakan dokumen tahunan sebagai dasar pelaksanaan dalam pembahasan perubahan APBD setiap tahunnya. Selain itu juga Dokumen Renja Perubahan juga sebagai pedoman dalam melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Lingkup Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur meliputi Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Kebakaran, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sekretariat.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur. Dengan Rencana Kerja (Renja) ini pula diharapkan sebagai dasar didalam melakukan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaporan atas capaian kinerja tahunan.

Akhirnya dengan terselesaikannya Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023, maka telah ditetapkan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Prov.Kaltim Tahun 2023, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas serta mendorong pencapaian tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun.

Samarinda, September 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

Arih Frananta Filifus Sembiring, S.IP
Pembina Utama Madya
NIP. 196905262016091001

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

Periode Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 akan memasuki tahap tahun ke empat dalam pelaksanaannya. Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagai tahun ke lima pelaksanaan Rencana Strategis, menjadi penentu keberhasilan Perangkat Daerah dalam mewujudkan visi dan misi melalui kebijakan-kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan dan direalisasikan dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Guna melanjutkan pelayanan Perangkat Daerah menuju pencapaian Rencana Strategis periode 2019-2023 dilakukan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja tahun 2023.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun berdasarkan perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Perubahan berbagai kebijakan secara otomatis menyebabkan beberapa penyesuaian baik itu pada sasaran pembangunan, arah kebijakan maupun program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

1.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode tahun ke 5 (Lima), yang mana merupakan penjabaran Renstra PD yang mengacu pada RKPD, yang akan memberikan gambaran tentang program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh PD dalam satu tahun anggaran, dan menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan PD sesuai Tupoksinya. Dengan muatan renja seperti program-program, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan perkiraan maju atau kebutuhan dana untuk tahun berikut.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019, Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1);
19. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu khususnya pada penanggulangan bencana di wilayah Kalimantan Timur guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah, maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat, meliputi :

a. Menjabarkan Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
b. Mengoptimalkan tugas dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

2. Tujuan

a. Sebagai *input* dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;

b. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kalimantan Timur khususnya BPBD Provinsi Kalimantan Timur;

c. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Kalimantan Timur;

d. Memberikan arah kebijakan dan strategi bagi seluruh aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Renstra PD tahun 2019-2023 yang dimanifestasikan kedalam program, kegiatan, dan sub kegiatan;

e. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh aparatur jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dengan penyesuaian pendanaan pagu indikatif;

f. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan singkronisasi Pembangunan baik antar dinas/instansi terkait, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hubungan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

g. Memberikan dasar dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan;

h. Menciptakan iklim Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good Governance*) dan dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas (*Performance Accountability Report*);

i. Mengoptimalkan kerjasama dan Kemitraan dengan Lembaga Usaha dan Organisasi Masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

j. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Kepala Badan (Kaban)/ Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Kalimantan Timur berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RENJA mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja.

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

BAB V Penutup

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Pencapaian Renja s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2022			Target kinerja dan anggaran Apbd Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Apbd Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023		Predikat	
									Triwulan-I		Triwulan-II							
(1)	(2)	(3)	(4)			(4)			(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	
			K		RP	K		RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1.05.0.00.0.00.03.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	16,324,851,961	-	-	24,975,947,220	-	3,943,723,506		12,581,434,449	-	12,581,434,449	-	50.37		
1.05.0.00.0.00.03.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	16,324,851,961	-	-	24,975,947,220	-	3,943,723,506		12,581,434,449	-	12,581,434,449	-	50.37		
1.05.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana	100	%	12,481,797,782	98	%	18,566,778,420	12	2,671,935,848		8,513,804,222		8,513,804,222		45.86		
1.05.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100	Persen	487,605,690	100	Persen	1,490,654,000	10	154,371,375	44.44	700,649,651	44.44	700,649,651		47.00		
1.05.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Dokumen	85,442,550	10	Dokumen	500,269,000	1	149,756,875	4	294,891,435	4	294,891,435		58.95		
1.05.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	5	Laporan	431,855,000	1	4,614,500	3	317,495,996	3	317,495,996		73.52		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10	Laporan	185,798,900													
1.05.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	3	Laporan	558,530,000	0	-	1	88,262,220	1	88,262,220		15.80		
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	3	Laporan	216,364,240													
1.05.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	Persen	7,348,345,595	100	Persen	9,662,338,660	25	1,576,389,196		4,350,199,825	25	4,350,199,825		45.02		
1.05.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	45	Orang/ Bulan	9,146,854,660	43	1,546,813,496		4,092,443,563	43	4,092,443,563		44.74		
		Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	12	Dokumen	7,115,005,595	-	-	-	-	-	-	-	0	-		-		
1.05.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	12	Dokumen	266,400,000	3	-		98,900,000	3	98,900,000		37.12		
		Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12	Dokumen	233,340,000													
1.05.001.1.02.003	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	Dokumen	-	12	Dokumen	111,404,000	3	1,994,500		70,967,038	3	70,967,038		63.70		
1.05.001.1.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	Dokumen	-	12	Dokumen	137,680,000	3	27,581,200		87,889,224	3	87,889,224		63.84		
1.05.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	Persen	-	100	Persen	639,697,000	0	-		533,935,000	0	533,935,000		83.47		
1.05.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	-	7	Paket	639,697,000	0	-		533,935,000	0	533,935,000		83.47		
1.05.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	2,098,558,320	100	Persen	1,717,268,580	11.74	177,776,946		1,051,387,144	11.74	1,051,387,144		61.22		
1.05.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	11	Paket	544,527,620	0	19,850,000		336,035,600	0	336,035,600		61.71		
		Jumlah Barang Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor	933	Unit	1,238,366,877													

1.05.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	12	Paket	274,892,400	3	24,916,000		118,837,400	3	118,837,400		43.23		
		Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Laporan	129,735,010													
1.05.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	176	Laporan	897,848,560	18	133,010,946		596,514,144	18	596,514,144		66.44		
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi	262	Laporan	730,456,433													
1.05.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	1,938,786,609	100	Persen	3,360,509,180	25	723,333,331		1,617,033,450	25	1,617,033,450		48.12		
1.05.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	293,706,253	12	Laporan	471,622,620	3	82,660,291		157,787,370	3	157,787,370		33.46		
1.05.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1,645,080,356	12	Laporan	2,888,886,560	3	640,673,040		1,459,246,080	3	1,459,246,080		50.51		
1.05.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100	Persen	608,501,568	100	Persen	1,696,311,000	0	40,065,000		260,599,152	0	260,599,152		15.36		
1.05.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	10	Unit	548,958,000	0	40,065,000		165,574,652	0	165,574,652		30.16		
		Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional	23	Unit	248,226,568													
1.05.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50	Unit	149,330,000	0	-		95,024,500	0	95,024,500		63.63		
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	50	Unit	52,005,000													
1.05.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8	Unit	998,023,000	0	-		-	0	-		-		
		Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	506	m2	308,270,000													
1.05.003	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	82.67	%	3,843,054,179	100	%	6,409,168,800	20	1,271,787,658		4,067,630,227	20	4,067,630,227		63.47		
1.05.003.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan	100	Persen	1,168,123,438	100	Persen	80,232,000	0	9,964,000		9,964,000	0	9,964,000		12.42		
1.05.003.1.01.001	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah laporan kegiatan	-	-	-	1	laporan	80,232,000	0	9,964,000		9,964,000	0	9,964,000		12.42		
		Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	-	-		0	Dokumen		0				0	-		#DIV/0!		
		Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang tersusun	1	Dokumen	1,168,123,438													
1.05.003.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	persen	1,611,735,745	100	persen	3,101,850,900	16	496,259,740		1,887,802,324	16	1,887,802,324		60.86		
1.05.003.1.02.003	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0	0	-	12	Dokumen	340,237,100	3	780,000		138,155,000	3	138,155,000		40.61		
		Jumlah Laporan Pendataan, Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan Penyebaran Informasi Kebencanaan	12	laporan	272,169,710													
		Jumlah Pilot Drone tersertifikasi	8	orang														
1.05.003.1.02.004	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	-	-	-	6272	Unit	1,270,384,000	3022	440,581,200		1,231,422,900	3022	1,231,422,900		96.93		
1.05.003.1.02.006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	-	-	-	13	Kawasan	571,161,000	2	32,148,540		361,217,940	2	361,217,940		63.24		
		Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk	12	desa/kelurahan	431,296,218													

	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana	5	Laporan	660,683,397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.05.003.1.02.008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	0	0	-	120	orang	821,068,800	0	3,000,000		117,230,000	0	117,230,000		14.28		
		Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)	30	orang	247,586,420													
1.05.003.1.02.010	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	0	0	-	2	Laporan	99,000,000	0	19,750,000		39,776,484	0	39,776,484		40.18		
1.05.003.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	100	Persen	910,225,396	100	Persen	1,341,910,900	21.14	283,672,200		1,069,485,263	21.14	1,069,485,263		79.70		
1.05.003.1.03.002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	-	-	-	12	Laporan	533,818,100	3	188,681,400		392,357,996	3	392,357,996		73.50		
		Jumlah Laporan Respon Cepat Penanganan Bencana	12	Laporan	395,387,403													
1.05.003.1.03.004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	-	500	Orang	808,092,800	0	94,990,800		677,127,267	0	677,127,267		83.79		
		Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia	12	Laporan	514,837,993													
		Jumlah Kebutuhan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia	398	Bahan Logistik														
1.05.003.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100	Persen	152,969,600	100	Persen	1,885,175,000	25.56	481,891,718		1,100,378,640	25.56	1,100,378,640		58.37		
1.05.003.1.04.002	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	-	-	-	2	Dokumen	554,675,000	0	47,925,764		254,662,659	0	254,662,659		45.91		
1.05.003.1.04.004	Pengelolaan dan Pemanfaatan	Jumlah Data dan Informasi	-	-	-	1	Dokumen	111,500,000	0	32,507,600		96,941,461	0	96,941,461		86.94		
		Jumlah Pengembangan Aplikasi Informasi Kebencanaan	1	Aplikasi	152,969,600													
1.05.003.1.04.005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	-	-	-	2	Laporan	188,000,000	0	-		62,976,035	0	62,976,035		33.50		
1.05.003.1.04.007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	-	-	-	1	Dokumen	1,031,000,000	0	401,458,354		685,798,485	0	685,798,485		66.52		

Secara keseluruhan pada pelaksanaan Rencana kerja tahun 2023, sudah dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan pada beberapa sub kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, sedangkan pada tahun 2022 untuk capaian realisasi kinerja pembangunan telah optimal dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam mencapai target yang ditentukan.

a. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan

   Beberapa hal yang mempengaruhi antara lain :

   1. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang tertuang di dalam rencana strategis BPBD Provinsi Kalimantan Timur masih sangat terbatas.
   2. Belum semua Kabupaten / Kota dan Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota.

b. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

   Dengan adanya beberapa hal yang mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan diatas, tentunya berpengaruh terhadap capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur khusus percepatan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 pada pencapaian target yang telah ditetapkan. Untuk itu, perlu penyesuaian pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur (*Review*) secara berkala.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian kinerja pelayanan tahun 2022 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Dalam rangka melaksanakan arah atau tema pembangunan yang tercantum dalam RPJMD 2018 - 2023 Provinsi Kalimantan Timur yaitu terkait investasi suatu wilayah atau kawasan yaitu memberikan keadaaan kondusif terkait manajemen penanggulangan bencana pada wilayah atau kawasan pembangunan.
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan upaya mitigasi atau pengurangan terhadap dampak lingkungan sebagai akibat dari bencana, yaitu dengan meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana, pemaduan program/kegiatan/sub kegiatan, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksana kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.
3. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang handal di Kalimantan Timur, yaitu dengan peningkatan responsif mandiri daerah dalam penanganan bencana saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana, kemandirian wilayah atau daerah dalam upaya penanggulangan bencana secara dini, serta manajemen data dan informasi kebencanaan.
4. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, yaitu dengan membangun komitmen bersama para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	2022	2023	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
I	**Indikator Sasaran**											
	Prosentase desa/kelurahan tangguh bencana			61,33%	66,67%	82,67%	100%	61,33%	62,67%	82,67%	100%	Penguatan Kapasitas kawasan yaitu dengan pembentukan Desa / Kelurahan Tangguh Bencana di tahun 2021 dilaksanakan di 2 kab/Kota yaitu kota Samarinda dibentuk Destana Kelurahan Bandara, dan Kelurahan Teluk Lerong Ulu, kemudian Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu destana Sungai Meriam dan Desa Anggana.
1	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan	YA		-	100%	100%	100%	-	88,76%	100%	100%	Penyusunan Rencana Kontenjensi (Renkon) Kab/ Kota, yaitu pendampingan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 penyusunan Renkon Longsor Kota Balikpapan.
2	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	YA		-	100%	100%	100%	-	80%	100%	100%	(1). Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dianggarkan pada tahun 2021, kemudian dilakukan revisi rincian belanja, memperhatikan terhadap kecukupan waktu dan berdasarkan informasi bahwa BNPB dalam proses penyusunan KRB Prov. Kaltim, dimana dokumen tersebut akan diserahkan pada bulan Desember 2021 maka oleh BPBD Prov. Kaltim penyusunan dokumen KRB Prov. Kaltim tidak dilanjutkan. (2). Pengumpulan dan penyampaian data dan informasi kebencanaan Kab/Kota. (3) Kaji Kebutuhan saat tanggap darurat bencana
3	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	YA		-	100%	100%	100%	-	94,60%	100%	100%	
4	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	YA		-	100%	100%	100%	-	79,36%	100%	100%	

Terhadap ketercapaian terhadap target kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 dengan tahun 2023 tidak dapat disandingkan khususnya pada nomeklatur program, kegiatan dan sub kegiatan disebabkan telah diterapkan Permendagri nomor 90 Tahun 2019, sehingga terdapatnya perbedaan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan. Namun berdasarkan pada indikator kinerja program sesuai dengan target yang dicapai yaitu yang sebesar 66,67% dengan ketercapaian 66,67% (100%), tolak ukur terhadap indikator ini lebih difokuskan pada satu kegiatan Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Kegiatan yang ditujukan untuk penguatan dan pengembangan kemandirian wilayah dalam upaya penanggulangan bencana.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

a. Tingkat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai dengan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2009, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil, setara dan tepat sasaran;
2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana;
7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 ditetapkan 1 (satu)

Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu :

1) Prosentase desa/kelurahan tangguh bencana
2) Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah Dalam Penanganan Bencana

Kemudian dilakukan penyesuaian / perubahan dengan didasarkan pada RPJMD P 2019-2023 Provinsi Kalimantan Timur, serta berdasarkan pada penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan maka sasaran strategis BPBD Provinsi Kalimantan Timur dilakukan penyesuaian 1 (satu) sasaran strategis dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu persentase desa / kelurahan tangguh bencana.

b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan analisa faktor-faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang dimiliki serta dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1) **Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana**, hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dan jumlah sumberdaya manusia dalam pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan, keadaan tanggap darurat serta upaya

rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan masalah yang dihadapi antara lain adalah: (1) Belum maksimalnya kinerja aparatur kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; dan (2) Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya (3) Basis data yang tidak termutakhirkan dan telah dilakukan pengadministrasian secara reguler; (4) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang belum akurat; (5) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial; (6) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta (7) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

2) **Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana**, meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain: (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif; (3) Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan

dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah; keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang bersumber pada alokasi pemerintah daerah.

3) **Meningkatnya jumlah kejadian bencana setiap tahunnya,** hal yang sama tentu diikuti dengan dampak yang ditimbulkan. Perlu adanya pengembangaan kemandirian masyarakat dalam upaya menghadapi bencana.

c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023, Visi Provinsi Kalimantan Timur adalah :

"Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat"

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah misi Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan cita-cita Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Timur, dengan mendukung misi pemerintah provinsi Kalimantan Timur yaitu **" Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan",** dengan sasaran Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana (Sasaran ke 16) Keterkaitan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Disamping permasalahan-permasalahan seperti pada *point* b diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

1) Melaksanakan sosialisasi peraturan dan perundangan serta mengembangkan *sains* (pengetahuan), teknologi dan informasi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2) Meningkatkan koordinasi badan penanggulangan bencana daerah dengan Instansi Pusat dan Daerah dengan memanfaatkan fasilitasi, bantuan teknis dan dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan menambah sarana prasarana penunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4) Memperluas kerjasama dengan Pemerintah, TNI/ POLRI, Akademisi, Swasta, LSM, Ormas, dan masyarakat (*Pentaheliks*) untuk penanggulangan bencana.
5) Membuat, memperbanyak dan mendistribusikan kepada masyarakat pedoman-pedoman singkat yang mudah dimengerti tentang cara penyelamatan dalam menghadapi atau saat bencana.

6) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana.
7) Mendayagunakan kemampuan secara maksimal dengan melibatkan peran *multihelix*, melakukan mobilisasi, modifikasi untuk mengantisipasi perubahan kondisi sosial ekonomi yang dapat memberikan dampak timbulnya bencana.
8) Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kebencanaan untuk meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap bencana melalui media.
9) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang handal dan memadai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang kebencanaan yang baik.
10) Mengembangkan inovasi untuk sosialisasi dan promosi kepada masyarakat guna meningkatkan kepedulian terhadap usaha-usaha penanggulangan bencana, baik pada saat tidak ada bencana, tanggap darurat maupun pascabencana.
11) Mendayagunakan kapasitas yang ada dan sarana prasarana yang tersedia untuk promosi kegiatan penanggulangan bencana.
12) Menganalisis data dan informasi *hazard* dan risiko yang ada untuk mengkaji perubahan kondisi sosial-ekonomi yang dapat berdampak negatif ataupun menimbulkan bencana.

2.4 *REVIEW* TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal Renja 2023 mengacu pada RPJMD Perubahan Tahun 2019-2023 Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan rancangan RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023. *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Lampiran Tabel 2.3

Tabel 2.3 Rancangan Awal Renja Tahun 2023
BPBD Provinsi Kalimantan Timur

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	BPBD	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana	95%	14.135.490.368	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	BPBD	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana		
2.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	82,67%	3.364.509.632	Program Penanggulangan Bencana	BPBD	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana		

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023, yang kemudian akan dipaparkan melalui forum perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi Kalimantan Timur bersama Perangkat Daerah lain yaitu khususnya ditekankan pada standar pelayanan minimal (SPM) kebencanaan, pada tabel 2.4

Tabel 2.4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Pelayanan ke Masyarakat

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volumen	Catatan
	Program Penanggulangan Bencana				
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
1.	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	10 Kab/Kota	Jumlah Laporan Pendetaan, Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan PenyebaranInformasi Kebencanaan	12 Laporan	assesmen / pendataan wilayah terdampak bencana, data dan informasi kebencanaan
2.	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk	13 desa/ kelurahan	Pembentukan relawan, pengembangan kemandirian masyarakat terhadap bencana
3.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Kab. PPU	Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)	30 Peserta	Peningkatan Kapasitas tim reaksi cepat kab/ Kota
	Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
1.	Sub Kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	10 Kab/Kota	Jumlah Laporan Respon Cepat Penanganan Bencana	12 Laporan	Pengerahan tenaga penanganan bencana dan peralatan penanganan ke wilayah terdampak bencana
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Kab/Kota	Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia	12 Laporan	Penyedian dan pemberian bantuan logistik kebutuhan terdampak bencana

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Ditingkat nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Sekretariat Utama dan bersama-sama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melaksanakan amanat Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu mengintegrasikan kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMN pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2020-2024 menitikberatkan pada *upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan iklim serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon*.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, sesuai amanat Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, adalah berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal selanjutnya, Pasal 3, disebutkan bahwa asas-asas pokok dalam penanggulangan bencana meliputi; asas kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; ketertiban dan kepastian hukum; kebersamaan; kelestarian lingkungan hidup; dan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara prinsip-prinsip penanggulangan bencana mencakup prinsip cepat dan tepat; prioritas; koordinasi dan keterpaduan; berdaya guna dan

berhasil guna; transparansi dan akuntabilitas; kemitraan; pemberdayaan; *non*-diskriminatif; dan *non* - proletisi.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini, sesuai ketentuan Pasal 6, meliputi pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; pemulihan kondisi dari dampak bencana; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik, dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur, dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah dimana kewenangan pemerintah daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku SKPD yang bergerak di bidang kebencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berpedoman kepadanya.

Dalam situasi normal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota lebih menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksana kegiatan pencegahan, pengurangan risiko bencana, dan kesiapsiagaan.

Dalam situasi darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjalankan fungsi komando, koordinasi, dan sekaligus pelaksana kegiatan tanggap darurat. Dalam situasi ini BPBD dapat mengatur instansi-instansi sektoral dalam operasi tanggap darurat dalam situasi tanggap darurat bencana.

Dalam situasi pasca bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali menjalankan fungsinya dalam hal koordinasi dan pelaksana kegiatan-kegiatan pemulihan, sementara fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawab instansi-instansi sektoral tetap dilaksanakan oleh sektor masing-masing. Pelaksanaan penanggulangan bencana di pusat maupun daerah akan memerlukan koordinasi dengan semua sektor dan unsur masyarakat. Pembagian peran di antara para pemangku kepentingan pengurangan resiko bencana juga akan menjadi hal yang diatur melalui Rencana Strategis BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Rancangan Awal Rencana Kinerja Tahun 2023 pada Badan Penanggulangan bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak lepas dari tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang telah dirumuskan yaitu sesuai dengan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023, dimana sebagai dasar Penyusunan Kebijakan, Program, Indikator (tolok ukur kinerja) kegiatan BPBD Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan Gubernur Kalimantan Timur. Sesuai dengan Sasaran strategis RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu "Meningkatnya ketangguhan menghadapi bencana (Sasaran ke 16), maka Tujuan Rencana Strategis Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur (2019 - 2023) adalah :

"Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana", peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui kegiatan : 1) pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana, 2) peningkatan responsif mandiri daerah dalam penanganan bencana, pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta alat transportasi yang memadai dengan basis yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, dan 3) pemulihan baik rehabilitasi atau rekonstruksi pasca bencana;

sasaran Sejalan dengan sasaran pembangunan daerah berdasarkan Visi ***"Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat"*** pada Misi Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan. Maka sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam waktu 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Mengurangi Risiko Bencana	Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	85%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai langkah operasionalisasi arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, maka program yang akan di laksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan serta anggaran yang tersedia. Usulan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 meliputi, yaitu :

3.3.1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, kegiatan meliputi antara lain:

3.3.1.1 Kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat pada Subbag Umum, Subbag Penyusunan Program dan Subbag Keuangan ;

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri sub Kegiatan antara lain :

1. Penyusunan dokumen Perencanaan perangkat daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri sub Kegiatan antara lain :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik kantor
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

3.3.2. Program Penanggulangan Bencana Daerah.

Selanjutnya dalam kegiatan pokok sebagai penjabaran program dalam rangka penanggulangan bencana Tahun 2023, berdasarkan kepada bidang pelaksana adalah:

3.3.2.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

1. **Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi,** pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

3.3.2.1 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, meliputi sub kegiatan :

1. **Pengendalian operasi dan penyediaan Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana**, pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik
2. **Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan bencana**, pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3. **Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana**, pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

4. **Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi cepat (TRC) bencana**, pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik
5. **Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana,** pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

3.3.2.2 Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, meliputi sub kegiatan :

1. **Respon cepat penanganan Darurat Bencana,** pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik
2. **Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana,** pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik

3.3.2.3 Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, meliputi sub kegiatan :

1. **Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah,** pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2. **Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan**, pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3. **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi,** pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

4. **Penanganan Pasca Bencana Provinsi,** pelaksana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruks

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA dan pendanaan perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel. 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode					Urusan / Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju	
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**17,203,039,000**	**24,975,947,220**	**46,285,178,120**			
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana	98 %	98 %	**14,123,408,500**	**18,566,778,420**	**18,912,198,420**			
1	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	**742,800,000**	**1,490,654,000**	**1,515,554,000**			
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	271,000,000	500,269,000	500,269,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	5 Laporan	5 Laporan	318,800,000	431,855,000	431,855,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	153,000,000	558,530,000	583,430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	**9,327,309,672**	**9,662,338,660**	**9,689,698,660**			
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	8,899,049,672	9,146,854,660	9,146,854,660	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		
1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	312,720,000	266,400,000	293,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		
1	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	45,700,000	111,404,000	111,404,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		

1	05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	69,840,000	137,680,000	137,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		
1	**05**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	**53,100,000**	**639,697,000**	**639,697,000**			
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	7 Paket	7 Paket	53,100,000	639,697,000	639,697,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		
1	**05**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	**1,050,067,000**	**1,717,268,580**	**1,944,411,080**			
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	174,815,000	544,527,620	616,252,720	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	130,652,000	274,892,400	329,509,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176 Laporan	176 Laporan	744,600,000	897,848,560	998,648,560	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		
1	**05**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	**2,014,986,408**	**3,360,509,180**	**3,375,511,680**			
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	340,800,000	471,622,620	486,625,120	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1,674,186,408	2,888,886,560	2,888,886,560	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		
1	**05**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	100 Persen	**935,145,420**	**1,696,311,000**	**1,747,326,000**			
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	346,000,600	548,958,000	599,973,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		

1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	239,144,820	149,330,000	149,330,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		
1	05	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	350,000,000	998,023,000	998,023,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA**	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	100 %	100 %	**3,079,630,500**	**6,409,168,800**	**27,372,979,700**			
1	**05**	**03**	1.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan	100 Persen	100 Persen	**61,232,000**	**80,232,000**	**383,413,900**			
1	05	03	1.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi Jumlah laporan kegiatan	1 laporan	1 Dokumen 1 laporan	61,232,000	80,232,000	383,413,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		
1	**05**	**03**	1.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 persen	100 persen	**1,452,634,500**	**3,101,850,900**	**12,967,639,900**			
1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 Dokumen	12 Dokumen	266,267,000	340,237,100	10,206,026,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		
1	05	03	1.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	6272 Unit	6272 Unit	118,768,000	1,270,384,000	1,270,384,000	Kab. Berau Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegar Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara Semua Kecamatan Semua Kelurahan		

1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	13 Kawasan	13 Kawasan	665,072,000	571,161,000	571,161,000	Kab. Berau Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		
1	05	03	1.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	120 orang	120 orang	302,527,500	821,068,800	821,068,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		
0	05	03	1.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	2 Laporan	2 Laporan	100,000,000	99,000,000	99,000,000	Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan		
1	**05**	**03**	1.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	100 Persen	100 Persen	**608,191,000**	**1,341,910,900**	**1,341,910,900**			
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	12 Laporan	361,255,000	533,818,100	533,818,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	500 Orang	500 Orang	246,936,000	808,092,800	808,092,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		
1	**05**	**03**	1.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	100 Persen	**957,573,000**	**1,885,175,000**	**12,680,015,000**			
1	05	03	1.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	554,675,000	849,515,000	Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan		
1	05	03	1.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	112,500,000	111,500,000	111,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		
1	05	03	1.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	2 Laporan	2 Laporan	190,000,000	188,000,000	188,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		
1	05	03	1.04	07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	555,073,000	1,031,000,000	11,531,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		
TOTAL									**17,203,039,000**	**24,975,947,220**	**46,285,178,120**			

BAB V

PENUTUP

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BPBD) Tahun 2023 disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis Tahun 2019 – 2023, sebagai Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019 - 2023 Provinsi Kalimantan Timur, yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana.

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA 2023 ini akan memberikan peran dalam meningkatkan koordinasi berkaitan dengan tugas-tugas kebencanaan dan senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi masyarakat umum terutama masyarakat Kalimantan Timur. Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja 2023 ini yaitu :

1. Pelaksanaan yang didasarkan / berbasis pada kinerja, diperlukannya penambahan sub kegiatan untuk mendukung terhadap penyelenggaraan kegiatan kebencanaan.
2. Masih terdapatnya kegiatan atau sub kegiatan pendukung terhadap program prioritas yang belum dapat dilaksanakan, disebabkan masih kurangnya pemahaman dalam penyusunan rencana kerja ke dalam aplikasi SIPD.

3. Kesulitan dalam perumusan / perhitungan tolak ukur indikator kegiatan terhadap target yang akan dicapai.

Masih perlunya penyesuaian / perbaikan terhadap RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA Perangkat Daerah Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023.

Samarinda, Juli 2023
Kepala Pelaksana,

Drs. Agus Tianur, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650814199

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**17,203,039,000**	**24,975,947,220**	**46,285,178,120**							**17,840,820,696**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana	%		%	98 %	98 %	**14,123,408,500**	**18,566,778,420**	**18,912,198,420**						98 %	**14,276,311,064**	
1	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**742,800,000**	**1,490,654,000**	**1,515,554,000**						100 Persen	**742,800,000**	
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	271,000,000	500,269,000	500,269,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Dokumen	271,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	318,800,000	431,855,000	431,855,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Laporan	318,800,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	153,000,000	558,530,000	583,430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Laporan	153,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**9,327,309,672**	**9,662,338,660**	**9,689,698,660**						100 Persen	**9,468,130,368**	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	8,899,049,672	9,146,854,660	9,146,854,660	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				45 Orang/ Bulan	9,155,410,368	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	312,720,000	266,400,000	293,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	312,720,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	45,700,000	111,404,000	111,404,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	69,840,000	137,680,000	137,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**53,100,000**	**639,697,000**	**639,697,000**						100 Persen	**53,780,000**	
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				7 Paket	7 Paket	53,100,000	639,697,000	639,697,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	7 Paket	53,780,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,050,067,000**	**1,717,268,580**	**1,944,411,080**						100 Persen	**1,050,614,288**	
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	174,815,000	544,527,620	616,252,720	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					11 Paket	175,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	130,652,000	274,892,400	329,509,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					12 Paket	130,664,288	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				176 Laporan	176 Laporan	744,600,000	897,848,560	998,648,560	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				176 Laporan	744,950,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,014,986,408**	**3,360,509,180**	**3,375,511,680**						100 Persen	**2,014,986,408**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	340,800,000	471,622,620	486,625,120	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	340,800,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,674,186,408	2,888,886,560	2,888,886,560	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					12 Laporan	1,674,186,408	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**935,145,420**	**1,696,311,000**	**1,747,326,000**						100 Persen	**946,000,000**	
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	346,000,600	548,958,000	599,973,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	346,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	239,144,820	149,330,000	149,330,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Unit	250,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	350,000,000	998,023,000	998,023,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Unit	350,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	%		%	100 %	100 %	**3,079,630,500**	**6,409,168,800**	**27,372,979,700**						100 %	**3,564,509,632**	
1	**05**	**03**	1.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**61,232,000**	**80,232,000**	**383,413,900**						100 Persen	**320,000,000**	
1	05	03	1.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi Jumlah laporan kegiatan				1 laporan	1 Dokumen 1 laporan	61,232,000	80,232,000	383,413,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen 1 laporan	320,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**05**	**03**	1.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,452,634,500**	**3,101,850,900**	**12,967,639,900**						100 persen	**1,476,265,000**	
1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				12 Dokumen	12 Dokumen	266,267,000	340,237,100	10,206,026,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	290,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	1.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana				6272 Unit	6272 Unit	118,768,000	1,270,384,000	1,270,384,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6272 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				13 Kawasan	13 Kawasan	665,072,000	571,161,000	571,161,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13 Kawasan	760,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana				120 orang	120 orang	302,527,500	821,068,800	821,068,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				120 orang	326,265,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi				2 Laporan	2 Laporan	100,000,000	99,000,000	99,000,000	Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	1.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**608,191,000**	**1,341,910,900**	**1,341,910,900**						100 Persen	**655,744,632**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				12 Laporan	12 Laporan	361,255,000	533,818,100	533,818,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	385,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				500 Orang	500 Orang	246,936,000	808,092,800	808,092,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	500 Orang	270,744,632	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	1.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**957,573,000**	**1,885,175,000**	**12,680,015,000**						100 Persen	**1,112,500,000**	
1	05	03	1.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	554,675,000	849,515,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan				1 Dokumen	1 Dokumen	112,500,000	111,500,000	111,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	112,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi				2 Laporan	2 Laporan	190,000,000	188,000,000	188,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	250,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.04	07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	555,073,000	1,031,000,000	11,531,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	650,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TOTAL												**17,203,039,000**	**24,975,947,220**	**46,285,178,120**							**17,840,820,696**	

BERITA ACARA KESEPAKATAN
FORUM PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Samarinda, 30 Maret 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah diselenggarakan secara Tatap Muka di Hotel Harris Kota Samarinda dan melalui *Virtual* (*Zoom Cloud Meeting*) Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang dihadiri oleh Para Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum pada daftar hadir peserta dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah mendengar, memperhatikan dan mempertimbangkan :

1. Arahan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Yudha Pranoto, SE
2. Penyampaian materi oleh Bapak Yudha Pranoto, SE, dari BPBD Provinsi Kalimantan Timur mengenai Rencana Strategis BPBD 2019 - 2023.
3. Penyampaian materi oleh Bapak Dr. Ir. H. M. Aswin, MM, dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur mengenai Strategi & Arah Kebijakan Pemprov Kaltim dalam pengurangan Resiko Bencana & Peningkatan Kualitas Wilayah Siaga Bencana
4. Penyampaian materi oleh Bapak Yaser, SE., M.Si, dari BPBD Provinsi Kalimantan Timur mengenai Rencana Awal Rencana Kerja.
5. Tanggapan dan Masukan dari Peserta Forum Perangkat Daerah Urusan Penanggulangan Bencana terhadap materi yang disampaikan.

Seluruh peserta Forum Perangkat Daerah Urusan Penanggulangan Bencana Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

MENYEPAKATI

Kesatu	:	Rencana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 akan dilakukan penyempurnaan dengan memperhatikan hasil evaluasi, permasalahan utama pembangunan dan isu strategis daerah;
Kedua	:	Rencana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 akan dilakukan penyelarasan dengan Rencana Kerja BPBD Kabupaten / Kota dan BNPB;
Ketiga	:	Menyampaikan kepada BNPB hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah dalam rangka dukungan terhadap Rencana Kerja BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten /Kota Provinsi Kalimantan Timur;
Keempat	:	Penyelarasan rencana kerja Tahun 2023 akan dilakukan melalui Forum Perangkat Daerah, Rapat Koordinasi Daerah, dan Musyawarah khusus BPBD Se-Kalimantan Timur Instansi/lembaga terkait /lintas sektor;
Kelima	:	Standar Palayanan Minimal (SPM) terkait penyediaan data, dan Informasi Kebencanaan akan dilakukan sinkronisasi antara BPBD Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota, dengan pemangku kepentingan;
Keenam	:	Diupayakan urusan kebencanaan pada Perangkat Daerah *non* urusan kebencanaan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dijalankan.

No.	Institusi	Nama/Jabatan	Tanda tangan
12.	Dinas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kab. Mahakam Ulu	....	.....
13.	Dinas Sosial Prov. Kaltim	....	.....
14.	Dinas Komunikasi dan Informasi Prov. Kaltim	....	.....
15.	Dinas Kesehatan Prov. Kaltim		.....
16.	Dinas PU, Penataan Ruang & Perum Rakyat Prov. Kaltim	....	.....
17.	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim	....	.....
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Prov. Kaltim	....	.....
19.	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim	....	.....
20.	Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	Hadi Waluyo, S.Hut Kasubbag Renram	.....
21.	Dinas Pendidikan dan Kebudaya Prov. Kaltim	....	.....
22.	Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	....	.....
23.	Badan Kesatuan Bangsa dan politik Prov. Kaltim	....	.....

No.	Institusi	Nama/Jabatan	Tanda tangan
24.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kaltim	....	.....
25.	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kaltim	....	.....
26.	Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	Mohammad Rayani, S.SiT Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan	
27.	Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kaltim	....	.....
28.	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Kaltim	....	.....
29.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim	M. Ramadhani	.....
30.	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim	....	.....
31.	Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim	....	.....
32.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim	....	.....
33.	Inspektorat Prov. Kaltim	....	.....
34.	Badan Kepegawaian Daerah	....	.....
35.	Universitas Mulawarman (Pihak Akademisi)	....	.....
36.	Ketua Asosiasi Pengusaha Provinsi Kalimantan Timur	....	.....

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 300/ 78 /BPBD- I/ 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengembalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengendalian Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengembalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengendalian Daerah, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

c. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka dipandang perlu membentuk panitia dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan becana;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengembalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengendalian Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing *Non* Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Menyusun bahan-bahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023;
b. Mengadopsi Data SIPD SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
c. Membuat Matrik Rencana Anggaran Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023;
d. Melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Diktum PERTAMA Tim berpedoman pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA - SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : Januari 2023

Kepala Pelaksana,

H.M. Agus Hari Kesuma, SE., MM., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199203 1 017

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
NOMOR : 300/ 78 /BPBD-I / 2023
TANGGAL : Januari 2023

No	Nama	Jabatan Kegiatan
1	Drs. Agus Tianur, M.Si	Pengarah
2	Yasir, S.E., M.Si.	Ketua
3	A. Rafiq, S. Sos	Sekretaris
4	Tresna Rosano, SE	Koordinator Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
5	Rudi Syafriadi, S.H	Koordinator Bidang Kedaruratan dan Logistik
6	Andik Wahyudi, ST., M.M., M.T	Koordinator Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
7	M Fahrijal Ihsan, S.Pd	Koordinator Sekretariat
8	M. Bakriansyah, S.Hut	Koordinator Rencana Kerja
10	Renita, S.Hut	Koordinator Pengumpul/pengolah/*entry* data

Kepala Pelaksana,

H.M. Agus Hari Kesuma, SE., MM., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199203 1 017

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA P) merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun, sebagai Dokumen Rencana Tahunan, RENJA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan Program dan Kegiatan Tahunan mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari Visi, Misi dan Program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA PD merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan Program dan Kegiatan ke dalam KUA - PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2022;
3. RENJA PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan Program / Kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis RENJA dalam mendukung Penyelenggaraan Program Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan Dokumen Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Disusun berpedoman pada Resntra Perangkat Daerah, hasil evaluasi RENJA Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil RENJA perangkat daerah tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 - 2023;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Sosial Sesuai dengan Rencana Strategi yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Sosial;
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Sosial;
4. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Pemberdayaan Sosial;
5. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
6. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Bantuan dan Jaminan Sosial.
7. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

10. Pelaksana Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mempunyai peran yang strategis dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial dengan visi ***"TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL"***

Nilai-nilai inti yang terkandung dalam pernyataan visi tersebut adalah **Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial** artinya kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Untuk dapat mewujudkan visi dilakukan dengan cara mendorong efektitifitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, dengan menetapkan misi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang didalamnya terdapat tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi Dinas Sosial Provinsi kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial;
2. Meningkatkan keberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu ke depan (Kapan)

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan sosial;

2. Meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. Meningkatkan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan (PMKS);
4. Meningkatkan Keberdayaan Sumber Daya Aparatur.

1.2. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur didalam menyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kessos;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013 - 2018 Provinsi Kalimantan Timur;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
18. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan tahun 2023, dan mensikronkan serta mensinergikan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Prov. Kaltim Tahun 2023 dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

1.4. Sistimatika Penulisan

Sistimatika penulisan dan garis besar isi dokumen Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN
   - 1.1. Latar Belakang;
   - 1.2. Dasar Hukum;
   - 1.3. Maksud dan Tujuan;
   - 1.4. Sistimatika Penulisan.

2. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA DINAS SOSIAL PROV. KALIMANTAN TIMUR
   - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra;
   - 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD;
   - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur;
   - 2.4. Review Terhadap rancangan awal SKPD;
   - 2.5. Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat.

3. BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
   3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
   3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD;
   3.3. Program dan Kegiatan.

4. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
   4.1 Rencana Kerja dan Penganggaran Dinas Sosial Prov Kaltim

5. BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantanm Timur Tahun 2022 dan Capaian Renstra (2019 - 2023).

Capaian kinerja pembangunan tahun 2022 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan baik dalam DPA maupun DIPA dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2022 sebagian besar telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

1. Dari 5 program/ kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat terdapat capaian/realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :
   a. Program Pemberdayaan Sosial;
   b. Program Rehabilitasi Sosial;
   c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
   d. Program Penanganan Bencana;
   e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi dan telah direncanakan adalah sebagai berikut:
   a. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi;
   b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti;
   c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
   d. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi;
   e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi;
   f. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.

3. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi dari yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:
   a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
   b. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti;
4. Realisasi program/kegiatan yang melebihi dari target yang telah direncanakan adalah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi;
5. Faktor pendukung terpenuhinya target kinerja disebabkan adanya kebijakan keselarasan dan penyerasian program/kegiatan antara pusat dan Provinsi serta Kabupaten/Kota se - Kalimantan Timur.
6. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan adalah :
   a. Provinsi Kalimantan Timur memiliki sebaran penduduk yang belum merata serta aksesbilitas ke lokasi sasaran PMKS belum memadai;
   b. Kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan Anggaran.
7. Faktor-faktor penyebab target melebihi dari target yang telah direncanakan adalah :
   a. Provinsi Kalimantan Timur yang sangat luas dan rawan terjadinya bencana di setiap Kabupaten dan Kota;
   b. Relaisasi kinerja melebihi target dikarenakan tidak bisanya mempredikisi bencana yang terjadi di Kalimantan Timur dalam satu tahun dan berapa jumlah pemberian bantuan kepada korban bencana seperti banjir, kebakaran, longsor dan lain lain.

8. Implikasi yang timbul dari capaian program Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah meningkatnya fungsi sosial dan peranan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dimasyarakat yang pada gilirannya memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta penurunan tingkat pengganggguran terbuka. Selain itu sumber Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dapat digali serta didayagunakan secara maksimal untuk menjadi mitra dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
9. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan dengan melakukan revisi atau pergeseran anggaran kegiatan.

Tabel 1 (T-C.29). Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kinerja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2022 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2018	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2020			Target/Program Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2022		Catatan
						Target	Realisasi	%		Realisasi Capaian	%	
1	**2**		**3**	**4**	5	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**	12
1.06.1.06.01.07	**1**	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**									
1.06.1.06.01.07.01		Pelaksanaan Adminitrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	60 Bulan	12	12	12	100	12	48	80	
1.06.1.06.01.08	**2**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**									
1.06.1.06.01.08.01		Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pengadaan Peralatan dan kelengkapan kantor	105 Unit	21	21	21	100	21	84	80	
1.06.1.06.01.08.02		Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor yang di pelihara	60 Bulan	12	12	12	100	12	48	80	
1.16.1.06.01.09	**3**	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**	**Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2018	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2020			Target/Program Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2022		Catatan
						Target	Realisasi	%		Realisasi Capaian	%	
1	**2**		**3**	**4**	5	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**	12
1.16.1.06 .01.09.01		Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah serta Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	20 Unit	4	4	4	100	4	16	80	
1.16.1.06 .01.09.02		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis	250 Orang	50	50	45	95	50	195	78	
1.1.06.10	**4**	**Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Meningkatnya Sikronisasi Program dan Kegiatan yang dilaksanakan**									
1.16.1..06.01.10.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Yang Disusun	55 Dokumen	11	11	11	100	11	44	80	
1.16.1..06.01.10.02		Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dinas	30 Laporan	6	6	6	100	6	24	80	
1.06.1.06.01.16	**5**	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**Jumlah Lanjut Usia, Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran terlantar dan PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2018	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2020			Target/Program Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2022		Catatan
						Target	Realisasi	%		Realisasi Capaian	%	
1	**2**		**3**	**4**	5	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**	12
1.06.1.06 .01.16.02		Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran terlantar, KDRT & Korban Trafficking yang mendapatkan penanganan/pelayanan	350 Orang	60	60	60	100	60	240	80	
1.06.1.0 6.01.17	**6**	**Program pembinaan anak terlantar**	**Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Berhadapan Hukum, Anak Dengan Kecacatan, Anak Balita Terlantar yang kebutuhan dasarnya terpenuhi**									
1.06.1.06 .01.17.02		Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang diberi pelatihan keterampilan	1,000 Orang	180	200	200	100	200	780	78	
1.13.1.17 .03		Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar yang mampu bertahan terhadap perubahan Sosial	1,000 Orang	200	200	200	100	200	800	80	
1.06.1.0 6.01.18	**7**	**Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma**	**Jumlah Penyandang Cacat dan EksTrauma yang kebutuhan dasarnya terpenuhi**									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2018	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2020			Target/Program Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2022		Catatan
						Target	Realisasi	%		Realisasi Capaian	%	
1	2		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
1.06.1.06.01.18.03		Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang Cacat yang mendapatkan bantuan pelayanan	1,850 Orang	430	928	361	39	102	1279	69	
1.13.1.19	**8**	**Program pembinaan panti asuhan /panti jompo**	**Jumlah Panti yang memperoleh Peningkatan Sarana dan Prasarana.**									
1.06.1.06.01.19.03		Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti yang dilayani	25 Panti	5	5	5	100	5	20	80	
1.06.1.06.01.19.04		Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah penghuni panti yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	25 Panti	5	5	5	100	5	20	80	
1.06.1.06.01.20	**9**	**Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)**	**Jumlah PMKS (Eks. Narapidana, ODHA, Korban Napza, Tuna Susila, Waria dan Gepeng) yang mampu mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)**									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2018	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2020			Target/Program Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2022		Catatan
						Target	Realisasi	%		Realisasi Capaian	%	
1	2		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
1.06.1.06.01.20.04		Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah PMKS (Eks. Narapidana, ODHA, Korban Napza, Tuna Susila, Waria dan Gepeng) yang mampu mandiri	190 Orang	38	250	31	28	38	145	76	
1.06.1.06.01.21	**10**	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	**Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mampu melaksanakan Kemitraan**									
1.06.1.06.01.21.01		Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah Kelembagaan yang diberdayakan	15 Lembaga	3	3	3	100	3	12	80	
1.06.1.06.01.21.03		Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah kegiatan dalam rangka pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dilaksanakan	55 Lembaga	11	11	11	100	11	44	80	
1.06.1.06.01.23	**11**	**Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Sosial**	**Indeks kedalaman kemiskinan (Rasiko kesenjangan Kemiskinan)**									
1.06.1.06.01.23.01		Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya	Jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang mendapatkan bantuan sosial	2,700 Orang	500	500	500	100	500	2000	74	
1.06.1.06.01.23.02		Pelaksanaan Program Keluarga harapan	Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (Ibu Hamil/Miskin/Anak Usia Sekolah Miskin) yang mampu bertahan terhadap perubahan sosial ekonomi	375 KPM	50	50	50	100	50	150	55	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2018	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2020			Target/Program Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2022		Catatan
						Target	Realisasi	%		Realisasi Capaian	%	
1	**2**		**3**	**4**	5	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**	12
1.06.1.06 .01.23.03		Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah Lansia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial	1.600 Orang	360	360	360	100	360	1440	90	
1.06.1.0 6.01.24	**12**	**Program Penanganan dan Penanggulangan Korban Bencana**	**Jumlah Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar**									
1.06.1.06 .01.24.01		Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Pemulangan, Permakanan OT	Jumlah kegiatan penanganan Korban bencana dan orang terlantar yang mendapatkan bantuan sosial	5,590 Orang	1500	1518	1672	110	1518	4.930	80	
1.06.1.0 6.01.25	**13**	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	**Tersedianya sarana dan prasana kebutuhan dasar bagi keluarga miskin**									
1.06.1.06 .01.25.01		Pengadaan Sarana dan Prasaran Bagi Keluarga Miskin	Jumlah MCK bagi keluarga miskin KAT yang dibangun	10 Unit	1	-	-	-	-	-	-	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Adapun Jenis Indikator yang digunakan dalam pelaksanaan program-program pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial meliputi:

A. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2022 :
   1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas Terlantar dalam Panti dengan sasaran Program terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
   2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti dengan sasaran Program Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Telantar di dalam Panti;
   3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti dengan sasaran Program Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti;
   4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti dengan Sasaran Program Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;
   5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial dengan Sasaran Program Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi.

B. Program dan Kegiatan Urusan Wajib Bidang Sosial Lainnya dan Pengentasan PMKS:
   1. Penyediaan Saran dan Prasarana Panti Sosial Pemerintah, meliputi:
      a. Jumlah prasarana, sarana dan mobilitas Dinas Sosial yang dilakukan perawatan.

b. Jumlah panti sosial Pemerintah yang memenuhi Standar Operasional.
c. Jumlah panti sosial Pemerintah yang direnovasi / dilakukan perawatan.

2. Penyediaan prasarana dan sarana panti sosial Non Pemerintah yang mendapat fasilitas dan aksebilitas dalam penyelenggaraan pelayanan sosial.
3. Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial bagi Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
   a. Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang menerima bimbingan mental, sosial, pelatihan keterampilan dan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
   b. Jumlah komunitas adat terpencil yang diberdayakan melalui pemukiman.
   c. Jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang ditangani.
4. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah keterlantaran, ketunaan sosial dan kecacatan.
   a. Jumlah anak jalanan yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial.
   b. Jumlah anak berhadapan dengan hukum yang mendapatkan bantuan pendampingan.
   c. Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi sosial.
   d. Jumlah Eks narapidana yang mendapatkan bimbingan mental, sosial, keterampilan dan bantuan stimulan.
   e. Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan bimbingan mental, keterampilan dan bantuan stimulan.

f. Jumlah orang dengan HIV/AIDS yang mendapatkan bimbingan mental, sosial, keterampilan dan bantuan stimulan.
g. Jumlah orang terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial.

5. Bantuan dan jaminan sosial bagi lanjut usia, anak terlantar, cacat ganda/permanen dan korban bencana.
   a. Korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan sosial.
   b. Korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan makanan siap saji.
   c. Korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan evakuasi.
   d. Korban bencana alam/sosial yang memperoleh tampat penampungan sementara/shelter.
   e. Korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan Bahan Bangunan Rumah.
   f. Jumlah satuan penanggulangan bencana yang terampil dan siap siaga menghadapi bencana.
   g. jumlah Lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial.
   h. Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bantuan sosial.
   i. Jumlah anak balita terlantar yang mendapatkan bantuan sosial.
   j. Jumlah Penyandang cacat yang mendapatkan bantuan sosial.

Adapun Tugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat.

   Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Sekretariat mempunyai fungsi:

   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program, administrasi umum dan keuangan;
   b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, administrasi umum dan keuangan;
   c. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
   d. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
   e. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akutansi keuangan;
   f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pemberdayaan Sosial

Mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian serta pengembangan teknis pemberdayaan komunitas adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, pemberdayaan peran keluarga dan penyuluhan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanggulangan kemiskinan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan komunitas adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, pemberdayaan peran keluarga dan penyuluhan sosial;
b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat serta pemberdayaan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, peran keluarga dan penyuluhan sosial;
c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemberdayaan komunitas adat terpencil;
d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis tenaga kesejahteraan sosial masyarakat;
e. Penyiapan bahan-bahan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

f. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis peran keluarga dan penyuluhan sosial;
g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial.

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas-nya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis kesejahteraan anak, rehabilitasi tuna sosial dan korban napza, serta rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan kesejahteraan anak, rehabilitasi tuna sosial dan korban napza, serta rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia;
b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program peningkatan kesejahteraan anak, rehabilitasi tuna sosial dan korban napza, serta rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia;
c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kesejahteraan anak;
d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis rehabilitasi tuna sosial dan korban napza;

e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bim-bingan, pengendalian serta pengembangan teknis penanggulangan bencana alam dan sosial, pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial serta jaminan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penanggulangan bencana alam dan sosial, pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial serta jaminan kesejahteraan sosial;
b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program penanggulangan bencana alam dan sosial, pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial serta jaminan kesejahteraan sosial;
c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman penanggulangan bencana alam dan sosial;
d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pencegahan dan

pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran;

e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis jaminan kesejahteraan sosial;
f. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan sumber dana sosial;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penanganan Fakir Miskin.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penanganan fakir miskin di perkotaan, pedesaan dan daerah pesisir dan pulau terluar dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta produktifitasnya secara sosial, kelembagaan dan ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penanganan fakir miskin
b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program penanganan fakir miskin;
c. Memverifikasi dan memvalidasi data calon penerima bantuan program penanganan fakir miskin di perkotaan, pedesaan serta daerah pesisir dan pulau terluar.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebanyak 5 (lima) unit yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 92 tahun 2016 masing-masing sebagai berikut:

a. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan.
   - Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Kesejahteraan Sosial;
   - Fungsi UPTD PSA Anak Harapan adalah penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial anak terlantar, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial anak terlantar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan sosial anak terlantar;
   - Daya tampung 80 anak.

b. UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma.
   - Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pelayanan kesejahteraan sosial anak dalam pola perlindungan dan penyantunan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
   - Fungsi PS Perlindungan Anak Dharma penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial anak, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial anak, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan sosial anak.
   - Daya tampung 80 anak.

c. UPTD Panti Sosial Bina Remaja.
   - Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pelayanan kesejahteraan sosial remaja terlantar;

- Fungsi PS Bina Remaja penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan remaja terlantar, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan remaja terlantar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan remaja terlantar;
- Daya tampung sebanyak 75 orang.

d. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri.
   - Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
   - Fungsi Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
   - Daya tampung 110 orang.

e. UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
   - Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pelayanan kesejahteraan sosial wanita korban trafficing atau wanita rawan sosial ekonomi;
   - Daya tampung 35 orang.

Tabel 2 (T-C.30). Pencapain Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

No	INDIKATOR KINERJA	SPM Provinsi	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan
				2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	Menurunnya jumlah Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.5 % pertahun			1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	
2	Jumlah warga KAT yang diberdayakan melalui pemukiman	2		2	2	2	2	2	2	2	2	
5	Jumlah keluarga fakir miskin yang menerima bimbingan sosial, pelatihan keterampilan UEP melalui KUBE	125		300	540	540	540	540	200	440	440	
6	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan jaminan sosial	1.36	1.45	2.14	2.5	2.5	100	100	270	240	240	Termasuk di dalam SPM Bidang Sosial Tahun 2019-2022
7	Jumlah anak balita terlantar yang mendapatkan jaminan sosial	218		516	437	459	100	100	335	300	300	
	Pengembangan bakat dan Keterampilan Anak Terlantar	1578					200	200			200	
8	Jumlah anak jalanan yang mendapatkan rehabilitasi sosial	138		50	60	60	0	0	65	100	100	

No	INDIKATOR KINERJA	SPM Provinsi	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan
				2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
9	Jumlah anak cacat yang mendapatkan jaminan sosial berupa bantuan sosial dan rehabilitasi	24		107	112	118	0	0	157	20	20	
10	Jumlah anak berhadapan dengan hukum yang mendapatkan perlindungan sosial berupa advokasi sosial	25		20	24	35	20	20	20	20	20	
11	Jumlah anak membutuhkan perlakuan khusus yang mendapatkan jaminan sosial berupa bantuan sosial	6		110	10	130	110	110	140	100	100	
12	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial	815	3.02	1.09	1.065	1.126	110	110	350	350	350	Termasuk di dalam SPM Bidang Sosial Tahun 2019-2022
13	Jumlah wanita korban tindak kekerasan yang mendapatkan perlindungan sosial	68		60	100	100	30	30	62	30	30	
14	Jumlah wanita tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial berupa bimbingan mental, sosial dan keterampilan serta bantuan stimulant	235		90	150	160	140	140	30	30	30	

No	INDIKATOR KINERJA	SPM Provinsi	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan
				2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
15	Jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)	100		200	200	200	30	30	40	40	40	
16	Jumlah penyandang cacat yang mendapatkan bantuan sosial	350	0	693	934	950	80	80	270	270	270	Termasuk di dalam SPM Bidang Sosial Tahun 2019-2022
17	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bantuan sosial		0									Termasuk di dalam SPM Bidang Sosial Tahun 2019-2022
17	Jumlah eks Narapidana yang mendapatkan bimbingan mental, sosial dan keterampilan serta bantuan stimulant			0	140	165	0	0	20	20	20	
18	Jumlah orang dengan HIV/AIDS yang mendapatkan bimbingan mental, sosial dan keterampilan serta bantuan stimulant			86	105	110	0	0	10	10	10	

No	INDIKATOR KINERJA	SPM Provinsi	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan
				2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
19	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan bimbingan mental, sosial dan keterampilan serta bantuan stimulant	50		60	60	60	60	60	60	60	60	
20	Jumlah Penanganan korban bencana alam		100	34	40	45	0	0	34	34	0	Termasuk di dalam SPM Bidang Sosial Tahun 2019-2022
21	Jumlah Penanganan korban bencana sosial/pengungsi		100	80	85	3,027	100	100	118	1118	1118	Termasuk di dalam SPM Bidang Sosial Tahun 2019-2022
22	Jumlah pekerja migran terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	102		15	15	15	10	10	6	7	10	
23	Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang melakukan pelayanan ksejahteraan sosial			10	10	10	0	0	10	9	10	
24	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang mendapatkan pelatihan teknis dan fungsional			152	103	103	0	0	143	103	103	

No	INDIKATOR KINERJA	SPM Provinsi	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan
				2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
25	Jumlah Organisasi Sosial (ORSOS) yang mendapatkan pelatihan teknis			70	70	70	0	0	50	50	50	
26	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mendapatkan pelatihan teknis			80	80	80	0	0	40	40	40	
27	Jumlah Karang taruna yang mendapatkan pelatihan teknis			75	75	75	0	0	55	55	55	
28	Jumlah WKSBM yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas			10	20	20	0	0	30	10	10	
29	Jumlah CSR Kesejahteraan Sosial yang bertambah			6	6	6	0	0	30	15	10	
30	Jumlah Kampung siaga bencana yang terbentuk			1	1	1	0	0	2	2	2	
31	Jumlah petugas perlindungan sosial Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bimbingan teknis	210		160	200	240	0	0	200	200	200	
32	Jumlah tenaga pelopor yang mendapatkan diklat penanganan konflik social			19	24	29	0	0	21	20	20	
33	Jumlah forum keserasian sosial dan forim kearifan local yang peduli bencana social			7	9	11	0	0	4	11	10	

No	INDIKATOR KINERJA	SPM Provinsi	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan
				2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
34	Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat teknis, fungsional dan structural berkisar 20-30% dari jumlah keseluruhan aparatur pemerintah			87	87	87	0	0	13	17	0	
35	Persentase penurunan pelanggaran disiplin			0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Persentase kecukupan sarana operasional perkantoran yang diperlukan			60	85	100	0	0	75	75	75	
37	Jumlah jaringan informasi dan publikasi perkembangan kesejahteraan sosial yang terbangun dan terupdate			1	1	1	0	0	1	1	1	
	□ Teknologi informasi			1	1	1	0	0	1	1	1	
	□ Media informasi (bulletin dan media massa)			1	1	1	0	0	1	1	1	
38	Persentase pelaksanaan tugas fungsi yang telah didukung oleh SOP			80	100	100	0	0	100	100	100	
39	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun			5	4	4	0	0	4	4	4	
40	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja yang telah disusun dan terukur			17	17	17	0	0	13	12	17	

No	INDIKATOR KINERJA	SPM Provinsi	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan
				2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
41	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang telah disusun			25	25	25	0	0	25	25	25	
42	Jumlah system informasi yang terbangun dan digunakan			9	9	9	0	0	9	1	1	
43	Persentase Kab/Kota yang telah memiliki kebijakan yang selaras dengan provinsi			100	100	100	0	0	100	100	100	
44	Persentase Kab/Kota yang telah memiliki program yang selaras dengan provinsi			100	100	100	0	0	100	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial masih dibayangi oleh kecenderungan semakin meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Disadari bahwa kondisi ini merupakan tantangan yang sangat berat, jika tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas yang berimplikasi pada lemahnya ketahanan sosial serta dapat menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat.

Untuk mencapai sinergi yang baik antara Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas Sosial Kabupaten / Kota maka upaya yang dilakukan adalah Dinas Sosial Prov. Kaltim selalu mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan Sinronisasi terkait Visi, Misi, Program dan Kegiatan dengan Dinas Sosial Kab/Kota guna mencapai Sinergitas Perencanaan Program dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial dalam Menunjang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Valid dan Berkualitas

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh warga Negara secara minimal. Dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan bidang kesjehateraan sosial di daerah, diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capaian kinerja SKPD terhadap bidang sosial sesuai dengan Permensos RI nomor 9 tahun 2018 yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah membuat dan menyusun SPM sesuai dengan urusan wajib yang merupakan

kewenangannya. sebagai pedoman Dinas Sosial Prov. Kaltim dalam menyelenggarakan pelayanan sosial dasar kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan dan manjamin mutu pelayanan sosial kepada masyarakat. Dinas Sosial Prov. Kaltim telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tentang Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2019 – 2022 **(masih dalam bentuk rancangan/draft)**

Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Visi yang tertuang dalam Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah yakni "Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat" dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Aksesibilitas Perlindungan Sosial untuk menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Pelayanan Sosial dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;
2. Mengembangkan Perlindungan Sosial Bagi PMKS;
3. Meningkatkan Profesionalisme Penyelenggaraan Perlindungan Sosial dalam Bentuk Bantuan Sosial, Rehabilitasi, Pemberdayaan dan Jaminan Sebagai Metode Penanggulangan Kemiskinan;
4. Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan dalam Perlindungan, Jaminan, Pemberdyaan, Rehabilitasi dan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Meningkatkan dan Melestari penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
6. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Program prioritas Kemeneterian Sosial adalah sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH);

Sedangkan visi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yakni "Terwujudnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial". Dengan demikian maka visi dan misi Kementerian Sosial Republik Indonesia telah sejalan dengan visi dan misi Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur, oleh sebab itu guna mencapai visi dan misi tersebut diatas harus didukung oleh komitmen dari unsur pimpinan yang kuat dan bersinergi, konsistensi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, keberpihakan kepada kesejahteraan sosial PMKS, peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha secara aktif, system birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.

Isu strategis terkait pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Timur adalah :

a. Pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejhateraan Sosial (PMKS) melalui pemenuhan pelayanan dasar dalam panti dan terlebih lagi bagi pelayanan luar panti masih tergolong minim;
b. Dengan terus menurunnya Perekonomian Daerah sebagai dampak krisis Ekonomi Global yang mengakibatkan terciptanya PMKS-PMKS baru. Sehingga dipandang perlu perhatian Pemerintah Daerah untuk memberdayakan keterampilan berusaha bagi para PMKS melalui pemberian bantuan KUBE dan bantuan UEP secara maksimal dan terpadu;

c. Program Keluarga Harapan masih menjadi model penanganan PMKS ke depan dengan terus menambah jenis KPM dan jumlah KPM;
d. Permasalahan Pembangunan Kesejahteraan Sosial belum menjadi perhatian atau prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
e. Sinkronisasi antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam melaksanakan program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial masih mengalami kendala;
f. Provinsi Kalimantan Timur adalah Provinsi dengan sebaran penduduk yang belum merata serta aksesibiltas infrastruktur ke lokasi sasaran PMKS belum memadai;
g. Informasi data PMKS melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum menjadi acuan dan penanganan PMKS Provinsi Kalimantan Timur dan Kab/Kota.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Review terhadap rancangan awal Organisasi Perangakat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk bidang kesejahteraan sosial tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. (T.C.31). Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
Dinas Sosial					**51,756,330,212**	**Dinas Sosial**					**51,756,330,212**
1	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				**3,755,091,400**	**1**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				**3,755,091,400**
a.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**		**Tersedianya pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar**		**2,361,434,500**	**a.**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**		**Tersedianya pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar**		**2,361,434,500**
	Penyediaan Permakanan	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuaidengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	200	672,102,500		Penyediaan Permakanan	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuaidengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	200	672,102,500
	Penyediaan Alat Bantu	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	50	152,364,500		Penyediaan Alat Bantu	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	50	152,364,500
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Samarinda	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	54	930,467,500		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Samarinda	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	54	930,467,500
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Samarinda	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	30	606,500,000		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Samarinda	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	30	606,500,000

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
b.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**		**Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti**		**368,380,000**	**a**	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti**		**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial**		**368,380,000**
	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	10 Kab / Kota	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak (orang)	120 Orang	368,380,000		Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	10 Kab / Kota	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak (orang)	120 Orang	368,380,000
c.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**		**Tersedianya bantuan sosial bagi Lansia terlantar**		**490,606,000**	**a**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**		**Tersedianya bantuan sosial bagi Lansia terlantar**		**490,606,000**
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	10 Kab / Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (orang)	100 Orang	490,606,000		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	10 Kab / Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (orang)	100 Orang	490,606,000
a	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti**		**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial**		**534,670,900**	**a**	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti**		**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial**		**534,670,900**
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Samarinda	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Provinsi	28 Orang	534,670,900		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Samarinda	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Provinsi	28 Orang	534,670,900

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
2	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				**2,095,908,000**	**2**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				**2,095,908,000**
a	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**		**Tersedianya bantuan sosial bagi Keluarga Fakir Miskin**		**2,095,908,000**	**b**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**		**Tersedianya bantuan sosial bagi Keluarga Fakir Miskin**		**2,095,908,000**
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Kab / Kota	WRSE dan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin yang mandiri (KUBE dan WRSE)	20 KUBE dan 40 WRSE	2,095,908,000		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Kab / Kota	WRSE dan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin yang mandiri (KUBE dan WRSE)	20 KUBE dan 40 WRSE	2,095,908,000
3	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**				**1,457,250,175**	**3**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**				**1,457,250,175**
a	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**		**1,457,250,175**	**a**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**		**1,457,250,175**
	Penyediaan Permakanan	10 Kab / Kota	Jumlah Pengungsi yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat kewenangan Provinsi	1.518 Orang	591,736,050		Penyediaan Permakanan	10 Kab / Kota	Jumlah Pengungsi yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat kewenangan Provinsi	1.518 Orang	591,736,050
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	10 Kab / Kota	Jumlah orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	200 Orang	202,040,000		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	10 Kab / Kota	Jumlah orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	200 Orang	202,040,000
	Pelayanan Dukungan Psikososial	10 Kab / Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Provinsi	200 Orang	663,474,125		Pelayanan Dukungan Psikososial	10 Kab / Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Provinsi	200 Orang	663,474,125

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				**1,426,363,800**	**4**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				**1,426,363,800**
b.	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**		**Tersedianya Lembaga / Orsos dalam Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**		**1,426,363,800**	**b.**	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**		**Tersedianya Lembaga / Orsos dalam Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**		**1,426,363,800**
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Samarinda	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	105 Orang	1,426,363,800		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Samarinda	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	105 Orang	1,426,363,800
5	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**				**715,302,100**	**5**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**				**715,302,100**
a.	**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**		**Jumlah TMP yang meningkat kualitas pemeliharaan dan pengelolaannya (Lokasi)**	**1 Lokasi**	**715,302,100**	**a.**	**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**		**Jumlah TMP yang meningkat kualitas pemeliharaan dan pengelolaannya (Lokasi)**	**1 Lokasi**	**715,302,100**
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Dokumen)	1 Dok	715,302,100		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Dokumen)	1 Dok	715,302,100

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
6	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**42,306,414,737**	**6**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**42,306,414,737**
a.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Tersedianya dokumen Perrencanaan Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu**		**861,207,000**	**a.**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Tersedianya dokumen Perrencanaan Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu**		**861,207,000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7 Dok	861,207,000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7 Dok	861,207,000
b.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN**		**33,191,087,937**	**b.**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN**		**33,191,087,937**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	165 Orang	29,215,918,417		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	165 Orang	29,215,918,417
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dok	3,975,169,520		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dok	3,975,169,520
c.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah**		**11,533,500**	**c.**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah**		**11,533,500**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	11,533,500		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	11,533,500

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
d.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik**		**2,516,870,750**	**d.**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik**		**2,516,870,750**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	199,089,450		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	199,089,450
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	311,522,000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	311,522,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	295,486,500		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	295,486,500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1 Lap	1,710,772,800		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1 Lap	1,710,772,800
e.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Tesedianya fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya**		**3,502,443,500**	**e.**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Tesedianya fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya**		**3,502,443,500**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3 Unit	2,546,570,000		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3 Unit	2,546,570,000
	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1 Paket	550,120,000		Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1 Paket	550,120,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20 Unit	405,753,500		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20 Unit	405,753,500

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
f.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya Barang Milik Daerah yang diadakan**		**569,716,050**	**f.**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya Barang Milik Daerah yang diadakan**		**569,716,050**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Lap	60,506,000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Lap	60,506,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2 Lap	509,210,050		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2 Lap	509,210,050
g.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedinya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya**		**1,653,556,000**	**g.**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedinya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya**		**1,653,556,000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	10 Unit	70,147,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	10 Unit	70,147,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2 Unit	30,300,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2 Unit	30,300,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	200 Unit	801,694,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	200 Unit	801,694,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3 Unit	751,415,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3 Unit	751,415,000

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI					**6,735,233,600**	**UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI**					**6,735,233,600**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSTW-NP)**				**3,355,235,300**	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSTW-NP)**				**3,355,235,300**
a.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)**		**Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN**		**1,932,698,400**	**a.**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)**		**Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN**		**1,932,698,400**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1,932,698,400		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1,932,698,400
b.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)**		**Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah**		**54,527,900**	**b.**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)**		**Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah**		**54,527,900**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	54,527,900		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	54,527,900
c.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)**		**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah**		**788,508,000**	**c.**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)**		**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah**		**788,508,000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	15,059,100		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	15,059,100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	459,008,300		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	459,008,300

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	29,440,600		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	29,440,600
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	285,000,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	285,000,000
d.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)**		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**		**287,088,200**	**d.**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)**		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**		**287,088,200**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	279,331,400		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	279,331,400
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	7,756,800		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	7,756,800
f.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)**		**Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya**		**292,412,800**	**f.**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)**		**Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya**		**292,412,800**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	111,405,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	111,405,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50 Unit	156,175,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50 Unit	156,175,000

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24,832,800		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24,832,800
2	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSTW-NP)**				**3,379,998,300**	**2**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSTW-NP)**				**3,379,998,300**
a.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (UPTD PSTW-NP)**		**Tersedianya bantuan sosial bagi Lansia terlantar (UPTD PSTW-NP)**		**3,379,998,300**	**a.**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (UPTD PSTW-NP)**		**Tersedianya bantuan sosial bagi Lansia terlantar (UPTD PSTW-NP)**		**3,379,998,300**
	Penyediaan Permakanan	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuaidengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	110 Orang	2,345,395,000		Penyediaan Permakanan	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuaidengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	110 Orang	2,345,395,000
	Penyediaan Sandang	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediadalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	110 Orang	44,325,000		Penyediaan Sandang	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediadalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	110 Orang	44,325,000
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi	110 Orang	85,253,000		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi	110 Orang	85,253,000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Samarinda	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	110 Orang	147,753,700		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Samarinda	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	110 Orang	147,753,700
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Samarinda	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	110 Orang	683,769,600		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Samarinda	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	110 Orang	683,769,600
	Pemulasaraan	Samarinda	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang	73,502,000		Pemulasaraan	Samarinda	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang	73,502,000

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA					**4,902,121,043**	**UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA**					**4,902,121,043**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSPAD)**				**2,440,142,043**	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSPAD)**				**2,440,142,043**
a.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)**		**Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN**		**1,255,964,720**	**a.**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)**		**Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN**		**1,255,964,720**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dok	1,255,964,720		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dok	1,255,964,720
b.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)**		**Tesedianya fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya**		**444,674,023**	**b.**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)**		**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah**		**444,674,023**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	10,000,500		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	10,000,500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	142,188,300		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	142,188,300
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14,685,223		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14,685,223

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	277,800,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	277,800,000
c.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)**		**Tersedinya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyurat kantor**		**299,277,300**	**c.**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)**		**Tersedinya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyurat kantor**		**299,277,300**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	1 Lap	2,000,000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	1 Lap	2,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	297,277,300		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	297,277,300
d.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)**		**Jummlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**440,226,000**	**d.**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)**		**Jummlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**440,226,000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	178,276,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	178,276,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	62,150,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	62,150,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	20 M2	199,800,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	20 M2	199,800,000

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
2	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSPAD)**				**2,461,979,000**	**2**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSPAD)**				**2,461,979,000**
a.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (UPTD PSPAD)**		**Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti**		**2,461,979,000**	**a.**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (UPTD PSPAD)**		**Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)**		**2,461,979,000**
	Penyediaan Permakanan	Samarinda	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi	80 Orang	1,620,673,000		Penyediaan Permakanan	Samarinda	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi	80 Orang	1,620,673,000
	Penyediaan Sandang	Samarinda	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	626,390,000		Penyediaan Sandang	Samarinda	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	626,390,000
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Samarinda	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi	80 Orang	108,485,000		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Samarinda	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi	80 Orang	108,485,000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Samarinda	Jumlah perserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	77,100,000		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Samarinda	Jumlah perserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	77,100,000
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Samarinda	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20 Orang	29,331,000		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Samarinda	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20 Orang	29,331,000

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN					**5,910,182,370**	**UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN**					**5,910,182,370**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSAAH)**				**3,470,867,570**	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSAAH)**				**3,470,867,570**
a.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)**		**Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN**		**1,626,453,600**	**a.**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)**		**Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN**		**1,626,453,600**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dok	1,626,453,600		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dok	1,626,453,600
b.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)**		**Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah**		**468,982,000**	**b.**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)**		**Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah**		**468,982,000**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	468,982,000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	468,982,000
c.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)**		**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah**		**754,785,470**	**c.**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)**		**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah**		**754,785,470**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	37,598,900		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	37,598,900

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	421,177,570		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	421,177,570
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21,809,000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21,809,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	274,200,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	274,200,000
d.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSAAH)**		**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**		**6,647,800**	**d.**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSAAH)**		**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**		**6,647,800**
	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah mebeulair yang disediakan	1 Unit	6,647,800		Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah mebeulair yang disediakan	1 Unit	6,647,800
e.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)**		**Jumlah Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah daerah**		**271,551,700**	**e.**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)**		**Jumlah Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah daerah**		**271,551,700**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	1 Lap	5,556,000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	1 Lap	5,556,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	182,156,800		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	182,156,800
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	83,838,900		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	83,838,900

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
f.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)**		**Jummlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**342,447,000**	**f.**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)**		**Jummlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**342,447,000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	86,288,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	86,288,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	58,159,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	58,159,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	198,000,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	198,000,000
2	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSAAH)**				**2,439,314,800**	**2**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSAAH)**				**2,439,314,800**
a.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti (UPTD PSAAH)**		**Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti**		**2,439,314,800**	**a.**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti (UPTD PSAAH)**		**Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti**		**2,439,314,800**

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
	Penyediaan Makanan	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1,675,870,000		Penyediaan Makanan	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1,675,870,000
	Penyediaan Sandang	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	364,774,000		Penyediaan Sandang	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	364,774,000
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	80 Orang	181,315,000		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	80 Orang	181,315,000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Samarinda	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Penghuni Panti	80 Orang	85,355,800		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Samarinda	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Penghuni Panti	80 Orang	85,355,800
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Penghuni Panti	20 Orang	132,000,000		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Penghuni Panti	20 Orang	132,000,000

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA					**4,590,212,015**	**UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA**					**4,590,212,015**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSBR)**				**2,816,913,972**	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSBR)**				**2,816,913,972**
a.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSBR)**		**Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN**		**1,272,156,480**	**a.**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSBR)**		**Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN**		**1,272,156,480**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	1,272,156,480		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	1,272,156,480
b.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSBR)**		**Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah**		**84,907,000**	**b.**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSBR)**		**Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah**		**84,907,000**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	84,907,000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	84,907,000
c.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSBR)**		**Tesedianya fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya**		**741,953,292**	**c.**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSBR)**		**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah**		**741,953,292**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59,467,900		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59,467,900

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	302,671,392		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	302,671,392
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24,086,000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24,086,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	355,728,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	355,728,000
d.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBR)**		**Tersedinya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyurat kantor**		**154,222,200**	**e.**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBR)**		**Tersedinya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyurat kantor**		**154,222,200**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	1 Lap	10,017,600		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	1 Lap	10,017,600
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	144,204,600		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	144,204,600
e.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBR)**		**Jummlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**563,675,000**	**e.**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBR)**		**Jummlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**563,675,000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	82,410,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	82,410,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	68,038,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	68,038,000

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	413,227,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	413,227,000
1	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSBR)**				**1,773,298,043**	**1**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSBR)**				**1,773,298,043**
a.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSBR)**		**Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)**		**1,773,298,043**	**a.**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSBR)**		**Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)**		**1,773,298,043**
	Penyediaan Makanan	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar	55 Orang	653,737,500		Penyediaan Makanan	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar	55 Orang	653,737,500
	Penyediaan Sandang	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	55 Orang	252,149,500		Penyediaan Sandang	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	55 Orang	252,149,500
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	20 Orang	23,090,000		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	20 Orang	23,090,000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Samarinda	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	15 Orang	701,721,043		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Samarinda	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	15 Orang	701,721,043
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	15 Orang	142,600,000		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	15 Orang	142,600,000

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA					**1,911,234,942**	**UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA**					**1,895,383,142**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSKW-HM)**				**1,331,090,328**	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSKW-HM)**				**1,315,238,528**
a.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSKW-HM)**		**Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN**		**679,775,680**	**a.**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSKW-HM)**		**Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN**		**679,775,680**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dok	679,775,680		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dok	679,775,680
b.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSKW-HM)**		**Tesedianya fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya**		**254,591,100**	**b.**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSKW-HM)**		**Tesedianya fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya**		**254,591,100**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	4,686,200		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	4,686,200
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,868,500		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,868,500
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,836,400		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,836,400
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	196,200,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	196,200,000

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
c.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSKW-HM)**		**Tersedinya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyurat kantor**		**179,285,548**	**c.**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSKW-HM)**		**Tersedinya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyurat kantor**		**179,285,548**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	179,285,548		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	179,285,548
d.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSKW-HM)**		**Tersedinya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya**		**217,438,000**	**d.**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSKW-HM)**		**Tersedinya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya**		**201,586,200**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	28,850,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	49,998,700
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	38,588,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	38,588,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	150,000,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	112,999,500
2	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSKW-HM)**		**Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)**		**580,144,614**	**2**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSKW-HM)**		**Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)**		**580,144,614**
a.	**Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalaha Sosial (PMKS) Lainnya Di Luar HIV/AIDS Dan Napza didalam Panti**		**Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial**		**580,144,614**	**a.**	**Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalaha Sosial (PMKS) Lainnya Di Luar HIV/AIDS Dan Napza didalam Panti**		**Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial**		**580,144,614**

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Terget Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
	Penyediaan Permakanan	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	285,300,000		Penyediaan Permakanan	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	285,300,000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Samarinda	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	255,954,614		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Samarinda	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	255,954,614
	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	5,340,000		Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	5,340,000
	Pemulangan Ke Daerah Asal	Samarinda	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	10 Orang	33,550,000		Pemulangan Ke Daerah Asal	Samarinda	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	10 Orang	33,550,000

Terkait Tabel 3. (T.C.31). diatas tidak terjadi perubahan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan pada Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sub bab ini menjelaskan program/kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang diperoleh melalui mekanisme rapat koordinasi teknis yang telah dilaksanakan pada bulan Maret yang lalu dan telah memperoleh usulan dan masukan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota se- Kalimantan Timur. Selanjutnya usulan tersebut di verifikasi bersama BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur serta unsur-unsur terkait lainnya. Program dan kegiatan ini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 adalah tindaklanjut dari amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari :

1. Sekretariat,

   Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan.

2. Bidang Pemberdayaan Sosial,

   Mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian serta pengembangan teknis pemberdayaan komunitas adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, fakir miskin serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, pemberdayaan peran keluarga dan penyuluhan sosial.

3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial,
   Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis kesejahteraan anak, rehabilitasi tuna sosial dan korban napza, serta rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia.

4. Bidang Penanganan Fakir Miskin,
   Mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian serta pengembangan teknis penanganan fakir miskin perkotaan, perdesaan dan terluar pesisir.

5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
   Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis pe-nanggulangan bencana alam dan sosial, pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial serta jaminan kesejahteraan sosial.

Isu-isu strategis bagi Dinas Sosial diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial di masa lima tahun mendatang.

Pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial masih dibayangi oleh kecenderungan semakin meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Disadari bahwa kondisi ini merupakan tantangan yang sangat berat, jika tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat maka akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang

semakin meluas yang berimplikasi pada lemahnya ketahanan sosial serta menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat. Isu Strategis terkait pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pemenuhan pelayanan dasar dalam panti dan terlebih lagi bagi pelayanan luar panti masih tergolong minim;
2. Dengan terus menurunnya Perekonomian Daerah sebagai dampak krisis Ekonomi Global yang mengakibatkan terciptanya PMKS-PMKS baru. Sehingga dipandang perlu perhatian Pemerintah Daerah untuk memberdayakan keterampilan berusaha bagi para PMKS melalui pemberian bantuan KUBE dan bantuan UEP secara maksimal dan terpadu;
3. Program Keluarga Harapan masih menjadi model penangangan PMKS kedepan dengan terus menambah jenis Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan jumlah KPM;
4. Pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya Penyandang Disabilitas melalui pemenuhan pelayanan dasar dalam panti masih terkendala dengan belum adanya fasilitas panti yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
5. Penanganan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) akan tetap menjadi fokus penanganan PMKS kedepan;
6. Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial mendapat perhatian yang serius dan menjadi komitmen Kepala Daerah dengan pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) bersinergi dengan Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Tabel 4 (T-C.32).Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran / Volumen	Catatan
Dinas Sosial					
1	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				
a.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**		**Tersedianya pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar**		
	Penyediaan Permakanan	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuaidengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	200	
	Penyediaan Alat Bantu	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	50	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Samarinda	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	54	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Samarinda	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	30	
b.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**		**Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti**		
	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	10 Kab / Kota	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak (orang)	20 Orang	
c.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**		**Tersedianya bantuan sosial bagi Lansia terlantar**		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	10 Kab / Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (orang)	100 Orang	
a	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti**		**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial**		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Samarinda	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Provinsi	28 Orang	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran / Volumen	Catatan
2	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				
a	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**		**Tersedianya bantuan sosial bagi Keluarga Fakir Miskin**		
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Kab / Kota	WRSE dan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin yang mandiri (KUBE dan WRSE)	20 KUBE dan 40 WRSE	
3	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**				
a	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**		
	Penyediaan Permakanan	10 Kab / Kota	Jumlah Pengungsi yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat kewenangan Provinsi	1.518 Orang	
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	10 Kab / Kota	Jumlah orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	200 Orang	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	10 Kab / Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Provinsi	200 Orang	
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				
b.	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**		**Tersedianya Lembaga / Orsos dalam Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Samarinda	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	105 Orang	
5	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**				
a.	**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**		**Jumlah TMP yang meningkat kualitas pemeliharaan dan pengelolaannya (Lokasi)**	**1 Lokasi**	
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Dokumen)	1 Dok	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran / Volumen	Catatan
UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI					
1	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSTW-NP)**				
a.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (UPTD PSTW-NP)**		**Tersedianya bantuan sosial bagi Lansia terlantar (UPTD PSTW-NP)**		
	Penyediaan Permakanan	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuaidengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Prov	110 Orang	
	Penyediaan Sandang	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediadalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	110 Orang	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi	110 Orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Samarinda	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	110 Orang	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Samarinda	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	110 Orang	
	Pemulasaraan	Samarinda	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang	
UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA					
1	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSPAD)**				
a.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (UPTD PSPAD)**		**Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti**		
	Penyediaan Permakanan	Samarinda	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi	80 Orang	
	Penyediaan Sandang	Samarinda	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Samarinda	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi	80 Orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Samarinda	Jumlah perserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Samarinda	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20 Orang	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran / Volumen	Catatan
UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN					
1	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSAAH)**				
a.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti (UPTD PSAAH)**		**Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti**		
	Penyediaan Makanan	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Penyediaan Sandang	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	80 Orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Samarinda	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Penghuni Panti	80 Orang	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Penghuni Panti	20 Orang	
UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA					
1	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSBR)**				
a.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSBR)**		**Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)**		
	Penyediaan Makanan	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar	55 Orang	
	Penyediaan Sandang	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	55 Orang	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	20 Orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Samarinda	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	15 Orang	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	15 Orang	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran / Volumen	Catatan
UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA					
1	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSKW-HM)**		**Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)**		
a.	**Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalaha Sosial (PMKS) Lainnya Di Luar HIV/AIDS Dan Napza didalam Panti**		**Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial**		
	Penyediaan Permakanan	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Samarinda	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	
	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	
	Pemulangan Ke Daerah Asal	Samarinda	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	10 Orang	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warganegara; (2) Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; (4) Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) Melakukan revolusi karakter bangsa; serta (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial. Berbagai agenda prioritas pembangunan tersebut ditujukan untuk menuju Indonesia yang lebih baik.

Seiring dengan agenda prioritas tersebut, maka pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat yang masuk dalam kriteria kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), untuk meningkatkan kesejahteraan sosial setinggi-tingginya yang ditandai dengan derajat keberfungsian sosial mereka baik dalam lingkungan keluarga, komunitas, kelompok, organisasi sosial, dan masyarakat.

Guna mencapai tujuan tersebut diatas pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menerapkan beberapa kebijakan diantaranya meningkatkan pemberdayaan fakir miskin melaui Kelompok usaha bersama secara terpadu, pemberdayaan

penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya dengan memberikan bantuan stimulan, meningkatkan kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial serta meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Sesuai dengan yang tertuang dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2019 – 2023 telah ditetapkan tujuan dan sasaran program kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

A. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu ke depan (Kapan)

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan sosial
2. Meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Meningkatkan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
4. Meningkatkan keberdayaan Sumber Daya Aparatur.

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis instansi pemerintah.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber data daerah dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat

dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode I (satu) tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan sasaran dalam periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatkan potensi sosial Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Sosial merencanakan program dan kegiatan sebagai bentuk penjabaran dari Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dimaksud adalah 9 (sembilan) program utama dan 4 (empat) program penunjang lainnya dan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Program dan Kegiatan Utama

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

a. Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi dengan sub kegiatan :

- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi.

2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Makanan;
- Penyediaan Alat Bantu;
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial;
- Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;

b. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti dengan sub kegiatan :
   - Penyediaan Makanan;
   - Penyediaan Sandang;
   - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti;
   - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari;
   - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
   - Pemulasaran.

c. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti dengan sub kegiatan :
   - Penyediaan Makanan;
   - Penyediaan Sandang;
   - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti;
   - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari;
   - Penyediaan Alat Bantu;
   - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial;
   - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
   - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
   - Pemulangan ke Daerah Asal.Rehabilitasi Sosial Dasar.

d. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti dengan sub kegiatan :
   - Penyediaan Makanan;
   - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti;
   - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari;
   - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial;
   - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
   - Pemulangan ke Daerah Asal.

3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :
   - Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi dengan sub kegiatan :
   - Penyediaan Permakanan;
   - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan;
   - Pelayanan Dukungan Psikososial.

5. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

a. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi dengan sub kegiatan :
   - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

B. Program dan Kegiatan Penunjang.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
   - Pengadaan Mebel

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

h. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
   - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3.3.2 Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan.

- Adapun Visi Kepala Daerah adalah " Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat " dengan Misi yang terkait dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah : Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas;
- Program-program yang mengarah peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat akan dipadukan dengan RPJMD Kaltim 2019-2023 yang sudah ditetapkan. Program yang sudah ditandai sebagai SGDs disepakati menjadi Rencana Aksi Daerah SDGs. Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang pencapaian pembanguan berkelanjutan mengamanatkan agar agar daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGS;
- Dengan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dinas Sosial berupaya untuk mengembangkan Daerah terpencil dengan cara memberikan bantuan berupa pembuatan Rumah, MCK dan lahan yang dimana di harapkan dapat membantu warga KAT dalam kualitas hidup yang lebih baik.

Tabel 1 (T-C 33). Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Dinas Sosial					**51,756,330,212**				**11,481,102,525**
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				**3,755,091,400**				**4,418,847,500**
1.06.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**	**Tersedianya pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar**			**2,361,434,500**				**2,700,467,500**
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuaidengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Samarinda	200	672,102,500	APBD		200	800,000,000
1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	10 Kab / Kota	50	152,364,500	APBD		50	200,000,000
1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Samarinda	54	930,467,500			54	950,467,500
1.06.04.1.01.09	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Samarinda	30	606,500,000	APBD		30	750,000,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**	**Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti**			**368,380,000**				**468,380,000**
1.06.04.1.02.08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak (orang)	Samarinda	120 Orang	368,380,000	APBD		120 Orang	468,380,000
1.06.04.1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**Tersedianya bantuan sosial bagi Lansia terlantar**			**490,606,000**				**500,000,000**
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (orang)	Samarinda	100 Orang	490,606,000	APBD		100 Orang	500,000,000
1.06.04.1.05	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti**	**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial**			**534,670,900**				**750,000,000**
1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Provinsi	Samarinda	28 Orang	534,670,900	APBD		28 Orang	750,000,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				**2,095,908,000**				**2,195,908,000**
1.06.05.1.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**Tersedianya bantuan sosial bagi Keluarga Fakir Miskin**			**2,095,908,000**				**2,195,908,000**
1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	WRSE dan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin yang mandiri (KUBE dan WRSE)	10 Kab / Kota	20 KUBE dan 40 WRSE	2,095,908,000	APBD		20 KUBE dan 40 WRSE	2,195,908,000
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**				**1,457,250,175**				**1,563,474,125**
1.06.06.1.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**			**1,457,250,175**				**1,563,474,125**
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	1,518 Orang	591,736,050	APBD		1,518 Orang	600,000,000
1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	200 Orang	202,040,000	APBD		200 Orang	300,000,000
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	200 Orang	663,474,125	APBD		200 Orang	663,474,125

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				**1,426,363,800**				**1,526,363,800**
1.06.02.1.02	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**Tersedianya Lembaga / Orsos dalam Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**			**1,426,363,800**				**1,526,363,800**
1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	Samarinda	105 Orang	1,426,363,800	APBD		105 Orang	1,526,363,800
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**				**715,302,100**				**815,302,100**
1.06.07.1.01	**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	**Jumlah TMP yang meningkat kualitas pemeliharaan dan pengelolaannya (Lokasi)**		**1 Lokasi**	**715,302,100**			**1 Lokasi**	**815,302,100**
1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Dokumen)	Samarinda	1 Lokasi	715,302,100	APBD		1 Lokasi	815,302,100
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**42,306,414,737**				**961,207,000**
1.06.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)**			**861,207,000**				**961,207,000**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Samarinda	7 Dok	861,207,000	APBD		7 Dok	961,207,000
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim**			**33,191,087,937**				**34,191,087,937**
1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	Samarinda	165 Orang	29,215,918,417	APBD		165 Orang	30,215,918,417
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	2 Dok	3,975,169,520	APBD		2 Dok	3,975,169,520
1.06.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah**			**11,533,500**				**12,533,500**
1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Samarinda	5 Orang	11,533,500	APBD		5 Orang	12,533,500
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim**			**2,516,870,750**				**2,616,870,750**
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Samarinda	1 Paket	199,089,450	APBD		1 Paket	199,089,450
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Samarinda	1 Paket	311,522,000	APBD		1 Paket	311,522,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Samarinda	1 Paket	295,486,500	APBD		1 Paket	295,486,500
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Samarinda	1 Lap	1,710,772,800	APBD		1 Lap	1,810,772,800
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tesedianya fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya**			**3,502,443,500**				**3,602,443,500**
1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Samarinda	6 Unit	2,546,570,000	APBD		6 Unit	2,646,570,000
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Samarinda	1 Paket	550,120,000	APBD		1 Paket	550,120,000
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Samarinda	30 Unit	405,753,500	APBD		30 Unit	405,753,500
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1 Paket**	**569,716,050**			**1 Paket**	**679,716,050**
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Samarinda	1 Lap	60,506,000	APBD		1 Lap	70,506,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Samarinda	1 Lap	509,210,050	APBD		1 Lap	609,210,050
1.06.01.1.09	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**2 Lap**	**1,653,556,000**			**2 Lap**	**1,763,556,000**
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Samarinda	5 Unit	70,147,000	APBD		5 Unit	80,147,000
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Samarinda	5 Unit	30,300,000	APBD		5 Unit	30,300,000
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Samarinda	200 Unit	801,694,000	APBD		200 Unit	901,694,000
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Samarinda	1 Unit	751,415,000	APBD		1 Unit	751,415,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI					**6,735,233,600**				**7,494,007,300**
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSTW-NP)**				**3,355,235,300**				**3,744,009,000**
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)**	**Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN**			**1,932,698,400**				**2,000,000,000**
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	1 Dok	1,932,698,400	APBD		1 Dok	2,000,000,000
1.06.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)**	**Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah**			**54,527,900**				**65,000,000**
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Samarinda	1 Paket	54,527,900	APBD		1 Paket	65,000,000
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah**			**788,508,000**				**898,508,000**
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	Samarinda	1 Paket	15,059,100	APBD		1 Paket	25,059,100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	459,008,300	APBD		1 Paket	459,008,300
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	3 Paket	29,440,600	APBD		3 Paket	29,440,600
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	1 Lap	285,000,000	APBD		1 Lap	385,000,000
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**			**287,088,200**				**388,088,200**
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	1 Lap	279,331,400	APBD		1 Lap	379,331,400
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Lap	7,756,800	APBD		1 Lap	8,756,800

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
f.1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)**	**Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya**			**292,412,800**				**392,412,800**
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Samarinda	6 Unit	111,405,000	APBD		6 Unit	211,405,000
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Samarinda	50 Unit	156,175,000	APBD		50 Unit	156,175,000
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	1 Unit	24,832,800	APBD		1 Unit	24,832,800
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSTW-NP)**				**3,379,998,300**				**3,749,998,300**
1.06.04.1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (UPTD PSTW-NP)**	**Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)**		**110 Orang**	**3,379,998,300**			**110 Orang**	**3,749,998,300**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuaidengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Samarinda	110 Orang	2,345,395,000	APBD		110 Orang	2,715,395,000
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediadalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Samarinda	110 Orang	44,325,000	APBD		110 Orang	44,325,000
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi	Samarinda	110 Orang	85,253,000	APBD		110 Orang	85,253,000
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Samarinda	110 Orang	147,753,700	APBD		110 Orang	147,753,700
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Samarinda	110 Orang	683,769,600	APBD		110 Orang	683,769,600
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Samarinda	20 Orang	73,502,000	APBD		20 Orang	73,502,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA					**4,902,121,043**				**6,412,121,043**
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSPAD)**				**2,440,142,043**				**2,950,142,043**
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)**	**Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN**			**1,255,964,720**				**1,455,964,720**
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	1 Lap	1,255,964,720	APBD		1 Lap	1,455,964,720
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)**	**Tesedianya fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya**			**444,674,023**				**544,674,023**
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	Samarinda	1 Paket	10,000,500	APBD		1 Paket	10,000,500
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	142,188,300	APBD		1 Paket	242,188,300
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	14,685,223	APBD		3 Paket	14,685,223
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	1 Lap	277,800,000	APBD		1 Lap	277,800,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)**	**Tersedinya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyurat kantor**			**299,277,300**				**309,277,300**
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	Samarinda	1 Lap	2,000,000	APBD		1 Lap	2,000,000
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Lap	297,277,300	APBD		1 Lap	307,277,300
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)**	**Jummlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**440,226,000**				**640,226,000**
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Samarinda	3 Unit	178,276,000	APBD		3 Unit	278,276,000
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Samarinda	40 Unit	62,150,000	APBD		70 Unit	162,150,000
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Samarinda	20 M2	199,800,000	APBD		1 Unit	199,800,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSPAD)**				**2,461,979,000**				**3,461,979,000**
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (UPTD PSPAD)**	**Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti**			**2,461,979,000**				**3,461,979,000**
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi	Samarinda	80 Orang	1,620,673,000	APBD		80 Orang	2,620,673,000
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Provinsi	Samarinda	80 Orang	626,390,000	APBD		80 Orang	626,390,000
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi	Samarinda	80 Orang	108,485,000	APBD		80 Orang	108,485,000
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah perserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Samarinda	80 Orang	77,100,000	APBD		80 Orang	77,100,000
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Samarinda	20 Orang	29,331,000	APBD		80 Orang	29,331,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN					**5,910,182,370**				**6,822,182,370**
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSAAH)**				**3,470,867,570**				**4,082,867,570**
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)**	**Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN**			**1,626,453,600**				**1,826,453,600**
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	1 Lap	1,626,453,600	APBD		1 Lap	1,826,453,600
1.06.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)**	**Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah**			**468,982,000**				**568,982,000**
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Samarinda	1 Paket	468,982,000	APBD		1 Paket	568,982,000
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah**			**754,785,470**				**854,785,470**
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	37,598,900	APBD		1 Paket	37,598,900
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	421,177,570	APBD		1 Paket	521,177,570

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	21,809,000	APBD		1 Paket	21,809,000
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	1 Lap	274,200,000	APBD		1 Lap	274,200,000
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSAAH)**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**			**6,647,800**				**8,647,800**
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeulair yang disediakan	Samarinda	1 Unit	6,647,800	APBD		1 Unit	8,647,800
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)**	**Jumlah Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah daerah**			**271,551,700**				**371,551,700**
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	Samarinda	1 Lap	5,556,000	APBD		1 Lap	5,556,000
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Lap	182,156,800	APBD		1 Lap	282,156,800
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Lap	83,838,900	APBD		1 Lap	83,838,900

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)**	**Jummlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**342,447,000**				**452,447,000**
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Samarinda	8 Unit	86,288,000	APBD		8 Unit	186,288,000
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Samarinda	20 Unit	58,159,000	APBD		20 Unit	58,159,000
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	4 Unit	198,000,000	APBD		4 Unit	208,000,000
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSAAH)**				**2,439,314,800**				**2,739,314,800**
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti (UPTD PSAAH)**	**Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti**			**2,439,314,800**				**2,739,314,800**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Samarinda	80 Orang	1,675,870,000	APBD		80 Orang	1,875,870,000
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Samarinda	80 Orang	364,774,000	APBD		80 Orang	464,774,000
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Samarinda	80 Orang	181,315,000	APBD		80 Orang	181,315,000
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Penghuni Panti	Samarinda	80 Orang	85,355,800	APBD		80 Orang	85,355,800
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Penghuni Panti	Samarinda	20 Orang	132,000,000	APBD		80 Orang	132,000,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA					**4,590,212,015**				**5,940,212,015**
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSBR)**				**2,816,913,972**				**3,166,913,972**
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSBR)**	**Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN**			**1,272,156,480**				**1,372,156,480**
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	2 Dok	1,272,156,480	APBD		2 Dok	1,372,156,480
b.1.06.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSBR)**	**Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah**			**84,907,000**				**84,907,000**
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Samarinda	1 Paket	84,907,000	APBD		1 Paket	84,907,000
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSBR)**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah**			**741,953,292**				**841,953,292**
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	59,467,900	APBD		1 Paket	59,467,900

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	302,671,392	APBD		1 Paket	302,671,392
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	24,086,000	APBD		1 Paket	124,086,000
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	1 Lap	355,728,000	APBD		1 Lap	355,728,000
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBR)**	**Tersedinya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyurat kantor**			**154,222,200**				**204,222,200**
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	Samarinda	1 Lap	10,017,600	APBD		1 Lap	10,017,600
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Lap	144,204,600	APBD		1 Lap	194,204,600
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(UPTD PSBR)**	**Jummlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**563,675,000**				**663,675,000**
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Samarinda	2 Unit	82,410,000	APBD		2 Unit	82,410,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Samarinda	40 Unit	68,038,000	APBD		40 Unit	68,038,000
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	20 Unit	413,227,000	APBD		20 Unit	513,227,000
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSBR)**				**1,773,298,043**				**2,773,298,043**
a.1.06.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSBR)**	**Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti**			**1,773,298,043**				**2,773,298,043**
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Samarinda	55 Orang	653,737,500	APBD		60 Orang	1,653,737,500

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Samarinda	55 Orang	252,149,500	APBD		75 Orang	252,149,500
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Samarinda	20 Orang	23,090,000	APBD		60 Orang	23,090,000
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Penghuni Panti	Samarinda	15 Orang	701,721,043	APBD		60 Orang	701,721,043
1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Penghuni Panti	Samarinda	15 Orang	142,600,000	APBD		60 Orang	142,600,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA					**1,911,234,942**				**2,412,234,942**
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSKW-HM)**				**1,331,090,328**				**1,732,090,328**
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSKW-HM)**	**Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN**			**679,775,680**				**879,775,680**
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	2 Dok	679,775,680	APBD		2 Dok	879,775,680
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSKW-HM)**	**Tesedianya fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya**			**254,591,100**				**255,591,100**
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	Samarinda	1 Paket	4,686,200	APBD		1 Paket	5,686,200
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	50,868,500	APBD		1 Paket	50,868,500
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	2,836,400	APBD		1 Paket	2,836,400
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	1 Lap	196,200,000	APBD		1 Lap	196,200,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSKW-HM)**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan**			**179,285,548**				**179,285,548**
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Lap	179,285,548	APBD		1 Lap	179,285,548
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSKW-HM)**	**Tersedinya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya**			**217,438,000**				**417,438,000**
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Samarinda	1 Unit	28,850,000	APBD		5 Unit	128,850,000
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Samarinda	1 Unit	38,588,000	APBD		20 Unit	38,588,000
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	30 Unit	150,000,000	APBD		1 Unit	250,000,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSKW-HM)**				**580,144,614**				**680,144,614**
1.06.04.1.05	**Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalaha Sosial (PMKS) Lainnya Di Luar HIV/AIDS Dan Napza didalam Panti**	**Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial**			**580,144,614**				**680,144,614**
1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Samarinda	35 Orang	285,300,000	APBD		35 Orang	385,300,000
1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Samarinda	35 Orang	255,954,614	APBD		35 Orang	255,954,614
1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Samarinda	35 Orang	5,340,000	APBD		35 Orang	5,340,000
1.06.04.1.05.0010	Pemulangan Ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Samarinda	10 Orang	33,550,000	APBD		10 Orang	33,550,000
JUMLAH ANNGARAN PERUBAHAN DINAS DAN UPTD TAHUN 2023					**75,805,314,182**				**83,428,067,932**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Penganggaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam penanganan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui usaha bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, oleh karena itu Rencana Kerja yang disusun dalam laporan Renja ini harus mengkordinir peran serta pihak-pihak tersebut dalam Penanganan Pembangunan Kesejahteraan Sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Adapun rencana kerja yang disusun antara lain terdiri dari 6 Program dan 15 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan yang terdiri dari unsur Dinas Sosial dan UPTD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Secara keseluruhan rumusan program dan kegiatan untuk tahun 2023 seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 1 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
Dinas Sosial							**51,756,330,212**							**11,481,102,525**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial**	**Orang**		**Orang**	**1169 Orang**	**3,755,091,400**						**1169 Orang**	**4,418,847,500**	
1.06.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**	**Tersedianya pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar**	**Orang**		**Orang**	**304 Orang**	**2,361,434,500**						**304 Orang**	**2,700,467,500**	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuaidengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				200 Orang	672,102,500	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyandang Disabilitas Terlantar	200 Orang	800,000,000	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)				50 Orang	152,364,500	10 Kab / Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyandang Disabilitas Terlantar	50 Orang	200,000,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				54 Orang	930,467,500	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyandang Disabilitas Terlantar	54 Orang	950,467,500	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.09	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				30 Orang	606,500,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyandang Disabilitas Terlantar	30 Orang	750,000,000	Dinas Sosial
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**	**Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti**	**Anak**		**Anak**	**120 Anak**	**368,380,000**						**120 Anak**	**468,380,000**	
1.06.04.1.02.08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak (orang)				120 Orang	368,380,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anak Terlantar	120 Orang	468,380,000	Dinas Sosial
1.06.04.1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**Tersedianya bantuan sosial bagi Lansia terlantar**	**Orang**		**Orang**	**100 Orang**	**490,606,000**						**100 Orang**	**500,000,000**	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (orang)				100 Orang	490,606,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lansia Terlantar	100 Orang	500,000,000	Dinas Sosial
1.06.04.1.05	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti**	**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial**	**Orang**		**Orang**	**28 Orang**	**534,670,900**						**28 Orang**	**750,000,000**	
1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Provinsi				28 Orang	534,670,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PMKS Terlantar	28 Orang	750,000,000	Dinas Sosial
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar**	**Orang**		**Orang**	**440 Orang**	**2,095,908,000**						**440 Orang**	**2,195,908,000**	
1.06.05.1.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**Tersedianya bantuan sosial bagi Keluarga Fakir Miskin**				**440 Orang**	**2,095,908,000**						**440 Orang**	**2,195,908,000**	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	WRSE dan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin yang mandiri (KUBE dan WRSE)				20 KUBE dan 40 WRSE	2,095,908,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PMKS	20 KUBE dan 40 WRSE	2,195,908,000	Dinas Sosial
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan sosial**	**Orang**		**Orang**	**1518 Orang**	**1,457,250,175**						**1518 Orang**	**1,563,474,125**	
1.06.06.1.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**Orang**		**Orang**	**1518 Orang**	**1,457,250,175**						**1518 Orang**	**1,563,474,125**	
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat kewenangan Provinsi				1,518 Orang	591,736,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Korban Bencana	1,518 Orang	600,000,000	Dinas Sosial
1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				200 Orang	202,040,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Korban Bencana	200 Orang	300,000,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Provinsi				200 Orang	663,474,125	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Korban Bencana	200 Orang	663,474,125	Dinas Sosial
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Lembaga Sosial yang di berdayakan**	**Lembaga**		**Lembaga**	**4 Lembaga**	**1,426,363,800**							**1,526,363,800**	
1.06.02.1.02	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**Tersedianya Lembaga / Orsos dalam Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**Lembaga**		**Lembaga**	**4 Lembaga**	**1,426,363,800**							**1,526,363,800**	
1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)				105 Orang	1,426,363,800	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lemabaga Sosial	105 Orang	1,526,363,800	Dinas Sosial
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Taman Makam Pahlawan yang di kelola**	**Lokasi**		**Lokasi**	**1 Lokasi**	**715,302,100**						**1 Lokasi**	**815,302,100**	
1.06.07.1.01	**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	**Jumlah TMP yang meningkat kualitas pemeliharaan dan pengelolaannya (Lokasi)**	**Lokasi**		**Lokasi**	**1 Lokasi**	**715,302,100**						**1 Lokasi**	**815,302,100**	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Dokumen)				1 Lokasi	715,302,100	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			TMP	1 Lokasi	815,302,100	Dinas Sosial
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran**	**%**		**%**	**90%**	**42,306,414,737**						**90%**	**961,207,000**	
1.06.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)**	**Dok**		**Dok**	**7 Dok**	**861,207,000**						**7 Dok**	**961,207,000**	
1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				7 Dok	861,207,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan NON ASN	7 Dok	961,207,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim**	**Tahun**		**Tahun**	**1 Tahun**	**33,191,087,937**						**1 Tahun**	**34,191,087,937**	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)				165 Orang	29,215,918,417	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan NON ASN	165 Orang	30,215,918,417	Dinas Sosial
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dok	3,975,169,520	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan NON ASN	2 Dok	3,975,169,520	Dinas Sosial
1.06.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah**	**Orang**		**Orang**	**5 Orang**	**11,533,500**						**5 Orang**	**12,533,500**	
1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	11,533,500	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan NON ASN	5 Orang	12,533,500	Dinas Sosial
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim**	**Paket**		**Paket**	**1 Paket**	**2,516,870,750**						**1 Paket**	**2,616,870,750**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				1 Paket	199,089,450	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	199,089,450	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				1 Paket	311,522,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	311,522,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				1 Paket	295,486,500	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	295,486,500	Dinas Sosial
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)				1 Lap	1,710,772,800	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	1,810,772,800	Dinas Sosial
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tesedianya fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya**	**Unit**		**Unit**	**36 Unit**	**3,502,443,500**						**36 Unit**	**3,602,443,500**	
1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)				6 Unit	2,546,570,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	6 Unit	2,646,570,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)				1 Paket	550,120,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	550,120,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
									Alokasi Umum						
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)				30 Unit	405,753,500	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	30 Unit	405,753,500	Dinas Sosial
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Paket**		**Paket**	**1 Paket**	**569,716,050**						**1 Paket**	**679,716,050**	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				1 Lap	60,506,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	70,506,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				1 Lap	509,210,050	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	609,210,050	Dinas Sosial
1.06.01.1.09	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan**		**Laporan**	**2 Lap**	**1,653,556,000**						**2 Lap**	**1,763,556,000**	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)				5 Unit	70,147,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	5 Unit	80,147,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				5 Unit	30,300,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	5 Unit	30,300,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				200 Unit	801,694,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	200 Unit	901,694,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				1 Unit	751,415,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	751,415,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI							**6,735,233,600**							**7,494,007,300**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSTW-NP)**	**Persentase Pengembangan Kompetensi ASN**	**%**		**%**	**90%**	**3,355,235,300**						**90%**	**3,744,009,000**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)**	**Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN**	**Dok**		**Dok**	**1 Dok**	**1,932,698,400**						**1 Dok**	**2,000,000,000**	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dok	1,932,698,400	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan NON ASN	1 Dok	2,000,000,000	Dinas Sosial (UPTD PSTW)
1.06.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)**	**Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah**	**Paket**		**Paket**	**1 Paket**	**54,527,900**						**1 Paket**	**65,000,000**	
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	54,527,900	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan NON ASN	1 Paket	65,000,000	Dinas Sosial (UPTD PSTW)

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah**	**Paket**		**Paket**	**1 Paket**	**788,508,000**						**1 Paket**	**898,508,000**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan				1 Paket	15,059,100	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	25,059,100	Dinas Sosial (UPTD PSTW)
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	459,008,300	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	459,008,300	Dinas Sosial (UPTD PSTW)
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	29,440,600	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	3 Paket	29,440,600	Dinas Sosial (UPTD PSTW)
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lap	285,000,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	385,000,000	Dinas Sosial (UPTD PSTW)

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	**Laporan**		**Laporan**	**2 Lap**	**287,088,200**						**2 Lap**	**388,088,200**	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Lap	279,331,400	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	379,331,400	Dinas Sosial (UPTD PSTW)
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap	7,756,800	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	8,756,800	Dinas Sosial (UPTD PSTW)
f.1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)**	**Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya**	**Unit**		**Unit**	**57 Unit**	**292,412,800**						**57 Unit**	**392,412,800**	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	111,405,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	6 Unit	211,405,000	Dinas Sosial (UPTD PSTW)

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				50 Unit	156,175,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	50 Unit	156,175,000	Dinas Sosial (UPTD PSTW)
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	24,832,800	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	24,832,800	Dinas Sosial (UPTD PSTW)
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSTW-NP)**	**Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial**	**Orang**		**Orang**	**110 Orang**	**3,379,998,300**						**110 Orang**	**3,749,998,300**	
1.06.04.1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (UPTD PSTW-NP)**	**Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)**	**Orang**		**Orang**	**110 Orang**	**3,379,998,300**						**110 Orang**	**3,749,998,300**	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuaidengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				110 Orang	2,345,395,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lansia Terlantar	110 Orang	2,715,395,000	Dinas Sosial (UPTD PSTW)

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediadalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				110 Orang	44,325,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lansia Terlantar	110 Orang	44,325,000	Dinas Sosial (UPTD PSTW)
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi				110 Orang	85,253,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lansia Terlantar	110 Orang	85,253,000	Dinas Sosial (UPTD PSTW)
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				110 Orang	147,753,700	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lansia Terlantar	110 Orang	147,753,700	Dinas Sosial (UPTD PSTW)
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				110 Orang	683,769,600	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lansia Terlantar	110 Orang	683,769,600	Dinas Sosial (UPTD PSTW)
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				20 Orang	73,502,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lansia Terlantar	20 Orang	73,502,000	Dinas Sosial (UPTD PSTW)

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA							**4,902,121,043**							**6,412,121,043**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSPAD)**	**Persentase Pengembangan Kompetensi ASN**	**%**		**%**	**90%**	**2,440,142,043**						**90%**	**2,950,142,043**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)**	**Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN**	**Dok**		**Dok**	**1 Dok**	**1,255,964,720**						**1 Dok**	**1,455,964,720**	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dok	1,255,964,720	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan NON ASN	1 Dok	1,455,964,720	Dinas Sosial (UPTD PSPAD)
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)**	**Tesedianya fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya**	**Paket**		**Paket**	**1 Paket**	**444,674,023**						**1 Paket**	**544,674,023**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan				1 Paket	10,000,500	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	10,000,500	Dinas Sosial (UPTD PSPAD)

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	142,188,300	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	242,188,300	Dinas Sosial (UPTD PSPAD)
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14,685,223	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	3 Paket	14,685,223	Dinas Sosial (UPTD PSPAD)
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lap	277,800,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	277,800,000	Dinas Sosial (UPTD PSPAD)
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)**	**Tersedinya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyurat kantor**	**Laporan**		**Laporan**	**1 Lap**	**299,277,300**							**309,277,300**	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan				1 Lap	2,000,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	2,000,000	Dinas Sosial (UPTD PSPAD)

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap	297,277,300	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	307,277,300	Dinas Sosial (UPTD PSPAD)
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)**	**Jummlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Unit**		**Unit**	**63 Unit**	**440,226,000**						**63 Unit**	**640,226,000**	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	178,276,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	3 Unit	278,276,000	Dinas Sosial (UPTD PSPAD)
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	62,150,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	40 Unit	162,150,000	Dinas Sosial (UPTD PSPAD)

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi				20 M2	199,800,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	20 M2	199,800,000	Dinas Sosial (UPTD PSPAD)
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSPAD)**	**Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial**	**Orang**		**Orang**	**80 Orang**	**2,461,979,000**					**Orang**	**80 Orang**	**3,461,979,000**	
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (UPTD PSPAD)**	**Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti**	**Orang**		**Orang**	**80 Orang**	**2,461,979,000**					**Orang**	**80 Orang**	**3,461,979,000**	
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi				80 Orang	1,620,673,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anak Terlantar	80 Orang	2,620,673,000	Dinas Sosial (UPTD PSPAD)

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Provinsi				80 Orang	626,390,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anak Terlantar	80 Orang	626,390,000	Dinas Sosial (UPTD PSPAD)
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi				80 Orang	108,485,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anak Terlantar	80 Orang	108,485,000	Dinas Sosial (UPTD PSPAD)
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah perserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				80 Orang	77,100,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anak Terlantar	80 Orang	77,100,000	Dinas Sosial (UPTD PSPAD)
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				20 Orang	29,331,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anak Terlantar	80 Orang	29,331,000	Dinas Sosial (UPTD PSPAD)

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN							**5,910,182,370**							**6,822,182,370**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSAAH)**	**Persentase Pengembangan Kompetensi ASN**	**%**		**%**	**90%**	**3,470,867,570**						**90%**	**4,082,867,570**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)**	**Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN**	**Laporan**		**Laporan**	**1 Lap**	**1,626,453,600**						**1 Lap**	**1,826,453,600**	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Lap	1,626,453,600	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan NON ASN	1 Lap	1,826,453,600	Dinas Sosial (UPTD PSAAH)
1.06.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)**	**Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah**	**Paket**		**Paket**	**1 Paket**	**468,982,000**						**1 Paket**	**568,982,000**	
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	468,982,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan NON ASN	1 Paket	568,982,000	Dinas Sosial (UPTD PSAAH)

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah**	**Paket**		**Paket**	**1 Paket**	**754,785,470**						**1 Paket**	**854,785,470**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	37,598,900	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	37,598,900	Dinas Sosial (UPTD PSAAH)
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	421,177,570	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	521,177,570	Dinas Sosial (UPTD PSAAH)
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	21,809,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	21,809,000	Dinas Sosial (UPTD PSAAH)
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lap	274,200,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	274,200,000	Dinas Sosial (UPTD PSAAH)

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSAAH)**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**Unit**		**Unit**	**1 Unit**	**6,647,800**						**1 Unit**	**8,647,800**	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeulair yang disediakan				1 Unit	6,647,800	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	8,647,800	Dinas Sosial (UPTD PSAAH)
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)**	**Jumlah Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah daerah**	**Laporan**		**Laporan**	**1 Lap**	**271,551,700**						**1 Lap**	**371,551,700**	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan				1 Lap	5,556,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	5,556,000	Dinas Sosial (UPTD PSAAH)
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap	182,156,800	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	282,156,800	Dinas Sosial (UPTD PSAAH)

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Lap	83,838,900	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	83,838,900	Dinas Sosial (UPTD PSAAH)
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)**	**Jummlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Unit**		**Unit**	**32 Unit**	**342,447,000**						**32 Unit**	**452,447,000**	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	86,288,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	8 Unit	186,288,000	Dinas Sosial (UPTD PSAAH)
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	58,159,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	20 Unit	58,159,000	Dinas Sosial (UPTD PSAAH)

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	198,000,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	4 Unit	208,000,000	Dinas Sosial (UPTD PSAAH)
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSAAH)**	**Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial**	**Orang**		**Orang**	**80 Orang**	**2,439,314,800**						**80 Orang**	**2,739,314,800**	
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti (UPTD PSAAH)**	**Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti**				**80 Orang**	**2,439,314,800**						**80 Orang**	**2,739,314,800**	
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				80 Orang	1,675,870,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anak Terlantar	80 Orang	1,875,870,000	Dinas Sosial (UPTD PSAAH)

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				80 Orang	364,774,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anak Terlantar	80 Orang	464,774,000	Dinas Sosial (UPTD PSAAH)
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				80 Orang	181,315,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anak Terlantar	80 Orang	181,315,000	Dinas Sosial (UPTD PSAAH)
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Penghuni Panti				80 Orang	85,355,800	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anak Terlantar	80 Orang	85,355,800	Dinas Sosial (UPTD PSAAH)
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Penghuni Panti				20 Orang	132,000,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anak Terlantar	80 Orang	132,000,000	Dinas Sosial (UPTD PSAAH)

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA							**4,590,212,015**							**5,940,212,015**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSBR)**	**Persentase kualitas Pemerintahan Daerah**	**%**		**%**	**90%**	**2,816,913,972**						**90%**	**3,166,913,972**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSBR)**	**Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN**	**Dok**		**Dok**	**2 Dok**	**1,272,156,480**						**2 Dok**	**1,372,156,480**	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dok	1,272,156,480	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan NON ASN	2 Dok	1,372,156,480	Dinas Sosial (UPTD PSBR)
b.1.06.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSBR)**	**Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah**	**Paket**		**Paket**	**1 Paket**	**84,907,000**							**84,907,000**	
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	84,907,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan NON ASN	1 Paket	84,907,000	Dinas Sosial (UPTD PSBR)

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSBR)**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah**	**Paket**		**Paket**	**1 Paket**	**741,953,292**						**1 Paket**	**841,953,292**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	59,467,900	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	59,467,900	Dinas Sosial (UPTD PSBR)
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	302,671,392	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	302,671,392	Dinas Sosial (UPTD PSBR)
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	24,086,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	124,086,000	Dinas Sosial (UPTD PSBR)
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lap	355,728,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	355,728,000	Dinas Sosial (UPTD PSBR)
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Tersedinya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyurat kantor**	**Laporan**		**Laporan**	**1 Lap**	**154,222,200**							**204,222,200**	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
	Daerah (UPTD PSBR)														
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan				1 Lap	10,017,600	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	10,017,600	Dinas Sosial (UPTD PSBR)
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap	144,204,600	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	194,204,600	Dinas Sosial (UPTD PSBR)
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(UPTD PSBR)**	**Jummlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Unit**		**Unit**	**62 Unit**	**563,675,000**							**663,675,000**	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	82,410,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	2 Unit	82,410,000	Dinas Sosial (UPTD PSBR)

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	68,038,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	40 Unit	68,038,000	Dinas Sosial (UPTD PSBR)
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	413,227,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	20 Unit	513,227,000	Dinas Sosial (UPTD PSBR)
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSBR)**	**Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial**	**Orang**		**Orang**	**55 Orang**	**1,773,298,043**						**55 Orang**	**2,773,298,043**	
a.1.06.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSBR)**	**Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti**	**Orang**		**Orang**	**55 Orang**	**1,773,298,043**						**55 Orang**	**2,773,298,043**	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				55 Orang	653,737,500	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Remaja Terlantar Dalam Panti	60 Orang	1,653,737,500	Dinas Sosial (UPTD PSBR)

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				55 Orang	252,149,500	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Remaja Terlantar Dalam Panti	75 Orang	252,149,500	Dinas Sosial (UPTD PSBR)
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				20 Orang	23,090,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Remaja Terlantar Dalam Panti	60 Orang	23,090,000	Dinas Sosial (UPTD PSBR)
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Penghuni Panti				15 Orang	701,721,043	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Remaja Terlantar Dalam Panti	60 Orang	701,721,043	Dinas Sosial (UPTD PSBR)
1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Penghuni Panti				15 Orang	142,600,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Remaja Terlantar Dalam Panti	60 Orang	142,600,000	Dinas Sosial (UPTD PSBR)

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA							**1,911,234,942**							**2,412,234,942**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSKW-HM)**	**Persentase kualitas Pemerintahan Daerah**	**%**		**%**	**90%**	**1,331,090,328**						**90%**	**1,732,090,328**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSKW-HM)**	**Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN**	**Dok**		**Dok**	**2 Dok**	**679,775,680**						**2 Dok**	**879,775,680**	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dok	679,775,680	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan NON ASN	2 Dok	879,775,680	Dinas Sosial (UPTD PSKW)
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSKW-HM)**	**Tesedianya fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya**	**Paket**		**Paket**	**1 Paket**	**254,591,100**						**1 Paket**	**255,591,100**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan				1 Paket	4,686,200	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	5,686,200	Dinas Sosial (UPTD PSKW)

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,868,500	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	50,868,500	Dinas Sosial (UPTD PSKW)
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2,836,400	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	2,836,400	Dinas Sosial (UPTD PSKW)
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lap	196,200,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	196,200,000	Dinas Sosial (UPTD PSKW)
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSKW-HM)**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan**	**Laporan**		**Laporan**	**1 Lap**	**179,285,548**							**179,285,548**	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap	179,285,548	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	179,285,548	Dinas Sosial (UPTD PSKW)

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSKW)**	**Tersedinya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya**	**Unit**		**Unit**	**32 Unit**	**217,438,000**							**417,438,000**	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	28,850,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	5 Unit	128,850,000	Dinas Sosial (UPTD PSKW)
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	38,588,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi			Sarana dan Prasarana Kantor	20 Unit	38,588,000	Dinas Sosial (UPTD PSKW)
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	150,000,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	250,000,000	Dinas Sosial (UPTD PSKW)

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSKW-HM)**	**Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial**	**Orang**		**Orang**	**35 Orang**	**580,144,614**						**35 Orang**	**680,144,614**	
1.06.04.1.05	**Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalaha Sosial (PMKS) Lainnya Di Luar HIV/AIDS Dan Napza didalam Panti**	**Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial**	**Orang**		**Orang**	**35 Orang**	**580,144,614**						**35 Orang**	**680,144,614**	
1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				35 Orang	285,300,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35 Orang	385,300,000	Dinas Sosial (UPTD PSKW)
1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				35 Orang	255,954,614	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35 Orang	255,954,614	Dinas Sosial (UPTD PSKW)

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah penanggung jawab
						Terget 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				35 Orang	5,340,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35 Orang	5,340,000	Dinas Sosial (UPTD PSKW)
1.06.04.1.05.0010	Pemulangan Ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				10 Orang	33,550,000	Samarinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Orang	33,550,000	Dinas Sosial (UPTD PSKW)
JUMLAH ANNGARAN PERUBAHAN DINAS DAN UPTD TAHUN 2023							**75,805,314,182**							**83,428,067,932**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Dinas Sosial Tahun 2023 ini merupakan rencana akhir kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kalimantan Timur serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Renja Perubahan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran Perubahan 2023.

Dengan adanya Renja Perubagan Dinas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun dengan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Samarinda, Agustus 2023

Kepala,

Drs. Andi Muhammad Ishak, Apt., M.Si.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19680814 199403 1 012

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bab I. Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa Azas dan Tujuannya adalah : 1). Pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi, dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional; 2). Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan; 3). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Azas Umum Penyelenggaraan Negara; dan 4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk : a). mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b). menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; c). menjamin keterkaitan dan konsistensi antara ***Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pengawasan***; d). mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e). menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam perencanaan pembangunan nasional terdapat 4 (empat) tahapan perencanaan meliput : a). Penyusunan Rencana; b). Penetapan Rencana; c). Pengendalian pelaksanaan rencana; dan d). Evaluasi pelaksanaan rencana. Dalam rangka Penyusunan Rencana Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Renstra-SKPD sesuai dengan RPJMD, RENSTRA KEMENTERIAN dan RENSTRA PD sebagai bahan masukan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pedoman penyusunan RAPBD dan RAPBN TA. 2023 pada Musrenbang Tahun 2022.

Berdasarkan azas, tujuan dan tahapan perencanaan pembangunan tersebut diatas Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun

Anggaran 2023, mengacu Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, memperhatikan usulan Bidang Teknis Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, memperhatikan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, arah kebijakan dan aspirasi pemangku kepentingan pada Musrenbang KALTIM 2022 serta arahan Musrenbang Nasional 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279);

3. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

4. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355)

5. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

6. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 126, dan Tambahan Lembaran Negara RI Noor 4438).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Deknonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);

12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 12/MEN/IV/2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Program Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08;

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

16. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

17. Peraturan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 050 / 583 / SETDIS-PROG / DTKT tentang Rencana Strategis SKPD Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023.

18. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

19. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 050./2019/SETDIS-PROG/DTKT/2022 tentang Rencana Kerja Tahun 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud.

Mensinergikan perencanaan program sebagaimana rencana program yang akan dituangkan dalam RPJM Daerah Provinsi Kalimatan Timur 2019 - 2023, RENSTRA Kementerian NAKERTRANS Tahun 2019 - 2024 maupun RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Tahun 2019 - 2023, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terangkum dalam hasil Musrenbang baik tingkat Kabupaten/Kota, Raker Gubernur dengan Bupati/Walikota se Kalimantan Timur Tahun 2021.

2. Tujuan.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, adalah sebagai pedoman dan bahan penyusunan program kegiatan satuan kerja yang pendanaannya melalui alokasi APBD dan APBN Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA SKPD

Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 meliputi :

BAB I **PENDAHULUAN**, Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020** Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.** berisi: telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan terdiri dari : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.**

Berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023.

BAB V **PENUTUP.** Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, Kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra PD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra PD

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur menangani urusan wajib Ketenagakerjaan dan urusan pilihan Ketransmigrasian. Urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja dengan Program Prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019 - 2023 terdiri dari 7 (tujuh) yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketengakerjaan, Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif, Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Program Peningkatan Produktivitas, dan Program Pelatihan Pencari Kerja. Urusan pilihan Ketransmigrasian yang terdiri dari 1 (satu) Program yaitu Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan 2 UPTD yaitu : UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Balikpapan, dan UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Bontang.

Adapun capaian (Realisasi) 2021 hingga triwulan IV Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui kegiatan yaitu :
   a. Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dengan target 160 orang dan realisasi kinerja sebanyak 160 orang, sehingga persentase realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,08 %.
   b. Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dengan target 160 orang dan realisasi kinerja sebanyak 10 LPK, sehingga persentase realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 77,38 %.
   c. Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah dengan target dan realisasi kinerja sebanyak 15 Perusahaan, sehingga persentase realisasi fisik sebesar 51,95% dan realisasi keuangan sebesar 51,95%.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja melalui kegiatan yaitu :
   a. Kegiatan Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi fisik sebesar 73,07% dan realisasi keuangan sebesar 73,07%.
   b. Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi fisik sebesar 41,64% dan realisasi keuangan sebesar 41,64%.
   c. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan realisasi fisik sebesar 42,27% dan realisasi keuangan sebesar 42,27%.
   d. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi realisasi fisik sebesar 45,79% dan realisasi keuangan sebesar 100%.
   e. Kegiatan Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan realisasi fisik sebesar 35,54% dan realisasi keuangan sebesar 35,54%.
   f. Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan realisasi fisik sebesar 25,52% dan realisasi keuangan sebesar 25,52%.
3. Program Hubungan Industrial melalui kegiatan yaitu:
   a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kotadengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 98,75%.
   b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi dengan output 3 dokumen dari target kinerja 3 dokumen yang salah satunya berupa terbitnya SK Gubernur mengenai UMP Tahun 2021 sehingga realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,73% .
   c. Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral

Kabupaten/Kota (UMSK) dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 97,77%.

4. Program Pengawasan Ketenagakerjaan melalui kegiatan yaitu :
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan output 150 perusahaan dari target kinerja 150 perusahaan dengan realisasi fisik sebesar 100% atau 224 perusahaan dan realisasi keuangan sebesar 95%.
5. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi melalui kegiatan yaitu:
   a. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,22%.
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi melalui kegiatan yaitu:
   a. Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,43%.
7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi melalui kegiatan yaitu:
   a. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan Provinsi dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,64%.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	33,14 %	26,04%	78%
2	Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial (%)	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Penerapan Norma Ketenagakerjaan	Persentase Menurunnya Jumlah Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan (%)	10%	86.15%	100%
4	Mewujudkan Transmigrasi Sejahtera	Jumlah Transmigran Mandiri (Kimtrans)	1 Kimtrans	1 Kimtrans	100%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2019 s/d 2023 (selama periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Capaian Program (RenstraPerangkat Daerah) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegaitan Tahun lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Rensta (%)
1	2	*3*	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**KETENAGAKERJAAN**									
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	***Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor***	**100 %**	**100**	**91**	**100**	**100**	**91**		
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	*Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran*	58 bulan	12	12	100	100	12		

2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	***Meningkatnya Fungsi Sarana & Prasarana Aparatur***	**100**	**%**	**100**	**91,00**	**100**	**100**	**91**	
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	*Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor*	600	unit	100	9	100	100	9	
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	*Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan prasarana kantor*	60	bulan	12	12	100	100	12	
3	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**	***Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Daerah***	**100**	**%**	**100**	**85**	**98**	**100**	**100**	
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemrintah Daerah	*Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah*	750	kegiatan	50	40	100	100	50	

	Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur	*Persentase Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/ bimtek*	245	orang	10	10	95	100	10		
4	**Program Penyusunan Dokumen Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan**	***Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah***	**100**	**%**	**100**	**75**	**75**	**100**	**100**		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Aggaran*	50	dokumen	10	10	10	100	10		
	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	*Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan*	40	dokumen	8	8	8	100	8		
5	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	***meningkatnya lulusan pelatihan yang ditempatkan***	**100**	**%**	**66**	**75**	**75**	**100,00**	**75**		

	Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja	*Jumlah pencari kerja yang ditingkatkan ketrampilanny a*	500	orang	482	210	210	100	500		
	Pengadaan sarana dan prasarana pelatihan	*Jumlah peralatan gedung kantor*	15	Unit	2	15	-		15		
	Peningkatan profesionalisme instruktur pelatihan	*Jumlah instruktur yang dilatih*	290	orang	-	50	30	60	50		
	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	*Tersedianya assesor dan tempat uji kompetensi*	1	LSP	90	1		1	15		
6	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	***Prosentase penempatan tenaga kerja***	**31**	**%**	**27**	**31**		**86,83**	**31**		
	Penyusunan Informasi Bursa tenaga kerja	*Jumlah dokumen Informasi Bursa tenaga kerja*	14	dokum en	4	2	2	100	2		

	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	*jumlah laporan pencari kerja yang dilatih kewirausahaan*	5	dokumen	220	100	100	100	220		
	Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	*Jumlah laporan pencari kerja yang memiliki ketrampilan*	10	dokumen	2	20	20	100	2		
	Perluasan Kesempatan Kerja melalui padat Karya	*Jumlah pencari kerja yang mendapat pekerjaan sementara*	1.504	orang	306	81	81	150	204		
7	**Program Perlindungan & Pengembangan Lembaga KK**	***Peningkatan Perlindungan & Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan***	**100**	**%**	**100**	**100**		**100**	**100**		
	Fasilitas Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan HI	*mencegah perselisihan hubungan industrial*	350	perusahaan	50	0		100	50		

	Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	*jumlah perusahaan yang dibina*	150	perusahaan	150	0		100	150		
	Peningkatan Fungsi-fungsi Lembaga-lembaga Ketenagakerjaan	*Selesainya SK Gubernur tentang UMP*	15	dokumen	3	3	100	100	3		
8	**Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan KK**	***Persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Ketenagakerjaan***	**80,00**	**%**	**169**	**250**	**250**	**100**	**120**		
	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	*Jumlah Perusahaan yang di Bina*	4.284	perusahaan	60	75	75	100	1.056		
	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja, Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Norma	*Jumlah Perusahaan yang di Bina dan diawasi*	13225	perusahaan	25	70	70	100	3.300		

	Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak									
	Peningkatan Perlindungan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	*Jumlah Perusahaan yang di Bina dan diawasi*	3 perusahaan	31	28	28	100	36		
9	**Program Peningkatan Produktivitas**	***Persentase Perusahaan yang meningkat Produktivitasnya***	**80 %**	**160**	**160**	**160**	**100**	**160**		
	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	*Jumlah Jumlah yang dilatih peningkatan produktivitas tenaga kerja*	500 orang	160	160	160	100	160		
10	**Program Pelatihan Pencari Kerja**	***Persentase lulusan Pelatihan yang ditempatkan***	**80 %**	**84**	**95**	**95**	**100**	**160**		

	Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Ketrampilan Kerja	*jumlah BLK/LLK yang memenuhi standar sebagai tempat ujikompetensi (TUK) Kejuruan*	4	kegiatan	3	10	10	100	10		
	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja (BLKI BPP & BLKI BTG)	*Jumlah pencari kerja yang dilatih BLK*	1.312	orang	32	160	160	100	160		
2	**KETRANSMIGRASIAN**										
1	**Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi**	***Meningkatnya fungsi kawasan transmigrasi sebagai kawasan strategis dan cepat tumbuh***	**5**	**kim trans**	**4**	**4**	**4**	**100**	**4**		
	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan	*Jumlah dokumen yang telah disepakati dengan Provinsi lain*	18	dokumen	3	3	3	0	1		

	transmigrasi									
	Koordinasi Ketransmigrasian	*Jumlah permukiman transmigrasi yang disediakan sarana dan prasarana sosial*	500	orang	50	-	-	-	100		
	Evaluasi Penyediaan tanah Transmigrasi	*Tersedianya lahan transmigrasi*	15	dokumen	3	3	3	100	3		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

Berdasarkan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 - 2023 target dan capaian kinerja yang telah ada akan dicapai sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
PROVINSI KALTIM

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	*3*	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja	-	Presentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	51	52	53	54	95,40	95,81	95	95	
2	Persentase Meningkatnya Kasus Hubungan Industrial	-	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaaftar peserta BPJS Ketanagakerjaan	100	100	100	100	99,53	94,76	94	94	
3	Persentase Menurunnya Jumlah Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan	-	Presentase perusahaan yang menerapkan Peraturan Perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	10	10	10	10	97,82	100	97	97	
4	Jumlah Transmigran Mandiri	-	Jumlah satuan permukiman transmigran yang difasilitasi pembangunannya	1	1	1	1	1	1	1	1	

2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

2.3.1 Koordinasi dan Sinergi Program/Kegiatan

Program/Kegiatan Kemenaker RI (Sumber dana APBN), yaitu :

a. Bidang Ketenagakerjaan :

1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan produktivitas (PKTKP):

   Dengan Kegiatan :

   a. Kegiatan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP)
   b. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK)
   c. Pelatihan pemagangan dalam negeri
   d. Penilaian Kinerja Perusahaan (Siddhakarya)
   e. Kegiatan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (imta) dan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing tahun 2020

2. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

   Dengan Kegiatan :

   a) Pengelolaan Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial.
   b) Peningkatan Penerapan Pengupahan.
   c) Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
   d) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
   e) Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

3. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan.

   Dengan kegiatan :

   a) Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak;

b) Peningkatan Penerapan Norma Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
c) Peningkatan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
d) Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan.

b. Bidang Ketransmigrasian

1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
   Dengan Kegiatan :
   a) Fasilitasi Penempatan Transmigrasi;
   b) Pembangunan permukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi;
   c) Penyusunan rencana pembangunan kawasan transmigrasi;
   d) Partisipasi masyarakat.
2. Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi.
   Dengan kegiatan :
   a) Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi;
   b) Pengembangan usaha di kawasan transmigrasi;
   c) Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di kawasan Transmigrasi;
   d) Penyerasian lingkungan di kawasan transmigrasi.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD:

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur pada dasarnya sudah bersinergi dengan Program/Kegiatan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perbatasan, Transmigrasi dan daerah Tertinggal RI juga dengan Program/Kegiatan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur saat ini adalah tidak memadainya sumber daya aparatur utamanya makin berkurangnya tenaga fungsional ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Pengantar Kerja, Instruktur, Pelatihan Mediator, Pegawai Pengawas maupun Pegawai Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Transmigrasi. Disisi lain kebutuhan akan tenaga fungsional ini sangat mendesak untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten/Kota karena fungsi pegawai teknis ini tidak dapat tergantikan oleh PNS biasa.

Ditinjau dari teknis mempermasalahkan sebagai berikut :

a. Ketenagakerjaan :
   1. Permasalahan :
      - Masih Tingginya tingkat pengangguran;
      - Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan adanya pandemi Covid-19
      - Rendahnya perluasan kesempatan kerja imbas Covid-19. ;
      - Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
      - Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial;
      - Menurunnya perkembangan ekonomi Provinsi Kaltim;
   2. Hambatan :
      - Lokasi pengawasan yang tersebar;
      - Akses jalan menuju lokasi perusahaan yang sangat jauh di dari kota dan kurang baiknya infrastruktur jalan yang memakan waktu.
      - Kurangnya tenaga fungsional, baik pengawas, mediator, dan pengantar kerja.

b. Ketransmigrasian :
   1. Permasalahan :
      - Adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah karena terbatasnya aksesbilitas;

- Rendahnya kualitas SDM, terutama di pedesaan;
- Kurangnya keterkaitan antara kawasan perdesaan sebagai hinterland dengan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi;
- Kurang seimbangnya tingkat kepadatan penduduk antara wilayah satu dengan yang lain;

2. Hambatan :
   - Konflik fungsi lahan/kepemilikan lahan;
   - Regulasi;
   - Kurangnya tenaga fungsional penggerak swadaya.

Kinerja pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Provinsi Kalimantan Timur diukur melalui Angkatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan, Tenaga Kerja, SP/SB, Jumlah Anggota SP/SB, Pekerja/buruh, Perjanjian Kerja Bersama, LKS Tripartit, LKS Bipartit, Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan, Penurunan Kasus Kecelakaan Kerja, Peningkatan Kepesertaan Jamsostek, Penempatan Transmigrasi, Pembangunan KTM.

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berkoordinasi melalui Program/Kegiatan baik dengan Kementerian Tenaga Kerja RI dan Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI maupun dengan Kabupaten/Kota. Sinergi program/kegiatan dengan 2 (dua) Kementerian tersebut melalui Program/Kegiatan APBN (dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) sedangkan dengan kabupaten/kota dengan menggunakan pola sharing, yaitu sharing program/kegiatan, target dan disamping itu juga dilakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lingkup Provinsi Kaltim untuk sharing terkait khususnya penciptaan wirausaha baru.

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian visi, misi Kepala Daerah

Kekurangan SDM dan tenaga fungsional ini bisa berdampak pada tidak tercapai kinerja SKPD seperti yang telah ditargetkan, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya angka penurunan pengangguran dan perluasan kesempatan kerja menjadi tidak optimal.

Disamping hal tersebut permasalahan dan hambatan yang dihadapi adalah belum sinerginya perencanaan dan pelaksanaan progam-program sektoral untuk dapat fokus pada pengurangan pengangguran dan perluasan kesempatan kerja, antara lain perluasan kesempatan kerja sektoral belum didukung tingkat kompetensi tenaga kerja yang tersedia mengingat kompetensi tenaga kerja yang tersedia belum sesuai kebutuhan kompetensi kesempatan kerja.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD:

Terkait dengan akan dibangunnya Kilang Minyak yang ada di Kota Balikpapan yang akan menciptakan peluang kerja kurang lebih 5000 Tenaga Kerja sampai dengan Tahun 2022 maka bidang ketenagakerjaan harus mampu menciptakan tenaga kerja yang mampu menciptakan tenaga kerja yang kompeten serta kemampuan bersaing dengan orang – orang yang ada diluar Provinsi Kalimantan Timur.

Disisi lain dengan latar belakang percepatan pembangunan, pemerintah pusat menerbitkan PP baru mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) karena penggunaan TKA diarahkan untuk mempercepat proses pembangunan nasional melalui tenaga ahli teknologi dan tenaga ahli khusus lainnya. Hal tersebut tertuang dalam PP 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Definisi Tenaga Kerja Asing (TKA) sendiri menurut PP 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Akhirnya dengan adanya regulasi baru ini menciptakan persaingan di pasar kerja bagi tenaga kerja asing dengan pencari kerja kerja lokal. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Disnakertrans Prov. Kaltim akan melakukan Pelatihan Bersertifikasi guna memberikan kesempatan bagi masyarakat Kalimantan Timur dalam bersaing mendapatkan pekerjaan.

2.3.5 Rekomendasi :

1. Dalam hasil Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 dan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, pada tanggal 18 Februari 2021 disampaikan oleh Prof. DR. Ir. H. M. Aswin, MM Kepala Bappeda Provinsi Kaltim 8 (Delapan) program unggulan untuk Kaltim Berdaulat. Beberapa diantaranya terkait 250.000 Lapangan Kerja dan dibukanya 1.000.000 HA Lahan Pertanian (sektor pertanian). Sehingga bisa disimpulkan sebagian calon tenaga kerja yang akan terserap sebagian besar adalah yang memiliki keahlian di bidang pertanian.
2. Untuk pengembangan komoditas unggulan di wilayah Kalimantan berdasarkan arah kebijakan yang tertuang dalam lampiran RPJMN 2020-2024 Perpres nomor 18 tahun 2020 Industri manufaktur juga masih mendominasi peluang usaha dan investasi seperti industri batubara dan pengilangan migas, industri kayu, barang dari kayu atau gabus, pertambangan batubara dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Selain itu untuk pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama akan diarahkan ke Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus, salah satunya yang terdapat di Provinsi kaltim yaitu KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan dan

Pemerintah Pusat akan memberikan perhatian khusus pada Destinasi Potensial Derawan (Wisata Lokal Kepulauan Derawan yang berada di kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur).

3. Dengan banyaknya peluang kesempatan kerja dalam pembangunan kilang minyak di Kota Balikpapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur akan mengadakan pelatihan pelatihan guna mempersiapkan tenaga-tenaga terlatih bersertifikasi yang dibutuhkan seperti tenaga safety man, safety officer, first aider dimana mengingat di tahun 202018-19 sudah terlaksana pelatihan untuk kebutuhan tenaga tersebut dalam perluasan kilang minyak (RDMP V).
4. Dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 dan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 juga disampaikan akan ada pemberian Modal Usaha sebesar 100M untuk sektor kewirausahaan. Sehingga Disnakertrans juga mengadakan kegiatan pelatihan berbasis masyarakat yang dilanjutkan dengan pelatihan kewirausahaan, sehingga calon wirausaha baru dapat berwirausaha mandiri. Agar dapat berwirarusaha mandiri maka diperlukan modal usaha, karena itu bantuan permodalan pasca pelatihan sangatlah diperlukan dalam upaya membina wirausaha mandiri, sehingga pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja non formal.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD :

Rancangan awal RKPD tahun 2023 pada bab 5 memuat program prioritas terkait dengan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yaitu :

1) Tema yang diusung pada RKPD tahun 2023 adalah "**Pemantapan industri hilir untuk mewujudkan struktur ekonomi yang berkualitas**".
2) Prioritas pembangunan dibagi mejadi urusan wajib Urusan tenaga kerja berada pada point 14.

3) Adapun urusan pilahan terdiri 8 urusan, urusan ketransmigrasian berada pada urutan ke 8. Program kegiatan prioritas RKPD 2022 yang terkait dengan ketenagakerjaan yaitu percepatan pengentasan kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan pada prioritas 3. Pada prioritas 4 Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja melalui program peningkatan tenaga terampil bidang jasa kontruksi (tukang kayu, batu, las, keramik, plumbing, dst), Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Pada prioritas 5, pembangunan ekonomi melalui program Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dan Program Peningkatan Pembinaan & Pengawasan Ketenagakerjaan. Pada prioritas 9, pengutan cadangan pangan, melalui Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Timur

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	**Catatan Penting**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja				**41.097.120.000,00**						
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				**10.032.702.200,00**						
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap Di Pasar Kerja	70%	9.684.625.700,00						

Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap Di Pasar Kerja	70%	150.076.500,00						
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap Di Pasar Kerja 70	70%	198.000.000,00						
Program Penempatan Tenaga Kerja		**Presentase Penempatan Tenaga Kerja**	**31 %**	**2.162.015.260**						
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Wirausahaan Baru Dari Pencari Kerja	80%	534.593.400,00						
enerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Wirausahaan Baru Dari Pencari Kerja	80%	300.024.400,00						

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Wirausahaan Baru Dari Pencari Kerja	80%	600.236.460,00						
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Wirausahaan Baru Dari Pencari Kerja	80%	426.861.000,00						
Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Wirausahaan Baru Dari Pencari Kerja	80%	150.300.000,00						
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Wirausahaan Baru Dari Pencari Kerja	80%	150.000.000,00						
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				**2.316.258.000,00**						

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perlindungan Dan Pekembangan Lembaga Ketenagakerjaan	20%	235.157.600,00						
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perlindungan Dan Pekembangan Lembaga Ketenagakerjaan	20%	650.160.600,00						
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perlindungan Dan Pekembangan Lembaga Ketenagakerjaan	20%	1.430.939.800,00						

PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				**2.662.581.100,00**						
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	)	Perusahaan Yang Dibina Dan Diawasi (UPTD Pengawasan)	20 Perusahaan	2.662.581.100,00						
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				**400.000.000,00**						
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kawasan Transmigrasi	1 Kimtrans	400.000.000,00						
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				400.000.000,00						
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Masyarakat Transmigrasi Mandiri	1 Kimtrans	400.000.000,00						

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				360.625.000,00						
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kesepakatan Bersama Dengan Provinsi Lain	1 Kimtrans	360.625.000,00						
UPTD BLKI BPP										
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				**9.684.625.700,00**						
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap	70%	9.684.625.700,00						
UPTD BLKI BONTANG										
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				9.684.625.700,00						

Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap	70%	9.684.625.700,00						

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan program kegiatan tahun 2023 usulan terdiri dari :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Provinsi Kalimantan Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Balikpapan	Persentase lulusan pelatihan yang terserap dipasar kerja	4 paket (@16 orang)	Jurusan : Welding, Operator Excavator, Administrasi Perkantoran dan Barista
	Kegiatan: Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Balikpapan	Jumlah Lulusan Pelatihan Pemagangan yang ditempatkan	4 paket (@16 orang)	Jurusan : Welding, Operator Excavator, Administrasi Perkantoran dan Barista

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional.

3.1.1 Kebijakan Nasional

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 - 2024 yang tertuang dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024. Adapun agenda yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah Agenda Kedua yakni Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan juga Agenda Ketiga yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan berdaya Saing.

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2020, RPJPN menempatkan SDM sebagai modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Gambaran umum tersebut merupakan kondisi ketenagakerjaan Indonesia saat ini, terlihat dari perkembangan peningkatan jumlah penduduk Indonesia usia produktif yang merupakan tantangan strategis bangsa. Jumlah angkatan keija yang sudah mencapai 133,56 juta orang pada 2019 (Badan Pusat Statistik, Agustus 2019) merupakan potensi yang dapat mengoptimalkan kinerja perekonomian Indonesia.

Pada acara *Kick Off Meeting* (Pembukaan Acara) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 pada tanggal 19 Februari 2021, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memfokuskan empat hal yaitu kemiskinan, lapangan kerja, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), serta industri dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Investasi dan ekspor akan menjadi kunci pemulihan Indonesia pada 2023 di saat pandemi masih berlangsung.

Program transmigrasi memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan daerah, karena transmigrasi pada hakikatnya merupakan pembangunan daerah, karena transmigrasi pada hakikatnya merupakan pembangunan daerah atau bagian integral dari pembangunan daerah, melalui pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi. Hal ini sesuai dengan

amanat UU No. 29 tahun 2009 tentang Ketransmigrasian bahwa tujuan transmigrasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

3.1.2 Prioritas Pembangunan Nasional.

Arah Kebijakan dan Strategi bidang Kementerian tenaga Kerja dan Kementerian Tahun 2020 – 2024 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan kontrak kinerja yang telah ditetapkan.

Pemerintah pusat menargetkan angka TPT ada diantara 3,6 - 4,3%. Untuk arah Kebijakan dan Strategi di Bidang Ketenagakerjaan kedepannya akan difokuskan pada :

1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi, seperti pemenuhan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang salah satunya berasal dari Kalimantan Timur (Kawasan Industri Batubara)
2. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dengan strategi peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi.

Arah kebijakan dilaksanakan melalui berbagai program prioritas yang terdiri dari prioritas nasional, prioritas bidang dan prioritas Kemnaker RI dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, serta kontrak kinerja Menteri melalui 6 (enam) program teknis dan 3 (tiga) program pendukung (generic). Berikut adalah 6 (enam) program teknis dan 3 (tiga) program pendukung, yaitu :

A. Bidang Ketenagakerjaan

a. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (PKTKP);

Indikator kinerja utama dari program ini adalah angka peserta pelatihan yang kompeten, yang diukur melalui :

1) Persentase Peningkatan Lembaga Pelatihan yang Terakreditasi;
2) Presentase peningkatan lulusan pelatihan berbasis kompetensi;
3) Presentase peningakatan perusahaan penyelenggara pemagangan yang terferifikasi

4) Presentase peningkatan lulusan pemagangan;
5) Presentase peningkatan LSP berlisensi;
6) Presentase peningkatan tenaga kerja bersetifikat kompetensi;
7) Presentase peningkatan lembaga pelayanan produktivitas;
8) Presentase peningkatan produktivitas tenaga kerja (nasional, sektoral, daerah).

b. Program Penempatan dan perluasan Kesempatan kerja (PPKK);

Indikator kinerja utama dari program ini adalah jumlah fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, yang diukur melalui :

1) Presentase peningkatan jumlah pencari kerja yang difasilitasi untuk mengisi lowongan pekerjaan :
2) Presentase peningkatan Rasio tenaga kerja pendamping dengan TKA untuk jabatan tertentu;
3) Presentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan melalui sistem Antar Kerja;
4) Presentase peningkatan penempatan TKI pada pengguna berbadan hukum;
5) Presentase penanganan pengangguran dan setengah penganggur melalui system Padat Karya;
6) Presentase peningkatan wirausahawan baru per tahun;
7) Presentase peningkatan calon wirausahawan yang mengikuti inkubasi bisnis;

c. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Indikator kineja utama dari program ini adalah meningkatnya syarat-syarat kerja dan menguatnya kelembagaan hubungan industrial, yang diukur dari :

1) Meningkatnya persentase LKS Bipartit yang berfungsi secara efektif;
2) Persentase peningkatan perusahaan yang membuat peraturan perusahaan (PP);
3) Persentase peningkatan perusahaan yang membuat perjanjian kerja bersama (PKB);

4) Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sistem pengupahan berbasis struktur dan skala upah serta produktivitas;
5) Meningkatnya persentase tenaga kerja penerima upah yang menjadi persentase BPJS ketenagakerjaan;
6) Meningkatnya persentase tenaga kerja bukan penerima upah yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan;
7) Meningkatnya persentase perusahaan yang memiliki tingkat kerawanan hubungan industrial label hijau;
8) Meningkatnya persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan hubungan industrial oleh mediator;

d. Program Perlindungan Tenaga kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Indikator kinerja utama dari program ini adalah jumlah perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), yang diukur dari:

1) Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan;
2) Jumlah Pekerja Anak yang Ditarik dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA);

B. Bidang Ketransmigrasian

a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Indikator kinerja utama dari program ini adalah jumlah permukiman transmigrasi yang dibangun dan transmigran yang ditempatkan di kawasan transmigrasi, yang diukur dari :

1) Penduduk yang tertata terintegrasi dalam kawasan transmigrasi;
2) Infrastruktur kawasan yang dibangun;
3) Lahan yang tersedia ;
4) Rencana pembangunan kawasan transmigrasi;
5) Lembaga Pemerintah dan non pemerintah yang berpartisipasi dalam pembangunan kawasan transmigrasi;
6) Pelayanan teknis dan administrastif.

b. Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi.

Indikator kinerja utama dari program ini adalah jumlah permukiman transmigrasi (kimtrans) yang mandiri dan kawasan transmigrasi yang berkembang, yang diukur dari :

1) Jumlah kimtrans dan kawasan yang dikembangkan sarana dan prasarananya;
2) Jumlah luasan lahan yang produktif dan produktivitas lahan di kimtrans dan kawasan;
3) Jumlah kepala keluarga yang mendapat layanan social budaya dan kelembagaan di kimtrans yang berfungsi;
4) Jumlah kimtrans yang mandiri dan kawasan yang berwawasan lingkungan;
5) Jumlah dokumen Rencana Pengembangan Masyarakat dan Kawasan yang dapat diimplementasikan;
6) Jumlah pelayanan teknis dan administrastif.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Isu-isu Penting

a. Bidang ketenagakerjaan :

Sasaran program kegiatan bidang ketenagakerjaan untuk peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kompetensi dan produktivitas sebagai upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, meliputi :

1. Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik (*decent work*), yaitu lapangan kerja produktif serta adanya perlindungan dan jaminan sosial yang memadai;
2. Mendorong terciptanya kesempatan kerja seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan;
3. Meningkatkan kondisi dan mekanisme Hubungan Industrial untuk mendorong kesempatan kerja;
4. Menyempurnakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan peraturan ketenagakerjaan pokok (utama), sesuai hukum internasional;
5. Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja;
6. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas;
7. Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah;

8. Menyempurnakan kebijakan migrasi dan pembangunan;
9. Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja.

Fokus **prioritas ketenagakerjaan dalam bidang ekonomi** diarahkan **untuk meningkatkan daya saing ketenagakerjaan**, yang meliputi :

1) Peningkatan Fasilitasi dan Perlindungan untuk mendukung mobilitas tenaga kerja.

   Fokus prioritas ini dilakukan dengan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja melalui kegiatan :

   a) Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja;
   b) Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja.

2) Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas.

   Fokus prioritas ini dilakukan dengan Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, melalui kegiatan:

   a) Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan;
   b) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas;
   c) Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan;
   d) Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri;
   e) Peningkatan dan Pengembangan Produktivitas;
   f) Pengembangan dan Penyelenggaraan Pelatihan.

b. Bidang ketransmigrasian :

Untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah kota dan desa, Sumber Daya Masyarakat, kepadatan penduduk dll, diarahkan untuk:

1. Pelaksanaan persebaran penduduk;
2. Koordinasi dan integrasi pembangunan kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan kawasan strategis;
3. Pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan;
4. Peningkatan daya tarik desa;
5. Membangun keterkaitan antara kota dan desa;
6. Percepatan pembangunan kawasan tertinggal;

7. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan

Fokus **prioritas Pembangunan ketransmigrasian dalam bidang Wilayah dan Tata Ruang** diarahkan untuk mendukung 2 fokus prioritas, yaitu:

1) Pembangunan perdesaan

Arah kebijakan pembangunan perdesaan adalah memperkuat kemandirian desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; meningkatkan ketahanan desa sebagai wilayah produksi; serta meningkatkan daya tarik perdesaan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan seiring dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan.

Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui 2 program yaitu:

a) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, meliputi kegiatan sebagai berikut:
   (1) Penyediaan Tanah Transmigrasi;
   (2) Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penempatan Transmigrasi;
   (3) Pembangunan Permukiman di Kawasan Transmigrasi;
   (4) Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi;
   (5) Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Transmigrasi.

b) Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi, meliputi kegiatan sebagai berikut:
   (1) Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi;
   (2) Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi;
   (3) Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi;
   (4) Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi;
   (5) Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi.

2) Pengembangan ekonomi lokal dan daerah.

Arah kebijakan pengembangan ekonomi lokal pada tahun 2019-2023 adalah meningkatkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota atau antara wilayah pusat pertumbuhan dengan wilayah produksi (hulu-hilir).

Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, meliputi kegiatan sebagai berikut:

a) Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi;
b) Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi;
c) Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi;
d) Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi;

3.2.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

a. Menurunkan jumlah pengangguran
b. Meningkatnya kualitas Hubungan Industrial
c. Meningkatnya penerapan norma ketenagakerjaan dan norma keselamatan dan kesehatan kerja
d. Meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat Transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-Faktor Penting Penetapan Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Gubernur 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.

Tugas :

Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan paragraf 1, pasal 3 mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan paragraf 1, pasal 4 Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi ;

a. perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan tenaga kerja;

e. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang pengawasan tenaga kerja;

f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang transmigrasi;

h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

1. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

j. Pembina Kelompok Jabatan Fungsional; dan

k. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan provinsi bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur **yaitu:**

a. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
7. Pembinaan Ketenagakerjaan

b. Urusan Pilihan Transmigrasi

1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan
2. Pembinaan SDM Aparatur
3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan
4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
5. Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi

3.3.2 Program dan Kegiatan

a. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja SKPD memuat :

– Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang handal dan berdaya saing tinggi; menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dan mendorong usaha-usaha produktif; serta mengembangkan ketransmigrasian melalui pembangunan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) untuk pencapaian misi Kepala Daerah bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yaitu tecakup dalam Misi pertama yakni Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas. Dan Misi Ketiga, yaitu Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah yaitu **“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”** melalui sinergitas pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak swasta.

– Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam pembangunan ketenagakerjaan di Indoonesia, termasuk dalam agenda SDGs yang ke 8, yakni mendukung pertumbuhan

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua

- Amanat yang dituangkan pada Undang-Undang desa terkait pembangunan di desa adalah perlunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus meningkatkan kualitas hidup manusia. Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana di desa, pengembangan potensi sektor ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan tak luput menjadi tujuan yang harus diimplementasikan dalam pembangunan desa.
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dan pengembangan daerah terisolir, yaitu : Pengembangan masyarakat dan kawasan Transmigrasi, pengarahan dan fasilitasi perpindahan Transmigrasi.

b. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur, terlihat Program/Kegiatan untuk mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, dengan 4 Program Ketenagakerjaan dan 1 Program Ketransmigrasian, yang terdiri sbb :

- Program Ketenagakerjaan sebagai berikut :
  1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
  2. Program Penempatan Tenaga Kerja
  3. Program Hubungan Industrial
  4. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
- Program Ketransmigrasian Sebagai berikut :
  1. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
  2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
  3. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program/kegiatan baik Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, lokasi kegiatannya tersebar di Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan usulan dan kebutuhan di Kabupaten/Kota.

SEMULA

3.3.3 Rumusan Program Yang Tidak Sesuai Dengan Rancangan Awal RKPD Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023

Provinsi Kalimantan Timur

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				59.451.868.000	APBD			106.080.000.000
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				45.818.251.756	APBD			99.800.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				776.880.000	APBD			6.280.000.000
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyrakat terhadap urusan bidang tenaga kerja dan transmigrasi	Samarinda	81%	40.387.320.496			83%	68.000.000.000
2.07.01.1,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi	Samarinda	10 dokumen	1.438.791.000			33	3.900.000.000

2.07.01.1,01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	3 dokumen	769.791.000			3 Dokumen	1.250.000.000
2.07.01.1,01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	1 dokumen	0			1 dokumen	500.000.000
2.07.01.1,01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Samarinda	1 dokumen	0			1 dokumen	350.000.000
2.07.01.1,01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	1 dokumen	103.640.000			2 dokumen	550.000.000
2.07.01.1,01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	2 dokumen	565.360.000			5 dokumen	1.250.000.000
2.07.01.1,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan**	**Samarinda**	**1 laporan**	**36.502.420.720**			**1 laporan**	**40.435.000.000**
2.07.01.1,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	200 orang/ bulan	33.145.322.520			**200 orang/ bulan**	36.035.000.000
2.07.01.1,02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	12 dokumen	3.263.378.200			12 dokumen	3.500.000.000

2.07.01.1,02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	1 laporan	30.600.000			1 laporan	200.000.000
2..07.01.1,02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Samarinda	1 laporan	41.520.000			1 laporan	350.000.000
2..07.01.1,02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	1 Dokumen	21.600.000			1 dokumen	350.000.000
2.07.01.1,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian**	**Samarinda**	**12 bulan**	**243.580.000**			**12 bulan**	**1.550.000.000**
2.07.01.1,05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapan	Samarinda	190 paket	153.580.000			190 paket	500.000.000

2.07.01.1,05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Samarinda	4 orang	90.000.000			4 orang	500.000.000
2.07.01.1,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	5 orang	0			5 orang	550.000.000
2.07.01.1,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggara nya Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah**	**Samarinda**	**12 bulan**	**1.276.634.000**			**12 bulan**	**17.270.000.000**
2.07.01.1,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	6 paket	17.000.000			6 paket	20.000.000
2.07.01.1,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	5 paket	49.268.000			5 paket	15.000.000.000
2.07.01.1,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Samarinda	15 paket	211.366.000			15 paket	600.000.000
2.07.01.1,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	12 paket	54.000.000			12 paket	150.000.000
2.07.01.1,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	30 laporan	945.000.000			30 laporan	1.500.000.000

2.07.01.1,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Samarinda**		**0**			**1 unit**	**3.000.000.000**
2.07.01.1,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Samarinda	1 unit	0			1 unit	3.000.000.000
2.07.01.1,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Samarinda**	**12 bulan**	**382.688.200**			**12 bulan**	**425.000.000**
2.07.01.1,07.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	1 laporan	10.000.000			1 laporan	5.000.000
2.07.01.1,07.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	3 laporan	372.688.200			3 laporan	420.000.000
2.07.01.1,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedia nya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Samarinda**	**12 bulan**	**543.206.576**			**12 bulan**	**1.420.000.000**
2.07.01.1,09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Samarinda	2 unit	111.949.000			2 unit	170.000.000

2.07.01.1,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Samarinda	3 unit	103.309.000			3 unit	200.000.000
2.07.01.1,09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Samarinda	12 unit	90.862.000			2 unit	150.000.000
2.07.01.1,09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Samarinda	5 unit	0			5 unit	150.000.000
2.07.01.1,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Samarinda	1 unit	237.086.576			1 unit	750.000.000
2.07.03.1	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase lulusan pelatihan yang terserap dipasar kerja**	**9 Kab/ Kota**	**70%**	**1.086.847.760**				**9.150.000.000**
2.07.03. 1.01	**Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**	**Jumlah Lulusan Pelatihan Pemagangan yang ditempatkan**	**Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar,Berau , Ppu, Paser,**	**1008 orang**	**864.427.760**				**7.750.000.000**
2.07.03. 1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi		100 orang	831.517.760			**100 orang**	**7.000.000.000**

2.07.03. 1.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas		10 Lembaga	32.910.000			**10 lembaga**	**750.000.000**
2.07.03. 1.02	**Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja**	**Jumlah LPK yang diAkreditasi**	**9 Kab/ Kota**	**10 LPK**	**57.720.000**				**500.000.000**
2.07.03. 1.02.001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi		10 LPK	57.720.000			**10 LPK**	**500.000.000**
2.07.03. 1.03	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah**	**Perusahaan yang meningkat produktifitas nya**	**Bpp, Smd, Bontang, Kukar, Kutim, Ppu**	**30 orang**	**69.840.000**				**350.000.000**
2.07.03. 1.03.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Bpp, Smd, Bontang, Kukar, Kutim, Ppu	**30** perusahaan	69.840.000			**30 perusahaan**	**350.000.000**
2.07.03. 1.04	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**	**Perusahaan yang meningkat produktifitas nya**			**94.860.000**				**550.000.000**
2.07.03. 1.04.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan produktivitasnya		20 perusahaan	94.860.000			**20 orang**	**550.000.000**
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Penempatan Tenaga Kerja**		**31%**	**1.009.086.000**			**31%**	**11.500.000.000**
2.07.04.1.01	**Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pencari kerja yang mendaftar**			**414.976.000**				**7.300.000.000**

2.07.04.1.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	Samarinda	40 orang	44.160.000			40 orang	250.000.000
2.07.04.1.01.02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Samarinda	500 orang	0			500 orang	750.000.000
2.07.04.1.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Samarinda	500 orang	52.296.000			500 orang	450.000.000
2.07.04.1.01.04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Samarinda	700 orang	55.080.000			700 orang	350.000.000
2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Samarinda	80 orang	263.440.000			80 orang	5.500.000.000
2.07.04.1.02	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin**	**Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu, Paser,**	**20 LPTKS**	**88.800.000**				**700.000.000**

2.07.04.1.02.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegras	Samarinda	5 Lembaga	44.160.000			5 lembaga	350.000.000
2.07.04.1.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Samarinda	5 Lembaga	44.640.000			5 lembaga	350.000.000
2.07.04.1.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Aplikasi pasar kerja online**	**Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu, Paser**	**1 Aplikasi**	**411.350.000**				**1.450.000.000**
2.07.04.1.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi	Samarinda	1 dokumen	41.040.000			**1 dokumen**	**350.000.000**
2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Samarinda	50000 orang	54.360.000			50000 orang	350.000.000
2.07.04.1.03.003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Samarinda	100 orang	315.950.000			100 orang	750.000.000
2.07.04.1.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**	**Jumlah Tenaga Kerja Purna Penempatan**	**Samarinda**	**20 orang**	**0**			**20 orang**	**750.000.000**
2.07.04.1.004	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Samarinda	20 orang	0			20 orang	**750.000.000**
2.07.04.1.05	**Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya**	**Samarinda**	**40 orang**	**40.320.000**			**40 orang**	**550.000.000**

2.07.04.1.05.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Samarinda	40 orang	40.320.000			40 orang	**550.000.000**
2.07.04.1.06	**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya**	**Kukar, Paser, Bpp, Bontang**	**40 orang**	**53.640.000**			**40 orang**	**750.000.000**
2.07.04.1.06.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	Kukar, Paser, Bpp, Bontang	40 Orang	53.640.000			40 orang	**750.000.000**
2.07.05	**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**		**20%**	**1.640.400.000**			**20%**	**4.150.000.000**
2.07.05.1.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diterbitkan**	**Samarinda**	**100 Surat Keputusan**	**271.800.000**			**100 surat keputusan**	**1.100.000.000**
2.07.05.1.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Samarinda	20 Perusahaan	144.000.000			20 perusahaan	**600.000.000**
2.07.05.1.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	Samarinda	20 Perusahaan	37.800.000			20 perusahaan	**150.000.000**

2.07.05.1.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Samarinda	1 Laporan	90.000.000			1 laporan	**350.000.000**
2.07.05.1.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)**		**1 Dokumen**	**430.200.000**			**1 dokumen**	**1.300.000.000**
2.07.05.1.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Samarinda	1 Perkara	169.200.000			1 perkara	**300.000.000**
2.07.05.1.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Samarinda	20 Perkara	88.200.000			**20 perkara**	**300.000.000**
2.07.05.1.02.003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Samarinda	1 Serikat Pekerja	126.000.000			**1 serikat pekerja**	**350.000.000**
2.07.05.1.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Samarinda	4 Lembaga	46.800.000			**4 lembaga**	**350.000.000**
2.07.05.1.03	**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**	**Jumlah SK Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota**	**Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu,**	**11 SK**	**938.400.000**			**11 surat keputusan**	**1.750.000.000**

			Paser, Mahulu						
2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP		**1 SK**	916.800.000			**1 surat keputusan**	**1.250.000.000**
2.07.05.1.03.03	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu, Paser, Mahulu	10 SK	21.600.000			10 surat keputusan	**500.000.000**
2.07.06	**Program Pengawasan Ketenagakerjaan**	**Perusahaan yang dibina dan diawasi**	**Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu, Paser, Mahulu**	**300 perusahaan**	**1.694.597.500**			**300 perusahaan**	**7.000.000.000**
2.07.06.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**Jumlah perusahaan yang diawasi terkait norma ketenagakerjaan**	**Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu, Paser, Mahulu**	**150 perusahaan**	**1.694.597.500**			**150 perusahaan**	**7.000.000.000**

2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu, Paser, Mahulu	30 perusahaan	530.640.000			30 perusahaan	**2.000.000.000**
2.07.06.1.01.02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu, Paser, Mahulu	30 perusahaan	610.920.000			**30 perusahaan**	**1.500.000.000**
2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu, Paser, Mahulu	20 perusahaan	553.037.500			20 perusahaan	**3.500.000.000**
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**776.880.000**				**6.280.000.000**
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**776.880.000**				**6.280.000.000**

3.32.02	**Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi**	**Kawasan Transmigrasi**	**Paser Kawasan Muara Koman dan Kerang, Kutim Maloy Kaliorang**	**1 Kimtrans**	**257.400.000**			**1 kimtrans**	**2.880.000.000**
3.32.02.1.01	**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**Jumlah Kawasan Transmigrasi** **Penatausahaan Tanah Kawasan Transmigrasi**	**Berau, Kukar, Paser, PPU**	**1 Kimtrans**	**257.400.000**			**1 kimtrans**	**2.880.000.000**
3.32.02.1.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Berau, Kukar, Paser, PPU	2 dokumen	0			2 dokumen	995.000.000
3.32.02.1.01.02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Berau, Kukar, Paser, PPU	1 kawasan transmigrasi	257.400.000			1 kawasan transmigrasi	535.000.000
3.32.02.1.01.03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Berau, Kukar, Paser, PPU	0 hektar	0			0 hektar	850.000.000
3.32.02.1.01.04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Berau, Kukar, Paser, PPU	1 dokumen	0			1 dokumen	500.000.000
3.32.03	**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Meningkatnya Masyarakat Transmigrasi Mandiri**	**Desa Keladen Kecamatan Tanjung Harapan Kab. Paser**	**1 Kimtrans**	**257.400.000**			**1 kimtrans**	**2.200.000.000**

3.32.03.1.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi**	**Perjanjian Kerja sama antar daerah asal transmigran dan daerah tujuan transmigran**	**Desa Keladen Kecamatan Tanjung Harapan Kab. Paser**	**1 Kimtrans**	**257.400.000**			**1 kimtrans**	**2.200.000.000**
3.32.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	257.400.000			1 laporan	350.000.000
3.32.03.1.01.02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha danLayak Berkembang)	Berau, Kukar, Paser, PPU	1 Dokumen	0			1 dokumen	550.000.000
3.32.03.1.01.03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	Berau, Kukar, Paser, PPU	15 Kepala Keluarga	0			15 kepala keluarga	750.000.000

3.32.03.1.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	Berau, Kukar, Paser, PPU	15 Kepala Keluarga	0			15 kepala keluarga	550.000.000
3.32.04	**Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**	**Kesepakatan bersama dengan provinsi lain**	**Desa Keladen Kab. Paser**	**1 Kimtrans**	**262.080.000**			**1 kimtrans**	**1.200.000.000**
3.32.04.1.01	**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**	**Transmigran Mandiri**	**Desa Keladen Kab. Paser**	**1 Kimtrans**	**262.080.000**			**1 kimtrans**	**1.200.000.000**
3.32.04.1.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Berau, Maratua-Payung-Payung, Kukar Tenggarong Seberang Embalut, Paser Tanjung Harapan Keladen, PPU Sepaku Semoi Dua	15 Kepala Keluarga	0			15 kepala keluarga	750.000.000
3.32.04.1.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Di kembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Berau, Kukar, Paser, PPU	1 Satuan Permukaan	262.080.000			1 satuan permukiman	450.000.000
JUMLAH (DINAS)					**44,222,894,000**				**99.800.000.000**

SEMULA: UPTD BLKI BALIKPAPAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	`								
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**11.014.268.244**	**APBD**			**23.220.000.000**
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor kepuasan masyrakat terhadap urusan bidang tenaga kerja dan transmigrasi**	**Bpp**	**83%**	**1.015.282.244**			**83%**	**4.470.000.000**
2.07.01.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan**	**Bpp**	**1 Laporan**	**900.972.244**			**1 Laporan**	**850.000.000**
2.07.01.1,02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bpp	12 Bulan	900.972.244			12 Bulan	850.000.000
2.07.01.1,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terselenggara nya Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bpp**	**12 bulan**	**0**			**12 bulan**	**70.000.000**
2.07.01.1,05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			20 Paket	0			20 Paket	70.000.000
2.07.01.1,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggara nya Pengadministrasi Umum Perangkat**	**Bpp**	**12 bulan**	**100.000.000**			**12 bulan**	**645.000.000**

		Daerah							
2.07.01.1,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bpp	5 paket	0			5 paket	30.000.000
2.07.01.1,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bpp Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	0			12 bulan	150.000.000
2.07.01.1,06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bpp	12 bulan	0			12 bulan	50.000.000
2.07.01.1,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bpp	12 bulan	10.000.000			12 bulan	50.000.000
2.07.01.1,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bpp	15 paket	0			15 paket	15.000.000
2.07.01.1,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bpp	12 bulan	90.000.000,00			12 bulan	350.000.000,00
2.07.01.1,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bpp**	12 bulan	**0**			12 bulan	**1.500.000.000**
2.07.01.1,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Bpp	1 Unit	0			1 Unit	1.500.000.000
2.07.01.1,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bpp**	12 bulan	**14.310.000**			12 bulan	**205.000.000**
2.07.01.1,07.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bpp	12 bulan	0			12 bulan	5.000.000

2.07.01.1,07.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bpp	12 bulan	14.310.000			12 bulan	200.000.000
2.07.01.1,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Bpp**	**12 bulan**	**0**			**12 bulan**	**1.200.000.000**
2.07.01.1,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bpp	1 unit	0			1 unit	350.000.000
2.07.01.1,09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bpp	12 bulan	0			12 bulan	850.000.000
2.07.03.1	**Program Pelatihan Kerja danan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase Lulusan Pelatihan yang Terserap di Pasar Kerja**	**Bpp**	**85%**	**9.998.986.000**			**85%**	**18.750.000.000**
2.07.03. 1.01	**Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**	**Jumlah Lulusan Pelatihan Pemagangan yang ditempatkan**	**Bpp, PPU**	**1008 orang**	**9.998.986.000**			**1008 orang**	**18.750.000.000**
2.07.03. 1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi	Bpp, PPU	1008 orang	9.984.946.000			1008 orang	17.000.000.000
2.07.03. 1.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Bpp, PPU	10 Lembaga	14.040.000			10 Lembaga	500.000.000
2.07.03. 1.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja		1 Unit	0			1 Unit	1.250.000.000
JUMLAH UPTD BLKI BALIKPAPAN					**11.014.268.244**				**23.220.000.000**

SEMULA: UPTD BLKI Bontang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan dasar**					**APBD**			
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**1.842.468.000**				**11.273.000.000**
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor kepuasan masyrakat terhadap urusan bidang tenaga kerja dan transmigrasi**	**Btg**	**83%**	**981.668.000**			**83%**	**2.673.000.000**
2.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan**	**Btg**	**1 Laporan**	**975.000.000**			**1 Laporan**	**800.000.000**
2.07.01.1,02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Btg	12 Dokumen	975.000.000			12 Dokumen	800.000.000
2.07.01.1,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedia nya Pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**Btg**		**0**			**12 Paket**	**25.000.000**
2.07.01.1,05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapan	Btg	12 Paket	0			12 Paket	25.000.000
2.07.01.1,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggara nya Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah**	**Btg**	**12 Bulan**	**5.000.000**			**12 Bulan**	**845.000.000**
2.07.01.1,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Btg	9 Paket	0			9 Paket	15.000.000

2.07.01.1,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Btg	4 Paket	0			4 Paket	200.000.000
2.07.01.1,06.04	Penyediaan bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Btg	5 Paket	5.000.000			5 Paket	50.000.000
2.07.01.1,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Btg	9 Paket	0			9 Paket	30.000.000
2.07.01.1,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Btg	9 Laporan	0			9 Laporan	550.000.000
2.07.01.1,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Btg**	12 Bulan	**1.668.000**			12 Bulan	**203.000.000**
2.07.01.1,08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bpp	1 laporan	**0**			1 laporan	3.000.000
2.07.01.1,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Btg	1 Laporan	1.668.000			3 Laporan	200.000.000
2.07.01.1,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedia nya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Btg**	**12 bulan**	**0**			**12 bulan**	**800.000.000**
2.07.01.1,09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Btg	1 unit	0			1 unit	50.000.000
2.07.01.1,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Btg	1 unit	0			1 unit	750.000.000
2.07.03.1	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase Lulusan Pelatihan yang Terserap di Pasar Kerja**	**Btg**	**85%**	**860.800.000**			**85%**	**8.600.000.000**

2.07.03. 1.01	**Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**	**Jumlah Lulusan Pelatihan Pemagangan yang ditempatkan**	**Btg**	**144 orang**	**860.800.000**			**144 orang**	**8.600.000.000**
2.07.03. 1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi	Btg	160 orang	860.800.000			160 orang	7.000.000.000
2.07.03. 1.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Btg	10 Lembaga	0			10 Lembaga	350.000.000
2.07.03. 1.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Btg	3 Unit	0			3 Unit	1.250.000.000
JUMLAH UPTD. BLKI BONTANG					**1.842.468.000**				**11.273.000.000**
TOTAL					**59.451.868.000**				**140.573.000.000**

MENJADI

3.3.3 Rumusan Program Yang Tidak Sesuai Dengan Rancangan Awal RKPD Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023

Provinsi Kalimantan Timur

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				84.285.125.808	APBD			106.080.000.000
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				56,155,917,637	APBD			99.800.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1,079,620,700	APBD			6.280.000.000
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyrakat terhadap urusan bidang tenaga kerja dan transmigrasi	Samarinda	81%	41,738,884,637			83%	68.000.000.000

2.07.01.1,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi**	**Samarinda**	**10 dokumen**	**2,449,906,218**			**10 Dokumen**	**3.900.000.000**
2.07.01.1,01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	5 dokumen	1,936,649,568			5 Dokumen	1.250.000.000
2.07.01.1,01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	1 dokumen	0			1 dokumen	500.000.000
2.07.01.1,01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Samarinda	1 dokumen	0			1 dokumen	350.000.000
2.07.01.1,01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	2 dokumen	177,780,250			2 dokumen	550.000.000
2.07.01.1,01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	6 dokumen	335,476,400			6 dokumen	1.250.000.000
2.07.01.1,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan**	**Samarinda**	**1 laporan**	**35,617,976,799**			**1 laporan**	**40.435.000.000**

2.07.01.1,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	146 orang/ bulan	31,346,643,959			146 orang/ bulan	36.035.000.000
2.07.01.1,02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	12 dokumen	4,036,517,840			12 dokumen	3.500.000.000
2.07.01.1,02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	1 laporan	27,490,000			1 laporan	200.000.000
2..07.01.1,02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Samarinda	1 laporan	183,600,000			1 laporan	350.000.000
2..07.01.1,02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	1 Dokumen	23,725,000			1 dokumen	350.000.000
2.07.01.1,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian**	**Samarinda**	**12 bulan**	**420,192,900**			**12 bulan**	**1.000.000.000**

2.07.01.1,05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapan	Samarinda	3 paket	329,102,900			3 paket	500.000.000
2.07.01.1,05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Samarinda	6 orang	91,090,000			6 orang	500.000.000
2.07.01.1,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	5 orang	0			5 orang	550.000.000
2.07.01.1,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggara nya Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah**	**Samarinda**	**12 bulan**	**2,021,494,820**			**12 bulan**	**17.270.000.000**
2.07.01.1,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	5 paket	16,989,800			6 paket	20.000.000
2.07.01.1,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	8 paket	798,243,320			8 paket	15.000.000.000
2.07.01.1,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Samarinda	6 paket	314,094,700			15 paket	600.000.000
2.07.01.1,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	7 paket	49,194,400			7 paket	150.000.000

2.07.01.1,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	30 laporan	842,972,600			30 laporan	1.500.000.000
2.07.01.1,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Samarinda**		**0**			**1 unit**	**3.000.000.000**
2.07.01.1,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Samarinda	1 unit	0			1 unit	3.000.000.000
2.07.01.1,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Samarinda**	**12 bulan**	**477,157,800**			**12 bulan**	**425.000.000**
2.07.01.1,07.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	1 laporan	5,252,000			1 laporan	5.000.000
2.07.01.1,07.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	3 laporan	471,905,800			3 laporan	420.000.000
2.07.01.1,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedia nya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Samarinda**	**12 bulan**	**752,156,100**			**12 bulan**	**1,270,000,000**

2.07.01.1,09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Samarinda	2 unit	40,330,000			2 unit	170.000.000
2.07.01.1,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Samarinda	3 unit	176,370,000			3 unit	200.000.000
2.07.01.1,09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Samarinda	2 unit	63.000.000			2 unit	150.000.000
2.07.01.1,09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Samarinda	5 unit	0			5 unit	150.000.000
2.07.01.1,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Samarinda	1 unit	535,393,100			1 unit	750.000.000
2.07.03.1	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase lulusan pelatihan yang terserap dipasar kerja**	**9 Kab/ Kota**	**70%**	**1,964,336,500**			**70%**	**9.150.000.000**
2.07.03. 1.01	**Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**	**Jumlah Lulusan Pelatihan Pemagangan yang ditempatkan**	**Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar,Berau , Ppu, Paser,**	**160 orang**	**1,715,700,700**			**160**	**7.750.000.000**

2.07.03. 1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi		160 orang	1,656,900,700			**100 orang**	**7.000.000.000**
2.07.03. 1.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas		10 Lembaga	58,800,000			**10 lembaga**	**750.000.000**
2.07.03. 1.02	**Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja**	**Jumlah LPK yang diAkreditasi**	**9 Kab/ Kota**	**10 LPK**	**59,232,000**			**10 LPK**	**500.000.000**
2.07.03. 1.02.001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi		10 LPK	59,232,000			10 LPK	**500.000.000**
2.07.03. 1.03	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah**	**Perusahaan yang meningkat produktifitas nya**	**Bpp, Smd, Bontang, Kukar, Kutim, Ppu**	**30 orang**	**76,680,000**			**30 orang**	**350.000.000**
2.07.03. 1.03.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Bpp, Smd, Bontang, Kukar, Kutim, Ppu	30 perusahaan	69.840.000			**30 perusahaan**	**350.000.000**
2.07.03. 1.04	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**	**Perusahaan yang meningkat produktifitas nya**		**1 dokumen**	**112,723,800**			**1 dokumen**	**550.000.000**
2.07.03. 1.04.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan produktivitasnya		20 orang	112,723,800			20 orang	**550.000.000**

2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Penempatan Tenaga Kerja**		**31%**	**2,405,519,600**			**31%**	**10.000.000.000**
2.07.04.1.01	**Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pencari kerja yang mendaftar**		**3000 Orang**	**616,899,700**				**6.550.000.000**
2.07.04.1.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	Samarinda	40 orang	32,393,600			40 orang	250.000.000
2.07.04.1.01.02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Samarinda	500 orang	0			500 orang	750.000.000
2.07.04.1.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Samarinda	500 orang	114,642,100			500 orang	450.000.000
2.07.04.1.01.04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Samarinda	700 orang	87,120,000			700 orang	350.000.000
2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Samarinda	96 orang	382,744,000			96 orang	5.500.000.000

2.07.04.1.02	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin**	**Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu, Paser,**	**20 LPTKS**	**27,319,000**				**700.000.000**
2.07.04.1.02.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegras	Samarinda		0				0
2.07.04.1.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Samarinda	5 Lembaga	27,319,000			5 lembaga	350.000.000
2.07.04.1.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Aplikasi pasar kerja online**	**Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu, Paser**	**1 Aplikasi**	**1,689,260,900**			**1 Aplikasi**	**1.450.000.000**
2.07.04.1.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi	Samarinda	1 dokumen	33,280,000			1 dokumen	**350.000.000**
2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Samarinda	50000 orang	198,228,000			50000 orang	350.000.000
2.07.04.1.03.003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Samarinda	1000 orang	1,457,752,900			1000 orang	750.000.000

2.07.04.1.05	**Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya**	**Samarinda**	**40 orang**	**72,040,000**			**40 orang**	**550.000.000**
2.07.04.1.05.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Samarinda	40 orang	72,040,000			40 orang	550.000.000
2.07.04.1.06	**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya**	**Kukar, Paser, Bpp, Bontang**	**-**	**0**			**40 orang**	**750.000.000**
2.07.04.1.06.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	Kukar, Paser, Bpp, Bontang	-	0			40 orang	750.000.000
2.07.05	**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	**10 Kab/Kota**	**20%**	**8,402,565,300**			**20%**	**4.150.000.000**
2.07.05.1.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diterbitkan**	**Samarinda**	**100 Surat Keputusan**	**6,944,703,700**			**100 surat keputusan**	**1.100.000.000**
2.07.05.1.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Samarinda	20 Perusahaan	111,922,550			20 perusahaan	600.000.000
2.07.05.1.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	Samarinda	20 Perusahaan	102,922,550			20 perusahaan	**150.000.000**

2.07.05.1.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Samarinda	1 Laporan	6,729,858,600			1 laporan	350.000.000
2.07.05.1.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)**		**1 Dokumen**	**790,516,500**			**1 dokumen**	**1.300.000.000**
2.07.05.1.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Samarinda	20 Perkara	374,500,900			20perkara	300.000.000
2.07.05.1.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Samarinda	20 Perkara	127,309,800			20 perkara	300.000.000
2.07.05.1.02.003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Samarinda	10 Serikat Pekerja	89,509,800			10 serikat pekerja	350.000.000
2.07.05.1.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Samarinda	10 Lembaga	199,196,000			10 lembaga	350.000.000
2.07.05.1.03	**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**	**Jumlah SK Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota**	**Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu,**	**1 SK**	**667,345,100**			**1 Surat Keputusan**	**1.750.000.000**

			Paser, Mahulu						
2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP		1 SK	667,345,100			1 Surat Keputusan	1.250.000.000
2.07.05.1.03.03	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu, Paser, Mahulu	-	0			10 surat keputusan	500.000.000
2.07.06	**Program Pengawasan Ketenagakerjaan**	**Perusahaan yang dibina dan diawasi**	**Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu, Paser, Mahulu**	**300 perusahaan**	**1,644,611,600**			**300 perusahaan**	**7.000.000.000**
2.07.06.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**Jumlah perusahaan yang diawasi terkait norma ketenagakerjaan**	**Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu, Paser, Mahulu**	**150 perusahaan**	**1,644,611,600**			**150 perusahaan**	**7.000.000.000**

2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu, Paser, Mahulu	48 perusahaan	900,506,000			30 perusahaan	2.000.000.000
2.07.06.1.01.02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu, Paser, Mahulu	30 perusahaan	321,316,900			30 perusahaan	1.500.000.000
2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu, Paser, Mahulu	20 perusahaan	422,788,700			20 perusahaan	3.500.000.000
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**1,079,620,700**				**6.280.000.000**
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**1,079,620,700**				**6.280.000.000**

3.32.02	**Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi**	**Kawasan Transmigrasi**	**Paser Kawasan Muara Koman dan Kerang, Kutim Maloy Kaliorang**	**1 Kimtrans**	**392,900,000**			**1 kimtrans**	**2.880.000.000**
3.32.02.1.01	**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**Jumlah Kawasan Transmigrasi** **Penatausahaan Tanah Kawasan Transmigrasi**	**Berau, Kukar, Paser, PPU**	**1 Kimtrans**	**392,900,000**			**1 kimtrans**	**2.880.000.000**
3.32.02.1.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Berau, Kukar, Paser, PPU	2 dokumen	61,398,000			2 dokumen	995.000.000
3.32.02.1.01.02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Berau, Kukar, Paser, PPU	2 kawasan transmigrasi	119,196,000			2 kawasan transmigrasi	535.000.000
3.32.02.1.01.03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Berau, Kukar, Paser, PPU	13500 hektar	134,448,000			13500 hektar	850.000.000
3.32.02.1.01.04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Berau, Kukar, Paser, PPU	2 dokumen	77,858,000			2 dokumen	500.000.000
3.32.03	**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Meningkatnya Masyarakat Transmigrasi Mandiri**	**Desa Keladen Kecamatan Tanjung Harapan Kab. Paser**	**1 Kimtrans**	**279,474,000**			**1 kimtrans**	**1,450,000,000**

3.32.03.1.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi**	**Perjanjian Kerja sama antar daerah asal transmigran dan daerah tujuan transmigran**	**Desa Keladen Kecamatan Tanjung Harapan Kab. Paser**	**1 Kimtrans**	**279,474,000**			**1 kimtrans**	**1,450,000,000**
3.32.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	128,598,000			1 laporan	350.000.000
3.32.03.1.01.02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha danLayak Berkembang)	Berau, Kukar, Paser, PPU	1 Dokumen	66,798,000			1 dokumen	550.000.000
3.32.03.1.01.03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	Berau, Kukar, Paser, PPU	10 Kepala Keluarga	84,078,000			10 kepala keluarga	550.000.000

3.32.03.1.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	Berau, Kukar, Paser, PPU	15 Kepala Keluarga	0			15 kepala keluarga	550.000.000
3.32.04	**Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**	**Kesepakatan bersama dengan provinsi lain**	**Desa Keladen Kab. Paser**	**1 Kimtrans**	**407,246,700**			**1 kimtrans**	**1.200.000.000**
3.32.04.1.01	**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**	**Transmigran Mandiri**	**Desa Keladen Kab. Paser**	**1 Kimtrans**	**407,246,700**			**1 kimtrans**	**1.200.000.000**
3.32.04.1.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Berau, Maratua-Payung-Payung, Kukar Tenggarong Seberang Embalut, Paser Tanjung Harapan Keladen, PPU Sepaku Semoi Dua	60 Kepala Keluarga	327,154,700			60 kepala keluarga	750.000.000
3.32.04.1.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Di kembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Berau, Kukar, Paser, PPU	1 Satuan Permukaan	80,092,000			1 satuan permukiman	450.000.000
JUMLAH (DINAS)					**59.451.868.000**				**106.080.000.000**

MENJADI: UPTD BLKI BALIKPAPAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	`								
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**23,209,393,351**	**APBD**			**23,100,000,000**
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor kepuasan masyrakat terhadap urusan bidang tenaga kerja dan transmigrasi**	**Bpp**	**83%**	**3,076,532,200**			**83%**	**4,350,000,000**
2.07.01.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan**	**Bpp**	**1 Laporan**	**1,161,014,000**			**1 Laporan**	**850.000.000**
2.07.01.1,02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bpp	12 dokumen	1,161,014,000			12 dokumen	850.000.000
2.07.01.1,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggara nya Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bpp**	**12 bulan**	**1,251,836,400**			**12 bulan**	**595,000,000**
2.07.01.1,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bpp	5 paket	8,556,500			5 paket	30.000.000

2.07.01.1,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bpp Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 paket	488,869,400			12 paket	150.000.000
2.07.01.1,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bpp	3 paket	350,060,500			3 paket	50.000.000
2.07.01.1,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bpp	12 bulan 12 laporan	90.000.000,00			12 bulan 12 laporan	350.000.000,00
2.07.01.1,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bpp**	12 bulan	**392,681,500**			12 bulan	**205.000.000**
2.07.01.1,07.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bpp	12 laporan	2,040,000			12 laporan	5.000.000
2.07.01.1,07.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bpp	12 bulan	390,641,500			12 bulan	200.000.000
2.07.01.1,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Bpp**	**12 bulan**	**271,000,300**			**12 bulan**	**1.200.000.000**
2.07.01.1,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bpp	4 unit	49,883,500			4 unit	350.000.000
2.07.01.1,09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bpp	12 bulan 35 unit	221,116,800			12 bulan 35 unit	850.000.000
2.07.03.1	**Program Pelatihan Kerja danan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase Lulusan Pelatihan yang Terserap di Pasar Kerja**	**Bpp**	**85%**	**20,132,861,151**			**85%**	**18.750.000.000**
2.07.03. 1.01	**Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**	**Jumlah Lulusan Pelatihan Pemagangan yang ditempatkan**	**Bpp, PPU**	**1008 orang**	**20,132,861,151**			**1008 orang**	**18.750.000.000**

2.07.03. 1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi	Bpp, PPU	1040 orang	20,066,753,351			1040 orang	17.000.000.000
2.07.03. 1.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Bpp, PPU	10 Lembaga	66,107,800			10 Lembaga	500.000.000
JUMLAH UPTD BLKI BALIKPAPAN					**23.209.393.35**				**23.100.000.000**

MENJADI: UPTD BLKI Bontang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan dasar**					**APBD**			
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**3,840,194,120**				**9,673,000,000**
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor kepuasan masyrakat terhadap urusan bidang tenaga kerja dan transmigrasi**	**Btg**	**83%**	**2,205,658,900**			**83%**	**2.673.000.000**
2.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan**	**Btg**	**1 Laporan**	**1,301,946,560**			**1 Laporan**	**800.000.000**

2.07.01.1,02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Btg	12 Dokumen	1,301,946,560			12 Dokumen	800.000.000
2.07.01.1,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedia nya Pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**Btg**	**12 Bulan**	**29,280,200**			**12 Bulan**	**25.000.000**
2.07.01.1,05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapan	Btg	12 Paket	29,280,200			12 Paket	25.000.000
2.07.01.1,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggara nya Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah**	**Btg**	**12 Bulan**	**345,674,740**			**12 Bulan**	**845.000.000**
2.07.01.1,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Btg	2 Paket	7,753,500			7 Paket	15.000.000
2.07.01.1,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Btg	4 Paket	161,122,900			4 Paket	200.000.000
2.07.01.1,06.04	Penyediaan bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Btg	2 Paket	29,000,000			2 Paket	50.000.000
2.07.01.1,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Btg	9 Paket	7,453,340			9 Paket	30.000.000
2.07.01.1,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Btg	10 Laporan	140,345,000			10 Laporan	550.000.000
2.07.01.1,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Btg**	12 Bulan	**335,790,800**			12 Bulan	**203.000.000**
2.07.01.1,08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bpp	1 laporan	4,864,800			1 laporan	3.000.000

2.07.01.1,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Btg	1 Laporan	330,926,000			3 Laporan	200.000.000
2.07.01.1,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedia nya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Btg**	**12 bulan**	**192,966,600**			**12 bulan**	**800.000.000**
2.07.01.1,09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Btg	1 unit	56,407,800			1 unit	50.000.000
2.07.01.1,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Btg	1 unit	136,558,800			1 unit	750.000.000
2.07.03.1	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase Lulusan Pelatihan yang Terserap di Pasar Kerja**	**Btg**	**85%**	**1,634,535,220**			**85%**	**8.600.000.000**
2.07.03. 1.01	**Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**	**Jumlah Lulusan Pelatihan Pemagangan yang ditempatkan**	**Btg**	**176 orang**	**1,634,535,220**			**176 orang**	**7.000.000.000**
2.07.03. 1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi	Btg	176 orang	860.800.000			176 orang	7.000.000.000
JUMLAH UPTD. BLKI BONTANG					**3,840,194,120**				**9,673,000,000**
TOTAL DINAS, UPTD.BLKI BALIKPAPAN DAN UPTD BLKI BONTANG					**84.285.125.808**				**135.053.000.000**

Berdasarkan tabel rekapitulasi Program dan Kegiatan Disnakertrans Prov. Kaltim diatas, maka di simpulkan bahwa jumlah Program yang akan dilaksanakan sejumlah 12 Program, 30 Kegiatan, dan 63 Sub Kegiatan untuk keseluruhan Dinas beserta UPTD di lingkungan Disnakertrans Prov. Kaltim.

Untuk pelaksanaan lokasi kegiatan unit kerja di Disnakertrans Prov Kaltim, tersebar di Kota Samarinda, akan tetapi untuk Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja tesebar di 10 Kab/Kota yaitu Samarinda, Balikpapan, PPU, Paser, Bontang, Kutim, Kukar, Berau, Kubar, Mahulu (untuk kegiatan pengelolaan Informasi Tenaga Kerja).

Pada Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi berlokuskan di Desa Keladen Kecamatan Tanjung Harapan Kab. Paser, kemudian untuk Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi masih dipusatkan pada perencanaan Kawasan di Paser (Muara Kaman dan Kerang) juga di daerah Kutai Timur, di Perencanan Kawasan Industri Maloy Kaliorang. Sedangkan untuk pelaksanaan sub-sub kegiatan di Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi tersebar di Paser Kawasan Muara Koman dan Kerang, Kutim Maloy Kaliorang, PPU, Kukar, Paser, Kutim, Kubar, Berau, Mahulu, Samarinda, PPU Sepaku Semoi, Kukar Embalut, Samarinda Lempake, Makroman, Palaran, Simpang Pasir, Bantuas. Selain itu untuk Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi difokuskan pada Pulau Maratua.

Adapun di UPTD. BLKI Balikpapan persebaran kegiatan merata di seluruh kecamatan dan kelurahan Balikpapan dan sebagian wilayah Penajam Paser Utara, sedangkan UPTD BLKI Bontang fokus pelaksanaan di seputar Kota Bontang, Bontang Selatan dan Bontang Lestari.

Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada tahun 2022 yang semula Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Provinsi Kalimantan Timur mengajukan Rencana Anggaran APBD Provinsi Tahun 2023 sebesar **Rp. 59.451.868,00** pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 **menjadi Rp. 84.285.125.808,00.**

Adapun Renja Program Prioritas Tahun anggaran 2023 yang mengalami Perubahan:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang semula sebesar Rp.1.086.847.760,00 (Dinas) menjadi Rp. 1.964.336.500 melalui kegiatan :
   – Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
   – Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
   – Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah

   UPTD. BLKI Balikpapan semula Rp. 9.998.986.000,00 menjadi Rp. 20.132.861.151,00 melalui kegiatan:
   – Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
   – Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

   UPTD. BLKI Bontang semula Rp. 860.800.000,00 menjadi Rp. 1.634.535.220,00 melalui kegiatan:
   – Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
2. Program Penempatan Tenaga Kerja semula Rp. 1.009.086.000,00 menjadi Rp. 2.405.519.600,00 dengan kegiatan:
   – Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
   – Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   – Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
   – Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
   – Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3. Program Hubungan Industrial semula Rp. 1.640.400.000,00 menjadi Rp. 8.402.565.300,00 dengan kegiatan :
   – Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota
   – Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
   – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)

4. Program Pengawasan Ketenagakerjaan semula Rp. 1.694.597.000,00 menjadi Rp. 1.644.611.600 melalui kegiatan :
   – Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
5. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi semula Rp. 257.400.000,00 menjadi Rp. 392.900.000,00 melalui kegiatan:
   – Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi semula Rp. 257.400.000,00 menjadi Rp. 279.474.000,00 melalui kegiatan :
   – Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi semula Rp. 262.080.000,00 menjadi Rp. 407.246.700,00 melalui kegiatan :
   – Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan

BAB V . PENUTUP

5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian.

1. Penyediaan Peralatan Pelatihan bagi BLKI yang ada masih kurang.
2. Perlu penambahan Pegawai Fungsional Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (Mediator, Pengantar Kerja, Instruktur Pelatihan dan Pengerak Swadaya Masyarakat)
3. Program pemagangan dalam negeri dan luar negeri yang masih harus terus di kembangkan.
4. Penyedian tenaga kerja bersertifikasi perlu terus ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang besar.
5. Kesadaran akan pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja sehingga harus semakin digiatkan sosialisasi tentang Norma Kerja, serta Kesehatan dan Keselamatan di lingkungan kerja.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

1. Bertahap dengan skala prioritas sehubungan dengan keterbatasan anggaran baik dukungan APBN maupun APBD.
2. Pola sharing, baik sharing penganggaran (APBN, APBD Kabupaten/Kota) maupun sharing Program dan Kegiatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Kerjasama dengan pihak Swasta dengan pola kemitraan dan/atau penanaman investasi skala Nasional.
4. Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, dan dukungan masyarakat pada pembangunan daerah.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Pelaksanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan setiap tahun anggaran berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, RENSTRA Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur serta melakukan review terhadap pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan didasari dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi Lainnya, dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan Perusahaan Besar Swasta di Wilayah Kalimantan Timur, dan pihak terkait lainnya.
3. Dukungan Program dan kegiatan dari sektoral baik SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi maupun Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, dan Kementerian terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota serta pihak-pihak swasta yang terkait.
4. Dukungan anggaran pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui APBN Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan,

serta APBD Kabupaten/Kota, dan Dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

5. Dukungan investor Nasional dalam pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui program CSR.
6. Kerjasama pelaksanaan program ketenagakerjaan dalam rangka pemagangan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan di wilayah Kalimantan Timur.
7. Program dan kegiatan didukung atas aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat secara kelompok dan/atau keterwakilan.

Samarinda, Agustus 2022

Kepala Dinas,

H. Rozani Erawadi,S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP.197101241997031007

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD yang merupakan penjabaran dari Renstra (Rencana Strategis PD) untuk periode satu tahun. Dokumen ini memuat rencana progam/kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun lalu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan. Pada level pemerintah daerah disusun Perencanaan Jangka Panjang (RPJPD), Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD) maupun Perencanaan Tahunan (RKPD) dan untuk level perangkat daerah disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah) serta Rencana kerja-Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Secara hierarki penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rancanga RKPD yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan RKPD tersebut. Renja Perangkat Daerah juga diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Perangkat Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD).

Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Secara teknis, Renja Perangkat Daerah akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah/Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) DKP3A memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota. Penyusunan Renja DKP3A mengacu pada tugas dan fungsi DKP3A sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mengenai Tugas dan Fungsi DKP3A, Renstra Perangkat Daerah , Renja Provinsi Kalimantan Timur dan memperhatikan Renja Kementerian/Lembaga.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak masuk ke dalam urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Selanjutnya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah mengatur bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah salah satu jenis perangkat daerah adalah dinas yang mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pemanantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dengan demikian terjadi perubahan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari badan menjadi Dinas, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) berubah menjadi Dinas Kependudukan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak (DKP3A) dengan mandat 3 urusan yaitu pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta Pelayanan Adminsitrasi Kependudukan. Untuk mencapai tujuan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur maka disusun Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam

rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah sesuai Pasal 272 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan ke dalam rancangan Rencanan Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Dasar hukum pembentukan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Kerja (Renja) DKP3A memuat rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah khususnya bidang Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, rencana kinerja dan pendanaannya serta prakiraan kerja dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja DKP3A mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negera;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Maksud disusunnya Rencana Kerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk mengetahui arah pelaksanaan pembangunan daerah serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai

dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur Periode 2019 -2023.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Awal DKP3A Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, serta kebijakan Kelapa Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dan hasil dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan
- 1.2 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayananan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Pada Tahun Anggaran 2021 DKP3A mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 32.580.509.000-, terdiri dari Belanja Gaji Rp. 9.344.839.000,- Belanja Operasional Rp. 13.362.425.000,- Belanja DAK (Adminduk) Rp. 1.326.175.000,-, Belanja DAK (PPPA) Rp. 397.070.000,- Belanja DID Rp. 8.150.000.000,- Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran posisi 31 Desember 2021 adalah Realisasi Belanja Gaji Rp. 7.893.688.511, Realisasi Belanja Operasional, DAK (Adminduk & PPPA), DID sebesar Rp. 23.235.670.000. Secara rinci tertuang dalam table berikut :

Tabel 2.1

Realisasi anggaran dan fisik DKP3A Provinsi Kalimantan Timur

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN 2021	REALISASI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021	
			KEUANGAN (Rp)	SISA DANA (Rp.)
	TOTAL BELANJA	32,580,509,000	21,679,414,822	10,901,094,178
2.02 . 2.02.01.01 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*454,075,375*	*369,694,491*	*84,380,884*
2.02 . 2.02.01.01 . 01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	454,075,375	369,694,491	84,380,884
2.02 . 2.14.2.12 . 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,344,839,000	7,893,688,511	1,451,150,489
2.02 . 2.14.2.12 . 01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,344,839,000	7,893,688,511	1,451,150,489
2.02 . 2.02.01.01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	989,167,624	938,989,590	50,178,034
2.02 . 2.02.01.01 . 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	989,167,624	938,989,590	50,178,034
2.02 . 2.02.01.01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,137,648,540	1,736,289,915	401,358,625
2.02 . 2.02.01.01 . 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,137,648,540	1,736,289,915	401,358,625

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN 2021	REALISASI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021	
			KEUANGAN (Rp)	SISA DANA (Rp.)
2.02 . 2.02.01.01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,571,183,635	1,163,129,305	408,054,330
2.02 . 2.02.01.01 . 09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,571,183,635	1,163,129,305	408,054,330
2.02 . 2.02.01.01 . 15	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	300,000,000	228,408,016	71,591,984
2.02 . 2.02.01.01 . 15.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	80,000,000	74,233,682	5,766,318
2.02 . 2.02.01.01 . 15.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	100,000,000	46,794,180	53,205,820
2.02 . 2.02.01.01 . 15.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	120,000,000	107,380,154	12,619,846
2.02 . 2.02.01.01 . 16	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	250,000,000	149,212,509	100,787,491
2.02 . 2.02.01.01 . 16.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	150,000,000	65,017,909	84,982,091
2.02 . 2.02.01.01 . 16.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	100,000,000	84,194,600	15,805,400
2.02 . 2.02.01.01 . 17	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	449,325,201	370,885,826	78,439,375
2.02 . 2.02.01.01 . 17.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	100,000,000	76,202,300	23,797,700
2.02 . 2.02.01.01 . 17.02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	100,000,000	88,212,194	11,787,806
2.02 . 2.02.01.01 . 17.03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	249,325,201	206,471,332	42,853,869
2.02 . 2.02.01.01 . 18	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	179,310,000	152,191,138	27,118,862
2.02 . 2.02.01.01 . 18.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	179,310,000	152,191,138	27,118,862
2.02 . 2.02.01.01 . 19	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	563,359,625	202,098,905	361,260,720

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN 2021	REALISASI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021	
			KEUANGAN (Rp)	SISA DANA (Rp.)
2.02 . 2.02.01.01 . 19.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	563,359,625	202,098,905	361,260,720
2.02 . 2.02.01.01 . 20	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	205,425,000	175,853,725	29,571,275
2.02 . 2.02.01.01 . 20.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	205,425,000	175,853,725	29,571,275
2.02 . 2.02.01.01 . 24	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	500,000,000	477,025,547	22,974,453
2.02 . 2.02.01.01 . 24.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	300,000,000	294,408,222	5,591,778
2.02 . 2.02.01.01 . 24.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	200,000,000	182,617,325	17,382,675
2.02 . 2.02.01.01 . 25	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	59,575,000	54,093,000	5,482,000
2.02 . 2.02.01.01 . 25.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	59,575,000	54,093,000	5,482,000
2.02 . 2.02.01.01 . 26	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	8,315,425,000	1,803,730,870	6,511,694,130
2.02 . 2.02.01.01 . 26.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	106,525,000	103,890,300	2,634,700
2.02 . 2.02.01.01 . 26.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8,208,900,000	1,699,840,570	6,509,059,430
2.02 . 2.02.01.01 . 27	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	250,000,000	194,855,200	55,144,800
2.02 . 2.02.01.01 . 27.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	250,000,000	194,855,200	55,144,800
2.02 . 2.02.01.01 . 28	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	225,000,000	194,024,198	30,975,802
2.02 . 2.02.01.01 . 28.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	225,000,000	194,024,198	30,975,802
2.06 . 2.02.01.01 . 15	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	4,680,000,000	3,951,600,510	728,399,490
2.06 . 2.02.01.01 . 15.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk	4,680,000,000	3,951,600,510	728,399,490

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN 2021	REALISASI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021	
			KEUANGAN (Rp)	SISA DANA (Rp.)
	Berdasarkan Kebijakan Nasional			
2.06 . 2.02.01.01 . 18	Pelayanan Pencatatan Sipil	170,000,000	115,369,284	54,630,716
2.06 . 2.02.01.01 . 18.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	170,000,000	115,369,284	54,630,716
2.06 . 2.02.01.01 . 21	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1,476,175,000	1,091,734,499	384,440,501
2.06 . 2.02.01.01 . 21.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1,326,175,000	997,036,599	329,138,401
2.06 . 2.02.01.01 . 21.02	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	150,000,000	94,697,900	55,302,100
2.08 . 2.02.01.01 . 15	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	150,000,000	138,996,176	11,003,824
2.08 . 2.02.01.01 . 15.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	150,000,000	138,996,176	11,003,824
2.08 . 2.02.01.01 . 18	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	150,000,000	123,791,749	26,208,251
2.08 . 2.02.01.01 . 18.05	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	40,000,000	27,252,147	12,747,853
2.08 . 2.02.01.01 . 18.07	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	40,000,000	36,636,958	3,363,042
2.08 . 2.02.01.01 . 18.08	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	70,000,000	59,902,644	10,097,356
2.08 . 2.02.01.01 . 20	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	160,000,000	153,751,858	6,248,142
2.08 . 2.02.01.01 . 20.03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	160,000,000	153,751,858	6,248,142

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu

1. Program Perlindungan Perempuan

   Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realiasasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan DKP3A Provinsi Kalimantan timur secara keseluruhan di tahun 2021 terlaksana atau terealisasi dengan cukup baik dapat dilihat dari realisasi keuangan sebesar 66,54 %, hal ini didukung oleh anggaran dan sumber daya yang memadai.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan secara keseluruhan program dan kegiatan pada DKP3A provinsi Kalimantan timur di tahun 2021 terlaksana sesuai dengan target kegiatan. DKP3A telah berupaya untuk terus menjalankan aktifitas program/kegiatan khusunya terkait pelayanan masyarakat dan program prioritas sesuai protokol kesehatan di tengah Pandemi Covid-19.

Secara umum program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran juga adanya dukungan sarana dan prasarana lainnya. Secara rinci faktor pendukung capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang memadai.
2. Adanya kebijakan PUG Kalimantan Timur sebagai pedoman Pelaksanaan dalam Terwujudnya Pembangunan yang setara dan berkeadilan.
3. Adanya regulasi dan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui melalui satgas perlindungan perempuan dan anak.
4. Tiga Urusan dalam Institusi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur memberi kemudahan dalam penyediaan dan pemanfaatan data, baik data administrasi kependudukan, data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak, data Keluarga Berencana sebagai bahan informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Kemitraan dengan lembaga pemerhati anak (PATBM, PUSPAGA, PUSPA, Kampung KB, dll)

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu :

- Dukungan anggaran yang tidak sesuai dengan penetapan Renstra Perangkat daerah
- Kurang Maksimalnya operasional rutinitas DKP3A Provinsi Kalimantan Timur guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta laporan kinerja dan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang ada.
- Masih Belum tersedianya Data pilah Gender secara baik pada setiap Perangkat Daerah
- Belum terbentuknya UPTD DKP3A
- Perangkat daerah belum menuangkan PPRG menjadi dasar dalam pencapaian kinerja Program Kegiatan.
- Belum terbentuknya sistem informasi data gender dan anak (data pilah) yang aktif.
- Pelaksanaan Program kegiatan Pendidikan Politik perempuan bersifat temporer.
- Sifat Tugas kewenangan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan keberhasilan program pendapatan perempuan tidak secara langsung, namun di tentukan oleh komitmen lintas sektor lainnya (Dinas Tenaga Kerja, Disperindakop, Perbankan, dll).
- Perhitungan Data Korban Kekerasan melalui online (SIMFONI PPA) belum sesuai dengan fakta lapangan.
- Terbatasnya jumlah ADB (Administrator Data Base) dalam pengendalian administrasi kependudukan.

Implikasi yang timbul terhadapa target capaian program Renstra Perangkat Daerah secara langsung terwujud dalam peningkatan fungsi sosial dan peran kelompok sasaran program/kegiatan yang memberikan konstribusi dalam penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak. Selain itu Potensi Sumber Kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak dapat tergali dan didayagunakan secara maksimal untuk mitra dalam pembangunan.

Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain :

- Melakukan perubahan Anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan
- Meningkatkan Koordinasi dengan Pemangku kepentingan
- Meningkatkan komitmen antar unit kerja
- Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas sumber daya melalui program dan kegiatan
- Konsisten dalam kualitas target dan indikator kinerja

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DKP3A) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target & realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra s/d tahun 2023	
					Target renja tahun 2021	Realisasi Renja tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target capaian	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
2.08.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dokumen evaluasi kinerja SKPD	100 %	79,61	90 %	90 %	100 %	95 %	100 %	100 %
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	68 %	79,61	66 %	63.84 %	96,73%	67%	68 %	68 %
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran DKP3A Prov. Kaltim	98 %	87,17	90%	90%	100 %	95%	98 %	98 %
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	87,17	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap kenyamanan di tempat kerja	62 %	71,84	60 %	60 %	100 %	62 %	62 %	62 %
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang digunakan dan berfungsi baik	95%	71,84	90%	90%	100 %	95%	95%	100%
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Implementasi Kelembagaan PUG	1 kebijakan	0	1 kebijakan	1 kebijakan	100 %	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan lembaga PUG	10 lembaga	56,65	3 kab/kota	3 kab/kota	100 %	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan	Pengembangan SDM	1 dokumen	38,47	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DKP3A) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target & realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra s/d tahun 2023	
					Target renja tahun 2021	Realisasi Renja tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target capaian	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
	Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	bidang politik dan hukum / Pengembangan SDM Perempuan bidang politik dan hukum								
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan	1 dokumen	88,78	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kebijakan Perlindungan Perempuan	4 kebijakan	55,69	4 kebijakan	4 kebijakan	100 %	4 kebijakan	4 kebijakan	4 kebijakan
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan SDM / Peningkatan SDM yang memahami pencegahan kekerasan terhadap perempuan	2 dokumen	0	30 orang	30 orang	100 %	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot	Rasio KDRT / Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0.038 persen	76,71	0.054 persen	0.029 persen	53,7 %	0.042 persen	0.038 persen	0.038 persen
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta peningkatan sumber daya lembaga penyedia layanan yang mengikuti pelatihan / Penguatan lembaga penyedia layanan		76,71	30 orang	25 orang	83 %			
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Penguatan Pemenuhan Hak Anak (Jumlah Penguatan)	3 kebijakan	67,05	3 kebijakan	4 kebijakan	133 %	3 kebijakan	3 kebijakan	3 kebijakan
2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non	Penguatan pelembagaan PHA	1 kab/kota	67,05	1 kab./kota	1 kab/kota	100 %	1 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DKP3A) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target & realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra s/d tahun 2023	
					Target renja tahun 2021	Realisasi Renja tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target capaian	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
	Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi									
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Penguatan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	200 orang	82,33	200 orang	250 orang	125 %	200 orang	200 orang	200 orang
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak / Peningkatan Perlindungan Khusus Anak (Jumlah Peningkatan)	0,05 %	82,33	0,06 %	0,09%	150 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data perkawinan anak / Dokumen pencegahan kekerasan terhadap anak (Jumlah dokumen / SOP / PKS)	2 dokumen	15,26	2 dokumen	2 dokumen	100 %	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan perlindungan anak / Jumlah layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Anak	100 peserta	15,26	350 peserta	100 peserta	29 %	100 peserta	100 peserta	100 peserta
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Capaian data gender dan anak yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan / sistem data gender untuk dasar perencanaan pembangunan berdasarkan data pilah	70 %	80,55	65 %	70%	108 %	70 %	70 %	70 %
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan	persentase data gender	70 %	86,90	65 %	70%	108 %	70 %	70 %	70 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DKP3A) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target & realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra s/d tahun 2023	
					Target renja tahun 2021	Realisasi Renja tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target capaian	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
	Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	dan anak yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan								
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kebjiakan terkait dengan pendaftaran penduduk	6 kebijakan	66,30	6 kebijakan	6 kebijakan	100 %	6 kebijakan	6 kebijakan	6 kebijakan
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah kebijakan terkait pelayanan pendaftaran penduduk Kab/Kota se-Kaltim	6 dokumen	74,35	6 dokumen	6 dokumen	100 %	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kebijakan terkait pencatatn sipil	6 kebijakan	71,41	6 kebijakan	6 kebijakan	100 %	6 kebijakan	6 kebijakan	6 kebijakan
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kebijakan terkait pelayanan catatan sipil kab/kota se Kaltim	6 dokumen	69,52	6 dokumen	6 dokumen	100 %	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kebijakan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	5 kebijakan	79,71	5 kebijakan	5 kebijakan	100 %	5 kebijakan	5 kebijakan	5 kebijakan
2.12.04.1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya data kependudukan yang digunakan untuk semua kepentingan / Jumlah data kependudukan	3 data kependudukan	63,96	3 data kependudukan	3 data kependudukan	100 %	3 data kependudukan	3 data kependudukan	3 data kependudukan
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kebijakan tentang pengendalian penduduk	1 kebijakan	77,28	1 kebijakan	1 kebijakan	100 %	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah grand desain pembangunan kab/kota dalam 5 aspek/	1 dokumen	80,31	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	40%	88,56	33 %	100%	303 %	40%	40%	40%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DKP3A) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target & realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra s/d tahun 2023	
					Target renja tahun 2021	Realisasi Renja tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target capaian	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
		(KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal								
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Peningkatan jumlah peserta KB	120 orang	54,14	200 orang	160 orang	80 %	120 orang	120 orang	120 orang
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kebijakan tentang ketahanan keluarga / Peningkatan SDM ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 kebijakan	58,89	1 kebijakan	1 kebijakan	100 %		1 kebijakan	1 kebijakan
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengembangan SDM / Peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 dokumen	77,04	1 dokumen	1 dokumen	100 %		1 dokumen	1 dokumen

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1 Kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indicator NSPK, SPM dan IKK dan Indikator Kinerja lainnya

Analisis kinerja yang menggambarkan capaian kinerja pelayanan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dan tertuang dalam Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, diantaranya yaitu:

- Jumlah kab/kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak
- Jumlah kab/kota menuju layak anak
- Persentase DP3A yang melaksanakan perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG)
- Jumlah kab/kota yang menyediakan data terpilah gender dan anak
- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
- Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Pagu Anggaran 2023	
				Sebelum	Menjadi (Sesuai SIPD)
DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**29,037,956,281.00**	**31,923,364,281.00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Indeks kualitas pelayanan kesekretariatan**	**100%**	**18,519,406,281.00**	**19,023,699,781.00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**68%**	**633,120,000.00**	**633,120,000.00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	248,720,000.00	248,720,000.00

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA -SKPD	2 dokumen	129,000,000.00	129,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	5,500,000.00	5,500,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen forum perangkat daerah	1 dokumen	115,800,000.00	115,800,000.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	134,100,000.00	134,100,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase realisasi anggaran**	**12 bulan**	**10,609,000,521.00**	**10,609,000,521.00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang menerima gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	10,535,000,521.00	10,535,000,521.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhirtahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akg=hir tahun	1 dokumen	51,000,000.00	51,000,000.00

	Koordinasi dan enyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan akhirtahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akg=hir tahun	1 dokumen	23,000,000.00	23,000,000.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**80%**	707,306,500.00	707,306,500.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas pegawai	1 Paket	198,897,300.00	198,897,300.00
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM mengkuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	24 Orang	508,409,200.00	508,409,200.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik**	**100%**	**2,122,979,400.00**	**2,122,979,400.00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	10 Paket	10,362,000.00	10,362,000.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	20 paket	164,685,000.00	164,685,000.00

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	10 paket	75,345,500.00	75,345,500.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	1 dokumen	13,574,400.00	13,574,400.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi	1 laporan	159,472,500.00	159,472,500.00
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	1,699,540,000.00	1,699,540,000.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusn pemerintah daerah**	**60%**	**534,482,000.00**	**1,746,082,000.00**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	16 unit	534,482,000.00	1,746,082,000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**64%**	**2,750,611,360.00**	**2,750,611,360.00**

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan Jasa surat menyurat yang tersedia	3 laporan	10,855,200.00	10,855,200.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	3 laporan	458,844,000.00	458,844,000.00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 laporan	35,950,000.00	35,950,000.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	3 laporan	2,244,962,160.00	2,244,962,160.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik**		**1,161,906,500.00**	**1,161,906,500.00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan yang tersedia	14 unit	270,951,500.00	270,951,500.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang terpelihara	-	890,955,000.00	890,955,000.00

	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirsusahaan**	**1 Kebijakan**	**1,700,000,000.00**	**1,700,000,000.00**
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	**Penguatan lembaga PUG**	**7 lembaga PUG**	**950,000,000.00**	**950,000,000.00**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen pelaksanaan PUG	1 Dokumen	550,000,000.00	550,000,000.00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Pendampingan dan advokasi PUG	4 Perangkat Daerah	300,000,000.00	300,000,000.00
	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG ermasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Pendampingan dan advokasi PUG	4 Perangkat Daerah	100,000,000.00	100,000,000.00

	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	**Pengembangan SDM Perempuan bidang politik dan hukum**	**1 dokumen**	**350,000,000.00**	**350,000,000.00**
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1 dokumen	200,000,000.00	200,000,000.00
	Advokasi kebijakan dan pendampingan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1 dokumen	150,000,000.00	150,000,000.00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	**Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirsusahaan**	**1 dokumen**	**400,000,000.00**	**400,000,000.00**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	30 lembaga	137,440,000.00	137,440,000.00

	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	150 Orang	135,630,000.00	135,630,000.00
	Pengembangan KIE pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	150 Orang	126,930,000.00	126,930,000.00
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani**	**4 Kebijakan**	**1,970,400,000.00**	**2,494,208,000.00**
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan**	**1 dokumen**	**741,300,000.00**	**1,265,108,000.00**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 dokumen	352,100,000.00	875,908,000.00

	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 dokumen	389,200,000.00	389,200,000.00
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu**		**1,154,504,000.00**	**1,154,504,000.00**
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	1 laporan	500,000,000.00	500,000,000.00

	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	1 laporan	654,504,000.00	654,504,000.00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	**Penguatan lembaga penyedia layanan**	**-**	**74,596,000.00**	**74,596,000.00**
	Peniingkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	1 laporan	74,596,000.00	74,596,000.00
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Predikat kabupaten/kota layak anak**	**3 Kebijakan**	**431,400,000.00**	**431,400,000.00**

	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	**Penguatan pelembagaan PHA**	**1 Kab/Kota**	**235,000,000.00**	**235,000,000.00**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	1 kab/kota	117,000,000.00	117,000,000.00
	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemeuhan hak anak kewennagan provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	1 laporan	118,000,000.00	118,000,000.00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	**Jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak**	**1 dokumen**	**196,400,000.00**	**196,400,000.00**
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 dokumen	98,000,000.00	98,000,000.00

	Penguatan jejaring antara lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi dan lintas daerah kab/kota	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 dokumen	98,400,000.00	98,400,000.00
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak**	**90.00%**	**1,216,000,000.00**	**1,216,000,000.00**
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan**	**1 dokumn**	**336,000,000.00**	**336,000,000.00**
	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan	1 dokumn	336,000,000.00	336,000,000.00
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	**Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**1 dokumen**	**880,000,000.00**	**880,000,000.00**

	Pengembangan KIE anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan povinsi	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 dokumen	880,000,000.00	880,000,000.00
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Persentase Capaian Data Gender dan anak**	**75%**	**692,400,000.00**	**692,400,000.00**
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	**Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia**	**20 data**	**692,400,000.00**	**692,400,000.00**
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender Provinsi yang Tersedia	2 dokumen	448,400,000.00	448,400,000.00
		Jumlah Dokumen Data anak Provinsi yang Tersedia	2 dokumen		
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	2 dokumen	244,000,000.00	244,000,000.00

	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk**	**6 Kebijakan**	**624,150,000.00**	**1,624,150,000.00**
	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	**Jumlah Dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk**	**6 Dokumen**	**624,150,000.00**	**1,624,150,000.00**
	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk yang telah ditetapkan	6 Dokumen	624,150,000.00	1,624,150,000.00
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil**	**6 Kebijakan**	**278,000,000.00**	**278,000,000.00**
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil	6 Dokumen	278,000,000.00	278,000,000.00

	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Publikasi data kependudukan skala provinsi**	**5 Kebijakan**	**498,000,000.00**	**498,000,000.00**
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan**	**3 Data Kependudukan**	**498,000,000.00**	**498,000,000.00**
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah SKPD Prov. Kaltim yang melakukan pemanfaatan data (DAK)	8 SKPD	498,000,000.00	498,000,000.00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Angka kelahiran total**	**1 Kebijakan**	**1,277,400,000.00**	**1,277,400,000.00**
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan**	**1 Dokumen**	**1,277,400,000.00**	**1,277,400,000.00**

	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	3 laporan	1,277,400,000.00	1,277,400,000.00
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Angka prevalensi kontrasepsi modern**	**50%**	**814,500,000.00**	**964,500,000.00**
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Ratio akseptor KB**	**1 dokumen**	**814,500,000.00**	**964,500,000.00**
	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah peserta advokasi /sosialisasi penurunan angka stunting	1 dokumen	730,000,000.00	880,000,000.00

	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah peserta yang mengikuti konseling kespro	2 dokumen	7,000,000.00	7,000,000.00
	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah calon pengantin yang telah dibina untuk mendapatkan pemahaman konseling	3 dokumen	77,500,000.00	77,500,000.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Peningkatan SDM ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**1 Kebijakan**	**1,514,300,000.00**	**1,723,606,500.00**
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**1 laporan**	**1,016,300,000.00**	**1,016,300,000.00**
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peserta yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	**1 laporan**	1,016,300,000.00	1,016,300,000.00

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat daerah

Koordinasi dan sinergi program antara DKP3A Provinsi Kalimantan Timur dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2021 yaitu pada program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan target 1 kebijakan

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DKP3A Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
   - Rendahnya koordinasi antara bidang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
   - Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM yang terlatih di DKP3A
   - Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur
   - Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur

b. Permasalahan Bidang Kesetaraan Gender:
   - Masih belum optimalnya pemberdayaan perempuan tehadap perempuan yang menjadi konflik social dan pelaku industry rumahan
   - Belum optimalnya evaluasi implementasi PPRG
   - Rendahnya partisipasi politik perempuan di parlemen

c. Permasalahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
   - Masih belum terbentuknya atau belum optimalnya kelembagaan penyedia layanan ketahanan keluarga
   - Rendahnya pemahaman kesadaran masyarakat tentang ketahanan keluarga
   - Belum optimalnya partisipasi organisasi/Lembaga/forum dalam pemberdayaan perempuan

d. Permasalahan Bidang Sistem Informasi Gender dan Anak:
   - Belum adanya kebijakan terkait data gender dan anak

- Belum optimalnya penggunaan aplikasi SIGA dan DKP3A dan kabupaten/Kota
- Belum termanfaatkannya data pilah pada semua aspek pembangunan
- Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan SIGA
- Rendahnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan data gender dan anak

e. Permasalahan Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak:
- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Belum optimalnya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap perempuan
- Masih belum optimalnya perlindungan dan penanganan terhadap perempuan yang menjadi konflik sosial
- Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perlakuan buruk terhadap pekerja perempuan
- Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual dan penipuan kasus pornografi, cyber crime

f. Permasalahan Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan:
- Terbatasnya jumlah ADB (Administrator Data Base) dalam pengendalian administrasi kependudukan
- Kurangnya kesadarnya masyarakat terhadap kelengkapan administrasi kependudukan

2.3.3 Dampak terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/intenasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program untuk bagian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

1. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dengan indikator penunjang keberhasilan nya yaitu indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG).
2. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, dengan indikator penunjang keberhasilannya yaitu proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, proporsi keterwakilan

perempuan sebagai pengambil kebijakan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- Isu perempuan dan anak belum menjadi isu penting yang harus diperjuangkan antar perangkat daerah
- Beberapa lembaga nasional belum fokus terhadap isu-isu kerentanan perempuan dan anak
- Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang
- Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan
- Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender
- Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga
- Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan
- Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasuskasus anak belum berjalan secara efektif
- Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak
- Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- Belum terintegrasi sistem data gender dan anak antar kabupaten kota
- Tingginya bantuan untuk perempuan dan anak belum fokus menyelesaiakan problem kelempok rentan
- Jaringan dalam pengembangan perlindungan bagi perempuan dan anak belum optimal dikembangkan
- Meningkatnya kualitas kesehatan perempuan yang ditandai dengan tingginya Angka Harapan Hidup perlu disertai dengan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi dan sosial

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- Pengalaman bekerjasama dengan lembaga internasional cukup besar
- Beberapa kebijakan strategis dari Kementrian KPPPA turut memperkuat pencapaian kinerja DKP3A Provinsi Kalimantan timur
- Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah
- Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak
- Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030)
- Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak
- Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak

- Menguatnya dukungan swasta dalam percepatan pencapaian hak-hak anak
- Berkembangnya kapasitas masyarakat untuk memperkuat jaringan kelembagaan dalam mengatasi permasalahan kesenjangan gender dan pemenuhan hak-hak anak

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
   - Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
   - Hasil Evaluasi kinerja belum dijadikan sebagai pedoman.
   - Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
   - Kurangnya pengembangan kompetensi ASN disebabkan oleh terbatasnya diklat yang tersedia, diklat yang ada hanya pada kegiatan teknis tertentu.
   - Adanya Mutasi Pegawai pada bidang teknis menghambat proses pelayanan.
   - Belum optimalnya penggunan SOP dalam pelayanan internal sehingga berpengaruh terhadap lauanan publik.
   - Dalam capaian kinerja belum sepenuhnya berpedoman pada dokumen Perencanaan dan Penganggaran.

b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
   - Angka Harapan Hidup Perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan angka harapan hidup laki-laki.
   - Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
   - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
   - Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
   - Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki lebih tinggi dari pendapatan penduduk perempuan.
   - Pelaku usaha ekonomi perempuan kurang memiliki daya

saing dalam menduduki kepemilikan usaha, sehingga untuk kepemilikannya diserahkan kepada suami/anak laki-lakinya.

- Kurangnya minat dan kompetensi serta peluang perempuan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi.

c. Permasalahan Perlindungan Hak Perempuan:

- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
  - ✓ Perhitungan Data Korban Kekerasan sering terjadi tidak optimal karena terdapat kasus yang tidak dilaporkan, masyarakat masih enggan melaporkan karena menanggap aib keluarga, atau karena tdak mengetahui lembaga layanan.
  - ✓ Belum optimalnya fungsi lembaga layanan bagi perempuan penyandang disabilitas
  - ✓ Belum tersedianya data perempuan tenaga kerja korban kekerasan
  - ✓ Belum optimalnya pencatatan laporan data kekerasan melalui aplikasi simfoni dikarenakan mutasi pegawai/ tenaga teknis.
- Perempuan sangat rentan terhadap pornografi dan kekerasan.
- Belum maksimalnya fungsi dan peran gugus tugas PTPPO serta belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD, instansi vertikal, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dll.
- Belum optimalnya peran lembaga pemerhati perempuan dalam pemenuhan perlindungan hak perempuan.

d. Permasalahan Perlindungan Anak:

- Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkawinan anak, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
- Munculnya berbagai tindak kekerasan di media *online* seperti pornografi, pelecehan seksual, & penipuan terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*.
- Kurangnya lembaga/organisasi yang mendukung aktualisasi dan pemenuhan Hak Anak.
- Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang anak (anak putus sekolah, pekerja anak, dll
- Angka anak Putus sekolah yang cukup tinggi.

- Belum sepenuhnya sistem perlindungan di provinsi dan kabupaten/kota berjalan dengan baik.

e. Permasalahan Tumbuh Kembang Anak:
   - Belum semua anak memiliki akte kelahiran.
   - Masih tingginya anak yang belum memiliki kartu identitas anak.
   - Kurangnya pengetahuan / informasi tentang pengasuhan dan pembinaan keluarga yang aman. Hal ini dapat terlihat dari jumlah anak korban kekerasan.
   - Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
   - Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
   - Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
   - Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang anak (anak putus sekolah, pekerja anak, dll)
   - Masih kurangnya tindak lanjut dari Komitmen pemerintah daerah, penentu kebijakan, masyarakat,dunia usaha, perguruan tinggi dalam menuju Kota Layak Anak.

f. Permasalahan Sistim Infornasi Gender dan Anak.
   - Data dan informasi yang ada tidak terpilah dan tidak terbaru
   - Belum terbangunnya jaringan sistem informasi data gender dan anak
   - Masih kurangnya partisipasi OPD dalam menyediakan data gender dan anak.
   - Kurangnya tersedianya kelembagaan sistem informasi gender dan anak
   - Belum semua wilayah Kalimantan Timur dengan mudah mengakses internet untuk penggunaan aplikasi Simfoni PPPA.

g. Permasalahan Pengendalian Penduduk dan KB
   - Banyaknya penduduk yang migrasi ke Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan taraf hidup terbatas oleh kompetensi rawan menjadi kelompok marjinal.
   - Adanya dampak Demografi penduduk berupa terbatasnya Pengembangan kapasitas sumberdaya penduduk, misalnya dalam pemenuhan pendidikan dan kesempatan kerja terutama bagi perempuan.
   - Kurangnya komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja

(KRR), khususnya pada program kegiatan calon pengantin dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga

- Belum optimalnya lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program KB
- Tingginya angka perceraian di karenakan pendewasaan usia pernikahan pertama belum optimal.

h. Permasalahan terkait Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

- Kurang optimalnya fungsi organisasi / lembaga penyedia data dalam penyediaan data terpilah atau data gender.
- Belum tersedianya jaringan yang memadai untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan.
- Kurang optimalnya pemanfaatan database kependudukan/profil kependudukan oleh stakeholder terkait

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender difokuskan pada:

- Mengoptimalkan pengarusutamaan gender dan hak anak dalam pembangunan;
- Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak
- Meningkatkan kualitas SDM aparatur perlindungan anak dan perempuan

Analisa Pengukuran Kinerja Kegiatan (PK) dari berbagai kegiatan yang terdapat dalam rincian kegiatan APBA Tahun 2020 secara umum berhasil diselesaikan yang artinya terdapat hanya 8,2% anggaran yang tidak terserap, tetapi program dan kegiatan terlaksana sepenuhnya dengan beberapa hal yang menjadi hambatan realiasisasi anggaran sebagaimana tersebut diatas. Nilai rata–rata pencapaian realisasi fisik 95%. Sedangkan Analisa pencapaian sasaran strategis dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mencapai sasaran
- Meningkatnya kualitas hidup perempuan sasaran
- Meningkatnya implementasi PUG dalam proses perencanaan, penganggaran, implementasi

- Meningkatnya Kualitas Hidup keluarga
- Meningkatnya implementasi Kabupaten/ Kota menuju layak anak
- Meningkatnya ketersedian data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan uptodate dengan sasaran

2.4.1 Perbandingan antara rancangan RKPD dengan analisis kebutuhan

Perencanaan yang baik membutuhkan perhatian yang jeli terhadap perkembangan yang terus berubah. Akibatnya, penyesuaian rencana kerja patut dilakukan guna memastikan visi dan misi organisasi tercapai. Karena itu, DKP3A melakukan berbagai perbaikan perencanaan melalui peninjauan kembali rencana awal yang telah dibuat.

2.4.2 Alasan Perbandingan tersebut dilaksanakan

Selanjutnya kesenjangan kebutuhan anggaran dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam dukumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi tolok ukur kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan pagu pada setiap program/ kegiatan lembaga sesuai dengan kebutuhannya, sehingga Perangkat Daerah dapat menjalankan program dan kegiatannya dengan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien

2.4.3 Temuan dan catatan penting jika terdapat perbedaan dengan rancangan RKPD seperti rumusan program/kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD termasuk perbedaan besaran anggaran dan kinerja

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan timur pada tahun 2020 tidak terdapat temuan atau catatan penting terhadap rumusan program/kegiatan yang tidak sesuai dengan DPA.

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021

Provinsi Kalimantan Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 28.363.970.000.00)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 19.062.153.223)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kependudukan, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak	90 %	14,496,914,174	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kependudukan, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak	90	*12,101,791,812*	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Meningkatnya Nilai SAKIP**	**66.00 %**	**454,075,375**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Meningkatnya Nilai SAKIP**	63.84	369,694,491	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	5	454,075,375	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	5	369,694,491	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN**	**12**	**9,344,839,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN**	12	7,893,688,511	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	1	9,344,839,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	1	7,893,688,511	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100**	**989,167,624**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	100	938,989,590	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah dokumen rapat koordinasi daerah SKPD	1	989,167,624	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah dokumen rapat koordinasi daerah SKPD	1	938,989,590	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Nilai survey kepuasan pegawai terhadap kenyamanan di tempat kerja**	**60**	**2,137,648,540**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Nilai survey kepuasan pegawai terhadap kenyamanan di tempat kerja**	60	1,736,289,915	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 28.363.970.000.00)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 19.062.153.223)	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	12	2,137,648,540	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	12	*1,736,289,915*	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang berfungsi baik dan layak beroperasi**	**11**	**1,571,183,635**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang berfungsi baik dan layak beroperasi**	11	1,163,129,305	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan yang tersedia	1	1,571,183,635	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan yang tersedia	1	1,163,129,305	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Implementasi Kelembagaan PUG	1	999,325,201	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Implementasi Kelembagaan PUG	1	798,506,351	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		**Penguatan lembaga PUG**	**3**	**300,000,000**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**		**Penguatan lembaga PUG**	3	228,408,016	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Berau, Mahulu	jumlah dokumen pelaksanaan PUG	1	80,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Berau, Mahulu	jumlah dokumen pelaksanaan PUG	1	74,233,682	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Kubar, Mahulu	Jumlah peserta Pendampingan dan advokasi PUG	25	100,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Kubar, Mahulu	Jumlah peserta Pendampingan dan advokasi PUG	25	46,794,180	
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Kubar, Paser	Jumlah peserta Sosialisasi pelaksanaan kebijakan PUG	120	120,000,000	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Kubar, Paser	Jumlah peserta Sosialisasi pelaksanaan kebijakan PUG	80	107,380,154	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		**Pengembangan SDM Perempuan bidang politik dan hukum**	**1**	**250,000,000**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**		**Pengembangan SDM Perempuan bidang politik dan hukum**	1	199,212,509	
	Sosialisasi Peningkatan	Kukar, Kubar	Jumlah Peserta	60	150,000,000	Sosialisasi Peningkatan	Kukar,	Jumlah Peserta	60	115,017,909	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 28.363.970.000.00)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 19.062.153.223)	
	Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		kebijakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan			Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Kubar	kebijakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	PPU, Paser	Jumlah Peserta pendampingan dan advokasi Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi	30	100,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	PPU, Paser	Jumlah Peserta pendampingan dan advokasi Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi	50	84,194,600	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		**Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan**	**1**	**449,325,201**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**		**Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan**	1	370,885,826	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Kukar, Samarinda	Jumlah Peserta advokasi dan pendampingan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan	50	100,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Kukar, Samarinda	Jumlah Peserta advokasi dan pendampingan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan	60	76,202,300	
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Samarinda, Kukar	Jumlah Peserta peningkatan kapasitas lembaga layanan Pemberdayaan Perempuan	100	100,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Samarinda, Kukar	Jumlah Peserta peningkatan kapasitas lembaga layanan Pemberdayaan Perempuan	80	88,212,194	
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Bontang, Samarinda, Paser	Jumlah Peserta yang mendapatkan KIE Pemberdayaan Perempuan	150	249,325,201	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Bontang, Samarinda, Paser	Jumlah Peserta yang mendapatkan KIE Pemberdayaan Perempuan	90	206,471,332	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 28.363.970.000.00)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 19.062.153.223)	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Kebijakan Perlindungan Perempuan	*4*	948,094,625	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Kebijakan Perlindungan Perempuan	*4*	530,143,768	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		**Peningkatan SDM yang memahami pencegahan kekerasan terhadap perempuan**	**30**	**179,310,000**	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**		**Peningkatan SDM yang memahami pencegahan kekerasan terhadap perempuan**	30	152,191,138	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Samarinda	Jumlah peserta/lembaga layanan yang mengikuti pelatihan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	30	179,310,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Samarinda	Jumlah peserta/lembaga layanan yang mengikuti pelatihan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	30	152,191,138	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		**Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**0.054**	**563,359,625**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**		**Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	0.029	202,098,905	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	balikpapan	Jumlah layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	54	563,359,625	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	balikpapan	Jumlah layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	29	202,098,905	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		**Penguatan lembaga penyedia layanan**	**30**	**205,425,000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**		**Penguatan lembaga penyedia layanan**	25	175,853,725	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi	samarinda	Jumlah peserta lembaga penyedia layanan yang ditingkatkan	30	205,425,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi	samarinda	Jumlah peserta lembaga penyedia layanan yang ditingkatkan	25	175,853,725	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 28.363.970.000.00)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 19.062.153.223)	
	Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		kapasitasnya			Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		kapasitasnya			
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Penguatan Pemenuhan Hak Anak	*3*	225,000,000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Penguatan Pemenuhan Hak Anak	*4*	187,598,870	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		**Penguatan pelembagaan PHA**	**1**	**59,575,000**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**		**Penguatan pelembagaan PHA**	1	54,093,000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	mahulu	Jumlah kab/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak	1	59,575,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	mahulu	Jumlah kab/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak	1	54,093,000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		**Penguatan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak**	**200**	**165,425,000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**		**Penguatan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak**	350	133,505,870	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	samarinda	Jumlah peserta pengembangan KIE pemenuhan hak anak	100	106,525,000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	samarinda	Jumlah peserta pengembangan KIE pemenuhan hak anak	100	103,890,300	
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	samarinda	Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	100	58,900,000	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	samarinda	Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	150	29,615,570	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak	*0.06*	*475,000,000*	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak	*0.09*	*388,879,398*	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi		**Dokumen pencegahan kekerasan terhadap anak**	**2**	**250,000,000**	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi**		**Dokumen pencegahan kekerasan terhadap anak**	2	194,855,200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 28.363.970.000.00)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 19.062.153.223)	
	dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					**dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	ppu, kutim	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak (Peserta 5 layanan terpadu)	2	250,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	ppu, kutim	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak (Peserta 5 layanan terpadu)	2	194,855,200	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		**Jumlah layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Anak**	**350**	**225,000,000**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**		**Jumlah layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Anak**	100	194,024,198	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	samarinda, paser	Jumlah peserta yang mengikuti KIE yang Memerlukan Perlindungan	350	225,000,000	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	samarinda, paser	Jumlah peserta yang mengikuti KIE yang Memerlukan Perlindungan	100	194,024,198	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		capaian data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan data pilah	*65*	500,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		capaian data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan data pilah	*70*	477,025,547	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		data gender dan anak yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan	**65**	**500,000,000**	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**		data gender dan anak yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan	70	477,025,547	
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi		Jumlah data gender Prov/Kab Kota	20	300,000,000	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi		Jumlah data gender Prov/Kab Kota	45	294,408,222	
			Jumlah data terpilah anak Pro/Kab/Kota	20				Jumlah data terpilah anak Pro/Kab/Kota	43		
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi		Jumlah pemanfaatan data gender dan anak yang disajikan	20	200,000,000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi		Jumlah pemanfaatan data gender dan anak yang disajikan	32	182,617,325	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Kebjiakan terkait dengan pendaftaran penduduk	*6*	*4,680,000,000*	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Kebjiakan terkait dengan pendaftaran penduduk	*6*	*3,951,600,510*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 28.363.970.000.00)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 19.062.153.223)	
	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		**Jumlah kebijakan terkait pelayanan pendaftaran penduduk kab/kota se-Kaltim**	**6**	**4,680,000,000**	**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**		**Jumlah kebijakan terkait pelayanan pendaftaran penduduk kab/kota se-Kaltim**	6	3,951,600,510	
	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional		Jumlah kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk yang telah ditetapkan	6	4,680,000,000	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional		Jumlah kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk yang telah ditetapkan	6	3,951,600,510	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Kebijakan terkait pencatatn sipil	6	*170,000,000*	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Kebijakan terkait pencatatn sipil	6	*115,369,284*	
	Pelayanan Pencatatan Sipil		**Jumlah kebijakan terkait pelayanan catatan sipil kab/kota se-Kaltim**	**6**	**170,000,000**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**		**Jumlah kebijakan terkait pelayanan catatan sipil kab/kota se-Kaltim**	6	115,369,284	
	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil		Jumlah kebijakan teknis di bidang catatan sipil yang telah ditetapkan	6	170,000,000	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil		Jumlah kebijakan teknis di bidang catatan sipil yang telah ditetapkan	6	115,369,284	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Kebijakan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	*5*	*150,000,000*	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Kebijakan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	*5*	*94,697,900*	
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		**Jumlah data kependudukan**	**3**	**150,000,000**	**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**Jumlah data kependudukan**	3	94,697,900	
	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota		Jumlah data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan pribadi yang telah tersusun	3	150,000,000	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota		Jumlah data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan pribadi yang telah tersusun	3	94,697,900	
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah SKPD Prov. Kaltim yang melakukan pemanfaatan data (DAK FASYAMINDUK)	7	1,326,175,000	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah SKPD Prov. Kaltim yang melakukan pemanfaatan data (DAK FASYAMINDUK)	7	997,036,599	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 28.363.970.000.00)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 19.062.153.223)	
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak (DID PPPA)	100	8,150,000,000	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak (DID PPPA)	150	1,670,225,000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Kebijakan tentang pengendalian penduduk	*1*	*150,000,000*	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Kebijakan tentang pengendalian penduduk	*1*	*138,996,176*	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		**Jumlah dokumen grand desain pembangunan kab/kota dalam 5 aspek/**	**1**	**150,000,000**	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**		**Jumlah dokumen grand desain pembangunan kab/kota dalam 5 aspek/**	1	138,996,176	
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Samarinda	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	1	150,000,000	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Samarinda	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	1	138,996,176	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	200	150,000,000	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	160	123,791,749	
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		**Peningkatan jumlah peserta KB**	**80**	**150,000,000**	**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**		**Peningkatan jumlah peserta KB**	160	123,791,749	
	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi,	Kab. PPU	Jumlah peserta advokasi /sosialisasi penurunan angka stunting	60	40,000,000	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi,	Kab. PPU	Jumlah peserta advokasi /sosialisasi penurunan angka stunting	50	27,252,147	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 28.363.970.000.00)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 19.062.153.223)	
	Promosi dan KIE Program KKBPK					Promosi dan KIE Program KKBPK					
	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	samarinda	Jumlah peserta yang mengikuti konseling kespro	60	40,000,000	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	samarinda	Jumlah peserta yang mengikuti konseling kespro	80	36,636,958	
	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Kab. Paser	Jumlah calon pengantin yang telah dibina untuk mendapatkan pemahaman konseling	30	70,000,000	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Kab. Paser	Jumlah calon pengantin yang telah dibina untuk mendapatkan pemahaman konseling	30	59,902,644	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Peningkatan SDM ketahanan dan kesejahteraan keluarga	140	160,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Peningkatan SDM ketahanan dan kesejahteraan keluarga	140	153,751,858	
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		**Peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**140**	**160,000,000**	**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	140	153,751,858	
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah peserta yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	140	160,000,000	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah peserta yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	140	153,751,858	

2.5 Penelaahan Urusan Program dan Kegiatan Masyrakat

2.5.1 Proses pengusulan oleh pemangku kepentingan (Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)

DKP3A Provinsi Kalimantan Timur membangun Partisipasi masyarakat dalam urusan Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui penerbitan rekomendasi hasil telaahan program dan kegiatan masyarakat, meliputi :

1. Badan kerja sama organisasi wanita (BKOW) Provi. Kaltim
2. Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia Cabang Kalimantan Timur
3. Dharma Wanita Persatuan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur

2.5.1 Kesesuaian usulan tersebut dengan isu-isu penting penyelenggaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Usulan program dan kegiatan dari kabupaten/kota memiliki kesesuaian dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur .Adapun yang menjadi isu penting dalam penyelenggaran tugas pokok dan fungsinya diantaranya adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, hal ini sejalan dan sesuai dengan usulan program dan kegiatan dari kabupaten/kota yaitu Program Pengarutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak,d an Perlindungan Khusus Anak,P erlindungan Perempuan dan Administrasi Kependudukan.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2022

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kependudukan, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak	95 %	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran DKP3A yang tepat waktu dan tepat proses	95 %	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Meningkatnya capaian kinerja	2 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran DKP3A Prov. Kaltim	95%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/12 bulan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	
	Administrasi		Persentase kedisiplinan	80 %	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Besaran /	Catatan
	Kepegawaian Perangkat Daerah		pegawai		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	20 %	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai survey kepuasan pegawai terhadap kenyamanan di tempat kerja	62 %	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	1 Laporan	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Besaran /	Catatan
		Luar	Umum Kantor yang Disediakan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang berfungsi baik dan layak beroperasi	11 unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Implementasi Kelembagaan PUG	1 Kebijakan	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		Penguatan lembaga PUG	7 lembaga PUG	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen pelaksanaan PUG	1 dokumen	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	25 Perangkat Daerah	
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan	25 Perangkat Daerah	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Besaran /	Catatan
		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)		
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		pengembangan SDM perempuan bidang politik dan hukum	1 dokumen	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota	25 Peserta	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan		penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 dokumen	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Besaran /	Catatan
	Perempuan Kewenangan Provinsi				
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 Lembaga	
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan,	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	125 Orang	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Besaran /	Catatan
		Semua Kelurahan			
		Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	
		Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
		Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Kebijakan Perlindungan Perempuan	4 Kebijakan	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan SDM yang memahami pencegahan kekerasan terhadap perempuan	1 dokumen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 dokumen	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	25 Perangkat Daerah	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		penguatan lembaga penyedia layanan	30 orang	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Peserta	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Capaian Data Gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan Data Pilah	70 %	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		data gender dan anak yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan	70 persen	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Besaran /	Catatan
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 dokumen	
			Jumlah data terpilah anak Prov/Kab/Kota	25 data	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 dokumen	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Penguatan Pemenuhan Hak Anak	3 Kebijakan	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		Penguatan pelembagaan PHA	1 Kab/Kota	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	200 orang	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	
		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak	90 %	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Besaran /	Catatan
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen pencegahan kekerasan terhadap anak	1 dokumen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak	1 dokumen	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 dokumen	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk	6 Kebijakan	
	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		Jumlah kebijakan terkait pelayanan pendaftaran penduduk kab/kota se-Kaltim	6 Dokumen	
	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk yang telah ditetapkan	6 dokumen	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Kebijakan terkait pencatatan sipil	6 Kebijakan	
	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah kebijakan terkait pelayanan catatan sipil kab/kota se-Kaltim	6 Dokumen	
	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kebijakan teknis di bidang catatan sipil yang telah ditetapkan	6 dokumen	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Kebijakan terkait pengelolaan administrasi kependudukan	5 Kebijakan	
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		jumlah data kependudukan	3 data kependudukan	
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan. Pelaksanaan. Pemantauan. Evaluasi. Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk	1 dokumen	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Besaran /	Catatan
	Administrasi Kependudukan		Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan. Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 dokumen	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Kebijakan tentang pengendalian penduduk	1 Kebijakan	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Kebijakan tentang pengendalian penduduk	1 Dokumen	
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1 dokumen	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	40 %	
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Peningkatan jumlah peserta KB	1 dokumen	
	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi. Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 dokumen	
	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 dokumen	
	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	1 Laporan	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Besaran /	Catatan
		Kelurahan			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Peningkatan SDM Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Kebijakan	
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	40 %	
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Awal Tahun 2023 DKP3A Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur. Dilakukan beberapa telaahan kebijakan nasional terkait dengan capaian kinerja Kementerian sebagai kebijakan nasional, meliputi :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Penelaahan ini dilaksanakan melalui penyelarasan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023.

3. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur konsisten dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang secara kolektif menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tersebut. Adapun tujuan dan sasaran Renja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari Misi 1 yang telah ditetapkan, dengan Sasaran meliputi :

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran			
						2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	%	94,49	67	78	89	90
2	Meningkatkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan di Kalimantan Timur	Peningkatan Pelaksanaan PUG	Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan (PPRG)	Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	%	29	47	65	83	100
3	Meningkatkan Pelayanan administrasi kependudukan yang lebih uptdate dan komprehensif	Peningkatan dokumen administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Presentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	%	100	100	100	100	100
4	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian dan Ketahanan Keluarga	Peningkatan kemandirian dan ketahanan keluarga	terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%	1,19	2,56	2,54	2,52	2,50
5	Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas	Peningkatan pemanfaatan data gender dan anak	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data gender	%	35	35	40	45	50

Tabel Strategi dan Kebijakan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

NO	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Tidak maksimalnya fungsi dan peran gugus tugas TPPO	Meningkatkan upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	Meningkatkan pemahaman Pemerintah, aparat, penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termaksud TPPO	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termaksud tindak pidana perdagangan orang
2	Tidak semua penegak hukum berkomitmen pada PUG dan PUHA	Meningkatkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan di Kalimantan Timur	Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan (PPRG)	Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	Peningkatan Implementasi PUG melalui Pembentukan Focal Point dan Penguatan POKJA PUG, Pembentukan Tim Teknis	Pembentukan focal point yang di fokuskan pada OPD yang belum memiliki FP (Focal Point)
3	Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen masih rendah	Meningkatkan Pelayanan administrasi kependudukan yang lebih uptdate dan komprehensif	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Presentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Peningkatan kualitas teknis ADB SIAK, Peningkatan kualitas akses jaringan server.	Pembinaan teknis Administrator Database SIAK
5	Data yang tersedia kurang update dan tidak komprehensif	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian dan Ketahanan Keluarga	terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender	Peningkatan penyusunan data gender dan anak menggunakan SIGA

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

Dengan memperhatikan Visi Gubernur Kalimantan Timur “Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat “ dan Misi Pembangunan Gubernur Kalimantan Timur butir kesatu yaitu “Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya manusia yang berahlak mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan Pemuda dan Penyandang Disabilitas” maka disusunlah program dan kegiatan pada DKP3A Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada

tujuan pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Kegiatan-kegiatan yang terkait pencapaian kesetaraan gender dan pengurangan kesenjangan secara konkrit terlihat pada kegiatan :

- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
- Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
- Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

1.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Program dan Kegiatan DKP3A Tahun 2023 memiliki 13 Program dan 25 Kegiatan dan 56 Sub kegiatan. dengan rincian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
- Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi

- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi

Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

- Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi

5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

- Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
- Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak

Kewenangan Provinsi

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
- Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

- Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

8. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

- Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional

9. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Pelayanan Pencatatan Sipil

- Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil

10. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota

11. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

- Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
- Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal

12. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan

Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal

- Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK
- Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
- Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi

13. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Untuk Program Internal seperti Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan hanya terfokus di Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur sedangkan untuk Program Eksternal lokasi tempat pelaksanaan kegiatan tersebar di Provinsi dan Kabupaten Kota.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif tahun 2022 berdasarkan RKPD sebesar Rp. 20.270.213.568,- yang berasal dari dana APBD Provinsi Kalimantan Timur.

1.3.3 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

Secara umum Rancangan RKPD telah sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2022. Kesesuaian tersebut dilhat dalam uraian program/kegiatan yang akan dilaksanakan dengan target dan pagu indikatif yang mengacu pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

Dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Kalimantan timur

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2	**8**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**20,687,768,568**				**22,569,861,000**
2	**8**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kependudukan, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak		95 %	**16,375,133,678**			95 %	**16,850,111,000**
2	**8**	**1**	1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	persentase dokumen perencanaan dan pengannggran DKP3A yang tepat waktu dan tepat proses		67 %	**310,000,000**			67 %	**440,000,000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	8	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	5 Dokumen	112,000,000			5 Dokumen	120,000,000
2	8	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	2 Dokumen	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	10,000,000
2	8	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	2 Dokumen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	10,000,000
2	8	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1 Dokumen	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	100,000,000
2	8	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai	1 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	60,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Pinang Luar						
2	**8**	**1**	1		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase realisasi anggaran DKP3A Prov. Kaltim		95 %	**10,518,615,169**			100 %	**10,577,000,000**
2	8	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	40 orang/12 bulan	10,488,615,169			1 tahun	10,535,000,000
2	8	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/Semesteran S dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keu Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1 laporan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	15,000,000
2	8	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	3 laporan	20,000,000			3 dokumen	27,000,000
2	**8**	**1**	1.1		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase kedisiplinan pegawai		80 %	**727,220,000**			80 %	**700,000,000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	8	1	1.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	90 Stel	219,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90 Stel	200,000,000
2	8	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 pegawai	507,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 pegawai	500,000,000
2	**8**	**1**	1.1		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100 %	**1,741,733,103**			100 %	**1,955,611,000**
2	8	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	10 Paket	18,161,603	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Paket	20,000,000
2	8	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	20 Paket	224,621,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Paket	200,000,000
2	8	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	10 Paket	90,032,5000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Paket	100,611,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	8	1	1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1 Dokumen	13,440,000			1 Dokumen	15,000,000
2	8	1	1.1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1 Laporan	107,025,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	120,000,000
2	8	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1,288,453,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1,500,000,000
2	**8**	**1**	1.1		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya		20 %	**560,127,000**			60 %	**500,000,000**
2	8	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	10 Unit	560,127,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Unit	500,000,000
2	**8**	**1**	1.1		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap kenyamanan di tempat kerja		62 %	**2,209,952,296**			64 %	**2,267,500,000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	8	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1 Laporan	14,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	17,500,000
2	8	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1 Laporan	370,755,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	400,000,000
2	8	1	1.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	53,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	50,000,000
2	8	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1 Laporan	1,770,897,296	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	1,800,000,000
2	**8**	**1**	1.1		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang digunakan dan berfungsi baik		95 %	**305,486,000**			100 %	**410,000,000**
2	8	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	5 Unit	205,486,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Unit	210,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Dipelihara/Direhabilitasi							
2	8	1	1.1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	20 Unit	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Unit	200,000,000
2	**8**	**2**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Implementasi Kelembagaan PUG		1 Kebijakan				1 Kebijakan	
2	**8**	**2**	1		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	Penguatan lembaga PUG		7 lembaga PUG	**405,066,600**			7 lembaga PUG	**550,000,000**
2	8	2	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	1 dokumen	247,737,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	350,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
2	8	2	1	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Perangkat	81,573,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35 Perangkat	100,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	8	2	1	4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Perangkat	76,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35 Perangkat	100,000,000
2	**8**	**2**	1		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**	pengembangan SDM perempuan bidang politik dan hukum		1 dokumen	**317,401,400**			1 dokumen	**400,000,000**
2	8	2	1	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	142,054,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	200,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
2	8	2	1	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Organisasi	130,438,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35 Organisasi	150,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
2	**8**	**2**	1		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**	Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan		1 dokumen	**371,401,400**			1 dokumen	**400,000,000**
2	8	2	1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan,	25 Lembaga	122,305,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Lembaga	200,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
2	8	2	1	2	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125 Orang	75,611,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150 Orang	100,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
2	8	2	1	3	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	119,485,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	100,000,000
2	**8**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Kebijakan Perlindungan Perempuan		4 Kebijakan				4 Kebijakan	
2	**8**	**3**	1		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan SDM yang memahami pencegahan kekerasan terhadap perempuan		1 dokumen	**342,640,000**			1 dokumen	**442,400,000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	8	3	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	169,640,000			1 dokumen	221,200,000
2	8	3	1	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 perangkat	173,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 perangkat	221,200,000
2	**8**	**3**	1		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	penguatan lembaga penyedia layanan		30 orang				30 orang	
2	8	3	1	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	**8**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Capaian Data Gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan Data Pilah		70 %				70 %	
2	**8**	**5**	1		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	persentase data gender dan anak yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan		70 persen	**649,650,000**			75 persen	**692,400,000**
2	8	5	1	1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	424,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	472,400,000
2	8	5	1	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	225,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	220,000,000
2	**8**	**6**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Penguatan Pemenuhan Hak Anak		3 Kebijakan				3 Kebijakan	
2	**8**	**6**	1		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	Penguatan pelembagaan PHA		1 Kab/Kota	**292,160,000**			1 Kab/Kota	**442,400,000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	8	6	1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Organisasi	68,955,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Organisasi	120,000,000
2	8	6	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	72,269,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	120,000,000
2	**8**	**6**	1		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen				1 Dokumen	
2	8	6	1	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	78,422,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	100,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi							
2	8	6	1	4	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	72,514,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	102,400,000
2	**8**	**7**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak		90 %	**400,000,000**			90 %	**500,000,000**
2	**8**	**7**	1		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Dokumen pencegahan kekerasan terhadap anak		1 dokumen	**212,820,000**			1 dokumen	**250,000,000**
2	8	7	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pencegahan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan,	1 dokumen	212,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 dokumen	250,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Provinsi	kekerasan terhadap anak	Semua Kelurahan			(PAD)			
2	**8**	**7**	1		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	**187,180,000**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	**250,000,000**
2	8	7	1	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti KIE yang Memerlukan Perlindungan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 peserta	187,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 peserta	250,000,000
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								
2	**12**	**2**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk		6 Kebijakan	**522,230,000**			6 Kebijakan	**624,150,000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	**12**	**2**	1		**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**	Jumlah kebijakan terkait pelayanan pendaftaran penduduk kab/kota se-Kaltim		6 Dokumen				6 Dokumen	
2	12	2	1	1	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 dokumen	522,230,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 dokumen	624,150,000
2	**12**	**3**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Kebijakan terkait pencatatan sipil		6 Kebijakan	**222,023,000**			6 Kebijakan	**278,000,000**
2	**12**	**3**	1		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Jumlah kebijakan terkait pelayanan catatan sipil kab/kota se-Kaltim		6 Dokumen				6 Dokumen	
2	12	3	1	1	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Ditetapkan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	222,023,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	278,000,000
2	**12**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Kebijakan terkait pengelolaan administrasi kependudukan		5 Kebijakan	**245,324,000**			5 Kebijakan	**298,000,000**
2	**12**	**4**	1		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	jumlah data kependudukan		3 data kependudukan				3 data kependudukan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	12	4	1	1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan. Pelaksanaan. Pemantauan. Evaluasi. Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1 Dokumen	
2	12	4	1	2	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan. Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	245,324,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	298,000,000
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								
2	**14**	**2**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Kebijakan tentang pengendalian penduduk		1 Kebijakan	**217,500,000**			1 Kebijakan	**277,400,000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	**14**	**2**	1		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Kebijakan tentang pengendalian penduduk		1 Dokumen				1 Dokumen	
2	14	2	1	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	217,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	277,400,000
2	**14**	**3**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		40 %	**179,600,000**			50 %	**217,500,000**
2	**14**	**3**	1		**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Peningkatan jumlah peserta KB		1 dokumen				1 dokumen	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	14	3	1	5	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi. Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	59,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	70,000,000
2	14	3	1	7	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	58,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	70,000,000
2	14	3	1	8	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	61,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	77,500,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	**14**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Peningkatan SDM Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		1 Kebijakan	**192,875,000**			1 Kebijakan	**197,500,000**
2	**14**	**4**	1		**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga							
2	14	4	1	3	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah peserta yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170 peserta	192,875,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		170 peserta	197,500,000
TOTAL									**20,687,768,568**				**22,569,861,000**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara rinci Rumusan Rencana Program dan Kegiatan rencana kerja tahun 2022 memuat indikator kinerja outcome/output masing-masing Program/kegiatan, serta perkiraan maju tahun anggaran 2023 pada DKP3A Provinsi Kalimantan Timur dapat diihat dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Kalimantan TimurTahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**8**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**20,917,765,000**							**23,762140 0,000**	
2	**8**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kependudukan, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak	%		%	95 %	**16.840.565.000**						95 %	**18.170.000.000**	

2	**8**	**1**	1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	persentase dokumen perencanaan dan pengannggran DKP3A yang tepat waktu dan tepat proses	%		%	67 %	**440,000,000**						67 %	**345,000,000**	
2	8	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	150,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Dokumen Perencanaan DKP3A dan Perangkat Daerah terkait	5 Dokumen	55,000,000	DKP3A
2	8	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	120,000,000	Kota Samarinda, Kota Balikpapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen Perencanaan DKP3A dan Perangkat Daerah terkait	2 Dokumen	125,000,000	DKP3A
2	8	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	10,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen Perencanaan DKP3A dan Perangkat Daerah terkait	2 Dokumen	15,000,000	DKP3A

2	8	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan dan Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen Perencanaan DKP3A dan Perangkat Daerah terkait	1 Dokumen	95,000,000	DKP3A
2	8	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen Perencanaan DKP3A dan Perangkat Daerah terkait	1 Dokumen	55,000,000	DKP3A
2	**8**	**1**	1		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase realisasi anggaran DKP3A Prov. Kaltim	bulan		bulan	95 %	**10.577.000.204**						100 %	**11.040.000.000**	

2	8	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				40 orang/12 bulan	10.535.000.204	Kota Samarinda, Semua Kecamatan dan Kelurahan				Pegawai di lingkungan DKP3A	1 tahun	11.000.000.000	DKP3A
2	8	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/Semesteran S dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keu Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD				1 laporan	15,000,000	Kota Balikpapan, Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai di lingkungan DKP3A	1 dokumen	15,000,000	DKP3A
2	8	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3 laporan	27,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar				Pegawai di lingkungan DKP3A	3 dokumen	25,000,000	DKP3A
2	**8**	**1**	1		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase kedisiplinan pegawai	%		%	80 %	**733.960.000**						80 %	**800.000.000**	
2	8	1	1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 paket	227.300.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai di lingkungan DKP3A	3 paket	250,000,000	DKP3A

2	8	1	1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	506.660.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai di lingkungan DKP3A	30 Orang	550,000,000	DKP3A
2	**8**	**1**	1		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%		%	100 %	**1.971.256.500**						100 %	**2.260.000.000**	
2	8	1	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Komponen	11.340.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gedung/bangunan Kantor DKP3A	5 Komponen	25.000.000	DKP3A
2	8	1	1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	179.637.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gedung/bangunan Kantor DKP3A	6 Paket	350.000.000	DKP3A
2	8	1	1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	93.144.500	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gedung/bangunan Kantor DKP3A	2 Paket	150.000.000	DKP3A

2	8	1	1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1680 eksemplar/lembar	13.440.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar				Gedung/bangunan Kantor DKP3A	4000 eksemplar/lembar	35,000,000	DKP3A
2	8	1	1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	185.025.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gedung/bangunan Kantor DKP3A	1 Laporan	150,000,000	DKP3A
2	8	1	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat				1 Laporan	1.488.670.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gedung/bangunan Kantor DKP3A	1 Laporan	1,550,000,000	DKP3A
2	**8**	**1**	1		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	%		%	20 %	**480.550.000**						60 %	**550,000,000**	
2	8	1	1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	480.550.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sarana dan prasarana kantor	25 Unit	5500,000,000	DKP3A
2	**8**	**1**	1		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap kenyamanan di tempat kerja	%		%	62 %	**2.232.312.296**						64 %	**2,375,000,000**	

2	8	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	11.660.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gedung/Bangunan DKP3A, Pegawai di lingkungan DKP3A, Sarana dan Prasarana Kantor	3 Laporan	20.000.000	DKP3A
2	8	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun	400.005.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gedung/Bangunan DKP3A, Pegawai di lingkungan DKP3A, Sarana dan Prasarana Kantor	3 Laporan	450,000,000	DKP3A
2	8	1	1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	49.750.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gedung/Bangunan DKP3A, Pegawai di lingkungan DKP3A, Sarana dan Prasarana Kantor	3 Laporan	55,000,000	DKP3A
2	8	1	1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.770.897.296,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gedung/Bangunan DKP3A, Pegawai di lingkungan DKP3A, Sarana dan Prasarana Kantor	3 Laporan	1,850,000,000	DKP3A
2	**8**	**1**	1		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang digunakan dan berfungsi baik	unit		unit	95 %	**405.486.000**							100 %	**800,000,000**	

2	8	1	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	205.486.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gedung/Bangunan kantor DKP3A, Kendaraan Dinas/Operasinal DKP3A	20 Unit	250,000,000	DKP3A
2	8	1	1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Tahun	200.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gedung/Bangunan kantor DKP3A, Kendaraan Dinas/Operasinal DKP3A	1 Tahun	550,000,000	DKP3A
2	**8**	**2**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Implementasi Kelembagaan PUG	Kebijakan		Kebijakan	1 Kebijakan	**1.300.000.000**						1 Kebijakan	**1,300,000,000**	
2	**8**	**2**	1		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	Penguatan lembaga PUG	lembaga PUG		lembaga PUG	7 lembaga PUG	**550.000.000**						7 lembaga PUG	**650,000,000**	
2	8	2	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan				1 dokumen	350.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah terkait Prov/Kab/Kota, Lintas Sektor, Vertikal, Perguruan	1 dokumen	350,000,000	DKP3A

						Gender (PUG) Kewenangan Provinsi						Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Tinggi, Media Massa, LSM, Partai Politik, Pemilih pemula, Pelaku ekonomi perempuan dan UMKM			
2	8	2	1	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi				35 Perangkat Daerah	100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah terkait Prov/Kab/Kota, Lintas Sektor, Vertikal, Perguruan Tinggi, Media Massa, LSM, Partai Politik, Pemilih pemula, Pelaku ekonomi perempuan dan UMKM	35 Perangkat	150,000,000	DKP3A

											Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	8	2	1	4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)				35 Perangkat Daerah	100.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah terkait Prov/Kab/Kota, Lintas Sektor, Vertikal, Perguruan Tinggi, Media Massa, LSM, Partai Politik, Pemilih pemula, Pelaku ekonomi perempuan dan UMKM	35 Perangkat Daerah	150,000,000	DKP3A

2	**8**	**2**	1		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**	pengembangan SDM perempuan bidang politik dan hukum	dokumen		dokumen	1 dokumen	**350.000.000**						1 dokumen	**450,000,000**	
2	8	2	1	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	200.000.000	Kab. Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah terkait Prov/Kab/Kota, Lintas Sektor, Vertikal, Perguruan Tinggi, Media Massa, LSM, Partai Politik, Pemilih pemula, Pelaku ekonomi perempuan dan UMKM	1 Dokumen	250,000,000	DKP3A

2	8	2	1	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota				30 Organisasi	150.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah terkait Prov/Kab/Kota, Lintas Sektor, Vertikal, Perguruan Tinggi, Media Massa, LSM, Partai Politik, Pemilih pemula, Pelaku ekonomi perempuan dan UMKM	35 Organisasi	200.000.000	DKP3A

2	**8**	**2**	1		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**	Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	dokumen		dokumen	1 dokumen	**400.000.000**							**600,000,000**	
2	8	2	1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				10 Lembaga	137.440.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah terkait Prov/Kab/Kota, Lintas Sektor, Vertikal, Perguruan Tinggi, Media Massa, LSM, Partai Politik, Pemilih pemula, Pelaku ekonomi perempuan dan UMKM	30 Lembaga	250,000,000	DKP3A

											Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	8	2	1	2	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan				100 Orang	135.630.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah terkait Prov/Kab/Kota, Lintas Sektor, Vertikal, Perguruan	150 Orang	150,000,000	DKP3A

| | | |

												Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	8	2	1	3	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	126.930.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah terkait Prov/Kab/Kota, Lintas Sektor, Vertikal, Perguruan Tinggi, Media Massa, LSM, Partai Politik, Pemilih pemula, Pelaku ekonomi perempuan dan UMKM	1 Dokumen	200,000,000	DKP3A
2	**8**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Kebijakan Perlindungan Perempuan	Kebijakan		Kebijakan	4 Kebijakan	**1,142,400,000**						4 Kebijakan	**2,100,000,000**	

2	**8**	**3**	1		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan SDM yang memahami pencegahan kekerasan terhadap perempuan	orang		orang	1 dokumen	**442.400.000,00**						1 dokumen	**500,000,000**	
2	8	3	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				1 dokumen	221.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				SDM lembaga penyedia layanan, Perangkat Daerah terkait	1 dokumen	250.000.000	DKP3A
2	8	3	1	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				1 Laporan	221.200.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	SDM lembaga penyedia layanan, Perangkat Daerah terkait	1 Laporan	250.000.000	DKP3A
2	**8**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	penguatan lembaga penyedia layanan	%		%	70 %	**692,400,000,00**						70 %	**850,000,000**	

2	**8**	**5**	1		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	persen		persen	70 persen	**692,400,000**						70 persen	**850,000,000**	
2	8	5	1	1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Capaian Data Gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan Data Pilah				3 dokumen	472,400,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PPPA Kabupaten/ Kota	1 dokumen	550,000,000	DKP3A

2	8	5	1	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	persentase data gender dan anak yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan				1 dokumen	220.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PPPA Kabupaten/ Kota	1 dokumen	300,000,000	DKP3A
2	**8**	**6**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Kebijakan		Kebijakan	3 Kebijakan	**442,400,000**						3 Kebijakan	**442,400,000**	
2	**8**	**6**	1		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Kab/Kota		Kab/Kota	1 Kab/Kota	**240,000,000**						1 Kab/Kota	**240,000,000**	
2	8	6	1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Penguatan Pemenuhan Hak Anak				30 Organisasi	120.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	Perangkat Daerah terkait, Organisasi/ LM pemerhati perempuan dan anak	30 Organisasi	120,000,000	DKP3A
2	8	6	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Penguatan pelembagaan PHA				1 dokumen	120.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah terkait, Organisasi/ LM pemerhati perempuan dan anak	1 dokumen	120,000,000	DKP3A

2	**8**	**6**	1		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	Jumlah Organisasi Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha	orang		orang	1 Dokumen	**202,400,000**	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah terkait, Organisasi/ LM pemerhati perempuan dan anak, Lembaga vertikal, perguruan tinggi, dunia usaha	1 Dokumen	**202,400,000**	DKP3A
2	8	6	1	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Dokumen	100,000,000	

2	8	6	1	4	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 dokumen	102,400,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	Perangkat Daerah terkait, Organisasi/ LM pemerhati perempuan dan anak, Lembaga vertikal, perguruan tinggi, dunia usaha	1 Dokumen	102,400,000	DKP3A
2	**8**	**7**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak	%		%	90 %	**500,000,000**						90 %	**500,000,000**	
2	**8**	**7**	1		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Dokumen pencegahan kekerasan terhadap anak	dokumen		dokumen	1 dokumen	**250,000,000**						1 dokumen	**250,000,000**	
2	8	7	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak				1 dokumen	250.000.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelajar, tokoh masyarakat, tokoh agama, Perangkat Daerah terkait	1 dokumen	250,000,000	DKP3A

2	**8**	**7**	1		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	peserta		peserta	100 peserta	**250.000.000**						100 peserta	**250,000,000**	
2	8	7	1	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti KIE yang Memerlukan Perlindungan				100 peserta	250.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelajar, tokoh masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Perangkat Daerah	100 peserta	250,000,000	DKP3A
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**1,200,150,000**							**1,424,150,000**	
2	**12**	**2**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk	Kebijakan		Kebijakan	6 Kebijakan	**624,150,000**						6 Kebijakan	**624,150,000**	
2	**12**	**2**	1		**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**	Jumlah kebijakan terkait pelayanan pendaftaran penduduk kab/kota se-Kaltim											6 Dokumen		
2	12	2	1	1	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	Dokumen		Dokumen	6 dokumen	624,150,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Disdukcapil Kabupaten/ Kota se-Kaltim dan Masyarakat	6 dokumen	624,150,000	DKP3A
2	**12**	**3**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Kebijakan terkait pencatatan sipil	Kebijakan		Kebijakan	6 Kebijakan	**278,000,000**						6 Kebijakan	**400,000,000**	

2	**12**	**3**	1		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Jumlah kebijakan terkait pelayanan catatan sipil kab/kota se-Kaltim	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	**278,000,000**						6 Dokumen	**400,000,000**	
2	12	3	1	1	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Ditetapkan				6 dokumen	278,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Disdukcapil Kabupaten/kota se-Kaltim dan Masyarakat	6 dokumen	400,000,000	DKP3A
2	**12**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Kebijakan terkait pengelolaan administrasi kependudukan	Kebijakan		Kebijakan	5 Kebijakan	**298,000,000**						5 Kebijakan	**400,000,000**	
2	**12**	**4**	1		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	jumlah data kependudukan	data kependudukan		data kependudukan	3 data kependudukan	**298,000,000**						3 data kependudukan	**400,000,000**	
2	12	4	1	1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan. Pelaksanaan. Pemantauan. Evaluasi. Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Disdukcapil Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah terkait	8 SKPD		DKP3A

2	12	4	1	2	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan. Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota				6 dokumen	298,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Disdukcapil Kabupaten/ Kota dan Perangkat Daerah terkait	6 dokumen	400,000,000	DKP3A
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**1,448,200,000**							**865,000,000**	
2	**14**	**2**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Kebijakan tentang pengendalian penduduk	Kebijakan		Kebijakan	1 Kebijakan	**277,400,000**						1 Kebijakan	**350,000,000**	
2	**14**	**2**	1		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Kebijakan tentang pengendalian penduduk				1 Dokumen	**277,400,000**						1 Dokumen	**350,000,000**	
2	14	2	1	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi				3 Laporan	277,400,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah terkait	3 Laporan	350,000,000	DKP3A

2	**14**	**3**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	%		%	40 %	**217,500,000**						50 %	**350,000,000**	
2	**14**	**3**	1		**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Peningkatan jumlah peserta KB				1 dokumen	**217,500,000**						1 dokumen		
2	14	3	1	5	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1 dokumen	70,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Remaja	1 dokumen	85,000,000	DKP3A

2	14	3	1	7	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi				1 dokumen	70,000,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Remaja	1 Laporan	85,000,000	DKP3A
2	14	3	1	8	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1 Laporan	77,500,000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Remaja	1 Laporan	95,000,000	DKP3A
2	**14**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kebijakan		Kebijakan	1 Kebijakan	**953,300,000**						1 Kebijakan	**250,000,000**	
2	**14**	**4**	1		**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	jumlah peserta yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga				170 peserta	**953,300,000**						170 Peserta	**250,000,000**	
2	14	4	1	3	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kebijakan tentang pengendalian penduduk				1 Kebijakan	953,300,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi perempuan	1 Kebijakan	250,000,000	DKP3A

													Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
											TOTAL	**23,566,115,000**								**26,051,550,000**	

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi kalimantan Timur berfungsi sebagai Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. dan perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

a. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban untuk mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 serta diselaraskan dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 -2023
b. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Tahun 2023, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2022 dan tahun 2021
c. Harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan seluruh bidang teknis
d. Penyusunan Renja sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
e. Penyusunan Renja Awal Tahun 2023, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Awal Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Tahun 2023 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Samarinda, 11 Maret 2021

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan timur,

Hj. Noryani Sorayalita, SE, MMT
Pembina Utama Muda
Nip. 19651215 198601 2 002

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Dareah (PD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perngakt daerah untuk priode jangka pendek satu tahun. Fungsi Renja adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Renja memuat hasil evaluasi tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan Renja PD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengentahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporankinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Penyusunan Renja perubahan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura disusun melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi Renja tahun 2023.

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Pergub Kaltim No. 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja.

Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dilakukan perubahan dikarenakan adanya penyesuaian dan penambahan pagu anggaran untuyk menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA Perubahan PD Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 (Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam tata urutan dokumen prencanaan, maksud penyusunan Renja adalah untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan. Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2023 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur juga dimaksudkan sebagai penjabaran jangka pendek dari tujuan strategis Pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra.

Adapun tujuan penyusunannya adalah untuk mewujudkan program Pembangunan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur yang tertintegrasi dan berkelanjutan, sesuai dengan amanat Perubahan Renstra yang dilaksanakan dengan :

1. Menjadikan Renja sebagai pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD, dan APBD;
2. Menjadikan Renja sebagai instrument evaluasi kinerja penyelenggaraan kegiatan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana

pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, meliputi:

BAB I **PENDAHULUAN,** berisi tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,** berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN,** berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Ranker Perubahan RENJA Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,** berisi tentang : Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

BAB V **PENUTUP**

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun tahun 2022 (tahun n-1) dan perkiraan capaian realisasi tahun berjalan tahun 2023 (tahun n1) yang merupakan pencapaian target Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah berdasarkan realisasi Program dan Kegiatan pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah yang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan
Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2022 s/d Semester I tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur

Perangkat Daerah :Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim
Lembar 1 dari 11

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	TOTAL URUSAN BIDANG PANGAN + PERTANIAN									
02:09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									
01:00	**Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**									
02:09:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian**	**Skor**	82	81	88,56	109,33	82	85,18	103,88
2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	24	24	24	100,00	24	15	62,50
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100,00	12	6	50
2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1	100,00	1	-	0
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang	181	181	181	100,00	181	181	100
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100,00	12	6	50
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit	1	1	1	100,00	1	3	300
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	100,00	12	6	50
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	100,00	12	6	50
02:09:03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi**	**Skor**	91,0	90	86	95,44	91,0	-	0
		Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan	**Skor**	97,5	96	98	101,99	97,5	-	0

Lembar 2 dari 11

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga	Laporan	12	12	12	100,00	12	5	41,67
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Cadangan Pangan yang tersedia	Ton	210	210	222	105,91	210	222	105,91
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Jumlah media promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Media	1	1	3	300,00	1	-	0
02:09:04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Jumlah Desa Rawan Pangan**	**Desa**	50	45	45	100,00	50	50	100
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Laporan FSVA	Laporan	3	2	2	100,00	3	-	0
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah desa rawan pangan yang ditangani	Desa	10	20	20	100,00	10	-	0
02:09:05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan aman di kalimantan timur**	**Persentase**	92	91	91	100,00	92	65	70,88
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi, sertifikasi dan rekomendasi keamanan pangan segar	Dokumen	17	16	16	100,00	17	-	0
01:00	**UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura**									
02:09:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian**	**Skor**	82	81	81	100,00	82	25	30,49
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100,00	12	6	50
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang	136	136	136	-	136	136	100
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100,00	12	6	50
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit	5	5	5	100,00	5	3	60
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	100,00	12	6	50
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	100,00	12	6	50

Lembar 3 dari 11

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
01:00	**UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian**									
02:09:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian**	**Skor**	82	81	81	100,00	82	83,22	101,49
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100,00	12	6	50
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100,00	12	6	50
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit	5	5	5	100,00	5	-	0
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	100,00	12	6	50
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	100,00	12	6	50
01:00	**UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura**									
02:09:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian**	**Skor**	82	81	81	100,00	82	-	0
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100,00	12	5	41,67
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang	24	24	24	100,00	24	4	16,67
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100,00	12	6	50
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit	31	31	31	100,00	31	-	0
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	100,00	12	6	50
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	100,00	12	6	50

Lembar 4 dari 11

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
01:00	**UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura**									
02:09:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian**	**Skor**	82	81	81	100,00	82	-	0
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100,00	12	12	100
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang	85	125	125	100,00	85	85	100
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100,00	12	5	41,67
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	100,00	12	5	41,67
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	100,00	12	5	41,67
03:27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									
01:00	**Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**									
03:27:02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**1. Jumlah produksi padi**	**Ton**	289.846	271.356	232.143	85,55	289.846	137.112,43	47,305269
		2. Jumlah produksi tanaman hortikultura	**Ton**	292.383	275.070	351.782	127,89	292.383	104.511,63	35,7447697
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1. Peningkatan Produktivitas Padi	Ton/Ha	3,7	3,7	3,62	97,84	3,7	3,1	83,78
		1. Produktivitas Tanaman Hortikultura	Ton/Ha	22,37	22,19	23,77	107,12	22,37	20,96	93,70
03:27:03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**1. Jumlah luas lahan kel. penerima bantuan tanaman pangan**	**Ha**	8.500	8.000	8.000	100,00	8.500	6.200	72,94
		2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Prasarana Pertanian Hortikultura	**Unit**	7	7	7	100,00	7	6	85,71
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	1. Jumlah kel. Tani yang menerima bantuan tanaman pangan	Kel. Tani	228	226	464	205,31	228	590	258,77
		2. Jumlah kel. Tani yang menerima fasilitasi hortikultura	Kel. tani	7	7	7	100,00	7	6	85,71428571

Lembar 5 dari 11

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
01:00	**UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura**									
03:27:02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase pemenuhan kebutuhan benih sumber TPH yang**	**Persentase**	82	82	82	100,00	82	32	39,02439024
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas lahan yang menggunakan benih bersertifikat	Ha	940	920	920	100,00	940	360	38,29787234
03:27:03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah UPTD yang dilakukan Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Sarana Pendukungnya**	**UPTD**	-	1	1	100,00	-	-	0
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana yang di renovasi	Unit	-	1	1	100,00	-	1	0
01:00	**UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian**									
03:27:07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**1. Jumlah aparatur, non aparatur yang dibina**	**Orang**	441	330	333	100,91	441	310	70,29
		2. Jumlah kelembagaan petani berbasis koorporasi yang dibina	**Lembaga**	4	4	4	100,00	4	-	0
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh yang mendapat pembinaan dan diklat	Orang	456	486	801	164,81	456	120	26,32
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian	Orang	291	210	210	100,00	291	-	0
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan	Unit	6	6	6	100,00	6	1	16,67
01:00	**UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura**									
03:27:02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang diidentifikasi**	**Unit**	249	219	219	100,00	249	-	0
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah produsen benih tanaman pangan dan hortikultura yang diterbitkan sertifikat kompetensi/rekomendasi	Sertifikat	78	77	110	142,86	78	62	79,49
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah varietas daerah yang di identifikasi	Varietas	3	3	3	100,00	3	-	0

Lembar 6 dari 11

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
01:00	**UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura**									
03:27:02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Pengawasan Jumlah Pestisida dan Pupuk di Kios Pertanian**	**Kali**	50	40	40	100,00	50	20	40
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah pupuk dan pestisida yang diawasi	Jenis	20	20	20	100,00	20	15	75
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah pos pelayanan agens hayati (PPAH) yang dikembangkan	Kali	40	37	37	100,00	40	8	20
03:27:03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah bangunan yang dibangun/pelihara**	**Unit**	1	1	1	100,00	1	-	0
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luasan bangunan LPHP yang dipelihara	M2	10.000	10.000	10.000	100,00	10.000	-	0
03:27:05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Luas penanganan OPT dan DPI**	**Ha**	30.000	20.000	20.000	100,00	30.000	5.119	17,06
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas pengendalian OPT dan penanganan DPI	Ha	1.500	1.200	1.200	100,00	1.500	4.000	266,67

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat: (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangantarget kinerja program yaitu Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi sebesar 90,0 skor, realisasi kinerja hanya sebesar 85,9 skor, atau sebesar 95,44 %;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian: (1) Bidang Produksi Tanaman Pangan, target kinerja program yaitu : Jumlah produksi padi sebesar 271.356 ton, realisasi kinerja hanya sebesar 232.143 ton, atau sebesar 85,55%.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

1. Program Penanganan Kerawanan Pangan : (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, target kinerja program yaitu Jumlah desa rawan pangan sebesar 45 desa, realisasi kinerja sebesar 45 desa, atau sebesar 100 %;
2. Program Pengawasan Keamanan Pangan: (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, target kinerja program yaitu Persentase pangan aman di kalimantan timur sebesar 90 %, realisasi kinerja sebesar 90%, atau sebesar 100 %;
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian: (1)Bidang Produksi Tanaman Pangan, target kinerja program yaitu Jumlah luas lahan kelompok penerima bantuan tanaman pangansebesar 8.000 ha, realisasi kinerja sebesar 8.000 ha, atau sebesar 100 %, (2) Bidang Produksi Hortikultura, target kinerja program Jumlah fasilitas pengembangan prasarana pertanian hortikulturasebesar 7 unit, realisasi kinerja sebesar 7 unitatau sebesar 100 %;
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian: (1) UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura, target kinerja program yaituPersentase pemenuhan kebutuhan benih sumber TPH yang bersertifikat sebesar 82 %, realisasi kinerja sebesar 82 %, atau sebesar 100 %, (2)UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura,target kinerja program yaituPengawasan Jumlah sebaran Pestisida dan pupuk di kios pertanian dan kelompok tani (PPAH) 40 kali, realisasi kinerja sebesar 40 kali, atau sebesar 100 %; (3) UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, target kinerja program Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi dan

tersertifikasisebesar 193 unit, realisasi kinerja sebesar 193 unit, atau sebesar 100 %;

5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian : UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, target kinerja program yaitu Luas penanganan OPT dan DPI sebesar 20.000 Ha, realisasi kinerja sebesar 20.000 ha, atau sebesar 100 %.

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian : (1) Bidang Produksi Hortikultura, target kinerja program yaitu : Jumlah produksi tanaman hortikultura sebesar 283.592 ton, realisasi kinerja sebesar 351.782 ton, atau sebesar 124,05 %;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi : Dinas dan UPTD, target kinerja program yaitu Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian sebesar 81 Skor, realisasi kinerja sebesar 88,56 Skor, atau sebesar 109,33 %;
3. Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan target kinerja program yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan sebesar 96,2 skor realisasi kinerja sebesar 98,11 skor atau sebesar 101,99 %.
4. Program Penyuluhan Pertanian: (1) UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian,target kinerja program yaituJumlah aparatur, non aparatur yang dibina sebesar 330 orang, realisasi kinerja sebesar 331 orang, atau sebesar 100,91 %, danJumlah kelembagaan petani berbasis koorporasi yang dibina sebesar 4 lembaga, realisasi kinerja sebesar 4 lembaga, atau sebesar 100 %.

Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja yaitu :

1. Adanya dampak pandemi covid 19 yang mengakibatkan terbatasnya kegiatan ditingkat lapangandiKabupaten/Kota sehingga program/kegiatan lebih sulit untuk dilaksanakan sesuai target rencana kerja;
2. Terjadinya rencana rasionalisasi anggaran akibat pandemi covid 19, yang mengakibatkan beberapa indikator kinerja tidak tercapai;
3. Adanya perubahan metode perhitungan produksi padi menggunakan metode kerangka sample area (KSA) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengakibatkan penurunan jumlah produksi padi;

4. Faktor cuaca sangat mempengaruhi dalam melakukan budidaya pertanian tanaman pangan khususnya tanaman padi.

Faktor – faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja yaitu :

1. Komoditas hortikultura mengalami peningkatan produksi hal ini disebabkan komoditi buah dan sayur pada saat pandemi covid 19 banyak diminati masyarakat untuk memenuhi pangan dan gizi masyarakat;
5. Sebagian petani dan produsen benih telah memahami tentang pentingnya legalitas benih unggul tanaman pangan dan hortikultura dalam melakukan budidaya pertanian;
6. Adanya kerjasama yang dilaksanakan UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Prov. Kaltim dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota terkait Diklat/Bimtek pertanian bagi aparatur maupun non aparatur guna meningkatkan SDM petugas pertanian.
7. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program pada indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra yaitu : (1) Meningkatkan Ketersediaaan dan Ketahanan Pangan dengan indikator : 1. Jumlah Produksi Padi dengan target 279.671 ton realisasi sebesar 239.425,43 ton, atau sebesar 85,61 %, 2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura target 283.592 ton realisasi sebesar 351.782 ton, atau sebesar 124,05 %; 3. Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi target 90,0 skor realisasi 85,9 skor, atau sebesar 95,44 %; 4. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan target 96,2 skor realisasi kinerja sebesar 98,11 skor atau sebesar 101,99 %. (2) Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dengan indikator : 1. Nilai SAKIP target 64 realisasi sebesar 64,10.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran di sektor ketahanan pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura yaitu mengalokasikan anggaran berupa bantuan alsintan, benih, pupuk, pestisida, sarana dan prasarana pertanian lainnya yang berdampak langsung kepada petani/kelompok tani, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produksi dan produktivitas serta meningkatkan pendapatan petani. Penganggaran kegiatan ubinan swakarsa juga sangat diperlukan untuk menambah sampel ubinan pada saat panen padi, yang mana data ubinan tersebut dapat melengkapi data kerangka sampel area (KSA), semakin banyak sampel area yang diubin maka semakin akurat data yang dihasilkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultra Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

NO.	INDIKATOR	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		TAHUN 2021 (N-2)	TAHUN 2022 (N-1)	TAHUN 2023 (N)	TAHUN 2024 (N+1)	TAHUN 2021 (N-2)	TAHUN 2022 (N-1)	TAHUN 2023 (N)	TAHUN 2024 (N+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian (Skor)	80,00	81,00	82,00	82,00	80,00	88,56	82,00	82,00	
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (Skor)	94,00	96,20	97,50	97,50	94,00	85,9	97,50	97,50	
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Skor)	89,00	90,00	91,00	91,00	85,00	98,11	91,00	91,00	
4	Jumlah Desa Rawan Pangan (Desa)	39	45	50	50	39	45	50	50	
5	Persentase Pangan Aman di Kalimantan Timur (%)	90,0	91,0	92,0	92,0	90,0	91	92,0	92,0	
6	Jumlah Produksi Padi (Ton)	271.356	279.681	289.846	289.846	240.641	232,144	289.846	289.846	
7	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	275.070	283.592	292.383	292.383	345.230	351,782	292.383	292.383	
8	Jumlah Luas Lahan Kelompok Penerima Bantuan Tanaman Pangan (Ha)	7.100	8.000	8.500	8.500	7.000	8000	8.500	8.500	
9	Jumlah Fasilitas Pengembangan Prasarana Pertanian Hortikultura (Unit)	6	7	7	7	6	7	7	7	
10	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	82	82	82	82	82	82	82	82	
11	Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di Bina (Orang)	85	330	441	441	91	331	441	441	
12	Jumlah Kelembagaan Petani Berbasis Korporasi yang di Bina (Lembaga)	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	Jumlah Legalitas Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Yang Terawasi dan Tersertifikasi (Unit)	193	222	252	252	193	222	252	252	
14	Pengawasan Jumlah Pestisida dan Pupuk	30	40	50	50	30	40	50	50	
15	Luas Penanganan OPT dan DPI (Ha)	15.000	20.000	30.000	30.000	14.879	20.000	30.000	30.000	

Uraian pencapaian kinerja sampai dengan semester satu tahun anggaran 2023 :

1. Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian dalam Pembangunan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalimantan Timur, target semula 82 Skor, dimana realisasi 85 Skor, atau sebesar 103,66 %;
2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan target 97,50 skor, dimana realisasi 0 skor, atau sebesar 0 %;

3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, target semula 91 skor, dimana realisasi 0 skor, atau sebesar 0 %;
4. Jumlah Desa Rawan Pangan,target semula 50 desa, dimana realisasi 50 desa, atau sebesar 100 %;
5. Persentase Pangan Aman di Kalimantan Timur,target semula 92 %, dimana realisasi 65,21 %, atau sebesar 70,88 %;
6. Jumlah Produksi Padi, target semula 289.846 Ton, dimana realisasi 137.112,43 Ton atau sebesar 47,31 %;
7. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura, target semula 292.383 Ton, dimana realisasi 104.511,63 Ton atau sebesar 35,75 %;
8. Jumlah Luas Lahan Kelompok Penerima Bantuan Tanaman Pangan, target semula 8.500 Ha, dimana realisasi 6.200 Ha, atau sebesar 72,94 %;
9. Jumlah Fasilitas Pengembangan Prasarana Pertanian Hortikultura, target 7 unit, realisasi 6 unit, atau sebesar 85,71 %;
10. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber Tanaman Pangan dan Hortikultura , target semula 82 %, dimana realisasi 0 %, atau sebesar 0 %;
11. Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di Bina, target 441 orang, realisasi 310 orang, atau sebesar 70,29 %;
12. Jumlah Kelembagaan Petani Berbasis Korporasi yang di Bina, target 4 Lembaga, realisasi 0 Lembaga, atau sebesar 0 %;
13. Jumlah Legalitas Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Yang Terawasi dan Tersertifikasi, target semula 249 Unit, dimana realisasi 0 Unit, atau sebesar 0 %, sesuai dengan rencana kerja;
14. Luas Penanganan OPT dan DPI, target semula 30.000 Ha, dimana realisasi 5.119 Ha, atau sebesar 17,10 %.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Tingkat Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok yaitu *"Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan"*Dalam menyelenggarakan tugas pokok

tersebut, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan bidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura;
2. Pengembangan tanaman pangan;
3. Pengembangan hortikultura;
4. Penataan prasarana pertanian;
5. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit tanaman;
6. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
7. Pemberian ijin usaha atau rekomendasi teknis pertanian;
8. Pembinaan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
9. Pembinaan distribusi dan cadangan pangan;
10. Pembinaan harga pangan;
11. Pembinaan konsumsi pangan;
12. Pembinaan keamanan dan kelembagaan pangan;
13. Pembinaan penganekaragaman pangan;
14. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
15. Pelaksanaan unit pelaksana teknis dinas;
16. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura yang diberikan oleh Gubernur.

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, dalam perubahan RENSTRA Tahun 2019-2023 memiliki tujuan dan sasaran yaitu Meningkatnya Kontribusi Pertanian Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Ekonomi Daerah dengan Sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Petani. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka diperlukan sinergitas pembangunan pertanian antara Perangkat Daerah Provinsi, Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota.

Program kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2023 selaras dengan Rencana Kerja Kementerian Pertanian RI dan Badan Pangan Nasional RI (BAPANAS) yaitu pengembangan kawasan, kawasan padi, jagung, bawang merah, cabai, jeruk, pisang, lengkeng, alpukat dan penyediaan sarana dan prasarana pertanian lainnya, pengadaan cadangan beras pemerintah daerah serta koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan,

kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.

b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timurdalam pembangunan di bidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi dimasa mendatang antara lain :

1. Ketahanan Pangan dan Gizi

Mengingat permintaan kebutuhan pangan semakin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan bahan baku industri pengolahan pangan di Provinsi Kalimantan Timur, maka peluang dalam menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mantap, secara umum masih cukup terbuka peluang potensi sumberdaya (alam, SDM, budaya, teknologi dan finansial) yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan aksesibilitas pangan; mengembangkan sistem distribusi pangan, stabilitasi harga pangan dan peningkatkan cadangan pangan; mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman; serta penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat.

2. Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Global

Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi lahan yang berlebihan yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Perubahan iklim global berdampak bergesernya pola tanam, eksplosif hama dan penyakit tanaman yang pada akhirnya menurunkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Tantangan ke depan dalam menyikapi hal ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapang dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan.

3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Masih Terbatas

Prasarana pertanian yang saat ini memprihatinkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan jaringan irigasi yang baru dan rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian menurun. Tantangan yang dihadapi bagaimana meningkatkan partisipasi petani dalam perlindungan daerah aliran sungai (DAS), pemeliharaan jaringan irigasi desa, pengembangan sumber-sumber air alternatif serta pemanfaatan sumber air tanah, danau, rawa dan hujan. Prasarana lain yang dibutuhkan namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani dan jalan produksi. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menyediakan prasarana yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup dan baik.

Permasalahan lain yang dihadapi yaitu belum tersedianya benih/bibit unggul, pupuk dan bahan pengendali OPT, alat dan mesin pertanian hingga ketingkat usahatani serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Tantangan kedepan adalah bagaimana menumbuhkembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, kelembagaan penyedia jasa alat mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik dan pestisida yang ramah lingkungan.

4. Keterbatasan Akses Petani Terhadap Permodalan

Petani belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan, diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan. Tantangan ke depan adalah bagaimana pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok untuk menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro di pedesaan.

5. Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian

Meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan diluar sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan menurun tapi juga semakin sempitnya luas garapan usahatani. Tantangan untuk menghadapi ini bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian yang ada dengan melakukan percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

6. Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani kondisinya di Kalimantan Timur selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

bergerak fluktuatif, namun ada kecenderungan menurun. Hal ini disebabkan yang diterima petani dari hasil penjualan hasil-hasil pertanian jauh dibawah yang dibayar oleh petani baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk biaya sarana produksi pertaniannya.

7. Belum Optimalnya Kelembagaan Petani

Kondisi organisasi petani lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesbilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar bagi pengembangan usaha pertanian. Tantangan kedepan bagaimana kelembagaan petani ini merevitalisasi diri dari kelembagaan pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum dan berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan.

8. Semakin Berkurangnya Minat Generasi Muda

Merosotnya luas lahan garapan fungsional sebagai salah satu penyebab keengganan generasi muda dalam berusahatani yang mengakibatkan jarak antara pemuda dengan lahan pertanian semakin jauh dan proses regenerasi petani pun sulit berjalan sehingga pertanian tetap didominasi oleh generasi tua yang tentu mempunyai implikasi bahwa pertanian berjalan ditempat dan sulit melakukan perubahan yang mendasar mungkin ini salah satu yang menyebabkan kondisi pertanian kita mengalami penurunan.

9. Terbatasnya SDM Pertanian

Dengan meningkatnya tuntutan daya saing bagi masyarakat tani dipasar regional dan pasar global, petani dituntut merubah pola pikir dan prilaku dari petani tradisional menjadi petani modern, mandiri dan berwawasan agribisnis maka jumlah dan kompetensi Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan – Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP), Petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT) perlu ditingkatkan melalui pendidikan/pelatihan. Perlunya dukungan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov. Kaltim tentang penerimaan Pegawai/Petugas Pertanian yang baru sesuai dengan tabel kebutuhan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian

Provinsi Kalimantan Timur

NO	URAIAN SDM	EKSISTING	KEBUTUHAN	KEKURANGAN	KET
1.	Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)	PNS : 547 Orang Non PNS : 80 Orang	1.038 Orang	426 Orang	1 Desa = 1 Petugas PPL
2.	Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP)	PNS : 19 Orang Non PNS : 36 Orang	103 Orang	48 Orang	1 Kecamatan = 1 Petugas POPT
3.	Petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT)	PNS : 17 Orang	103 Orang	86 Orang	1 Kecamatan = 1 Petugas PBT

10. Belum Optimalnya Koordinasi Antar Sektor

Pembangunan pertanian tidak bisa berdiri sendiri melainkan melibatkan banyak sektor terkait, baik sektor hulu maupun sektor hilir. Koordinasi antar sektor sudah sering dilakukan, hanya saja mengintegrasikan secara fisik kegiatan antar sektor masih sulit dilaksanakan. Perlunya dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) terkait Percepatan Pembangunan Bendungan Marangkayu yang berlokasi Kabupaten Kutai Kartanegara yang direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 12.37 M^3 diharapkan dapat mengairi lahan sawah seluas 4.500 Ha, serta percepatan Pembangunan Bendungan Lambakan yang berlokasi di Kabupaten Paser yang direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 7,9 M^3, diharapkan dapat mengairi lahan sawah seluas 16.000 – 25.000 Ha di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara, dengan ketersediaan air irigasi di kedua bendungan besar tersebut berdampak pada :

a. Ekstensifikasi : luas areal tanam bertambah
b. Intensifikasi : peningkatan IP 100 menjadi IP 200 atau IP 300 (dari 1 kali tanam menjadi 2 kali tanam padi dan 1 kali palawija)

c. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023, Visi Provinsi Kalimantan Timur adalah "Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat" dalam rangka pencapaian visi secara evektif dan efisien, maka disusunlahMisi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan kedepan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. **Misi Pertama** : Berdaulat dalam pembangunan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. **Misi Kedua** :Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. **Misi Ketiga** :Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. **Misi Keempat** :Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. **Misi Kelima** :Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Dalamrangka mencapai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut khususnya pada Misi Kedua yaitu "Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan" sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu*"Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan"* dan tertuang dalam Indikator Kinerja Utama yaitu Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap PDRB (%).

d. Dampak Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraanuntuk Mencapai Tujuan.

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyatermasuk dalam SDGs pada tujuan 2 yaitu Tanpa Kelaparan.

Tujuan Tanpa Kelaparan mempunyai targetPada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula, dengan Indikator Kinerja Kualitas Konsumsi Pangan yang di indikasikan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH), realisasi indikator kinerja sdgs dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Target dan Realisasi SDGS Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tahun 2022
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Timur

NO	TARGET TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN	NAMA INDIKATOR	TARGET (SKOR)	REALISASI (SKOR)	PERSENTASE
1.	2.2. Pada tahun 2030,menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	(i) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi ikan perkapita	90,0	85,9	95,44

Realisasi Skor Pola Harapan Konsumsi (PPH) Tahun 2022 sebesar 85,9 Skor dari target 90,0 Skor atau sebesar 95,44 %, realisasi belum mencapai target hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk merubah pola hidup dengan mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)untukmewujudkan pencapaian target tanpa kelaparan di Provinsi Kalimantan Timur, maka program-program yang dilakukan yaitu : (1) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, (2) Program Penanganan Kerawanan Pangan, (3) Program Pengawasan Keamanan Pangan, (4) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, (5) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, (6) Program Penyuluhan Pertanian.

e. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Disamping permasalahan pada poin b diatas, maka Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai peluang untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura sebagai berikut :

1. Pentingnya Peraturan Daerah diKabupaten/Kota tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura ke non pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
2. Perlu adanya upaya diversifikasi konsumsi pangan non beras untuk mengurangi konsumsi beras mengingat semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur yang disebabkan migrasi mapun karena tingkat kelahiran yang cukup tinggi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, sehat dan aman.
3. Menciptakan pasar yang luas bagi produk-produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura guna memutus mata rantai tata niaga produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani.
4. Perbaikan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura seperti jaringan irigasi, jalan pertanian, jalan produksi dan alat dan mesin pertanian (pra panen dan pasca panen) untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
5. Meningkatkan proteksi/perlindungan tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) akibat dampak perubahan iklim.

6. Menumbuhkan minat petani muda untuk terjun di bidang pertanian tanaman dan hortikultura melalui pendidikan pertanian pada SMK Pertanian dan UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (UPTD BPPSDMP).

   Selain itu, perlu ditumbuhkan kepedulian pihak swasta untuk mengembangkan Sektor Pangan dan Pertanian sehingga dapat terbentuk Korporasi Pertanian yang berbasis sumber daya lokal.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Akhir RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2023, dapat dijelaskan pada tabel berikutini:

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 1 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
TOTAL URUSAN BIDANG PANGAN + PERTANIAN					**177.172.327.000**	**TOTAL URUSAN BIDANG PANGAN + PERTANIAN**					**177.172.327.000**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					**158.873.602.450**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**					**158.873.602.450**	
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura					**103.142.595.565**	**Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**					**103.142.595.565**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Biodang Pertanian**	**Skor**	**82**	**65.262.163.115**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Biodang Pertanian**	**Skor**	**82**	**65.262.163.115**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**24**	**1.291.338.500**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**24**	**1.291.338.500**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	821.117.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	821.117.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	4.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	4.400.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	4.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	4.400.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	4.400.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	4.400.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	4.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	4.400.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Laporan	12	93.960.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Laporan	12	93.960.000	

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 2 dari17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	358.661.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	358.661.500	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bulan**	**12**	**54.159.429.095**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bulan**	**12**	**54.159.429.095**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	231	53.563.646.095	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	231	53.563.646.095	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	450.960.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	450.960.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	133.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	133.750.000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3	3.165.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3	3.165.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	18	7.908.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	18	7.908.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Laporan**	**1**	**51.830.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Laporan**	**1**	**51.830.000**	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Dokumen	1	2.880.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Dokumen	1	2.880.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	48.950.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	48.950.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai**	**Orang**	**181**	**421.596.600**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai**	**Orang**	**181**	**421.596.600**	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Paket	1	294.996.600	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Paket	1	294.996.600	

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 3 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15	126.600.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15	126.600.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bulan**	**12**	**1.494.628.400**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bulan**	**12**	**1.494.628.400**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	29.426.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	29.426.100	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan	Paket	4	13.440.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan	Paket	4	13.440.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	23.270.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	23.270.400	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1.271.352.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1.271.352.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	157.139.900	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	157.139.900	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah**	**Unit**	**1**	**3.940.118.300**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah**	**Unit**	**1**	**3.940.118.300**	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	3.352.310.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	3.352.310.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	86	587.808.300	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	86	587.808.300	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**	**12**	**2.964.479.720**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**	**12**	**2.964.479.720**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	38.004.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	38.004.000	

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 4 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	460.621.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	460.621.400	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.465.854.320	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.465.854.320	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**	**12**	**938.742.500**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**	**12**	**938.742.500**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	144.496.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	144.496.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	28	324.986.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	28	324.986.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	148.660.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	148.660.500	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	268.600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	268.600.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	52.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	52.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		**Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi**	**Skor**	**91,0**	**4.355.250.400**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		**Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi**	**Skor**	**91,0**	**4.355.250.400**	
		Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan	**Skor**	**97,5**				**Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan**	**Skor**	**97,5**		
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		**Jumlah Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan**	**Laporan**	**12**	**707.426.200**	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**		**Jumlah Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan**	**Laporan**	**12**	**707.426.200**	
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	2	232.327.000	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	2	232.327.000	

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 5 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	1	146,662,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	1	146,662,000	
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	1	328,437,200	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	1	328,437,200	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		**Cadangan Pangan yang tersedia**	**Ton**	**210**	**1,592,311,200**	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**		**Cadangan Pangan yang tersedia**	**Ton**	**210**	**1,592,311,200**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	170,421,200	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	170,421,200	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	2	1,251,270,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	2	1,251,270,000	
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Ton	210	170,620,000	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Ton	210	170,620,000	
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		**Jumlah media promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal**	**Media**	**1**	**2,055,513,000**	**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi**		**Jumlah media promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal**	**Media**	**1**	**2,055,513,000**	
Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal berbasis sumber daya lokal	Dokumen	1	899,242,300	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal berbasis sumber daya lokal	Dokumen	1	899,242,300	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	1	588,758,400	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	1	588,758,400	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	1	567,512,300	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	1	567,512,300	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		**Jumlah Desa Rawan Pangan**	**Desa**	**50**	**1,142,493,850**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**		**Jumlah Desa Rawan Pangan**	**Desa**	**50**	**1,142,493,850**	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		**Laporan FSVA dan SKPG**	**Laporan**	**3**	**252,139,600**	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**		**Laporan FSVA dan SKPG**	**Laporan**	**3**	**252,139,600**	

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 6 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen	4	252,139,600	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen	4	252,139,600	
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		**Jumlah desa rawan pangan yang ditangani**	**Desa**	**10**	**890,354,250**	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**		**Jumlah desa rawan pangan yang ditangani**	**Desa**	**10**	**890,354,250**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen	1	529,759,500	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen	1	529,759,500	
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	360,594,750	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	360,594,750	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		**Persentase pangan aman di kalimantan timur**	**Persentase**	**92**	**1,194,487,000**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**		**Persentase pangan aman di kalimantan timur**	**Persentase**	**92**	**1,194,487,000**	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah registrasi, sertifikasi dan rekomendasi keamanan pangan segar**	**Dokumen**	**17**	**1,194,487,000**	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah registrasi, sertifikasi dan rekomendasi keamanan pangan segar**	**Dokumen**	**17**	**1,194,487,000**	
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi yang Dibina	Dokumen	1	523,816,200	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi yang Dibina	Dokumen	1	523,816,200	
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat	11	124,138,400	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat	11	124,138,400	
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	117,379,500	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	117,379,500	
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	104,558,900	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	104,558,900	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen	1	324,594,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen	1	324,594,000	

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 7 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		**1. Jumlah produksi padi**	**Ton**	**289,846**	**28,386,082,630**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		**1. Jumlah produksi padi**	**Ton**	**289,846**	**28,386,082,630**	
		2. Jumlah produksi tanaman hortikultura	**Ton**	**292,383**				**2. Jumlah produksi tanaman hortikultura**	**Ton**	**292,383**		
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		**1. Peningkatan Produktivitas Padi**	**Ton/Ha**	**3.7**	**28,386,082,630**	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**		**1. Peningkatan Produktivitas Padi**	**Ton/Ha**	**3.7**	**28,386,082,630**	
		2. Produktivitas Tanaman Hortikultura	**Ton/Ha**	**22.37**				**2. Produktivitas Tanaman Hortikultura**	**Ton/Ha**	**22.37**		
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	2	26,831,995,380	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	2	26,831,995,380	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Petanian	Dokumen	2	1,554,087,250	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Petanian	Dokumen	2	1,554,087,250	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		**1. Jumlah luas lahan kel. Penerimaan bantuan tanaman pangan**	**Ha**	**8,500**	**2,802,118,570**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		**1. Jumlah luas lahan kel. Penerimaan bantuan tanaman pangan**	**Ha**	**8,500**	**2,802,118,570**	
		2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	**Unit**	**7**				**2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura**	**Unit**	**7**		
Penataan Prasarana Pertanian		**1. Jumlah kel. tani yang menerima bantuan tanaman pangan**	**Kel. Tani**	**228**	**2,802,118,570**	**Penataan Prasarana Pertanian**		**1. Jumlah kel. tani yang menerima bantuan tanaman pangan**	**Kel. Tani**	**228**	**2,802,118,570**	
		2. Jumlah kel.tani yang menerima fasilitasi hortikultura	**Kel. tani**	**7**				**2. Jumlah kel.tani yang menerima fasilitasi hortikultura**	**Kel. tani**	**7**		
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Rencana Pembangunan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	2	798,431,500	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Rencana Pembangunan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	2	798,431,500	
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	2	1,499,792,370	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	2	1,499,792,370	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	2	137,173,100	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	2	137,173,100	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	2	133,321,600	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	2	133,321,600	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	2	233,400,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	2	233,400,000	

UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura

Lembar 8 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura					**46,562,562,546**	**UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura**					**46,562,562,546**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Biodang Pertanian**	**Skor**	**82**	**38,207,821,346**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Biodang Pertanian**	**Skor**	**82**	**38,207,821,346**	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bulan**	**12**	**115,680,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bulan**	**12**	**115,680,000**	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	115,680,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	115,680,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai**	**Orang**	**136**	**295,685,200**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai**	**Orang**	**136**	**295,685,200**	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Paket	1	60,785,200	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Paket	1	60,785,200	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15	234,900,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15	234,900,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bulan**	**12**	**243,031,156**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bulan**	**12**	**243,031,156**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	9,597,800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	9,597,800	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10,652,700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10,652,700	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2,496,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2,496,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	220,284,656	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	220,284,656	

UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura

Lembar 9 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah**	**Unit**	**5**	**34,863,763,390**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah**	**Unit**	**5**	**34,863,763,390**	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	Unit	5	214,123,900	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	Unit	5	214,123,900	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	30,446,620,290	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	30,446,620,290	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	4,203,019,200	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	4,203,019,200	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**	**12**	**2,384,553,600**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**	**12**	**2,384,553,600**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	3,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	170,886,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	170,886,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	9,750,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	9,750,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2,200,917,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2,200,917,600	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**	**12**	**305,108,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**	**12**	**305,108,000**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	132,529,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	132,529,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	30,579,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	30,579,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	142,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	142,000,000	

UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 10 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		**Persentase pemenuhan kebutuhan benih sumber TPH yang bersertifikat**	**Persentase**	**82**	**2,517,149,200**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		**Persentase pemenuhan kebutuhan benih sumber TPH yang bersertifikat**	**Persentase**	**82**	**2,517,149,200**	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		**Luas lahan yang menggunakan benih bersertifikat**	**Ha**	**940**	**2,517,149,200**	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**		**Luas lahan yang menggunakan benih bersertifikat**	**Ha**	**940**	**2,517,149,200**	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	1	1,193,354,500	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	1	1,193,354,500	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen	1	1,323,794,700	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen	1	1,323,794,700	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		**Jumlah yang dilakukan Renovasi**	**Unit**	**1**	**5,837,592,000**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		**Jumlah yang dilakukan Renovasi**	**Unit**	**1**	**5,837,592,000**	
Penataan Prasarana Pertanian		**Jumlah prasarana yang di renovasi**	**Unit**	1	5,837,592,000	**Penataan Prasarana Pertanian**		**Jumlah prasarana yang di renovasi**	**Unit**	1	5,837,592,000	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	16	5,837,592,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	16	5,837,592,000	

UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Lembar 11 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian					**17,509,377,819**	**UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian**					**17,509,377,819**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Biodang Pertanian**	**Skor**	**82**	**12,064,277,419**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Biodang Pertanian**	**Skor**	**82**	**12,064,277,419**	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bulan**	**12**	**88,560,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bulan**	**12**	**88,560,000**	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	88,560,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	88,560,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bulan**	**12**	**269,207,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bulan**	**12**	**269,207,000**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	40,607,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	40,607,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	228,600,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	228,600,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah**	**Unit**	**5**	**8,136,464,963**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah**	**Unit**	**5**	**8,136,464,963**	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	6,730,472,500	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	6,730,472,500	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	1,405,992,463	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	1,405,992,463	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**	**12**	**1,732,324,776**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**	**12**	**1,732,324,776**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	19,913,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	19,913,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	169,438,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	169,438,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	71,710,176	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	71,710,176	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1,471,263,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1,471,263,600	

UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Lembar 12 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**	**12**	**1,837,720,680**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**	**12**	**1,837,720,680**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	7	130,987,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	7	130,987,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	1,706,733,680	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	1,706,733,680	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		**1. Jumlah aparatur, non aparatur yang dibina**	**Orang**	**441**	**5,445,100,400**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		**1. Jumlah aparatur, non aparatur yang dibina**	**Orang**	**441**	**5,445,100,400**	
		2. Jumlah kelembagaan petani berbasis koorporasi yang dibina	**Lembaga**	**4**				**2. Jumlah kelembagaan petani berbasis koorporasi yang dibina**	**Lembaga**	**4**		
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		**Jumlah penyuluh yang mendapat pembinaan dan diklat**	**Orang**	**456**	**1,222,086,850**	**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**		**Jumlah penyuluh yang mendapat pembinaan dan diklat**	**Orang**	**456**	**1,222,086,850**	
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	Orang	150	1,222,086,850	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	Orang	150	1,222,086,850	
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		**Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian**	**Orang**	**291**	**3,291,085,750**	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**		**Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian**	**Orang**	**291**	**3,291,085,750**	
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Disemenisasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	1	2,727,317,100	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Disemenisasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	1	2,727,317,100	
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	7	563,768,650	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	7	563,768,650	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		**Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan**	**Unit**	**6**	**931,927,800**	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**		**Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan**	**Unit**	**6**	**931,927,800**	
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	1	158,627,600	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	1	158,627,600	
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	3	773,300,200	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	3	773,300,200	

UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura					**2,945,935,130**	**UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura**					**2,945,935,130**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Biodang Pertanian**	**Skor**	**82**	**2,043,806,380**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Biodang Pertanian**	**Skor**	**82**	**2,043,806,380**	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bulan**	**12**	**81,000,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bulan**	**12**	**81,000,000**	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	1	81,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	1	81,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai**	Orang	**24**	**128,520,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai**	Orang	**24**	**128,520,000**	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	7	128,520,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	7	128,520,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bulan**	**12**	**163,393,200**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bulan**	**12**	**163,393,200**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	2,858,700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	2,858,700	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	33,331,700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	33,331,700	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	15,602,800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	15,602,800	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	2,400,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	2,400,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	109,200,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	109,200,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah**	**Unit**	**31**	**137,766,720**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah**	**Unit**	**31**	**137,766,720**	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	Unit	28	137,766,720	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	Unit	28	137,766,720	

UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 14 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**	**12**	**1,095,804,560**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**	**12**	**1,095,804,560**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	3,480,400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	3,480,400	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	157,492,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	157,492,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	934,832,160	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	934,832,160	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**	**12**	**437,321,900**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**	**12**	**437,321,900**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kendaraan Dinas Operasinal atau Lapngan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya	Unit	38	66,614,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kendaraan Dinas Operasinal atau Lapngan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya	Unit	38	66,614,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	25,017,600	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	25,017,600	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	1	345,690,300	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	1	345,690,300	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		**Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang diidentifikasi**	**Unit**	**249**	**902,128,750**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		**Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang diidentifikasi**	**Unit**	**249**	**902,128,750**	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		**Jumlah produsen benih tanaman pangan dan hortikultura diterbitkan sertifikat kompetensi/rekomendasi**	**Sertifikat**	**78**	**848,448,750**	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**		**Jumlah produsen benih tanaman pangan dan hortikultura diterbitkan sertifikat kompetensi/rekomendasi**	**Sertifikat**	**78**	**848,448,750**	
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	85	355,768,000	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	85	355,768,000	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	1	251,730,950	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	1	251,730,950	

UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen	1	240,949,800	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen	1	240,949,800	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		**Jumlah varietas daerah yang di identifikasi**	**Varietas**	**3**	**53,680,000**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**		**Jumlah varietas daerah yang di identifikasi**	**Varietas**	**3**	**53,680,000**	
Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	VUB	1	53,680,000	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	VUB	1	53,680,000	

UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Lembar 16 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura					**7,011,855,940**	**UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura**					**7,011,855,940**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Biodang Pertanian**	**Skor**	**82**	**3,415,101,740**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Biodang Pertanian**	**Skor**	**82**	**3,415,101,740**	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bulan**	**12**	**78,120,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bulan**	**12**	**78,120,000**	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	78,120,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	78,120,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai**	**Orang**	**85**	**191,807,500**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai**	**Orang**	**85**	**191,807,500**	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	191,807,500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	191,807,500	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bulan**	**12**	**1,208,539,200**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bulan**	**12**	**1,208,539,200**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	30,288,700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	30,288,700	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	370,139,300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	370,139,300	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	11,112,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	11,112,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peratuiran Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	1,939,200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peratuiran Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	1,939,200	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	782,100,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	782,100,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	12,960,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	12,960,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**	**12**	**1,588,854,720**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**	**12**	**1,588,854,720**	

UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Lembar 17 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	137,497,200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	137,497,200	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1,446,357,520	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1,446,357,520	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**	**12**	**347,780,320**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**	**12**	**347,780,320**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan	Unit	1	85,956,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan	Unit	1	85,956,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	261,824,320	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	261,824,320	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		**Pengawasan Jumlah Pestisida dan Pupuk**	**Kali**	**50**	**485,928,400**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		**Pengawasan Jumlah Pestisida dan Pupuk**	**Kali**	**50**	**485,928,400**	
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		**Jumlah pupuk dan pestisida yang diawasi**	**Jenis**	**20**	**267,085,000**	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**		**Jumlah pupuk dan pestisida yang diawasi**	**Jenis**	**20**	**267,085,000**	
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	267,085,000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	267,085,000	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		**Jumlah pos pelayanan agens hayati (PPAH) yang dikembangkan**	**Kali**	**40**	**218,843,400**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**		**Jumlah pos pelayanan agens hayati (PPAH) yang dikembangkan**	**Kali**	**40**	**218,843,400**	
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	1	218,843,400	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	1	218,843,400	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		**Jumlah bangunan yang dibangun/pelihara**	**Unit**	**1**	**2,199,998,800**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		**Jumlah bangunan yang dibangun/pelihara**	**Unit**	**1**	**2,199,998,800**	

UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 18 dari 18

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
Penataan Prasarana Pertanian		**Jumlah luasan bangunan LPHP yang pelihara**	**M2**	**10,000**	**2,199,998,800**	**Penataan Prasarana Pertanian**		**Jumlah luasan bangunan LPHP yang pelihara**	**M2**	**10,000**	**2,199,998,800**	
Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laboratorium Pertanian yang dibangun dan dipelihara	Unit	1	2,199,998,800	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laboratorium Pertanian yang dibangun dan dipelihara	Unit	1	2,199,998,800	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		**Luas penanganan OPT DPI**	**Ha**	**30,000**	**910,827,000**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**		**Luas penanganan OPT DPI**	**Ha**	**30,000**	**910,827,000**	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		**Luas pengendalian OPT dan penanganan DPI**	**Ha**	**1,500**	**910,827,000**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**		**Luas pengendalian OPT dan penanganan DPI**	**Ha**	**1,500**	**910,827,000**	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	6,150	751,587,000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	6,150	751,587,000	
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	1,000	159,240,000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	1,000	159,240,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tingkat Pelayanan Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaringan aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan dibidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahun 2023 yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Usulan Proposal Program dan Kegiatan dari Masyarakat khususnya di Bidang Pangan, Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura disampaikan melalui Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan atau Dinas yang menangani Ketahanan Pangan, Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten/Kota yang selanjutnya di rekapitulasi oleh Dinas tersebut dan direkomendasikan ke Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dan dibahas melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten/Kota. Usulan-usulan tersebut diseleksi sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi serta isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya usulan tersebut disampaikan pada Musrenbang Provinsi Kalimantan Timur. Setelah mendapat pagu dana indikatif Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur tetap berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan atau yang membidangi fungsi Pertanian dan Ketahanan Pangan diKabupaten/Kota untuk mengalokasikan usulan tersebut.

Kesesuaian Usulan Program/Kegiatan dari para pemangku kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah untuk mewujudkan Pembangunan pangan, tanaman pangan dan hortikultura yaitu :

1. Perlunya dukungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait penerimaan petugas pertanian yang baru seperti penyuluh pertanian

lapangan (PPL), petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT), pengawas benih tanaman (PBT), mengingat petugas yang lama banyak yang memasuki purna tugas;

2. Perlu dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas PUPR Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan Pembangunan Bendungan Marang di Kutai Kartanegara dan Bendungan Lambakan di Kabupaten Paser, agar bendungan tersebut bisa dimanfaatkan petani/kelompok tani guna meningkatkan produksi dan produktivitas serta peningkatan indek pertanaman (IP), semula ditanam sekali (IP 100) menjadi dua kali (IP 200), atau menjadi tiga kali tanam (IP 300).
3. Perlunya Sinergitas Pembangunan Pertanian di Kaltim seperti PT. PKT, Bankaltim, BRI, PT. Jasindo, Bulog, Dinas Pertanian Kab/Kota dan Dinas Ketahanan Pangan Kab/Kota serta stakeholder terkait lainnya.

Usulan Program/Kegiatan dari pemangku kepentingan dalam mendukung program prioritas Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur TA. 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1.	Penerimaan Petugas Pertanian Baru : - Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) - Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) - Pengawas Benih Tanaman (PBT)	10 Kab/Kota 10 Kab/Kota 10 Kab/Kota	Peningkatan SDM Pertanian Peningkatan SDM Pertanian Peningkatan SDM Pertanian	426 Orang 48 Orang 86 Orang	Dukungan BKN/BKD Prov. Kaltim
2.	Percapatan Pembangunan Bendungan Marangkayu	Kabupaten Kutai Kartanegara	Peningkatan Indek Pertanaman (IP)	1 Bendungan	Dukungan KEMENPU-PR/Dinas PU-PR Prov. Kaltim
3.	Percepatan Pembangunan Bendungan Lambakan	Kabupaten Paser	Peningkatan Indek Pertanaman (IP)	1 Bendungan	Dukungan KEMENPU-PR/Dinas PU-PR Prov. Kaltim
4.	Sinergitas Pembangunan Pertanian di Kaltim	10 Kab/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dukungan PT. PKT, Bankaltim, BRI, PT. Jasindo, Bulog, Dinas Pertanian/Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu "INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR" yang pelaksanaannya dibagi kedalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah, Rencana Kerja (Renja)Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap IV (RPJMN IV Tahun 2020-2024) yaitu Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Presiden Joko Widodo pada hari senin, 28 Agustus 2019 telah mengumumkan Pemindahan Ibu Kota Negara Baru ke Kalimantan Timur, yang membawa konsekuensi salah satunya adalah bertambahnya jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 1,5 Juta orang. Hal ini berdampak pada penyediaan pangan pokok yang lebih besar yang harus disiapkan melalui upaya-upaya pembangunan pertanian yang lebih agresif dan harus disiapkan mulai saat ini.

Secara Nasional Kementerian Pertanian (Kementan)telah menetapkan Kawasan Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara. Kawasan food estate merupakan salah satu program super prioritas, tujuan food estate yaitu membangun kawasan yang terpadu yang berdaya saing, ramah lingkungan dan modern, mendorong sinergitas dengan stakeholder dalam pembangunan pertanian.

Pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengidentifikasi calon lokasi food estate di Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 1.500 Ha dan di Kabupaten Paser seluas 1.154 Ha, hasil identifikasi calon lokasi tersebut disampaikan ke Kementerian Pertanian RI pada tanggal 29 Desember 2020, dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah di Bidang Pangan, Pertanian Tanaman Pangan

dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur yaitu "*Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan"*. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun 2023 telah menganggarkan alokasi kegiatan bantuan sarana produksi pertanian berupa bantuan benih padi, pupuk dan kapur pertanian untuk Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, diharapkan dengan bantuan sarana produksi tersebut dapat meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman padi dilokasi kawasan food estate PPU dan Paser.

Pada awal Maret 2020 pandemi Covid 19 mulai meluas di Kalimantan Timur, oleh para ahli Covid 19 ini diperkirakan berdampak sampai tahun 2023, dan seluruh sektor pembangunan terdampak, sehingga diperlukan antisipasi dan upaya-upaya recovery dampak Covid 19 tersebut, dengan Program/Kegiatan :

1. Meningkatkan kapasitas produksi tanaman pangan dan hortikultura
2. Menumbuhkan agribisnis sehingga dapat berperan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah
3. Penyediaan cadangan pangan pemerintah
4. Percepatan tanam padi dan palawija
5. Bantuan saprodi dan perbaikan prasarana pertanian
6. Peningkatan kapasitas penyuluh

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perubahan Perangkat Daerah

Hubungan yang selaras antara RENJA PD dan RENSTRA, maka tujuan dan sasaran RENJA PD Tahun 2023 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.

Tujuan dan Sasaran RENJA Perubahan PD Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur yaitu Meningkatnya Kontribusi Pertanian Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Ekonomi Daerah dengan Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Meningkatkan

Fokus Utama RENJAPD Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 di Sektor Pertanian

yaitu peningkatan produksi padi dengan target : 289.846 Ton dan peningkatan produksi tanaman hortikultura dengan target : 292.383 Ton.

Proyek Strategis RENJA PD Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yaitu :

- Pengembangan sentra kawasan food estate, komoditi padi berupa bantuan benih, pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian lainnya
- Pengembangan sentra kawasan hortikultura berupa bantuan benih, , pestisida, pupuk, alsintan dan sarana pendukung pertanian lainnya
- Perbaikan prasarana pertanian berupa pembuatan/peningkatan jalan usaha tani, pembuatan/perbaikan saluran irigasi ditingkat usaha tani
- Pelatihan pasca panen, pengolahan hasil, pengemasan dan pemasaran
- Peningkatan peran petugas penyuluh pertanian, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT) dan pengawas benih tanaman (PBT) terhadap peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 diSektor Kesehatan yaitu Pengentasan Stunting, bentuk dukungan yang dilakukan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timuryaitu :

- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dengan Pengembangan Padi Nutrizink
- Peningkatan ketersediaan dan penanganan daerah rawan pangan dengan penyusunan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)
- Pengembangan pangan lokal melalui promosi pengembangan pangan lokal, pembinaan dan pengembangan pemanfaatan pekarangan serta penyuluhan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal
- Pengawasan mutu pangan segar melalui pengawasan mutu dan keamanan pangan segar.

Untuk sektor Gender yaitu meningkatkan perananperempuan disektor pertanian bentuk dukungan yang dilakukan Dinas Pangan, Tanaman dan Hortikultura Prov. Kaltim adalah :

- Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
- Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok tani

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai tugas pokok dan fungsi **"*Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan*"** dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka diimplementasikan kedalam 3 (tiga) kelompok program yaitu :

1. Program yang terkait dengan pelayanan administrasi perkantoran/pelayanan publik sebanyak 1 (satu) program, dengan jumlah kegiatan sebanyak 8 (delapan) kegiatan.
2. Program Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan sebanyak 3 (tiga) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 6 (enam) kegiatan.
3. Program Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebanyak 4 (empat) program denganjumlah kegiatan sebanyak 8 (delapan) kegiatan.

Program dan Kegiatan pembangunan dibidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembangunan dibidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura selama 5 tahun kedepan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nonemklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun 2023 dijabarkan secara rinci sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasif

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :
   A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
   A. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
      - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
      - Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
   B. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
      - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
      - Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
   C. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
      - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
   A. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
      - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
   B. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi

- Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

A. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
- Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

A. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

- Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

B. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
- Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih

C. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi

- Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
- Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

A. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian

- Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian

- Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
- Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian

3. Program Penyuluhan Pertanian
   A. Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
      - Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
   B. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
      - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
      - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
   C. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
      - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
      - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
   A. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
      - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
      - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Adapun total kebutuhan dana/pagu indikatif Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura beserta 4 (empat) Unit Pelaksana Dinas Daerah (UPTD) pada tahun 2023 sebanyak Rp. 182.075.399.031,- (Seratus Delapan Belas Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh satu Rupiah) yang terinci sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pagu Indikatif Rencana Kerja Perubahan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD Tahun 2023

NO.	UNIT KERJA	PAGU
	TOTAL DINAS DAN UPTD	**182.075.399.031,-**
1	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	104.677.545.966,-
2	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.006.173.210,-
3	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	7.105.559.620,-
4	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	49.693.078.386,-
5	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	17.593.041.819,-

Program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Perubhan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, telah sesuai dengan Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P RKPD) tahun 2023, yang terinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Lembar 1 dari 6

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
	TOTAL URUSAN BIDANG PANGAN + PERTANIAN					**182,075,399,031**
2:09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**					**116,979,135,281**
1:00	**Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**					**104,677,545,996**
2:09:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Biodang Pertanian**	**Skor**		**82**	**54,187,775,546**
2.09.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**		**24**	**1,291,338,500**
2.09.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	821,117,000
2.09.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	4,400,000
2.09.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	4,400,000
2.09.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	4,400,000
2.09.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	4,400,000
2.09.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu ,	12	93,960,000
2.09.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	358,661,500
2.09.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bulan**		**12**	**42,947,832,566**
2.09.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	231	42,308,009,566
2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	495,000,000
2.09.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	133,750,000
2.09.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	3,165,000
2.09.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	18	7,908,000
2.09.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Laporan**		**1**	**51,830,000**
2.09.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	2,880,000
2.09.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	48,950,000
2.09.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai**	**Orang**		**181**	**421,596,600**
2.09.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	294,996,600
2.09.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	15	126,600,000
2.09.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bulan**		**12**	**1,494,628,400**
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	29,426,100
2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	13,440,000
2.09.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	12	23,270,400
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	1,271,352,000

Lembar 2 dari 6

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
2.09.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	157,139,900
2.09.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah**	**Unit**		**1**	**3,940,118,300**
2.09.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	3,352,310,000
2.09.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	86	587,808,300
2.09.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**		**12**	**3,101,688,680**
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	38,004,000
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	460,621,400
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	2,603,063,280
2.09.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**		**12**	**938,742,500**
2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	144,496,000
2.09.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	28	324,986,000
2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	148,660,500
2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	268,600,000
2.09.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	52,000,000
2:09:03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi**	**Skor**		**91.0**	**4,355,250,400**
		Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan	**Skor**		**97.5**	
2.09.03.1.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Jumlah Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan**	**Laporan**		**12**	**707,426,200**
2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	232,327,000
2.09.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	146,662,000
2.09.03.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	328,437,200
2.09.03.1.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**	**Cadangan Pangan yang tersedia**	**Ton**		**210**	**1,592,311,200**
2.09.03.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	170,421,200
2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	1,251,270,000
2.09.03.1.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Ton	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	210	170,620,000
2.09.03.1.04	**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi**	**Jumlah media promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal**	**Media**		**1**	**2,055,513,000**
2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal berbasis sumber daya lokal	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	899,242,300
2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	588,758,400
2.09.03.1.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	567,512,300
2:09:04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Jumlah Desa Rawan Pangan**	**Desa**		**50**	**1,142,493,850**
2.09.04.1.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**	**Laporan FSVA**	**Laporan**		**3**	**252,139,600**
2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	252,139,600

Lembar 3 dari 6

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
2.09.04.1.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	**Jumlah desa rawan pangan yang ditangani**	**Desa**		**10**	**890,354,250**
2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	529,759,500
2.09.04.1.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	360,594,750
2:09:05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan aman di kalimantan timur**	**Persentase**		**92**	**1,194,487,000**
2.09.05.1.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah registrasi, sertifikasi dan rekomendasi keamanan pangan segar**	**Dokumen**		**17**	**1,194,487,000**
2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi yang Dibina	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	523,816,200
2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	11	124,138,400
2.09.05.1.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	117,379,500
2.09.05.1.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	104,558,900
2.09.05.1.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	324,594,000
1:00	**UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura**					**49,693,078,386**
2:09:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian**	**Skor**		**82**	**38,338,337,186**
2.09.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bulan**		**12**	**115,680,000**
2.09.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	115,680,000
2.09.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai**	**Orang**		**136**	**295,685,200**
2.09.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	60,785,200
2.09.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	15	234,900,000
2.09.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bulan**		**12**	**243,031,156**
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	9,597,800
2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	10,652,700
2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	2,496,000
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	12	220,284,656
2.09.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah**	**Unit**		**5**	**34,863,763,390**
2.09.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	214,123,900
2.09.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	30,446,620,290
2.09.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	4,203,019,200
2.09.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**		**12**	**2,515,069,440**
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	3,000,000
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	170,886,000
2.09.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	9,750,000
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	2,331,433,440
2.09.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**		**12**	**305,108,000**

Lembar 4 dari 6

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
2.09.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	6	132,529,000
2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	30,579,000
2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	142,000,000
1:00	**UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian**					**17,593,041,819**
2:09:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian**	**Skor**		**82**	**12,147,941,419**
2.09.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bulan**		**12**	**88,560,000**
2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	88,560,000
2.09.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bulan**		**12**	**269,207,000**
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	40,607,000
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	228,600,000
2.09.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah**	**Unit**		**5**	**8,136,464,963**
2.09.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	6,730,472,500
2.09.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	1,405,992,463
2.09.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**		**12**	**1,815,988,776**
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	19,913,000
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	169,438,000
2.09.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	71,710,176
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	1,554,927,600
2.09.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**		**12**	**1,837,720,680**
2.09.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	7	130,987,000
2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	1,706,733,680
1:00	**UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura**					**3,006,173,210**
2:09:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian**	**Skor**		**82**	**2,104,044,460**
2.09.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bulan**		**12**	**81,000,000**
2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	81,000,000
2.09.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai**	**Orang**		**24**	**128,520,000**
2.09.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	7	128,520,000
2.09.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bulan**		**12**	**163,393,200**
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	2,858,700
2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	33,331,700
2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	15,602,800
2.09.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	2,400,000
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	6	109,200,000
2.09.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah**	**Unit**		**31**	**137,766,720**

Lembar 5 dari 6

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
2.09.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	28	137,766,720
2.09.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**		**12**	**1,156,042,640**
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	3,480,400
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	157,492,000
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	995,070,240
2.09.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**	**bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah ,**	**12**	**437,321,900**
2.09.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasinal atau Lapngan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	38	66,614,000
2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	25,017,600
2.09.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	345,690,300
1:00	**UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura**					**7,105,559,620**
2:09:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian**	**Skor**		**82**	**3,508,805,420**
2.09.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bulan**		**12**	**78,120,000**
2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	78,120,000
2.09.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai**	**Orang**		**85**	**191,807,500**
2.09.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	191,807,500
2.09.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bulan**		**12**	**1,208,539,200**
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	30,288,700
2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	370,139,300
2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	11,112,000
2.09.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peratuiran Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	1,939,200
2.09.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	782,100,000
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	12,960,000
2.09.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**		**12**	**1,682,558,400**
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	5,000,000
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	137,497,200
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	1,540,061,200
2.09.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**		**12**	**347,780,320**
2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	85,956,000
2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	261,824,320
3:27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**					**65,096,263,750**
1:00	**Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**					**43,797,539,200**
3:27:02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**1. Jumlah produksi padi**	**Ton**		**289,846**	**40,995,420,630**
		2. Jumlah produksi tanaman hortikultura	**Ton**		**292,383**	
3.27.02.1.01	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**1. Peningkatan Produktivitas Padi**	**Ton**		**3.7**	**40,995,420,630**
		2. Produktivitas Tanaman Hortikultura	**Ton**		**22.37**	

Lembar 6 dari 6

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	39,441,333,380
3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Petanian	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	1,554,087,250
3:27:03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**1. Jumlah luas lahan kel. penerima bantuan tanaman pangan**	**Ha**		**8,500**	**2,802,118,570**
		2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Prasarana Pertanian Hortikultura	**Unit**		**7**	
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**1. Jumlah kel. Tani yang menerima bantuan tanaman pangan**	**Kel. Tani**		**228**	**2,802,118,570**
		2. Jumlah kel. Tani yang menerima fasilitasi hortikultura	**Kel. tani**		**7**	
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pembangunan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	798,431,500
3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	1,499,792,370
3.27.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	137,173,100
3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	133,321,600
3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	233,400,000
1:00	**UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura**					**11,354,741,200**
3:27:02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase pemenuhan kebutuhan benih sumber TPH yang bersertifikat**	**Persentase**		**82**	**5,517,149,200**
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**Luas lahan yang menggunakan benih bersertifikat**	**Ha**		**940**	**5,517,149,200**
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	4,193,354,500
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	1,323,794,700
3:27:03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah yang dilakukan Renovasi**	**Unit**		1	5,837,592,000
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**Jumlah prasarana yang di renovasi**	**Unit**		1	5,837,592,000
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	16	5,837,592,000
1:00	**UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian**					**5,445,100,400**
3:27:07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**1. Jumlah aparatur, non aparatur yang dibina**	**Orang**		**441**	**5,445,100,400**
		2. Jumlah kelembagaan petani berbasis koorporasi yang dibina	**Lembaga**		**4**	
3.27.07.1.01	**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah penyuluh yang mendapat pembinaan dan diklat**	**Orang**		**456**	**1,222,086,850**
3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	Orang	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	150	1,222,086,850
3.27.07.1.02	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian**	**Orang**		**291**	**3,291,085,750**
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Disemenisasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	2,727,317,100
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	7	563,768,650
3.27.07.1.03	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan**	**Unit**		**6**	**931,927,800**
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	158,627,600
3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	773,300,200
1:00	**UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura**					**902,128,750**

Lembar 6 dari 7

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
3:27:02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang diidentifikasi**	**Unit**		**249**	**902,128,750**
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**Jumlah produsen benih tanaman pangan dan hortikultura yang diterbitkan sertifikat kompetensi/rekomendasi**	**Sertifikat**		**78**	**848,448,750**
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	85	355,768,000
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	251,730,950
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	240,949,800
3.27.02.1.03	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**	**Jumlah varietas daerah yang di identifikasi**	**Varietas**		**3**	**53,680,000**
3.27.02.1.03.02	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	VUB	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	53,680,000
1:00	**UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura**					**3,596,754,200**
3:27:02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Pengawasan Jumlah Pestisida dan Pupuk**	**Kali**		**50**	**485,928,400**
3.27.02.1.01	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**Jumlah pupuk dan pestisida yang diawasi**	**Jenis**		**20**	**267,085,000**
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	267,085,000
3.27.02.1.03	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**	**Jumlah pos pelayanan agens hayati (PPAH) yang dikembangkan**	**Kali**		**40**	**218,843,400**
3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	218,843,400
3:27:03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah bangunan yang dibangun/pelihara**	**Unit**		1	2,199,998,800
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**Jumlah luasan bangunan LPHP yang pelihara**	**M2**		10,000	2,199,998,800
3.27.03.1.01.07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang dibangun dan dipelihara	Unit	Bru, Kbr, Kkr, Ktm, Psr, Ppu, Bpn, Btg, Smd, Mhl, Luar Provinsi	1	2,199,998,800
3:27:05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Luas penanganan OPT dan DPI**	**Ha**		**30,000**	**910,827,000**
3.27.05.1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**Luas pengendalian OPT dan penanganan DPI**	**Ha**		**1,500**	**910,827,000**
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	6,150	751,587,000
3.27.05.1.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1,000	159,240,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dalam mencapai sasaran pembangunan di Bidang Pangan, Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dilakukan melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan Daerah dan Nasional. Kegiatan yang tercakup dalam program - program tersebut, merupakan kegiatan operasional lingkup Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur yang harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja setiap tahun dengan memperhatikan masalah, tantangan dan peluang serta isu – isu strategis yang dapat mempengaruhi pembangunan dan arah pembangunan serta pengembangannya.

Pendanaan Rancangan Akhir Perubahan RENJA PD Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 bersumber pada APBD Provinsi Kalimantan Timur untuk pembangunan di bidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura di provinsi Kalimantan timur yang terinci dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rencana Pagu Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Timur

Perangkat Daerah :Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 1 dari 15

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
	TOTAL URUSAN BIDANG PANGAN + PERTANIAN					**182.075.399.031**			**179.995.498.196**
02:09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**					**116.979.135.281**			**113.647.411.946**
01:00	**Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**					**104.677.545.996**			**102.965.766.761**
02:09:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Biodang Pertanian**	**Skor**		**82**	**54.187.775.546**		**82**	**51.224.173.811**
2.09.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**		**24**	**1.291.338.500**		**24**	**1.291.338.500**
2.09.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	821.117.000		5	821.117.000
2.09.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	4.400.000		1	4.400.000
2.09.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	4.400.000		1	4.400.000
2.09.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	4.400.000		1	4.400.000
2.09.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	4.400.000		1	4.400.000
2.09.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu ,	12	93.960.000		12	93.960.000
2.09.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	358.661.500		3	358.661.500

Perangkat Daerah :Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 2 dari 15

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
2.09.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bulan**		**12**	**42.947.832.566**		**12**	**40.121.439.791**
2.09.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	231	42.308.009.566		231	39.481.616.791
2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	495.000.000		1	495.000.000
2.09.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	133.750.000		1	133.750.000
2.09.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	3.165.000		3	3.165.000
2.09.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	18	7.908.000		18	7.908.000
2.09.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Laporan**		**1**	**51.830.000**		**1**	**51.830.000**
2.09.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	2.880.000		1	2.880.000
2.09.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	48.950.000		1	48.950.000
2.09.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai**	**Orang**		**181**	**421.596.600**		**181**	**421.596.600**
2.09.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	294.996.600		1	294.996.600
2.09.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	15	126.600.000		15	126.600.000

Perangkat Daerah :Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 3 dari 15

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
2.09.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bulan**		**12**	**1.494.628.400**		**12**	**1.494.628.400**
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	29.426.100		1	29.426.100
2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	13.440.000		4	13.440.000
2.09.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	12	23.270.400		12	23.270.400
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	1.271.352.000		5	1.271.352.000
2.09.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	157.139.900		1	157.139.900
2.09.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah**	**Unit**		**1**	**3.940.118.300**		**1**	**3.940.118.300**
2.09.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	3.352.310.000		3	3.352.310.000
2.09.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	86	587.808.300		86	587.808.300
2.09.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**		**12**	**3.101.688.680**		**12**	**2.964.479.720**
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	38.004.000		1	38.004.000
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	460.621.400		1	460.621.400
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	2.603.063.280		1	2.465.854.320

Perangkat Daerah : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 4 dari 15

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
2.09.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**		**12**	**938.742.500**		**12**	**938.742.500**
2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	144.496.000		2	144.496.000
2.09.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	28	324.986.000		28	324.986.000
2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	148.660.500		3	148.660.500
2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	268.600.000		1	268.600.000
2.09.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	52.000.000		4	52.000.000
02:09:03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi**	**Skor**		**91,0**	**4.355.250.400**		**91,0**	**4.355.250.400**
		Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan	**Skor**		**97,5**			**97,5**	
2.09.03.1.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Jumlah Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan**	**Laporan**		**12**	**707.426.200**		**12**	**707.426.200**
2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	232.327.000		2	232.327.000
2.09.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	146.662.000		1	146.662.000
2.09.03.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	328.437.200		1	328.437.200
2.09.03.1.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**	**Cadangan Pangan yang tersedia**	**Ton**		**210**	**1.592.311.200**		**210**	**1.592.311.200**
2.09.03.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	170.421.200		1	170.421.200

Perangkat Daerah : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 5 dari 15

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	1.251.270.000		2	1.251.270.000
2.09.03.1.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Ton	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	210	170.620.000		210	170.620.000
2.09.03.1.04	**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi**	**Jumlah media promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal**	**Media**		**1**	**2.055.513.000**		**1**	**2.055.513.000**
2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal berbasis sumber daya lokal	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	899.242.300		1	899.242.300
2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	588.758.400		1	588.758.400
2.09.03.1.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	567.512.300		1	567.512.300
02:09:04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Jumlah Desa Rawan Pangan**	**Desa**		**50**	**1.142.493.850**		**50**	**1.142.493.850**
2.09.04.1.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**	**Laporan FSVA**	**Laporan**		**3**	**252.139.600**		**3**	**252.139.600**
2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	252.139.600		4	252.139.600
2.09.04.1.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	**Jumlah desa rawan pangan yang ditangani**	**Desa**		**10**	**890.354.250**		**10**	**890.354.250**
2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	529.759.500		1	529.759.500
2.09.04.1.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	360.594.750		1	360.594.750
02:09:05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan aman di kalimantan timur**	**Persentase**		**92**	**1.194.487.000**		**92**	**1.194.487.000**
2.09.05.1.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah registrasi, sertifikasi dan rekomendasi keamanan pangan segar**	**Dokumen**		**17**	**1.194.487.000**		**17**	**1.194.487.000**

Perangkat Daerah :Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 6 dari 15

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi yang Dibina	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	523.816.200		1	523.816.200
2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	11	124.138.400		11	124.138.400
2.09.05.1.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	117.379.500		1	117.379.500
2.09.05.1.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	104.558.900		1	104.558.900
2.09.05.1.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	324.594.000		1	324.594.000
03:27:02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**1. Jumlah produksi padi**	**Ton**		**289.846**	**40.995.420.630**		**289.846**	**42.247.243.130**
		2. Jumlah produksi tanaman hortikultura	**Ton**		**292.383**			**292.383**	
3.27.02.1.01	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**1. Peningkatan Produktivitas Padi**	**Ton**		**3,7**	**40.995.420.630**		**3,7**	**42.247.243.130**
		2. Produktivitas Tanaman Hortikultura	**Ton**		**22,37**			**22,37**	
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	39.441.333.380		2	40.693.155.880
3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Petanian	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	1.554.087.250		2	1.554.087.250
03:27:03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**1. Jumlah luas lahan kel. penerima bantuan tanaman pangan**	**Ha**		**8.500**	**2.802.118.570**		**8.500**	**2.802.118.570**
		2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Prasarana Pertanian Hortikultura	**Unit**		**7**			**7**	

Perangkat Daerah : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**1. Jumlah kel. Tani yang menerima bantuan tanaman pangan**	**Kel. Tani**		**228**	**2.802.118.570**		**228**	**2.802.118.570**
		2. Jumlah kel. Tani yang menerima fasilitasi hortikultura	**Kel. tani**		**7**			**7**	
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pembangunan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	798.431.500		2	798.431.500
3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	1.499.792.370		2	1.499.792.370
3.27.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	137.173.100		2	137.173.100
3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	133.321.600		2	133.321.600
3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	233.400.000		2	233.400.000

UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 7 dari 15

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
01:00	**UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura**					**49.693.078.386**			**49.562.562.546**
02:09:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian**	**Skor**		**82**	**38.338.337.186**		**82**	**38.207.821.346**
2.09.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bulan**		**12**	**115.680.000**		**12**	**115.680.000**
2.09.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	115.680.000		4	115.680.000
2.09.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai**	**Orang**		**136**	**295.685.200**		**136**	**295.685.200**
2.09.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	60.785.200		1	60.785.200
2.09.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	15	234.900.000		15	234.900.000
2.09.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bulan**		**12**	**243.031.156**		**12**	**243.031.156**
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	9.597.800		1	9.597.800
2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	10.652.700		1	10.652.700
2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	2.496.000		1	2.496.000
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	12	220.284.656		12	220.284.656
2.09.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah**	**Unit**		**5**	**34.863.763.390**		**5**	**34.863.763.390**
2.09.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	214.123.900		5	214.123.900
2.09.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	30.446.620.290		4	30.446.620.290
2.09.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	4.203.019.200		5	4.203.019.200

UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 8 dari 15

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
2.09.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**		**12**	**2.515.069.440**		**12**	**2.384.553.600**
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	3.000.000		1	3.000.000
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	170.886.000		1	170.886.000
2.09.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	9.750.000		1	9.750.000
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	2.331.433.440		1	2.200.917.600
2.09.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**		**12**	**305.108.000**		**12**	**305.108.000**
2.09.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	6	132.529.000		6	132.529.000
2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	30.579.000		3	30.579.000
2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	142.000.000		1	142.000.000
03:27:02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase pemenuhan kebutuhan benih sumber TPH yang bersertifikat**	**Persentase**		**82**	**5.517.149.200**		**82**	**5.517.149.200**
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**Luas lahan yang menggunakan benih bersertifikat**	**Ha**		**940**	**5.517.149.200**		**940**	**5.517.149.200**
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	4.193.354.500		1	4.193.354.500
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	1.323.794.700		1	1.323.794.700
03:27:03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah yang dilakukan Renovasi**	**Unit**		1	5.837.592.000		1	5.837.592.000
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**Jumlah prasarana yang di renovasi**	**Unit**		1	5.837.592.000		1	5.837.592.000
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	16	5.837.592.000		16	5.837.592.000

UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Lembar 9 dari 15

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
01:00	**UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian**					**17.593.041.819**			**17.509.377.819**
02:09:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian**	**Skor**		**82**	**12.147.941.419**		**82**	**12.064.277.419**
2.09.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bulan**		**12**	**88.560.000**		**12**	**88.560.000**
2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	88.560.000		1	88.560.000
2.09.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bulan**		**12**	**269.207.000**		**12**	**269.207.000**
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	40.607.000		1	40.607.000
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	228.600.000		5	228.600.000
2.09.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah**	**Unit**		**5**	**8.136.464.963**		**5**	**8.136.464.963**
2.09.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	6.730.472.500		2	6.730.472.500
2.09.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	1.405.992.463		5	1.405.992.463
2.09.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**		**12**	**1.815.988.776**		**12**	**1.732.324.776**
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	19.913.000		1	19.913.000
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	169.438.000		1	169.438.000
2.09.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	71.710.176		1	71.710.176
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	1.554.927.600		1	1.471.263.600
2.09.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**		**12**	**1.837.720.680**		**12**	**1.837.720.680**

UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Lembar 10 dari 15

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
2.09.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	7	130.987.000		7	130.987.000
2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	1.706.733.680		3	1.706.733.680
03:27:07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**1. Jumlah aparatur, non aparatur yang dibina**	**Orang**		**441**	**5.445.100.400**		**441**	**5.445.100.400**
		2. Jumlah kelembagaan petani berbasis koorporasi yang dibina	**Lembaga**		**4**			**4**	
3.27.07.1.01	**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah penyuluh yang mendapat pembinaan dan diklat**	**Orang**		**456**	**1.222.086.850**		**456**	**1.222.086.850**
3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	Orang	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	150	1.222.086.850		150	1.222.086.850
3.27.07.1.02	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian**	**Orang**		**291**	**3.291.085.750**		**291**	**3.291.085.750**
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Disemenisasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	2.727.317.100		1	2.727.317.100
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	7	563.768.650		7	563.768.650
3.27.07.1.03	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan**	**Unit**		**6**	**931.927.800**		**6**	**931.927.800**
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	158.627.600		1	158.627.600
3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	773.300.200		3	773.300.200

UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 11 dari 15

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
01:00	**UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura**					**3.006.173.210**			**2.945.935.130**
02:09:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian**	**Skor**		**82**	**2.104.044.460**		**82**	**2.043.806.380**
2.09.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bulan**		**12**	**81.000.000**		**12**	**81.000.000**
2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	81.000.000		1	81.000.000
2.09.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai**	**Orang**		**24**	**128.520.000**		**24**	**128.520.000**
2.09.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	7	128.520.000		7	128.520.000
2.09.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bulan**		**12**	**163.393.200**		**12**	**163.393.200**
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	2.858.700		1	2.858.700
2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	33.331.700		1	33.331.700
2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	15.602.800		3	15.602.800
2.09.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	2.400.000		4	2.400.000
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	6	109.200.000		6	109.200.000
2.09.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah**	**Unit**		**31**	**137.766.720**		**31**	**137.766.720**
2.09.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	28	137.766.720		28	137.766.720
2.09.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**		**12**	**1.156.042.640**		**12**	**1.095.804.560**

UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 12 dari 15

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	3.480.400		1	3.480.400
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	157.492.000		1	157.492.000
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	995.070.240		1	934.832.160
2.09.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**	**bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah ,**	**12**	**437.321.900**		**12**	**437.321.900**
2.09.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasinal atau Lapngan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	38	66.614.000		38	66.614.000
2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	25.017.600		5	25.017.600
2.09.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	345.690.300		1	345.690.300
03:27:02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang diidentifikasi**	**Unit**		**249**	**902.128.750**		**249**	**902.128.750**
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**Jumlah produsen benih tanaman pangan dan hortikultura yang diterbitkan sertifikat kompetensi/rekomendasi**	**Sertifikat**		**78**	**848.448.750**		**78**	**848.448.750**
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	85	355.768.000		85	355.768.000
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	251.730.950		1	251.730.950
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	240.949.800		1	240.949.800
3.27.02.1.03	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**	**Jumlah varietas daerah yang di identifikasi**	**Varietas**		**3**	**53.680.000**		**3**	**53.680.000**
3.27.02.1.03.02	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	VUB	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	53.680.000		1	53.680.000

UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 14 dari 15

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
01:00	**UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura**					**7.105.559.620**			**7.011.855.940**
02:09:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian**	**Skor**		**82**	**3.508.805.420**		**82**	**3.415.101.740**
2.09.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bulan**		**12**	**78.120.000**		**12**	**78.120.000**
2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	78.120.000		1	78.120.000
2.09.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai**	**Orang**		**85**	**191.807.500**		**85**	**191.807.500**
2.09.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	191.807.500		1	191.807.500
2.09.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bulan**		**12**	**1.208.539.200**		**12**	**1.208.539.200**
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	30.288.700		1	30.288.700
2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	370.139.300		1	370.139.300
2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	11.112.000		4	11.112.000
2.09.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peratuiran Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	1.939.200		5	1.939.200
2.09.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	782.100.000		4	782.100.000
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	12.960.000		3	12.960.000
2.09.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**		**12**	**1.682.558.400**		**12**	**1.588.854.720**
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	5.000.000		1	5.000.000
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	137.497.200		1	137.497.200

UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 15 dari 15

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	1.540.061.200		1	1.446.357.520
2.09.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bulan**		**12**	**347.780.320**		**12**	**347.780.320**
2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	85.956.000		1	85.956.000
2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	261.824.320		1	261.824.320
03:27:02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Pengawasan Jumlah Pestisida dan Pupuk**	**Kali**		**50**	**485.928.400**		**50**	**485.928.400**
3.27.02.1.01	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**Jumlah pupuk dan pestisida yang diawasi**	**Jenis**		**20**	**267.085.000**		**20**	**267.085.000**
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	267.085.000		1	267.085.000
3.27.02.1.03	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**	**Jumlah pos pelayanan agens hayati (PPAH) yang dikembangkan**	**Kali**		**40**	**218.843.400**		**40**	**218.843.400**
3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	218.843.400		1	218.843.400
03:27:03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah bangunan yang dibangun/pelihara**	**Unit**		1	2.199.998.800		1	2.199.998.800
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**Jumlah luasan bangunan LPHP yang pelihara**	**M2**		10.000	2.199.998.800		10.000	2.199.998.800
3.27.03.1.01.07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang dibangun dan dipelihara	Unit	Bru, Kbr, Kkr, Ktm, Psr, Ppu, Bpn, Btg, Smd, Mhl, Luar Provinsi	1	2.199.998.800		1	2.199.998.800
03:27:05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Luas penanganan OPT dan DPI**	**Ha**		**30.000**	**910.827.000**		**30.000**	**910.827.000**

UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
3.27.05.1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**Luas pengendalian OPT dan penanganan DPI**	**Ha**		**1.500**	**910.827.000**		**1.500**	**910.827.000**
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	6.150	751.587.000		6.150	751.587.000
3.27.05.1.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1.000	159.240.000		1.000	159.240.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (RENJA P) Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Perubahan RENSTRA Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023. RENJA Perubahan PD Tahun 2023 juga merupakan Penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, sehingga Pembangunan di Bidang Pangan, Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat tercapai sesuai dengan tujuan, sasaran dan target prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P RPJMD) tahun 2023 yaitu Kontribusi Lapangan Usaha Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap PDRB sebesar 0,65%.

Dalam rangka menjamin terlaksananya Program dan Kegiatan, serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RENJA Perubahan PD Tahun 2023 dengan efektif dan efisien.
2. RENJA Perubahan PD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2023, dimana Rancangan Akhir RENJA PD Tahun 2023 dijabarkan lebih lanjut dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P DPA) Tahun 2023.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan, seluruh aparatur Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Perubahan PD Tahun 2023.
4. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif baik sebagai subyek maupun sebagai obyek dalam pembangunan pangan, tanaman pangan dan hortikultura dengan melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Rancangan Akhir Perubahan RENJA Tahun 2023

5. Tata cara penyusunan RENJA Perubahan PD Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
6. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan evaluasi dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun, penjabaran Renstra perangkat daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan memberikan gambaran tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran, menggambarkan tujuan sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tupoksinya, mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah.

Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup berawal dari Rencana Startegis Dinas Lingkugan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Kebutuhan serta ketersediaan anggaran, selanjutnya dirumuskan isu-isu penting dan diwujudkan ke dalam kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur sebagai pedoman dan acuan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Lingkungan Hidup. Dokumen-dokumen perencanaan diatas sebagai pedoman Dinas Lingkungan Hidup untuk menghasilkan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang akan ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

1.2 . Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah
16. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
18. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No, 18 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2005 -2025
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023;
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
29. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 61 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
30. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 050/1390/B.PPEPD-Bapp/2022, tanggal 2 Maret 2022 tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) menjadi Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2023

1.3 . Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program,kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2023 dan perencanaan program,kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RenjaP PD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini adalah

1. Menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 di bidang Lingkungan Hidup;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
3. Sebagai acuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023

4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 meliputi :

BAB I **PENDAHULUAN,** berisi tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,** berisi tentang : Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, berisi tentang :Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

BAB V **PENUTUP**

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur yang berfungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 sebesar Rp.32.285.035.000,- (Tiga puluh dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah). Realisasi belanja pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.25.113.481.763,- (Dua puluh lima miliar seratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) atau 77,79%

Pada tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Rencana Kerja antara lain :

Berikut penjelasan atas capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatanDinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Indikator Kinerja	:	Skor Kepuasan terhadap pelayanan urusan bidang lingkungan hidup
Target Kinerja	:	85,30
Realisasi Kinerja	:	84,08 Kategori Mutu Layanan: B (Baik) Periode survei dilakukan pada 1 Januari s/d 30September 2021 dengan jumlah responden sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang dengan rincian responden laki-laki sebanyak 51 (lima puluh satu) orang dan responden perempuan sebanyak 20 (dua puluh) orang. Jika dirincikan lagi berdasarkan tingkat pendidikan responden berjumlah 11 (sebelas) orang D3, 47 (empat puluh tujuh) orang S1, dan 13 (tiga belas) orang S2.
Capaian Kinerja (%)	:	98,57
Capaian Fisik (%)	:	80,78
Pagu Anggaran (Rp)	:	20.304.935.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	15.855.730.880,00
Capaian Anggaran (%)	:	78,09
Rekomendasi	:	Akan melakukan peningkatan pelayanan padaDinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur pada tahun selanjutnya.

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah

Indikator Kinerja	:	Persentase perencanaan, penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan
Target Kinerja	:	100%
Realisasi Kinerja	:	100%
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	72,94
Pagu Anggaran (Rp)	:	1.000.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	615.609.540,00
Capaian Anggaran (%)	:	61,56
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	:	Jumlah dokumen perencanaan
Target Kinerja	:	6 Dokumen
Realisasi Kinerja	:	6 Dokumen Terdiri dari Dokumen Reviu Renstra 2019 – 2023, Dokumen Renja Tahun2022, Forum Perangkat Daerah, Koordinasi dan Sinkronasi Percencanaan Program Urusan Lingkungan Hidup Kalimantan Timur, dan Rakorda UrusanLingkungan Hidup.
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	90,55
Pagu Anggaran (Rp)	:	500.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	338.546.540,00
Capaian Anggaran (%)	:	67,71
Kendala/Permasalahan	:	1. Penggunaan Aplikasi SIPD masihperlu penyesuaian dengan format dokumen perencanaan. 2. Ada beberapa indikator kinerja dalam dokumen perencanaan masih belum sesuai dengan kondisi pencapaian kinerja, sehingga pengukuran dan perhitungan capaian kinerja mengalami kesulitan. 3. Mekanisme sinkronisasi dokumenperencanaan dengan SIPD belum diatur dengan baik, sehingga terjadi perbedaan data antara dokumen perencanaan dengan SIPD.
Rekomendasi	:	1. MengusulkanpenyempurnaanAplikasi SIPD agar disesuaikan dengan format dokumenperencanaan. 2. Mengusulkan perubahan indikatorkinerja ke Bappeda. 3. Mendiskusikan dengan Bappeda tentang mekanisme sinkronisasi dokumen perencanaan dengan SIPD.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Kinerja	:	Jumlah dokumen RKA sub kegiatan SKPD
Target Kinerja	:	56 Dokumen
Realisasi Kinerja	:	56 Dokumen
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	95,62
Pagu Anggaran (Rp)	:	100.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	40.683.000,00
Capaian Anggaran (%)	:	40,68
Kendala/Permasalahan	:	Pelaksanaan *entry* penganggaran terkendala dengan pilihan SSH dan SBU tidak tersedia di aplikasi SIPD sehingga menyulitkan pelaksanaan kegaitan/sub kegiatan.
Rekomendasi	:	Mengusulkan SSH dan SBU ke BPKAD untuk disiapkan pada SIPD.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator Kinerja	:	Jumlah dokumen RKA perubahan sub kegiatan SKPD
Target Kinerja	:	1 Dokumen
Realisasi Kinerja	:	1 Dokumen
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	35,61
Pagu Anggaran (Rp)	:	50.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	6.090.000,00
Capaian Anggaran (%)	:	12,18
Kendala/Permasalahan	:	1. Keputusan terhadap usulanpergeseran anggaran dari BPKAD terlalu lama, sehingga menyulitkan pelaksanaan kegiatan/subkegiatan. 2. Ada beberapa usulan pergeserananggaran tidak disetujui. 3. Perubahan anggaran sub kegiatan tidak dapat dilakukan karena tidakdisetujui Perubahan APBD 2021. 4. Kepastian batalnya rencana refokusing anggaran pada bulan Oktober 2021 menyebabkankendala penyelesaian kegiatan/sub kegiatan karena waktu yang terlalusingkat.
Rekomendasi	:	1. Mengusulkan mekanisme percepatan keputusan usulan pergeseran anggaran ke BPKAD. 2. Segera menyesuaikan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan berdasarkan dokumen yang ada.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Kinerja	:	Jumlah dokumen rincian belanja sub kegiatan DPA SKPD
Target Kinerja	:	56 Dokumen
Realisasi Kinerja	:	56 Dokumen
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	93.92
Pagu Anggaran (Rp)	:	100.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	71.278.100,00
Capaian Anggaran (%)	:	71,28
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Indikator Kinerja	:	Jumlah dokumen DPA perubahan SKPD
Target Kinerja	:	1 Dokumen
Realisasi Kinerja	:	0 Dokumen

Capaian Kinerja (%)	:	0,00
Capaian Fisik (%)	:	41,80
Pagu Anggaran (Rp)	:	50.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	18.200.000,00
Capaian Anggaran (%)	:	36,40
Kendala/Permasalahan	:	Usulan perubahan anggaran sub kegiatan tidak dapat diproses.
Rekomendasi	:	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan

  Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Kinerja	:	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD
Target Kinerja	:	4 Laporan
Realisasi Kinerja	:	6 Laporan
		Terdiri dari Laporan Evaluasi Renja Triwulan I – IV Tahun 2021, LKjIP Tahun 2020, dan DIKPLH Tahun 2020.
Capaian Kinerja (%)	:	150,00
Capaian Fisik (%)	:	63,46
Pagu Anggaran (Rp)	:	100.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	54.261.100,00
Capaian Anggaran (%)	:	54,26
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	:	Jumlah evalusasi kinerja perangkat daerah
Target Kinerja	:	12 Laporan
Realisasi Kinerja	:	10 Laporan
		Terdiri dari hasil notulensi kegiatan dimana terdapat 3 (tiga) kegiatan padabulan Februari, 1 (satu) kegiatan padabulan Maret, 2 (dua) kegiatanpadabulan April, 3 (tiga) kegiatan pada bulan Juni, 3 (tiga) kegiatan pada bulan Juli, 2 (dua) kegiatan padabulan Agustus, 4 (empat) kegiatan pada bulan Oktober, 1 (satu) kegiatan pada bulan November, dan 3 (tiga) kegiatan pada bulan Desember.
Capaian Kinerja (%)	:	83,33
Capaian Fisik (%)	:	89,64
Pagu Anggaran (Rp)	:	100.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	86.550.800,00
Capaian Anggaran (%)	:	86,55

Kendala/Permasalahan	:	1. Penerimaan data laporan kinerjabulanan dari PPTK ada yang terlambat/tidak tepat waktu. 2. Kesulitan dalam penentuan data capaian kinerja, karena metode perhitungan kinerja tidak tepat. 3. Realisasi/capaian kinerja tidak adadata atau data capaian terlalu jauh dari target.
Rekomendasi	:	Mengingatkan PPTK untukmenyampaikan data capaian kinerja tepat waktu.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	:	Persentase penatausahaan keuangan
Target Kinerja	:	100%
Realisasi Kinerja	:	100%
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	98,54
Pagu Anggaran (Rp)	:	13.406.795.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	10.767.514.684,00
Capaian Anggaran (%)	:	80,31
Kendala/Permasalahan	:	Adanya *refocusing* / pemotongan anggaran yang sempat direncanakansehingga pejabat pengawas sempat tertahan untuk melakukan kegiatan dikarenakan terhalangnya anggaran yang tersedia.
Rekomendasi	:	1. Mengingatkan PPTK agarmenyampaikan data laporan kinerja bulanan tepat waktu. 2. Merumuskan kembali indikatorkinerja, satuan dan target serta metode perhitungannya. 3. Memperbaiki proses perencanaandalam penentuan target dan satuan indikator kinerja.

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Kinerja	:	a. Jumlah pembayaran gaji dantunjangan b. Jumlah pembayaran TPP c. Jumlah pembayaran JKK d. Jumlah pembayaran JKM
Target Kinerja	:	a. 14 Pembayaran b. 12 Pembayaran c. 12 Pembayaran d. 12 Pembayaran
Realisasi Kinerja	:	a. 14 Pembayaran b. 12 Pembayaran c. 12 Pembayaran d. 12 Pembayaran
Capaian Kinerja (%)	:	a. 100,00 b. 100,00 c. 100,00 d. 100,00
Capaian Fisik (%)	:	100,00
Pagu Anggaran (Rp)	:	12.225.035.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	9.942.796.284,00
Capaian Anggaran (%)	:	81,33
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator Kinerja	:	a. Jumlah Pembayaran honor Pengelola Keuangan, Pengurus Barang dan Pembantu PengurusBarang b. Jumlah Dokumen SPJ Keuangan Pengurus Barang dan Pembatu Pengurus Barang c. Jumlah Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak
Target Kinerja	:	a. 12 Pembayaran b. 84 Dokumen c. 13 Pembayaran
Realisasi Kinerja	:	a. 12 Pembayaran b. 95 Dokumen c. 13 Pembayaran
Capaian Kinerja (%)	:	a. 100,00 b. 113,10 c. 100,00

Capaian Fisik (%)	:	97,09
Pagu Anggaran (Rp)	:	1.181.760.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	824.718.400,00
Capaian Anggaran (%)	:	69,79
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	:	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian
Target Kinerja	:	100%
Realisasi Kinerja	:	100%
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	49,86
Pagu Anggaran (Rp)	:	397.500.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	88.400.000,00
Capaian Anggaran (%)	:	22,24
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya

Indikator Kinerja	:	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pakaian Dinas
Target Kinerja	:	120 Stel
Realisasi Kinerja	:	70 Stel
Capaian Kinerja (%)	:	58,33
Capaian Fisik (%)	:	99,72
Pagu Anggaran (Rp)	:	79.500.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	79.400.000,00
Capaian Anggaran (%)	:	99,87
Rekomendasi	:	Akan meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi

Indikator Kinerja	:	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Target Kinerja	:	40 pegawai
Realisasi Kinerja	:	0 pegawai
Capaian Kinerja (%)	:	0,00
Capaian Fisik (%)	:	0,00
Pagu Anggaran (Rp)	:	318.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	9.000.000,00
Capaian Anggaran (%)	:	2,83
Kendala/Permasalahan	:	Tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi Covid-19 yang membatasi ruang lingkup berkumpul dalam satu tempat dalam jumlah yang banyak.
Rekomendasi	:	Tahun berikutnya akan dilaksanakan kegiatan.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	:	Persentase pelaksanaan administasi umum
Target Kinerja	:	100%
Realisasi Kinerja	:	100%
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	93,58
Pagu Anggaran (Rp)	:	1.456.940.003,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	1.269.627.804,00
Capaian Anggaran (%)	:	87,14
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Kinerja	:	Jumlah perlengkapan kantor
Target Kinerja	:	50 Jenis
Realisasi Kinerja	:	50 Jenis
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	100,00
Pagu Anggaran (Rp)	:	103.400.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	102.940.795,00
Capaian Anggaran (%)	:	99,56
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Kinerja	:	a. Jumlah cetakan b. Jumlah fotocopy c. Jumlah penjilidan
Target Kinerja	:	a. 10 Cetakan b. 33000 Lembar c. 50 Penjilidan

Realisasi Kinerja	:	a. 10 Cetakan b. 32984 Lembar c. 49 Penjilidan
Capaian Kinerja (%)	:	a. 100,00 b. 99,95 c. 98,00
Capaian Fisik (%)	:	95,07
Pagu Anggaran (Rp)	:	96.250.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	76.854.000,00
Capaian Anggaran (%)	:	79,85
Rekomendasi	:	Akan meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Kinerja	:	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Target Kinerja	:	4 Jenis
Realisasi Kinerja	:	4 Jenis
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	92,21
Pagu Anggaran (Rp)	:	9.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	6.078.000,00
Capaian Anggaran (%)	:	67,53
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD

Indikator Kinerja	:	Jumlah koordinasi dan konsultasi
Target Kinerja	:	100 Koordinasi dan Konsultasi
Realisasi Kinerja	:	95 Koordinasi dan Konsultasi
Capaian Kinerja (%)	:	95,00
Capaian Fisik (%)	:	87,03
Pagu Anggaran (Rp)	:	1.248.290.003,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	1.083.755.009,00
Capaian Anggaran (%)	:	86,82
Rekomendasi	:	Akan meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah

Indikator Kinerja	:	Persentase barang milik daerah yang diadakan
Target Kinerja	:	100%
Realisasi Kinerja	:	100%
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	76,06
Pagu Anggaran (Rp)	:	983.715.744,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	738.527.800,00
Capaian Anggaran (%)	:	75,08
Kendala/Permasalahan	:	1. Terhalangnya pelaksanaan pengadaan dikarenakan terdapat perbedaan harga di SSH dengan kondisi di lapangan. 2. Adanya *refocusing* / pemotongan anggaran yang sempat direncanakan sehingga anggaran sempat tertahan untuk melakukan kegiatan dikarenakanterhalangnya anggaran yang tersedia.
Rekomendasi	:	1. Menganalisa kebutuhan apa saja setiap sekretariat atau bidang di kantor DinasLingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. 2. Penyerahan barang inventaris sesuai dengan perencanaan awal. 3. Barang habis pakai bisa dilakukan dengan metode penjatahan yang dibagirata.

- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Indikator Kinerja	:	Jumlah mebel
Target Kinerja	:	5 Unit
Realisasi Kinerja	:	7 Unit
Capaian Kinerja (%)	:	140,00
Capaian Fisik (%)	:	0,00
Pagu Anggaran (Rp)	:	30.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	-
Capaian Anggaran (%)	:	0,00
Kendala/Permasalahan	:	1. Terhalangnya pelaksanaanpengadaan dikarenakan terdapat perbedaan harga di SSH dengan kondisi di lapangan. 2. Adanya *refocusing* / pemotongan anggaran yang sempat direncanakan sehingga anggaran sempat tertahan untuk melakukan kegiatan dikarenakan terhalangnya anggaran yang tersedia.

Rekomendasi : 1. Menganalisa kebutuhan apa saja setiap sekretariat atau bidang dikantor Dinas Lingkungan HidupProvinsi Kalimantan Timur.
2. Penyerahan barang inventaris sesuai dengan perencanaan awal.
3. Barang habis pakai bisa dilakukan dengan metode penjatahan yang dibagi rata.

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Kinerja : Jumlah jenis perlengkapan kantor
Target Kinerja : 9 Jenis
Realisasi Kinerja : 8 Jenis
Capaian Kinerja (%) : 88,89
Capaian Fisik (%) : 76,47
Pagu Anggaran (Rp) : 308.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp) : 226.745.800,00
Capaian Anggaran (%) : 73,62
Kendala/Permasalahan : 1. Terhalangnya pelaksanaanpengadaan dikarenakan terdapat perbedaan harga di SSH dengan kondisi di lapangan.
2. Adanya *refocusing* / pemotongan anggaran yang sempat direncanakan sehingga anggaran sempat tertahan untuk melakukan kegiatan dikarenakanterhalangnya anggaran yang tersedia.

Rekomendasi : 1. Menganalisa kebutuhan apa saja setiap sekretariat atau bidang dikantor Dinas Lingkungan HidupProvinsi Kalimantan Timur.
2. Penyerahan barang inventaris sesuai dengan perencanaan awal.
3. Barang habis pakai bisa dilakukandengan metode penjatahan yang dibagi rata.

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Kinerja : Jumlah pengadaan sarana dan prasarana
Target Kinerja : 4 Jenis
Realisasi Kinerja : 4 Jenis
Capaian Kinerja (%) : 100,00
Capaian Fisik (%) : 82,46
Pagu Anggaran (Rp) : 645.715.744,00
Realisasi Anggaran (Rp) : 511.782.000,00
Capaian Anggaran (%) : 79,26

Rekomendasi : Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja	:	Presentase pelayanan jasa kantor
Target Kinerja	:	100%
Realisasi Kinerja	:	100%
Capaian Kinerja (%)	:	100
Capaian Fisik (%)	:	82,46
Pagu Anggaran (Rp)	:	2.544.584.253,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	1.984.435.495,00
Capaian Anggaran (%)	:	77,99
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik

Indikator Kinerja	:	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Target Kinerja	:	4 Layanan
Realisasi Kinerja	:	4 Layanan
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	77,54
Pagu Anggaran (Rp)	:	458.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	238.981.281,00
Capaian Anggaran (%)	:	52,18
Kendala/Permasalahan	:	1. Terhalangnya pelaksanaanpengadaan dikarenakan terdapat perbedaan harga di SSH dengan kondisi di lapangan. 2. Adanya *refocusing* / pemotongan anggaran yang sempat direncanakan sehingga anggaran sempat tertahan untuk melakukan kegiatan dikarenakan terhalangnya anggaran yang tersedia.
Rekomendasi	:	1. Menganalisa kebutuhan apa saja setiap sekretariat atau bidang dikantor Dinas Lingkungan HidupProvinsi Kalimantan Timur. 2. Penyerahan barang inventaris sesuai dengan perencanaan awal. 3. Barang habis pakai bisa dilakukandengan metode penjatahan yang dibagi rata.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Kinerja	:	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran
Target Kinerja	:	48 Orang

Realisasi Kinerja	:	46 Orang
Capaian Kinerja (%)	:	95,83
Capaian Fisik (%)	:	87,39
Pagu Anggaran (Rp)	:	2.086.584.253,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	1.745.454.214,00
Capaian Anggaran (%)	:	83,65
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah

Indikator Kinerja	:	Persentase pemeliharaan barang milik daerah
Target Kinerja	:	100%
Realisasi Kinerja	:	100%
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	98,05
Pagu Anggaran (Rp)	:	515.400.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	391.615.557,00
Capaian Anggaran (%)	:	75,98
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Kinerja	:	Jumlah kendaraan
Target Kinerja	:	30 Kendaraan
Realisasi Kinerja	:	30 Kendaraan
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	99,98
Pagu Anggaran (Rp)	:	316.400.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	218.046.640,00
Capaian Anggaran (%)	:	68,91
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Kinerja	:	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor
Target Kinerja	:	6 Jenis
Realisasi Kinerja	:	6 Jenis
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	96,11
Pagu Anggaran (Rp)	:	199.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	173.568.917,00

Capaian Anggaran (%) : 87,22
Rekomendasi : Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja : Persentase kebijakan perencanaan lingkunganhidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan danwilayah

Target Kinerja : 100%
Realisasi Kinerja : 100%
Capaian Kinerja (%) : 100,00
Capaian Fisik (%) : 75,07
Pagu Anggaran (Rp) : 1.370.100.000,00
Realisasi Anggaran (Rp) : 1.025.731.565,00
Capaian Anggaran (%) : 74,87
Kendala/Permasalahan :
1. RPPLH Nasional belum ada.
2. 8 (delapan) Kab./Kota belum ada yang menyusun dokumen RPPLH.
3. Laporan IKLH dibuat berdasarkan hasil perhitungan pemantauan IKLH dari Bidang Pengendalian dan Pencemaran LH.
4. Draft dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi telah disusun dan pengajuan validasi di KLHK dilaksanakan tahun 2023 karena ada perubahan matek dan rencana IKN.
5. Ketidaksesuaian penetapan target kinerja 10 (sepuluh) Kab/Kota, yang seharusnya Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan dilaksanakan hanya 7 (tujuh) Kab/kota yang masuk dalam zonasi wilayah pesisir danpulau-pulau kecil.
6. Tidak dianggarkannya Honorarium Tenaga Ahli Validasi KLHS RTRW/RDTR Tahun 2021.
7. Pengaturan waktu untuk perjalanan dinas luar daerah, mengingat COVID-19 dan pemberlakuan PPKM.

Rekomendasi :
1. Diperlukan dukungan Bantuan Teknis penyusunan RPPLH Kab/Kota melalui APBD maupun APBN;
2. Diperlukan penyesuaian jumlah target kinerja kab/kota untuk kegiatan KLHS RZWP3K.
3. Diperlukan Komitmen dan pengaturan waktu sesuai Aliran Kas terhadappenyelenggaraan kegiatan.
4. Pengusulan Honorarium Tenaga Ahli dalam Tim Validasi RTRW/RDTR yang tidak dianggarkan di Tahun 2021.

1) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(RPPLH) Provinsi

Indikator Kinerja : Presentase pelaksanaan perlindungan danpengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen perencanaan LH
Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja	:	100% Terdiri dari 1 (satu) dokumen ReviuRRPLH.
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	60,92
Pagu Anggaran (Rp)	:	440.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	190.190.300,00
Capaian Anggaran (%)	:	43,23
Kendala/Permasalahan	:	1. RPPLH Nasional belum ada. 2. 8 (delapan) Kab./Kota belum ada yangmenyusun dokumen RPPLH. 3. Pengaturan waktu untuk perjalanan dinas luar daerah, mengingat COVID-19 dan pemberlakuan PPKM.
Rekomendasi	:	Diperlukan dukungan Bantuan Teknis penyusunan RPPLH Kab/Kota melaluiAPBD maupun APBN

- Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi

Indikator Kinerja	:	a. Jumlah Dokumen RPPLHprovinsi b. Jumlah kab/kota yang dibinaPenyusunan Dokumen RPPLHnya
Target Kinerja	:	a. 1 Dokumen b. 10 Kab/Kota
Realisasi Kinerja	:	a. 1 Dokumen b. 7 Kab/Kota
Capaian Kinerja (%)	:	a. 100,00 b. 70,00
Capaian Fisik (%)	:	99,39
Pagu Anggaran (Rp)	:	221.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	154.564.000,00
Capaian Anggaran (%)	:	69,94
Kendala/Permasalahan	:	1. RPPLH Nasional belum ada. 2. 8 (delapan) Kab./Kota belum adayang menyusun dokumen RPPLH. 3. Pengaturan waktu untukperjalanan dinas luar daerah, mengingat COVID-19 danpemberlakuan PPKM.
Rekomendasi	:	Diperlukan dukungan Bantuan Teknis penyusunan RPPLH Kab/Kota melalui APBD maupun APBN

- Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi

Indikator Kinerja	:	a. Jumlah laporan pencapaian IKLHdalam RPPLH Provinsi b. Jumlah dokumen RPPLH kab/kotayang diverifikasi
Target Kinerja	:	a. 1 Laporan b. 8 Dokumen
Realisasi Kinerja	:	a. 1 Laporan b. 1 Dokumen
Capaian Kinerja (%)	:	a. 100,00 b. 12,50
Capaian Fisik (%)	:	22,45
Pagu Anggaran (Rp)	:	219.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	35.626.300,00
Capaian Anggaran (%)	:	16,27
Kendala/Permasalahan	:	1. 8 (delapan) Kab./Kota belum ada yang menyusun dokumen RPPLH. 2. Pengaturan waktu untuk perjalanan dinas luar daerah, mengingat COVID-19 dan pemberlakuan PPKM.
Rekomendasi	:	Diperlukan dukungan Bantuan Teknis penyusunan RPPLH Kab/Kota melalui APBD maupun APBN

2) Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Provinsi

Indikator Kinerja	:	Presentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis
Target Kinerja	:	100%

Realisasi Kinerja	:	100% Terdiri dari 2 (dua) dokumen revisi, yaitu1 (satu) dokumen KLJS RPJMD 2019 – 2023 dan 1 (satu) draft dokumen KLHSRTRW 2021 – 2041.
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	89,21
Pagu Anggaran (Rp)	:	930.100.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	835.541.265,00
Capaian Anggaran (%)	:	89,83
Kendala/Permasalahan	:	1. Draft dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi telah disusun dan pengajuan validasi di KLHK dilaksanakan tahun 2023 karena ada perubahan matek danrencana IKN. 2. Ketidaksesuaian penetapan target kinerja 10 (sepuluh) Kab/Kota, yangseharusnya Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan dilaksanakan hanya 7(tujuh) Kab/kota yang masuk dalam zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulaukecil. 3. Tidak dianggarkannya Honorarium Tenaga Ahli Validasi KLHS RTRW/RDTR Tahun 2021. 4. Pengaturan waktu untuk perjalanan dinas luar daerah, mengingat COVID- 19 dan pemberlakuan PPKM.
Rekomendasi	:	Diperlukan penyesuaian jumlah targetkinerja kab/kota untuk kegiatan KLHS RZWP3K.

- Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang

Indikator Kinerja	:	a. Jumlah Dokumen KLHS RTRW Provinsi Beserta Rencana / Rincinya/ reviu/ kajian DDDT/ IELH b. Jumlah dokumen KLHS RTRW Kab/Kota Beserta RencanaRincinya yang dilakukan validasi
Target Kinerja	:	a. 1 Dokumen b. 5 Dokumen
Realisasi Kinerja	:	a. 1 Dokumen b. 5 Dokumen
Capaian Kinerja (%)	:	a. 100,00 b. 180,00
Capaian Fisik (%)	:	98,17
Pagu Anggaran (Rp)	:	390.837.500,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	346.658.131,00
Capaian Anggaran (%)	:	88,70
Kendala/Permasalahan	:	Tidak dianggarkannya HonorariumTenaga Ahli Validasi KLHS RTRW/RDTR Tahun 2021.
Rekomendasi	:	Pengusulan Honorarium Tenaga Ahlidalam Tim Validasi RTRW/RDTR yang tidak dianggarkan di Tahun2021.

- Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

Indikator Kinerja	:	a. Jumlah Dokumen KLHS RPJMD Provinsi/reviu/ kajian DDDT/ IELH b. Jumlah Dokumen KLHS RPJMD Kab/Kota yang dilakukan validasi
Target Kinerja	:	a. 1 Dokumen b. 5 Dokumen
Realisasi Kinerja	:	a. 1 Dokumen b. 9 Dokumen
Capaian Kinerja (%)	:	a. 100,00 b. 180,00
Capaian Fisik (%)	:	81,88
Pagu Anggaran (Rp)	:	455.812.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	410.002.379,00
Capaian Anggaran (%)	:	89,95
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja ditahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk ZonasiWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator Kinerja	:	a. Jumlah Dokumen KLHS RZWP3K Provinsi/Reviu b. Jumlah kab/kota yang dilakukansosialisasi dan pembinaan HasilKLHS RZWP3K
Target Kinerja	:	a. 1 Dokumen b. 10 Kab/Kota
Realisasi Kinerja	:	a. 1 Dokumen b. 10 Kab/Kota
Capaian Kinerja (%)	:	a. 100,00 b. 70,00
Capaian Fisik (%)	:	98,87
Pagu Anggaran (Rp)	:	47.791.600,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	43.973.755,00
Capaian Anggaran (%)	:	92,01
Kendala/Permasalahan	:	1. Draft dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi telah disusun danpengajuan validasi di KLHK dilaksanakan tahun 2023 karenaada perubahan matek dan rencanaIKN. 2. Ketidaksesuaian penetapan target kinerja 10 (sepuluh) Kab/Kota, yang seharusnya Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan dilaksanakan hanya 7 (tujuh) Kab/kota yang masuk dalam zonasi wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil.
Rekomendasi	:	Diperlukan penyesuaian jumlahtarget kinerja kab/kota untuk kegiatan KLHS RZWP3K.

- Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yangBerpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	:	Pembuatan buku peraturan terkait penyusunan KLHS
Target Kinerja	:	1 Dokumen
Realisasi Kinerja	:	1 Dokumen
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	77,93
Pagu Anggaran (Rp)	:	35.658.900,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	34.907.000,00
Capaian Anggaran (%)	:	97,89
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja ditahun berikutnya.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	:	a. Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Lahan (IKL) d. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
Target Kinerja	:	a. 53,75 indeks b. 89,11 indeks c. 79,81 indeks d. 83,56 indeks

Realisasi Kinerja	:	a. 51,92 b. 88,84 c. 82,21 d. 85,40
Capaian Kinerja (%)	:	a. 96,60 b. 99,70 c. 103,01 d. 102,20
Capaian Fisik (%)	:	84,96
Pagu Anggaran (Rp)	:	4.840.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	3.842.447.826,00
Capaian Anggaran (%)	:	79,39
Rekomendasi	:	Akan terus melakukan peningkatan pada tahunberikutnya.

1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	:	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan serta pengendalian perubahan iklim
Target Kinerja	:	7 singkronisasi, koordinasi dan pelaksanaan PPKL dan PPI
Realisasi Kinerja	:	7 singkronisasi, koordinasi danpelaksanaan PPKL dan PPI. Dengan rincian 4 (empat) singkronasi dan koordinasi Kajian Dampak Lingkungan, serta 3 (tiga) pelaksanaan PPKL dan PPI emisi GRK.
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	73,65
Pagu Anggaran (Rp)	:	1.590.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	1.005.889.311,00
Capaian Anggaran (%)	:	63,26
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Indikator Kinerja	:	a. Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan Rekomendasi Izin Lingkungan/ persetujuan lingkungan/ perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah b. Jumlah KPA (Komisi Penilai Amdal)/Tim uji kelayakan/ tata laksana uji kelayakan Kab/Kota yang diterbitkan rekomendasi lisensinya c. Jumlah Komisi Penilai Amdal/Tim uji kelayakan/tata laksana ujikelayakan Kab/Kota yang dibina dan diawasi d. Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan izin lingkungan/persetujuan lingkungan/ perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah

Target Kinerja	:	a. 20 Dokumen b. 2 KPA c. 10 KPA d. 8 Pelaku Usaha
Realisasi Kinerja	:	a. 37 Dokumen b. 2 KPA c. 10 KPA d. 10 Pelaku Usaha Terdiri dari pelaku usaha, yaitu PT. Belantara Subur, PT. Fajar Surya Swadaya. PT. SAL, PT. GawiMakmur Kalimantan, PT. BalikpapanWana Lestari, PT. Wahana Prima Sejati, PT. Kutai Refinery Nusantara, PT. MPG I, dan PT. MPG II.
Capaian Kinerja (%)	:	a. 185,00 b. 100,00 c. 100,00 d. 125,00
Capaian Fisik (%)	:	93,28
Pagu Anggaran (Rp)	:	815.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	589.315.183,00
Capaian Anggaran (%)	:	72,31
Kendala/Permasalahan	:	1. Pandemi Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur membatasi ruang gerak dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan meliputi kegiatan koordinasi / konsultasi, sosialisasi, bimtek, dan rapat di Hotel. 2. Adanya pembatalan *refocusing* / pemotongan anggaran pada bulan Oktober 2021, maka setiappelaksanaan teknis kegiatan melaksanakan kegiatan disisaakhir tahun 2021.
Rekomendasi	:	1. Perlunya koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup internal Dinas Lingkungan Hidup ProvinsiKalimantan Timur. 2. Menjalin kerja sama antara semuapegawai sehingga dapat mencapai sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan PengendalianEmisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Indikator Kinerja	:	a. Jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi danAdaptasi Perubahan Iklim b. Jumlah sistem informasi dan infrastruktur MRV yang terbangun dan beroperasi c. JumlahBimtek/diklatpengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalampenyelenggaraan sistem MRV
Target Kinerja	:	a. 10 Kab/Kota b. 1 Sistem c. 2 Kali

Realisasi Kinerja	:	a. 10 Kab./Kota b. 1 Sistem c. 2 Kali
Capaian Kinerja (%)	:	a. 100,00 b. 100,00 c. 100,00
Capaian Fisik (%)	:	54,02
Pagu Anggaran (Rp)	:	775.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	416.574.128,00
Capaian Anggaran (%)	:	53,75
Kendala/Permasalahan	:	1. Pandemi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur membatasi ruang gerak dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan meliputi: kegiatan koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, bimtek, pengumpulan data dan rapat di Hotel. 2. Belanja modal sebesar **Rp. 26.000.000,-** yaitu mesin bor tanah (1 unit) dan kamera digital (3 unit) tidak bisa diadakan dikarenakan harga satuan dalam RKA tidak sesuai harga pasar yang berlaku di Kota Samarinda. 3. Langganan internet untuk portalMRV Kalimantan Timur dibayar 6bulan sehingga tersisa dana **Rp. 45.054.000,-** implikasi dari pindahnya server portal MRV Kalimantan Timur ke Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur.
Rekomendasi	:	1. Penyusunan dokumen rencana dan anggaran kegiatan seksi harus cermat dan diteliti disesuaikandengan aturan yang berlaku untuk meminimalkan kesalahan. 2. Perlu dijadwalkan rapat monitoring dan evaluasi setiap bulan untuk pemantauanpelaksanaan kegiatan dan progresnya. 3. Perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur(termasuk dibidang) dalam pengelolaan keuangan APBD(Sosialisasi, bimtek dan update aturan terbaru).

2) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LingkunganHidup

Indikator Kinerja	:	Indeks Pencemaran (Status Mutu Air)
Target Kinerja	:	≤ 8 (Tercemar Sedang)
Realisasi Kinerja	:	2,6 Tercemar Ringan
Capaian Kinerja (%)	:	307,69
Capaian Fisik (%)	:	88,62
Pagu Anggaran (Rp)	:	2.700.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	2.375.059.515,00
Capaian Anggaran (%)	:	87,97
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Indikator Kinerja	:	a. Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Air(IKA) b. Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas AirLaut (IKAL)
Target Kinerja	:	a. 54 titik pantau b. 80 titik pantau c. 52 titik pantau
Realisasi Kinerja	:	a. 54 titik pantau b. 80 titik pantau c. 52 titik pantau Adapun titik pantau untuk dilakukan dalam perhitungan indeks IKLH, yaitu: a. Pemantauan air dilakukan di 7 (tujuh) Kab./Kota dengan 9(sembilan) sungai di 27 (dua puluh tujuh) titik pantau yang dilakukan 2x (dua kali) pemantauan dalam setahun. b. Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan di 10 (sepuluh) Kab./Kota dimana masing- masing terdiri dari 4 (empat) kawasan, yaitu kawasan pemukiman, kawasan industri,kawasan transportasi, dan kawasan padat lalu lintas. c. Pemantauan kualitas air laut dilakukan di 52 (lima puluh dua)titik, dimana pada semester 1 dilakukan di 26 (dua puluh enam) titik. Kawasan yang dilakukan pengambilan sampel terdpaat di kawasan pelabuhan, kawasanbiota laut, kawasan wisata bahari, dan kawasan mangrove.
Capaian Kinerja (%)	:	a. 100,00 b. 100,00 c. 100,00
Capaian Fisik (%)	:	82,59
Pagu Anggaran (Rp)	:	1.500.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	1.346.456.650,00
Capaian Anggaran (%)	:	89,76
Kendala/Permasalahan	:	Kendala yang dihadapi dalampengambilan sampel adalah semasa pandemi Covid-19 terdapat Kab./Kota yang menerapkan protokolkesehatan yang ketat dan terdapat jadwal buka tutup daerah sehinggaterjadi pengunduran waktu pemantauan.
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	:	Jumlah sumber pencemar yang dilakukan pengisolasian
Target Kinerja	:	255 Titik
Realisasi Kinerja	:	255 Titik
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	94,64
Pagu Anggaran (Rp)	:	1.200.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	1.028.602.865,00
Capaian Anggaran (%)	:	85,72
Kendala/Permasalahan	:	Dikarenakan adanya perubahan peraturan rekomendasi menjadi persetujuan teknis dan terdapat banyak perusahaan yang barumemasukan permohonan di tahun ini, memungkinkan tahun depan dapat terealisasi.
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

3) Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	:	Persentase pemulihan lingkungan
Target Kinerja	:	42,64%
Realisasi Kinerja	:	60,62%
		Lahan terganggu = 18.473,12Revegetasi = 11.259,78 Reklamasi = 13.648,90 $= \frac{Revegetasi}{Lahan\ Terganggu} \times 100\%$ $= \frac{11.259,78}{18.473,12} \times 100\%$ = 60,62%
Capaian Kinerja (%)	:	142,18
Capaian Fisik (%)	:	92,60
Pagu Anggaran (Rp)	:	550.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	461.499.000,00
Capaian Anggaran (%)	:	83,91
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan UnsurPencemar

Indikator Kinerja	:	Jumlah koordinasi pelaksanan pembersihan unsur pencemar
Target Kinerja	:	9 koordinasi
Realisasi Kinerja	:	7 koordinasi
Capaian Kinerja (%)	:	77,78
Capaian Fisik (%)	:	93,76
Pagu Anggaran (Rp)	:	125.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	110.785.100,00
Capaian Anggaran (%)	:	88,63

Kendala/Permasalahan :

1. Adanya pemberlakukan PPKM pada daerah-daerah di Kab./Kota sehingga kegiatan perjalanan dinas luar daerah tidak dapat digunakan secara maksimal.
2. Adanya *Refocusing* anggaran yang kemudian dibatalkan mendekati akhir tahun sehingga waktu untuk menggunakan anggaran menjadi terbatas dan tidak maksimal.
3. Tidak diperkenankannya TUP (Tambahan Uang Persediaan) pada akhir tahun anggaran 2021.

Rekomendasi :

1. Pembenahan sistem manajemenkeuangan.
2. Perlu membuat SOP dalampenggunaan keuangan.
3. Diumumkannya dan evaluasi secara transparan kepada pengguna anggaran / keuangan.
4. Percepatan dalam meng-SPJ-kanpada masing-masing seksi/bidang.

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi

Indikator Kinerja : Luas lahan terkontaminasi yang diinventarisasi dan diidentifikasi
Target Kinerja : 2 Ha
Realisasi Kinerja : 2 Ha
Capaian Kinerja (%) : 100,00
Capaian Fisik (%) : 88,50
Pagu Anggaran (Rp) : 100.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp) : 73.180.100,00
Capaian Anggaran (%) : 73,18
Kendala/Permasalahan :

1. Adanya pemberlakukan PPKMpada daerah-daerah di Kab./Kota sehingga kegiatan perjalanan dinas luar daerah tidak dapat digunakan secara maksimal.
2. Adanya *Refocusing* anggaran yang kemudian dibatalkan mendekati akhir tahun sehingga waktu untuk menggunakan anggaran menjadi terbatas dan tidak maksimal.
3. Tidak diperkenankannya TUP (Tambahan Uang Persediaan) pada akhir tahun anggaran 2021.

Rekomendasi	:	1. Pembenahan sistem manajemen keuangan. 2. Perlu membuat SOP dalam penggunaan keuangan. 3. Diumumkannya dan evaluasisecara transparan kepada pengguna anggaran / keuangan. 4. Percepatan dalam meng-SPJ-kanpada masing-masing seksi/bidang.

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

Indikator Kinerja	:	Luas lahan reklamasi, revegetasi,lahan terbuka dan kerusakan lahan yang diinventarisasi
Target Kinerja	:	6000 Ha
Realisasi Kinerja	:	11260 Ha Kumulatif Lahan Terganggu 2020 =18.573,12 Kumulatif Lahan Reklamasi 2020 =13.648,90 Kumulatif Lahan Revegetasi 2020 =11.259,78

Presentase Lahan Revegetasi / Lahan Terganggu = 60,62%

Capaian Kinerja (%)	:	187,67
Capaian Fisik (%)	:	96,17
Pagu Anggaran (Rp)	:	175.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	166.251.500,00
Capaian Anggaran (%)	:	95,00
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi

Indikator Kinerja	:	Jumlah Danau yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan
Target Kinerja	:	1 Danau
Realisasi Kinerja	:	1 Danau
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	91,98
Pagu Anggaran (Rp)	:	150.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	111.282.300,00
Capaian Anggaran (%)	:	74,19
Kendala/Permasalahan	:	1. Adanya pemberlakukan PPKMpada daerah-daerah di Kab./Kota sehingga kegiatan perjalanan dinas luar daerah tidak dapat digunakan secara maksimal. 2. Adanya *Refocusing* anggaran yang kemudian dibatalkan mendekati akhir tahun sehingga waktu untuk menggunakan anggaran menjadi terbatas dan tidak maksimal. 3. Tidak diperkenankannya TUP (Tambahan Uang Persediaan) pada akhir tahun anggaran 2021.
Rekomendasi	:	1. Pembenahan sistem manajemen keuangan. 2. Perlu membuat SOP dalampenggunaan keuangan. 3. Diumumkannya dan evaluasi secara transparan kepadapengguna anggaran / keuangan. 4. Percepatan dalam meng-SPJ-kanpada masing-masing seksi/bidang.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Indikator Kinerja	:	Presentase Perangkat (dokumen dan sistem) keanekaragaan hayati daerah yang terintegrasi kedalam perencanaan pembangunan wilayah (RTRW beserta rencana rinci RPJMD dan RPJPD)
Target Kinerja	:	100%
Realisasi Kinerja	:	100%
Capaian Kinerja (%)	:	100,00

		Terdapat 1 (satu) jumlah perangkat (dokumen dan system) kehati yang telah diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan wilayah dan 1 (satu) perangkat kehati daerah yang telah diterbitkan/berfungsi.
Capaian Fisik (%)	:	84,53
Pagu Anggaran (Rp)	:	500.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	375.454.100,00
Capaian Anggaran (%)	:	75,09
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahunberikutnya.

1) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi

Indikator Kinerja	:	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan keanekaragaman hayati provinsi
Target Kinerja	:	4 Kegiatan
Realisasi Kinerja	:	6 Kegiatan Terdiri dari penyusunan dokumen profil Kehati Provinsi, penyusunan dokumen rencana induk pengelolaan Kehati Provinsi, sistem informasi danpengelolaan *database* Kehati, taman Kehati di luar kawasan hutang yang dilakukan pembinaan dan pemantauan, melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap taman Kehati kepada Kab./Kota, dan melakukan bimtek/diklat atas pengembangan kapasitas dalam pengelolaan Kehati.
Capaian Kinerja (%)	:	166,67
Capaian Fisik (%)	:	84,53
Pagu Anggaran (Rp)	:	500.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	375.454.100,00
Capaian Anggaran (%)	:	75,09
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana PengelolaanKeanekaragaman Hayati

Indikator Kinerja	:	a. Jumlah dokumen Profil KEHATIProvinsi b. Jumlah dokumen Rencana IndukPengelolaan KEHATI Provinsi c. Jumlah Sistem Informasi danPengelolaan database Kehati
Target Kinerja	:	a. 1 dokumen (profil kehati) b. 1 dokumen c. 1 sistem
Realisasi Kinerja	:	a. 1 dokumen (profil kehati) b. 1 dokumen c. 1 sistem

Capaian Kinerja (%)	:	a. 100,00 b. 100,00 c. 100,00
Capaian Fisik (%)	:	100,00
Pagu Anggaran (Rp)	:	100.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	99.923.700,00
Capaian Anggaran (%)	:	99,92
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di LuarKawasan Hutan

Indikator Kinerja	:	Jumlah taman kehati di luar kawasanhutan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan
Target Kinerja	:	1 Taman Kehati
Realisasi Kinerja	:	1 Taman Kehati
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	84,53
Pagu Anggaran (Rp)	:	75.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	45.163.300,00
Capaian Anggaran (%)	:	60,22
Kendala/Permasalahan	:	Pandemi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur membatasi ruang gerak dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan meliputi: kegiatankoordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, bimtek, pengumpulan data dan rapat di Hotel.
Rekomendasi	:	1. Penyusunan dokumen rencana dan anggaran kegiatan seksi harus cermat dan diteliti disesuaikan dengan aturan yang berlaku untuk meminimalkan kesalahan. 2. Perlu dijadwalkan rapatmonitoring dan evaluasi setiap bulan untuk pemantauan pelaksanaan kegiatan dan progresnya. 3. Perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur (termasuk dibidang) dalam pengelolaan keuangan APBD (Sosialisasi, bimtek dan update aturan terbaru).

- Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

Indikator Kinerja	:	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan pemantauan terhadapTaman Kehati dan/atau kawasan bernilai penting lainnya
Target Kinerja	:	6 Kab/Kota
Realisasi Kinerja	:	10 Kab/Kota
Capaian Kinerja (%)	:	166,67
Capaian Fisik (%)	:	78,65
Pagu Anggaran (Rp)	:	250.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	177.970.600,00
Capaian Anggaran (%)	:	71,19
Kendala/Permasalahan	:	Pandemi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur membatasi ruang gerak dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan meliputi: kegiatan koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, bimtek, pengumpulan data dan rapat di Hotel.

Rekomendasi : 1. Penyusunan dokumen rencana dan anggaran kegiatan seksi harus cermat dan diteliti disesuaikan dengan aturan yang berlaku untuk meminimalkan kesalahan.
2. Perlu dijadwalkan rapatmonitoring dan evaluasi setiap bulan untuk pemantauan pelaksanaan kegiatan dan progresnya.
3. Perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur (termasuk dibidang) dalam pengelolaan keuangan APBD (Sosialisasi, bimtek dan update aturan terbaru).

- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Indikator Kinerja : Jumlah bimtek/ diklat pengembangan kapasitas dalam pengelolaan kehati
Target Kinerja : 1 Bimtek
Realisasi Kinerja : 1 Bimtek
Capaian Kinerja (%) : 100,00
Capaian Fisik (%) : 74,93
Pagu Anggaran (Rp) : 75.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp) : 52.396.500,00
Capaian Anggaran (%) : 69,86
Kendala/Permasalahan : Pandemi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur membatasi ruanggerak dalam pelaksanaan kegiatan

dilapangan meliputi: kegiatan koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, bimtek, pengumpulan data dan rapat di Hotel.

Rekomendasi : 1. Penyusunan dokumen rencana dan anggaran kegiatan seksi harus cermat dan diteliti disesuaikan dengan aturan yang berlaku untuk meminimalkan kesalahan.
2. Perlu dijadwalkan rapatmonitoring dan evaluasi setiap bulan untuk pemantauan pelaksanaan kegiatan dan progresnya.
3. Perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur (termasuk dibidang) dalam pengelolaan keuangan APBD (Sosialisasi, bimtek dan update aturan terbaru).

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Indikator Kinerja : a. Persentase Pengurangan penggunan B3(dari penggunaan merkuri tahun sebelumnya)
b. Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)

Target Kinerja : a. 0%
b. 40%

Realisasi Kinerja	:	a. 0% b. 31,56% Jumlah limbah B3 yang dihasilkan pada tahun2020 sebesar 103.932,76 ton dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan pada tahun 2021 sebesar 39.667,64 ton.
Capaian Kinerja (%)	:	a. 0,00 b. 78,90
Capaian Fisik (%)	:	22,41
Pagu Anggaran (Rp)	:	1.400.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	293.698.953,00
Capaian Anggaran (%)	:	20,98
Kendala/ Permasalahan	:	Persentase Pengurangan penggunan B3 (dari penggunaan merkuri tahun sebelumnya) tidak dapat dihitung dikarenakan data jumlah penggunaan merkuri tahun 2020 masih dalam tahap kajian teknis pergub kaltim masih dalamtahap proses dan data tahun 2021 tidak memiliki nilai sementara.
Rekomendasi	:	Akan meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya

1) Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi

Indikator Kinerja	:	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha
Target Kinerja	:	23 Usaha
Realisasi Kinerja	:	22 Usaha Terdiri dari 22 (dua puluh dua) usaha, yaituPT. Wiraswasta Gemilang Indonesia / Balikpapan, PT. Sinar Wandiole Balikpapan, PT. Balikpapan EnvironmentalServices, PT. Sinar Bintang Albar, PT. Peteka Karya Tirta, PT. POSB Reksa Bumi Indonesia, PT. Maju Asrti Jaya Utama, PT.Ilham Jaya Bersama, PT. Sumber Rezeki Abadi Jaya, PT. Pengelola Limbah Kutai Kartanegara, PT. Ranji Karya Sakti, PT.Putra Daerah Mandiri Jaya, PT. Karunia Lumasindo Pratama, PT. Sumber Agung Srimarti, PT. Liles Borneo Abadi, PT. Puramarta Mahakam Lestari, PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia /Samarinda, PT. Berkat Jaya Sukses, PT.Limbah Olah Sejahtera, PT. Artama Sentosa Indonesia, PT. Pelabuhan PenajamBanua Taka, PT. Berkat Jaya Sukses, dan PT. Limbah Bina Sejahtera.
Capaian Kinerja (%)	:	95,65
Capaian Fisik (%)	:	22,41
Pagu Anggaran (Rp)	:	1.400.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	293.698.953,00
Capaian Anggaran (%)	:	20,98
Kendala/Permasalahan	:	Hanya terealisasi sebanyak 22 (dua puluh dua) usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dikarenakan terdapat 2 (dua) usaha/kegiatan yang semula ditargetkan pembinaan kepada 24 (dua puluh empat) usaha/kegiatan tidak dapat dilakukan dikarenakan Covid-19 sehingga pihak perusahaan melakukan pengketatan terhadap pengunjung.

Rekomendasi : Akan meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Indikator Kinerja	:	a. Jumlah rekomendasi pemenuhankomitmen pengumpulan LimbahB3 Skala Provinsi b. Jumlah inventarisasi pengelolaan limbah B3 yang dikelola sesuaidengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku c. Jumlah pembinaan penyusunan dokumen program kedaruratan pengelolaan limbah B3 yang telahdisusun oleh pelaku usaha dan kegiatan d. Jumlah dokumen program kedaruratan pengelolaan limbah B3 e. Jumlah sosialisasi pengurangan dan/atau penghapusan merkuri
Target Kinerja	:	a. 1 Rekomendasi b. 10 Usaha c. 5 Dokumen d. 1 Dokumen e. 2 Sosialisasi
Realisasi Kinerja	:	a. 0 Rekomendasi b. 10 Usaha c. 6 Dokumen d. 0 Dokumen e. 2 Sosialisasi
Capaian Kinerja (%)	:	a. 0,00 b. 100,00 c. 120,00 d. 0,00 e. 100,00
Capaian Fisik (%)	:	78,82
Pagu Anggaran (Rp)	:	200.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	122.760.100,00
Capaian Anggaran (%)	:	61,38
Kendala/Permasalahan	:	Terhalangnya pelaksanaan pengadaan dikarenakan terdapat perbedaan hargadan spesifikasi barang di SSHdikarenakan barang yang ada di SIPDsudah *discontinue* sehingga sesuai arahan BPKD tidak dilakukan pembelian barang.
Rekomendasi	:	Akan meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

Indikator Kinerja	:	a. Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 b. Jumlah kajian (DED, FS, AMDAL, Perencanaan Bangunan untuk insenerator) c. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pusat pengelolaaan Limbah B3
Target Kinerja	:	a. 1 Laporan b. 2 Kajian c. 4 Koordinasi dan Sinkronisasi
Realisasi Kinerja	:	a. 1 Laporan b. 2 Kajian c. 3 Koordinasi dan Sinkronisasi
Capaian Kinerja (%)	:	a. 100,00 b. 100,00 c. 75,00
Capaian Fisik (%)	:	22,41
Pagu Anggaran (Rp)	:	1.200.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	170.938.853,00
Capaian Anggaran (%)	:	14,24
Kendala/Permasalahan	:	1. Dalam penyusunan DED dan FS,Perencanaan Bangunan untuk insenerator belum bisa dilaksanakan dikarenakan kesalahan input dalam menentukan kode rekening yang mana seharusnya diinput ke anggaran belanja pihak ke-3 namun dalam terdapat kesalahansaat menginput RKA dikarenakan baru pertama kali melakukan input di SIPD dimana terinput ke dalam anggaran pegawai dan tidak akan bisa digunakan kecuali swakelola. Telah melakukan koordinasi dengan BPKAD dari Februari hingga Oktober 2021, sedangkanpengerjaan kegiatan ini membutuhkan waktu 5 – 6 bulan dan jika melakukan proses lelangmembutuhkan 2 bulan sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 8 bulan. 2. Terdapat koordinasi untukpenentuan lokasi dan kendala anggaran untuk pembangunaninsenerator, yaitu lokasi yang direncanakan (Palaran dan sekitar Makroman) namun Makroman mempunyai kendala terkait tata ruang yang lebihsusah, namun akses jalan masuk lokasi Palaran perlu dilakukan pembiayaan lebih dikarenakan membutuhkan jembatan dikarenakan terdapat lembah. Sehingga pembangunan akses jalan bisa lebih tinggidibandingkan dengan pembangunan insenerator. 3. Terhalangnya pelaksanaan pengadaan dikarenakan terdapat perbedaan harga dan spesifikasi barang di SSH dikarenakan barang yang ada di SIPD sudah *discontinue* sehingga sesuaiarahan BPKD tidak dilakukan pembelian barang.

Rekomendasi	:	Direncanakan oleh KLHK untuk pembangunan pusat pengelolaan pihak limbah B3 dan sampah spesifikterpadu dan kapasitas lebih besar daripada yang direncakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Indikator Kinerja	:	Persentase ketaatan usaha dan atau kegiatanterhadap peraturan lingkungan hidup yang diawasi
Target Kinerja	:	100%
Realisasi Kinerja	:	66,67% 34 (tiga puluh empat) dari 51 (lima puluh satu)kegiatan/usaha yang diawasi yang taat terhadap peraturan LH.
Capaian Kinerja (%)	:	66,67
Capaian Fisik (%)	:	48,98
Pagu Anggaran (Rp)	:	710.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	553.409.570,00
Capaian Anggaran (%)	:	77,95
Rekomendasi	:	Akan meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Indikator Kinerja	:	Jumlah laporan kegiatan usaha dan atau kegiatan yang telah dilakukanpengawasan dan pembinaan
Target Kinerja	:	4 Laporan
Realisasi Kinerja	:	2 Laporan
Capaian Kinerja (%)	:	50,00
Capaian Fisik (%)	:	48,98
Pagu Anggaran (Rp)	:	710.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	553.409.570,00
Capaian Anggaran (%)	:	77,95
Rekomendasi	:	Akan meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban IzinLingkungan dan/atau Izin PPLH

Indikator Kinerja	:	Jumlah kegiatan/usaha yang dapatditingkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya
Target Kinerja	:	100 kegiatan/ usaha
Realisasi Kinerja	:	0 kegiatan/ usaha
Capaian Kinerja (%)	:	0,00
Capaian Fisik (%)	:	0,00
Pagu Anggaran (Rp)	:	75.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	-
Capaian Anggaran (%)	:	0,00

Kendala/Permasalahan	:	Tidak bisa dilaksanakan dikarenakan pada saat *refocusing* anggaran terpotong pada bulan Mei dan Juni dan dilakukan penundaan hingga November 2021 namun saat ingin dilakukan kegiatan terjadi musibah pribadi sehingga ingin dilakukan di bulan Desemberi 2021 namun sudah tidak bisa mengelakukan kegiatan.
Rekomendasi	:	Akan meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas LingkunganHidup

Indikator Kinerja	:	Jumlah PPLH yang mengikuti rapat koordinasi
Target Kinerja	:	35 Orang
Realisasi Kinerja	:	0 Orang
Capaian Kinerja (%)	:	0,00
Capaian Fisik (%)	:	0,00
Pagu Anggaran (Rp)	:	50.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	-
Capaian Anggaran (%)	:	0,00
Kendala/Permasalahan	:	Tidak bisa dilaksanakan dikarenakan pada saat *refocusing* anggaran terpotong pada bulan Mei dan Juni dan dilakukan penundaan hingga November 2021 namun saat ingin dilakukan kegiatan terjadi musibah pribadi sehingga ingin dilakukan di bulan Desemberi 2021 namun sudah tidak bisa mengelakukan kegiatan.
Rekomendasi	:	Akan meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Indikator Kinerja	:	Jumlah pengawasan terhadap penangungjawab dan atau usahakegiatan yang diberi izin
Target Kinerja	:	100 kegiatan/ usaha

Realisasi Kinerja	:	51 kegiatan/ usaha Terdiri dari PT. Graha Power Kaltim,PT. WGI CAB. Samarinda, PT. KutaiRefinery Nusantara, PT. Sinar Bintang Albar, PT. Dermaga Perkasa Pratama, PT. Pertaminatrans Kontinental, PT. Peteka Karya Tirta, PT. Balikpapan Environmental Services, PT. Balikpapan Chip Lestari, PT. Barokah Galangan Perkasa, PT. PLN Pembangkitan BPP-PLTD Batakan, PT. POSB Reksa Bumi, PT. Limbah Bina Sejahtera, PT. Pengelola Limbah Kutai Kartanegara, PT. Sinar Wandiole Balikpapan, PT. WGI CAB. Balikpapan, PT. PLN (Persero)Unit Balikpapan, PT. LDC Louist East Indonesia, PT. Sumber Rezeki Abadi Jaya, PT. Ilham Jaya Bersama,PT. Wahana Prima Sejati, PT. Ranji Karya Sakti, PT. Pandega Citra Niaga, PT. Badak NGL, PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka, PT.Indominco Mandiri, PT. EnergiUnggul Persada, PT. Bukit Raya CoalMininG, PT. Belayan Coal International, PT. Jembayan MuaraBara, PT. Kartanegara EnergiPerkasa, PT. Kaltim Methanol Indonesia, PT. Kaltim Nitrat Indonesia, PT Fairco, PT. Mahakam Sumber Jaya, PT. Tambang Damai, PT. Acacia Andalan Utama, PT. Rodamas, PT. KBT, PT. Santan, PT. Singlurus, PT. Gawi Makmur, PT Insani, PT. Lanna Harita, PT. KRN, PT. FSP, PT. PIK, PT. KPC, PT. GAM, dan PT. Indexim
Capaian Kinerja (%)	:	51,00
Capaian Fisik (%)	:	98,61
Pagu Anggaran (Rp)	:	445.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	424.439.270,00
Capaian Anggaran (%)	:	95,38
Kendala/Permasalahan	:	1. Keterbatasannya jumlah SDM pengawas sehingga tidak bisa dilakukan pengawasan kepada 100 (seratus) kegiatan/usahadalam satu tahun. 2. Akibat pandemi Covid-19 sehingga tidak semua perusahaan dapat menerima kunjungan.
Rekomendasi	:	Akan meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

Indikator Kinerja	:	Jumlah pengawasan terhadap penerapan sanksi administrasilingkungan hidup hasil pengawasan
Target Kinerja	:	25 usaha/ kegiatan
Realisasi Kinerja	:	13 usaha/ kegiatan
Capaian Kinerja (%)	:	52,00
Capaian Fisik (%)	:	97,29
Pagu Anggaran (Rp)	:	140.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	128.970.300,00
Capaian Anggaran (%)	:	92,12
Kendala/Permasalahan	:	1. Keterbatasannya jumlah SDM pengawas sehingga tidak bisa dilakukan pengawasan kepada 100 (seratus) kegiatan/usahadalam satu tahun. 2. Akibat pandemi Covid-19 sehingga tidak semua perusahaan dapat menerima kunjungan.

Rekomendasi : Akan meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), KearifanLokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

Indikator Kinerja	:	Persentase kab/kota yang telah teridentifikasi MHA terkait PPLH
Target Kinerja	:	50%
Realisasi Kinerja	:	50% $\frac{5}{10} \times 100\% = 50\%$ Dimana angka 5 (lima) adalah Kab./Kota yangtelah dilakukan pembinaan (Kota Samarinda, Kab. Paser, Kab. PPU, Kab. Kutai Timur, danKab. Kutai Kartanegara) Angka 10 (sepuluh) menunjukkan jumlah Kab./Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	95,84
Pagu Anggaran (Rp)	:	100.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	83.370.500,00
Capaian Anggaran (%)	:	83,37
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

1) Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisionaldan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Indikator Kinerja	:	Jumlah dokumen laporan identifikasi dan inventarisasi MHA di kab/kota
Target Kinerja	:	2 Dokumen
Realisasi Kinerja	:	2 Dokumen
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	95,84
Pagu Anggaran (Rp)	:	100.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	83.370.500,00
Capaian Anggaran (%)	:	83,37
Rekomendasi	:	Akan meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan InformasiPengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional danHak MHA terkait dengan PPLH

Indikator Kinerja	:	Jumlah inventarisasi dan identifikasi MHA
Target Kinerja	:	1 Laporan
Realisasi Kinerja	:	1 Laporan
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	95,84
Pagu Anggaran (Rp)	:	100.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	83.370.500,00
Capaian Anggaran (%)	:	83,37
Rekomendasi	:	Akan meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan HidupUntuk Masyarakat

Indikator Kinerja	:	Persentase peningkatan bimbingan teknis, pembinaandan pendampingan kelompokmasyarakat terkait lingkungan hidup
Target Kinerja	:	52%
Realisasi Kinerja	:	200% Jumlah bimbingan teknis, pembinaan, dan pendampingan kelompok masyarakat terkait lingkungan hidup pada tahun 2020 sebesar 2 (dua) bimbingan dan pada tahun 2021 sebesar 4 (empat) bimbingan. Sehingga realisasi kinerja meningkat 2 (dua) kali lipat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya.
Capaian Kinerja (%)	:	384,62
Capaian Fisik (%)	:	92,99
Pagu Anggaran (Rp)	:	850.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	761.984.686,00
Capaian Anggaran (%)	:	89,65
Rekomendasi	:	Akan meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi

Indikator Kinerja	:	Jumlah bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan lembaga /lembaga terkaitlingkungan hidup
Target Kinerja	:	143 bimteks, pembinaan, pendampingan
Realisasi Kinerja	:	163 bimteks, pembinaan, pendampingan
Capaian Kinerja (%)	:	113,99
Capaian Fisik (%)	:	92,99
Pagu Anggaran (Rp)	:	850.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	761.984.686,00
Capaian Anggaran (%)	:	89,65
Rekomendasi	:	Akan meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Kinerja :
a. Jumlah lembaga pendidikan yangdibina untuk kegiatan adiwiyata
b. Jumlah DLH kab/kota yang dibinauntuk kegiatan adipura
c. Jumlah DLH kab/kota yang dibinauntuk kegiatan kalpataru
d. Jumlah kampung iklim yangdibina
e. Jumlah pendidikan dan pelatihanlingkungan hidup

Target Kinerja	:	a. 50 lembaga pendidikan b. 10 DLH kab/kota c. 10 DLH kab/kota d. 20 kampung e. 1 diklat
Realisasi Kinerja	:	a. 50 lembaga pendidikan b. 10 DLH kab/kota c. 10 DLH kab/kota d. 20 kampung e. 1 diklat
Capaian Kinerja (%)	:	a. 100,00 b. 100,00 c. 100,00 d. 100,00 e. 100,00
Capaian Fisik (%)	:	100,00
Pagu Anggaran (Rp)	:	750.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	683.329.300,00
Capaian Anggaran (%)	:	91,11
Rekomendasi	:	Akan meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	:	a. Jumlah lembaga pendidikan yang didampingi untuk kegiatanadiwiyata nasional dan mandiri b. Jumlah DLH kab/kota yang didampingi untuk kegiatan adipura c. Jumlah DLH kab/kota yang didampingi untuk kegiatan kalpataru d. Jumlah pendampingan kampung iklim
Target Kinerja	:	a. 30 lembaga pendidikan b. 10 DLH kab/kota c. 10 DLH kab/kota d. 2 kampung iklim
Realisasi Kinerja	:	a. 30 lembaga pendidikan b. 10 DLH kab/kota c. 10 DLH kab/kota d. 2 kampung iklim
Capaian Kinerja (%)	:	a. 100,00 b. 100,00 c. 100,00 d. 100,00
Capaian Fisik (%)	:	95,98
Pagu Anggaran (Rp)	:	100.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	78.655.386,00
Capaian Anggaran (%)	:	78,66
Kendala/Permasalahan	:	Terdapat kendala pandemi Covid-19dikarenakan tidak adanya pendampingan Adipura, Adiwiyatadikarenakan *injurytime* dimana waktu mepet saat penyampaian penghargaan.
Rekomendasi	:	Akan meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Indikator Kinerja	:	Persentase penghargaan lingkungan hidupyang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan
Target Kinerja	:	66,66 %
Realisasi Kinerja	:	95%

$$\frac{95}{100} \times 100\% = 95\%$$

Dimana angka 95 (sembilan puluh lima) dari jumlah penghargaan Adiwiyata Provinsi 37(tiga puluh tujuh) sekolah, Adiwiyata Nasional 24 (dua puluh empat) sekolah, Adiwiyata Mandiri 5 (lima) sekolah, Kalpataru Provinsi 7(tujuh) tokoh, dan 22 (dua puluh dua) kampungiklim.
Angka 100 (seratus) adalah jumlah dari 60 (enam puluh) sekolah yang dibina, 10 (sepuluh) calon kalpataru yang dibina, dan 30 (tiga puluh) kampung iklim yang dibina.

Capaian Kinerja (%)	:	143,00
Capaian Fisik (%)	:	100,00
Pagu Anggaran (Rp)	:	200.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	172.576.950,00
Capaian Anggaran (%)	:	86,29
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja ditahun berikutnya.

1) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat DaerahProvinsi

Indikator Kinerja	:	Persentase masyarakat/ lembaga pendidikan/ dunia usaha yang memenuhi syarat untuk diberikan penghargan dari hasil pembinaan
Target Kinerja	:	66,66%
Realisasi Kinerja	:	95%

$$\frac{95}{100} \times 100\% = 95\%$$

Dimana angka 95 (sembilan puluh lima) penghargaan yang diberikan yang memenuhi syarat, yaitu AdiwiyataProvinsi 37 (tiga puluh tujuh) sekolah,Adiwiyata Nasional 24 (dua puluh empat)sekolah, Adiwiyata Mandiri 5 (lima)sekolah, Kalpataru Provinsi 7 (tujuh)tokoh, dan 22 (dua puluh dua) kampung iklim.Angka 100 (seratus) adalah jumlah dari 60(enam puluh) sekolah yang dibina, 10 (sepuluh) calon kalpataru yang dibina, dan 30 (tiga puluh) kampung iklim yang dibina.

Capaian Kinerja (%)	:	143,00
Capaian Fisik (%)	:	100,00
Pagu Anggaran (Rp)	:	200.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	172.576.950,00
Capaian Anggaran (%)	:	86,29
Rekomendasi	:	Mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	:	a. Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi yang diberikan b. Jumlah penghargaan properprovinsi yang diberikan
Target Kinerja	:	a. 65 penghargaan b. 235 penghargaan
Realisasi Kinerja	:	a. 60 penghargaan b. 255 penghargaan
Capaian Kinerja (%)	:	a. 92,31 b. 108,51
Capaian Fisik (%)	:	100,00
Pagu Anggaran (Rp)	:	200.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	172.576.950,00
Capaian Anggaran (%)	:	86,29
Rekomendasi	:	Akan meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	:	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang diselesaikan
Target Kinerja	:	100%
Realisasi Kinerja	:	100%
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	94,96
Pagu Anggaran (Rp)	:	730.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	521.252.700,00
Capaian Anggaran (%)	:	71,40
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

1) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat DaerahProvinsi

Indikator Kinerja	:	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti
Target Kinerja	:	100%
Realisasi Kinerja	:	100% Jumlah pengaduan di bidang PPLH yang ditindak lanjuti sebesar 18 (delapan belas)pengaduan dan pengaduan yang dilaporkan sebesar 18 (delapan belas) pengaduan. Rincian pengaduan setiapbulan, yaitu 3 (tiga) pengaduan pada bulan Januari, 1 (satu) pengaduan bulan Maret, 1 (satu) pengaduan bulan April, 2 (dua) pengaduan bulan Mei, 1 (satu) pengaduanbulan Juni, 1 (satu) pengaduan bulan Juli, 1 (satu) pengaduan bulan Agustus, 4 (empat) pengaduan bulan September, 1(satu) pengaduan bulan Oktober, dan 3 (tiga) pengaduan bulan November.
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	94,96
Pagu Anggaran (Rp)	:	730.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	521.252.700,00
Capaian Anggaran (%)	:	71,40
Rekomendasi	:	mempertahankancapaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLHProvinsi

Indikator Kinerja	:	Jumlah pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti
Target Kinerja	:	9 dok hasil tindak lanjut
Realisasi Kinerja	:	20 dok hasil tindak lanjut Total aduan yang masuk sebanyak 34 (tiga puluh empat) aduan dimana 20 (dua puluh) aduan difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan 14 (empat belas) aduan dilimpahkan sesuai kewenangannya.
Capaian Kinerja (%)	:	222,22
Capaian Fisik (%)	:	95,10
Pagu Anggaran (Rp)	:	415.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	301.226.800,00
Capaian Anggaran (%)	:	72,58
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan

Indikator Kinerja	:	a. Jumlah fasilitasi sengketa lingkungan hidup b. Jumlah penerapan sanksiadministrasi lingkungan hidup atas tindak lanjut pengaduan
Target Kinerja	:	a. 7 dok hasil fasilitasi b. 2 dok hasil penerapan sanksi
Realisasi Kinerja	:	a. 7 dok hasil fasilitasi b. 2 dok hasil penerapan sanksi
Capaian Kinerja (%)	:	a. 100,00 b. 100,00
Capaian Fisik (%)	:	84,82
Pagu Anggaran (Rp)	:	315.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	220.025.900,00
Capaian Anggaran (%)	:	69,85
Rekomendasi	:	Akan tetap mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya.

11. Program Pengelolaan Persampahan

Indikator Kinerja	:	Persentase pengelolaan sampah sesuai jakstrada
Target Kinerja	:	74%
Realisasi Kinerja	:	78,43% Jumlah sampah yang dikelola sebesar 569.245,41 ton dan jumlah timbulan sampah sebesar 725.834,66 ton.
Capaian Kinerja (%)	:	105,99
Capaian Fisik (%)	:	62,91
Pagu Anggaran (Rp)	:	1.280.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	677.874.300,00
Capaian Anggaran (%)	:	52,96
Rekomendasi	:	Akan terus meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

1) Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

Indikator Kinerja	:	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim
Target Kinerja	:	74%
Realisasi Kinerja	:	65,24%
Capaian Kinerja (%)	:	88,16
Capaian Fisik (%)	:	62,91
Pagu Anggaran (Rp)	:	1.280.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	677.874.300,00
Capaian Anggaran (%)	:	52,96
Rekomendasi	:	Akan terus meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional

Indikator Kinerja	:	Jumlah Kajian Penanganan Sampah Lintas Kab/Kota
Target Kinerja	:	1 Kajian
Realisasi Kinerja	:	0 Kajian
Capaian Kinerja (%)	:	0,00
Capaian Fisik (%)	:	4,10
Pagu Anggaran (Rp)	:	268.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	860.000,00
Capaian Anggaran (%)	:	0,32
Kendala/Permasalahan	:	1. Target diawal adalah menyusun pembentukan TPS Regional untuk Kota Samarinda dan Kab. Kutai Kartanegara, namun terdapatkesalahan penginputan kode rekening di SIPD. Sudah mencoba untuk melakukan perbaikan dan pengusulan di perubahaan dan terus mengkoordinasi dengan Sub Bagian Program namun usulan perubahan tidak disetujui 2. Terbatasnya waktu pelaksanaan dari perencanaan dilakukan dalam6 (enam) bulan menjadi 3 (tiga) bulan. 3. Terjadinya kesalahan dalammenginput satuan pekerjaan di DPA yang seharusnya bulanmenjadi orang.
Rekomendasi	:	Akan terus meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus

Indikator Kinerja	:	Jumlah laporan penanganan sampah kondisi khusus
Target Kinerja	:	4 Laporan
Realisasi Kinerja	:	4 Laporan
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	80,17
Pagu Anggaran (Rp)	:	266.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	161.580.800,00
Capaian Anggaran (%)	:	60,74
Kendala/Permasalahan	:	1. Target adalah 4 (empat) laporan, dimana laporan ini dibagi zona,yaitu a. Zona selatan (Kab. Paser, Kab. PPU, dan Kota Balikpapan). b. Zona tengah (Kota Samarinda, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, dan Kab. Mahakam Ulu) c. Zona utara (Kota Bontang, Kab. Kutai Timur, dan Kab. Berau). .

Dimana laporan ini terdiri dariaspek pengelolaan sampah yang terkait dengan regulasi dan pembiayaan. Namun Provinsi Kalimantan Timur tertinggal dikarenakan hanya memiliki regulasi yaitu Jakstrada,sedangkan Provinsi lain sudah mempunyai perda pengelolaan sampah. Seiring waktu diminta oleh Gubernur Kaltim untuk menyusun pergub tentang pembatasan pemakaian sekali pakai yang berbahan plastik. Pada aspek pembiayaan, terdapat kesulitan dari pihak Kab./Kota dikarenakan jika dibandingkan dengan OPD lain, persampahan tidak terlalu dilihat.

2. Pengembalian dana *refocusing* perjalanan dinas yang terjadi pada akhir tahun sehingga dana perjalanan dinas tidak terserapseluruhnya.
3. Belanja modal personal *computer*
   – laptop tidak tersedia sesuai spesifikasi dan harga di pasaran.

Rekomendasi : Akan terus meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

- Sub Kegiatan Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

Indikator Kinerja	:	Jumlah koordinasi dan sinkronisasipenyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah di TPA/TPST regional
Target Kinerja	:	1 Laporan
Realisasi Kinerja	:	1 Laporan
Capaian Kinerja (%)	:	100,00
Capaian Fisik (%)	:	88,50
Pagu Anggaran (Rp)	:	266.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp)	:	238.272.300,00
Capaian Anggaran (%)	:	89,58
Kendala/Permasalahan	:	1. Direncanakan saat penyusunan target adalah 10 (sepuluh) Kab./Kota namun terdapat arahan dari pihak asistensi untukmengubah menjadi 1 (satu)laporan akhir sehingga capaiankinerja baru bisa terealisasi diakhir tahun. Terdapat kendala lain dalam penyusunan laporan dikarenakan terdapat Kab./Kota yang belum menyampaikan data.

2. Pandemi Covid-19 menjadi penghalang dalam melakukan perjalanan dinas sehingga terdapat beberapa acara yangdibatalkan.
3. *Refocusing* perjalanan dinas sebesar 42% yang dibatalkan danbaru diinfokan pada akhir bulan Oktober 2021.
4. Dalam pengadaan barang(Komputer dan Printer) tidak bisadilaksanakan dikarenakanspesifikasi barang yang ada diSIPD tidak tersedia di lapangan.

Rekomendasi : Tahun depan dilakukan penanganan khusus yang sama namun terfokuskanke Kaskade Mahakam dan sampah laut.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana danSarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

Indikator Kinerja : Jumlah lembaga yang melaksanakan kerjasama penanganan sampah lintaskab/kota

Target Kinerja : 1 Lembaga
Realisasi Kinerja : 1 Lembaga
Capaian Kinerja (%) : 100,00
Capaian Fisik (%) : 78,86
Pagu Anggaran (Rp) : 480.000.000,00
Realisasi Anggaran (Rp) : 277.161.200,00
Capaian Anggaran (%) : 57,74
Kendala/Permasalahan :

1. Akan melakukan sosialisasi terkaitaplikasi SPARKLING apakah ada masukan terkait dengan aplikasi dikarenakan akan dilakukanpenggabungan bank-bank sampahse-Kalimantan Timur.
2. Terjadi pandemi Covid-19, sehingga ada beberapa perjalanan dinas yang tertunda/batal dan beberapa acara menghadiri Undangan dilaksanakan melalui via daring.
3. Pengadaan peralatan computer tidak dapat dilaksanakan dikarenakan spesifikasi barang tidak tersedia di pasaran.

Rekomendasi : Akan terus meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

Adapun tabel rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD Tahun 2021 adalah tertuang dalam tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021

Provinsi Kalimantan Timur

PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
A.	**Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**									
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan terhadap pelayanan urusan bidang lingkungan hidup**	**85,40**	**84,08**	**85,30**	**84,08**	**98,57**	**85,35**	**253,51**	**296,85**
1.1	Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100	100	100	100	100,00	100	300,00	300,00
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan	100	100	100	100	100,00	100	300,00	300,00

1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100	100	100	100	100,00	100	300,00	300,00
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administasi umum	100	100	100	100	100,00	100	300,00	300,00
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100	100	100	100	100,00	100	300,00	300,00
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pelayanan jasa kantor	100	100	100	100	100,00	100	300,00	300,00
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	100	100	100	100,00	100	300,00	300,00
B.	**Urusan Lingkungan Hidup**									
2	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**300,00**	**300,00**
2.1	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Presentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen perencanaan LH	100	100	100	100	100,00	100	300,00	300,00
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Presentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	100	100	100	100	100,00	100	300,00	300,00
3	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Indeks Kualitas Air Sungai (IKA)**	**53,85**	**53,75**	**51,92**	**53,75**	**103,52**	**53,8**	**161,30**	**299,54**
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	**89,21**	**89,11**	**88,84**	**89,11**	**100,30**	**89,16**	**267,38**	**299,72**
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	**79,91**	**79,81**	**82,21**	**79,81**	**97,08**	**79,86**	**239,48**	**299,69**

		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	**83,66**	**83,56**	**85,4**	**83,56**	**97,85**	**83,61**	**250,73**	**299,70**
3.1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan serta pengendalian perubahan iklim	7	7	7	7	100,00	7	21,00	300,00
3.2	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran (Status Mutu Air) (≤ 8 (Tercemar Sedang))	8	8	2,6	8	307,69	8	24,00	300,00
3.3	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemulihan lingkungan	52,64	42,64	60,62	42,64	70,34	47,64	132,92	252,51
4	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**	**Presentase Perangkat (dokumen dan sistem) keanekaragaan hayati daerah yang terintegrasi kedalam perencanaan pembangunan wilayah (RTRW beserta rencana rinci RPJMD dan RPJPD)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**300,00**	**300,00**
4.1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan keanekaragaman hayati provinsi	5	4	6	4	66,67	5	13,00	260,00
5	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**Persentase Pengurangan penggunan B3 (dari penggunaan merkuri tahun sebelumnya)**	**8**	**0**	**40**	**0**	**0,00**	**4**	**4,00**	**50,00**
		Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)	**50**	**31,56**	**31,56**	**31,56**	**100,00**	**45**	**108,12**	**216,24**

5.1	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	23	23	22	23	104,55	23	69,00	300,00
6	**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Persentase ketaatan usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup yang diawasi**	**100**	**100**	**66,67**	**100**	**149,99**	**100**	**300,00**	**300,00**
6.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan kegiatan usaha dan atau kegiatan yang telah dilakukan pengawasan dan pembinaan	4	4	2	4	200,00	4	12,00	300,00
7	**Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH**	**Persentase kab/kota yang telah teridentifikasi MHA terkait PPLH**	**100**	**50**	**50**	**50**	**100,00**	**100**	**200,00**	**200,00**
7.1	Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen laporan identifikasi dan inventarisasi MHA di kab/kota	2	2	2	2	100,00	2	6,00	300,00
8	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**Persentase peningkatan bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat terkait lingkungan hidup**	**52**	**52**	**200**	**52**	**26,00**	**52**	**156,00**	**300,00**
8.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan lembaga /lembaga terkait lingkungan hidup	165	143	163	143	87,73	154	440,00	266,67

9	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan**	**84,42**	**66,66**	**95**	**66,66**	**70,17**	**83,81**	**217,13**	**257,20**
9.1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase masyarakat/ lembaga pendidikan/ dunia usaha yang memenuhi syarat untuk diberikan penghargan dari hasil pembinaan	86,42	66,66	95	66,66	70,17	83,81	217,13	251,25
10	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**Persentase pengaduan di bidang PPLH yang diselesaikan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**300,00**	**300,00**
10.1	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100,00	100	300,00	300,00
11	**Program Pengelolaan Persampahan**	**Persentase pengelolaan sampah sesuai jakstrada**	**72**	**74**	**78,43**	**74**	**94,35**	**73**	**221,00**	**306,94**
11.1	Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	72	74	65,24	74	113,43	73	221,00	306,94

Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2020 dianggap berhasil meskipun ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya oleh faktor teknis diluar control perencanaan, namun dengan upaya, strategi dan peningkatan koordinasi yang dijalankan oleh jajaran Dinas Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur kendala dan hambatan dapat dicarikan jalan pemecahannya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada sasaran/target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup yang termuat dalam PermenLH no. 19 tahun 2008, dan/atau indikator lainnya seperti dalam MDG's dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca		Penurunan Emisi	Emisi (Juta ton CO2eq)	12,181	12,941	13,818	14,667	24,411	20,897	13,818	14,667	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Standar Nasional 66,5-68,5		Indeks	75,75	75,95	-	-	78,81	75,06	-	-	
Penurunan beban pencemaran			%	5	-	-	-	-	-	-	-	
Indeks Kualitas Air Sungai (IKA)			Indeks	75	53,75	53,8	53,85	77,04	53,75	-	-	
Indeks Kualitas Udara (IKU)			Indeks	80	89,11	89,16	89,21	89,42	89,11	-	-	
Indeks Kualitas Lahan (IKL)			Indeks	70	79,81	79,86	79,91	72,12	79,81	-	-	
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)			Indeks		83,56	83,61	83,66		83,56	-	-	
Jumlah Perusahaan yang dinilai mendapatkan peringkat hijau		Penilaian kinerja perusahaan	Perusahaan	225	-	-	-	226	-	-	-	

Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah			%	-	100	100	100	-	100	-	-	
Presentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen perencanaan LH			%	-	100	100	100	-	100	-	-	
Presentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis			%	-	100	100	100	-	100	-	-	
Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan serta pengendalian perubahan iklim			singkronisasi, koordinasi dan pelaksanaan PPKL dan PPI	-	7	7	7	-	7	-	-	
Indeks Pencemaran (Status Mutu Air) (≤ 8 (Tercemar Sedang))			Indeks	-	2,6	8	8	-	8	-	-	
Persentase pemulihan lingkungan			%	-	60,62	47,64	52,64	-	42,64	-	-	

Presentase Perangkat (dokumen dan sistem) keanekaragaan hayati daerah yang terintegrasi kedalam perencanaan pembangunan wilayah (RTRW beserta rencana rinci RPJMD dan RPJPD)			%	-	100	100	100	-	100	-	-	
Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan keanekaragaman hayati provinsi			Kegiatan	-	6	5	5	-	4	-	-	
Persentase Pengurangan penggunan B3 (dari penggunaan merkuri tahun sebelumnya)			%	-	40	4	8	-	0	-	-	
Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)			%	-	31,56	45	50	-	31,56	-	-	
Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha			Usaha	-	22	23	23	-	23	-	-	
Persentase ketaatan usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup yang diawasi			%	-	66,67	100	100	-	100	-	-	
Jumlah laporan kegiatan usaha dan atau kegiatan yang telah dilakukan pengawasan dan pembinaan			Laporan	-	2	4	4	-	4	-	-	

Persentase kab/kota yang telah teridentifikasi MHA terkait PPLH			%	-	50	100	100	-	50	-	-	
Jumlah dokumen laporan identifikasi dan inventarisasi MHA di kab/kota			Dokumen	-	2	2	2	-	2	-	-	
Persentase peningkatan bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat terkait lingkungan hidup			%	-	200	52	52	-	52	-	-	
Jumlah bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan lembaga /lembaga terkait lingkungan hidup			bimteks, pembinaan, pendampingan	-	163	154	165	-	143	-	-	
Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan			%	-	95	83,81	84,42	-	66,66	-	-	
Persentase masyarakat/ lembaga pendidikan/ dunia usaha yang memenuhi syarat untuk diberikan penghargan dari hasil pembinaan			%	-	95	83,81	86,42	-	66,66	-	-	
Persentase pengaduan di bidang PPLH yang diselesaikan			%	-	100	100	100	-	100	-	-	

Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti			%	-	100	100	100	-	100	-	-	
Persentase pengelolaan sampah sesuai jakstrada			%	-	78,43	73	72	-	74	-	-	
Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim			%	-	65,24	73	72	-	74	-	-	

Berdasarkan analisa pencapaian kinerja pada tahun 2021, secara keseluruhan pencapaian kinerja berhasil dicapai dengan persentase capaian sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 85,14 %.

Indikator kinerja utama dalam implementasi suatu kebijakan menjadi penting sebagai tolok ukur keberhasilan. Selain itu memungkinkan untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala pada saat diimplementasikan. Sehingga, ketika dirasa output dan outcome yag diukur tidak tercapai sesuai keinginan, maka dapat dilakukan analisis untuk merumuskan kembali hal-hal yang belum terdeteksi sebelumnya.

Penetapan indikator kinerja utama merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai. Dengan demikian penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian. dengan penetapan kinerja ini, diharapkan instnasi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukan serta mepertanggungjawabkan kinerjanya. Selain itu, penetapan indikator kinerja utama merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan beroreintasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan perangkat daerah dan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur maka dirumuskan isu strategis lingkup pelayanan beserta faktor pendorong

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

a) Masih rendahnya koordinasi dinas terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan lintas sektoral sehingga sasaran program kerja yang telah disusun kurang maksimal;
b) Belum dimanfaatkannya secara optimal fasilitas kerja sehingga pekerjaan yang penting sering tidak bisa mengerjakan dengan cepat bahkan terlambat, sehingga menghambat semua kegiatan;
c) Perlunya komitmen yang kuat dari seluruh *stakeholder* tentang kesepakatan program/kegiatan.

Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi

a. Koordinasi yang masih parsial sehingga menghambat dalam proses perencanaan dan kegiatan;
b. Tingkat pemahaman Aparatur terhadap tugas dan fungsi belum maksimal;
c. Inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tanggung jawab belum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
d. Kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas yang belum terwujud dengan baik;
e. Penempatan pegawai yang belum sesuai dengan kompetensinya.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pelayanan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

- Tidak semua program dan kegiatan yang direncanakan terealisasi karena tidak tersedianya dana.
- Kurangnya sumber daya manusia (SDM).
- Rendahnya pendidikaan dan pengetahuan pelaku usaha mengenai pengolahan Lingkungan Hidup.
- Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat akan pentingnya kelestarian Lingkungan Hidup.

Kebijakan Lingkungan Hidup bertujuan mewujudkan pembangunan yang selaras dengan lingkungan alam sehingga dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Dengan tujuan Millenium Development Goals antara lain memastikan kelestarian lingkungan hidup, memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang.

Hal-hal tersebut diatas yang menjadi dasar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Implikasi RTRW dan KLHS bagi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, serta RPJPD 2005-2025 dan RPJMD Kaltim 2019-2023, maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan, adalah :

1. Fenomena perubahan iklim dan pemanasan global (*global warming*) serta komitmen pemerintah dalam penurunan emisi GRK secara nasional.
2. Dukungan Provinsi Kalimantan Timur terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
3. Pentingnya penciptaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan.
4. Kurang optimalnya kinerja perlindungan dan pengelolan lingkungan hidup.
5. Lemahnya sistem informasi lingkungan hidup.
6. Menurunnya kualitas lingkungan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan.
7. Rendahnya tingkat kebersihan wilayah Kalimantan Timur.
8. Ancaman timbulan sampah dan belum optimalnya pengelolaan sampahdengan pola 3R
9. Meningkatnya potensi banjir, erosi dan tanah longsor serta dampak perubahan iklim dan pemanasan global akibat lahan kritis,Degradasi lahan dan deforestasi hutan.
10. Ancaman pencemaran sumber daya air (sungai, danau dan laut) , udara dan tanah

Adapun tantangan dan peluang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- **Tantangan :**
  a. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan hidup, kepadatan penduduk, serta laju pembangunan sehingga

berpengaruh terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keberlanjutan sumber daya hayati;

b. Terjadinya peningkatan intensitas fenomena perubahan iklim;
c. Rendahnya komitmen, pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan para pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
d. Kompleksnya peraturan yang berlaku dalam upaya pembebasan lahan untuk konservasi;
e. Meningkatnya sengketa lahan di kawasan Hutan Kota/Ruang Terbuka Hijau;
f. Meningkatnya berbagai usaha/kegiatan yang berpotensi menyebabkan pencemaran dankerusakan lingkungan;
g. Pengelolaan lingkungan hidup sebagian besar masih bersifat parsial dan belum terpadu untuk lintas sector;
h. Meningkatnya pembukaan lahan yang tak berizin;
i. Menurunnya kualitas udara akibat kebakaran hutan/lahan;
j. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan;
k. Belum tersedianya data daya dukung dan daya tampung fungsi yangmenjadi pedoman terhadap perizinan lingkungan;
l. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia aparatur,khususnya pada bidang pengawasan;
m. Terjadinya ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam Kalimantan Timur yang berujung pada konflik sosial dan mempertajam ketidakpastian pengelolaan sumber daya alam;
n. Kondisi lingkungan yang semakin memburuk, ditandai dengan semakin rendahnya daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia;
o. Kalkulasi nilai lingkungan dan hutan yang senantiasa disandingkan dengan nilai langsung yang diperoleh;
p. Belum tersedianya sarana prasarana laboratorium lingkungan yang memadai;
q. Kapasitas penegak hukum lingkungan dan kehutanan belum bisa menanggulangi pelanggaran hukum lingkungan hidup & kehutanan yang terkait dengan penataan ruang, pencegahan perusakan hutan, pencucian uang dan tindak pidana korupsi; dan
r. Belum sinkron dan padunya perencanaan yang ditetapkan dengan pelaksanaan kegiatan.

- **Peluang :**

a. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup termasuk baku mutu yang telah ditetapkan, dengan didukung oleh peraturan daerah yang konsisten dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan seperti dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
b. Adanya reorganisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, yakni perubahan nomenklatur dari badan yang sifatnya hanya koordinatif/penunjang menjadi dinas selaku pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
c. Adanya jejaring kerjasama dengan *stakeholders* meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan hidup, perguruan tinggi, masyarakat, pemuka agama dan penanggung jawab usaha/kegiatan serta komunitas masyarakat pemerhati lingkungan;
d. Pembangunan berkelanjutan yang menjadi inti dari pembangunan global pasca-2015 memungkinkan instrumen kebijakan lingkungan meningkatkan peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam pembangunan berkelanjutan;
e. Kegiatan-kegiatan berkaitan dengan upaya melestarikan lingkungan dan pro-lingkungan swadaya masyarakat semakin sering dilaksanakan;
f. Peningkatan tutupan lahan yang merupakan salah satu indikator lingkungan hidup yang lebih baik;
g. Meningkatnya atensi global tentang isu lingkungan dan dampak perubahan iklim;
h. Adanya peluang pendanaan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak hanya bersumber dari APBD;
i. Adopsi program nasional yang inovatif yang telah dihasilkan seperti PROPER, Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, dan Keanekaragaman Hayati;
j. Bertambahnya sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih serta berpengalaman di bidang lingkungan hidup; dan
k. Adanya berbagai program dan kegiatan pengelolaan lingkungan yang sudah berjalan dengan cukup baik dan berkelanjutan.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2023 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Lingkungan Hidup adalah Persandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan.

Program Rutin Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Tabel Reviu Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel.2.3

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Provinsi Kalimantan Timur

PD :Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

No	Rancang Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (dalam ribu Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (juta)	
	WAJIB										
I.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10 Kab/Kota	Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	53,85 89,21 79,91 83,63	4.625.485	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10 Kab/Kota	Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	53,85 89,21 79,91 83,63	4.625.485	Selaras
1.	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan LH	10 Kab/Kota	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan serta pengendalian perubahan iklim	7 singkronisasi, koordinasi	1.550.000	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan LH	10 Kab/Kota	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan serta pengendalian perubahan iklim	7 singkronisasi, koordinasi	1.550.000	Selaras

	1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	53 Dokumen	775.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	53 Dokumen	775.000	Selaras
	2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10 Kab/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah	13 Dokumen	775.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10 Kab/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah	13 Dokumen	775.000	Selaras
	2	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10 Kab/Kota	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	≤ 8 (tercemar sedang)	2.755.485	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10 Kab/Kota	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	≤ 8 (tercemar sedang)	2.755.485	Selaras
	1	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1.755.485	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1.755.485	Selaras
	2	Sub Kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10 Kab/Kota	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	200 Lokasi	1.000.000	Sub Kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10 Kab/Kota	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	200 Lokasi	1.000.000	Selaras
	3	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	10 Kab/Kota	Persentase Pemulihan Lingkungan	52,64%	420.000	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	10 Kab/Kota	Persentase Pemulihan Lingkungan	52,64%	320.000	Selaras
	1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 Dokumen	120.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 Dokumen	120.000	Selaras

							Pembersihan Unsur Pencemar					
	2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1 Dokumen	0	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1 Dokumen	0	Selaras
	3	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	15 Dokumen	200.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	15 Dokumen	200.000	Selaras
	4	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Kukar dan Kubar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	4 Dokumen	0	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Kukar dan Kubar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	4 Dokumen	0	Selaras
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		10 Kab/Kota	Skor Kepuasan terhadap pelayanan urusan bidang lingkungan hidup	85,40 %	21.199.900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10 Kab/Kota	Skor Kepuasan terhadap pelayanan urusan bidang lingkungan hidup	85,40 %	21.199.900	Selaras
	1	Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Kab/Kota	Persentase perencanaan, penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 %	980.000	Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Kab/Kota	Persentase perencanaan, penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 %	980.000	Selaras
	1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Kab/Kota	Jumlah dokumen perencanaanJumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Kab/Kota	Jumlah dokumen perencanaanJumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	400.000	Selaras
	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	60.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	60.000	Selaras

	3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	40.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	40.000	Selaras
	4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	40.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	40.000	Selaras
	5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	40.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	40.000	Selaras
	6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Kab/Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	300.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Kab/Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	300.000	Selaras
	7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Kab/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	100.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Kab/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	100.000	Selaras
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase penatausahaan keuangan	100 %	14.249.046.460	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase penatausahaan keuangan	100 %	14.249.046.460	Selaras
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	826 Orang/Bulan	13.130.286.460	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	826 Orang/Bulan	13.130.286.460	Selaras
	2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	1.118.760	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	1.118.760	Selaras
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100 %	280.385	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100 %	280.385	Selaras

		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	220 Paket	80.385	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	220 Paket	80.385	Selaras
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	200.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	200.000	Selaras
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase pelaksanaan administasi umum	100 %	1.459.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase pelaksanaan administasi umum	100 %	1.459.000	Selaras
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	100.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah perlengkapan kantor	50	103.400	Selaras
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	100.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	100.000	Selaras
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	9.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	9.000	Selaras
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kab/Kota Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	1.250.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kab/Kota Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	1.250.000	Selaras
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100 %	2.881.468	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100 %	2.881.468	Selaras
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	1.170.539	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	1.170.539	Selaras
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	5 Unit	200.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	5 Unit	200.000	Selaras

		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Disediakan			Kantor atau Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Disediakan			
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit	650.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit	650.000	Selaras
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase pelayanan jasa kantor	100%	2.881.468.540	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase pelayanan jasa kantor	100%	2.881.468.540	Selaras
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	500.000	Selaras
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.381.468.540	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.381.468.540	Selaras
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	500.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	500.000	Selaras
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Kendaraan	300.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Kendaraan	300.000	Selaras
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	200.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	200.000	Selaras

III.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	10 Kab/Kota	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah	100%	**1.095.000**	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	10 Kab/Kota	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah	100%	**1.095.000**	Selaras
1.	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	10 Kab/Kota	Presentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen perencanaan LH	100 %	440.000	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	10 Kab/Kota	Presentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen perencanaan LH	100 %	440.000	Selaras
	1 Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	10 Kab/Kota	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	220.000	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	10 Kab/Kota	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	220.000	Selaras

	2 Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	220.000	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	220.000	Selaras
2	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	10 Kab/Kota	Presentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	100 %	655.000	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	10 Kab/Kota	Presentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	100 %	655.000	Selaras
	1 Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	300.000	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	300.000	Selaras
	2 Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	275.000	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	275.000	Selaras
	3 Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7 Kab/Kota	Jumlah kab/kota yang dilakukan sosialisasi dan pembinaan Hasil KLHS RZWP3K	7 Kab/Kota	45.000	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7 Kab/Kota	Jumlah kab/kota yang dilakukan sosialisasi dan pembinaan Hasil KLHS RZWP3K	7 Kab/Kota	45.000	Selaras
	4 Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Samarinda	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang DisusunPembuatan buku peraturan terkait penyusunan KLHS	1 Dokumen	30.000	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Samarinda	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang DisusunPembuatan buku peraturan terkait penyusunan KLHS	1 Dokumen	30.000	Selaras
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	10 Kab/Kota	Presentase Perangkat (dokumen dan sistem) keanekaragaan hayati daerah yang terintegrasi kedalam perencanaan pembangunan wilayah (RTRW beserta rencana rinci RPJMD dan RPJPD	100 %	500.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	10 Kab/Kota	Presentase Perangkat (dokumen dan sistem) keanekaragaan hayati daerah yang terintegrasi kedalam perencanaan pembangunan wilayah (RTRW beserta rencana rinci RPJMD dan RPJPD	100 %	500.000	Selaras
1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	10 Kab/Kota	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan keanekaragaman hayati provinsi	5 Kegiatan	500.000	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	10 Kab/Kota	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan keanekaragaman hayati provinsi	5 Kegiatan	500.000	selaras

	1	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Samarinda	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	100.000	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Samarinda	Jumlah dokumen profil KEHATI Provinsi	1 Dok	400.000	selaras
	2	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Samarinda	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	650 Ha	100.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Samarinda	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	650 Ha	100.000	selaras
	3	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	10 Kab/Kota	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	532.143 Ha	200.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	10 Kab/Kota	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	532.143 Ha	200.000	selaras
	4	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Samarinda Balikpapan	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	60 Orang	100.000	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Samarinda Balikpapan	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	60 Orang	100.000	selaras
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		10 Kab/Kota	Persentase Pengurangan penggunan B3 (dari penggunaan merkuri tahun sebelumnya)	9%	550.000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	10 Kab/Kota	Persentase Pengurangan penggunan B3 (dari penggunaan merkuri tahun sebelumnya)	9%	550.000	selaras
				persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)	50%				persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)	50%		
1	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		10 Kab/Kota	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	23 Usaha	550.000	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10 Kab/Kota	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	23 Usaha	550.000	selaras
	1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Kab/Kota	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	350.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Kab/Kota	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	350.000	selaras

	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	7 Dokumen	200.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	7 Dokumen	200.000	selaras
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		10 Kab/Kota	Persentase ketaatan usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup yang diawasi	100 %	1.030.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	10 Kab/Kota	Persentase ketaatan usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup yang diawasi	100 %	1.030.000	selaras
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		10 Kab/Kota	Jumlah laporan kegiatan usaha dan atau kegiatan yang telah dilakukan pengawasan dan pembinaan	12 Laporan	1.030.000	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	10 Kab/Kota	Jumlah laporan kegiatan usaha dan atau kegiatan yang telah dilakukan pengawasan dan pembinaan	12 Laporan	1.030.000	**Selaras**
	1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	10 Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	1 Dokumen	75.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	10 Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	1 Dokumen	75.000	**Selaras**

	2	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	10 Kab/Kota	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	35 Orang	75.000	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	10 Kab/Kota	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	35 Orang	75.000	**Selaras**
	3	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	10 Kab/Kota	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100 Laporan	680.000	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	10 Kab/Kota	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100 Laporan	680.000	**Selaras**
	4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50 Dokumen	200.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50 Dokumen	200.000	**Selaras**
VII	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Paser	Persentase kab/kota yang telah teridentifikasi MHA terkait PPLH	100 %	100.000	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Paser	Persentase kab/kota yang telah teridentifikasi MHA terkait PPLH	100 %	100.000	**Selaras**
1	Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Paser	Jumlah dokumen laporan identifikasi dan inventarisasi MHA di kab/kota	2 Dokumen	100.000	Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Paser	Jumlah dokumen laporan identifikasi dan inventarisasi MHA di kab/kota	2 Dokumen	100.000	**Selaras**
	1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	5 Dokumen	100.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	5 Dokumen	100.000	**Selaras**

VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	10 Kab/Kota	Persentase peningkatan bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat terkait lingkungan hidup	52 %	850.000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	10 Kab/Kota	Persentase peningkatan bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat terkait lingkungan hidup	52 %	850.000	**Selaras**
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	10 Kab/Kota	Jumlah bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan lembaga /lembaga terkait lingkungan hidup	165 bimteks, pembinaan, pendampingan	850.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	10 Kab/Kota	Jumlah bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan lembaga /lembaga terkait lingkungan hidup	165 bimteks, pembinaan, pendampingan	850.000	selaras
	1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	10 Kab/Kota	Jumlah pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup	3 Diklat	750.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	10 Kab/Kota	Jumlah pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup	3 Diklat	750.000	selaras
	2 Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	10 Kab/Kota	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	60 Dokumen	100.000	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	10 Kab/Kota	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	60 Dokumen	100.000	selaras
VIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	10 Kab/Kota	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan	84,42%	1.000.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	10 Kab/Kota	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan	84,42%	1.000.000	selaras
1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	10 Kab/Kota	Persentase masyarakat/ lembaga pendidikan/ dunia usaha yang memenuhi syarat untuk diberikan penghargan dari hasil pembinaan	86,42%	1.000.000	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	10 Kab/Kota	Persentase masyarakat/ lembaga pendidikan/ dunia usaha yang memenuhi syarat untuk diberikan penghargan dari hasil pembinaan	86,42%	1.000.000	selaras

	1 Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Samarinda	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	295 Entitas	1.000.000	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Samarinda	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	295 Entitas	1.000.000	selaras
IX	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10 Kab/Kota	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang diselesaikan	100 %	950.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10 Kab/Kota	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang diselesaikan	100 %	950.000	selaras
1	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	10 Kab/Kota	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100 %	950.000	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	10 Kab/Kota	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100 %	950.000	selaras
	1 Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	10 Kab/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Diitangani	16 Dokumen	650.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	10 Kab/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Diitangani	16 Dokumen	650.000	selaras
	2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	11 Dokumen	300.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	11 Dokumen	300.000	selaras
X	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10 Kab/Kota	Persentase pengelolaan sampah sesuai jakstrada	72 %	1.099.615	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10 Kab/Kota	Persentase pengelolaan sampah sesuai jakstrada	72 %	1.099.615	selaras

1	Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Kukar	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	72 %	1.099.615	Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Balikpapan	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	72 %	1.099.615	selaras
	1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	-	250.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	-	250.000	selaras
	2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	-	249.615	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	-	249.615	selaras
	3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	400.000	selaras
	4	Sub Kegiatan Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	10 Kab/Kota	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan	-	200.000	Sub Kegiatan Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	10 Kab/Kota	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan	-	200.000	selaras

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kebijakan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dengan kesepakatan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota tahun 2022.

Berikut usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Tabel 2.4

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	10 Kab/Kota	10 Komisi Penilai Amdal; 25 dokumen rekomendasi; 10 Pelaku Usaha	Karena untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kunci urusan lingkungan hidup
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota; 1 Sistem Informasi; 1 Bimtek	Karena untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kunci urusan lingkungan hidup
3	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	10 Kab/Kota	186 Pemantauan;	Karena untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kunci urusan lingkungan hidup
4	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10 Kab/Kota	2 kegiatan pengisolasian; 100 Sumber pencemaran; 10 Rekomendasi teknis izin PPLH;	Karena untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kunci urusan lingkungan hidup

			1 draft produk hukum daerah	
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	10 Kab/Kota	11 koordinasi pelaksanan pembersihan unsur pencemar	Karena untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kunci urusan lingkungan hidup
6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	10 Kab/Kota	3 koordinasi pelaksanan remidiasi	Karena untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kunci urusan lingkungan hidup
7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	10 Kab/Kota	6.000 ha	Karena untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kunci urusan lingkungan hidup
8	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	10 Kab/Kota	1 Danau	Karena untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kunci urusan lingkungan hidup

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah danPP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah :

• Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.

• Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan.

• Membangun hubungan interdependensi antar daerah.

• Menetapkan pendekatan kewilayahan.

Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 dengan PP No. 18 Tahun 2016, Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada di Daerah,maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumberdaya alam danlingkungan hidup, namun sejak tahun 2020 program nasional melalui kegiatan dekonsentrasi tidak lagi dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Transformasi pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur dari semula berbasis *unrenewable resources* ke *renewable resources* harus dilakukan dan hanya dapat diwujudkan bila ada keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan dan sosial dalam perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau.Sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya daerah berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan melalui ekonomi hijau maka komitmen terhadap perbaikan lingkungan menjadi hal yang niscaya. Membangun keterkaitan hulu dan hilir dari berbagai komoditas unggulan dapat menjadi basis perekonomian Kalimantan Timur masa mendatang.Keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Kalimantan Timur.Oleh karena itu, peran serta masyarakat dan para pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan pembangunan daerah berbasis agroindustry serta penggunaan dan penerapan energi ramah lingkungan sangat dibutuhkan saat ini, termasuk pula Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, memiliki peran sangat sentral bagi penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan berperspektif perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Timur (beserta seluruh perangkat daerah) dengan layanan yang akuntabel, partisipatif, dan transparan. Perbaikan dalam layanan bidang lingkungan hidup secara serempak Bersama seluruh Perangkat Daerah pada dasarnya dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri karena menjembatani partisipasi masyarakat (jika direspons dengan baik) melalui akses, inovasi, dan kolaborasi semua Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Berpijak pada pemahaman tersebut, secara teknis kerangka logis layanan pada dasarnya dipisahkan dalam dua kelompok,yaitu: (1) pelayanan terhadap aparatur untuk meningkatkan kualitas layanan publik; dan (2) pelayanan terhadap masyarakat dimana lingkungan dan segala kenakeragaman hayatinya merupakan modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang apabila tidak dijaga, dilindungi dan dilestarikan akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup seluruh seluruh makhluk hidup sekarang dan masa mendatang. Adapun kerangka logis pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tersebut pada dasarnya dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1
Kerangka Logis: Struktur Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

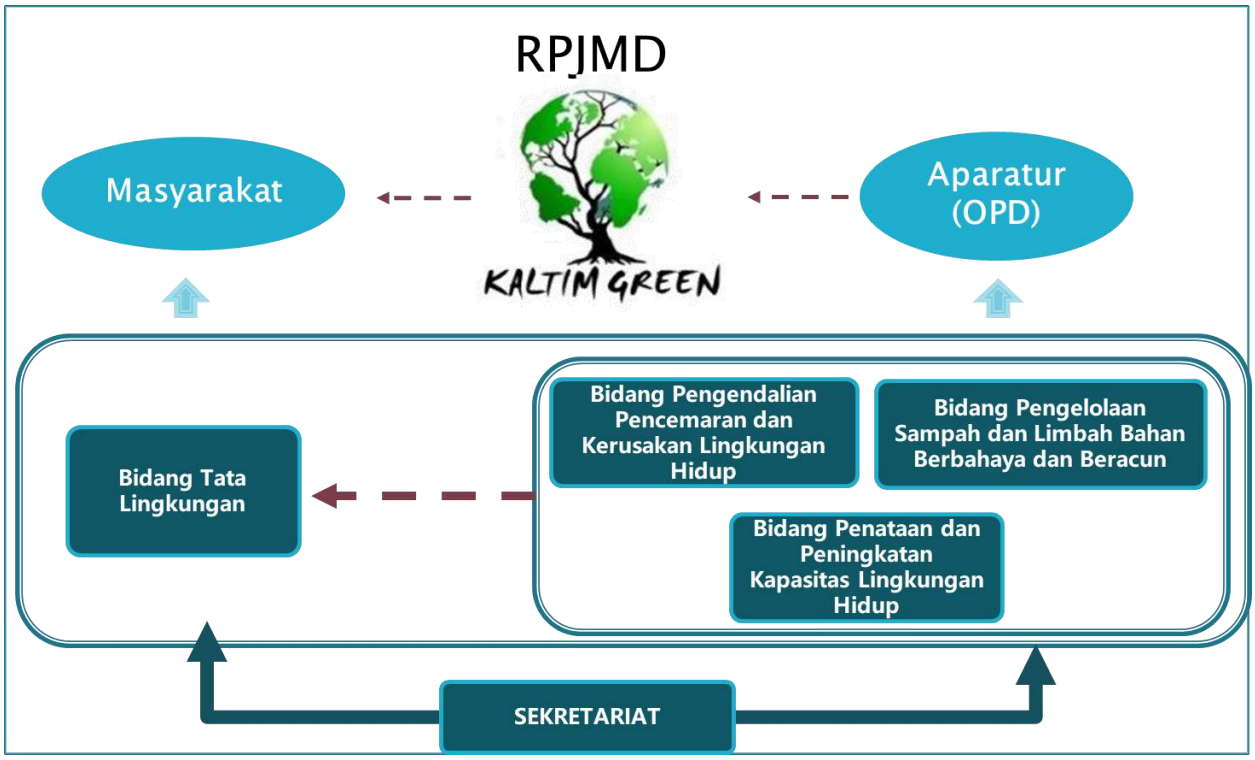

Dalam rangka mewujudkan Kaltim Green, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur hingga kini terus bermetamorfosis dalam perbaikan layanannya guna mendukung visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih 2019-2023. Peran penting Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung komitmen nasional untuk menurunkan emisi GRK sebanyak 27,75% dari *Business as Usual* (BAU), dengan bantuan internasional dan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengurangi emisi GRK sebanyak 30% pada tahun 2030 dari tingkat emisi pada tahun tersebut, merupakan tujuan paling strategis bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Mendukung upaya pemerintah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, sebagai satuan kerja dengan memerhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan lima tahun kedepan, menetapkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, yakni: **Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup menuju pembangunan Kaltim Hijau yang berdaulat, berkelanjutan dan berperspektif perubahan iklim,** dengan tujuan jangka menengahnya yaitu:**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup,** dengan indikator tujuan:**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH**) dan sasaran jangka menengah yaitu : **Jumlah Menurunnya emisi gas rumah kaca,** dengan indikator sasaran:Penurunan Intensitas Emisi (%).

Tabel : 1

Tujuan, Sasaran, dan IndikatorSasaranDinasLingkunganHidup

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir (2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
Menurunnya emisi gas rumah kaca dari BAU Baseline	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi	3.210 emisi (juta ton CO2 eq)	12.181 emisi (juta ton Co2 eq)	12.941 emisi (juta ton Co2 eq)	13.818 emisi (juta ton Co2 eq)	14.667 emisi (juta ton Co2 eq)	15.558 emisi (juta ton Co2 eq)	15.558 emisi (juta ton Co2 eq)

3.3.Program dan Kegiatan.

Perencanaan program dan kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur yang tertuang dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, dengan tema "Penguatan Ketahanan Ekonomi, sosial dan lingkungan menuju kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat"

Indikator dan target kinerja, tujuan dan sasaran pembangunan dalam rancangan awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur ada pada tujuan 5 yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Indikator Kinerja Indeks Kualitas LIngkungan Hidup (IKLH), satuannya indeks dengan target 76,15. Sasaran yang akan dicapai ada pada sasaran 15 yaitu

menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan indikator Kinerja Persentase Penurunan emisi dari BAU dengan satuan persen (%), target tahun 2023 sebesar 29,33 %.

Program Prioritas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur adalah Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Adapun Jumlah Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Program berjumlah :11 (Sebelas) Program, 20 (Dua Puluh) Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
   a. Kegiatan PencegahanPencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
      - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
      - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

   b. Kegiatan PenanggulanganPencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
      - Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
      - Sub Kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

   c. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
      - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi
      - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
      - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
   a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
      - Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
      - Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi

   b. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
      - Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
      - Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
      - Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
      - Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untukKRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati(KEHATI)
    a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
        - Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
        - Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
        - Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
        - Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
        - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
    a. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
        - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
        - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
    a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
        - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
        - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas PejabatPengawas Lingkungan Hidup
        - Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
        - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH
    a. Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkaitdengan PPLH

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan HakMHA terkait dengan PPLH

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
      - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
      - Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
   a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
      - Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Program Penanganan Pengaduan LingkunganHidup
   a. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup (PPLH) Provinsi
      - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakatterhadap PPLH Provinsi
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
10. Program Pengelolaan Persampahan
    a. Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
       - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional
       - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
       - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
       - Sub Kegiatan Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
    a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
       - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan MesinLa

Dari Program dan kegiatan serta Sub Kegiatan diatas total dana/pagu indikatif ditambahkan dengan tambahan anggaran adalah sebesar **Rp. 53.437.694.858,- (Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Tiga**

Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 memuat 11 Program, 20 Kegiatan, dan 57 Sub Kegiatan yang tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Dan Prakiraan maju tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam ribu Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Samarinda, Kukar, Kubar, Bontang, Paser, Berau	53,85 89,21 79,91 83,66	4.625.485				
1		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan LH	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan serta pengendalian perubahan iklim	10 Kab/Kota	7 singkronisasi, koordinasi dan pelaksanaan PPKL dan PPI	1.550.000				

	1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan Rekomendasi Izin Lingkungan/ persetujuan lingkungan/ perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah	10 Kab/Kota	25 Dokumen	775.000				
			Jumlah KPA (Komisi Penilai Amdal)/Tim uji kelayakan/ tata laksana uji kelayakan Kab/Kota yang diterbitkan rekomendasi lisensinya		8 KPA					
			Jumlah Komisi Penilai Amdal /Tim uji kelayakan/tata laksana uji kelayakan Kab/Kota yang dibina dan diawasi		10 KPA					
			Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan izin lingkungan/ persetujuan lingkungan/ perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah		10 pelaku usaha dan/atau kegiatan					
	2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10 Kab/Kota	10 kab/kota	775.000				
			Jumlah sistem informasi dan infrastruktur MRV yang terbangun dan beroperasi		1 sistem					
			Jumlah Bimtek/diklat pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam penyelenggaraan sistem MRV		2 kali					
2		Kegiatan Penanggulangan	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	10 Kab/Kota	≤ 8	2.755.485				

		Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			(tercemar sedang)					
	1	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)		54 titik pantau	1.755.485				
			Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)		80 titik pantau					
			Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		52 titik pantau					
	2	Sub Kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sumber pencemaran yang dilakukan pengisolasian	10 Kab/Kota	200 Titik	1.000.000				
3		Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	Persentase Pemulihan Lingkungan	10 Kab/Kota	47,64%	420.000				
	1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah koordinasi pelaksanan pembersihan unsur pencemar	10 Kab/Kota	11 Koordinasi	120.000				
	2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Luas lahan terkontaminasi yang diinventarisasi dan diidentifikasi	10 Kab/Kota	2 ha	0				
	3	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas lahan reklamasi, revegetasi, lahan terbuka dan kerusakan lahan yang diinventarisasi	10 Kab/Kota	6.000 ha	200.000				
	4	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Danau yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	Kukar dan Kubar	1 danau	0				
II		PROGRAM PENUNJANG	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	10 Kab/Kota	85,40	21.199.900				

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	terhadap pelayanan urusan lingkungan hidup						
1		Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	10 Kab/Kota	100	980.000			
	1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	10 Kab/Kota	6	400.000			
	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA sub kegiatan SKPD	10 Kab/Kota	1	60.000			
	3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA sub kegiatan SKPD	10 Kab/Kota	1	40.000			
	4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Rincian Belanja DPA SKPD	10 Kab/Kota	1	40.000			
	5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA perubahan SKPD	10 Kab/Kota	1	40.000			
	6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	10 Kab/Kota	4	300.000			
	7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan evalusasi kinerja perangkat daerah	10 Kab/Kota	12	100.000			
2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan keuangan	Samarinda	100	14.249.046			

	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	Samarinda	14	13.130.286				
			jumlah pembayaran TPP		12					
			jumlah pembayaran JKK		12					
			jumlah pembayaran JKM		12					
	2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran honor Pengelola Keuangan, Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang	Samarinda	12	1.118.760				
			Jumlah dokumen SPJ keuangan yang diverivikasi (GU dan LS)		84					
			Jumlah pembayaran gaji tenaga kontrak		12					
3		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	Samarinda	100	280.385				
	1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas	Samarinda	115	80.385				
	2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Samarinda	40	200.000				
4		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administasi umum	Samarinda	100	1.459.000				
	1	Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah perlengkapan kantor	Samarinda	50	100.000				

		Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan	Samarinda	10	100.000				
			Jumlah fotocopy		33.000					
			Jumlah penjilidan		50					
	3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Buku Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Samarinda	10	9.000				
	4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi	10 Kab/Kota Luar Daerah	100	1.250.000				
5		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	Samarinda	100	1.420.539				
	1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Samarinda	10 Paket	1.170.539				
	2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan kantor	Samarinda	9 jenis	200.000				
	3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana	Samarinda	10 jenis	650.000				
6		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa kantor	Samarinda	100%	2.881.468				
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Samarinda	4 layanan	500.000				
	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah Tenaga Kontrak	Samarinda	49	2.381.468				

		Pelayanan Umum Kantor	(Administrasi dan Satpam)							
7		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Samarinda	100 %	500.000				
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran	Samarinda	30	300.000				
	2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	Samarinda	10	200.000				
III		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kebijakan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembanunan dan wilayah	10 Kab/Kota	100%	**1.095.000**				
1.		Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Presentase pelaksanaan dokumen perencanaan LH	10 Kab/Kota	100 %	440.000				
	1	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH Provinsi	10 Kab/Kota	1 Dok	220.000				
			Jumlah Kab/Kota yang dibina penyusunan dokumen RPPLHnya		10 Kab/ Kota					
	2	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah laporan pencapaian IKLH dalam RPPLH Provinsi	10 Kab/Kota	1 Laporan	220.000				

			Jumlah dokumen RPPLH Kab/Kota yang diverifikasi		5 Dokumen					
			Jumlah bimtek/ diklat pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam penyelenggaraan RPPLH		1 kali					
2		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Presentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	10 Kab/Kota	100 %	655.000				
	1	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS RTRW Kab/Kota beserta rencana rincinya yang dilakukan validasi	10 Kab/Kota	5 Dok	300.000				
			Jumlah Dokumen KLHS RTRW Provinsi Beserta Rencana /Rincinya/reviu/ kajian DDDT/IELH		1 Dok					
	2	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD Provinsi/reviu/ kajian DDDT/IELH	10 Kab/Kota	1 Dok	275.000				
			Jumlah dokumen KLHS RPJMD RTRW Kab/Kota yang dilakukan validasi		5 Dok					
	3	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen KLHS RZWP3K Provinsi	10 Kab/Kota	1 Dok	45.000				
			Jumlah Kab/Kota yang dilakukan sosialisasi dan pembinaan hasil KLHS RZWP3K		10 Kab/Kota					

	4	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Pembuatan buku peraturan terkait penyusunan KLHS	Samarinda	1 Dok	30.000				
			Jumlah Dokumen KLHS/KRP Provinsi		1 Dok					
			Jumlah Dokumen KLHS/KRP Kab/Kota yang divalidasi		1 Dok					
IV		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase perangkat (dokumen dan sistem) keanekaragaman hayati daerah yang terintegrasi kedalam perencanaan pembangunan wilayah (RTRW beserta rencana rinci, RPJMD, dan RPJPD)	10 Kab/Kota	100 %	500.000				
1		Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan keanekaragaman hayati provinsi	10 Kab/Kota	5 Kegiatan	500.000				
	1	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Samarinda	1 Dokumen	100.000				
	2	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Samarinda	650 ha	100.000				
	3	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan pemantauan terhadap Taman Kehati dan/atau kawasan bernilai penting lainnya	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	200.000				
	4	Sub Kegiatan Pengembangan	Jumlah kegiatan bimtek/diklat	Samarinda	2 Bimtek	100.000				

		Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	pengembangan kapasitas dalam pengelolaan kehati	Balikpapan						
V		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengurangan penggunan B3 (dari penggunaan merkuri tahun sebelumnya)	10 Kab/Kota	8 %	550.000				
			persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)		50 %					
1		Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	10 Kab/Kota	23 Usaha	550.000				
	1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Kab/Kota	4 Dokumen	350.000				
	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan	10 Kab/Kota	7 Dokumen	200.000				

			Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya							

VI		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup yang diawasi	10 Kab/Kota	100 %	1.030.000				
1		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan kegiatan usaha dan atau kegiatan yang telah dilakukan pengawasan dan pembinaan	10 Kab/Kota	4 Laporan	1.030.000				
	1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah kegiatan/usaha yang dapat ditingkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya	10 Kab/Kota	100 Usaha	75.000				
	2	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLH yang mengikuti rapat koordinasi	10 Kab/Kota	35 Orang	75.000				
	3	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pengawasan terhadap penangungjawab dan atau usaha kegiatan yang diberi izin	10 Kab/Kota	100 Usaha	680.000				
	4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah pengawasan terhadap penerapan sanksi administrasi lingkungan hidup hasil pengawasan	10 Kab/Kota	50 Sanksi	200.000				
VII		PROGRAM PENGAKUAN	Persentase kab/kota yang telah teridentifikasi MHA terkait PPLH	-	100%	100.000				

		KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH								
1		Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen laporan identifikasi dan inventarisasi MHA di kab/kota	Paser	2 Dokumen laporan MHA kab/kota	100.000				
	1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah inventarisasi dan identifikasi MHA	10 Kab/Kota	0	100.000				
			Jumlah pembinaan MHA		3 lembaga					
VII		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase peningkatan bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat terkait lingkungan hidup	10 Kab/Kota	52 %	850.000				
1		Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan lembaga /lembaga terkait lingkungan hidup	10 Kab/Kota	165 bimteks, pembinaan, pendampingan	850.000				

		Tingkat Daerah Provinsi								
	1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga pendidikan yang dibina untuk kegiatan adiwiyata	10 Kab/Kota	60 Lembaga pendidikan	750.000				
			Jumlah DLH kab/kota yang dibina untuk kegiatan adipura		10 Kab/Kota					
			Jumlah DLH kab/kota yang dibina untuk kegiatan kalpataru		10 Kab/ Kota					
			Jumlah kampung iklim yang dibina		30 Kampung Iklim					
			Jumlah pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup		1 Diklat					
	2	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah lembaga pendidikan yang didampingai untuk kegiatan adiwiyata nasional dan mandiri	10 Kab/Kota	30 Lembaga	100.000				
			Jumlah DLH kab/kota yang didampingi untuk kegiatan adipura		10 Kab/Kota					
			Jumlah DLH kab/kota yang didampingi untuk kegiatan kalpataru		10 Kab/Kota					
			Jumlah pendampingan kampung iklim		3 Kampung Iklim					
VIII		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan	10 Kab/Kota	84,42%	1.000.000				
1		Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi yang diberikan	10 Kab/Kota	86,42%	1.000.000				

	1	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi yang diberikan	Samarinda	65 Penghargaan	1.000.000				
			Jumlah penghargaan proper provinsi yang diberikan		200 Penghargaan					
IX		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	10 Kab/Kota	100 %	950.000				
1		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	10 Kab/Kota	100%	950.000				
	1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti	10 Kab/Kota	16 dok hasil tindak lanjut	650.000				
	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah fasilitasi sengketa lingkungan hidup	10 Kab/Kota	8 dok hasil fasilitasi	300.000				
			Jumlah penerapan sanksi administrasi lingkungan hidup atas tindak lanjut pengaduan		3 dok hasil penerapan sanksi					
X		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah sesuai jakstrada	10 Kab/Kota	72%	1.099.615				
1		Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	10 Kab/Kota	72%	1.099.615				

	1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	jumlah kajian penanganan sampah lintas kab/kota	10 Kab/Kota	-	250.000				
	2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah laporan penanganan sampah kondisi khusus	10 Kab/Kota	-	249.615				
	3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	10 Kab/Kota	1 Koordinasi dan Sinkronisasi	400.000				
			Jumlah peningkatan SDM pengelolaan persampahan		2 Kab/Kota					
			Jumlah fasilitasi pertemuan FORKOM BS se Kaltim		2 kali					
	4	Sub Kegiatan Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah rapat koordinasi pengelolan sampah se-Kaltim	10 Kab/Kota	1 kali	200.000				

BAB V

PENUTUP

Dokumen ini memberikan gambaran tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesediaan anggaran terutama pada anggaran perubahan tahun 2023

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 perlu memperhatikan pencapaian target kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) ini harus memperhatikan kaidah dan aturan yang berkaitan dengan teknis urusan lingkungan hidup, pengadaan barang jasa, dan pengelolaan keuangan pemerintah.

Semoga Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan dan memberi manfaat bagi provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Kalimantan Timur,

E.A Rafiddin Rizal
Pembina Utama Madya
NIP. 19650309 199603 1 004

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**35,197,786,400**	**6,745,576,600**	**0**	**0**	**41,943,363,000**	**40,998,722,430**	**12,438,972,428**	**0**	**0**	**53,437,694,858**	**11.494.331.858**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**22,277,920,700**	**6,714,591,300**	**0**	**0**	**28,992,512,000**	**23,506,098,300**	**12,025,505,808**	**0**	**0**	**35,531,604,108**	**6.539.092.108**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**1,070,000,000**	**0**	**0**	**0**	**1,070,000,000**	**1,409,384,000**	**55,616,000**	**0**	**0**	**1,465,000,000**	**395.000.000**	
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500,000,000	0	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	
2	11	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan		60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	
2	11	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Lingkungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,		20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	

					Hidup)		Semua Kelurahan													
2	1 1	0 1	1.01	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	
2	1 1	0 1	1.01	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
2	1 1	0 1	1.01	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	
2	1 1	0 1	1.01	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		140,000,000	0	0	0	140,000,000	479,384,000	55,616,000	0	0	535,000,000	395.000.000	

2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**14,694,366,458**	**0**	**0**	**0**	**14,694,366,458**	**14,694,366,458**	**0**	**0**	**0**	**14,694,366,458**	**0**	
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		13,514,286,458	0	0	0	13,514,286,458	13,514,286,458	0	0	0	13,514,286,458	0	
2	11	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,180,080,000	0	0	0	1,180,080,000	1,180,080,000	0	0	0	1,180,080,000	0	
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**297,680,000**	**0**	**0**	**0**	**297,680,000**	**297,680,000**	**0**	**0**	**0**	**297,680,000**	**0**	
2	11	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		97,680,000	0	0	0	97,680,000	97,680,000	0	0	0	97,680,000	0	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**1,844,908,082**	**87,837,300**	**0**	**0**	**1,932,745,382**	**1,985,127,882**	**87,837,300**	**0**	**0**	**2,072,965,182**	**140.219.800**	
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		159,445,400	87,837,300	0	0	247,282,700	193,988,200	87,837,300	0	0	281,825,500	34.542.800	

2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		87,351,062	0	0	0	87,351,062	87,351,062	0	0	0	87,351,062	0	
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,707,200	0	0	0	7,707,200	7,707,200	0	0	0	7,707,200	0	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,590,404,420	0	0	0	1,590,404,420	1,696,081,420	0	0	0	1,696,081,420	105.677.000	
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**312,486,000**	**6,626,754,000**	**0**	**0**	**6,939,240,000**	**541,539,800**	**11,882,052,508**	**0**	**0**	**12,423,592,308**	**5.484.352.308**	

2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11,676,000	6,566,300,000	0	0	6,577,976,000	106,056,000	5,953,913,100	0	0	6,059,969,100	(518.006.900)	
2	11	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300,810,000	60,454,000	0	0	361,264,000	435,483,800	5,928,139,408	0	0	6,363,623,208	6.002.359.208	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**3,686,055,960**	**0**	**0**	**0**	**3,686,055,960**	**4,205,575,960**	**0**	**0**	**0**	**4,205,575,960**	**519.520.000**	

2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		586,135,200	0	0	0	586,135,200	931,385,200	0	0	0	931,385,200	345.250.000	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,099,920,760	0	0	0	3,099,920,760	3,274,190,760	0	0	0	3,274,190,760	174.270.000	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**372,424,200**	**0**	**0**	**0**	**372,424,200**	**372,424,200**	**0**	**0**	**0**	**372,424,200**	**0**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		255,142,700	0	0	0	255,142,700	255,142,700	0	0	0	255,142,700	0	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		117,281,500	0	0	0	117,281,500	117,281,500	0	0	0	117,281,500	0	
2	**11**	**02**			**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**				**2,195,000,000**	**0**	**0**	**0**	**2,195,000,000**	**2,495,000,000**	**0**	**0**	**0**	**2,495,000,000**	**300.000.000**	
2	**11**	**02**	**1.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**				**340,920,000**	**0**	**0**	**0**	**340,920,000**	**640,920,000**	**0**	**0**	**0**	**640,920,000**	**300.000.000**	

2	11	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		160,280,000	0	0	0	160,280,000	460,280,000	0	0	0	460,280,000	300.000.000	
2	11	02	1.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		180,640,000	0	0	0	180,640,000	180,640,000	0	0	0	180,640,000	0	
2	**11**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**				**1,854,080,000**	**0**	**0**	**0**	**1,854,080,000**	**1,854,080,000**	**0**	**0**	**0**	**1,854,080,000**	**0**	
2	11	02	1.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		226,980,000	0	0	0	226,980,000	226,980,000	0	0	0	226,980,000	0	
2	11	02	1.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,375,000,000	0	0	0	1,375,000,000	1,375,000,000	0	0	0	1,375,000,000	0	
2	11	02	1.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua		189,615,000	0	0	0	189,615,000	189,615,000	0	0	0	189,615,000	0	

					untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dinas Lingkungan Hidup)		Kecamatan, Semua Kelurahan													
2	11	02	1.02	04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		62,485,000	0	0	0	62,485,000	62,485,000	0	0	0	62,485,000	0	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**				**5,175,485,000**	**0**	**0**	**0**	**5,175,485,000**	**8,308,856,430**	**132,868,320**	**0**	**0**	**8,441,724,750**	**3.266.239.750**	
2	**11**	**03**	**1.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**				**1,550,000,000**	**0**	**0**	**0**	**1,550,000,000**	**4,445,241,430**	**132,868,320**	**0**	**0**	**4,578,109,750**	**3.028.109.750**	
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		775,000,000	0	0	0	775,000,000	775,000,000	0	0	0	775,000,000	0	
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan atas Dana Reducing	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		775,000,000	0	0	0	775,000,000	3,670,241,430	132,868,320	0	0	3,803,109,750	3.028.109.750	

					(Dinas Lingkungan Hidup)														

2	11	03	1.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,755,485,000	0	0	0	1,755,485,000	1,993,615,000	0	0	0	1,993,615,000	238.130.000	
2	11	03	1.02	02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,200,000,000	0	0	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	0	1,200,000,000	0	
2	**11**	**03**	**1.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**				**670,000,000**	**0**	**0**	**0**	**670,000,000**	**670,000,000**	**0**	**0**	**0**	**670,000,000**	**0**	
2	11	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		120,000,000	0	0	0	120,000,000	120,000,000	0	0	0	120,000,000	0	
2	11	03	1.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	
2	11	03	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	

2	11	03	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**				**500,000,000**	**0**	**0**	**0**	**500,000,000**	**500,000,000**	**0**	**0**	**0**	**500,000,000**	**0**	
2	**11**	**04**	**1.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**				**500,000,000**	**0**	**0**	**0**	**500,000,000**	**500,000,000**	**0**	**0**	**0**	**500,000,000**	**0**	
2	11	04	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Dinas Lingkungan Hidup)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	
2	11	04	1.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	
2	11	04	1.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	
2	11	04	1.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**				**537,638,000**	**0**	**0**	**0**	**537,638,000**	**579,638,000**	**0**	**0**	**0**	**579,638,000**	**42.000.000**	

2	**11**	**05**	**1.01**		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**537,638,000**	**0**	**0**	**0**	**537,638,000**	**579,638,000**	**0**	**0**	**0**	**579,638,000**	**42.000.000**	
2	11	05	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		296,591,000	0	0	0	296,591,000	338,591,000	0	0	0	338,591,000	42.000.000	
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		241,047,000	0	0	0	241,047,000	241,047,000	0	0	0	241,047,000	0	
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**				**1,030,000,000**	**0**	**0**	**0**	**1,030,000,000**	**1,030,000,000**	**0**	**0**	**0**	**1,030,000,000**	**0**	
2	**11**	**06**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**				**1,030,000,000**	**0**	**0**	**0**	**1,030,000,000**	**1,030,000,000**	**0**	**0**	**0**	**1,030,000,000**	**0**	
2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75,000,000	0	0	0	75,000,000	75,000,000	0	0	0	75,000,000	0	
2	11	06	1.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,		75,000,000	0	0	0	75,000,000	75,000,000	0	0	0	75,000,000	0	

					(Dinas Lingkungan Hidup)		Semua Kelurahan													
2	11	06	1.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua		680,000,000	0	0	0	680,000,000	680,000,000	0	0	0	680,000,000	0	

					Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Dinas Lingkungan Hidup)		Kecamatan, Semua Kelurahan													
2	11	06	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				**1,040,000,000**	**0**	**0**	**0**	**1,040,000,000**	**1,782,543,000**	**62,457,000**	**0**	**0**	**1,845,000,000**	**805.000.000**	
2	**11**	**08**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**				**1,040,000,000**	**0**	**0**	**0**	**1,040,000,000**	**1,782,543,000**	**62,457,000**	**0**	**0**	**1,845,000,000**	**805.000.000**	
2	11	08	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		840,000,000	0	0	0	840,000,000	1,582,543,000	62,457,000	0	0	1,645,000,000	805.000.000	

						Degradation (REDD+) Results Based Payment														
2	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				**250,000,000**	**0**	**0**	**0**	**250,000,000**	**250,000,000**	**0**	**0**	**0**	**250,000,000**	**0**	
2	**11**	**09**	**1.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**				**250,000,000**	**0**	**0**	**0**	**250,000,000**	**250,000,000**	**0**	**0**	**0**	**250,000,000**	**0**	
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		250,000,000	0	0	0	250,000,000	250,000,000	0	0	0	250,000,000	0	
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**				**906,281,000**	**6,832,000**	**0**	**0**	**913,113,000**	**1,219,125,000**	**193,988,000**	**0**	**0**	**1,413,113,000**	**500.000.000**	
2	**11**	**10**	**1.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**				**906,281,000**	**6,832,000**	**0**	**0**	**913,113,000**	**1,219,125,000**	**193,988,000**	**0**	**0**	**1,413,113,000**	**500.000.000**	

2	11	10	1.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		606,281,000	6,832,000	0	0	613,113,000	919,125,000	193,988,000	0	0	1,113,113,000	500.000.000	
2	11	10	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**				**1,285,461,700**	**24,153,300**	**0**	**0**	**1,309,615,000**	**1,327,461,700**	**24,153,300**	**0**	**0**	**1,351,615,000**	**42.000.000**	
2	**11**	**11**	**1.01**		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**				**1,285,461,700**	**24,153,300**	**0**	**0**	**1,309,615,000**	**1,327,461,700**	**24,153,300**	**0**	**0**	**1,351,615,000**	**42.000.000**	
2	11	11	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		248,258,000	1,742,000	0	0	250,000,000	248,258,000	1,742,000	0	0	250,000,000	0	
2	11	11	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua		499,615,000	0	0	0	499,615,000	499,615,000	0	0	0	499,615,000	0	

					Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus (Dinas Lingkungan Hidup)		Kecamatan, Semua Kelurahan													
2	11	11	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300,000,000	0	0	0	300,000,000	342,000,000	0	0	0	342,000,000	42.000.000	
2	11	11	1.01	06	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,		237,588,700	22,411,300	0	0	260,000,000	237,588,700	22,411,300	0	0	260,000,000	0	

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA

B A B I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi Dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perencanaan yang spesifik. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif diperlukan perencanaan yang matang dan terarah.

Perencanaan disusun baik di Tingkat Pusat maupun Daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan. Rancangan Akhir Rencana Kerja perangkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka setiap perangkat daerah wajib menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, yang diarahkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada satu tahun anggaran berjalan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Secara legal dan formal penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2023 ini berdasarkan pada :

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerag tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
15. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dimaksudkan untuk adalah untuk menyajikan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Dengan demikian penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur bertujuan sebagai berikut :

a. Untuk memastikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah;
b. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program/kegiatan;
c. Sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023;
d. Sebagai acuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
e. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Proses dan sistematika penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

4.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (RENJA-DPMPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR) TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sesuai tugas dan fungsinya mendukung capaian Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu ***"Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat",*** melalui Misi 2 yaitu ***"Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan",*** menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 yang dituangkan dalam bentuk Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) tahunan yang dimulai pada tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 52,148,806,025.00 (Lima Puluh Dua Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Ribu Dua Lima Rupiah) terdiri dari 5 (Lima) program, 11 (Sebelas) kegiatan, dan 56 (Lima Puluh Lima) sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
1.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
			2	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa
			3	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
			4	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
			5	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa

			6	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
			7	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
			8	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
			9	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
			10	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
			11	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
			12	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
			13	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa

2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama	14	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
			15	Ìdentifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
			16	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

		Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	17	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			18	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			19	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
			20	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
3.	PROGRAM PENATAAN DESA	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	21	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
4.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	22	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
			23	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
			24	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota

5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			27	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			28	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			29	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

			30	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			31	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
			32	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			33	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	34	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			35	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			36	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			37	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			38	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			39	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			41	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			42	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			44	Pengadaan Mebel
			45	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			47	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			48	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			49	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			50	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			52	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			53	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
			54	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			55	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			56	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama dan Program/Kegiatan Tahun 2022 rata-rata mencapai 100%, sedangkan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama dan Program/Kegiatan Tahun 2023 masih dalam Proses berjalannya Tahun Anggaran.

Adapun Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun lalu dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan pada **Tabel T-C.29** sebagai berikut :

Tabel T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

PD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

N0	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2018-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
					Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Prog dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 07	**URUSAN WAJIB**									
2 07 01	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**									
2 07 01 07	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terlayaninya Administrasi Perkantoran**	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen
2 07 01 07 01	Pelaksanaan Administrai Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	90 persen	12 bulan	12 bulan	90 persen
2 07 01 08	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**	**Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur**	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	**80 persen**	80 persen	80 persen
2 07 01 08 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	90 persen	12 bulan	12 bulan	90 persen
2 07 01 09	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah**	80 persen	**80 persen**	**80 persen**	**80 persen**	80 persen	**80 persen**	**80 persen**	**80 persen**
2 07 01 09 01	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	**125 Kegiatan**	**25 Kegiatan**	**25 Kegiatan**	**25 Kegiatan**	**80 persen**	**25 Kegiatan**	**25 Kegiatan**	**80 persen**
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	**250 kegiatan**	**50 kegiatan**	**50 kegiatan**	**50 kegiatan**	**80 persen**	**50 kegiatan**	**50 kegiatan**	**80 persen**
		Jumlah bulan penyediaan makan dan minum	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**80 persen**	**12 bulan**	**12 bulan**	**80 persen**
2 07 01 09 01	**Program Peningkatan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Meningkatnya kinerja instansi pemerintah**	80 persen	**80 persen**	**80 persen**	**80 persen**	80 persen	**80 persen**	**80 persen**	**80 persen**
2 07 01 09 01	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran	Jumlah dokumen Perencanaan dan anggaran	**50 Dokumen**	**10 Dokumen**	**10 Dokumen**	**10 Dokumen**	**80 persen**	**10 Dokumen**	**10 Dokumen**	**80 persen**
2 07 01 09 01	Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Jumlah Laporan pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	40 Dokumen	**8 Dokumen**	**8 Dokumen**	**8 Dokumen**	80 persen	**8 Dokumen**	**8 Dokumen**	**80 persen**
2 07 01 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**	175 LKD	35 LKD	35 LKD	35 LKD	100 persen	35 LKD	35 LKD	100 persen
2 07 01 15 01	Pengembangan dan Monitoring Lembaga serta Organisasi Masyarakat Perdesaan									
		Jumlah pelaksanaan BBGRM yang di bina	10 Kab/Kota	6 Desa/Kamp/Kel	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	70 persen	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	70 persen
		Jumlah pelaksana posyandu yang dibina	36 Posyandu	6 posyandu	6 posyandu	6 posyandu	70 persen	6 posyandu	6 posyandu	70 persen
		Jumlah pelaksana PMT-AS yang dibina	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Pelaksana LPM yang dibina	10 Kota	10 Kota	10 Kota	10 Kota	70 persen	10 Kota	10 Kota	70 persen
		Jumlah Pelaksana PKK yang dibina	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	70 persen	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	70 persen
2 07 01 15 03	Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat	Penyebaran Informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa secara optimal	70 persen	70 persen	70 persen	70 persen	70 persen	70 persen	70 persen	70 persen
2 07 01 15 08	Pengembangan Kapasitas Masyarakat	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dibina	750 orang	150 orang	150 orang	150 orang	70 persen	150 orang	150 orang	70 persen
2 07 01 15 09	Pengembangan dan Monitoring Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat	Jumlah masyarakat hukum adat (MHA) yang dibina	25 MHA	5 MHA	5 MHA	5 MHA	70 persen	5 MHA	5 MHA	70 persen
2 07 01 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Berkembangnya Lembaga Ekonomi Masyarakat	80 persen		80 persen	80 persen	80 persen		80 persen	80 persen
		Jumlah Pasar Desa yang aktif	0	-	-	-	0	-	-	0
2 07 01 16 01	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Persentase BUMDesa aktif	150 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	80 persen	15 Desa	15 Desa	80 persen
				2.9 Persen	2.9 Persen	2.9 Persen	80 persen	2.9 Persen	2.9 Persen	80 persen

						Jumlah Pasar Desa yang aktif	0	-	-	-	0	-	-	0
						Jumlah Bumdesa yang terbentuk	75 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	80 persen	15 Unit	15 Unit	80 persen
						Laporan	0	-	-	-	0	0	0	0
2	07	01	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
2	07	01	17	04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Pelaporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan PMD	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
2	07	01	21		Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat	Terwujudnya sinergitas kebijakan dan program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
2	07	01	21	01	Sinkronisasi dan penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
2	07	01	22		Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	90 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	80 persen	18 Unit	18 Unit	80 persen
2	07	01	22	01	Pemasyarakatan dan pengembangan penerapan teknologi tepat guna	Jumlah Kelompok Masyarakat pemanfaatan TTG yang mempunyai Daya Saing Pasar	90 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	80 persen	18 Unit	18 Unit	80 persen
2	07	01	22	02	Pengembangan Prasarana dan Sarana Sosial Dasar Masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan konservasi lingkungan perdesaan/kecamatan	50 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	80 persen	10 Unit	10 Unit	80 persen
2	07	01	26		Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Terwujudnya Ketahanan dan Kelestarian Keluarga	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
2	07	01	26	01	Pengembangan dan Monitoring ketahanan keluarga dan pelestarian nilai-nilai kegotongroyongan	Jumlah TP PKK yang dibina	650 orang	130 orang	130 orang	130 orang	80 persen	130 orang	130 orang	80 persen
2	07	01	26	02	Penguatan Kapasitas Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kader PKK yang dilatih	750 Orang	150 orang	150 Orang	150 Orang	80 persen	150 orang	150 Orang	80 persen
2	07	01	26	03	Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga	Jumlah Keluarga/Kader PKK yang dibina	800 Orang	160 orang	160 Orang	160 Orang	80 persen	160 Orang	160 Orang	80 persen
2	07	01	26	04	Pengembangan dan monitoring hidup sehat keluarga yang ramah lingkungan	Jumlah Kader PKK/Keluarga yang dibina	1500 orang	300 orang	300 orang	300 orang	80 persen	300 orang	300 orang	80 persen
					Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat									
2	07	01	27			Meningkatnya Masyarakat Miskin perdesaan yang mandiri dalam Agribisnis TTG, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan Desa, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Program Pemberdayaan Masyarakat	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
2	07	01	27	01	Peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan Desa, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin perdesaan yang mandiri dalam agribisnis teknologi tepat guna, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan Desa, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri	50 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	80 Persen	10 Posyantek	10 Posyantek	80 Persen
2	07	01	28		Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
2	07	01	28	01	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Data Aparatur Desa/Kelurahan dan BPD yang belum dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	80 persen	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	80 persen
						Jumlah Laporan Pemutakhiran Data Aparatur Desa/Kelurahan dan BPD yang belum dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	80 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	80 persen
						Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang memperoleh Pembinaan	150 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	80 persen	15 Desa	15 Desa	80 persen
								2.9 Persen	2.9 Persen	2.9 Persen	80 persen	2.9 Persen	2.9 Persen	80 persen
2	07	01	28	02	Monitoring Penyaluran Keuangan Desa	Data Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD dan Pengelolaan Dana Desa	7 Kabupaten	7 Kabupaten	7 Kabupaten	7 Kabupaten	80 persen	7 Kabupaten	7 Kabupaten	80 persen
						Jumlah laporan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset desa	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	80 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	80 persen
2	07	01	28	03	Peningkatan Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa dan Kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur yang mengikuti Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2019	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	80 persen	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	80 persen
						Jumlah Desa/Kelurahan Berprestasi	30 Desa/Kelurahan,	6 Desa/Kelurahan,	6 Desa/Kelurahan,	6 Desa/Kelurahan,	80 persen	6 Desa/Kelurahan,	6 Desa/Kelurahan,	80 persen

2	07	01	29		Program Pembangunan Desa dan kawasan	Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Berbasis Pemberdayaan yang Optimal	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
2	07	01	29	01	Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Desa	Jumlah Kabupaten yang berhasil dibina	25 Kabupaten	5 Kabupaten	5 Kabupaten	5 Kabupaten	80 persen	5 Kabupaten	5 Kabupaten	80 persen
						Pendamping Desa yang Berhasil dibina	250 orang	50 orang	50 orang	50 orang	80 persen	50 orang		80 persen
						Persentase Desa dengan Status Berkembang	150 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	80 persen	15 Desa	15 Desa	80 persen
								2.9 Persen	2.9 Persen	2.9 Persen	80 persen	2.9 Persen	2.9 Persen	80 persen
					Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Antar Desa	Tercapainya Penguatan Pengembangan dan Pembangunan Antar Desa	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	80 persen	1 Laporan	1 Laporan	80 persen
2	07	01	29	02										
						Laporan Penguatan Pengembangan dan Pembangunan Antar Desa	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	80 persen	1 Laporan	1 Laporan	80 persen
					Pengembangan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan	Penyebaran Data dan Informasi Pembangunan Desa/Kelurahan dan Antar Desa	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	80 persen	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	80 persen
2	07	01	29	03		Tercapainya Data dan Informasi Pembangunan Desa/Kelurahan dan Antar Desa	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	80 persen	1 Laporan	1 Laporan	
2	07	01	30		Program Kampung Iklim+	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	70 persen	70 persen	70 persen	70 persen	70 persen	70 persen	70 persen	70 persen
2	07	01	30	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Emisi Rendah Desa/Village Low Emission Development/VLED	Jumlah Desa yang menjadi Desa/Kampung/Kelurahan Iklim	150 Desa	-	20 Desa	20 Desa	80 persen	22 Desa	22 Desa	80 persen
						Persentase Desa yang menjadi Desa/Kampung/Kelurahan Iklim		-	2.4 Persen	2.4 Persen	80 persen	2.6 Persen	2.6 Persen	80 persen

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya/tahun lalu dalam rangka mengentaskan/mengurangi jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Kalimantan Timur dengan strategi dan arah kebijakan melalui program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran meningkatkan jumlah Desa Berkembang, dan mendorong Desa Berkembang menjadi Maju dan Desa Maju menjadi Desa Mandiri.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang merupakan awal pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan 45 Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di 7 (tujuh) Kabupaten se-Kalimantan Timur untuk ditingkatkan statusnya menjadi Desa Berkembang.

2.2.1. Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

2.2.2. Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Fungsi :

1) Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2) Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
3) Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
4) Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
5) Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
6) Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemerintahan desa dan Kelurahan;
7) Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
8) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9) Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

2.2.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

a. Tujuan :

   Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Di Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal

b. Sasaran :

   Meningkatnya Kualitas Pembangunan Wilayah Perdesaan Secara Merata

c. Strategi :

   1. Pemantapan dan Peningkatan Peran Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat;
   2. Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Desa;

3. Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Membangun Desa Berkualitas;
4. Peningkatan Peran Kelembagaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengelolaan Pembangunan Secara Partisipatif;
5. Penguatan Ketangguhan Desa dalam Menghadapi Bencana dan Perubahan Iklim

d. Arah Kebijakan :

1. Peningkatan BUMDes yang Aktif untuk Meningkatkan Ekonomi Desa;
2. Optimalisasi Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa untuk Mencapai Status Desa Berkembang;
3. Pembinaan Kapasitas Desa yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Anggaran;
4. Peningkatan Peran Aktif Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
5. Pembinaan dan Pengembangan Desa/Kampung Rendah Emisi

2.2.4. Struktur Organisasi

Secara struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, dan 4 (empat) Bidang, seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini :

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

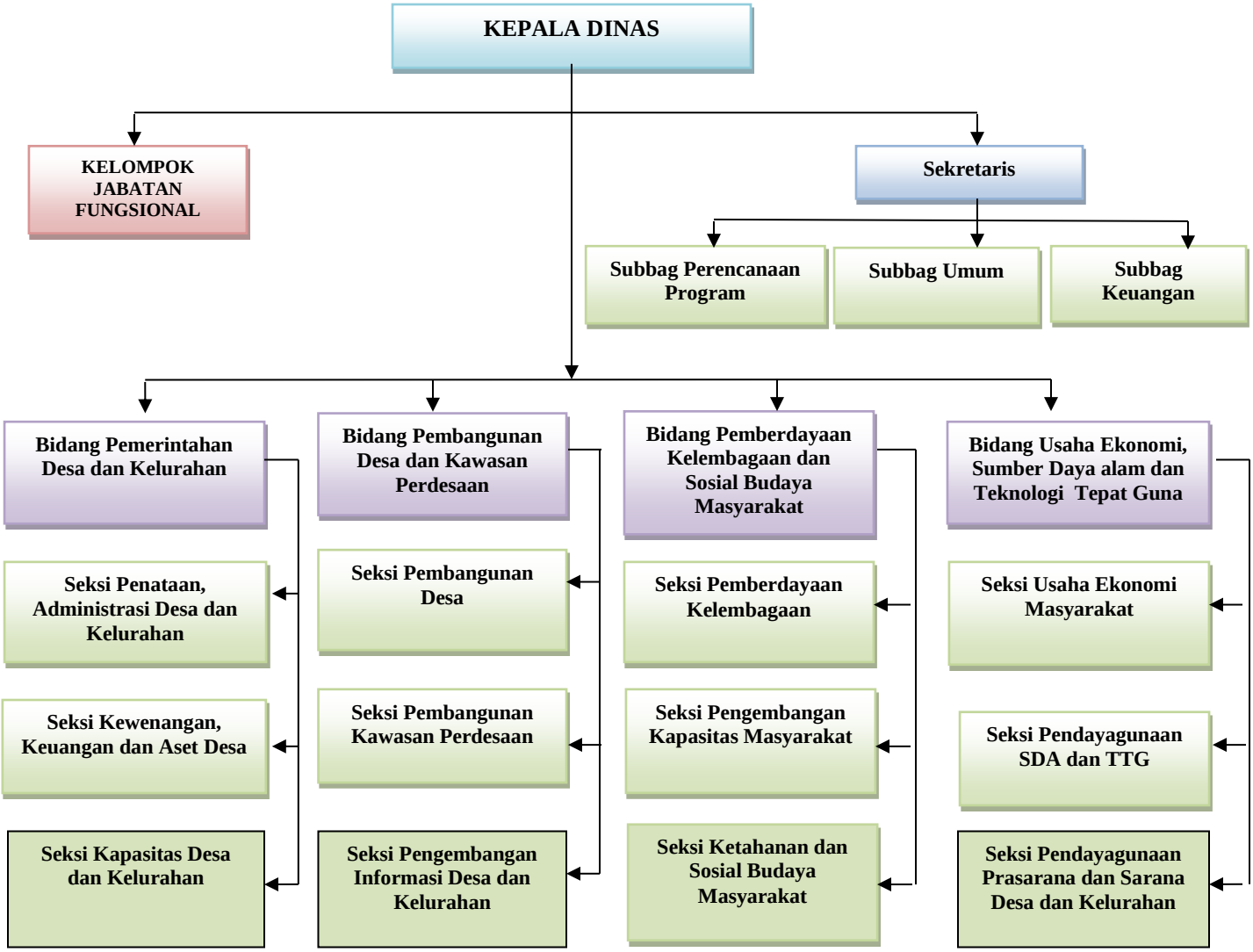

2.2.5. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

A. Sumber Daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2023 memiliki jumlah pegawai sebanyak 82 orang.

Jumlah Pegawai (PNS/Non PNS)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Jenis Kelamin dan Pendidikan

(Jumlah PNS)

Pangkat/Gol. Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan							Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	S3	S2	S1	SM/ D3	SLTA	SLTP	SD	
11	25	4		20	21	0	12	21	1	5	0	0	40

(Jumlah Non PNS)

Pangkat/Gol. Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD	
-	-	-		26	16	2	19	5	15	0	1	42

Sumber data: DPMPD Provinsi Kaltim

Sebaran Jumlah PNS dan Non PNS Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Sekretariat dan Bidang di Lingkup

Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur per Tahun 2023

(Jumlah PNS)

NO.	BAGIAN / BIDANG	PENDIDIKAN														JUMLAH	
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2		S3			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekretariat	-	-	-	-	1	1	-	1	1	5	1	2	-	-	3	9
2	Bid.Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya masy.	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	2	-	-	-	4	4
3	Bidang Usaha Eko Masy. Dan TTG	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	-	-	-	4	3
4	Bidang Pemdes dan kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	4	1
5	Bidang Pembanguan Desa dan Kawasan Perdesaaan	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	-	-	4	4

(Jumlah Non PNS)

NO.	BAGIAN / BIDANG	PENDIDIKAN														JUMLAH	
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2		S3			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekretariat	1	-	-	-	9	1	2	1	3	6	-	1	-	-	15	9
2	Bid.Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya masy.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	1
3	Bidang Usaha Eko Masy. Dan TTG	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	-	1	-	-	3	4
4	Bidang Pemdes dan kelurahan	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	3	2
5	Bidang Pembanguan Desa dan Kawasan Perdesaaan	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	1

Sumber data: DPMPD Prov. Kaltim

B. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintaahn Desa Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Sarana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

NO	SARANA KERJA YANG TERSEDIA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Tanah dan Bangunan kantor	8.228 m2	Baik
2.	Gedung	3 lantai	
3.	Kendaran Roda 4	8 buah	Baik
4.	Kendaraan Roda 2	4 buah	Baik
5.	Komputer PC	16 buah	Baik
6.	Laptop	17 buah	Baik
7.	Mesin Tik	15 buah	Baik
8.	Telepon	1 unit	(0541) 7779725/ Baik
9.	Telepon/Faximil	1 Unit	(0541) 7779726 / Baik
10.	Mesin Foto Copy	1 unit	Kurang Baik
11.	AC	20 buah	Baik
12.	Listrik	1 jaringan	Baik
13.	Air	1 jaringan	Baik
14.	Telepon	2 jaringan	Baik
15.	Area Parkir	3 area	Baik
16.	Ruang Rapat	2 ruang	Baik
17.	Taman	1 area	Baik
18.	Masjid	1 unit	Baik

Sumber data : DPMPD Provinsi Kaltim

2.2.6 Kinerja Pelayanan pada masing-masing Bagian/Bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, antara lain :

1. Sekretariat
   - Mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
   - Memfasilitasi Kebijakan Perencanaan Regulasi yang mendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
   - Mengkoordinir penyusunan, pencairan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran
   - Memfasilitasi peningkatan kualitas dan pengembangan karir bagi Masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa
   - Memfasilitasi Diseminasi dan Informasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
   - Meningkatkan kualitas hubungan dengan Perangkat Daerah/Instansi Terkait

2. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
   - Melaksanakan pengkajian pengembangan program Bidang Pemerintahan desa/kampung dan Kelurahan
   - Melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung dan kelurahan
   - Fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa
   - Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa/kampung dan kelurahan, berkenaan dengan manajemen pemerintahan desa/kampung dan kelurahan, penguatan kapasitas sekretaris desa, pengelolaan keuangan desa atau kampung (ADD/ADK), Bimtek sistem informasi keuangan desa, administrasi desa/kampung dan kelurahan, Penyusunan

peraturan desa/kampung, serta laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung dan kelurahan

- Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa, serta fasilitasi tanah kas desa
- Fasilitasi pengelolaan aset desa
- Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang bantuan keuangan pemerintahan desa
- Sosialisasi regulasi tentang pemerintahan desa
- Lomba desa dan kelurahan
- Lomba cerdas cermat desa dan kelurahan
- Fasilitasi penataan kode desa dan kelurahan
- Fasilitasi pemilihan kepala desa
- Fasilitasi penataan desa dan kelurahan
- Memberikan pelayanan data yang berkaitan dengan pengembangan Desa/Kampung dan kelurahan, serta data pengelolaan keuangan Desa/Kampung
- Fasilitasi administrasi pemerintahan desa

3. Bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan
    - Melaksanakan pengkajian dan pengembangan program pembangunan desa dan kawasan perdesaan
    - Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pembangunan desa
    - Melaksanakan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan
    - Mengumpulkan dan mengolah data pembangunan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat pedesaan sesuai dengan kewenangan lokal
    - Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan lintas sektor masuk ke desa berbasis pemberdayaan masyarakat

- Melaksanakan pemetaan penempatan dan relokasi pendamping desa
- Melaksanakan rekruitmen, monitoring dan evaluasi kegiatan pendamping desa
- Melakukan fasilitasi dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam kaitannya dengan pembangunan kawasan perdesaan
- Melakukan pembinaan fasilitasi perencanaan dan penetapan pembangunan kawasan perdesaan
- Memperkuat kebijakan perencanaan tata ruang dan rencana pengembangan desa yang mendukung program pengurangan emisi (fasilitasi regulasi)
- Mengembangkan Desa rendah emisi berbasis pemberdayaan masyarakat (implementasi)
- Melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan pilot project pembangunan kawasan perdesaan
- Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam kaitannya dengan pembangunan kawasan perdesaan
- Melakukan pembinaan dan pengembangan informasi desa dan kelurahan
- Melakukan pembinaan dan pengembangan sistem informasi desa dan kelurahan meliputi pendayagunaan data profil Desa/Kampung dan kelurahan, sistem informasi posyandu, dan perkembangan desa
- Melakukan pengembangan sistem informasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa

4. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat

- Melaksanakan pengkajian pengembangan program bidang pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat
- Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat
- Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat meialui partisipasi pelestarian lingkungan hidup dalam rangka pengurangan emisi
- Melaksanakan pembinaan peningkatan ketahanan dan sosial budaya masyarakat
- Fasilitasi dan peningkatan Partisipasi masyarakat terhadap HIV-AIDS, penyalahgunaan narkoba dan penyakit menular/tidak menular melalui Lembaga Masyarakat Kaltim Sehat (LMKS)
- Pembinaan dan penIngkatan peran aktif kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan melalui revitalisasi dan optimalisasi peran posyandu
- Memberikan pembinaan, pelayanan data dan peningkatan peran aktif yang berkaitan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- Memfasilitasi pelaksanaan perlombaan pelaksana terbaik gotong royong masyarakat
- Memberikan pembinaan dan peningkatan peran aktif Kader PKK dan pelayanan data yang berkaitan dengan PKK
- Memberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
- Memberikan pembinaan dan fasilitasi pemantapan nilai-nilai budaya adat serta peningkatan kapasitas dan pelestarian adat maupun penyediaan data Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- Memberikan Fasilitasi pembinaan Pengarustamaan Gender (PUG)

5. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
    - Melaksanakan pengkajlan dan pengembangan Program yang berkaitan dengan usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan TTG
    - Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat
    - Memperkuat dan mengembangkan Ekonomi Masyarakat berkelanjutan (pertanian, aquakultur) berbasis pemberdayaan masyarakat
    - Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan Pendayagunaan TTG
    - Melaksanakan Pembinaan dan fasilitasi kegiatan pendayagunaan prasarana dan sarana perdesaan
    - Membuat pedoman pelaksanaan programi/kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan TTG
    - Memberikan bimbingan teknis dan pembinaan Pasar Desa, Lumbung Pangan Masyarakat Desa
    - Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
    - Memberikan fasilitasi bantuan permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perdesaan
    - Memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berwirausaha, dan selanjutnya memberikan pembinaan sehingga menjadi usaha yang berhasil
    - Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk unggulan UMKM
    - Menampung aspirasi masyarakat terkait dengan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Penanggulangan Kemiskinan
    - Memberikan pelayanan data yang berkaitan dengan Penduduk Miskin, Pasar Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam

- Melakukan pembinaan Pos Pelayanan Teknologi, serta Warung Teknologi Perdesaan (Wartekdes)
- Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan bagi pengelola Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)
- Memfasilitasi promosi dan informasi produk teknologi tepat guna unggulan yang ramah lingkungan melalui Gelar Teknologi Tepat Guna
- Memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam
- Memberikan pelayanan data yang berkaitan dengan teknologi tepat guna
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Emisi Rendah Desa/Village Low Emission Development/VLED (Kampung Iklim)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana disajikan pada **Tabel T-C. 30** sebagai berikut :

NO	Indikator	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi				Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jumlah Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pelayanan Prima Aparatur Desa dan Kelurahan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	1 laporan		
2	Persentase Desa dan Kelurahan yang berhasil dalam melaksanakan pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	1 laporan		
3	Jumlah Desa/Kelurahan yang berhasil dalam pembangunan	Meningkatnya lembaga swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat.	30 Desa/Kel	6 Desa/Kel	6 Desa/Kel	6 Desa/Kel		6 Desa/Kel	6 Desa/Kel	6 Desa/Kel		6 Desa/Kel	6 Desa/Kel	6 Desa/Kel		
4	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina dan dilatih	Meningkatnya lembaga swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat.	175 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga		35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga		35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga		
5	Persentase Rekomendasi kebijakan bidang penanggulangan kemiskinan yang ditindaklanjuti	Meningkatnya Usaha Ekonomi masyarakat.	50 Unit Posyantek	10 unit Posyantek	10 unit Posyantek	10 unit Posyantek		10 unit Posyantek	10 unit Posyantek	10 unit Posyantek		10 unit Posyantek	10 unit Posyantek	10 unit Posyantek		
6	Jumlah Lembaga Perekonomian perdesaan yang aktif	Meningkatnya Kualitas Lembaga Ekonomi Masyarakat														
	Jumlah BUMDesa terbentuk		125 Unit	25 Unit	125 Unit	25 Unit		125 Unit	25 Unit	125 Unit		25 Unit	125 Unit	25 Unit		
	Jumlah BUMDesa aktif		125 Unit	25 Unit	125 Unit	25 Unit		125 Unit	25 Unit	125 Unit		25 Unit	125 Unit	25 Unit		
7	Jumlah Kelompok Masyarakat dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya Kemampuan Kelompok Masyarakat dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	90 Posyantek	18 Posyantek	18 Posyantek	18 Posyantek		18 Posyantek	18 Posyantek	18 Posyantek		18 Posyantek	18 Posyantek	18 Posyantek		
8	Jumlah Kelembagaan Pokmas	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pokmas	40 Pokmas	8 Pokmas	8 Pokmas	8 Pokmas		8 Pokmas	8 Pokmas	8 Pokmas		8 Pokmas	8 Pokmas	8 Pokmas		
9	Rumusan hasil koordinasi dan konsultasi program pem berdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	Terciptanya integrasi, sinkro nisasi dan sinergitas pemba ngunan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kampong dan kelurahan	5 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan		1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan		1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan		
10	Jumlah Aparatur desa yang dilatih menyusun perencanaan pembangunan desa	Meningkatnya kualitas penye-lenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	5 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan		1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan		1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan		
11	Jumlah aparatur desa/kel yang dilatih menajemen pemerintahan	Meningkatnya kualitas penye-lenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	5 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan		1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan		1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan		
12	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mengelola keuangan desa/kelurahan	Meningkatnya kualitas penye-lenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	5 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan		1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan		1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan		
13	Jumlah Masyarakat Miskin Perdesaan yang melakukan Ekonomi Agribisnis melalui Pemanfaatan TTG,	Peningkatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat miskin melalui Pemanfaatan TTG, Penguatan Kelembagaan Masy dan Pem des, Usaha	50 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek		10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek		10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek		

	Penguatan Kelembagaan Masy dan Pem des, Usaha Ekonomi Masy. Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Dan	Ekonomi Masy. Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan														
14	Jumlah Laporan pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Berbasis Pemberdayaan yang Optimal	Mewujudkan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Berbasis Pemberdayaan yang Optimal	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina		7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina		7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina		
			50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina		50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina		50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina		
			Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina		Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina		Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina		
			Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa		Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa		Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa		
			Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa		Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa		Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa		
15	Jumlah Desa yang menjadi Desa/Kampung/Kelurahan Iklim	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	122 Kampung Iklim	70 Kampung Iklim	105 Kampung Iklim	150 Kampung Iklim		70 Kampung Iklim	105 Kampung Iklim	150 Kampung Iklim		70 Kampung Iklim	105 Kampung Iklim	150 Kampung Iklim		

T-C. 30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	Indikator	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi					Catatan Analisis
				Tahun 2019	tahun 2020	tahun 2021	tahun 2022	tahun 2023	Tahun 2019	tahun 2020	tahun 2021	tahun 2022	tahun 2023	Tahun 2019	tahun 2020	tahun 2021	tahun 2022	tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7		8	9				10	11				12	13
1	Jumlah Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pelayanan Prima Aparatur Desa dan Kelurahan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
2	Persentase Desa dan Kelurahan yang berhasil dalam melaksanakan pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
3	Jumlah Desa/Kelurahan yang berhasil dalam pembangunan	Meningkatnya lembaga swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat.	30 Desa/Kel	6 Desa/Kel	6 Desa/Kel	6 Desa/Kel	6 Desa/Kel	6 Desa/Kel	6 Desa/Kel	6 Desa/Kel	6 Desa/Kel	6 Desa/Kel	6 Desa/Kel	6 Desa/Kel	6 Desa/Kel	6 Desa/Kel	6 Desa/Kel	6 Desa/Kel	6 Desa/Kel	
4	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina dan dilatih	Meningkatnya lembaga swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat.	175 lembaga	35 35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	
5	Persentase Rekomendasi kebijakan bidang penanggulangan kemiskinan yang ditindaklanjuti	Meningkatnya Usaha Ekonomi masyarakat.	50 Unit Posyantek	10 unit Posyantek	10 unit Posyantek	10 unit Posyantek	10 unit Posyantek	10 unit Posyantek	10 unit Posyantek	10 unit Posyantek	10 unit Posyantek	10 unit Posyantek	10 unit Posyantek	10 unit Posyantek	10 unit Posyantek	10 unit Posyantek	10 unit Posyantek	10 unit Posyantek	
6	Jumlah Lembaga Perekonomian perdesaan yang aktif	Meningkatnya Kualitas Lembaga Ekonomi Masyarakat																	
	Jumlah BUMDesa terbentuk		125 Unit	25 Unit	125 Unit	25 Unit	125 Unit	25 Unit	125 Unit	25 Unit	125 Unit	25 Unit	125 Unit	25 Unit	125 Unit	25 Unit	125 Unit	25 Unit	
	Jumlah BUMDesa aktif		125 Unit	25 Unit	125 Unit	25 Unit	125 Unit	25 Unit	125 Unit	25 Unit	125 Unit	25 Unit	125 Unit	25 Unit	125 Unit	25 Unit	125 Unit	25 Unit	
7	Jumlah Kelompok Masyarakat dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya Kemampuan Kelompok Masyarakat dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	90 Posyantek	18 Posyantek	18 Posyantek	18 Posyantek	18 Posyantek	18 Posyantek	18 Posyantek	18 Posyantek	18 Posyantek	18 Posyantek	18 Posyantek	18 Posyantek	18 Posyantek	18 Posyantek	18 Posyantek	18 Posyantek	
8	Jumlah Kelembagaan Pokmas	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pokmas	40 Pokmas	8 Pokmas	8 Pokmas	8 Pokmas	8 Pokmas	8 Pokmas	8 Pokmas	8 Pokmas	8 Pokmas	8 Pokmas	8 Pokmas	8 Pokmas	8 Pokmas	8 Pokmas	8 Pokmas	8 Pokmas	

9	Rumusan hasil koordinasi dan konsultasi program pem berdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	Terciptanya integrasi, sinkro nisasi dan sinergitas pemba ngunan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kampong dan kelurahan	5 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	
10	Jumlah Aparatur desa yang dilatih menyusun perencanaan pembangunan desa	Meningkatnya kualitas penye-lenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	5 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	
11	Jumlah aparatur desa/kel yang dilatih menajemen pemerintahan	Meningkatnya kualitas penye-lenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	5 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	
12	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mengelola keuangan desa/kelurahan	Meningkatnya kualitas penye-lenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	5 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	
13	Jumlah Masyarakat Miskin Perdesaan yang melakukan Ekonomi Agribisnis melalui Pemanfaatan TTG, Penguatan Kelembagaan Masy dan Pem des, Usaha Ekonomi Masy. Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Dan	Peningkatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat miskin melalui Pemanfaatan TTG, Penguatan Kelembagaan Masy dan Pem des, Usaha Ekonomi Masy. Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	50 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	
14	Jumlah Laporan pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Berbasis Pemberdayaan yang Optimal	Mewujudkan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Berbasis Pemberdayaan yang Optimal	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	
			50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	
			Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	
			Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	
			Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	
15	Jumlah Desa yang menjadi Desa/Kampung/Kelurahan Iklim	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	122 Kampung Iklim	15 Kampung Iklim	40 Kampung Iklim	70 Kampung Iklim	105 Kampung Iklim	150 Kampung Iklim	15 Kampung Iklim	40 Kampung Iklim	70 Kampung Iklim	105 Kampung Iklim	150 Kampung Iklim	15 Kampung Iklim	40 Kampung Iklim	70 Kampung Iklim	105 Kampung Iklim	150 Kampung Iklim	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

a. Sebagaimana Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Indeks Desa membangun, Kondisi 841 Desa se-kalimantan Timur berdasarkan **Indeks Desa Membangun (IDM)** tersebut terpetakan sebagai berikut :

REKAPITULASI INPUTAN KUISENER STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN TAHUN 2021
DI APLIKASI IDM TAHUN 2020, KALIMANTAN TIMUR

NO.	KABUPATEN	JUMLAH DESA	INPUTAN SELESAI		%	JUMLAH DESA BERDASARKAN STATUS						STATUR IDM TAHUN 2021
			SUDAH	BELUM		MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TINGGAL	TOTAL	
1.	PASER	139	139	0	100 %	13	69	49	8	0	139	Maju
2.	KUTAI KARTANEGARA	193	193	0	100 %	24	64	98	7	0	193	Maju
3.	BERAU	100	100	0	100 %	11	38	50	1	0	100	Maju
4.	KUTAI BARAT	190	190	0	100 %	19	65	87	18	1	190	Berkembang
5.	KUTAI TIMUR	139	139	0	100 %	15	55	63	6	0	139	Maju
6.	PENAJAM PASER UTARA	30	30	0	100 %	5	14	11	0	0	30	Maju
7.	MAHAKAM ULU	50	50	0	100 %	0	7	29	14	0	50	Berkembang
TOTAL		841	841	0	100 %	87	312	387	54	1	841	

Melihat kondisi besarnya jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di kalimantan Timur yaitu 308 dari 841 Desa. Sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur maka yang menjadi isu penting adalah bagaimana mengurangi jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal atau menaikan status desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa berkembang, dan diharapkan akan mengungkit status desa berkembang menjadi desa maju, dan desa maju menjadi desa mandiri.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

- Partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum optimal.
- Belum optimalnya peran lembaga sosial budaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- Belum optimalnya pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan.
- Belum optimalnya pengembangan kapasitas masyarakat
- Belum optimalnya pengembangan potensi ketahanan dan sosial budaya masyarakat
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa.
- Belum tersedianya data potensi desa dan kelurahan yang komprehensif.
- Lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi.

- Adanya kesenjangan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada masing-masing kawasan.
- Belum optimalnya penggalian dan pendayagunaan dana desa untuk menumbuhkankembangkan perekonomian desa.
- Belum optimalnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi SDA lokal.
- Rendahnya kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.
- Belum optimalnya peran kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana teknologi tepat guna perdesaan.
- Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif.
- Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Belum terpenuhinya jumlah perangkat Desa dan Kelurahan yang memenuhi persyaratan.
- Belum tersedianya tanah kas Desa.
- Belum optimalnya penegasan batas antar desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- Belum optimalnya Pembangunan Desa yang berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
- Belum optimalnya pengembangan potensi pembangunan Kawasan Perdesaan.
- Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kelurahan.

c. Dampak

1. Pemerintah Desa/Kelurahan belum secara efektif mengimplementasikan pola pembangunan partisipatif (atau pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat).
2. Masih terbatasnya peran lembaga masyarakat dalam mendorong peningkatan kemampuan, partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan

d. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

- **Tantangan** yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan pelayanan antara lain :

1) Pemerintah Desa/Kelurahan belum secara efektif mengimplementasikan pola pembangunan partisipatif (atau pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat).
2) Masih terbatasnya peran lembaga masyarakat dalam mendorong peningkatan kemampuan, partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan.
3) Kualitas SDM belum optimal.
4) Belum tersedianya data potensi desa dan kelurahan yang komprehensif
5) Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif.
6) Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
7) Masih perlunya pengembangan pembangunan Desa berbasis Kawasan Perdesaan untuk mengurangi adanya ketimpangan pembangunan antar Desa

8) Masih perlunya akses ekonomi yang lebih luas untuk mencapai masyarakat yang mampu dan mandiri melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan TTG.

- **Peluang** dalam peningkatan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur**:**

Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebaga Peluang dan berasal dari internal dan bisa di kontrol *(Controllable)* adalah :

1. Jumlah sumber daya manusia yang memadai.
2. Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal.
3. Koordinasi yang baik dengan Masyarakat atau perangkat Desa/Kelurahan.
4. Tersedianya dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memadai.

Sedangkan beberapa hal yang dikategorikan sebagai Peluang yang berasal dari lingkungan eksternal dan teridentifikasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
4. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bumdesa.
5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yang memberikan mandat dan wewenang yang jelas kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Timur untuk berkiprah lebih maksimal.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dibawah koordiasi 2 (dua) Kementerian yakni Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri.
10. Telah Terbentuknya LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).

e. Rekomendasi Strategis Untuk Ditindaklanjuti

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Dalam kaitan dengan hal tersebut maka rekomendasi strategis dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa adalah :

- Kebijakan pemerintah yang menempatkan pembangunan perdesaan sebagai salah satu agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan rujukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- Peran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang difokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan dengan mendayagunakan teknologi tepat guna serta peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung dan pemerintahan kelurahan.
- Upaya pemberdayaan masyarakat miskin secara komprehensif menjadi komitmen utama dari seluruh jajaran aparatur yang mengemban tugas dibidang pembangunan perdesaan, sehingga secara proaktif merancang berbagai kebijakan dan program

penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik masalah dan prioritas kebutuhan keluarga miskin. Upaya komprehensif dalam rangka pemberdayaan masyarakat (termasuk pemberdayaan masyarakat miskin), difokuskan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yakni pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik dan aspek lingkungan.

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menegaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan rangkaian yang utuh dan tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan secara nasional, dan merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta memiliki posisi strategis dalam mencapai keberhasilan berbagai kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat.
- Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk penetapan kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Pemerintahan Daerah (RKPD)

Review terhadap Rancangan Akhir Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Pemerintahan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, menunjukan bahwa RKPD telah selaras dan mengakomodir rumusan program dan kegiatan yang terdapat pada Rancangan Akhir Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, yaitu 5 (lima) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 55 (lima puluh limat) sub kegiatan dengan besaran pagu dana indikatif sesuai dengan yang diusulkan, Dari Rumusan dan Program dimaksud sebagaimana disajikan pada **Tabel T-C.31** sebagai berikut :

Tabel T-C. 31.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Kepmendagri 50	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
						52.148.806.025					***52.148.806.025***	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
	Indikator Program : Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa											
I	**Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah**		**1 Tahun**							
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Laporan	52,520,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Laporan	52,520,000	
II	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**		**1 Tahun**							
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Laporan Keuangan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 Laporan	145,260,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporam	145,260,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	53,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan akhir tahun	1 Laporan	53,000,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Bulanan, triwulan dan Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18 Laporan	131,088,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Bulanan, triwulan dan Semesteran	18 Laporan	131,088,000	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverivikasi	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	800 Dokumen	76,421,200	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverivikasi	800 Dokumen	76,421,200	
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaaan yang ditanggapi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Laporan	20,511,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaaan yang ditanggapi	1 Laporan	20,511,000	

6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	379,680,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	379,680,000	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	8,885,298,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji ASN	1 Tahun	8,885,298,000	
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Tersedianya Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Laporan	6,630,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Tersedianya Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Laporan	6,630,000	
III	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Administrasi Umum PD**		**1 Tahun**					**1 Tahun**		
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	7 jenis	484,175,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7 jenis	484,175,000	
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 jenis	170,204,700	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 jenis	170,204,700	
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedia Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 jenis	35,001,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedia Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis	35,001,000	
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 jenis	170,553,700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 jenis	170,553,700	
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 jenis	25,374,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 jenis	25,374,000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,774,450,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,774,450,000	
IV	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD**		**1 Tahun**					**1 Tahun**		
1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	1 gedung	328,451,400				1 gedung	328,451,400	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16 unit	81,678,000				16 unit	81,678,000	

3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan dinas yang diperpanjang STNK	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	571,718,500				16 unit	571,718,500	
V	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Terlaksananya Pengadaan barang Milik daerah Penunjuang Urusan PD**									
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	1,042,220,000				1 unit	1,042,220,000	
2	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 jenis	1,969,700				1 jenis	1,969,700	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	288,471,800				1 Unit	288,471,800	
VI	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya Jasa Penunjuang Urusan PD**		**12 bulan**					**12 bulan**		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 tahun	428,372,000				1 tahun	428,372,000	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 tahun	2,361,395,646				1 tahun	2,361,395,646	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 jenis	336,770,000				10 jenis	336,770,000	
4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6,000,000				1 Laporan	6,000,000	
VII	**Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja PD**									
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2,138,391,000				2 dokumen	2,138,391,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000				1 Dokumen	15,000,000	

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000				1 Dokumen	15,000,000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000				1 Dokumen	15,000,000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 dokumen	50,000,000				16 dokumen	50,000,000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	17,000,000				1 dok	17,000,000	
7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	290,000,000				5 dok	290,000,000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSIPROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (PROGRAM PRIORITAS)											
	Indikator Program : Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa dan (Lembaga Ekonomi Desa) secara optimal											
VIII	**Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**		**Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahahan desa secara optimal**		**45 Desa**					**45 Desa**		
1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		jumlah desa/ kampung berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 desa/ kampung 3 Kelurahan	500,000,000				3 desa/ kampung 3 Kelurahan	500,000,000	
2	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa		jumlah desa/kampung yang mengikuti inovasi perkembangan desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	1 desa dan 1 Kelurahan	88,200,000				1 desa dan 1 Kelurahan	88,200,000	
3	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		jumlah laporan pemilihan,pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	75,000,000				1 Laporan	75,000,000	
4	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		jumlah laporan penetapan penegasan batas desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Laporan	400,000,000				1 Laporan	400,000,000	

5	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Tersedia data pengelolaan aset desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Laporan	100,000,000				1 Laporan	100,000,000	
6	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Tersedianya data penggunaan SISKEUDES	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Laporan	1,173,275,000				1 Laporan	1,173,275,000	
7	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa		jumlah laporan peraturan daerah kab/kota dan jumlah laporan bupati/ walikota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Laporan	50,000,000				1 Laporan	50,000,000	
8	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa		jumlah desa/kel Iklim	jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan. Perencanaan. Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	40 kampung	317,749,500				40 kampung	317,749,500	
9	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		laporan fasilitasi peran BPD dalam penyelnggaraan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Laporan	50,000,000				1 Laporan	50,000,000	
10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa		jumlah aparatur desa yang telah dilatih	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	45 orang	653,297,800				45 orang	653,297,800	
11	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa		jumlah bumdes yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	45 bumdes	1,234,000,000				45 bumdes	1,234,000,000	
12	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa		Jumlah Laporan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Laporan	140,000,000				1 Laporan	140,000,000	
13	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Jumlah Anggota BPD yang telah dilatih	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	45 orang	275,000,000				45 orang	275,000,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT											
	Indikator Program : Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan											
IX	**Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum**		**jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yg lembaga kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPN, dan pokmas yang berhasil menjalankan tugas**		**30 Desa**					**30 Desa**		

	Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		**dan fungsi kelembagaan**									
1	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		jumlah laporan penyenggaraan BBGRM	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	47,000,000				1 Laporan	47,000,000	
2	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		jumlah posyantek yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10 posyantek	1,036,000,000				10 posyantek	1,036,000,000	
3	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah desa yang PKK, posyandu, dan LPM aktif	Jumlah Dokumen Hasil Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	30 desa	817,509,000				30 desa	817,509,000	
4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang dibina	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20 Pokma	490,000,000				20 Pokma	490,000,000	
5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah laporan hasil pembinaan penyelenggaraan gerakan PKK	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 Laporan	2,203,993,500				5 Laporan	2,203,993,500	
6	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		laporan hasil identifikasi dan pembinaan MHA	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Laporan	790,083,000				1 Laporan	790,083,000	
7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat		jumlah LPN,KPM, karang taruna dan pokmas yang mampu berperan aktif dalam proses pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan	150 orang	402,540,000				150 orang	402,540,000	

	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya								
	PROGRAM PENATAAN DESA											
	Indikator Program : Kabupaten yang telah melaksanakan penataan desa											
X	**Kegiatan : Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**		**Jumlah Kabupaten yang telah melaksanakan penataan desa**		**7 Kab**					**7 Kab**		
1	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa Dalam Rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Laporan	400,000,000				1 Laporan	400,000,000	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA (Program Prioritas)											
	Indikator Program : Desa berkembang											
XI	**Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**		**Jumlah Desa Berkembang**		**30 Desa**					**30 Desa**		
1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Badan kerjasama Antar Desa Yang dibina	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	7 BKAD	1,469,000,000				7 BKAD	1,469,000,000	
2	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		Kerjasama desa dengan pihak ketiga yang dibina	jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	3 Kerjasama Desa	91,000,000				3 Kerjasama Desa	91,000,000	
3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Kawasan perdesaan yang dibina	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Kawasan Perdesaan	590,000,000				3 Kawasan Perdesaan	590,000,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, merupakan hasil analisis sesuai kebutuhan. Rumusan berdasarkan hasil Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi pelaksanaan Program tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.

Program dan Kegiatan merupakan analisis dan penelaahan Usulan pemangku kepentingan maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kampung dan Kelurahan Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan ke Provinsi maupun hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dan Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kampung dan Kelurahan se-Kalimantan Timur.

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan merupakan penjabaran pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pada satu anggaran berjalan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Usulan Program dan Kegiatan dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 disajikan pada **Tabel T-C.32** sebagai berikut :

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

NO	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Kepmendagri 50	Besaran/Volume	Catatan
	2	*3*	*4*	*5*	6	*7*
					52.148.806.025	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Indikator Program : Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa					
I	**Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah**			
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	52.520.000	
II	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**			
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Laporan Keuangan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	145.260.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	53.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Bulanan, triwulan dan Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	131.088.000	

4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverivikasi	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	76.421.200	
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaaan yang ditanggapi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20.511.000	
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	379.680.000	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.885.298.000	
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Tersedianya Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.630.000	
III	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Administrasi Umum PD**			
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	484.175.100	
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	170.204.700	
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedia Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35.001.000	
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	170.553.700	
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	25.374.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.495.900.000	

IV	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD**			
1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	328.451.400	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	81.678.000	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan dinas yang diperpanjang STNK	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	571.718.500	
V	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Terlaksananya Pengadaan barang Milik daerah Penunjuang Urusan PD**			
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	1.042.220.000	
2	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.969.700	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				253.968.000	
VI	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya Jasa Penunjuang Urusan PD**			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	428.372.000	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.361.395.646	

3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	336.770.000	
4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	
VII	**Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja PD**			
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.138.391.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15,000,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15,000,000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	15,000,000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50,000,000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	17,000,000	
7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	340.000.000	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSIPROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (PROGRAM PRIORITAS)					
	Indikator Program : Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa dan (Lembaga Ekonomi Desa) secara optimal					
VIII	**Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**		**Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahahan desa secara optimal**			
1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		jumlah desa/ kampung berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	500.000.000	
2	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa		jumlah desa/kampung yang mengikuti inovasi perkembangan desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	88,200,000	
3	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		jumlah laporan pemilihan,pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	75.000.000	
4	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		jumlah laporan penetapan penegasan batas desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	400.000.000	
5	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Tersedia data pengelolaan aset desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	100.000.000	
6	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Tersedianya data penggunaan SISKEUDES	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.173.275.000	
7	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa		jumlah laporan peraturan daerah kab/kota dan jumlah laporan bupati/ walikota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	50,000,000	
8	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa		jumlah desa/kel Iklim	jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan. Perencanaan. Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	317.749.500	

9	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		laporan fasilitasi peran BPD dalam penyelnggaraan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	50,000,000	
10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa		jumlah aparatur desa yang telah dilatih	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	653.297.800	
11	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa		jumlah bumdes yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1.234.000.000	
12	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa		Jumlah Laporan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	140.000.000	
13	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Jumlah Anggota BPD yang telah dilatih	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	275.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
	Indikator Program : Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan					
IX	**Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**		**jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yg lembaga kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPN, dan pokmas yang berhasil menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan**			
1	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		jumlah laporan penyenggaraan BBGRM	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	47.000.000	

2	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		jumlah posyantek yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1.036.000.000	
3	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		jumlah desa yang PKK, posyandu, dan LPM aktif	Jumlah Dokumen Hasil Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	817.509.000	
4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang dibina	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	490.000.000	
5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		jumlah laporan hasil pembinaan penyelenggaraan gerakan PKK	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.203.993.500	
6	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		laporan hasil identifikasi dan pembinaan MHA	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	790.083.000	

7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		jumlah LPN,KPM, karang taruna dan pokmas yang mampu berperan aktif dalam proses pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	402.540.000	
	PROGRAM PENATAAN DESA					
	Indikator Program : Kabupaten yang telah melaksanakan penataan desa					
X	**Kegiatan : Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**		**Jumlah Kabupaten yang telah melaksanakan penataan desa**			
1	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa Dalam Rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	400.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA (Program Prioritas)					
	Indikator Program : Desa berkembang					
XI	**Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**		**Jumlah Desa Berkembang**			
1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Badan kerjasama Antar Desa Yang dibina	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	1.469.000.000	
2	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		Kerjasama desa dengan pihak ketiga yang dibina	jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	91.000.000	
3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Kawasan perdesaan yang dibina	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	590.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Daerah yang dituangkan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tersinkronisasi dan terharmonisasi dengan Rencna Kerja Pemerintah mendukung pencapaian target pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan daerah dan perangkat daerah terkait.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, memiliki arah kebijakan sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memilih prioritas salah satunya adalah meningkatkan jumlah Desa Berkembang, Maju dan Mandiri di Indonesia sementara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memprioritaskan pengentasan/penurunan jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal menjadi Desa Berkembang dan seterusnya menjadi Desa Maju dan Mandiri. Dan disisi lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur juga melaksanakan Program dan Kegiatan yang sama dalam rangka mendukung pembangunan nasional terkait Peningkatan Kapasitan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Penataan dan Penyelenggaraan Administrasi Desa

serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Dan disepakati bersama dalam Rapat Kordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas).

3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi kalimantan Timur

Tingginya Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di Kalimantan Timur berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi isu strategis (Indikator Kinerja Utama) dalam penetapan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan ditindaklanjuti dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) tahunan. Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2023 disusun untuk meningkatkan status desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa berkembang dan seterusnya (Desa Maju dan Desa Mandiri) secara berjenjang.

Tujuan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan;
b. Meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi masyarakat dan tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat;
c. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan;
d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;

e. Meningkatkan Pemerataan dan kualitas Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkeadilan;
f. Meningkatkan koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Sasaran Rancangan Akhir Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa :

a. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.
b. Meningkatnya lembaga dan usaha ekonomi produktif masyarakat.
c. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
e. Meningkatkan Pembangunan desa dan Kawasan Perdesaan yang merata, berkualitas dan berkeadilan.
f. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan Kelurahan.

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Rumusan program dan kegiatan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Renstra 2023 guna mendukung dan melaksanakan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih adalah sebagai berikut :

VISI : Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat

Berani : Pemerintahan mempunyai keberanian, tekad dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki

sesuai peraturan perundangan untuk mensejahterakan masyarakat

Berdaulat :

1. Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik
2. Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar
3. Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
4. Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki daya saing.

Sejalan dengan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPJMD 2018 - 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur bertekad mewujudkannya melalui Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai berikut :

Misi I : **Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas**

Untuk mewujudkan Misi tersebut, melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa maka kemampuan masyarakat khususnya meningkatkan peran Pemuda melalui Karang Taruna semakin ditingkatkan pengetahuan tentang penyalahgunaan Narkoba dengan tujuan Meminimalisir penyalahgunaan narkoba bagi kalangan generasi muda. Selain itu perlu peningkatan kualitas SDM

Aparatur Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang menangani Kepemudaan, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pembangunan masyarakat lebih optimal.

Pemberdayaan Masyarakat juga dikembangkan dalam pengarustamaan gender dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan terutama di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Misi 2 : **Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan Ekonomi kerakyatan yang berkeadilan**

Untuk mewujudkan Misi tersebut, melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa maka ditingkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui Pemanfaatan Perekonomian Desa dengan cara fasilitasi Pembangan Lembaga Ekonomi Desa, pembentukan Bumdes dan Pasar Desa, pelatihan manajemen Bumdes serta pelatihan Administrasi Bumdesa. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan juga dikembangkan melalui peningkatan Kapasitas masyarakat terutama Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam usaha mengembangkan Wira Usaha Baru di Desa/Kelurahan secara merata dan berkeadilan.

Misi 3 : **Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan**

Untuk mewujudkan Misi tersebut, melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Peningakatan perkembangan pokmas sapras Desa/Kel/KP-SPAMS; Peningkatan perkembangan

sarana air minum dan sanitasi yang layak; Peningkatan jumlah masyarakat yang mampu mengelola sarana air minum dan sanitasi yang layak; Meningkatkan jumlah masyarakat yang mampu membina kelompok pengelola sarana air minum dan sanitasi yang layak. Disamping itu pelaksanaan pembangunan masyarakat berbasis desa membangun dan pembangunan kawasan dikembangkan untuk mewujudkan kedaulatan dan memenuhi kebutuhan infratruktur kewilayahan antara lain melalui peningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Serta Tata Ruang Desa; peningkatkan Kualitas dan Pelaksanaan Dalam Penyusunan Serta Implementasi Regulasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan serta Komunikasi dan Informasi Perdesaan; Penyediaan Stimulan Dana Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Melalui Bantuan Keuangan; Peningkatkan Akses Informasi dan Data Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan melalui Desiminasi Informasi dan Sistem Informasi Profile Desa; Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat Tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Serta Komunikasi dan Informasi Perdesaan; Peningkatkan Kualitas Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Serta Sistem Informasi Desa/Kelurahan melalui Pengkajian dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD); serta Peningkatkan Kapasitas Peran dan Fungsi Tenaga Pendamping Profesional Desa.

Misi 4 : **Berdaulat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan**

Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam lokal dan pemanfaatan Teknologi Tepat bertujuan untuk pengembangan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam pempengelolaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dengan memanfaatkan sumber daya lokal, meningkatkan nilai tambah serta berwawasan lingkungan serta selaras dengan konsep pembangunan hijau. Kualitas lingkungan yang baik dan sehat juga dikembangkan berbasis pembangunan kawasan dengan pemberdayaan masyarakat secara optimal. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi.

Misi 5 : **Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Professional dan Berorientasi Pelayanan Publik**

Untuk mewujudkan Misi tersebut, melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Peningkatan pembinaan aparatur pemerintah desa dan pemerintah kelurahan; Melakukan peningkatan kapasitas Kepala Desa, perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan aparatur Kelurahan; Melakukan pembinaan dan pemantauan atas kebijakan daerah dalam penetapan pembiayaan desa melakukan koordinasi pembinaan bersama Kabupaten/Kota dalam rangka penataan dan adminsitrasi desa/kelurahan; Menyelenggarakan

perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Melakukan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Desa dan pengelolaan aset Desa bagi aparatur desa.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut maka melalui Pemberdayaan masyarakat ditetapkan usaha-usaha sebagai berikut :
Pertama, meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;

Kedua, meningkatkan peran kelembagaan masyarakat dalam mendorong dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk mengatasi hal ini harus dilakukan dan difasilitasi oleh pihak pemerintah melalui penetapan kebijakan, pengembangan instrumen implementasi (dalam bentuk pedoman, petunjuk teknis, atau panduan), peningkatan kemampuan aparatur dan masyarakat (melalui sosialisasi, orientasi, pelatihan, atau bimbingan teknis), serta supervisi pemantauan dan evaluasi.

Dengan demikian peningkatan keberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa lima tahun kedepan akan mampu memberikan keseimbangan antara upaya penguatan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatannya, yang dilakukan oleh pihak pemerintah dengan penetapan kebijakan pemberian kewenangan kepada masyarakat dalam proses pembangunan, dengan penekanan pada aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan aspek lingkungan serta pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

Rekapitulasi Rumusan Program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, penyebaran lokasi dan kebutuhan dana/pagu indikatif dapat dijelaskan pada **Tabel T-C. 33** sebagai berikut :

T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju

Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kepmendagri 50	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**									
	Indikator Program : Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa									
2.13.01.1.05	**Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah**								
2.13.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kalimantan Timur	1 Laporan	52.520.000	PAD			
2.13.01.1.02	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**								
2.13.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Kalimantan Timur	12 Laporam	145.260.000	PAD			
2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kalimantan Timur	1 Laporan	53.000.000	PAD			

2.13.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan, triwulan dan Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Kalimantan Timur	18 Laporan	131.088.000	PAD			
2.13.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverivikasi	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Kalimantan Timur	800 Dokumen	76.421.200	PAD			
2.13.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaaan yang ditanggapi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kalimantan Timur	1 Laporan	20.511.000	PAD			
2.13.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kalimantan Timur	12 Bulan	379.680.000	PAD			
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kalimantan Timur	1 Tahun	8.885.298.000	PAD			
2.13.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kalimantan Timur	4 Laporan	6.630.000	PAD			
2.13.01.1.06	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum PD**			**1 Tahun**					
2.13.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kalimantan Timur	7 jenis	484.175.100	PAD			
2.13.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kalimantan Timur	4 jenis	170.204.700	PAD			

2.13.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedia Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kalimantan Timur	10 jenis	35.001.000	PAD			
2.13.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kalimantan Timur	8 jenis	170.553.700	PAD			
2.13.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kalimantan Timur	1 jenis	25.374.000	PAD			
2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kalimantan Timur	1 Laporan	1.495.900.000	PAD			
2.13.01.1.09	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD**		Kalimantan Timur	**1 Tahun**		PAD			
2.13.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Kalimantan Timur	1 gedung	328.451.400	PAD			
2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kalimantan Timur	16 unit	81.678.000	PAD			
2.13.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang diperpanjang STNK	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kalimantan Timur	16 unit	571.718.500	PAD			

2.13.01.1.07	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan barang Milik daerah Penunjuang Urusan PD**								
2.13.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Kalimantan Timur	1 unit	1.042.220.000	PAD			
2.13.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kalimantan Timur	1 jenis	1.969.700	PAD			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					253.968.000				
2.13.01.1.08	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjuang Urusan PD**			**12 bulan**					
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kalimantan Timur	1 tahun	428.372.000	PAD			
2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kalimantan Timur	1 tahun	2.361.395.646	PAD			
2.13.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kalimantan Timur	10 jenis	336.770.000	PAD			
2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kalimantan Timur	1 Laporan	6.000.000	PAD			

2.13.01.1.01	**Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja PD**								
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	2 dokumen	2.138.391.000	PAD			
2.13.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kalimantan Timur	1 Dokumen	15,000,000	PAD			
2.13.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kalimantan Timur	1 Dokumen	15,000,000	PAD			
2.13.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kalimantan Timur	1 Dokumen	15,000,000	PAD			
2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kalimantan Timur	16 dokumen	50,000,000	PAD			

2.13.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kalimantan Timur	1 dok	17,000,000	PAD			
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	5 dok	340.000.000	PAD			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSIPROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (PROGRAM PRIORITAS)**									
	Indikator Program : Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa dan (Lembaga Ekonomi Desa) secara optimal									
2.13.04.1.01	**Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahahan desa secara optimal**			**45 Desa**					
2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	jumlah desa/ kampung berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kalimantan Timur	3 desa/ kampung 3 Kelurahan	500.000.000	PAD			
2.13.04.1.01.21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	jumlah desa/kampung yang mengikuti inovasi perkembangan desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Kalimantan Timur	1 desa dan 1 Kelurahan	88,200,000	PAD			
2.13.04.1.01.07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah laporan pemilihan,pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kalimantan Timur	1 Laporan	75.000.000	PAD			
2.13.04.1.01.16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	jumlah laporan penetapan penegasan batas desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kalimantan Timur	1 Laporan	400.000.000	PAD			

2.13.04.1.01.06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Tersedia data pengelolaan aset desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kalimantan Timur	1 Laporan	100.000.000	PAD			
2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tersedianya data penggunaan SISKEUDES	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kalimantan Timur	1 Laporan	1.173.275.000	PAD			
2.13.04.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	jumlah laporan peraturan daerah kab/kota dan jumlah laporan bupati/ walikota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	Kalimantan Timur	1 Laporan	50,000,000	PAD			
2.13.04.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah desa/kel Iklim	jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan. Perencanaan. Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Kalimantan Timur	40 kampung	317.749.500	PAD			
2.13.04.1.01.19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	laporan fasilitasi peran BPD dalam penyelnggaraan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kalimantan Timur	1 Laporan	50,000,000	PAD			
2.13.04.1.01.10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah aparatur desa yang telah dilatih	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Kalimantan Timur	45 orang	653.297.800	PAD			
2.13.04.1.01.15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	jumlah bumdes yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kalimantan Timur	45 bumdes	1.234.000.000	PAD			

2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Kalimantan Timur	1 Laporan	140.000.000	PAD			
2.13.04.1.01.11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang telah dilatih	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kalimantan Timur	45 orang	275.000.000	PAD			
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**									
	Indikator Program : Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan									
2.13.05.1.01	**Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yg lembaga kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPN, dan pokmas yang berhasil menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan**			**30 Desa**					
2.13.05.1.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	jumlah laporan penyenggaraan BBGRM	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kalimantan Timur	1 Laporan	47,000,000	PAD			
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah posyantek yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kalimantan Timur	10 posyantek	1.036.000.000	PAD			

2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah desa yang PKK, posyandu, dan LPM aktif	Jumlah Dokumen Hasil Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kalimantan Timur	30 desa	817.509.000	PAD			
2.13.05.1.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang dibina	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kalimantan Timur	20 Pokma	490.000.000	PAD			
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah laporan hasil pembinaan penyelenggaraan gerakan PKK	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kalimantan Timur	5 Laporan	2.203.993.500	PAD			

2.13.05.1.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	laporan hasil identifikasi dan pembinaan MHA	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kalimantan Timur	1 Laporan	790.083.000	PAD			
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah LPN,KPM, karang taruna dan pokmas yang mampu berperan aktif dalam proses pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Kalimantan Timur	150 orang	402.540.000	PAD			
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**									
	Indikator Program : Kabupaten yang telah melaksanakan penataan desa									
2.13.02.1.01	**Kegiatan : Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**Jumlah Kabupaten yang telah melaksanakan penataan desa**			**7 Kab**					
2.13.02.1.01.03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa Dalam Rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Kalimantan Timur	1 Laporan	400.000.000	PAD			
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA (Program Prioritas)**									
	Indikator Program : Desa berkembang									
2.13.03.1.01	**Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Desa Berkembang**			**30 Desa**					

2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan kerjasama Antar Desa Yang dibina	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Kalimantan Timur	7 BKAD	1.469.000.000	PAD			
2.13.03.1.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kerjasama desa dengan pihak ketiga yang dibina	jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	Kalimantan Timur	3 Kerjasama Desa	91.000.000	PAD			
2.13.03.1.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kawasan perdesaan yang dibina	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kalimantan Timur	3 Kawasan Perdesaan	590.000.000	PAD			

BAB IV

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

4.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Secara rinci kebijakan dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 sebagai berikut :

A. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Program Penataan Desa;
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
4. Program Program Administrasi Pemerintahan Desa;
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;

B. Kegiatan

1. Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

8. Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat.;
9. Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang menjadi Kewenangan Provinsi;
10. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
11. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Didang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama Berada di lintas Daerah Kabupaten/Kota;

C. Sub Kegiatan

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
9. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
13. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
14. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

15. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
16. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
18. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
19. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
21. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
22. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
23. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
24. Pengadaan Mebel
25. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
26. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
27. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
28. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
29. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
30. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
31. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
32. Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
33. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
34. Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
35. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
36. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
37. Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa

38. Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
39. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
40. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa
41. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
42. Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
43. Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
44. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
45. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
46. Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
47. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
48. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
49. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
50. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
51. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
52. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

53. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
54. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
55. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat

D. Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan Rancangan Akhir Rencana Kerja 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan Pagu Indikatif sebesar 21,000,000,000.00 (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah) untuk pembiayaan 5 (lima) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 55 (lima puluh lima) Sub Kegiatan.

P E N U T U P

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menjadi sangat penting dan harus dilaksanakan sebagai langkah pengambilan kebijakan dalam menangani persoalan-persoalan dalam bentuk rumusan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas, fungsi dan tanggung jawab Pemerintah dalam bidang pemberdayaan, mengadopsi kebutuhan masyarakat yang mengedepankan pembangunan berbasis masyarakat dan keberpihakan kepada masyarakat miskin sesuai dengan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan untuk :

a. Bahan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2023;
b. Acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (RKA/DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2023;
c. Acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan rencana kebijakan dimasa

mendatang oleh jajaran pimpinan dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di bidang pemberdayaan masyarakat.

Samarinda,

Kepala,

Anwar Sanusi, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650906 198903 1 010

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Permendagri no. 86 Tahun 2017 ditegaskan bahwa Perangkat Daerah diamanahkan untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA). Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2023, merupakan dokumen perencanaan yang sangat strategis karena merupakan embrio penyusunan Perubahan APBD Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2023.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2024 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023, dimana uraian jenis program dan kegiatan tetap mengacu pada dokumen Rancangan RKPD Tahun 2023 yang bersama-sama disusun oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2023 akan dijabarkan sebagai acuan bagi para pengelola program/kegiatan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023.

Usulan kegiatan dan besaran alokasi anggaran yang telah ditetapkan ini selanjutnya akan dibahas dalam rapat – rapat koordinasi prioritas pembangunan lintas bidang dalam lingkungan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur dengan memperhatikan aspirasi dan skala prioritas serta *core bisnis indicator* / indikator kinerja utama Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur yang selanjutnya akan menjadi Perubahn Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang akan disahkan/disetujui oleh Gubernur

Kalimantan Timur melalui Bappeda Prov. Kalimantan Timur akan menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan prioritas kegiatan Perangkat Daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Tahunan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2023, didasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
11. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
16. Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 –2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023;
21. Rancangan Akhir RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai pedoman dan landasan bagi jajaran Kepala Bidang dan Sekretariat serta Kepala UPTD dalam menyusun dan merencanakan perubahan anggaran program dan kegiatan Tahun 2023, sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah :

1. Mewujudkan keselarasan program kegiatan antara RKPD dengan implementasi usulan kegiatan dari Perangkat Daerah;
2. Sebagai pedoman dalam usulan jenis pekerjaan;

3. Melakukan inventarisasi dan kesesuaian program dan kegiatan, sesuai dengan skala prioritas yang harus diselesaikan pada tahun 2023;
4. Menciptakan mekanisme pengendalian dan membangun sistem kinerja pembangunan yang terarah, transparan dan terukur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I **PENDAHULUAN**, berisi tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,** berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III **TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH** berisi tentang : Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB V **PENUTUP** berisi catatan yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (n)

Evaluasi Kinerja Tahun Lalu terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur, Tahun 2022 yang merupakan tahun keempat dari Renstra Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur 2019 – 2023 dan Realisasi Renstra serta Evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur 2019 – 2023.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2022 dari 4 Program dan 25 Kegiatan 48 Sub Kegiatan, Pagu yang tersedia untuk Dinas Perhubungan sebesar Rp. 43.804.884.750,- terealisasi sebesar Rp. 39.404.697.464,- atau 89,96% terhadap pagu dan dana yang tidak terserap (Silpa) sebesar Rp. 4.400.187.287,- atau 10,04%. Pagu yang tersedia untuk UPTD Terminal sebesar Rp. 7.234.382.911,- terealisasi sebesar Rp. 6.369.335.156,- atau 88,04% terhadap pagu dan dana yang tidak terserap (Silpa) sebesar Rp. 865.047.755,- atau 11,96% dan untuk keseluruhan Pagu sebesar Rp. 51.039.267.661,- terealisasi sebesar Rp. 51.039.267.661,- atau 89,68% terhadap pagu dan dana yang tidak terserap (Silpa) sebesar Rp. 5.265.235.041,- atau 10,32%. Dana Silpa tersebut merupakan hasil efisiensi dari belanja rutin dan pendukung kegiatan serta Silpa dari proses pelelangan pengadaan barang/jasa dan Belanja yang tidak terserap dikarenakan pemutusan kontrak, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel : 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu / 2022 (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan/2023	
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3			5		6		7		8=(7/6)	9		10=(7+9)	11=((10/4)
2	**15**	**00**				**Dinas Perhubungan**														
2	**15**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan (%)**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**	**100**	**%**	**0**	**0%**
2	**15**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**75,0**	**%**	**71,3**	**%**	**73**	**%**	**70,11**	**%**	**96,04%**	**75**	**%**	**73,05**	**97%**
2	15	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja (2 Dok), SKM (2 Dok), Studi Gender Statistik (1Dok)	25	Dokumen	16	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100%				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	Dokumen								4	Dokumen	23	92%
2	15	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran (RKA 1 Dok, DPA 1 Dok, Laporan Rakornis 1 Dok, Laporan Forum PD 1 Dok)	20	Dokumen	12	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%				
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20	Dokumen								4	Dokumen	16	80%
2	15	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian dan Ikhtisar Kinerja SKPD (Laporan Monev 2 Dok, Laporan TEPRA 12 Dok, Laporan Angkutan Lebaran 1 Dok, Laporan Natal dan Tahun Baru 1 Dok)	80	Dokumen	48	Dokumen	16	Dokumen	16	Dokumen	100%				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80	Dokumen								5	Laporan	66	83%
2	15	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (4 Triwulan)	20	Dokumen	12	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	Dokumen								20	Laporan	16	80%
2	**15**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tercapaianya Laporan Keuangan Tepat Waktu**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**	**100**	**%**	**25**	**25%**
2	15	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48	Laporan	36	Laporan	12	Bulan	12	Bulan	100%			48	100%
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN										86	Orang/Bulan		
2	15	01	1	02	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verikifikasi Keuangan SKPD													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bulan								12	Bulan	3	25%

2	**15**	**01**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi**	**38**	**%**	**35**	**%**	**38**	**%**	**38**	**%**	**100%**	**60**	**%**	**3,75**	**10%**
2	15	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian Dishub beserta Perlengkapannya	897	Stel	728	Stel	145	Stel	145	Stel	100%	892	Stel	728	81%
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan										4	Paket		
2	15	01	1	05	02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya Kualifikasi ASN Perhubungan	117	Pegawai	35	Pegawai	65	Pegawai	65	Pegawai	100%	117	Pegawai		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	182	Pegawai								24	Orang	68	37%
2	**15**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Penyelenggaraan Administrasi Umum**	**60**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**51**	**85%**
2	15	01	1	06	01	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2290	Unit	1700	Unit	434	Unit	434	Unit	100%	100	Unit		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	Paket								10	Paket	0	0%
2	15	01	1	06	02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	48	Bulan		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	180	Paket								69	Paket	0	0%
2	15	01	1	06	05	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	800000	Lembar	600000	Lembar	200000	Lembar	200000	Lembar	100%	600000	Lembar		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket								10	Paket	1	17%
2	15	01	1	06	09	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	200	Kali	150	Kali	50	Kali	50	Kali	100%	200	Kali		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan								22	Laporan	3	6%
2	**15**	**01**	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah**	**60,0**	**%**	**45**	**%**	**50**	**%**	**50**	**%**	**100%**	**60**	**%**	**14,02**	**23%**
2	15	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	19	Unit	15	Unit	6	Unit	6	Unit	100%	5	Unit		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	22	Unit								4	Unit	0	0%
2	15	01	1	07	06	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	38	Unit	13	Unit	5	Unit	5	Unit	100%	38	Unit		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	106	Unit								259	Unit	0	0%
2	**15**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**60**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**51**	**85%**
2	15	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Administrasikan	20400	Surat	15500	Surat	5100	Surat	5100	Surat	100%	20400	Surat		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan								12	Laporan	3	25%
2	15	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	60	Bulan		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan								4	Laporan	3	25%
2	15	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	60	Bulan		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan								12	Laporan	3	25%

2	**15**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**100,0**	**%**	**90,0**	**%**	**95**	**%**	**95**	**%**	**100%**	**100**	**%**	**4,86**	**5%**
2	15	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan	12	Unit	4	Unit	4	Unit	4	Unit	100%	12	Unit		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14	Unit								2	Unit	0	0%
2	15	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	10	Unit	10	Unit	10	Unit	10	Unit	100%	10	Unit		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50	Unit								18	Unit	1	2%
2	15	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharan Peralatan dan Mesin	285	Unit	257	Unit	279	Unit	279	Unit	100%	285	Unit		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	246	Unit								245	Unit	34	14%
2	15	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	1	Gedung	1	Gedung	1	Gedung	1	Gedung	100%	1	Gedung		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit								1	Unit	0	0%
2	**15**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas**	**342**	**Kasus**	**598**	**Kasus**	**427**	**Kasus**	**163**	**Kasus**	**262%**	**342**	**Kasus**	**43**	**13%**
2	**15**	**02**	**1**	**02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan**	**80,0**	**%**	**60,0**	**%**	**70**	**%**	**75,23**	**%**	**107%**	**80,0**	**%**	**23,48**	**29%**
2	15	02	1	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang dipasang perlengkapan jalan	775	Km	535	Km	120	Km	120	Km	100%	775	Km		
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	60	Unit								4748	Unit	1600	2667%
2	15	02	1	02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Direhabilitasi & Dipelihara	130	Unit	55	Unit	30	Unit	30	Unit	100%	130	Unit		
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	45	Unit								40	Unit	40	89%
2	**15**	**02**	**1**	**03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal**	**14**	**Perencanaan**	**3**	**Perencanaan**	**2**	**Perencanaan**	**2**	**Perencanaan**	**100%**	**1**	**Perencanaan**	**0**	**0%**
2	15	02	1	03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Rencana	14	Dokumen	3	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	10	Dokumen		
							Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	14	Dokumen								1	Dokumen	0	0%
2	**15**	**02**	**1**	**05**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**Persentase Kepatuhan Rekomendasi MRLL**	**100,0**	**%**	**80**	**%**	**85**	**%**	**47,36**	**%**	**56%**	**75,0**	**%**	**15,63**	**16%**
2	15	02	1	05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Rekomendasi MRLL yang dikeluarkan			0	Rekomendasi	10	Rekomendasi	4	Rekomendasi	40%				
							Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	10	Laporan								11	Laporan	0	0%

2	15	02	1	05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Pelaksanaan Penegakan Hukum di Jalan Provinsi			1	Lokasi	7	Lokasi	5	Lokasi	71,43%				
							Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	8	Laporan								8	Laporan	1	13%
2	15	02	1	05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi										2	Laporan		
2	**15**	**02**	**1**	**06**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**Jumlah izin andalalin yang di keluarkan**	**30**	**Izin Andalalin**	**0**	**Izin Andalalin**	**20**	**Izin Andalalin**	**20**	**Izin Andalalin**	**100%**	**30,0**	**Izin Andalalin**	**0,00**	**0%**
2	15	02	1	06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Kegiatan Pengawasan Andalalin			0	Kegiatan	20	Kegiatan	20	Kegiatan	100%				
							Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	2	Laporan								2	Laporan	0	0%
2	**15**	**02**	**1**	**07**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji**	**85,0**	**%**	**55**	**%**	**75**	**%**	**75**	**%**	**100%**	**75,0**	**%**	**0,00**	**0%**
2	15	02	1	07	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terakreditasi	8	Unit	4	Unit	2	Unit	2	Unit	100%	8	Unit		
							Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	3	Laporan								9	Laporan	0	0%
2	15	02	1	07	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Terminal yang Memenuhi Standar Kelaikan	120	Pengemudi	60	Pengemudi	7	Terminal	7	Terminal	100%	85,0	Terminal		
							Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	6	Laporan								6,0	Laporan	0,0	0%
2	15	02	1	07	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Pengemudi Angkutan Umum yang Memiliki Kompetensi	320	Badan Usaha	120	Badan Usaha	30	Pengemudi	30	Pengemudi	100%	100	Pengemudi		
							Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	2	Laporan								2	Laporan	0	0%
2	15	02	1	07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan	50	Badan Usaha	40	Badan Usaha	50	Badan Usaha	50	Badan Usaha	100%	50	Badan Usaha		
							Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2	Laporan								3	Laporan	1	50%
2	**15**	**02**	**1**	**08**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Penambahan Jumlah Angkutan Umum dan/atau Barang yang tersedia**	**100**	**Unit**	**0**	**Unit**	**18**	**Unit**	**0**	**Unit**	**0%**	**20**	**Unit**	**0**	**0%**
2	15	02	1	08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit kendaraan yang tersedia													
							Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20	Unit								20	Unit	0	0%

2	15	02	1	08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah laporan yang tersedia												
							Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)	5	Laporan							3	Laporan	0	0%
2	**15**	**02**	**1**	**09**		**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Penetapan Kawasan**	**1**	**Penetapan**	**0**	**Penetapan**	**1**	**Penetapan**	**0**	**Penetapan**	**0%**	**1**	**Penetapan**	**0**	**0%**
2	15	02	1	09	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan	1	Dokumen	1	Dokumen						1	Dokumen		
							Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1	Dokumen							1	Dokumen	0	0%
2	15	02	1	09	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan yang Disosialisasikan	1	Kebijakan	0	Kebijakan	1	Kebijakan	1	Kebijakan	100%	1	Kebijakan		
							Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1	Dokumen							1	Dokumen	0	0%
2	**15**	**02**	**1**	**10**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penetapan Jaringan Trayek**	**0**	**Penetapan**	**0**	**Penetapan**	**1**	**Penetapan**	**0**	**Penetapan**	**0%**	**1**	**Penetapan**	**0**	**0%**
2	15	02	1	10	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Kajian Akademis			0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%				
							Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1	Dokumen							0	Dokumen	0	0%
2	15	02	1	10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Uji Coba			0	Orang	200	Orang	200	Orang	100%				
							Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1	Dokumen							0	Dokumen	0	0%
2	**15**	**02**	**1**	**13**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan**	**120**	**Izin**	**72**	**Izin**	**24**	**Izin**	**25**	**Izin**	**104%**	**24**	**Izin**	**25**	**21%**
2	15	02	1	13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah izin Trayek Angkutan Orang yang Diproses Tepat Waktu	120	Izin	72	Izin	24	Izin	25	Izin	104%	96	Izin		
							Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	24	Unit							75	Unit	25	104%

2	15	02	1	13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah badan usaha angkutan umum yang dibina	120	Badan Usaha	72	Badan Usaha	24	Badan Usaha	25	Badan Usaha	104%	96	Badan Usaha		
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	24	Laporan								3	Laporan	0,0	0%
2	**15**	**02**	**1**	**14**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Izin Angkutan Taksi yang dikeluarkan**	**40**	**Izin**	**30**	**Izin**	**10**	**Izin**	**11**	**Izin**	**110%**	**40**	**Izin**	**25**	**63%**
2	15	02	1	14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Trayek Angkutan Taksi yang Diproses Tepat Waktu	40	Izin	30	Izin	10	Izin	11	Izin	110%	40	Izin		
							Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	10	Unit								75	Unit	25	250%
2	15	02	1	14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Badan Usaha Angkutan Taksi yang Dibina	40	Badan Usaha	30	Badan Usaha	40	Badan Usaha	13	Badan Usaha	33%	40	Badan Usaha		
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	40	Laporan								40	Laporan	10	25%
2	**15**	**02**	**1**	**15**		**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Trayek yang telah ditetapkan besaran Tarif**	**35**	**Trayek**	**35**	**Trayek**	**35**	**Trayek**	**35**	**Trayek**	**100%**	**35**	**Trayek**	**0**	**0%**
2	15	02	1	15	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Analisis yang Tersedia			0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%				
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2	Dokumen								0	Dokumen	0	0%

2	**15**	**03**				**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP**	**88**	**%**	**83**	**%**	**87**	**%**	**85**	**%**	**102%**	**88**	**%**	**85**	**96,59%**
2	**15**	**03**	**1**	**03**		**Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan**	**Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP**	**300**	**Izin**	**190**	**Izin**	**250**	**Izin**	**103**	**Izin**	**41%**	**300**	**Izin**	**11**	**4%**
2	15	02	1	03	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Trayek ASDP yang Diproses Tepat Waktu	300	Izin	190	Izin	250	Izin	103	Izin	41%	250	Izin		
							Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	250	Unit								300	Unit	11	4%
2	15	02	1	03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Badan Usaha/Perorangan ASDP yang Dibina	75	Badan Usaha	50	Badan Usaha	75	Badan Usaha	69	Badan Usaha	92%	75	Badan Usaha		
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	60	Laporan								1	Laporan	0	0%
2	**15**	**03**	**1**	**05**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan**	**1**	**Dokumen**	**0**	**Dokumen**	**1**	**Dokumen**	**1**	**Dokumen**	**100%**	**1**	**Dokumen**	**0**	**0%**
2	15	02	1	05	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Pengembangan Pelayanan Penyeberangan Kariangau	100	Izin	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	100	Dokumen		
							Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1	Dokumen								1	Dokumen	0	0%

2	**15**	**03**	**1**	**06**		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas**	**Jumlah Izin Jasa Pelayaran**	**100**	**Izin**	**50**	**Izin**	**50**	**Izin**	**79**	**Izin**	**158%**	**100**	**Izin**	**25**	**25%**
2	15	02	1	06	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Usaha Jasa Pelayaran yang Diproses Tepat Waktu	100	Izin	50	Izin	50	Izin	79	Izin	158%	100	Izin		
							Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100	Dokumen							100	Dokumen	25	25%
2	15	02	1	06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Badan Usaha Jasa Pelayaran Angkutan Laut yang Dibina	570	Badan Usaha	150	Badan Usaha	150	Badan Usaha	157	Badan Usaha	105%	570	Badan Usaha		
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	50	Laporan							2	Laporan	1	2%

2	**15**	**03**	**1**	**08**		**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Jumlah Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional (Penetapan)**	**1**	**Penetapan**	**0**	**Penetapan**	**0**	**Penetapan**	**0**	**Penetapan**	**0%**	**0**	**Penetapan**	**0**	**0%**
2	15	03	1	08	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional												
							Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1	Dokumen							0	Dokumen	0	0%
2	**15**	**03**	**1**	**09**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Peningkatan Fasilitas/Fasilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional**	**97,5**	**%**	**95**	**%**	**97**	**%**	**97**	**%**	**100%**	**97,5**	**%**	**0**	**0%**
2	15	02	1	09	02	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	DLKr/DLKp Pelabuhan Sangkulirang dan Rencana Induk Pelabuhan Provinsi Kalimantan Timur	2	Pelabuhan	1	Pelabuhan	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen		
							Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1	Unit								1	Unit	0	0%
2	15	02	1	09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi/Dipelihara	1	Pelabuhan	1	Pelabuhan	4	Pelabuhan	0	Pelabuhan	0%	1	Pelabuhan		
							Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1	Unit								0	Unit	0	0%
2	**15**	**03**	**1**	**10**		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Sungai dan Danau**	**93,34**	**%**	**81**	**%**	**81**	**%**	**81**	**%**	**100%**	**93,34**	**%**	**0**	**0%**
2	15	02	1	10	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Direncanakan/Ditingkatkan	1	Pelabuhan	1	Pelabuhan	1	Pelabuhan	1	Pelabuhan	100%	1	Pelabuhan		
							Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	1	Unit								0	Unit	0	0%
2	**15**	**05**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**Prosentase Kabupaten/Kota yang Tersosialisasikan Perencanaan, Peraturan dan Kebijakan Perkeretaapian**	**80**	**%**	**20**	**%**	**50**	**%**	**50**	**%**	**100%**	**80**	**%**	**50**	**63%**
2	**15**	**05**	**1**	**01**		**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	**Jumlah Rencana Induk Perkeretaapian**	**1**	**Dokumen**	**0**	**Dokumen**	**0**	**Dokumen**	**0**	**Dokumen**	**0%**	**1**	**Dokumen**	**0**	**0%**
2	15	05	1	01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	0	0%
2	15	05	1	01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Rencana Induk Perkeretaapian yang di Sosialisasikan			1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%				
							Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	1	Dokumen								1	Dokumen	0	0%

2	**15**	**05**	**1**	**03**		**Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Rencana Lintasan/ Trase Kereta Api**	**1**	**Penetapan**	**0**	**Penetapan**	**1**	**Penetapan**	**0**	**Penetapan**	**0%**	**1**	**Penetapan**	**0**	**0%**
2	15	05	1	03	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0%	0	Dokumen	0	0%
							Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan	0	Dokumen								0	Dokumen	0	0%
2	15	05	1	03	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana yang di Sosialisasikan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	1	Kegiatan	1,0	100%
							Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	0	Dokumen								0	Dokumen	0	0%
2	**15**	**00**				**UPTD Terminal**														
2	**15**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Penyelenggaraan Administrasi Umum**	**60**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**51**	**85%**
2	15	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2290	Unit	100	Unit	60	Unit	60	Unit	100%	100	Unit		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket								8	Paket	0	0%
2	15	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	48	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	48	Bulan		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23	Paket								31	Paket	0	0%
2	15	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	800000	Lembar	400000	Lembar	124000	Lembar	124000	Lembar	100%	600000	Lembar		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket								7	Paket	0	0%
2	15	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	200	Kali	100	Kali	10	Kali	23	Kali	230%	200	Kali		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan								10	Laporan	2	20%
2	**15**	**01**	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah**	**50,0**	**%**	**35,0**	**%**	**40**	**%**	**12,5**	**%**	**31%**	**50**	**%**	**6,83**	**14%**
2	15	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	19	Unit	14	Unit	2	Unit	0	Unit	0%	5	Unit		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15	Unit								5	Unit	0	0%
2	15	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	38	Unit	13	Unit	12	Unit	12	Unit	100%	38	Unit		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39	Unit								150	Unit	41	105%

2	**15**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**60**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**51**	**85%**
2	15	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Administrasikan	20400	Surat	10200	Surat	25	Surat	20	Surat	80%	20400	Surat		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan								12	Laporan	3	25%
2	15	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	60	Bulan		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan								12	Laporan	3	25%
2	15	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	60	Bulan		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan								12	Laporan	3	25%
2	**15**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**30,0**	**%**	**20,0**	**%**	**25,0**	**%**	**25,0**	**%**	**100%**	**30**	**%**	**0,00**	**0%**
2	15	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1	Gedung	1	Gedung	5	Unit	5	Unit	100%	1	Unit		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit								6	Unit	0	0%
2	15	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	1	Gedung	1	Gedung	7	Unit	7	Unit	100%	1	Unit		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	Unit								7	Unit	0	0%
2	**15**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas**	**342**	**Kasus**	**598**	**Kasus**	**427**	**Kasus**	**163**	**Kasus**	**262%**	**342**	**Kasus**	**43**	**13%**
2	**15**	**02**	**1**	**03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**Jumlah Penumpang Terminal yang Terlayani (Orang)**	**750000**	**Penumpang**	**254928**	**Penumpang**	**650000**	**Penumpang**	**377969**	**Penumpang**	**58%**	**750000**	**Penumpang**	**18921**	**3%**
2	15	02	1	03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Dokumen Perencanaan Terminal Tipe B (Dokumen)	4	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	4	Dokumen		
							Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1	Unit								2	Unit	0	0%
2	15	02	1	03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sapras Terminal Tipe B yang Dikembangkan (Terminal)	7	Terminal	1	Terminal	5	Terminal	5	Terminal	100%	7	Terminal		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	1	Unit				Unit		Unit		2	Unit	0	0%

Tabel 2.1.2
Program/Kegiatan, Anggaran dan Capaian Tahun n-1 (2022) Sumber Dana Murni dan Perubahan

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
	DINAS PERHUBUNGAN					
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan	**Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan**	**100%**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**25.383.422.694**	**22.317.564.662**	**87,92**
	Penilaian Hasil Evaluasi Sistem AKIP	**75%**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**782.468.500**	**750.887.448**	**95,96**
	Jumlah Dokumen Perencanaan; Renja (2 Dokumen), SKM (2 Dokumen), Studi Gender Statistik (1 Dokumen)	5 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	370.043.500	369.676.880	99,90
	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran; RKA (1 Dokumen), DPA (1 Dokumen), Laporan Rakornis (1 Dokumen), Laporan Forum PD (1 Dokumen)	4 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	31.534.500	26.652.000	84,52
	Jumlah Dokumen Capaian dan Ikhtisar Kinerja SKPD; Laporan Monev (2 Dokumen), Laporan TEPRA (12 Dokumen), Laporan Angkutan Lebaran (1 Dokumen), Laporan Natal dan Tahun Baru (1 Dokumen)	16 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	211.083.500	206.178.500	97,68
	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (4 Triwulan)	4 Dokumen	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.807.000	148.380.068	95,8
	Tercapainya Laporan Keuangan Tepat Waktu	**100%**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16.044.902.049**	**13.603.062.115**	**84,78**
	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.044.902.049	13.603.062.115	84,78
	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	**38%**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**206.475.000**	**203.127.751**	**98,38**
	Jumlah Pakaian Dinas Harian Dishub beserta Perlengkapannya	145 Stel	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	132.675.000	130.500.000	98,36
	Terpenuhinya Kualifikasi ASN Perhubungan	65 Pegawai	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	73.800.000	72.627.751	98,41
	Penyelenggaraan Administrasi Umum	**12 Bulan**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.853.157.000**	**1.846.701.739**	**99,65**
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	434 Unit	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.997.500	49.870.000	99,74
	Jumlah Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	180 Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180.000.000	179.500.000	99,72
	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	200000 Lembar	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200.077.500	200.064.850	99,99
	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	65 Kali	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.423.082.000	1.417.266.889	99,59
	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	**50%**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**999.639.800**	**910.739.520**	**91,11**
	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	342.000.000	307.400.000	89,88
	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	72 Unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	657.639.800	603.339.520	91,74
	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**12 Bulan**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.216.268.155**	**3.834.147.089**	**90,94**
	Jumlah Surat yang di Administrasikan	5300 Surat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.160.000	10.679.800	81,15
	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	796.816.969	624.939.126	78,43
	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.406.291.186	3.198.528.163	93,9
	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	**95%**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.280.512.190**	**1.168.899.000**	**91,28**
	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan	4 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.280.000	117.594.750	97,77
	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	20 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	263.977.300	253.507.300	96,03
	Jumlah Pemeliharan Peralatan dan Mesin	157 Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	204.350.000	204.241.200	99,95
	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	1 Gedung	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	691.904.890	593.555.750	85,79

Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	**Jumlah Lakalantas**	**427 kasus**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**14.634.422.056**	**13.615.817.387**	**93,04**
	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	70%	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	7.098.494.066	6.756.576.989	95,18
	Panjang Jalan yang dipasang perlengkapan jalan	120 Km	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			
	Terpasangnya LPJU Solar Sell di Jalan Provinsi	61 Buah				
	Terpasangnya Rambu Jalan di Jalan Provinsi	105 Buah				
	Terpasangnya Marka Jalan di Jalan Provinsi **(ABT)**	50008 Meter				
	Terpasangnya Paku Jalan di Jalan Provinsi **(ABT)**	5014 Buah				
	Pengadaan Drone **(ABT)**	1 Set				
	Pengadaan HT **(ABT)**	1 Set				
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipelihara berupa Rambu Jalan/Pagar Pengaman Jalan/Marka Jalan	8030 Meter	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.763.053.000	1.576.855.218	89,44
	Operasional CCTV	2 Bulan				
	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	**5 Perencanaan**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**1.530.650.000**	**1.425.420.538**	**93,13**
	Jumlah Dokumen Rencana	5 Dokumen	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1.530.650.000	1.425.420.538	93,13
	Persentase Kepatuhan Rekomendasi MRLL	**85%**	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**1.632.410.000**	**1.496.567.652**	**91,68**
	Jumlah Rekomendasi MRLL yang dikeluarkan	10 Rekomendasi	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	76.900.000	74.028.545	96,27
	Pelaksanaan Penegakan Hukum di Jalan Provinsi	7 Lokasi	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1.555.510.000	1.422.539.107	91,45
	Jumlah izin andalalin yang di keluarkan	**20 Izin Andalalin**	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**81.750.000**	**78.052.900**	**95,48**
	Jumlah Kegiatan Pengawasan Andalalin	20 Kegiatan	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	81.750.000	78.052.900	95,48
	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	**75%**	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**586.758.000**	**566.229.942**	**96,50**
	Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terakreditasi	2 unit	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	75.805.000	73.695.880	97,22
	Laporan Audit PKB	1 UPPKB				
	Jumlah Terminal yang Memenuhi Standar Kelaikan	7 Terminal	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	79.100.000	79.047.380	99,93
	Jumlah Pengemudi Angkutan Umum yang Memiliki Kompetensi	30 Pengemudi	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	205.036.000	203.453.870	99,23
	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan	1 Kegiatan				
	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Memenuhi Sistem Manjemen Keselamatan	50 Badan Usaha	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	226.817.000	210.032.812	92,6
	Jumlah Forum dan Sosialialisasi Keselamatan LLAJ	2 Kegiatan				
	Jumlah Penetapan Kawasan	**1 Penetapan**	**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**98.332.000**	**89.846.009**	**91,37**
	Jumlah Kebijakan yang di sosialisasikan	1 Kebijakan	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	98.332.000	89.846.009	91,37
	Jumlah Penetapan Jaringan Trayek	**1 Penetapan**	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**817.606.000**	**709.225.440**	**86,74**
	Jumlah Kajian Akademis	1 Dokumen	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	693.330.000	615.939.000	88,84
	Jumlah peserta sosialisasi dan uji coba	200 Orang	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	124.276.000	93.286.440	75,06

Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	**Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan**	**24 Izin**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**545.528.990**	**502.459.131**	**92,10**
	Jumlah izin Trayek Angkutan Orang yang Diproses Tepat Waktu	24 Izin	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	286.502.000	272.939.685	95,27
	- Jumlah Badan Usaha Angkutan Umum yang Dibina	24 Badan Usaha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	259.026.990	229.519.446	88,61
	- Pemilihan Abdiyasa Teladan	1 Kegiatan				
	- Pemilihan Wahana Tata Nugraha	1 Kegiatan				
	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	**10 Surat Izin**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**228.800.000**	**218.668.568**	**95,57**
	Jumlah Izin Trayek Angkutan Taksi yang Diproses Tepat Waktu	10 Surat Izin	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	81.700.000	79.996.947	97,92
	Jumlah Badan Usaha Angkutan Taksi Yang Dibina	40 Badan Usaha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	147.100.000	138.671.621	94,27
	Jumlah Trayek yang telah ditetapkan besaran Tarif	**35 Trayek**	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**251.040.000**	**195.915.000**	**78,04**
	Jumlah dokumen analisis yang tersedia	1 Dokumen	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	251.040.000	195.915.000	78,04
Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman	**Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP**	**87%**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**3.390.803.000**	**3.090.171.936**	**91,13**
	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	**250 Izin**	**Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan**	**625.370.000**	**617.867.024**	**98,8**
	Jumlah Izin Trayek ASDP yang Diproses Tepat Waktu	250 Izin	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	149.917.000	148.421.413	99,00
	- Jumlah Badan Usaha/Perorangan ASDP yang Dibina	75 Badan Usaha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	475.453.000	469.445.611	98,74
	- Jumlah Kapal yang di Rampcheck	50 Unit Kapal				
	- Jumlah Pengadaan Alat Keselamatan (APAR)	51 Buah				
	Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan	**1 Dokumen**	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**722.508.000**	**647.613.070**	**89,63**
	Penyediaan Data dan Informasi Pengembangan Pelayanan Penyebrangan Kariangau	1 Dokumen	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	722.508.000	647.613.070	89,63

Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman	**Jumlah Izin Jasa Pelayaran**	**100 Izin**	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas**	**424.800.000**	**421.839.210**	**99,30**
	Jumlah Izin Usaha Jasa Pelayaran Angkutan Laut yang Diproses Tepat Waktu	50 Izin	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	188.600.000	187.666.390	99,50
	Jumlah Badan Usaha Jasa Pelayaran Angkutan Laut yang Dibina	150 Badan Usaha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	236.200.000	234.172.820	99,14
	Peningkatan Fasilitas/Fasilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional	**97%**	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**1.618.125.000**	**1.402.852.632**	**86,70**
	Jumlah Dokumen Studi Kepelabuhanan	2 Dokumen	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	1.618.125.000	1.402.852.632	86,70
	Persentase Kabupaten/Kota yang Tersosialisasikan Perencanaan Peraturan dan Kebijakan Perkeretaapian	**50%**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**396.237.000**	**381.143.479**	**96,19**
	Jumlah Rencana Lintasan/Trase Kereta Api	**1 Penetapan**	**Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**396.237.000**	**381.143.479**	**96,19**
	Jumlah Rencana Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api	1 Dokumen	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	186.743.000	177.569.196	95,09
	Jumlah Rencana yang di Sosialisasikan	1 Kegiatan	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	209.494.000	203.574.283	97,17
	JUMLAH DINAS PERHUBUNGAN			**43.804.884.750**	**39.404.697.464**	**89,96**

No	Indikator	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
	UPTD TERMINAL					
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan	**Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan**	**100%**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**3.082.135.205**	**2.783.899.127**	**90,32**
	Penyelenggaraan Administrasi Umum	**12 Bulan**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**434.101.707**	**424.801.197**	**97,86**
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 Unit	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	58.385.207	57.485.000	98,46
	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.965.000	26.812.650	99,44
	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	124000 Eks	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	82.303.500	75.083.500	91,23
	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	10 Kali	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	266.448.000	265.420.047	99,61
	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	**40%**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**179.865.000**	**110.525.500**	**61,45**
	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.124.000	0	0
	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	12 Unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.741.000	110.525.500	94,68

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan	**Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12 Bulan**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.236.764.248**	**2.036.760.160**	**91,06**
	Jumlah Surat yang di Administrasikan	25 Surat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.760.000	6.060.200	56,32
	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.507.140	80.345.190	35,47
	Jumlah Jasa Pelayanan Umum (Kebersihan) Kantor	12 Bulan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.999.497.108	1.950.354.770	97,54
	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	**25%**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**231.404.250**	**211.812.270**	**91,53**
	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	5 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.794.250	5.147.270	32,59
	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	7 Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	215.610.000	206.665.000	95,85
Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman	**Jumlah Lakalantas**	**427 kasus**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**4.152.247.706**	**3.585.436.029**	**86,35**
	Jumlah Penumpang Terminal yang Terlayani	**700000 Orang**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**4.152.247.706**	**3.585.436.029**	**86,35**
	Jumlah Penumpang Terminal yang Terlayani	2 Dokumen	Pembangunan Gedung Terminal	900.386.090	798.356.333	88,67
	Jumlah Sarpras Terminal Tipe B yang Dikembangkan	5 Terminal	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	3.251.861.616	2.787.079.696	85,71
	JUMLAH UPTD TERMINAL			**7.234.382.911**	**6.369.335.156**	**88,04**
	JUMLAH DINAS PERHUBUNGAN DAN UPTD TERMINAL			**51.039.267.661**	**45.774.032.620**	**89,68**

Sumber : FMIS Tahun 2022

Mengacu pada DPA SKPD Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Nomor : 2-15.0-00.0-00.01 tanggal 03 Januari 2022, alokasi anggaran total SKPD DPA Murni sebesar Rp. 47.039.267.661,-. Rincian sebagaimana pada tabel 2.1.3.di bawah ini :

Tabel 2.1.3
Proporsi Alokasi Anggaran PD Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2022

No.	Nama Unit dan Jenis Belanja Langsung (BL)	Alokasi Anggaran Tahun 2022	
		DPA Murni	DPPA
1	Dinas Perhubungan	39.804.884.750,-	43.804.884.750,-
2	UPTD Terminal	7.234.382.911,-	7.234.382.911,-
TOTAL		**47.039.267.661,-**	**51.039.267.661,-**

Tabel 2.1.4
Proporsi Alokasi Anggaran DPA Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Menurut Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian Belanja Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25.383.422.694,-
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	14.634.422.056,-

3	Program Pengelolaan Pelayaran	3.390.803.000,-
4	Program Pengelolaan Perkeretaapiaan	396.237.000,-
Total Anggaran		**43.804.884.750,-**

Sumber : DPA PD Dishub Prov. Kalimantan Timur TA.2022

Tabel 2.1.5
Proporsi Alokasi Anggaran DPA Perangkat Daerah
UPTD Terminal Menurut Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian Belanja Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.082.135.205,-
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4.152.247.706,-
Total Anggaran		**7.234.382.911,-**

Sumber : DPA PD Dishub Prov. Kalimantan Timur TA. 2022

Tabel 2.1.6
Perkiraan Capaian Tahun 2023
Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

No	Program/Kegiatan	Lokasi	DPA Tahun 2023	Target Capaian 2023 (%)
I.	**Program Pengelolaan Pelayaran**		**5.733.228.500,-**	
1.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Berau, Kukar, Kubar, Kutim, Paser, Bpp, Bontang, Smd, PPU, Mahulu	129.628.000,-	100
1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Bpn,Smd	307.203.500,-	100
1.3	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Bpn	236.640.400,-	
1.4	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Berau, Kukar, Kutim, Paser,Bpp, Bontang, Smd,PPU	208.495.000,-	100

1.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Aangkutan Laut, Tally Mandiri, Depo Peti Kemas	Berau, Kukar, Kutim, Paser, Bpp, Bontang, Smd,PPU	300.000.000,-	100
1.6	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Berau, Kukar, Kubar, Kutim, Paser,Bpp, Bontang, Smd,PPU, Mahulu	4.551.261.000,-	100
II	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**		**12.328.247.140,-**	
2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Berau, Kukar, Paser,Smd, PPU	4.905.568.100,-	100
2.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kukar	2.123.000.040,-	100
2.3	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Kutim, Paser,Smd	779.072.500,-	100
2.4	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Kukar, Bpp, Bontang, Smd	353.894.800,-	100
2.5	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Berau, Kukar, Kutim, Paser,Bpp, Smd, PPU	1.432.116.000,-	100
2.6	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Bpp,Smd	236.369.100,-	100
2.7	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kukar,Bpp, Smd	324.356.000,-	100
2.8	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Berau, Kukar, Kubar, Kutim, Paser, Bpp, Bontang, Smd, PPU	89.410.000,-	100
2.9	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Berau, Kukar, Kutim, Paser, Bontang, Smd	98.617.000,-	100
2.10	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Berau, Kukar, Kubar, Kutim, Paser, Bpp, Bontang, Smd, PPU	214.500.000,-	100

2.11	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Berau, Kukar, Kubar, Kutim, Paser, Bpp, Bontang, Smd, PPU	213.900.000,-	100
2.12	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kaltim	364.647.000	100
2.13	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Kaltim	108.000.000	100
2.14	Fasilitasi PemenuhanPersyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Smd	282.941.500,-	100
2.15	Koordinasi da Sinkrosnisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Smd, Bpp	483.455.000,-	100
2.16	Fasiiltasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Berau, Kukar, Kubar, Kutim, Paser, Bpp, Bontang, Smd, PPU	147.100.000,-	100
2.17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Kukar, Bpp, Smd	171.300.000,-	100
III	**Program Pengelolaan Perkeretaapiaan**		**396.237.000,-**	
3.1	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Berau, Kukar, Kubar, Kutim, Paser, Bpp, Bontang, Smd, PPU	1.223.560.700,-	100
3.2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Smd	185.868.000,-	100
IV.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**		**32.220.982.927,-**	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Smd	541.456.500,-	100
4.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Smd	177.767.500,-	100
4.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Smd	291.227.000,-	100

4.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Smd	409.947.000,-	100
4.5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Smd	14.564.326.005,-	100
4.6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifkasi Keuangan SKPD (Dinas Perhubungan)	Smd	1.084.224.000,-	100
4.7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	347.312.000,-	100
4.8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Smd	295.920.000,-	100
4.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	49.931.100,-	100
4.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	277.696.134,-	100
4.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Smd	197.969.249,-	100
4.12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	2.189.083.399,-	100
4.13	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	1.115.997.000,-	100
4.14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	2.331.131.000,-	100
4.15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	33.795.000,-	100
4.16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	986.852.800,-	100
4.17	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	3.376.036.040,-	100
4.18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Smd	77.530.000,-	100
4.19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	297.220.000,-	100
4.20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	167.930.000,-	100
4.20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	3.407.631.200,-	100
	TOTAL		51.691.887.267,-	100

Tabel 2.1.7
Perkiraan Capaian Tahun 2023 UPTD Terminal

No	Program/Kegiatan	Lokasi	DPA Tahun 2023	Target Capaian 2023 (%)
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**		**4.445.045.403,-**	
1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	25.307.600,-	100
1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	38.481.383,-	100
1.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Smd	76.167.300,-	100
1.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	653.784.000,-	100
1.5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	125.000.000,-	100

1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	562.357.600,-	100
1.7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	8.668.000,-	100
1.8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	125.648.400,-	100
1.9	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	2.583.729.120,-	100
1.10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	33.612.000,-	100
1.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	212.290.000,-	100
II.	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**		**28.396.547.700,-**	
2.1	Pembangunan Gedung Terminal	Kukar, Kubar	1.405.541.400,-	100
2.2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Berau, Kukar, Kutim, Bontang, Smd	26.991.006.300,-	100
	TOTAL		**32.841.593.103,-**	100

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018 dan 2019 – 2023, sebagaimana di bawah ini :

Tabel 2.1.8
Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun
2013 – 2018

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Renstra				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi	Angka	68,19	68,54	71,16	72	76,63
2	Prosentase penurunan jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan Angkutan Bus Umum	%	-4,17	-9,09	-4,76	8,7	-2
3	Prosentase kesesuaian waktu tempuh rerata per 100 Km Angkutan AKDP pada Kartu Pengawasan (KPS) terhadap kondisi lapangan	%	-	-	98	98	94
4	Prosentase Kab/Kota berpredikat WTN	%	-	-	70	70	100

5	Prosentase peningkatan jumlah SDM yang berkompetensi Teknis	%	-	-	75	20,37	55
6	Prosentase Kelulusan Taruna yang Bersertifikasi Pelaut	%	31,14	46,15	71,43	75	45
7	Prosentase Ketersediaan Terminal tipe B	%	-	-	70	87,5	100
8	Prosentase Ketersediaan Pelabuhan laut	%	-	70	80	100	100
9	Prosentase ketersediaan Bandar Udara	%	-	42,04	75,11	88,34	100
10	Prosentase ketersediaan dermaga sungai dan penyeberangan	%	-	10	75	93,75	100

Sumber : Evaluasi Capaian Renstra 2013 – 2018

Tabel 2.1.9
Capaian Renstra Perangkat Daerah Terhadap RPJMD Tahun 2013 – 2018

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kuantitas Komoditas dan Penumpang	Ton ; Org	324.765.350; 11.650.500	699.580.433; 12.484.231	816.654.067 ; & 14.585.053	339.012.717 ; 10.362.475	325.051.663; 10.392.536
2	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, danau dan penyeberangan	Kecamatan	11	10	6	6	6
3	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi udara	Kecamatan	3	3	1	1	1

Sumber : Evaluasi Capaian Renstra terhadap RPJMD 2013 – 2018

Target Renstra Perangkat Daerah yang telah diselaraskan dengan RPJMD Prov. Kalimantan Timur 2019 – 2023, sebagaimana di bawah ini :

Tabel 2.1.10
Target Renstra Perangkat Daerah 2019 – 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Renstra				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Penumpang yang terlayani	Orang	10.721.656	3.570.750	4.500.000	6.000.000	8.100.000
	Jumlah barang	Ton	341.529.897	294.478.397	307.000.000	337.000.000	370.000.000
3	Prosentase pergerakan sarana transportasi	%	30	32	33	34	35
4	Pertumbuhan Kelaikan sarana prasarana lalu lintas jalan	%	50	60	70	80	85
5	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP	Unit/%	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (83%)	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (84%)	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (85%)	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (87%)	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (88%)
6	Jumlah kecelakaan lalu lintas	Kasus	683	598	512	427	342
7	Jumlah simpul transportasi yang terintegrasi dan terpadu	%	0	0	20	50	80
8	Jumlah penumpang terminal yang terlayani	Penumpang	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000

Sumber : Renstra 2019 – 2023

Tabel 2.1.11
Target Renstra Perangkat Daerah Terhadap RPJMD 2019 – 2023

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja RPJMD				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Penumpang yang terlayani	Orang	10.721.656	3.570.750	4.500.000	6.000.000	8.100.000
	Jumlah barang	Ton	341.529.897	294.478.397	307.000.000	337.000.000	370.000.000
2	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP	Unit/%	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (83%)	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (84%)	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (85%)	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (87%)	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (88%)
3	Jumlah kecelakaan lalu lintas	Kasus	683	598	512	427	342

Sumber :RPJMD Prov. Kaltim 2019 – 2023

Berdasarkan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2019 – 2018 sesuai tabel terhadap jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan dan jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi udara yang tertuang dalam Program Pembukaan Keterisolasian Wilayah Sektor Transportasi Darat, Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Program Pembukaan Keterisolasian Wilayah Sektor Transportasi Udara tidak dapat sepenuhnya tercapai melalui anggaran APBD, mengingat kegiatan pembangunan dermaga sungai dan penyeberangan, Perangkat Daerah hanya mengajukan Study Perencanaan, sedangkan untuk pembangunan fisiknya diajukan melalui anggaran APBN begitu juga terhadap Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi udara dikarenakan berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Dinas Perhubungan Provinsi tidak berwenang lagi dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi udara sehingga pembangunannya diajukan melalui anggaran APBN.

Tabel 2.1.12
Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Renstra	Capaian Kinerja Renstra
			2022	2022
1	2	3	4	5
1	Jumlah Penumpang yang terlayani	Orang	6.000.000	8.513.323
	Jumlah barang	Ton	337.000.000	513.031.229
3	Prosentase pergerakan sarana transportasi	%	34	33,74
4	Pertumbuhan kelaikan sarana prasarana lalu lintas jalan	%	80	98,51
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100	95,75
6	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP	Unit/%	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (87%)	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (85%)
7	Jumlah kecelakaan lalu lintas	Kasus	427	195

8	Persentase Kab/Kota yang Tersosialisasikan Perencanaan, Peraturan dan Kebijakan Perkeretaapian	%	50	50
9	Jumlah penumpang terminal yang terlayani	Penumpang	700.000	377.969

Sumber : Evaluasi Capaian Renstra 2019 – 2023

Tabel 2.1.13
Capaian Renstra Perangkat Daerah Terhadap RPJMD Tahun 2019 – 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Renstra	Capaian Kinerja Renstra
			2022	2022
1	2	3	4	5
1	Jumlah Penumpang yang terlayani	Orang	6.000.000	8.513.323
	Jumlah barang	Ton	337.000.000	513.031.229
2	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP	Unit/%	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (87%)	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (85%)
3	Jumlah kecelakaan lalu lintas	Kasus	427	195

Sumber : Evaluasi Capaian Renstra terhadap RPJMD 2019 – 2023

Tahun 2019 merupakan tahun awal dari RPJMD dan Renstra baru tahun 2019 – 2023, penyesuaian indikator kinerja dilakukan untuk dapat mengakomodir pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pada RPJMD Prov. Kaltim tahun 2019 – 2023 sektor perhubungan, capaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan sebagian besar telah sesuai dengan target yang ditetapkan, capaian kinerja jumlah penumpang terminal yang terlayani tidak dapat sepenuhnya dicapai dikarenakan proses P3D yang masih berlangsung, kondisi prasarana terminal yang masih dalam proses perencanaan untuk rehabilitasi and kondisi sarana angkutan perkotaan yang belum mendukung sehingga memerlukan waktu dan kinerja untuk dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di terminal tipe B. Proses P3D juga masih berlangsung untuk Pelabuhan Laut Pengumpan Regional dan Pelabuhan/Dermaga Sungai Pengumpan yang menjadi kewenangan Provinsi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk pelaporan SPM Bidang Perhubungan sesuai dengan arahan dari Kemendagri bahwa Bidang Perhubungan sudah tidak termasuk dalam urusan dasar hanya urusan wajib, dan dengan terbitnya Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana terdapat pembagian kewenangan pusat dan daerah khusus untuk sektor Perhubungan lebih terfokus kepada Sektor Transportasi Darat, Laut dan SDP sedangkan untuk kewenangan Sektor Transportasi Udara seluruhnya menjadi kewenangan Pusat.

Berdasarkan Renja Tahun Lalu (N-1) / Tahun 2022, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel : 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 Tahun n-2	Tahun 2021 Tahun n-1	Tahun 2022 Tahun n	Tahun 2023 Tahun n+1	Tahun 2024 Tahun n+2	Tahun 2020 Tahun n-2	Tahun 2021 Tahun n-1	Tahun 2022 Tahun n	Tahun 2023 Tahun n+1	Tahun 2024 Tahun n+2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(13)
1	Kuantitas Penumpang (orang)			3.570.750	4.500.000	6.000.000	8.100.000		3.570.750	4.664.922	8.513.323	8.100.000		Pelonggaran aturan PPKM sektor transportasi dapat meningkatkan arus penumpang
2	Kuantitas Komoditas (ton)			294.478.397	307.000.000	337.000.000	370.000.000		294.478.397	323.231.994	513.031.229	370.000.000		Sektor komoditas yang masih bertahan membantu mendukung daya beli masyarakat
3	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan							80						
4	Prosentase pergerakan sarana transportasi (%)			32%	33%	34%	35%		17%	20%	33,74%	35%		Dampak Pandemi COVID-19, Pembatasan pergerakan kendaraan antar kota
5	Rasio Konektivitas Provinsi							0,846						
6	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (%)			60%	70%	80%	85%		68,63%	89,49%	98,51%	92%		Komitmen untuk pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah							76						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan							83						
8	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP (Unit/%)			85%	88%	90%	90,42%		83%	84%	85%	90%		Kewenangan operasional pelabuhan pengumpan regional masih di Pusat dan permasalahan aset dermaga sungai
9	Indeks Kualitas Layanan Pelabuhan Laut dan SDP							72						
10	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas			598 Kasus	512 Kasus	427 Kasus	342 Kasus		448 Kasus	418 Kasus	195 Kasus	300 Kasus		Sinergi yang baik dari semua stake holder perhubungan dan berkurangnya pergerakan kendaraan krn Pandemi COVID-19

11	Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP							82						
12	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan (Poin)							0,006						
13	Persentase Kabupaten/Kota yang Tersosialisasikan Perencanaan, Peraturan dan Kebijakan Perkeretaapian			0%	20%	50%	80%		0%	20%	50%	80%		Sinergi perencanaan perkeretaapian Kalimantan Timur dengan transportasi IKN
14	Presentase Kajian Pelayanan Multimoda (%)							68						
15	Jumlah penumpang terminal yang terlayani			600.000 penumpang	650.000 penumpang	700.000 penumpang	750.000 penumpang		254.928 penumpang	301.083 penumpang	377.969 Penumpang	500.000 penumpang		Dampak Pandemi COVID-19, Pembatasan pergerakan kendaraan antar kota dan sarpras yang kurang reprensentatif

2.2.1 Transportasi Darat

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, yang meliputi kegiatan: Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Pagar Pengaman Jalan.

Tabel 2.2.2
Data Terpasang dan Pagu Anggaran Fasilitas LLAJ

No	Jenis Fasilitas LLJ	Jumlah Terpasang					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rambu Jalan	350 bh	356 bh	130 bh	1.333bh	1.392bh	105 bh
2	Marka Jalan	-	-	-	42.250 m	42.500 m	58.038 m
3	Pagar Pengaman Jalan	-	-	-	1.000 m	1.200 m	-
4	CCTV/LPJU	-	38 unit	-	10 unit	25 unit	62 unit
5	RPPJ	-	-	-	-	50	-
6	Paku Jalan	-	-	-	-	6.173 bh	5.014 bh
7	Alat Timbang Kendaraan Portable	-	-	-	-	3	-
No.	**Pagu Anggaran**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	Rambu Jalan	637.700.000,-	487.581.000,-	195.000.000,-	18.94.203.190,-	1.969.614.000,-	198.201.60,-
2	Marka Jalan	-	-	-	1.272.179.560,-	1.412.853.035,-	2.215.479.000,-
3	Pagar Pengaman Jalan	-	-	-	1.661.699.300,-	1.976.421.000,-	-
4	CCTV/LPJU	-	7.515.978.000,-	-	377.011.000,-	931.288.270,-	2.698.215.906
5	RPPJ	-	-	-	-	677.022.000,-	-
6	Paku Jalan	-	-	-	-	1.661.601.000,-	1.835.258.000,-
7	Alat Timbang Kendaraan Portable	-	-	-	-	746.918.700,-	-
No.	**Realisasi Pagu Anggaran**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	Rambu Jalan	587.307.000,-	487.581.000,-	194.623.000,-	18.94.203.190,-	1.969.614.000,-	196.393.500,-
2	Marka Jalan	-	-	-	1.272.179.560,-	1.412.853.035,-	2.204.583.385,-
3	Pagar Pengaman Jalan	-	-	-	1.661.699.300,-	1.976.421.000,-	-
4	CCTV/LPJU	-	7.512.252.820,-	-	377.011.000,-	931.288.270,-	2.467.548.500,-
5	RPPJ	-	-	-	-	677.022.000,-	
6	Paku Jalan	-	-	-	-	1.661.601.000,-	1.749.303.000,-
7	Alat Timbang Kendaraan Portable	-	-	-	-	746.918.700,-	-
No.	**Prosentase**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	Rambu Jalan	92,10%	100%	99,8%	100%	100%	100%
2	Marka Jalan	-	-	-	100%	100%	100%
3	Pagar Pengaman Jalan	-	-	-	100%	100%	-
4	CCTV/LPJU	-	99,95%	-	100%	100%	100%
5	RPPJ	-	-	-	-	100%	-
6	Paku Jalan	-	-	-	-	100%	100%
7	Alat Timbang Kendaraan Portable	-	-	-	-	100%	-

Terhitung mulai Tahun 2013 s/d Tahun 2015 terdapat juga kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lalu Lintas Jalan, yang merupakan penerapan Penegakan Hukum dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit. Pelaksanaan kegiatan ini mencakup pengawasan, pembinaan, pengendalian dan penertiban lalu lintas angkutan kendaraan batubara dan kelapa sawit menyangkut jam operasi dan kapasitas muat.

Tahun 2016 s/d 2021 anggaran untuk kegiatan Pengawasan dan Pengendalian angkutan khusus batubara dan kelapa sawit, tidak dialokasikan lagi mengingat volume lalulintas kendaraan angkutan batubara di ruas jalan provinsi maupun nasional sudah berkurang akan tetapi seiring dengan kembali meningkatnya angkutan batubara dan kelapa sawit maka pada tahun 2022 Pengendalian angkutan khusus batubara dan kelapa sawit kembali di tegakkan seiring dengan target nasional *Zero Over Dimension Over Loading (ODOL)* pada tahun 2023.

Tabel 2.2.3
Data Realisasi Anggaran Penerapan
Perda No.10 Tahun 2012

No	Uraian	Pagu Anggaran				
		2014	**2015**	**2016 s/d 2021**	**2022**	**2023**
1	2	3	4	5	6	7
1	Pagu Anggaran	4.000.000.000	3.000.000.000	0.00	1.555.510.000	1.432.116.000
2	Realisasi	3.789.575.900	1.204.097.150	0.00	1.422.539.107	-
Prosentase		**94,74%**	**40,14%**	**0**	**91,45%**	

Program peningkatan pelayanan angkutan, meliputi kegiatan yang bersifat pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, pengawasan dan pengendalian serta koordinasi dalam rangka

peningkatan pelayanan kepada masyarakat operator dan pengguna jasa transportasi jalan, telah dilaksanakan sebanyak 6 kegiatan yang berlokasi di Kab/Kota di Kalimantan Timur.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selain melaksanakan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam DPA SKPD, juga terdapat kegiatan yang mengacu kepada tupoksi berupa penerbitan ijin dan sertifikat terkait pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu :

Tabel 2.2.4

Data Realisasi Perijinan dan Sertifikat pada Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

No.	Uraian Perijinan / Sertifikat	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perpanjangan Ijin Operasional						2 bh
2	Perpanjangan Kartu Pengawasan	788 bh	978 bh	83 bh	666 bh	76 bh	750 bh
3	Ijin Insidentil	9 bh	5 bh	2 bh	25 bh	0 bh	1 bh
4	Sertifikat Registrasi Uji Type (SRUT) Produksi Karoseri						

Terhitung mulai tahun 2015 penerbitan ijin dikelola oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Prov. Kalimantan Timur dan untuk Sertifikat Registrasi Uji Type (SRUT) Produksi Karoseri Dinas Perhubungan hanya mengeluarkan pertimbangan teknis.

2.2.2 Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP)

Pada Tahun 2019 Sub Sektor Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) terdapat di dalam program pembangunan prasarana transportasi laut dan SDP dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1. Study FS dan DED Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Keramat dengan pagu anggaran Rp. 500.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 468.984.750,- (93%);

2. Study FS Dermaga Pariwisata Kaltim (Samarinda – Kutai Kertanegara) dengan pagu anggaran Rp. 300.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 265.265.000,- (88%);
3. Studi DED Dermaga Tering Kutai Barat dengan pagu anggaran Rp. 400.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 345.317.500,- (86%);
4. Pembangunan Bollard Dermaga Penyeberangan Kariangau dengan pagu anggaran Rp. 259.946.500,- dan realisasi anggaran Rp. 238.834.400,- (91%);
5. Pembangunan sumur bor dan instalasinya (Pelabuhan Kariangau) dengan anggaran Rp. 400.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 81.802.244,- (20%).

Terkait kegiatan rutin bidang yang bersifat pelayanan kepada masyarakat pemilik usaha angkutan SDP, maka Dinas Perhubungan melalui Bidang Pelayaran pada tahun 2019 telah menerbitkan 36 rekomendasi perijinan yang meliputi :

Tabel 2.2.5
Data Realisasi Perijinan pada Bidang Pelayaran

No.	Uraian Perijinan / Sertifikat	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Sungai dan Danau (BBM) ke Hulu Sungai Mahakam					25 bh	
2	Ijin Fasilitas Penyeberangan Angkutan Khusus BBM/BBG di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau					19 bh	
3	Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau						
4	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Kapal Sungai	69 bh	64 bh	20 bh	456 bh	258 bh	
5	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan					2 bh	
6	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Kapal Penyeberangan Lintas Kab/Kota Dalam Provinsi	20 bh	15 bh	16 bh	19 bh	13 bh	16 bh
7	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Kapal/Speedboat antar Kab/Kota Dalam Provinsi GT<7	23 bh	11 bh		4 bh		
8	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Kapal/Speedboat antar Kab/Kota Dalam Provinsi GT<7				14 bh		

9	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Angkutan Sungai Danau Lintas Kab/Kota Dalam Provinsi >7GT					217 bh	91 bh
10	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Angkutan Penumpang Kapal/Speedboat Dalam Kota/Kab Dalam Provinsi >7GT					9 bh	
11	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Angkutan Penumpang Kapal/Speedboat Dalam Kota/Kab Dalam Provinsi <7GT					1 bh	
10	Pengujian Kapal secara berkala di Perairan Daratan GT 7 s/d 35	22 bh	21 bh				
10	Pengujian Kapal secara berkala di Perairan Daratan GT 35 s/d 50	11 bh	11 bh				
11	Pengujian Kapal secara berkala di Perairan Daratan GT 50 s/d1 50	36 bh	35 bh				
12	Pengujian Kapal secara berkala di Perairan Daratan GT 150 s/d 300	2 bh	2 bh				
Jumlah		**220 bh**	**183 bh**	**36 bh**	**493 bh**	**544 bh**	**107 bh**

Terhitung mulai tahun 2015 penerbitan ijin dikelola oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Prov. Kalimantan Timur.

2.2.3 Transportasi Laut

Program Peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP, melalui :

1. Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy di Kab. Kutai Timur Tahun 2014, yakni : pembangunan fasilitas sisi darat berupa pembangunan jalan lingkungan Rigid Pavement;
2. K.350 & Pek. Tanah sepanjang 3 Km dan Lanjutan Study Amdal Pelabuhan Laut Maloy. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.14.396.918.050,- (95,44%) terdapat penghematan anggaran dari sisa lelang sebesar Rp.4.677.228.887,50 (4,66%);
3. Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy di Kab. Kutai Timur Tahun 2015, yakni : pembangunan jalan pendekat (causeway), pembanguan Helipad dan pematangan lahan. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.18.406.195.292,- (76,05%) dari pagu

anggaran sebesar Rp.24.201.546.310,- terdapat penghematan anggaran dari sisa lelang sebesar Rp. 5.795.351.018 (23,95%);

4. Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy di Kab. Kutai Timur Tahun 2015, yakni : pembangunan jalan pendekat (causeway), pembangunan helipad dan pematangan lahan. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.18.406.195.292,- (76,05%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 24.201.546.310,- terdapat penghematan anggaran dari sisa lelang sebesar Rp.5.795.351.018 (23,95%);
5. Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy di Kab. Kutai Timur Tahun 2016, yakni : pembangunan terminal cargo dan studi tapak sisi darat Pelabuhan Laut Maloy, Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.130.445.000,- (100%);
6. Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy di Kab. Kutai Timur Tahun 2017, yakni : pembangunan jalan akses ke trestle dengan konstruksi rigid 1.020 m (causeway). Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.10.419.482.250,- (86,60%) dari pagu anggaran sebesar Rp.12.031.450.000,- terdapat penghematan anggaran dari sisa lelang sebesar Rp. 1.611.967.750 (13,40%); dan pembayaran Sewa Lahan Somber sesuai Putusan MA nomor 3091 K/Pdt/2012 sebesar Rp. 6.047.484.236,80;
7. Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy di Kab. Kutai Timur Tahun 2018, yakni : pembangunan abutment yang menghubungkan Trestle dengan Causeway. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 979.503.000,- (95,89%) dari pagu anggaran terdapat penghematan anggaran dari sisa lelang sebesar Rp. 40.302.518 (0,04%);

8. Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Laut di Kab. Kutai Timur Tahun 2021, yakni : pembangunan jalan yang menghubungkan causeway dengan jalan utama. Realisasi fisik 39.13 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.606.669.850,- (30.61%) dari pagu anggaran sebesar, penyedia dinyatakan wan prestasi karena tidak dapat menyelesaikan keseluruhan pekerjaan.

2.2.4 Transportasi Udara

Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 kewenangan Bidang Transportasi Udara telah beralih ke Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur selalu berkoordinasi dengan Kementrian Perhubungan dan Stake Holder terkait untuk meningkatkan pelayanan di bidang transportasi Udara.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kebijakan Nasional terkait dengan pembangunan Kalimantan Timur sesuai dengan RPJMN yang diterjemahkan dalam RPJMD, kemudian dituangkan dalam pelaksanaannya berupa RKPD, khusus sektor perhubungan diprioritaskan pada pengembangan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi didalam kawasan strategis provinsi yaitu berupa penyelesaian program – program yang sudah digariskan dalam program Pengembangan Kawasan Ekonomi/Industri Khusus dan pusat pertumbuhan ekonomi sebagai penggerak ekonomi daerah.

Program Nasional yang sudah diselaraskan dalam pengembangan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi, khususnya regional Kalimantan Timur untuk sektor perhubungan adalah Pengembangan Kawasan Penunjang untuk mensuplai pertumbuhan Kawasan Industri Kariangau dan penyelesaian Kawasan Pelabuhan Internasional KIPI Maloy dan integrasi perencanaan transportasi IKN.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Dalam rangka mewujudkan Kebijakan Nasional maupun Kebijakan Propinsi, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di bawah ini :

Tabel 2.3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran
1	Memenuhi kebutuhan infrastruktur perhubungan yang handal	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan berdasarkan skala prioritas
2	Mewujudkan zero accident dalam berlalu lintas	Menurunnya angka kecelakaan berlalu lintas dan turunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas
3	Mewujudkan pelayanan jasa transportasi yang aman, selamat, nyaman, tertib dan terkendali	Terselenggaranya pelayanan jasa angkutan yang aman, selamat, tertib dan terkendali
4	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan	Terpenuhinya kebutuhan perencanaan prasarana dan fasilitas perhubungan secara terintegrasi
5	Mewujudkan profesionalisme aparatur sesuai kebutuhan	Terlaksananya peningkatan SDM melalui Diklat Teknis

6	Mewujudkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan akuntabel	Terciptanya sistem pelaporan kinerja SKPD perhubungan yang akuntabel
7	Mewujudkan penyelenggaraan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perkantoran yang didukung peralatan, perlengkapan operasional serta SDM yang berkualitas

Dari rumusan dan sasaran Perangkat Daerah diatas dituangkan dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Dinas Perhubungan sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas perhubungan yang berkualitas dan berkeselamatan ke pusat-pusat perekonomian di wilayah Kalimantan Timur
2	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah

Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur, pada tahun rencana, senantiasa berusaha untuk mewujudkan pelayan prima kepada masyarakat melalui pemenuhan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ditunjang oleh 1 program strategis yakni Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan program – program lain yang tentunya mendukung 1 program strategis tersebut.

Pelaksanaan pembangunan tersebut tanpa mengabaikan ketentuan ataupun peraturan – peraturan yang mengikat lainnya, sehingga mampu melaksanakan kegiatan yang tertib administrasi

sesuai kewenangan guna mempertahankan predikat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Namun demikian ada beberapa isu – isu penting untuk segera dicapai penyelesaiannya, yaitu terbitnya **Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah**, guna terhindarnya pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tumpang tindih terkait kewenangan dan pengalihan kewenangan.

Rekomendasi dalam penanganan permasalahan dimaksud adalah adanya kemauan dan komitmen para pemangku kepentingan dalam level pengambil keputusan untuk duduk bersama dalam penyelesaian masalah khususya dalam hal serah terima asset dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat pada asset hasil pembangunan bandara dan serah terima kewenangan pelabuhan pengumpan regional dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi, selain dari kegiatan yang bersifat rutin seperti : Musrenbang Regional, Musrenbang Nasional dan Musrenbang Provinsi serta Musrenbang Kab/Kota.

Program dan kegiatan provinsi pada tahun rencana (2023) senantiasa mengacu kepada program dan kegiatan pusat yang tertuang dalam RPJM Nasional, sehingga tercipta keselarasan dan keharmonisan, sementara pembangunan yang dianggap menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang selama ini terjadi, akan diarahkan sesuai kewenangan masing – masing melalui perencanaan yang sinergis antara pemerintah Kab/Kota, Provinsi dan Pusat yang difasilitasi dengan Rakortek dan Musrenbang dan untuk program dan kegiatan rutin Pemerintah Pusat yang perlu dukungan Pemerintah Daerah, maka program dan kegiatan tersebut diselaraskan pembiayaan dan pelaksanaannya sesuai kebutuhan dan jadwal yang telah ditentukan.

2.4 Review Terhadap RKPD

Review terhadap RKPD terhadap analisis kebutuhan Perangkat Daerah dilakukan dengan membandingkan kebutuhan anggaran setiap

kegiatan dan program untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada Renstra PD.

Analisis tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan di Perangkat Daerah yaitu pada kegiatan dan program strategis dan manajerial (operasional rutin) agar terjadi keseimbangan dalam pengaanggarannya dengan tetap mempertimbangkan target program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan.

Dari analisis tersebut terdapat perubahan pagu anggaran dari RKPD sebesar Rp. 83.552.930.370,- menjadi Rp. 89.958.184.370,- atau bertambah Rp. 5.424.704.000,- dengan rincian penambahan di Bidang LLAJ sebesar Rp. 5.256.904.000,- dan Sekretariat sebesar Rp. 167.800.000,-. Dengan adanya penambahan tersebut diperlukan penyesuaian anggaran dari setiap sub kegiatan tersebut agar perencanaan anggarannya sesuai dengan ketentuan dan dapat berjalan baik pada tahun 2023.

Hasil review terhadap RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan perubahan untuk pelaksanaan tahun 2023, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel : 2.4.1
Review Terhadap RKPD Tahun 2023
Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

No.	RKPD					No.	Analisis Hasil Kebutuhan					Catatan Penting
	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif		Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan**		**100%**	**Rp 31.502.305.349**	**I**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan**		**100%**	**Rp 32.388.782.927**	
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**		**75,50%**	**Rp 2.162.653.500**	**1.1**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**		**75,50%**	**Rp 1.420.398.000**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	6 Dokumen	Rp 872.150.000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	4 Dokumen	Rp 541.456.500	Penyesuaian kesesuaian belanja dan kebutuhan anggaran
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	3 Dokumen	Rp 277.395.000	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	4 Dokumen	Rp 177.767.500	Penyesuaian kesesuaian belanja dan kebutuhan anggaran
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	16 Laporan	Rp 709.822.000	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	5 Laporan	Rp 291.227.000	Penyesuaian kesesuaian belanja dan kebutuhan anggaran
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda, Balikpapan	5 Laporan	Rp 303.286.500	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda, Balikpapan	20 Laporan	Rp 409.947.000	Penyesuaian kesesuaian belanja dan kebutuhan anggaran
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu**		**100%**	**Rp 15.265.426.005**	**1.2**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu**		**100%**	**Rp 15.336.525.160**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	84 Orang/Bulan	Rp 14.564.326.005	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	86 Orang/Bulan	Rp 14.184.501.160	Penyesuaian kebutuhan anggaran
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	12 Dokumen	Rp 701.100.000	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	12 Dokumen	Rp 1.152.024.000	Penyesuaian kesesuaian belanja dan kebutuhan anggaran
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi**		**40%**	**Rp 453.863.000**	**1.3**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi**		**60%**	**Rp 643.232.000**	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Samarinda	1 Paket	Rp 152.100.000	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Samarinda	4 Paket	Rp 347.312.000	Penyesuaian kebutuhan anggaran
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Samarinda	65 Orang	Rp 301.763.000	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Samarinda	24 Orang	Rp 295.920.000	Penyesuaian kebutuhan anggaran

1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Penyelenggaraan Administrasi Umum**		**12 Bulan**	**Rp**	**2.047.341.300**	**1.4**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Penyelenggaraan Administrasi Umum**		**12 Bulan**	**Rp**	**3.094.504.727**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	16 Paket	Rp	49.998.000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	10 Paket	Rp	49.931.100	Penyesuaian kebutuhan anggaran
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	175 Paket	Rp	175.000.000	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	81 Paket	Rp	277.696.134	Penyesuaian kebutuhan anggaran
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	6 Paket	Rp	199.275.300	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	10 Paket	Rp	197.969.249	Penyesuaian kebutuhan anggaran
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Paser, Balikpapan, Bontang, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu	12 Laporan	Rp	1.623.068.000	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Paser, Balikpapan, Bontang, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu	12 Laporan	Rp	2.568.908.244	Penyesuaian kebutuhan anggaran
1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah**		**60%**	**Rp**	**3.555.165.500**	**1.5**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah**		**60%**	**Rp**	**3.447.128.000**	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Samarinda	9 Unit	Rp	1.448.312.000	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Samarinda	4 Unit	Rp	1.115.997.000	Penyesuaian kebutuhan anggaran
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Samarinda	255 Unit	Rp	2.106.853.500	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Samarinda	260 Unit	Rp	2.331.131.000	Penyesuaian kebutuhan anggaran
1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah**		**12 Bulan**	**Rp**	**3.812.587.789**	**1.6**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah**		**12 Bulan**	**Rp**	**4.396.683.840**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	12 Laporan	Rp	25.460.000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	12 Laporan	Rp	33.795.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	Rp	987.457.369	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	4 Laporan	Rp	986.852.800	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	Rp	2.799.670.420	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	Rp	3.376.036.040	Penyesuaian kesesuaian belanja dan kebutuhan anggaran

1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**		**100%**	**Rp**	**4.205.268.255**	**1.7**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**		**100%**	**Rp**	**4.050.311.200**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Samarinda	2 Unit	Rp	120.354.900	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Samarinda	2 Unit	Rp	77.530.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Samarinda	19 Unit	Rp	294.940.450	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Samarinda	18 Unit	Rp	297.220.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Samarinda	639 Unit	Rp	234.080.000	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Samarinda	639 Unit	Rp	167.930.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	1 Unit	Rp	3.555.892.905	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	1 Unit	Rp	3.507.631.200	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas**		**342 Kasus**	**Rp**	**11.500.299.783**	**II**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas**		**342 Kasus**	**Rp**	**17.585.151.140**	
2.1	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan**		**80%**	**Rp**	**5.443.061.853**	**2.1**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan**		**82%**	**Rp**	**12.285.472.240**	
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Samarinda, Kukar, Kutim,PPU	525 Unit	Rp	3.347.089.453	1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Samarinda, Kukar, Kutim,PPU	8338 Unit	Rp	10.162.472.100	Anggaran Belanja Tambahan
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Samarinda, Kukar, PPU	40 Unit	Rp	2.095.972.400	2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Samarinda, Kukar, PPU	40 Unit	Rp	2.123.000.140	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
2.2	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal**		**4 Perencanaan**	**Rp**	**746.800.000**	**2.2**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal**		**1 Perencanaan**	**Rp**	**779.072.500**	
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	PPU	1 Dokumen	Rp	746.800.000	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	PPU	1 Dokumen	Rp	779.072.500	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
2.3	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**Persentase Kepatuhan Rekomendasi MRLL**		**100%**	**Rp**	**2.074.997.680**	**2.3**	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**Menurunnya Pelanggaran LLAJ dan Over Dimensi dan Over Loading**		**75%**	**Rp**	**2.022.379.900**	
1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan JalanProvinsi	Paser, Bontang, PPU, Berau, Kukar	10 Laporan	Rp	114.150.000	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan JalanProvinsi	Paser, Bontang, PPU, Berau, Kukar	12 Laporan	Rp	353.894.800	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
2	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakanuntuk Jalan Provinsi	Berau, Kukar, PPU, Kutim, Samarinda, Balikpapan, Paser	8 Laporan	Rp	1.703.438.680	2	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakanuntuk Jalan Provinsi	Berau, Kukar, PPU, Kutim, Samarinda, Balikpapan, Paser	8 Laporan	Rp	1.432.116.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Balikpapan, Samarinda	2 Laporan	Rp	257.409.000	3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Balikpapan, Samarinda	2 Laporan	Rp	236.369.100	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran

2.4	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**Jumlah Izin Andalalin yang di Keluarkan**		**30 Izin Andalalin**	**Rp**	**384.356.000**	**2.4**	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**Jumlah Izin Andalalin yang di Keluarkan**		**30 Izin Andalalin**	**Rp**	**324.356.000**	
1	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Samarinda, Kukar, Kutim, PPU, Paser, Balikpapan dan Berau	2 Laporan	Rp	384.356.000	1	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Samarinda, Kukar, Kutim, PPU, Paser, Balikpapan dan Berau	2 Laporan	Rp	324.356.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
2.5	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji**		**85%**	**Rp**	**640.027.000**	**2.5**	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji**		**85%**	**Rp**	**616.427.000**	
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji BerkalaKendaraan Bermotor	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kukar, Kutim, Kubar, Paser, Berau, PPU	9 Laporan	Rp	90.410.000	1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji BerkalaKendaraan Bermotor	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kukar, Kutim, Kubar, Paser, Berau, PPU	9 Laporan	Rp	89.410.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Samarinda, Bontang, Kukar, Kutim, Paser, Berau	6 Laporan	Rp	99.617.000	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Samarinda, Bontang, Kukar, Kutim, Paser, Berau	6 Laporan	Rp	98.617.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan PersyaratanPenyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Samarinda	2 Laporan	Rp	220.000.000	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan PenyelenggaraanKompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan PersyaratanPenyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Samarinda	2 Laporan	Rp	214.500.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	7 Terminal dan Samarinda	3 Laporan	Rp	230.000.000	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	7 Terminal dan Samarinda	3 Laporan	Rp	213.900.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
2.6	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Penambahan Jumlah Angkutan Umum dan/atau Barang yang Tersedia**		**20 Unit**	**Rp**	**529.850.000**	**2.6**	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Penambahan Jumlah Angkutan Umum dan/atau Barang yang Tersedia**		**20 Unit**	**Rp**	**472.647.000**	
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Paser, Balikpapan, Bontang, Penajam Paser Utara	20 Unit	Rp	400.850.000	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Paser, Balikpapan, Bontang, Penajam Paser Utara	20 Unit	Rp	364.647.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran

2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Paser, Balikpapan, Bontang, Penajam Paser Utara, Mahulu	3 Laporan	Rp	129.000.000	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Berau, Kutai Kartanegara , Kutai Barat, Kutai Timur, Paser, Balikpapan, Bontang, Penajam Paser Utara, Mahulu	3 Laporan	Rp	108.000.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
2.7	**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Penetapan Kawasan**		**1 Penetapan**	**Rp**	**149.999.600**	**2.7**	**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Penetapan Kawasan**		**0 Penetapan**	**Rp**	**-**	
1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Samarinda	1 Dokumen	Rp	149.999.600	1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Samarinda	0 Dokumen	Rp	-	Diarahkan pada belanja yang lebih prioritas
2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Balikpapan	1 Dokumen	Rp	-	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Balikpapan	0 Dokumen	Rp	-	Diarahkan pada belanja yang lebih prioritas
2.8	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan**		**75 Izin**	**Rp**	**892.670.900**	**2.8**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan**		**75 Izin**	**Rp**	**766.396.500**	
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	10 (sepuluh) Kab/Kota se Kaltim	75 Unit	Rp	299.890.000	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	10 (sepuluh) Kab/Kota se Kaltim	75 Unit	Rp	282.941.500	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Samarinda	3 Laporan	Rp	592.780.900	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Samarinda	3 Laporan	Rp	483.455.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran

2.9	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan**		**75 Izin**	**Rp**	**389.600.000**	**2.9**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan**		**75 Izin**	**Rp**	**318.400.000**	
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ElektronikPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	10 (sepuluh) Kab/Kota se Kaltim	75 Unit	Rp	151.300.000	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ElektronikPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	10 (sepuluh) Kab/Kota se Kaltim	75 Unit	Rp	147.100.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	10 (sepuluh) Kab/Kota se Kaltim	40 Laporan	Rp	238.300.000	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	10 (sepuluh) Kab/Kota se Kaltim	40 Laporan	Rp	171.300.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
3.0	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Trayek yang telah ditetapkan besaran Tarif**		**35 Trayek**	**Rp**	**248.936.750**	**3.0**	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Trayek yang telah ditetapkan besaran Tarif**		**0 Trayek**	**Rp**	**-**	
1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur	2 Dokumen	Rp	248.936.750	1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur	0 Dokumen	Rp	-	Diarahkan pada belanja yang lebih prioritas
III	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP**		**88%**	**Rp**	**5.707.600.452**	**III**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP**		**88%**	**Rp**	**5.733.228.500**	
3.1	**Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan**	**Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP**		**300 Izin**	**Rp**	**443.200.000**	**3.1**	**Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan**	**Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP**		**300 Izin**	**Rp**	**436.831.500**	
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	10 (sepuluh) Kab/Kota se Kaltim	300 Unit	Rp	131.000.000	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	10 (sepuluh) Kab/Kota se Kaltim	300 Unit	Rp	129.628.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran

2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Balikpapan dan Samarinda	1Laporan	Rp	312.200.000	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Balikpapan dan Samarinda	1 Laporan	Rp	307.203.500	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
3.2	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan**		**1 Dokumen**	**Rp**	**200.000.000**	**3.2**	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan**		**1 Dokumen**	**Rp**	**236.640.400**	
1	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Balikpapan	1 Dokumen	Rp	200.000.000	1	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Balikpapan	1 Dokumen	Rp	236.640.400	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
3.3	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas**	**Jumlah Izin Jasa Pelayaran**		**100 Izin**	**Rp**	**512.400.000**	**3.3**	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas**	**Jumlah Izin Jasa Pelayaran**		**100 Izin**	**Rp**	**508.495.000**	
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 (sepuluh) Kab/Kota se Kaltim	100 Dokumen	Rp	212.400.000	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 (sepuluh) Kab/Kota se Kaltim	100 Dokumen	Rp	208.495.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran

2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kukar, Kutim, Paser, PPU, Berau	2 Laporan	Rp	300.000.000	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kukar, Kutim, Paser, PPU, Berau	2 Laporan	Rp	300.000.000	
3.4	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Peningkatan Fasilitas/Fasilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional**		**97,5%**	**Rp**	**4.552.000.452**	**3.4**	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Peningkatan Fasilitas/Fasilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional**		**97,5%**	**Rp**	**4.551.261.600**	
1	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Kutai Timur	1 Unit	Rp	4.552.000.452	1	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Kutai Timur	1 Unit	Rp	4.551.261.600	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**Prosentase Kabupaten/Kota yang Tersosialisasikan Perencanaan, Peraturan dan Kebijakan Perkeretaapian**		**80%**	**Rp**	**1.446.316.436**	**IV**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**Prosentase Kabupaten/Kota yang Tersosialisasikan Perencanaan, Peraturan dan Kebijakan Perkeretaapian**		**80%**	**Rp**	**1.409.428.700**	
4.1	**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	**Jumlah Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	**Kaltim**	**1 Penetapan**	**Rp**	**1.446.316.436**	**4.1**	**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	**Jumlah Rencana Induk Perkeretaapian**	**Kaltim**	**1 Dokumen**	**Rp**	**1.409.428.700**	
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, Mahulu	1 Dokumen	Rp	1.250.000.000	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, Mahulu	1 Dokumen	Rp	1.223.560.700	
2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Balikpapan	1 Dokumen	Rp	196.316.436	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Balikpapan	1 Dokumen	Rp	185.868.000	
JUMLAH					**Rp**	**50.156.522.020**		**JUMLAH**				**Rp**	**57.116.591.267**	

No.	RKPD					No.	Analisis Hasil Kebutuhan					Catatan Penting
	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif		Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)**		**100%**	**Rp 4.089.951.564**	**I**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan**		**100%**	**Rp 4.445.045.403**	
1.1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Penyelenggaraan Administrasi Umum**		**12 Bulan**	**Rp 693.241.600**	**1.1**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Penyelenggaraan Administrasi Umum**		**12 Bulan**	**Rp 793.740.283**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	5 Paket	Rp 24.176.600	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	8 Paket	Rp 25.307.600	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	27 Paket	Rp 35.366.000	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	31 Paket	Rp 38.481.383	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	7 Paket	Rp 82.299.000	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	7 Paket	Rp 76.167.300	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Paser	10 Laporan	Rp 551.400.000	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Paser	12 Laporan	Rp 653.784.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
1.2	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah**		**30%**	**Rp 726.351.200**	**1.2**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah**		**50%**	**Rp 687.357.600**	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Samarinda	5 Unit	Rp 157.810.000	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Samarinda	5 Unit	Rp 125.000.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Samarinda	165 Unit	Rp 568.541.200	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Samarinda	150 Unit	Rp 562.357.600	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
1.3	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah**		**12 Bulan**	**Rp 2.494.515.764**	**1.3**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**12 Bulan**	**Rp 2.718.045.520**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	12 Laporan	Rp 16.000.000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	12 Laporan	Rp 8.668.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran

2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda, Bontang, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser,	12 Laporan	Rp 110.942.500	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda, Bontang, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser,	12 Laporan	Rp 125.648.400	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	Rp 2.367.573.264	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	Rp 2.583.729.120	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
1.4	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**		**100%**	**Rp 175.843.000**	**1.4**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**		**30%**	**Rp 245.902.000**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Samarinda	6 Unit	Rp 24.593.000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Samarinda	6 Unit	Rp 33.612.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda, Bontang, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser	7 Unit	Rp 151.250.000	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda, Bontang, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser	7 Unit	Rp 212.290.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas**		**342 Kasus**	**Rp 18.293.073.552**	**II**	**Program Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B**	**Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas**		**342 Kasus**	**Rp 28.396.547.700**	
2.1	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**Jumlah Penumpang yang Terlayani**		**750.000 Penumpang**	**Rp 18.293.073.552**	**2.1**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**Jumlah Penumpang yang Terlayani**		**750.000 Penumpang**	**Rp 28.396.547.700**	
1	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun		1 Unit	Rp 1.406.041.807	1	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun		2 Unit	Rp 1.405.541.400	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan		1 Unit	Rp 16.887.031.745	2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan		2 Unit	Rp 26.991.006.300	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
JUMLAH					**Rp 22.383.025.116**		**JUMLAH**				**Rp 32.841.593.103**	
TOTAL					**Rp 72.539.547.136**		**TOTAL**				**Rp 89.958.184.370**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang bersumber dari masyarakat, diperoleh pada saat sosialisasi internal perhubungan maupun masukan – masukan dari pemangku kepentingan yang lain. Usulan Program/Kegiatan Dinas Perhubungan bersumber dari :

a. Hasil evaluasi pelayanan dilapangan;
b. Masukan tertulis dari LSM dan Perguruan Tinggi yang direalisasikan dalam kegiatan study maupun penyediaan jasa;
c. Masukan dari institusi eksternal, berupa permintaan penyediaan fasilitas perhubungan guna mendukung sektor lain yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pembukaan keterisolasian wilayah;
d. Permintaan para operator baik angkutan darat, laut, udara dan ASDP terhadap optimalisasi upaya penciptaan zero accident;
e. Upaya keterbukaan publik dalam bentuk pendistribusian informasi melalui media masa, elektronik dan penyuluhan;
f. Hasil evaluasi dari pihak pemeriksa internal (Inspektorat, Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Administrasi Pembangunan, dll) terhadap pemenuhan fasilitas insfrastruktur perhubungan;
g. Penyebaran pamflet, leaflet dan kuesioner terhadap pelayanan sarana transportasi;
h. Evaluasi internal Perangkat Daerah terhadap hal-hal yang kurang dan harus segera dipenuhi terhadap upaya peningkatan pelayanan jasa perhubungan;
i. Hasil monitoring bersama dengan pihak operator, pengguna dan instansi (pemerintah daerah Prov/Kota/Kab) dan Pemerintah Pusat, dalam upaya pendistribusian pasokan logistik;
j. Masukan dalan kegiatan Forum Perangkat Daerah, Rakortek dan Musrenbang Daerah Prov. Kaltim.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur, tetap berdasarkan pada

program dan kegiatan yang berkelanjutan dari Rencana Anggaran yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Dishub. Prov. Kaltim Tahun 2019 – 2023, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025, dan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019 – 2023. Daftar usulan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 2.5.1

Usulan Pogram dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Kota Samarinda	Pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Spesifikasi : Tiang Octagonal		Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Jalan MT.Haryono, Provinsi Kalimantan Timur
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Kota Samarinda	Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka/Mata Kucing Solar		Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Jalan MT.Haryono, Provinsi Kalimantan Timur
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Kota Samarinda	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas		Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Jalan MT.Haryono, Provinsi Kalimantan Timur
4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Kota Samarinda	Rehabilitasi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)		Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Jalan MT.Haryono, Provinsi Kalimantan Timur
5	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Kota Samarinda	Rehabilitasi Area Traffic Control System (ATCS)		Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Jalan MT.Haryono, Provinsi Kalimantan Timur
6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Kota Samarinda	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) (LPJU Listrik) Ruas Jalan Provinsi		Jl. Ring Road I
7	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Kota Samarinda	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)		Jalan Ampera Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran, Provinsi Kalimantan Timur
8	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Kota Samarinda	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)		Jalan Ring Road II (JL. Nusyirwan Ismail) Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Provinsi Kalimantan Timur
9	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Kab. Kutim	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Ruas Jalan Provinsi Jl. Ampera		Jalan Ampera Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran, Provinsi Kalimantan Timur
10	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Kab. Kutim	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Ruas Jalan Provinsi Jl. Ampera		Jalan Ring Road I Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang, Provinsi Kalimantan Timur

11	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Samarinda	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Ruas Jalan Provinsi Jl. Ring Road II (Jl. Nusyirwan Ismail)		Jalan Ring Road II (JL. Nusyirwan Ismail) Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Provinsi Kalimantan Timur
12	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Balikpapan	Resiko kecelakaan tinggi di sekitar kawasan sekolah		1. Depan SDN 002 Balsel 2. Akses SDN 005 Baltim 3. Akses SMPN 08 Baltim 4. Akses SDN 15 Baltim 5. Akses SMAN 07 Baltim 6. Depan TK Kartika V-6 7. Depan SDN 002 Baltim 8. Depan SDN 003 Baltim 9. Depan SDN 020 Balbar, Provinsi Kalimantan Timur
12	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Balikpapan	Minimnya penerangan jalan di ruas- ruas jalan provinsi		Jl Mularman dan Jl Km 5,5-Kariangau, Provinsi Kalimantan Timur
12	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Berau	Belum tersedianya perlengkapan jalan (rambu, pagar pengaman, marka, paku marka dan lampu penerangan) yang memadai		Jalan Poros Tanjung Redeb - Talisayan - Simpang Lenggo, Provinsi Kalimantan Timur
13	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Samarinda	Minimnya Marka Jalan		Jalan Ring Road III (JL. HM Ardan) , Provinsi Kalimantan Timur
14	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Samarinda	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) (LPJU Listrik) Ruas Jalan Provinsi Jalan Ring Road III (JL. HM Ardan)		Jalan Ring Road III (JL. HM Ardan), Kel Air Hitam, Provinsi Kalimantan Timur
15	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Samarinda	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Ruas Jalan Provinsi Jl. Ring Road III (JL. HM Ardan)		Jl. Ring Road III (JL. HM Ardan), Provinsi Kalimantan Timur

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024, prioritas pembangunan dan penyelenggaraan transportasi meliputi :

1. Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi;
2. Perkuatan Jalur Logistik Utama;
3. Dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata, dan;
4. Pengembangan Transportasi Perkotaan.

Arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi nasional antara lain :

1. Membuka Aksesibilitas untuk Mencapai Pemerataan Ekonomi untuk Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi;
2. Merajut Konektivitas Antar Wilayah sebagai upaya Perkuatan Jalur Logistik Utama;
3. Dukungan Aksesibilitas dalam Pengembangan Kawasan Industri, Pariwisata dan KEK Luar Jawa sebagai wujud Dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata; dan
4. Peningkatan Kualitas Mobilitas Perkotaan guna mewujudkan Pengembangan Transportasi Perkotaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam upaya penyelarasan target capaian, tujuan dan sasaran Perubahan Rancangan Akhir Renja Tahun 2023 harus selaras dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya Perangkat Daerah dalam mengoptimalkan rencana

target dan capaian RPJMD. Dalam rangka capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur, maka dengan tupoksi utama untuk melayani masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan transportasi, baik berupa perijinan trayek, perluasan jaringan trayek, pemenuhan kondisi sarana dan prasarana yang laik, selamat, aman, nyaman dan tertib, juga perlu pemenuhan dalam pembangunan fasilitas pendukung keselamatan serta infrastruktur transportasi yang memadai.

Salah satu arah pembangunan nasional adalah pemerataan pembangunan antar wilayah adalah menurunnya tingkat kesenjangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah kab/kota tertinggal, meningkatnya peran wilayah luar pulau jawa dalam pembentukan PDRB serta lebih meningkat dan merata dalam implementasi pelayanan dasar diberbagai wilayah Indonesia.

Implementasi perwujudan dan percepatan capaian target Provinsi dan Nasional dalam sektor Perhubungan, telah terakomodir dalam IKU dan IKK Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur. Adapaun tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

NO.	TUJUAN	SASARAN
1.	Menyiapkan dokumen perencanaan anggaran, keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah sesuai prosedur yang ditentukan	Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel
2.	Meningkatkan mutu pelayanan administrasi perkantoran, sesuai standar minimal pelayanan yang sudah ditetapkan	Terciptanya ketepatan waktu penyelesaian dan kepuasan karyawan dalam menerima dan memberikan layanan administrasi perkantoran

3.	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur guna menunjang operasional pelayanan secara optimal, efektif dan efisien.	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur
4.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia sektor Perhubungan yang profesional dan koordinasi yang intensif dengan stakeholder	Terpenuhinya SDM Perhubungan sesuai dengan bidang kompetensi dan kualifikasi pelayanan sesuai dengan cita-cita 5 Citra Manusia Perhubungan
5.	Mengurangi angka kecelakaan dalam berlalu lintas di jalan maupun perairan baik penyedia maupun pengguna jasa angkutan	Terlaksananya kegiatan pengendalian, penyuluhan dan sosialisasi disiplin keamanan bertransportasi dan kegiatan lain dalam rangka mewujudkan zero accident
6.	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan sesuai dengan dinamika perkembangan transportasi yang berkesinambungan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan baik darat, laut, udara dan SDP di beberapa Kab/Kota se Kalimantan Timur sesuai skala prioritas
7.	Meningkatkan mutu dan umur prasarana dan fasilitas perhubungan	Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan
8.	Mewujudkan pelayanan publik yang prima di sektor perhubungan	Terlaksananya operasional Terminal Tipe B yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman

3.3. Program dan Kegiatan

Terkait dengan isu-isu penting terutama dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah beserta aturan turunannya, dimana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan menjadi lebih terarah, maka rangka percepatan pembangunan wilayah dan tertib administrasi, maka program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2024 disesuaikan dengan Struktur Organisasi Kelembagaan yang ada. Namun demikian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan

Timur, dalam implementasinya tidak terlepas dari pedoman-pedoman yang telah digariskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah melekat pada Perangkat Daerah.

3.3.1 Program dan Kegiatan Indikatif Tahun 2023

1. Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Tuntutan terhadap mutu, kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa perhubungan;
b. Kondisi Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur, sehingga memerlukan penanganan transportasi secara ideal dan berkesinambungan;
c. Kondisi geografis Kalimantan Timur yang kompleks (darat, laut, udara dan sungai);
d. Kondisi demografi masyarakat Kalimantan Timur yang tersebar/tidak merata;
e. Munculnya kawasan – kawasan baru berbasis ekonomi terpadu;
f. Kedinamisan sektor perhubungan yang selalu berkembang sesuai dengan tuntutan waktu;
g. Destinasi wisata, budaya dan lingkungan yang memerlukan keseimbangan secara arif dan bijaksana.

2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

a. Jumlah program Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2023 yang diusulkan sebanyak : 4 program dan 22 kegiatan, dan 50 sub kegiatan yang meliputi

program/kegiatan untuk Perangkat Daerah termasuk UPTD.

b. Sifat penyebaran/distribusi lokasi program dan kegiatan mengacu kepada Struktur Organisasi Kelembagaan Tahun 2019 sesuai penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, penekanan pada program/kegiatan prioritas adalah yang bersifat strategis dalam rangka peningkatan daya dukung sektor perhubungan dalam menumbuhkan industri hilir yang mendukung ekonomi kerakyatan dan ekonomi kawasan.
c. Kebutuhan anggaran pembangunan sektor perhubungan untuk pelaksanaan program/kegiatan strategis cukup besar yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijaksanaan, ditetapkan program yang implementasinya dalam pencapaian tujuan tertuang dalam kegiatan atau aktifitas, yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan program sebagai berikut :

Dinas Perhubungan :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   - Forum Perangkat/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024;
   - Penyusunan Dokumen RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023;
   - Penyusunan Dokumen Gender Statistik Sektor Perhubungan di Kab. Paser.
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
   - Penyusunan RKA TA. 2024 dan Perubahan RKA TA. 2023.
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
   - Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2022;
   - Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2022 / Laporan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ Gub) Tahun 2023;
   - Penyusunan Laporan Capaian RENJA/ RENSTRA TA. 2023.
4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   - Kegiatan Survey Kepuasan Masyrakat (SKM) dan Penyusunan Laporannya;
   - Penyusunan Laporan Evaluasi SAKIP TA. 2023;
   - Penyusunan Laporan TEPRA/RADALOK TA.2023;
   - Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan TA.2024.

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   - Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN.
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan ASN;
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.
   - Laporan pembayaran honorarium pengelola keuangan SKPD.
   - Pemindahbukuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, monev kegiatan.
   - Rekon Pajak, Rekon Belanja Bidang, Administrasi Perpajakan, Penyusunan Laporan Keuangan;
   - Sosialisasi Belanja, BIMTEK, Laporan Keuangan Tahunan dan Aplikasi Penatausahaan Keuangan Daerah;
   - Rekon Belanja (BPKAD).
   - Pembinaan Retribusi, Rekonsiliasi/Sosialisasi Retribusi.

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya :
   - Pengadaan PDH Non-PNS 87 Stel;
   - Pengadaan Pakaian Korpri 86 Stel;
   - Pengdaan Pakaian Olahraga 173 Pasang;
   - Pengadaan Sepatu Olahraga 173 Pcs.
2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi:
   - Pelaksanaan Pelatihan Teknis ASN.
   - Pengelolaan data kepegawaian di SIMPEG BKD, MySAPK BKN.
   - Sosialisasi Kepegawaian dan Penilaian Kinerja melalui MySAPK BKN.

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor:
   - Pengadaan Komponen Listrik.
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor:
   - Pengadaan ATK, Kertas, Bahan Komputer.
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan:
   - Pencetakan Spanduk, Fotocopy, Kertas Kop, Amplop, Lembar Disposisi, Map.
4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD:
   - Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah, Forum, Sosialisasi, Monitoring.

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   - Pengadaan Kendaraan 3 Unit Roda-4 Operasional dan 1 Unit Roda-2.
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya:
   - Pengadaan Kabel HDMI, Komputer PC, Laptop, Tablet, Printer, UPS, Bahan Komputer, Perabot Kantor, Mesin Fotocopy, Meubelair, Mesin Potong Rumput, AC, Sound System, APAR, Video Wall, Drone, Genset.

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat:
   - Pelaksanaan Surat Menyurat.
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik:
   - Pembayaran Listrik, Air, Internet.

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor:
   - Pembayaran Gaji Non PNS, Cleaning Service, Pengamanan Kantor.

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   - Pemeliharaan Kendaraan Jabatan Roda-4

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   - Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda-4 dan Roda 2.

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   - Pemeliharaan Peralatan Komputer (Personal Komputer, Printer, Scanner, UPS, Laptop, Mesin Foto Copy dll) dan Perlengkapan Kantor (AC, Genset, TV, Videotron dll)

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
   - Pemeliharaan Gedung Kantor Dishub, Pos Jaga, Paving, Lapangan Tenis, Mushola, WC Mushola.

II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ):

2.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi:
   - Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka Jalan Paku Marka 4.000 Unit (Ruas Jalan Sp.3 Sambera – Muara Badak);

- Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka Jalan Paku Marka 3.507 Unit (Ruas Jalan Simpang Patung Lembuswana – Sebulu) (ABT);
- Pengadaan dan Pemasangan RPPJ 8 Unit;
- Pengadaan dan Pemasangan Rambu 322 Unit dan Rambu Informasi Ruas dan Kapasitas Jalan 332 Unit;
- Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan 86 Unit;
- Pengadaan dan Pemasangan LPJU 91 Unit (Ruas Jalan Sp.3 Sambera – Muara Badak) (ABT);
- Pengdaan Kursi dan Meja Rapat.

2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- Pemeliharaan Marka Jalan 2.340 m (Ruas Jalan Kab. Kukar);
- Pemeliharaan Marka Jalan 3.862 m (Ruas Jalan Kota Samarinda);
- Pengadaan alat uji reflektifitas rambu.

2.2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B:

1) Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B:
- Studi FS Terminal Penumpang Tipe B Kab.Penajam Paser Utara.

2.3 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi:

1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi:
- Pengawasan dan Pengendalian MRLL;

2) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi.
- Pelaksanaan Penegakan Hukum *ODOL*.

3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
   - Pelaksanaan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan;

2.4 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
   1) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

2.5 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan:
   1) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
      - Pengawasan dan Koordinasi UPPKB.
   2) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
      - Pengawasan dan Koordinasi Terminal.
   3) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi;
      - Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor;
      - Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan.
   4) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahan Angkutan Umum.
      - Kegiatan Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan;
      - Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan;
      - Kegiatan Inspeksi Keselamatan (Ramp Chek);

2.6 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:

1) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
   - Perizinan Angkutan Barang Umum dan Studi Master Plan Rencana Induk Lintas Angkutan Barang Kalimantan Timur.
2) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi :
   - Monev Angkutan Barang dan Tarif Angkutan.

2.7 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:

1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:
   - Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan.
2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi:
   - Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan;
   - Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN);
   - Penghargaan Panji – Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Perhubungan.

2.8 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Trayek Kewenangan Provinsi;
   - Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.
2) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
   - Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

III. Program Pengelolaan Pelayaran

3.1 Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan:

1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
   - Kegiatan Inspeksi / Rampchek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
   - Pengadaan APAR.
2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal Yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi:
   - Forum Keselamatan Pelayaran.

3.2 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:

1) Penyediaan Data Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi;
   - Sosialisasi Studi Pengembangan Potensi Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Balikpapan;

3.3 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas:

1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
   - Penerbitan Rekomendasi Teknis Sertifikat Standar.
2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan,

Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas:

- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan.

3.4 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional:

1) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional.
   - Lanjutan Pembangunan Jalan Penghubung Causeway Pelabuhan Laut Maloy.

IV. Program Pengelolaan Perkeretaapian

4.1 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian:

1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian;
   - Studi Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Kalimantan Timur.
2) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perekeretaapian.
   - Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Prov. Kaltim.

UPTD Terminal :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
   - Pengadaan Komponen Listrik.
2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   - Pengadaan ATK, Kertas, Bahan Komputer, Flashdisk.

3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   - Cetakan Bahan Administrasi Umum, Karcis.
4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
   - Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah, Forum, Sosialisasi, Monitoring.

1.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   - Pengadaan Kendaraan Operasional Roda-2 sebanyak 5 Unit.
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   - Pelaksanaan Surat Menyurat.
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   - Pembayaran Listrik, Air, Internet.
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
   - Pembayaran Gaji Non PNS, Cleaning Service, Pengamanan Kantor.

1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   - Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda-4 dan Roda-2.
2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
   - Pemelihraan Rutin Gedung Kantor Terminal.

1.6 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B:

1) Pembangunan Gedung Terminal

- Pembangunan Terminal Tipe B Kab. Paser;

2) Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal :

- Pembangunan Terminal Tipe B Kota Bontang;
- Pembangunan Terminal Tipe B Kab. Sangatta.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan penyusunan program dan kegiatan beserta pendanaan pada tahun 2023 di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim berdasarkan pada RKPD Prov. Kaltim tahun 2023 yang disandinganken dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pada Permendagri 90 Tahun 2019 beserta aturan turunannya dengan menitikberatkan pendanaan pada program – program prioritas yang berkesinambungan dan mendukung visi dan misi RPJMD maupun RPJPD provinsi Kalimantan Timur. Indikator program dan kegiatan disusun untuk mendukung kebijakan daerah yang selaras dengan kebijakan pusat dalam mendukung program prioritas nasional dan isu – isu strategis daerah. Program dan kegiatan manajerial disusun dengan selalu memperhatikan efesiensi dan efektifitas dalam pendanaan maupun pelaksanaannya.

Dinas Perhubungan pada perubaahan tahun 2023 merencanakan 4 program dan 20 kegiatan, dan 48 sub kegiatan dimana terdapat 1 program proritas dengan 8 kegiatan 18 sub kegiatan, 3 program penunjang dengan 12 kegiatan dan 30 sub kegiatan, program prioritas dilaksanakan oleh Bidang Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan UPTD Terminal pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan penunjang tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Bidang Pelayaran pada Program Pengelolaan Pelayaran dan Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Program Pengelolaan Perkeretaapian yang semuanya disusun untuk mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di bidang perhubungan di Povinsi Kalimantan Timur dan diharapkan dapat mencapai target dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan secara berjenjang dapat mendukung pencapaian target – target strategis dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.

Pendanaan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan adalah murni dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sesuai dengan pagu indikatif Perubahan RKPD tahun 2023, keterbatasan sumber daya anggaran pelakasanaan program pembangunan dapat diantisipasi dengan pola – pola pembiayaan pembangunan seperti pinjaman daerah ataupun Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Penerapan prinsip *safeguarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi menjadi kegiatan yang terpisahkan dari proses pembangunan.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Perubahan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 15 2 15 0 0 0 0 01	**Dinas Perhubungan**				**Rp 89.958.184.370**				**Rp 55.161.000.000**
2 15 2 15 0 0 0 0 01	**Dinas Perhubungan**				**Rp 57.116.591.267**				**Rp 43.612.000.000**
2 15 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan**		**100%**	**Rp 32.388.782.927**	**APBD**	**Rutin**	**100%**	**Rp 24.945.000.000**
2 15 01 1 01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**		**75,50%**	**Rp 1.420.398.000**	**APBD**	**Rutin**	**76 Angka**	**Rp 1.032.000.000**
2 15 01 1 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	4 Dokumen	Rp 541.456.500	APBD	Rutin	3 Dokumen	Rp 400.000.000
2 15 01 1 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	4 Dokumen	Rp 177.767.500	APBD	Rutin	4 Dokumen	Rp 178.000.000
2 15 01 1 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	5 Laporan	Rp 291.227.000	APBD	Rutin	4 Laporan	Rp 154.000.000
2 15 01 1 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda, Balikpapan	20 Laporan	Rp 409.947.000	APBD	Rutin	20 Laporan	Rp 300.000.000
2 15 01 1 02	**Administrasi Keuangan**	**Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu**		**100%**	**Rp 15.336.525.160**	**APBD**	**Rutin**	**91%**	**Rp 15.595.000.000**
2 15 01 1 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	86 Orang/Bulan	Rp 14.184.501.160	APBD	Rutin	88 Orang/Bulan	Rp 14.600.000.000
2 15 01 1 02 02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	12 Dokumen	Rp 1.152.024.000	APBD	Rutin	12 Dokumen	Rp 995.000.000
2 15 01 1 05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi**		**60%**	**Rp 643.232.000**	**APBD**	**Rutin**	**17%**	**Rp 320.000.000**
2 15 01 1 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Samarinda	4 Paket	Rp 347.312.000	APBD	Rutin	0 Paket	Rp -
2 15 01 1 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Samarinda	24 Orang	Rp 295.920.000	APBD	Rutin	20 Orang	Rp 320.000.000

2	**15**	**01**	**1**	**06**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Penyelenggaraan Administrasi Umum**		**12 Bulan**	**Rp**	**3.094.504.727**	**APBD**	**Rutin**	**91%**	**Rp**	**2.211.000.000**
2	15	01	1	06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	10 Paket	Rp	49.931.100	APBD	Rutin	10 Paket	Rp	50.000.000
2	15	01	1	06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	81 Paket	Rp	277.696.134	APBD	Rutin	27 Paket	Rp	300.000.000
2	15	01	1	06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	10 Paket	Rp	197.969.249	APBD	Rutin	8 Paket	Rp	150.000.000
2	15	01	1	06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Paser, Balikpapan, Bontang, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu	12 Laporan	Rp	2.568.908.244	APBD	Rutin	12 Laporan	Rp	1.711.000.000
2	**15**	**01**	**1**	**07**						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah**		**60%**	**Rp**	**3.447.128.000**	**APBD**	**Rutin**	**65%**	**Rp**	**352.000.000**
2	15	01	1	07	02					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Samarinda	4 Unit	Rp	1.115.997.000	APBD	Rutin	1 Unit	Rp	352.000.000
2	15	01	1	07	06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Samarinda	260 Unit	Rp	2.331.131.000	APBD	Rutin	0 Unit	Rp	-
2	**15**	**01**	**1**	**08**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**12 Bulan**	**Rp**	**4.396.683.840**	**APBD**	**Rutin**	**100%**	**Rp**	**4.627.000.000**
2	15	01	1	08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	12 Laporan	Rp	33.795.000	APBD	Rutin	12 Laporan	Rp	25.000.000
2	15	01	1	08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	4 Laporan	Rp	986.852.800	APBD	Rutin	12 Laporan	Rp	992.000.000
2	15	01	1	08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	Rp	3.376.036.040	APBD	Rutin	12 Laporan	Rp	3.610.000.000
2	**15**	**01**	**1**	**09**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**		**100%**	**Rp**	**4.050.311.200**	**APBD**	**Rutin**	**66%**	**Rp**	**808.000.000**
2	15	01	1	09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Samarinda	2 Unit	Rp	77.530.000	APBD	Rutin	2 Unit	Rp	120.000.000

2	15	01	1	09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Samarinda	18 Unit	Rp	297.220.000	APBD	Rutin	10 unit	Rp	180.000.000
2	15	01	1	09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Samarinda	639 Unit	Rp	167.930.000	APBD	Rutin	0 Unit	Rp	-
2	15	01	1	09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	1 Unit	Rp	3.507.631.200	APBD	Rutin	1 unit	Rp	508.000.000
2	**15**	**02**								**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas**		**342 Kasus**	**Rp**	**17.585.151.140**	**APBD**	**Prioritas**	**175 Kasus**	**Rp**	**14.192.000.000**
2	**15**	**02**	**1**	**02**						**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**		**82%**	**Rp**	**12.285.472.240**	**APBD**	**Prioritas**	**80%**	**Rp**	**9.300.000.000**
2	15	02	1	02	02					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Samarinda, Kukar, Kutim,PPU	8338 Unit	Rp	10.162.472.100	APBD	Prioritas	2317 Unit	Rp	9.300.000.000
2	15	02	1	02	04					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Samarinda, Kukar, PPU	40 Unit	Rp	2.123.000.140	APBD	Prioritas	0 Unit	Rp	-
2	**15**	**02**	**1**	**03**						**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal**		**4 Perencanaan**	**Rp**	**779.072.500**	**APBD**	**Prioritas**	**1 Perencanaan**	**Rp**	**850.000.000**
2	15	02	1	03	01					Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	PPU	1 Dokumen	Rp	779.072.500	APBD	Prioritas	1 Dokumen	Rp	850.000.000
2	**15**	**02**	**1**	**05**						**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**Menurunnya Pelanggaran LLAJ dan Over Dimensi dan Over Loading**		**75%**	**Rp**	**2.022.379.900**	**APBD**	**Prioritas**	**4 Dokumen**	**Rp**	**900.000.000**
2	15	02	1	05	01					Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Paser, Bontang, PPU, Berau, Kukar	10 Laporan	Rp	353.894.800	APBD	Prioritas	11 Laporan	Rp	400.000.000
2	15	02	1	05	04					Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Berau, Kukar, PPU, Kutim, Samarinda, Balikpapan, Paser	8 Laporan	Rp	1.432.116.000	APBD	Prioritas	4 Laporan	Rp	500.000.000
2	15	02	1	05	05					Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Balikpapan, Samarinda	2 Laporan	Rp	236.369.100	APBD	Prioritas	0 Laporan	Rp	-
2	**15**	**02**	**1**	**06**						**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**Jumlah izin andalalin yang di keluarkan**		**30 Izin Andalalin**	**Rp**	**324.356.000**	APBD	Prioritas	**0 Izin Andalalin**	**Rp**	**-**
2	15	02	1	06	04					Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Samarinda, Kukar, Kutim, PPU, Paser, Balikpapan dan Berau	2 Laporan	Rp	324.356.000	APBD	Prioritas	0 Laporan	Rp	-

2	**15**	**02**	**1**	**07**						**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji**		**85%**	**Rp**	**616.427.000**		**Prioritas**	**78%**	**Rp**	**960.000.000**
2	15	02	1	07	02					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kukar, Kutim, Kubar, Paser, Berau, PPU	9 Laporan	Rp	89.410.000	APBD	Prioritas	9 Laporan	Rp	90.000.000
2	15	02	1	07	03					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Samarinda, Bontang, Kukar, Kutim, Paser, Berau	6 Laporan	Rp	98.617.000	APBD	Prioritas	0 Laporan	Rp	-
2	15	02	1	07	04					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Samarinda	2 Laporan	Rp	214.500.000	APBD	Prioritas	2 Laporan	Rp	220.000.000
2	15	02	1	07	05					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kukar, Kubar,Paser PPU, Kutim, Berau	3 Laporan	Rp	213.900.000	APBD	Prioritas	10 Laporan	Rp	650.000.000
2	**15**	**02**	**1**	**08**						**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Penambahan Jumlah Angkutan Umum dan/atau Barang yang Tersedia**		**20 Unit**	**Rp**	**472.647.000**	**APBD**	**Prioritas**	**15 Unit**	**Rp**	**375.000.000**
2	15	02	1	08	01					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Paser, Balikpapan, Bontang, Penajam Paser Utara	20 Unit	Rp	364.647.000	APBD	Prioritas	15 Unit	Rp	300.000.000
2	15	02	1	08	02					Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Paser, Balikpapan, Bontang, Penajam Paser Utara, Mahulu	3 Laporan	Rp	108.000.000	APBD	Prioritas	4 Laporan	Rp	75.000.000

2	**15**	**02**	**1**	**09**						**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Penetapan Kawasan**		**0 Penetapan**	**Rp**	**-**	**APBD**	**Prioritas**	**1 Dokumen**	**Rp**	**850.000.000**
2	15	02	1	09	01					Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Samarinda	0 Dokumen	Rp	-	APBD	Prioritas	1 Dokumen	Rp	750.000.000
2	15	02	1	09	02					Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Balikpapan	0 Dokumen	Rp	-	APBD	Prioritas	1 Dokumen	Rp	100.000.000
2	**15**	**02**	**1**	**13**						**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan**		**75 Izin**	**Rp**	**766.396.500**	**APBD**	**Prioritas**	**100 Unit**	**Rp**	**635.000.000**
2	15	02	1	13	01					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	10 (sepuluh) Kab/Kota se Kaltim	75 Unit	Rp	282.941.500	APBD	Prioritas	100 Unit	Rp	300.000.000
2	15	02	1	13	02					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Samarinda	3 Laporan	Rp	483.455.000	APBD	Prioritas	4 Laporan	Rp	335.000.000
2	**15**	**02**	**1**	**14**						**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan**		**75 Izin**	**Rp**	**318.400.000**	**APBD**	**Prioritas**	**300 Unit**	**Rp**	**322.000.000**
2	15	02	1	14	01					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	10 (sepuluh) Kab/Kota se Kaltim	75 Unit	Rp	147.100.000	APBD	Prioritas	300 Unit	Rp	150.000.000

2	15	02	1	14	02					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	10 (sepuluh) Kab/Kota se Kaltim	40 Laporan	Rp	171.300.000	APBD	Prioritas	4 Laporan	Rp	172.000.000
2	**15**	**03**								**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP**		**88%**	**Rp**	**5.733.228.500**	**APBD**	**Rutin**	**0,96 Angka**	**Rp**	**3.375.000.000**
2	**15**	**03**	**1**	**03**						**Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan**	**Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP**		**300 Izin**	**Rp**	**436.831.500**	**APBD**	**Rutin**	**100 Izin**	**Rp**	**350.000.000**
2	15	03	1	03	01					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	10 (sepuluh) Kab/Kota se Kaltim	300 Unit	Rp	129.628.000	APBD	Rutin	100 Unit	Rp	200.000.000
2	15	03	1	03	02					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Balikpapan dan Samarinda	1 Laporan	Rp	307.203.500	APBD	Rutin	1 Laporan	Rp	150.000.000
2	**15**	**03**	**1**	**05**						**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan**		**1 Dokumen**	**Rp**	**236.640.400**	**APBD**	**Rutin**	**2 Dokumen**	**Rp**	**900.000.000**
2	15	03	1	05	01					Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	Balikpapan	1 Dokumen	Rp	236.640.400	APBD	Rutin	2 Dokumen	Rp	900.000.000

2	**15**	**03**	**1**	**06**						**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas**	**Jumlah Izin Jasa Pelayaran**		**100 Izin**	**Rp**	**508.495.000**	**APBD**	**Rutin**	**60 Badan Usaha**	**Rp**	**275.000.000**
2	15	03	1	06	01					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 (sepuluh) Kab/Kota se Kaltim	100 Dokumen	Rp	208.495.000	APBD	Rutin	60 Dokumen	Rp	125.000.000
2	15	03	1	06	02					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kukar, Kutim, Paser, PPU, Berau	2 Laporan	Rp	300.000.000	APBD	Rutin	2 Laporan	Rp	150.000.000
2	**15**	**03**	**1**	**09**						**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Peningkatan Fasilitas/Fasilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional**		**97,5%**	**Rp**	**4.551.261.600**	**APBD**	**Prioritas**	**55,0%**	**Rp**	**1.850.000.000**
2	15	03	1	09	02					Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Kutai Timur	1 Unit	Rp	4.551.261.600	APBD	Prioritas	2 Unit	Rp	1.850.000.000

2	**15**	**05**								**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**Prosentase Kabupaten/Kota yang Tersosialisasikan Perencanaan, Peraturan dan Kebijakan Perkeretaapian**		**80%**	**Rp**	**1.409.428.700**	**APBD**	**Rutin**	**40%**	**Rp**	**1.100.000.000**
2	**15**	**05**	**1**	**01**						**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	**Jumlah Rencana Induk Perkeretaapian**	**Kaltim**	**1 Dokumen**	**Rp**	**1.409.428.700**	**APBD**	**Rutin**	**1 Dokumen**	**Rp**	**1.100.000.000**
2	15	05	1	01	01					Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, Mahulu	1 Dokumen	Rp	1.223.560.700	APBD	Rutin	1 Dokumen	Rp	1.000.000.000
2	15	05	1	01	02					Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Balikpapan	1 Dokumen	Rp	185.868.000	APBD	Rutin	1 Dokumen	Rp	100.000.000

Kode										Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
												Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)										(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	**15**	**2**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**01**	**01**	**UPTD Terminal**				**Rp 32.841.593.103**				**Rp 11.549.000.000**
2	**15**	**01**								**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan**		**100%**	**Rp 4.445.045.403**	**APBD**	**Rutin**	**100%**	**Rp 4.321.443.960**
2	**15**	**01**	**1**	**06**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Penyelenggaraan Administrasi Umum**		**12 Bulan**	**Rp 793.740.283**	**APBD**	**Rutin**	**60%**	**Rp 663.368.600**
2	15	01	1	06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	8 Paket	Rp 25.307.600	APBD	Rutin	8 Paket	Rp 25.000.000
2	15	01	1	06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	31 Paket	Rp 38.481.383	APBD	Rutin	6 Paket	Rp 158.368.600
2	15	01	1	06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	7 Paket	Rp 76.167.300	APBD	Rutin	7 Paket	Rp 80.000.000
2	15	01	1	06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Berau, Kutai	12 Laporan	Rp 653.784.000	APBD	Rutin	12 Laporan	Rp 400.000.000

2	**15**	**01**	**1**	**07**						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah**		**50%**	**Rp**	**687.357.600**	**APBD**	**Rutin**	**50%**	**Rp**	**60.000.000**
2	15	01	1	07	02					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Samarinda	5 Unit	Rp	125.000.000	APBD	Rutin	3 Unit	Rp	60.000.000
2	15	01	1	07	06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Samarinda	150 Unit	Rp	562.357.600	APBD	Rutin	0 Unit	Rp	-
2	**15**	**01**	**1**	**08**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**12 Bulan**	**Rp**	**2.718.045.520**	**APBD**	**Rutin**	**100%**	**Rp**	**3.438.075.360**
2	15	01	1	08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	12 Laporan	Rp	8.668.000	APBD	Rutin	12 Laporan	Rp	9.000.000
2	15	01	1	08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda, Bontang, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser,	12 Laporan	Rp	125.648.400	APBD	Rutin	12 Laporan	Rp	126.000.000
2	15	01	1	08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	Rp	2.583.729.120	APBD	Rutin	12 Laporan	Rp	3.303.075.360
2	**15**	**01**	**1**	**09**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**		**30%**	**Rp**	**245.902.000**	**APBD**	**Rutin**	**30%**	**Rp**	**160.000.000**
2	15	01	1	09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Samarinda	6 Unit	Rp	33.612.000	APBD	Rutin	6 unit	Rp	35.000.000
2	15	01	1	09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda, Bontang, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser	7 Unit	Rp	212.290.000	APBD	Rutin	77 unit	Rp	125.000.000
2	**15**	**02**								**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas**		**342 Kasus**	**Rp**	**28.396.547.700**	**APBD**	**Prioritas**	**1 Unit**	**Rp**	**7.227.556.040**
2	**15**	**02**	**1**	**03**						**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**Jumlah Penumpang yang Terlayani**		**750.000 Penumpang**	**Rp**	**28.396.547.700**	**APBD**	**Rutin**	**800.000 Penumpang**	**Rp**	**7.227.556.040**
2	**15**	**02**	**1**	**03**	**02**					Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal Tipe B yang Dibangun		2 Unit	Rp	1.405.541.400	APBD	Rutin	1 Unit	Rp	1.500.000.000
2	**15**	**02**	**1**	**03**	**03**					Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sapras Terminal Tipe B yang Dikembangkan		2 Unit	Rp	26.991.006.300	APBD	Rutin	2 Unit	Rp	5.727.556.040

BAB V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

1. Jumlah program Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Perubahan Tahun 2023 berdasarkan Pagu Indikatif Perubahan SKPD Tahun 2024 sebanyak 4 program dan 20 kegiatan, dan 48 sub kegiatan dengan alokasi anggaran indikatif sebesar Rp. 89.958.184.370,- ;
2. Sifat penyebaran/distribusi lokasi program dan kegiatan pada prinsipnya mengacu pada Struktur Organisasi Kelembagaan Tahun 2019 sesuai penerapan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, penekanan pada program/kegiatan prioritas adalah yang bersifat strategis dalam rangka peningkatan pelayanan dan pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, khususnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pembangunan Pelabuhan Laut Sangkulirang, Mantaritif, Dermaga Sungai Tering, Melak, Mahulu dan Terminal Tipe B;
3. Dalam pelaksanaan program/kegiatan bidang perhubungan tidak dapat lepas dari keterkaitan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun stake holder swasta dan masyarakat, oleh karena itu dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan selalu mengedepankan koordinasi yang intens sehingga tercipta kerjasama yang sinergis dan tepat sasaran dalam hal teknis kegiatan maupun pendanaan program / kegiatan, dimana sumber – sumber pendanaan program / kegiatan dapat digali dari beberapa sumber antara lain Pinjaman Daerah dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang diharapkan dapat menjamin kontinuitas program/kegiatan tersebut dan kebijakan - kebijakan yang mendukung prorgam/kegiatan juga sangat diperhatikan untuk mencapai target sesuai dengan perencanaan;

4. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip – prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

5.2 Saran

1. Perubahan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagai pedoman penyusunan R-PAPBD Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur, perlu dijabarkan dalam usulan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan Penyusunan Prioritas Plafon Perubahan Anggaran (PPA) Tahun 2023;
2. Untuk menyusun rencana tindak bagi pencapaian program prioritas pembangunan dan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan – kegiatan tersebut, serta untuk terwujudkannya sinergitas semua pihak yang terkait, maka setiap prioritas kegiatan akan dilakukan pengendalian dan pengawasan / monitoirng dan evaluasi secara berkesinambungan oleh Kepala Bidang teknis terkait dalam kendali Kepala Dinas, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Samarinda, Agustus 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Timur



YUDHA PRANOTO, S.E.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640817 201006 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut sebagai RENJA Diskominfo merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Diskominfo tahun 2019 – 2023 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas dan indikasi kegiatan khusus bidang Informasi Komunikasi Publik, Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian, Aplikasi Informatika, dan Statistik.

Penetapan program, kegiatan dan operasional pelayanan yang ada dirancang secara berjenjang, melalui mekanisme musyawarah pembangunan yang diformulasikan pada setiap tahunnya sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo. Peran pemerintah lebih banyak kepada peran-peran stimulasi, dinamisasi, regulasi dan fasilitasi bagi masyarakat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat terus akan didorong pada setiap tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan saat ini telah berkembang dengan pesat sebagai dampak dari keterbukaan informasi publik sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan baik melalui media cetak, elektronik, website maupun bertatap muka.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa adalah Program Diskominfo yang merupakan salah satu dari sekian program prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.

Untuk mencapai sasaran program seperti tersebut di atas, maka disusunlah Rencana Strategis SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 . Renstra ini diwujudkan setiap tahun

melalui Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan, dimana pelaksanaannya, berapa dana yang dibutuhkan oleh SKPD untuk mencapai sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Sejalan dengan itu, berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 263 ayat 2 bahwa rencana strategis perangkat daerah dirumuskan ke dalam rencana kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD; Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program , kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah; maka dalam penyusunan RENJA ini Diskominfo berupaya untuk melaksanakan amanat seperti yang tertulis tersebut.

Visi Diskominfo merupakan upaya penjabaran dari visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

“TERWUJUDNYA AKSES KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG BERKUALITAS DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR.”

Maksud dari visi diatas adalah “Terwujudnya akses komunikasi dan informatika yang berkualitas” memiliki arti teknologi informasi merupakan pilar penting dalam mendukung pembangunan, karena dengan teknologi informasi dapat memberikan efisiensi dalam sistem pembangunan serta masyarakat harus mendapatkan informasi yang akurat dan berkualitas, disamping itu harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

Kemudian visi tersebut dijabarkan kedalam misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Mengedepankan aspek sistem pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informasi Publik.
2. Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkualitas.

1.1.1 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja SKPD disusun berdasarkan :

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD.

1.1.2 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD

Perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun,

hingga perencanaan pada tataran SKPD adalah Renja SKPD. Penyusunan RPJMD dilakukan secara terintegrasi dengan dokumen – dokumen perencanaan lainnya, mulai dari tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar terdapat koordinasi dan sinkronisasi berbagai program/kegiatan baik di pusat maupun di daerah dan pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

1.1.3 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah

Penetapan program, kegiatan dan operasional pelayanan yang ada dirancang secara berjenjang, melalui mekanisme musyawarah pembangunan yang diformulasikan pada setiap tahunnya sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo. Peran pemerintah lebih banyak kepada peran-peran stimulasi, dinamisasi, regulasi dan fasilitasi bagi masyarakat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat terus akan didorong pada setiap tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan saat ini telah berkembang dengan pesat sebagai dampak dari keterbukaan informasi publik sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan baik melalui media cetak, elektronik, website maupun bertatap muka.

1.1.4 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renja K/L

Setiap tahun selama periode perencanaan, program/kegiatan Pemerientah Daerah akan dijabarkan dalam RKPD, dan keberadaan RKPD tersebut akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun Dalam kaitan dengan sistem keuangan, maka penjabaran RPJMD dan RKPD untuk setiap tahunnya juga akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.1.5 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renja Kabupaten/kota

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renja kabupaten/Kota dilakukan pada saat Forum Perangat Daerah dengan melakukan evaluasi yang mencakup :

1) Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
2) Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
3) Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai :
   - Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.

- Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan informasi publik.
- Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo, dapat tercapai untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kominfo Perangkat Daerah dengan Renja Kabupaten/Kota tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Kominfo.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rancangan Awal RENJA Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244).
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843).
e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846).
f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916).
g. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005, tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra OPD.
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
j. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5).
k. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Daerah Kalimantan Timur tahun 2008 nomor 08).
l. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025.
m. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 .
n. Peraturan Gubernur Nomor: 45 tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
o. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun kedepan serta rencana kerjanya.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebagai pedoman PD dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2023 sesuai dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Rancangan Awal RENJA Diskominfo Prov. Kaltim adalah sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan.
   Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen Renja.
b. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.
   Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian Renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi PD, review terhadap rancangan akhir RKPD, penelaahan usulan program kegiatan masyarakat.

c. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.
   Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan.

d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
   Memuat Rencana Kerja, program dan kegiatan, sasaran, indicator kinerja, dan pendanaan untuk tahun 2023.

e. Bab V Penutup
   Memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja PD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun ke depan oleh PD.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2023, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki visi: " ***Terwujudnya akses komunikasi dan informatika yang berkualitas"***. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah:

1. Mengedepankan aspek sistem pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informasi Publik.
2. Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkualitas.

Faktor Penyebab Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program / Kegiatan Perencanaan telah sinkron dengan pelaksanaan Proses pengadaan sesuai dengan tatakala yang telah ditetapkan (tepat waktu), dan Evaluasi pekerjaan yang selalu dilakukan. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra - Perubahan indikator kinerja dan target capaian program Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada . Kebijakan/ Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut dengan mempercepat pelaksanaan fisik dan memperketat pengawasan di lapangan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur pada rancangan awal rencana kerja tahun 2023 terdapat 5 program dan 14 kegiatan dengan pagu indikatif yang bersumber dari APBD.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel T- C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun **2022**	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) **2019**	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) **2022**	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Bidang Urusan	Program	Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%) 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) **2022**	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11=(10/4)**
2	**10**			**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika**									
2	**10**			**Dinas Komunikasi dan Informatika**			**15.977.054.281**						
2	**10**	**07**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terlayaninya administrasi perkantoran**		**4.217.796.862**						
2	10	07	01	Pelaksana Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran		4.217.796.862						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun **2022**	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) **2019**	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) **2022**	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Bidang Urusan	Program	Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%) 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) **2022**	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11=(10/4)**
2	**10**	**08**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur**		**2.303.400.937**						
2	10	08	01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Saranan dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor		1.573.585.437						
2	10	08	02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana		729.815.500						
2	**10**	**09**		**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**		**861.525.000**						
2	10	09	01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		555.625.000						
					Jumlah kegiatan rapat koordinasi								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun **2022**	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) **2019**	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) **2022**	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Bidang Urusan		Program	Kegiatan					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%) 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) **2022**	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11=(10/4)**
					dan konsultasi ke dalam daerah								
					Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman								
2	10	09	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek		305.900.000						
					Jumlah Pakaian Dinas								
				Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	**Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah**		**149.000.000**						
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran		10.000.000						
				Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan		139.000.000						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun **2022**	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) **2019**	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) **2022**	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Bidang Urusan	Program	Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%) 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) **2022**	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11=(10/4)**
				Pelaksanaan Kegiatan									
				Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	**Persentase siswa sekolah dan mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi bidang TIK**		30.056.660						
				Peningkatan Sumber Daya TIK	1. Jumlah pelatihan untuk siswa (SD/SMP/SMA/Sederajat)		30.056.660						
					2. Jumlah bimbingan teknis Pranata Komputer								
2	**10**	**12**		**Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah**	**Jumlah Lembaga yang mengembangkan media center informasi publik**		**1.155.795.340**						
				Koordinasi bidang Kominfo Antar Lintas SKPD, Lintas Vertikal di daerah, BUMN dan Swasta	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Bidang Kominfo		104.800.000						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun **2022**	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) **2019**	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) **2022**	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Bidang Urusan		Program	Kegiatan					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%) 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) **2022**	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11=(10/4)**
				Lokal Provinsi,Kab/Kota									
				Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah	Workshop, bimtek, sarana dan prasarana kegiatan jurnalistik dll		67.260.000						
2	10	12	03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah Kerjasama Publikasi Informasi Pembangunan Daerah Melalui RRI, TVRI, Radio Swasta dan TV Swasta, Lokal dan Nasional serta melalui media cetak untuk penerbitan buletin advertorial		983.735.340						
				Penguatan Manajemen Tata Kelola TIK	Jumlah Kab/Kota dalam pemeringkatan E-Goverment								
2	**10**	**13**		**Program Peningkatan Tata**	**Persentase Indeks**		**1.220.517.600**						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun **2022**	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) **2019**	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) **2022**	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Bidang Urusan	Program	Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%) 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) **2022**	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11=(10/4)**
				Laksana Komunikasi dan Informatika	**Kepuasan Pelayanan Informasi Publik**								
				Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baliho dll	Jumlah poster, leaflet, buletin, baliho yang menginformasikan kebijakan pemerintah daerah serta pembangunan dan perawatan baliho		345.760.000						
				Komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi	Jumlah dialog interkatif di radio dan televisi		42.750.000						
				Pengolahan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah	jumlah laporan hasil inventarisasi data dan hasil survei IKM		628.517.600						
				Dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah	Jumlah laporan dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah		191.690.000						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun **2022**	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) **2019**	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) **2022**	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Bidang Urusan	Program	Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%) 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) **2022**	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11=(10/4)**
2	10	13	05	Partisipasi pada pameran/expo/pekan kebudayaan daerah dan diluar daerah	Jumlah event keikutsertaan pada pameran / expo/ pekan kebudayaan daerah		11.800.000						
2	**10**	**14**		**Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik**	**Cakupan Masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan informasi**		**236.975.000**						
2	10	14	06	Pengembangan Sumber Informasi Publik	Jumlah PPID Pembantu di Badan Pemerintah Pemprov. Kaltim dan PPID Kab/ kota yang dikoordinasikan dalam jejaring pengelolaan pelayanan dan informasi		236.975.000						
2	**10**	**15**		**Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa**	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**		**2.267.565.452**						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun **2022**	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) **2019**	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) **2022**	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Bidang Urusan	Program	Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%) 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) **2022**	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11=(10/4)**
2	10	15	02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi	Kapasitas Bandwidth internet		810.350.000						
2	10	15	03	interkoneksi jaringan intra pemerintah	Jumlah OPD Terhubung dalam jaringan		809.700.000						
2	10	15	04	Pengembangan Integrasi Sistem Informasi di Pemprov Kaltim& Kab/Kota Kaltim (Interoperabilitas)	Jumlah Aplikasi/Sistem Informasi yang terintegrasi		134.624.600						
				Pembinaan dan Pengembangan Telecenter	Jumlah Jaringan terpasang di Desa Kab/Kota		143.525.000						
				Penguatan SPBE	Jumlah perangkat daerah yang mendapat pembinaan/penguatan SPBE		369.365.852						
2	**10**	**16**		**Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo**	**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem pengamanan data elektronik**		**3.203.742.463**						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun **2022**	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) **2019**	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) **2022**	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Bidang Urusan	Program	Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%) 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) **2022**	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11=(10/4)**
2	10	16	04	Pengembangan dan penyelenggaraan DC dan DRC	Jumlah Hosting Aplikasi DC dan DRC		1.817.725.000						
				Goverment cloud computing	Jumlah Penggunaan Cloud Computing								
				Pelaksanaan audit TIK	Terstandarisasinya Audit TIK		193.618.500						
				Penangan Insiden Keamanan Informasi	Jumlah Penggunaan Secure Socket Layer Pada Website dan Aplikasi Resmi OPD		1.057.010.500						
				Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah	Tersedianya sarana pendukung layanan								
2	10	16	10	Peningkatan penyediaan informasi dan data KPU/USO di kaltim	Terlayaninya informasi dan data KPU/USO								
				Penyediaan dan pengumpulan data informasi mitra telekomunikasi dan	Tersedianya data dan informasi telekomunikasi dan penyiaran								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun **2022**	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) **2019**	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) **2022**	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Bidang Urusan	Program	Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%) 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) **2022**	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11=(10/4)**
				penyiaran (radio & televisi)									
				Pengawasan dan pengendalian pengamanan informasi, persandian, pos dan telekomunikasi	Tersedianya data dan informasi yang ter-enkripsi		216.371.188						
				Pengelolaan Aplikasi (Sistem Informasi Website) Perangkat Daerah di Prov. Kaltim	Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah yang dikelola		44.145.275						
				Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	**Persentase Program/kegiatan dari hasil rekomendasi penelitian TIK yang dilaksanakan**								
				Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Dokumen RIPTIK Rencana Induk Pengembangan TIK) yang dihasilkan								
				Program penguatan dan	**jumlah Kajian yang diselesaikan**		330.678.967						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun **2022**	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) **2019**	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) **2022**	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Bidang Urusan	Program	Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%) 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) **2022**	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11=(10/4)**
				evaluasi data dan statistik									
				Pengumpulan data statistik daerah	Tersedianya data pembangunan daerah dan data pertumbuhan ekonomi yang akurat dan kredibel		330.678.967						

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2022
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**29.770.575.464**	**21.191.011.120**	**93.91**	87.730.375.101	83,881,219,719	**96.91**
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**		**80 %**		**6.945.822.400**	**6.520.589.337**	**93.91**	37.429.086.750	36,998,053,535	98.85
2	**16**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	**Jumlah Desiminasi Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik**	**80 %**		**6.945.822.400**	**6.520.589.337**	**93.91**	37.429.086.750	36,998,053,535	98.85
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi	Jumlah Dokumen Hasil perumusan	90 Peserta		59.165.000	47.605.900	80.46	146.640.000	140,197,476	95.61

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2022
					dan Komunikasi Publik	Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik								
2	1 6	2	1.0 1	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik melalui Media Komunikasi Publik	300 Peserta		174.025.000	173.478.453	99.87	171.900.000	171,900,000.	100
2	1 6	0 2	1.0 1	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	10 Media Center		101.790.000	101.456.092		146.970.000	137,611,380	93.63
2	1 6	0 2	1.0 1	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	53 PD		106.310.000	106.310.000	100	362.972.000	106.310.000	100
2	1 6	2	1.0 1	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	110 Dialog		125.500.000	105.782.500	84.29	29.509.440.000	105.782.500	84.29
2	1 6	2	1.0 1	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil	50 Perangkat Daerah		217.357.000	211.787.700	97.50	3.350.864.500	359,047,025	98.92

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2022
						Pelayanan Informasi Publik								
2	16	2	1.01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Kerjasama		278.500.000	223.703.800	80.32	218.592.000	29,450,525,393	99.80
2	16	2	1.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	6 Kegiatan		152.000.000	149.420.348	98.54	427.178.000	418,531,900	97.98
2	16	2	1.01	9	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1900 Liputan		93.750.000	77.108.200	82.55	136.200.000	109,632,550	80.49
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunitas Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	45 Orang		10.000.000	9.417.000	99.10	207.136.000	200,937,320	97.01%
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	85 Sengketa		5.617.407.400	5.310.188.344	94.53	2.272.190.250	2,015,186,189	88.69
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaran Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat. Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	2 Laporan		10.000.000	4.575.000	45.75	479.004.000	470,528,559	98.23

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2022
2	1 6	0 2	1.0 1	13	Penyediaan/Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi								
2	**1 6**	**0 3**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**		**3.15 Indeks**		**5.035.579.830**	**4.639.215.203**	**92.18**	7.362.108.000	7,203,081,824	97.84
2	**1 6**	**0 3**	**1. 01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**		**80%**		**2.065.535.550**	**2.007.190.203**	**97.19**	3.371.487.200	3,317,757,537	98.41
2	1 6	0 3	1.0 1	1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi								
2	1 6	0 3	1.0 1	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub	20 Sub Domain		275.973.000	273.940.100	99.14	350.886.000	350,139,437	99.79

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2022
					Pemerintahan Daerah Provinsi	Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi								
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah provinsi	90%		1.789.562.550	1.733.250.550	96.86	3.020.601.200	2,967,618,100	98.25
2	**16**	**03**	**1.02**		**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data daerah**	**70%**		**2.970.044.280**	**2.632.024.553**	**88.70**	3.990.620.800	3,885,324,287.	97.36
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.15 Indeks		226.100.000	126.690.000	56.03	872.756.000	862,395,734	98.81
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 Kegiatan		226.100.000	190.022.606	84.04	130.533.500	113,131,375	86.67

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2022
2	1 6	0 3	1.0 2	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	90% OPD		921.250.280	826.307.319	89.69	2.194.471.800	2,153,633,367	98.14
2	1 6	0 3	1.0 2	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	90%		325.000.000	288.076.495	89.26	93.900.000	83,635,800	89.07
2	1 6	0 3	1.0 2	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Kegiatan		250.000.000	224.715.460	89.89	55.892.500	55,125,960	98.63
2	1 6	0 3	1.0 2	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data	90% Layanan		180.000.000	160.516.112	89.34	138.220.000	133,665,151	96.70
2	1 6	0 3	1.0 2	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah dokumen arsitektur aplikasi perangkat daerah	2 Aplikasi		226.100.000	223.113.862	98.68			
2	1 6	0 3	1.0 2	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan	jumlah layanan administrasi publik perangkat daerah yang terintegrasi	90% Layanan		310.000.000	292.038.103	94.26	126.537.500	120,558,100	95.27

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2022
					Pemerintah									
2	1 6	0 3	1.0 2	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas									
2	1 6	0 3	1.0 2	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pelatihan dan pembinaan sumber daya TIK	6 Kegiatan		305.494.000	300.544.596	98.38	274.808.000	260,424,800	94.77
2	1 6	0 3	1.0 2	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)									
2	1 6	0 3	1.0 2	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE									
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							1.255.639.500	1,770,972,461	99.08
2	**2 0**				**URUSAN PEMERINTAHAN**				**953.673.080**	**918.125.641**	**96.27**	1.255.639.500	1,770,972,461	99.08

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2022
					BIDANG STATISTIK									
2	**2 0**	**0 2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Di Lingkup Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur**	**70% OPD**		**953.673.080**	**918.125.641**	**96.27**	224.871.500	223,866,700	99.55
2	**2 0**	**0 2**	**1. 01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	**Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Di Lingkup Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur di Pemprov. Kaltim**	**70% OPD**		**953.673.080**	**918.125.641**	**96.27**	115.200.000	114,369,200	99.28
2	2 0	0 2	1.0 1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Buku Data Statistik Sektoral yang terpublikasikan	1 Dokumen		382.199.500	362.897.017	96.27	318.130.000	313,326,500.	98.49
2	2 0	0 2	1.0 1	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas SDM nya dalam rangka peningkatan mutu statistik sektoral yang terintegrasi	15 Orang		50.000.000	49.505.760	99.01	502,409,000	500,816,161	99.68

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2022
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Kelengkapan Metadata Statistik Sektoral di Perangkat Daerah	1 Dokumen		115.300.000	114.858.930	99.62	626,863,000	618,593,900	98.68
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Kebijakan tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 Kegiatan		118.673.950	112.821.550	95.07	1.255.639.500	1,770,972,461	99.08
2	20	02	1.01	5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Sistem Informasi Statistik Sektoral yang terintegrasi	1 Kegiatan		140.499.630	139.959.532	99.62	1.255.639.500	1,770,972,461	99.08
2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Otorisasi Statistik Sektoral di Perangkat Daerah	3 Kegiatan		147.000.000	138.082.852	93.93			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**									
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK**	**Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi**	**III (Indeks)**		**316.849.592**	**283.837.919**	**89.58**	340.267.000	314,614,535	92.46

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2022
					PENGAMANAN INFORMASI	**Pemerintah (Indeks KAMI)**								
2	**2 1**	**0 2**	**1. 01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	**Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)**	**III (Indeks)**		**296.849.592**	**264.226.249**	**89.01**	269.467.000	244,387,950	90.69
2	2 1	0 2	1.0 1	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	1 Dokumen		70.000.000	63.623.150	90.90	68.418.000	57,796,100	84.47
2	2 1	0 2	1.0 1	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	jumlah laporan pengamanan informasi berbasis elektronik dan non elektronik	30 Orang		70.000.000	56.116.699	80.17	56.064.000	51,892,900	92.56
2	2 1	0 2	1.0 1	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah perangkat daerah yang terlayani keamanan informasi	10 Informasi		29.600.000	22.433.800	75.79	80.964.000	77,858,950	96.16

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2022
2	2 1	0 2	1.0 1	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang terlayani keamanan informasi	100%		127.249.592	122.047.600	95.91	64.021.000	56,840,000	88.78
2	**2 1**	**0 2**	**1. 02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**	**Meningkatnya Pemanfaatan Jaring Komunikasi Sandi untuk Pengamanan Informasi Publik yang dikecualikan**	**1 Kegiatan**		**20.000.000**	**19.611.670**	**98.06**	70.800.000	70,226,585.	99.19
2	2 1	0 2	1.0 2	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	jumlah laporan operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi antar provinsi dan kab/kota	1 Kegiatan		20.000.000	19.611.670	98.06	70.800.000	70,226,585.	99.19
2	**1 6**	**0 1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**							**40.811.439.851**	37,594,497,364	92.12%
2	**1 6**	**0 1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**304.740.000,**	282,326,322	92.64
2	1 6	0 1	1.0 1	01	Penyusunan Dokumen	Jumlah Penyusunan	5 Dokumen		102.250.000	84.748.700	91.52			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2022
					Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perangkat Daerah								
2	1 6	0 1	1.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja dan ikshtisar realisasi kinerja skpd	1 Dokumen		49.290.000	33.260.000	67.48	200.760.000	185,996,000	92.65
2	1 6	0 1	1.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen		35.375.000	34.247.000	96.83	103.980.000	96,330,322	92.64
2	**1 6**	**0 1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**10.675.536.354**	**9.275.561.186**	**86.89**	**13.307.088.790**	10,332,960,415	77.65
2	1 6	0 1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Daftar Gaji dan Tunjangan	12 Bulan		10.675.536.354	9.275.561.186	86.89	12.830.808.790	9,874,320,415	76.96
2	1 6	0 1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen LS dan GU Yang diverifikasi	200 Dokumen					476.280.000	458,640,000	96.30
2	**1 6**	**0 1**	**1. 03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terwujudnya tertib administrasi BMD pada SKPD**	**12 Bulan**					**3.750.000**	**0**	**0**
2	1 6	0 1	1.0 3	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan BMD	1 Laporan					3.750.000	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2022
2	**1 6**	**0 1**	**1. 05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**159.630.000**	159,599,000	99.98
2	1 6	0 1	1.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	124 Stel		110.135.000	109.325.000	99.26	48.000.000	111,599,000	99.97
2	1 6	0 1	1.0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	30 Orang					111.630.000	48,000,000	100
2	**1 6**	**0 1**	**1. 06**		**Administrasi Umum Perangkat Daaerah**							1.311.857.000	1,310,301,815	99.88
2	1 6	0 1	1.0 6	01	Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan		17.738.346	17.735.000	97.19	9.078.000	9,077,500	99.99
2	1 6	0 1	1.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	1 Laporan		1.098,305.000	1.034.368.700	99.01	21.432.000	20,052,000	93.56
2	1 6	0 1	1.0 6	05	Penyedian Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah laporan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan		30.468.000	30.162.400	99.00	90.400.000	90,337,150	99.93
2	1 6	0 1	1.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan		156.925.000	131.135.700	83.57	1.190.947.000	1,190,835,165	99.99

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2022
					dan Konsultasi SKPD									
2	1 6	0 1	1.0 7		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**21.361.427.500**	21,266,916,800.	99.56
2	1 6	0 1	1.0 7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional	2 Unit		27.200.000	27.200.000	100	1.370.072.000,	1,335,410,000.	97.47
2	1 6	0 1	1.0 7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Penyediaan Mebel	1 PD					367.564.000,	364,046,000	99.04
2	1 6	0 1	1.0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	20 Unit					19.623.791.500	19,567,460,800	99.71
2	1 6	0 1	1.0 7	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
2	**1 6**	**0 1**	**1. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah dokumen jasa Surat menyurat dan benda pos**	**12 Bulan**		**3.512.621.562**	**3.343.097.508**	**95.74**	**3.356.452.761**	3,297,290,588	98.24
2	1 6	0 1	1.0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan		6.000.000	4.172.000	69.60	10.740.000	7,881,000	73.38
2	1 6	0 1	1.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan		422.751.113	333.723.207	78.94	357.805.241,	346,350,916	96.80

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2022
2	1 6	0 1	1.0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan		1.098.305.000	1.034.368.700	99.01	39.400.000	38,170,000	96.88
2	1 6	0 1	1.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan daftar gaji dan pengelola keuangan	13 Laporan		3.023.995.449	2.463.860.743	81.48	2.948.507.520	2,904,888,672	98.52
2	**1 6**	**0 1**	**1. 09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana prasarana**	**12 Bulan**		**702.806.300**	**521.995.733**	**74.27**	**1.006.493.800,**	945,102,424	93.90
2	1 6	0 1	1.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan		332.045.900	220.099.833	66.29	277.341.800,	257,672,224	92.91
2	1 6	0 1	1.0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Bangunan		119.660.000	117.980.000	98.60	398.452.000,	395,000,000	99.13
2	1 6	0 1	1.0 9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah laporan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan		251.100.400	183.915.900	73.24	330.700.000	292,430,200	88.43

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh seorang Sekretaris dan empat Kepala Bidang yang masing-masing membawahi tiga Kepala Seksi/Kasubbag (terlihat pada gambar dibawah ini :

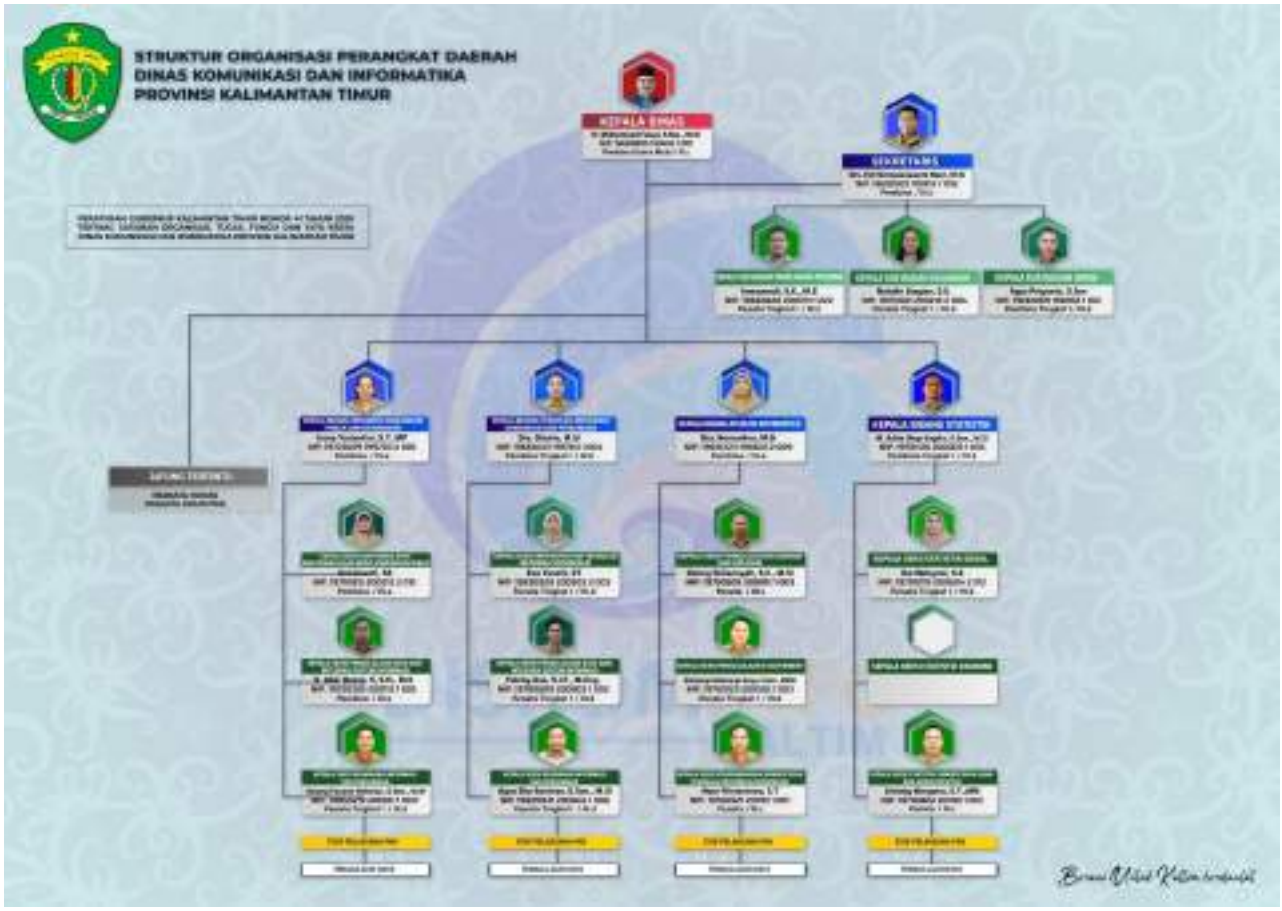

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan Bidang Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.

c. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan.
d. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian.
e. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Aplikasi Informatika.
f. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Statistik.
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian, Aplikasi Informatika dan Statistik.
h. Pelaksanaan administrasi Dinas Kominfo sesuai dengan lingkup tugasnya. Dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretaris Dinas mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset., dengan dibantu:

a. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat..
c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, dengan dibantu:

1. Seksi Monitoring Opini dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi monitoring opini dan pengelolaan media komunikasi publik.;
2. Seksi Pelayanan Informasi dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi pelayanan informasi dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.;
3. Seksi Kemitraan Media Komunikasi Publik, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi kemitraan media komunikasi publik.

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian, dengan dibantu:

1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi infrastruktur teknologi informasi komunikasi;

2. Seksi Pengelolaan Data dan Intergrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian yang meliputi pengelolaan data dan integrasi sistem informasi
3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian yang meliputi keamanan informasi dan persandian.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Aplikasi Informatika., dengan dibantu:

1. Seksi Pengelolaan Domain dan Aplikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pengelolaan domain dan aplikasi.
2. Seksi Pengelolaan *e-Government* mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pengelolaan e-government;
3. Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi.

Kepala Bidang Statistik, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,

pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis bidang Statistik, dengan dibantu:

1. Seksi Statistik Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis Statistik Sosial;
2. Seksi Statistik Ekonomi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis Statistik Ekonomi;
3. Seksi Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di dukung oleh 113 orang pegawai terdiri dari 51 orang Pegawai Negeri Sipil dan 62 orang Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Kontrak) yang ditempatkan di semua Bidang-Bidang. Untuk 51 Orang PNS berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut:

Tabel 2.3

Data Aparatur Dinas Kominfo Provinsi Kaltim Tahun 2023

No	Jabatan	Pangkat / Golongan	Pendidikan	JENIS KELAMIN	
				Laki2	Perempuan
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda/ IV-c	S2	1	
2	Sekretaris	Pembina Tk. I/ IV-b	S2	1	
3	Kepala Bidang	Pembina Tk. I/ IV-b	S2	2	

		Pembina/ IV-a	S2		2
4	Kepala Sub Bagian	Penata Tk. I/ III-d	S2	1	
		Penata Tk. I/ III-d	S1	1	
		Penata / III-c	S2		
		Penata / III-c	S1		1
5	Kepala Seksi	Pembina Tk. I/ IV-b	S1		
		Pembina/ IV-a	S2	1	
		Penata Tk. I/ III-d	S2	4	1
		Penata Tk. I/ III-d	S1	1	2
		Penata / III-c	S2	1	1
		Penata / III-c	S1		
6	Staf	Pembina Tk. I/ IV-b	S1		
		Penata Tk. I / IV-a	S2		
		Penata Tk. I / III-d	S1	1	
		Penata /III-c	S2	1	
		Penata /III-c	S1	2	
		Penata Muda Tk.I/ III-b	S2	1	
		Penata Muda Tk.I/ III-b	S1	4	1
		Penata Muda Tk.I/ III-b	D3		2
		Penata Muda Tk.I/ III-b	SMA	3	1
		Penata Muda/ III-a	S1		1

		Penata Muda/ III-a	D3	1	
		Penata Muda/ III-a	SLTA	2	1
		Pengatur Tk. I/ II-d	D3		
		Pengatur Tk. I/ II-d	SLTA	3	
		Pengatur/ II-c	D3	1	1
		Pengatur/ II-c	SLTA	1	2
		Pengatur Muda Tk. I/ II-b	SLTA	2	
		Pengatur Muda/ II-a	SMA		
		Pengatur Muda/ II-a	SLTP		
		Pengatur Muda/ II-a	SD		
		Total	51	35	16

Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun Perjanjian Kinerja yang memuat Indikator kinerja yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi, berikut dijabarkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
Tabel T-C.30

No	Indikator	SPM/Standar nasional	ikk	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2) 2021	Tahun 2023 (thn n-1) 2022	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1) 2024	Tahun 2023 (thn n-2) 2021	Tahun 2023 (thn n-1) 2022	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1) 2024	
1	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan dan Infrastruktur SPBE yang terintegrasi		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.2 Indeks	3.2 Indeks	3.2 Indeks			Rp. 103.501.500	Rp. 110.501.500		
2	Melaksanakan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat Kematangan Penerapan SPBE berdasarkan 35 Indikator SPBE	3.03 Indeks SPBE	3.03 Indeks SPBE	3.03 Indeks SPBE			Rp. 288.008.000	Rp. 388.008.000		
5	Melaksanakan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Tingkat Penerapan SPBE berdasarkan Rencana Induk	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			Rp. 126.537.500	Rp. 106.537.500		
	Melaksanakan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Dokumen Arsitektur SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			Rp. 329.056.000	Rp. 409.056.000		

9	**Terselenggaranya Seminar, Kegitan, Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**		**Jumlah Seminar**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**			**Rp. 346.034.000**	**Rp. 446.034.000**		
10	**Terselenggaranya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik**		**Jumlah Laporan Aspirasi Etam** **Jumlah Kegiatan Sosialisasi**	**10 Laporan**	**10 Laporan**	**10 Laporan**			**Rp. 171.900.000**	**Rp. 201.900.000**		
11	**Terselenggaranya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah**		**Jumlah Seminar**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**			**Rp. 146.970.000**	**Rp. 156.970.000**		
12	**Terkelolanya Media Komunikasi Publik**		**Jumlah Berita** **Jumlah Kegiatan Kreatif Media** **Jumlah Isu Publik**	**1000 Berita** **1 Kegiatan** **10 Laporan**	**1000 Berita** **1 Kegiatan** **10 Laporan**	**1000 Berita** **1 Kegiatan** **10 Laporan**			**Rp. 241.972.000**	**Rp. 241.972.000**		
13	**Meningkatkan Layanan Hubungan Media**		**Jumlah Kegiatan Pemantauan Isu Publik dan Seminar Anti Hoax**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**			**Rp.146.640.000**	**Rp.146.640.000**		
14	**Tersedianya jumlah data pembangunan daerah yang akurat dan kredibel berdasarkan data statistic sosial**		**Data Statistik Sosial**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**			**Rp. 115.200.000**	**Rp. 115.200.000**		
15	**Tersedianya jumlah data pembangunan daerah statistic ekonomi**		**Data Statistik Ekonomi**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**			**Rp. 244.727.00**	**Rp. 244.727.00**		
16	**Tersedianya jumlah data pembangunan daerah yang akurat**		**Data Statistik SDA dan infrastruktur**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**			**Rp. 222.293.000**	**Rp. 222.293.000**		

	dan kredibel berdasarkan data statistik SDA dan infrastruktur											
17	**Meningkatkan Jumlah hosting, co. location, cloud computing pada data center**		**Jumlah hosting aplikasi/website yang ditempatkan di data center**	**5 Aplikasi**	**5 Aplikasi**	**5 Aplikasi**			**Rp. 2.502.904.000**	**Rp. 2.502.904.000**		
18	**Terhubungnya perangkat daerah dan distribusi Bandwidth dalam simpul jaringan TIK**		**Jumlah OPD yang terhubung dalam jaringan intra Pemerintah**	**18 PD**	**18 PD**	**18 PD**			**Rp. 84.743.000**	**Rp. 84.743.000**		
19	**Pengelolaan data dan informasi elektronik yang terkoordinir dan tersinkronisassi**		**Presentase perangkat Daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data**	**30% PD**	**30% PD**	**30% PD**			**Rp. 55.892.500**	**Rp. 55.892.500**		
20	**Sistem penghubung layanan yang terselenggara dengan baik**		**Presentase layanan public dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan system penghubung layanan Pemerintah**	**30% Layanan**	**30% Layanan**	**30% Layanan**			**Rp. 167.620.000**	**Rp. 107.620.000**		
21	**Meningkatkan layanan monitoring trafik data keamanan informasi**		**Jumlah OPD yang di monitor keamanan dan aktivitasinya pada NOC Diskominfo Prov. Kaltim**	**5 OPD**	**5 OPD**	**5 OPD**			**Rp. 2.655.305.900**	**Rp. 3.655.305.900**		
22	**Meningkatkan keamanan informasi pada data center kominfo Prov. Kaltim**		**Jumlah laporan keamanan informasi pada data center kominfo**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**2 Laporan**			**Rp. 373.086.000**	**Rp. 373.086.000**		
23	**Meningkatkan Pelayanan komunikasi intra pemerintah yang secure**		**Jumlah laporan terkait pelaksanaan kegiatan Data Center**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**			**Rp. 346.034.000**	**Rp. 346.034.000**		
24	**Meningkatkan Penanganan insiden keamanan informasi**		**Jumlah laporan kab/kota yang di audit**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**			**Rp. 171.900.000**	**Rp. 171.900.000**		

			terkait keamanan informasinya									

Adapun pencapaian urusan bidang Kominfo tahun 2021 dalam upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi secara cepat, tepat, akurat dan terpercaya sesuai kebutuhan masyarakat, maka dalam Tahun 2021 dilaksanakan kegiatan:

1. Penyediaan jaringan layanan informasi yaitu
    - Sewa bandwith teresterial
    - Sewa Link Fiber Optic
2. Media Center merupakan tempat untuk mengolah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Sosial;
3. Pada tahun 2021 untuk publikasi dilaksanakan pembuatan leaflet, baliho, dan spanduk.
4. Dalam rangka mempublikasikan informasi tentang pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2021 Diskominfo Provinsi Kaltim secara berkesinambungan melakukan kerjasama dengan TVRI Kalimantan Timur dan RRI Samarinda.Acara dialog interaktif di TVRI dilakukan setiap hari Rabu sedangkan untuk RRI setiap hari Selasa dengan nara sumber dari OPD dilingkungan Pemprov. Kaltim, Akademisi, LSM, DPRD dan Tokoh Masyarakat.
5. Pada tahun 2021 setiap Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara rutin dilakukan pendokumentasian.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim direncanakan berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan pameran yang digunakan sebagai sarana publikasi baik kegiatan Dinas Kominfo Prov. Kaltim sendiri maupun capaian pembangunan secara keseluruhan. Di tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim yaitu 2 kegiatan pameran di dalam daerah).

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Adapun isu strategis pada Dinas Kominfo Prov. Kaltim sebagai berikut:

a. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi (e-Government) dalam urusan Pemerintahan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
b. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Kalimantan Timur akan informasi pembangunan daerah
c. Blankspot yang masih terjadi di beberapa daerah pada provinsi Kalimantan Timur dikarenakan minimnya infrastruktur telekomunikasi

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengurusi urusan wajib bukan pelayanan dasar. Tugas Pokok yang dibebankan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kaltim tahun 2019-2023 yang akan ditetapkan.

Infrastruktur dasar merupakan fasilitas dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.Dengan hal ini infrastruktur dasar merupakan kebutuhan dasar untuk masyarakat Provinsi KalimantanTimur dapat melakukan aktivitas kehidupan dengan baik dan layak.Melihat pentingnya insfrastruktur dasar maka hal ini sangat mempengaruhi kehidupan,salah satunya dapat terkait dengan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur dasar sering dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur seperti telekomunikasi merupakanaspek-aspek penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat KalimantanTimur.

Untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik,maka penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan dengan keterbukaan,akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, dengan meningkatkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang menunjang kegiatan pemerintah daerah dapat diukur dengan jumlah interoperabilitas sistem informasi.

Program-program pembangunan ini harus dilaksanakan secara konsisten agar mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam menetapkan program-program ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur membuat skala prioritas atau bertahap dengan memperhatikan urusan wajib dan urusan pilihan serta mempertimbangkan kondisi faktual isu-isu strategis di daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar dapat memberikan akses layanan informasi dan komunikasi untuk kebutuhan publik secara tepat, cepat, efisien dan efektif serta sinergis dengan perkembangan teknologi yang tersedia.

Di tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur mempunyai sasaran dalam mempercepat dan meningkatkan pelayan publik, hal utama yang akan dilaksanakan sesuai

dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur diantaranya pengembangan infrsatruktur TIK dan interoperabilitas aplikasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah provinsi dalam hal pelayanan publik. Disamping itu tidak kalah pentingnya adalah pengembangan akses telekomunikasi didaerah perbatasan, pedalaman, dan daerah tertinggal.

Untuk melaksanakan misi *Good Governance*, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat perlu diakomodir dengan mempermudah akses terhadap informasi publik dengan membuat dan mengembangkan akses sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudahan dan wajar.Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, bahwa setiap Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah.

Selain itu terdapat beberapa masalah yang terjadi di masyarakat yaitu:

a. Penduduk yang tinggal di daerah terpencil umumnya berlatar belakang pendidikan kurang memadai;
b. Pola pikir sederhana,umumnya sibuk bertani;
c. Kurang kesempatan memperoleh pendidikan karena tidak tersedianya lembaga pendidikan yang memadai di desanya;
d. Kurangnya Informasi sebagai akibat terjangkaunya desa mereka oleh jaringan layanan informasi.

Tabel **Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur**

Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai mana tertera dalam tabel berikut ini:

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur

Tabel T-C.31

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
2	16				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**60.143.532.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					
2	16	02			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**		Jumlah diseminasi informasi program dan kebijakan pembangunan pemerintah daerah melalui media komunikasi publik	80%	**14.100.933.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**		Jumlah diseminasi informasi program dan kebijakan pembangunan pemerintah daerah melalui media			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
												komunikasi publik			
2	16	02	1.01		**Pengelolaan dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**		Jumlah dokumen pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi	1 Dokumen	**14.100.933.000**	**Pengelolaan dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**		Jumlah dokumen pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi			
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	1 Dokumen	299.040.000	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik			
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten/ Kota,Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	550.944.000	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten/Kota,Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			
2	16	02	1.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi	1 Dokumen	399.834.000	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Monitoring Informasi			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Pemerintah Daerah		Komunikasi Pemerintah Daerah			Komunikasi Komunikasi Pemerintah Daerah		dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Komunikasi Pemerintah Daerah			
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	1 Dokumen	650.000.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media			
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	2.707.125.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	4.550.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik			
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	500.000.000	Layanan Hubungan Media	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Layanan Hubungan Media			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	16	02	1.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1.000.000.000	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			
2	16	02	1.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	243.990.000	Manajemen Komunikasi Krisis	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis			
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunitas Publik	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	45 Orang	300.000.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunitas Publik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya			
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	2.000.000.000	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaran Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	1 Dokumen	900.000.000	Penyelenggaran Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
												mendiseminasikan informasi program atau kebijakan			
2	16	03			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**		Presentase peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	70%	13.147.814.120	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**		Presentase peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi			
2	16	03	1.01		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	6.167.644.120	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan	Kabupaten/ Kota,	Jumlah Penatalaksanaan dan Pengawasan	1 Dokumen	2.000.010.720	Penatalaksanaan dan Pengawasan	Kabupaten/Kota,	Jumlah Penatalaksanaan dan			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kecamatan, Kelurahan.	Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi			Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kecamatan, Kelurahan.	Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi			
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	38 Unit	4.167.633.400	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			
2	16	03	1.02		**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**		jumlah presentase implementasi e-government yang dilaksanakan	70%	6.980.170.000	**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**		jumlah presentase implementasi e-government yang dilaksanakan			
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1.088.784.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
												Provinsi			
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	1.010.944.500	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik			
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	20 Unit	2.294.070.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola			
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	487.321.000	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah			
2	16	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kabupaten/ Kota Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	281.444.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kabupaten/Kota Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
												Informasi			
2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kabupaten/ Kota Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	22 Perangkat Daerah	484.960.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kabupaten/Kota Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik			
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronikyang dikembangkan	1 Unit		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronikyang dikembangkan			
2	16	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	jumlah layanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	1 Layanan	432.640.000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	jumlah layanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah			
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya	Kabupaten/ Kota,	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan	1 Dokumen	900.006.500	Pengembangan dan Pengelolaan	Kabupaten/Kota,	Jumlah dokumen pelaksanaan			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kecamatan, Kelurahan.	Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kecamatan, Kelurahan.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
2	20				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**		Jumlah Elemen Data Statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur	Presentase Ketersedian data 50%	3.999.950.000	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**		Jumlah Elemen Data Statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur			
2	20	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Presentase elemen data statistik sektoral di lingkup ekonomi, sosial, sumber daya alam, dan infrastruktur	70%	3.999.950.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Presentase elemen data statistik sektoral di lingkup ekonomi, sosial,			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
												sumber daya alam, dan infrastruktur			
2	20	02	1.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Di Lingkup Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur	70%	3.999.950.000	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Di Lingkup Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur			
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	549.995.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			
2	20	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	12 Orang	249.984.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
												daerah yang terintegrasi			
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	1 Dokumen	699.988.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun			
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	100 Orang	849.996.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS			
2	20	02	1.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	1.649.986.500	Pengembangan Infrastruktur	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Infrastruktur Statistik			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**		Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	III Indeks	1.851.910.500	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**		Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Indeks keamanan informasi pemerintah (indeks KAMI)	III Indeks	1.851.910.500	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Indeks keamanan informasi pemerintah (indeks KAMI)			
2	**21**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Meningkatnya tingkat keamanan informasi pemerintah	27 perangkat daerah	1.536.313.000	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Meningkatnya tingkat keamanan informasi pemerintah			
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang ditetapkan	1 Dokumen	349.490.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang ditetapkan			
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	276.672.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Pemerintah Daerah Provinsi					Daerah Provinsi		Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	jumlah laporan pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	512.051.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	jumlah laporan pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	27 Perangkat Daerah	398.100.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi			
2	**21**	**02**	**1.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**	**Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Meningkatnya pemanfaatan jaring komunikasi sandi untuk pengamanan informasi publik yang dikecualikan**	**1 Kegiatan**	**315.597.500**	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**	**Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Meningkatnya pemanfaatan jaring komunikasi sandi untuk pengamanan informasi publik yang**			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
												dikecualikan			
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	27 Perangkat Daerah	315.597.500	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi			
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**		**Presentase terlaksananya penunjang urusan daerah**	**100%**	**27.042.924.380**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**		**Presentase terlaksananya penunjang urusan daerah**			
2	**16**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan sesuai dengan pedoman**	**12 Dokumen**	**460.780.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan sesuai dengan pedoman**			
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	2 Laporan	272.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	187.980.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	**16**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Terwujudnya tertib administrasi keuangan**	**12 Bulan**	**12.119.774.815**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Terwujudnya tertib administrasi keuangan**			
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 orang / Bulan	11.067.624.815	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200 Dokumen	1.052.150.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	**16**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Terwujudnya tertib administrasi BMD pada SKPD**	**12 Bulan**	**5.950.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Terwujudnya tertib administrasi BMD pada SKPD**			
2	16	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.950.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
2	**16**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Meningkatnya Sumber Daya Aparatur**	**124 Orang**	**235.500.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Meningkatnya Sumber Daya Aparatur**			
2	16	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	187.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			
2	16	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	48.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	**16**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daaerah**		**Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah**	**12 Bulan**	**1.926.991.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daaerah**		**Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah**			
2	16	01	1.06	01	Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	14.335.000	Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	25.320.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			
2	16	01	1.06	05	Penyedian Barang Cetakan dan Pengadaan	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan	1 Paket	91.392.000	Penyedian Barang Cetakan dan Pengadaan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan			
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1.795.944.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
												Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
2	**16**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Terpenuhinya fasilitas penunjang kegiatan kantor**	**1 Perangkat Daerah**	**7.986.946.037**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Terpenuhinya fasilitas penunjang kegiatan kantor**			
2	16	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	760.430.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	166.640.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	2.065.851.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
2	16	01	1.07	09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	4.994.025.037	**Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya**	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
												lainnya yang disediakan			
2	**16**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Terwujudnya jasa penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**3.507.387.528**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Terwujudnya jasa penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	12.040.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangdisediakan	2 Laporan	375.690.008	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangdisediakan			
2	16	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Laporan	171.150.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.948.507.520	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
2	**16**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung dan prasarana pendukung gedung kantor**	**12 Bulan**	**799.595.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung dan prasarana pendukung gedung kantor**			
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	271.187.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	199.408.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
2	16	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	329.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Untuk melaksanakan misi *Good Governance*, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat perlu diakomodir dengan mempermudah akses terhadap informasi publik dengan membuat dan mengembangkan akses sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudahan dan wajar.Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, bahwa setiap Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah.

Selain itu terdapat beberapa masalah yang terjadi di masyarakat yaitu:

e. Penduduk yang tinggal di daerah terpencil umumnya berlatar belakang pendidikan kurang memadai;
f. Pola pikir sederhana,umumnya sibuk bertani;
g. Kurang kesempatan memperoleh pendidikan karena tidak tersedianya lembaga pendidikan yang memadai di desanya;
h. Kurangnya Informasi sebagai akibat terjangkaunya desa mereka oleh jaringan layanan informasi.

Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat wilayah Kalimantan Timur adalah kurangnya informasi akibat kurang terjangkaunya daerah-daerah tersebut dengan fasilitas informasi yang ada.Wilayah Kalimantan Timur yang sebagian besar merupakan pengunungan yang tertutup oleh hutan lebat.Kondisi ini tentunya menimbulkan masalah dalam penyelenggara telekomunikasi dan telematika bila sarana yang digunakan menggunakan frekuensi radio. Sinyal frekuensi radio tidak bisa menembus bukit atau hutan yang lebat. Dampak dari hal ini adalah banyaknya daerah yang tidak bisa menerima sinyal (*blank spot*).

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi “corong” terdepan dalam memberikan kualitas informasi yang cepat, tepat, dan akurat mengharuskan bekerja sama dengan instansi terkait seperti TVRI, RRI, dan lembaga penyiaran lainnya. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas diharapkan bukan lagi dalam artian terbatas pada lingkup Pemerintah Provinsi akan tetapi menjangkau seluruh elemen pembangunan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Diharapkan informasi mengenai stabilitas sosial, politik, dan kemanan; peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah; serta kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan dapat disebarkan kepada masyarakat secara luas sehingga kebutuhan dan tindak lanjut dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk tahun 2022. Adapun rencana program yang dimaksud sesuai dengan RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2022 diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		**Jumlah diseminasi informasi program dan kebijakan pembangunan pemerintah daerah melalui media komunikasi publik**	**80%**	
	Pengelolaan dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		**Jumlah dokumen pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi**	**1 Dokumen**	
	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	1 Dokumen	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten/Kota,Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	
	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas	1 Dokumen	

			Komunikasi Komunikasi Pemerintah Daerah		
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	1 Dokumen	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	
	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	
	Layanan Hubungan Media	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	
	Manajemen Komunikasi Krisis	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunitas Publik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	45 Orang	
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	
	Penyelenggaran Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	1 Dokumen	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		**Presentase peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi**	**70%**	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	**Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Jumlah laporan pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**1 Laporan**	

	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	38 Unit	
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		jumlah presentase implementasi e-government yang dilaksanakan	70%	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	20 Unit	
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kabupaten/Kota Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kabupaten/Kota Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	22 Perangkat Daerah	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronikyang dikembangkan	1 Unit	
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	jumlah layanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	1 Layanan	

	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		**Jumlah Elemen Data Statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur**	**Presentase Ketersedian data 50%**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Presentase elemen data statistik sektoral di lingkup ekonomi, sosial, sumber daya alam, dan infrastruktur**	**70%**	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Di Lingkup Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur	70%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	12 Orang	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	1 Dokumen	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	100 Orang	
	Pengembangan Infrastruktur	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		**Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)**	**III Indeks**	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Indeks keamanan informasi pemerintah (indeks KAMI)**	**III Indeks**	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	**Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Meningkatnya tingkat keamanan informasi pemerintah**	**27 perangkat daerah**	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang ditetapkan	1 Dokumen	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	jumlah laporan pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	27 Perangkat Daerah	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	**Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Meningkatnya pemanfaatan jaring komunikasi sandi untuk pengamanan informasi publik yang dikecualikan**	**1 Kegiatan**	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	27 Perangkat Daerah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		**Presentase terlaksananya penunjang urusan daerah**	**100%**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen perencanaan sesuai dengan pedoman**	**12 Dokumen**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Terwujudnya tertib administrasi keuangan**	**12 Bulan**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 orang / Bulan	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Terwujudnya tertib administrasi BMD pada SKPD**	**12 Bulan**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Meningkatnya Sumber Daya Aparatur**	**124 Orang**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daaerah		**Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah**	**12 Bulan**	
	Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	

	Penyedian Barang Cetakan dan Pengadaan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan	1 Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Terpenuhinya fasilitas penunjang kegiatan kantor**	**1 Perangkat Daerah**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	
	Pengadaan Mebel	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	**Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan**	**1 Unit**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Terwujudnya jasa penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangdisediakan	2 Laporan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung dan prasarana pendukung gedung kantor**	**12 Bulan**	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipandang sebagai suatu sistem yang tugas dan fungsinya dilakukan oleh beberapa subsistem yang masing-masing dilaksanakan oleh satu PD. Seluruh PD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saling berinteraksi dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Seringkali informasi keluaran dari suatu PD akan diolah lebih lanjut oleh PD lainnya untuk menghasilkan informasi yang strategis, sehingga dengan demikian, aliran informasi dari satu PD ke PD lainnya harus dapat dijamin terlaksananya serta kebenarannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan perangkat Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung tugas keseharian pemerintahan sudah menjadi suatu kebutuhan. Dalam mewujudkan pembangunan/ pengembangan TIK yang terintegrasi maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bermaksud untuk melakukan sinergi implementasi TIK dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang terkandung didalamnya dengan tujuan agar:

a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sistem pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.
b. Menciptakan transparansi terhadap sistem pemerintahan kepada masyarakat serta mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan di Kaltim.
c. Mengurangi kesenjangan informasi di segenap lapisan masyarakat Kalimantan Timur.

Selain aspek-aspek di atas, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini dan ke depan adalah:

1. Kebijakan dan perundang-undangan.

   Permasalahan yang terjadi saat ini adalah pengaturan / regulasi di bidang komunikasi dan informatika masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi. Pengaturan di bidang penyiaran dilakukan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pengaturan di bidang telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Demikian halnya pengaturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan pengaturan mengenai Informasi Publik dilakukan berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sedangkan pengaturan mengenai Pos dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 kemudian sejak tanggal 14 Oktober 2009 telah diberlakukan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.
2. Masalah Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

   Beberapa permasalahan birokrasi saat ini di antaranya adalah belum terbangunnya budaya kerja yang kuat, belum berfungsinya pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan secara maksimal dan masih lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, sehingga secara keseluruhan kondisi tersebut mempengaruhi capaian kinerja yang kurang optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara menyeluruh, yang antara lain dapat ditempuh melalui reformasi birokrasi yang meliputi restrukturisasi kelembagaan, peningkatan kualitas SDM dan remunerasi.
3. Teknologi.

   Sebagai sebuah *general purpose technology*, khususnya teknologi informasi dan komunikasi dapat dipergunakan dalam banyak

bidang dan untuk memenuhi banyak macam kebutuhan. Walaupun begitu teknologi informasi sebenarnya memainkan peran fundamental yang sangat sederhana, yaitu:

a. Menyediakan akses dan mengorganisasikan data, informasi dan pengetahuan dalam jumlah besar dengan kecepatan menakjubkan dan aman.
b. Mempercepat dan mereduksi biaya transaksi dan produksi seluruh kegiatan perekonomian.
c. Membentuk hubungan langsung antar manusia, komunitas, perusahaan, pemerintah, dan organisasi pada umumnya.

Mengingat pentingnya peranan tekhnologi informasi dan komunikasi sebagaimana tersebut di atas, maka infrastruktur komunikasi dan informatika sebagai infrastruktur dasar bagi masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan bangsanya, mutlak harus dibangun dan disediakan oleh negara dengan melibatkan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya, karena di masa depan. informasi tidak lagi menjadi domain negara, tetapi juga merupakan domain publik yang dapat dibuat dan diakses oleh setiap anggota masyarakat. Keterlibatan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi disparitas ketersediaan infrastruktur antara perkotaan dan perdesaan, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia yang masih besar.

4. Informasi dan edukasi/*e-literacy*.

   Belum optimalnya upaya pelayanan informasi publik untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat terhadap informasi publik mengakibatkan adanya kesenjangan kemampuan akses masyarakat terhadap informasi, sehingga menimbulkan permasalahan dalam hal keadilan dan kesempatan untuk mengembangkan potensi masyarakat secara individual.

Adanya ketidakjelasan pembatasan informasi publik dan yang bukan informasi publik, menimbulkan permasalahan mengenai hak masyarakat atas informasi pemerintah dan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat serta perlindungan rahasia negara, yang antara lain juga disebabkan oleh belum disadarinya sekuritas informasi oleh institusi/lembaga penyedia informasi.

5. Pasar, Pelaku Usaha dan Masalah *Software* Ilegal/Bajakan.Perkembangan TIK terjadi sangat pesat dan cepat berubah sehingga membuat suatu perangkat teknologi informasi dan komunikasi menjadi cepat usang. Di Indonesia kemampuan untuk memproduksi perangkat TIK relatif sangat rendah sehingga mengakibatkan sifat ketergantungan dalam memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut memposisikan Indonesia sebagai Negara yang banyak mengimpor perangkat/produk industri di bidang TIK dimana ditinjau dari segi harga relatif menjadi lebih mahal. Kondisi sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kecenderungan terjadinya penggunaan perangkat TIK (software) bajakan yang cukup besar dan berdampak pada sistem industri dan perekonomian dalam negeri. Terjadinya pembajakan software yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut menunjukkan bahwa masih lemahnya fungsi pengawasan terhadap aktivitas pemasaran perangkat TIK produk bajakan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, diperlukannya kebijakan yang berorientasi pada objek sasaran yang akan di capai. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

a. Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang menunjang kegiatan pemerintah daerah.
b. Terwujudnya keterbukaan informasi dengan meningkatkan sistem, metode, dan mutu penyebarluasan serta pelayanan informasi kepada masyarakat.
c. Tersedianya infrastruktur bidang Komunikasi dan Informasi dalam pemenuhan kebutuhan akses informasi kepada masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Agar tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur diperlukan adanya tindakan nyata berupa program dan kegiatan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Untuk tahun 2021 kegiatan yang diusulkan meliputi 5 program, 14 kegiatan dan 58 sub kegiatan yaitu:

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
    1.1. Pengelolaan Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
        1.1.1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
        1.1.2. Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik
        1.1.3. Monitoring Informasi Dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Komunikasi Pemerintah Daerah
        1.1.4. Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media
        1.1.5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
        1.1.6. Pelayanan Informasi Publik
        1.1.7. Layanan Hubungan Media
        1.1.8. Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
        1.1.9. Manajemen Komunikasi Krisis
        1.1.10. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunitas Publik
        1.1.11. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah

1.1.12. Penyelenggaran Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

2.1. Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

2.1.1. Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi

2.1.2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

2.2. Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah

2.2.1. Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi

2.2.2. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik

2.2.3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

2.2.4. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

2.2.5. Koordinasi Dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi

2.2.6. Koordinasi Dan Sinkronisasi Data Dan Informasi Elektronik

2.2.7. Pengembangan Aplikas Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

2.2.8. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

2.2.9. Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
   3.1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Provinsi
      3.1.1. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
      3.1.2. Peningkatan Kapasitas Sdm Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi
      3.1.3. Membangun Metadata Statistik Sektoral
      3.1.4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
      3.1.5. Pengembangan Infrastruktur
      3.1.6. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Di Daerah
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
   4.1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
      4.1.1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
      4.1.2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
      4.1.3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik
      4.1.4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

4.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi

4.2.1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

5.1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

5.1.2. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

5.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

5.2.1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn

5.3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

5.3.1. Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd

5.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

5.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

5.5. Administrasi Umum Perangkat Daaerah

5.5.1. Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.5.2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

5.5.3. Penyedian Barang Cetakan Dan Pengadaan

5.5.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd

5.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5.6.1. Pengadaan Mebel

5.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

5.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

5.7.3. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

5.7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan

5.8.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NAMA PERANGKAT DAERAH : DISKOMINFO

No					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)					(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					APBD			
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				95.604.788.805	APBD			
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Jumlah diseminasi informasi program dan kebijakan	80%	37,706,837,500	APBD			4,250,000,000

							pembangunan pemerintah daerah melalui media komunikasi publik						
2	**16**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**		**Jumlah diseminasi informasi program dan kebijakan pembangunan pemerintah daerah melalui media**	**80%**	**37,706,837,500**	**APBD**		**1 Dokumen**	**4,250,000,000**
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	1 Dokumen	299,040,000	APBD		1 Dokumen	300.000.000
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten/Kota,Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	887,860,400	APBD		1 Dokumen	550.000.000
2	16	02	1.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	447,028,000	APBD		1 Dokumen	400.000.000
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	1 Dokumen	3.717.120.300	APBD		1 Dokumen	650.000.000
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pengelolaan	1 Dokumen	17.714.511.500	APBD		1 Dokumen	4.000.000.000

							Media Komunikasi Publik						
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	7,550,000,000	APBD		1 Dokumen	4.200.000.000
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	430,000,000	APBD		1 Layanan	500.000.000
2	16	02	1.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1.356.541.000	APBD		1 Dokumen	1.100.000.000
2	16	02	1.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	261,734,300	APBD		1 Dokumen	250.000.000
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunitas Publik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	45 Orang	340,000,000	APBD		45 Orang	350.000.000
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	2,000,000,000	APBD		1 Dokumen	1.000.000.000
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaran Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	1 Dokumen	2,703,002,000	APBD		1 Dokumen	950.000.000
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**		**Presentase peningkatan pemanfaatan teknologi**	**85%**	**19,579,510,680**	**APBD**		**85%**	**10.800.000.001**

							informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi						
2	16	03	1.01		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Jumlah Persentase Layanan domain**	**80%**	**7,043,814,000.00**	**APBD**		**1 Laporan**	**3,500,000,000**
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1,641,111,500	APBD		1 Dokumen	2.000.000.000
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	38 Unit	5,402,702,500	APBD		38 Unit	1.500.000.000
2	16	03	1.02		**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**		jumlah presentase implementasi e-government yang dilaksanakan	**70%**	**12,535,696,680**	**APBD**		**70%**	**7.300.000.001**
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1,978,426,000	APBD		1 Dokumen	700.000.000
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Sinkronisasi Pengelolaan	1 Dokumen	789,323,000	APBD		1 Dokumen	700.000.000

					Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik						
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	20 Unit	3,789,996,080	APBD		20 Unit	1.000.000.001
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	437,996,800	APBD		1 Dokumen	1.000.000.000
2	16	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kabupaten/Kota Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	134,492,500	APBD		1 Dokumen	1.000.000.000
2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kabupaten/Kota Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	22 Perangkat Daerah	660,237,000	APBD		22 Perangkat Daerah	1.000.000.000
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronikyang dikembangkan	1 Unit		APBD		1 Unit	
2	16	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah layanan 1410ublic yang terhubung dengan sistem penghubung	1 Layanan	365.944.800	APBD		1 Layanan	1.000.000.000

							layanan pemerintah daerah						
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 laporan	4,379,280,500	APBD		1 Dokumen	900.000.000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					APBD			
2	20				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**		**Jumlah Elemen Data Statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur**	**Presentase Ketersedian data 50%**	**3,801,721,068**	**APBD**		**Presentase Ketersedian data 50%**	**3,000,000,000**
2	20	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Presentase elemen data statistik sektoral di lingkup ekonomi, sosial, sumber daya alam, dan infrastruktur**	**70%**	**3,801,721,068**	**APBD**		**70%**	**3,000,000,000**
2	20	02	1.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	**Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Di Lingkup Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur**	**70%**	**3,801,721,068**	**APBD**		**70%**	**3,000,000,000**
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan,	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Dokumen	520,207,500	APBD		1 Dokumen	550.000.000

					Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral						
2	20	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	16 Orang	286,080,000	APBD		12 Orang	250.000.000
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	1 Dokumen	942,418,668	APBD		1 Dokumen	700.000.000
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	100 Orang	751,776,500	APBD		100 Orang	600.000.000
2	20	02	1.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	1,301,238,400	APBD		1 Unit	900.000.000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					APBD			
2	21				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**		**Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)**	**III Indeks**	**1,458,486,750**	**APBD**		**III Indeks**	**5.000.000.000**
2	21	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Indeks keamanan informasi pemerintah (indeks KAMI)**	**10 Indeks**	**1,458,486,750**	**APBD**		**10 Indeks**	**5.000.000.000**
2	21	02	1.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk**	**Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Meningkatnya tingkat keamanan**	**27 perangkat daerah**	**1,206,955,550**	**APBD**		**27 perangkat daerah**	**4,000,000,000**

					Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		**informasi pemerintah**						
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang ditetapkan	1 Dokumen	89,560,000	APBD		1 Dokumen	1.000.000.000
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	406,561,300	APBD		1 Laporan	1.000.000.000
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	470,704,250	APBD		1 Laporan	1.000.000.000
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	27 Perangkat Daerah	240,130,000	APBD		27 Perangkat Daerah	1.000.000.000
2	21	02	1.02		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**	**Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Meningkatnya pemanfaatan jaring komunikasi sandi untuk pengamanan**	**1 Kegiatan**	**251,531,200**	**APBD**		**1 Kegiatan**	**1.000.000.000**

							informasi publik yang dikecualikan						
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	27 Perangkat Daerah	251,531,200	APBD		27 Perangkat Daerah	1.000.000.000
2	16	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**		Presentase terlaksananya penunjang urusan daerah	100%	**33,128.432.807**	**APBD**		**100%**	**21,007,736,000**
2	16	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Jumlah dokumen perencanaan sesuai dengan pedoman	12 Dokumen	401,661,000	APBD		12 Dokumen	
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	10.000.000
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	119,900,000	APBD		2 Laporan	290.000.000
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	281,761,000	APBD		5 Laporan	200.000.000
2	16	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Terwujudnya tertib administrasi keuangan**	**12 Bulan**	**12,397.922.412**	**APBD**		**12 Bulan**	

2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 orang / Bulan	11,526,942,412	APBD		53 orang / Bulan	11.067.615.682
2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200 Dokumen	870,980,000	APBD		200 Dokumen	500.000.000
2	16	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Terwujudnya tertib administrasi BMD pada SKPD**	**12 Bulan**	**0**	**APBD**		**12 Bulan**	
2	16	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	APBD		12 Laporan	10.000.000
2	16	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Meningkatnya Sumber Daya Aparatur**	**124 Orang**	**514,021,000**	**APBD**		**124 Orang**	**350.000.000**
2	16	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	295,071,000	APBD		1 Paket	300.000.000
2	16	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	218,950,000	APBD		20 Orang	50.000.000
2	16	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daaerah**		**Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah**	**12 Bulan**	**1,741.633.815.**	**APBD**		**12 Bulan**	**1.785.000.000**
2	16	01	1.06	01	Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket komponen instalasi listrik/peneranga	1 Paket	19,370,800	APBD		1 Paket	15.000.000

							n bangunan kantor yang disediakan						
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	103.595.300	APBD		1 paket	20.000.000
2	16	01	1.06	05	Penyedian Barang Cetakan dan Pengadaan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan	4 Paket	129,713,200	APBD		1 Paket	50.000.000
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,488,954,515	APBD		2 Laporan	1.700.000.000
2	**16**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Terpenuhinya fasilitas penunjang kegiatan kantor**	**1 Perangkat Daerah**	**12,716,613,200**	**APBD**		**1 Perangkat Daerah**	**1,963,120,318**
2	16	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	900,513,500	APBD		2 Unit	500.000.000
2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	665,972,500	APBD		1 Paket	114.312.159
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	8,181,377,200	APBD		20 Unit	1.234.496.000
2	16	01	1.07	09	Pengadaan 1416edung kantor atau bangunan lainnya	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	2,968,750,000	APBD		1 Unit	114.312.159
2	**16**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Terwujudnya jasa penyedian Jasa Penunjang**	**12 Bulan**	**4.488.257.080**	**APBD**		**12 Bulan**	**3,892,000,000**

							Urusan Pemerintahan Daerah						
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	12,398,400	APBD		1 Laporan	12.000.000
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangdisediakan	4 Laporan	467,885,400	APBD		1 Laporan	450.000.000
2	16	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Laporan	157,660,000	APBD		12 Bulan	30.000.000
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3,850,313,280	APBD			3.400.000.000
2	**16**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.**	**Terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung dan prasarana pendukung gedung kantor**	**12 Bulan**	**868,324,300**	**APBD**		**12 Bulan**	**950.000.000**
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	316,285,900	APBD		20 Unit	400.000.000
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Prasarana Gedung Kantor	1 Unit	199,838,400	APBD		1 Unit	150.000.000

							atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						
2	16	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	352,200,000	APBD		1 Unit	400.000.000

BAB.V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan berpedoman pada Renstra PD. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Kaltim memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan yang nantinya akan di usulkan ke BAPPEDA Provinsi Kaltim.

Dipandang dari sisi anggaran sampai dengan tahun 2023 jumlah anggaran Diskominfo relatif terbatas, apalagi bila dibandingkan dengan target untuk mengejar berbagai ketertinggalan terutama untuk mengimbangi percepatan perubahan dan perkembangan di bidang teknologi informasi yang meliputi perangkat hardware, software dan jaringan infrastruktur, peningkatan SDM TIK. Disamping itu kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait seperti TVRI, RRI, dan Komisi Informasi Provinsi anggarannya masih melekat di Diskominfo Prov. Kaltim sehingga Diskominfo membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Dengan peningkatan anggaran dari tahun 2022 ke tahun 2023 diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dapat mewujudkan Provinsi Kalimantan Timur berbasis Teknologi Informasi dan meningkatkan percepatan stabilitas dalam bidang komunikasi di daerah-daerah yang masih minim serta banyak kendala.

Samarinda, Agustus 2023

H. MUHAMMAD FAISAL, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680805 199402 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun lalu telah memberikan hasil yang positif bagi kehidupan masyarakat. Banyak prestasi yang telah diraih, namun bukan berarti permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur menyurut. Sebaliknya, era liberalisasi ekonomi yang terus bergulir menawarkan banyak tantangan. Permasalahan pembangunan menjadi kian kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih baik. Oleh karenanya, penting bagi segenap komponen dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan kembali apa dan bagaimana wajah Provinsi Kalimantan Timur kini dan masa akan datang, lalu merangkaikannya dalam perencanaan pembangunan secara lebih baik, fokus, dan konsisten.

Salah satu upaya agar kita dapat memproyeksikan diri di masa depan adalah dengan sungguh-sungguh memahami kondisi Provinsi Kalimantan Timur pada saat ini, capaian kinerja apa yang telah diraih, permasalahan apa yang masih terus mengiringi, dan isu strategis apa yang harus benar-benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di masa datang. Langkah tersebut juga harus dibarengi dengan upaya mengenali berbagai potensi besar yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur untuk dikembangkan demi meningkatnya kemakmuran masyarakat Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen Perencanaan untuk periode satu tahun kedepan. Rencana Kerja ini merupakan jabaran dari Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dan merupakan operasionalisasi dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023. Rencana Kerja memuat

gambaran tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun (Tahun 2023) serta menjawab apa yang menjadi tujuan, sasaran, target capaian kinerja serta bagaimana pengorganisasian sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

1.2 Landasan Hukum

Dasar yang menjadi acuan dalam perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur adalah sbb ;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Permendagri No. 54 tahun 2010, tentang Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah ;
8. Permendagri No. 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Tata Cara Rancangan Perda, RPJPD dan RPJMD) serta Tata Cara Perubahan (RPJPD, RPJMD dan RENJA Pemda) ;
9. Permendagri No. 90 tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
10. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi,

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

11. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025 ;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kaltim ;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023
15. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 ;
16. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur ;
17. Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 ;
18. Berita Acara Forum Perangkat Daerah tentang Perencanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi, Kab/ Kota Se-Kalimantan Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Kerja ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai kurun waktu setahun yang lalu, disertai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam realisasi dan operasionalisasi program dan kegiatan serta proyeksi dan target yang

diharapkan dengan mempertimbang-kan peluang dan tantangan setahun berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Anggaran dan Capaian Realisasi Terhadap Renstra PD
  - 2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Anggaran
  - 2.1.2 Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelengaraan Tupoksi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1 Tela'ahan Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 4.1 Perumusan Program Prioritas
- 4.2 Rencana Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Anggaran 2021 dan Capaian Realisasi Terhadap Renstra PD

Bab ini memuat reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah murni dan anggaran perubahan (APBD-P) pada tahun anggaran 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp. 25.062.900.000,-** . Berikut Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja sbb :

2.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp17.093.182.850,00 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp14.645.048.008,00 atau 85,68%.

- ***Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***

  Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp640.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp421.775.845,00 atau

65,90%. Beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana secara maksimal karena pandemi Covid-19.

- ***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***

  Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp11.758.569.760,00 dan terealisasi sebesar Rp10.420.508.083,00 atau 88,62%.

- ***Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***

  Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp64.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.080.000,00 atau 20,33%. Realisasi tidak mencapai target karena pada tahun berjalan terjadi penurunan besaran honorarium pengurus barang yang jauh dari standar pada saat penyusunan anggaran serta adanya honorarium yang tidak boleh dibayarkan.

- ***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***

  Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp221.490.000,00 dan terealisasi sebesar Rp79.015.000,00 atau 35,67%. Realisasi masih belum mencapai target yang telah ditetapkan karena kegiatan mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi tidak dapat direalisasikan akibat adanya kekhawatiran terhadap Covid-19.

- ***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***

  Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.585.966.957,00 dan terealisasi sebesar Rp1.188.090.309,00 atau 74,91%.

- ***Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***

  Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.417.840.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.336.055.000,00 atau 94,23%.

- ***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

  Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp603.837.033,00 dan terealisasi sebesar Rp551.609.024,00 atau 91,35%.

- ***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

  Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp801.129.100,00 dan terealisasi sebesar Rp634.914.747,00 atau 79,25%.

2.1.2 Program Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp1.690.013.950,00 pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.599.410.641,00 atau 94,64%.

- ***Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi***

  Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp890.013.950,00 dan terealisasi sebesar Rp851.094.750,00 atau 95,63%.

- ***Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi***

  Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp748.315.891,00 atau 93,54%.

2.1.3 Program Promosi Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp1.360.000.000,00 pada Program Promosi Penanaman Modal. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.163.915.687,00 atau 85,58%.

- ***Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi***

  Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.360.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.163.915.687,00 atau 85,58%.

2.1.4 Program Pelayanan Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp1.760.000.000,00 pada Program Pelayanan Penanaman Modal. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.354.323.701,00 atau 76,95%.

- ***Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota***

  Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.760.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.354.323.701,00 atau 76,95%.

2.1.5 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp2.599.703.000,00 pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.069.577.836,00 atau 41,14%.

- ***Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi***

  Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.599.703.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.069.577.836,00 atau 41,14%. Realisasi tidak mencapai target yang diharapkan karena terjadinya lonjakan Covid-19 dipertengahan tahun sehingga kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan serta sosialisasi ke perusahaan pada saat itu tidak dapat dilaksanakan

2.1.6 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp560.000.200,00 pada Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp497.062.784,00 atau 88,76%.

- ***Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi***

  Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp560.000.200,00 dan terealisasi sebesar Rp497.062.784,00 atau 88,76%.

2.1.7 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Secara keseluruhan pencapaian target masih belum memuaskan karena dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Merebaknya pandemi Covid-19 di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang cukup ketat di awal-awal merebaknya wabah Covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan tertunda atau bahkan dibatalkan pelaksanaannya.
2. Ada beberapa kegiatan yang dianggarkan setelah perubahan APBD sehingga rentang waktu pelaksanaannya singkat, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan bahkan ada yang tidak dapat dilaksanakan
3. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola Bidang-bidang di lingkungan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

4. Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berubah-ubah dalam satu tahun terakhir dari hal perencanaan kegiatan/anggaran, penatausahaan keuangan sampai dengan hal-hal yang teknis.
5. SDM (Staf Pegawai ASN) yang terbilang kurang memadai.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur

Perangkat Daerah : **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	**18**	**01**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Urusan Bidang Penanaman Modal**	**86** %	**0**				**85** %		
2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	75 Nilai AKIP	0				65 Nilai AKIP	51,09	68,12
2	18	01	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran*	*18 Dokumen*	*0*				*4 Dokumen*	4	22,22
2	18	01	1.01	07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah*	*17 Laporan*	*0*				*3 Laporan*	3	17,65
2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	72 Dokumen	0				24 Dokumen	24	33,33
2	18	01	1.02	01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah laporan daftar gaji dan tunjangan*	*36 Laporan*	*0*				*12 Laporan*	12	33,33
2	18	01	1.02	02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Jumlah orang yang melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi*	*162 Orang*	*0*				*Orang*	0	0,00
2	18	01	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*	*Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi*	*3000 Laporan*	*0*				*1000 Laporan*	1000	33,33
2	18	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah	6 Orang	0				2 Orang	2	33,33
2	18	01	1.03	06	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Jumlah laporan kartu inventaris ruangan (KIR) yang disusun*	*51 Laporan*	*0*				*17 Laporan*	17	33,33

2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan	320	Pegawai	0				100	Pegawai	100	31,25
2	18	01	1.05	02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan*	*350*	*Stel*	*0*				*110*	*Stel*	110	31,43
2	18	01	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Jumlah pegawai yang memperoleh pendidikan dan pelatihan formal*	*50*	*Orang*	*0*				*10*	*Orang*	10	20,00
2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	36	Bulan	0				12	Bulan	12	33,33
2	18	01	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan yang diadakan*	*27*	*Jenis*	*0*				*9*	*Jenis*	9	33,33
2	18	01	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan*	*24*	*Jenis*	*0*				*8*	*Jenis*	8	33,33
2	18	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah bulan pelaksanaan cetakan dan penggandaan*	*36*	*Bulan*	*0*				*12*	*Bulan*	12	33,33
2	18	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan*	*288*	*Bahan Bacaan*	*0*				*96*	*Bahan Bacaan*	96	33,33
2	18	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	*327*	*Kegiatan*	*0*				*109*	*Kegiatan*	109	33,33
2	18	01	1.06	11	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*Jumlah ruangan yang difasilitasi media berbasis elektronik untuk rapat-rapat online*	*30*	*Ruangan*	*0*				*20*	*Ruangan*	20	66,67
2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	248	Unit	0				76	Unit	76	30,65
2	18	01	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah unit kendaraan mobil jabatan yang diadakan*	*1*	*Unit*	*0*				*1*	*Unit*	1	100,00
2	18	01	1.07	05	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan*	*3*	*Unit*	*0*				*1*	*Unit*	1	33,33
2	18	01	1.07	06	*Pengadaan Mebel*	*Jumlah unit mebel yang diadakan*	*97*	*Unit*	*0*				*36*	*Unit*	36	37,11
2	18	01	1.07	02	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah unit peralatan dan mesin yang diadakan*	*144*	*Unit*	*0*				*38*	*Unit*	38	26,39
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	36	Bulan	0				12	Bulan	12	33,33
2	18	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan*	*36*	*Bulan*	*0*				*12*	*Bulan*	12	33,33
2	18	01	1.08	03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor*	*36*	*Bulan*	*0*				*12*	*Bulan*	12	33,33

2	18	01	1.08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah bulan administrasi perkantoran yang terlayani*	*36*	*Bulan*	*0*				*12*	*Bulan*	12	33,33
2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasrana milik daerah yang terpelihara	16	Kegiatan	0				6	Kegiatan	6	37,50
2	18	01	1.09	01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas*	*35*	*Unit*	*0*				*15*	*Unit*	15	42,86
2	18	01	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah jenis peralatan dan mesin yang terawat*	*23*	*Jenis*	*0*				*8*	*Jenis*	8	34,78
2	18	01	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah kegiatan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan yang terlaksana*	*7*	*Kegiatan*	*0*				*5*	*Kegiatan*	5	71,43
2	18	01	1.09	10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang terlaksana*	*6*	*Kegiatan*	*0*				*2*	*Kegiatan*	2	33,33
2	**18**	**02**			**PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal**	**8**	**Dokumen**	**0**				**4**	**Dokumen**	4	50,00
2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pemberian fasilitas insentif dan kemudahan berusaha	2	Kegiatan	0				2	Kegiatan	2	100,00
2	18	02	1.01	01	*Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*	*Jumlah kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal*	*1*	*Regulasi*	*0*				*1*	*Regulasi*	1	100,00
2	18	02	1.01	02	*Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*	*Jumlah dokumen kajian evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal*	*1*	*Dokumen*	*0*				*1*	*Dokumen*	1	100,00
2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi	6	Dokumen	0				2	Dokumen	2	33,33
2	18	02	1.02	01	*Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi*	*Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kalimantan Timur*	*3*	*Dokumen*	*0*				*1*	*Dokumen*	1	33,33
2	18	02	1.02	02	*Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi*	*Jumlah dokumen kajian peta potensi investasi*	*3*	*Dokumen*	*0*				*1*	*Dokumen*	1	33,33
2	**18**	**03**			**PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi**	**30**	**Laporan**	**0**				**9**	**Laporan**	9	30,00
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	32	Kegiatan	0				9	Kegiatan	9	28,13
2	18	03	1.01	01	*Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi*	*Jumlah dokumen hasil pertemuan promosi penanaman modal*	*11*	*Dokumen*	*0*				*2*	*Dokumen*	2	18,18

2	18	03	1.01	02	*Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi*	*Jumlah keikutsertaan pada kegiatan pameran investasi*	*21*	*Pameran*	*0*				*7*	*Pameran*	7	33,33
2	**18**	**04**			**PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Waktu Penyelesaian Proses Perizinan**	**10**	**Hari**	**0**				**12**	**Hari**	5	100,00
2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin	4350	Izin/ Non Izin	0				1500	Izin/ Non Izin	1500	34,48
2	18	04	1.02	01	*Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik*	*Jumlah kegiatan pelatihan tentang pelatihan pelayanan yang prima berbasis elektronik*	*8*	*Kegiatan*	*0*				*4*	*Kegiatan*	4	50,00
2	18	04	1.02	02	*Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal*	*Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan*	*30000*	*NIB*	*0*				*15000*	*NIB*	15000	50,00
2	18	04	1.02	03	*Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PelayananTerpadu Perizinan dan Nonperizinan*	*Jumlah persentase pengaduan yang terlayani*	*100*	*Persen*	*0*				*15*	*Persen*	15	15,00
2	18	04	1.02	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah*	*Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi*	*25*	*Laporan*	*0*				*5*	*Laporan*	5	20,00
2	**18**	**05**			**PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM**	**100**	**%**	**0**				**100**	**%**	100	100,00
2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	21	Perusahaan	0				6	Perusahaan	6	28,57
2	18	05	1.01	01	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal*	*Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)*	*21*	*LKPM*	*0*				*6*	*LKPM*	6	28,57
2	18	05	1.01	02	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal*	*Jumlah perusahaan yang dibina*	*21*	*Perusahaan*	*0*				*6*	*Perusahaan*	6	28,57
2	18	05	1.01	03	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal*	*Jumlah perusahaan yang diawasi*	*21*	*Perusahaan*	*0*				*6*	*Perusahaan*	6	28,57
2	**18**	**06**			**PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan**	**13**	**Kegiatan**	**0**				**4**	**Kegiatan**	4	30,77
2	18	06	1.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media eletronik yang tersedia	8	Media	0				2	Media	2	25,00
2	18	06	1.01	01	*Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan*	Jumlah aplikasi informasi yang diolah/ disajikan	8	Aplikasi	0				2	Aplikasi	2	25,00

					Berusaha Terintegrasi secara Elektronik											

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimatan Timur No. 65 Tahun 2016, tugas pokok DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur adalah ***"Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu"*** dengan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang perizinan dan penanaman modal sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijkan dibidang perizinan dan penanaman modal;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengembangan penanaman modal;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
6. Peyelenggaraan urusan kesekretariatan;
7. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Capaian kinerja adalah salah satu alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Capaian kinerja merupakan rambu atau tanda apakah sasaran kegiatan yang dilakukan telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik dapa menghasilkan informasi kinerja yang member indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan kinerja organisasi. Selanjutanya, bila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja, maka dapat mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya.

Indikator kinerja pada dasarnya tidak hanya digunakan saat penyusunan laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja dapat juga merupakan komponen yang krusial sejak merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Adanya indikator kinerja menuntut perencanaan harus sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja bertujuan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang lebih sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur sekaligus menjalankan misi Lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Isu-isu ini menjadi dasar dalam menentukan program dan kegiatan skala prioritas selama lima (5) tahun kedepan. Isu tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis lingkungan global yang kita hadapi bersama. Terdapat empat belas (14) perubahan yang saat ini harus diperhatikan, yaitu ;

1. Liberalisasi perdagangan;
2. Pencapaian Milenium Development Goal's (MDG's);
3. Kenaikan harga produk pangan dan kelangkaan sumber energi;
4. Arus demokratisasi yang tidak bisa dibendung;
5. Terbukanya pasar bebas tenaga kerja (AFTA) Tahun 2015;
6. Pembatasan produksi sector primer (minyak, gas dan batu bara);
7. Pengembangan industry bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan;
8. Pembangunan dan pengembangan produktivitas sector pertanian dalam arti luas;

9. Pengembangan industri turunan minyak, gas dan batu bara;
10. Pengembangan industri pertanian dalam arti luas;
11. Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT);
12. Pemgembangan sektor jasa, perdagangan dan keuangan;
13. Pengembangan industri pariwisata; dan
14. Pengembangan infrastruktur pendukung industri.

Berdasarkan isu-isu diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur perlu memberi perhatian pada isu yang berhubungan dengan peningkatan Iklim Investasi didaerah, karena sangat menentukan besar kecilnya modal yang diinvestasikan. Iklim Investasi merupakan perpaduan antara sumberdaya alam yang tersedia dan kreafitas dalam merencanakan dan mengorganisasikan antar kementrian dan lembaga terkait. Semangat otonomi daerah memberikan konsekuensi kepada setiap provinsi dan kabupaten/ kota untuk lebih efektif dalam menarik investasi melalui strategi kemudahan dan insentif. Keadaan tersebut menimbulkan Iklim Persaingan yang kompentitif dan perlu didukung oleh kebijakan nasional dengan tidak membatasi atau mempersulit Iklim Investasi di Daerah.

Iklim usaha yang kondusif akan menaikkan realisasi investasi yang memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja (mengurangi pengangguran). Perkembangan dunia usaha dan tren investasi global sangat mempengaruhi perluasan dan pertumbuhan sektor industri. Bidang agroindustri dan energi terbarukan diharapkan menjadi tulang punggung menuju visi Kaltim 2025.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal (Ranwal) RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2021. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.2 Review terhadap P-RKPD 2023 Provinsi Kalimantan Timur

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Rancangan Awal RKPD	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Hasil Analisis Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rancangan Awal RKPD				**38,647,183,327**	**Hasil Analisis Kebutuhan**				**38,967,183,327**
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)**	**86,00 %**	**24,003,596,887**	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)**	**86,00 %**	**24,003,596,887**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	71 Nilai AKIP	768,111,800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	71 Nilai AKIP	768,111,800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	368,057,800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	368,057,800
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	400,054,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	400,054,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	24 Dokumen	13,387,096,910	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	24 Dokumen	13,387,096,910
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang / Bulan	9,604,139,550	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang / Bulan	9,604,139,550
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen	3,571,037,360	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 Dokumen	3,571,037,360
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	211,920,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	211,920,000

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah orang pengurusan dan invetarisir barang milik daerah	2	Orang	15,840,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah orang pengurusan dan invetarisir barang milik daerah	2	Orang	15,840,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17	Laporan	15,840,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17	Laporan	15,840,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah pegawai yang telah melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan	100	Pegawai	432,965,500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah pegawai yang telah melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan	100	Pegawai	432,965,500
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6	Paket	349,948,600	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	Paket	349,948,600
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	83,016,900	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	83,016,900
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	12	Bulan	4,137,709,077	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	12	Bulan	4,137,709,077
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9	Paket	25,910,700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9	Paket	25,910,700
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	15,561,600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	15,561,600
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	308,845,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	308,845,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96	Dokumen	19,392,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96	Dokumen	19,392,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109	Laporan	1,368,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109	Laporan	1,368,000,000

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	Dokumen	2,399,999,777	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	Dokumen	2,399,999,777
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	76	Unit/Tahun	2,211,751,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	76	Unit/Tahun	2,211,751,000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Unit	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	0
Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36	Paket	183,227,300	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36	Paket	183,227,300
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38	Unit	2,028,523,700	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38	Unit	2,028,523,700
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	12	Bulan	1,019,856,200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	12	Bulan	1,019,856,200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	442,874,200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	442,874,200
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	61,800,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	61,800,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	515,182,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	515,182,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasrana milik daerah yang terpelihara	6	Kegiatan	2,030,266,400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasrana milik daerah yang terpelihara	6	Kegiatan	2,030,266,400
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15	Unit	346,342,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15	Unit	346,342,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Unit	249,700,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Unit	249,700,000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1,285,472,400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1,285,472,400
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	148,752,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	148,752,000
PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		**Jumlah dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal**	**2**	**Dokumen**	**3,000,000,000**	**PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**		**Jumlah dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal**	**2**	**Dokumen**	**3,000,000,000**
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi	2	Dokumen	3,000,000,000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi	2	Dokumen	3,000,000,000
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Samarinda	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1	Dokumen	700,000,000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Samarinda	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1	Dokumen	700,000,000
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Samarinda	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1	Dokumen	2,300,000,000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Samarinda	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1	Dokumen	2,300,000,000
PROMOSI PENANAMAN MODAL		**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi**	**10**	**Laporan**	**3,572,484,840**	**PROMOSI PENANAMAN MODAL**		**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi**	**11**	**Laporan**	**3,572,484,840**
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	12	Kegiatan	3,572,484,840	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	13	Kegiatan	3,572,484,840
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Samarinda	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	3	Dokumen	1,546,533,640	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Samarinda	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	5	Dokumen	1,546,533,640
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	7	Dokumen	2,025,951,200	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	7	Dokumen	2,025,951,200

PELAYANAN PENANAMAN MODAL		**Waktu Penyelesaian Proses Perizinan**	**10**	**Hari**	**3,404,370,000**	**PELAYANAN PENANAMAN MODAL**		**Waktu Penyelesaian Proses Perizinan**	**10**	**Hari**	**3,724,370,000**
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin	1450	Izin/ Non Izin	3,404,370,000	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin	1450	Izin/ Non Izin	3,724,370,000
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Samarinda	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	2	Pelaku Usaha	1,214,370,000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Samarinda	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	80	Pelaku Usaha	1,214,370,000
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	5	Kegiatan Usaha	1.000.000.000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	2	Kegiatan Usaha	1.000.000.000
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PelayananTerpadu Perizinan dan Nonperizinan	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	10	Orang	690,000,000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PelayananTerpadu Perizinan dan Nonperizinan	Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	5	Orang	690,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Samarinda	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	2	Kegiatan Usaha	500.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Samarinda	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	6	Kegiatan Usaha	820.000.000

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		**Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM**	**100**	**%**	**3,575,025,600**	**PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**		**Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM**	**100**	**%**	**3,575,025,600**
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	8	Perusahaan	3,575,025,600	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	8	Perusahaan	3,575,025,600
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	2	Kegiatan Usaha	1,449,425,600	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1000	Kegiatan Usaha	1,449,425,600
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	10	Pelaku Usaha	861,650,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	10	Pelaku Usaha	861,650,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	2	Kegiatan Usaha	1,263,950,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	2	Kegiatan Usaha	1,263,950,000
PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		**Jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan**	**4**	**Kegiatan**	**1,091,706,000**	**PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**		**Jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan**	**4**	**Kegiatan**	**1,091,706,000**
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Media eletronik yang tersedia	3	Media	1,091,706,000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Media eletronik yang tersedia	3	Media	1,091,706,000
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Samarinda	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4	Dokumen	1,091,706,000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Samarinda	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2	Dokumen	1,091,706,000

Pada tabel 2.13 diatas merupakan rencana kerja tahun (n+1) yang dimaksud adalah rencana tahun anggaran 2021, merupakan perubahan dari Permendagri No. 13 tahun 2006 menjadi Permendagri No. 90 tahun 2019. Yang sekarang telah diketahui banyaknya perubahan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2021 dan terindikasi satu bidang khususnya Bidang Pelayanan Pengaduan (YANDU) akan mengalami perbuhan nomenklatur apabila mengacu pada Permendagri No. 90 tahun 2019, serta perubahan yang sangat mendasar adalah Perangkat Daerah sangat dimungkinkan untuk me-review kembali Renstra 2019-2023 Perangkat Daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Kab/ Kota

Rancangan rencana kerja Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah (PD) Kabupaten dan Kota yang dilaksanakan pada 08 Maret Tahun 2022 yang sebagai berikut :

1. Meningkatan kapasitas aparatur pelayanan perizinan DPMPTSP Provinsi Kaltim dengan melakukan diklat kepada petugas di Kab/Kota dalam penggunaan aplikasi OSS RBA, terutama dalam memberikan layanan berbantuan kepada masyarakat pemohon.
2. Penyesuaian Program/Kegiatan sesuai Kepmendagri 050/2019, indikator kinerja berdasarkan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021 dan Penyusunan Renstra Kabupaten/Kota sehingga cascading antara Program/Kegiatan Prioritas Provinsi dengan Program/Kegiatan Kabupaten/Kota sehingga terjadinya keselarasan kegiatan antara Pemerintahan Provinsi dan Kab/Kota.
3. DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur akan mempunyai Program Kerja Major Project yaitu Desk Corner di 9 Kabupaten/Kota sehingga perlunya dukungan dari Bappeda dan anggota Tim TAPD.
4. DPMPTSP Provinsi Kaltim mempunyai rencana untuk memiliki kantor baru di karenakan penilaian dari MenpanRB /BKPM /Ombudsman dan BPK bahwa fasilitas yang ada sekarang kurang memadai.

5. Perlunya dukungan bersama 10 Kabupaten/Kota untuk mendukung Program Kerja Gubernur Kalimantan Timur (38 Dedicated).
6. Kajian Investasi Industri Manufaktur Pengelolaan Pakan Ternak merupakan salah satu penunjang peluang investasi. Seperti yang diketahui Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki pabrik pakan. Peluang investasi dan pasar juga ada. Terlebih lagi semua Kabupaten / Kota akan menjadi sentral IKN. Oleh karena itu adalah salah satu penunjang peluang investasi.
7. Tim P3K Dinas Peternakan telah menyusun dan melakukan uji public 3 (tiga) buku yaitu buku peluang investasi Sistem Integrasi Sapi – Kelapa Sawit (SISKA), buku Komoditas Ternak dan buku komoditas Telur yang akan disempurnakan dan di launching oleh Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang pastinya akan menjadi media promosi sebuah peluang investasi.
8. DPMPTSP Provinsi memohon kepada Kabupaten / Kota mengupdate data peluang investasi yang ada di Kabupaten / Kota masing-masing agar dapat meningkatkan kembali peluang investasi.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tela'ahan Kebijakan Nasional

Sejalan tujuan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, dimana arah tujuan tersebut adalah ***"Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya"*** yang memiliki permasalahan pokok sebagai berikut penjelasanya (lihat tabel 3.1) :

Tabel 3.1 Matriks RPJPD Prov. Kaltim

TUJUAN RPJPD	SASARAN	INDIKATOR	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Kontribusi sektor industri pengolahan	Daya saing investasi industri belum optimal	Regulasi terutama terkait perijinan yang belum efektif	Ketersediaan dan validasi terhadap data statistik dan spasial yang kurang mendukung
					Perubahan kebijakan kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota

= Tujuan Utama RPJPD

Dengan permasalahan pada tabel 3.1 diatas maka strategi yang akan ditempuh sebagai berikut:

1. Mendorong berkembangnya Penanaman Modal diberbagai sektor yang mencakup Sektor Primer, Sekunder dan Tersier dalam rangka meningkatkan persebaran.
2. Mendorong berkembangnya Penanaman Modal berbasis keunggulan daerah dalam rangka memperluas kesempatan kerja.
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal melalui harmonisasi dan simplifikasi berbagai perangkat peraturan baik di Pusat maupun di daerah.
4. Mendorong percepatan ketersediaan infrastruktur dalam arti luas melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan kemitraan

Pemerintah dan Dunia Usaha dalam rangka meningkatkan daya tarik penanaman modal.

5. Membangun sistem informasi secara elektronik untuk mempercepat pendaftaran izin dan prosesnya.
6. Membangun dan mengembangkan sistem informasi berkenaan data rencana dan realisasi investasi serta mempublikasikannya ke instansi pemerintah/ swasta dan masyarakat luas.
7. Mengevaluasi dan merevisi SOP dilingkup DPMPTSP Prov. Kaltim khususnya di Bidang Pelayanan Perizinan.
8. Membuat dan merevisi berkenaan peraturan-peraturan kebijakan tentang percepatan dan kemudahan untuk berinvestasi.
9. Memberikan informasi kepada investor atau mitra kerjasama mengenai potensi dan peluang untuk berinvestasi.

Sejalan dengan kebijakan Nasional tersebut diatas, maka berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimatan Timur No. 65 Tahun 2016, tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur adalah ***"Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu"***.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan goal yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu dan terukur melalui indikator dan standar yang sudah ditetapkan, maka terdapat beberapa penjelasan mengenai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat daerah :

3.2.1 Tujuan

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 050/0214/B.P3D-Bapp/2021 Tentang Sinkronisasi Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 maka Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi dan tujuan Gubernur serta wakil gubernur provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 sebagai adalah

“Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara”. Untuk mencapainya tujuan tersebut maka dibuatlah rumusan strategi yaitu Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non Migas dan Non Batubara, yang menjadikan DPMPTSP memiliki program prioritas.

3.2.2 Sasaran Program Kegiatan

Sasaran program kegiatan DPMPTSP yang diselaraskan dengan rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan visi dan misi Gubernur terpilih periode 2019-2023 Bapak Isran Noor dan Bapak Hadi Mulyadi terdiri dari enam sasaran yaitu:

1. Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang Terintegrasi dan Implementatif di Kawasan Strategis;
2. Terselenggarannya Penyusunan Strategi Promosi dan Kegiatan Promosi Penanaman Modal ;
3. Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang lebih mudah dan cepat ;
4. Terwujudnya Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ;
5. Terinformasikannya Pengurusan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik ;
6. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan.

Sedangkan sasaran strategis merupakan bagian integral dalam suatu proses perencanaan strategis yang terfokus pada kegiatan tertentu serta adanya keterkaitan dengan dokumen RPJMD yang telah disepakati pada waktu forum-forum perencanaan kegiatan. Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur adalah “Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara dengan target 35,00 Triliun Rupiah”

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 mencakup 6 program yang terdiri dari 13 kegiatan dan 37 sub kegiatan yaitu :

3.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

I. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Pada kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan dan anggaran yang terdapat beberapa rencana pendanaan sub kegiatan yang terdiri dari :

1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan :
   - *Penyusunan Reviu Renstra 2019-2023*
   - *Kegiatan Forum Perangkat Daerah Perencanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi, Kab / Kota Se Kaltim*
   - *Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPPA).*
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan :
   - *Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).*
   - *Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Penyusunan LPPD, IKI, IKU, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Rencana Aksi dan LKjIP/LAKIP).*

II. Administrasi Keuangan

Pada kegiatan ini merupakan rencana pendanaan untuk adminitstrasi keuangan dan belanja gaji PNS dan Non PNS serta pendukung kegiatan pada bagian keuangan. Sub kegiatan terdiri dari :

3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ; *(Pergeseran Perubahan)*

5. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

III. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Kegiatan ini merupakan penyusunan laporan kartu inventaris ruangan (KIR).

6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

7. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ;
8. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

V. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan ini merupakan belanja mengikat pada perangkat daerah, karena pada kegiatan ini merupakan belanja rutinitas. Berikut sub kegiatan yang terdiri dari :

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ;
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ;
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ;
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ;
14. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini merupakan penyediaan sarana dan prasarana dalam bentuk barang guna meningkatkan performa dan kinerja aparatur ASN dilingkup DPMPTSP Prov. Kaltim. Berikut beberapa sub kegiatan yang akan dilaksankan :

15. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;

16. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ;
17. Pengadaan Mebel ; *(Pergeseran Perubahan)*
18. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. *(Pergeseran Perubahan)*

VII. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini merupakan penyediaan prasarana dalam bentuk jasa guna meningkatkan performa dan kinerja aparatur ASN dilingkup DPMPTSP Prov. Kaltim. Berikut beberapa sub kegiatan yang akan dilaksankan :

19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
20. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; *(Pergeseran Perubahan)*
21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

VIII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini merupakan pemeliharaan dalam bentuk barang dan jasa guna meningkatkan performa dan kinerja aparatur ASN dilingkup DPMPTSP Prov. Kaltim. Berikut beberapa sub kegiatan yang akan dilaksankan :

22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;
23. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ; *(Pergeseran Perubahan)*
24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ;
25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. *(Pergeseran Perubahan)*

3.3.2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

IX. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Sub kegiatan terdiri dari :

26. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;
    - *Workshop Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.*
    - *Workshop RUPMP.*
    - *Kajian Direktori Investasi.*
    - *Kajian Investasi (IPRO) Sektor Unggulan di Kab. PPU.*
    - *Buletin Investasi.*
27. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;
    - *Workshop Bimtek PIR.*
    - *Aplikasi SI PINTAR.*
    - *Kajian Investasi (IPRO) Sektor Unggulan Kab. Kubar.*
    - *Kajian Investasi (IPRO) Sektor Unggulan Kab. Mahulu.*
    - *Kajian Investasi (IPRO) Sektor Unggulan Kab. Paser.*

3.3.3 Program Promosi Penanaman Modal

X. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Sub kegiatan terdiri dari :

28. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;
    - *Kegiatan Matchmaking Dunia Usaha (4 Kali Kegiatan).*
    - *Belanja Peralatan Pendukung Dokumentasi.*
    - *Kegiatan Kunjungan Keluar Negeri Australia, China dan Kazakthan (Pergeseran Anggaran)*
29. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;
    - *Pelaksanaan Event Pameran Dalam Daerah (2 Kali Event).*
    - *Pelaksanaan Event Pameran Luar Daerah (5 Kali Event).*

3.3.4 Program Pelayanan Penanaman Modal

XI. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Pada kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

30. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;
    - *Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Dalam Manajemen Perizinan Investasi Se-Kab/Kota.*
    - *Bimbingan Teknis Service Excellence Tahun 2023.*
31. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;
    - *Kegiatan sosialisasi dan Pelatihan OSS.*
    - *Koordinasi dan sinkronisasi data antar Kab dan Kota Kalimantan Timur.*
32. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;
    - *Forum Komunikasi Penanganan Pengaduan se OPD teknis terkait Kab/Kota se Kalimantar Timur.*
    - *Kegiatan Forum Komunikasi Penanganan Pengaduan se OPD teknis terkait Provinsi Kalimantar Timur.*
    - *Pembentukan Tim penanganan pengaduan Litigasi dan Non Ligitasi*
33. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;
    - *Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan se Kaltim.*
    - *Rapat Tim Teknis Proses Perizinan dan Non Perizinan*

- *Koordinasi, Pemantauan, Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan proses perizinan dan non perizinan.*
- *Kegiatan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund (Pergeseran Anggaran).*

3.3.5 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

XII. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Pada kegiatan tersebut memiliki tiga sub kegiatan yang terdiri dari :

34. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;
    - *Kegiatan Sosialisasi LKPM Online dan Penerapannya (2 Kali Kegiatan).*
    - *Menghadiri/Mengikuti Rapat, Workshop, Sosialisasi, Koordinasi dan Konsolidasi.*
    - *Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Terhadap Perusahaan PMA/PMDN di Kalimantan Timur.*
    - *Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Terhadap Perusahaan PMA/PMDN di Luar Kalimantan Timur.*
35. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;
    - *Kegiatan Sosialiasasi Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (3 Kali Kegiatan)*
    - *Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Terhadap Perusahaan PMA/PMDN di Kalimantan Timur.*
    - *Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Terhadap Perusahaan PMA/PMDN di Luar Kalimantan Timur.*

36. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;
    - *Pembentukan Tim Pemecah Masalah dan Percepatan Realisasi Investasi di KPIK.*
    - *Kegiatan Pengawasan ke Perusahaan di Wilayah KPIK dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.*
    - *Kegiatan Pengawasan ke Perusahaan yang berlamat atau berkantor di luar daerah Provinsi Kalimantan Timur.*
    - *Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal.*

3.3.6 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

XIII. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program dan kegiatan ini terindikasi menjadi bidang baru, pada kegiatan ini hanya terdapat satu sub kegiatan yaitu :

37. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;
    - *Kegiatan FGD Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Kab/Kota Se-Kalimantan Timur.*
    - *Pembentukan Tim Pengelola Website DPMPTSP Prov Kalimantan Timur.*
    - *Pembentukan Tim PPID Pembantu.*
    - *Pengembangan Sistem Layanan Perizinan dan Nonperizinan.*

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah

Di dalam pembahasan forum Finalisasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur, khususnya untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah disepakati bahwa untuk rencana kerja tahun 2023 rencana program prioritas terdiri dari 2 (dua) program yaitu **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** dan **Program Pelayanan Penanaman Modal.** Pada program tersebut bertujuan untuk meningkatkan realisasi investasi sektor non migas dan non batubara serta pelaksanaan untuk membangun dan mengembangkan kawasan-kawasan industri/ perusahan yang bernilai meningkatkan investasi di Kalimantan Timur, diseluruh Kalimantan Timur terutama dikawasan Kariangau dan Balikpapan sekitarnya.

4.2 Rencana Pendanaan Perangkat Daerah

Rumusan rencana pendanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 yang sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur serta telah dianalisa ada beberapa program yang berubah Pada program kemudahan layanan dan percepatan proses perizinan yang semula targetnya adalah “izin/ non izin” menjadi “hari” penyesuaian dan kesepakatan ini diambil pada saat Musrenbang pada tanggal 16 dan 17 Januari 2019 silam. Dan terdapat hampir secara keseluruhan perubahan redaksi atau nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini dikarenakan penyesuaian dan telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Dan Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 Maka dalam hal ini DPMPTSP Prov. Kaltim telah melakukan pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan setelah dianalisa terdapat satu bidang yang berubah secara keseluruhan tugas pokok dan fungsinya, yaitu yang sebelumnya Bidang

Pelayanan Pengaduan Advokasi (YANDU) menjadi Bidang Pengolaahan Data, oleh karena itu harus ada perbaikan dalam hal struktur organisasi dan tugas-tugas pokok yang jelas.

Dalam hal lain nilai investasi dan indeks kepuasan masyarakat (IKM) merupakan target khusus yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, dan yang akan disepakati menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) milik DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur serta menjadi perjanjian kinerja Kepala Dinas dengan Kepala Daerah.

Program/ kegiatan pendukung prioritas merupakan upaya untuk mendukung tercapainya sasaran program prioritas serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan salah satu untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Kepala daerah pada periode tahun 2019-2023. Dapat dilihat pada Tabel 4.1 Rencana Kerja Program dan Kegiatan, Indikator dan Pendanaan Tahun 2023.

Tabel 4.1 Rencana Kerja Program dan Kegiatan, Indikator dan Pendanaan Perubahan APBD Tahun 2023

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja 2024	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(10)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									**38,967,183,327**				**34.000.000.000**
2	**18**	**01**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)**		**86,00 %**	**24,003,596,887**			**85,00 %**	**20.750.000.000**
2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		71 Nilai AKIP	768,111,800			71 Nilai AKIP	2.000.000.000
2	18	01	1.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	368,057,800	APBD		7 Dokumen	1.000.000.000
2	18	01	1.01	07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	400,054,000	APBD		4 Laporan	1.000.000.000

2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu		24	Dokumen	13,387,096,910			24	Dokumen	13.515.765.754
2	18	01	1.02	01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37	Orang / Bulan	9,604,139,550	APBD		12	Orang / Bulan	10.115.765.754
2	18	01	1.02	02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85	Dokumen	3,571,037,360	APBD		100	Dokumen	3.000.000.000
2	18	01	1.02	03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000	Dokumen	211,920,000	APBD		1000	Dokumen	400.000.000
2	18	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan invetarisir barang milik daerah		1	Orang	15,840,000			1	Orang	61.800.000
2	18	01	1.03	06	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17	Laporan	15,840,000	APBD		17	Laporan	61.800.000
2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan		100	Pegawai	432,965,500			100	Pegawai	212.070.000
2	18	01	1.05	02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6	Paket	349,948,600	APBD		6	Paket	127.070.000

2	18	01	1.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9	Orang	83,016,900	APBD		9	Orang	85.000.000
2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana		12	Bulan	4,137,709,077			12	Bulan	1.028.706.855
2	18	01	1.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	Paket	25,910,700	APBD		2	Paket	24.714.144
2	18	01	1.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	Paket	15,561,600	APBD		8	Paket	261.823.544
2	18	01	1.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Paket	308,845,000	APBD		12	Paket	5.975.000
2	18	01	1.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120	Dokumen	19,392,000	APBD		96	Dokumen	19.200.000
2	18	01	1.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	109	Laporan	1,368,000,000	APBD		109	Laporan	712.200.000
2	18	01	1.06	11	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	Dokumen	2,399,999,777	APBD		3	Dokumen	4.794.167

2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana		76	Unit/Tahun	2,211,751,000			76	Unit/Tahun	577.570.000
2	18	01	1.07	02	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	Unit	0			0	Unit	0
2	18	01	1.07	05	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	Unit	0	APBD		0	Unit	0
2	18	01	1.07	06	*Pengadaan Mebel*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	Paket	183,227,300	APBD		3	Paket	49.500.000
2	18	01	1.07	02	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84	Unit	2,028,523,700	APBD		84	Unit	528.070.000
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana		12	Bulan	1,019,856,200			12	Bulan	961.365.591
2	18	01	1.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48	Laporan	442,874,200	APBD		48	Laporan	515.500.041
2	18	01	1.08	03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Laporan	61,800,000	APBD		1	Laporan	105.843.550

2	18	01	1.08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36	Laporan	515,182,000	APBD		36	Laporan	340.022.000
2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasrana milik daerah yang terpelihara		157	Kegiatan	2,030,266,400			157	Kegiatan	2.392.721.800
2	18	01	1.09	01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29	Unit	346,342,000	APBD		29	Unit	398.775.800
2	18	01	1.09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125	Unit	249,700,000	APBD		125	Unit	219.936.000
2	18	01	1.09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Unit	1,285,472,400	APBD		1	Unit	1.644.930.000
2	18	01	1.09	10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	Unit	148,752,000	APBD		2	Unit	129.080.000

2	**18**	**02**			**PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal**		**2 Dokumen**	**3,000,000,000**			**2 Dokumen**	**3.000.000.000**
2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi		2 Dokumen	3,000,000,000			2 Dokumen	3.000.000.000
2	18	02	1.02	01	*Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi*	*Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi*	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	700,000,000	APBD		1 Dokumen	1.500.000.000
2	18	02	1.02	02	*Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi*	*Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi*	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2,300,000,000	APBD		1 Dokumen	1.500.000.000
2	**18**	**03**			**PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi**		**11 Laporan**	**3,572,484,840**			**10 Laporan**	**3.500.000.000**
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan		13 Kegiatan	3,572,484,840			10 Kegiatan	3.500.000.000
2	18	03	1.01	01	*Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi*	*Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi*	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	1,546,533,640	APBD		3 Dokumen	1.500.000.000
2	18	03	1.01	02	*Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi*	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi*	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	2,025,951,200	APBD		7 Dokumen	2.000.000.000

2	**18**	**04**			**PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Waktu Penyelesaian Proses Perizinan**		**6**	**Hari**	**3,724,370,000**			**12**	**Hari**	**3.500.000.000**
2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin		1450	Izin/ Non Izin	3,724,370,000			1400	Izin/ Non Izin	3.500.000.000
2	18	04	1.02	01	*Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik*	*Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi*	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80	Pelaku Usaha	1,214,370,000	APBD		2	Pelaku Usaha	500.000.000
2	18	04	1.02	02	*Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal*	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi*	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	Kegiatan Usaha	1.000.000.000	APBD		5	Kegiatan Usaha	2.000.000.000
2	18	04	1.02	03	*Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PelayananTerpadu Perizinan dan Nonperizinan*	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi*	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	Orang	690,000,000	APBD		10	Orang	500.000.000
2	18	04	1.02	04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah*	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi*	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6	Kegiatan Usaha	820.000.000	APBD		2	Kegiatan Usaha	500.000.000

2	**18**	**05**			**PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM**		**100**	**%**	**3,575,025,600**			**100**	**%**	**2.250.000.000**
2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri		8	Perusahaan	3,575,025,600			7	Perusahaan	2.250.000.000
2	18	05	1.01	01	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal*	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal*	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000	Kegiatan Usaha	1,449,425,600	APBD		2	Kegiatan Usaha	750.000.000
2	18	05	1.01	02	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal*	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal*	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10	Pelaku Usaha	861,650,000	APBD		10	Pelaku Usaha	750.000.000
2	18	05	1.01	03	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal*	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan*	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	Kegiatan Usaha	1,263,950,000	APBD		2	Kegiatan Usaha	750.000.000
2	**18**	**06**			**PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan**		**4**	**Kegiatan**	**1,091,706,000**			**4**	**Kegiatan**	**1.000.000.000**
2	18	06	1.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media eletronik yang tersedia		3	Media	1,091,706,000			3	Media	1.000.000.000
2	18	06	1.01	01	*Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik*	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Dokumen	1,091,706,000	APBD		4	Dokumen	1.000.000.000

BAB V
P E N U T U P

Demikian Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disampaikan, untuk memberikan gambaran tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan.

Selanjutnya kami mengharapkan agar alokasi dana yang sudah kami proyeksikan didalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kebutuhan Anggaran tahun 2023 ini tidak mengalami perubahan secara signifikan dan berharap dapat ditingkatkan, sehingga apa yang menjadi komitmen kami untuk meningkatkan realisasi investasi secara stabil dan dapat terlaksana.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Samarinda, 16 Agustus 2022

K e p a l a,
DPMPTSP PROV. KALTIM

PUGUH HARJANTO, S.STP., M.SI
Pembina Utama Madya
NIP. 197908101998021001

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) 2023, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Perubahan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan 2023 merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Perubahan merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan tahun 2023.
3. Renja Perubahan merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini, yang merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan Tahun 2023 dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan Tahun Anggaran 2023 harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No …… Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2023 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA pada triwulan satu dan triwulan dua dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA Perubahan harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja Perubahan harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA Perubahan DISPORA Prov. Kaltim Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beerapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
18. Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2023;
19. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005- 2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023;
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022.
25. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
26. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
27. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Nomor 050.14/1426/SK-DISPORA PROG/2018, tanggal 29 September 2018 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Tahun 2019-2023;
28. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Nomor 050/1007/SK-DISPORA-PROG/2021 , tanggal 26 April 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2019-2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur (RENSTRA-Perubahan) Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan RENJA Perubahan DISPORA Prov. Kaltim Tahun 2023 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan DISPORA Prov. Kaltim Tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA Perubahan DISPORA Prov. Kaltim Tahun 2023 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan RENJA Perubahan DISPORA Prov. Kaltim Tahun 2023 meliputi:

BAB I **PENDAHULUAN**, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;

BAB II **EVALUASI RENJA DISPORA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Renja s.d Triwulan II tahun 2023, Analisis Kinerja Pelayanan Dispora, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Solusi dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2023, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

BAB III **TUJUAN DAN SASARAN DISPORA PROV. KALTIM,** berisi tentang : Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran, Program dan Tujuan;

BAB IV **RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, berisi tentang : Rencana Kerja dan Pendanaan, Prioritas

Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi, Prioritas Perangkat Daerah, Lokasi Kegiatan, Kelompok Sasaran Penerima Manfaat

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja s/d Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra

Perangkat Daerah. Ada beberapa perubahan nomenklatur Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan pada tahun 2023 dan 2023 Perubahan sebagai berikut:

PROGRAM DAN KEGIATAN 2023

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
     - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
     - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
     - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
     - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
     - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah
     - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
     - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
     - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
     - Penyediaan Bahan/Material
     - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
     - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
     - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
     - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
     - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
     - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
     - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
   - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
     - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
     - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
     - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
     - Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
   - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
     - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
3. PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
   - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
     - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
     - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
   - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
     - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
     - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
   - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
     - Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
     - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
     - Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi
     - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
   - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
     - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga

- Pengembangan Organisasi Keolahragaan
- Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait

4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
   - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
     - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi
5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD)
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah
     - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
     - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
     - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
     - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
     - Penyediaan Bahan/Material
     - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
     - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
     - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
     - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
     - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
     - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
     - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
     - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM DAN KEGIATAN 2023

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
     - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan/Material
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

- Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
- Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
- Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi
- Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda

- Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
  - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi

3. PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
  - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
  - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
  - Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
  - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
  - Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
  - Pengembangan Organisasi Keolahragaan

- Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait

4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
  - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi

5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD)

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan/Material
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA DISPORA sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut dibawah ini:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Dispora Prov. Kaltim s/d Triwulan II Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023			Realisasi 2023				Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023	
						Triwulan 1		Triwulan 2			
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)	
			K		RP	K	RP	K	RP	K	RP
2.19.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pemuda dan Olah Raga**				**237.035.539.645**		**10.979.492.460**		**132.770.525.531**		**56,01**
2.19.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pemuda dan Olah Raga**				**188.852.496.285**		**8.006.963.866**		**124.586.571.613**		**65,97**
2.19.001	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga**	**95**	**Persen**	**40.201.368.385**	**20,5**	**2.596.666.973**	**28,8**	**10.431.743.796**	**50,36**	**25,95**
2.19.001.1.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*14*	*Dokumen*	*318.749.000*	*1*	-	*4*	*80.832.004*	*29,57*	*25,36*
2.19.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	190.220.000	0	-	0	-	0,00	0,00
2.19.001.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	29.968.000	0	-	0	-	0,00	0,00
2.19.001.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	29.996.000	0	-	1	18.724.004	100,00	62,42
2.19.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	48.550.000	1	-	1	45.461.500	51,00	93,64
2.19.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	20.015.000	1	-	1	16.646.500	26,00	83,17

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023			Realisasi 2023				Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023	
						Triwulan 1		Triwulan 2			
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)	
			K		RP	K	RP	K	RP	K	RP
2.19.001.1.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan*	*15*	*Dokumen*	*15.990.342.852*	*3*	*2.183.419.298*	*7*	*7.273.789.292*	*49,67*	*45,49*
2.19.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78	Orang/ Bulan	15.549.462.852	3	2.183.419.298	78	7.103.689.292	103,00	45,68
2.19.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	440.880.000	0	-	1	170.100.000	100,00	38,58
2.19.001.1.03	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Administrasi BMD*	*1*	*Laporan*	*22.662.000*	*0*	-	*0*	-	*0,00*	*0,00*
2.19.001.1.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	22.662.000	0	-	0	-	0,00	0,00
2.19.001.1.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*12*	*Bulan*	*5.548.917.581*	*0*	-	*6*	*1.088.088.564*	*50,00*	*19,61*
2.19.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	15.324.200	0	-	0	-	0,00	0,00
2.19.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	691.857.700	0	-	0	-	0,00	0,00
2.19.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	445.636.279	0	-	1	28.747.500	20,00	6,45
2.19.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	107.993.500	0	-	0	-	0,00	0,00
2.19.001.1.06.007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	-	0	-	0	-	0,00	
2.19.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	4.210.416.902	0	-	6	1.059.341.064	50,00	25,16
2.19.001.1.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	8.425.000	0	-	0	-	0,00	0,00
2.19.001.1.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	69.264.000	0	-	0	-	0,00	0,00

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023			Realisasi 2023				Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023	
						Triwulan 1		Triwulan 2			
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)	
			K		RP	K	RP	K	RP	K	RP
2.19.001.1.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan*	*15*	*Dokumen*	*15.990.342.852*	*3*	*2.183.419.298*	*7*	*7.273.789.292*	*49,67*	*45,49*
2.19.001.1.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*12*	*Bulan*	*452.010.000*	*0*	-	*6*	*326.000.000*	*50,00*	*72,12*
2.19.001.1.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	Unit	452.010.000	0	-	1	326.000.000	25,00	72,12
2.19.001.1.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*12*	*Bulan*	*4.851.751.352*	*6*	*332.357.396*	*6*	*1.302.841.904*	*56,00*	*26,85*
2.19.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	612.174.000	3	3.731.956	4	133.102.084	83,00	21,74
2.19.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	Laporan	4.239.577.352	3	328.625.440	3	1.169.739.820	103,00	27,59
2.19.001.1.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*12*	*Bulan*	*13.016.935.600*	*3*	*80.890.279*	*6*	*360.192.032*	*53,00*	*2,77*
2.19.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8	Unit	248.147.000	2	11.650.279	6	44.454.640	77,00	17,91
2.19.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	Unit	308.112.000	0	-	10	115.477.392	62,50	37,48
2.19.001.1.09.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	92	Unit	740.496.000	1	69.240.000	30	194.915.000	33,61	26,32
2.19.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	799.560.200	0	-	1	5.345.000	25,00	0,67
2.19.001.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	10.920.620.400	0	-	0	-	0,00	0,00

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023			Realisasi 2023				Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023	
						Triwulan 1		Triwulan 2			
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)	
			K		RP	K	RP	K	RP	K	RP
2.19.002	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING**	**Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan**	**1,2**	**%**	**20.360.000.000**	**0,44**	**1.783.314.056**	**0,92**	**7.266.654.678**	**77,11**	**35,69**
2.19.002.1.01	*Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi*	*Jumlah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur*	*####*	*Orang*	*17.660.000.000*	*3906*	*583.314.056*	*8219*	*5.325.221.264*	*3972,44*	*30,15*
2.19.002.1.01.001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	630	Orang	2.750.000.000	80	65.071.650	380	176.055.468	140,32	6,40
2.19.002.1.01.002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10000	Orang	9.510.000.000	1516	232.631.112	5219	4.072.928.599	1568,19	42,83
2.19.002.1.01.003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	940	Orang	1.850.000.000	200	181.697.209	280	741.822.328	229,79	40,10
2.19.002.1.01.004	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	500	Orang	2.500.000.000	2110	103.914.085	2110	292.913.169	2532,00	11,72
2.19.002.1.01.006	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	7	Dokumen	650.000.000	0	-	1	41.501.700	14,29	6,38
2.19.002.1.01.009	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	300	Orang	400.000.000	0	-	0	-	0,00	0,00
2.19.002.1.02	*Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi*	*Jumlah pemuda yang terlibat dalam organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan Daerah Tingkat Provinsi*	*600*	*Orang*	*2.700.000.000*	*1*	*1.200.000.000*	*230*	*1.941.433.414*	*39,33*	*71,90*
2.19.002.1.02.002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	6	Dokumen	2.700.000.000	1	1.200.000.000	1	1.941.433.414	17,67	71,90

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023			Realisasi 2023				Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023	
						Triwulan 1		Triwulan 2			
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)	
			K		RP	K	RP	K	RP	K	RP
2.19.003	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan**	80	Persen	123.241.127.900	0	626.982.837	40	103.888.173.139	50,00	84,30
2.19.003.1.01	*Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi*	*Jumlah atlet yang dibina dan dikembangkan melalui olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dalam Kewenangan Provinsi*	*3000*	*Orang*	*787.000.000*	*0*	-	*24*	*24.010.946*	*0,80*	*3,05*
2.19.003.1.01.001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1	Unit	493.000.000	0	-	1	24.010.946	100,00	4,87
2.19.003.1.01.002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	2	Dokumen	294.000.000	0	-	0	-	0,00	0,00
2.19.003.1.02	*Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga*	*Jumlah atlet daerah yang mengikuti penyelenggaraan kejuaraan olahraga*	*7000*	*Orang*	*8.333.486.500*	*1*	*115.030.603*	*1680*	*1.634.292.226*	*25,00*	*19,61*
2.19.003.1.02.001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	10	Dokumen	2.999.895.000	1	115.030.603	3	1.567.743.507	31,00	52,26
2.19.003.1.02.003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	500	Orang	5.333.591.500	0	-	250	66.548.719	50,00	1,25
2.19.003.1.03	*Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi*	*Jumlah atlet, pelatih, juri dan wasit yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional*	*1000*	*Orang*	*10.431.151.400*	*0*	*418.394.834*	*150*	*1.238.031.067*	*15,00*	*11,87*
2.19.003.1.03.002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1	Pelatda	5.459.901.700	1	178.768.726	1	742.448.651	101,00	13,60

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023			Realisasi 2023				Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023	
						Triwulan 1		Triwulan 2			
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)	
			K		RP	K	RP	K	RP	K	RP
2.19.003.1.03.003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	500	Orang	3.410.249.700	20	218.426.108	475	416.789.416	115,00	12,22
2.19.003.1.03.004	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	200	Orang	496.000.000	0	9.740.000	0	24.419.000	0,00	4,92
2.19.003.1.03.005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	Dokumen	1.065.000.000	1	11.460.000	1	54.374.000	101,00	5,11
2.19.003.1.04	*Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga*	*Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan*	*300*	*Orang*	*103.689.490.000*	*91*	*93.557.400*	*1720*	*100.991.838.900*	*664,33*	*97,40*
2.19.003.1.04.001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	1	Dokumen	1.324.490.000	1	73.260.400	1	73.260.400	101,00	5,53
2.19.003.1.04.002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1	Dokumen	1.220.000.000	1	20.297.000	1	170.580.500	101,00	13,98
2.19.003.1.04.003	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	1	Dokumen	101.145.000.000	0	-	1	100.747.998.000	100,00	99,61
2.19.004	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**8**	**%**	**5.050.000.000**	**0**	**3.000.000.000**	**4**	**3.000.000.000**	**50,00**	**59,41**
2.19.004.1.01	*Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan*	*Jumlah Pramuka yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan organisasi*	*5000*	*Orang*	*5.050.000.000*	*0*	*3.000.000.000*	*1213*	*3.000.000.000*	*24,26*	*59,41*
2.19.004.1.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan termanfaatkan	10	Dokumen	50.000.000	0	-	4	-	40,00	0,00
2.19.004.1.01.005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1	Laporan	5.000.000.000	0	3.000.000.000	1	3.000.000.000	100,00	60,00

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023			Realisasi 2023				Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023	
						Triwulan 1		Triwulan 2			
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)	
			K		RP	K	RP	K	RP	K	RP
2.19.0.00.0.00.01.0002	**UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga**										
2.19.001	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga**	**95**	**%**	**48.183.043.360**	**20**	**2.972.528.594**	**50**	**8.183.953.918**	**72,63**	**16,99**
2.19.001.1.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*12*	*Bulan*	*6.022.094.780*	*2*	*19.380.000*	*6*	*662.909.800*	*52,00*	*11,01*
2.19.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.665.183.700	0	-	1	138.344.850	100,00	3,77
2.19.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.084.022.440	0	-	1	163.984.740	100,00	15,13
2.19.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	115.588.100	1	8.385.000	1	31.577.775	101,00	27,32
2.19.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	123.826.400	1	10.995.000	1	70.940.200	101,00	57,29
2.19.001.1.06.007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	20.001.640	0	-	1	16.685.000	100,00	83,42
2.19.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	1.013.472.500	0	-	6	241.377.235	50,00	23,82
2.19.001.1.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*12*	*Bulan*	*220.020.000*	*0*	-	*0*	-	*0,00*	*0,00*
2.19.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	220.020.000	0	-	0	-	0,00	0,00
2.19.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	11.400.990.080	0	2.420.281.302	6	5.749.446.371	50,00	50,43
2.19.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	4.007.586.100	0	936.907.742	6	2.013.924.381	50,00	50,25

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023			Realisasi 2023				Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023	
						Triwulan 1		Triwulan 2			
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)	
			K		RP	K	RP	K	RP	K	RP
2.19.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	557.714.700	0	2.108.000	1	265.171.350	100,00	47,55
2.19.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	6.835.689.280	0	1.481.265.560	1	3.470.350.640	100,00	50,77
2.19.001.1.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*12*	*Bulan*	*30.539.938.500*	*0*	*532.867.292*	*6*	*1.771.597.747*	*50,00*	*5,80*
2.19.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	107.692.000	0	16.554.292	1	28.767.612	100,00	26,71
2.19.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	18.262.500	0	-	1	2.013.000	100,00	11,02
2.19.001.1.09.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	3.002.275.200	0	516.313.000	2	1.224.700.000	50,00	40,79
2.19.001.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	27.411.708.800	0	-	1	516.117.135	25,00	1,88

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA DISPORA Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan belum semuanya memenuhi target kinerja hasil/keluaran pada akhir triwulan II.
2. Adapun presentasi capaian kinerja beberapa kegiatan mengalami perubahan dengan penyesuaian sebagian kegiatan dengan jadwal pusat.
3. Sebagian kegiatan dilaksanakan pada triwulan III dan IV sesuai jadwal Kemenpora dan jadwal hasil kesepakatan dengan mitra Dispora Prov. Kaltim.
4. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana hibah sebagian besar dilaksanakan atau direalisasikan pada Triwulan III dan IV.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA DISPORA. Dikarenakan adanya pertambahan pendanaan pada program/kegiatan tersebut mempengaruhi capaian RENSTRA DISPORA dan namun tidak diperlukan kebijakan perencanaan dan penganggaran terhadap hal tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kondisi Organisasi secara umum adalah sebagai berikut :

1. Kondisi sumber daya aparatur yang ada secara jabatan struktural telah terpenuhi tetapi untuk jabatan pelaksana masih kurang atau masih belum memadai.
2. Dari sisi kualitas masih perlu peningkatan terutama untuk bidang pengelolaan administrasi keuangan, administrasi pengelolaan barang dan kemampuan penguasaan IT.
3. Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional sampai sampai saat ini belum ada pedoman Penentapan Angka Kredit (PAK) dari BKN.
4. Sarana dan prasarana penunjang kantor (peralatan) belum terpenuhi secara maksimal.
5. Kantor yang saat ini digunakan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan perkantoran karena masih menggunakan gedung PUSDIKLAT, sehingga banyak terkendala terhadap pemeliharaan dan pengembangan ruang kantor guna untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
6. Dispora selaku pengampu terhadap urusan keolahragaan juga saat ini diamanahkan untuk mensosialisasikan seluruh kegiatan olahraga masyarakat dan tradisional kepada seluruh lapisan masyarakat dengan tetap melakukan olahraga senam pagi atau aerobic di Gelora Kadrie Oening setiap Minggu.

Tabel. 2.2

Misi RPJMD dan Tujuan SKPD yang masuk dalam RPJMD Perubahan 2019-2023

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR SASARAN		
				2021	2022	2023
Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia Terutama Perempuan dan Penyandang Disabilitas	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Meningkatnya Daya Saing Generasi Muda	Persentase daya saing generasi muda	0,22	0,32	0,40

Analisis kinerja pelayanan DISPORA sesuai dengan RENSTRA DISPORA tertuang dalam capaian Sasaran Strategis tahun 2023 berdasarkan target Renstra 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja DISPORA Provinsi Kalimantan Timur sesuai IKU Dispora 2019-2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	0,65	0,85	1,09	0,13	0,88	1,09	Penyesuaian data kepemudaan pada tahun 2021

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

a. Tingkat Pelayanan DISPORA

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

Tugas Pokok Dispora Kaltim sebagaimana berikut:

Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.

Adapun Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2) Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
3) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan olahraga;
4) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda;.
5) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan pemuda;
6) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga;
7) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;
8) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
10) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Kemudian pada RENSTRA DISPORA Periode 2019-2023 ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis guna mencapai sasaran dalam RPJMD 2019-2023 yang pencapaiannya diukur dengan 2 (dua) indikator utama, yaitu:

1) Persentase pemuda yang mendapatkan peningkatan kompetensi dalam berwirausaha;
2) Persentase atlet Berprestasi (Tingkat Nasional)

b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DISPORA

Secara struktur organisasi, saat ini DISPORA telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan, hanya saja kelompok jabatan fungsional belum terbentuk. Keberadaan 1 (satu) Bagian Sekretariat yang berfungsi sebagai fasilitator maupun koordinator dan pelayanan, 4 (empat) Bidang (Bidang Pemberdayaan Pemuda, Bidang Pengembangan Pemuda, Bidang Pembudayaan Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga) yang berfungsi mendukung fungsi-fungsi pengembangan pemberdayaan, pembudayaan kepemudaan dan keolahragaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan penyediaan data, walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan program kegiatan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedepan, pengembangan kelembagaan Dispora ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga, dan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD PPO) yang berfungsi untuk melaksanakan pelayana teknis untuk meningkatkan PAD terhadap pengelolaan prasarana olahraga.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1) Pada penjenjangan pegawai belum adanya kejelasan strategi pengembangan dan pelatihan, jenjang karir, penilaian kinerja, serta sistem kompensasi pegawai kususnya pegawai yang diangkat melalui jalur pelatih dan atlet. Integrasi aspek-aspek tersebut merupakan kunci keberhasilan terciptanya sumber daya aparatur DISPORA yang mampu menjawab kompleksitas permasalahan pembangunan dan dinamika perubahan yang terjadi;
2) Belum meratanya kualitas dan kuantitas SDM DISPORA baik aspek perencanaan, pengendalian, data informasi dan penguasaan teknologi karena perencanaan yang berdaya guna dan berhasil guna sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparaturnya;
3) Belum maksimalnya fungsi koordinasi dengan OPD dan Kabupaten/Kota;

4) Belum optimalnya penggunaan sistem data dan informasi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan secara maksimal;
5) Belum efektifnya tindak lanjut dari hasil pengendalian dan evaluasi;
6) Masih terdapat ketidakselarasan antara dalam penetapan indikator capaian antara RPJMD dan RENSTRA OPD sehingga sedikit menghambat dalam proses perencanaan dan evaluasi pelaksanaan;
7) Masih adanya ego sektoral yang menyebabkan tidak maksimalnya koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan;
8) Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan perubahan kebijakan perencanaan daerah;
9) Semakin besarnya tuntutan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efesien, partisipatif, dan transparan berbasis teknologi termasuk aksesibilitas data dan informasi.

c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019 – 2023, Visi Prov. Kaltim adalah:

"Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat"

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1) **Misi Pertama** : Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia & Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda & Penyandang Disabilitas;
2) **Misi Kedua** : Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah & Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan;
3) **Misi Ketiga** : Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan;
4) **Misi Keempat** : Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan;
5) **Misi Kelima** : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik.

d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DISPORA Provinsi Kalimantan Timur

Disamping permasalahan seperti yang pada poin “b” diatas, DISPORA memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal pembangunan daerah menuju **Kaltim Maju 2030**. Dalam usaha pencapaian **Kaltim Maju 2030**, DISPORA memiliki dinamika tantangan dan peluang pembangunan sebagai berikut :

- Pentingnya peran DISPORA yang didukung oleh peraturan yang berlaku;
- Tingginya kepercayaan Gubernur dan Perangkat Daerah terhadap keberadaan DISPORA dalam hal pengembangan dan peningkatan prestasi pemuda dan olahraga di Kalimantan Timur;
- Kualitas SDM DISPORA yang handal dan memadai sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan;
- Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan tetap mengikuti perkembangan teknologi tersebut;
- Tersedianya sarana dan prasarana teknologi yang memadai;
- Tersedianya peraturan yang mendukung kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, evaluasi, dan monitoring.

2.4 Solusi dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2023

Terhadap beberapa permasalahan di atas berkaitan dengan pencapain taget kinerja sampai dengan Triwulan II perlu ada solusi tepat dalam penyelesaiannya sebagaimana berikut :

a. Melakukan percepatan persiapan pelaksanaan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan baik yang mendapatkan alokasi tambahan maupun yang murni.
b. Berkoordinasi lebih intens dengan pusat terkait jadwal pelaksanaan kegiatan yang melibatkan seluruh Kabupaten dan Kota.
c. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh mitra SKPD yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
d. Meningkatan koordinasi antar SKPD dan Dispora Kab/Kota terkait kinerja kegiatan yang dihasilkan bersama, guna pencapaian target dalam P-RPJMD 2019-2023.

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2023 perubahan, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**				**237.035.539.645**	**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**				**248.205.355.349**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga**	**95 Persen**	**40.201.368.385**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga**	**95 Persen**	**41.935.630.589**
a	**Kegiatan** **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**318.749.000**	**Kegiatan** **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**318.749.000**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	190.220.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	190.220.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	29.968.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	29.968.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	29.996.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	29.996.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2 Laporan	48.550.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	2 Laporan	48.550.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	20.015.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	20.015.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
b	**Kegiatan** **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**15.990.342.852**	**Kegiatan** **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**16.052.942.852**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ Bulan	15.549.462.852	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ Bulan	15.549.462.852
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	440.880.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	503.480.000
c	**Kegiatan** **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Presentase Pelaksanaan Administrasi BMD pada SKPD**	**100 Persen**	**22.662.000**	**Kegiatan** **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Presentase Pelaksanaan Administrasi BMD pada SKPD**	**100 Persen**	**22.662.000**
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	22.662.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	22.662.000
d	**Kegiatan** **Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**5.548.917.581**	**Kegiatan** **Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**7.148.917.581**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.324.200	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.324.200
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	691.857.700	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.291.857.700
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	445.636.279	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	445.636.279
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	107.993.500	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	107.993.500

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4.210.416.902	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4.210.416.902
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	8.425.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	8.425.000
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	69.264.000	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	69.264.000
e	**Kegiatan** **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah dalam satu tahun**	**100 Persen**	**452.010.000**	**Kegiatan** **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah dalam satu tahun**	**100 Persen**	**452.010.000**
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	452.010.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	452.010.000
f	**Kegiatan** **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa dalam satu tahun**	**100 Persen**	**4.851.751.352**	**Kegiatan** **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa dalam satu tahun**	**100 Persen**	**4.923.413.556**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	612.174.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	612.174.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	4.239.577.352	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	4.311.239.556
g	**Kegiatan** **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan BMD selama satu Tahun**	**100 Persen**	**13.016.935.600**	**Kegiatan** **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan BMD selama satu Tahun**	**100 Persen**	**13.016.935.600**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	248.147.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	248.147.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	308.112.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	308.112.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	92 Unit	740.496.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	92 Unit	740.496.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	799.560.200	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	799.560.200
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	10.920.620.400	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	10.920.620.400
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		**Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan**	**1,20 Persen**	**20.360.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		**Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan**	**1,20 Persen**	**25.785.000.000**
a	**Kegiatan** **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**		**Persentase Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda**	**100 Persen**	**17.660.000.000**	**Kegiatan** **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**		**Persentase Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda**	**100 Persen**	**21.235.000.000**
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	630 Orang	2.750.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	930 Orang	4.500.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10000	9.510.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10000 Orang	11.310.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	940 Orang	1.850.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	940 Orang	1.850.000.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	500 Orang	2.500.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	500 Orang	2.500.000.000
	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	7 Dokumen	650.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	8 Dokumen	675.000.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	300 Orang	400.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	300 Orang	400.000.000
b	**Kegiatan** **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**		**Persentase Pemuda yang terlibat dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan**	**100 Persen**	**2.700.000.000**	**Kegiatan** **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**		**Persentase Pemuda yang terlibat dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan**	**100 Persen**	**4.550.000.000**
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	6 Dokumen	2.700.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	9 Dokumen	4.550.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		**Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan**	**80 Persen**	**123.241.127.900**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		**Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan**	**80 Persen**	**126.199.108.400**
a	**Kegiatan** **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**		**Persentase Atlet Pelajar yang difasilitasi dalam Pembinaan dan Pengembangan**	**100 Persen**	**787.000.000**	**Kegiatan** **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**		**Persentase Atlet Pelajar yang difasilitasi dalam Pembinaan dan Pengembangan**	**100 Persen**	**787.000.000**
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit	493.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit	493.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	2 Dokumen	294.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	2 Dokumen	294.000.000
b	**Kegiatan** **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**		**Persentase Atlet yang mendapatkan medali pada setiap kejuaraan**	**30 Persen**	**8.333.486.500**	**Kegiatan** **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**		**Persentase Atlet yang mendapatkan medali pada setiap kejuaraan**	**30 Persen**	**9.883.467.000**
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	10	2.999.895.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	12 Dokumen	4.549.875.500
	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	500 Orang	5.333.591.500	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	500 Orang	5.333.591.500

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
c	**Kegiatan** **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**		**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi**	**100 Persen**	**10.431.151.400**	**Kegiatan** **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**		**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi**	**100 Persen**	**11.839.151.400**
	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	5.459.901.700	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	5.459.901.700
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	500 Orang	3.410.249.700	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	500 Orang	3.410.249.700
	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	200 Orang	496.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	230 Orang	1.904.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	1.065.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	1.065.000.000
d	**Kegiatan** **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**		**Meningkatnya Organisasi Keolahragaan yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan**	**30 Persen**	**103.689.490.000**	**Kegiatan** **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**		**Meningkatnya Organisasi Keolahragaan yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan**	**30 Persen**	**103.689.490.000**
	Sub Kegiatan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	1.324.490.000	Sub Kegiatan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	1.324.490.000
	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	1.220.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	1.220.000.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	1 Dokumen	101.145.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	1 Dokumen	101.145.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**		**Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**8 Persen**	**5.050.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**		**Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**8 Persen**	**5.050.000.000**
a	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**		**Persentase terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Pramuka**	**90 Persen**	**5.050.000.000**	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**		**Persentase terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Pramuka**	**90 Persen**	**5.050.000.000**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan termanfaatkan	10	50.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan termanfaatkan	10 Dokumen	50.000.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1 Laporan	5.000.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1 Laporan	5.000.000.000
	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD)		**Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga**	**95 Persen**	**48.183.043.360**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga**	**95 Persen**	**49.235.616.360**
a	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**6.022.094.780**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**6.122.094.780**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.665.183.700	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.665.183.700
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.084.022.440	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.084.022.440
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	115.588.100	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	115.588.100
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	123.826.400	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	123.826.400

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.001.640	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.001.640
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.013.472.500	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.113.472.500
b	**Kegiatan** **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah dalam satu tahun**	**100 Persen**	**220.020.000**	**Kegiatan** **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah dalam satu tahun**	**100 Persen**	**220.020.000**
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	220.020.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	220.020.000
c	**Kegiatan** **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa dalam satu tahun**	**100 Persen**	**11.400.990.080**	**Kegiatan** **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa dalam satu tahun**	**100 Persen**	**12.353.563.080**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.007.586.100	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.807.861.100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	557.714.700	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	582.964.700
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.835.689.280	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	6.962.737.280

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
d	**Kegiatan** **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan BMD selama satu Tahun**	**100 Persen**	**30.539.938.500**	**Kegiatan** **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan BMD selama satu Tahun**	**100 Persen**	**30.539.938.500**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	107.692.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	107.692.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	18.262.500	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	18.262.500
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3.002.275.200	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3.002.275.200
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	27.411.708.800	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	27.411.708.800

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DISPORA PROV. KALTIM

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2021 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan 2020-2024 dengan tema dan agenda pembangunan.

"INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH – TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL, DAN BERKESINAMBUNGAN"

Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dan RKPD Prov. Kaltim Tahun 2023 dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pembangunan Prov. Kaltim Tahun 2021, keselarasan antara RPJMN 2020 – 2024 dengan RPJMD Kaltim 2019 – 2023 belum tersinkronisasi namun secara subtantif RENJA 2023 dan RENSTRA Perubahan 2019-2023 telah berpedoman pada Perubahan RPJMD 2019-2023, oleh karena itu data yang disajikan masih dalam keterkaitan dengan RPJMN periode sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
1	Ekonomi	1. Pengarusutamaan Gender 2. Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang 3. Peningkatan investasi sektor UMKM 4. Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparasi harga 5. Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global 6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru 7. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir) 8. Peningkatan ekspor produk olahan 9. Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan 10. Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian 11. Penyediaan tenaga kerja petani melalui program transmigrasi 12. Peningkatan infrastruktur pertanian 13. Peningkatan produktivitas pertanian 14. Perbaikan tata niaga produk pangan 15. Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan 16. Peningkatan rasio elektrifikasi 17. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi 18. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan 19. Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan

2	Lingkungan	1. Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan 2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan. 3. Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (green economy) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan 4. Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi 5. Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup perkotaan 6. Penegakan hukum lingkungan 7. Penurunan emisi gas rumah kaca Pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah
3	Politik	-
4	Hukum	-
5	Pertahanan dan Keamanan	-
6	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	1. Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas fokus 2. Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur
7	Kesejahteraan Rakyat	1. Peningkatan Relevansi dan mutu pendidikan 2. Peningkatan kesempatan belajar anak 3. Peningkatan mutu di bidang kesehatan 4. Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja 5. Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin 6. Peningkatan kualitas tenaga kerja

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi DISPORA maka Prioritas Nasional yang berkaitan langsung adalah pada Prioritas ke-7 yaitu Kesejahteraan Rakyat. Namun jika dilihat pada dokumen RPJMN IV tahun 2020 – 2024 tupoksi DISPORA

masuk dalam Agenda Pembangunan ke tiga yaitu : ***"Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing "*** yang sejalan dengan Misi pertama dalam RPJMD 2019-2023 *"Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia & Berdaya Saing, terutama Perempuan, Pemuda & Penyandang Disabilitas".*

Tabel 3.2
Kinerja dan Target Provinsi dan Nasional

No.	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2023	Target Nasional	Keterangan
Urusan Kepemudaan dan Olahraga					
1	Meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,35 %	6,69%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2023 dan kondisi serta kemampuan keuangan daerah
2	Meningkatnya Pemuda yang berwirausaha	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,25 %	0,65%	
3	Meningkatnya prestasi olahraga nasional dan internasional	Peningkatan prestasi olahraga	0,30 %	12 Medali Emas (Tingkat Internasional)	

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renja Dispora Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Perubahan Rencana Strategis Dispora Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

   Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan

Indikator tujuan/target

Persentase pemuda dalam pembinaan kepemudaan / 1,09%

2. Sasaran

Meningkatnya daya saing generasi muda

Indikator sasaran/target

Persentase daya saing generasi muda/ 0,40%

Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran Renstra tahun 2013-2018, maka tujuan dan sasaran tersebut tetap relevan dan layak karena merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi DISPORA sebagai OPD pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Kalimantan Timur. Perubahan tujuan, sasaran dan indicator serta target selaras dengan dokumen Renstra Perubahan 2019-2023.

3.3 Program dan Tujuan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dispora Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Perubahan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				**318,892,485,629**				**457,760,450,000**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga**		**95 Persen**	**61,254,412,855**			**95 Persen**	**75,358,942,200**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100 Persen**	**318,749,000**				**408,200,000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	10 Dokumen	190,220,000	PAD		10 Dokumen	265,600,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda	1 Dokumen	29,968,000	PAD		2 Dokumen	33,200,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Samarinda	1 Dokumen	29,996,000	PAD		2 Dokumen	16,600,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	2 Laporan	48,550,000	PAD		3 Laporan	39,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	4 Laporan	20,015,000	PAD		4 Laporan	53,800,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Samarinda	**100 Persen**	**16,052,942,852**				**19,163,509,382**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	78 Orang/ Bulan	15,549,462,852	PAD		88 Orang/ Bulan	18,182,416,682

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	1 Dokumen	503,480,000	PAD		12 Dokumen	729,480,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Samarinda	12 Dokumen	-	PAD		12 Dokumen	23,700,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Samarinda	12 Dokumen	-	PAD		12 Dokumen	4,312,700
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Samarinda	12 Laporan	-	PAD		12 Laporan	223,600,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Presentase Pelaksanaan Administrasi BMD pada SKPD**	Kota Samarinda	**100 Persen**	**22,662,000**				**90,675,000**
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Samarinda	2 Dokumen	-	PAD		2 Dokumen	24,835,000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Samarinda	1 Laporan	-	PAD		1 Laporan	10,440,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Samarinda	1 Laporan	22,662,000	PAD		4 Laporan	55,400,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi**	Kota Samarinda	**100 Persen**	**-**				**986,044,400**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Samarinda	3 Paket	-	PAD		3 Paket	349,286,400
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Samarinda	1 Dokumen	-	PAD		1 Dokumen	10,600,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Samarinda	50 Orang	-	PAD		50 Orang	576,000,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	Kota Samarinda	88 Orang	-	PAD		88 Orang	24,916,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	88 Orang	-	PAD		88 Orang	25,242,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Samarinda	**100 Persen**	**12,303,072,819**				**5,314,455,943**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Paket	15,324,200	PAD		1 Paket	50,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	4 Paket	6,126,977,138	PAD		4 Paket	1,942,900,517
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Paket	-	PAD			50,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	5 Paket	1,764,672,079	PAD		4 Paket	703,902,702
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Paket	107,993,500	PAD			197,760,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	12 Laporan	-	PAD			400,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	12 Laporan	4,210,416,902	PAD		85 Laporan	1,743,827,724
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Samarinda	1 Dokumen	8,425,000	PAD		1 Dokumen	128,600,000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Samarinda	1 Dokumen	69,264,000	PAD		1 Dokumen	97,465,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah dalam satu tahun**	Kota Samarinda	**100 Persen**	**452,010,000**				**4,709,985,175**
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Samarinda	4 Unit	452,010,000	PAD		1 Unit	500,900,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Samarinda	4 Unit	-	PAD		18 Unit	4,009,085,175
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Samarinda	Paket	-	PAD		1 Paket	200,000,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa dalam satu tahun**	Kota Samarinda	**100 Persen**	**18,269,844,584**				**27,136,591,700**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda	5 Laporan	612,174,000	PAD		12 Laporan	500,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	3 Laporan	17,657,670,584	PAD		12 Laporan	26,636,591,700
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan BMD selama satu Tahun**	Kota Samarinda	**100 Persen**	**13,835,131,600**				**17,549,480,600**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda	8 Unit	248,147,000	PAD		18 Unit	51,610,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda	16 Unit	328,518,000	PAD		10 Unit	384,633,000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Samarinda	Unit		PAD		8 Unit	82,250,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda	Unit		PAD		40 Unit	231,101,600
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda	92 Unit	740,496,000	PAD		100 Unit	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda	4 Unit	799,560,200	PAD		1 Unit	500,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda	Unit	-	PAD		1 Unit	500,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda	4 Unit	11,718,410,400	PAD		3 Unit	15,799,886,000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan**		**1,20 Persen**	**26,085,000,000**				**26,377,455,200**
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	**Persentase Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda**		**100 Persen**	**21,435,000,000**				**22,168,601,200**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	930 Orang	4,500,000,000	PAD		630 Orang	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10180 Orang	11,510,000,000	PAD		10000 Orang	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	940 Orang	1,850,000,000	PAD		940 Orang	989,000,000
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Orang	2,500,000,000	PAD		500 Orang	-
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						57,400,000
Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Dokumen	675,000,000	PAD		7 Dokumen	-
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Orang	400,000,000	PAD		300 Orang	-
Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang		PAD			898,300,000
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen		PAD			1,889,800,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750 Persentase		PAD			797,750,000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang		PAD			300,950,000
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	630 Orang		PAD			7,089,817,200
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3500 Orang	-	PAD		300 Orang	10,145,584,000
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	**Persentase Pemuda yang terlibat dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan**		**100 Persen**	**4,650,000,000**			**100 Persen**	**4,208,854,000**
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Dokumen	4,650,000,000	PAD		6 Dokumen	-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Persentase	-	PAD		5 Persentase	464,564,000
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Organisasi	-	PAD		100 Organisasi	3,744,290,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan**		**80 Persen**	**157,825,390,414**			**80 Persen**	**292,154,661,000**
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	**Persentase Atlet Pelajar yang difasilitasi dalam Pembinaan dan Pengembangan**		**100 Persen**	**787,000,000**			**100 Persen**	**4,239,914,000**
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	493,000,000	PAD		1 Unit	3,743,914,000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	294,000,000	PAD		2 Dokumen	496,000,000
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	**Persentase Atlet yang mendapatkan medali pada setiap kejuaraan**		**30 Persen**	**9,883,467,000**			**30 Persen**	**9,385,617,400**
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	4,549,875,500			10 Dokumen	-
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Orang	5,333,591,500			500 Orang	-
Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	765 Orang	-			765 Orang	2,172,000,000
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	-			2 Kegiatan	2,955,000,000
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Kegiatan	-			9 Kegiatan	4,258,617,400
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi**		**100 Persen**	**22,040,433,414**			**100 Persen**	**14,981,760,000**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Pelatda	5,959,961,700	PAD		1 Pelatda	-
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Orang	12,830,221,714	PAD		500 Orang	-
Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	230 Orang	2,185,250,000	PAD		200 Orang	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,065,000,000	PAD		1 Dokumen	-
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	-	PAD		100 Orang	3,523,000,000
Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Pelatda	-	PAD		2 Pelatda	2,163,000,000
Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	-	PAD		1 Dokumen	1,180,800,000
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	430 Orang	-	PAD		430 Orang	8,114,960,000
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**Meningkatnya Organisasi Keolahragaan yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan**		**30 Persen**	**125,114,490,000**			**30 Persen**	**263,547,369,600**
Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	1,324,490,000	PAD		1 Dokumen	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,720,000,000	PAD		1 Dokumen	-
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	122,070,000,000	PAD		1 Dokumen	262,837,769,600
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	-	PAD		4 Dokumen	709,600,000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**		**8 Persen**	**6,050,000,000**			**8 Persen**	**7,252,162,000**
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan termanfaatkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	50,000,000	PAD		10 Dokumen	-
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	6,000,000,000	PAD		10 Dokumen	7,252,162,000
UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga**		**95 Persen**	**67,677,682,360**				**56,617,229,600**
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100 Persen**	**15,267,413,030**			**100 Persen**	**2,366,514,300**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Paket	3,665,183,700	PAD		1 Paket	283,947,510
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Paket	10,229,340,690	PAD		1 Paket	1,276,646,931
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Paket	115,588,100	PAD		1 Paket	118,981,758

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Paket	123,826,400	PAD		1 Paket	80,367,700
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Paket	20,001,640	PAD		1 Paket	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	12 Laporan	1,113,472,500	PAD		1 Paket	606,570,401
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah dalam satu tahun**		**100 Persen**	**1,129,280,000**			**100 Persen**	**140,000,000**
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Samarinda	10 Unit	1,129,280,000	PAD		4 Unit	140,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa dalam satu tahun**		**100 Persen**	**12,734,758,800**			**100 Persen**	**6,426,393,800**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Laporan	4,807,861,100	PAD		12 Laporan	5,882,422,500
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Laporan	682,091,700	PAD		1 Laporan	543,971,300
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Laporan	7,244,806,000	PAD		1 Laporan	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan BMD selama satu Tahun**		**100 Persen**	**38,546,230,530**			**100 Persen**	**47,684,321,500**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda	1 Unit	107,692,000	PAD		1 Unit	75,826,500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda	1 Unit	18,262,500	PAD		1 Unit	18,468,800
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda	4 Unit	3,002,275,200	PAD		Unit	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda	20 Unit	35,418,000,830	PAD		6 Unit	47,590,026,200

BAB IV

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perubahan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Perubahan Dispora Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1. Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan

Rencana kerja Perubahan dan pendanaan Dispora Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2019-2023, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.

4.2. Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2023 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yaitu melaksanakan kebijakan terkait urusan kepemudaan dan keolahragaan, Dispora Provinsi Kalimantan Timur tidak secara langsung mendukung Prioritas Provinsi namun dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Provinsi dimaksud, Dispora berperan dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program kepemudan dan keolahragaan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan

secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijaksanaan pada tahun 2019-2023, penetapan program prioritas dan operasional berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 serta Keputusan Mendagri Nomor 80-3708 Tahun 2020 dan dengan tetap melihat prioritas daerah, maka ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
   Program ini merupakan program yang menunjang pelaksanaan dan pencapaian target kegiatan dan sub kegiatan operasional rutin kantor.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
   Program Pengembangan Kepemudaan pada hakekatnya adalah upaya untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang berdaya saing. Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda adalah program prioritas yang masuk dalam RPJMD 2019-2023 yang bertujuan meningkatkan minat pemuda Kalimantan Timur untuk berwirausaha mandiri, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk menyongsong Kalimantan Timur sebagai IKN, dan sebagai bentuk pengurangan kemiskinan secara umum.
3. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
   Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan adalah program prioritas yang masuk dalam Perubahan RPJMD 2019-2023 program yang bertujuan meningkatkan prestasi olahraga di Kalimantan Timur melalui sistem pembinaan olahraga, mulai dari usia dini sampai dengan usia masa keemasan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang tidak hanya berbatas pada pelakunya tapi juga pada sarana dan prasarana yang digunakan selain itu program ini juga selaras dengan Program Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
   Program ini merupakan program baru yang masuk dan diatur dalam Permendagri 90 tahun 2019, untuk mengakomodir keseluruhan kegiatan kepramukaan dan pengembangannya sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

4.3. Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiata dan prioritas Dispora Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Perubahan, adalah sebagaimana table berikut:

Tabel 4.3

Program Prioritas SKPD

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan Nomenklatur
1	2	3	4	5
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	1,09%	Seluruh Kab/Kota	2.19.002	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
			2.19.002.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
			2.19.002.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
			2.19.003	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
			2.19.003.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
			2.19.003.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
			2.19.003.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
			2.19.003.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

4.4. Lokasi Kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dan diluar Provinsi Kalimantan Timur.

4.5. Kelompok Sasaran Penerima Manfaat

Adapun kelompok sasaran dari program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 adalah :

1. Masyarakat Kalimantan Timur secara keseluruhan berdasarkan usia 16 tahun sampai dengan 30 tahun.
2. Pelaku Olahraga, Pengurus Cabang Olahraga, Mantan Atlet atau Pelatih Berprestasi.
3. Organisasi Kepemudaan, Kelompok Pemuda dan Pemuda Non Produktif.

BAB V
PENUTUP

RENJA Perubahan Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja yang disusun berdasarkan RENSTRA Perubahan Tahun 2019-2023. RENJA Perubahan Tahun 2023 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Prov. Kaltim Tahun 2023, sehingga Visi dan Misi Kalimantan Timur serta target dan Sasaran. Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RENJA Perubahan Tahun 2023 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2023.

5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur DISPORA berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Tahun 2023 dengan efektif dan efisien.
2. RENJA Perubahan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah dalam penyusunan anggaran Tahun 2022 Perubahan, dimana RENJA Perubahan Tahun 2023 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran perubahan.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan DISPORA, seluruh aparatur DISPORA secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Perubahan Tahun 2023.
4. Tata cara penyusunan Renja Perubahan Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.

5. Renja Perubahan Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2.5. Rencana tindak lanjut

Dengan ditetapkannya Rancangan Akhir Renja Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Samarinda, Agustus 2023.

Kepala,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM., M,Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670817 199203 1 017

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penyempurnaan Rancangan Recana Kerja yang berisi penjabaran dari dokumen RENSTRA Perangkat Daerah dan merupakan uraian lebih mendetail dari rencana strategis yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya dan dalam pelaksanaan RENJA dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (Ranhir-RENJA-P) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dilaksanakan berpedoman kepada Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, serta Surat Edaran Kepala Daerah Nomor :000.7.2.4/12994/Bapp-II tanggal 11 Agustus 2023 Tentang Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, yang kemudian diolah melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan, review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja sesuai dengan tuntutan perubahan dari masyarakat maupun stakeholders dan mampu menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat.

Tahun Anggaran 2023 adalah tahun ke kelima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

Sebagaimana diketahui pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana pada awal tahun 2017 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur sebelumnya adalah penggabungan dari dua lembaga yaitu Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok yang berbeda. Adapun tugas pokok dari dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan undang undang no 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2016 serta dituangkan ke dalam Perda No.9 Tahun 2016 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan dan kearsipan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Konstitusional Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal-RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Kalimantan Timur adalah Pancasila dan UUD 1945, dengan landasan operasionalnya adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

14. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
15. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Provinsi Kalimantan Timur;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini telah memperhitungan besaran organisasi dan sekurang kurangnya telah mempertimbangkan factor-faktor berikut :

1. Kemampuan keuangan.
2. Cakupan Tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus di wujudkan.
3. Jenis dan banyaknya tugas.
4. Luas Wilayah Kerja, Kondisi Geografis dan Topografi.
5. Jumlah dan Kepadatan Penduduk.
6. Potensi Daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani.
7. Sarana dan Prasarana penunjang tugas.

Sejalan dengan itu, maka maksud disusunnya Rancangan ahir Rencana Kerja (Ranhir-RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini adalah :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategik (Renstra)/Manajemen Strategik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
2. Mengoptimalkan tugas dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi misi dan tujuan pembangunan daerah;
5. Penajaman Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan pagu indikatif Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan penetapan pagu yang dituangkan didalam RKPD tahun 2023

Sedangkan tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Menjabarkan Visi, Misi yang diuraikankan dalam tujuan, sasaran dan strategik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Kalimantan Timur, yang diwujudkan kedalam Program dan Kegiatan Perpustakaan secara rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan melalui Rencana Strategis (Renstra) yang dibuat dalam Rencana Kerja dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.
2. Sebagai pedoman dan menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan Prioritas Program Pembangunan yang akan dilaksanakan dengan Sumber Dana ABPD Provinsi Kalimantan Timur.
3. Mendorong terwujudnya koordinasi, pembinaan, pengawasan, integrasi, sinergi dan sinkronisasi Pembangunan baik antar Pemerintah Kab/Kota, antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hubungan pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dearah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

5. Menciptakan iklim Pemerintahan yang baik dan bersih serta berwibawa guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Governance*, dengan prinsip efisiensi, efektif, ekonomis, *Money Follow Program*, akuntabel, Transparan, keterbukaan, adil/tidak diskriminatif, bersaing dan Profesional.
6. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara aparat baik Internal dan Ekternal.
7. Penajaman Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan pagu indikatif Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan penetapan pagu yang dituangkan didalam Perubahan RKPD tahun 2023

1.4 Sistematika Penulisan Renja

Pembangunan bidang perpustakaan di Kalimantan Timur senantiasa memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang menempatkan pembangunan perpustakaan sebagai salah satu potensi yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat berbudaya baca dan belajar sepanjang hayat.

Guna memudahkan pemahaman terhadap subtansi dasar dari Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ini, maka disusunlah sistematika penulisan sesuai dengan permendagri nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan ke II dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah pada triwulan ke II berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Sampai Dengan Triwulan II.

2.2 Analisis Evaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Prov.Kaltim

Memuat telaahan terhadap kebijakan Daerah, program kegiatan dan subkegiatan yang diampu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim guna mengakomodir kebijakan kebijakan serta perubahan kebijakan terkait Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1 Program dan Kegiatan

3.2 Rencana Anggaran

3.3 Program dan Kegiatan

Bab V Penutup

Memuat uraian penutup berupa, Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang dibutuhkan.

5.1 Kaidah Kaidah Pelaksanaan

5.2 Rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Sampai Dengan Triwulan II

Sebagaimana diketahui Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategik instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana stratejik.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 sampai dengan triwulan II, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pendekatan komperatif, antara lain :

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
4. Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Dalam pelaksanan evaluasi kinerja, dilakukan dengan pengukuran terhadap realisasi setiap target indikator baik dari program, kegiatan dan sub kegiatan, selain itu pengukuran juga dilakukan dari sisi keuangan dengan memperhatikan pagu inidikatif setiap program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap realisasi nya. Evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara periodik dan tersistem melalui aplikasi, dari evaluasi yang telah dilakukan diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur seperti gambar tabel berikut :

Laporan Renja Triwulan 2 2023 [2.23.2.24.0.00.01.0000] Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Renja			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Renja			Realisasi 2022		Realisasi 2023				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023		Predikat	
												Triwulan 1		Triwulan 2							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12)		(13)	
				K		RP	K		RP	K	RP	K	RP	K	RP			K	RP	K	RP
2.23.2.24.0.00.01.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah					28.566.471.000			27.673.881.000		5.009.014.876		5.009.014.876		19.874.199.133				71,816451		SR
2.23.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip	positif	100	%	24.889.471.000	100	%	23.352.973.600	0	4.405.576.514	11	4.405.576.514	44	13.703.180.394			44	58,678525	SR	R
2.23.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	positif	67	Skor	250.000.000	67	Skor	250.033.500	0	63.622.116	0	63.622.116	0	289.338.926	Nilai AKIP SKPD Tahun 2022 belum terbit	Tersedianya pedoman teknis tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi SKPD	0	115,72086	SR	ST
2.23.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	positif	10	Dokumen	100.000.000	10	Dokumen	100.000.000	0	6.568.000	0	6.568.000	5	123.485.276			50	123,48528	SR	ST
2.23.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	positif	5	Laporan	100.000.000	5	Laporan	100.000.000	0	43.696.116	1	43.696.116	2	149.949.650			40	149,94965	SR	ST
2.23.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	positif	2	Laporan	50.000.000	2	Laporan	50.033.500	0	15.358.000	0	15.358.000	1	15.904.000			50	31,786705	SR	SR
2.23.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip	positif	100	%	18.943.972.108	100	%	17.426.000.396	0	2.874.278.857	25	2.874.278.857	50	7.858.877.690	Berubahnya nomenklatur indikator target dari bulan menjadi dokumen sehingga realisasi akan terlaksana di triwulan IV	Tersedianya regulasi terkait pengelolaan keuangan SKPD	50	45,098574	SR	SR
2.23.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	positif	12	Orang	18.522.968.108	94	Orang	17.000.000.396	0	2.705.700.791	94	2.705.700.791	94	7.598.597.679			100	44,697632	ST	SR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Renja			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Renja			Realisasi 2022		Realisasi 2023				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023		Predikat	
												Triwulan 1		Triwulan 2							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12)		(13)	
				K		RP	K		RP	K	RP	K	RP	K	RP			K	RP	K	RP
2.23.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	12	Dokumen	387.604.000	1	Dokumen	312.660.000	0	68.940.000	0	68.940.000	0	121.883.183			0	38,990142	SR	SR
2.23.001.1.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	positif	12	Dokumen	61.200.000	1	Dokumen	61.200.000	0	60.053.420	0	60.053.420	0	60.053.420			0	98,126503	SR	ST
2.23.001.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	positif	1	Laporan	52.200.000	1	Laporan	52.200.000	0	39.584.646	0	39.584.646	0	78.541.408			0	150,08816	SR	ST
2.23.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	positif	100	%	60.600.000	100	%	60.600.000	0	24.942.155	0	24.942.155	0	32.534.605	Perubahan kebijakan yang tidak konsisten dan tidak terkoordinasi	Tersedianya regulasi terkait pengelolaan barang milik daerah	0	53,687467	SR	R
2.23.001.1.03.003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	positif	1	Laporan	60.600.000	1	Laporan	60.600.000	0	24.942.155	0	24.942.155	0	32.534.605			0	53,687467	SR	R
2.23.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	positif	100	%	48.861.850	100	%	132.075.000	0	60.272.500	50	60.272.500	83	91.646.494	Kurangnya sinergitas antar instansi pembina sehingga berdampak pada pedoman teknis dokumen kepegawaian	- Tersedianya regulasi terkait administrasi kepegawaian	83	69,388736	T	S
2.23.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	positif	0	Paket	0	1	Paket	84.075.000	0	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000			100	57,091882	ST	R
2.23.001.1.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	positif	12	Dokumen	48.861.850	3	Dokumen	48.000.000	0	12.272.500	0	12.272.500	2	43.646.494			67	90,930196	S	T

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Renja			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Renja			Realisasi 2022		Realisasi 2023				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023		Prediksi	
												Triwulan 1		Triwulan 2							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12)		(13)	
				K		RP	K		RP	K	RP	K	RP	K	RP			K	RP	K	RP
2.23.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	positif	100	%	1.860.291.200	100	%	1.743.449.000	0	547.927.055	8	547.927.055	55	1.042.312.806		Tersedianya peraturan dan ketentuan terkait administrasi umum perangkat daerah	55	59,784531	R	R
2.23.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	positif	5	Paket	34.892.000	5	Paket	34.892.000	0	4.339.500	0	4.339.500	5	30.047.625			100	86,116087	ST	T
2.23.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	5	Paket	506.154.700	5	Paket	439.358.000	0	68.536.925	0	68.536.925	4	409.795.875			80	93,271518	T	ST
2.23.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	positif	20	Paket	100.000.000	20	Paket	50.000.000	0	0	0	0	0	0			0	0	SR	SR
2.23.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	positif	10	Paket	50.000.000	10	Paket	49.959.000	0	30.578.200	0	30.578.200	6	63.849.250			60	127,8033	R	ST
2.23.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	positif	12	Dokumen	51.880.000	7	Dokumen	51.880.000	0	0	0	0	3	17.961.000			43	34,646991	SR	SR
2.23.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	40	Laporan	1.117.404.500	2	Laporan	1.117.400.000	0	444.472.430	1	444.472.430	1	520.659.056			50	46,595584	SR	SR
2.23.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah	positif	100	%	2.226.409.600	100	%	2.498.090.704	0	744.206.122	0	744.206.122	50	4.027.564.887	Perubahan kebijakan yang tidak konsisten dan tidak terkoordinasi	Tersedianya peraturan dan ketentuan terkait pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	50	161,22573	SR	ST
2.23.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	positif	12	Laporan	27.740.000	2	Laporan	27.740.000	0	1.828.000	0	1.828.000	1	3.582.000			50	12,912761	SR	SR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Renja			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Renja			Realisasi 2022		Realisasi 2023				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023		Predikat	
												Triwulan 1		Triwulan 2							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12)		(13)	
				K		RP	K		RP	K	RP	K	RP	K	RP			K	RP	K	RP
2.23.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	12	Laporan	716.077.475	1	Laporan	716.078.084	0	150.515.527	0	150.515.527	0	296.286.834			0	41,376332	SR	SR
2.23.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	12	Laporan	1.482.592.125	1	Laporan	1.754.272.640	0	591.862.595	0	591.862.595	0	3.727.696.053			0	212,4924	SR	ST
2.23.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah	positif	100	%	1.489.338.242	100	%	1.242.725.000	0	90.327.709	12	90.327.709	54	360.904.988	Perubahan kebijakan yang tidak konsisten dan tidak terkoordinasi	Tersedianya peraturan dan ketentuan terkait pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	54	29,04142	R	SR
2.23.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	positif	12	Unit	214.624.000	33	Unit	294.745.000	0	26.773.709	3	26.773.709	19	108.856.188			58	36,932327	R	SR
2.23.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	positif	12	Unit	903.968.000	2	Unit	700.000.000	0	44.687.000	0	44.687.000	1	220.562.000			50	31,508857	SR	SR
2.23.001.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	positif	12	Unit	380.746.242	50	Unit	247.980.000	0	18.867.000	15	18.867.000	27	31.486.800			54	12,697314	R	SR
2.23.002	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	positif	9,2	%	2.325.000.000	11	%	2.590.940.800	0	324.833.608	1	324.833.608	12	5.467.182.010			101	211,01346	ST	ST

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Renja			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Renja			Realisasi 2022		Realisasi 2023				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023		Predikat	
												Triwulan 1		Triwulan 2							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12)		(13)	
				K		RP	K		RP	K	RP	K	RP	K	RP			K	RP	K	RP
2.23.002.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai sarana pembelajar sepanjang hayat	positif	100	%	2.000.000.000	100	%	2.340.940.800	0	256.198.808	3	256.198.808	65	5.374.027.715	- Sebagian besar pengelolaan Perpustakaan di Kaltim yang belum dikelola berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) - Belum terlaksanya/terealisasinya Kolaborasi & Sinergitas yang baik dengan Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Sekolah yang ada - Terbatasnya Koleksi Buku Layanan Eksternal - Terbatasnya anggaran penerbitan Buku Konten Lokal - Terbatasnya anggaran Hunting/Pembelian Buku Konten Lokal ke berbagai daerah	- Tersedianya Standar Nasional Perpustakaan (SNP) - Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Perpustakaan - Adanya Perhatian dan dukungan dari Perpustakaan di - Adanya akses perpustakaan online melalui Aplikasi iKaltim - Meningkatnya kesadaran Penerbit/Penulis Kalimantan Timur untuk	65	229,56701	R	ST
2.23.002.1.01.001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	positif	5	Perpustakaan	200.000.000	5	Perpustakaan	349.999.800	0	59.128.608	0	59.128.608	5	98.108.608			100	28,031047	ST	SR
2.23.002.1.01.002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	positif	20	Perpustakaan	425.000.000	20	Perpustakaan	450.000.000	0	30.770.000	0	30.770.000	8	221.022.461			40	49,116102	SR	SR
2.23.002.1.01.003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	positif	10	Eksemplar	200.000.000	500	Eksemplar	200.000.000	0	27.205.017	0	27.205.017	450	139.542.396			90	69,771198	T	S

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Renja			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Renja			Realisasi 2022		Realisasi 2023				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023		Predikat	
												Triwulan 1		Triwulan 2							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12)		(13)	
				K		RP	K		RP	K	RP	K	RP	K	RP			K	RP	K	RP
2.23.002.1.01.006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	positif	30	Orang	150.000.000	60	Orang	150.000.000	0	6.700.000	0	6.700.000	40	22.195.640			67	14,797093	S	SR
2.23.002.1.01.007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	positif	5	Layanan	500.000.000	5	Layanan	500.000.000	0	33.345.000	0	33.345.000	5	154.764.600			100	30,95292	ST	SR
2.23.002.1.01.008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	positif	500	Perpustakaan	125.000.000	5	Perpustakaan	100.000.000	0	35.085.300	0	35.085.300	3	50.160.800			60	50,1608	R	SR
2.23.002.1.01.009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	positif	#####	Eksemplar	400.000.000	#####	Eksemplar	590.941.000	0	63.964.883	0	63.964.883	20	4.688.233.210			1,3	793,35047	SB	SR
2.23.002.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	positif	1	Kegiatan	325.000.000	2	Kegiatan	250.000.000	0	68.634.800	0	68.634.800	1	93.154.315	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan Gerakan Gemar Membaca	Provinsi Kalimantan Timur salah satu penerima program peningkatan Gerakan Gemar Membaca melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	50	37,261726	SR	SR
2.23.002.1.02.003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	positif	9	Orang	75.000.000	12	Orang	100.000.000	0	40.274.800	0	40.274.800	0	47.124.800			0	47,1248	SR	SR

1556

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Renja			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Renja			Realisasi 2022		Realisasi 2023				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023		Predikat	
												Triwulan 1		Triwulan 2							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12)		(13)	
				K		RP	K		RP	K	RP	K	RP	K	RP			K	RP	K	RP
2.23.002.1.02.004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	positif	30	Perpustakaan	250.000.000	3	Perpustakaan	350.000.000	0	28.360.000	0	28.360.000	6	46.029.515			200	30,686343	ST	SR
2.24.002	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase kualitas pengelolaan tertib arsip	positif	100	%	1.252.000.000	100	%	1.479.979.000	0	248.930.925	3	248.930.925	43	609.799.566			43	41,205258	SR	SR
2.24.002.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Tercapainya penyelenggaraan kearsipan pada LKD Kabupaten / Kota sesuai dengan Peraturan Kearsipan	positif	10	OPD/LKD	676.000.000	47	OPD/LKD	679.999.900	0	96.939.223	0	96.939.223	3	300.137.787	- Kurangnya tim audit (terdapat 2 arsiparis) /hanya terdapat 1 tim audit internal - Penyelenggaraan kearsipan pada Kabupaten/Kota masih proses hingga triwulan III	Tersedianya regulasi terkait penyelenggaraan kearsipan pada OPD dan LKD	6,4	44,137916	SR	SR
2.24.002.1.01.003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	positif	47	laporan	676.000.000	20	laporan	679.999.900	0	96.939.223	2	96.939.223	13	300.137.787			65	44,137916	R	SR
2.24.002.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya	positif	100	%	300.000.000	100	%	299.980.000	0	33.917.840	5	33.917.840	24	66.090.817	Kurangnya sumber daya manusia untuk pengelolaan arsip	Adanya kebijakan dan regulasi yang jelas dan mendukung terkait pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya	24	22,031741	SR	SR
2.24.002.1.02.002	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	positif	250	Arsip	300.000.000	950	Arsip	299.980.000	0	33.917.840	50	33.917.840	230	66.090.817			24	22,031741	SR	SR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Renja			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Renja			Realisasi 2022		Realisasi 2023				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023		Pr
												Triwulan 1		Triwulan 2						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12)		(
				K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K
2.24.002.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Pelaksanaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada Daerah	positif	1	OPD	276.000.000	1	OPD	499.999.100	0	118.073.862	0	118.073.862	5	243.570.962		Tersedianya pedoman teknis terkait penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional	500	48,71428	ST
2.24.002.1.03.001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	positif	700	Penggunaa	150.000.000	945	Penggunaa	299.999.100	0	82.320.880	40	82.320.880	653	164.927.980			60	54,976158	S
2.24.002.1.03.002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	positif	10	Laporan	126.000.000	1	Laporan	200.000.000	0	35.752.982	0	35.752.982	0	78.642.982			0	39,321491	SR
2.24.003	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat Penyelamatan, Pengolahan, Perlindungan serta Pelestarian Arsip	positif	100	%	100.000.000	100	%	249.987.600	0	29.673.829	0	29.673.829	0	94.237.143			0	37,686727	SR
2.24.003.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Penyelamatan arsip OPD akibat penggabungan, pembubaran dan pemekaran organisasi	positif	1	OPD	100.000.000	1	OPD	249.987.600	0	29.673.829	0	29.673.829	0	94.237.143	- Proses bantu penggabungan Dispora dengan SKOI - Menunggu konfirmasi serta verifikator dari ANRI untuk mengusulkan/ minta rekomendasi pemusnahan arsip	Tersedianya regulasi untuk pemusnahan arsip	0	37,686727	SR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Renja			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Renja			Realisasi 2022		Realisasi 2023				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023		Prediksi	
												Triwulan 1		Triwulan 2							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12)		(13)	
				K		RP	K		RP	K	RP	K	RP	K	RP			K	RP	K	RP
2.24.003.1.05.001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	positif	1	Daftar	100.000.000	1	Daftar	249.987.600	0	29.673.829	0	29.673.829	0	94.237.143			0	37.696.727	SR	SR

Laporan APBD Triwulan 2 2023 [2.23.2.24.0.00.01.0000] Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Apbd			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2022		Realisasi 2023				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan		Prediksi	
												Triwulan 1		Triwulan 2							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]			[6]			[7]		[8]		[9]		[10]	[11]	[12]		[13]	
				K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah					27.871.576.519			52.825.127.062		5.069.014.804		5.069.014.804		19.874.395.133				38		SR
2.23.003	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip	positif	100	%	22.357.929.555	100	%	40.754.282.604	0	4.405.576.514	11	4.405.576.514	44	13.702.180.394			44	34	SR	SR
2.23.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	positif	67	Skor	507.775.000	67	Skor	1.389.909.510		65.622.116	0	65.622.116	0	289.338.926	Nilai AKIP Tahun 2022 belum terbit	Tersedianya pedoman teknis tentang Tata Cara Perencanaan, Pengadaian dan Evaluasi SKPD	0	21	SR	SR
2.23.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	positif	10	Dokumen	48.984.000	10	Dokumen	934.961.620		6.568.000	0	6.568.000	5	113.485.276			50	13	SR	SR
2.23.001.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	positif	5	Laporan	223.393.000	5	Laporan	197.149.500		43.696.116	1	43.696.116	2	149.949.650			40	74	SR	T
2.23.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	positif	2	laporan	35.400.000	2	laporan	257.798.000	0	19.358.000	0	19.358.000	1	35.904.000			50	6	SR	SR
2.23.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip	positif	100	%	16.866.335.551	100	%	16.474.440.852	0	2.874.278.857	25	2.874.278.857	50	7.858.877.660	Berubahnya nomenklatur indikator target	Tersedianya regulasi terkait pengelolaan	50	48	SR	SR
2.23.001.1.02.005	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	positif	12	Orang/Bulan	16.256.321.551	94	Orang/Bulan	15.880.661.652		2.706.700.791	94	2.706.700.791	94	7.998.597.679			100	48	ST	SR
2.23.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	12	Dokumen	557.214.000	1	Dokumen	452.880.000		68.940.000	0	68.940.000	0	111.885.183			0	27	SR	SR
2.23.001.1.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	positif	12	Dokumen	22.200.000	1	Dokumen	61.449.600		60.053.420	0	60.053.420	0	60.053.420			0	98	SR	ST
2.23.001.1.02.003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	positif	3	laporan	93.600.000	1	laporan	79.449.600		39.584.846	0	39.584.846	0	78.343.408			0	99	SR	ST
2.23.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	positif	100	%	26.400.000	100	%	80.849.600		24.942.135	0	24.942.135	0	52.358.605	Perubahan kebijakan yang tidak konsisten dan tidak terkoordinasi	Tersedianya regulasi terkait pengelolaan barang milik daerah	0	33	SR	R

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Apbd			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2022		Realisasi 2023				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan		Predikat	
												Triwulan 1		Triwulan 2							
2.23.001.1.03.002	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	positif	1	Laporan	26.400.000	1	Laporan	80.949.600	0	24.642.155	0	24.642.155	0	32.334.603			0	53	SR	R
2.23.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	positif	100	%	22.200.000	100	%	178.869.600	0	60.272.500	50	60.272.500	88	80.648.494	Kurangnya sinergitas antar instansi pembina sehingga berdampak pada pedoman teknis dokumen kepegawaian	- Tersedianya regulasi terkait administrasi kepegawaian	93	91	T	R
2.23.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	positif	0	Paket	0	1	Paket	91.020.000	0	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000			100	53	ST	R
2.23.001.1.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	positif	12	Dokumen	22.200.000	1	Dokumen	87.849.600	0	12.272.500	0	12.272.500	2	43.646.494			67	50	S	SR
2.23.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	positif	100	%	1.676.544.800	100	%	9.794.888.640	0	547.927.055	8	547.927.055	55	1.042.312.804		Tersedianya peraturan dan ketentuan terkait administrasi umum perangkat daerah	55	11	R	SR
2.23.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	positif	5	Paket	35.892.000	5	Paket	30.600.100	0	4.339.500	0	4.339.500	5	30.047.525			100	98	ST	ST
2.23.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	5	Paket	523.716.000	5	Paket	6.078.229.180	0	88.536.925	0	88.536.925	4	401.765.875			80	7	T	SR
2.23.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	positif	20	Paket	70.031.000	20	Paket	30.030.400	0	0	0	0	0	0			0	0	SR	SR
2.23.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	positif	10	Paket	48.999.900	10	Paket	2.567.040.000	0	30.578.200	0	30.578.200	6	63.849.250			60	2	R	SR
2.23.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	positif	12	Dokumen	51.840.000	7	Dokumen	51.000.000	0	0	0	0	3	17.961.000			45	35	SR	SR
2.23.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	40	Laporan	945.095.000	2	Laporan	1.057.928.760	0	444.472.430	1	444.472.430	1	520.699.056			50	49	SR	SR
2.23.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah	positif	100	%	2.410.390.304	100	%	11.622.718.942	0	744.209.122	0	744.209.122	50	4.027.594.887	Perubahan kebijakan yang tidak konsisten dan tidak terkoordinasi	Tersedianya peraturan dan kebentuan terkait pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	50	39	SR	SR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Apbd			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2022		Realisasi 2023				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan		Predikat	
												Triwulan 1		Triwulan 2							
2.23.001.1.01.9.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	positif	12	Laporan	27.740.000	2	Laporan	14.690.000	0	3.828.000	0	3.828.000	1	5.082.000			50	24	SR	SR
2.23.001.1.01.9.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	12	Laporan	625.577.664	1	Laporan	700.546.400	0	150.315.527	0	150.315.527	0	296.288.854			0	42	SR	SR
2.23.001.1.01.9.006	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	12	Laporan	1.354.272.640	1	Laporan	10.907.980.542	0	561.882.935	0	561.882.935	0	3.727.696.055			0	34	SR	SR
2.23.001.1.01.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah	positif	100	%	1.048.085.900	100	%	1.212.600.700	0	90.527.705	12	90.527.705	24	360.934.989	Perubahan kebijakan yang tidak konsisten dan tidak terkoordinasi	Tersedianya peraturan dan ketentuan terkait pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	34	50	R	SR
2.23.001.1.01.9.007	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	positif	12	Unit	275.502.900	55	Unit	388.502.200	0	26.772.704	9	26.772.704	19	108.859.189			48	55	R	R
2.23.001.1.01.9.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	positif	12	Unit	629.800.000	2	Unit	805.663.900	0	66.687.000	0	66.687.000	3	220.562.000			50	24	SR	SR
2.23.001.1.01.9.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	positif	12	Unit	149.280.000	56	Unit	97.479.600	0	18.867.000	15	18.867.000	27	51.486.800			48	47	SR	SR
2.23.002	PROGRAM PENUNJANG PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	positif	9,19	%	4.808.949.691	11,5	%	10.160.878.308	0	324.203.608	3	324.203.608	12	5.467.180.010			101	52	ST	R

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Apbd			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2022		Realisasi 2023				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan		Predikat	
												Triwulan 1		Triwulan 2							
2.23.002.1.01.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat	positif	100	%	1.301.672.661	100	%	8.939.193.508	0	259.198.808	3	259.198.808	65	5.374.027.713	- Belum optimalnya pengelolaan Perpustakaan di Kaltim yang belum dikelola berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) - Belum teroptimanya/terwujudnya Kolaborasi & Sinergitas yang baik dengan Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Sekolah yang ada - Terbatasnya Koleksi Buku Layanan Elektronik - Terbatasnya anggaran penerbitan Buku Konten Lokal - Terbatasnya anggaran Hunting/Perburuan Buku Konten	- Terlaksananya Standar Nasional Perpustakaan (SNP) - Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Perpustakaan - Adanya Perhatian dan dukungan dari Perpusnas RI - Adanya akses perpustakaan online melalui Aplikasi iKaltim - Meningkatnya kesadaran Penerbit/Penulis Kalimantan Timur untuk menyerahkan Buku Terbitan/Tulisan	65	60	R	R
2.23.002.1.01.1.001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	positif	5	Perpustakaan	174.721.661	5	Perpustakaan	410.033.100	0	50.138.608	0	50.138.608	3	88.108.608			100	24	ST	SR
2.23.002.1.01.1.002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam rewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	positif	20	Perpustakaan	410.323.000	20	Perpustakaan	1.882.000.000	0	10.770.000	0	10.770.000	8	221.022.461			40	13	SR	SR
2.23.002.1.01.1.003	Pengembangan Koleksi Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	positif	30	Eksemplar	101.750.000	500	Eksemplar	195.211.000	0	27.205.017	0	27.205.017	450	159.540.399			90	71	T	S
2.23.002.1.01.1.006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	positif	30	Orang	75.900.000	60	Orang	145.000.000	0	6.700.000	0	6.700.000	40	22.133.640			67	15	S	SR
2.23.002.1.01.1.007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	positif	5	Layanan	170.317.700	5	Layanan	499.000.600	0	12.345.000	0	12.345.000	3	154.764.600			100	31	ST	SR
2.23.002.1.01.1.008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	positif	500	Perpustakaan	16.000.000	5	Perpustakaan	110.000.208		15.085.300	0	15.085.300	3	50.150.800			60	40	R	SR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Apbd			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2022		Realisasi 2023				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan		Predikat	
												Triwulan 1		Triwulan 2							
2.24.002.1.01.1.006	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	positif	2000	Eksemplar	346.050.000	1400	Eksemplar	5.389.040.400	0	63.664.883	0	63.664.883	20	4.688.233.210			1,3	80	SR	T
2.24.002.1.01.2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Gerakan Gemar Membaca	positif	1	%	2.517.277.000	80	%	1.421.685.000		68.634.800	0	68.634.800	40	93.154.315	Belum optimalnya partisipasi	Provinsi Kalimantan Timur salah	10	7	SR	SR
2.24.002.1.01.2.003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	positif	9	Orang	157.227.000	12	Orang	1.277.685.000	0	40.274.800	0	40.274.800	0	47.134.800			0	4	SR	SR
2.24.002.1.01.2.004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	positif	50	Perpustakaan	2.380.050.000	5	Perpustakaan	144.000.000	0	28.260.000	0	28.260.000	6	46.019.515			100	32	ST	SR
2.24.002	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase kualitas pengelolaan terhadap arsip	positif	100	%	606.930.300	100	%	1.487.444.600	0	348.910.925	3	348.910.925	43	609.798.566			43	41	SR	SR
2.24.002.1.01.1	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Tercapainya penyelenggaraan kearsipan pada UKD Kabupaten / Kota sesuai dengan Peraturan Kearsipan	positif	47	OPD/UKD	241.287.300	47	OPD/UKD	685.999.400	0	96.999.223	0	96.999.223	3	301.137.787	- Kurangnya SDM audit (terdapat 2 arsiparis) jhanya terdapat 1 SM audit internal - Penyelenggaraan kearsipan pada Kabupaten/Kota masih proses hingga triwulan II	Tersedianya regulasi terkait penyelenggaraan kearsipan pada OPD dan UKD	6,4	44	SR	SR
2.24.002.1.01.1.003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	positif	47	laporan	241.287.300	20	laporan	685.999.400	0	96.999.223	1	96.999.223	15	301.137.787			95	44	ft	SR
2.24.002.1.01.2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya	positif	100	%	185.575.000	100	%	508.365.900	0	53.917.940	5	53.917.940	24	66.060.817	Kurangnya sumber daya manusia untuk pengelolaan arsip	Adanya kebijakan dan regulasi yang jelas dan mendukung terkait pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya	24	21	SR	SR
2.24.002.1.01.2.002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	positif	250	Arsip	185.575.000	950	Arsip	508.365.900	0	53.917.940	50	53.917.940	230	66.060.817			24	21	SR	SR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Apbd			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2022		Realisasi 2023				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan		Predikat	
												Triwulan 1		Triwulan 2							
2.24.002.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Pelaksanaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada Daerah	positif	1	OPD	180.065.000	1	OPD	492.079.500	0	118.073.862	0	118.073.862	3	243.570.962	Kurangnya sumber daya manusia untuk Layanan Kearsipan	Tersedianya pedoman teknis terkait penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional	500	49	ST	SR
2.24.002.1.03.001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	positif	700	Pengguna	80.475.000	845	Pengguna	288.079.500	0	82.520.880	40	82.520.880	652	164.927.980			69	55	S	R
2.24.002.1.03.002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	positif	10	Laporan	99.590.000	1	Laporan	194.000.000		55.752.982	0	55.752.982	0	78.642.982			0	41	SB	SR
2.24.003	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat Penyelamatan, Pengolahan, Perlindungan serta Pelestarian Arsip	positif	100	%	87.767.000	100	%	242.521.500		29.673.829	0	29.673.829	0	84.237.143			0	59	SB	SR
2.24.003.1.03.003	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemeliharaan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelamatan arsip OPD akibat penggabungan, pembubaran dan pemeliharaan organisasi	positif	1	OPD	87.767.000	1	OPD	242.521.500		29.673.829	0	29.673.829	0	84.237.143	- Proses bantu penggabungan Dispora dengan SKDI - Menunggu konfirmasi serta verifikator dari ANRI untuk mengusulkan/mintarekomendasi pemusnahan arsip	Tersedianya regulasi untuk pemusnahan arsip	0	59	SB	SR
2.24.003.1.03.001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	positif	1	Daftar	87.767.000	1	Daftar	242.521.500		29.673.829	0	29.673.829	0	84.237.143			0	38	SB	SR

Laporan Keuangan Dan Fisik

[2.23.2.24.0.00.01.0000] Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Semua

Keterangan : 0-24.99% 25-49.99% 50-99.99% 100%

Kode	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan					Realisasi Fisik			
			Penyedia (Rp)	Swakelola & Non Pengadaan (Rp)	Total (Rp)	Persen (%)	Status	Penyedia (%)	Swakelola & Non Pengadaan (%)	Total (%)	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	57,825,127,062.00	8,204,371,350.00	11,670,027,783.00	19,874,399,133.00	37.62%	K	16.16%	24.31%	42.48%	K
2.23.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40,734,282,654.00	3,371,624,500.00	10,331,555,894.00	13,703,180,394.00	33.64%	K	10.89%	27.73%	38.63%	K
2.23.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,389,909,520.00	1,855,000.00	287,483,926.00	289,338,926.00	20.81%	M	0.55%	22.18%	22.73%	M
2.23.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	934,961,620.00	896,000.00	122,589,276.00	123,485,276.00	13.20%	M	12%	15%	14.90%	M
2.23.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	197,149,500.00	959,000.00	148,990,650.00	149,949,650.00	76.05%	H	54.55%	78%	77.38%	H
2.23.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	257,798,400.00	0.00	15,904,000.00	15,904,000.00	6.16%	M	24.83%	9%	9.35%	M
2.23.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16,474,440,852.00	0.00	7,858,877,690.00	7,858,877,690.00	47.70%	K	0%	53.30%	53.30%	H
2.23.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15,880,661,652.00	0.00	7,598,597,679.00	7,598,597,679.00	47.84%	K	0%	53%	53%	H
2.23.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	452,880,000.00	0.00	121,883,183.00	121,883,183.00	26.91%	K	0%	50%	50%	H
2.23.001.1.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	61,449,600.00	0.00	60,053,420.00	60,053,420.00	97.72%	H	0%	99%	98.59%	H

Kode	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan					Realisasi Fisik			
			Penyedia (Rp)	Swakelola & Non Pengadaan (Rp)	Total (Rp)	Persen (%)	Status	Penyedia (%)	Swakelola & Non Pengadaan (%)	Total (%)	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23.001.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	79,449,600.00	0.00	78,343,408.00	78,343,408.00	98.60%	H	0%	99%	98.68%	H
2.23.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60,849,600.00	0.00	32,534,605.00	32,534,605.00	53.46%	H	0%	54.77%	54.77%	H
2.23.001.1.03.003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	60,849,600.00	0.00	32,534,605.00	32,534,605.00	53.46%	H	0%	55%	54.77%	H
2.23.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	178,869,600.00	48,000,000.00	43,646,494.00	91,646,494.00	51.23%	H	38.74%	24.97%	63.72%	H
2.23.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	91,020,000.00	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	52.73%	H	76.14%	0%	76.14%	H
2.23.001.1.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	87,849,600.00	0.00	43,646,494.00	43,646,494.00	49.68%	K	0%	51%	50.85%	H
2.23.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9,794,838,440.00	598,653,750.00	443,659,056.00	1,042,312,806.00	10.64%	M	13.50%	5.19%	18.69%	M
2.23.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,600,100.00	30,047,625.00	0.00	30,047,625.00	98.19%	H	99%	0%	99%	H
2.23.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,078,239,180.00	409,795,875.00	0.00	409,795,875.00	6.74%	M	17.47%	0%	17.45%	M
2.23.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,030,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	M	0%	0%	0%	M
2.23.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2,567,040,000.00	63,849,250.00	0.00	63,849,250.00	2.48%	M	4.88%	0%	4.88%	M
2.23.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	51,000,000.00	17,961,000.00	0.00	17,961,000.00	35.21%	K	50%	0%	50%	H

Kode	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan					Realisasi Fisik			
			Penyedia (Rp)	Swakelola & Non Pengadaan (Rp)	Total (Rp)	Persen (%)	Status	Penyedia (%)	Swakelola & Non Pengadaan (%)	Total (%)	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,057,928,760.00	77,000,000.00	443,659,056.00	520,659,056.00	49.21%	K	100%	52%	55.64%	H
2.23.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11,622,718,942.00	2,416,054,000.00	1,611,510,887.00	4,027,564,887.00	34.65%	K	22.04%	13.45%	35.50%	K
2.23.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14,690,000.00	3,582,000.00	0.00	3,582,000.00	24.38%	M	33.44%	0%	33.44%	K
2.23.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	700,346,400.00	0.00	296,286,834.00	296,286,834.00	42.30%	K	0%	50%	50%	H
2.23.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10,907,682,542.00	2,412,472,000.00	1,315,224,053.00	3,727,696,053.00	34.17%	K	30.15%	50%	34.57%	K
2.23.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,212,655,700.00	307,061,750.00	53,843,236.00	360,904,986.00	29.76%	K	39.29%	4.74%	44.03%	K
2.23.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199,512,300.00	55,012,950.00	53,843,236.00	108,856,186.00	54.56%	H	89%	42%	56.72%	H
2.23.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	945,663,800.00	220,562,000.00	0.00	220,562,000.00	23.32%	M	41.16%	0%	41.16%	K
2.23.001.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67,479,600.00	31,486,800.00	0.00	31,486,800.00	46.66%	K	46.81%	0%	46.81%	K
2.23.002	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	10,360,878,308.00	4,599,447,000.00	867,735,030.00	5,467,182,030.00	52.76%	H	47.36%	10.29%	57.66%	H
2.23.002.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	8,939,193,308.00	4,599,447,000.00	774,580,715.00	5,374,027,715.00	60.11%	H	52.28%	10.55%	62.84%	H

Kode	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan					Realisasi Fisik			
			Penyedia (Rp)	Swakelola & Non Pengadaan (Rp)	Total (Rp)	Persen (%)	Status	Penyedia (%)	Swakelola & Non Pengadaan (%)	Total (%)	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23.002.1.01.001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	410,933,100.00	44,339,500.00	53,769,108.00	98,108,608.00	23.87%	M	46.32%	33%	39.94%	K
2.23.002.1.01.002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	1,683,000,000.00	7,248,000.00	213,774,461.00	221,022,461.00	13.13%	M	11.05%	23%	21.37%	M
2.23.002.1.01.003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	195,211,000.00	13,750,500.00	125,791,896.00	139,542,396.00	71.48%	H	38.34%	80%	72.23%	H
2.23.002.1.01.006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	145,000,000.00	0.00	22,195,640.00	22,195,640.00	15.30%	M	0%	25%	20.27%	M
2.23.002.1.01.007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	499,999,600.00	49,118,200.00	105,646,400.00	154,764,600.00	30.95%	K	49.83%	30%	34.02%	K
2.23.002.1.01.008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	116,000,208.00	12,990,800.00	37,170,000.00	50,160,800.00	43.24%	K	17.56%	90%	43.79%	K
2.23.002.1.01.009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	5,889,049,400.00	4,472,000,000.00	216,233,210.00	4,688,233,210.00	79.60%	H	81.24%	60%	79.85%	H
2.23.002.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	1,421,685,000.00	0.00	93,154,315.00	93,154,315.00	6.55%	M	16.42%	8.63%	25.06%	K
2.23.002.1.02.003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	1,277,685,000.00	0.00	47,124,800.00	47,124,800.00	3.68%	M	44.72%	10%	24.18%	M
2.23.002.1.02.004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	144,000,000.00	0.00	46,029,515.00	46,029,515.00	31.96%	K	0%	35%	32.81%	K
2.24.002	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1,487,444,600.00	181,123,350.00	428,676,216.00	609,799,566.00	40.99%	K	13.08%	29.37%	42.46%	K
2.24.002.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	685,999,400.00	69,020,000.00	231,117,787.00	300,137,787.00	43.75%	K	10.85%	33.93%	44.78%	K
2.24.002.1.01.003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan	685,999,400.00	69,020,000.00	231,117,787.00	300,137,787.00	43.75%	K	71.56%	40%	44.78%	K

Kode	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan					Realisasi Fisik			
			Penyedia (Rp)	Swakelola & Non Pengadaan (Rp)	Total (Rp)	Persen (%)	Status	Penyedia (%)	Swakelola & Non Pengadaan (%)	Total (%)	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Provinsi										
2.24.002.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	309,365,900.00	6,559,250.00	59,531,567.00	66,090,817.00	21.36%	M	3.27%	20.11%	23.38%	M
2.24.002.1.02.002	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	309,365,900.00	6,559,250.00	59,531,567.00	66,090,817.00	21.36%	M	16.73%	25%	23.38%	M
2.24.002.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	492,079,300.00	105,544,100.00	138,026,862.00	243,570,962.00	49.49%	K	22.37%	28.84%	51.22%	H
2.24.002.1.03.001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	298,079,300.00	72,344,100.00	92,583,880.00	164,927,980.00	55.33%	H	59.36%	55%	56.89%	H
2.24.002.1.03.002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	194,000,000.00	33,200,000.00	45,442,982.00	78,642,982.00	40.53%	K	51.50%	38%	42.51%	K
2.24.003	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	242,521,500.00	52,176,500.00	42,060,643.00	94,237,143.00	38.85%	K	22.40%	17.86%	40.27%	K
2.24.003.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	242,521,500.00	52,176,500.00	42,060,643.00	94,237,143.00	38.85%	K	22.40%	17.86%	40.27%	K
2.24.003.1.03.001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	242,521,500.00	52,176,500.00	42,060,643.00	94,237,143.00	38.85%	K	78.53%	25%	40.27%	K

Aplikasi Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran | Jenis Anggaran MURNI | Tahun Anggaran 2023 | Jam 10:43:29 | Tidak Ada Jadwal

Dari tabel diatas baik didalam pelaporan Evaluasi Dokumen Perencanaan yang di fasilitasi oleh Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur maupun Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) pada triwulan II dapat dikatakan masih **rendah**, secara langsung capaian kinerja dilihar dari sisi keuangan Belanja, anggaran yang dikelola sebesar Rp. 52,825,127,062 dengan realisasi Rp. 19,874,399,133 atau sebesar 37.62%. Dengan realisasi keuangn sebesar 37.62% masih bisa sangat rendah, hal tersebut dikarenakan adanya dinamika anggaran yang ditetapkan pemerintah daerah yang sering berubah disebabkan dengan adanya peralihan system manajemen keuangan daerah serta kebijakan kebijakan finansial lainya yang menyebaban adanya recofusing anggaran, selain itu adanya perubahan perubahan terhadap objek rinjian belanja turut mempengaruhi dengan adanya revisi anggaran sehingga realisasi anggaran turut terpengaruh.

Sedangkan pada sisi kinerja dapat terlihat prosentase kinerja sampai dengan triwulan 2 secara keseluruhan berada pada nilai 42.48%, hanya beberapa subkegiatan yang mendapatkan kinerja rendah, namun bukan berarti tidak berjalan hanya saja bergeserjadwal pelaksanaannya terkait kendala teknis dilapangan. Sejalan dengan capaian kinerja yang telah dilaksanakan tersebut secara keseleruhan tidak mempengaruhi sisi pelayanan terhadap pemustaka atau masyarakat pengguna jasa layanan perpustakaan dan kearsipan.

1.5 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

Sasaran Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi. Penjabaran misi masing-masing Sasaran Strategis sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta cara mencapai tujuan dari sasaran strategis, maka dari sasaran yang telah ditetapkan dan yang dicapai tahun 2023 belum dapat sepenuhnya dilaksanakan, namun sebagian besar dapat mencapai target kinerja yang diharapkan.

Nilai capaian masing-masing sasaran diperoleh dari rata-rata capaian masing-masing indikatornya. Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaanya.

Tugas utama yang hendak dicapai dalam tahun 2023, yaitu : **Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku**

Sasaran ini juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun indikator keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah:

1. Jumlah Masyarakat yang Mendayagunakan Perpustakaan (Online dan Onsite).
2. Jumlah Perangkat Daerah dan LKD yang Menyelenggarakan Kearsipan Sesuai Standar.
3. Terwujudnya pelayanan prima perangkat daerah.

Dalam pemenuhan target yang tertuang didlam sasaran tersebut tentu harus didukung sumber daya aggaran yang memadai, sehingga target Perangk Daerah yang sudah tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat direalisasikan dengan maksimal. Adapun anggaran yang sudah di proyeksika didala RKPD perubahan sebagaimana berikut :

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							35,943,914,400	51,095,168,962	57,829,580,026							33,219,375,583	
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip	%		%	100 %	100 %	23,352,973,600	40,734,292,854	45,570,629,719						100 %	26,169,375,583	
2	23	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	Skor		Skor	67 Skor	67 Skor	250,833,500	1,389,909,520	1,389,909,520						67 Skor	330,000,000	
2	23	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	100,000,000	934,951,520	934,951,520	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN , Mitra DPRD dan Stake Holder terkait	10 Dokumen	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	100,000,000	197,149,100	197,149,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN , Mitra DPRD dan Stake Holder terkait	5 Laporan	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 laporan	2 laporan	50,055,500	257,798,400	257,798,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN , Mitra DPRD dan Stake Holder terkait	2 laporan	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip	%		%	100 %	100 %	17,426,800,396	16,474,448,852	17,866,210,396						100 %	19,872,968,100	
2	23	01	1.02	01	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				94 Orang	94 Orang	17,080,080,396	15,980,693,652	17,240,271,396	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN , Mitra DPRD dan Stake Holder terkait	94 Orang	19,322,968,100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	01	1.02	02	Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	512,000,000	412,868,000	495,100,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN , Mitra DPRD dan Stake Holder terkait	1 Dokumen	550,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	01	102	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	61,200,000	63,449,600	61,449,600	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN , Mitra DPRD dan Stake Holder terkait	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	01	102	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 laporan	1 laporan	12,200,000	13,449,600	13,449,600	Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN , Mitra DPRD dan Stake Holder terkait	1 laporan	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	**23**	**01**	**103**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksanannya Pengelolaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**60,600,000**	**60,849,600**	**60,849,600**						100 %	**75,000,000**	
2	23	01	103	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	60,600,000	60,849,600	60,849,600	Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN , Mitra DPRD dan Stake Holder terkait	1 Laporan	75,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	**23**	**01**	**105**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksanannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**122,075,000**	**178,069,600**	**178,069,600**						100 %	**225,000,000**	
2	23	01	105	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Jenis Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Jenis 1 Paket	2 Jenis 1 Paket	84,875,000	91,020,000	91,020,000	Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN , Mitra DPRD dan Stake Holder terkait	2 Jenis 1 Paket	125,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	01	105	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen 4 Dokumen	1 Dokumen 4 Dokumen	48,800,000	87,849,600	87,849,600	Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN , Mitra DPRD dan Stake Holder terkait	1 Dokumen 4 Dokumen	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	**23**	**01**	**106**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksanannya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,743,449,000**	**9,794,838,440**	**13,247,295,960**						100 %	**2,132,984,700**	

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?p25mjdd9A60Ebc1wGqyAeAnNjGIGdDLmkYWVAIDTcTO6@EWDnqOdHWT6WqG9b5Uks09kAXfz5m1b571AssD1MeyO1Ka3oKyn1nJF0k@L6B5/MHHdhsuWs0qVJ0zvqvGPD4k@LCGQCqMAWbOdWg0lb1Cso38b9d6kKACYbVD4kYUR4eYykK0BWeGneGeWkq@AN... 2/7

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Jenis 1 Paket	2 Jenis 1 Paket	34.842.000	33.600.100	33.600.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN , Mitra DPRD dan Stake Holder terkait	3 Jenis 1 Paket	40.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	455.316.000	6.078.239.100	6.093.239.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN , Mitra DPRD dan Stake Holder terkait	1 Paket	105.154.780	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Gedung Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Jenis 20 Paket	3 Jenis 20 Paket	10.000.000	10.050.400	10.050.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN , Mitra DPRD dan Stake Holder terkait	5 Jenis 20 Paket	250.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	46.910.000	2.167.040.000	2.167.040.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN , Mitra DPRD dan Stake Holder terkait	10 Paket	75.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Jenis 7 Dokumen	4 Jenis 7 Dokumen	13.840.000	11.000.000	11.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN , Mitra DPRD dan Stake Holder terkait	4 Jenis 7 Dokumen	11.840.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Kegiatan 2 Laporan	20 Kegiatan 2 Laporan	1.113.400.000	1.057.928.768	1.621.288.268	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN , Mitra DPRD dan Stake Holder terkait	20 Kegiatan 2 Laporan	1.330.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	**23**	**01**	**1.06**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**2,490,998,704**	**11,622,718,942**	**11,622,718,942**						100 %	**2,643,817,475**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Jenis 2 Laporan	2 Jenis 2 Laporan	27,740,000	14,690,000	14,690,000	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN , Mitra OPD dan Stake Holder terkait	2 Jenis 2 Laporan	27,740,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	719,013,084	700,346,400	700,346,400	Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN , Mitra OPD dan Stake Holder terkait	1 Laporan	719,077,415	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,154,272,648	10,901,682,542	10,901,682,542	Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN , Mitra OPD dan Stake Holder terkait	1 Laporan	1,000,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	**23**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**1,242,125,900**	**1,212,655,700**	**1,212,655,700**						100 %	**1,719,595,500**	
2	23	01	1.09	02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	33 Unit	294,185,080	999,512,000	999,512,000	Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	Sarana dan Prasarana OPD	33 Unit	165,627,308	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	700,000,000	945,663,800	945,663,800	Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	Sarana dan Prasarana OPD	2 Unit	650,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perpustakaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Perpustakaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				55 Unit	55 Unit	247,080,000	67,479,680	67,479,680	Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	Sarana dan Prasarana OPD	55 Unit	960,968,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Persentase Peningkatan layanan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	%		%	11.49 %	11.49 %	**2,590,940,900**	**10,360,870,300**	**12,360,870,300**						11.49 %	**4,050,080,900**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	02	1.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat	%		%	100 %	100 %	**2.340.540.800**	**8.559.195.305**	**9.339.193.305**						100 %	**3.650.000.000**	
2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dijamin oleh Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	349,099,680	410,633,100	410,633,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN ,Pemustaka, Mitra DPKD dan Stake Holder terkait	1 Perpustakaan	350,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	02	1.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	410,000,000	1,665,000,000	1,665,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN ,Pemustaka, Mitra DPKD dan Stake Holder terkait	20 Perpustakaan	500,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	02	1.01	03	Pengembangan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan				500 Eksemplar	600 Eksemplar	200,000,000	195,211,000	195,211,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN ,Pemustaka, Mitra DPKD dan Stake Holder terkait	500 Eksemplar	500,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	02	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikat Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				60 Orang	60 Orang	150,000,000	145,000,000	145,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN ,Pemustaka, Mitra DPKD dan Stake Holder terkait	60 Orang	200,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	02	1.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi				1 Layanan	1 Layanan	500,000,000	499,999,680	499,999,680	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN ,Pemustaka, Mitra DPKD dan Stake Holder terkait	1 Layanan	1,000,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	02	1.01	08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	100,000,000	116,000,200	116,000,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN ,Pemustaka, Mitra DPKD dan Stake Holder terkait	1 Perpustakaan	500,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Diolah dan Dikembangkan untuk Memperkaya Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1600 Eksemplar	1600 Eksemplar	590,517,000	5,899,049,400	6,299,049,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN ,Pemustaka, Mitra DPKD dan Stake Holder terkait	1600 Eksemplar	600,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proklesan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Proklesan Maja Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Gerakan Gemar Membaca	%		%	80 %	80 %	250,000,000	1,421,685,000	3,021,685,000						88 %	400,000,000	
2	23	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				12 Orang	12 Orang	100,000,000	1,277,685,000	1,277,685,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN , Pemerintah, Mitra DPRD dan Stake Holder terkait	12 Orang	110,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				8 Perpustakaan	8 Perpustakaan	110,000,000	140,000,000	1,144,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	ASN , Pemerintah, Mitra DPRD dan Stake Holder terkait	8 Perpustakaan	240,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							1,729,966,600	1,729,966,100	1,329,966,100							2,500,000,000	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Kualitas pengelolaan tertib arsip	%		%	100 %	100 %	1,479,979,800	1,487,444,900	1,487,444,900						100 %	2,100,000,000	
2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Tercapainya pengelenggaraan kearsipan pada UKD Kabupaten / Kota sesuai dengan Peraturan Kearsipan	DRD/UKD		DPD/UKD	47 DPD/UKD	47 DRD/UKD	629,999,800	685,999,400	685,999,400						47 DRD/UKD	1,000,000,000	
2	24	02	1.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi				20 laporan	20 laporan	679,999,900	685,999,400	685,999,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pemisnegaran Kebudayaan	5. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	DRD, UKD, ASN, Mitra DPRD, dan Stake Holder Terkait	28 laporan	1,000,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya	%		%	100 %	100 %	299,980,800	309,365,900	309,365,900						100 %	500,000,000	
2	24	02	1.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses				950 Arsip	958 Arsip	299,980,000	309,365,900	309,365,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Arsip	950 Arsip	500,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pZSrqbB46fEao1wOqyAeArNjGIOdBLmkYWAD7bTO0@EWDnqGiHWTSWqGB6SUko3%KlV5m1c07\AauDHMyOKa3oKysLkJFO@L6553YHHdhuNsIqVJUrvpvOP0k@LCQGCqMKi6bQWg9ld.Cso36b69fBkXACYbVC44YUR4nYyAl3:BMdQmGeMoq@Al... 6/7

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proklesan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Proklesan Maja Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	24	02	1.01		**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	Pelaksanaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada Daerah	cpd		cpd	1 cpd	1 cpd	**499,999,100**	**492,079,000**	**492,079,000**						1 cpd	**400,000,000**	
2	24	02	1.01	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				945 Penggunaan	945 Penggunaan	249,999,100	280,079,000	298,079,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	OPD, UPD, ASN, Mitra DPRD, dan Stake Holder Terkait	945 Penggunaan	680,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	24	02	1.01	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	194,000,000	194,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	OPD, UPD, ASN, Mitra DPRD, dan Stake Holder Terkait	1 Laporan	680,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Persentase Tingkat Penyelamatan, Pengelolaan, Perlindungan serta Pelestarian Arsip	%		%	100 %	100 %	**249,987,600**	**242,521,500**	**242,521,500**						100 %	**400,000,000**	
2	**24**	**03**	1.01		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dilebarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**	Penyelamatan arsip OPD akibat penggabungan, pembubaran dan pemekaran organisasi	cpd		cpd	1 cpd	1 cpd	**249,987,600**	**242,521,500**	**242,521,500**						1 cpd	**400,000,000**	
2	24	03	1.01	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Melakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi				1 Daftar	1 Daftar	249,987,600	242,521,500	242,521,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Arsip OPD, UPD, Mitra DPRD, dan Stake Holder Terkait	1 Daftar	400,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
									TOTAL			**27,673,881,800**	**52,825,127,862**	**59,689,474,126**						**32,719,375,583**	

Melalui Pergub Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, Anggaran Belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 yang bersumber dari dana APBD Murni Provinsi Kalimantan Timur Rp 52,825,127,062,00 dan bersumber dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 332.939.000,00.

Seiring waktu pelaksanaan Rencana kerja APBD murni, masih terdapat beberapa kegiatan yang masih dirasa kurang dalam hal pendanaa, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat diakomorir didalam kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD murni, pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Perubahan) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur mengajukan usulan penambahan anggaran, yang kemudian mendapatkan respon positif dari Pemerintah Daerah melalui surat Sekretaris Daerah Nomor 000.7.2.4/12488/Bapp-II tanggal 31 Juli 2023 perihal Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur mendapat alokasi tambahan anggaran sebesar Rp. 6.844.347.064, sehingga total pagu menjadi Rp. 59,669,474,126.

Dari alokasi anggaran perubahan yang diterima tersebut dialokasikan untuk mendukung program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk mensukseskan pencapaian target sasaran yang tergambar dalam indikator tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim telah mempunyai Program Pembinaan Perpustakaan yang diakomodir didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan rapat koordinasi bidang perrpustakaan dan bidang kearsipan yang melibatkan perangkat Daerah, serta Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten/kota. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Perpustakaan dan kearsipan Provinsi Kalimantan Timur. Dari usulan usulan yang masuk lebih kepada penyediaan sarana dan prasana serta kedalam bentuk kegiatan dalam rangka peningkatan budaya baca masyarakat serta pengembangan litersasi berbasis inkluisi sosial. Adapun dari pagu anggaran murni tahun 2023 sebesar Rp 52,825,127,062, terdapat Rp 17.740.000.000 yang merupakan anggaran yang dialokasikan untuk pokok pikiran.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROV.KALTIM

3.1 Program dan Kegiatan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada berusaha memenuhi visi dan misi melalui program kerja yang berdasarkan pada Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Strategik (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam hal pelaksanaan tupoksi beberapa program dan kegiatan mengalami penyesuaian sebagaimana yang tertuang didalam PERMENDAGRI Nomor 90 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah agar sinkron dengan tupoksi didalam internal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga diperlukan penyesuaian penyesuaian pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebagaimana diakomodir di dalam RENSTRA terlampir dan tertuang didalam RKPD terdiri dari tiga (4) Program, tiga belas (13) kegiata dan Tiga puluh tujuh (37) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1

Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Perubahan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		
						APBD	APBD Perubahan	Keterangan
1					2	3	4	5
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Tetap**	
2	23	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Tetap**	
2	23	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		**Tetap**	
2	23	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		**Tetap**	
2	23	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Tetap**	
2	23	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Tetap**	
2	23	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		**Berubah**	
2	23	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		**Tetap**	
2	23	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		**Tetap**	
2	23	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		**Tetap**	
2	23	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Tetap**	
2	23	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		**Tetap**	
2	23	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Tetap**	
2	23	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		**Tetap**	
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Tetap**	
2	23	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		**Tetap**	
2	23	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		**Tetap**	
2	23	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		**Tetap**	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Perubahan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		
						APBD	APBD Perubahan	Keterangan
1					2	3	4	5
2	23	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		**Tetap**	
2	23	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		**Tetap**	
2	23	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		**Tetap**	
2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Tetap**	
2	23	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		**Tetap**	
2	23	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		**Tetap**	
2	23	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		**Tetap**	
2	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Tetap**	
2	23	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		**Tetap**	
2	23	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		**Tetap**	
2	23	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		**Tetap**	
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**		**Tetap**	
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		**Tetap**	
2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		**Tetap**	
2	23	02	1.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi		**Tetap**	
2	23	02	1.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi		**Tetap**	
2	23	02	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi		**Tetap**	
2	23	02	1.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		**Tetap**	
2	23	02	1.01	08	Pengembangan Perpustakaan Deposit		**Tetap**	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Perubahan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		
						APBD	APBD Perubahan	Keterangan
1					2	3	4	5
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		**Tetap**	
2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		**Tetap**	
2	23	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		**Tetap**	
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		**Tetap**	
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**		**Tetap**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		**Tetap**	
2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		**Tetap**	
2	24	02	1.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi		**Tetap**	
2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi		**Tetap**	
2	24	02	1.02	02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		**Tetap**	
2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi		**Tetap**	
2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN		**Tetap**	
2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi		**Tetap**	
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**		**Tetap**	
2	24	03	1.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota		**Tetap**	
2	24	03	1.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi		**Tetap**	

3.2 Rencana Anggaran

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, bidang perpustakaan dan kearsipan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.Oleh karena itu, pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan penambahan wawasan dan keilmuan melalui berbagai kebijakan.

Berdasarkan hasil evaluasi serta pertimbangan atas berbagai aspek perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, beberapa kegiatan harus dilaksanakan perubahan demi mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD.

Seluruh Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov.Kaltim dikelompokkan dalam bentuk penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu sub kegiatan. Penggambaran Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam Perubahan Rencana Anggaran dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2
Rencana Perubahan Per Jenis Belanja
Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp) Murni	APBD-P (RKPD-P)	(+ / -)
I	**Belanja Operasi**	**41.767.251.262**	**45.150.466.286**	**3.383.215.024**
	Belanja Pegawai	16.187.741.652	17.579.631.196	1.391.889..544
	Belanja Barang dan Jasa	25.579.509.610	27.570.835.090	1.991.325.480
II	**Belanja Modal**	**11.057.875.800**	**14.519.007.840**	**3.461.132.040**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.494.556.800	7.090.442.640	2.595.885.840
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.563.319.000	7.428.565.200	865.264.200
	Jumlah	**52.825.127.062**	**59.669.474.126**	**6.844.347.064**

Tabel 3
Rencana Perubahan Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp) Murni	APBD-P (RKPD-P)	(+ / -)
I	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**68.400.000**	**39.300.000**	**-29.100.000**
	Retribusi Daerah	68.400.000	39.300.000	-29.100.000
	Jumlah	**68.400.000**	**39.300.000**	**-29.100.000**

Tabel 4

Rencana Program Kegiatan,Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Perubahan
Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	APBD Murni		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	APBD-Perubahan		(+/-)
		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Perubahan	Pagu Indikatif Perubahan	
2	3	5	6	7	9	10	11
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			52.825.127.062			59.669.474.126	6.844.347.064
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			51.095.160.962			57.939.508.026	6.844.347.064
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip**	**96%**	**40.734.282.654**	**Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip**	**100%**	**45.578.629.718**	**4.844.347.064**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	67 Skor	1.380.909.520	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	67 skor	1.380.909.520	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	934.961.620	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	934.961.620	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	197.149.500	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	197.149.500	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	257.798.400	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	257.798.400	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan fungsi penatausahaan keuangan	12 Bulan	16.474.440.852	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip	100%	17.866.330.396	1.391.889.544
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang	15.880.661.852	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang	17.240.271.196	1.359.609.344
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	452.880.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	485.160.000	32.280.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	61.449.600	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	61.449.600	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	79.449.600	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	79.449.600	0
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	93%	60.849.600	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	60.849.600	0
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	60.849.600	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	60.849.600	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	178.869.600	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100%	178.869.600	0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	91.020.000	Jumlah Jenis Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Jenis 1 Paket	91.020.000	0
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	87.849.600	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	87.849.600	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	APBD Murni		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	APBD Perubahan		(+/-)
		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Perubahan	Pagu Indikatif Perubahan	
2	3	5	6	7	9	10	11
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pelayanan Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	9.794.938.440	Terlaksananya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100%	13.247.295.960	3.452.457.520
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	30.600.100	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Jenis 5 Paket	30.600.100	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6.078.229.100	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6.961.229.100	-2.885.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	10.030.400	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Jenis 20 Paket	10.030.400	0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2.567.040.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2.567.040.000	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	51.000.000	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Jenis 7 Dokumen	51.000.000	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1.057.928.760	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke kelembagaan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Kegiatan 2 Laporan	1.625.386.280	-567.457.520
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan pemeliharaan Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah	93%	11.622.718.942	Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah	100%	11.622.718.942	0
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	14.690.000	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Jenis 2 Laporan	14.690.000	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	700.346.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	700.346.400	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.907.682.542	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.907.682.542	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor	85 Unit	1.212.655.700	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah	100%	1.212.655.700	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	199.512.300	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	199.512.300	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	APBD Murni		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	APBD-Perubahan		(+/-)
		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Perubahan	Pagu Indikatif Perubahan	
2	3	5	6	7	9	10	11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	945.663.800	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	945.663.800	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	67.479.600	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	56 Unit	67.479.600	0
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi**	**11,49%**	**10.360.878.308**	**Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi**	**11,49%**	**12.360.878.308**	**2.000.000.000**
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat	100%	8.939.193.308	Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat	100%	9.339.193.308	400.000.000
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	5 Perpustakaan	410.933.100	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	5 Perpustakaan	410.933.100	0
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam rangka mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	20 Perpustakaan	1.683.000.000	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam rangka mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	20 Perpustakaan	1.683.000.000	0
Pengembangan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	500 Eksemplar	195.211.000	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	500 Eksemplar	195.211.000	0
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	60 Orang	145.000.000	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	60 Orang	145.000.000	0
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	499.999.600	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	499.999.600	0
Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	116.000.208	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	116.000.208	0
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1600 Eksemplar	5.889.049.400	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1600 Eksemp	6.289.049.400	400.000.000
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Gerakan gemar membaca dalam rangka mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	1 Kegiatan	1.421.685.000	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Gerakan Gemar Membaca	80%	3.021.685.000	1.600.000.000
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	12 Orang	1.277.685.000	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	12 Orang	1.277.685.000	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	APBD Murni		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	APBD Perubahan		(+/-)
		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Perubahan	Pagu Indikatif Perubahan	
2	3	5	6	9	9	10	11
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	144.000.000	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	1.744.000.000	1.600.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			**1.729.966.100**			**1.729.966.100**	**0**
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Persentase kualitas pengelolaan tertib arsip**	**100%**	**1.487.444.600**	**Persentase kualitas pengelolaan tertib arsip**	**100%**	**1.487.444.600**	**0**
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Tercapainya penyelenggaraan kearsipan pada LKD Kabupaten / Kota sesuai dengan Peraturan Kearsipan	47 Laporan	685.999.400	Tercapainya penyelenggaraan kearsipan pada LKD Kabupaten / Kota sesuai dengan Peraturan Kearsipan	47 OPD/LKD	685.999.400	0
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	20 Laporan	685.999.400	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	20 Laporan	685.999.400	0
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya	100%	309.365.900	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya	100%	309.365.900	0
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	950 Arsip	309.365.900	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	950 Arsip	309.365.900	0
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Pelaksanaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada Daerah	1 OPD	492.079.300	Pelaksanaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada Daerah	1 OPD	492.079.300	0
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	945 Pengguna	298.079.300	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	945 Pengguna	298.079.300	0
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	1 Laporan	194.000.000	jumlah peningkatan kualitas tenga fungsiJumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsional	1 Laporan	194.000.000	0
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Persentase Tingkat Penyelamatan, Pengolahan, Perlindungan serta Pelestarian Arsip**	**100%**	**242.521.500**	**Persentase Tingkat Penyelamatan, Pengolahan, Perlindungan serta Pelestarian Arsip**	**100%**	**242.521.500**	**0**
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Penyelamatan arsip OPD akibat penggabungan, pembubaran dan pemekaran organisasi	1 OPD	242.521.500	Penyelamatan arsip OPD akibat penggabungan, pembubaran dan pemekaran organisasi	1 OPD	242.521.500	0
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	1 Daftar	242.521.500	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	1 Daftar	242.521.500	0

Dari tabel diatas usulan yang diajukan pada RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur Dinas PerpustakaanDan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur mendapat jatah alokasi penganggaran pada RKPD Perubahan Sebesar Rp. 6.844.347.064 sehingga total anggaran pada Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023 menjadi Rp.59.669.474.126. Penambahan anggaran dimaksud ditujukan untuk pemenuhan beberapa kegiatan yang tidak bisa di akomodir didalam rencana kerja anggaran murni 2023 seperti Belanja gaji pokok untuk pegawai mutasi, honorarium pengelola keuangan, perjalanan dinas dan biaya pendaftaran Kongres Perpustakaan Internasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kaidah Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2023.

4.2 Rencana tindak lanjut

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-Perubahan) Tahun 2023 yang telah disusun diharapkan dapat diimplementasikan serta dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan dan pedoman dalam Penyusunan RKPD – Perubahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 dan berguna dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan tahun 2023 yang konsisten dan berkomitmen serta mendapat perhatian semua fihak dan tersedianya anggaran yang dibutuhkan.

Adanya Rencana Kerja Perubahan(RENJA-Perubahan) Tahun 2023 ini diharapkan pula agar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov

Kalimantan Timur serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-Perubaan) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yang memuat penjabaran Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan pada tahun mendatang.

Samarinda, 21 Agustus 2023

Kepala Dinas,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Drs. Muhammad Syafranuddin, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19641012 198910 1 004

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pembangunan daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, merupakan pendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, dasar perencanaan pembangunan nasional agar terjadi sinkronisasi, integrasi dan keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Sinkronisasi, integrasi dan keselarasan tersebut diwujudkan melalui perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, matang, relevan dan konsisten pada masing-masing jenjang agar hasil akhir pembangunan dapat terwujud secara efektif dan efisien sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Dalam perekonomian nasional, penyediaan lapangan kerja, penerimaan ekspor dan penerimaan pajak. Dalam perkembangannya, subsektor ini tidak terlepas dari berbagai dinamika lingkungan nasional dan global. Perubahan strategis nasional dan global tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan kelautan dan perikanan harus mengikuti dinamika perubahan lingkungan.

Amanat pembangunan nasional dalam 9 (sembilan) agenda Prioritas NAWACITA yang awajib dilaksanakan untuk pengembangan subsektor kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencakup 2 (dua) Agenda Prioritas, yaitu: (1) **Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional**; dan (2) **Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik**.

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan melalui sektor unggulan nasional

“Kemaritiman dan Kelautan” dan “Kedaulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat meningkatkan kontribusi Produk domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam daerah.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program subsektor kelautan dan perikanan agar mampu eksis dan unggul dalam menghadapi perubahan ekonomi global, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya melaksanakan perubahan secara berkelanjutan menuju arah perbaikan positif dengan berbagai program kegiatan yang bersolusi, aplikatif, inovatif dan ramah lingkungan guna meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Organisasi Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD.

Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya berpedoman berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2019–2023 yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2019.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2019 ini menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja tahun 2023. RKT OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan

dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Timur adalah Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan berdasarkan penerapan konsep Blue Ekonomi sebagai penerjemahan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Dimana selaras dengan Visi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yaitu : ***"Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat".*** Maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai salah satu upaya penting guna mewujudkan transformasi ekonomi sub sektor Kelautan dan Perikanan, dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu (1) Masih rendahnya daya saing sumber daya manusia; (2) Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan berjalan lambat, baik secara vertikal maupun horizontal; (3) Pembangunan infrastruktur belum optimal dalam mendukung peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah; (4) Penurunan kualitas lingkungan hidup dan (5) Pemerintahan yang belum mencapai kinerja profesional dan akuntabel.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan menindaklanjuti perwujudan visi dan misi tersebut sebagaimana terdapat dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

Visi Gubernur Kalimantan Timur :

"Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat"

Upaya pencapaian Visi tersebut melalui pelaksanaan 5 Misi yaitu sebagai berikut :

1. Berdaulat dalam pembangunan sumberdaya manusia yang berahlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. **Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;**
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan;

5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, dengan misi sebagai pihak yang berkepentingan (stakehholder's) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Adapun Misi Gubernur yang sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam mencapai visi adalah sebagai berikut :

Misi 2 : Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan

Mengingat arti strategis dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan RKPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan RKPD yang antara lain adalah :

1. Pelaksanaan Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Rancangan Awal Rencana Kerja-OPD) tahun sebelumnya dan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
2. Program dalam Rancangan Awal Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagai tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan Kegiatan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja OPD harus selaras dalam program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum mendatang.
4. Program dan kegiatan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Rancangan Awal Rencana Kerja OPD dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur umumnya dan Kelautan Perikanan pada khususnya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
8. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Permendagri No.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
14. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.**
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2005 -2025.
18. Peraturan Daerah Nomor 48 Tanggal 1 Desember 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) OPD Provinsi Kalimantan Timur.
19. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2019, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023.

Sedangkan tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Mengsinkronisasikan agenda dan program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan kebutuhan riil OPD Provinsi Kalimantan Timur.
2. Menjadi dasar dalam penyusunan program/kegiatan yang terdapat di Rancangan Awal Rencana Kerja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023 sebagai

rujukan dalam Penyusunan Rancangan Awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

3. Merupakan landasan untuk menetapkan program dan kegiatan OPD serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.
4. Rancangan Awal Rencana Kerja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 dengan tetap memperhatikan RKPD.
5. Rancangan Awal Rencana Kerja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN,

1.1 Latar belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019,

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Pada Tahun 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 9 Program dan 28 Kegiatan, dengan pagu anggaran APBD setelah perubahan sebesar Rp. 80.927.997.000,- (delapan puluh milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 70.218.752.294,87,- (tujuh puluh milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh tujuh Rupiah) dengan persentase capaiannya adalah 86,77%.

Anggaran APBN tahun 2021 dengan 6 program dan 68 kegiatan melalui dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 1.621.094.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.574.688.909,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan rupiah) atau 97,14%.

Adapun tingkat capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Realisasi keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dapat dilaksanakan keseluruhan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.758.865.042,- (tiga puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat puluh dua rupiah) atau 88,15% dengan sisa anggaran Rp. 4.270.831.958,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) dari total anggaran Rp. 36.029.697.000,- (tiga puluh enam milyar dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu

rupiah).

2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Realisasi keuangan program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan sebesar Rp. 3.449.833.835,- (tiga milyar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) atau sebesar 95,04% dengan sisa anggaran Rp. 180,161,165,- (seratus delapan puluh juta seratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh lima rupiah) dari total anggaran Rp. 3.629.995.000,- (dua tiga milyar enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan fisik dicapai 100%. Dalam melaksanakan kegiatan tidak mengalami kendala, dengan rincian realisasi anggaran kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

   Anggaran : Rp. 1,152,057,500,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

   Realisasi : Rp. 1,055,634,020,- (satu milyar lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua puluh rupiah) atau 91,63%

   Sisa Dana : Rp. 96,423,480,- (sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

b. Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

   Total Anggaran : Rp. 1,537,700,000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)

   Realisasi : Rp. 1,486,180,794,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) atau 96,65%

   Sisa Dana : Rp. 51,519,206,- (lima puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus enam rupiah)

c. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

   Total Anggaran : Rp. 940,237,500,- (sembilan ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

   Realisasi : Rp. 908,019,021,- (sembilan ratus delapan juta sembilan belas ribu dua puluh satu rupiah) atau 96,57%

   Sisa Dana : Rp. 32,218,479,- (tiga puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah)

3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Realisasi keuangan program pengelolaan perikanan tangkap lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan sebesar Rp. 17,179,335,544.72,- (tujuh belas milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat koma tujuh puluh dua rupiah) atau sebesar 79,47% dengan sisa anggaran Rp. 4,437,609,455.28,- (empat milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh lima koma dua puluh delapan rupiah) dari total anggaran Rp. 21,616,945,000,- (dua puluh satu milyar enam ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan kegiatan fisik dapat dilaksanakan 100%. Dalam melaksanakan kegiatan tidak mengalami kendala, dengan rincian realisasi anggaran kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

   Anggaran : Rp. 3,266,675,000,- (tiga milyar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

   Realisasi : Rp. 2,969,199,896,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) atau 90,89%

   Sisa Dana : Rp. 297,475,104,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah)

b. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

   Total Anggaran : Rp. 233,325,000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

   Realisasi : Rp. 214,142,100,- (dua ratus empat belas juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) atau 91,78%

   Sisa Dana : Rp. 19,182,900,- (sembilan belas juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)

c. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

   Total Anggaran : Rp. 508,000,000,- (lima ratus delapan juta rupiah)

   Realisasi : Rp. 477,315,160,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu seratus enam puluh rupiah) atau 93,96%

   Sisa Dana : Rp. 30,684,840,- (tiga puluh juta enam ratus delapan puluh

empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah)

d. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

   Total Anggaran : Rp. 17,016,945,000,- (tujuh belas milyar enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

   Realisasi : Rp. 12,929,665,638.72,- (dua belas milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh dua rupiah) atau 75,98%

   Sisa Dana : Rp. 4,087,279,361.28,- (empat milyar delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu koma dua puluh delapan rupiah)

e. Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT

   Total Anggaran : Rp. 592,000,000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah)

   Realisasi : Rp. 589,012,750,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau 99,50%

   Sisa Dana : Rp. 2,987,250,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)

4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Tingkat realisasi keuangan program ini sebesar Rp. 5,090,172,069.65,- (lima milyar sembilan puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu enam puluh sembilan koma enam puluh lima rupiah) atau sebesar 96,40% dengan sisa anggaran Rp. 189,827,930.35,- (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh koma tiga puluh lima rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 5,280,000,000,- (lima milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

   Anggaran : Rp. 550,690,000,- (lima ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

   Realisasi : Rp. 523,011,440,- (lima ratus dua puluh tiga juta sebelas ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau 94,97%

   Sisa Dana : Rp. 27,678,560,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh

puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah)

b. Kegiatan Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

   Total Anggaran : Rp. 104,400,000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah)

   Realisasi : Rp. 103,702,900,- (seratus tiga juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus rupiah) atau 99,33%

   Sisa Dana : Rp. 697,100,- (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah)

c. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

   Total Anggaran : Rp. 4,624,910,000,- (empat milyar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

   Realisasi : Rp. 4,463,457,729.65,- (empat milyar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma enam puluh lima rupiah) atau 96,51%

   Sisa Dana : Rp. 161,452,270.35,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh koma tiga puluh lima rupiah)

5. Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Tingkat realisasi capaian program ini sebesar Rp. 2,761,498,727,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) atau sebesar 83,68% dengan sisa anggaran Rp. 538,501,273,- (lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 3,300,000,000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah). Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, adapun rincian realisasi kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

   Anggaran : Rp. 2,350,000,000,-(dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

   Realisasi : Rp. 2,028,048,589,- (dua milyar dua puluh delapan juta empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau 86,30%

Sisa Dana : Rp. 321,951,411,- (tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus sebelas rupiah)

b. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Anggaran : Rp. 950,000,000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

Realisasi : Rp. 733,450,138,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) atau 77,21%

Sisa Dana : Rp. 216,549,862,- (dua ratus enam belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)

6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Tingkat realisasi capaian program ini sebesar Rp. 771,015,020,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima belas ribu dua puluh rupiah) atau sebesar 64,36% dengan sisa anggaran Rp. 426,984,980,- (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 1,198,000,000,- (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta rupiah). Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, adapun rincian realisasi kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Anggaran : Rp. 603,000,000,-(dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Realisasi : Rp. 242,218,590,- (dua milyar dua puluh delapan juta empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau 40,17%

Sisa Dana : Rp. 360,781,410,- (tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus sebelas rupiah)

b. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Anggaran : Rp. 495,000,000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

Realisasi : Rp. 476,525,430,- (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah) atau 96,27%

Sisa Dana : Rp. 18,474,570,- (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)

c. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan

Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Anggaran : Rp. 100,000,000,- (seratus juta rupiah)
Realisasi : Rp. 52,271,000,- (lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) atau 52,27%
Sisa Dana : Rp. 47,729,000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

7. Program Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar

Tingkat realisasi capaian program ini sebesar Rp. 4,585,484,600,-(empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) atau sebesar 98,89% dengan sisa anggaran Rp. 51,515,400,-(lima puluh satu juta lima ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 4,637,000,000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) Untuk pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

8. Program Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu

Tingkat realisasi capaian program ini sebesar Rp. 827,914,507,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus tujuh rupiah) atau sebesar 98,75% dengan sisa anggaran Rp. 10,445,493,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 838,360,000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) Untuk pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

9. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Tingkat realisasi capaian program ini sebesar Rp. 128,523,979,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau sebesar 60,91% dengan sisa anggaran Rp. 82,476,021,- (delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 211,000,000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) Untuk pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jika dilihat dari Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, hasil pencapaian kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

TABEL 1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TAHUN 2022 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2022
1		3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	**%**	**85**	**81**	**82**	**82**	100.00	84	82	96.86
1	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Nilai Akuntabilitas Kinerja PD*	Nilai	75	63	65	65	100.00	70	66	88.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	8	9	9	100.00	9	9	96.30
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	2	2	100.00	2	2	100.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	2	1	1	100.00	1	1	133.33
2	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	123	12	12	12	100.00	123	49	39.84
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	12	12	100.00	12	12	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	12	12	12	100.00	1	8	833.33

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2022
1		3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
3	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	%	20	20	20	20	100.00	20	20	100.00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	225	225	225	100.00	0	150	15,000.00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	45	45	45	45	100.00	45	45	100.00
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bulan**	12	12	12	12	100.00	12	12	100.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Paket	1	20	20	20	100.00	1	14	1,366.67
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	30	30	30	100.00	1	20	2,033.33
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	1	12	12	12	100.00	1	8	833.33
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	40000	40000	40000	100.00	1	26,667	2,666,700.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	540	2640	2640	2640	100.00	540	1,940	359.26
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Laporan*	1	220	220	220	100.00	1	147	14,700.00
		Jumlah Makan dan Minum Rapat	*Kotak*	1900	1900	1900	1900		1900	1,900	100.00
5	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah**	*Jenis*	2	2	2	2	100.00	2	2	100.00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	*Unit*	3	3	3	3	100.00	3	3	100.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangungan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	*Unit*	130	130	130	130	100.00	3	88	67.44
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah**	Jenis	3	3	3	3	100.00	3	3	100.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	12	12	12	100.00	1	8	833.33
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Laporan*	1	133	133	133	100.00	1	89	8,900.00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2022
1		3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	Jenis	4	4	4	4	100.00	4	4	100.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*Unit*	3	12	12	12	100.00	3	9	300.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	20	20	100.00	20	20	100.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	152	152	152	100.00	3	102	3,411.11

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2022
1		3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	**Luas Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif**	**Ha**	**297,805.90**	**289,048**	**289,048**	**289,048**	100.00	**297,805.9**	291,967	98.04
8	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Kawasan	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen	0	0	0	0	#DIV/0!	1	0	#DIV/0!
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	3982.3	2	2	2	100.00	3,982.30	1,329	33.37
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	5	5	5	5	100.00	5	5	100.00
	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi	Orang	30	1	1	1	100.00	30	11	35.56
9	**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Izin	4	1	1	1	100.00	4	2	50.00
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendasi	2	2	2	2	100.00	2	2	100.00
	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	4	4	4	100.00	1	3	300.00
	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Dokumen	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2022
1		3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
10	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok Masyarakat	13	2	2	2	100.00	13	6	43.59
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	60	2	2	2	100.00	60	21	35.56
	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	8	4	4	4	100.00	8	5	66.67
	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	50	6	6	6	100.00	50	21	41.33
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	5	5	5	5	100.00	5	5	100.00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	**167,593**	**167,042**	**158,938**	**173,996**	109.47	**182,730**	174,589	104.17
11	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Kegiatan	2	2	2	2	100.00	2	2	100.00
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12	Dokumen	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	66	2	2	62	3,100.00	66	43	65.66
12	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan	4	4	1	1	100.00	4	3	75.00
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12	Dokumen	1	2	1	1	100.00	1	1	133.33
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	8	2	1	1	100.00	8	4	45.83

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2022
1		3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
13	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	**Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	Dokumen	175	200	100	257	257.00	175	211	120.38
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Dokumen	175	200	100	257	257.00	175	211	120.38
14	**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Dokumen	300	250	250	250	100.00	300	267	88.89
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Dokumen	300	250	0	0	#DIV/0!	300	183	61.11
15	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	Lokasi	4	3	6	6	100.00	4	4	108.33
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	1	1	4	4	100.00	1	2	200.00
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	6	6	6	6	100.00	6	6	100.00
16	**Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	**Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	Rekomendasi		0	50	50	100.00		17	#DIV/0!
	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	0	0	50	50	100.00	0	17	#DIV/0!

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2022
1		3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)**	**Ton**	**168,710**	**160,244**	**161,216**	**160,240**	99.39	**178,961**	166,482	98.68
		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita)	**Kg/Kapita**	**60**	**53.18**	**54**	**54.42**	100.78	**58**	55	92.00
17	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Dokumen	3	3	3	3	100.00	3	3	100.00
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Dokumen	0	3	3	3	100.00	0	2	#DIV/0!
18	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing**	**Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing**	Rekomendasi	2	1	1	1	100.00	2	1	66.67
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi	3	3	3	3	100.00	3	3	100.00
19	**Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing**	**Jumlah Sosialisasi Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing**	Rekomendasi	0	1	1	1	100.00	0	1	#DIV/0!
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang	Rekomendasi	0	1	1	1	100.00	0	1	#DIV/0!
20	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Lokasi	10	3	3	3	100.00	10	5	53.33
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	2	2	2	100.00	1	2	166.67

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2022
1		3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
21	**Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut**	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	3	3	3	3	100.00	0	2	66.67
		Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Laut yang	Kegiatan	1	0	0	0	#DIV/0!	0	1	100.00
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar yg disediakan	Pokdakan	8	5	5	7	140.00	0	4	50.00
		Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar (HDPE)	Unit	1	0	0	0	#DIV/0!	1	0	33.33
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	1	1	9	9	100.00	3	4	433.33
			Unit Teknis	0	3	3	3	100.00	0	2	#DIV/0!
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Melebihi Pagu Validasi	Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	Benih	5,000	0	1,000,000	1,000,000	100.00	5,000	335,000	6,700.00
		Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	Pokdakan	30	15	15	15	100.00	30	20	66.67
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Dokumen	70	60	60	70	116.67	70	67	95.24
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Orang	75	70	70	70	100.00	75	72	95.56
			Orang	120	0	0	0	#DIV/0!	120	40	33.33

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2022
1		3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan (%)**	**%**	**47.06**	**37.07**	**40.74**	**40.75**	100.02	**47.06**	41.63	88.45
21	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	%	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	3	4	2	10	500.00	3	6	188.89
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	7	2	30	30	100.00	7	13	185.71
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	2	3	12	12	100.00	2	6	283.33
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Kelompok	0	0	0	0	#DIV/0!	20	7	#DIV/0!
22	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	%	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	3	3	6	6	100.00	3	4	133.33
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai,	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah	Dokumen	3	2	15	15	100.00	3	7	222.22
	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	6	2	15	15	100.00	6	8	127.78

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2022
1		3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan**	**Jenis**	**4**	**3**	**2**	**2**	100.00	**4**	3	75.00
23	**Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Kegiatan	2	4	4	4	100.00	2	3	166.67
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	10	30	40	40	100.00	10	27	266.67
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah	Dokumen	4	4	4	4	100.00	4	4	100.00
24	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	UMNKM	20	20	20	20	100.00	20	20	100.00
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran	Unit Usaha	20	20	20	37	185.00	20	26	128.33
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Unit Usaha	2	1	1	2	200.00	2	2	83.33
25	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah**	**Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah**	Lokasi	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	Dokumen	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2022
1		3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar							#DIV/0!			#DIV/0!
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan PD (SKM)**	**SKM**	**85**	**80**	**82**	**81**	98.78	**84**	82	96.08
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	%	20	20	20	20	100.00	20	20	100.00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	4	4	4	4	100.00	4	4	100.00
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	Bulan	12	12	12	12	100.00	12	12	100.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10	10	10	100.00	1	7	700.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	30	30	30	100.00	1	20.3333333	2,033.33
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	1	12	12	12	100.00	1	8.33333333	833.33
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10,000	10,000	10,000	100.00	1	6,667	666,700.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	240	960	960	960	100.00	240	720	300.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	20	19	19	100.00	1	13	1,333.33
4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah**	Jenis	3	1	1	1	100.00	3	2	55.56
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	12	12	12	100.00	1	8	833.33
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	8	8	8	100.00	1	6	566.67

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2022
1		3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	**Jenis**	**2**	**1**	**1**	**1**	100.00	**2**	1.33333333	66.67
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut (Milyar Ekor)**	**Milyar Ekor**	**3.1**	**2.6**	**2.8**	**2.8**	100.00	**3**	2.80	90.32
6	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	Milyar Ekor	**3.1**	**2.6**	**2.8**	**2.8**	100.00	**3**	2.80	90.32
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana UPTD Manggar Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang direhab	Unit	2	8	10	10.0	100.00	2	6.67	333.33
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana UPTD Manggar Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	Unit	2	2	2	2	100.00	2	2	100.00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2022
1		3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan							#DIV/0!			#DIV/0!
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan PD (SKM)**	**SKM**	**85**	**81**	**82**	**81**	99.19	**84**	82	96.60
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	%	20	20	20	20	100.00	20	20	100.00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		14	14	14	14	100.00	14	14	100.00
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	Bulan	12	12	12	12	100.00	12	12	100.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	5	2	46.67	6	3	51.85
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1	50	17	34.67	12	10	84.26
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	6	12	12	12	100.00	6	10	166.67
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	10,000	10,000	10,000	100.00	12	6,671	55,588.89
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	120	720	720	720	100.00	120	520	433.33
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	37	43	39	90.70	1	25.6666667	2,566.67
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah**	*Jenis*	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	*Unit*	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah**	Jenis	3	1	1	1	100.00	3	1.66666667	55.56
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1	1	1	100.00	12	4.66666667	38.89
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1	12	5	38.89	12	5.88888889	49.07
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	8	8	8	100.00	12	9.33333333	77.78

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2022
1		3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	**Jenis**	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	1	1	1	100.00	2	1.33333333	66.67
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	1	1	1	100.00	60	20.6666667	34.44
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0					0		
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan (Sampel)**	**Sampel**	**240**	**220**	**220**	**239**	108.64	**240**	233	97.08
7	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Jumlah Sampel Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Sampel	240	220	220	239	108.64	240	233	97.08
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Unit Usaha	10	220	220	239	108.64	10	156.333333	1,563.33

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu							#DIV/0!			#DIV/0!
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan PD (SKM)**	**SKM**	**85**	**81**	**82**	**81**	99.19	**84**	82	96.60
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	%	20	15	15	15	100.00	20	16.6666667	83.33
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	18	21	15	19	126.67	18	19	107.41
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum**	Bulan	12	12	12	12	100.00	12	12	100.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10	10	10	100.00	1	7	700.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	30	30	30	100.00	1	20.3333333	2,033.33
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	1	12	12	12	100.00	1	8.33333333	833.33
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10,000	10,000	10,000	100	1	6,667	666,700.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	30	30	30	100.00	1	20.3333333	2,033.33
4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah**	Jenis	3	1	1	1	100.00	3	1.66666667	55.56
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	12	12	12	100.00	1	8.33333333	833.33
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	15	15	15	100.00	1	10.3333333	1,033.33

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	**Jenis**	3	3	3	3	100.00	3	3	100.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1	2	1	66.67	2	1	72.22
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut (Ekor)**	**Ekor**	**3,847,000**	**32,000**	**1,232,000**	**1,377,500**	111.81	**3,797,000**	1,735,500	45.11
6	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Payau/Laut/Tawar (Ekor)	Ekor	**3,847,000**	**32,000**	**1,232,000**	**1,377,500**	111.81	**3,797,000**	1,735,500	45.11
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana UPTD Sebulu Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang direhab	Unit	6	1	1	1	100.00	6	2.66666667	44.44
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana UPTD Sebulu Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	Unit	2	2	2	2	100.00	2	2	100.00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan dekonsentrasi bidang perikanan dan kelautan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan di provinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kelautan dan perikanan di wilayah provinsi;
c. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan;
d. Pelaksanaan pengembangan komoditi dan usaha kelautan dan perikanan di wilayah provinsi;
e. Pelaksanaan pengolahan promosi dan pemasaran kelautan dan perikanan berkelanjutan;
f. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh gubernur.

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja Utama	SPM/Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Kontribusi lapangan usaha subsektor perikanan terhadap PDRB (%)	8,11		1,58	1,60	1,62	1,64	1,67	1,70	1,64		
2.	Indeks Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya (NTNP)	103		100	100	100	100	102,57	100,77	100		
3.	Nilai Ekspor Perikanan (USD)	-		0	36.030.000	36.066.030	36.102.096	0	62.649.686	36.102.096		
4.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	8,42 Juta Ton		155.516	158.938	162.593	182.730	158.709	173,996	182.730		
5.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	19,47 Juta Ton		158.055	161.216	164.441	178.961	155.000	160,240	178.961		

No	Indikator Kinerja Utama	SPM/Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	
6.	Jumlah Ketersediaan Produksi Benih (Ekor)	-	-	2,8 Milyar	2,9 Milyar	2,9 Milyar	3 Milyar	2,6 Milyar	2,8 Milyar	3 Milyar		
7.	Jumlah produksi ketersediaan benih udang galah/ikan air laut (ekor)			70.000	1.232.000	2.264.000	3.797.000	32.000	1,377,500	3.797.000		
8.	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita)	58,08	-	52	54	56	58	53,18	54,42	58		
9.	Jumlah hasil bahan uji perikanan yang dilakukan pemeriksaan (Sampel)	-	-	210	220	230	240	210	239	240		
10.	Jumlah Pelaku Investasi Jasa Kelautan yang difasilitasi (Pelaku Investasi)	-	-	2	3	3	3	2	0	3		
11.	Jumlah Kawasan Konservasi yang	24,2 Juta Ha	-	1	1	1	1	1	289,048 Ha	297,805.90 Ha		

No	Indikator Kinerja Utama	SPM/Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	
	ditata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan yang di restorasi)											
12.	Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	-	-	35,28	37,07	40,74	44,82	36,87	40,75	44,82		

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur ditunjang oleh organisasi dan tata kerja yang terdiri dari unsur dinas dengan bidang-bidang dan unit pelaksana teknis dinas. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan dan kelautan.

b. Sekretaris

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan.

Dalam melaksanakan fungsi dan peranan tersebut dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian, sebagai berikut :

a. Sub Bagian Perencanaan Program;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang-Bidang yang terdiri dari 4 bidang yaitu :

1. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil :

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis rehabilitasi, konservasi kelautan dan perikanan serta reklamasi.

Dalam melaksanakan fungsi dan peranan tersebut dibantu oleh :

a. Seksi Reklamasi dan Jasa Kelautan
b. Seksi Konservasi Kelautan dan Perikanan
c. Seksi Pendayagunaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan :

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalaian dan pengawasan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, penangkapan ikan, pengawasan budidaya, pengolahan dan pemasaran.

Dalam melaksanakan fungsi dan peranan tersebut dibantu oleh 3 (tiga) seksi, sebagai berikut :

a. Seksi Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan
b. Seksi Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau^{2} Kecil dan Penangkapan Ikan
c. Seksi Pengawasan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran

3. Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknologi budidaya dan pembenihan, sarana dan prasarana budidaya dan pembenihan, pengembangan usaha pengolahan ikan, promosi investasi, perizinan pengolahan dan pemasaran.

Dalam melaksanakan fungsi dan peranan tersebut dibantu oleh 3 (tiga) seksi, sebagai berikut :

a. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
b. Seksi Perikanan Budidaya
c. Seksi Usaha Perikanan Budidaya

4. Bidang Perikanan Tangkap

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis prasarana dan pengelolaan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan, teknologi dan pengembangan usaha penangkapan ikan, serta pengelolaan sumber daya ikan dan pelayanan usaha penangkapan ikan.

Dalam melaksanakan fungsi dan peranan tersebut dibantu oleh :

a. Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan
b. Seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
c. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :

1. Kepala UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Manggar, Kelas A membawahi :
   a. Sub Bagian Tata Usaha
   b. Seksi Pengujian Mutu
   c. Seksi Pengendalian Mutu

2. Kepala UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Sebulu, Kelas B membawahi :
   a. Sub Bagian Tata Usaha

3. Kepala UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan, Kelas B membawahi :
   a. Sub Bagian Tata Usaha

Kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur diukur berdasarkan target sasaran pada kurun waktu perencanaan yang telah dilakukan lima tahun sebelumnya. Kinerja pelayanan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelayanan serta tugas dekonsentrasi dan pembantuan di sektor kelautan dan perikanan. Tugas dekonsentrasi Dinas Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 07 tahun 2008. Tugas dekonsentrasi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2007, telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur No.05 Tahun 2009.

Pelayanan Publik di bidang kelautan dan perikanan, dilakukan melalui :

- Kaji terap Teknologi Perikanan dan Kelautan
- Melakukan sosialisasi tentang teknologi perikanan dan kelautan;
- Pelayanan Fasilitasi Prasarana perikanan dan kelautan, yaitu Fasilitasi Pangkalan Pendaratan Ikan, Prasarana Budidaya dan Tangkap, Fasilitasi Pelayanan Usaha Pengolahan;
- Pelayanan usaha pemanfaatan asset daerah melalui pengujian mutu laboratorium, pengukuran bahan sampel ikan/udang untuk keamanan pangan, uji kualitas air, serta penjualan benih ikan/udang yang telah dilakukan di 3 UPT lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Kelautan dan Perikanan diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan di masa lima tahun mendatang.

Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Belum optimalnya produksi perikanan hasil tangkapan.
2. Belum optimalnya produksi budidaya perikanan.
3. Belum optimalnya pengembangan nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan.
4. Belum optimalnya pembangunan kawasan kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan berbasis rendah emisi.
5. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.
6. Belum optimalnya mutu produk hasil perikanan.
7. Belum optimalnya ketersediaan komoditas perikanan unggulan (udang windu) dan ikan air payau/laut.
8. Belum optimalnya ketersediaan komoditas perikanan yang spesifik.
9. Penurunan kualitas air yang disebabkan oleh limbah rumah tangga, pembukaan hutan untuk perkebunan sawit, limbah industri maupun pertanian.
10. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya Kaltim (ikan dan rumput laut), dikarenakan teknologi yang masih sederhana/tradisional.
11. Perlunya sarana dan prasarana kapal penangkapan ikan dan alat tangkap modern dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap sebagai sumber pangan perikanan;
12. Belum terkelolanya pulau-pulau kecil sebagai kekuatan ekonomi dalam rangka pemerataan pertumbuhan sesuai dengan semangat Nawacita yaitu membangun daerah dari pinggiran;

13. Belum optimalnya industri pengolahan perikanan Kaltim (khususnya di kawasan Indonesia Bagian Timur) dalam rangka mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif untuk memperkuat daya saing produk guna kesejahteraan masyarakat perikanan;
14. Kurangnya ketersediaan BBM untuk nelayan dan pembudidayaan ikan;
15. Belum optimalnya pengawasan UU Perikanan *(Illegal Unreported and Unregulated Fishing*) dan *Destruktif Fishing*.
16. Perlunya peningkatan kawasan konservarsi laut Kaltim sebagai sumber ketersediaan stok ikan;
17. Minimnya kapasitas SDM kelautan dan perikanan;
18. Peningkatan IPTEK kelautan dan perikanan serta diseminasi teknologi;
19. Belum optimalnya penyerahan bantuan kepada masyarakat dan penurunan Produksi akibat pandemi covid19.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah** dengan Hasil Analisis Kebutuhan.

Adapun Program Prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Produksi Budidaya dan Pengolahan Pemsaran Hasil Perikanan
3. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
5. Program Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah.
6. Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau/Air Laut
7. Program Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

8. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
9. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

11. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
13. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
14. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tabel Review terhadap RKPD Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana tertera dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	8 Kab/Kota	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD	84 SKM	**18,483,950,000**	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	8 Kab/Kota	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD	84 SKM	**42,328,158,871**	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda, Balikpapan, Kukar	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	3,793,350,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda, Balikpapan, Kukar	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	210,000,000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda, Balikpapan, Kukar	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	0	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda, Balikpapan, Kukar	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	23,979,823,835	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2,038,552,700	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	4 Jenis	4,677,450,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	4 Jenis	927,547,000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	2 Jenis	0	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	2 Jenis	4,118,989,600	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Kab/Kota	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	7,635,250,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Kab/Kota	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	8,927,374,636	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70 Nilai	2,395,800,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70 Nilai	2,125,871,100	
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	10 Kab/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	166.170 Ton	**11,279,213,000**	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	10 Kab/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	182.730 Ton	**36,610,615,500**	
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Pemgolahan Pemasaran Hasil Perikanan	10 Kab/Kota	- Jumlah Produksi Perikanan Budidaya - Jumlah olahan hasil perikanan yang dipasarkan	167.730 Ton 4 Jenis	**6,721,650,000**	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Pemgolahan Pemasaran Hasil Perikanan	10 Kab/Kota	- Jumlah Produksi Perikanan Budidaya - Jumlah olahan hasil perikanan yang dipasarkan	178.961 Ton 4 Jenis	**7,273,735,065** **3,567,233,900**	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10 Kab/Kota	Luas Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	297.805 Ha	**4,591,950,000**	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10 Kab/Kota	Luas Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	297.805 Ha	**6,492,268,400**	
5	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Kukar, Kutim, Berau, BPN, Bontang	Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	47,06%	**4,090,900,000**	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Kukar, Kutim, Berau, BPN, Bontang	Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	47,06%	**3,735,029,400**	
Pagu Indikatif Dinas					45,185,563,000	Pagu Kebutuhan Dinas				100,007,041,136	
UPTD PMHP											
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Samarinda	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD	84 SKM	**1,378,514,000**	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Samarinda	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD	84 SKM	**1,132,763,504**	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	0	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	69,480,000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	345,500,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	91,512,500	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	381,016,484	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Jenis	0	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Jenis	0	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	623,014,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	494,204,720	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	1 Jenis	410,000,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	1 Jenis	96,549,800	
2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Samarinda	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan	240 Sampel	415,000,000	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Samarinda	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan	240 Sampel	**293,870,600**	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pagu Indikatif UPTD PMHP					**1.793.514.000**	Pagu Kebutuhan UPTD PMHP				**1,426,634,104**	
UPTD SPAPAL MANGGAR											
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Balikpapan	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD	84 SKM	1,410,900,000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Balikpapan	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD	84 SKM	**2,756,593,000**	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	0	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	98,760,000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	463,200,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	64,850,000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,073,478,400	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah	3 Jenis	632,500,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah	3 Jenis	779,507,500	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			daerah					daerah			
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	2 Jenis	315,200,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	2 Jenis	**739,997,100**	
2	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan	Balikpapan	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut (Milyar Ekor)	3 Milyar Benih	4,789,100,000	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan	Balikpapan	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut (Milyar Ekor)	3 Milyar Benih	**4,144,173,869**	
Pagu Indikatif UPTD SPAPAL MANGGAR					**6.200.000.000**	Pagu Kebutuhan UPTD SPAPAL MANGGAR				**6,900,766,869**	
UPTD SPAPAL SEBULU											
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Kutai Kartanegara	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD	84 SKM	1,853,785,000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Kutai Kartanegara	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD	84 SKM	**2,881,836,700**	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	0	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	87,120,000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20%	294,000,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20%	115,600,500	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	521,722,600	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kutai Kartanegara	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	795,000,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kutai Kartanegara	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	854,642,800	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kutai Kartanegara	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	764,785,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kutai Kartanegara	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	1,302,750,800	
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kukar	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut (Ekor)	3,797,000 Ekor	928,000,000	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kukar	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut (Ekor)	3,797,000 Ekor	**1,205,657,200**	
Pagu Indikatif UPTD SPAPAL SEBULU					2.781.785.000	Pagu Kebutuhan UPTD SPAPAL SEBULU				**4,087,493,900**	
PAGU INDIKATIF KESELURUHAN					**55.960.862.000**	**PAGU KEBUTUHAN KESELURUHAN**				**112,421,936,009**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur terhadap setiap program/kegiatan yang direncanakan baik internal maupun eksternal diupayakan berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat (*pro poor, pro job, pro growth dan pro environment*)

Arah kebijakan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur terhadap pelayanan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, secara *On-Farm* dan *Off-Farm* secara garis besar adalah sebagai berikut:

a. Untuk kegiatan *On Farm* antara lain meliputi:
   - Pengembangan komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi;
   - Meningkatkan optimalisasi penyediaan benih udang/ikan;
   - Pelayanan rekomendasi perijinan usaha budidaya, tangkap dan pengolahan.
   - Pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat pemanfaat berupa sarana dan prasarana pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasaran hasil perikanan.

b. Sedangkan kegiatan *Off Farm* adalah untuk mendukung pengelolaan hasil produksi perikanan. Baik sejak pasca panen, pengolahan sampai pada pemasaran hasil. Adapun kegiatannya antara lain :
   - Diversifikasi produk olahan dan Layanan Pengujian mutu;
   - Promosi Hasil Produk Perikanan.

Tabel 4. Usulan Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Seksi	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu	Indikator Kinerja	Target	Catatan	Lokasi
A	**PENGELOLAAN RUANG LAUT**						
1	PENDAYAGUNAAN RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	728,178,700	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen		Samarinda
		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	240,607,100	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	60 Orang		Kota Balikpapan dan Kab. PPU
		Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	481,214,200	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8 Kelompok		Kab. Kukar, Kota Bontang, Kab. Berau, Kota Balikpapan
2	REKLAMASI DAN JASA KELAUTAN	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	255,000,000	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2 Rekomendasi		Kab. Berau, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kota Samarinda
		Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	385,000,000	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	1. Akan dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Perizinan Berusaha di Kab. Berau	Kota Balikpapan, Kab. Berau, Kab. PPU, Kota Samarinda
		Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	100,000,000	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	1 Rekomendasi		Kota Balikpapan
		Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	760,000,000	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	1. Telah diakomodir dalam bentuk pengadaan Percontohan Tunnel Garam sebanyak 1 Paket	Kab. Kukar, Kab Kutim, Kota Balikpapan, Kab. Berau, Kab. Paser
3	KONSERVASI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari	654,600,000	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	3982,30 Ha	1. Rehabilitasi mangrove (Paser) 2. Pelestrarian Biuku / beluku (*batagur borneoensus)* Desa Bekoso (Pelatihan) (Paser)	Kab. Kutai Kartanegara

No	Seksi	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu	Indikator Kinerja	Target	Catatan	Lokasi
		Pemerintah Pusat					
		Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	160,000,000	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	5 Ha		Kota Balikpapan
		Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	75,000,000	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	30 Orang	1. Mengusulkan pelatihan Transplasi Karang untuk KUB Nelayan (Berau)	Kab. Berau
		Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	217,500,000	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	50 Orang		Berau, Kukar
B	**PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						
1	PENGAWASAN WILAYAH PESISIR, PULAU-PULAU KECIL DAN PENANGKAPAN IKAN	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	900,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	7 Dokumen		Kukar, Berau, Kutim, PPU, Paser, Balikpapan
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	362,875,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	3 Dokumen	1. Pembentukan POKMASWAS (Kubar)	Kubar, Kukar, Paser
2	PENGAWASAN, PEMBUDIDAYA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	450,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	2 Dokumen		Berau, Bontang
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	450,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	3 Dokumen		Kukar, Samarinda, Kubar
		Pengawasan Usaha Pemasaran	612,875,000	Jumlah Dokumen Hasil	6 Dokumen	1. Sosialisasi Permen KP 31 Tahun 2021	Balikpapan, PPU, Paser,

No	Seksi	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu	Indikator Kinerja	Target	Catatan	Lokasi
		dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang kelautan dan Perikanan ke Pelaku Usaha (BPP)	Kutim, Mahulu, Berau
3	PENANGANAN PELANGGARAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	900,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	3 Dokumen	1. Pembangunan kantor PSDKP 1 unit (Bontang) 2. Rehabilitasi Pos PSDKP 2 unit (Bontang) 3. Mengusulkan 1 proses penyidikan untuk kegiatan di perairan umum (Berau)	10 Kab/Kota
C	**PERIKANAN TANGKAP**						
1	PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DAN KENELAYANAN	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	225,719,000	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1. Sosialisasi fasilitasi surat kapal (Bontang)	Balikpapan
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2,236,305,000	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	66 Unit	1. Fasilitasi Alat Tangkap yang ramah Lingkungan (Balikpapan) 2. Pengadaan unit penangkap > 10 Gtsebagai Pilot Project (Kukar) 3. Mengusulkan 6 KUB (Berau)	8 Kab/Kota
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	240,894,000	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen		Balikpapan
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	705,932,000	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	4 Unit	1. Pengadaan Perahu dan Mesin (Kubar) 2. Pengadaan Pukat dan Jala (Kubar)	Kukar, Kubar, Samarinda
2	PENGENDALIAN PENANGKAPAN IKAN	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	739,000,000	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	175 Dokumen		8 Kab/Kota
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	558,725,000	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	300 Dokumen	1. Fasilitasi perijinan kapal kecil (Balikpapan) 2. Penerbitan TDKP Kab. Kubar (Kecamatan Penyingghan, Muara Pahu, Melak, Mook Manaar Bulant, Jempang) 3. 200 kapal mengingat masih banyak kapal perikanan yang belum terdaftar/izin rekom BBM dan yang lainnya (Paser) 4. Mengusulkan 150 kapal nelayan untuk wilayah tengah dan selatan (Berau)	10 Kab/Kota
3	PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	5,869,300,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	1. PPI Kota Bangun masih memerlukan sarana dalam mendukung optimalisasi operasional (Kukar) 2. Mengusulkan pembangunan TPI di	Balikpapan, PPU, Samarinda, Kutim,Berau

No	Seksi	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu	Indikator Kinerja	Target	Catatan	Lokasi
						Tanjung Baru (Berau)	
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	800,000,000	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	6 Layanan		Balikpapan, PPU, Samarinda, Bontang, Kutim,Berau
D	**PERIKANAN BUDIDAYA**						
1	PERIKANAN BUDIDAYA	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	174,000,000	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	3 Rekomendasi	1. Design Master Plan kampung Budidaya Krapu (Berau) 2. Peta potensi budidaya berbasis komoditi (Berau) 3. Restocking ikan endemik (Berau) 4. Sapras budidaya berbasis solar cell (Berau) 5. Optimalisasi BBIP produksi gelondongan benih krapu (Berau)	Kutai Timur
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	247,615,000	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1. Diperlukan perbaharuan data base/kerangka survey (Paser)	Balikpapan
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	123,260,000	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Laut yang disediakan	1 Kegiatan		Bontang
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	750,000,000	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar (BIOFLOG)	1 Unit		Kukar (Muara Badak)
		Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	264,133,000	Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	5000 Benih		Samarinda (Unmul)
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	480,000,000	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	70 Dokumen	1. Dialokasikan sebagai salah satu tempat pengambilan sampel ikan (Paser)	10 Kab/Kota
		Pembinaan dan Pemantauan	228,002,000	Jumlah Pembudidaya	75 Orang		10

No	Seksi	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu	Indikator Kinerja	Target	Catatan	Lokasi
		Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi					Kab/Kota
2	USAHA PERIKANAN BUDIDAYA	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1,140,724,000	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit		Kukar, Bontang, Berau
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	172,960,000	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar yg disediakan	Unit	1. Fasilitasi Sarana dan Prasarana " Keramba Jaring Apung di Kariangau (Balikpapan)	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	192,880,000	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	1. Fasilitasi Sarana Penjemuran rumput Laut dan Perahu Sampan di Pokdakan Nestapa dan Mina Barokah (Balikpapan) 2. Pengadaan bibit rumput laut unggul hasil culture jaringan (Bontang) 3. Demplot kaji terap udang vaname sistem Bioflok 1 Paket (Bontang)	Berau
		Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1,031,540,000	Jumlah Benih Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	30 Pokdakan	1. Sesuai permohonan bantuan dalam proposal yaitu Saponin, waring, ikan lokal pepuyu, gabus, pakan dan mesin pakan (Paser) 2. Bantuan Mesin Pakan Ikan untuk Kelompok Pembudidaya Ikan "Suchi" Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.	Paser, PPU, Samarinda, Kukar, Kubar, Kutim, Berau
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	501,833,000	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	120 Orang		Paser, Balikpapan, Berau
3	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	149,737,500	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Rekomendasi	1. Harapannya kabupaten yang memiliki produk spesifik lokal dapat dipertimbangkan menjadi lokasi sasaran ex: Paser (petis, amplang bulan-bulan, kerupuk aneka ikan) (Paser)	10 Kab/Kota
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	465,500,000	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah	4 Dokumen		4 Kab/Kota

No	Seksi	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu	Indikator Kinerja	Target	Catatan	Lokasi
		Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko			
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	545,450,000	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	20 Unit Usaha	1. Sosialisasi Pelaksanaan Peijinan Berusaha pada Usaha Pengolahan ke Pelaku Utama (Balikpapan) 2. Sosialisasi Persyaratan penerapan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil di Kecamatan Jempang, Muara Pahu, Mook Manoor Bulant. Pengadaan freezer box 500 L sebanyak 10 unit untuk kelompok pengolahan di Kecamatan Jempang, Muara Pahu, Mook Manaar Bulant (Kubar)	10 Kab./Kota
		Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	160,325,000	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	2 Unit Usaha	1. Bimbingan Manajemen Perikanan Tangkap, sehingga Terciptanya usaha perikanan tangkap yang unggul baik dari pengolahan, pemasaran dan pendapatan (Samarinda)	Samarinda, Berau
		Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	142,737,500	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	1 Dokumen	1. Pelatihan /sosialiasi Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan di Kecamatan Barong Tongkok (Kubar) 2. Peringatan Hari Ikan Nasional (Bontang)	Balikpapan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran Strategis pembangunan kelautan dan perikanan berdasarkan tujuan yang akan dicapai (Permen KP Nomor : 25/PERMEN-KP/2016 tentang Renstra KKP Tahun 2016-2019), lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. Sasaran Strategis Rentsra KKP 2020 - 2023

SASARAN STRATEGIS & INDIKATOR KINERJA		2020	2023	2023	2023	2024
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE						
SS 1. Kesejahteraan Masyarakat KP meningkat						
1.	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP	59,16	60,31	61,47	62,66	63,87
	Nilai Tukar Nelayan	102,00	103,00	105,00	106,00	107,00
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00
	Nilai Tukar Pengolah dan Pemasar	103,75	104,00	104,25	104,50	104,75
	Nilai Tukar Petambak Garam	102,75	103,00	103,25	103,50	103,75
CUSTOMERS PERSPECTIVE						
SS 2. Ekonomi sektor KP meningkat						
2.	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7,90	8,11	8,31	8,51	8,71
3.	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	6,17	6,63	7,13	7,66	8,00
4.	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	56,39	58,08	59,53	61,02	62,05
SS 3. Sumber daya KP berkelanjutan						
5.	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman pada tahun 2024 (%)	≤64%	≤67%	≤72%	≤76%	≤80%
6.	Luas kawasan konservasi perairan (juta ha)	23,4	24,2	25,1	26,0	26,9
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
SS 4. Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat						
7.	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri/ DUDI (orang)	17.175	17.696	18.296	18.916	19.546
SS 5. Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan						
8.	Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan (hasil riset)	5	8	11	13	15
SS 6. Tatakelola sumber daya KP bertanggung jawab						
9.	WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPP)	3	5	7	11	11
10.	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Rencana Zonasi)	14	24	26	26	102 Kumulatif
11.	Persentase Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	94	95	97	98	98

SASARAN STRATEGIS & INDIKATOR KINERJA		2020	2023	2023	2023	2024
SS 7. Industrialisasi KP berdaya saing						
12.	Produksi perikanan (juta ton)	26,46	27,89	29,42	31,01	32,75
	Perikanan Tangkap	8,02	8,42	8,88	9,43	10,10
	Perikanan Budidaya	18,44	19,47	20,54	21,58	22,65
	- Ikan	7,45	7,92	8,69	9,48	10,32
	- Rumpul Laut	10,99	11,55	11,85	12,10	12,33
13.	Produksi garam (juta ton)	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
SS 8. Pengawasan sumber daya KP integratif						
14.	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)	54	60	65	70	75
15.	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	93	93	93	93	93
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
SS 9. Tatakelola pemerintahan yang baik						
16.	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP	A (80)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)

Sedangkan arah kebijakan program dan kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sesuai dengan OPD baru adalah :

- ✓ Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan target tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 84%.
- ✓ Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan target kinerja produksi perikanan hasil tangkapan sebesar 182.730 ton.
- ✓ Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan target kinerja produksi perikanan budidaya sebesar 178.961 ton.
- ✓ Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan target kinerja Luas Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif 297,805.90 Ha.
- ✓ Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan target kinerja berupa Persentase cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan sebesar 47,06%.
- ✓ Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan target Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan 4 Jenis.
- ✓ Target Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan sebanyak 240 sampel.
- ✓ Target Peningkatan Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut sebanyak 3 milyar ekor.

- ✓ Target Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut sebanyak 3,797,000 ekor.

Kebijakan program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur selaras dengan arah kebijakan Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka menunjang pembangunan khususnya dibidang kelautan dan perikanan, sesuai dengan yang telah diakomodir dalam Permendagri No, 8 Tahun 2017, Tabel T-A.2 Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat *Outcome* Pemerintah Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan pembangunan perikanan dan kelautan tahun 2019-2023 adalah :

Meningkatnya Konstribusi Sektor Perikanan Terhadap Ekonomi Daerah, melalui sumbangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Perencanaan Strategis Tahun 2019-2023 yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan.
2. Meningkatkan ketersediaan pangan hasil kelautan dan perikanan.
3. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4. Meningkatkan peluang investasi untuk pelaku usaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan.
6. Meningkatkan luas wilayah perairan Kalimantan Timur yang diawasi oleh pengawasan perikanan.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, sumber dana pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dari APBD Provinsi dan APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Adapun Program dan Kegiatan sumber dana APBD Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Program ini dilaksanakan dilandasi oleh kebutuhan akan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dimana dalam pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya sarana untuk memenuhi kebutuhan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur maupun UPTD lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdiri dari.

a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam mendukung target produksi perikanan tangkap secara nasional yang diemban oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Adapun kegiatan dari Program Pengembangan Perikanan Tangkap yaitu :

1. Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT.
2. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.
3. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air

Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

4. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
5. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
6. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan.

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya dan produksi pengolahan hasil perikanan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam mendukung target produksi perikanan secara nasional yang diemban oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Adapun kegiatan dari Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan yaitu :

1. Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing.
2. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing.
3. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
4. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
5. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
6. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
7. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

4. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Program ini dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut dan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan dalam rangka untuk meningkatkan luas kawasan yang dikelola secara berkelanjutan.

Adapun kegiatan dari Program Pengelolaan Ruang Laut yaitu :

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi.
3. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi.

5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Program ini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan pengawasan wilayah perairan Kalimantan Timur yang diawasi oleh pengawas perikanan sehingga dapat menurunkan persentase wilayah bebas illegal loging dan kegiatan yang dapat merusak sumberdaya kelautan dan perikanan.

Adapun kegiatan dari Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.
2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan UPTD. Penerapan Mutu Hasil Perikanan.

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu dan keamanan produk perikanan sesuai dengan standar dalam rangka meningkatkan ekspor hasil perikanan.

Adapun kegiatan dari Program Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yaitu :

1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar.

7. Program Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (UPTD. SPAPAL Manggar)

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan benih dalam mendukung target produksi perikanan budidaya secara nasional yang diemban oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Jumlah

Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut oleh UPTD Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan

Adapun kegiatan dari Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan yaitu :

1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut (Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut)

8. Program Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (UPTD. SPAPAL Sebulu)

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan benih ikan air payau/laut spesifik penting dalam mendukung target produksi perikanan budidaya secara nasional yang diemban oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut oleh UPTD Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan.

Adapun kegiatan dari Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau/Air Laut yaitu :

1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut (Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Anggaran pagu indikatif OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Tabel 6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target 2023		Pagu Indikatif			Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2022	RKPD 2023 PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**	**Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)**	**Berau,Kukar, Btg,PPU,BPN, SMD**	**84**	**84**	**40,503,472,697**	**42,323,479,640**	**42,328,158,871**	**85**	**39,660,558,727**
3.25.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	**Berau,Kukar, Btg,PPU,BPN, SMD**	70 Nilai	70 Nilai	2,263,234,800	2,170,097,600	2,125,871,100	70 Nilai	2,855,050,000
3.25.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berau,Kukar, Btg,PPU,BPN, SMD	9 Dokumen	9 Dokumen	1,014,081,800	1,035,446,800	1,035,446,800	9 Dokumen	1,173,370,000
3.25.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Berau,Kukar, Btg,PPU,BPN, SMD	2 Laporan	2 Laporan	878,527,000	764,024,800	719,798,300	2 Laporan	1,171,500,000
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SMD, Bppn, Kukar	1 Laporan	1 Laporan	370,626,000	370,626,000	370,626,000	1 Laporan	510,180,000
3.25.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	**Kab/Kota dan Luar Provinsi**	100 %	100 %	23,982,523,065	23,931,523,835	23,979,823,835	100 %	23,806,894,000
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab/Kota dan Luar Provinsi	123 Orang/Bulan	123 Orang/Bulan	22,850,697,065	22,850,697,835	22,858,197,835	123 Orang/Bulan	22,850,697,000
3.25.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dalam dan Luar Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	661,440,000	610,440,000	651,240,000	1 Dokumen	704,000,000
3.25.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	Provinsi	12 Dokumen	12 Dokumen	225,744,000	225,744,000	225,744,000	12 Dokumen	74,800,000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target 2023		Pagu Indikatif			Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2022	RKPD 2023 PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
3.25.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bppn, Smd, Luar Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	152,372,000	152,372,000	152,372,000	1 Laporan	75,900,000
3.25.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bppn, Smd, Luar Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	92,270,000	92,270,000	92,270,000	1 Laporan	101,497,000
3.25.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	**Bppn, Smd, Luar Provinsi**	20 %	20 %	87,000,000	210,000,000	210,000,000	20 %	2,117,463,700
3.25.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Berau, Kukar, Kutim, Pasir, PPU, Bppn, Btg, Smd	0 Paket	0 Paket	-	-	-	0 Paket	-
3.25.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Berau, Kukar, Kutim, Pasir, PPU, Bppn, Btg	45 Orang	45 Orang	87,000,000	210,000,000	210,000,000	45 Orang	2,117,463,700
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Berau, Kukar, Kutim, Pasir, PPU, Bppn, Btg**	12 Bulan	12 Bulan	2,109,195,000	2,038,552,700	2,038,552,700	12 Bulan	1,848,634,545
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Berau, btg, sangata, samarinda, bppn, Panajam	1 Paket	1 Paket	26,500,000	11,823,600	11,823,600	1 Paket	30,250,000
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kukar, BPN, SMD, Bontang	1 Paket	1 Paket	118,000,000	142,410,000	142,410,000	1 Paket	81,180,000
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kkr, bpn, btg, smd	1 Paket	1 Paket	191,578,000	111,194,100	111,194,100	1 Paket	243,980,000
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kkr, bpn, btg, smd	1 Paket	1 Paket	36,883,000	36,891,000	36,891,000	1 Paket	40,574,600
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kkr, bpn, btg, smd	540 Dokumen	540 Dokumen	17,776,000	17,776,000	17,776,000	540 Dokumen	20,130,000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target 2023		Pagu Indikatif			Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2022	RKPD 2023 PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kkr, bpn, btg, smd Kkr, bpn, btg, smd	1 Laporan 1900 Kotak	1 Laporan 1900 Kotak	1,718,458,000	1,718,458,000	1,718,458,000	1 Laporan 1900 Kotak	1,432,519,945
3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah**	Kkr, bpn, btg, smd	2 Jenis	2 Jenis	3,396,867,352	4,079,029,600	4,118,989,600	2 Jenis	774,694,800
3.25.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kkr, bpn, btg, smd	3 Unit	3 Unit	2,241,372,000	2,241,372,000	2,241,372,000	3 Unit	75,644,800
3.25.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangungan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Smd	3 Unit	6 Unit	1,155,495,352	1,837,657,600	1,877,617,600	3 Unit	699,050,000
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah**	Smd	3 Jenis	3 Jenis	7,520,788,480	8,966,728,905	8,927,374,636	3 Jenis	7,467,738,668
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Kab/Kota	1 Laporan	1 Laporan	23,750,000	4,170,000	4,170,000	1 Laporan	15,128,300
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Smd	1 Laporan	1 Laporan	2,060,931,000	2,088,400,200	2,088,400,200	1 Laporan	2,017,218,500
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Paser, PPU, Bpn, Kukar, Btg, Kutim, Berau	1 Laporan	1 Laporan	5,436,107,480	6,874,158,705	6,834,804,436	1 Laporan	5,435,391,868
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	Paser, PPU, Bpn, Kukar, Btg, Kutim, Berau	4 Jenis	4 Jenis	1,143,864,000	927,547,000	927,547,000	4 Jenis	790,083,014
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Paser, PPU, Bpn, Kukar, Btg, Kutim, Berau	3 Unit	3 Unit	462,120,000	508,842,000	508,842,000	3 Unit	516,883,014.10
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paser, PPU, Bpn, Kukar, Btg, Kutim, Berau	20 Unit	20 Unit	156,000,000	94,693,000	94,693,000	20 Unit	163,200,000
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paser, PPU, Bpn, Kukar, Btg, Kutim, Berau	3 Unit	3 Unit	525,744,000	324,012,000	324,012,000	3 Unit	110,000,000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target 2023		Pagu Indikatif			Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2022	RKPD 2023 PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
3.25.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**Luas Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif**	**Kab. Berau, Kab. Kutim, Kota Bontang, Kab. Kukar, Kota Balikpapan, Kab. PPU, dan Kab. Paser**	297.805,90 Ha	297.805,90 Ha	**4,526,482,000**	**4,296,458,400**	**6,492,268,400**	297.805,90 Ha	**4,057,100,000**
3.25.02.1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Kab. Kukar, kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kab. Berau	1 Kawasan	1 Kawasan	1,499,397,000	1,489,397,000	3,236,867,000	1 Kawasan	889,600,000
3.25.02.1.01.02	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Kab. Berau, Kab. Kutim, Kota Bontang, Kab. Kukar, Kota Balikpapan, Kab. PPU, dan Kab. Paser	1 Dokumen	1 Dokumen	620,000,000	620,000,000	620,000,000	0 Dokumen	0
3.25.02.1.01.03	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Kab. Kutai Kartanegara	3.982,30 Ha	289.531,2 Ha	644,397,000	634,397,000	1,617,493,200	3.982,30 Ha	654,600,000
3.25.02.1.01.04	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Kota Balikpapan	5 Ha	25 Ha	160,000,000	160,000,000	622,280,000	5 Ha	160,000,000
3.25.02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Kab. Berau	30 Orang	90 Orang	75,000,000	75,000,000	377,093,800	30 Orang	75,000,000
3.25.02.1.02	**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Kab. Berau, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kab. PPU	4 Izin	4 Izin	1,457,967,000	1,337,344,200	1,337,344,200	4 Izin	1,468,178,700
3.25.02.1.02.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Kab. Berau, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kota Samarinda	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	255,000,000	255,000,000	255,000,000	2 Rekomendasi	255,000,000
3.25.02.1.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	Kota Balikpapan, Kab. Berau, Kab. PPU, Kota Samarinda	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	385,000,000	385,000,000	385,000,000	1 Rekomendasi	385,000,000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target 2023		Pagu Indikatif			Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2022	RKPD 2023 PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
3.25.02.1.02.04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	Kota Balikpapan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100,000,000	100,000,000	100,000,000	1 Rekomendasi	100,000,000
3.25.02.1.02.05	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Kota Samarinda	1 Dokumen	1 Dokumen	717,967,000	597,344,200	597,344,200	1 Dokumen	728,178,700
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kota Balikpapan, Kab. Kukar, Kab. Kutim, Kab. PPU, Kota Bontang, Kab. Berau, Kab. Paser	13 Kelompok Masyarakat	13 Kelompok Masyarakat	1,569,118,000	1,469,717,200	1,918,057,200	13 Kelompok Masyarakat	1,699,321,300
3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Kota Balikpapan dan Kab. PPU	60 Orang	60 Orang	120,607,000	120,607,000	120,607,000	60 Orang	240,607,100
3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Kukar, Kota Bontang, Kab. Berau, Kota Balikpapan	8 Kelompok	8 Kelompok	481,214,000	481,214,000	481,214,000	8 Kelompok	481,214,200
3.25.02.1.03.03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Berau, Kab. Kukar	50 Orang	180 Orang	217,500,000	217,500,000	665,840,000	50 Orang	217,500,000
3.25.02.1.03.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kukar, Kab Kutim, Kota Balikpapan, Kab. Berau, Kab. Paser	5 Kelompok	5 Kelompok	749,797,000	650,396,200	650,396,200	5 Kelompok	760,000,000
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)**	**WPPNRI 713 dan 716 (LAUT) dan WPPNRI (PUD) 436**	182.730 Ton	182.730 Ton	**13,642,457,000**	**23,868,165,500**	**36,610,615,500**	167.593 Ton	**19,425,875,000**
3.25.03.1.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Bpp, PPU, Paser,Kutim	3 Kegiatan	3 Kegiatan	5,022,524,000	3,496,924,000	15,992,324,000	2 Kegiatan	3,012,024,000
3.25.03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang	Balikpapan	1 Dokumen	1 Dokumen	225,719,000	223,619,000	223,619,000	1 Dokumen	225,719,000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target 2023		Pagu Indikatif			Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2022	RKPD 2023 PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil								
3.25.03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	8 Kab/Kota	66 Unit	76 Unit	4,796,805,000	3,273,305,000	15,768,705,000	66 Unit	2,786,305,000
3.25.03.1.02	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kukar,Kubar	4 Unit	4 Unit	946,826,000	939,826,000	939,826,000	4 Unit	946,826,000
3.25.03.1.02.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Balikpapan	1 Dokumen	1 Dokumen	240,894,000	238,894,000	238,894,000	1 Dokumen	240,894,000
3.25.03.1.02.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Kukar;Kubar;Samarinda	12 Unit	12 Unit	705,932,000	700,932,000	700,932,000	4 Unit	705,932,000
3.25.03.1.03	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	8 Kab/Kota	175 Dokumen	175 Dokumen	688,600,000	673,378,500	673,378,500	175 Dokumen	739,000,000
3.25.03.1.03.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	8 Kab/Kota	175 Dokumen	175 Dokumen	688,600,000	673,378,500	673,378,500	175 Dokumen	739,000,000
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10 Kab/Kota	800 Dokumen	800 Dokumen	558,725,000	1,596,255,000	1,596,255,000	300 Dokumen	558,725,000
3.25.03.1.05.02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	10 Kab/Kota	800 Dokumen	800 Dokumen	558,725,000	1,596,255,000	1,596,255,000	300 Dokumen	558,725,000
3.25.03.1.06	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan**	Balikpapan, PPU, Kutim, Bontang	4 Lokasi	4 Lokasi	6,425,782,000	17,161,782,000	17,408,832,000	4 Lokasi	14,169,300,000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target 2023		Pagu Indikatif			Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2022	RKPD 2023 PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		Perikanan Provinsi								
3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Balikpapan, PPU, Samarinda, Kutim,Berau	200 Unit	200 Unit	5,869,300,000	16,662,300,000	16,909,350,000	1 Unit	13,369,300,000
3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Balikpapan, PPU, Samarinda, Bontang, Kutim,Berau	5 Layanan	5 Layanan	556,482,000	499,482,000	499,482,000	6 Layanan	800,000,000
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)**		178.961 Ton	178.961 Ton	**4,859,320,500**	**5,875,160,065**	**7,273,735,065**	167.730 Ton	**5,306,947,000**
		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita)		58 Kg/Kapita	58 Kg/Kapita				58 Kg/Kapita	
3.25.04.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0
3.25.04.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0
3.25.04.1.02	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing**	**Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing**	Kutim	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	174,000,000	167,000,000	167,000,000	3 Rekomendasi	174,000,000
3.25.04.1.02.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Kutim	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	174,000,000	167,000,000	167,000,000	3 Rekomendasi	174,000,000
3.25.04.1.03	**Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing**	**Jumlah Sosialisasi Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing**	-	Rekomendasi	Rekomendasi	0	0	0	Rekomendasi	0

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target 2023		Pagu Indikatif			Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2022	RKPD 2023 PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
3.25.04.1.03.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	-	Rekomendasi	Rekomendasi	0	0	0	Rekomendasi	0
3.25.04.1.05	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	10 Kab/Kota	10 Lokasi	10 Lokasi	4,685,320,500	5,708,160,065	7,106,735,065	10 Lokasi	5,132,947,000
3.25.04.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	1 Dokumen	1 Dokumen	247,615,000	235,615,000	235,615,000	1 Dokumen	247,615,000
3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	-	-	-	0	0	0	3 Unit	1,140,724,000
		Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Laut yang disediakan	-	-	-	0	0	0	1 Kegiatan	123,260,000
3.25.04.1.05.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar yg disediakan	-	-	-	0	0	0	8 Pokdakan	172,960,000
		Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar (HDPE)	Kukar (Muara Badak)	1 Unit	1 Unit	763,519,000	1,763,518,890	1,993,822,890	1 Unit	750,000,000
3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Kab/Kota	3 Unit Teknis	3 Unit Teknis	192,880,000	192,878,450	192,878,450	1 Unit	192,880,000
						501,820,000	501,820,000	501,820,000	0 Unit Teknis	-
3.25.04.1.05.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	Samarinda (Unmul)	5000 Benih	5000 Benih	503,687,000	503,687,000	1,536,390,500	5000 Benih	264,133,000
		Jumlah Benih Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	Paser, PPU, Kukar, Kubar, Berau, Kutim,	30 Pokdakan	30 Pokdakan	1,049,540,000	1,286,015,975	1,286,015,975	30 Pokdakan	1,031,540,000
3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	10 Kab/Kota	70 Dokumen	70 Dokumen	480,000,000	475,999,800	475,999,800	70 Dokumen	480,000,000
3.25.04.1.05.07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	10 Kab/Kota	75 Orang	115 Orang	208,565,500	228,002,000	228,002,000	75 Orang	228,002,000
			Paser, Balikpapan, Berau	120 Orang	120 Orang	737,694,000	520,622,950	656,190,450	120 Orang	501,833,000
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN**	**Cakupan wilayah laut**	**10 Kab/Kota**	47,06%	47,06%	**3,543,455,000**	**3,735,029,400**		47,06 %	

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target 2023		Pagu Indikatif			Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2022	RKPD 2023 PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
	SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**sampai dengan 12 mil yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan (%)**						**3,735,029,400**		**3,925,750,000**
3.25.05.1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	10 Kab/Kota	100 %	100 %	2,228,905,000	2,493,502,100	2,493,502,100	100 %	2,500,000,000
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	10 Kab/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	789,161,000	878,057,500	878,057,500	3 Dokumen	900,000,000
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Kukar, Berau, Kutim, PPU, Paser, Balikpapan	7 Dokumen	7 Dokumen	766,822,000	681,583,600	681,583,600	7 Dokumen	1,150,000,000
3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Bontang, Berau	2 Dokumen	2 Dokumen	419,200,000	406,200,000	406,200,000	2 Dokumen	450,000,000
3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	10 Kab/Kota	20 Kelompok	20 Kelompok	253,722,000	527,661,000	527,661,000	-	-
3.25.05.1.02	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	10 Kab/Kota	100 %	100 %	1,314,550,000	1,241,527,300	1,241,527,300	100 %	1,425,750,000
3.25.05.1.02.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Kubar, Kukar, Paser	3 Dokumen	3 Dokumen	362,875,000	326,852,300	326,852,300	3 Dokumen	362,875,000
3.25.05.1.02.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang	Samarinda, Kukar, Kubar	3 Dokumen	3 Dokumen	428,800,000	404,800,000	404,800,000	3 Dokumen	450,000,000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target 2023		Pagu Indikatif			Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2022	RKPD 2023 PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
	Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya								
3.25.05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Balikpapan, PPU, Paser, Kutim, Mahulu, Berau	6 Dokumen	6 Dokumen	522,875,000	509,875,000	509,875,000	6 Dokumen	612,875,000
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan**	**Bontang, Balikpapan**	4 Jenis	4 Jenis	**1,450,405,500**	**1,648,633,900**	**3,567,233,900**	4 Jenis	**1,463,750,000**
3.25.06.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Samarinda, Balikpapan**	2 Kegiatan	2 Kegiatan	615,237,500	833,465,900	833,465,900	2 Kegiatan	615,237,500
3.25.06.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Kabupaten/Kota	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	149,737,500	147,737,500	147,737,500	10 Rekomendasi	149,737,500
3.25.06.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Samarinda	4 Dokumen	4 Dokumen	465,500,000	685,728,400	685,728,400	4 Dokumen	465,500,000
3.25.06.1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan**	Kabupaten/Kota	20 UMKM	20 UMKM	650,430,500	633,430,500	2,552,030,500	20 UMKM	705,775,000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target 2023		Pagu Indikatif			Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2022	RKPD 2023 PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		Pemasaran Skala Menengah dan Besar								
3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kabupaten/Kota	20 Unit Usaha	25 Unit Usaha	490,105,500	475,105,500	2,393,705,500	20 Unit Usaha	545,450,000
3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Samarinda, Berau	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	160,325,000	158,325,000	158,325,000	2 Unit Usaha	160,325,000
3.25.06.1.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Balikpapan	1 Lokasi	1 Lokasi	184,737,500	181,737,500	181,737,500	1	142,737,500
3.25.06.1.03.03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	Balikpapan	1 Dokumen	1 Dokumen	184,737,500	181,737,500	181,737,500	1 Dokumen	142,737,500
01.00	**UPTD. Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar**					**5,321,826,063**	**6,850,500,003**	**6,900,766,869**		**5,090,075,996**
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan PD (SKM)**	**Balikpapan**	84 SKM	84 SKM	**2,279,649,490**	**2,706,326,134**	**2,756,593,000**	85 SKM	**1,579,650,996**
3.25.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	Pemenuhan kebutuhan	Balikpapan	100 %	100 %	98,760,000	98,760,000	98,760,000	100 %	133,455,000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target 2023		Pagu Indikatif			Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2022	RKPD 2023 PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
	Perangkat Daerah	administrasi keuangan perangkat daerah								
3.25.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Balikpapan	1 Dokumen	1 Dokumen	98,760,000	98,760,000	98,760,000	1 Dokumen	133,455,000
3.25.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	Balikpapan	20 %	20 %	91,873,000	64,850,000	64,850,000	20 %	57,373,000
3.25.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Balikpapan	4 Orang	4 Orang	91,873,000	64,850,000	64,850,000	4 Orang	57,373,000
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	12 Bulan	12 Bulan	747,550,000	1,073,478,400	1,073,478,400	12 Bulan	532,522,000
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	1 Paket	1 Paket	7,759,000	29,997,400	29,997,400	1 Paket	7,759,000
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	1 Paket	1 Paket	171,906,000	175,792,800	175,792,800	1 Paket	96,406,000
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Balikpapan	1 Paket	1 Paket	25,863,000	58,586,500	58,586,500	1 Paket	25,863,000
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Balikpapan	1 Paket	1 Paket	10,230,000	18,909,700	18,909,700	1 Paket	10,230,000
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Balikpapan	240 Dokumen	240 Dokumen	3,840,000	13,840,000	13,840,000	240 Dokumen	4,312,000
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	1 Laporan	1 Laporan	527,952,000	776,352,000	776,352,000	1 Laporan	387,952,000
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah**	Balikpapan	3 Jenis	3 Jenis	589,494,490	729,240,634	779,507,500	3 Jenis	554,327,848
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikpapan	1 Laporan	1 Laporan	2,131,000	1,431,000	1,431,000	1 Laporan	2,131,000
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Balikpapan	1 Laporan	1 Laporan	259,354,882	365,441,300	365,441,300	1 Laporan	226,938,000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target 2023		Pagu Indikatif			Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2022	RKPD 2023 PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Balikpapan	1 Laporan	1 Laporan	328,008,608	362,368,334	412,635,200	1 Laporan	325,258,848
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	**Balikpapan**	1 Jenis	1 Jenis	**751,972,000**	**739,997,100**	**739,997,100**	2 Jenis	**301,973,148**
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Balikpapan	1 Unit	1 Unit	96,499,000	104,479,200	104,479,200	1 Unit	96,499,350
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Balikpapan	1 Unit	1 Unit	205,473,000	185,570,000	185,570,000	1 Unit	205,473,798
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor danBangunanLainnya	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi	Balikpapan	5 Unit	5 Unit	450,000,000	449,947,900	449,947,900		
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut (Milyar Ekor)**	**Balikpapan**	3 Milyar Ekor	3 Milyar Ekor	**2,649,558,073**	**4,144,173,869**	**4,144,173,869**	3.1 Milyar Ekor	**3,510,425,000**
3.25.04.1.05	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	Balikpapan	3 Milyar Ekor	3 Milyar Ekor	2,649,558,073	4,144,173,869	4,144,173,869	3.1 Milyar Ekor	3,510,425,000
3.25.04.1.05.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana UPTD Manggar Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang direhab	Balikpapan	2 Unit	2 Unit	399,999,573	1,894,633,319	1,894,633,319	2 Unit	400,000,000
3.25.04.1.05.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana UPTD Manggar Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	Balikpapan	2 Unit	2 Unit	2,249,558,500	2,249,540,550	2,249,540,550	2 Unit	3,110,425,000
01.00	**UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan**					**1,352,357,928**	**1,382,706,701**	**1,426,634,104**		**1,415,481,928**

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target 2023		Pagu Indikatif			Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2022	RKPD 2023 PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan PD (SKM)**	**Samarinda**	84 SKM	84 SKM	**1,058,483,928**	**1,088,836,101**	**1,132,763,504**	85 SKM	**1,058,481,928**
3.25.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Samarinda	100 %	100 %	69,480,000	69,480,000	69,480,000	100 %	69,480,000
3.25.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	1 Dokumen	1 Dokumen	69,480,000	69,480,000	69,480,000	1 Dokumen	69,480,000
3.25.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	Samarinda	20 %	20 %	91,560,000	91,512,500	91,512,500	20 %	91,560,000
3.25.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Samarinda	14	14	91,560,000	91,512,500	91,512,500	14	91,560,000
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	12 Bulan	12 Bulan	378,158,000	381,016,484	381,016,484	12 Bulan	360,411,000
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	6 Paket	6 Paket	3,917,500	3,917,500	3,917,500	6 Paket	4,035,000
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Paket	12 Paket	29,715,000	32,580,000	32,580,000	12 Paket	11,980,000
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Samarinda	6 Paket	6 Paket	4,796,000	4,795,883	4,795,883	6 Paket	4,796,000
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	12 Paket	12 Paket	18,129,500	18,137,500	18,137,500	12 Paket	18,000,000
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Samarinda	120 Dokumen	120 Dokumen	1,920,000	1,905,601	1,905,601	120 Dokumen	1,920,000
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	1 Laporan	1 Laporan	319,680,000	319,680,000	319,680,000	1 Laporan	319,680,000
3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah**	Samarinda	0 Jenis	0 Jenis	0	-	-	0 Jenis	-
3.25.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Samarinda	Unit	Unit	0			Unit	0

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target 2023		Pagu Indikatif			Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2022	RKPD 2023 PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
	Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah**	Samarinda	3 Jenis	3 Jenis	422,692,128	450,277,317	494,204,720	3 Jenis	420,492,128
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	12 Laporan	12 Laporan	3,700,000	954,000	954,000	12 Laporan	1,500,000
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	12 Laporan	121,185,384	121,167,600	121,167,600	12 Laporan	121,185,384
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	12 Laporan	297,806,744	328,155,717	372,083,120	12 Laporan	297,806,744
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	Samarinda	1 Jenis	1 Jenis	96,593,800	96,549,800	96,549,800	1 Jenis	116,538,800
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Samarinda	2 Unit	2 Unit	57,613,800	57,612,000	57,612,000	2 Unit	57,613,800
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Samarinda	60 Unit	60 Unit	38,980,000	38,937,800	38,937,800	60 Unit	58,925,000
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	0 Unit	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan (Sampel)**	**Samarinda**	240 Sampel	240 Sampel	**293,874,000**	**293,870,600**	**293,870,600**	240 Sampel	**357,000,000**
3.25.06.1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Jumlah Sampel Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Samarinda	240 Sampel	240 Sampel	293,874,000	293,870,600	293,870,600	240 Sampel	357,000,000
3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil	Samarinda	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	293,874,000	293,870,600	293,870,600	10 Unit Usaha	357,000,000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target 2023		Pagu Indikatif			Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2022	RKPD 2023 PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
	untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing								
01.00	**UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu**		**Kukar**			**2,654,461,312**	**3,561,727,400**	**4,087,493,900**		**2,654,461,349**
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan PD (SKM)**	Kukar	84 SKM	84 SKM	**1,902,592,632**	**2,572,770,200**	**2,881,836,700**	85 SKM	**1,902,414,669**
3.25.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Kukar	100 %	100 %	86,280,000	87,120,000	87,120,000	100 %	95,880,000
3.25.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kukar	1 Dokumen	1 Dokumen	86,280,000	87,120,000	87,120,000	1 Dokumen	95,880,000
3.25.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	Kukar	20 %	20 %	117,450,000	115,600,500	115,600,500	20 %	117,450,000
3.25.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kukar	18 Orang	18 Orang	117,450,000	115,600,500	115,600,500	18 Orang	117,450,000
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kukar	12 Bulan	12 Bulan	384,408,330	392,722,600	521,722,600	12 Bulan	419,242,230
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kukar	1 Paket	1 Paket	21,509,380	21,271,600	96,271,600	1 Paket	21,495,730
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kukar	1 Paket	1 Paket	26,829,000	34,326,800	34,326,800	1 Paket	26,871,500
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kukar	1 Paket	1 Paket	26,493,950	27,548,200	27,548,200	1 Paket	26,499,000
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kukar	1 Paket	1 Paket	12,000,000	12,000,000	12,000,000	1 Paket	12,000,000
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kukar	1 Laporan	1 Laporan	297,576,000	297,576,000	351,576,000	1 Laporan	332,376,000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target 2023		Pagu Indikatif			Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2022	RKPD 2023 PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah**	KUKAR	3 Jenis	3 Jenis	727,727,992	810,756,300	854,642,800	3 Jenis	682,245,677
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KUKAR	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	5,000	5,000	1 Laporan	2,000,000
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KUKAR	1 Laporan	1 Laporan	68,903,377	80,652,600	80,652,600	1 Laporan	68,903,377
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KUKAR	1 Laporan	1 Laporan	656,824,615	730,098,700	773,985,200	1 Laporan	611,342,300
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	KUKAR	3 Jenis	3 Jenis	586,726,310	1,166,570,800	1,302,750,800	3 Jenis	587,596,762
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KUKAR	4 Unit	4 Unit	86,024,800	86,016,000	86,016,000	1 Unit	86,033,500
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KUKAR	1 Unit	1 Unit	58,180,000	39,780,000	39,780,000	1 Unit	58,180,000
3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KUKAR	5 Unit	5 Unit	442,521,510	1,040,774,800	1,176,954,800	2 Unit	443,383,262
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut (Ekor)**	KUKAR	3797000 Ekor	3797000 Ekor	**751,868,680**	**988,957,200**	**1,205,657,200**	3797000 Ekor	**752,046,680**
3.25.04.1.05	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Payau/Laut/Tawar (Ekor)	KUKAR	3797000 Ekor	3797000 Ekor	751,868,680	988,957,200	1,205,657,200	3797000 Ekor	752,046,680
3.25.04.1.05.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana UPTD Sebulu Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang direhab	KUKAR	1 Unit	1 Unit	60,820,480	210,233,000	293,833,000	6 Unit	60,998,465

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target 2023		Pagu Indikatif			Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2022	RKPD 2023 PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
3.25.04.1.05.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana UPTD Sebulu Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	KUKAR	104 Unit	112 Unit	691,048,200	778,724,200	911,824,200	2 Unit	700,000,000
TOTAL PAGU						**77,854,238,000**	**93,541,861,009**	**112,421,936,009**		**80,695,000,000**

Tabel 7. Pagu APBN Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Pagu* (Rp.)
1.	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Pembinaan Dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran Dan Monev. Pembangunan KKP) (01)/DK	105,240,000
2.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap (03)/DK	456,201,000
3.	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (04)/DK	585,424,000
4.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (05)/DK	181,235,000
5.	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan (06)/DK	314,450,000
6.	Program Pengelolaan Ruang Laut (07)/DK	149,592,000
	Total Anggaran	**1,792,142,000**

**Angka Sementara*

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 selain menjadi pelaksanaan kegiatan, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Rencana Kerja ini juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Samarinda, Agustus 2023

Kepala,

H. Irhan Hukmaidy, S.Pi, MP
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19751228 200003 1 002

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur telah memasuki tahun ketiga dari rencana menengah pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2019 – 2023. Pada periode ini, pembangunan Pariwisata Kalimantan Timur dapat lebih didalami terhadap program kegiatan yang telah dilakukan dan rencana kedepannya untuk mencapai visi misi Gubernur Kalimantan Timur Periode 2019 – 2023.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 -2023 Provinsi Kalimantan Timur serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, tahun 2023 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD gubernur terpilih periode 2019 – 2023. Hasil pembahasan forum PD dan dinamika pembangunan serta serangkaian hasil Rapat Kerja (Raker) Gubernur dengan Bupati/ Walikota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah/Instansi Vertikal dan SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Timur.

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) 2023 ini akan dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Tahun 2023. Acara ini melibatkan seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah, swasta dan masyarakat yang berasal dari Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya berdasarkan aspirasi yang berkembang dirumuskan dalam kesepakatan yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023.

RENJA Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur ini disusun berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon serta Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan renacana kerja pemerintah daerah;
3. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
6. Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Tahun 2019-2023;
7. Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (Talanpekda) Provinsi Kalimantan Timur Periode 2021-2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini dimaksudkan agar program dan kegiatan tahun 2023 selaras dengan Program Strategis Nasional Kementerian Pariwisata, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023, Perubahan Rencana Strategis SKPD (RENSTRA PD) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, serta Program dan Kegiatan PD Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan dari Penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD (RENJA PD) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 (satu) tahun

kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja
- 1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Catatan penting yang perlu diperhatikan;

Kaidah-kaidah pelaksanaan;

Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022.

Provinsi Kalimantan Timur

Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan PD dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcames)* / Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program *(Renstra PD Th. 2019-2023)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD th 2022) (n-1)*	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th (berjalan)	
					Target Renja PD Th 2021	Realisasi Renja PD Th 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan : Pilihan									
	Bidang Urusan : Pariwisata									
26.02	Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya	2 Destinasi	0 Destinasi	2 Detinasi	2 Destinasi	100%	2 Destinasi	0 Destinasi	100%
26.02.1.01	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tari Wisata Provinsi	Jumlah Produk Wisata yang Dikelola	2 Produk Wisata	0 Produk Wisata	0 Produk Wisata	0 Produk Wisata	0%	3 Produk Wisata	0 Produk Wisata	0%
26.02.1.01.02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disediakan	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %	3 Dokumen	0 Dokumen	0%
26.02.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah pembuatan sarpras terapung kedai kuliner di wisata 3 danau	2 Lokasi	0 Lokasi	0 Lokasi	0 Lokasi	0 %	2 Lokasi	0 Lokasi	0%
		Jumlah produk wisata unggulan yang dikembangkan di wisata 3 danau	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	7 Unit	0 Unit	0%
26.02.1.02	Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Produk Wisata dalam Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	1 Produk Wisata	0 Produk Wisata	2 Produk Wisata	2 Produk Wisata	100%	2 Produk Wisata	0 Produk Wisata	0%
26.02.1.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah perahu wisata kawasan wisata 3 danau	6 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	6 Unit	0 Unit	0%
26.02.1.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah masyarakat yang di berdayakan	0 Masyarakat	0 Masyarakat	0 Masyarakat	0 Masyarakat	0%	210 Masyarakat	60 Masyarakat	28%
26.02.1.03	Kegiatan: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola Produk Wisatanya	3 Destinasi Pariwisata	3 Destinasi Pariwisata	Destinasi Pariwisata	Destinasi Pariwisata	%	3 Destinasi Pariwisata	0 Destinasi Pariwisata	0%

26.02.1.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Monev Destinasi Pariwisata Provinsi yang dilakukan	10 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0%	10 Kab/Kota	0 Kab/Kota	%
26.02.1.03.06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan	50 Masyarakat	0 Masyarakat	0 Masyarakat	0 Masyarakat	0%	50 Masyarakat	0 Masyarakat	58,62%
26.02.1.04	Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pariwisata yang dibina	15 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0%	30 Usaha Pariwisata	10 Usaha Pariwisata	33 %
26.02.1.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah forum investasi	2 Forum	0 Forum	0 Forum	0 Forum	0%	1 Forum	0 Forum	0%
26.02.1.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang dibina	5 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0%	5 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0%
26.02.1.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah fasilitasi standarisasi dan usaha pariwisata	10 Fasilitasi	0 Fasilitasi	0 Fasilitasi	0 Fasilitasi	0%	5 Fasilitasi	2 Fasilitasi	40%
26.03	Program : Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan - Wisatawan Nusantara - Wisatawan Mancanegara	2 Juta 10 Ribu	2 Juta 15 Ribu	2 Juta 15 Ribu	3.759.309 18.045	188% 120%	2 Juta 5 Ribu	1.287.907 Juta 5.931 Ribu	64%
26.03.1.01	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Jangkauan Pemasaran Produk Wisata Kaltim	6 Daerah/Kota	Daerah/Kota	Daerah/Kota	Daerah/Kota	%	6 Daerah/Kota	2 Daerah/Kota	33%
26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi produk wisata kaltim	4 Promosi	0 Promosi	0 Promosi	0 Promosi	%	4 Promosi	1 Promosi	25%
26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dlaam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan pemasaran produk wisata kaltim	6 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	6 Kegiatan	4 Kegiatan	66%
26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata, Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
26.03.1.01.03	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama pariwisata yang dilakukan	4 Kerjasama	0 Kerjasama	0 Kerjasama	0 Kerjasama	0%	4 Kerjasama	2 Kerjasama	50%
26.05	Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentase Tercapainya Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi	90 %	0 %	90 %	106 %	120%	90%	41.8%	48%
26.05.1.01	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100%	9 Kegiatan	5 Kegiatan	60%
26.05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	100%	120 Orang	80 Orang	66%
26.05.1.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	100 Orang	230 Orang	230 Orang	230 Orang	100%	120 Orang	0 Orang	0%
26.05.1.01.03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (*Tour Guide)* Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (*Tour Guide*) Tingkat Lanjutan	25 Orang	180 Orang	180 Orang	180 Orang	100%	30 Orang	20 Orang	66%
26.05.1.01.08	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekraf yang di fasilitasi Pengembangan Produktivitasnya	8 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	8 Orang	8 Orang	100%
26.05.1.01.08	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang di fasilitasi pengembengan kompetensinya	530 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	100%	530 Orang	150 Orang	28%
26.04	Program : Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Presentase Sub Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	23,5 %	0	0	0	0%	23,5 %	5,88 %	24%

26.04.1.01	Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Kota Kreatif yang Dikembangkan	3 Kota Kreatif	0 Kota Kreatif	0 Kota Kreatif	0 Kota Kreatif	0%	3 Kota Kreatif	0 Kota Kreatif	0%
26.04.1.01.01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah sarpras kota kreatif yang disiapkan	8 Sarpras	0 Sarpras	0 Sarpras	0 Sarpras	0%	1 Sarpras	0 Sarpras	0%
26.04.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah kegiatan pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif	8 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	5 Kegiatan	1 Kegiatan	20%
26.04.1.02	Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Jenis Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	3 Jenis Ekosistem	0 Jenis Ekosistem	0 Jenis Ekosistem	0 Jenis Ekosistem	0%	3 Jenis Ekosistem	0 Jenis Ekosistem	0%
26.04.1.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah kekayaan intelektual yang di fasilitasi	1 Haki	0 Haki	0 Haki	0 Haki	0%	1 Haki	0 Haki	0%
26.04.1.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah monev yang dilaksanakan	5 Monev	0 Monev	0 Monev	0 Monev	0%	5 Monev	0 Monev	0%
3.26.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pariwisata	95%	95%	95%	95%	100%	95%	0%	0%
3.26.01.1.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	14 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	14 Dokumen	5 Dokumen	35%
26.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen perencanaan dan anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	4 Dokumen	66%
26.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang diadakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	1 Laporan	33%
26.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	3 Dokumen	1 Dokumen	33%
26.01.1.02	Kegiatan : Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji, Tunjangan dan Jasa Administrasi Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
26.01.1.02.02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
26.01.1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
26.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
26.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
26.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
26.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
26.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	100 Kali	100 Kali	100 Kali	100 Kali	100%	100 Kali	30 Kali	30%
26.01.1.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
26.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
26.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
26.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
26.01.1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
26.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas ata Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan biayanya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcames)*/ Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) TAHUN 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
	Urusan Pilihan : Pariwisata									
26.02	Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya	2 Destinasi	0 Destinasi	2 Detinasi	2 Destinasi	100%	2 Destinasi	0 Destinasi	100%
26.02.1.01	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tari Wisata Provinsi	Jumlah Produk Wisata yang Dikelola	2 Produk Wisata	0 Produk Wisata	0 Produk Wisata	0 Produk Wisata	0%	3 Produk Wisata	0 Produk Wisata	0%
26.02.1.01.02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disediakan	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %	3 Dokumen	0 Dokumen	0%
26.02.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah pembuatan sarpras terapung kedai kuliner di wisata 3 danau	2 Lokasi	0 Lokasi	0 Lokasi	0 Lokasi	0 %	2 Lokasi	0 Lokasi	0%
008	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah produk wisata unggulan yang dikembangkan di wisata 3 danau	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	7 Unit	0 Unit	0%
26.02.1.02	Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Produk Wisata dalam Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	1 Produk Wisata	0 Produk Wisata	2 Produk Wisata	2 Produk Wisata	100%	2 Produk Wisata	0 Produk Wisata	0%
26.02.1.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah perahu wisata kawasan wisata 3 danau	6 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	6 Unit	0 Unit	0%
26.02.1.02.06 26.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Kegiatan: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah masyarakat yang di berdayakan Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola Produk Wisatanya	0 Masyarakat 3 Destinasi Pariwisata	0 Masyarakat 3 Destinasi Pariwisata	0 Masyarakat			0 Masyarakat 3 Destinasi Pariwisata	0%	
					Destinasi Pariwisata	Destinasi Pariwisata	%		0 Destinasi Pariwisata	0%
26.02.1.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Monev Destinasi Pariwisata Provinsi yang dilakukan	10 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0%	10 Kab/Kota	0 Kab/Kota	%
26.02.1.03.06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan	50 Masyarakat	0 Masyarakat	0 Masyarakat	0 Masyarakat	0%	50 Masyarakat	0 Masyarakat	58,62%
26.02.1.04	Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pariwisata yang dibina	15 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0%	30 Usaha Pariwisata	10 Usaha Pariwisata	33 %
26.02.1.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah forum investasi	2 Forum	0 Forum	0 Forum	0 Forum	0%	1 Forum	0 Forum	0%
26.02.1.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang dibina	5 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0%	5 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0%
26.02.1.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah fasilitasi standarisasi dan usaha pariwisata	10 Fasilitasi	0 Fasilitasi	0 Fasilitasi	0 Fasilitasi	0%	5 Fasilitasi	2 Fasilitasi	40%
26.03	Program : Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan - Wisatawan Nusantara	2 Juta 10 Ribu	2 Juta 15 Ribu	2 Juta 15 Ribu	3.759.309 18.045	188% 120%	2 Juta 5 Ribu	1.287.907 Juta 5.931 Ribu	64%

		Wisatawan Mancanegara								
26.03.1.01	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Jangkauan Pemasaran Produk Wisata Kaltim	6 Daerah/Kota	Daerah/Kota	Daerah/Kota	Daerah/Kota	%	6 Daerah/Kota	2 Daerah/Kota	33%
26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi produk wisata kaltim	4 Promosi	0 Promosi	0 Promosi	0 Promosi	%	4 Promosi	1 Promosi	25%
26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dlaam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan pemasaran produk wisata kaltim	6 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	6 Kegiatan	4 Kegiatan	66%
26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata, Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
26.03.1.01.03	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama pariwisata yang dilakukan	4 Kerjasama	0 Kerjasama	0 Kerjasama	0 Kerjasama	0%	4 Kerjasama	2 Kerjasama	50%
26.05	Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentase Tercapainya Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi	90 %	0 %	90 %	106 %	120%	90%	41.8%	48%
26.05.1.01	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100%	9 Kegiatan	5 Kegiatan	60%
26.05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	100%	120 Orang	80 Orang	66%
26.05.1.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	100 Orang	230 Orang	230 Orang	230 Orang	100%	120 Orang	0 Orang	0%
26.05.1.01.03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (*Tour Guide)* Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (*Tour Guide*) Tingkat Lanjutan	25 Orang	180 Orang	180 Orang	180 Orang	100%	30 Orang	20 Orang	66%
26.05.1.01.08	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekraf yang di fasilitasi Pengembangan Produktivitasnya	8 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	8 Orang	8 Orang	100%
26.05.1.01.08	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang di fasilitasi pengembengan kompetensinya	530 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	100%	530 Orang	150 Orang	28%
26.04	Program : Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Presentase Sub Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	23,5 %	0	0	0	0%	23,5 %	5,88 %	24%
26.04.1.01	Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Kota Kreatif yang Dikembangkan	3 Kota Kreatif	0 Kota Kreatif	0 Kota Kreatif	0 Kota Kreatif	0%	3 Kota Kreatif	0 Kota Kreatif	0%
26.04.1.01.01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah sarpras kota kreatif yang disiapkan	8 Sarpras	0 Sarpras	0 Sarpras	0 Sarpras	0%	1 Sarpras	0 Sarpras	0%
26.04.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah kegiatan pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif	8 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	5 Kegiatan	1 Kegiatan	20%
26.04.1.02	Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Jenis Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	3 Jenis Ekosistem	0 Jenis Ekosistem	0 Jenis Ekosistem	0 Jenis Ekosistem	0%	3 Jenis Ekosistem	0 Jenis Ekosistem	0%
26.04.1.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah kekayaan intelektual yang di fasilitasi	1 Haki	0 Haki	0 Haki	0 Haki	0%	1 Haki	0 Haki	0%
26.04.1.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah monev yang dilaksanakan	5 Monev	0 Monev	0 Monev	0 Monev	0%	5 Monev	0 Monev	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan Pariwisata Kalimantan Timur yang telah direncanakan dalam lima tahun periode Gubernur Terpilih 2019 – 2023 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur serta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan VISI dan Misinya yang diharapkan mampu mewujudkan daerah tujuan pariwisata Kalimantan Timur sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing, dapat meningkatkan industri pariwisata Kalimantan Timur sebagai penopang perekonomian daerah selain kekayaan sumber daya alamnya, mampu meningkatkan seni dan budaya daerah untuk selalu dipelihara dan dilestarikan sebagai karakter jati diri dan pemersatu bangsa, serta dapat meningkatkan penyelenggaraan pariwisata yang profesional dan akuntabel sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Visi Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran strategis dan 8 (delapan) Program, 18 (delapan belas) kegiatan yang diukur dengan 2 (dua) indikator utama.

Perihal tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara [Orang]	-	-	6.055.500	2.015.000	2.000.000	2.310.000	2.904.115	1.293.838	2.000.000	2.310.000	Dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan adalah dengan meningkatkan inovasi produk, kekuatan pemasaran, peningkatan sarpras destinasi pariwisata (aksesibilitas dan konektifitas), pengembangan SDM
	a. Wisatawan nusantara (wisnus) [Orang]	-	-	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.300.000	2.884.329	1.287.907	2.000.000	2.300.000	
	b. Wisatawan mancanegara (wisman) [Orang]	-	-	55.500	15.000	5.000	10.000	19.786	5.931	5.000	10.000	

												pariwisata dan ekonomi kreatif dan sinergitas antar pelaku wisata
2.	Nilai Tambah Ekraf [Rupiah]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa point sebagai isu strategis pengembangan Kepariwisataan dan ekonomi kreatif Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Penetapan IKN menjadi peluang besar bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.
2. Perkembangan pola hidup masyarakat yang menjadikan pariwisata sebagai kebutuhan dan gaya hidup .
3. Pelaku usaha Pariwisata semakin tumbuh dan variatif.
4. Pelaku ekonomi kreatif terus tumbuh .
5. Sektor ekonomi kreatif memiliki kontribusi yang tidak sedikit bagi ekonomi daerah dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut khususnya pada sub sektor ekonomi kreatif unggulan (Kuliner, Kriya, Aplikasi dan Game) dan Sub sektor ekonomi potensial (Seni Pertunjukan, Fotografi/Videografi, Musik).
6. Digitalisasi informasi menunjang promosi pariwisata yang aktif dan dinamis.
7. Asosiasi kepariwisataan semakin tumbuh.
8. Kesadaran masyarakat untuk mewujudkan desa wisata semakin tumbuh dan berkembang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Provinsi Kalimantan Timur

Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (RP.000)**	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	**Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata**		**Jumlah destinasi dalam kawasan pariwisata provinsi (KPP) yang dikembangkan**	**3 destinasi**	**6.003**	**Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata**	**Jumlah destinasi dalam kawasan pariwisata provinsi (KPP) yang dikembangkan**	**3 destinasi**		**6.003**	**Karts sangkulirang mangkalihat, 3 danau (kukar & kubar)**
1.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Sangkulirang, pela, jempang, tj. Issuy	Jumlah Produk wisata yang dikelola	5 produk wisata	3.939	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Sangkulirang, pela, jempang, tj. Issuy	Jumlah Produk wisata yang dikelola	2 produk wisata	3.939	
1.2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	pela, muara wis, melintang, jempang, tj. Issuy, muara muntai, kenohan, semayang,	Jumlah produk wisata dalam kawasan strategis pariwisata yang dikelola	1 produk wisata	624	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	pela, muara wis, melintang, jempang, tj. Issuy, muara muntai, kenohan, semayang, muara enggelam	Jumlah produk wisata dalam kawasan strategis pariwisata yang dikelola	1 produk wisata	624	

		muara enggelam									
1.3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	10 kab/ kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola produk wisatanya	3 destinasi	1.010	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	10 kab/ kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola produk wisatanya	3 destinasi	1.010	
1.4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Berau, Kutim, Kukar, Balikpapan, Bontang	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	3 destinasi	429	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Berau, Kutim, Kukar, Balikpapan, Bontang	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	3 destinasi	429	
2	**Program Pemasaran Pariwisata**		**Jumlah kunjungan wisatawan (wisman – wisnus)**	**2.005.000 orang**	**2.700**	**Program Pemasaran Pariwisata**		**Jumlah kunjungan wisatawan (wisman – wisnus)**	**2.005.000 orang**	**2.700**	
2.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Samarinda, kukar, kubar	Jumlah jangkauan pemasaran produk wisata kaltim	6 daerah/ kota	2.700	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Samarinda, kukar, kubar	Jumlah jangkauan pemasaran produk wisata kaltim	6 daerah/ kota	2.700	
3	**Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual**		**Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan**	**23.53 %**	**2.000**	**Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual**		**Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan**	**23.53 %**	**2.000**	
3.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Kukar, kutim, balikpapan, bontang,	Jumlah kota kreatif yang dikembangkan	3 kota kreatif	1.800	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Kukar, kutim, balikpapan, bontang, berau, paser,	Jumlah kota kreatif yang dikembangkan	3 kota kreatif	1.800	

		berau, paser, samarinda, PPU, mahakam ulu					samarinda, PPU, mahakam ulu				
3.2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kutim, PPU, paser, bontang, (10 kab/ kota)	Jumlah jenis ekosistem ekraf yang dikembangkan	3 ekosistem ekraf	200	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kutim, PPU, paser, bontang, (10 kab/ kota)	Jumlah jenis ekosistem ekraf yang dikembangkan	3 ekosistem ekraf	200	
4	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**		**Persentase tercapainya jumlah pelaku pariwisata & ekraf yang difasilitasi**	**95 %**	2.990	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**		**Persentase tercapainya jumlah pelaku pariwisata & ekraf yang difasilitasi**	**95 %**	2.990	
4.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Kukar, kubar, balikpapan, bontang, samarinda, paser	Jumlah pengembangan SDM pariwisata dan ekraf yang dibina	9 kegiatan	2.990	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Kukar, kubar, balikpapan, bontang, samarinda, paser	Jumlah pengembangan SDM pariwisata dan ekraf yang dibina	9 kegiatan	2.990	
5	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**		**Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pariwisata**	**95 %**	**16.481**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**		**Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pariwisata**	**95 %**	**16.481**	
5.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	14 dokumen	1.170	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	14 dokumen	1.170	
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Terbayarnya gaji, tunjangan dan jasa administrasi kantor	12 bulan	9.556	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Terbayarnya gaji, tunjangan dan jasa administrasi kantor	12 bulan	9.556	
5.3	Administrasi Umum	Samarinda	Terpenuhinya pelaksanaan administrasi	12 bulan	2.569	Administrasi Umum	Samarinda	Terpenuhinya pelaksanaan administrasi	12 bulan	2.569	

	Perangkat Daerah		umum perangkat daerah			Perangkat Daerah		umum perangkat daerah			
5.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	3.055	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	3.055	
5.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	130	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	130	
				T O T A L	**30.175**				**T O T A L**	**30.175**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Provinsi Kalimantan Timur

Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	-	-	-	-
2	Program Pemasaran Pariwisata	-	-	-	-
3	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	-	-	-	-
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan Bab VI Pasal 7,8 dan 9 adalah ; Pembangunan Kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kabupaten/kota..

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 – 2025 dan Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (Talanpekda) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 - 2025

Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dalam Ripparnas 2010 – 2025, yang dapat dirangkum sebagai berikut:

PROVINSI	**KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL/KPPN (RIPPARNAS)**	**KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (RIPPARNAS)**	**DESTINASI PARIWISATA NASIONAL/DPN (RIPPARNAS)**
Kalimantan Timur	1. KPPN Long Apari dskt		DPN LONG BAGUN–MELAK dskt
	2. KPPN Long Bagun dskt	KSPN. Long Bagun dskt	
	3. KPPN Melak–Kersik Luway dskt		
	4. KPPN Kota Bangun–Tanjung Isuy dskt	KSPN. Kota Bangun–Tanjung Isuy dskt	DPN TENGGARONG–BALIKPAPAN dskt
	5. KPPN Tenggarong dskt		
	6. KPPN Samarinda Kota dskt		
	7. KPPN Bontang–Sangata dskt		
	8. KPPN Balikpapan–Semboja dskt		
	9. KPPN Tanjung Redeb dskt		DPN DERAWAN–KAYAN
	10.KPPN Derawan–Sangalaki dskt	KSPN. Derawan–Sangalaki dskt	

			MENTARANG dskt
Kalimantan Utara	1.KPPN Kayan Mentarang dskt	KSPN. Kayan Mentarang dskt	
	2.KPPN Tarakan dskt		

Kebijakan Nasional terhadap Pariwisata khususnya Kalimantan Timur adalah.

Rekomendasi Pengembangan Pariwisata Kaltim meliputi:

1. Percepatan penetapan RIPPARDA Provinsi dan Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur
2. Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kuantitas serta kualitas aksesibilitas menuju KSPN&KPPN
3. Percepatan Implementasi pendaftaran usaha pariwisata.
4. Diseminasi Standar dan Sertifikasi Usaha Pariwisata kepada Pelaku usaha pariwisata.
5. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata dan Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Pariwisata;
6. Diseminasi ACCSTP kepada pelaku dan SDM Usaha Pariwisata
7. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Usaha Pariwisata;
8. Identikasi kebutuhan WPA dan Auditor Usaha Pariwisata, disampaikan kepada Kementerian Pariwisata C.q. Direktorat Industri Pariwisata & Pusat kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata.
9. Penyusunan Travel Pattern Kabupaten dan Kota se Kalimantan Timur.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Menjadi obyek pariwisata andalan dan terpelihara untuk mendatangkan wisatawan yang berimbas pada peningkatan ekonomi masyarakat.

yang dielaborasikan dalam program dan kegiatan untuk mewujudkan visi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, yaitu “**Terwujudnya Kalimantan Timur menjadi Daerah Tujuan Pariwisata yang berdaya saing**” dalam mendukung perwujudan visi Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan.

3.2.1 Tujuan

Tujuan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbaharukan.

Berdasarkan misi dan faktor–faktor kunci keberhasilan, Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim menetapkan tujuan sebagai berikut:

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas maka telah ditetapkan 5 (lima) tujuan strategis sebagai berikut:

a. Meningkatnya kepariwisataan kalimantan timur yang berdaya saing.;
b. Meningkatnya industri pariwisata sebagai penopang perekonomian daerah;
c. Meningkatnya Kualitas persembahan Seni dan Budaya yang mendukung daya tarik pariwisata;
d. Meningkatnya Penyelengaraan Kepariwisataan yang Profesional dan Akuntabel.

3.2.2 Sasaran

Sasaran dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

a. Tujuan meningkatnya kepariwisataan kalimantan timur yang berdaya saing dijabarkan menjadi lima sasaran strategis, yaitu:
    1) Daya tarik wisata di 7 (Tujuh) kawasan pengembangan pariwisata (KPP) berdaya saing;
    2) Kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisata nusantara meningkat;
    3) Banyaknya karya seni budaya yang dimanfaatkan untuk mendukung pariwisata;
    4) Banyaknya karya seni budaya yang dimanfaatkan untuk mendukung pariwisata;
    5) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
    6) Meningkatnya kualitas sarana prasarana aparatur;
    7) Terpenuhinya urusan kelembagaanpemerintah daerah;
    8) Dokumen perencanaan pengendalian evaluasi disusun tepat waktu.

b. Tujuan meningkatnya industri pariwisata sebagai penopang perekonomian daerah dijabarkan menjadi dua sasaran strategis, yaitu:
   1) Meningkatnya usaha jasa dan sarana pariwisata;
   2) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

c. Tujuan menggali, melestarikan, mengembangkan serta meningkatnya seni dan budaya sebagai karakter jati diri dan pemersatu bangsa dijabarkan menjadi dua sasaran strategis, yaitu:
   1) Meningkatnya Pengembangan budaya di Kalimantan Timur;
   2) Meningkatnya industri ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya.

d. Tujuan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian Dispar dijabarkan menjadi tiga sasaran strategis, yaitu:
   1) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Dispar;
   2) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset dan kepegawaian Dispar; dan
   3) Meningkatnya Kapasitas Aparatur.

e. Tujuan meningkatnya akuntabilitas kinerja Dispar dijabarkan menjadi tiga sasaran strtategis, terdiri:
   1) Meningkatnya kualitas perencanaan Dispar;
   2) Meningkatnya kinerja Dispar; dan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur ke-9 adalah “Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah” dengan Isu Strategis “Menuju Kalimantan Timur sebagai daerah Tujuan Wisata Kelas dunia.

Hal tersebut mendorong setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat merealisasikan dalam program kegiatan dalam rencana kerja yang akan dilaksanakan di tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2023 dari pendanaan APBD Provinsi Kalimantan Timur sebagai program penunjang adalah sebagai berikut ;

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
b) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
c) Program Pemasaran Pariwisata
d) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
e) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

Kode	Urusan / Bidang Urusan PD dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**43.389.867.836**	**APBD Murni**			**31.000.000.000**
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pariwisata**	**Samarinda, Kalimantan Timur**	**88 %**	**17.488.231.692**			**95 %**	**16.590.000.000**
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peranngkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	Samarinda, Kalimantan Timur	11 Dokumen	1.570.000.000			14 Dokumen	
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji, tunjangan dan jasa administrasi kantor	Samarinda, Kalimantan Timur	12 Bulan	9.532.708.527			12 Bulan	
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda, Kalimantan Timur	12 Bulan	2.867.539.765			12 Bulan	
3.26.01.1.08	Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Samarinda, Kalimantan Timur	12 Bulan	3.335.434.400			12 Bulan	
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Samarinda, Kalimantan Timur	12 Bulan	182.549.000			12 Bulan	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah destinasi dalam kawasan pariwisata provinsi (KPP) yang dikembangkan**	**Kukar, Kubar, Kutim, Berau, PPU, Paser, Balikpapan, Bontang, Mahulu, Samarinda**	**10 Destinasi**	**9.800.189.944**		**Goa Mengkuris - KSPP 2 , Goa Rimba - KSPP 2, Danau Semayang - KSPP 3, Danau Jempang - KSPP 3, Danau Melintang - KSPP 3, Desa Muara Muntai - KSPP 3, Desa Semayang - KSPP 3)**	**3 Destinasi**	**6.310.000.000**
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Produk wisata yang dikelola		3 Produk Wisata	4.183.373.724		Danau Semayang dan Goa Mungkuris	5 Produk Wisata	
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Produk Wisata dalam Kawasan strategis pariwisata yang dikelola		2 Produk Wisata dalam kawasan strategis	4.312.998.700		3 Danau (semayang, Melintang dan Jempang)	2 Produk Wisata dalam kawasan strategis	
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola produk wisatanya		10 Destinasi Pariwisata	1.010.049.520		10 DTW (Kabupaten / Kota)	3 Destinasi Pariwisata	
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usaha Pariwisata yang di bina		15 Usaha Pariwisata	293.768.000		15 Usaha	30 Usaha Pariwisata	

	dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah kunjungan wisatawan (wisman-wisnus)**	**10 Kab./Kota**	**6.510.000 Orang**	**3.366.271.300**			**2.310.000 Orang**	**2.700.000.000**
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah jangkauan pemasaran produk wisata Kaltim		6 Daerah/ Kota	3.366.271.300			6 Daerah/ Kota	
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan**	**Balikpapan, Samarinda, Kukar, Kutim, Berau**	**23,5% / 4 Sub Sektor Ekraf**	**6.105.824.000**		**1. Kuliner 2. Kriya 3. Wastra 4. Aplikasi dan Game**	**4 Sub Sektor Ekraf**	**2.000.000.000**
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah kota kreatif yang dikembangkan		3 Kota Kreatif	5.855.824.000		Kota Bontang Kota Samarinda Kab. Paser	3 Kota Kreatif	
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Jenis Ekosistem ekraf yang dikembangkan		3 Jenis Ekosistem Ekraf	250.000.000		1. Kuliner 2. Kriya / Wastra 3. Aplikasi dan Game	3 Jenis Ekosistem Ekraf	
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase tercapainya jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi**	**Balikpapan, Samarinda, Kukar, Kutim, Berau**	**97%**	**6.629.350.900**			**220 Orang**	**3.400.000.000**
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf yang di Bina		9 Kegiatan	6.629.350.900			9 Kegiatan	

3.3.1 Fokus Program Kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2023

Penjelasan Rencana Program dan Kegiatan Pariwisata Tahun Anggaran 2022.

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi,dengan pagu rencana sebesar Rp. 17.488.231.692,-**
   1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   2) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   5) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan pagu rencana sebesar Rp. 9.800.189.944,-**
   1) Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
   2) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
   3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
   4) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

3. **Program Pemasaran Pariwisata dengan pagu rencana sebesar Rp. 3.366.271.300,-**
   1) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

4. **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan pagu rencana sebesar Rp. 6.105.824.000,-**
   1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
   2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif

5. **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dengan pagu rencana sebesar Rp. 6.629.350.900,-**
    1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata memiliki 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Rencana Kerja dan Pendanaan dapat dilihat di Tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2023	
				TARGET	PAGU(Rp)
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**Rp 47,225,942,049**
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**Rp 17,608,182,412**
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pariwisata	Kalimantan Timur, Luar Daerah	95%	Rp 1,570,000,000
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pariwisata	Kalimantan Timur	95%	Rp 9,572,308,527
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pariwisata	Kalimantan Timur, Luar Daerah	95%	Rp 2,867,539,765
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pariwisata	Kalimantan Timur	95%	Rp 3,412,785,120
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pariwisata	Kalimantan Timur	95%	Rp 185,549,000
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**				**Rp 10,939,562,437**

3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	Kab. Kutai Timur,	3 Destinasi	Rp 5,194,604,217
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	Kab. Kutai Kartanegara, Kab Kutai Barat	3 Destinasi	Rp 4,312,998,700
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	Kalimantan Timur	3 Destinasi	Rp 1,010,049,520
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	Kab. Berau, Kab Kutai Timur, Kab Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, Kota Bontang	3 Destinasi	Rp 421,910,000
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**				**Rp 4,683,547,300**
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisman-Wisnus)	Kota Samarinda, Kab Kutai Kartanegara, Kab Kutai Barat, Luar Daerah	2.005.000 Kunjungan	Rp 4,683,547,300
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**				**Rp 7,213,299,000**
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	Kab Kutai Kartanegara, Kab Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Bontang	23.53%	Rp 6,963,299,000

3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	Kab Berau, Kab Paser, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kab Penajam Paser utara, Kab Mahakam Ulu	23.53%	Rp 250,000,000
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**				**Rp 6,829,450,900**
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase tercapainya jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi	Kalimantan Timur, Luar Daerah	95%	Rp 6,829,450,900

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 – 2024.

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur diberikan amanah dan tanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pariwisata bedasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pariwisata berdasarkan pada tujuan, sasaran, dan Program Kerja yang telah ditetapkan baik dalam Rencana Strategis Dispar 2019 – 2024, Renja 2023, serta Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Kalimantan Timur tahun 2022.

Program kegiatan yang telah disepakati dalam dokumen RPJMD di dalam rencana kerja tahun 2020 ini agar dapat dimaksimalkan dukungan pendanaan untuk mencapai target akhir Renstra SKPD dan RPJMD pada 2024 mendatang.

Untuk selanjutnya tataran indikator kinerja utama ini perlu untuk dibahas lebih lanjut agar terdapat penajaman-penajaman yang sesuai dengan perkembangan Kepariwisataan Kalimantan Timur dengan melihat isu-isu nasional yang berkembang. Sehingga tercapai Visi Misi Dinas Pariwisata untuk mendukung Visi Misi Gubernur Kalimantan Timur Terpilih yang telah dituangkan dalam RPJMD 2019 – 2024.

Akhirnya dengan harapan Dinas Pariwisata tentunya dapat menyumbangkan pembangunan kepada masyarakat menjadi lebih maju dan meningkat dibidang Pariwisata

Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Kalimantan Timur

Drs. Ahmad Herwansyah, M.Si
(Pembina Utama Muda)
NIP. 196802041988031003

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
c. Adanya penambahan anggaran yang bersumber dari Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF)

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada :

a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

a. Perumusan Rancangan Awal Perubahan Renja Perangkat Daerah;
b. Penyajian Rancangan Awal Perubahan Renja Perangkat Daerah;
c. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
d. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
e. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

17. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;

18. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;

19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

20. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;

21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor .... Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Maksud disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Renja adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2023.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Renja adalah:

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB 2. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Bab ini memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

BAB 3. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat Tujuan Sasaran, Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023, dan Rancangan Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2023.

BAB 4. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Hasil evaluasi Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Dinas Perkebunan				**43.904.550.650**			**30.414.645.013**			**53.642.224.560**			**10.706.690.816**			**10.706.690.816**			**41.121.335.829**			**93,66**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan**	**92**	**%**	**23.611.237.650**	**89,09**	**%**	**15.759.398.198**	**92**	**%**	**27.134.564.860**	**86,13**	**%**	**7.799.205.046**	**86,13**	**%**	**7.799.205.046**	**175,22**	**%**	**23.558.603.244**	**190,46**	**%**	**99,78**	**Dinas Perkebunan**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai Akuntabilitas Kinerja PD**	**74**	**%**	**1.774.925.300**	**76,12**	**%**	**1.063.991.355**	**74**	**%**	**1.518.431.600**	**73,40**	**%**	**596.754.242**	**73,40**	**%**	**596.754.242**	**149,52**	**%**	**1.660.745.597**	**202,05**	**%**	**93,57**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	802.771.000	10	Dokumen	471.563.160	10	Dokumen	626.939.900	4	Dokumen	364.992.610	4	Dokumen	364.992.610	14	Dokumen	836.555.770	140,00	Dokumen	104,21	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	972.154.300	4	Laporan	592.428.195	4	Laporan	891.491.700	3	Laporan	231.761.632	3	Laporan	231.761.632	7	Laporan	824.189.827	175,00	Laporan	84,78	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12**	**Bulan**	**15.359.114.750**	**12**	**Bulan**	**1318078 4498**	**12**	**Bulan**	**15.998.989.760**	**6**	**Bulan**	**7.202.450.804**	**6**	**Bulan**	**7.202.450.804**	**18**	**Bulan**	**20.383.235.302**	**150,00**	**Bulan**	**132,71**	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79	Orang/ Bulan	14.906.274.750				79	Orang/ Bulan	15.567.349.760	78	Orang/ Bulan	7.009.180.804	78	Orang/ Bulan	7.009.180.804	78	Orang/ Bulan	7.009.180.804	98,73	Orang/ Bulan	47,02	
	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan				28	Dokumen	12.877.514.498																
	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan				12	laporan																	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	452.840.000				1	Dokumen	431.640.000	1	Dokumen	193.270.000	1	Dokumen	193.270.000	1	Dokumen	193.270.000	100,00	Dokumen	42,68	
	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksaan tugas ASN				12	Bulan	303.270.000																
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi**	**20**	**%**	**936.032.000**	**20**	**%**	**109816460**	**20**	**%**	**1.044.908.000**		**%**	-		**%**	-	**20**	**%**	**109.816.460**	**100,00**	**%**	**11,73**	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasai Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	352.032.000	0	Paket	0	1	Paket	171.408.000		Paket	-		Paket	-	0	Paket	-	-	Paket	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	Orang	584.000.000	12	Orang	109.816.460	50	Orang	873.500.000		Orang	-		Orang	-	12	Orang	109.816.460	24,00	Orang	18,80	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu**	**5**	**Unit**	**1.716.947.254**	**5**	**Unit**	**489441336**	**5**	**Unit**	**1.898.822.900**		**Unit**	**-**		**Unit**	**-**	**5**	**Unit**	**489.441.336**	**100,00**	**Unit**	**28,51**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	35.991.708				4	Paket	35.900.400		Paket	-		Paket	-	0	Paket	-	-	Paket	-	
	Jumlah bulan penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12	Bulan	35.911.000																
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	167.310.000				4	Paket	209.403.500		Paket	-		Paket	-	0	Paket	-	-	Paket	-	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				12	Bulan	117.200.000																
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	352.514.181				4	Paket	357.470.000		Paket	-		Paket	-	0	Paket	-	-	Paket	-	
	Jumlah bulan penyediaan konsumsi/makan minum rapat				12	Bulan	400.880.000																
	Jumlah bulan penyedaiaan alat tulis kantor				12	Bulan	52.650.336																
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	69.731.365				4	Paket	49.203.000		Paket	-		Paket	-	0	Paket	-	-	Paket	-	
	Jumlah barang cetakan dan penggandaan				47240	Lembar	52.650.336																

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	9.600.000				12	Dokumen	9.696.000		Dokumen	-		Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	Dokumen	-	
	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12	Bulan	9.600.000																
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	1.081.800.000				1	Laporan	1.237.150.000		Laporan	-		Laporan	-	0	Laporan	-	-	Laporan	-	
	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah				12	Bulan	1.113.742.345																
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah**	**13**	**Jenis**	**227.407.500**	**8**	**Jenis**	**314.569.700**	**13**	**Jenis**	**1.723.434.000**	**1**	**Jenis**	**-**	**1**	**Jenis**	**-**	**9**	**Jenis**	**314.569.700**	**69,23**	**Jenis**	**138,33**	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasai Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	-	0	Unit	0	2	Unit	985.220.000	2	Unit	-	2	Unit	-	2	Unit	-	100,00	Unit		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25	Unit	227.407.500	15	Unit	314.569.700	25	Unit	738.214.000		Unit	-		Unit	-	15	Unit	314.569.700	60,00	Unit	138,33	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah**	**3**	**Jenis**	**2.634.801.146**	**3**	**Jenis**	**2.763.097.920**	**3**	**Jenis**	**3.572.693.200**		**Jenis**	-		**Jenis**	-	**3**	**Jenis**	**2.763.097.920**	**100,00**	**Jenis**	**104,87**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	30.000.000				1	Laporan	31.210.000		Laporan	-		Laporan	-	0	Laporan	-	-	Laporan	-	
	Jumlah surat yang diadministrasikan				3121	Lembar	31.210.000																
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	494.401.410				1	Laporan	519.730.000		Laporan	-		Laporan	-	0	Laporan	-	-	Laporan	-	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12	Bulan	275.000.000																
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	304.192.000				1	Laporan	421.440.000		Laporan	-		Laporan	-	0	Laporan	-	-	Laporan	-	
	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				12	Bulan	335.000.000																
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1.806.207.736				1	Laporan	2.600.313.200		Laporan	-		Laporan	-	0	Laporan	-	-	Laporan	-	
	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran				12	Bulan	2.121.887.920																
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	**3**	**Jenis**	**962.009.700**	**3**	**Jenis**	**645897164**	**3**	**Jenis**	**1.377.285.400**		**Jenis**	**-**		**Jenis**	**-**	**3**	**Jenis**	**645.897.164**	**100,00**	**Jenis**	**67,14**	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	Unit	400.217.700	18	Unit	292.000.000	18	Unit	309.266.600		Unit	-		Unit	-	18	Unit	292.000.000	100,00	Unit	72,96	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	349.932.000	2	Unit	199.885.056	2	Unit	912.818.800		Unit	-		Unit	-	2	Unit	199.885.056	100,00	Unit	57,12	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21	Unit	211.860.000	21	Unit	154.012.108	21	Unit	155.200.000		Unit	-		Unit	-	21	Unit	154.012.108	100,00	Unit	72,70	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Produksi komoditas perkebunan**	**18.313.874,25**	**Ton**	**6.965.557.600**	**17022588**	**Ton**	**11167377425**	**18.313.874,25**	**Ton**	**7.122.478.500**	**19.207.272**	**Ton**	**233.599.400**	**19.207.272**	**Ton**	**233.599.400**	**36.229.860**	**Ton**	**11.400.976.825**	**197,83**	**Ton**	**163,68**	
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	**Produktivitas komoditas perkebunan strategis**	**20,03**	**Ton/Ha**	**6.965.557.600**	**12,49 ****	**Ton/Ha**	**11167377425**	**20,03**	**Ton/Ha**	**7.122.478.500**	**12,49**	**Ton/Ha**	**233.599.400**	**12,49**	**Ton/Ha**	**233.599.400**	**#VALUE!**	**Ton/Ha**	**11.400.976.825**	**#VALUE!**	**Ton/Ha**	**163,68**	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1	Laporan	6.965.557.600	1	Dokumen	1116737 7425	1	Laporan	7.122.478.500	-	Laporan	233.599.400	-	Laporan	233.599.400	1	Laporan	11.400.976.825	100,00	Laporan	163,68	
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa Sawit)				13,22	Ton/Ha																	
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)				1,287	Ton/Ha																	
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)				0,45	Ton/Ha																	
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)				0,61	Ton/Ha																	
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)				0,876	Ton/Ha																	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30	Kelompok	7.222.948.500	36	Kelompok	0	30	Kelompok	9.053.510.000	-	Kelompok	350.531.800	-	Kelompok	350.531.800	36	Kelompok	350.531.800	120,00	Kelompok	4,85	
	Luas kebun yang dibangun	1.500.674	Ha		1575966	Ha		1.500.674	Ha		1.575.966	Ha		1.575.966	Ha		3151932	Ha	-	210,03	Ha		
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang diperluas	545	Ha	7.222.948.500	720	Ha	0	545	Ha	9.053.510.000	-	Ha	350.531.800	-	Ha	350.531.800	720	Ha	350.531.800	132,11	Ha	4,85	
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1	Dokumen	7.222.948.500				1	Dokumen	9.053.510.000	-	Dokumen	350.531.800	-	Dokumen	350.531.800	0	Dokumen	350.531.800	-	Dokumen	4,85	
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)				70	Ha																	
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Lada)				100	Ha																	
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Kelapa)				50	Ha																	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Kakao)				150	Ha																	
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Karet)				150	Ha																	
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Pala)				100	Ha																	
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Aren)				100	Ha																	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan**	**4,044**	**Juta Ton CO2eq**	**1.120.000.000**	**7,92**	**Juta Ton CO2eq**	**1183055520**	**4,044**	**Juta Ton CO2eq**	**5.081.550.200**	**7,92**	**Juta Ton CO2eq**	**602.580.517**	**7,92**	**Juta Ton CO2eq**	**602.580.517**	**15,84**	**Juta Ton CO2eq**	**1.785.636.037**	**391,69**	**Juta Ton CO2eq**	**159,43**	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	137	Pelaku Usaha	1.120.000.000	233	Pelaku Usaha	1183055520	137	Pelaku Usaha	5.081.550.200	53	Pelaku Usaha	602.580.517	53	Pelaku Usaha	602.580.517	286	Pelaku Usaha	1.785.636.037	208,76	Pelaku Usaha	159,43	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	9317	Ha	585.660.000				9317	Ha	3.197.288.488	1.071	Ha	481.152.917	1.071	Ha	481.152.917	1071	Ha	481.152.917	11,50	Ha	82,16	
	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi				1	PMS	730627970																
	Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi				120371,34	Ha																	
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	150	Ha	534.340.000				150	Ha	1.884.261.712	50	Ha	121.427.600	50	Ha	121.427.600	50	Ha	121.427.600	33,33	Ha	22,72	
	Jumlah Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina				46	KTPA	285.167.050																

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
	Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani				11	Konflik	167.260.500																
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)**	**35**	**Perusahaan**	**750.000.000**	**36**	**Perusahaan**	**576455550**	**35**	**Perusahaan**	**1.247.873.900**	**18**	**Perusahaan**	**542.712.300**	**18**	**Perusahaan**	**542.712.300**	**54**	**Perusahaan**	**1.119.167.850**	**154,29**	**Perusahaan**	**149,22**	
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan**	**107**	**Perusahaan**	**750.000.000**	**97**	**Perusahaan**	**576455550**	**107**	**Perusahaan**	**1.247.873.900**	**65**	**Perusahaan**	**542.712.300**	**65**	**Perusahaan**	**542.712.300**	**162**	**Perusahaan**	**1.119.167.850**	**151,40**	**Perusahaan**	**149,22**	
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1	Laporan	750.000.000				1	Laporan	1.247.873.900	-	Laporan	**542.712.300**	-	Laporan	**542.712.300**	0	Laporan	542.712.300	-	Laporan	72,36	
	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan				45	Lembaga	290432300																
	Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina				52	Perusahaan	286023250																

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk**	**1**	**lembaga**	**4.234.806.900**	**1**	**Lembaga**	**1728358320**	**1**	**lembaga**	**4.002.247.100**		**lembaga**	**1.178.061.753**		**lembaga**	**1.178.061.753**	**1**	**lembaga**	**2.906.420.073**	**100,00**	**lembaga**	**68,63**	
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	**Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya**	**25**	**Orang**	**312.046.900**	**45**	**Orang**	**393715900**	**25**	**Orang**	**908.093.300**	**25**	**Orang**	**481.411.000**	**25**	**Orang**	**481.411.000**	**70**	**Orang**	**875.126.900**	**280,00**	**Orang**	**280,45**	
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	15	Orang	312.046.900				15	Orang	908.093.300	15	Orang	481.411.000	15	Orang	481.411.000	15	Orang	481.411.000	100,00	Orang	154,28	
	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)				2	Kegiatan	393715900																
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	**Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya**	**31**	**KT**	**1.877.575.000**	**30**	**KT**	**529643755**	**31**	**KT**	**1.754.478.800**	**5**	**KT**	**269.271.051**	**5**	**KT**	**269.271.051**	**35**	**KT**	**798.914.806**	**112,90**	**KT**	**42,55**	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
	Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan	**7**	**Unit**		**7**	**Unit**		**7**	**Unit**		**7**	**Unit**		**7**	**Unit**		**14**	**Unit**	**-**	**200,00**	**Unit**		
	Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	**1**	**Unit**		**1**	**Unit**		**1**	**Unit**		**1**	**Unit**		**1**	**Unit**		**2**	**Unit**	**-**	**200,00**	**Unit**		
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1	Dokumen	1.343.750.000				1	Dokumen	1.045.361.800	-	Dokumen	269.036.051	-	Dokumen	269.036.051	0	Dokumen	269.036.051	-	Dokumen	20,02	
	Jumlah jenis olahan produk perkebunan yang teradopsi dan disebarluaskan (produk)				5	produk	529643755																
	Jumlah produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan (Produk)				20	produk																	
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	10	Kelompok	533.825.000				10	Kelompok	709.117.000	5	Kelompok	235.000	5	Kelompok	235.000	5	Kelompok	235.000	50,00	Kelompok	0,04	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
	Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				20	Pertemuan																	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	**Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI**	**4**	**KT**	**2.045.185.000**	**6**	**KT**	**804998665**	**4**	**KT**	**1.339.675.000**	**3**	**KT**	**427.379.702**	**3**	**KT**	**427.379.702**	**9**	**KT**	**1.232.378.367**	**225,00**	**KT**	**60,26**	
	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk	**20**	**Lembaga**		**21**	**Lembaga**		**20**	**Lembaga**		4	**Lembaga**		4	**Lembaga**		**25**	**Lembaga**	**-**	**125,00**	**Lembaga**		
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1	Unit	552.475.000				1	Unit	268.020.500		Unit	102.308.300		Unit	102.308.300	0	Unit	102.308.300	-	Unit	18,52	
	Jumlah Kelembagaan Pekebun yang dibentuk				29	Lembaga	203456000																
Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	1	Laporan	993.750.000				1	Laporan	748.248.000	-	Laporan	187.745.302	-	Laporan	187.745.302	0	Laporan	187.745.302	-	Laporan	18,89	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina				5	Unit	337866075																
	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya (pelaku usaha)				15	Pelaku Usaha																	
Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya	1	Unit	262.500.000				1	Unit	157.289.900	-	Unit	84.499.500	-	Unit	84.499.500	0	Unit	84.499.500	-	Unit	32,19	
	Jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan yang diuji dengan pengujian laboratorium yang berstandar SNI				6	Kali	94947190																
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1	Unit	236.460.000				1	Unit	166.116.600		Unit	52.826.600		Unit	52.826.600	0	Unit	52.826.600	-	Unit	22,34	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani				1	Pertemuan	168729400																
UPTD Pengawasan Benih Pekebunan (PBP)				**2.496.308.950**						**2.813.119.190**			**1.253.105.778**			**1.253.105.778**	**0**		**1.253.105.778**			**50,20**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan**	**92**	**%**	**1.460.138.650**				**92**	**%**	**2.022.250.190**	**82,11**	**%**	**925.205.576**	**82,11**	**%**	**925.205.576**	**82,11**	**%**	**925.205.576**	**89,25**	**%**	**63,36**	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12**	**Bulan**	**92.520.000**				**12**	**Bulan**	**84.960.000**	**6**	**Bulan**	**32.550.000**	**6**	**Bulan**	**32.550.000**	**6**	**Bulan**	**32.550.000**	**50,00**	**Bulan**	**35,18**	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	92.520.000				1	Dokumen	84.960.000	-	Dokumen	32.550.000	-	Dokumen	32.550.000	0	Dokumen	32.550.000	-	Dokumen	35,18	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi**	**20**	**%**	**158.990.000**				**20**	**%**	**183.600.000**	**20**	**%**	**77.465.355**	**20**	**%**	**77.465.355**	**20**	**%**	**77.465.355**	**100,00**	**%**	**48,72**	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13	Orang	158.990.000				13	Orang	183.600.000	13	Orang	77.465.355	13	Orang	77.465.355	13	Orang	77.465.355	100,00	Orang	48,72	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu**	**3**	**Unit**	**294.022.117**				**3**	**Unit**	**539.771.100**	**3**	**Unit**	**195.216.982**	**3**	**Unit**	**195.216.982**	**3**	**Unit**	**195.216.982**	**100,00**	**Unit**	**66,40**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	4.500.000				4	Paket	4.055.500	4	Paket	4.043.756	4	Paket	4.043.756	4	Paket	4.043.756	100,00	Paket	89,86	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	24.980.000				4	Paket	113.678.800	3	Paket	79.210.826	3	Paket	79.210.826	3	Paket	79.210.826	75,00	Paket	317,10	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	61.701.617				4	Paket	51.936.000	2	Paket	13.848.000	2	Paket	13.848.000	2	Paket	13.848.000	50,00	Paket	22,44	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	7.000.500				4	Paket	7.744.000	1	Paket	2.477.000	1	Paket	2.477.000	1	Paket	2.477.000	25,00	Paket	35,38	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	3.840.000				12	Dokumen	7.756.800	3	Dokumen	1.452.000	3	Dokumen	1.452.000	3	Dokumen	1.452.000	25,00	Dokumen	37,81	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	192.000.000				1	Laporan	354.600.000	-	Laporan	94.185.400	-	Laporan	94.185.400	0	Laporan	94.185.400	-	Laporan	49,05	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah**	**6**	**Jenis**	**334.506.200**				**6**	**Jenis**	**282.779.410**	**6**	**Jenis**	**274.013.800**	**6**	**Jenis**	**274.013.800**	**6**	**Jenis**	**274.013.800**	**100,00**	**Jenis**	**81,92**	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	Unit	334.506.200				15	Unit	282.779.410	15	Unit	274.013.800	15	Unit	274.013.800	15	Unit	274.013.800	100,00	Unit	81,92	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah**	**3**	**Jenis**	**435.339.733**				**3**	**Jenis**	**667.823.680**	**3**	**Jenis**	**236.376.761**	**3**	**Jenis**	**236.376.761**	**3**	**Jenis**	**236.376.761**	**100,00**	**Jenis**	**54,30**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	2.400.000				1	Laporan	5.000.000	-	Laporan	2.500.000	-	Laporan	2.500.000	0	Laporan	2.500.000	-	Laporan	104,17	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	86.977.605				1	Laporan	131.683.200	-	Laporan	42.081.671	-	Laporan	42.081.671	0	Laporan	42.081.671	-	Laporan	48,38	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	188.750.000				1	Laporan	323.400.000	-	Laporan	80.624.850	-	Laporan	80.624.850	0	Laporan	80.624.850	-	Laporan	42,72	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	157.212.128				1	Laporan	207.740.480	-	Laporan	111.170.240	-	Laporan	111.170.240	0	Laporan	111.170.240	-	Laporan	70,71	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	**3**	**Jenis**	**144.760.600**				**3**	**Jenis**	**263.316.000**	**3**	**Jenis**	**109.582.678**	**3**	**Jenis**	**109.582.678**	**3**	**Jenis**	**109.582.678**	**100,00**	**Jenis**	**75,70**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Unit	35.910.600				2	Unit	24.406.000	1	Unit	11.264.000	1	Unit	11.264.000	1	Unit	11.264.000	50,00	Unit	31,37	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	90.000.000				4	Unit	199.000.000	2	Unit	79.400.520	2	Unit	79.400.520	2	Unit	79.400.520	50,00	Unit	88,22	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13	Unit	18.850.000				13	Unit	39.910.000	2	Unit	18.918.158	2	Unit	18.918.158	2	Unit	18.918.158	15,38	Unit	100,36	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Jumlah benih yang beredar**	**6.000.000**	**benih**	**1.036.170.300**				**6.000.000**	**benih**	**790.869.000**	**5.146.993**	**benih**	**327.900.202**	**5.146.993**	**benih**	**327.900.202**	**5146993**	**benih**	**327.900.202**	**85,78**	**benih**	**31,65**	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	**Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi**	**6.000.000**	**Benih**	**1.036.170.300**				**6.000.000**	**Benih**	**790.869.000**	**5.146.993**	**Benih**	**327.900.202**	**5.146.993**	**Benih**	**327.900.202**	**5146993**	**Benih**	**327.900.202**	**85,78**	**Benih**	**31,65**	
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	150	Sertifikat	461.297.250				150	Sertifikat	400.835.000	169	Sertifikat	186.910.262	169	Sertifikat	186.910.262	169	Sertifikat	186.910.262	112,67	Sertifikat	40,52	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1	Laporan	574.873.050				1	Laporan	390.034.000	-	Laporan	140.989.940	-	Laporan	140.989.940	0	Laporan	140.989.940	-	Laporan	24,53	
UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP)				**2.070.133.000**						**3.354.506.080**			**1.084.790.659**			**1.084.790.659**	**0**		**1.084.790.659**			**52,40**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan**	**92**	**%**	**1.944.904.600**				**92**	**%**	**1.849.722.680**	**89,74**	**%**	**653.873.230**	**89,74**	**%**	**653.873.230**	**89,74**	**%**	**653.873.230**	**97,54**	**%**	**33,62**	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasai Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12**	**Bulan**	**92.520.000**				**12**	**Bulan**	**84.960.000**	**6**	**Bulan**	**42.480.000**	**6**	**Bulan**	**42.480.000**	**6**	**Bulan**	**42.480.000**	**50,00**	**Bulan**	**45,91**	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	92.520.000				1	Dokumen	84.960.000	1	Dokumen	42.480.000	1	Dokumen	42.480.000	1	Dokumen	42.480.000	100,00	Dokumen	45,91	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi**	**20**	**%**	**95.200.000**				**20**	**%**	**93.960.000**		**%**	-		**%**	-	**0**	**%**	-	-	**%**	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	Orang	95.200.000				6	Orang	93.960.000		Orang	-		Orang	-	0	Orang	-	-	Orang	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu**	**3**	**Unit**	**309.980.917**				**3**	**Unit**	**405.610.200**		**Unit**	**240.610.598**		**Unit**	**240.610.598**	**0**	**Unit**	**240.610.598**	**-**	**Unit**	**77,62**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	10.699.946				4	Paket	9.081.300	1	Paket	1.928.000	1	Paket	1.928.000	1	Paket	1.928.000	25,00	Paket	18,02	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	17.600.000				4	Paket	55.611.500	2	Paket	15.820.180	2	Paket	15.820.180	2	Paket	15.820.180	50,00	Paket	89,89	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	77.777.300				4	Paket	41.088.000	2	Paket	9.842.000	2	Paket	9.842.000	2	Paket	9.842.000	50,00	Paket	12,65	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	24.783.671				4	Paket	21.151.000	2	Paket	12.441.243	2	Paket	12.441.243	2	Paket	12.441.243	50,00	Paket	50,20	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	5.120.000				12	Dokumen	3.878.400	4	Dokumen	969.600	4	Dokumen	969.600	4	Dokumen	969.600	33,33	Dokumen	18,94	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	174.000.000				1	Laporan	274.800.000	1	Laporan	199.609.575	1	Laporan	199.609.575	1	Laporan	199.609.575	100,00	Laporan	114,72	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah**	**5**	**Jenis**	**367.934.800**				**5**	**Jenis**	**604.665.400**	**2**	**Jenis**	**90.720.300**	**2**	**Jenis**	**90.720.300**	**2**	**Jenis**	**90.720.300**	**40,00**	**Jenis**	**24,66**	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17	Unit	367.934.800				17	Unit	604.665.400	7	Unit	90.720.300	7	Unit	90.720.300	7	Unit	90.720.300	41,18	Unit	24,66	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah**	**3**	**Jenis**	**495.410.883**				**3**	**Jenis**	**521.213.280**		**Jenis**	**213.535.773**		**Jenis**	**213.535.773**	**0**	**Jenis**	**213.535.773**	**-**	**Jenis**	**43,10**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	3.950.000				1	Laporan	5.200.000	1	Laporan	2.600.000	1	Laporan	2.600.000	1	Laporan	2.600.000	100,00	Laporan	65,82	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	185.782.355				1	Laporan	178.912.800	1	Laporan	67.336.043	1	Laporan	67.336.043	1	Laporan	67.336.043	100,00	Laporan	36,24	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	148.466.400				1	Laporan	129.360.000	1	Laporan	32.429.490	1	Laporan	32.429.490	1	Laporan	32.429.490	100,00	Laporan	21,84	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	157.212.128				1	Laporan	207.740.480	1	Laporan	111.170.240	1	Laporan	111.170.240	1	Laporan	111.170.240	100,00	Laporan	70,71	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	**3**	**Jenis**	**583.858.000**				**3**	**Jenis**	**139.313.800**		**Jenis**	**66.526.559**		**Jenis**	**66.526.559**	**0**	**Jenis**	**66.526.559**	**-**	**Jenis**	**11,39**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	35.510.000				1	Unit	12.203.000	1	Unit	9.852.100	1	Unit	9.852.100	1	Unit	9.852.100	100,00	Unit	27,74	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	509.328.000				1	Unit	101.600.000	1	Unit	56.674.459	1	Unit	56.674.459	1	Unit	56.674.459	100,00	Unit	11,13	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	39.020.000				10	Unit	25.510.800	-	Unit	-	-	Unit	-	0	Unit	-	-	Unit	-	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT**	**774.940.000**	**Rp**	**125.228.400**				**774.940.000**	**Rp**	**1.504.783.400**	**1.532.403.400**	**Rp**	**430.917.429**	**458.537.429**	**Rp**	**430.917.429**	**458.537.429**	**Rp**	**430.917.429**	**59,17**	**Rp**	**344,11**	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	**Luas serangan berat OPT yang dikendalikan**	**156**	**Ha**	**125.228.400**				**156**	**Ha**	**1.504.783.400**	**354**	**Ha**	**430.917.429**	**354**	**Ha**	**430.917.429**	**354**	**Ha**	**430.917.429**	**226,92**	**Ha**	**344,11**	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	156	Ha	125.228.400				156	Ha	1.504.783.400	370,5	Ha	430.917.429	370,5	Ha	430.917.429	370,5	Ha	430.917.429	237,50	Ha	344,11	
UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP)				**2.401.807.400**						**4.455.010.500**			**2.403.820.953**			**2.403.820.953**	**0**		**2.403.820.953**			**100,08**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan**	**92**	**%**	**983.464.992**				**92**	**%**	**1.211.808.300**	**91,5**	**%**	**547.579.615**	**91,5**	**%**	**547.579.615**	**91,5**	**%**	**547.579.615**	**99,46**	**%**	**55,68**	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12**	**Bulan**	**92.520.000**				**12**	**Bulan**	**84.960.000**	**6**	**Bulan**	**42.480.000**	**6**	**Bulan**	**42.480.000**	**6**	**Bulan**	**42.480.000**	**50,00**	**Bulan**	**45,91**	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	92.520.000				1	Dokumen	84.960.000	-	Dokumen	42.480.000	-	Dokumen	42.480.000	0	Dokumen	42.480.000	-	Dokumen	45,91	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi**	**20**	**%**	**95.360.000**				**20**	**%**	**77.067.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	Orang	95.360.000				7	Orang	77.067.000	-	Orang	-	-	Orang	-	0	Orang	-	-	Orang	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu**	**3**	**Unit**	**268.815.973**				**3**	**Unit**	**331.414.700**	**3**	**Unit**	**148.264.877**	**3**	**Unit**	**148.264.877**	**3**	**Unit**	**148.264.877**	**100,00**	**Unit**	**55,15**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	2.703.273				4	Paket	7.343.000	2	Paket	6.262.460	2	Paket	6.262.460	2	Paket	6.262.460	50,00	Paket	231,66	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	2.475.000				2	Paket	70.669.900	1	Paket	32.510.326	1	Paket	32.510.326	1	Paket	32.510.326	50,00	Paket	1.313,55	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	61.165.200				4	Paket	27.576.000	2	Paket	7.219.000	2	Paket	7.219.000	2	Paket	7.219.000	50,00	Paket	11,80	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	5.552.500				2	Paket	17.927.000	1	Paket	8.456.585	1	Paket	8.456.585	1	Paket	8.456.585	50,00	Paket	152,30	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	1.920.000				12	Dokumen	2.698.800	6	Dokumen	800.000	6	Dokumen	800.000	6	Dokumen	800.000	50,00	Dokumen	41,67	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	195.000.000				1	Laporan	205.200.000	-	Laporan	93.016.506	-	Laporan	93.016.506	0	Laporan	93.016.506	-	Laporan	47,70	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah**	**2**	**Jenis**	**-**				**2**	**Jenis**	**143.680.800**	**2**	**Jenis**	**123.512.000**	**2**	**Jenis**	**123.512.000**	**2**	**Jenis**	**123.512.000**	**100,00**	**Jenis**		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	-				4	Unit	143.680.800	4	Unit	123.512.000	4	Unit	123.512.000	4	Unit	123.512.000	100,00	Unit		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah**	**3**	**Jenis**	**407.984.019**				**3**	**Jenis**	**542.982.800**	**1**	**Jenis**	**218.709.458**	**1**	**Jenis**	**218.709.458**	**1**	**Jenis**	**218.709.458**	**33,33**	**Jenis**	**53,61**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	3.000.000				1	Laporan	4.000.000	1	Laporan	4.000.000	1	Laporan	4.000.000	1	Laporan	4.000.000	100,00	Laporan	133,33	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	92.987.659				1	Laporan	85.267.200	-	Laporan	35.020.038	-	Laporan	35.020.038	0	Laporan	35.020.038	-	Laporan	37,66	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	129.231.200				1	Laporan	194.040.000	-	Laporan	42.360.000	-	Laporan	42.360.000	0	Laporan	42.360.000	-	Laporan	32,78	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	182.765.160				1	Laporan	259.675.600	-	Laporan	137.329.420	-	Laporan	137.329.420	0	Laporan	137.329.420	-	Laporan	75,14	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	**3**	**Jenis**	**118.785.000**				**3**	**Jenis**	**31.703.000**	**2**	**Jenis**	**14.613.280**	**2**	**Jenis**	**14.613.280**	**2**	**Jenis**	**14.613.280**	**66,67**	**Jenis**	**12,30**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Unit	36.510.000				2	Unit	12.203.000	1	Unit	8.968.280	1	Unit	8.968.280	1	Unit	8.968.280	50,00	Unit	24,56	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	44.000.000				13	Unit	19.500.000	6	Unit	5.645.000	6	Unit	5.645.000	6	Unit	5.645.000	600,00	Unit	12,83	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13	Unit	38.275.000																		-	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat**	**85**	**%**	**1.418.342.408**				**85**	**%**	**3.243.202.200**	**61**	**%**	**1.856.241.338**	**61**	**%**	**1.856.241.338**	**61**	**%**	**1.856.241.338**	**71,76**	**%**	**130,87**	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	**Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan**	**50000**	**Benih**	**1.418.342.408**				**50000**	**Benih**	**3.243.202.200**	**35.000**	**Benih**	**1.856.241.338**	**35.000**	**Benih**	**1.856.241.338**	**35000**	**Benih**	**1.856.241.338**	**70,00**	**Benih**	**130,87**	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1	Laporan	1.418.342.408				1	Laporan	3.243.202.200	-	Laporan	1.856.241.338	-	Laporan	1.856.241.338	0	Laporan	1.856.241.338	-	Laporan	130,87	

2.2 Permasalahan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan perencanaan, namun Dinas perkebunan memerlukan anggaran tambahan untuk mengakomodir beberapa kegiatan pada Dinas dan UPTD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang belum terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) murni tahun anggaran 2023. Program/Kegiatan/Sub kegiatan tersebut antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (3.27.01) pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur :
    - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (3.27.001.1.02) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (3.27.001.1.02.001) pada belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS. Hal ini dikarenakan perlunya dilakukan penambahan belanja gaji untuk pembayaran iuran BPJS
    - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (3.27.001.1.02) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (3.27.001.1.02.002), pada Belanja Honorarium Pengelola Keuangan. Penambahan Honor PBP (Pembantu Bendahara Pengeluaran) yang sebelumnya tidak teranggarkan.
    - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (3.27.001.1.07) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (3.27.001.1.07.002) pada Belanja Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Pengadaan Kendaraan Eselon III (Kepala Bidang dan UPTD) dan Kendaraan Operasional.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (00.01) pada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) Provinsi Kalimantan Timur:
    - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.27.001.1.09) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (3.27.001.1.09.009), yang di alokasikan untuk pemeliharaan gedung

kantor berupa perbaikan atap yang sudah bocor dan rusak, serta biaya perencanaan teknis untuk rehabilitasi ruang laboratorium dan ruang PBT.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (00.01) pada UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) Provinsi Kalimantan Timur:
    - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.27.001.1.09) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (3.27.001.1.09.009), yang dialokasikan untuk rehabilitasi rumah petugas di Km. 41 Kecamatan Loa Janan.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2023 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2023 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada mekanisme Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

BAB 3
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pengembangan sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur, dimana setiap elemennya memiliki fungsi dan tujuan teknis dalam pembangunan subsektor perkebunan dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatnya peran sektor pertanian (dalam arti luas).

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang pertanian tersebut perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2019-2023. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2019-2023 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2023, target tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Penyesuaian target tujuan/sasaran Perubahan RENJA 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET	
		RENJA 2023	RENJA-P 2023
Tujuan :			
Meningkatkan peran Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	5,3%	5,3%
Sasaran :			
1. Meningkatnya nilai PDRB sub sektor perkebunan	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)	21.997	21.997
2. Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	Jumlah perusahaan yang mendapat kan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) (Perusahaan)	63	63
3. Meningkatnya kesejahteraan pekebun	NTP Perkebunan Rakyat (%)	112	112

Memperhatikan tabel 3.1 Penyesuaian target tujuan/sasaran Perubahan RENJA 2023 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 tidak mengalami perubahan.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2023 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomdir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat daerah maupun menunjang terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2023 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2023 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan RKPD-P tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023

Kode	RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
DINAS PERKEBUNAN					**57.072.934.560**					**57.072.934.560**
3.27.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**		**Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)**	**92%**	**30.565.274.860**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**		**Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)**	**92%**	**30.565.274.860**
3.27.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja PD**	**74**	**1.518.431.600**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja PD**	**74**	**1.518.431.600**
3.27.01.1.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*	*10 Dokumen*	*626.939.900*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*	*10 Dokumen*	*626.939.900*
3.27.01.1.01.07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*	*4 Laporan*	*891.491.700*	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*	*4 Laporan*	*891.491.700*

Kode	RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)**	**12 Bulan**	**16.241.869.760**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)**	**12 Bulan**	**16.241.869.760**
3.27.01.1.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Samarinda*	*Jumlah Orang yang menerima gaji dan tiunjangan ASN (Orang/Bulan)*	*79 Orang/ Bulan*	*15.772.789.760*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Samarinda*	*Jumlah Orang yang menerima gaji dan tiunjangan ASN (Orang/Bulan)*	*79 Orang/ Bulan*	*15.772.789.760*
3.27.01.1.02.02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Samarinda*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*	*1 Dokumen*	*469.080.000*	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Samarinda*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*	*1 Dokumen*	*469.080.000*
3.27.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)**	**20%**	**1.044.908.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)**	**20%**	**1.044.908.000**
3.27.01.1.05.02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Samarinda*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*	*1 Paket*	*171.408.000*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Samarinda*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*	*1 Paket*	*171.408.000*
3.27.01.1.05.09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Samarinda*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*	*107 Orang*	*873.500.000*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Samarinda*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*	*107 Orang*	*873.500.000*
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)**	**5 Unit**	**1.898.822.900**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)**	**5 Unit**	**1.898.822.900**
3.27.01.1.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor*	*Samarinda*	*Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)*	*4 Paket*	*35.900.400*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor*	*Samarinda*	*Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)*	*4 Paket*	*35.900.400*

Kode	RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.06.02	*Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor*	*Samarinda*	*Jumlah pkaet peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)*	*4 Paket*	*209.403.500*	*Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor*	*Samarinda*	*Jumlah pkaet peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)*	*4 Paket*	*209.403.500*
3.27.01.1.06.04	*Penyediaan bahan logistik kantor*	*Samarinda*	*Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan (Paket)*	*4 Paket*	*357.470.000*	*Penyediaan bahan logistik kantor*	*Samarinda*	*Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan (Paket)*	*4 Paket*	*357.470.000*
3.27.01.1.06.05	*Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*	*Samarinda*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)*	*4 Paket*	*49.203.000*	*Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*	*Samarinda*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)*	*4 Paket*	*49.203.000*
3.27.01.1.06.06	*Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan*	*Samarinda*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*	*12 Dokumen*	*9.696.000*	*Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan*	*Samarinda*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*	*12 Dokumen*	*9.696.000*
3.27.01.1.06.09	*Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	*Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)*	*1 Laporan*	*1.237.150.000*	*Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	*Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)*	*1 Laporan*	*1.237.150.000*
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah**	**6 Jenis**	**4.911.264.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah**	**6 Jenis**	**4.911.264.000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Samarinda*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)*	*10 Unit*	4.173.050.000	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Samarinda*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)*	*10 Unit*	4.173.050.000
3.27.01.1.07.10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangungan lainnya*	*Samarinda*	*Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)*	*58 Unit*	*738.214.000*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangungan lainnya*	*Samarinda*	*Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)*	*58 Unit*	*738.214.000*

Kode	RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)**	**3 Jenis**	**3.572.693.200**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)**	**3 Jenis**	**3.572.693.200**
3.27.01.1.08.01	*Penyediaan jasa surat menyurat*	*Samarinda*	*Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)*	*1 Laporan*	*31.210.000*	*Penyediaan jasa surat menyurat*	*Samarinda*	*Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)*	*1 Laporan*	*31.210.000*
3.27.01.1.08.02	*Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*	*Samarinda*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	*1 Laporan*	*519.730.000*	*Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*	*Samarinda*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	*1 Laporan*	*519.730.000*
3.27.01.1.08.03	*Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor*	*Samarinda*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)*	*1 Laporan*	*421.440.000*	*Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor*	*Samarinda*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)*	*1 Laporan*	*421.440.000*
3.27.01.1.08.04	*Penyediaan jasa pelayanan umum kantor*	*Samarinda*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	*1 Laporan*	*2.600.313.200*	*Penyediaan jasa pelayanan umum kantor*	*Samarinda*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	*1 Laporan*	*2.600.313.200*
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)**	**3 Jenis**	**1.377.285.400**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)**	**3 Jenis**	**1.377.285.400**
3.27.01.1.09.02	*Penyediaan jasa pemeliharan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (unit)*	*Samarinda*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*	*36 Unit*	*309.266.600*	*Penyediaan jasa pemeliharan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (unit)*	*Samarinda*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*	*36 Unit*	*309.266.600*

Kode	RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.09.09	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)*	*Samarinda*	*Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)*	*2 Unit*	*912.818.800*	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)*	*Samarinda*	*Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)*	*2 Unit*	*912.818.800*
3.27.01.1.09.10	*Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)*	*Samarinda*	*Jumlahsarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)*	*21 Unit*	*155.200.000*	*Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)*	*Samarinda*	*Jumlahsarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)*	*21 Unit*	*155.200.000*
3.27.02	**Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian**		**Produksi komoditas perkebunan (Ton)**	**18.313.874,25**	**7.122.478.500**	**Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian**		**Produksi komoditas perkebunan (Ton)**	**18.313.874,25**	**7.122.478.500**
3.27.02.1.01	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**		**Produktivitas komoditas perkebunan strategis (Ton/Ha)**	**20,03 Ton/Ha**	**7.122.478.500**	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**		**Produktivitas komoditas perkebunan strategis (Ton/Ha)**	**20,03 Ton/Ha**	**7.122.478.500**
3.27.02.1.01.01	*Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian*	*Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan*	*Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)*	*1 Laporan*	*7.122.478.500*	*Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian*	*Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan*	*Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)*	*1 Laporan*	*7.122.478.500*
3.27.03	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**		**Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (Kelompok Tani)**	**30 KT**	**9.053.510.000**	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**		**Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (Kelompok Tani)**	**30 KT**	**9.053.510.000**
			Luas kebun yang dibangun (Ha)	**1.500.674**				**Luas kebun yang dibangun (Ha)**	**1.500.674**	

Kode	RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**		**Jumlah luas kebun yang di perluas (Ha)**	**745 Ha**	**9.053.510.000**	**Penataan Prasarana Pertanian**		**Jumlah luas kebun yang di perluas (Ha)**	**745 Ha**	**9.053.510.000**
3.27.03.1.01.01	*Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian*	*Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan*	*Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)*	*1 Dokumen*	*9.053.510.000*	*Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian*	*Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan*	*Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)*	*1 Dokumen*	*9.053.510.000*
3.27.05	**Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian**		**Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)**	**4,044 Juta Ton CO2eq**	**5.081.550.200**	**Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian**		**Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)**	**4,044 Juta Ton CO2eq**	**5.081.550.200**
3.27.05.1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**		**Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan**	**137 Pelaku usaha**	**5.081.550.200**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**		**Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan**	**137 Pelaku usaha**	**5.081.550.200**
3.27.05.1.01.02	*Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan*	*Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim*	*Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)*	*9317 Ha*	*3.197.288.488*	*Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan*	*Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim*	*Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)*	*9317 Ha*	*3.197.288.488*
3.27.05.1.01.03	*Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan*	*Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim*	*Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)*	*150 Ha*	*1.884.261.712*	*Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan*	*Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim*	*Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)*	*150 Ha*	*1.884.261.712*

Kode	RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.06	**Program perizinan Usaha Pertanian**		**Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) (Perusahaan)**	**35 Perusahaan**	**1.247.873.900**	**Program perizinan Usaha Pertanian**		**Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) (Perusahaan)**	**35 Perusahaan**	**1.247.873.900**
3.27.06.1.01	*Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim*	*Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (perusahaan)*	*107 Perusahaan*	*1.247.873.900*	*Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim*	*Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (perusahaan)*	*107 Perusahaan*	*1.247.873.900*
3.27.06.1.01.03	*Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha pertanian*	*Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim*	*Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (laporan)*	*1 Laporan*	*1.247.873.900*	*Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha pertanian*	*Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim*	*Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (laporan)*	*1 Laporan*	*1.247.873.900*
3.27.07	**Program Penyuluhan Pertanian**		**Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)**	**1 Lembaga**	**4.002.247.100**	**Program Penyuluhan Pertanian**		**Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)**	**1 Lembaga**	**4.002.247.100**
3.27.07.1.01	**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**		**Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (Orang)**	**50 Orang**	**908.093.300**	**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**		**Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (Orang)**	**50 Orang**	**908.093.300**

Kode	RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.07.1.01.01	*Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN*	*Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan*	*Jumlah penyuluh pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan (Orang)*	*45 Orang*	*908.093.300*	*Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN*	*Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan*	*Jumlah penyuluh pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan (Orang)*	*45 Orang*	*908.093.300*
3.27.07.1.02	**Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian**		**Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (kelompok tani)**	**31 KT**	**1.754.478.800**	**Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian**		**Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (kelompok tani)**	**31 KT**	**1.754.478.800**
			Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (Unit)	**1 Unit**				**Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (Unit)**	**1 Unit**	
			Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan (Unit)	**7 Unit**				**Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan (Unit)**	**7 Unit**	
3.27.07.1.02.01	*Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian*	*Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan*	*Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (dokumen)*	*1 Dokumen*	*1.045.361.800*	*Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian*	*Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan*	*Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (dokumen)*	*1 Dokumen*	*1.045.361.800*
3.27.07.1.02.02	*Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani*	*Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan*	*Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)*	*10 Kelompok*	*709.117.000*	*Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani*	*Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan*	*Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)*	*10 Kelompok*	*709.117.000*
3.27.07.1.03	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**		**Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (Lembaga)**	**20 Lembaga**	**1.339.675.000**	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**		**Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (Lembaga)**	**20 Lembaga**	**1.339.675.000**

Kode	RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI (kelompok tani)	**4 KT**				**Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI (kelompok tani)**	**4 KT**	
3.27.07.1.03.01	*Pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani*	*Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan*	*Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)*	*1 Unit*	*268.020.500*	*Pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani*	*Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan*	*Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)*	*1 Unit*	*268.020.500*
3.27.07.1.03.02	*Pendampingan manajemen koorporasi petani*	*Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan*	*Jumlah pendampingan manajemen korporasi petani (Laporan)*	*1 Laporan*	*748.248.000*	*Pendampingan manajemen koorporasi petani*	*Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan*	*Jumlah pendampingan manajemen korporasi petani (Laporan)*	*1 Laporan*	*748.248.000*
3.27.07.1.03.03	*Penilaian kelayakan dan standarisasi manajamen koorporasi petani*	*Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan*	*Jumlah korporasi petani yang dinilai kelayakan dan standarisasi manajemennya (Unit)*	*1 Unit*	*157.289.900*	*Penilaian kelayakan dan standarisasi manajamen koorporasi petani*	*Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan*	*Jumlah korporasi petani yang dinilai kelayakan dan standarisasi manajemennya (Unit)*	*1 Unit*	*157.289.900*
3.27.07.1.03.04	*Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani*	*Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim*	*Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi (Unit)*	*1 Unit*	*166.116.600*	*Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani*	*Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim*	*Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi (Unit)*	*1 Unit*	*166.116.600*

Kode	RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN					**3.065.834.190**					**3.065.834.190**
3.27.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**		**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan**	**92%**	**2.274.965.190**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**		**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan**	**92%**	**2.274.965.190**
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)**	**12 Bulan**	**84.960.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)**	**12 Bulan**	**84.960.000**
3.27.01.1.02.02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Samarinda*	*Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)*	*1 Dokumen*	*84.960.000*	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Samarinda*	*Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)*	*1 Dokumen*	*84.960.000*
3.27.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)**	**20%**	**183.600.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)**	**20%**	**183.600.000**
3.27.01.1.05.09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi*	*Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Pendidikan dan pelatihan (Orang)*	*13 Orang*	*183.600.000*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi*	*Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Pendidikan dan pelatihan (Orang)*	*13 Orang*	*183.600.000*
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)**	**3 Unit**	**539.771.100**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)**	**3 Unit**	**539.771.100**
3.27.01.1.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor*	*Samarinda*	*Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)*	*4 Paket*	*4.055.500*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor*	*Samarinda*	*Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)*	*4 Paket*	*4.055.500*

Kode	RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.06.02	*Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor*	*Samarinda*	*Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)*	*4 Paket*	*113.678.800*	*Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor*	*Samarinda*	*Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)*	*4 Paket*	*113.678.800*
3.27.01.1.06.04	*Penyediaan bahan logistik kantor*	*Samarinda*	*Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan (paket)*	*4 Paket*	*51.936.000*	*Penyediaan bahan logistik kantor*	*Samarinda*	*Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan (paket)*	*4 Paket*	*51.936.000*
3.27.01.1.06.05	*Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*	*Samarinda*	*Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)*	*4 Paket*	*7.744.000*	*Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*	*Samarinda*	*Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)*	*4 Paket*	*7.744.000*
3.27.01.1.06.06	*Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan*	*Samarinda*	*Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan (dokumen)*	*12 Dokumen*	*7.756.800*	*Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan*	*Samarinda*	*Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan (dokumen)*	*12 Dokumen*	*7.756.800*
3.27.01.1.06.09	*Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	*Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim*	*Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinas dan konsultasi SKPD (Laporan)*	*1 Laporan*	*354.600.000*	*Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	*Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim*	*Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinas dan konsultasi SKPD (Laporan)*	*1 Laporan*	*354.600.000*
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)**	**6 Jenis**	**282.779.410**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)**	**6 Jenis**	**282.779.410**
3.27.01.1.07.10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangungan lainnya*	*Samarinda*	*Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)*	*25 Unit*	*282.779.410*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangungan lainnya*	*Samarinda*	*Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)*	*25 Unit*	*282.779.410*

Kode	RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)**	**3 Jenis**	**667.823.680**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)**	**3 Jenis**	**667.823.680**
3.27.01.1.08.01	*Penyediaan jasa surat menyurat*	*Samarinda*	*Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)*	*1 Laporan*	*5.000.000*	*Penyediaan jasa surat menyurat*	*Samarinda*	*Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)*	*1 Laporan*	*5.000.000*
3.27.01.1.08.02	*Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*	*Samarinda*	*Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)*	*1 Laporan*	*131.683.200*	*Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*	*Samarinda*	*Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)*	*1 Laporan*	*131.683.200*
3.27.01.1.08.03	*Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor*	*Samarinda*	*Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)*	*1 Laporan*	*323.400.000*	*Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor*	*Samarinda*	*Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)*	*1 Laporan*	*323.400.000*
3.27.01.1.08.04	*Penyediaan jasa pelayanan umum kantor*	*Samarinda*	*Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)*	*1 Laporan*	*207.740.480*	*Penyediaan jasa pelayanan umum kantor*	*Samarinda*	*Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)*	*1 Laporan*	*207.740.480*
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)**	**3 Jenis**	**516.031.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)**	**3 Jenis**	**516.031.000**
3.27.01.1.09.02	*Penyediaan jasa pemeliharan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan*	*Samarinda*	*Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya (Unit)*	*2 Unit*	*24.406.000*	*Penyediaan jasa pemeliharan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan*	*Samarinda*	*Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya (Unit)*	*2 Unit*	*24.406.000*

Kode	RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.09.09	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Samarinda*	*Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)*	*4 Unit*	*451.715.000*	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Samarinda*	*Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)*	*4 Unit*	*451.715.000*
3.27.01.1.09.10	*Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya*	*Samarinda*	*Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)*	*13 Unit*	*39.910.000*	*Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya*	*Samarinda*	*Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)*	*13 Unit*	*39.910.000*
3.27.02	**Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian**		**Jumlah benih yang beredar (Benih)**	**6.000.000 Benih**	**790.869.000**	**Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian**		**Jumlah benih yang beredar (Benih)**	**6.000.000 Benih**	**790.869.000**
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**		**Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi (Benih)**	**6.000.000 Benih**	**790.869.000**	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**		**Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi (Benih)**	**6.000.000 Benih**	**790.869.000**
3.27.02.1.02.01	*Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih*	*Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim*	*Jumlah Sertifikat Benih (Benih)*	*150 Sertifikat*	*400.835.000*	*Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih*	*Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim*	*Jumlah Sertifikat Benih (Benih)*	*150 Sertifikat*	*400.835.000*
3.27.02.1.02.04	*Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit perkebunan*	*Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim*	*Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Perkebunan (Laporan)*	*1 Laporan*	*390.034.000*	*Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit perkebunan*	*Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim*	*Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Perkebunan (Laporan)*	*1 Laporan*	*390.034.000*

Kode	RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN					**3.354.506.080**					**3.354.506.080**
3.27.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**		**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan**	**92%**	**1.849.722.680**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**		**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan**	**92%**	**1.849.722.680**
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)**	**12 Bulan**	**84.960.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)**	**12 Bulan**	**84.960.000**
3.27.01.1.02.02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Samarinda*	*Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)*	*1 Dokumen*	*84.960.000*	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Samarinda*	*Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)*	*1 Dokumen*	*84.960.000*
3.27.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)**	**20%**	**93.960.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)**	**20%**	**93.960.000**
3.27.01.1.05.09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi*	*Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Pendidikan dan pelatihan (Orang)*	*6 Orang*	*93.960.000*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi*	*Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Pendidikan dan pelatihan (Orang)*	*6 Orang*	*93.960.000*
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)**	**3 Unit**	**405.610.200**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)**	**3 Unit**	**405.610.200**
3.27.01.1.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor*	*Samarinda*	*Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)*	*4 Paket*	*9.081.300*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor*	*Samarinda*	*Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)*	*4 Paket*	*9.081.300*

Kode	RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.06.02	*Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor*	*Samarinda*	*Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)*	*4 Paket*	*55.611.500*	*Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor*	*Samarinda*	*Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)*	*4 Paket*	*55.611.500*
3.27.01.1.06.04	*Penyediaan bahan logistik kantor*	*Samarinda*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)*	*4 Paket*	*41.088.000*	*Penyediaan bahan logistik kantor*	*Samarinda*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)*	*4 Paket*	*41.088.000*
3.27.01.1.06.05	*Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*	*Samarinda*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)*	*4 Paket*	*21.151.000*	*Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*	*Samarinda*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)*	*4 Paket*	*21.151.000*
3.27.01.1.06.06	*Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan*	*Samarinda*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*	*12 Dokumen*	*3.878.400*	*Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan*	*Samarinda*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*	*12 Dokumen*	*3.878.400*
3.27.01.1.06.09	*Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	*Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)*	*1 Laporan*	*274.800.000*	*Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	*Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)*	*1 Laporan*	*274.800.000*
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)**	**5 Jenis**	**604.665.400**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)**	**5 Jenis**	**604.665.400**

Kode	RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.07.10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangungan lainnya*	*Samarinda*	*Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)*	*13 Unit*	*604.665.400*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangungan lainnya*	*Samarinda*	*Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)*	*13 Unit*	*604.665.400*
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)**	**3 Jenis**	**521.213.280**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)**	**3 Jenis**	**521.213.280**
3.27.01.1.08.01	*Penyediaan jasa surat menyurat*	*Samarinda*	*Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)*	*1 Laporan*	*5.200.000*	*Penyediaan jasa surat menyurat*	*Samarinda*	*Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)*	*1 Laporan*	*5.200.000*
3.27.01.1.08.02	*Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*	*Samarinda*	*Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)*	*1 Laporan*	*178.912.800*	*Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*	*Samarinda*	*Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)*	*1 Laporan*	*178.912.800*
3.27.01.1.08.03	*Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor*	*Samarinda*	*Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)*	*1 Laporan*	*129.360.000*	*Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor*	*Samarinda*	*Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)*	*1 Laporan*	*129.360.000*
3.27.01.1.08.04	*Penyediaan jasa pelayanan umum kantor*	*Samarinda*	*Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)*	*1 Laporan*	*207.740.480*	*Penyediaan jasa pelayanan umum kantor*	*Samarinda*	*Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)*	*1 Laporan*	*207.740.480*
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)**	**3 Jenis**	**139.313.800**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)**	**3 Jenis**	**139.313.800**

Kode	RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.09.02	*Penyediaan jasa pemeliharan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan*	*Samarinda*	*Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya (Unit)*	*1 Unit*	*12.203.000*	*Penyediaan jasa pemeliharan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan*	*Samarinda*	*Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya (Unit)*	*1 Unit*	*12.203.000*
3.27.01.1.09.09	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Samarinda*	*Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)*	*1 Unit*	*101.600.000*	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Samarinda*	*Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)*	*1 Unit*	*101.600.000*
3.27.01.1.09.10	*Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya*	*Samarinda*	*Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)*	*33 Unit*	*25.510.800*	*Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya*	*Samarinda*	*Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)*	*33 Unit*	*25.510.800*
3.27.05	**ProgramPengendalian dan penanggulangan bencana pertanian**		**Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (Rp)**	**774.940.000**	**1.504.783.400**	**ProgramPengendalian dan penanggulangan bencana pertanian**		**Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (Rp)**	**774.940.000**	**1.504.783.400**
3.27.05.1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**		**Luas serangan berat OPT yang dikendalikan (Ha)**	**156 Ha**	**1.504.783.400**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**		**Luas serangan berat OPT yang dikendalikan (Ha)**	**156 Ha**	**1.504.783.400**
3.27.05.1.01.01	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	*Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim*	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan (Ha)	500 Ha	1.504.783.400	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	*Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim*	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan (Ha)	500 Ha	1.504.783.400

Kode	RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN					**4.653.095.032**					**4.653.095.032**
3.27.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**		**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan**	**92%**	**1.409.892.832**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**		**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan**	**92%**	**1.409.892.832**
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)**	**12 Bulan**	**84.960.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)**	**12 Bulan**	**84.960.000**
3.27.01.1.02.02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Samarinda*	*Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)*	*1 Dokumen*	*84.960.000*	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Samarinda*	*Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)*	*1 Dokumen*	*84.960.000*
3.27.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)**	**20%**	**77.067.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)**	**20%**	**77.067.000**
3.27.01.1.05.09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi*	*Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Pendidikan dan pelatihan (Orang)*	*6 Orang*	*77.067.000*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi*	*Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Pendidikan dan pelatihan (Orang)*	*6 Orang*	*77.067.000*
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)**	**3 Unit**	**331.414.700**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)**	**3 Unit**	**331.414.700**
3.27.01.1.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor*	*Samarinda*	*Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)*	*4 Paket*	*7.343.000*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor*	*Samarinda*	*Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)*	*4 Paket*	*7.343.000*

Kode	RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
3.27.01.1.06.02	*Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor*	*Samarinda*	*Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)*	*2 Paket*	*70.669.900*	*Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor*	*Samarinda*	*Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)*	*2 Paket*	*70.669.900*
3.27.01.1.06.04	*Penyediaan bahan logistik kantor*	*Samarinda*	*Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan (paket)*	*4 Paket*	*27.576.000*	*Penyediaan bahan logistik kantor*	*Samarinda*	*Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan (paket)*	*4 Paket*	*27.576.000*
3.27.01.1.06.05	*Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*	*Samarinda*	*Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)*	*2 Paket*	*17.927.000*	*Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*	*Samarinda*	*Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)*	*2 Paket*	*17.927.000*
3.27.01.1.06.06	*Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan*	*Samarinda*	*Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan (dokumen)*	*12 Dokumen*	*2.698.800*	*Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan*	*Samarinda*	*Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan (dokumen)*	*12 Dokumen*	*2.698.800*
3.27.01.1.06.09	*Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	*Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim*	*Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinas dan konsultasi SKPD (Laporan)*	*1 Laporan*	*205.200.000*	*Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	*Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim*	*Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinas dan konsultasi SKPD (Laporan)*	*1 Laporan*	*205.200.000*
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)**	**2 Jenis**	**143.680.800**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)**	**2 Jenis**	**143.680.800**
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit)	*13 Unit*	*143.680.800*			*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit)*	*13 Unit*	*143.680.800*

Kode	RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)**	**3 Jenis**	**542.982.800**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)**	**3 Jenis**	**542.982.800**
3.27.01.1.08.01	*Penyediaan jasa surat menyurat*	*Samarinda*	*Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)*	*1 Laporan*	*4.000.000*	*Penyediaan jasa surat menyurat*	*Samarinda*	*Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)*	*1 Laporan*	*4.000.000*
3.27.01.1.08.02	*Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*	*Samarinda*	*Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)*	*1 Laporan*	*85.267.200*	*Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*	*Samarinda*	*Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)*	*1 Laporan*	*85.267.200*
3.27.01.1.08.03	*Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor*	*Samarinda*	*Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)*	*1 Laporan*	*194.040.000*	*Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor*	*Samarinda*	*Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)*	*1 Laporan*	*194.040.000*
3.27.01.1.08.04	*Penyediaan jasa pelayanan umum kantor*	*Samarinda*	*Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)*	*1 Laporan*	*259.675.600*	*Penyediaan jasa pelayanan umum kantor*	*Samarinda*	*Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)*	*1 Laporan*	*259.675.600*
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)**	**3 Jenis**	**229.787.532**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)**	**3 Jenis**	**229.787.532**
3.27.01.1.09.02	*Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan*	*Samarinda*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*	*2 Unit*	*12.203.000*	*Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan*	*Samarinda*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*	*2 Unit*	*12.203.000*

Kode	RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.09.09	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Samarinda*	*Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)*	*1 Unit*	*198.084.532*	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Samarinda*	*Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)*	*1 Unit*	*198.084.532*
3.27.01.1.09.10	*Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya*	*Samarinda*	*Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)*	*2 Unit*	*19.500.000*	*Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya*	*Samarinda*	*Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)*	*2 Unit*	*19.500.000*
3.27.02	**Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian**		**Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)**	**85%**	**3.243.202.200**	**Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian**		**Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)**	**85%**	**3.243.202.200**
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**		**Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan (Benih)**	**50.000 Benih**	**3.243.202.200**	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**		**Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan (Benih)**	**50.000 Benih**	**3.243.202.200**
3.27.02.1.02.04	*Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit perkebunan*	*Samarinda, Kukar, Kubar, Kutim*	*Jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit perkebunan (Laporan)*	*1 Laporan*	*3.243.202.200*	*Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit perkebunan*	*Samarinda, Kukar, Kubar, Kutim*	*Jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit perkebunan (Laporan)*	*1 Laporan*	*3.243.202.200*
				TOTAL	**68.146.369.862**					**68.146.369.862**

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2023

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2023, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, adalah sebagaimana tabel 3.3 berikut:

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							43,618,793,138	48,950,714,760	57,072,934,560							44,522,290,650	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	%		%	92 %	92 %	24,072,561,738	26,116,876,560	30,565,274,860						92 %	24,596,457,650	
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	%		%	74 %	74 %	1,275,323,500	1,227,243,300	1,518,431,600						74 %	1,774,925,300	
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	648,757,500	626,939,900	626,939,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		10 Dokumen	802,771,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	626,566,000	600,303,400	891,491,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		4 Laporan	972,154,300	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	15,280,723,258	15,998,989,760	16,241,869,760						12 Bulan	15,359,114,750	
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				79 Orang/ Bulan	79 Orang/ Bulan	14,906,203,258	15,567,349,760	15,772,789,760	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		79 Orang/ Bulan	14,906,274,750	Dinas Perkebunan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	374,520,000	431,640,000	469,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	452,840,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	%		%	20 %	20 %	392,570,000	318,408,000	1,044,908,000						20 %	936,032,000	
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	282,500,000	171,408,000	171,408,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Paket	352,032,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				13 Orang	107 Orang	110,070,000	147,000,000	873,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		107 Orang	584,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	Unit		Unit	5 Unit	5 Unit	1,738,342,000	1,898,822,900	1,898,822,900						5 Unit	1,716,947,254	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	35,902,000	35,900,400	35,900,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		4 Paket	35,991,708	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	117,262,000	209,403,500	209,403,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		4 Paket	167,310,000	Dinas Perkebunan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	439,938,000	357,470,000	357,470,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		4 Paket	352,514,181	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	52,640,000	49,203,000	49,203,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		4 Paket	69,731,365	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	9,600,000	9,696,000	9,696,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		12 Dokumen	9,600,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,083,000,000	1,237,150,000	1,237,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	1,081,800,000	Dinas Perkebunan
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	13 Jenis	13 Jenis	1,388,704,000	1,723,434,000	4,911,264,000						13 Jenis	1,212,627,500	
3	27	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	10 Unit	985,220,000	985,220,000	4,173,050,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Aparatur	10 Unit	985,220,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				58 Unit	58 Unit	403,484,000	738,214,000	738,214,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Aparatur	58 Unit	227,407,500	Dinas Perkebunan
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	2,926,567,488	3,572,693,200	3,572,693,200						3 Jenis	2,634,801,146	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	31,210,000	31,210,000	31,210,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	30,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	479,967,400	519,730,000	519,730,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	494,401,410	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	336,242,400	421,440,000	421,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	304,192,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2,079,147,688	2,600,313,200	2,600,313,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	1,806,207,736	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	1,070,331,492	1,377,285,400	1,377,285,400						3 Jenis	962,009,700	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	36 Unit	271,654,400	309,266,600	309,266,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Aparatur	36 Unit	400,217,700	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	396,708,000	912,818,800	912,818,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Aparatur	2 Unit	349,932,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				21 Unit	21 Unit	401,969,092	155,200,000	155,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Aparatur	21 Unit	211,860,000	Dinas Perkebunan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan	Ton		Ton	18.313.874,25 Ton	18.313.874,25 Ton	6,766,710,000	7,122,478,500	7,122,478,500						18.313.874,25 Ton	6,965,557,600	
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	Ton/Ha		Ton/Ha	20.03 Ton/Ha	20.03 Ton/Ha	6,766,710,000	7,122,478,500	7,122,478,500						20.03 Ton/Ha	6,965,557,600	
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	6,766,710,000	7,122,478,500	7,122,478,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah		1 Laporan	6,965,557,600	Dinas Perkebunan
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1) Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan ; 2) Luas Kebun yang dibangun	Kelompok/Ha		Kelompok/Ha	30/1.500.674 Kelompok/Ha	30/1.500.674 Kelompok/Ha	7,428,634,000	9,053,510,000	9,053,510,000						30/1.500.674 Kelompok/Ha	7,222,948,500	
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang diperluas	Ha		Ha	745 Ha	745 Ha	7,428,634,000	9,053,510,000	9,053,510,000						745 Ha	7,222,948,500	
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	7,428,634,000	9,053,510,000	9,053,510,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah	Kelompok Tani	1 Dokumen	7,222,948,500	Dinas Perkebunan
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	Juta Ton CO2eq		Juta Ton CO2eq	4,044 Juta Ton CO2eq	4,044 Juta Ton CO2eq	1,827,790,000	2,505,080,300	5,081,550,200						4,044 Juta Ton CO2eq	1,120,000,000	
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	137 Pelaku Usaha	137 Pelaku Usaha	1,827,790,000	2,505,080,300	5,081,550,200						137 Pelaku Usaha	1,120,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				9317 Ha	9317 Ha	1,027,790,000	1,718,329,300	3,197,288,488	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang		9317 Ha	585,660,000	Dinas Perkebunan
3	27	05	1.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				150 Ha	150 Ha	800,000,000	786,751,000	1,884,261,712	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang		150 Ha	534,340,000	Dinas Perkebunan
3	27	06			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	Perusahaan		Perusahaan	35 Perusahaan	35 Perusahaan	1,050,000,000	1,016,873,900	1,247,873,900						35 Perusahaan	1,200,000,000	
3	27	06	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	Perusahaan		Perusahaan	107 Perusahaan	107 Perusahaan	1,050,000,000	1,016,873,900	1,247,873,900						107 Perusahaan	1,200,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	06	1.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi				1 Laporan	1 Laporan	1,050,000,000	1,016,873,900	1,247,873,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah		1 Laporan	1,200,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	lembaga		lembaga	1 lembaga	1 lembaga	2,473,097,400	3,135,895,500	4,002,247,100						1 lembaga	3,417,326,900	
3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	Orang		Orang	45 Orang	50 Orang	187,295,700	539,641,000	908,093,300						50 Orang	312,046,900	
3	27	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan				45 Orang	45 Orang	187,295,700	539,641,000	908,093,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	Petugas lapang dan teknis perkebunan	45 Orang	312,046,900	Dinas Perkebunan
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	KT Unit Unit		KT Unit Unit	31 KT 7 Unit 1 Unit	31 KT 7 Unit 1 Unit	1,057,437,900	1,376,745,500	1,754,478,800						31 KT 7 Unit 1 Unit	1,440,624,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	656,480,000	667,628,500	1,045,361,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah	Kelompok tani	1 Dokumen	906,799,000	Dinas Perkebunan
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				10 Kelompok	10 Kelompok	400,957,900	709,117,000	709,117,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	Kelompok tani	10 Kelompok	533,825,000	Dinas Perkebunan
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk	KT Lembaga		KT Lembaga	4 KT 20 Lembaga	4 KT 20 Lembaga	1,228,363,800	1,219,509,000	1,339,675,000						4 KT 20 Lembaga	1,664,656,000	
3	27	07	1.03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi				1 Unit	1 Unit	210,455,900	268,020,500	268,020,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah		1 Unit	552,475,000	Dinas Perkebunan
3	27	07	1.03	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani				1 Laporan	1 Laporan	693,228,000	628,082,000	748,248,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah		1 Laporan	718,428,000	Dinas Perkebunan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	07	1.03	03	Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya				1 Unit	1 Unit	157,293,000	157,289,900	157,289,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah		1 Unit	157,293,000	Dinas Perkebunan
3	27	07	1.03	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				1 Unit	1 Unit	167,386,900	166,116,600	166,116,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah		1 Unit	236,460,000	Dinas Perkebunan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							2,779,000,968	2,813,119,190	3,065,834,190							2,484,331,345	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	%		%	92 %	92 %	1,773,599,068	2,022,250,190	2,274,965,190						92 %	1,448,161,045	
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	93,120,000	84,960,000	84,960,000						12 Bulan	92,520,000	
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	93,120,000	84,960,000	84,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	92,520,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	%		%	20 %	20 %	158,990,000	183,600,000	183,600,000						20 %	158,990,000	
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				13 Orang	13 Orang	158,990,000	183,600,000	183,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		13 Orang	158,990,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	Unit		Unit	3 Unit	3 Unit	586,467,800	539,771,100	539,771,100						3 Unit	294,022,117	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	14,792,800	4,055,500	4,055,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		4 Paket	4,500,000	Dinas Perkebunan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	48,431,000	113,678,800	113,678,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		4 Paket	24,980,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	58,574,000	51,936,000	51,936,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		4 Paket	61,701,617	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5,430,000	7,744,000	7,744,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		4 Paket	7,000,500	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3,840,000	7,756,800	7,756,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		12 Dokumen	3,840,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	455,400,000	354,600,000	354,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	192,000,000	Dinas Perkebunan
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	170,752,500	282,779,410	282,779,410						6 Jenis	334,506,200	
3	27	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	170,752,500	282,779,410	282,779,410	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		25 Unit	334,506,200	Dinas Perkebunan
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	533,642,768	667,823,680	667,823,680						3 Jenis	423,362,128	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5,500,000	5,000,000	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	2,400,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	122,738,000	131,683,200	131,683,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	75,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	239,943,360	323,400,000	323,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	188,750,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	165,461,408	207,740,480	207,740,480	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	157,212,128	Dinas Perkebunan
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	230,626,000	263,316,000	516,031,000						3 Jenis	144,760,600	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	22,406,000	24,406,000	24,406,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		2 Unit	35,910,600	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	5 Unit	180,000,000	199,000,000	451,715,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		5 Unit	90,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				59 Unit	59 Unit	28,220,000	39,910,000	39,910,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		59 Unit	18,850,000	Dinas Perkebunan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih yang beredar	benih		benih	6.000.000 benih	6.000.000 benih	1,005,401,900	790,869,000	790,869,000						6.000.000 benih	1,036,170,300	
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi	Benih		Benih	6000000 Benih	6000000 Benih	1,005,401,900	790,869,000	790,869,000						6000000 Benih	1,036,170,300	
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih				150 Sertifikat	150 Sertifikat	508,790,900	400,835,000	400,835,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah		150 Sertifikat	461,297,250	Dinas Perkebunan
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				1 Laporan	1 Laporan	496,611,000	390,034,000	390,034,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah		1 Laporan	574,873,050	Dinas Perkebunan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							2,799,999,446	2,833,515,880	3,354,506,080							3,197,333,000	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	%		%	92 %	92 %	1,767,778,446	1,849,722,680	1,849,722,680						92 %	1,944,904,600	
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	93,120,000	84,960,000	84,960,000						12 Bulan	92,520,000	
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	93,120,000	84,960,000	84,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	92,520,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	%		%	20 %	20 %	90,000,000	93,960,000	93,960,000						20 %	95,200,000	
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	90,000,000	93,960,000	93,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		6 Orang	95,200,000	Dinas Perkebunan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	Unit		Unit	3 Unit	3 Unit	358,353,200	405,610,200	405,610,200						3 Unit	309,980,917	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	9,139,000	9,081,300	9,081,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		4 Paket	10,699,946	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3,420,000	55,611,500	55,611,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		4 Paket	17,600,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	69,604,000	41,088,000	41,088,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		4 Paket	77,777,300	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20,230,200	21,151,000	21,151,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		4 Paket	24,783,671	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5,760,000	3,878,400	3,878,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		12 Dokumen	5,120,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	250,200,000	274,800,000	274,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	174,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	5 Jenis	5 Jenis	186,971,000	604,665,400	604,665,400						5 Jenis	367,934,800	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	186,971,000	604,665,400	604,665,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		13 Unit	367,934,800	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	507,555,848	521,213,280	521,213,280						3 Jenis	495,410,883	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5,200,000	5,200,000	5,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	3,950,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	172,825,440	178,912,800	178,912,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	185,782,355	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	164,069,000	129,360,000	129,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	148,466,400	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	165,461,408	207,740,480	207,740,480	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	157,212,128	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	531,778,398	139,313,800	139,313,800						3 Jenis	583,858,000	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	12,203,000	12,203,000	12,203,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Unit	35,510,000	Dinas Perkebunan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	499,065,398	101,600,000	101,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Unit	509,328,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				33 Unit	33 Unit	20,510,000	25,510,800	25,510,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		33 Unit	39,020,000	Dinas Perkebunan
3	27	05			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	Rp		Rp	774.940.000	Rp774.940.000	Rp 1,032,221,000	983,793,200	1,504,783,400						774.940.000	Rp 1,252,428,400	
3	27	05	1.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan	Ha		Ha	156 Ha	156 Ha	1,032,221,000	983,793,200	1,504,783,400						156 Ha	1,252,428,400	
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				156 Ha	500 Ha	1,032,221,000	983,793,200	1,504,783,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah		500 Ha	1,252,428,400	Dinas Perkebunan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	27				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							3,999,996,448	4,455,010,500	4,653,095,032							4,482,638,200	
3	27	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	%		%	92 %	92 %	1,095,255,448	1,211,808,300	1,409,892,832						92 %	1,239,436,000	
3	27	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	82,560,000	84,960,000	84,960,000						12 Bulan	84,960,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	82,560,000	84,960,000	84,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	84,960,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	%		%	20 %	20 %	80,010,000	77,067,000	77,067,000						20 %	77,067,000	
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	80,010,000	77,067,000	77,067,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		6 Orang	77,067,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	Unit		Unit	3 Unit	3 Unit	281,015,000	331,414,700	331,414,700						3 Unit	331,408,800	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2,918,000	7,343,000	7,343,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		4 Paket	7,343,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2,200,000	70,669,900	70,669,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		2 Paket	70,669,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	65,224,000	27,576,000	27,576,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		4 Paket	27,576,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14,953,000	17,927,000	17,927,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		2 Paket	17,922,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1,920,000	2,698,800	2,698,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		12 Dokumen	2,698,800	Dinas Perkebunan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	193,800,000	205,200,000	205,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	205,200,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	95,090,000	143,680,800	143,680,800						2 Jenis	143,680,000	
3	27	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	95,090,000	143,680,800	143,680,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Aparatur	13 Unit	143,680,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	518,997,448	542,982,800	542,982,800						3 Jenis	490,617,200	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	4,000,000	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	4,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	79,549,320	85,267,200	85,267,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	85,267,200	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	136,958,000	194,040,000	194,040,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	194,040,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	299,490,128	259,675,600	259,675,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	207,310,000	Dinas Perkebunan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	37,583,000	31,703,000	229,787,532						3 Jenis	111,703,000	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	12,203,000	12,203,000	12,203,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		2 Unit	12,203,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	0	0	198,084,532	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Unit	80,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	25,380,000	19,500,000	19,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		2 Unit	19,500,000	Dinas Perkebunan
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	%		%	85 %	85 %	2,904,741,000	3,243,202,200	3,243,202,200						85 %	3,243,202,200	
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	Benih		Benih	50000 Benih	50000 Benih	2,904,741,000	3,243,202,200	3,243,202,200						50000 Benih	3,243,202,200	
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				1 Laporan	1 Laporan	2,904,741,000	3,243,202,200	3,243,202,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah		1 Laporan	3,243,202,200	Dinas Perkebunan
TOTAL												53,197,790,000	59,052,360,330	68,344,454,394							54,766,593,195	

BAB 4
PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai peran yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2023.

4.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2023, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Samarinda, Agustus 2023

Kepala Dinas,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERKEBUNAN

Ahmad Muzakkir, ST.M.Si
Pembina Tk I/IV/b
NIP. 19751001 200112 1 003

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur dengan migas menunjukan bahwa sektor ekonomi yang memiliki peran dalam pencapaian PDRB Kaltim adalah sektor pertambangan dan penggalian, namun kondisi ini tidak lagi semenjak terjadinya penurunan harga komoditas pertambangan diantaranya batubara dan minyak bumi. Data PBRD Kaltim tahun 2020 sektor pertambangan dan penggalian hanya berkontribusi sebesar 41,43%, sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya 0,86% menjadi 8,77%. Dari angka tersebut perolehan PDRB bidang pertanian didominasi oleh sub sektor perkebunan kemudian perikanan, kehutanan, peternakan serta tanaman pangan dan hortikultura. Sub sektor peternakan berada pada kisaran 0,36% namun jika dilihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan kontribusi paling besar berasal dari daging ayam.

Indikator ekonomi lainnya seperti, laju inflasi mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga mencapai 0,78%, dimana salah satu harga komoditas yang mempengaruhi inflasi adalah perkembangan harga daging sapi dan harga daging ayam broiler. Sedangkan angka indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani setiap tahun bergerak fluktuatif namun cenderung naik yaitu sebasar 111,36 pada tahun 2020, akumulasi dari NTP Pertanian, Perkebunan, Kelautan Perikanan dan Peternakan. Kondisi ini menunjukan indeks yang diterima petani dari hasil penjualan produk pertaniannya lebih tinggi dibandingkan laju indeks yang dibayar petani baik untuk konsumsi rumah tangga maupun biaya sarana produksi pertanian. NTP untuk peternakan adalah 101,65 dan NTP yang tertinggi di lingkup Pertanian berasal dari sektor perkebunan sebesar 124,57.

Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kalimantan Timur dengan penetapan target 2 (dua) juta ekor sapi menjadi landasan penetapan kebijakan strategis pembangunan peternakan selanjutnya, dengan upaya peningkatan populasi dengan sistem “Mini Ranch” sehingga tingkat kepemilikan ternak sapi pada setiap Rumah Tangga Peternak (RTP) meningkat, dan biaya produksi menurun

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kalimantan Timur diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan asal ternak dan meningkatkan kesejahteraan peternak, dengan strategi:

1. Pengembangan Kawasan Peternakan;
2. Peningkatan Populasi dan Produktivitas Ternak;
3. Peningkatan populasi dan produktivitas Pakan Ternak;
4. Peningkatan daya saing produk peternakan dan jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan;
5. Peningkatan status kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan/ternak;
6. Peningkatan peran swasta dan penguatan usaha peternakan rakyat;
7. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Peternak;

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang peternakan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan tujuan, sasaran, Strategi dan arah kebijakan untuk dapat mencapai peningkatan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Penetapan program, kegiatan dan operasional pelayanan yang ada dirancang secara berjenjang, melalui mekanisme musyawarah pembangunan yang diformulasikan pada setiap tahunnya sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Peternakan. Peran pemerintah lebih banyak kepada peran-peran stimulasi, dinamisasi, regulasi dan fasilitasi bagi masyarakat dan pelaku usaha peternakan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat terus akan didorong pada setiap tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan saat ini telah berkembang dengan pesat sebagai dampak dari keterbukaan informasi publik sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan baik melalui media cetak, elektronik, website maupun bertatap muka.

Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan akhir yang harus dilakukan

sebelum disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
2. Tahap penyajian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Adapun prioritas Pembangunan Daerah 2019 – 2023 adalah:

1. Peningkatan daya smber daya manusia dan tenaga kerja
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah
3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi
4. Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar
5. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang
6. Peningkatan kinerja tata kelola pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik

Untuk mencapai sasaran program seperti tersebut di atas, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Renstra ini diwujudkan setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan, dimana pelaksanaannya, berapa dana yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran. Selain itu, Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mengakomodasi rencana kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait lain.

1.2 Landasan Hukum

Beberapa perundangan-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai bahan acuan dan arahan bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan program/kegiatan

bidang peternakan di Kalimantan Timur, sehingga tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi bidang peternakan di Kalimantan Timur, antara lain diindikasikan dalam hal :

1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan asal ternak (daging dan telur);
2. Meningkatkan efisiensi budidaya peternakan dan kelestarian lingkungan;
3. Meningkatkan jaminan keamanan pangan produk peternakan.

Tujuan yang diharapkan dari Perubahan Renja Perangkat Daerah ini adalah:

1. Terjabarkannya Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Perangkat Daerah tahun 2019-2023
2. Tersedianya gambaran yang jelas tentang program dan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2023
3. Tersedianya acuan dan arahan dalam pencapaian sasaran Perangkat Daerah tahun 2023
4. Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada tahun 2023

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 secara garis besar adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusun Renja, landasan hokum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistimatika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis

kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal Perangkat Daerah, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perubahan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangaunan selama 1 (satu) tahun ke depan oleh Perangkat Daerah.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan capaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Hasil pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov.Kaltim Tahun 2023 sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Sampai Dengan Triwulan II

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023 s.d TW II)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2023 s.d TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)								
1	2	3	4			6	7	8 = (7/6)	9		10,00		11 = 10/9*100		12	13 = 12/4
			K		Rp	K	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur					**158.664.134.300**					**69.247.398.646**		**22.548.037.500**		**32,56**		
3.27.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan**	**82**	**%**	**104.674.727.782**	**81,00**	**81,00**	**100,00**	**81,00**	**32.255.409.528**	**83,30**	**15.650.121.260**	**103**	**49**	**83**	**102**
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	79,30	Nilai	4.673.100.000	79,20	77,60	97,98	79,20	1.676.326.000	77,60	674.621.006	98	40	78	98
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80,00	%	57.123.915.293	80,00	83,37	104,21	80,00	17.673.613.344	43,33	7.468.576.691	54	42	43	54

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023 s.d TW II)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2023 s.d TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)								
1	2	3	4			6	7	8 = (7/6)	9		10,00		11 = 10/9*100		12	13 = 12/4
			K		Rp	K	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80,00	%	2.265.210.000	80,00	79,92	99,90	80,00	487.968.000	35,33	332.522.230	44	68	35	44
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80,00	%	8.881.963.318	80,00	83,54	104,43	80,00	2.794.192.700	47,66	1.716.350.855	60	61	48	60
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80,00	%	8.819.421.720	80,00	85,05	106,31	80,00	2.279.274.000	73,67	1.163.548.200	92	51	74	92
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80,00	%	14.273.815.877	80,00	86,36	107,95	80,00	5.806.815.430	45,89	3.884.892.886	57	66,90	46	57

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023 s.d TW II)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2023 s.d TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)								
1	2	3	4			6	7	8 = (7/6)	9		10,00		11 = 10/9*100		12	13 = 12/4
			K		Rp	K	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80,00	%	8.637.301.574	80,00	82,42	103,03	80,00	1.537.220.054	33,06	409.609.392	41	27	33	41
													69	**51**		**69**
													S	**R**		**S**
3.27.02	**Program Penyediaaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Angka Kelahiran Sapi**	**22**	**%**	**29.009.748.518**	**21,00**	**21,00**	**100**	**22,00**	**24.365.183.396**	**14,41**	**2.079.528.366**	**66**	**9**	**14**	**66**
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	151	Unit usaha	2.496.000.000	75,00	75,00	0	76,00	1.335.998.600	35,00	301.816.491	46	23	110	73
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Popolasi Ternak Sapi Bibit	155	Ekor	3.462.106.264	65,00	65,00	100	80,00	1.566.000.000	82,00	734.033.923	103	47	147	95
		Produksi HPT (Segar)	2.375	Ton		800,00	896,00	112	825,00		462,00		56		1358	57

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023 s.d TW II)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2023 s.d TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)								
1	2	3	4			6	7	8 = (7/6)	9		10,00		11 = 10/9*100		12	13 = 12/4
			K		Rp	K	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Calving Interval	16,50	Bulan	6.452.630.000	17,00	17,02	100	16,50	2.045.616.500	18,55	349.415.724	89	17	19	112
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	120	Sampel	3.642.305.500	40,00	40,00	100	40,00	419.650.000	20,00	219.030.000	50	52	60	50
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	32	sampel	1.867.087.500	11,00	16,00	145	13,00	685.532.150	13,00	268.934.250	100	39	29	91
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah kelompok penerima ternak	30	Kelompok	11.089.619.254	12,00	4,00	33	10,00	18.312.386.146	9,00	206.297.978	90	1	13	43

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023 s.d TW II)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2023 s.d TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)								
1	2	3	4			6	7	8 = (7/6)	9		10,00		11 = 10/9*100		12	13 = 12/4
			K		Rp	K	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
													86	27		84
													T	SR		T
3.27.03	Program Penyediaaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Miniranch yang teregister	120	Unit	7.109.518.000	49,00	49,00	100	30,00	5.101.338.000	12,00	2.206.693.565	40	43	78	65
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah miniranch sapi potong	120	Unit	24.608.875.700	49,00	49,00	100	30,00	5.101.338.000	12,00	2.206.693.565	40	43	78	65
													40	43		65,00
													SR	SR		R
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	70	%	11.501.140.000	60,00	60,00	100	70,00	5.240.604.950	70,00	2.010.122.804	100	38	60	86

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023 s.d TW II)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2023 s.d TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)								
1	2	3	4			6	7	8 = (7/6)	9		10,00		11 = 10/9*100		12	13 = 12/4
			K		Rp	K	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
		Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	**14**	**%**		**13,00**	**13,00**	**100**	**14,00**		**0,00**		**0**		**13**	**93**
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI	10	Kab/Kota	2.081.100.000	10,00	10,00	100	10,00	1.176.967.500	9,00	408.052.828	90	35	10	100
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	3	Check Point	2.623.340.000	2,00	2,00	100	3,00	1.572.637.450	2,00	699.622.640	67	44	2	67
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan Pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan	15	%	4.394.650.000	14,00	14,00	100	15,00	1.470.000.000	8,94	610.405.129	60	42	14	93

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023 s.d TW II)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2023 s.d TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)								
1	2	3	4			6	7	8 = (7/6)	9		10,00		11 = 10/9*100		12	13 = 12/4
			K		Rp	K	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	6	Unit Usaha	1.092.150.000	2,00	2,00	100	2,00	371.000.000	0,00	69.072.758	0	19	2	33
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan	23	Unit Usaha	1.309.900.000	5,00	5,00	100	11,00	650.000.000	0,00	222.969.449	0	34	5	22
													45	**30**		**86**
													SR	**SR**		**T**
3.27.06	**Program Perizinan Usaha Pertanian**	**Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha**	**75**	**%**	**2.389.800.000**	**50,00**	**50,00**	**100**	**75,00**	**1.131.862.772**	**37,75**	**352.801.945**	**50**	**31**	**38**	**50**
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan	90	Unit usaha	1.599.500.000	30,00	30,00	100	35,00	873.999.900	16,00	254.067.720	46	29	46	51

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023 s.d TW II)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2023 s.d TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)								
1	2	3	4			6	7	8 = (7/6)	9		10,00		11 = 10/9*100		12	13 = 12/4
			K		Rp	K	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
3.27.06.1.03	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan	4	Rekomendasi	790.300.000	1,00	1,00	100	2,00	257.862.872	1,00	98.734.225	50	38	3	75
													49	**33**		**59**
													SR	**SR**		**R**
3.27.07	**Program Penyuluhan Pertanian**	**Cakupan Binaan Kelompok Ternak**	**45**	**%**	**3.979.200.000**	**44,00**	**44,00**	**100**	**45**	**1.153.000.000**	**44,82**	**248.769.560**	**100**	**22**	**45**	**100**
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyebaran informasi peternakan	12	Kali	1.760.000.000	12,00	12,00	100	12	600.000.000	6,00	160.301.306	50	27	6	50
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok ternak yang teregistrasi	65	Kelompok	2.219.200.000	20,00	20,00	100	25	553.000.000	16,00	88.468.254	64	16	36	55
													71	**21**		**68**
													S	**SR**		**S**

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tersebut, disampaikan hasil program/kegiatan yang telah dilakasnakan sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

   Program penunjang urusahan pemerintahan daerah provinsi sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 12.870.115.364 dari pagu anggaran Rp 26.728.525.290 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 48,15%. Indikator kinerja program tersebut adalah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan dengan realisasi kinerja sampai dengan triwulan II sebasar 85,54% dari target 82%. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi terdiri dari tujuh kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 674.621.006 dari pagu anggaran Rp 1.676.326.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 40,24%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah nilai akuntabilitas kinerja dengan realisasi kinerja 0 dari target 79,10.

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 7.381.786.691dari pagu anggaran Rp 17.428.333.344 dengan rata-rata capaian keuangan 42,36%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi keuangan dengan realisasi kinerja 40% dengan target 80%.

   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

      Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 311.697.230 dari pagu anggaran Rp 412.038.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 75,65%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan realisasi kinerja sebesar 66% dari target 80%.

   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

      Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 1.138.983.049 dari pagu anggaran Rp 1.899.033.500 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 59,98%. Indikator kinerja

kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah dengan realisasi kinerja 44% dari target 80%

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 795.500.000 dari pagu anggaran Rp 930.394.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 85,50%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan realisasi kinerja 77% dari target 80%

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan daerah sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 2.266.549.272,00 dari pagu anggaran Rp 3.230.131.172 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 71,87%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi kinerja 46% dari target 80%

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan pemeliharaan barang milik daerang penunjang urusan pemerintahan daerah sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 246.058.040 dari pagu anggaran Rp 1.152.269.274 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 31,35%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi kinerja sebesar 23% dari target 80%

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program penyediaan dan pengambangan sarana pertanian sampai dengan triwulan II tahun 2023 terealisasi Rp 1.345.494.443 dari pagu anggaran Rp 22.799.183.396 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 5,90%. Indikator kinerja capaian program tersebut adalah angka kelahiran sapi dengan realisasi kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 14,41% dari target 22%. Program penyediaan dan pengambangan sarana pertanian terdiri dari 6 kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
Kegiatan pengawasan peredaran sarana pertanian sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 301.816.491 dari pagu anggaran Rp 1.335.998.600 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 22,59%.

Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan dengan realisasi indikator kinerja sebesar 35 unit usaha dari target 76 unit usaha.

b. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
Kegiatan peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 349.415.724 dari pagu anggaran Rp 2.045.616.500 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 17,08%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah calving interval dengan realisasi indikator kinerja sebesar 18,55 bulan dari target 16,5 bulan. Calving Interval (CI) adalah jarak antara kelahiran satu dengan kelahiran berikutnya pada ternak betina. Jarak kelahiran (CI) merupakan salah satu ukuran produktifitas ternak sapi untuk menghasilkan pedet dalam waktu yang singkat.

c. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
Kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan kewenangan provinsi sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 219.030.000 dari pagu anggaran Rp 419.650.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 52,19%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu dengan realisasi indikator kinerja sebesar 20 sampel dari target 40 sampel.

d. Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor
Kegiatan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 268.934.250 dari pagu anggaran Rp 685.532.150 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 39,32%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu dengan realisasi indikator kinerja sebesar 13 sampel dari target 13 sampel.

e. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
Kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 206.297.978 dari pagu anggaran Rp 18.312.386.146 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 1,13%. Indikator kinerja kegiatan tersebut

adalah jumlah kelompok penerima ternak dengan realisasi indikator kinerja 9 kelompok dari target 10 kelompok.

3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

   Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 2.206.693.565 dari pagu anggaran Rp 5.101.338.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 43,26%. Indikator kinerja capaian program tersebut adalah jumlah miniranch yang teregister dengan realisasi indikator kinerja sebanyak 30 unit dari target 12 unit. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian terdiri dari satu kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

   a. Penataan Prasarana Pertanian

      Kegiatan prasarana pertanian sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 2.206.693.565 dari pagu anggaran Rp 5.101.338.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 43,26%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah miniranch sapi potong dengan realisasi kinerja 12 unit dari target 30 unit.

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

   Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sampai dengan triwulan II tahun 2023 terealisasi Rp 1.399.717.675 dengan pagu anggaran Rp 3.770.604.950 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 37,12%. Indikator kinerja program tersebut terdiri dari:

   - Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular dengan realisasi kinerja program sebesar 70% dari target 70%.
   - Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV) dengan realisasi kinerja program sebesar 0% dari target 14%

   Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner terdiri dari lima kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut

   a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

      Kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 408.052.828 dari pagu anggaran Rp 1.176.967.500 dengan rata-rata

capaian keuangan sebesar 34,67%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI dengan realisasi indikator kinerja sebanyak 9 kab/kota dari target 10 kab/kota.

b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi

   Kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 699.622.640 dari pagu anggaran Rp 1.572.637.450 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 44,49%. Indikator kinerja kegiatan tersebut yaitu jumlah check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan dengan realisasi kinerja sebanyak 2 check point dari target 3 check point

c. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan

   Kegiatan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 65.963.000 dari pagu anggaran Rp 72.324.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 91,20%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan dengan realisasi sebesar 13% dari target 13%

d. Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

   Kegiatan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 69.072.758 dari pagu anggaran Rp 371.000.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 18,62%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dengan realisasi kinerja sebanyak 0 unit usaha dari target 2 unit.

e. Kesejahteraan Hewan

   Kegiatan kesejahteran hewan sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 222.969.449 dari pagu anggaran Rp 650.000.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 34,30%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan dengan realisasi indikator kinerja sebanyak 0 unit dari target 11 unit.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

   Program perizinan usaha pertanian sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 352.801.945 dari pagu anggaran Rp 1.131.862.772 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 31,17%. Indikator kinerja program tersebut adalah

Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha dengan realisasi kinerja sebesar 37,75% dari target 75%. Program perizinan usaha pertanian terdiri dari 2 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 254.067.720 dari pagu anggaran Rp 873.999.900 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 29,07%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan dengan realisasi kinerja sebanyak 16 unit usaha dari target 35 unit usaha

b. Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan

   Kegiatan penerbitan izin usaha pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 98.734.225 dari pagu anggaran Rp 257.862.872 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 38,29%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan dengan realisasi kinerja sebanyak 1 rekomendasi dari target 2 rekomendasi

6. Program Penyuluhan Pertanian

Program penyuluhan pertanian sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 248.769.560 dengan pagu anggaran Rp 1.153.000.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 21,58%. Indikator kinerja program tersebut adalah Cakupan binaan kelompok ternak dengan realisasi sebesar 44,82% dari target 45%. Program penyuluhan pertanian terdiri dari dua kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

   Kegiatan pengembangan penerapan penyuluhan pertanian sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 160.301.306 dengan pagu anggaran Rp 600.000.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 26,72%. Indikator kegiatan tersebut adalah jumlah informasi penyebaran informassi peternakan dengan realisasi kinerja sebanyak 6 kali dari target 12 kali.

b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan sampai dengan triwulan II terealisai Rp 88.468.254 dari pagu anggaran Rp 553.000.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 16%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah kelompok ternak yang teregistrasi dengan realisasi kinerja sebanyak 16 kelompok dari target 25 kelompok.

B. UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 1.548.182.464 dari pagu anggaran Rp 3.538.999.990 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 43,75%. Indikator kinerja program tersebut adalah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan dengan realisasi kinerja sampai dengan triwulan I1 sebasar 80,75% dari target 82%. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi terdiri dari tujuh kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 29.370.000 dari pagu anggaran Rp 125.640.000 dengan rata-rata capaian keuangan 23,38%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi keuangan dengan realisasi kinerja 40% dengan target 80%.

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 20.825.000 dari pagu anggaran Rp 64.500.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 32,29%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan realisasi kinerja sebesar 40% dari target 80%.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sampai dengan triwulan II terealisasi Rp. 351.367.114 dari pagu anggaran Rp 539.170.200 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 65,17%. Indikator kinerja

kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah dengan realisasi kinerja 40% dari target 80%.

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 7.106.200 dari pagu anggaran Rp 856.688.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 0,83%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan realisasi kinerja 64% dari target 80%

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan daerah sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 1.022.170.400 dari pagu anggaran Rp 1.677.050.510 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 60,95%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi kinerja 40% dari target 80%

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 117.343.750 dari pagu anggaran Rp 275.951.280 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 42,52%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi kinerja sebesar 40% dari target 80%

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program penyediaan dan pengambangan sarana pertanian sampai dengan triwulan II tahun 2023 terealisasi Rp 734.033.923 dari pagu anggaran Rp 1.566.000.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 46,87%. Indikator kinerja capaian program tersebut adalah angka kelahiran sapi dengan realisasi kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 14,41% dari target 22%. Program penyediaan dan pengambangan sarana pertanian terdiri dari 1 kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
Kegiatan pengelolaan sumber daya genetik (sdg) hewan tumbuhan dan mikro organisme kewenangan provinsi, kegiatan ini dilaksanakan pada

UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak. Sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 734.033.923 dari pagu anggaran sebesar Rp 1.566.000.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 46,87%. Indikator kinerja kegiatan terdiri dari:

- Produksi hijauan pakan ternak (HPT) segar dengan realisasi indikator kinerja sebanyak 462 ton dari target 825 ton
- Populasi ternak sapi bibit dengan realisasi indikator kinerja sebanyak 82 ekor dari target 80 ekor

C. UPTD. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

   Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 1.231.823.348 dari pagu anggaran Rp 1.987.884.248 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 61,97%. Indikator kinerja program tersebut adalah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan dengan realisasi kinerja sampai dengan triwulan II sebasar 83,52% dari target 82%. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi terdiri dari tujuh kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 57.420.000 dari pagu anggaran Rp 119.640.000 dengan rata-rata capaian keuangan 47,99%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi keuangan dengan realisasi kinerja 50% dengan target 80%.

   b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

      Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 0.00 dari pagu anggaran Rp 11.430.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 0,00%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan realisasi kinerja sebesar 0,00% dari target 80%.

   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

      Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sampai dengan triwulan II terealisasi Rp. 226.000.692 dari pagu anggaran Rp 355.989.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 63,49%. Indikator kinerja

kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah dengan realisasi kinerja 58,98% dari target 80%.

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 360.942.000 dari pagu anggaran Rp 492.192.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 73,33%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan realisasi kinerja 80% dari target 80%

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan daerah sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 541.253.048 dari pagu anggaran Rp 899.633.748 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 60,16%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi kinerja 51,67% dari target 80%.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sampai dengan triwulan II terealisasi Rp 46.207.608 dari pagu anggaran Rp 108.999.500 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 42,39%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi kinerja sebesar 36,18% dari target 80%

2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sampai dengan triwulan II tahun 2023 terealisasi Rp 610.405.129 dengan pagu anggaran Rp 1.470.000.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 41,52%. Indikator kinerja program tersebut terdiri dari:
- Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular dengan realisasi kinerja program sebesar 70% dari target 70%.

- Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV) dengan realisasi kinerja program sebesar 0,00% dari target 14%

Dalam melaksanakan pembangunan peternakan di Provinsi Kalimantan Timur selain bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, juga bersumber dari dana APBN yang berasal dari kegiatan Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan pengalokasian berupa Tugas Pembantuan. Dukungan anggaran APBD dan APBN sejak tahun 2013 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2 Dukungan Anggaran APBD Provinsi dan APBN tahun 2013 s/d 2023

No.	Tahun Anggaran	APBN Ditjen PKH & PSP TP (Rp)	APBD (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	2013	35.086.258.000 Realisasi 96,03%	72.318.668.123 Realisasi 94,53%	107.404.926.123
2.	2014	30.764.230.000 Realisasi 73,79%	67.517.958.263,50 Realisasi 94,80%	98.282.188.263,50
3.	2015	307.682.215.000 Realisasi 46,28%	80.919.778.040 Realisasi 74,52%	388.601.993.040
4.	2016	25.083.899.000 Realisasi 91,63%	59.605.749.228 Realisasi 94,59%	81.466.766.834
5.	2017	8.332.948.000 Realisasi 90,00%	20.299.891.000 Realisasi 90.68%	28.622.839.000
6.	2018	3.413.441.000 Realisasi 94,86%	22.157.153.540,07 Realisasi 96,39%	25.570.594.540,07
7.	2019	7.156.453.000 Realisasi 96,61%	46.903.080.000 Realisasi 91,99%	54.059.533.000
8.	2020	4.133.774.000 Realisasi 95,29%	46.634.207.724 Realisasi 90,21%	50.767.981.724
9.	2021	4.708.807.000 Realisasi 97,04%	59.575.683.770 Realisasi 81,38	64.284.490.770
10.	2022	7.987.573.000 Realisasi 88%	49.294.328.927 Realisasi 91,06%	57.281.901.927
11.	2023	7.106.376.000 Realisasi s.d Tw II 25,59%	63.476.114.568 Realisasi s.d Tw II 35,52%	70.582.490.568

Dana APBN merupakan akumulasi Anggaran yang berasal dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Pada Tahun anggaran 2023, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan alokasi anggaran

sebesar Rp. 63.476.114.568 termasuk belanja operasional dan belanja modal. Realiasi keuangan selama tahun 2023 sampai dengan triwulan II sebesar 35,52% atau sebesar Rp 22.548.037.416. Sedangkan realisasi fisik sebesar 47,28%. Realisasi keuangan tersebut merupakan perolehan sampai dengan tanggal 31 Juni 2023.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

2.2.1 Analisis Gambaran Tupoksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Propinsi di bidang Peternakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah. Pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Kalimantan Timur adalah Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Timur yang diperkuat dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Kalimantan Timur.

Namun setelah terbitnya Peraturan Pemerintah No, 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perangkat daerah tersebut dilakukan penataan kembali. Sehingga terbitlah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur. Tindak lanjut dari Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi. Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tersebut terdiri atas 1 (satu) Esselon II yaitu Kepala Dinas; 7 (tujuh) Esselon III yaitu 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang dan 2 (dua) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas; 21 (dua puluh satu) Esselon IV yaitu 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dan 4 (empat) Kepala Seksi serta 14 (Empat Belas) jabatan fungsional.

Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur, membawahi 7(tujuh) unit Esselon III, meliputi:

1. Sekretaris, menangani 3 (tiga) bagian, yaitu:
   a. Umum
   b. Perencanaan Prorgam
   c. Keuangan
2. Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan, menangani 3 (tiga) bagian, yaitu:
   a. Perbibitan Ternak
   b. Budidaya Ternak dan Alat dan Mesin Peternakan
   c. Penataan, Kelembagaan, dan Penyebaran Ternak
3. Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan, menangani 3 (tiga) bagian, yaitu:
   a. Pengembangan Kawasan dan Pakan Ternak
   b. Pelayanan Usaha dan Pembiayaan Peternakan
   c. Data dan Informasi Peternakan
4. Bidang Kesehatan Hewan, menangani 3 (tiga) bagian, yaitu:
   a. Perlindungan Hewan
   b. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
   c. Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan
5. Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, menangani (tiga) bagian, yaitu:
   a. Pengolahan Hasil dan Pengawasan Mutu Produk
   b. Promosi dan Pemasaran
   c. Kesehatan Masyarakat Veteriner
6. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
   a. Sub Bagian Tata Usaha
   b. Seksi Benih dan Bibit Ternak
   c. Seksi Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
7. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
   a. Sub Bagian Tata Usaha
   b. Seksi Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan
   c. Seksi Penyidikan dan Pengujian Kualitas Hasil Peternakan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada **Gambar Bagan berikut**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

LAMPIRAN XXII PERDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 09TAHUN 2016
TANGGAL : 22 Nopember 2016
TENTANG : STRUKTUR DINAS PETERNAKAN DAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

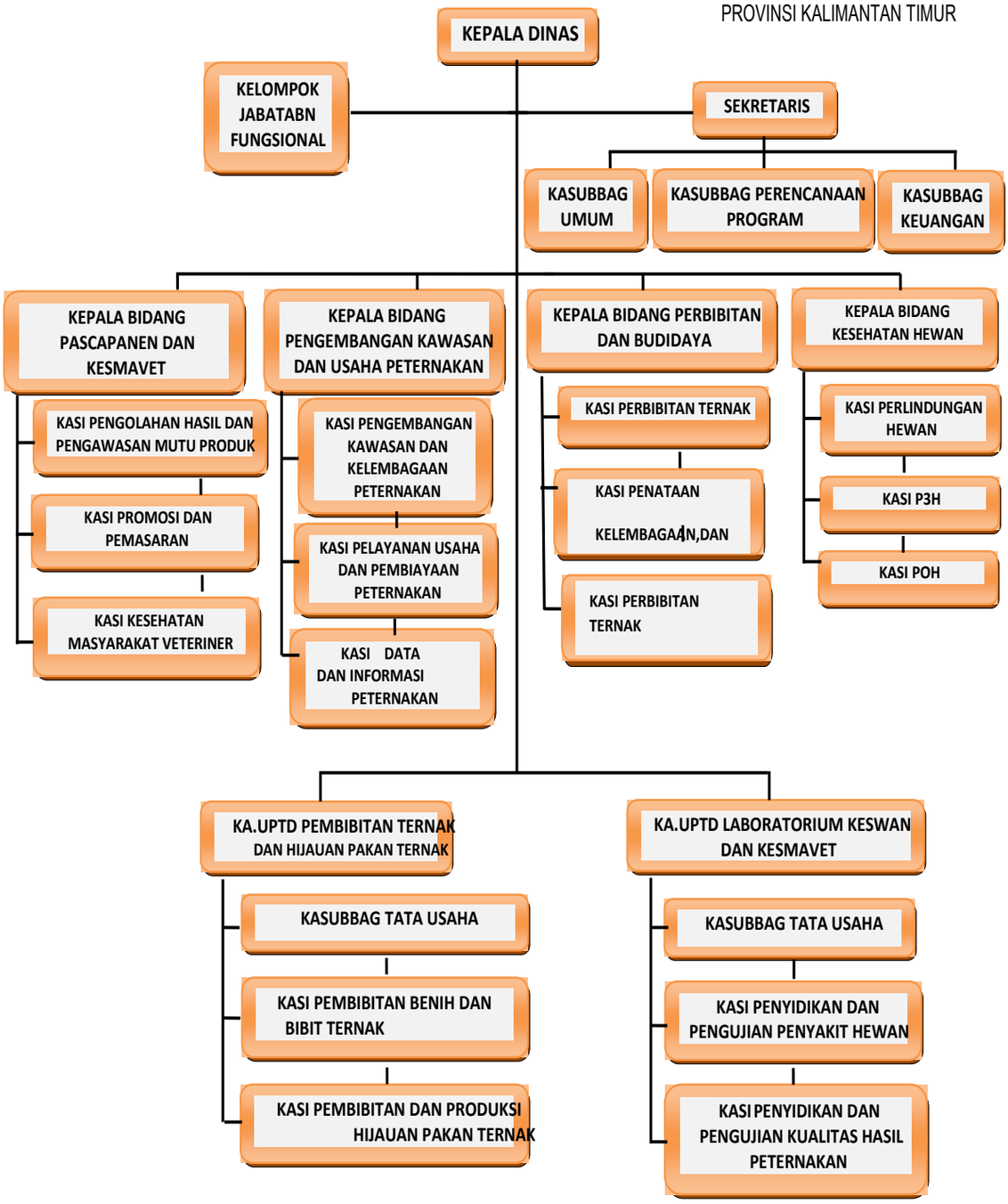

2.2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

I. Analisis Atas Capaian Indikator Kinerja Pada Tujuan Tahun 2023

Indikator tujuan yaitu "Kontribusi lapangan usaha subsector peternakan terhadap ekonomi daerah"

PDRB merupakan indikator utama untuk pembentukan output dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Subsector peternakan merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sector pertanian, sehingga subsector peternakan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan ketahanan pangan, terutama dalam menjaga ketersediaan dan kecukupan protein hewani yang mayoritas terdapat pada komoditas peternakan, seperti daging, telur, dan susu yang tidak dapat digantikan dan ketersediaanya sebagian masih bergantung kepada impor.

Tabel 3 Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Tujuan Tahun 2023

Capaian Tujuan: Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi s.d Tw II	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Kontribusi Lapangan Usaha Subsektor peternakan terhadap ekonomi daerah	%	0,37	0,27	84,37

Pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja tujuan ini cukup baik, karena capaian kontribusi lapangan usaha subsector peternakan terhadap ekonomi daerah terealisasi 0,27% dari target 0,37% dengan capaian 84,37%

Berdasarkan data diatas kontribusi lapangan usaha sub sector peternakan terhadap ekonomi daerah mencapai 0,27% pada triwulan II tahun 2023. Dibandingkan tahun 2021, subsector peternakan mengalami penurunan sebesar 0,05% dari 0,27% menjadi 0,32%. Namun secara nilai rupiah mengalami peningkatan dari 2.473,65 milyar menjadi 2.288,89 milyar. Peningkatan nilai rupiah ini tidak bersamaan dengan peningkatan kontribusi sub sector peternakan karena kontribusi kenaikan PDRB total sumbangan terbesar dari sektor Pertambangan

II. Analisis Atas Capaian Indikator Kinerja Pada Sasaran Tahun 2023

Capaian Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Produksi Pangan Asal Ternak

Indikator:

1. Produksi Daging

Sumber protein asal daging secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu daging sapi dan kerbau, daging kambing dan domba, serta daging unggas. Produksi daging unggas memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi/kerbau maupun kambing/domba. Seiring dengan semakin membaiknya pendapatan masyarakat, konsumsi produk peternakan cenderung turut meningkat. Peningkatan produksi daging ini tidak terlepas dari peningkatan populasi komoditas tersebut yang berasal dari lokal/dalam Kaltim.

Tabel 4 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 Produksi Daging Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi s.d Tw II	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Produksi Daging	Ton	76.235,08	30.352,42	39,81

Permintaan daging yang semakin meningkat setiap tahunnya sebagai akibat dari peningkatan pendapat dan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada peningkatan gizi disamping itu juga tumbuh dan berkembanganya perusahaan asing (perushanaan pertambangan) di Kalimantan Timur. Pengukuran kinerja terhadap sasaran meningkatnya produksi pangan asal ternak terutama produksi daging sampai dengan semester II terealisasi persentase capaian produksi daging sebesar 39,81%. Sehingga untuk ketersediaan daging dapat dikatakan cukup untuk di konsumsi.

Produksi daging secara keseluruhan pada tahun 2022 mencapai 74.461,03 ton mengalami penurunan sebesar 1,78% dari tahun 2021 yaitu 75.811,95 ton. Hal ini disebabkan adanya wabah penyakit hewan nasional yaitu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak ruminansia di daerah sumber ternak untuk Provinsi Kalimantan Timur.

2. Produksi Telur

Pemenuhan protein asal ternak dapat dipenuhi dari produk selain daging, yaitu telur dan susu. Telur merupakan salah satu produk ternak yang memiliki nilai nutrisi yang baik, mudah diperoleh dan harganya relatif murah. Tingkat konsumsi berbagai jenis telur secara nyata dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, harga, ukuran rumah tangga dan tingkat pendidikan keluarga.

Produksi telur merupakan jumlah telur yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu dan usaha peternakan rakyat dalam waktu tertentu, sedangkan konsumsi telur merupakan jumlah telur yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tabel 5 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 Produksi Telur Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Produksi Telur	Ton	14.433,04	6.230,09	43,17

Pemenuhan protein asal ternak dapat dipenuhi dari produk selain daging, yaitu telur diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk, perbaikan ekonomi masyarakat, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi protein hewani. Pengukuran kinerja terhadap sasaran meningkatnya produksi pangan asal ternak terutama produksi telur sampai dengan semester II terealisasi persentase capaian produksi telur sebesar 43,17%. Sehingga untuk ketersediaan telur dapat dikatakan cukup untuk di konsumsi.

Produksi telur secara keseluruhan mengalami peningkatan pada tahun 2022 mencapai 14.834,64 ton/tahun sedangkan Konsumsi telur mencapai 26.809,03 ton/tahun. Produksi telur Kalimantan Timur belum bisa mencukupi kebutuhan konsumsi telur masyarakat Kalimantan Timur. Untuk memenuhi kekurangan akan permintaan telur maka dipenuhi dengan pemasukan telur dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya peran swasta/ usaha peternakan rakyat dibidang ayam petelur masih rendah, biaya investasi usaha ayam petelur cukup tinggi, populasi ayam petelur masih sedikit, dan manajemen budidaya ayam petelur belum optimal.

Capaian Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Peternak

Indikator:

1. Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan

Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Sehingga merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, maka semakin kuat tingkat daya beli petani.

Tabel 6 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 (dua) Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi s.d Tw II	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	Nilai Konstanta	104	108,13	103,97

Pengukuran kinerja terhadap sasaran ini tahun 2023 sangat baik, karena terealisasi 108,13 dari target 104 dengan persentase capaian kinerja sebesar 103,97% artinya sampai dengan triwulan II tahun 20231 peternak masih mengalami keuntungan atau masih bisa belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Jika NTP di atas 100, maka peternak masih untung karena nilai penjualannya lebih tinggi ketimbang biaya rumah tangga. Sementara jika NTP-nya pas 100, maka peternak tidak untung dan tidak rugi. Jika NTP dibawah 100 peterak mengalami kerugian karena penghasilan dari penjualan produksi peternakan masih lebih rendah disbanding biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan pokok rumah tangga.

Tabel 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Indikator Sasaran Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		Tahun 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	104	104,5	102	103	104	102,54	104,27	108.04	104	
2	Produksi Daging (Ton)	82.811,60	85.479,70	73.274,74	74.740,23	76.235,08	80.917,96	75.811,96	74,461.03	76.235,08	
	Produksi Telur (Ton)	11.786,10	12.058,60	14.148,65	14.290,14	14.433,04	11.386,31	13.181,14	14,834.64	14.433,04	

III. PENGADAAN TERNAK

Pengadaan Ternak bibit setiap tahun cenderung meningkat baik bersumber dari Anggaran APBD maupun dari Anggaran APBN. Pengadaan ternak sejak tahun 2013 sampai dengan 2022 dari anggaran APBD Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 Pengadaan Ternak Tahun 2013-2022

Tahun	Jenis Ternak	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Presentase (%)
2013	Sapi Bibit	1.800	1478	82,11
	Sapi Bakalan	400	250	62,5
	Sapi Potong	1080	1080	100
	Sapi BC	175	175	100
2014	Sapi Bibit	1.580	1.580	100
	Sapi Bakalan	776	776	100
	Sapi Potong	195	195	100
2015	Sapi Bibit	483	483	100
	Sapi Bakalan	472	472	100
	Sapi Potong	200	200	100
	Babi	125	125	125
	Sapi BC	950	95	10
2016	Sapi Bibit	480	480	100
	Sapi Bakalan	50	50	100
	Sapi Potong	220	220	100
	Sapi PO	365	365	100
	Kambing	450	450	100
2017	Sapi Bali	25	25	100
	Itik	400	400	100
2018	Sapi Bali	115	115	100
2019	Sapi Jantan	15	15	100

Tahun	Jenis Ternak	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Presentase (%)
	Pejantan Pemacek Sapi Bali	80	80	100
	Pemacek Brahman Cross	20	20	100
	Sapi Bali Jantan dan Betina	108	108	100
2020	Sapi Bali	368	368	100
2021	Sapi Bali	265	90	33,96
	Kambing	148	148	100
2022	Sapi Bali	116	24	20,69
	Kambing	175	175	100
	Ternak Itik	6000	6000	100
	Ternak Ayam	6000	6000	100

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Permasalahan

Permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah *"Percepatan Pertumbuhan Populasi Ternak Belum Sebanding Dengan Peningkatan Konsumsi"*, sehingga permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan ke depan adalah sebagai berikut:

a) Populasi dan Produktivitas ternak masih rendah;

Dinamika pertumbuhan populasi komoditas peternakan di Kalimantan Timur sejak Tahun 2018 sampai dengan 2022 masih relatif rendah, dari 15 komoditas binaan sub sektor peternakan terdapat 8 komoditas dengan tren pertumbuhan positif, dan terdapat 7 komoditas mengalami tren penurunan. Permasalahan pada masing-masing komoditas bersifat spesifik dan perlu strategi yang spesifik dan fokus penyelesaian masalah pada komoditas tersebut. Komoditas peternakan diklasifikasikan dalam 2 kelompok besar yaitu komoditas Ruminansia, Komoditas Non Ruminansia (termasuk didalamnya aneka ternak). Komoditas ruminansia diantaranya adalah Sapi potong, sapi perah, Kerbau, Kambing, dan domba sedangkan komoditas non ruminasia diantaranya adalah Ayam Potong, Ayam Petelur, Ayam Buras (kampung), Itik, Puyuh, Merpati, Kelinci, Kuda, Babi dan itik manila.

Pertumbuhan negatif banyak dialami pada dinamika populasi komoditas ruminasia terutama pada ternak sapi potong, Sapi Perah dan kambing mengalami tren penuruanan pada masing-masing -1,95%, -11,31% dan -3,09%, namun terdapat komoditas ternak ruminansia yang mengalami pertumbuhan positif yaitu domba dengan pertumbuhan 9,97%. Sedangkan pertumbuhan positif banyak dialami pada dinamika populasi komoditas non ruminansia ayam buras, ayam petelur, itik dan itik manila berturut-turut 3,21%, 6,15%, 2,01% dan 12,08%, namun juga terdapat penurunan pada komoditas ayam potong -2,03%.

Tabel 9 Populasi Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (ekor)

No.	Jenis Ternak	Existing Population					r (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	S a p i	117.504	119.485	119.974	121.290	108.613	-1,95
2	Sapi Perah	110	91	87	76	68	-11,31
3	Kerbau	6.157	6.194	6.552	6.539	6.490	1,33
4	Kambing	66.378	67.892	69.929	68.997	58.552	-3,09
5	Domba	439	590	635	694	642	9,97
6	Babi	78.968	82.546	83.652	76.292	45.839	-12,71
7	Kuda	97	102	95	143	95	-0,52
8	Ayam Buras	4.569.169	4.372.415	4.435.205	4.815.976	5.183.873	3,21
9	Ayam Petelur	1.055.432	853.693	1.218.994	2.263.835	1.340.217	6,15
10	Ayam Pedaging	66.672.445	67.886.566	59.402.832	55.877.917	61.412.191	-2,03
11	Itik	248.978	254.683	254.749	261.263	269.564	2,01
12	Kelinci	14.189	8.859	10.830	9.462	7.931	-13,53
13	Puyuh	66.593	65.808	79.222	94.339	88.143	7,26
14	Merpati	4.027	4.776	5.015	5.375	5.678	8,97
15	Itik Manila	42.851	42.890	52.823	64.178	67.608	12,08

Keterangan: * = Angka Sementara
Sumber data : Buku Statistik Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Untuk dapat memenuhi kebutuhan sapi potong diperlukan populasi dasar sebesar 431.028 ekor, dengan asumsi jumlah Pemotongan per Tahun 53.213 ekor, jika 90% dapat diambil dari populasi maka setiap Tahun dapat dipotong 47.892 ekor. Sedangkan populasi Tahun 2022 sebanyak 108,613 ekor sehingga masih perlu penambahan 322,415 ekor. Produktivitas sapi di Kalimantan Timur dapat digambarkan dengan indikator sebagai berikut:

- Bobot lahir rata-rata Kurang dari 20 kg untuk ternak sapi bali, bobot lahir rata-rata untuk sapi persilangan sebesar 30 kg
- Rata-rata berat hidup sapi (Non BX) yang dipotong 242,15 kg sedangkan rata-rata berat potong sapi Brahman 292,50kg pada Tahun 2021 (BPS-RI, 2021).

- Angka Kelahiran dari total populasi pada Tahun 2017 berturut-turut Sapi 15,91%, Kerbau 28.84%, Kambing 21,02%. (BPS-RI, Survei Struktur Ongkos Usaha Peternakan 2017, 2017).
- Angka Kematian dari total populasi pada Tahun 2017 berturut-turut Sapi 2,41%, Kerbau 7,27% dan Kambing 7,66% (BPS-RI, Survei Struktur Ongkos Usaha Peternakan 2017, 2017)
- Calving interval rata- rata 19,6 bulan. Indikator tersebut masih perlu ditingkatkan untuk bobot lahir sapi Bali hingga mencapai 25 kg dan Sapi silangan mencapai 35Kg, untuk bobot potong sapi Minimal 400 kg dan calving interval rata-rata 16- 17 bulan.

b) Produksi dan produktivitas Hijauan Pakan Ternak masih rendah

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan baik pembibitan, pengembangbiakan maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan penggunaan bahan pakan lokal maupun biomassa ikutan dari hasil tanaman yang ada disekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia baik berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi. Produksi hijauan pakan ternak Tahun 2021 mencapai 36.400 Ton dengan luas kebun HPT 1.367Ha, dengan Produktifitas produksi hijaun mencapai 26,6 Ton/Ha/Tahun. Produktivitas hijauan ini akan meningkat jika dilakukan pemeliharaan/manajemen perawatan HPT yang baik, pemupukan yang baik dan dengan bibit HPT yang berkualitas. Potensi produktivitas rumput gajah dapat mencapai 200-300 Ton/ha/Tahun.

c) Daya Saing Produk Peternakan Rendah dan Fluktuasi Harga Komoditas Picu Inflasi

Potensi basis komoditas dan produk peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar lokal. Daya saing produk peternakan, merupakan kemampuan dalam menghasilkan komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan baik lokal maupun nasional. Provinsi Kalimantan Timur untuk usaha hilirisasi dan industrialisasi produk peternakan masih rendah dan manajemen pemasaran produk peternakan masih kurang.

Masalah fluktuasi harga komoditas ayam potong yang dapat memicu inflasi merupakan permasalahan yang cukup signifikan di Indonesia, mengingat konsumsi ayam potong cukup tinggi di masyarakat Kalimantan Timur yaitu 79% dari total konsumsi daging. Beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga komoditas ayam potong antara lain:

1. Faktor musim dan cuaca. Harga ayam potong dipengaruhi oleh faktor musiman dan cuaca, seperti peningkatan permintaan pada saat perayaan hari besar atau cuaca buruk yang mengganggu produksi peternakan ayam.
2. Kenaikan harga pakan ternak. Harga pakan ternak yang tinggi dapat membuat biaya produksi peternakan ayam meningkat dan berdampak pada kenaikan harga ayam potong.
3. Kondisi kesehatan ternak. Jika ada wabah penyakit ternak atau kondisi kesehatan ternak yang buruk, produksi ayam potong bisa menurun dan harga ayam potong bisa naik.
4. Ketergantungan terhadap impor. Indonesia masih mengimpor ayam potong dalam jumlah yang cukup besar. Jika terjadi kenaikan harga ayam potong di pasar internasional, maka harga ayam potong di dalam negeri juga bisa naik.

Untuk mengetahui secara mendalam dan detail maka diperlukan informasi Supply demand yang memadai akurat dan terpercaya, sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat. Kolaborasi antar perangkat Dinas terkait pengendalian inflasi dan kenaikan harga sangat diperlukan, dengan lebih mendalam memahami kondisi stok barang, produksi lokal, pemasukkan dari luar daerah dan rantai distribusi yang menyebabkan dan faktor kenaikan harga.

d) Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) belum maksimal

Kesehatan hewan masih menjadi perhatian khusus untuk 3 Tahun kedepan, penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) harus terus diupayakan secara masif, agar Kalimantan Timur segera bebas dari wabah tersebut. Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui pengendalian, pencegahan dan pengobatan yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan.

Kejadian penyakit baru selain PMK yang harus diwaspadai adalah penyakit African Swine Fever (ASF) yang menyerang ternak babi, dan Penyakit Lumpie Skin Deasease (LSD). Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di Kalimantan Timur kejadiannya masih cukup tinggi seperti BVD, IBR, Pullorum, Anaplasmosis, Tripanosomiasis, Babesiolosis sedangkan penyakit hewan menular strategis yang sangat berpengaruh terhadap keuntungan peternak adalah AI, jembrana, bruceolosis.

Kejadian penyakit Avian Influenza (AI) meningkat pada Tahun 2022 sebanyak 76 kasus dari Tahun 2021 sebanyak 5 Kasus, kejadian penyakit ASF meningkat pada Tahun 2022 sebanyak 1.251 ekor dari Tahun 2021. sebanyak 784 ekor, dan PMK mulai terjadi Tahun 2022 sebanyak 123 ekor. Penyakit hewan menular yang bersifat zoonosis yang masih banyak terjadi di Kalimantan Timur seperti Rabies, Salmonellosis, fasiolosis dan AI. Keterbatasan biaya, tenaga medis/ paramedik dan peralatan menjadi hambatan dalam penanggulangan penyakit hewan menular tersebut. Disamping pencegahan dan pemberantasan terhadap penyakit hewan menular, juga harus dilakukan penerapan dan replikasi program ISIKHNAS secara rutin dan berkala untuk menganalisis status kesehatan hewan.

e) Pengembangan Kawasan Peternakan belum optimal

Pengembangan Kawasan peternakan bertujuan untuk mengoptimalkan potesi sumberdaya lahan, ternak, peternak, teknologi, sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan produktivitas peternakan, pendapatan dan kesejahteraan peternak, serta menciptakan pewilayahan komoditas. Pengembangan Kawasan peternakan di Provinsi Kalimantan Timur belum optimal padahal potensi sumber daya alam di Kalimantan Timur cukup mendukung diantaranya tersedianya lahan eks tambang, adanya perkebunan sawit yang dapat diintegrasikan dengan sapi, dan adanya kebijakan menggunakan perhutanan social untuk masyarakat.

f) Jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan belum optimal

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara Kesehatan hewan dan produk Hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Oleh karena itu penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui

penjaminan higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan, penjaminan produk hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan, penerapan kesejehteraan hewan serta pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Produk hewan yang aman yang berkualitas merupakan faktor kunci untuk meningkatkannilai tambah dan daya saing produk, sehingga produk hewan nasional dapat bersaing di pasar local maupun nasional. UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet melayanai kegiatan laboratorium yaitu: penyidikan dan pengujian kualitas hasil peternakan (P2KHP) meliputi uji Salmonella, uji E.coli, uji Staphylococcus, uji Colliform, uji Total Plate Count (TPC). Hasil uji penyakit hewan untuk penyakit zoonosis seperti brucelosis, pullorum dan avian influensa terdapat hasil positif, perlu adanya penyidikan dan penanganan lebih lanjut dari instansi terkait pada wilayah atau daerah yang terinfeksi penyakit-penyakit tersebut di Provinsi Kalimantan Timur.

Masih ditemukannya cemaran mikroba dengan jumlah mikroba diatas nilai ambang batas untuk uji kualitas hasil peternakan pada pengujian TPC, Salmonella, E. Coli, Colliform dan TPC dan masih ditemukannya pemalsuan daging sapi dengan daging babi. Perlu adanya upaya sosialisasi dan pembinaan tentang penanganan PAH pada produsen oleh instansi terkait di wilayah Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

g) Peran swasta dan usaha peternakan rakyat belum optimal

Perusahaan swasta di Kalimantan Timur masih sedikit dan didominasi oleh perusahaan ayam pedaging. Perusahaan swasta yang menggeluti usaha ayam pedaging dalam jumlah besar baru 7 perusahaan, selebihnya yaitu perusahaan skala menengah dan kemitraan. Sedangkan untuk perusahaan penggemukan sapi dalam skala besar baru terdapat 1 di Kab. PPU. Peran swasta yang masih rendah ini dikarenakan tingginya biaya investasi peternakan di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk peternakan rakyak kesulitan mendapat modal untuk usaha dibidang peternakan. Perlu adanya sosialisasi/edukasi dan pembinaan terhadap peternakan rakyat terkait akses permodalan seperti KUR, AUTS, KTS, selain itu perlu peningkatan akses informasi tentang perizinan usaha peternakan agar investor mau berusaha di Kalimantan Timur.

h) Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Peternak masih rendah

Ada kecenderungan bahwa peternak tidak mempunyai kapasitas pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk dapat memahami permasalahan mereka, memikirkan permasalahannya, atau memilih pemecahan masalah yang paling tepat untuk mencapai tujuan mereka. Kemungkinan yang terjadi selanjutnya adalah pengetahuan mereka berdasarkan kepada informasi yang keliru karena kurangnya pengalaman, pendidikan, atau faktor nilai budaya yang ada. Terbatasnya pengetahuan, sikap dan keterampilan petani, akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan untuk berternak yang lebih baik. Sehingga kualitas, kuantitas produksi peternakan tidak optimal. Hal tersebut ditandai dengan populasi dan produktifitas komoditas peternakan yang belum mencukupi ketersediaan dan keamanan pangan. Oleh karena itu perlunya dilakukan pembinaan terhap peternak mapun petugas lapangan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peternak maupun petugas agar dapat meningkatkan usaha dibidang peternakan. Selain itu memberikan informasi dan teknologi dalam budidaya peternakan secara continue.

2.3.2 Keterkaitan Koordinasi dan Sinergi Program Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 sudah menjadi acuan, namun RENSTRA 2018-2023 belum menjadi acuan karena pemilihan kepala daerah Kabupaten/Kota lebih dahulu dilaksanakan, sehingga keterkaitan dengan renstra Kabupaten/Kota masih dengan Renstra dengan periode sebelumnya seperti:

1. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun 2016–2021: “Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian”.
2. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tujuan dan sasaran renstra, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun 2016–2021: Meningkatkan Produktivitas, tata kelola dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas dan meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
3. Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur dengan Visi Tahun 2016 – 2021: “Terwujudnya Pembangunan Agribisnis Pertanian Menuju Kutai Timur Mandiri”.
4. Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Visi Tahun 2019 – 2023: “Mewujudkan Swasembada dan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan Menuju Masyarakat Penajam Paser Utara Yang Sejahtera, Berkualitas dan Berdaya Saing”.
5. Dinas Pertanian Kota Samarinda dengan Visi Tahun 2016–2021:"Terwujudnya Pertanian Maju, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan"
6. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan dengan Visi Tahun 2016 – 2021: “Terwujudnya Ketersediaan Pangan dan Kesejahteraan Petani dan Nelayan Melalui Pemanfaatan Sumber Petanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang Seinergis dan Berkelanjutan”.
7. Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat dengan Visi Tahun 2016–2021: “Terwujudnya Optimalisasi Potensi Pertanian dan Perikanan Meningkatkan Kesejahteraan Petani”.

8. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun 2016–2021: 1) Meningkatkan pemenuh kebutuhan pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal, 2) Menigkatkan kinerja perikanan tangkap dan bududaya serta nilai tambah industri perikanan, 3) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan.
9. Dinas Pertanian Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 adalah "Terwujudnya Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Yang Tangguh Berwawasan Agribisnis".

   Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2021 adalah "Terwujudnya Pembangunan Pertanian yang terarah, berkesinambungan didasarkan pada keunggulan kompetitif wilayah dan kearifan lokal dalam pengembangan ekonomi kerakyatan".

2.3.3 Keterkaitan Koordinasi dan Sinergi Program Perangkat Daerah Provinsi dan Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat

Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan jangka panjang dirumuskan sebagai berikut:" Terwujudnya peternakan indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern". Untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan berkelanjutan
2. Meningkatkan ketersediaan pakan yang berkualitas secara berkelanjutan
3. Mewujudkan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan keamanan dan mutu produk hewan serta kesehatan masyarakat
5. Meningkatkan usaha peternakan, pengolahan dan pemasaran produk peternakan berdaya saing
6. Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakandan Kesehatan Hewan menuju birokrasi professional dan modern

Pernyataan visi dan misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI memberikan arahan bagi seluruh daerah (Provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Menyelenggarakan dan menggerakkan pengembangan perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, serta kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen dalam mencapai penyediaan dan keamanan pangan hewani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak
2. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan

2.3.4 Tantangan dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.4.1 Tantangan dalam meningkatkan Pelayanan Kinerja Perangka Daerah

Memperhatikan kondisi pembangunan peternakan baik secara nasional maupun wilayah Provinsi Kalimantan Timur saat ini dan hasil yang ingin dicapai hingga tahun 2023, maka banyak tantangan yang dihadapi dan akan berpengaruh pada kinerja pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kurun waktu 2019 – 2023.

1. Tantangan Internal

   Tantangan internal merupakan faktor potensial yang ada di dalam intern Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang belum secara optimal diberdayakan dalam pembangunan peternakan.

   a. Sumber Daya Manusia

      Dalam kurun waktu 2011-2022 tidak ada pengangkatan PNS baik teknis maupun Non Teknis sehingga tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan oleh PPBASN. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur merupakan dinas teknis yang mempunyai tanggung jawab bidang teknis peternakan dan kesehatan hewan maka memerlukan tenaga teknis yang lebih banyak dibandingkan dengan tenaga non teknis. Untuk itu, perlu pemberdayaan tenaga non teknis dengan melalui bimbingan teknis, pelatihan/magang teknis peternakan dan kesehatan hewan,

sehingga memiliki dasar pemahaman tentang pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

b. Prasarana dan Sarana

Secara umum, prasarana dan sarana perkantoran sudah memadai namun untuk prasarana dan sarana pelayanan di lokasi khususnya padat ternak masih sangat minim seperti check point, pasar hewan, depo obat hewan dan alat mesin peternakan. Perkembangan informasi elektronik sangat pesat sehingga kecepatan, ketepatan dan keterbukaan semakin dituntut oleh masyarakat. Publikasi saat ini harus mengikuti perkembangan dan informasi yang transparan dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama dengan media elektronik serta prasarana dan sarana elektronik seperti website, baliho, leaflet, spanduk perlu ditingkatkan agar penyampaian informasi mengenai peternakan dan kesehatan hewan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Peran serta masyarakat akan semakin meningkat dengan adanya media publikasi tersebut di dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan.

c. Koordinasi dengan instansi/lembaga terkait

Keterkaitan/keterpaduan dan sinergisitas antar instansi/lembaga terkait baik di Pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota perlu ditingkatkan agar keterpaduan program dan kegiatan peternakan berjalan efektif dan efisien. Sebagai contoh dalam pengembangan kawasan peternakan yang berbasis komoditas ternak dapat terintegrasi dengan sektor lainnya seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, industri pengolahan hasil dan lahan eks tambang

d. Konsistensi penganggaran

Rencana kerja yang telah disusun sudah memuat rencana kebutuhan pendanaan dalam satu tahun namun dalam implementasinya tidak secara konsisten dengan penganggaran tersebut sehingga target kinerja tidak tercapai, hal ini sangat tergantung dengan kondisi keuangan daerah.

2. Tantangan Eksternal

a. Sumber pembiayaan selain belanja APBD dan APBN seperti Kredit Program (KKPE, KUPS), CSR, Kredit Ternak Sejahtera (KTS) dan penjaminan usaha peternakan sapi melalui AUTS belum secara

optimal dapat diakses oleh peternak. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memecahkan permasalahan permodalan khususnya agunan yang harus dimiliki oleh peternak maka telah dibentuk lembaga penjaminan. Namun belum semua peternak memahami adanya lembaga penjaminan sehingga ke depan perlu sosialisasi mengenai pola penjaminan, disamping itu sifat kehati-hatian pihak perbankan masih menjadi Persyaratan utama sehingga agunan tetap harus dipenuhi.

b. Keterlibatan peran swasta terutama perusahaan sawit dan perusahaan tambang terhadap pengembangan usaha peternakan masih rendah, sehingga pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang komitmen perusahaan terhadap pengembangan peternakan sapi potong belum optimal.
c. Pemotongan betina produktif khususnya sapi/kerbau lokal masih cukup tinggi. Hal ini merupakan suatu kerugian bagi peternak karena yang seharusnya dapat memberikan keuntungan dengan bertambahnya populasi namun harus dipotong. Oleh karena itu pengawasan dan penindakan tentang larangan pemotongan betina produktif perlu ditingkatkan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
d. Semakin meningkatnya lalu lintas ternak maupun produk peternakan akan semakin besar ancaman penyakit hewan strategis yang berdampak tinggi pada ekonomi. Kewaspadaan terhadap penyakit harus ditingkatkan karena Kaltim bebas Brucellosis, anthrax, Penyakit mulut dan kuku
e. Pemanfaatan sumber daya pakan ternak yang tersedia belum optimal, maka perlu peningkatan dan pemahaman pengelolaan pakan secara baik dan benar dengan di dukung teknologi tepat guna yang bisa meningkatkan efesiensi dan efektifitas usaha peternakan rakyat

2.3.4.2 Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan bahan pangan asal ternak yang ASUH maka peluang usaha di bidang peternakan juga semakin meningkat.

1. Meningkatnya Konsumsi Daging dan Telur

Konsumsi daging berkembang dengan pesat yang disebabkan oleh pertambahan penduduk, peningkatan pendapatan, kesadaran gizi serta pola hidup sehat. Struktur konsumsi daging jika dilihat atas jenis daging yang dikonsumsi maka dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 10 Struktur Konsumsi Daging Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 – 2022 (dalam ton)

No.	Jenis Ternak	2018	2019	2020	2021	2022
1	S a p i	10,961.24	12,444.65	10,694.27	9,924.65	7,091.87
2	K e r b a u	1,360.47	1,667.58	2,391.48	3,346.89	61.18
3	Kuda	0.18	0.63	1.81	1.36	0.29
4	Kambing	745.89	693.59	826.10	877.53	783.33
5	Domba	8.32	11.07	36.25	15.32	5.19
6	Babi	1,400.94	1,803.70	1,830.40	2,302.49	2,348.23
7	Ayam Buras	4,798.66	4,592.02	4,657.96	4,720.67	4,815.08
8	Ayam Petelur	452.21	365.77	522.29	629.19	641.77
9	Ayam Pedaging	63,028.77	69,243.31	60,372.41	65,702.56	54,830.23
10	I t i k	392.71	499.28	644.86	115.38	104.43
11	Kelinci	6.32	3.95	4.82	4.21	4.30
12	Puyuh	6.76	6.19	7.48	8.92	9.05
13	Merpati	1.05	1.25	1.31	1.40	1.43
14	Itik Manila	26.87	26.89	33.12	40.24	41.04
Jumlah		**83.190,37**	**91.359,87**	**82.024,57**	**87.690,81**	**70.737,42**

Sumber: Statistik Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022

Pada Tahun 2018 konsumsi daging sapi di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 10.961,24 Ton dibandingkan dengan Tahun 2017 konsumsi daging sapi di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 9.393,51 Ton. Apabila dibanding dengan Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 16,68% dan di Tahun 2019 mengalami peningkatan kembali mencapai 12.444,65 Ton atau sebesar 11,9%. Namun pada Tahun 2020 terjadi penurunan konsumsi daging sapi menjadi 10.694,27 Ton atau penurunan sebesar 14,1% hal ini dikarenan dampak dari pandemi covid-19 mengakibatkan adanya pembatasan sosial yang berdampak pada sektor peternakan dan keterbatasan pasokan daging serta kenaikan harga yang cukup signifikan di beberapa daerah. Meskipun konsumsi daging mengalami penurunan pada Tahun 2020 hal ini kemungkinan bersifat sementara dan bisa kembali meningkat setelah pandemi berkahir dan perekonomian pulih kembali.

Berdasarkan data konsumsi daging pada tabel diatas dimulai Tahun 2018-2020 mengalami peningkatan setiap Tahunnya, Struktur konsumsi daging terbesar pada 5 Tahun terakhir mencapai 69.243,31 Ton adalah ayam pedaging. Prestasi yang telah diraih bahwa seluruh

kebutuhan konsumsi ayam pedaging broiler telah dipenuhi dari produksi lokal Kalimantan Timur.

Pemenuhan konsumsi daging dalam rangka pembangunan IKN

Peningkatan kebutuhan daging pada pembangunan Ibu Kota Nusantara perlu memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:

(1) Melakukan analisis kebutuhan terhadap kebutuhan daging yang diperlukan untuk memenuhi permintaan dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hal ini meliputi penghitungan terhadap jumlah penduduk yang akan tinggal di Ibu Kota Nusantara, pertumbuhan populasi yang diharapkan, preferensi konsumsi daging, serta kebutuhan daging untuk sektor-sektor tertentu seperti konstruksi dan tenaga kerja.

(2) Peningkatan produksi dalam daerah (lokal Kalimantan Timur), yaitu dengan mendorong peningkatan produksi daging dalam daerah dari peternak-peternak lokal, termasuk peternakan sapi, kambing, domba, dan ayam, untuk meningkatkan jumlah ternak yang diproduksi. Peningkatan produksi dapat dicapai melalui program-program pengembangan peternakan, peningkatan teknologi peternakan, pemenuhan pakan berkualitas, dan pengelolaan kesehatan hewan yang baik.

(3) Peningkatan produktifitas perlu juga dilakukan, hal ini dapat dicapai melalui seleksi genetik yang baik untuk menghasilkan ternak yang lebih produktif, penerapan teknologi pertanian yang modern, penggunaan pakan berkualitas tinggi, serta penerapan praktik pengelolaan yang efisien.

(4) Kerjasama dengan peternak lokal menjadi penting dalam pemenuhan kebutuhan daging. Pemerintah dapat mendorong kemitraan dengan peternak lokal, memberikan bantuan teknis, dukungan pembiayaan, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas peternak lokal dalam memproduksi daging yang berkualitas dan memenuhi standar kebutuhan.

(5) Diversifikasi sumber protein selain daging, penting juga untuk mendorong diversifikasi sumber protein, termasuk sumber protein nabati, untuk mengurangi tekanan terhadap sektor peternakan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan pertanian vertikal, pengembangan tumbuhan protein alternatif, serta promosi pola makan yang seimbang.

Aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam merencanakan pemenuhan kebutuhan daging untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara perlu diperhatikan. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, peternak, pemangku kepentingan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencapai keberhasilan pemenuhan kebutuhan

Tabel 11 Proyeksi Kebutuhan Daging berbagai Jenis Komoditas (ton)

Komoditas	Tahun					
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2045**
S a p i	7,091.87	7,304.63	7,636.99	7,866.10	8,102.08	14,207.04
K e r b a u	61.18	63.02	65.88	67.86	69.89	122.56
Kuda	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.58
Kambing	783.33	806.83	843.54	868.85	894.91	1,569.23
Domba	5.19	5.35	5.59	5.76	5.93	10.40
Babi	2,348.23	2,418.68	2,528.73	2,604.59	2,682.73	4,704.18
Ayam Buras	4,815.08	4,959.53	5,185.19	5,340.75	5,500.97	9,645.98
Ayam Petelur	641.77	661.02	691.10	711.83	733.19	1,285.65
Ayam Pedaging	54,830.23	56,475.14	59,044.76	60,816.10	62,640.58	109,840.64
I t i k	104.43	107.56	112.46	115.83	119.31	209.20
Kelinci	4.30	4.43	4.63	4.77	4.91	8.61
Puyuh	9.05	9.32	9.75	10.04	10.34	18.13
Merpati	1.43	1.47	1.54	1.59	1.63	2.86
Itik Manila	41.04	42.27	44.19	45.52	46.89	82.21
Total	70,737.42	72,859.54	76,174.65	78,459.89	80,813.69	141,707.29

Tabel 12 Struktur Konsumsi Telur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018– 2022 (dalam Ton)

No	Jenis Telur	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ayam Buras	2,926.55	2,800.53	2,840.75	3,084.63	3,177.17
2	Ayam Petelur	8,137.38	6,581.97	9,398.44	9,435.03	9,718.08
3	I t i k	1,366.89	1,398.21	1,398.57	1,434.34	1,477.37
4	Puyuh	67.92	67.12	80.81	96.23	99.11
5	Itik Manila	235.25	235.47	290.00	352.34	362.91
	Jumlah	12,734.00	11,083.30	14,008.57	14,402.56	14,834.64

Sumber: Statistik Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022

Struktur konsumsi telur pada Tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2018 jumlah konsumsi telur mencapai 12.734,00 Ton. Pada Tahun 2019 konsumsi telur mengalami penurunan mencapai 11.083,30 Ton. Kemudian naik signifikan atau mencapai 14.834,64 Ton pada Tahun 2022

Pemenuhan konsumsi telur dalam rangka pembangunan IKN

Telur merupakan sumber protein yang berkualitas tinggi, kaya nutrisi, praktis, dan terjangkau. Kelebihan ini menjadikan telur sebagai komoditas peternakan yang penting dalam pemenuhan pangan dan memberikan kontribusi dalam menjaga kesehatan dan gizi masyarakat.

Telur menjadi pilihan komoditas peternakan dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam rangka pembangunan IKN, diman telur memiliki kelebihan sebagai berikut:

- Sumber protein yang berkualitas
- Nutrisi yang lengkap, Telur mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin (A, D, E, B12, riboflavin), mineral (zat besi, seng, selenium), asam lemak sehat, kolin, dan antioksidan.
- Harga terjangkau,
- Fleksibilitas dalam penggunaan, Telur dapat digunakan dalam berbagai cara dalam makanan dan masakan. Fleksibilitas ini memungkinkan variasi dalam pola makan dan memenuhi preferensi masyarakat.
- Daya tahan yang baik (Daya simpan)
- Sumber energi yang baik

2. Daya Tampung Ternak Masih Tinggi

   Daya tampung ternak mengacu pada kapasitas produksi maksimal dari suatu kawasan atau peternakan. Pernyataan bahwa daya tampung ternak masih tinggi dapat diartikan bahwa masih ada potensi untuk meningkatkan populasi ternak pada suatu kawasan atau peternakan. Melalui Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) akan melakukan kajian untuk pengembangan sapi pada lahan bekas tambang sehingga Kalimantan Timur diharapkan menjadi salah satu lumbung sapi nasional. Populasi sapi potong yang dikembangkan pada lahan perkebunan sawit sampai sekarang diperkirakan sebanyak 31.955 ekor yang tersebar pada 8 Kabupaten/Kota sedangkan yang dipelihara/dikembangkan pada lahan bekas tambang sampai saat ini sekitar 6.839 ekor yang tersebar pada 7 Kabupaten/kota. Sehingga dari populasi sapi potong di lahan perkubanan sawit dan lahan ex tambang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya peternakan berbasis korporasi.

3. Data Perkembangan populasi ternak berdasarkan jenis

   Data populasi ternak mulai Tahun 2016-2020 tercatat kenaikan dengan rasio 1,54% untuk Sapi, 1,72% untuk Kambing, 12,93% untuk Domba, 10,76% untuk Kuda, 16,97% untuk ayam petelur, 1,96% untuk Itik, 14,49% untuk Iti Manila. Kerbau 2,26%, Ayam buras 2,08% dan Puyuh

9,91% disamping kenaikan ada beberapa jenis ternak yang mengalami penurunan seperti Babi sebesar -0,12%, Sapi Perah sebesar -8,24%, Kelinci sebesar -8,96%. Perkembangan populasi ternak bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 13 Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2022

No.	Jenis Ternak	Existing Population				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	S a p i	117,504	119,485	119,974	121,290	108,613
2	Sapi Perah	110	91	87	76	68
3	Kerbau	6,157	6,194	6,552	6,539	6,490
4	Kambing	66,378	67,892	69,929	68,997	58,552
5	Domba	439	590	635	694	642
6	Babi	78,968	82,546	83,652	76,292	45,839
7	Kuda	97	102	95	143	95
8	Ayam Buras	4,569,169	4,372,415	4,435,205	4,815,976	5,183,873
9	Ayam Petelur	1,055,432	853,693	1,218,994	2,263,835	1,340,217
10	Ayam Pedaging	66,672,445	67,886,566	59,402,832	55,877,917	61,412,191
11	Itik	248,978	254,683	254,749	261,263	269,564
12	Kelinci	14,189	8,859	10,830	9,462	7,931
13	Puyuh	66,593	65,808	79,222	94,339	88,143
14	Merpati	4,027	4,776	5,015	5,375	5,678
15	Itik Manila	42,851	42,890	52,823	64,178	67,608

Keterangan: * = Angka Sementara
Sumber: Statistik Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021

4. Berkembanganya teknologi peternakan tepat guna

   Perkembangan teknologi peternakan tepat guna di Provinsi Kalimantan Timur sangat baik. Teknologi peternakan tepat guna di Kalimantan Timur adalah Biogas. Pada Tahun 2018-2022 jumlah instalasi biogas yang dibangun dan dimanfaatkan masyarakat yaitu 77 unit. Selain itu telah tumbuh upgrade kandang tertutup dari kandang terbuka dalam budidaya ayam potong mencapai 45%.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Prioritas pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang tertuang dalam pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan dengan strategi peningkatan produksi pangan asal ternak, dan arah kebijakan yang terdiri dari Peningkatan Produksi Ternak Berkualitas dan Pengembangan Kawasan Peternakan. Berikut Penjabaran Program Prioritas Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam sasaran dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2023:

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran Perubahan (Rupiah)
Prioritas Pembangunan 2								
Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan								
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB	%	0,37	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Miniranch yang teregister	30 Unit	5.309.353.900
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran Sapi	22%	13.042.871.695

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Program-program prioritas Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Perizinan Usaha Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian Program yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan OPD dan telah terakomodasi dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2023.

Tabel 14 Review Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2023							Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**
02	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**					**62.000.000.000**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**				**66.902.514.068**
02.00	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**					**50.078.609.880**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**				**55.740.419.218**
3.27.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan**	**%**	**82**		**30.278.609.880**	**Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan**	**%**	**82**		**28.697.078.523**
3.27.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja**	**Nilai**	**79,30**		**1.950.000.000**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja**	**Nilai**	**79,30**		**1.774.428.900**
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	1.000.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	smd, bpn	882.999.900
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	950.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu	891.429.000
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**%**	**80**		**20.412.979.880**	**Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**%**	**80**		**16.847.830.223**
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	83	smd dan ppu	19.628.609.880	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	83	smd dan ppu	16.008.420.623
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	Smd	715.970.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	smd	627.800.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2023							Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**
3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Smd	68.400.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	smd	211.609.600
3.27.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**%**	**80**		**488.581.000**	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**%**	**80**		**556.891.100**
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	Smd	269.801.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	smd	175.255.600
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	18	smd dan luarProv	218.780.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	smd dan luarProv	381.635.500
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**%**	**80**		**2.073.017.854**	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**%**	**80**		**2.527.480.400**
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	Smd	19.799.634	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	smd	23.465.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	smd	514.599.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	135	smd	1.040.947.500
3.27.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	smd	5.000.000	-	-	-	-	-

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2023							Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	35	smd	141.759.200	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	smd	162.319.500
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3840	smd	15.360.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3840	smd	27.148.800
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	170	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	1.376.500.020	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	1.273.599.600
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**80**		**1.555.948.000**	**Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**80**		**897.090.000**
3.27.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	smd	1.368.800.000	-	-	-	-	-
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	smd	127.048.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	smd	897.090.000
3.27.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	7	smd	60.100.000	-	-	-	-	-
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**80**		**2.301.595.726**	**Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**80**		**4.591.942.060**
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	smd	103.458.219	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	smd	22.620.100

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2023							Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	smd	252.710.035	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	smd	410.984.200
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	smd	1.945.427.472	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	smd	4.158.337.760
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**80**		**1.496.487.420**	**Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**80**		**1.501.415.840**
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	63	smd	34.212.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	63	smd	45.500.000
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	88	smd	274.145.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	199	smd	510.824.800
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	smd	1.101.947.920	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	smd	945.091.040
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	smd	86.182.500	-	-	-	-	-
3.27.02	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Angka Kelahiran Sapi**	**%**	**22**		**8.750.000.000**	**Angka Kelahiran Sapi**	**%**	**22**		**13.042.871.695**

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2023							Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**
3.27.02.1.01	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan**	**unit usaha**	**76**		**1.650.000.000**	**Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan**	**unit usaha**	**76**		**1.601.789.140**
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk. Pestisida. Alsintan. dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	700.000.000	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk. Pestisida. Alsintan. dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, dan bru	537.680.240
3.27.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	950.000.000	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, dan bru	1.064.108.900
3.27.02.1.04	**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Calving Interval**	**Bulan**	**16,5**		**2.500.000.000**	**Calving Interval**	**Bulan**	**16,5**		**2.628.917.200**
3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	1.200.000.000	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	bru, kkr, kbr, psr, dan ppu	1.088.679.500
3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	950.000.000	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, dan bru	1.004.721.500

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2023							Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**
3.27.02.1.04.03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Orang	20	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	350.000.000	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Orang	20	bpn dan smd	535.516.200
3.27.02.1.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu**	**sampel**	**40**		**800.000.000**	**Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu**	**sampel**	**40**		**573.592.000**
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	400.000.000	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, dan mahulu	349.000.000
3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT. Bahan Pakan.Pakan yang Beredar	Ton	100.000	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	400.000.000	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT. Bahan Pakan.Pakan yang Beredar	Ton	100.000	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, dan mahulu	224.592.000
3.27.02.1.06	**Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor**	**Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu**	**Sampel**	**13**		**600.000.000**	**Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu**	**Sampel**	**13**		**681.241.555**
3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	450.000.000	Jumlah Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, dan mahulu	387.679.600

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2023							Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**
3.27.02.1.06.02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	Kasus	165	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	150.000.000	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	Kasus	165	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, dan mahulu	293.561.955
3.27.02.1.07	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**	**Jumlah kelompok penerima ternak**	**Kelompok**	**10**		**3.200.000.000**	**Jumlah kelompok penerima ternak**	**Kelompok**	**43**		**7.557.331.800**
3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	200	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	3.200.000.000	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	1536	bru, kkr,knr, ktm, psr dan mahulu	7.557.331.800
3.27.03	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Miniranch yang teregister**	**Unit**	**30**		**5.200.000.000**	**Jumlah Miniranch yang teregister**	**Unit**	**30**		**5.309.353.900**
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**Jumlah miniranch sapi potong**	**Unit**	**30**		**5.200.000.000**	**Jumlah miniranch sapi potong**	**Unit**	**30**		**5.309.353.900**
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	5.200.000.000	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, dan mahulu	5.309.353.900
3.27.04	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular**	**%**	**70**		**3.250.000.000**	**Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular**	**%**	**70**		**6.852.550.300**
		Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	**%**	**14**			**Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)**	**%**	**14**		

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2023							Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**
3.27.04.1.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI**	**Kab/Kota**	**10**		**900.000.000**	**Jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI**	**Kab/Kota**	**10**		**1.448.521.000**
3.27.04.1.01.01	Pengendalian RIsiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	400.000.000	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, dan mahulu	750.948.000
3.27.04.1.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	300.000.000	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, dan mahulu	218.898.500
3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	200.000.000	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, dan mahulu	478.674.500
3.27.04.1.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**	**Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan**	**Checkpoint**	**3**		**1.350.000.000**	**Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan**	**Checkpoint**	**3**		**4.171.771.500**
3.27.04.1.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	150.000.000	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, dan mahulu	2.822.848.700
3.27.04.1.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	200.000.000	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, dan mahulu	662.773.100

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2023							Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**
3.27.04.1.02.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	1.000.000.000	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, dan mahulu	686.149.700
3.27.04.1.04	**Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner**	**Unit usaha**	**2**		**600.000.000**	**Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner**	**Unit usaha**	**2**		**524.664.000**
3.27.04.1.04.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Sertifikat	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	600.000.000	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Sertifikat	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, dan bru	524.664.000
3.27.04.1.05	**Kesejahteraan Hewan**	**Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan**	**Unit usaha**	**11**		**400.000.000**	**Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan**	**Unit usaha**	**11**		**707.593.800**
3.27.04.1.05.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannnya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Kasus	750	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	400.000.000	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Kasus	750	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, dan bru	707.593.800
3.27.06	**Program Perizinan Usaha Pertanian**	**Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha**	**%**	**75**		**1.200.000.000**	**Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha**	**%**	**75**		**753.162.100**
3.27.06.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan**	**Unit usaha**	**35**		**800.000.000**	**Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan**	**Unit usaha**	**35**		**544.416.000**
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	800.000.000	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, dan bru	544.416.000
3.27.06.1.03	**Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan**	**Jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan**	**Rekomendasi**	**2**		**400.000.000**	**Jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan**	**Rekomendasi**	**2**		**208.746.100**

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2023							Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**
3.27.06.1.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	300.000.000	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Laporan	2	bru, kkr, kbr, ktm, dan psr	114.646.100
3.27.06.1.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha pengecer obat hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	100.000.000	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, dan bru	94.100.000
3.27.07	**Program Penyuluhan Pertanian**	**Cakupan Binaan Kelompok Ternak**	**%**	**45**		**1.400.000.000**	**Cakupan Binaan Kelompok Ternak**	**%**	**45**		**1.085.402.700**
3.27.07.1.02	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah penyebaran informasi peternakan**	**Kali**	**12**		**800.000.000**	**Jumlah penyebaran informasi peternakan**	**Kali**	**12**		**545.837.000**
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis. Sosial. Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	4	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	800.000.000	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis. Sosial. Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	4	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, dan mahulu	545.837.000
3.27.07.1.03	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**Jumlah kelompok ternak yang teregistrasi**	**Kelompok**	**25**		**600.000.000**	**Jumlah kelompok ternak yang teregistrasi**	**Kelompok**	**25**		**539.565.700**
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	600.000.000	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, dan mahulu	539.565.700
02.00	**UPTD. PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK**					**5.220.000.000**	**UPTD. PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK**				**5.765.300.970**
3.27.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap urusan bidang peternakan**	**%**	**82**		**3.520.000.000**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap urusan bidang peternakan**	**%**	**82**		**4.313.986.300**
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**%**	**80**		**125.760.000**	**Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**%**	**80**		**128.700.000**
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	ppu	125.760.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	ppu	128.700.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2023							Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF
3.27.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**80**		**259.850.000**	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**80**		**60.511.700**
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	ppu	77.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	ppu	24.063.500
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	23	ppu	182.850.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	ppu	36.448.200
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**80**		**816.436.488**	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**80**		**578.430.800**
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	ppu	12.861.488	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	ppu	16.466.200
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	ppu	508.735.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	147	ppu	175.958.800
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	30	ppu	3.000.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	ppu	12.805.800
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	156	ppu	3.840.000	-	-	-	-	-
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	288.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	373.200.000
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**80**		**67.900.000**	**Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**80**		**10.928.000**

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2023							Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	ppu	67.900.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	ppu	10.928.000
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**80**		**1.534.984.732**	**Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**80**		**1.946.361.100**
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	ppu	18.267.788	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	ppu	2.502.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	ppu	126.338.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	ppu	100.657.580
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	ppu	1.390.378.944	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	ppu	1.843.201.520
3.27.01.1.09	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**80**		**715.068.780**	**Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**80**		**1.589.054.700**
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	ppu	12.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	ppu	11.757.500
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	ppu	139.798.780	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	56	ppu	275.313.700
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	ppu	563.270.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	ppu	1.301.983.500
3.27.02	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Angka Kelahiran Sapi**	**%**	**22**		**1.700.000.000**	**Angka Kelahiran Sapi**	**%**	**22**		**1.451.314.670**

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2023							Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**
3.27.02.1.03	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**	**Populasi ternak sapi bibit**	**Ekor**	**80**		**1.700.000.000**	**Populasi ternak sapi bibit**	**Ekor**	**80**		**1.451.314.670**
		Produksi HPT (Segar)	**Ton / Tahun**	**825**			**Produksi HPT (Segar)**	**Ton / Tahun**	**825**		
3.27.02.1.03.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	12	smd, ppu, luarProv	700.000.000	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	12	smd, ppu, luarProv	460.722.290
3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	12	smd, ppu, luarProv	1.000.000.000	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	12	smd, ppu, luarProv	990.592.380
02.00	**UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**					**6.701.390.120**	**UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**				**5.396.793.880**
3.27.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap urusan bidang peternakan**	**%**	**82**		**5.101.390.120**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap urusan bidang peternakan**	**%**	**82**		**2.245.545.020**
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**%**	**80**		**110.000.000**	**Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**%**	**80**		**114.840.000**
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	smd	110.000.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	smd	114.840.000
3.27.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**80**		**86.000.000**	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**80**		**12.844.500**
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	smd	20.000.000	-	-	-	-	-

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2023							Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	smd	66.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	smd	12.844.500
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**%**	**80**		**472.000.000**	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**%**	**80**		**383.200.600**
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	smd	7.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	smd	7.128.100
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	smd	40.000.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	23	smd	97.643.100
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	30	smd	25.000.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	smd	18.045.000
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	smd	5.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	smd	3.878.400
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	51	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	325.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	207.624.000
3.27.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	smd	70.000.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	smd	48.882.000
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**80**		**3.341.390.120**	**Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**80**		**559.412.000**

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2023							Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	smd	400.000.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	smd	360.942.000
3.27.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	smd	2.941.390.120	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor UPTD. LKK	Dokumen	1	smd	198.470.000
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor UPTD. LKK	Dokumen	1							
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**80**		**955.000.000**	**Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**80**		**1.047.541.220**
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	smd	25.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	smd	4.976.400
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	smd	180.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	smd	175.492.100
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	smd	750.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	smd	867.072.720
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**80**		**137.000.000**	**Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**80**		**127.706.700**
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	smd	7.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	smd	7.000.000
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	62	smd	130.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	55	smd	120.706.700

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2023							Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**
3.27.04	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular**	**%**	**70**		**1.600.000.000**	**Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular**	**%**	**70**		**3.151.248.860**
		Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	**%**	**14**			**Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)**	**%**	**14**		
3.27.04.1.03.	**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**Peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan**	**%**	**15**		**1.600.000.000**	**Peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan**	**%**	**15**		**3.151.248.860**
3.27.04.1.03.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit	4	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	800.000.000	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit	4	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	2.073.634.300
		Jumlah sertifikat hasil uji	262	Sertifikat							
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	105	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	800.000.000	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	105	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	1.077.614.560

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat khususnya peternak disampaikan ke Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan se-Kabupaten/Kota, yang langsung ditujukan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim melalui Rapat Konsultasi dan Koordinasi Teknis Daerah (Rakontekda) dan Musrenbang kabupaten/kota. Usulan-usulan tersebut diseleksi sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim. Selanjutnya usulan tersebut disampaikan pada Musrenbang Provinsi. Setelah mendapat pagu dana indikatif Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim tetap berkoordinasi dengan Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan se-Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan usulan tersebut.

Tabel 15 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentinagan Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	Pengembangan Kawasan Peternakan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengembangan Mini Ranch	8 Unit	
2	Pengembangan Kawasan Peternakan	Kabupaten Berau	Pengembangan Mini Ranch	2 Unit	
3	Pengembangan Kawasan Peternakan	Kabupaten Penajam Paser Utara	Pengembangan Mini Ranch	1 Unit	
4	Penyediaan Benih/Bibit Ternak sapi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengadaan Sapi	45 Ekor	
5	Penyediaan Benih/Bibit Ternak sapi	Kabupaten Berau	Pengadaan Sapi	28 Ekor	
6	Penyediaan Benih/Bibit Ternak sapi	Kabupaten Kutai Timur	Pengadaan Sapi	28 Ekor	
7	Penyediaan Hijauan Pakan Ternak	Kabupaten Kutai Barat	Pengadaan Bibit Hijauan Pakan Ternak	2 Ha	

8	Permohonan Bantuan Ternak Sapi (Kelompok Tani "Karya Mandiri").	Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Rekomendasi Berasal Dari Kantor Lurah, Kantor Camat, BPP. Kec. Tenggarong, Belum Ada Rekom PPL Setempat, Belum Ada Rekom Dinas Pertanian dan Peternakan Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota Namun Belum Memiliki Nomor Register
9	Permohonan Bantuan Ternak Sapi (Kelompok Tani "Pulau Sakkan").	Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Rekomendasi Berasal Dari Kepala Desa, Kantor Camat, UPT. Penyuluh Pertanian dan Peternakan Kec. Kenohan, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec. Kenohan, Belum Ada Rekom Dinas Pertanian dan Peternakan Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota
10	Permohonan Bantuan Ternak Sapi Bali dan Pembuatan Kandang Serta Penanaman HPT (Kelompok Tani "Kerukunan Keluarga Besar Makassar (KKBM)").	Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Rekomendasi Berasal Dari Kepala Desa, Kantor Camat, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec. Marangkayu, Belum Ada Rekom Dinas Pertanian dan Peternakan Kab/Kota, Terdaftar SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota Namun Belum Memiliki Nomor Register
11	Permohonan Bantuan Ternak Bebek dan Pakan (Kelompok Tani "Suka Maju")	Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Rekomendasi Berasal Dari Kantor Desa, Belum Ada Rekom PPL Setempat, Belum Ada Rekom Dinas Pertanian dan Peternakan Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota Namun Belum
12	Permohonan Bantuan Sapi Bali (Kelompok Tani "Sumber Rejeki II").	Kabupaten Kutai Timur	-	-	Rekomendasi Berasal Dari Kepala Desa, Ketua Rt, Kantor Camat, UPT. Puskeswan Kongbeng, UPT. P4 Kec. Kongbeng, Rekom PPL Setempat, Belum Ada Rekom Dinas Pertanian dan Peternakan Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota
13	Permohonan Bantuan Sapi Bali (Kelompok Tani "Karya Mukti").	Kabupaten Kutai Timur	-	-	Rekomendasi Berasal Dari Kepala Desa, Kantor Camat, UPT. P4 Kec. Kongbeng, Rekom PPL Setempat, Akta Notaris, Belum Ada Rekom Dinas Pertanian dan Peternakan Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota
14	Permohonan Bantuan Ternak Sapi (Kegiatan Desa Korporasi Sapi). Kelompok Tani "Mataram	Kabupaten Kutai Timur	-	-	Rekomendasi Berasal Dari Kepala Desa, Kantor Camat, UPT. P4 Kec. Muara Wahau, Akta Notaris, Belum Ada Rekom Dinas Pertanian dan Peternakan Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota
15	Permohonan Bantuan Ternak Sapi (Kegiatan Desa Korporasi Sapi). Kelompok Tani "Karya Baru"	Kabupaten Kutai Timur	-	-	Rekomendasi Berasal Dari Kepala Desa, Kantor Camat, UPT. P4 Kec. Muara Wahau, Akta Notaris, Belum Ada Rekom Dinas Pertanian dan Peternakan Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota
16	Permohonan Bantuan Ternak Sapi (Kegiatan Desa Korporasi Sapi). Kelompok Tani "Karya Bhakti Sejahtera"	Kabupaten Kutai Timur	-	-	Rekomendasi Berasal Dari Kepala Desa, Kantor Camat, UPT. P4 Kec. Muara Wahau, Rekom PPL Setempat, Akta Notaris, Belum Ada Rekom Dinas Pertanian dan Peternakan Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota
17	Permohonan Bantuan Ternak Sapi (Kegiatan Desa Korporasi Sapi). Kelompok Tani "Suka Maju"	Kabupaten Kutai Timur	-	-	Rekomendasi Berasal Dari Ketua Rt, Kepala Desa, Kantor Camat, UPT. P4 Kec. Muara Wahau, Rekom PPL Setempat, Akta Notaris, Belum Ada Rekom Dinas Pertanian dan Peternakan Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota

Tabel 16 Daftar Usulan Langsung (Aspirasi) Kabupaten/Kota Tahun 2023

NO	KODE USULAN	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Nama Kelompok	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal
1	62535f0158bb3	11-04-2022	BAPPEDA Kab. Kutai Barat	Bappeda Kab/Kota	Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Sapi	Bantuan Bibit Sapi dan Sarana Prasarana Peternakan	Radak Sangoking	Muara Tae, Kab. Kutai Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	Provinsi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	62535f91b87e4	11-04-2022	BAPPEDA Kab. Kutai Barat	Bappeda Kab/Kota	Pertanian	Pengadaan Sapi	Bantuan Ternak Sapi Bali	Puti Jaya	Kampung Engkuni Pasek, Kab. Kutai Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	Provinsi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	6253bbb5e09c2	11-04-2022	BAPPEDA Kab. Kutai Barat	Bappeda Kab/Kota	Pertanian	Pengadaan Sapi	Bantuan Ternak Sapi	Bina Warga	Jerang Melayu, Kab. Kutai Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	Provinsi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4	6253c7b76cb3b	11-04-2022	BAPPEDA Kab. Kutai Kartanegara	Bappeda Kab/Kota	Pertanian	Pengadaan Sapi	Dalam Rangka Mendukung swasembada daging (protein hewani),berbasis Pengembangan Berbasis Kawasan peternakan melalui integrasi sapi dan sawit,teknologi sumber daya genetik dan breeding (perbibitan) guna mendukung IKN.	KT. Pelita	Tenggarong Seberang (Desa Bukit Pariaman, desa kertabuana), Loa Janan (Desa Batuah, desa tani bakti), tenggarong desa loa tebu, samboja kelurahan wonotirto, kota bangun desa SP2, Loa kulu desa jonggon., Kab. Kutai Kartanegara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	Provinsi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5	6253c7e42145b	11-04-2022	BAPPEDA Kab. Kutai Kartanegara	Bappeda Kab/Kota	Pertanian	Pembangunan Miniranch	Dalam Rangka Mendukung swasembada daging (protein hewani),berbasis Pengembangan Berbasis Kawasan peternakan melalui integrasi sapi dan sawit,teknologi sumber daya genetik dan breeding (perbibitan) guna mendukung IKN.		Tenggarong Seberang (Desa Bukit Pariaman, desa kertabuana), Loa Janan (Desa Batuah, desa tani bakti), tenggarong desa loa tebu, samboja kelurahan wonotirto, kota bangun desa SP2, Loa kulu desa jonggon., Kab. Kutai Kartanegara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	Provinsi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	62553f24032d8	12-04-2022	BAPPEDA Kab. Berau	Bappeda Kab/Kota	Pertanian	Pengadaan Sapi	pengadaan sapi yg gagal di tahun 2021 (BANKEU)	Usaha bersama	Kamp.Melati Jaya, Labanan Jaya dan Limunjan, Kab. Berau	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	Provinsi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tabel 17 Daftar Usulan Pokok-Pokok Pikiran Tahun 2023

	No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal
1	RS6241fadfa53fb	29-03-2022	Herliana Yanti	PDI-P	Pertanian	Pengadaan Sapi	**Kelompok tani KARYA TAKA** sangat membutuhkan bantuan ternak sapi guna meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat	Desa Modang, Kab. Paser	Kuaro	Modang	25 ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	RS6242041377db9	29-03-2022	Herliana Yanti	PDI-P	Pertanian	Pengadaan Sapi	**Kelompok Tani BERKAH TIRTA MUTIARA** Sangat membutuhkan bantuan sapi untuk meninhgkatkan ekonomi masyraakat yang tergabung dalam kelompok tani kami adapun domisili kelompok tani kami di Desa Muara adang II Kec.Longkali	Jl.Poros Trans Rt.003, Kab. Paser	Long Kali	Muara Adang II	25 ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	RS62446c45257a3	30-03-2022	Salehuddin, S.Sos, S.Fil	Golkar	Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Sapi	Bibit Sapi belum tersedia untuk Bantuan **Kelompok Ternak Sapi Pepadaan Etam Maju** Desa Sebelimbingan	Jalan Mulawarman RT 01, Kab. Kutai Kartanegara	Kota Bangun	Sebelimbingan	30 ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4	RS624478578c75b	30-03-2022	Herliana Yanti	PDI-P	Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Sapi	**Kelompok tani KARYA MAJU I** yang berdomisili di desa makmur jaya saaat ini sangat membutuhkan bantuan bibit ternak sapi guna menambah dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani KARYA MAJU I	Jl.Sriwijaya Rt.12, Kab. Paser	Long Kali	Makmur Jaya	25 ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5	RS624e7170b977a	07-04-2022	Marthinus, S.T, M.Si	PDI-P	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Pengadaan Ternak Sapi Bali **Kelompok Tani Bumi Hijua**	Kampung Long Iram Kota, Kab. Kutai Barat	Long Iram	Long Iram Kota	25 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	RS624ee3fc8fb9c	07-04-2022	Salehuddin, S.Sos, S.Fil	Golkar	Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Sapi	Bantuan Bibit Ternak Kambing **Kelompok Ternak Mitra Usaha Sejahtera**	Jalan Bpp Handil II RT 11, Kab. Kutai Kartanegara	Samboja	Margomulyo	50 ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

	No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal
7	RS624f9e8c0f927	08-04-2022	Sukmawati	PAN	Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Sapi	**Kelompok Tani Ternak Suka Senang** Membutuhkan Bantuan Ternak Sapi	Dusun Sumber Makmur RT.03, Kab. Paser	Long Ikis	Krayan Jaya	31 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
8	RS624fa1b4e850f	08-04-2022	Sukmawati	PAN	Pertanian	Pengadaan Sapi	**Kelompok Tani Ternak Karya Bersama** Membutuhkan Bantuan Ternak Sapi	Dusun Sumber Makmur RT.03, Kab. Paser	Long Ikis	Krayan Jaya	31 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
9	RS624faf33bf621	08-04-2022	Sukmawati	PAN	Pertanian	Pengadaan Sapi	**Kelompok Ternak Taruna Muda** Desa Klempang Sari Membutuhkan Bantuan Ternak Sapi	Jalan Garuda RT.01, Kab. Paser	Kuaro	Klempang Sari	35 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
10	RS624fc8fbd2fc6	08-04-2022	Sukmawati	PAN	Pertanian	Pengadaan Sapi	**Kelompok Tani Anugrah** Desa Rangan Kecamatan Kuaro Membutuhkan Bantuan pengadaan Ternak Sapi	Jalan Jambu RT.07, Kab. Paser	Kuaro	Rangan	17 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
11	RS624fcbd09176d	08-04-2022	Sukmawati	PAN	Pertanian	Pengadaan Sapi	Kelompok Tani Daya V Desa Jemparing Membutuhkan Bantuan Ternak Sapi	Desa Jemparing RT.02, Kab. Paser	Seluruh Kecamatan	Jemparing	15 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
12	RS624fcd41b306b	08-04-2022	Sukmawati	PAN	Pertanian	Pengadaan Sapi	**Kelompok Tani Meto Bolum** Desa Jemparing Membutuhkan Bantuan Ternak Sapi Bali	Desa Jemparing RT.03, Kab. Paser	Long Ikis	Jemparing	16 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

	No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal
13	RS624ff6ef5f91e	08-04-2022	Sukmawati	PAN	Pertanian	Pengadaan Sapi	**Kelompok Tani Mekar Jaya** Membutuhkan bantuan ternak sapi bali untuk meningkatkan usaha peternakan dan kesejahteraan anggota kelompok peternak sapi	Desa Modang RT.06, Kab. Paser	Kuaro	Modang	24 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
14	RS6251bf92afa97	10-04-2022	Ismail , S.T	Dekorat-Nasdem	Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Sapi	Permohonan Bantuan Bibit Ternak Sapi **Kelompok Tani Bukit Cemangi**	Jalan Sendawar RT.05 Kampung Kajang, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Kab. Kutai Timur	Sangatta Selatan	Singa Geweh	10 ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
15	RS6251c93fb1033	10-04-2022	Ismail , S.T	Dekorat-Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan Sapi **Kelompok Tani Dan Ternak Warga Etam**	Jalan Bontang - Sangatta RT.08 NO.05 Desa Kandolo, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Kab. Kutai Timur	Teluk Pandan	Kandolo	30 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
16	RS6251cddc21210	10-04-2022	Ismail , S.T	Dekorat-Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan Ternak Sapi **Kelompok Tani Pammase**	Lonjok Gunung RT.007 Desa Long Bentuq, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur, Kab. Kutai Timur	Busang	Long Bentuq	10 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
17	RS6251d1478707d	10-04-2022	Ismail , S.T	Dekorat-Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan Pengadaan Ternak Sapi **Kelompok Tani Subur Jaya**	RT.003 Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Kab. Kutai Timur	Teluk Pandan	Martadinata	20 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
18	RS6251d266cee78	10-04-2022	Ismail , S.T	Dekorat-Nasdem	Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Sapi	Permohonan Bantuan Bibit Ternak **Kelompok Tani Ternak Rantau Jaya**	Kampung Melati Jaya, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kab. Berau	Gunung Tabur	Melati Jaya	10 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

	No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal
19	RS6253adb7b3518	11-04-2022	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	PAN	Pertanian	Pengadaan Sapi	**KELOMPOK TANI TERNAK MEKAR JAYA** mengajukan permohonan pengadaan ternak sapi bali untuk meningkatkan taraf hidup para peternak sapi.	Jl. Poros Samarinda - Bontang Rt. 03, Kab. Kutai Kartanegara	Marang Kayu	Prangat Selatan	18 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
20	RS6253aeb964963	11-04-2022	Ananda Emira Moeis, S.Sn	PDI-P	Pertanian	Pengadaan Sapi	PERMOHONAN BANTUAN TERNAK SAPI **KELOMPOK TANI SINAR MAJU**	DUSUN PRALENDA BLOK D DESA PADANG PENGRAPAT, Kab. Paser	Tanah Grogot	Padang Pengrapat	20 EKOR	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
21	RS6253ca1a5dad3	11-04-2022	M. Nasiruddin, S.H	PAN	Pertanian	Pengadaan Sapi	**Kelompok Tani Rimba Ayu** Sangatta Selatan, Permohonan Bantuan Sapi agar meningkatkan kesejahtraan petani	Desa sangatta selatan, Kab. Kutai Timur	Sangatta Selatan	Sangatta Selatan	30 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
22	RS6253cd4056c21	11-04-2022	H. Agus Aras	Dekorat-Nasdem	Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Sapi	permohonan bantuan bibit sapi **Kelompok Tani Ngudi Kamulyan**	Jl. Serda Suwito RT. 08 Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat, Kab. Kutai Timur	Long Mesangat	Tanah Abang	23 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
23	RS6253cf8b48b27	11-04-2022	H. Agus Aras	Dekorat-Nasdem	Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Sapi	permohonan bantuan bibit sapi **Kelompok Tani Serba Guna**	jalan poros km. 02 desa batu timbau batu ampar, Kab. Kutai Timur	Batu Ampar	Batu Timbau	23 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
24	RS6253d1d439c4e	11-04-2022	H. Agus Aras	Dekorat-Nasdem	Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Sapi	permohonan bantuan ternak sapi **Kelompok Tani Sumber Rezeki**	jl. melati rt. 05 desa sika makmur kec. long mesangat, Kab. Kutai Timur	Long Mesangat	Sika Makmur	30 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

	No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal
25	RS6253d5c458ed0	11-04-2022	H. Agus Aras	Dekorat-Nasdem	Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Sapi	sulitnya pendapatan bibit sapi, dikarenakan populasi ternak sapi di desa long pejeng masih sangat kurang dan tingkat kesejahteraan petani masih rendah sehingga menyulitkan petani membeli bibit secara swadaya **Kelompok Tani Sa-Tawal I**	jl. haleluya rt. 02 desa long pejeng kec. busang, Kab. Kutai Timur	Busang	Long Pejeng	23 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
26	RS6253d85922d8e	11-04-2022	H. Agus Aras	Dekorat-Nasdem	Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Sapi	sulitnya mendapatkan bibit sapi, dikarenakan populasi ternak sapi di desa sika makmur maish sangat kurang dan tingkat kesejahteraan petani masih rendah sehingga sulit untuk memebeli bibit secara swadaya **Kelompok Tani Tunas Baru**	jl. kenanga rt. 06 desa sika makmur kec. long mesangat, Kab. Kutai Timur	Long Mesangat	Sika Makmur	25 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
27	RS625454c91e86c	11-04-2022	Ismail , S.T	Dekorat-Nasdem	Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Sapi	Permohonan Bantuan Bibit Unggul Sapi Bali **KELOMPOK TANI GELUMBANG BERSAMA**	Jln. Jaya Muda RT.005 Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Kab. Kutai Timur	Muara Bengkal	Benua Baru	23 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
28	RS6255122dc0115	12-04-2022	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	PAN	Pertanian	Pengadaan Sapi	**KELOMPOK PEMUDA TANI SINAR JAYA** mengajukan permohonan ternak sapi untuk memenuhi kebutuhan akan daging sapi	Jl. RA. Kartini RT. 011, Kab. Kutai Kartanegara	Muara Badak	Gas Alam Badak I	25 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
29	RS6255ac1cbbe5f	12-04-2022	Ismail , S.T	Dekorat-Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohona Bantuan Sapi **KELOMPOK TANI SIDOMUNCUL**	Jl. Poros Bengalon M. Wahau KM.115 RT.05, Kab. Kutai Timur	Bengalon	Tepian Langsat	10 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
30	RS625628Sc64f35	13-04-2022	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Gerindra	Pertanian	Pengadaan Sapi	belum maksimal nya pasokkan daging sapi **Kelompok Tani Agro Lestari**	jalan rukun sari RT 03, Kab. Kutai Kartanegara	Samboja	Beringin Agung	26 ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

	No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal
31	RS6256592752b87	13-04-2022	Baharuddin Dommu, S.Pi, M.Si	PAN	Pertanian	Pengadaan Sapi	**KELOMPOK PETERNAK SAPI POTONG TERNAK JAYA** mengajukan permohonan ternak sapi untuk meningkatkan ketersediaan daging sapi oleh masyarakat.	Jln. Salo Manis RT. 17, Kab. Kutai Kartanegara	Marang Kayu	Sebuntal	50 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
32	RS6256d9cd11137	13-04-2022	Muhammad Samsun, S.E. M,Si	PDI-P	Pertanian	Pengadaan Sapi	Banyaknya Lahan Non Produktif Yang Tidak Berdampak Pada Ekonomi Peternak Sapi Pada **Kelompok Tani Bakula Mandiri** Kelurahan Kampung Lama Samboja	Jl Balikpapan Handil II RT.04, Kab. Kutai Kartanegara	Samboja	Kampung Lama	50 EKOR	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
33	RS6256d9ea90cd1	13-04-2022	Ismail , S.T	Dekorat-Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan TERNAK SAPI BRAHMAN CROSS **KELOMPOK TANI SUMBER REZEKI**	Jl. Balikpapan RT 07, Kab. Kutai Timur	Muara Wahau	Karya Bhakti	50 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
34	RS6256dabe17593	13-04-2022	Ismail , S.T	Dekorat-Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan Sapi Brahman Cross **KELOMPOK TANI BUNGA CEMPEDAK**	Jalan Cempedak RT 017 / 004, Kab. Kutai Timur	Kombeng	Sukamaju	50 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
35	RS6256db89b02fb	13-04-2022	Ismail , S.T	Dekorat-Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan BAntuan Sapi BrahmanCross **KELOMPOK TANI SUMBER REJEKI II**	Jalan Belimbing RT 005 / 003, Kab. Kutai Timur	Kombeng	Sukamaju	50 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
36	RS6256dc41b9a7e	13-04-2022	Ismail , S.T	Dekorat-Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan Sapi Brahman Cross **KELOMPOK TANI SEKAR MAS**	Jalan Barito, Kab. Kutai Timur	Kombeng	Sidomulyo	50 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
37	RS6256ddad07dee	13/04/2022	Ismail , S.T	Dekorat-Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan Ternak Sapi **KELOMPOK TANI KARYA BARU**	Desa Muara Wahau, Kab. Kutai Timur	Muara Wahau	Muara Wahau	50 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
38	RS6256de5660e9d	13-04-2022	Ismail , S.T	Dekorat-Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan TERNAK SAPI BRAHMAN CROSS **KELOMPOK TANI MATARAM**	Jl. Puyuh RT.10, Kab. Kutai Timur	Muara Wahau	Wahau Baru	50 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
39	RS6256dee54194S	13-04-2022	Ismail , S.T	Dekorat-Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan Sapi Brahman Cross **KELOMPOK TANI TANI MUKTI**	JAlan Citandui, Kab. Kutai Timur	Kombeng	Sidomulyo	50 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

	No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal
40	RS6256df7f3c43a	13-04-2022	Ismail , S.T	Dekorat-Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan Ternak Sapi **KELOMPOK TANI SUMBER TANI MULYA**	Jl. Poros Sangatta - Ma. Bengkal KM 67, Kab. Kutai Timur	Bengalon	Tepian Baru	50 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
41	RS6256e03239ff3	13-04-2022	Ismail , S.T	Dekorat-Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan Pengadaan Ternak Sapi **KELOMPOK TANI SUMBER REJEKI**	Desa Kebon Agung, Kab. Kutai Timur	Rantau Pulung	Kebon Agung	60 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
42	RS6256e0f714b09	13-04-2022	Ismail , S.T	Dekorat-Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan Ternak Unggul Sapi Limousin/Simental, Brahman Cross **KELOMPOK TANI ETAM JUA MANDIRI**	Jl. Pertamina KM.04 RT.01, Kab. Kutai Timur	Sangatta Selatan	Sangatta Selatan	10 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
43	RS6256e2256589e	13-04-2022	Ismail , S.T	Dekorat-Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan TERNAK SAPI BRAHMAN CROSS **KELOMPOK TANI HARAPAN JAYA**	Jl. Cenderawasih RT.12, Kab. Kutai Timur	Muara Wahau	Wahau Baru	50 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
44	RS6256e2cc0fa3e	13-04-2022	Ismail , S.T	Dekorat-Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan TERNAK SAPI BRAHMAN CROSS **KELOMPOK TANI SASAK TULEN**	Jl. Kakap RT.02, Kab. Kutai Timur	Muara Wahau	Wanasari	50 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
45	RS6253cb4a2c560	11-04-2022	M. Nasiruddin , S.H	PAN	Pertanian	Pengadaan Sapi	**Kelompok tani barokah** , permohonan bantuan sapi untuk meningkatkan kesejahteraan petani	Kelurahan singah geweh, Kab. Kutai Timur	Sangatta Selatan	Singa Geweh	30 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mencermati Rencana Kerja Pemerintah 2023, dengan tema **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan",** maka untuk mendukung pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 tersebut maka Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan operasional yang meliputi program prioritas nasional yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan yang dituangkan dalam empat program yaitu:

- Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- Program Nilai Tambah Daya Saing Industri
- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- Program Dukungan Manajemen

Berdasarkan Empat program tersebut diatas yang terkait dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yaitu:

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
   Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas bertujuan untuk memenuhi produksi daging secara nasional. Target produksi daging sapi/kerbau pada tahun 2023 sebesar 465,15 ribu ton yang merupakan penyediaan protein hewani.
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
   Program nilai tambah dan daya saing industri bertujuan untuk meningkatkan produk ekspor seperti hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk non pangan, obat hewan, serta bibit dan benih. Target produksi ekspor tahun 2023 sebesar 376, 052 Ton

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan bagian dari pembangunan pertanian oleh karena itu kebijakan pembangunan pertanian dapat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Tema Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah ***"Peningkatan Produktivitas Guna Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat"*** Mengacu pada kebijakan Pembangunan Pertanian Nasional

serta Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur maka dapat disampaikan pokok-pokok pikiran Renja 2023 sebagai berikut:

1. Tema pembangunan peternakan 2023 adalah “Sinergitas Perangkat Daerah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Asal Ternak dan Kesejahteraan Masyarakat Untuk Kalimantan Timur Berdaulat**”.**
2. Kebijakan operasional dengan berpedoman pada program pembangunan yang telah ditetapkan meliputi:
   a) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan didukung enam kegiatan yaitu pengawasan peredaran sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik (sdg) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan provinsi, peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi, pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan kewenangan provinsi, pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor dan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain.
   b) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dengan kegiatan penataan prasarana pertanian didukung sub kegiatan perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian
   c) Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan didukung kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi, penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan, sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan
   d) Program perizinan usaha pertanian dengan didukung dua kegiatan yaitu penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota dan penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan
   e) Program penyuluhan pertanian dengan didukung dua kegiatan yaitu pengembangan penerapan penyuluhan pertanian dan

pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan

f) Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi dengan didukung tujuh kegiatan yaitu perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam pelaksanaan misi. Dalam periode 2019–2023 Rencana Kinerja Tahun 2023 yang akan datang akan diarahkan pada pencapaian tujuan sebagai berikut:

- Meningkatkan Kontribusi Subsektor Peternakan terhadap Ekonomi Daerah

Indikatornya meliputi:

Kontribusi lapangan usaha subsektor peternakan terhadap PDRB (%)

Tabel 18 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
A.	Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha subsektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,37

3.2.2 Sasaran Renja

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka peningkatan produksi pangan asal hewan khususnya daging maka sasaran tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya produksi pangan asal ternak

Indikatornya meliputi :

- ***Produksi Daging (Ton)***
- ***Produksi Telur (Ton)***

(2) Meningkatnya kesejahteraan peternak

Indikatornya meliputi :

- ***Nilai Tukar Peternak (NTP)***

Tabel 19 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
A.	Meningkatnya pendapatan peternak	Nilai Tukar Peternak (NTP)	104
B.	Meningkatnya produksi pangan asal ternak	Produksi (Ton): - Daging - Telur	 76.235,08 14.433,04

3.3 Pogram dan kegiatan

3.3.1 Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur adalah pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dituangkan ke dalam Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 Visi:

Pasangan Dr. Ir. H. Israan Noor, M.Si dan H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode

2019-2023 memiliki tekad, komitmen dan keberanian untuk mewujudkan Kalimantan Timur yang berdaulat, dengan merumuskan **Visi yaitu**:

"**Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat**"

Penjabaran dari visi dimaksud bahwa Pemerintahan Kalimantan Timur harus memiliki kemantapan, kemandirian dan daya saing untuk mengatur dan mengelola sumber daya daerahnya secara otonom untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan rakyat. BERDAULAT memilik arti berbahagia, bertuah menurut kamus besar Bahasa Indonesia. BERDAULAT dapat memiliki arti berhak, otonom, swapraja, berkuasa menurut thesaurus on-line. Selain makna/arti yang positif atas kata BERDAULAT, menyatakan kondisi/keadaan akhir pembangunan yang digambarkan oleh gabungan sifat tujuan pembangunan yang meliputi **Berdikari, SejahtERa, DAmai, unggUL, dan kuAT.**

MISI :

Untuk mewujudkan visi "Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat" maka dirumuskan misi sebagai berikut:

Misi Pertama:

Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia.

Misi Kedua:

Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Misi Ketiga:

Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan

Misi Keempat:

Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Misi Kelima:

Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan public

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini ditunjukkan melalui:

Misi 2 yaitu: Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Pada misi ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur berperan dalam

Terwujudnya Pengembangan Mini Ranch untuk kesejahteraan peternak yang berdaulat.

3.3.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembangunan peternakan selama 5 tahun ke depan yang disesuikan dengan urusan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur diimplementasikan ke dalam 6 (enam) kelompok program, yaitu program yang menunjang penyelenggaraan pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan dan program utama yang mendukung penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian

Adapun program pembangunan Peternakan dan Kesehatan yang mendukung sasaran I Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Meningkatnya pendapatan peternak adalah program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Sedangkan program yang mendukung sasaran II Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Meningkatnya produksi pangan asal ternak adalah program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, program perizinan usaha pertanian, dan program penyuluhan pertanian.

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan

kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023. Kegiatan-kegiatan penunjang dan pembangunan peternakan pada tahun 2023 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
    a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
        - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
        - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
        - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
        - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
        - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    d Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
        - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
        - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
        - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
        - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
        - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
    e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan:
        - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
        - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
        - Pengadaan Gedung Knator atau Bangunan Lainnya

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

a. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian meliputi sub kegiatan:
   - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pertanian
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi meliputi sub kegiatan:
   - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
   - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme

c. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi, meliputi sub kegiatan:
   - Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
   - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

- Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

d. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi, meliputi sub kegiatan:
   - Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
   - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, PakanPengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak

e. Kegiatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor meliputi sub kegiatan:
   - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
   - Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan

f. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, meliputi sub kegiatan:
   - Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
   a. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
      - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
   a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, meliputi sub kegiatan:
      - Pengendalian RIsiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
      - Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
      - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular

b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi, meliputi sub kegiatan:
   - Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
   - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
   - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi

c. Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan, meliputi sub kegiatan:
   - Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
   - Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner

d. Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, meliputi sub kegiatan:
   - Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan

e. Kegiatan Kesejahteraan Hewan, meliputi sub kegiatan:
   - Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannnya

5. Program Perizinan Usaha Pertanian
   a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan:
      - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
   b. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan, meliputi sub kegiatan:
      - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
      - Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha pengecer obat hewan
6. Program Penyuluhan Pertanian
   a. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, meliputi kegiatan:
      - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
   b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, meliputi sub kegiatan:
      - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani

Kegiatan yang tercakup dalam program di atas merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan administrasi dan pembangunan, yang harus dijabarkan menjadi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dengan memperhatikan isu-isu strategis dari perubahan lingkungan strategis, masalah, tantangan dan peluang yang dapat mempengaruhi pembangunan dan arah pembangunan peternakan dan kesehatan hewan serta pengembangannya.

Adapun total anggaran yang diusulkan melalui Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 66.902.514.068,- (Enam Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah).

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pelaksanaan kebijakan dan alokasi PERUBAHAN anggaran belanja daerah dalam APBD tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2023, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2023, serta kesepakatan Pemerintah dan DPRD dalam seluruh pembahasan APBD 2023. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih tearah.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyususnan Perubahan RKPD, serta merupakan rangkaian kegiatan penyusunan Perubahan APBD. Adapun rumusan perubahan rencana kerja dan pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan perangkat daerah tahun 2023 pada table 20.

Tabel 20 Perubahan Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Dan Pendanaan Tahun 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2024							PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF
02	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**					**66.902.514.068**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**				**61.861.496.000**
02.00	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**					**55.740.419.218**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**				**49.224.290.000**
3.27.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan**	**%**	**82**		**28.697.078.523**	**Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan**	**%**	**82**		**29.003.166.000**
3.27.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja**	**Nilai**	**79,30**		**1.774.428.900**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja**	**Nilai**	**79,30**		**1.790.800.000**
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	smd, bpn	882.999.900	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	smd	1.100.000.000
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu	891.429.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu	690.800.000
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**%**	**80**		**16.847.830.223**	**Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**%**	**80**		**19.124.950.000**
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	83	smd dan ppu	16.008.420.623	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	83	smd dan ppu	18.214.073.000
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	smd	627.800.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	smd	682.572.000
3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	smd	211.609.600	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	smd	228.305.000
3.27.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**%**	**80**		**556.891.100**	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**%**	**80**		**461.366.000**
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	smd	175.255.600	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	smd	207.592.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2024							PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024				
KODE	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	smd dan luarProv	381.635.500	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	18	smd dan luarProv	253.774.000
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**%**	**80**		**2.527.480.400**	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**%**	**80**		**2.004.545.000**
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	smd	23.465.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	smd	25.812.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	135	smd	1.040.947.500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	smd	554.177.000
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	smd	162.319.500	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	35	smd	149.832.000
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3840	smd	27.148.800	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3840	smd	19.008.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	1.273.599.600	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	170	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	1.255.716.000
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**80**		**897.090.000**	**Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**80**		**1.023.434.000**
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	smd	897.090.000	Jumlah pengadaan roda-2 operasional	Unit	4	smd	1.023.434.000
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**80**		**4.591.942.060**	**Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**80**		**3.561.304.000**
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	smd	22.620.100	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	smd	120.334.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	smd	410.984.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Unit	12	smd	386.722.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2024							PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024				
KODE	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	smd	4.158.337.760	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	smd	3.054.248.000
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**80**		**1.501.415.840**	**Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**80**		**1.036.767.000**
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	63	smd	45.500.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	63	smd	45.650.000
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	199	smd	510.824.800	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	88	smd	396.077.000
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	7	smd	945.091.040	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	smd	595.040.000
3.27.02	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Angka Kelahiran Sapi**	**%**	**22**		**13.042.871.695**	**Angka Kelahiran Sapi**	**%**	**22**		**8.309.224.000**
3.27.02.1.01	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan**	**unit usaha**	**76**		**1.601.789.140**	**Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan**	**unit usaha**	**76**		**1.470.100.000**
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk. Pestisida. Alsintan. dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, dan bru	537.680.240	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk. Pestisida. Alsintan.dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	600.000.000
3.27.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, dan bru	1.064.108.900	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	870.100.000
3.27.02.1.04	**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Calving Interval**	**Bulan**	**16,5**		**2.628.917.200**	**Calving Interval**	**Bulan**	**16,5**		**2.413.024.000**

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2024							PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024				
KODE	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**
3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	bru, kkr, kbr, psr, dan ppu	1.088.679.500	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	1.215.500.000
3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, dan bru	1.004.721.500	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	860.024.000
3.27.02.1.04.03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Orang	20	bpn dan smd	535.516.200	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Orang	20	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	337.500.000
3.27.02.1.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu**	**sampel**	**40**		**573.592.000**	**Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu**	**sampel**	**40**		**463.100.000**
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, dan mahulu	349.000.000	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	197.450.000
3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT. Bahan Pakan.Pakan yang Beredar	Ton	100.000	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, dan mahulu	224.592.000	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	Ton	100000	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	265.650.000
3.27.02.1.06	**Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor**	**Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu**	**Sampel**	**13**		**681.241.555**	**Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu**	**Sampel**	**13**		**605.000.000**

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2024							PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024				
KODE	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**
3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, dan mahulu	387.679.600	Jumlah Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	495.000.000
3.27.02.1.06.02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	Kasus	165	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, dan mahulu	293.561.955	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	Kasus	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	110.000.000
3.27.02.1.07	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**	**Jumlah kelompok penerima ternak**	**Kelompok**	**43**		**7.557.331.800**	**Jumlah kelompok penerima ternak**	**Kelompok**	**10**		**3.358.000.000**
3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	1536	bru, kkr,knr, ktm, psr dan mahulu	7.557.331.800	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	200	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	3.358.000.000
3.27.03	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Miniranch yang teregister**	**Unit**	**30**		**5.309.353.900**	**Jumlah Miniranch yang teregister**	**Unit**	**30**		**5.610.000.000**
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**Jumlah miniranch sapi potong**	**Unit**	**30**		**5.309.353.900**	**Jumlah miniranch sapi potong**	**Unit**	**30**		**5.610.000.000**
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, dan mahulu	5.309.353.900	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	5.610.000.000
3.27.04	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular**	**%**	**70**		**6.852.550.300**	**Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular**	**%**	**70**		**3.687.200.000**
		Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	**%**	**14**			**Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)**	**%**	**14**		

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2024							PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024				
KODE	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**
3.27.04.1.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI**	**Kab/Kota**	**10**		**1.448.521.000**	**Jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI**	**Kab/Kota**	**10**		**990.100.000**
3.27.04.1.01.01	Pengendalian RIsiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, dan mahulu	750.948.000	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	685.600.000
3.27.04.1.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, dan mahulu	218.898.500	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	226.900.000
3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, dan mahulu	478.674.500	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	77.600.000
3.27.04.1.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**	**Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan**	**Checkpoint**	**3**		**4.171.771.500**	**Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan**	**Checkpoint**	**3**		**1.367.300.000**
3.27.04.1.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, dan mahulu	2.822.848.700	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	165.000.000
3.27.04.1.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, dan mahulu	662.773.100	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	220.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2024							PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024				
KODE	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**
3.27.04.1.02.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, dan mahulu	686.149.700	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	982.300.000
3.27.04.1.04	**Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner**	**Unit usaha**	**2**		**524.664.000**	**Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner**	**Unit usaha**	**2**		**633.200.000**
3.27.04.1.04.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Sertifikat	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, dan bru	524.664.000	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Sertifikat	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	633.200.000
3.27.04.1.05	**Kesejahteraan Hewan**	**Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan**	**Unit usaha**	**11**		**707.593.800**	**Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan**	**Unit usaha**	**11**		**696.600.000**
3.27.04.1.05.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannnya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Kasus	750	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, dan bru	707.593.800	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Kasus	10	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	696.600.000
3.27.06	**Program Perizinan Usaha Pertanian**	**Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha**	**%**	**75**		**753.162.100**	**Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha**	**%**	**75**		**1.346.400.000**
3.27.06.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan**	**Unit usaha**	**35**		**544.416.000**	**Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan**	**Unit usaha**	**35**		**961.400.000**
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, dan bru	544.416.000	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	961.400.000
3.27.06.1.03	**Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan**	**Jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan**	**Rekomendasi**	**2**		**208.746.100**	**Jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan**	**Rekomendasi**	**2**		**385.000.000**
3.27.06.1.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Laporan	2	bru, kkr, kbr, ktm, dan psr	114.646.100	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	110.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2024							PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024				
KODE	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**
3.27.06.1.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha pengecer obat hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, dan bru	94.100.000	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	275.000.000
3.27.07	**Program Penyuluhan Pertanian**	**Cakupan Binaan Kelompok Ternak**	**%**	**45**		**1.085.402.700**	**Cakupan Binaan Kelompok Ternak**	**%**	**45**		**1.268.300.000**
3.27.07.1.02	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah penyebaran informasi peternakan**	**Kali**	**12**		**545.837.000**	**Jumlah penyebaran informasi peternakan**	**Kali**	**12**		**660.000.000**
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis. Sosial. Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	4	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, dan mahulu	545.837.000	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis. Sosial. Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	4	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	660.000.000
3.27.07.1.03	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**Jumlah kelompok ternak yang teregistrasi**	**Kelompok**	**25**		**539.565.700**	**Jumlah kelompok ternak yang teregistrasi**	**Kelompok**	**25**		**608.300.000**
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, dan mahulu	539.565.700	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	608.300.000
02.00	**UPTD. PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK**					**5.765.300.970**	**UPTD. PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK**				**5.619.786.000**
3.27.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap urusan bidang peternakan**	**%**	**82**		**4.313.986.300**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap urusan bidang peternakan**	**%**	**82**		**3.897.786.000**
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**%**	**80**		**128.700.000**	**Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**%**	**80**		**127.000.000**
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	ppu	128.700.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	ppu	127.000.000
3.27.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**80**		**60.511.700**	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**80**		**84.000.000**
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	ppu	24.063.500	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	ppu	25.000.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	ppu	36.448.200	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	23	ppu	59.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2024							PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**80**		**578.430.800**	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**80**		**430.000.000**
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	12	ppu	16.466.200	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	ppu	22.000.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	147	ppu	175.958.800	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	ppu	12.000.000
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	ppu	12.805.800	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	30	ppu	12.000.000
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	156	ppu	7.000.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	373.200.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	377.000.000
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**80**		**10.928.000**	**Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**80**		**44.000.000**
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	ppu	10.928.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	ppu	44.000.000
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**80**		**1.946.361.100**	**Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**80**		**1.844.786.000**
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	ppu	2.502.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	ppu	31.383.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	ppu	100.657.580	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	ppu	107.744.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	ppu	1.843.201.520	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	ppu	1.705.659.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2024							PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024				
KODE	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**
3.27.01.1.09	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**80**		**1.589.054.700**	**Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**80**		**1.368.000.000**
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	ppu	11.757.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	ppu	14.000.000
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	56	ppu	275.313.700	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	ppu	154.000.000
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	ppu	1.301.983.500	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	ppu	1.200.000.000
3.27.02	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Angka Kelahiran Sapi**	**%**	**22**		**1.451.314.670**	**Angka Kelahiran Sapi**	**%**	**22**		**1.722.000.000**
3.27.02.1.03	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**	**Populasi ternak sapi bibit**	**Ekor**	**80**		**1.451.314.670**	**Populasi ternak sapi bibit**	**Ekor**	**80**		**1.722.000.000**
		Produksi HPT (Segar)	**Ton / Tahun**	**825**			**Produksi HPT (Segar)**	**Ton / Tahun**	**825**		
3.27.02.1.03.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	12	smd, ppu, luarProv	460.722.290	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	12	smd, ppu, luarProv	708.000.000
3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	12	smd, ppu, luarProv	990.592.380	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	12	smd, ppu, luarProv	1.014.000.000
02.00	**UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**					**5.396.793.880**	**UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**				**7.017.420.000**
3.27.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap urusan bidang peternakan**	**%**	**82**		**2.245.545.020**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap urusan bidang peternakan**	**%**	**82**		**5.400.420.000**
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**%**	**80**		**114.840.000**	**Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**%**	**80**		**147.000.000**

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2024							PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024				
KODE	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	smd	114.840.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	smd	147.000.000
3.27.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**80**		**12.844.500**	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**80**		**33.220.000**
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	smd	22.000.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	smd	12.844.500	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	smd	11.220.000
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**%**	**80**		**383.200.600**	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**%**	**80**		**384.600.000**
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	smd	7.128.100	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	smd	4.100.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	23	smd	97.643.100	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	smd	71.000.000
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	smd	18.045.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	30	smd	17.400.000
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	smd	3.878.400	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	smd	4.300.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	207.624.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	51	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	224.000.000
3.27.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	smd	48.882.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	smd	63.800.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2024							PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024				
KODE	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**80**		**559.412.000**	**Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**80**		**3.731.800.000**
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	smd	360.942.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	smd	431.800.000
3.27.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor UPTD. LKK	Dokumen	1	smd	198.470.000	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	smd	3.300.000.000
							Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor UPTD. LKK	Dokumen	1		
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**80**		**1.047.541.220**	**Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**80**		**985.100.000**
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	smd	4.976.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	smd	25.400.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	smd	175.492.100	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	smd	177.600.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	smd	867.072.720	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	smd	782.100.000
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**80**		**127.706.700**	**Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**80**		**118.700.000**
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	smd	7.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	smd	7.700.000
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	55	smd	120.706.700	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	62	smd	111.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2024							PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024				
KODE	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**PAGU INDIKATIF**
3.27.04	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular**	**%**	**70**		**3.151.248.860**	**Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular**	**%**	**70**		**1.617.000.000**
		Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	**%**	**14**			**Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)**	**%**	**14**		
3.27.04.1.03.	**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**Peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan**	**%**	**15**		**3.151.248.860**	**Peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan**	**%**	**15**		**1.617.000.000**
3.27.04.1.03.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit	4	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	2.073.634.300	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit	4	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	810.700.000
-							Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	105	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	806.300.000
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	105	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	1.077.614.560	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	105	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	1.077.614.560

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program, kegiatan, serta sub kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Perubahan Rencana Kerja juga berfungsi untuk memperhatikan kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, sebagai upaya mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, pelaksaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Perubahan Rencana Kerja. Kemudian Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dapat dipedomani dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, Agustus 2023

Kepala,

Fahmi Himawan, S.T., M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19741216 200604 1 006

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah (PD), yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 khususnya pasal 343 yang memberi ruang untuk Perangkat Daerah melakukan perubahan Rencana Kerja (Renja) sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk itu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merasa perlu untuk melakukan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dengan pertimbangan terdapat Pergeseran anggaran serta penambahan anggaran yang disebabkan oleh adanya anggaran sumber dana FCPF-CF dan Silpa DBH SDA DR serta penetapan pagu definitif pada DPA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 belum sesuai dengan pagu pada dokumen Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2023. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tetap mempedomani RKPD Perubahan dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Triwulan II tahun 2022.

Rancangan perubahan Rencana Kerja 2022 mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara Subtansial merupakan penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023.

3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2023.

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain adalah :

1. Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun sebelumnya dan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
2. Program yang tercantum dalam Dokumen Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagai mana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dalam program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum mendatang.
4. Program dan kegiatan dalam Dokumen Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur umumnya dan kehutanan pada khususnya.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah .
6. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah Terkait DAK TA. 2022, DBH DR TA. 2022, DBH CHT TA. 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 Tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
9. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 0007.2.4/12994/Bapp-II Tentang Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 yang telah dilakukan penyesuaian, dan perencanaan

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Tujuan disusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengsinkronisasikan agenda dan program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2023 dengan kebutuhan SKPD Provinsi Kalimantan Timur.
2. Menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan yang terdapat di Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023.
3. Penyesuaian rencana kerja terhadap aturan terkait DBH SDA DR dan FCPF-CF yang berlaku.
4. Penyesuaian target rencana kerja terhadap perubahan pagu anggaran hasil pergeseran.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I **PENDAHULUAN** berisikan penjelasan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, sehingga subtansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023** berisikan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II.

BAB III **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH** berisikan uraian rencana kerja perangkat daerah yang tertuang dalam program dan kegiatan serta rencana pendaanaannya.

BAB IV **PENUTUP** berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana berikut, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan melaksanakan 5 Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Hutan
3. Program Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistem
4. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
5. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Total anggaran yang dikelola sesuai Rencana Kerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 432.031.495.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan anggaran dana sebesar Rp. 557.731.625.687,- (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) terdiri dari APBD Murni sebesar Rp. 234.607.000.565,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dan anggaran DBH SDA DR sejumlah Rp. 323.124.625.122,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah), penambahan anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah berasal dari POKIR sebesar Rp. 3.475.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Puluh Juta Rupiah).

Pada tahun 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dapat melaksanakan program dan kegiatan yang sumber dana dari DBH SDA DR dimulai dari awal tahun 2023, berbeda dari tahun 2022 dan tahun sebelumnya dimana anggaran DBH SDA DR tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal disebabkan oleh waktu pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan pada bulan September akibat dari

menunggu proses pergeseran anggaran mendahului perubahan akibat dari penyesuaian nomenklatur dari aturan yang mengatur penggunaan DBH SDA DR. Sementara di tahun 2023 tidak terjadi perubahan aturan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang sumber dana DBH SDA DR sehingga pelaksanaan kegiatan dilakukan sejak awal tahun.

Pada bulan April 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menerima dana dari Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) yang penggunaannya diarahkan pada kegiatan yang mendukung penurunan emisi karbon seperti Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat yang mengelola kawasan hutan melalui perhutanan sosial. Anggaran yang di terima Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp. 35.742.543.571,- (Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dan silpa DBH SDA DR sebesar Rp. 25.002.800.392,- (Dua Puluh Lima Milyar Dua Juta Delapan Ratus Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) sehingga total penambahan pagu pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp. 60.745.343.963,- (Enam Puluh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), sehingga total pagu menjadi Rp. 618.476.969.650,- (Enam Ratus Delapan Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merencanakan sebanyak 4 Program Teknis dan 1 Program Penunjang (kesekretariatan) total 5 Program dan didukung oleh 20 Kegiatan. Dari Program / Kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah terlaksana dengan prosentase hasil capaian realisasi anggaran sebesar 32,33%. Dari Pagu sebesar Rp. 593.474.169.258,- sudah direalisasikan sebesar Rp. 191.928.077.384,-

Dari hasil realisasi tergambar bahwa capaian realisasi Dinas Kehutanan menjadi tidak maksimal diantaranya adalah karena waktu pelaksanaan kegiatan ataupun pengadaan menjadi terbatas terlebih yang bersifat lelang dan bersumber anggaran DBH SDA DR karena perlu dilakukan pergeseran anggaran.

Evaluasi terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur serta UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana disampaikan dibawah ini.

Nama Program	Indikator	Target Kinerja	Satuan	Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja %	Anggaran %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84	%	279.762.240.433	38,55	97.062.383.878	46	35
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5.050.000	M3	234.779.130.222	2.170.290	70.418.055.122	43	30
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730	Ton		303		41	
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1	%	12.999.911.900	0,50	3.777.036.882	50	29
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000	Ha	62.354.611.703	1.083	19.776.153.525	3	32
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	14	%	3.578.275.000	8,90	894.447.977	64	25

Tabel 2.1. Target dan Realisasi Program

Tingkat capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator kinerja adalah Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan dengan target 84% sudah terealisasi dengan hasil 46% secara rata2 Dinas dan UPTD. Perolehan Skor didapatkan dari pengisian kuesioner yang diisi secara online dan offline oleh masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur atau melalui scan QR Code yang tersedia di kantor Dinas Kehutanan yang bisa diakses setelah selesai mendapatkan pelayanan. Kuesioner yang diisikan mengandung 9 unsur pelayanan yaitu Persyaratan; Sistem, Mekanisme dan Prosedur; Waktu Penyelesaian; Biaya / Tarif; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; Saran dan Masukan. Program Penunjang Pemerintah Daerah pada Dinas Kehutanan terdiri dari 8 kegiatan dan telah dilaksanakan dengan tidak ada kendala. Capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 97.062.383.878,- (Sembilan Puluh Tujuh Milyar Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau 35% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 279.762.240.433,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah). Kegiatan dilaksanakan dalam rangka mendukung kepuasan

masyarakat yang membutuhkan layanan berkaitan dengan bidang kehutanan adalah sebanyak 8 kegiatan.

2. Program Pengelolaan Hutan

Program Pengelolaan Hutan adalah program yang dilaksanakan bersama oleh beberapa bidang di Dinas Kehutanan sesuai dengan tupoksinya yaitu Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Bidang Pengelolaan Das RHL dan Bidang Perlindungan KSDAE. Indikator program ada 2 yaitu 1). Produksi Hasil Hutan Kayu, satuannya M3; 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu, satuannya Ton. Capaian realisasi kinerja indikator program Produksi Hasil Hutan Kayu dari target 5.050.000 M3 terealisasi sebesar 2.170.290 M3 atau sebesar 43%; Capaian indikator program Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dari target 730 Ton terealisasi sebesar 303 Ton atau sebesar 41%. Capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 70.418.055.122,- (Tujuh Puluh Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 30% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 234.779.130.222,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

Faktor penghambat pencapaian program pengelolaan hutan yang hanya mencapai 89% adalah:

Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu menurun karena adanya beberapa faktor:

1. Curah hujan tinggi menyebabkan produksi terganggu.
2. Peralatan Produksi yang sudah berumur sehingga produktifitas alat rendah.
3. Harga kayu yang menurun cukup tajam (terutama pada bulan – bulan terakhir) karena lesunya permintaan pasar dunia sementara biaya operasional meningkat karena kenaikan bbm, kenaikan biaya perawatan, biaya sparespart dll

Faktor pendukung pencapaian program pengelolaan hutan adalah:

1. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) kepada Unit Manajemen terkait aspek produksi, lingkungan dan sosial
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pada pemegang Izin terkait penatausahaan hasil hutan

3. Adanya akses ke sistem pelaporan (SI-PUHH, SI-CAKEP, SI-HHBK, SI-PNBP, SIMPONI) sehingga produksi Hasil Hutan unit manajemen dapat terpantau melalui sistem

3. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Program Konservsi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan dan KSDAE beserta UPTD yang ada di tingkat tapak. Indikator program adalah Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan, target yang ditetapkan adalah <1,00% (bersifat negatif) hingga saat ini masih 0 %. Capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 3.777.036.882,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 29% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 12.999.911.900,- (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Capaian target program dapat dikatakan berhasil mengingat indikatornya adalah persentase kerusakan hutan dalam kawasan yang artinya semakin kecil tingkat kerusakan maka semakin baik hasilnya. Capaian program cukup baik hal tersebut dinilai dari sedikitnya jumlah kejadian kebakaran hutan dan atau lahan di sepanjang tahun 2023 ataupun kerusakan hutan akibat perambahan, sehingga tingkat kerusakan hutan juga kecil. Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program adalah sesuai table

Faktor pendukung pencapaian target program ini adalah:

1. Terjadi Penurunan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh curah hujan di wilayah Kalimantan timur cukup tinggi.
2. Penggunaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara optimal.
3. Telah dilakukan sosialisasi dan patroli perlindungan hutan secara berkala sebagai tindakan pencegahan.

Faktor penghambat pencapaian optimal adalah:

1. Jumlah personil Polisi Kehutanan, Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api masih belum memadai jika dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dijaga
2. Masyarakat disekitar hutan masih mengandalkan kayu sebagai pendukung ekonomi keluarga.

4. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dilakasanakan oleh bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan beserta UPTD lingkup Dinas Kehutanan. Program ini memiliki indikator Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat Dari target yang ditetapkan 32.000 Ha terealisasi sebesar 1.083 Ha atau sebesar 3%. Capaian Program ini dapat terlihat pada akhir tahun anggaran hal tersebut disebabkan karena proses verifikasi dilakukan oleh Kementerian KLHK. Capaian realisasi keuangan program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur bersama UPTD yang berada ditingkat tapak sebesar Rp. 19.776.153.525,- (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh TIga Ribu Lima Ratus DUa Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 32% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 62.354.611.703,- (Enam Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah).

Faktor pendukung pencapaian target program ini adalah:

1. Masuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. Adanya Roadmap Perhutanan Sosial
3. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) yang di SK kan oleh Gubernur Kaltim
4. Program ini sebagai program prioritas pada Rencana Strategis Dinas Kehutanan

Faktor penghambat pencapaian optimal adalah:

1. Tata Waktu Penerbitan SK Persetujuan Perhutanan Sosial Masih belum Terukur
2. Nomenklatur antar sektor yang belum sinkron
3. Lokasi areal perhutanan sosial relatif jauh sementara akses jalan belum memadai
4. Minimnya jumlah penyuluh kehutanan dalam pendampingan pasca persetujuan Perhutanan Sosial

5. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan DAS RHL dengan indikator Persentase Tutupan Lahan Meningkat dengan target 13,98% dan capaian sebesar 8,9%, Hasil akan terlihat pada akhir tahun anggaran setelah penanaman yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim serta stake holder telah selesai melaksanakan RHL

Capaian realisasi keuangan program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah sebesar Rp. 894.447.977,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 25% dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.385.054.500,- (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

Faktor pendukung pencapaian target program ini adalah:

1. Mitra pembangunan melakukan penanaman sehingga memberikan kontribusi terhadap tutupan lahan

Faktor penghambat pencapaian optimal adalah:

1. Penanaman yang dilakukan mitra kerja tidak dilakukan berbarengan, sehingga pelaporan tidak bersamaan.

2.2. Tabel Realisasi Triwulan II Dinas Kehutanan & UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023		Predikat	
							Triwulan 1		Triwulan 2					
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)			(8)		(9)		(12)		(13)	
				K		RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
28.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan					593,474,169,258		58,520,934,487		191,928,077,384		32.3398		SR
28.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan					302,933,748,546		28,883,741,183		95,577,822,687		31.55		SR
3.28.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	positif	84	%	228,705,219,093	21	21,012,066,988	83	71,576,780,769	98.81	31.30	ST	SR
3.28.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	positif	70	Nilai AKIP	2,313,200,000	0	119,030,700	0	736,848,584	0.00	31.85	SR	SR
3.28.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	positif	8	Dokumen	917,800,000	2	97,033,100	4	432,197,100	50.00	47.09	SR	SR
3.28.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	positif	5	Laporan	1,395,400,000	2	21,997,600	2	304,651,484	40.00	21.83	SR	SR
3.28.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	positif	12	Laporan	148,017,594,706	3	16,679,252,039	6	46,313,460,901	50.00	31.29	SR	SR
3.28.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	positif	585	Orang/ Bular	146,354,149,706	549	16,330,157,619	542	45,561,328,946	92.65	31.13	ST	SR
3.28.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	1	Dokumen	693,180,000	1	104,700,000	1	324,300,000	100.00	46.78	ST	SR
3.28.001.1.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap	positif	1	Laporan	970,265,000	1	244,394,420	1	427,831,955	100.00	44.09	ST	SR
3.28.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	positif	12	Laporan	612,631,000	3	72,430,290	6	242,821,430	50.00	39.64	SR	SR
3.28.001.1.03.004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada	positif	10	Laporan	292,765,000	1	44,042,890	5	116,923,690	50.00	39.94	SR	SR
3.28.001.1.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	positif	11	Laporan	319,866,000	1	28,387,400	6	125,897,740	54.55	39.36	R	SR
3.28.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	positif	12	Laporan	741,847,500	0	-	6	474,543,030	50.00	63.97	SR	R
3.28.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	positif	366	Paket	488,966,000	0	-	366	459,843,030	100.00	94.04	ST	ST
3.28.001.1.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	positif	1	Dokumen	81,947,500	0	-	1	-	100.00	0.00	ST	SR
3.28.001.1.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undan	positif	12	Orang	170,934,000	0	-	5	14,700,000	41.67	8.60	SR	SR
3.28.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	12	Bulan	2,597,256,907	3	533,812,148	6	1,281,810,095	50.00	49.35	SR	SR
3.28.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	positif	12	Paket	19,983,500	3	6,495,000	6	11,485,000	50.00	57.47	SR	R
3.28.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	60	Paket	113,036,007	15	30,023,000	30	57,043,000	50.00	50.46	SR	SR
3.28.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	positif	12	Paket	165,956,600	3	115,168,500	6	134,556,500	50.00	81.08	SR	T
3.28.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	positif	12	Paket	120,200,000	3	30,114,656	6	69,956,296	50.00	58.20	SR	R
3.28.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	positif	12	Dokumen	11,635,200	3	2,110,000	6	4,220,000	50.00	36.27	SR	SR
3.28.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	12	Laporan	1,963,718,100	3	237,411,992	6	809,945,899	50.00	41.25	SR	SR
3.28.001.1.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	positif	1	Dokumen	55,942,500	1	50,607,000	1	50,607,000	100.00	90.46	ST	T
3.28.001.1.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SK	positif	2	Dokumen	146,785,000	1	61,882,000	2	143,996,400	100.00	98.10	ST	ST
3.28.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	positif	2	Unit	69,871,710,240	0	2,847,152,335	2	20,794,300,555	100.00	29.76	ST	SR
3.28.001.1.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	positif	1	Unit	523,750,000	0	-	1	523,750,000	100.00	100.00	ST	ST
3.28.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	positif	88	Unit	48,850,245,500	0	-	45	4,879,300,000	51.14	9.99	R	SR
3.28.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	positif	288	Unit	20,497,714,740	100	2,847,152,335	250	15,391,250,555	86.81	75.09	T	S
3.28.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah	positif	12	Bulan	3,616,142,640	3	647,437,226	6	1,444,903,924	50.00	39.96	SR	SR
3.28.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	positif	12	Laporan	14,956,400	3	655,500	6	1,280,000	50.00	8.56	SR	SR
3.28.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	12	Laporan	803,327,600	3	125,685,126	6	197,606,164	50.00	24.60	SR	SR
3.28.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	1	Laporan	236,028,000	0	21,470,000	0	21,470,000	0.00	9.10	SR	SR
3.28.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	12	Laporan	2,561,830,640	3	499,626,600	6	1,224,547,760	50.00	47.80	SR	SR
3.28.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit barang yang diperlihara	positif	39	Unit	934,836,100	10	112,952,250	15	288,092,250	38.46	30.82	SR	SR
3.28.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dib	positif	6	Unit	130,462,800	6	7,655,750	6	43,077,000	100.00	33.02	ST	SR
3.28.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	positif	69	Unit	654,422,600	7	86,994,500	30	218,988,250	43.48	33.46	SR	SR
3.28.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	positif	186	Unit	149,950,700	20	18,302,000	40	26,027,000	21.51	17.36	SR	SR
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	positif	730	Ton	42,380,172,281	204.95	2,538,293,538	302.74	12,358,258,360	41.47	29.16	SR	SR
		1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	positif	5050000	M3		970025		2170290		42.98		SR	
3.28.003.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	positif	2	Dokumen	714,852,000	0	29,907,926	1	55,305,907	50.00	7.74	SR	SR
3.28.003.1.02.001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	positif	7	Dokumen	714,852,000	1	29,907,926	1	55,305,907	14.29	7.74	SR	SR
3.28.003.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	positif	1611386	Ha	9,019,532,000	0	508,518,050	0	2,286,468,817	0.00	25.35	SR	SR

3.28.003.1.03.001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan	positif	9	Dokumen	785,000,000	1	50,418,490	4	337,591,736	44.44	43.01	SR	SR
3.28.003.1.03.002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi	positif	2	Dokumen	239,000,000	1	13,550,400	1	80,601,690	50.00	33.72	SR	SR
3.28.003.1.03.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalik	positif	59	Laporan	5,143,736,000	3	195,308,760	13	841,035,291	22.03	16.35	SR	SR
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNBP dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan	positif	11	Laporan		2		5		45.45		SR	
		Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C	positif	6	hit Manajem		1		1		16.67		SR	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan	positif	1	Dokumen		0		0		0.00		SR	
3.28.003.1.03.006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Rencana Pengelolaan di Kawas	positif	70	Laporan	2,851,796,000	15	249,240,400	33	1,027,240,100	47.14	36.02	SR	SR

	Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	positif	50	Dokumen		15		69		138.00		ST	
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	positif	475	Ha	13,960,429,001	0	516,602,399	13	6,412,343,869	2.74	45.93	SR	SR
3.28.003.1.04.001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) dan Dokumen	positif	6	Dokumen	534,760,000	3	71,991,600	3	159,709,600	50.00	29.87	SR	SR
3.28.003.1.04.004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	positif	435	Ha	9,753,242,000	0	188,615,600	13	5,446,072,200	2.99	55.84	SR	R
3.28.003.1.04.005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	positif	100	Unit	1,165,397,000	0	19,024,599	0	75,291,800	0.00	6.46	SR	SR
3.28.003.1.04.008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilita	positif	23	Laporan	2,507,030,001	3	236,970,600	10	731,270,269	43.48	29.17	SR	SR
3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	positif	6	Kasus	12,763,104,800	1	1,083,058,350	2	2,537,965,911	33.33	19.89	SR	SR
3.28.003.1.05.003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	positif	6	Operasi	810,975,000	1	89,179,635	3	285,063,519	50.00	35.15	SR	SR
3.28.003.1.05.004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan H	positif	6	Dokumen	3,814,593,020	2	393,945,908	2	878,052,245	33.33	23.02	SR	SR
3.28.003.1.05.005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	positif	7	Laporan	8,137,536,780	1	599,932,807	2	1,374,850,147	28.57	16.90	SR	SR
3.28.003.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan	Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen	positif	13	UM	2,220,630,000	8	116,028,513	8	393,023,456	61.54	17.70	R	SR
3.28.003.1.07.001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang P	positif	48	it Managem	774,590,000	2	8,500,000	38	154,149,000	79.17	19.90	T	SR
3.28.003.1.07.002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu da	positif	28	Dokumen	774,080,000	0	-	0	31,685,000	0.00	4.09	SR	SR
3.28.003.1.07.003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	positif	13	it Managem	671,960,000	8	107,528,513	8	207,189,456	61.54	30.83	R	SR
3.28.003.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar	positif	138	;Sertf;UnitUs	3,701,624,480	8	284,178,300	37	673,150,400	26.81	18.19	SR	SR
3.28.003.1.09.001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Pertimbangan Teknis Pengadaan dan Pengedaran benih/bibit terdaftar yang diterbit	positif	25	Usaha, Lap	1,861,387,800	6	216,314,200	16	409,911,300	64.00	22.02	R	SR
3.28.003.1.09.002	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non P Jumlah Sertifikat Sumber Benih Yang Diterbitkan Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	positif positif positif	25 20 20	t Usaha;Lapo Sertifikat Sertifikat	742,427,680			16		64.00		R	
3.28.003.1.09.005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Laporan pengawasan peredaran benih dan bibit Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	positif positif	95 95	oran, Unit Us oran, Unit Us	1,097,809,000	1	38,244,700 29,619,400	6 6 15 15	107,847,200 155,391,900	30.00 30.00 15.79 15.79	14.53 14.15	SR SR SR SR	SR SR
3.28.004	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	negatif	1	%	1,895,180,100	0	303,789,088	0	625,941,215	0.00	33.03	SR	SR
3.28.004.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah	Luas KBEP yang dikelola	positif	6000	Ha	1,895,180,100	0	303,789,088	0	625,941,215	0.00	33.03	SR	SR
3.28.004.1.03.005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Kelompok/ Masyarakat yang Diberdayakan	positif	330	orang	1,127,300,000	255	303,789,088	315	605,371,215	95.45	53.70	ST	R
3.28.004.1.03.006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	positif	6000	Ha	767,880,100	0	-	0	20,570,000	0.00	2.68	SR	SR
3.28.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	positif	32000	Ha	27,774,902,072	0	4,758,313,800	1083	10,303,494,486	3.38	37.10	SR	SR
3.28.005.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyaraka	positif	15	Laporan	27,774,902,072	2	4,758,313,800	5	10,303,494,486	33.33	37.10	SR	SR
3.28.005.1.01.001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	positif	40	Orang	18,196,984,542	30	3,761,014,346	5	8,262,676,619	12.50	45.41	SR	SR
3.28.005.1.01.002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan K	positif	17	Kelompok	1,691,518,200	5	107,048,400	6	310,746,592	35.29	18.37	SR	SR
3.28.005.1.01.003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	positif	35000	Ha	7,886,399,330	9087.4	890,251,054	3580.62	1,730,071,275	10.23	21.94	SR	SR
3.28.006	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	positif	13.98	%	2,178,275,000	0	271,277,769	8.9	713,347,857	63.66	32.75	R	SR
3.28.006.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan pengelolaan DAS	positif	16	Laporan	2,178,275,000	2	271,277,769	7	713,347,857	41.18	32.75	SR	SR
3.28.006.1.01.001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang ditetapkan	positif	1	Dokumen	492,697,000	0	30,356,000	0	47,406,000	0.00	9.62	SR	SR
3.28.006.1.01.002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	positif	6	Dokumen	406,720,000	0	59,082,800	3	124,629,854	50.00	30.64	SR	SR
3.28.006.1.01.004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	positif	200	Orang	1,102,239,600	100	119,589,800	100	425,838,834	50.00	38.63	SR	SR
3.28.006.1.01.006	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah Laporan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	positif	1	Laporan	176,618,400	0	62,249,169	0	115,473,169	0.00	65.38	SR	R
.28.0.00.0.00.01.0002	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto					17,067,658,316		1,961,322,747		5,831,811,075		34.17		SR
3.28.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	positif	84	%	3,845,352,716	17	776,555,508	49	1,586,076,264	58.33	41.25	R	SR
3.28.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	positif	12	Laporan	130,320,000	3	33,750,000	6	55,210,000	50.00	42.36	SR	SR
3.28.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	12	Dokumen	130,320,000	3	33,750,000	6	55,210,000	50.00	42.36	SR	SR
3.28.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	positif	12	Laporan	260,925,300	3	-	6	110,231,500	50.00	42.25	SR	SR
3.28.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	positif	4	Paket	102,525,300	0	-	4	98,401,500	100.00	95.98	ST	ST
3.28.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	positif	20	Orang	158,400,000	0	-	15	11,830,000	75.00	7.47	S	SR
3.28.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	12	Bulan	423,461,096	3	115,268,852	6	223,601,630	50.00	52.80	SR	R
3.28.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	positif	12	Paket	12,426,100	3	6,393,600	6	6,393,600	50.00	51.45	SR	R
3.28.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	positif	12	Paket	14,747,400	3	7,677,832	6	7,677,832	50.00	52.06	SR	R
3.28.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	positif	12	Paket	83,024,500	3	31,932,357	6	52,552,097	50.00	63.30	SR	R
3.28.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	positif	12	Paket	19,959,696	3	7,250,625	6	9,998,438	50.00	50.09	SR	SR
3.28.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	positif	12	Dokumen	3,878,400	3	320,000	6	1,600,000	50.00	41.25	SR	SR
3.28.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	12	Laporan	289,425,000	3	61,694,438	6	145,379,663	50.00	50.23	SR	SR
3.28.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	positif	14	Unit	117,600,200	10	115,912,350	13	117,267,550	92.86	99.72	ST	ST
3.28.001.1.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	positif	42	Unit	117,600,200	23	115,912,350	41	117,267,550	97.62	99.72	ST	ST
3.28.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah	positif	12	Bulan	981,002,420	3	216,365,181	6	485,184,517	50.00	49.46	SR	SR

3.28.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	12	Laporan	203,590,500	3	35,626,701	6	69,153,557	50.00	33.97	SR	SR
3.28.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	12	Laporan	777,411,920	3	180,738,480	6	416,030,960	50.00	53.51	SR	R
3.28.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit barang yang diperlihara	positif	85	Unit	1,932,043,700	13	295,259,125	55	594,581,067	64.71	30.77	R	SR
3.28.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	positif	75	Unit	496,271,300	10	64,057,075	48	254,362,117	64.00	51.25	R	R
3.28.001.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipel	positif	1	Unit	1,387,531,200	0	231,202,050	1	294,512,350	100.00	21.23	ST	SR
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	positif positif	5050000 730	M3 Ton	253,189,000	970025 204.95	73,879,346	2170290 302.74	193,459,966	42.98 41.47	76.41	SR SR	T
3.28.003.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	positif	1	Dokumen	253,189,000	0	73,879,346	0	193,459,966	0.00	76.41	SR	T

3.28.003.1.02.001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	positif	1	Dokumen	253,189,000	0	73,879,346	0	193,459,966	0.00	76.41	SR	T
3.28.004	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	positif	1	%	10,904,731,800	0	817,905,899	1	3,072,904,267	100.00	28.18	ST	SR
3.28.004.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Hutan Tahura yang dikelola	positif	64864	Ha	10,904,731,800	16216	817,905,899	37867.1	3,072,904,267	58.38	28.18	R	SR
3.28.004.1.01.001	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan	Jumlah Laporan Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	positif	5	Laporan	1,822,445,200	1	298,257,368	3	776,752,878	60.00	42.62	R	SR
3.28.004.1.01.002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan PengamananKawasan Tahura Provinsi (FPCF - CF)	positif	3	Operasi	1,962,032,000		107,364,121	0	1,223,314,234	0.00	62.35	SR	R
		Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	positif	12	Operasi		2		6		50.00		SR	
3.28.004.1.01.003	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	positif	64914.98	Ha	227,688,600	16216	76,569,675	37867.1	117,240,477	58.33	51.49	R	R
3.28.004.1.01.005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	positif	400	Ha	5,856,028,000	0	159,722,935	300	487,285,758	75.00	8.32	S	SR
3.28.004.1.01.008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (FPCF - CF)	positif	3	Desa	859,538,000		127,703,000	0	360,969,560	0.00	42.00	SR	SR
		Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	positif	5	Desa		1		3		60.00		R	
3.28.004.1.01.009	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga Tahura	positif	5	Laporan	177,000,000	1	48,288,800	3	107,341,360	60.00	60.64	R	R
3.28.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	positif	32000	Ha	2,064,384,800	0	292,981,994	1083	979,370,578	3.38	47.44	SR	SR
3.28.005.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyaraka	positif	8	Laporan	2,064,384,800	2	292,981,994	1	979,370,578	12.50	47.44	SR	SR
3.28.005.1.01.002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan K	positif	2	Kelompok	640,252,100	0	46,117,500	1	366,483,569	50.00	57.24	SR	R
3.28.005.1.01.003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial (FCPF - CF)	positif	50	Hektar	1,424,132,700		246,864,494	0	612,887,009	0.00	43.04	SR	SR
		Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA	positif	100	Hektar		20		50		50		SR	
		Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	positif	20	Ha		0		10		50		SR	
28.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat					16,581,598,240		1,194,965,257		3,591,182,902		21.66		SR
3.28.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	positif	84	%	2,065,935,640	21	266,402,044	42	780,027,242	50.00	37.76	SR	SR
3.28.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	positif	12	Laporan	135,120,000	3	28,290,000	6	54,470,000	50.00	40.31	SR	SR
3.28.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	12	Dokumen	135,120,000	3	28,290,000	6	54,470,000	50.00	40.31	SR	SR
3.28.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	positif	12	Laporan	106,657,000	3	-	6	25,881,006	50.00	24.27	SR	SR
3.28.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	positif	1	Paket	25,048,000	0	-	1	21,189,900	100.00	84.60	ST	T
3.28.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	positif	10	Orang	81,609,000	0	-	1	4,691,106	10.00	5.75	SR	SR
3.28.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	12	Bulan	576,951,700	3	103,823,515	6	284,382,050	50.00	49.29	SR	SR
3.28.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	positif	12	Paket	9,127,700	3	1,073,500	6	1,073,500	50.00	11.76	SR	SR
3.28.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	12	Paket	102,828,500	3	-	6	34,158,900	50.00	33.22	SR	SR
3.28.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	positif	12	Paket	5,995,500	3	940,000	6	940,000	50.00	15.68	SR	SR
3.28.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	12	Laporan	459,000,000	3	101,810,015	6	248,209,650	50.00	54.08	SR	R
3.28.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	positif	14	Unit	72,156,900	3	-	6	26,540,000	42.86	36.78	SR	SR
3.28.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	positif	12	Unit	36,156,900	3	-	6	26,540,000	50.00	73.40	SR	S
3.28.001.1.07.008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	positif	1	Unit	36,000,000	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urursan Pemerintah Daerah	positif	12	Bulan	522,870,240	3	116,604,329	6	263,744,236	50.00	50.44	SR	SR
3.28.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	positif	12	Laporan	9,008,800	3	850,000	6	2,150,000	50.00	23.87	SR	SR
3.28.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	12	Laporan	104,072,000	3	20,506,969	6	42,299,516	50.00	40.64	SR	SR
3.28.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	12	Laporan	409,789,440	3	95,247,360	6	219,294,720	50.00	53.51	SR	R
3.28.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit barang yang diperlihara	positif	30	Unit	652,179,800	11	17,684,200	28	125,009,950	93.33	19.17	ST	SR
3.28.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	positif	30	Unit	147,664,300	4	15,204,700	20	48,230,450	66.67	32.66	S	SR
3.28.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	positif	12	Unit	46,460,000	6	2,209,500	6	7,284,500	50.00	15.68	SR	SR
3.28.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	positif	3	Unit	24,000,000	1	270,000	1	3,065,000	33.33	12.77	SR	SR
3.28.001.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipel	positif	1	Unit	434,055,500	0	-	1	66,430,000	100.00	15.30	ST	SR
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	positif	5050000	M3	12,929,693,600	970025	775,481,194	2170290	2,546,858,387	42.98	19.70	SR	SR
		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	positif	730	Ton		204.95		302.74		41.47		SR	
3.28.003.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	positif	3	Dokumen	6,492,348,600	0	118,873,137	0	235,818,629	0.00	3.63	SR	SR
3.28.003.1.01.003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hu	positif	2	Unit	6,492,348,600	0	118,873,137	0	235,818,629	0.00	3.63	SR	SR
3.28.003.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	positif	110790	Ha	692,750,000	0	84,720,000	0	220,257,487	0.00	31.79	SR	SR
3.28.003.1.03.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan	positif	12	Dokumen	692,750,000	9	84,720,000	12	220,257,487	100.00	31.79	ST	SR
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	positif	100	Ha	3,425,393,400	0	22,788,990	0	1,111,702,401	0.00	32.45	SR	SR
3.28.003.1.04.004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	positif	10	Ha	3,270,159,400	0	22,788,990	0	1,093,598,001	0.00	33.44	SR	SR
3.28.003.1.04.008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilita	positif	8	Laporan	155,234,000	0	-	4	18,104,400	50.00	11.66	SR	SR
3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	positif	3	Kasus	2,319,201,600	3	549,099,067	3	979,079,870	100.00	42.22	ST	SR
3.28.003.1.05.002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	positif	786021	Ha	230,000,000	196505	44,498,873	393000	121,591,900	50.00	52.87	SR	R
3.28.003.1.05.004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan H	positif	12	Dokumen	833,371,800	3	155,117,908	6	265,842,908	50.00	31.90	SR	SR
3.28.003.1.05.005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	positif	11	Laporan	1,255,829,800	3	349,482,286	6	591,645,062	54.55	47.11	R	SR
3.28.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	positif	32000	Ha	1,585,969,000	0	153,082,019	1083	264,297,273	3.38	16.66	SR	SR
3.28.005.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyaraka	positif	2	Laporan	1,585,969,000	0	153,082,019	1	264,297,273	50.00	16.66	SR	SR

3.28.005.1.01.001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	positif	5	Orang	101,499,000	2	3,440,000	3	16,705,254	60.00	16.46	R	SR
3.28.005.1.01.002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan K	positif	3	Kelompok	743,508,600	1	27,155,000	2	48,955,000	66.67	6.58	S	SR
3.28.005.1.01.003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	positif	3000	Ha	740,961,400	545	122,487,019	1500	198,637,019	50.00	26.81	SR	SR
.28.0.00.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan					15,196,789,078		1,480,269,001		6,904,556,942		45.43		SR
3.28.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	positif	84	%	2,601,604,578	18	530,937,449	35	1,368,015,252	41.67	52.58	SR	R
3.28.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	positif	12	Laporan	158,520,000	3	24,800,000	6	62,000,000	50.00	39.11	SR	SR

3.28.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	12	Dokumen	158,520,000	3	24,800,000	6	62,000,000	50.00	39.11	SR	SR
3.28.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	positif	12	Laporan	125,022,500	9	84,800,000	12	112,478,072	100.00	89.97	ST	T
3.28.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (100 stell)	positif	2	Paket	84,800,000	2	84,800,000	2	84,800,000	100.00	100.00	ST	ST
3.28.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	positif	5	Orang	40,222,500	0	-	4	27,678,072	80.00	68.81	T	S
3.28.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	12	Bulan	748,951,198	3	193,586,059	6	571,663,121	50.00	76.33	SR	T
3.28.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	positif	12	Paket	8,006,000	0	-	12	8,006,000	100.00	100.00	ST	ST
3.28.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	3	Paket	123,415,500	2	69,193,000	3	123,408,800	100.00	99.99	ST	ST
3.28.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	positif	12	Paket	58,790,498	0	-	12	58,790,000	100.00	100.00	ST	ST
3.28.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	positif	3	Paket	35,500,000	0	-	3	32,367,750	100.00	91.18	ST	ST
3.28.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	positif	12	Dokumen	1,939,200	0	-	6	755,000	50.00	38.93	SR	SR
3.28.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	54	Laporan	521,300,000	14	124,393,059	37	348,335,571	68.52	66.82	S	S
3.28.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urursan Pemerintah Daerah	positif	12	Bulan	938,851,780	3	174,167,540	6	429,933,248	50.00	45.79	SR	SR
3.28.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	positif	12	Laporan	11,455,600	3	-	6	5,678,000	50.00	49.57	SR	SR
3.28.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	12	Laporan	178,380,500	3	30,418,664	6	84,683,888	50.00	47.47	SR	SR
3.28.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	12	Laporan	749,015,680	3	143,748,876	6	339,571,360	50.00	45.34	SR	SR
3.28.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit barang yang diperlihara	positif	29	Unit	630,259,100	4	53,583,850	9	191,940,811	31.03	30.45	SR	SR
3.28.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	positif	29	Unit	427,950,100	6	53,583,850	11	159,502,311	37.93	37.27	SR	SR
3.28.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	positif	19	Unit	35,329,000	0	-	18	32,438,500	94.74	91.82	ST	ST
3.28.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh	positif	1	Unit	166,980,000	0	-	1	-	100.00	0.00	ST	SR
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	positif	5050000	M3	11,118,046,500	970025	678,043,292	2170290	4,982,249,121	42.98	44.81	SR	SR
		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	positif	730	Ton		204.95		302.74		41.47		SR	
3.28.003.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	positif	5	Dokumen	1,604,000,000	0	31,897,940	5	1,507,150,037	100.00	93.96	ST	ST
3.28.003.1.01.003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hu	positif	11	Unit	1,604,000,000	6	31,897,940	11	1,507,150,037	100.00	93.96	ST	ST
3.28.003.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	positif	1	Dokumen	395,000,000	1	134,053,024	1	161,304,884	100.00	40.84	ST	SR
3.28.003.1.02.001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	positif	2	Dokumen	395,000,000	1	134,053,024	1	161,304,884	50.00	40.84	SR	SR
3.28.003.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	positif	93859	Ha	1,478,633,500	0	69,618,700	93859	812,387,640	100.00	54.94	ST	R
3.28.003.1.03.001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan	positif	6	Dokumen	811,633,500	4	33,263,200	6	687,794,800	100.00	84.74	ST	T
3.28.003.1.03.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan	positif	3	Dokumen	667,000,000	1	36,355,500	3	124,592,840	100.00	18.68	ST	SR
3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	positif	6	Kasus	3,655,013,000	1	383,939,458	1	1,560,283,540	16.67	42.69	SR	SR
3.28.003.1.05.002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	positif	335746	Ha	685,200,000	60000	77,822,901	117511	203,780,688	35.00	29.74	SR	SR
3.28.003.1.05.004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan H	positif	3	Dokumen	100,800,000	1	25,926,550	3	72,212,400	100.00	71.64	ST	S
3.28.003.1.05.005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	positif	30	Laporan	2,869,013,000	4	280,190,007	15	1,284,290,452	50.00	44.76	SR	SR
3.28.003.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen	positif	1	Unit	2,916,400,000	0		1	144,933,260	100.00	4.97	ST	SR
3.28.003.1.06.003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	positif	3	it Managem	2,916,400,000	0		3	144,933,260	100.00	4.97	ST	SR
3.28.003.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar	positif	1	Unit	1,069,000,000	0	58,534,170	1	796,189,760	100.00	74.48	ST	S
3.28.003.1.09.001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non P	positif	3	Unit Usaha	1,069,000,000	0	58,534,170	3	796,189,760	100.00	74.48	ST	S
3.28.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	positif	32000	Ha	1,477,138,000	0	271,288,260	1083	554,292,569	3.38	37.52	SR	SR
3.28.005.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyaraka	positif	4	Laporan	1,477,138,000	1	271,288,260	2	554,292,569	50.00	37.52	SR	SR
3.28.005.1.01.002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan K	positif	2	Kelompok	620,991,000	1	205,448,900	1	284,106,150	50.00	45.75	SR	SR
3.28.005.1.01.003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	positif	600	Ha	856,147,000	0	65,839,360	210	270,186,419	35.00	31.56	SR	SR
28.0.00.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus					17,947,539,582		1,175,972,622		3,677,631,555		20.49		SR
3.28.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	positif	84	%	2,339,635,032	19.97	337,980,198	33	935,859,821	39.29	40.00	SR	SR
3.28.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	positif	12	Laporan	129,000,000	0	18,520,000	1	53,750,000	8.33	41.67	SR	SR
3.28.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	2	Dokumen	129,000,000	1	18,520,000	1	53,750,000	50.00	41.67	SR	SR
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	2	Dokumen		0		0		0.00		SR	
3.28.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	positif	12	Laporan	73,299,800	0	-	2	63,979,000	16.67	87.28	SR	T
3.28.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	positif	2	Paket	73,299,800	0	-	2	63,979,000	100.00	87.28	ST	T
3.28.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	12	Bulan	950,468,032	3	131,071,391	6	396,959,654	50.00	41.76	SR	SR
3.28.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	positif	1	paket	3,509,100	1	2,420,000	1	2,420,000	100.00	68.96	ST	S
3.28.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	3	paket	66,241,400	0	-	1	29,384,400	33.33	44.36	SR	SR
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	3	Paket		0		0		0.00		SR	
3.28.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	positif	3	paket	12,693,232	0	-	4	7,266,400	133.33	57.25	ST	R
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	positif	3	Paket		0		0		0.00		SR	
3.28.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	positif	1	paket	3,884,300	0	-	1	765,000	100.00	19.69	ST	SR
3.28.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	2	Laporan	864,140,000	1	128,651,391	1	357,123,854	50.00	41.33	SR	SR
3.28.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	positif	6	Unit	13,707,200	3	10,000,001	5	11,353,001	83.33	82.83	T	T

3.28.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	positif	4	Unit	13,707,200	3	10,000,001	5	11,353,001	125.00	82.83	ST	T
3.28.001.1.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lai	positif	0	Unit	-	0	-	0	-				SR
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	positif	0	unit		0		0					
3.28.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah	positif	12	Bulan	645,627,400	3	128,683,576	6	306,705,289	50.00	47.50	SR	SR
3.28.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	positif	2	Laporan	7,226,000	1	3,300,000	2	6,670,000	100.00	92.31	ST	ST
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	positif	2	Laporan		1		0		0.00		SR	

3.28.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	3	Laporan	122,607,400	1	13,269,496	2	31,785,209	66.67	25.92	S	SR
3.28.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	2	Laporan	515,794,000	1	112,114,080	1	268,250,080	50.00	52.01	SR	R
3.28.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit barang yang diperlihara	positif	77	Unit	527,532,600	10	49,705,230	16	103,112,877	20.78	19.55	SR	SR
3.28.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	positif	41	unit	500,402,600	10	49,705,230	6	99,124,557	14.63	19.81	SR	SR
3.28.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	positif	27	unit	27,130,000	0	-	10	3,988,320	37.04	14.70	SR	SR
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	positif	5050000	M3	14,908,227,350	970025	816,420,224	2170290	2,413,226,478	42.98	16.19	SR	SR
		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	positif	730	Ton		204.95		302.74		41.47		SR	
3.28.003.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	positif	1	Dokumen	2,535,904,900	0	363,868,524	0	970,492,314	0.00	38.27	SR	SR
		Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	positif	1	Dokumen		0		1		100.00		ST	
3.28.003.1.01.003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hu	positif	19	unit	2,535,904,900	1	363,868,524	5	970,492,314	26.32	38.27	SR	SR
3.28.003.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	positif	1	Dokumen	921,892,650	1	41,080,000	1	307,645,423	100.00	33.37	ST	SR
3.28.003.1.02.001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang disusun	positif	1	Dokumen	921,892,650	0	41,080,000	0	307,645,423	0.00	33.37	SR	SR
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	positif	2	Dokumen		1		1		50.00		SR	
3.28.003.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	positif	21362	Ha	953,416,000		81,757,000	0	221,105,938	0.00	23.19	SR	SR
3.28.003.1.03.001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan	positif	1	Dokumen	244,416,000	1	30,462,000	1	128,292,000	100.00	52.49	ST	R
3.28.003.1.03.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan	positif	28	Dokumen	709,000,000	6	51,295,000	16	92,813,938	57.14	13.09	R	SR
3.28.003.1.03.009	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu d	positif	0	Dokumen	-	0	-	0	-				SR
			positif	0			0		0		0.00		SR	
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	positif	50	Ha	5,768,825,000	0	165,889,000	50	377,255,262	100.00	6.54	ST	SR
3.28.003.1.04.004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	positif	200	Ha	5,768,825,000	3	165,889,000	50	377,255,262	25.00	6.54	SR	SR
3.28.003.1.04.006	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Luas areal Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	positif	0	Ha	-	0	-	0	-				SR
			positif	0			0		0		0.00		SR	
3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	positif	2	Kasus	2,796,984,800	0	163,825,700	1	519,519,105	50.00	18.57	SR	SR
3.28.003.1.05.002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	positif	452	Ha	284,400,000	0	-	26	114,359,778	5.75	40.21	SR	SR
3.28.003.1.05.004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan H	positif	4	Dokumen	792,584,800	1	36,619,700	2	101,962,700	50.00	12.86	SR	SR
3.28.003.1.05.005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	positif	10	Laporan	1,720,000,000	1	127,206,000	5	303,196,627	50.00	17.63	SR	SR
3.28.003.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu	positif	1	Unit	1,931,204,000	0	-	0	17,208,436	0.00	0.89	SR	SR
3.28.003.1.06.003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	positif	370	it Managem	1,931,204,000	0	-	0	17,208,436	0.00	0.89	SR	SR
3.28.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	positif	32000	Ha	699,677,200	0	21,572,200	1083	328,545,256	3.38	46.96	SR	SR
3.28.005.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyaraka	positif	10	Laporan	699,677,200	0	21,572,200	5	328,545,256	50.00	46.96	SR	SR
3.28.005.1.01.001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	positif	0	Orang	-	0	-	0	-				SR
3.28.005.1.01.003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	positif	50	Ha	699,677,200	0	21,572,200	50	328,545,256	100.00	46.96	ST	SR
28.0.00.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo					13,787,286,609		3,468,661,665		6,877,057,742		49.88		SR
3.28.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	positif	84	%	2,628,647,759	0	700,336,202	50	1,658,826,922	59.52	63.11	R	R
3.28.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	positif	12	Laporan	139,200,000	3	22,580,000	6	56,450,000	50.00	40.55	SR	SR
3.28.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	12	Dokumen	139,200,000	3	22,580,000	6	56,450,000	50.00	40.55	SR	SR
3.28.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	positif	12	Laporan	140,758,500	3	41,125,000	3	71,317,132	25.00	50.67	SR	SR
3.28.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	positif	1	Paket	41,736,000	1	41,125,000	1	41,125,000	100.00	98.54	ST	ST
3.28.001.1.05.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	Jumlah Laporan koordinasi dan Pelaksanaan SIK	positif	5	Laporan	22,200,000	0	-	3	17,624,000	60.00	79.39	R	T
3.28.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	positif	5	ASN	22,200,000	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.001.1.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undan	positif	5	ASN	54,622,500	0	-	2	12,568,132	40.00	23.01	SR	SR
3.28.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	12	Bulan	560,497,979	3	111,163,590	6	325,166,140	50.00	58.01	SR	R
3.28.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	positif	1	Paket	4,778,500	0	-	1	4,778,500	100.00	100.00	ST	ST
3.28.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	3	Paket	77,482,000	1	35,761,000	1	75,911,000	33.33	97.97	SR	ST
3.28.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	positif	3	Paket	10,734,000	0	-	1	7,334,000	33.33	68.32	SR	S
3.28.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	positif	1	Paket	12,364,279	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	positif	12	Dokumen	1,939,200	3	160,000	6	800,000	50.00	41.25	SR	SR
3.28.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	12	Laporan	453,200,000	3	75,242,590	6	236,342,640	50.00	52.15	SR	R
3.28.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	positif	60	Unit	398,869,100	30	222,479,000	40	393,289,000	66.67	98.60	S	ST
3.28.001.1.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	positif	3	Paket	132,362,400	0	-	3	132,362,000	100.00	100.00	ST	ST
3.28.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	positif	6	Paket	266,506,700	5	222,479,000	6	260,927,000	100.00	97.91	ST	ST
3.28.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urursan Pemerintah Daerah	positif	12	Bulan	999,774,880	3	247,291,832	6	534,445,205	50.00	53.46	SR	R
3.28.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	12	Laporan	139,328,800	3	46,009,934	6	80,281,229	50.00	57.62	SR	R
3.28.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	positif	12	Bulan	860,446,080	3	201,281,898	6	454,163,976	50.00	52.78	SR	R
3.28.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit barang yang diperlihara	positif	41	Unit	389,547,300	10	55,696,780	20	278,159,445	48.78	71.41	SR	S
3.28.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	positif	23	Unit	224,258,100	5	55,696,780	15	124,599,545	65.22	55.56	R	R

3.28.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	positif	26	Unit	17,460,000	5	-	10	6,100,000	38.46	34.94	SR	SR
3.28.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Unit Pemeliharaan / Rehabilitasi	positif	1	Unit	147,829,200	0	-	1	147,459,900	100.00	99.75	ST	ST
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	positif	5050000	M3	9,476,425,992	970025	2,682,211,663	2170290	4,952,974,810	42.98	52.27	SR	R
		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	positif	730	Ton		204.95		302.74		41.47		SR	
3.28.003.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	positif	1	Dokumen	4,779,144,322	0	1,906,166,403	0	2,545,265,040	0.00	53.26	SR	R
3.28.003.1.01.003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resort dan Kantor Resort Kesatuan Pengelolaan H	positif	52	Unit	4,779,144,322	40	1,906,166,403	40	2,545,265,040	76.92	53.26	T	R

3.28.003.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	positif	1	Dokumen	356,006,200	0	42,114,000	0	158,548,113	0.00	44.54	SR	SR
3.28.003.1.02.001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	positif	1	Dokumen	356,006,200	0	42,114,000	0	158,548,113	0.00	44.54	SR	SR
3.28.003.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	positif	137495	Ha	124,493,000	0	35,169,000	50000	75,772,104	36.36	60.86	SR	R
3.28.003.1.03.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan P	positif	1	Dokumen	124,493,000	0	35,169,000	0	75,772,104	0.00	60.86	SR	R
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	positif	50	Ha	1,925,020,170	0	302,763,740	20	982,438,585	40.00	51.04	SR	R
3.28.003.1.04.001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	positif	1	Dokumen	61,191,170	0	-	0	6,550,000	0.00	10.70	SR	SR
3.28.003.1.04.004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	positif	50	Ha	1,408,154,000	0	274,383,675	20	843,176,675	40.00	59.88	SR	R
3.28.003.1.04.008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilita	positif	1	Laporan	455,675,000	0	28,380,065	0	132,711,910	0.00	29.12	SR	SR
3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	positif	2	Kasus	1,420,730,000	0	157,058,720	0	561,322,718	0.00	39.51	SR	SR
3.28.003.1.05.002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	positif	100	Ha	200,000,000	25	40,398,720	50	58,344,891	50.00	29.17	SR	SR
3.28.003.1.05.004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan H	positif	10	Dokumen	405,048,000	2	62,960,000	5	186,336,237	50.00	46.00	SR	SR
3.28.003.1.05.005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	positif	20	Laporan	815,682,000	2	53,700,000	10	316,641,590	50.00	38.82	SR	SR
3.28.003.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	positif	1	Unit	871,032,300	0	238,939,800	0	629,628,250	0.00	72.29	SR	S
3.28.003.1.06.001	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	positif	10	ton	228,276,300	0	23,935,000	5	90,046,950	50.00	39.45	SR	SR
3.28.003.1.06.003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	positif	1	hit Manajem	642,756,000	0	215,004,800	0	539,581,300	0.00	83.95	SR	T
		Jumlah unit Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Poko	positif	1	Unit		0		0		0.00		SR	
3.28.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	positif	32000	Ha	1,682,212,858	0	86,113,800	1083	265,256,010	3.38	15.77	SR	SR
3.28.005.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyaraka	positif	10	Laporan	1,682,212,858	0	86,113,800	5	265,256,010	50.00	15.77	SR	SR
3.28.005.1.01.001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	positif	3	Orang	105,156,000	0	-	2	8,530,960	66.67	8.11	S	SR
3.28.005.1.01.002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan k	positif	10	Kelompok	481,162,365	0	-	5	84,459,750	50.00	17.55	SR	SR
		Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	positif	10	KTH		0		5		50.00		SR	
3.28.005.1.01.003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	positif	20	Ha	1,095,894,493	0	86,113,800	10	172,265,300	50.00	15.72	SR	SR
		Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	positif	2	Usulan		0		1		50.00		SR	
28.0.00.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan					14,146,940,944		1,430,768,758		5,558,931,359		39.29		SR
3.28.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	positif	84	%	2,585,488,394	21	453,181,908	42	1,339,060,125	50.00	51.79	SR	R
3.28.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	positif	12	Laporan	155,520,000	3	25,920,000	6	64,800,000	50.00	41.67	SR	SR
3.28.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	12	Dokumen	155,520,000	3	25,920,000	6	64,800,000	50.00	41.67	SR	SR
3.28.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	positif	12	Laporan	292,770,000	0	-	6	108,917,802	50.00	37.20	SR	SR
3.28.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	positif	1	Paket	69,180,000	0	-	1	65,400,000	100.00	94.54	ST	ST
3.28.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	positif	7	Orang	223,590,000	0	-	4	43,517,802	57.14	19.46	R	SR
3.28.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	12	Bulan	804,120,354	3	212,822,800	6	424,436,805	50.00	52.78	SR	R
3.28.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	positif	1	Paket	27,857,800	0	3,025,000	1	3,025,000	100.00	10.86	ST	SR
3.28.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	2	Paket	137,405,500	2	95,050,000	2	113,550,000	100.00	82.64	ST	T
3.28.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	positif	1	Paket	12,300,000	1	1,825,000	1	4,900,000	100.00	39.84	ST	SR
3.28.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	positif	1	Paket	18,697,054	1	14,725,000	1	14,725,000	100.00	78.76	ST	T
3.28.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	24	Laporan	607,860,000	6	98,197,800	12	288,236,805	50.00	47.42	SR	SR
3.28.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	positif	12	Bulan	879,899,640	3	178,018,808	6	424,644,626	50.00	48.26	SR	SR
3.28.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	12	Laporan	118,198,200	3	21,863,448	6	45,933,906	50.00	38.86	SR	SR
3.28.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	positif	12	Laporan	761,701,440	3	156,155,360	6	378,710,720	50.00	49.72	SR	SR
3.28.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit barang yang diperlihara	positif	2	Unit	453,178,400	1	36,420,300	2	316,260,892	100.00	69.79	ST	S
3.28.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	positif	113	Unit	253,877,200	15	36,420,300	43	117,139,554	38.05	46.14	SR	SR
3.28.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh	positif	2	Unit	199,301,200	0	-	2	199,121,338	100.00	99.91	ST	ST
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	positif	5050000	M3	11,141,153,050	970025	859,772,450	2170290	4,084,526,990	42.98	36.66	SR	SR
		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	positif	730	Ton		204.95		302.74		41.47		SR	
3.28.003.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	positif	1	Dokumen	4,776,187,450	0	357,187,200	0	2,265,859,350	0.00	47.44	SR	SR
3.28.003.1.01.003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hu	positif	164	Unit	4,776,187,450	52	357,187,200	61	2,265,859,350	37.20	47.44	SR	SR
3.28.003.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	positif	267068	Ha	130,020,000	200	12,350,000	267068	73,410,000	100.00	56.46	ST	R
3.28.003.1.03.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan	positif	11	Dokumen	130,020,000	2	12,350,000	11	73,410,000	100.00	56.46	ST	R
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	positif	50	Ha	3,139,519,100	0	178,742,400	0	703,515,800	0.00	22.41	SR	SR
3.28.003.1.04.004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	positif	50	Ha	2,767,531,600	0	178,742,400	0	600,949,700	0.00	21.71	SR	SR
3.28.003.1.04.008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilita	positif	1	Laporan	371,987,500	0	-	0	102,566,100	0.00	27.57	SR	SR
3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	positif	2	Kasus	3,095,426,500	0	311,492,850	1	1,041,741,840	50.00	33.65	SR	SR
3.28.003.1.05.002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	positif	267068	Ha	239,520,000	0	31,374,000	66767	83,963,500	25.00	35.05	SR	SR
3.28.003.1.05.004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan H	positif	12	Dokumen	631,472,000	3	60,501,300	6	203,406,399	50.00	32.21	SR	SR
3.28.003.1.05.005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	positif	51	Laporan	2,224,434,500	4	219,617,550	7	754,371,941	13.73	33.91	SR	SR
3.28.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	positif	32000	Ha	420,299,500	0	117,814,400	1083	135,344,244	3.38	32.20	SR	SR

3.28.005.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyaraka	positif	10	Laporan	420,299,500	2	117,814,400	5	135,344,244	50.00	32.20	SR	SR
3.28.005.1.01.003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	positif	1986	Ha	420,299,500	387	117,814,400	677	135,344,244	34.09	32.20	SR	SR
28.0.00.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das					14,993,576,926		1,134,671,357		2,730,643,101		18.21		SR
3.28.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	positif	84	%	2,621,527,026	21	549,366,657	42	934,345,597	50.00	35.64	SR	SR
3.28.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	positif	12	Laporan	141,240,000	3	32,370,000	6	35,310,000	50.00	25.00	SR	SR
3.28.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	12	Dokumen	141,240,000	3	32,370,000	6	35,310,000	50.00	25.00	SR	SR

3.28.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	positif	12	Laporan	68,395,500	3	17,050,000	6	21,353,600	50.00	31.22	SR	SR
3.28.001.1.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	positif	4	Laporan	68,395,500	1	17,050,000	2	21,353,600	50.00	31.22	SR	SR
3.28.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	positif	12	Laporan	231,558,000	3	67,323,000	6	131,946,000	50.00	56.98	SR	R
3.28.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	positif	3	Paket	132,258,000	3	67,323,000	3	131,946,000	100.00	99.76	ST	ST
3.28.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	positif	5	Orang	99,300,000	0	-	4	-	80.00	0.00	T	SR
3.28.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	12	Bulan	557,055,606	3	229,357,153	6	336,103,101	50.00	60.34	SR	R
3.28.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	positif	1	Paket	5,441,800	1	-	1	-	100.00	0.00	ST	SR
3.28.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	5	Paket	130,267,206	5	129,244,000	5	129,244,000	100.00	99.21	ST	ST
3.28.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	positif	1	Paket	5,706,600	1	-	1	-	100.00	0.00	ST	SR
3.28.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	positif	3	Paket	41,000,000	1	-	2	28,450,000	66.67	69.39	S	S
3.28.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	1	Laporan	374,640,000	0	100,113,153	0	178,409,101	0.00	47.62	SR	SR
3.28.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urursan Pemerintah Daerah	positif	12	Bulan	1,012,243,920	3	192,716,504	6	390,825,739	50.00	38.61	SR	SR
3.28.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	1	Laporan	109,994,400	0	16,074,104	0	42,271,739	0.00	38.43	SR	SR
3.28.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	1	Laporan	902,249,520	0	176,642,400	0	348,554,000	0.00	38.63	SR	SR
3.28.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit barang yang diperlihara	positif	15	Unit	611,034,000	0	10,550,000	5	18,807,157	33.33	3.08	SR	SR
3.28.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	positif	52	Unit	354,774,000	0	10,550,000	5	18,807,157	9.62	5.30	SR	SR
3.28.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	positif	52	Unit	136,260,000	0	-	2	-	3.85	0.00	SR	SR
3.28.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh	positif	1	Unit	120,000,000	1	-	1	-	100.00	0.00	ST	SR
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	positif	5050000	M3	9,964,547,900	970025	498,352,300	2170290	1,414,008,070	42.98	14.19	SR	SR
		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	positif	730	Ton		204.95		302.74		41.47		SR	
3.28.003.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	positif	1	Dokumen	3,073,146,400	0	162,395,900	0	595,757,266	0.00	19.39	SR	SR
3.28.003.1.01.003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hu	positif	4	Unit	3,073,146,400	1	162,395,900	1	595,757,266	25.00	19.39	SR	SR
3.28.003.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	positif	1	Dokumen	297,250,000	0	-	0	3,702,400	0.00	1.25	SR	SR
3.28.003.1.02.001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	positif	2	Dokumen	297,250,000	0	-	0	3,702,400	0.00	1.25	SR	SR
3.28.003.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	positif	272566	Ha	571,520,000	1000	8,607,200	5000	80,395,200	1.83	14.07	SR	SR
3.28.003.1.03.001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan	positif	1	Dokumen	194,340,000	0	-	0	53,626,400	0.00	27.59	SR	SR
3.28.003.1.03.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan	positif	1	Dokumen	377,180,000	0	8,607,200	0	26,768,800	0.00	7.10	SR	SR
3.28.003.1.03.006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	positif	0	Dokumen	-	0	-	0	-	0.00		SR	SR
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	positif	100	Ha	1,663,372,200	0	8,317,200	0	31,282,400	0.00	1.88	SR	SR
3.28.003.1.04.001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	positif	1	Dokumen	120,471,200	0	8,317,200	0	29,852,400	0.00	24.78	SR	SR
3.28.003.1.04.004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	positif	100	Ha	1,542,901,000	0	-	0	1,430,000	0.00	0.09	SR	SR
3.28.003.1.04.008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilita	positif	0	Laporan	-	0	-	0	-	0.00		SR	SR
3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	positif	2	Kasus	3,603,643,300	0	302,397,600	0	684,376,404	0.00	18.99	SR	SR
3.28.003.1.05.002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	positif	997384	Ha	211,160,000	299215	50,122,000	598430	79,681,654	60.00	37.74	R	SR
3.28.003.1.05.004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan H	positif	3	Dokumen	528,370,000	1	8,630,800	1	15,353,200	33.33	2.91	SR	SR
3.28.003.1.05.005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	positif	3	Laporan	2,864,113,300	1	243,644,800	1	589,341,550	33.33	20.58	SR	SR
3.28.003.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar	positif	1	;Sertf;UnitUs	755,616,000	0	16,634,400	0	18,494,400	0.00	2.45	SR	SR
3.28.003.1.09.001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non P	positif	3	Unit Usaha	755,616,000	0	16,634,400	0	18,494,400	0.00	2.45	SR	SR
3.28.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	positif	32000	Ha	2,407,502,000	0	86,952,400	1083	382,289,434	3.38	15.88	SR	SR
3.28.005.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyaraka	positif	3	Laporan	2,407,502,000	1	86,952,400	1	382,289,434	33.33	15.88	SR	SR
3.28.005.1.01.001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	positif	5	Orang	206,595,000	0	-	2	45,164,721	40.00	21.86	SR	SR
3.28.005.1.01.002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan K	positif	2	Kelompok	594,838,000	0	11,097,200	0	18,414,400	0.00	3.10	SR	SR
3.28.005.1.01.003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	positif	1000	Ha	1,606,069,000	0	75,855,200	0	318,710,313	0.00	19.84	SR	SR
.28.0.00.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon					14,890,015,697		728,956,101		4,893,007,184		32.86		SR
3.28.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	positif	84	%	2,283,270,497	21	315,765,337	42	862,092,837	50.00	37.76	SR	SR
3.28.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	positif	12	Laporan	139,200,000	3	23,200,000	6	58,000,000	50.00	41.67	SR	SR
3.28.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	1	Dokumen	139,200,000	0	23,200,000	0	58,000,000	0.00	41.67	SR	SR
3.28.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	positif	12	Laporan	198,500,000	3	67,875,828	6	70,275,828	50.00	35.40	SR	SR
3.28.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	positif	32	Orang	198,500,000	14	67,875,828	15	70,275,828	46.88	35.40	SR	SR
3.28.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	12	Bulan	641,553,637	3	53,764,119	6	255,542,072	50.00	39.83	SR	SR
3.28.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	positif	1	Paket	6,050,000	1	-	1	5,250,000	100.00	86.78	ST	T
3.28.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	15	Paket	120,580,300	6	-	10	57,019,600	66.67	47.29	S	SR
3.28.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	positif	5	Paket	10,169,337	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	12	Laporan	504,754,000	3	53,764,119	6	193,272,472	50.00	38.29	SR	SR
3.28.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	positif	1	Unit	78,026,100	1	47,519,100	1	77,777,700	100.00	99.68	ST	ST
3.28.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	positif	10	Unit	78,026,100	7	47,519,100	10	77,777,700	100.00	99.68	ST	ST

3.28.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururusan Pemerintah Daerah	positif	12	Bulan	800,280,560	3	99,222,720	6	309,020,140	50.00	38.61	SR	SR
3.28.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	4	Laporan	247,039,600	1	-	2	41,227,180	50.00	16.69	SR	SR
3.28.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	12	Laporan	553,240,960	3	99,222,720	6	267,792,960	50.00	48.40	SR	SR
3.28.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit barang yang diperlihara	positif	33	Unit	425,710,200	17	24,183,570	25	91,477,097	75.76	21.49	S	SR
3.28.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	positif	33	Unit	368,789,600	10	24,183,570	25	91,477,097	75.76	24.80	S	SR
3.28.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	positif	53	Unit	56,920,600	22	-	22	-	41.51	0.00	SR	SR

3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	positif	5050000	M3	10,474,706,936	970025	370,001,514	2170290	3,567,475,877	42.98	34.06	SR	SR
		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	positif	730	Ton		204.95		302.74		41.47		SR	
3.28.003.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	positif	1	Dokumen	2,058,678,736	0	57,962,024	0	861,541,850	0.00	41.85	SR	SR
3.28.003.1.01.003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hu	positif	1	Unit	2,058,678,736	0	57,962,024	1	861,541,850	100.00	41.85	ST	SR
3.28.003.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	positif	1	Dokumen	404,225,500	0	42,043,600	0	149,510,200	0.00	36.99	SR	SR
3.28.003.1.02.001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	positif	2	Dokumen	404,225,500	0	42,043,600	1	149,510,200	50.00	36.99	SR	SR
3.28.003.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dik	positif	641969	Ha	400,000,000	0	16,220,000	0	77,357,600	0.00	19.34	SR	SR
3.28.003.1.03.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan	positif	1	Dokumen	400,000,000	0	16,220,000	0	77,357,600	0.00	19.34	SR	SR
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan	positif	400	Ha	4,449,830,000	0	78,555,320	175	1,619,162,502	43.75	36.39	SR	SR
3.28.003.1.04.004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	positif	320	Ha	4,449,830,000	0	78,555,320	175	1,619,162,502	54.69	36.39	R	SR
3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	positif	2	Kasus	3,161,972,700	1	175,220,570	1	859,903,725	50.00	27.20	SR	SR
3.28.003.1.05.001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	positif	10000	Ha	495,345,500	4500	59,644,800	9000	172,430,626	90.00	34.81	T	SR
3.28.003.1.05.004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan H	positif	4	Dokumen	518,600,000	1	30,280,000	2	66,055,987	50.00	12.74	SR	SR
3.28.003.1.05.005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	positif	6	Laporan	2,148,027,200	2	85,295,770	4	621,417,112	66.67	28.93	S	SR
3.28.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	positif	32000	Ha	2,132,038,264	0	43,189,250	1083	463,438,470	3.38	21.74	SR	SR
3.28.005.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyaraka	positif	8	Laporan	2,132,038,264	1	43,189,250	4	463,438,470	50.00	21.74	SR	SR
3.28.005.1.01.001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	positif	3	Orang	230,105,964	1	16,966,100	3	47,551,100	100.00	20.66	ST	SR
3.28.005.1.01.002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan K	positif	4	Kelompok	1,167,913,300	0	10,993,150	2	303,007,450	50.00	25.94	SR	SR
3.28.005.1.01.003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	positif	1000	Ha	734,019,000	0	15,230,000	0	112,879,920	0.00	15.38	SR	SR
.28.0.00.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau					16,110,658,616		602,916,987		3,610,545,585		22.41		SR
3.28.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	positif	84	%	2,593,749,916	0	397,624,394	0	1,185,894,122	0.00	45.72	SR	SR
3.28.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	positif	12	Laporan	189,106,000	3	27,291,400	6	74,462,750	50.00	39.38	SR	SR
3.28.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	12	Bulan	129,600,000	3	21,600,000	6	54,000,000	50.00	41.67	SR	SR
3.28.001.1.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap	positif	1	Laporan	8,832,700	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.001.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi P	positif	5	Laporan	50,673,300	1	5,691,400	3	20,462,750	60.00	40.38	R	SR
3.28.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	positif	12	Laporan	38,586,600	0	-	7	20,722,000	58.33	53.70	R	R
3.28.001.1.03.003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang	positif	3	Laporan	21,513,300	0	-	2	12,390,000	66.67	57.59	S	R
3.28.001.1.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	positif	2	Laporan	17,073,300	0	-	1	8,332,000	50.00	48.80	SR	SR
3.28.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	positif	1	Laporan	136,442,200	0	-	0	12,588,000	0.00	9.23	SR	SR
3.28.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	positif	3	Paket	80,232,500	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.001.1.05.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	positif	5	Laporan	26,280,000	0	-	3	12,588,000	60.00	47.90	R	SR
3.28.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	positif	5	Orang	13,461,900	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.001.1.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undan	positif	6	Orang	16,467,800	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	12	Bulan	521,458,116	3	123,721,433	7	360,565,329	58.33	69.15	R	S
3.28.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	positif	12	Bulan	7,354,000	0	-	12	7,303,050	100.00	99.31	ST	ST
3.28.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	28	Paket	86,240,016	8	19,946,710	15	43,334,535	53.57	50.25	R	SR
3.28.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	positif	13	Paket	9,363,500	13	9,358,075	13	9,358,075	100.00	99.94	ST	ST
3.28.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	positif	3	Paket	11,804,600	0	-	2	8,189,200	66.67	69.37	S	S
3.28.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	38	Laporan	406,696,000	7	94,416,648	30	292,380,469	78.95	71.89	T	S
3.28.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah unit	positif	6	Unit	92,731,400	3	8,000,000	4	53,434,526	66.67	57.62	S	R
3.28.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	positif	13	Unit	22,162,400	3	8,000,000	12	20,330,000	92.31	91.73	ST	ST
3.28.001.1.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	positif	2	Unit	70,569,000	0	-	1	33,104,526	50.00	46.91	SR	SR
3.28.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urursan Pemerintah Daerah	positif	12	Bulan	1,160,277,300	3	222,423,889	6	554,733,428	50.00	47.81	SR	SR
3.28.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	12	Bulan	174,610,500	3	24,614,689	6	54,145,028	50.00	31.01	SR	SR
3.28.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	13	Bulan	985,666,800	3	197,809,200	7	500,588,400	53.85	50.79	R	SR
3.28.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit barang yang diperlihara	positif	25	Unit	455,148,300	3	16,187,672	7	109,388,089	28.00	24.03	SR	SR
3.28.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	positif	10	Unit	360,785,500	1	15,007,672	4	105,453,089	40.00	29.23	SR	SR
3.28.001.1.09.005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	positif	2	Unit	20,250,000	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	positif	50	Unit	33,500,000	2	1,180,000	8	3,935,000	16.00	11.75	SR	SR
3.28.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	positif	1	Unit	40,612,800	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.001.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipel	positif	1	Unit	-	0	-	0	-	0.00		SR	SR
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	positif	5050000	M3	11,860,714,700	970025	189,252,593	2170290	2,247,376,487	42.98	18.95	SR	SR
		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	positif	730	Ton		204.95		302.74		41.47		SR	
3.28.003.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	positif	1	Dokumen	4,994,370,600	0	133,652,593	0	1,211,066,697	0.00	24.25	SR	SR
3.28.003.1.01.001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	positif	6	Dokumen	222,069,000	1	2,150,000	1	2,150,000	16.67	0.97	SR	SR
3.28.003.1.01.002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pe	positif	1	Unit	272,772,500	0	-	0	21,010,000	0.00	7.70	SR	SR

3.28.003.1.01.003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hu	positif	219	Unit	4,499,529,100	21	131,502,593	60	1,187,906,697	27.40	26.40	SR	SR
3.28.003.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	positif	1	Dokumen	294,946,300	0	-	0	44,738,779	0.00	15.17	SR	SR
3.28.003.1.02.001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	positif	1	Dokumen	294,946,300	0	-	0	44,738,779	0.00	15.17	SR	SR
3.28.003.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	positif	69911	Ha	1,221,552,700	0	-	12878	134,239,092	18.42	10.99	SR	SR
3.28.003.1.03.001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan	positif	2	Dokumen	345,015,200	0	-	1	35,106,650	50.00	10.18	SR	SR
3.28.003.1.03.002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi	positif	4	Dokumen	345,015,200	0	-	1	27,580,000	25.00	7.99	SR	SR

3.28.003.1.03.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan	positif	14	Dokumen	337,750,000	0	-	3	59,142,442	50.00	17.51	SR	SR
3.28.003.1.03.009	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Ja	positif	3	Laporan	193,772,300	0	-	1	12,410,000	33.33	6.40	SR	SR
			positif	0			0		0		0.00		SR	
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	positif	20	Ha	3,178,199,700	0	-	5	45,845,269	25.00	1.44	SR	SR
3.28.003.1.04.004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	positif	65	Ha	2,982,162,700	0	-	5	24,774,098	7.69	0.83	SR	SR
3.28.003.1.04.008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilita	positif	6	Laporan	196,037,000	0	-	2	21,071,171	33.33	10.75	SR	SR
3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	positif	2	Kasus	1,972,447,400	1	55,600,000	1	811,486,650	50.00	41.14	SR	SR
3.28.003.1.05.002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	positif	1000	Ha	187,440,000	0	-	50	7,725,000	5.00	4.12	SR	SR
3.28.003.1.05.004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan H	positif	14	Dokumen	784,635,000	4	40,530,000	10	534,121,250	71.43	68.07	S	S
3.28.003.1.05.005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	positif	40	Laporan	1,000,372,400	2	15,070,000	8	269,640,400	28.57	26.95	SR	SR
3.28.003.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	positif	1	Unit	199,198,000	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.003.1.06.003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	positif	1	it Managem	199,198,000	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	positif	32000	Ha	1,656,194,000	0	16,040,000	1083	177,274,976	3.38	10.70	SR	SR
3.28.005.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyaraka	positif	2	Laporan	1,656,194,000	1	16,040,000	1	177,274,976	50.00	10.70	SR	SR
3.28.005.1.01.001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	positif	2	Orang	206,019,000	0	-	1	17,666,751	50.00	8.58	SR	SR
3.28.005.1.01.002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan K	positif	3	Kelompok	1,023,680,200	1	16,040,000	1	81,155,000	33.33	7.93	SR	SR
3.28.005.1.01.003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	positif	5000	HA	426,494,800	0	-	1000	78,453,225	20.00	18.39	SR	SR
.28.0.00.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara					12,131,726,661		1,108,304,214		4,498,765,127		37.08		SR
3.28.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	positif	84	%	2,334,525,561	10.04	562,717,892	40.74	1,138,294,429	48.50	48.76	SR	SR
3.28.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	positif	12	Laporan	180,120,000	3	45,616,899	6	56,016,899	50.00	31.10	SR	SR
3.28.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	12	Dokumen	124,800,000	3	19,810,000	6	30,210,000	50.00	24.21	SR	SR
3.28.001.1.02.003	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	positif	12	Dokumen	55,320,000	3	25,806,899	3	25,806,899	25.00	46.65	SR	SR
3.28.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	positif	12	Laporan	42,720,000	2	10,520,000	6	10,520,000	50.00	24.63	SR	SR
3.28.001.1.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	positif	4	Laporan	42,720,000	2	10,520,000	2	10,520,000	50.00	24.63	SR	SR
3.28.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	positif	12	Laporan	135,026,000	3	56,173,134	6	107,960,184	50.00	79.96	SR	T
3.28.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	positif	3	Paket	83,426,000	1	30,401,000	3	82,188,050	100.00	98.52	ST	ST
3.28.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	positif	10	orang	51,600,000	3	25,772,134	3	25,772,134	30.00	49.95	SR	SR
3.28.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	12	Bulan	594,973,681	3	233,921,336	6	373,883,655	50.00	62.84	SR	R
3.28.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	positif	1	Paket	5,853,800	1	5,831,000	1	5,831,000	100.00	99.61	ST	ST
3.28.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	4	Paket	63,972,100	2	41,772,500	2	41,772,500	50.00	65.30	SR	R
3.28.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	positif	1	Paket	9,536,000	1	3,282,000	1	3,282,000	100.00	34.42	ST	SR
3.28.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	positif	1	Paket	26,590,000	0	-	1	26,300,000	100.00	98.91	ST	ST
3.28.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	positif	2	Paket	22,021,781	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	12	Laporan	467,000,000	3	183,035,836	6	296,698,155	50.00	63.53	SR	R
3.28.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	positif	16	Unit	316,826,900	0	-	0	88,271,250	0.00	27.86	SR	SR
3.28.001.1.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	positif	2	paket	37,656,000	0	-	2	35,200,000	100.00	93.48	ST	ST
3.28.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	positif	4	Unit	19,254,100	0	-	4	18,800,000	100.00	97.64	ST	ST
3.28.001.1.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	positif	1	Unit	259,916,800	0	-	0	34,271,250	0.00	13.19	SR	SR
3.28.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	positif	12	Bulan	822,041,480	3	178,938,499	6	419,359,840	50.00	51.01	SR	R
3.28.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	positif	12	Laporan	3,992,000	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	12	Laporan	90,957,800	3	9,940,579	6	30,264,000	50.00	33.27	SR	SR
3.28.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	12	Laporan	727,091,680	3	168,997,920	6	389,095,840	50.00	53.51	SR	R
3.28.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit barang yang diperlihara	positif	32	Unit	242,817,500	0	37,548,024	0	82,282,601	0.00	33.89	SR	SR
3.28.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak d	positif	22	Unit	161,297,500	15	37,548,024	17	82,282,601	77.27	51.01	T	R
3.28.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	positif	36	Unit	21,520,000	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	positif	1	Unit	60,000,000	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	positif	5050000	M3	8,478,066,400	970025	430,783,825	2170290	2,775,230,287	42.98	32.73	SR	SR
		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	positif	730	Ton		204.95		302.74		41.47		SR	
3.28.003.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	positif	1	Dokumen	1,555,098,600	0	113,736,280	1	764,435,419	100.00	49.16	ST	SR
3.28.003.1.01.003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hu	positif	1	Unit	1,555,098,600	1	113,736,280	1	764,435,419	100.00	49.16	ST	SR
3.28.003.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	positif	1	Dokumen	192,270,000	0	34,784,407	0	80,765,339	0.00	42.01	SR	SR
3.28.003.1.02.001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	positif	1	Dokumen	192,270,000	1	34,784,407	1	80,765,339	100.00	42.01	ST	SR
3.28.003.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	positif	312160	Ha	323,760,000	0	15,209,138	0	102,699,138	0.00	31.72	SR	SR
3.28.003.1.03.001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan	positif	1	dokumen	115,560,000	1	7,260,000	1	26,160,000	100.00	22.64	ST	SR
3.28.003.1.03.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan	positif	7	Dokumen	208,200,000	2	7,949,138	1	76,539,138	14.29	36.76	SR	SR
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	positif	35	Ha	3,291,820,000	0	76,082,000	0	1,110,118,200	0.00	33.72	SR	SR

3.28.003.1.04.001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	positif	1	Dokumen	145,660,000	1	7,320,000	1	13,980,000	100.00	9.60	ST	SR
3.28.003.1.04.004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	positif	115	Hektar	3,146,160,000	25	68,762,000	25	1,096,138,200	21.74	34.84	SR	SR
3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	positif	2	Kasus	3,024,277,800	0	190,972,000	0	717,212,191	0.00	23.72	SR	SR
3.28.003.1.05.002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Pengamanan Hutan Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli	positif	44126	Ha	657,555,000	10	23,770,000	15	184,686,255	0.03	28.09	SR	SR
3.28.003.1.05.004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan H	positif	12	Laporan	514,281,900	3	19,690,000	6	70,417,370	50.00	13.69	SR	SR
3.28.003.1.05.005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	positif	70	Laporan	1,852,440,900	3	147,512,000	6	462,108,566	8.57	24.95	SR	SR

3.28.003.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan	Jumlah Pembinaan dan Pemenuhan Komitmen pada unit manajemen	positif	1	hit Manajem	90,840,000	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.003.1.07.002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu da	positif	7	Dokumen	90,840,000	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	positif	32000	Ha	1,319,134,700	0	114,802,497	1083	585,240,411	3.38	44.37	SR	SR
3.28.005.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyaraka	positif	3	Laporan	1,319,134,700	0	114,802,497	0	585,240,411	0.00	44.37	SR	SR
3.28.005.1.01.001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	positif	3	Orang	102,261,000	1	6,450,000	1	22,643,038	33.33	22.14	SR	SR
3.28.005.1.01.002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan K	positif	4	Kelompok	487,880,000	3	27,365,000	3	304,275,120	75.00	62.37	S	R
3.28.005.1.01.003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	positif	200	Hektar	728,993,700	10	80,987,497	20	258,322,253	10.00	35.44	SR	SR
.28.0.00.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah					10,073,300,285		1,041,189,604		3,955,719,826		39.27		SR
3.28.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	positif	84	%	2,334,031,385	21	604,479,920	84	1,319,615,598	100.00	56.54	ST	R
3.28.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	positif	12	Laporan	190,560,000	3	44,464,348	6	74,344,948	50.00	39.01	SR	SR
3.28.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	12	Dokumen	119,520,000	3	29,880,000	6	59,760,000	50.00	50.00	SR	SR
3.28.001.1.02.003	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	positif	12	Dokumen	71,040,000	3	14,584,348	6	14,584,948	50.00	20.53	SR	SR
3.28.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	positif	4	Laporan	44,640,000	1	16,417,677	2	34,415,925	50.00	77.10	SR	T
3.28.001.1.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	positif	4	Laporan	44,640,000	1	16,417,677	2	34,415,925	50.00	77.10	SR	T
3.28.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	positif	12	Laporan	221,248,000	3	-	6	115,967,312	50.00	52.42	SR	R
3.28.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	positif	2	Paket	43,381,000	0	-	1	42,900,000	50.00	98.89	SR	ST
3.28.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	positif	6	Orang	177,867,000	6	-	6	73,067,312	100.00	41.08	ST	SR
3.28.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	12	Bulan	442,471,145	3	197,413,127	6	339,573,285	50.00	76.74	SR	T
3.28.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	7	Paket	35,613,400	0	28,593,000	7	31,793,000	100.00	89.27	ST	T
3.28.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	positif	3	Paket	45,007,745	0	14,967,500	3	44,984,200	100.00	99.95	ST	ST
3.28.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	12	Laporan	361,850,000	3	153,852,627	6	262,796,085	50.00	72.63	SR	S
3.28.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	JUMLAH UN	positif	45	Unit	208,363,800	4	137,020,000	4	200,120,000	8.89	96.04	SR	ST
		Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	positif	45	Unit		4		4		8.89		SR	
3.28.001.1.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	positif	1	Paket	28,051,800	0	-	1	25,650,000	100.00	91.44	ST	ST
3.28.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	positif	4	Unit	180,312,000	4	137,020,000	4	174,470,000	100.00	96.76	ST	ST
3.28.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	12	Bulan	920,639,440	3	189,668,012	6	436,508,897	50.00	47.41	SR	SR
3.28.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	positif	12	Laporan	8,370,000	3	2,100,000	6	3,700,000	50.00	44.21	SR	SR
3.28.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	12	Laporan	94,090,000	3	9,682,652	6	23,314,177	50.00	24.78	SR	SR
3.28.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	12	Laporan	818,179,440	3	177,885,360	6	409,494,720	50.00	50.05	SR	SR
3.28.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit barang yang diperlihara	positif	11	Unit	306,109,000	0	19,496,756	10	118,685,231	90.91	38.77	T	SR
3.28.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	positif	20	Unit	225,529,000	0	19,496,756	10	38,235,231	50.00	16.95	SR	SR
3.28.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh	positif	1	Unit	80,580,000	0	-	1	80,450,000	100.00	99.84	ST	ST
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	positif	5050000	M3	6,606,914,900	970025	365,699,684	2170290	2,342,239,546	42.98	35.45	SR	SR
		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	positif	730	Ton		204.95		302.74		41.47		SR	
3.28.003.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	positif	1	Dokumen	1,605,360,900	0	-	1	102,986,249	100.00	6.42	ST	SR
3.28.003.1.01.003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hu	positif	1	Unit	1,605,360,900	0	-	1	102,986,249	100.00	6.42	ST	SR
3.28.003.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	positif	1	Dokumen	146,664,000	0	19,475,182	1	22,147,582	100.00	15.10	ST	SR
3.28.003.1.02.001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	positif	1	Dokumen	146,664,000	0	19,475,182	1	22,147,582	100.00	15.10	ST	SR
3.28.003.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	positif	301650	Ha	182,520,000	0	19,335,174	301650	167,776,430	100.00	91.92	ST	ST
3.28.003.1.03.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalik	positif	6	UM	182,520,000	0	19,335,174	6	167,776,430	100.00	91.92	ST	ST
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan	positif	1	Dokumen		0		1		100.00		ST	
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	positif	50	Ha	2,547,042,000	0	45,675,600	30	877,826,413	60.00	34.46	R	SR
3.28.003.1.04.004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	positif	65	Ha	2,547,042,000	0	45,675,600	30	877,826,413	46.15	34.46	SR	SR
3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	positif	2	Kasus	1,971,894,000	0	259,333,200	0	1,072,487,783	0.00	54.39	SR	R
3.28.003.1.05.002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	positif	300	Ha	282,396,000	0	142,677,600	300	256,127,629	100.00	90.70	ST	T
3.28.003.1.05.004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan H	positif	12	Laporan	587,886,000	3	70,041,600	6	200,318,800	50.00	34.07	SR	SR
3.28.003.1.05.005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	positif	12	Laporan	1,101,612,000	3	46,614,000	6	616,041,354	50.00	55.92	SR	R
3.28.003.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	positif	1	Unit	153,434,000	0	21,880,528	1	99,015,089	100.00	64.53	ST	R
3.28.003.1.06.003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	positif	1	it Managem	153,434,000	0	21,880,528	1	99,015,089	100.00	64.53	ST	R
3.28.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	positif	32000	Ha	1,132,354,000	0	71,010,000	1083	293,864,682	3.38	25.95	SR	SR
3.28.005.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyaraka	positif	4	Laporan	1,132,354,000	0	71,010,000	2	293,864,682	50.00	25.95	SR	SR
3.28.005.1.01.002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan K	positif	3	Kelompok	426,120,000	0	33,813,600	2	105,015,596	66.67	24.64	S	SR
3.28.005.1.01.003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	positif	1000	Ha	706,234,000	0	37,196,400	1000	188,849,086	100.00	26.74	ST	SR
.28.0.00.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai					10,228,223,720		1,336,484,309		2,784,768,906		27.23		SR
3.28.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	positif	84	%	2,127,050,920	0	427,667,794	0	884,278,186	0.00	41.57	SR	SR
3.28.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	positif	12	Laporan	124,800,000	3	27,840,000	6	46,400,000	50.00	37.18	SR	SR

3.28.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	12	Dokumen	124,800,000	3	27,840,000	6	46,400,000	50.00	37.18	SR	SR
3.28.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	positif	12	Laporan	141,654,000	0	37,956,620	9	77,556,620	75.00	54.75	S	R
3.28.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	positif	2	Paket	41,814,000	0	-	1	39,600,000	50.00	94.71	SR	ST
3.28.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	positif	8	Orang	99,840,000	4	37,956,620	4	37,956,620	50.00	38.02	SR	SR
3.28.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	12	Bulan	359,098,040	0	137,074,741	7	232,938,295	58.33	64.87	R	R
3.28.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	positif	6	Paket	32,048,000	3	18,511,800	3	20,327,000	50.00	63.43	SR	R

3.28.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	positif	12	Paket	48,450,040	3	8,730,000	4	14,130,000	33.33	29.16	SR	SR
3.28.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	12	Laporan	278,600,000	3	109,832,941	7	198,481,295	58.33	71.24	R	S
3.28.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	positif	15	Unit	558,845,100	0	32,634,100	9	177,164,952	60.00	31.70	R	SR
3.28.001.1.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	positif	2	Paket	55,248,000	0	309,100	2	52,009,100	100.00	94.14	ST	ST
3.28.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	positif	30	Unit	196,767,100	5	32,325,000	7	87,742,600	23.33	44.59	SR	SR
3.28.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	positif	1	Unit	306,830,000	0	-	0	37,413,252	0.00	12.19	SR	SR
3.28.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	positif	12	Bulan	743,560,380	0	160,090,023	6	300,021,709	50.00	40.35	SR	SR
3.28.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	positif	12	Laporan	5,004,000	2	264,000	2	264,000	16.67	5.28	SR	SR
3.28.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	12	Laporan	97,582,800	2	17,830,086	6	30,184,092	50.00	30.93	SR	SR
3.28.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	12	Laporan	20,157,500	2	1,554,417	2	2,654,417	16.67	13.17	SR	SR
3.28.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	12	Laporan	620,816,080	3	140,441,520	6	266,919,200	50.00	42.99	SR	SR
3.28.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit barang yang diperlihara	positif	1	Unit	199,093,400	0	32,072,310	5	50,196,610	500.00	25.21	ST	SR
3.28.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	positif	20	Unit	199,093,400	3	32,072,310	5	50,196,610	25.00	25.21	SR	SR
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	positif	730	Ton	6,646,646,800	204.95	812,487,913	302.74	1,659,426,317	41.47	24.97	SR	SR
		1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	positif	5050000	M3		970025		2170290		42.98		SR	
3.28.003.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	positif	3	Dokumen	1,067,844,900	0	424,477,712	7	487,526,419	233.33	45.66	ST	SR
3.28.003.1.01.003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hu	positif	11	Unit	1,067,844,900	6	424,477,712	7	487,526,419	63.64	45.66	R	SR
3.28.003.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali	JUMLAH DO	positif	3	Dokumen	566,481,000	0	67,028,630	1	212,567,440	33.33	37.52	SR	SR
3.28.003.1.02.001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	positif	2	Dokumen	566,481,000	0	67,028,630	1	212,567,440	50.00	37.52	SR	SR
3.28.003.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	positif	132335	Ha	331,000,000	0	12,355,000	14633	25,535,000	11.06	7.71	SR	SR
3.28.003.1.03.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan	positif	6	Dokumen	331,000,000	0	12,355,000	1	25,535,000	16.67	7.71	SR	SR
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	positif	27	Ha	2,152,908,600	0	101,646,898	6	268,557,825	22.22	12.47	SR	SR
3.28.003.1.04.004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	positif	25	Ha	2,152,908,600	4	101,646,898	6	268,557,825	24.00	12.47	SR	SR
3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	positif	2	Kasus	2,528,412,300	0	206,979,673	0	665,239,633	0.00	26.31	SR	SR
3.28.003.1.05.002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	positif	152098	Ha	200,362,800	4	56,781,200	86	115,701,166	0.06	57.75	SR	R
3.28.003.1.05.004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan H	positif	12	Dokumen	1,025,161,700	4	150,198,473	4	258,888,473	33.33	25.25	SR	SR
3.28.003.1.05.005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	positif	32	Laporan	1,302,887,800	0	-	8	290,649,994	25.00	22.31	SR	SR
3.28.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	positif	32000	Ha	1,454,526,000	0	96,328,602	1083	241,064,403	3.38	16.57	SR	SR
3.28.005.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyaraka	positif	5	Laporan	1,454,526,000	0	96,328,602	1	241,064,403	20.00	16.57	SR	SR
3.28.005.1.01.001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	positif	6	Orang	90,000,000	0	10,230,686	0	10,230,686	0.00	11.37	SR	SR
3.28.005.1.01.002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan K	positif	3	Kelompok	173,100,000	1	43,535,196	1	96,880,196	33.33	55.97	SR	R
3.28.005.1.01.003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	positif	2833	Ha	1,191,426,000	3	42,562,720	258	133,953,521	9.11	11.24	SR	SR
28.0.00.0.00.01.0014	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar					12,326,304,760		1,204,142,809		4,565,845,606		37.04		SR
3.28.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	positif	84	%	2,627,823,244	21	608,646,197	42	1,619,225,856	50.00	61.62	SR	R
3.28.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	positif	12	Laporan	138,240,000	3	33,360,000	6	66,720,000	50.00	48.26	SR	SR
3.28.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	12	Dokumen	138,240,000	3	33,360,000	6	66,720,000	50.00	48.26	SR	SR
3.28.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	positif	12	Laporan	132,609,300	3	-	6	58,499,050	50.00	44.11	SR	SR
3.28.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	positif	3	Paket	44,409,300	0	-	1	26,577,840	33.33	59.85	SR	R
3.28.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	positif	9	Orang	88,200,000	0	-	3	31,921,210	33.33	36.19	SR	SR
3.28.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	12	Bulan	774,602,204	3	341,101,496	6	638,505,856	50.00	82.43	SR	T
3.28.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	positif	2	Paket	4,954,900	0	-	2	4,954,900	100.00	100.00	ST	ST
3.28.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	2	Paket	45,153,004	2	45,151,800	2	45,151,800	100.00	100.00	ST	ST
3.28.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	positif	2	Paket	14,607,800	2	14,607,800	2	14,607,800	100.00	100.00	ST	ST
3.28.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	positif	2	Paket	4,386,500	2	4,386,500	2	4,386,500	100.00	100.00	ST	ST
3.28.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	4	Laporan	705,500,000	1	276,955,396	2	569,404,856	50.00	80.71	SR	T
3.28.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	positif	79	Unit	447,072,800	0	-	19	316,397,000	24.05	70.77	SR	S
3.28.001.1.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	positif	2	Paket	33,642,000	0	-	2	33,404,000	100.00	99.29	ST	ST
3.28.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	positif	23	Unit	413,430,800	0	-	17	282,993,000	73.91	68.45	S	S
3.28.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	positif	12	Bulan	919,199,440	3	150,178,860	6	386,189,420	50.00	42.01	SR	SR
3.28.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	4	Laporan	150,781,200	1	24,724,300	2	51,680,300	50.00	34.28	SR	SR
3.28.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	4	Laporan	768,418,240	1	125,454,560	2	334,509,120	50.00	43.53	SR	SR
3.28.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	positif	66	Unit	216,099,500	20	84,005,841	44	152,914,530	66.67	70.76	S	S
3.28.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	positif	26	Unit	163,189,500	12	76,005,841	19	121,274,530	73.08	74.32	S	S
3.28.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	positif	41	Unit	52,910,000	8	8,000,000	25	31,640,000	60.98	59.80	R	R
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	positif	5050000	M3	8,596,645,566	970025	557,710,612	2170290	2,615,509,364	42.98	30.42	SR	SR
		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	positif	730	Ton		204.95		302.74		41.47		SR	

3.28.003.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	positif	1	Dokumen	3,027,480,700	0	129,220,000	0	580,842,239	0.00	19.19	SR	SR
3.28.003.1.01.003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hu	positif	2	Unit	3,027,480,700	0	129,220,000	0	580,842,239	0.00	19.19	SR	SR
3.28.003.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali	Tersusunnya dokumen RPHJP/Revisi RPHJP /dokumen perencanaan lainnya	positif	3	Dokumen	742,035,500	0	35,415,000	0	35,415,000	0.00	4.77	SR	SR
3.28.003.1.02.001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	positif	3	Dokumen	742,035,500	0	35,415,000	0	35,415,000	0.00	4.77	SR	SR
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	positif	75	Ha	1,967,469,000	0	134,515,850	0	1,119,299,250	0.00	56.89	SR	R
3.28.003.1.04.002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	positif	25	Ha	1,967,469,000	0	134,515,850	0	1,119,299,250	0.00	56.89	SR	R

3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	positif	1	Kasus	2,859,660,366	0	258,559,762	1	879,952,875	100.00	30.77	ST	SR
3.28.003.1.05.004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan H	positif	10	Dokumen	1,066,770,816	2	130,429,762	4	383,613,170	40.00	35.96	SR	SR
3.28.003.1.05.005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	positif	12	Laporan	1,792,889,550	3	128,130,000	6	496,339,705	50.00	27.68	SR	SR
3.28.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	positif	32000	Ha	1,101,835,950	0	37,786,000	1083	331,110,386	3.38	30.05	SR	SR
3.28.005.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan	Terlaksananya pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat	positif	2	Laporan	1,101,835,950	0	37,786,000	0	331,110,386	0.00	30.05	SR	SR
3.28.005.1.01.002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan K	positif	2	Kelompok	839,523,600	0	27,008,000	0	309,462,386	0.00	36.86	SR	SR
3.28.005.1.01.003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	positif	30	Ha	262,312,350	0	10,778,000	0	21,648,000	0.00	8.25	SR	SR
.28.0.00.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau					17,170,030,695		1,229,420,094		6,326,590,219		36.85		SR
3.28.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	positif	84	%	2,375,358,020	0	711,672,094	0	1,426,610,518	0.00	60.06	SR	R
3.28.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	positif	12	Laporan	148,800,000	3	35,160,000	6	70,320,000	50.00	47.26	SR	SR
3.28.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	1	Dokumen	148,800,000	0	35,160,000	0	70,320,000	0.00	47.26	SR	SR
3.28.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	positif	12	Laporan	74,643,000	3	20,424,000	6	69,280,300	50.00	92.82	SR	ST
3.28.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	positif	2	Paket	31,635,000	0	-	2	31,002,300	100.00	98.00	ST	ST
3.28.001.1.05.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	positif	1	Dokumen	43,008,000	0	20,424,000	0	38,278,000	0.00	89.00	SR	T
3.28.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	12	Bulan	638,362,260	3	168,994,908	6	369,291,256	50.00	57.85	SR	R
3.28.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	6	Paket	94,335,000	2	21,766,000	5	43,287,000	83.33	45.89	T	SR
3.28.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	positif	2	Paket	14,419,260	1	5,250,000	1	9,243,220	50.00	64.10	SR	R
3.28.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	12	Laporan	529,608,000	3	141,978,908	6	316,761,036	50.00	59.81	SR	R
3.28.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	positif	8	Unit	477,044,000	6	357,713,106	8	453,763,106	100.00	95.12	ST	ST
3.28.001.1.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	positif	4	Paket	85,016,000	4	83,940,000	4	83,940,000	100.00	98.73	ST	ST
3.28.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	positif	8	Unit	392,028,000	6	273,773,106	8	369,823,106	100.00	94.34	ST	ST
3.28.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	positif	12	Bulan	759,010,760	3	129,380,080	6	343,383,660	50.00	45.24	SR	SR
3.28.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	12	Laporan	152,411,800	0	-	6	41,273,500	50.00	27.08	SR	SR
3.28.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	12	Laporan	606,598,960	3	129,380,080	6	302,110,160	50.00	49.80	SR	SR
3.28.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit barang yang diperlihara	positif	32	Unit	277,498,000	0	-	25	120,572,196	78.13	43.45	T	SR
3.28.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	positif	31	Unit	239,628,000	0	-	20	88,561,115	64.52	36.96	R	SR
3.28.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	positif	8	Unit	37,870,000	0	-	5	32,011,081	62.50	84.53	R	T
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	positif	5050000	M3	13,330,613,300	970025	517,748,000	2170290	4,403,948,789	42.98	33.04	SR	SR
		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	positif	730	Ton		204.95		302.74		41.47		SR	
3.28.003.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	positif	1	Dokumen	3,108,929,100	0	397,849,000	0	1,463,223,177	0.00	47.07	SR	SR
3.28.003.1.01.003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hu	positif	7	Unit	3,108,929,100	2	397,849,000	5	1,463,223,177	71.43	47.07	S	SR
3.28.003.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	positif	1	Dokumen	471,899,500	0	46,539,000	1	66,763,000	100.00	14.15	ST	SR
3.28.003.1.02.001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	positif	1	Dokumen	471,899,500	0	46,539,000	1	66,763,000	100.00	14.15	ST	SR
3.28.003.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	positif	94000	Ha	377,014,500	0	73,360,000	400133	171,814,500	425.67	45.57	ST	SR
3.28.003.1.03.001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan	positif	1	Dokumen	134,072,500	0	73,360,000	1	129,492,500	100.00	96.58	ST	ST
3.28.003.1.03.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan	positif	1	Dokumen	242,942,000	0	-	0	42,322,000	0.00	17.42	SR	SR
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	positif	100	Ha	6,802,288,000	0	-	50	2,304,762,112	50.00	33.88	SR	SR
3.28.003.1.04.004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	positif	100	Ha	6,802,288,000	0	-	50	2,304,762,112	50.00	33.88	SR	SR
3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	positif	3	Kasus	2,502,720,200	0	-	0	396,824,000	0.00	15.86	SR	SR
3.28.003.1.05.002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	positif	239700	Ha	224,052,000	0	-	443.23	129,594,000	0.18	57.84	SR	R
3.28.003.1.05.004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan H	positif	2	Dokumen	301,144,000	0	-	0	10,590,000	0.00	3.52	SR	SR
3.28.003.1.05.005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	positif	2	Laporan	1,977,524,200	0	-	1	256,640,000	50.00	12.98	SR	SR
3.28.003.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu	positif	1	UM	67,762,000	0	-	0	562,000	0.00	0.83	SR	SR
3.28.003.1.07.002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan. Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu da	positif	2	Dokumen	67,762,000	0	-	0	562,000	0.00	0.83	SR	SR
3.28.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	positif	32000	Ha	1,464,059,375	0	-	1083	496,030,912	3.38	33.88	SR	SR
3.28.005.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyaraka	positif	8	Laporan	1,464,059,375	0	-	4	496,030,912	50.00	33.88	SR	SR
3.28.005.1.01.001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	positif	5	Orang	472,439,000	0	-	2	131,723,612	40.00	27.88	SR	SR
3.28.005.1.01.002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan K	positif	2	Kelompok	691,220,375	0	-	0	258,854,800	0.00	37.45	SR	SR
3.28.005.1.01.003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	positif	1000	Ha	300,400,000	0	-	1000	105,452,500	100.00	35.10	ST	SR
.28.0.00.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta					12,730,129,987		1,442,306,082		4,708,289,923		36.99		SR
3.28.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	positif	84	%	2,811,822,665	0	430,771,032	45	1,605,761,122	53.57	57.11	R	R
3.28.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	positif	12	Laporan	148,800,000	0	-	4	45,160,000	33.33	30.35	SR	SR
3.28.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	12	Dokumen	148,800,000	0	-	4	45,160,000	33.33	30.35	SR	SR
3.28.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	positif	12	Laporan	101,760,000	0	-	12	95,287,728	100.00	93.64	ST	ST
3.28.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannnya	positif	3	Paket	101,760,000	0	-	3	95,287,728	100.00	93.64	ST	ST
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	positif	0	Paket		0		0		0.00		SR	

3.28.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	12	Bulan	434,921,665	3	91,979,300	12	215,222,587	100.00	49.49	ST	SR
3.28.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	positif	1	Paket	19,661,465	1	5,915,200	1	19,213,000	100.00	97.72	ST	ST
3.28.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	positif	29	Paket	50,931,200	29	50,516,100	30	50,516,100	103.45	99.18	ST	ST
3.28.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	positif	1	Paket	10,209,000	1	6,652,000	1	6,808,200	100.00	66.69	ST	S
3.28.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	12	Laporan	354,120,000	3	28,896,000	6	138,685,287	50.00	39.16	SR	SR
3.28.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	positif	10	Unit	319,082,200	1	38,200,000	1	305,740,000	10.00	95.82	SR	ST

3.28.001.1.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	positif	4	Paket	58,029,200	1	15,400,000	4	53,290,000	100.00	91.83	ST	ST
3.28.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	positif	19	Unit	261,053,000	1	22,800,000	19	252,450,000	100.00	96.70	ST	ST
3.28.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	positif	12	Bulan	1,350,144,400	3	290,921,732	6	683,819,959	50.00	50.65	SR	SR
3.28.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	12	Laporan	156,829,200	3	24,168,292	6	60,063,079	50.00	38.30	SR	SR
3.28.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	12	Laporan	1,193,315,200	3	266,753,440	6	623,756,880	50.00	52.27	SR	R
3.28.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit barang yang diperlihara	positif	1	Unit	457,114,400	0	9,670,000	1	260,530,848	100.00	56.99	ST	R
3.28.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	positif	16	Unit	41,599,000	0	-	8	6,519,000	50.00	15.67	SR	SR
3.28.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	positif	38	Unit	223,609,400	1	9,670,000	7	63,295,848	18.42	28.31	SR	SR
3.28.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	positif	1	Unit	191,906,000	0	-	2	190,716,000	200.00	99.38	ST	ST
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	positif	5050000	M3	6,152,224,122	970025	649,853,900	2170290	1,863,130,495	42.98	30.28	SR	SR
		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	positif	730	Ton		204.95		302.74		41.47		SR	
3.28.003.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	positif	1	Dokumen	1,200,000,000	0	241,111,900	1	974,458,600	100.00	81.20	ST	T
3.28.003.1.01.003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hu	positif	80	Unit	1,200,000,000	3	241,111,900	60	974,458,600	75.00	81.20	S	T
3.28.003.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	positif	1	Dokumen	400,000,000	1	31,978,600	1	119,713,200	100.00	29.93	ST	SR
3.28.003.1.02.001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	positif	1	Dokumen	400,000,000	1	31,978,600	1	119,713,200	100.00	29.93	ST	SR
3.28.003.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	positif	37578	Ha	230,000,000	0	40,575,400	1	49,866,000	0.00	21.68	SR	SR
3.28.003.1.03.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan	positif	1	Dokumen	230,000,000	1	40,575,400	1	49,866,000	100.00	21.68	ST	SR
3.28.003.1.03.009	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu d	positif	1	Dokumen	-	0	-	0	-	0.00		SR	SR
			positif	0			0		0					
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	positif	100	Ha	1,527,171,500	0	4,740,000	0	4,740,000	0.00	0.31	SR	SR
3.28.003.1.04.001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	positif	1	Dokumen	78,100,000	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.003.1.04.004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	positif	100	Ha	1,449,071,500	0	4,740,000	0	4,740,000	0.00	0.33	SR	SR
3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	positif	2	Kasus	2,010,242,622	0	331,448,000	0	714,352,695	0.00	35.54	SR	SR
3.28.003.1.05.004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan H	positif	2	Dokumen	600,000,000	0	55,594,000	1	227,032,295	50.00	37.84	SR	SR
3.28.003.1.05.005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	positif	4	Laporan	1,410,242,622	0	275,854,000	1	487,320,400	25.00	34.56	SR	SR
3.28.003.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu	positif	1	Unit	784,810,000	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.003.1.06.003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	positif	2	it Managem	784,810,000	0	-		-		0.00		SR
3.28.004	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	positif	1	%	100,000,000	0	11,940,000	1	56,640,400	100.00	56.64	ST	R
3.28.004.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan pengelolaan KBEP	positif	1	Laporan	100,000,000	0	11,940,000	0	56,640,400	0.00	56.64	SR	R
3.28.004.1.03.004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	positif	50	Ha	100,000,000	0	11,940,000	0	56,640,400	0.00	56.64	SR	R
3.28.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	positif	32000	Ha	3,666,083,200	0	349,741,150	1083	1,182,757,906	3.38	32.26	SR	SR
3.28.005.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyaraka	positif	8	Laporan	3,666,083,200	0	349,741,150	3	1,182,757,906	37.50	32.26	SR	SR
3.28.005.1.01.001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	positif	12	Orang	359,341,950	2	8,300,000	7	170,345,930	58.33	47.40	R	SR
3.28.005.1.01.003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	positif	1000	Ha	3,306,741,250	50	341,441,150	100	1,012,411,976	10.00	30.62	SR	SR
28.0.00.0.00.01.0017	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai					17,577,978,186		2,395,667,538		5,928,249,066		33.73		SR
3.28.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	positif	84	%	2,778,435,786	0	632,675,727	0	1,457,305,774	0.00	52.45	SR	R
3.28.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	positif	12	Laporan	202,800,000	1	13,932,720	6	88,332,720	50.00	43.56	SR	SR
3.28.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	1	Dokumen	148,800,000	0	-	0	74,400,000	0.00	50.00	SR	SR
3.28.001.1.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap	positif	2	Laporan	54,000,000	1	13,932,720	1	13,932,720	50.00	25.80	SR	SR
3.28.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	positif	2	Laporan	54,000,000	1	14,077,920	1	29,447,182	50.00	54.53	SR	R
3.28.001.1.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	positif	2	Laporan	54,000,000	1	14,077,920	1	29,447,182	50.00	54.53	SR	R
3.28.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	positif	12	Laporan	133,389,000	3	28,855,537	6	92,860,037	50.00	69.62	SR	S
3.28.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	positif	2	Paket	35,409,000	0	-	2	34,310,100	100.00	96.90	ST	ST
3.28.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	positif	10	Orang	97,980,000	3	28,855,537	7	58,549,937	70.00	59.76	S	R
3.28.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	12	Bulan	775,487,286	3	146,983,000	6	403,158,103	50.00	51.99	SR	R
3.28.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	positif	8	Paket	11,081,400	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	14	Paket	99,141,886	6	41,453,200	6	41,453,200	42.86	41.81	SR	SR
3.28.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	positif	15	Paket	22,834,000	12	18,024,000	12	18,024,000	80.00	78.93	T	T
3.28.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	positif	5	Paket	48,008,000	3	24,004,000	3	24,004,000	60.00	50.00	R	SR
3.28.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	12	Laporan	594,422,000	3	63,501,800	6	319,676,903	50.00	53.78	SR	R
3.28.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	positif	25	Unit	282,647,600	23	249,624,400	23	262,198,900	92.00	92.77	ST	ST
3.28.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	positif	0	Unit	-	0	-	0	-				SR
3.28.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	positif	69	Unit	282,647,600	58	249,624,400	69	262,198,900	100.00	92.77	ST	ST
3.28.001.1.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	positif	0	Unit	-	0	-	0	-				SR
3.28.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JUMLAH BULAN	positif	12	Bulan	818,473,400	3	136,515,140	6	349,927,822	50.00	42.75	SR	SR
3.28.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	positif	12	Laporan	7,780,000	10	6,390,000	10	6,390,000	83.33	82.13	T	T

3.28.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	12	Laporan	138,382,600	0	-	6	41,340,042	50.00	29.87	SR	SR
3.28.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	12	Laporan	672,310,800	3	130,125,140	6	302,197,780	50.00	44.95	SR	SR
3.28.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit barang yang diperlihara	positif	13	Unit	511,638,500	3	42,687,010	6	231,381,010	46.15	45.22	SR	SR
3.28.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dib	positif	5	Unit	54,195,000	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	positif	24	Unit	367,093,500	3	42,687,010	5	141,639,010	20.83	38.58	SR	SR
3.28.001.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipel	positif	1	Unit	90,350,000	0	-	1	89,742,000	100.00	99.33	ST	ST

3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	positif	730	Ton	11,095,348,525	0	1,079,211,411	302.74	3,195,611,606	41.47	28.80	SR	SR
		1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	positif	5050000	M3		0		2170290		42.98		SR	
3.28.003.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	positif	2	Dokumen	4,477,742,325	0	845,726,475	1	1,484,633,310	50.00	33.16	SR	SR
3.28.003.1.01.002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pe	positif	1	Unit	149,999,600	0	6,544,800	0	29,854,800	0.00	19.90	SR	SR
3.28.003.1.01.003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hu	positif	34	Unit	4,327,742,725	22	839,181,675	22	1,454,778,510	64.71	33.62	R	SR
3.28.003.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	positif	3	Dokumen	660,468,500	0	40,268,136	0	135,974,034	0.00	20.59	SR	SR
3.28.003.1.02.001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	positif	1	Dokumen	660,468,500	0	40,268,136	0	135,974,034	0.00	20.59	SR	SR
3.28.003.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	positif	132792	Ha	898,307,500	0	71,144,800	102269	336,684,800	77.01	37.48	T	SR
3.28.003.1.03.001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan	positif	1	Dokumen	154,672,500	0	7,352,400	4	59,252,400	400.00	38.31	ST	SR
3.28.003.1.03.002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi	positif	1	Dokumen	53,920,000	0	-	0	8,880,000	0.00	16.47	SR	SR
3.28.003.1.03.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan	positif	13	Dokumen	689,715,000	2	63,792,400	5	268,552,400	38.46	38.94	SR	SR
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	positif	173	Ha	1,978,088,500	0	4,742,000	0	646,828,918	0.00	32.70	SR	SR
3.28.003.1.04.004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	positif	80	Ha	1,734,936,000	0	4,742,000	0	646,828,918	0.00	37.28	SR	SR
3.28.003.1.04.008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilita	positif	1	Laporan	243,152,500	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	positif	2	Kasus	3,080,741,700	0	117,330,000	0	591,490,544	0.00	19.20	SR	SR
3.28.003.1.05.002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	positif	541626.1	Ha	250,000,000	115085	53,120,000	294081	135,740,000	54.30	54.30	R	R
3.28.003.1.05.004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan H	positif	13	Dokumen	1,039,220,000	0	2,042,000	2	103,729,000	15.38	9.98	SR	SR
3.28.003.1.05.005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	positif	15	Laporan	1,791,521,700	1	62,168,000	4	352,021,544	26.67	19.65	SR	SR
3.28.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	positif	32000	Ha	3,704,193,875	0	683,780,400	1083	1,275,331,686	3.38	34.43	SR	SR
3.28.005.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan	jumlah pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehu	positif	32	Laporan	3,704,193,875	2	683,780,400	1	1,275,331,686	3.13	34.43	SR	SR
3.28.005.1.01.001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	positif	15	Orang	599,160,000	0	-	6	49,455,286	40.00	8.25	SR	SR
		Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	positif	0	Orang		0		0		0.00		SR	
3.28.005.1.01.002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan K	positif	10	Kelompok	724,868,000	0	4,268,000	0	70,206,000	0.00	9.69	SR	SR
3.28.005.1.01.003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	positif	1000	Ha	2,380,165,875	0	679,512,400	225	1,155,670,400	22.50	48.55	SR	SR
28.0.00.0.00.01.0018	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor					13,836,172,161		1,326,419,151		4,437,693,684		32.07		SR
3.28.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	positif	84	%	3,140,452,661	14	798,910,637	21	1,685,168,086	25.00	53.66	SR	R
3.28.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	positif	12	Laporan	139,200,000	3	34,800,000	6	58,000,000	50.00	41.67	SR	SR
3.28.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	12	Dokumen	139,200,000	3	34,800,000	6	58,000,000	50.00	41.67	SR	SR
3.28.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	positif	12	Laporan	184,679,400	3	-	6	80,630,000	50.00	43.66	SR	SR
3.28.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	positif	1	Paket	71,205,000	0	-	1	71,150,000	100.00	99.92	ST	ST
3.28.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	positif	12	Orang	113,474,400	0	-	1	9,480,000	8.33	8.35	SR	SR
3.28.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	12	Bulan	792,817,281	3	230,406,155	6	523,384,608	50.00	66.02	SR	S
3.28.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	positif	1	Paket	4,972,500	1	4,961,000	1	4,961,000	100.00	99.77	ST	ST
3.28.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	5	Paket	67,610,781	3	30,081,900	4	64,617,900	80.00	95.57	T	ST
3.28.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	positif	5	Paket	27,951,000	2.5	17,218,500	3	23,296,500	60.00	83.35	R	T
3.28.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	positif	3	Paket	16,003,000	0.9	4,500,000	1	6,975,000	33.33	43.59	SR	SR
3.28.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	25	Laporan	676,280,000	2	173,644,755	6	423,534,208	24.00	62.63	SR	R
3.28.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	positif	66	Unit	533,060,000	36	288,092,657	36	288,092,657	54.55	54.05	R	R
3.28.001.1.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	positif	1	Paket	74,676,000	1	73,413,407	1	73,413,407	100.00	98.31	ST	ST
3.28.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	positif	105	Unit	241,220,000	35	214,679,250	35	214,679,250	33.33	89.00	SR	T
3.28.001.1.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	positif	1	Unit	217,164,000	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	positif	0	Unit	-	0	-	0	-				SR
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	positif	0	Unit		0		0					
3.28.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	positif	12	Bulan	879,990,280	3	186,314,820	6	436,686,140	50.00	49.62	SR	SR
3.28.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	positif	10	Laporan	3,058,000	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	12	Laporan	96,482,600	3	4,914,900	6	19,036,300	50.00	19.73	SR	SR
3.28.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	12	Laporan	780,449,680	3	181,399,920	6	417,649,840	50.00	53.51	SR	R
3.28.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit barang yang diperlihara	positif	40	Unit	610,705,700	0	59,297,005	16	298,374,681	40.00	48.86	SR	SR
3.28.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dib	positif	10	Unit	252,088,500	2	27,082,121	4	90,275,521	40.00	35.81	SR	SR
3.28.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	positif	14	Unit	126,857,200	0	32,214,884	12	52,031,160	85.71	41.02	T	SR
3.28.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	positif	30	Unit	16,470,000	0	-	3	1,250,000	10.00	7.59	SR	SR
3.28.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	positif	1	Unit	60,000,000	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.001.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipel	positif	1	Unit	155,290,000	0	-	1	154,818,000	100.00	99.70	ST	ST
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	positif	5050000	M3	8,491,886,900	970025	359,054,900	2170290	2,256,912,881	42.98	26.58	SR	SR
		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	positif	730	Ton		204.95		302.74		41.47		SR	
3.28.003.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	positif	2	Dokumen	2,393,744,900	0	135,107,400	0	729,981,270	0.00	30.50	SR	SR

3.28.003.1.01.002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pe	positif	1	Unit	268,904,000	0	-	0	47,498,320	0.00	17.66	SR	SR
3.28.003.1.01.003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hu	positif	1	Unit	2,124,840,900	0	135,107,400	0	682,482,950	0.00	32.12	SR	SR
3.28.003.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	positif	1	Dokumen	318,260,000	0	70,512,000	0	177,802,000	0.00	55.87	SR	R
3.28.003.1.02.001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	positif	1	Dokumen	318,260,000	0	70,512,000	0	177,802,000	0.00	55.87	SR	R
3.28.003.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	positif	85751	Ha	587,476,000	0	-	0	140,882,680	0.00	23.98	SR	SR
3.28.003.1.03.001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan	positif	1	Dokumen	250,516,000	0	-	0	130,572,680	0.00	52.12	SR	R

3.28.003.1.03.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan	positif	2	Dokumen	336,960,000	0	-	0	10,310,000	0.00	3.06	SR	SR
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	positif	80	Ha	3,324,890,000	0	71,095,700		625,231,520		18.80		SR
3.28.003.1.04.004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	positif	95	Ha	2,629,280,000	0	8,317,200	0	360,165,020	0.00	13.70	SR	SR
3.28.003.1.04.008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilita	positif	3	Laporan	695,610,000	0	62,778,500	0	265,066,500	0.00	38.11	SR	SR
3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	positif	2	Kasus	1,867,516,000	0	82,339,800	0	583,015,411	0.00	31.22	SR	SR
3.28.003.1.05.002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	positif	410738	Ha	136,560,000	0	6,544,800	410738	98,503,050	100.00	72.13	ST	S
3.28.003.1.05.004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan H	positif	3	Dokumen	390,236,000	0	-	1	137,394,057	33.33	35.21	SR	SR
3.28.003.1.05.005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	positif	5	Laporan	1,340,720,000	0	75,795,000	2	347,118,304	40.00	25.89	SR	SR
3.28.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	positif	32000	Ha	2,203,832,600	0	168,453,614	1083	495,612,717	3.38	22.49	SR	SR
3.28.005.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyaraka	positif	12	Laporan	2,203,832,600	0	168,453,614	6	495,612,717	50.00	22.49	SR	SR
3.28.005.1.01.001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	positif	2	Orang	209,000,000	0	-	1	13,749,103	50.00	6.58	SR	SR
3.28.005.1.01.002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan K	positif	5	Kelompok	841,225,000	0	7,980,000	3	129,359,000	60.00	15.38	R	SR
3.28.005.1.01.003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	positif	1000	Ha	1,153,607,600	0	160,473,614	0	352,504,614	0.00	30.56	SR	SR
.28.0.00.0.00.01.0019	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake					13,432,978,515		2,411,683,229		5,437,020,881		40.48		SR
3.28.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	positif	84	%	2,374,269,677	0.28	683,969,610	42	1,367,250,384	50.00	57.59	SR	R
3.28.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	positif	12	Laporan	213,720,000	1	34,766,100	6	86,657,593	50.00	40.55	SR	SR
3.28.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	3	Dokumen	148,800,000	1	21,820,000	2	61,320,000	66.67	41.21	S	SR
3.28.001.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi P	positif	12	Laporan	64,920,000	1	12,946,100	6	25,337,593	50.00	39.03	SR	SR
3.28.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	positif	12	Laporan	27,120,000	1	-	6	7,706,100	50.00	28.41	SR	SR
3.28.001.1.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	positif	6	Laporan	27,120,000	0	-	1	7,706,100	16.67	28.41	SR	SR
3.28.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	positif	12	Laporan	149,070,000	1	68,208,300	6	68,208,300	50.00	45.76	SR	SR
3.28.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	positif	30	Paket	42,510,000	30	36,960,000	30	36,960,000	100.00	86.94	ST	T
3.28.001.1.05.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	positif	4	Dokumen	27,120,000	0	9,257,000	1	9,257,000	25.00	34.13	SR	SR
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	positif	0	Dokumen		0		1		0.00		SR	
3.28.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	positif	8	Orang	79,440,000	2	21,991,300	2	21,991,300	25.00	27.68	SR	SR
3.28.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	positif	12	Bulan	408,228,059	1	152,074,416	6	233,727,722	50.00	57.25	SR	R
3.28.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	positif	2	Paket	5,893,700	1	3,105,000	1	3,105,000	50.00	52.68	SR	R
3.28.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	12	Paket	51,830,959	1	41,638,800	10	46,968,600	83.33	90.62	T	T
3.28.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	positif	2	Paket	80,864,200	1	46,048,300	1	59,730,703	50.00	73.87	SR	S
3.28.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	positif	3	Paket	18,700,000	1	6,000,000	1	6,000,000	33.33	32.09	SR	SR
3.28.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	positif	12	Dokumen	1,939,200	1	320,000	4	640,000	33.33	33.00	SR	SR
3.28.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	12	Laporan	249,000,000	1	54,962,316	6	117,283,419	50.00	47.10	SR	SR
3.28.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	positif	42	Unit	177,433,000	0	156,882,000	42	161,082,000	100.00	90.78	ST	T
3.28.001.1.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	positif	3	Paket	111,649,600	3	106,338,000	3	106,338,000	100.00	95.24	ST	ST
3.28.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	positif	18	Unit	65,783,400	14	50,544,000	15	54,744,000	83.33	83.22	T	T
3.28.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	positif	12	Bulan	1,034,682,018	0	232,389,777	6	537,087,654	50.00	51.91	SR	R
3.28.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	positif	12	Laporan	-	1	-	0	-	0.00		SR	SR
3.28.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	12	Laporan	70,811,000	1	22,059,593	6	42,477,286	50.00	59.99	SR	R
3.28.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	12	Laporan	963,871,018	1	210,330,184	6	494,610,368	50.00	51.31	SR	R
3.28.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	positif	44	Unit	364,016,600	0	39,649,017	32	272,781,015	72.73	74.94	S	S
3.28.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak d	positif	31	Unit	143,815,500	10	32,409,375	15	67,428,573	48.39	46.89	SR	SR
3.28.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	positif	15	Unit	14,940,000	8	7,239,642	8	7,239,642	53.33	48.46	R	SR
3.28.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	positif	1	Unit	205,261,100	0	-	1	198,112,800	100.00	96.52	ST	ST
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	positif	730	Ton	9,180,128,100	204.95	1,447,684,599	302.74	3,618,846,323	41.47	39.42	SR	SR
		1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	positif	5050000	M3		970025		2170290		42.98		SR	
3.28.003.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH	positif	1	Dokumen	3,653,187,800	0	1,176,838,012	1	1,791,753,899	100.00	49.05	ST	SR
3.28.003.1.01.002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pe	positif	1	Unit	332,628,000	0	38,938,000	1	244,239,000	100.00	73.43	ST	S
3.28.003.1.01.003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hu	positif	64	Unit	3,320,559,800	32	1,137,900,012	32	1,547,514,899	50.00	46.60	SR	SR
3.28.003.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	positif	2	Dokumen	270,816,000	0	11,312,500	1	47,713,500	50.00	17.62	SR	SR
3.28.003.1.02.001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	positif	2	Dokumen	270,816,000	0	11,312,500	1	47,713,500	50.00	17.62	SR	SR
3.28.003.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dapat d	positif	96298	Ha	510,153,000		86	0	159,780,365	0.00	31.32	SR	SR
3.28.003.1.03.001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan	positif	1	Dokumen	222,702,000	0	-	0	17,309,501	0.00	7.77	SR	SR
3.28.003.1.03.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan	positif	5	Dokumen	133,202,000	0	-	4	25,586,000	80.00	19.21	T	SR
3.28.003.1.03.008	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di KPH	positif	1	Dokumen	154,249,000	0	86	0	116,884,864	0.00	75.78	SR	S
			positif	0			0		0		0.00		SR	
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Rehabilitasi Lahan Keritis diluar Kawasan Hutan	positif	100	Ha	3,030,275,300	32	66,227,960	32	1,027,745,886	32.00	33.92	SR	SR

3.28.003.1.04.001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	positif	2	Dokumen	136,480,000	0	-	0	8,681,200	0.00	6.36	SR	SR
3.28.003.1.04.004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	positif	124	Ha	2,720,535,300	32	18,340,145	32	934,474,871	25.81	34.35	SR	SR
3.28.003.1.04.008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilita	positif	6	Laporan	173,260,000	1	47,887,815	3	84,589,815	50.00	48.82	SR	SR
3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan	Jumlah indak Pidana Kehutanan yang ditangani	positif	3	Kasus	1,715,696,000	0	193,306,041	0	591,852,673	0.00	34.50	SR	SR
3.28.003.1.05.001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pembatasan Kerusakan Hutan	positif	2	Kegiatan	156,104,000	0	20,754,936	0	65,694,936	0.00	42.08	SR	SR
		Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	positif	0	Ha		0		0					

3.28.003.1.05.004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan H	positif	1	Dokumen	346,108,000	0	63,797,201	0	165,364,383	0.00	47.78	SR	SR
3.28.003.1.05.005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	positif	6	laporan	1,213,484,000	1	108,753,904	2	360,793,354	33.33	29.73	SR	SR
3.28.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	positif	32000	Ha	1,878,580,738	0	280,029,020	1083	450,924,174	3.38	24.00	SR	SR
3.28.005.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarak	positif	15	Laporan	1,878,580,738	1	280,029,020	5	450,924,174	33.33	24.00	SR	SR
3.28.005.1.01.001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	positif	12	Orang	140,244,000	1	12,000,000	2	17,093,754	16.67	12.19	SR	SR
3.28.005.1.01.003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	positif	1200	Ha	1,738,336,738	137	268,029,020	137	433,830,420	11.42	24.96	SR	SR
28.0.00.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan					15,845,180,233		1,163,854,810		4,720,463,291		29.79		SR
3.28.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	positif	84	%	2,289,945,312	27.12	620,958,581	66.9	1,156,532,823	79.64	50.50	T	SR
3.28.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	positif	12	Laporan	193,320,000	3	52,177,000	6	92,535,500	50.00	47.87	SR	SR
3.28.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	12	Dokumen	141,600,000	3	35,400,000	6	59,000,000	50.00	41.67	SR	SR
3.28.001.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi P	positif	12	Laporan	51,720,000	3	16,777,000	6	33,535,500	50.00	64.84	SR	R
3.28.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	positif	12	Laporan	193,618,000	3	118,231,650	6	118,231,650	50.00	61.06	SR	R
3.28.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	positif	2	Paket	124,818,000	2	118,231,650	2	118,231,650	100.00	94.72	ST	ST
3.28.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	positif	7	Orang	68,800,000	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	12	Bulan	490,542,452	3	140,495,880	6	315,102,515	50.00	64.24	SR	R
3.28.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	positif	6	Paket	10,000,000	6	9,823,183	6	9,823,183	100.00	98.23	ST	ST
3.28.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	12	Paket	128,091,900	3	31,658,300	12	123,578,800	100.00	96.48	ST	ST
3.28.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	positif	12	Paket	8,000,000	3	6,448,022	12	7,398,022	100.00	92.48	ST	ST
3.28.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	positif	12	Paket	9,910,552	3	6,836,875	12	6,836,875	100.00	68.99	ST	S
3.28.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	12	Laporan	334,540,000	3	85,729,500	6	167,465,635	50.00	50.06	SR	SR
3.28.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	positif	31	Unit	82,149,900	5	47,311,200	31	78,531,700	100.00	95.60	ST	ST
3.28.001.1.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	positif	3	Paket	42,675,200	3	41,425,200	3	41,425,200	100.00	97.07	ST	ST
3.28.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	positif	10	Unit	39,474,700	5	5,886,000	10	37,106,500	100.00	94.00	ST	ST
3.28.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	positif	12	Bulan	1,047,427,360	3	206,642,074	6	458,925,731	50.00	43.81	SR	SR
3.28.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	positif	12	Laporan	7,500,000	3	5,419,000	6	5,649,000	50.00	75.32	SR	S
3.28.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	12	Laporan	171,810,800	3	30,709,568	6	78,894,719	50.00	45.92	SR	SR
3.28.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	12	Laporan	868,116,560	3	170,513,506	6	374,382,012	50.00	43.13	SR	SR
3.28.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit barang yang diperlihara	positif	31	Unit	282,887,600	11	56,100,777	31	93,205,727	100.00	32.95	ST	SR
3.28.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	positif	31	Unit	259,537,600	11	47,406,152	31	81,736,102	100.00	31.49	ST	SR
3.28.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan LainnyaJumlah Peralatan dan Mesin Lainn	positif	12	Unit	23,350,000	15	8,694,625	35	11,469,625	291.67	49.12	ST	SR
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	positif	0	Unit		15		35		0.00		SR	
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	positif	5050000	M3	11,422,691,350	970025	498,853,729	2170290	3,216,514,148	42.98	28.16	SR	SR
		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	positif	730	Ton		204.95		302.74		41.47		SR	
3.28.003.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	positif	1	Dokumen	9,062,482,350	0	360,624,127	0	2,480,796,561	0.00	27.37	SR	SR
3.28.003.1.01.002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pe	positif	3	Unit	425,956,000	1	29,379,900	3	296,473,100	100.00	69.60	ST	S
3.28.003.1.01.003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hu	positif	53	Unit	8,636,526,350	9	331,244,227	39	2,184,323,461	73.58	25.29	S	SR
3.28.003.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	positif	1	Dokumen	250,000,000	0	24,180,902	1	47,602,697	100.00	19.04	ST	SR
3.28.003.1.02.001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	positif	1	Dokumen	250,000,000	0	24,180,902	1	47,602,697	100.00	19.04	ST	SR
3.28.003.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	positif	350	Ha	304,610,000	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.003.1.03.005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan	positif	1	Dokumen	153,410,000	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
3.28.003.1.03.009	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Ja	positif	2	Unit	151,200,000	0	-	0	-	0.00	0.00	SR	SR
			positif	0			0		0		0.00		SR	
3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	positif	2	Kasus	1,271,000,000	0	69,531,700	0	445,692,890	0.00	35.07	SR	SR
3.28.003.1.05.002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	positif	10000	Ha	479,000,000	0	18,215,100	0	133,330,590	0.00	27.84	SR	SR
3.28.003.1.05.004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan H	positif	12	Dokumen	250,000,000	3	29,826,000	6	98,650,100	50.00	39.46	SR	SR
3.28.003.1.05.005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	positif	12	Laporan	542,000,000	3	21,490,600	6	213,712,200	50.00	39.43	SR	SR
3.28.003.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar	positif	1	;Sertf;UnitUs	534,599,000	0	44,517,000	0	242,422,000	0.00	45.35	SR	SR
3.28.003.1.09.001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non P	positif	1	Unit Usaha	534,599,000	0	44,517,000	0	242,422,000	0.00	45.35	SR	SR
3.28.004	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	positif	0	%	100,000,000	0	-	0	21,551,000		21.55		SR
3.28.004.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak	Jumlah Laporan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tid	positif	1	Laporan	100,000,000	0	-	0	21,551,000	0.00	21.55	SR	SR
3.28.004.1.02.001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak	positif	1	Laporan	100,000,000	0	-	0	21,551,000	0.00	21.55	SR	SR
3.28.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	positif	32000	Ha	632,543,571	0	30,311,500	1083	144,765,200	3.38	22.89	SR	SR
3.28.005.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bida	positif	4	Laporan	632,543,571	0	30,311,500	1	144,765,200	25.00	22.89	SR	SR
3.28.005.1.01.002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan K	positif	10	Kelompok	382,543,571	1	17,845,500	3	66,266,700	30.00	17.32	SR	SR
3.28.005.1.01.003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	positif	500	Ha	250,000,000	0	12,466,000	0	78,498,500	0.00	31.40	SR	SR
3.28.006	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	positif	13	%	1,400,000,000	0	13,731,000	8.9	181,100,120	68.46	12.94	S	SR

3.28.006.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	positif	4	Dokumen	1,400,000,000	0	13,731,000	0	181,100,120	0.00	12.94	SR	SR
3.28.006.1.01.002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	positif	4	Dokumen	1,400,000,000	0	13,731,000	0	181,100,120	0.00	12.94	SR	SR
28.0.00.0.00.01.0021	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook					14,466,331,501		1,799,216,969		5,311,480,723		36.72		SR
3.28.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	positif	84	%	2,298,094,551	20	362,658,340	50	1,175,362,151	59.52	51.15	R	R
3.28.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	positif	12	Laporan	133,440,000	0	-	0	33,360,000	0.00	25.00	SR	SR
3.28.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	12	dokumen	133,440,000	0	-	3	33,360,000	25.00	25.00	SR	SR

3.28.001.1.0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	positif	2	Laporan	85,200,000	0	-	1	41,608,557	50.00	48.84	SR	SR
3.28.001.1.03.00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	positif	2	Laporan	85,200,000	0	-	1	41,608,557	50.00	48.84	SR	SR
3.28.001.1.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	positif	1	Laporan	364,872,000	0	38,154,230	1	152,550,230	100.00	41.81	ST	SR
3.28.001.1.05.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	positif	2	paket	50,832,000	0	-	2	48,951,000	100.00	96.30	ST	ST
3.28.001.1.05.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	positif	2	Dokumen	203,040,000	0	-	1	50,130,000	50.00	24.69	SR	SR
3.28.001.1.05.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	positif	23	Orang	111,000,000	6	38,154,230	14	53,469,230	60.87	48.17	R	SR
3.28.001.1.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	12	Bulan	777,653,475	3	162,225,375	6	422,773,376	50.00	54.37	SR	R
3.28.001.1.06.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	positif	12	paket	16,597,900	3	4,488,300	6	8,165,900	50.00	49.20	SR	SR
3.28.001.1.06.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	34	paket	170,287,575	8	24,323,075	23	135,537,575	67.65	79.59	S	T
3.28.001.1.06.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	positif	12	Paket	60,432,000	3	19,303,300	6	40,275,300	50.00	66.65	SR	S
3.28.001.1.06.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	positif	12	paket	43,496,000	3	5,449,700	6	27,604,500	50.00	63.46	SR	R
3.28.001.1.06.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	12	Laporan	486,840,000	3	108,661,000	6	211,190,101	50.00	43.38	SR	SR
3.28.001.1.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	positif	30	Unit	9,147,500	30	9,147,500	1	9,147,500	3.33	100.00	SR	ST
3.28.001.1.07.00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	positif	1	Paket	9,147,500	1	9,147,500	1	9,147,500	100.00	100.00	ST	ST
3.28.001.1.07.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	positif	0	Unit	-	0	-	0	-	0.00		SR	SR
3.28.001.1.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	positif	12	Bulan	684,888,576	3	110,623,735	6	362,175,531	50.00	52.88	SR	R
3.28.001.1.08.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	positif	12	Laporan	55,264,176	3	13,061,335	6	25,238,331	50.00	45.67	SR	SR
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	positif	12	Laporan		3		6		50.00		SR	
3.28.001.1.08.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	positif	12	Laporan	629,624,400	3	97,562,400	6	336,937,200	50.00	53.51	SR	R
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	12	Laporan		3		6		50.00		SR	
3.28.001.1.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit barang yang diperlihara	positif	2	Unit	242,893,000	1	42,507,500	2	153,746,957	100.00	63.30	ST	R
3.28.001.1.09.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atrau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan	positif	17	Unit	187,686,000	3	37,337,500	11	106,872,957	64.71	56.94	R	R
3.28.001.1.09.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	positif	32	unit	15,670,000	5	5,170,000	20	8,174,000	62.50	52.16	R	R
3.28.001.1.09.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	positif	1	Unit	30,000,000	0	-	1	29,200,000	100.00	97.33	ST	ST
3.28.001.1.09.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	positif	1	Unit	9,537,000	0	-	1	9,500,000	100.00	99.61	ST	ST
3.28.00	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	positif	5050000	M3	10,271,086,950	970025	1,361,606,829	2170290	3,710,270,820	42.98	36.12	SR	SR
		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	positif	730	Ton		204.95		302.74		41.47		SR	
3.28.003.1.0	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	positif	2	Dokumen	2,023,441,950	0	659,772,816	0	1,251,845,855	0.00	61.87	SR	R
3.28.003.1.01.00	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan	positif	2	Unit	600,000,000	0	203,307,000	0	213,594,500	0.00	35.60	SR	SR
3.28.003.1.01.00	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan	positif	87	Unit	1,423,441,950	25	456,465,816	31	1,038,251,355	35.63	72.94	SR	S
3.28.003.1.0	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	positif	2	Dokumen	675,000,000	0	197,549,513	1	383,079,513	50.00	56.75	SR	R
3.28.003.1.02.00	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	positif	2	Dokumen	675,000,000	0	197,549,513	1	383,079,513	50.00	56.75	SR	R
3.28.003.1.0	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	positif	25	Ha	2,900,175,000	3	294,485,000	0	1,123,544,203	0.00	38.74	SR	SR
3.28.003.1.03.00	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di	positif	2	Dokumen	700,000,000	0	60,095,000	0	195,560,000	0.00	27.94	SR	SR
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL	positif	2	Dokumen		0		0		0.00		SR	
3.28.003.1.03.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan. Pengendalian. dan	positif	3	Dokumen	1,149,375,000	1	52,275,000	1	242,074,000	33.33	21.06	SR	SR
3.28.003.1.03.00	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	positif	1	Dokumen	330,800,000	0	49,280,000	0	215,306,000	0.00	65.09	SR	R
3.28.003.1.03.00	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil	Jumlah hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan yang	positif	2	Dokumen	720,000,000	0	132,835,000	2	470,604,203	100.00	65.36	ST	R
3.28.003.1.0	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	positif	15	Ha	2,704,875,000	1	78,004,200	1	169,534,746	6.67	6.27	SR	SR
3.28.003.1.04.00	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	positif	1	Dokumen	150,000,000	0	26,264,800	0	51,480,000	0.00	34.32	SR	SR
3.28.003.1.04.00	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	positif	50	Ha	2,127,000,000	0	50,989,400	0	86,885,796	0.00	4.08	SR	SR
3.28.003.1.04.00	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan	positif	1	Laporan	427,875,000	0	750,000	0	31,168,950	0.00	7.28	SR	SR
3.28.003.1.0	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	positif	2	Kasus	1,967,595,000	0	131,795,300	1	782,266,503	50.00	39.76	SR	SR
3.28.003.1.05.00	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	positif	649762	Ha	299,000,000	0	9,111,000	649762	161,219,400	100.00	53.92	ST	R
3.28.003.1.05.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	positif	6	Dokumen	568,595,000	1	36,082,400	9	202,354,689	150.00	35.59	ST	SR
3.28.003.1.05.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	positif	10	Laporan	1,100,000,000	1	86,601,900	10	418,692,414	100.00	38.06	ST	SR
3.28.00	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	positif	32000	Ha	1,897,150,000	0	74,951,800	1083	425,847,752	3.38	22.45	SR	SR
3.28.005.1.0	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan	positif	7	Laporan	1,897,150,000	0	74,951,800	6	425,847,752	85.71	22.45	T	SR
3.28.005.1.01.00	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	positif	3	Orang	500,000,000	0	31,048,000	1	68,111,655	33.33	13.62	SR	SR
3.28.005.1.01.00	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan	positif	4	Kelompok	677,150,000	1	29,661,400	2	189,742,400	50.00	28.02	SR	SR
3.28.005.1.01.00	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	positif	1000	Ha	720,000,000	0	14,242,400	600	167,993,697	60.00	23.33	R	SR

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur yang ingin dicapai yaitu:

“Visi: Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat ”.

Penjabaran dari visi adalah:

Pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Misi Gubernur Kalimantan Timur dimana Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berkontribusi atas pencapaiannya adalah

MISI 2 : Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Fokus Isu strategis yang dihadapi Dinas Kehutanan sesuai dengan yang tertuang pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 adalah :

“ Pengelolaan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur Hingga Saat Ini Belum Menerapkan Prinsip Lestari “

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Perencanaan Strategis (Dalam Proses Perubahan) adalah:

“ Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah “

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Perencanaan Strategis adalah:

” Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ”

Permasalahan yang menjadi perhatian Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk segera ditangani adalah:

“ Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah“

Strategi yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah:

- **Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor kehutanan**
- **Mengurangi laju deforestasi melalui perlindungan dan pengamanan kawasan hutan**
- **Memulihkan kawasan hutan yang terdeforestasi dan degradasi**
- **Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan**

3.2. Program dan Kegiatan

Dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan dengan memperhatikan faktor faktor yang menjadi pertimbangan antara lain pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang mengusung Tema “Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan menuju Sejahtera Masyarakat dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat“.

Melalui program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya pada Tujuan 3 yaitu “ Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)” pada Sasaran 10 yaitu “Kontribusi Lapangan Usaha Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)”. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyusun rencana Program dan Kegiatan yang nantinya akan membawa pada hasil yang diharapkan.

Dari 5 (Lima) program yang direncanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 4 (Empat) program adalah program teknis, dan 1 (Satu) program adalah program penunjang, serta diantaranya terdapat 2 (Dua) program yang menjadi Prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Program Prioritas adalah program yang mendukung capaian kinerja daerah yang menjadi capaian kinerja Gubernur Kalimantan Timur. Program yang menjadi Prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

1) Program Pengelolaan Hutan.
2) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.

Program yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan adalah Program Teknis. Program yang merupakan program Teknis yaitu:

1) Program Pengelolaan Hutan.
2) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.
3) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
4) Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

Program penunjang yang mendukung Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program dan Kegiatan Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini dilaksanakan untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat, dimana didalam pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya sarana adminsitrasi perkantoran yang memadai, disamping untuk memenuhi kebutuhan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur maupun UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan-kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah antara lain :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Hutan

Program ini dilaksanakan dengan 2 indikator kinerja yaitu:

1) Produksi Hasil Hutan Kayu (M3)

2) Produksi Hasil Hutan Non Kayu (Ton)

Kegiatan-kegiatan nya adalah :

1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
    1) Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
    2) Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan
    3) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH
2. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
    1) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
3. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
    1) Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
    2) Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung
    3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
    4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung
    5) Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi
    6) Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH
    7) Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan
4. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
    1) Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
    2) Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
    3) Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
    4) Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
    5) Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan

5. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
    1) Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan

2) Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
3) Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan
4) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
5) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
   1) Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati
   2) Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
7. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
   1) Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
   2) Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
   3) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
8. Perbenihan Tanaman Hutan
   1) Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
   2) Sertifikasi Sumber Benih
   3) Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit

3. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Program ini memiliki indikator kinerja yaitu Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan (%)

Kegiatan-kegiatan nya adalah :

1. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
   1) Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
   2) Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
   3) Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
   4) Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi

5) Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
6) Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi

2. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
   1) Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah
   2) Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
   3) Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
   4) Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi

4. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.

Program ini memiliki indikator kinerja yaitu Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha).

Kegiatan adalah :

1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan, Sub Kegiatan terdiri dari:
   1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
   2) Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
   3) Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial

5. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program ini memiliki indikator kinerja yaitu Persentase Tutupan Lahan Meningkat (%).

Kegiatan adalah :

1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten / Kota dan Dalam Daerah, Sub Kegiatan terdiri dari:
   1) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
   2) Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
   3) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
   4) Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
01.00	**Dinas Kehutanan**		**287.033.024.775**
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan**	**208.673.230.602**
3.28.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**2.177.036.000**
3.28.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	813.400.000
3.28.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.363.636.000
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah**	**101.151.960.187**
3.28.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99.394.795.187
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	786.900.000
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	970.265.000
3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**612.631.000**
3.28.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	292.765.000
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	319.866.000
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah**	**867.750.000**
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	488.966.000
3.28.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	207.850.000
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	170.934.000
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3.276.802.191**
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19.983.500
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	113.036.007

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	165.956.600
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	120.200.000
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	11.635.200
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.461.382.100
3.28.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	55.942.500
3.28.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	328.666.284
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah**	**95.847.515.284**
3.28.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	523.750.000
3.28.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	73.853.045.892
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21.470.719.392
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah**	**3.616.142.640**
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.956.400
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	803.327.600
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	236.028.000
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.561.830.640
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit barang yang diperlihara**	**1.123.393.300**
3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	130.462.800
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	654.422.600
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	149.950.700

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	188.557.200
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu**	**42.880.172.281**
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun**	**714.852.000**
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang disusun - Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	714.852.000
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung**	**9.519.532.000**
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	785.000.000
3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala - Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	239.000.000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan - Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNBP dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	5.643.736.000
3.28.03.1.03.06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi - Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	2.851.796.000
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara**	**13.960.429.001**
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) dan Dokumen Rancangan Teknis	534.760.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	9.753.242.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	1.165.397.000
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2.507.030.001
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani**	**12.763.104.800**
3.28.03.1.05.03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	810.975.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3.814.593.020
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	8.137.536.780
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen**	**2.220.630.000**
3.28.03.1.07.01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	774.590.000
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	774.080.000
3.28.03.1.07.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	671.960.000
3.28.03.1.09	**Perbenihan Tanaman Hutan**	**Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar**	**3.701.624.480**
3.28.03.1.09.01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Pertimbangan Teknis Pengadaan dan Pengedaran benih/bibit terdaftar yang diterbitkan - Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	1.861.387.800
3.28.03.1.09.02	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih Yang Diterbitkan	742.427.680
3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Laporan pengawasan peredaran benih dan bibit - Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	1.097.809.000
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan**	**1.895.180.100**

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**Luas KBEP yang dikelola**	**1.895.180.100**
3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/ Masyarakat yang Diberdayakan	1.127.300.000
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	767.880.100
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)**	**31.406.166.792**
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan**	**31.406.166.792**
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	18.196.984.542
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan - Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	1.691.518.200
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA - Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	11.517.664.050
3.28.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Persentase Tutupan Lahan Meningkat**	**2.178.275.000**
3.28.06.1.01	**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Laporan pelaksanaan pengelolaan DAS**	**2.178.275.000**
3.28.06.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang ditetapkan	492.697.000
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	406.720.000
3.28.06.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	1.102.239.600
3.28.06.1.01.06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah Laporan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	176.618.400

1953

UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
01.00	**UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto**		**19.448.656.216**
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan**	**5.898.930.616**
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah**	**153.690.000**
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	153.690.000
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah**	**260.925.300**
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	102.525.300
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	158.400.000
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**423.461.096**
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12.426.100
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14.747.400
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	83.024.500
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	19.959.696
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.878.400
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	289.425.000
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah**	**2.147.808.100**
3.28.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.147.808.100
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah**	**981.002.420**
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	203.590.500
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	777.411.920
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit barang yang diperlihara**	**1.932.043.700**
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	496.271.300
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48.241.200

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.387.531.200
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu**	**580.609.000**
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun**	**580.609.000**
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang disusun - Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	580.609.000
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan**	**10.904.731.800**
3.28.04.1.01	**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi**	**Luas Kawasan Hutan Tahura yang dikelola**	**10.904.731.800**
3.28.04.1.01.01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah Laporan Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	1.822.445.200
3.28.04.1.01.02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	1.962.032.000
3.28.04.1.01.03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	227.688.600
3.28.04.1.01.05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	5.856.028.000
3.28.04.1.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (FPCF - CF) - Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	859.538.000
3.28.04.1.01.09	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga Tahura	177.000.000
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)**	**2.064.384.800**
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan**	**2.064.384.800**
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan - Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	640.252.100
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA - Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	1.424.132.700

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
01.00	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat**		**18.279.286.840**
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan**	**3.011.356.340**
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah**	**135.120.000**
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	135.120.000
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah**	**106.657.000**
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	25.048.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	81.609.000
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**576.951.700**
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9.127.700
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	102.828.500
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5.995.500
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	459.000.000
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah**	**971.573.200**
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	935.573.200
3.28.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	36.000.000
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah**	**568.874.640**
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.008.800
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	150.076.400
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	409.789.440
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit barang yang diperlihara**	**652.179.800**
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	147.664.300
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46.460.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24.000.000
3.28.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	434.055.500
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu**	**12.929.693.600**
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun - Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun**	**6.492.348.600**
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	6.492.348.600
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung**	**692.750.000**
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan - Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNBP dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	692.750.000
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara**	**3.425.393.400**
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.270.159.400
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	155.234.000
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani**	**2.319.201.600**
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	230.000.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	833.371.800
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1.255.829.800
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)**	**2.338.236.900**
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan**	**2.338.236.900**
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	101.499.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan - Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	743.508.600
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA - Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	1.493.229.300

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
01.00	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan**		**16.312.362.078**
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan**	**3.717.177.578**
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah**	**158.520.000**
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	158.520.000
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah**	**125.022.500**
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	84.800.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40.222.500
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.024.951.198**
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8.006.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	123.415.500
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	58.790.498
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35.500.000
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.939.200
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	797.300.000
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah**	**669.145.000**
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	669.145.000
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah**	**998.927.780**
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.455.600
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	238.456.500
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	749.015.680
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit barang yang diperlihara**	**740.611.100**
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	427.950.100
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35.329.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	277.332.000
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu**	**11.118.046.500**
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun - Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun**	**1.604.000.000**
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1.604.000.000
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun**	**395.000.000**
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang disusun - Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	395.000.000
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung**	**1.478.633.500**
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	811.633.500
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan - Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNBP dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	667.000.000
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani**	**3.655.013.000**
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	685.200.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	100.800.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	2.869.013.000
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen**	**2.916.400.000**
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi - Jumlah unit Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	2.916.400.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.03.1.09	**Perbenihan Tanaman Hutan**	**Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar**	**1.069.000.000**
3.28.03.1.09.01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Pertimbangan Teknis Pengadaan dan Pengedaran benih/bibit terdaftar yang diterbitkan - Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	1.069.000.000
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)**	**1.477.138.000**
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan**	**1.477.138.000**
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan - Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	620.991.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA - Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	856.147.000

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
01.00	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus**		**18.726.971.682**
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan**	**3.119.067.132**
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah**	**129.000.000**
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	129.000.000
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah**	**73.299.800**
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	73.299.800
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.124.468.032**
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.509.100
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	66.241.400
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12.693.232
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.884.300
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.038.140.000
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah**	**619.139.300**
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	619.139.300
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah**	**645.627.400**
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.226.000
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	122.607.400
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	515.794.000
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit barang yang diperlihara**	**527.532.600**
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	500.402.600
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27.130.000
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1. Produksi Hasil Hutan Kayu;** **2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu**	**14.908.227.350**

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun** **- Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun**	**2.535.904.900**
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2.535.904.900
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun**	**921.892.650**
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang disusun - Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	921.892.650
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung**	**953.416.000**
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	244.416.000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan - Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNBP dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	709.000.000
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara**	**5.768.825.000**
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5.768.825.000
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani**	**2.796.984.800**
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	284.400.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	792.584.800
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1.720.000.000
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen**	**1.931.204.000**
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi - Jumlah unit Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	1.931.204.000
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)**	**699.677.200**

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan**	**699.677.200**
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA - Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	699.677.200

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
01.00	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo**		**19.394.741.142**
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan**	**7.993.603.792**
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah**	**139.200.000**
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	139.200.000
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah**	**140.758.500**
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	41.736.000
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan koordinasi dan Pelaksanaan SIK	22.200.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22.200.000
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54.622.500
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.019.258.112**
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9.860.900
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	133.556.200
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10.734.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	23.116.312
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.939.200
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	840.051.500
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah**	**3.490.915.900**
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	179.914.800
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3.311.001.100
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah**	**1.087.358.680**
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	226.912.600
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	860.446.080
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit barang yang diperlihara**	**2.116.112.600**

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	325.938.300
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24.360.000
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.765.814.300
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu**	**9.840.575.992**
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun - Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun**	**4.779.144.322**
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	4.779.144.322
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun**	**356.006.200**
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang disusun - Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	356.006.200
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung**	**488.643.000**
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan - Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNBP dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	124.493.000
3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	364.150.000
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara**	**1.925.020.170**
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) dan Dokumen Rancangan Teknis	61.191.170
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	1.408.154.000
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	455.675.000
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani**	**1.420.730.000**
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	200.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	405.048.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	815.682.000
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen**	**871.032.300**
3.28.03.1.06.01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	228.276.300
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi - Jumlah unit Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	642.756.000
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)**	**1.560.561.358**
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan**	**1.560.561.358**
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	105.156.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan - Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	481.162.365
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA - Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	974.242.993

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
01.00	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan**		**17.627.332.994**
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan**	**2.875.078.394**
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah**	**155.520.000**
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	155.520.000
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah**	**292.770.000**
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	69.180.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	223.590.000
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**974.220.354**
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	27.857.800
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	137.405.500
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12.300.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18.697.054
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	777.960.000
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah**	**879.899.640**
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	118.198.200
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	761.701.440
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit barang yang diperlihara**	**572.668.400**
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	373.367.200
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	199.301.200
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1. Produksi Hasil Hutan Kayu;** **2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu**	**13.094.643.100**
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun** **- Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun**	**6.729.677.500**
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	6.729.677.500

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung**	**130.020.000**
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan - Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNBP dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	130.020.000
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara**	**3.139.519.100**
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.767.531.600
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	371.987.500
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani**	**3.095.426.500**
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	239.520.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	631.472.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	2.224.434.500
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)**	**1.657.611.500**
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan**	**1.657.611.500**
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA - Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	1.657.611.500

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
01.00	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan**		**14.993.576.926**
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan**	**2.621.527.026**
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah**	**141.240.000**
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	141.240.000
3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**68.395.500**
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	68.395.500
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah**	**231.558.000**
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	132.258.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	99.300.000
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**557.055.606**
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.441.800
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	130.267.206
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5.706.600
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	41.000.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	374.640.000
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah**	**1.012.243.920**
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	109.994.400
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	902.249.520
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit barang yang diperlihara**	**611.034.000**
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	354.774.000
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	136.260.000
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	120.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu**	**9.964.547.900**
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun - Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun**	**3.073.146.400**
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	3.073.146.400
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun**	**297.250.000**
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang disusun - Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	297.250.000
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung**	**571.520.000**
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	194.340.000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan - Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNBP dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	377.180.000
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara**	**1.663.372.200**
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) dan Dokumen Rancangan Teknis	120.471.200
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	1.542.901.000
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani**	**3.603.643.300**
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	211.160.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	528.370.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	2.864.113.300
3.28.03.1.09	**Perbenihan Tanaman Hutan**	**Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar**	**755.616.000**

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.03.1.09.01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Pertimbangan Teknis Pengadaan dan Pengedaran benih/bibit terdaftar yang diterbitkan - Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	755.616.000
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)**	**2.407.502.000**
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan**	**2.407.502.000**
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	206.595.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan - Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	594.838.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA - Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	1.606.069.000

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
01.00	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon**		**16.389.477.197**
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan**	**2.728.229.997**
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah**	**139.200.000**
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	139.200.000
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah**	**198.500.000**
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	198.500.000
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**750.003.637**
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6.050.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	120.580.300
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10.169.337
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	613.204.000
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah**	**414.535.600**
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	414.535.600
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah**	**800.280.560**
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	247.039.600
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	553.240.960
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit barang yang diperlihara**	**425.710.200**
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	368.789.600
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56.920.600
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1. Produksi Hasil Hutan Kayu;** **2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu**	**11.529.208.936**
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun** **- Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun**	**2.058.678.736**
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2.058.678.736

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun**	**404.225.500**
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang disusun - Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	404.225.500
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung**	**400.000.000**
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan - Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNBP dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	400.000.000
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara**	**5.504.332.000**
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5.504.332.000
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani**	**3.161.972.700**
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	495.345.500
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	518.600.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	2.148.027.200
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)**	**2.132.038.264**
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan**	**2.132.038.264**
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	230.105.964
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan - Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	1.167.913.300

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA - Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	734.019.000

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
01.00	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau**		**16.110.658.616**
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan**	**2.593.749.916**
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah**	**189.106.000**
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	129.600.000
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.832.700
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50.673.300
3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**38.586.600**
3.28.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	21.513.300
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.073.300
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah**	**136.442.200**
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80.232.500
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan koordinasi dan Pelaksanaan SIK	26.280.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13.461.900
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.467.800
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**521.458.116**
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.354.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	86.240.016
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9.363.500
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11.804.600
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	406.696.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah**	**92.731.400**
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22.162.400
3.28.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	70.569.000
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah**	**1.160.277.300**
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	174.610.500
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	985.666.800
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit barang yang diperlihara**	**455.148.300**
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	360.785.500
3.28.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20.250.000
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33.500.000
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40.612.800
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1. Produksi Hasil Hutan Kayu;** **2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu**	**11.860.714.700**
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun** **- Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun**	**4.994.370.600**
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	222.069.000
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	272.772.500
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	4.499.529.100
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun**	**294.946.300**
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang disusun - Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	294.946.300
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung**	**1.221.552.700**

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	345.015.200
3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala - Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	345.015.200
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan - Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNBP dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	337.750.000
3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	193.772.300
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara**	**3.178.199.700**
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.982.162.700
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	196.037.000
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani**	**1.972.447.400**
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	187.440.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	784.635.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1.000.372.400
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen**	**199.198.000**
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi - Jumlah unit Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	199.198.000
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)**	**1.656.194.000**
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan**	**1.656.194.000**

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	206.019.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan - Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	1.023.680.200
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA - Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	426.494.800

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
01.00	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara**		**13.358.147.861**
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan**	**2.631.565.461**
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah**	**180.120.000**
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	124.800.000
3.28.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55.320.000
3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**42.720.000**
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42.720.000
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah**	**135.026.000**
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	83.426.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51.600.000
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**639.973.681**
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.853.800
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	63.972.100
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9.536.000
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26.590.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	22.021.781
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	512.000.000
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah**	**568.866.800**
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37.656.000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	271.294.000
3.28.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	259.916.800
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah**	**822.041.480**
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.992.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	90.957.800
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	727.091.680
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit barang yang diperlihara**	**242.817.500**
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	161.297.500
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21.520.000
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60.000.000
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu**	**9.231.485.500**
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun - Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun**	**1.555.098.600**
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1.555.098.600
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun**	**192.270.000**
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang disusun - Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	192.270.000
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung**	**607.262.600**
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	115.560.000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan - Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNBP dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	208.200.000
3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	283.502.600
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara**	**3.709.264.500**

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) dan Dokumen Rancangan Teknis	145.660.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.563.604.500
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani**	**3.076.749.800**
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	898.639.900
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	264.676.500
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1.913.433.400
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen**	**90.840.000**
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	90.840.000
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)**	**1.495.096.900**
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan**	**1.495.096.900**
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	102.261.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan - Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	487.880.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA - Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	904.955.900

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
01.00	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah**		**11.898.062.985**
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan**	**3.441.294.085**
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah**	**190.560.000**
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	119.520.000
3.28.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.040.000
3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**44.640.000**
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	44.640.000
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah**	**221.248.000**
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	43.381.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	177.867.000
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**606.751.145**
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35.613.400
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45.007.745
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	526.130.000
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah**	**1.151.346.500**
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	28.051.800
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.123.294.700
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah**	**920.639.440**
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.370.000
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	94.090.000
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	818.179.440
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit barang yang diperlihara**	**306.109.000**
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	225.529.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80.580.000
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu**	**7.324.414.900**
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun - Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun**	**1.605.360.900**
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1.605.360.900
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun**	**146.664.000**
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang disusun - Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	146.664.000
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung**	**182.520.000**
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan - Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNBP dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	182.520.000
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara**	**3.264.542.000**
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.264.542.000
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani**	**1.971.894.000**
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	282.396.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	587.886.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1.101.612.000
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen**	**153.434.000**
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi - Jumlah unit Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	153.434.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)**	**1.132.354.000**
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan**	**1.132.354.000**
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan - Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	426.120.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA - Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	706.234.000

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
01.00	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai**		**11.057.517.220**
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan**	**2.295.274.720**
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah**	**124.800.000**
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	124.800.000
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah**	**141.654.000**
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	41.814.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	99.840.000
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**464.098.040**
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	32.048.000
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48.450.040
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	383.600.000
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah**	**558.845.100**
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55.248.000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	196.767.100
3.28.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	306.830.000
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah**	**746.124.180**
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.004.000
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100.146.600
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20.157.500
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	620.816.080
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit barang yang diperlihara**	**259.753.400**
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	199.093.400
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60.660.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu**	**6.646.646.800**
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun - Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun**	**1.067.844.900**
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1.067.844.900
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun**	**566.481.000**
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang disusun - Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	566.481.000
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung**	**331.000.000**
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan - Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNBP dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	331.000.000
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara**	**2.152.908.600**
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.152.908.600
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani**	**2.528.412.300**
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	200.362.800
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1.025.161.700
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1.302.887.800
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)**	**2.115.595.700**
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan**	**2.115.595.700**
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	90.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan - Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	173.100.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA - Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	1.852.495.700

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
01.00	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar**		**14.763.459.160**
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan**	**3.086.039.044**
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah**	**138.240.000**
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	138.240.000
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah**	**162.579.300**
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	74.379.300
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	88.200.000
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**924.602.204**
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.954.900
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45.153.004
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14.607.800
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.386.500
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	855.500.000
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah**	**629.088.600**
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	125.613.600
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	503.475.000
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah**	**919.199.440**
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	150.781.200
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	768.418.240
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit barang yang diperlihara**	**312.329.500**
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	163.189.500
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	149.140.000
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1. Produksi Hasil Hutan Kayu;** **2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu**	**9.837.836.116**

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun - Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun**	**4.233.463.250**
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	4.233.463.250
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun**	**777.243.500**
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang disusun - Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	777.243.500
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara**	**1.967.469.000**
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	1.967.469.000
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani**	**2.859.660.366**
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1.066.770.816
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1.792.889.550
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)**	**1.839.584.000**
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan**	**1.839.584.000**
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan - Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	1.577.271.650
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA - Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	262.312.350

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
01.00	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau**		**18.170.030.695**
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan**	**2.375.358.020**
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah**	**148.800.000**
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah**	**74.643.000**
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	31.635.000
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan koordinasi dan Pelaksanaan SIK	43.008.000
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**638.362.260**
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	94.335.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14.419.260
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	529.608.000
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah**	**477.044.000**
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	85.016.000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	392.028.000
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah**	**759.010.760**
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	152.411.800
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	606.598.960
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit barang yang diperlihara**	**277.498.000**
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	239.628.000
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37.870.000
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1. Produksi Hasil Hutan Kayu;** **2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu**	**14.330.613.300**
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun** **- Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun**	**3.108.929.100**
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	3.108.929.100

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun**	**471.899.500**
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang disusun - Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	471.899.500
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung**	**377.014.500**
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	134.072.500
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan - Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNBP dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	242.942.000
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara**	**7.802.288.000**
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	7.802.288.000
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani**	**2.502.720.200**
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	224.052.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	301.144.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1.977.524.200
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen**	**67.762.000**
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	67.762.000
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)**	**1.464.059.375**
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan**	**1.464.059.375**
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	472.439.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan - Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	691.220.375
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA - Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	300.400.000

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
01.00	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam**		**14.174.839.387**
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan**	**2.811.822.665**
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah**	**148.800.000**
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah**	**101.760.000**
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	101.760.000
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**434.921.665**
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19.661.465
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50.931.200
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10.209.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	354.120.000
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah**	**319.082.200**
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	58.029.200
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	261.053.000
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah**	**1.350.144.400**
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	156.829.200
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.193.315.200
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit barang yang diperlihara**	**457.114.400**
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41.599.000
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	223.609.400
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	191.906.000
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1. Produksi Hasil Hutan Kayu;** **2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu**	**6.152.224.122**
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun** **- Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun**	**1.200.000.000**

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1.200.000.000
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun**	**400.000.000**
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang disusun - Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	400.000.000
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung**	**230.000.000**
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan - Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNBP dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	230.000.000
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara**	**2.307.781.500**
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) dan Dokumen Rancangan Teknis	150.000.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.157.781.500
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani**	**2.010.242.622**
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	600.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1.410.242.622
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen**	**4.200.000**
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi - Jumlah unit Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	4.200.000
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan**	**100.000.000**
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**Luas KBEP yang dikelola**	**100.000.000**
3.28.04.1.03.04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	100.000.000
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)**	**5.110.792.600**

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan**	**5.110.792.600**
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	359.341.950
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA - Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	4.751.450.650

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
01.00	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai**		**21.135.811.766**
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan**	**3.747.250.166**
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah**	**202.800.000**
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	54.000.000
3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**54.000.000**
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	54.000.000
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah**	**133.389.000**
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	35.409.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	97.980.000
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.092.875.286**
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11.081.400
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	416.529.886
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22.834.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48.008.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	594.422.000
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah**	**532.210.300**
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	427.928.200
3.28.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	104.282.100
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urursan Pemerintah Daerah**	**818.473.400**
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.780.000
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	138.382.600

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	672.310.800
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit barang yang diperlihara**	**913.502.180**
3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	54.195.000
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	367.093.500
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	257.303.680
3.28.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	234.910.000
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1. Produksi Hasil Hutan Kayu;** **2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu**	**12.050.068.925**
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun** **- Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun**	**4.477.742.325**
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	149.999.600
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	4.327.742.725
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun**	**660.468.500**
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang disusun - Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	660.468.500
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung**	**898.307.500**
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	154.672.500
3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala - Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	53.920.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan - Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNBP dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	689.715.000
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara**	**2.771.758.900**
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.528.606.400
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	243.152.500
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani**	**3.080.741.700**
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	250.000.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1.039.220.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1.791.521.700
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen**	**161.050.000**
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	161.050.000
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)**	**5.338.492.675**
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan**	**5.338.492.675**
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	599.160.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan - Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	724.868.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA - Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	4.014.464.675

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
01.00	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn**		**14.160.674.061**
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan**	**3.464.954.561**
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah**	**139.200.000**
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	139.200.000
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah**	**184.679.400**
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	71.205.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	113.474.400
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**966.817.281**
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.972.500
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	67.610.781
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	27.951.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16.003.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	850.280.000
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah**	**683.561.900**
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	74.676.000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	391.721.900
3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	217.164.000
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah**	**879.990.280**
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.058.000
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96.482.600
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	780.449.680
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit barang yang diperlihara**	**610.705.700**
3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	252.088.500

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	126.857.200
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16.470.000
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60.000.000
3.28.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	155.290.000
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu**	**8.491.886.900**
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun - Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun**	**2.393.744.900**
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	268.904.000
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2.124.840.900
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun**	**318.260.000**
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang disusun - Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	318.260.000
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung**	**587.476.000**
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	250.516.000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan - Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNBP dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	336.960.000
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara**	**3.324.890.000**
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.629.280.000
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	695.610.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani**	**1.867.516.000**
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	136.560.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	390.236.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1.340.720.000
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)**	**2.203.832.600**
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan**	**2.203.832.600**
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	209.000.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan - Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	841.225.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA - Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	1.153.607.600

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
01.00	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake**		**16.723.882.915**
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan**	**4.708.317.417**
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah**	**213.720.000**
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	64.920.000
3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**27.120.000**
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.120.000
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah**	**149.070.000**
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	42.510.000
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan koordinasi dan Pelaksanaan SIK	27.120.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	79.440.000
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**596.628.059**
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.893.700
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	51.830.959
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80.864.200
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18.700.000
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.939.200
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	437.400.000
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah**	**1.896.049.740**
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	111.649.600
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.784.400.140
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah**	**1.093.281.818**

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	129.410.800
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	963.871.018
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit barang yang diperlihara**	**732.447.800**
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	159.475.500
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14.940.000
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	558.032.300
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu**	**9.922.817.100**
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun - Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun**	**3.653.187.800**
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	332.628.000
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	3.320.559.800
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun**	**358.416.000**
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang disusun - Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	358.416.000
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung**	**510.153.000**
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	222.702.000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan - Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNBP dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	133.202.000
3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di KPH	154.249.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara**	**3.297.175.300**
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) dan Dokumen Rancangan Teknis	136.480.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.987.435.300
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	173.260.000
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani**	**2.103.885.000**
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	156.104.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	346.108.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1.601.673.000
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)**	**2.092.748.398**
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan**	**2.092.748.398**
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	140.244.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA - Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	1.952.504.398

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
01.00	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan**		**24.007.653.133**
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan**	**4.852.896.862**
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah**	**193.320.000**

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	141.600.000
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	51.720.000
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah**	**193.618.000**
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	124.818.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	68.800.000
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.830.896.902**
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.000.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.838.240.350
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8.000.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9.910.552
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	964.746.000
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah**	**82.149.900**
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	42.675.200
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39.474.700
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urursan Pemerintah Daerah**	**1.080.131.460**
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	204.514.900
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	868.116.560
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit barang yang diperlihara**	**472.780.600**
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	416.725.600
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56.055.000
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1. Produksi Hasil Hutan Kayu;** **2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu**	**11.422.691.350**

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun - Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun**	**9.062.482.350**
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	425.956.000
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	8.636.526.350
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun**	**250.000.000**
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang disusun - Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	250.000.000
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung**	**304.610.000**
3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	153.410.000
3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	151.200.000
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani**	**1.271.000.000**
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	479.000.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	250.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	542.000.000
3.28.03.1.09	**Perbenihan Tanaman Hutan**	**Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar**	**534.599.000**
3.28.03.1.09.01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Pertimbangan Teknis Pengadaan dan Pengedaran benih/bibit terdaftar yang diterbitkan - Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	534.599.000
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan**	**100.000.000**
3.28.04.1.02	**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**	**Jumlah Laporan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species)**	**100.000.000**

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	100.000.000
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)**	**6.232.064.921**
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan**	**6.232.064.921**
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan - Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	382.543.571
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA - Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	5.849.521.350
3.28.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Persentase Tutupan Lahan Meningkat**	**1.400.000.000**
3.28.06.1.01	**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Laporan pelaksanaan pengelolaan DAS**	**1.400.000.000**
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1.400.000.000

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
01.00	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook**		**14.710.802.001**
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan**	**2.542.565.051**
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah**	**136.230.000**
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	136.230.000
3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**136.200.000**
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	136.200.000
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah**	**495.006.000**
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50.832.000
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan koordinasi dan Pelaksanaan SIK	203.040.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	241.134.000
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**822.069.975**
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16.597.900
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	172.704.075
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60.432.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	43.496.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	528.840.000
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah**	**18.347.500**
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18.347.500
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah**	**691.818.576**
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	62.194.176
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	629.624.400
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit barang yang diperlihara**	**242.893.000**
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	187.686.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15.670.000
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30.000.000
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9.537.000
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu**	**10.271.086.950**
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun - Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun**	**2.023.441.950**
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	600.000.000
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1.423.441.950
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun**	**675.000.000**
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang disusun - Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	675.000.000
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung**	**2.900.175.000**
3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala - Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	700.000.000
3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1.149.375.000
3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di KPH	330.800.000
3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	720.000.000
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara**	**2.704.875.000**
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) dan Dokumen Rancangan Teknis	150.000.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.127.000.000
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	427.875.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani**	**1.967.595.000**
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	299.000.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	568.595.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1.100.000.000
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)**	**1.897.150.000**
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan**	**1.897.150.000**
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	500.000.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan - Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	677.150.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA - Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial - Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	720.000.000

BAB IV. Penutup

Rencana Kerja Perubahan (Renja P) PD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini disusun adalah penjabaran tahun ke 5 (kelima) dari Rencana Strategis (RENSTRA) PD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2023.

Catatan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja P) ini dalam rangka menyusun perencanaan yang baik diperlukan evaluasi terhadap perencanaan itu sendiri serta pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan apakah sesuai dengan rencana yang telah dibuat serta hasil capaian kinerja yang diperoleh. Dalam hal ini catatan penting untuk Renja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 adalah adanya perubahan yang disebabkan oleh penyesuaian terhadap terealisasinya pencairan dana FCPF-CF dari World Bank yang telah berproses sejak tahun 2019 tetapi pencairan dana tersebut ke dibulan april 2023 serta masuk ke penganggaran Dinas Kehutanan melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan, adanya kegiatan Pokir anggota DPR dilokasi tertentu, serta SILPA DBH DR tahun 2022.

Disadari sepenuhnya dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) ini masih terdapat banyak kekurangan, dan masih perlu masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya.

Dengan disusunnya Renja Perubahan PD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka keberhasilan pencapaian sasaran dan target yang ditetapkan.

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur

H. JOKO ISTANTO, S.P., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750807 200003 1 003

2014

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan daerah yang meliputi RPJPD 20 tahun, RPJMD 5 tahun, dan RKPD tahunan. Kemudian dinas/badan daerah wajib menjabarkannya ke dalam rencana strategis (renstra) dinas/badan.

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan rencana tahunan pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimatan Timur dimana :

1. Dokumen Renja Perubahan merupakan dokumen yang secara substansial dari penjabaran visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2023 (RKPD-P);
2. Dokumen Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2023 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan rencana program dan kegiatan pada Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2023.
3. Dokumen Rancangan Akhir Renja Perubahan merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Perangkat Daerah

untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55333);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- Permendagri 90 Tahun 2019 Tantang KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERA
- Permendagri 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Kepmendagri 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembetukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW
- Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
- Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 050/002/B.PPEPD-Bapp/2023 Tanggal 03 Januari 2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Provisi Kalimantan Timur Tahun 2023.
- Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
- Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 000.7.2.4/12994/Bapp-II Tentang PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023, sesuai dengan rencana program prioritas yang telah digariskan dalam Rancangan Akhir RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan guna pencapaian tujuan/sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Dokumen RPD, Dokumen RKPD, Dokumen Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dirangkum dalam 5 (lima) Bab dengan rincian sebagai berikut :

- Bab I : menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan renja meliputi latar belakang perlunya penyusunan renja, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan.
- Bab II : menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan Akhir RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- Bab III : menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024, yang ditetapkan dengan memperhatikan kebijakan nasional dalam sektor energi dan sumberdaya mineral.
- Bab IV : menguraikan rencana kerja dan kerangka pendanaan perangkat darah.
- Bab V : merupakan bab penutup, berisi catatan penting yang menjadi perhatian dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2023 merupakan tahun ke lima dari periode perencanaan strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2019-2023. Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2023 yang tertuang ke dalam 5 program dan 27 kegiatan serta 115 sub kegiatan, strategis dan administratif, secara umum dapat dilaksanakan sesuai rencana, berdasarkan pencapaian target kinerja outcome masing-masing program

Pelaksanaan program/kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Rancangan Akhir RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebesar Rp. 96,076,366,930. Adapun penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebesar Rp. 28.048.032.326 atau sebesar 20,91% terdiri dari :

Tabel 2.1
Realiasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023 (Semester I)

URAIAN	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI TAHUN 2022		
		KEUANGAN	FISIK (%)	KEU (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.888.624.462	10.624.623.618	44,53	44,48
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	2.280.786.700	626.757.914	27,53	27,48
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1.573.175.808	701.275.451	44,63	44,58
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	5.788.647.000	842.031.378	14,60	14,55
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	60.255.432.960	15.253.343.965	25,36	25,31
TOTAL BELANJA	**93.786.666.930**	**28.048.032.326**	**29,96**	**29,91**

Tabel 2.2
Realisasi Capaian Kinerja Outcome Tahun 2023 (Semester I)

No	TUJUAN / PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2023	TRIWULAN II		TARGET 2024
				REA	CAP	
	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Rasio elektrifikasi (%)	95,00	93,879	98,81	95,70
1.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Zona Konservasi Air Tanah yang terpetakan	38,38	32,00	83,38	45,38
2.	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.	50,00	25,00	50,00	0
3.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik	1.200.000	1.226.624	102,22	1.233.000
4.	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Pemanfaatan EBT	8,40	11,60	138,09	10,39
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	84,00	84,00	100,00	0
Rata-Rata Tingkat Capaian					94,74	

Rata-rata tingkat pencapaian target kinerja Program Tahun 2023 yang mengacu pada indikator kinerja Outcome adalah 94,74% sehingga kinerja seluruh kegiatan secara umum dapat dikategorikan Sangat Baik.

Tabel 2.3
Tingkat Capaian Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2023 (Semester I)

	Pagu	Keuangan	Fisik	Keu
Realisasi Belanja Wajib Mengikat	**23.888.624.462,00**	**10.624.623.618,00**	**49,48**	**44,48**
Belanja Pegawai (Gaji dan Pengelola Keuangan)	15.378.836.322,00	6.516.512.372,00	47,37	42,37
Belanja Rutin Kantor (Wajib Mengikat Lainnya)	8.509.788.140,00	4.108.111.246,00	53,28	48,28

	Pagu	Keuangan	Fisik	Keu
Tupoksional	**3.853.962.508,00**	**1.328.033.365,00**	**39,46**	**34,46**
Bidang GAT	2.280.786.700,00	**626.757.914,00**	32,48	27,48
Bidang Minerba	1.573.175.808,00	**701.275.451,00**	49,58	44,58

	Pagu	Keuangan	Fisik	Keu
Prioritas	**66.044.079.960,00**	**16.095.375.343,00**	**29,37**	**24,37**
Bidang EBTKE	5.788.647.000,00	**842.031.378,00**	19,55	14,55
Bidang Ketenagalistrikan	60.255.432.960,00	**15.253.343.965,00**	30,31	25,31
TOTAL PAGU DINAS	**93.786.666.930,00**	**28.048.032.326,00**	**34,91**	**29,91**

Faktor penyebab realiasi capaian Outcome melebihi target yang ditetapkan disebabkan dari beberapa faktor internal dan eksternal antara lain :

a. Pada sektor ketenagalistrikan jumlah sambungan rumah yang terpasang bersumber dari PLN sebanyak 26.624 KK yang semula berdasarkan target yang direncanakan sebanyak 1.200.000 KK berlistrik PLN maupun Non PLN menjadi 1.226.624 KK. Hal ini akan bertambah lagi mengingat belum selesainya pembangunan PLTS Terpusat sebanyak 6 lokasi dengan proyeksi sambungan sebanyak 750 KK.
b. Sektor pemanfaatan EBT semula Target yang direncanakan sebesar 8,40% realisasi sampai Triwulan I Tahun 2023 sebesar 11,60% dengan angka kenaikan sebesar 3,20% yang sebagian besar disumbang oleh PT. Pupuk Kaltim Bontang.

Tabel 2.4
Lokasi Pembangunan Tahun 2023

No	Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	Desa Pegat Betumbuk	Pulau Derawan	Berau
2	Desa Long Sului	Kelay	Berau
3	Desa Lemper & Desa Deraya	Bongan	Kutai Barat
4	Desa Mata Libaq	Long Hubung	Mahakam Ulu
5	Desa Ujoh Halang	Long Iram	Kutai Barat
6	Dusun Muluy Desa Swan Slutung	Muara Komam	Paser

Selain itu terdapat beberapa tambahan pembangunan yaitu pemasangan sambungan gratis rumah tangga Tahun 2023 pada rumah warga di Kabupaten Kukar, Kota Samarinda dan Kabupaten Paser sebanyak 200 sambungan rumah. Pembangunan instalasi Biogas sebanyak 28 unit di Kampung Purwodadi Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat sebanyak 20 unit dan Desa Margomulyo Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur sebanyak 8 unit. Pelaksanaan Pembangunan PJUTS sebanyak 55 titik di Kabupaten Mahakam Ulu serta Pembangunan PLTS Atap pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur kapasitas 30 kWp.

Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dipengaruhi oleh pelaksanaan kemitraan pemerintah-swasta yang didukung oleh partisipasi masyarakat. Setiap peningkatan pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta yang didukung oleh partisipasi masyarakat, maka dapat meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Kontribusi pelaksanaan kemitraan pemerintah-swasta yang didukung oleh partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan berkontribusi sangat besar bagi keberhasilan pencapaian program/kegiatan tersebut.

Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah di era otonomi daerah ditentukan kemampuan dan kreativitas pemerintah daerah di dalam merumuskan model pembangunan daerah sesuai kewenangannya, melalui pendekatan komunikasi pembangunan dengan seluruh komponen pembangunan di daerah baik pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat. Model pembangunan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah adalah penerapan pola kemitraan pemerintah-swasta. Hal ini tentunya akan membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur.

Keberadaan swasta yang berinvestasi dalam sektor pertambangan dan energy Provinsi Kalimantan Timur merupakan

potensi strategis yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah di dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Kemitraan pembangunan daerah tersebut diwujudkan melalui kerjasama pembangunan sarana-saran pembangkit listrik yang menunjang operasional pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan bersama berdasarkan skala prioritas kebutuhan pembangunan, dimana masing-masing mitra mengalokasikan sumber daya dalam mendukung program dan kegiatan.

Pencapaian keberhasilan pelaksanaan program sebagai model pembangunan daerah berbasis masyarakat terpencil dan daerah tertinggal dari hasil prakarsa dan inisiatif lokal dalam era desentralisasi dan otonomi daerah dipengaruhi oleh pelaksanaan kemitraan pemerintah-swasta yang didukung oleh partisipasi masyarakat secara luas.

Model kemitraan pemerintah-swasta dalam pelaksanaan program adalah wujud keberpihakan swasta sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawabnya untuk turut serta dalam membangun dan memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata khususnya Provinsi Kalimantan Timur.

Pelaksanaan pembangunan daerah berbasis masyarakat terpencil dan daerah tertinggal selama ini selalu mengandalkan kemampuan sumber daya dan organisasi pemerintah daerah. Kombinasi kerjasama antara dua lembaga yang berbeda orientasi antara pemerintah daerah dengan swasta (investor) melalui pola kemitraan pemerintah-swasta dalam pelaksanaan pembangunan daerah berbasis masyarakat terpencil dan daerah tertinggal sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasarkan pada perbedaan karakteristik dan orientasi kedua organisasi kemitraan ini, dimana pemerintah daerah sebagai organisasi publik yang memiliki orientasi sosial, sedangkan swasta merupakan organisasi privat yang berorientasi keuntungan (komersial).

Kesadaran baru mengenai perlunya dikembangkan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan pembangunan pada era persaingan global, bahwa tidak mungkin lagi pemerintah dan swasta berjalan sendiri-sendiri. Kemampuan sumberdaya pemerintah daerah dalam hal pembiayaan pembangunan yang terbatas sementara permasalahan pembangunan yang kompleks memerlukan penanganan yang komprehensif dan memadai, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan kemitraan dengan swasta untuk pelaksanaan program pembangunan daerah dengan tetap memaksimalkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu faktor penting dalam pembangunan.

Kemitraan pemerintah-swasta dalam pelaksanaan program/kegiatan dipandang sebagai nilai baru dalam pembangunan daerah yang berbasis masyarakat terpencil dan daerah tertinggal serta memberikan pandangan bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bukan lagi semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam arti formal, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama swasta dan masyarakat. Sinergitas ketiga faktor pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan daerah sangat menentukan pencapaian tujuan pembangunan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kibijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran sektor pemanfaatan energi terbarukan, karena biaya teknologi pemanfaatan energi baru terbarukan relatif mahal/tinggi, dan daerah yang belum memiliki infrastruktur energi lokasinya terletak di daerah terpencil, terluar dan tertinggal, maka diperlukan peran serta Pemerintah dan Swasta dalam membangun infrastruktur dimaksud, melalui porgram dan pendanaan yang memadai.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.001	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral									
3.29.001	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral									
3.29.001	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang ESDM**	**0%**	**82%**	**83%**	**83%**	**100.00**	**83%**	**83%**	**98.81**
3.29.001.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran**	**6**	**6**	6	**6**	**100.00**	**6**	**6**	**100.00**
3.29.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.001.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.001.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.001.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.001.1.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKjIP	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	17	14	17	18	105,88	18	18	100,00
3.29.001.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Akuntable**	**12**	**12**	**12**	**12**	**100.00**	**12**	**12**	**100.00**
3.29.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	12	12	12	12	100.00	12	12	100.00
3.29.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan SKPD	12	12	12	12	100.00	12	12	100.00
3.29.001.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi BMD yang diverifikasi**	**12**	**12**	**12**	**12**	**100.00**	**12**	**12**	**100.00**
3.29.001.1.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan bulanan administrasi BMD yang diverifikasi	12	12	12	12	100.00	12	12	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.001.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN**	**121**	**0**	**121**	**121**	**100.00**	**121**	**121**	**82.88**
3.29.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atributnya	121	109	121	121	100.00	121	121	53.30
3.29.001.1.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/Pelatihan	25	0	25	5	20,00	25	25	41.67
3.29.001.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai**	**12**	**12**	**12**	**12**	**100.00**	**12**	**12**	**100.00**
3.29.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11	11	11	11	100.00	11	11	100.00
3.29.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	35	11	33	33	100.00	35	35	77.78
3.29.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	12	12	100.00	12	12	100.00
3.29.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	120	120	120	120	100.00	120	120	100.00
3.29.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	144	144	144	144	100.00	144	144	100.00
3.29.001.1.06.007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material	6	6	6	6	100.00	6	6	100.00
3.29.001.1.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	4140	300	4140	1352	32,66	4140	4140	100.00
3.29.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	17	60	68	113,33	60	60	100.00
3.29.001.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah**	**73**	**11**	**73**	**73**	**100.00**	**73**	**73**	**173.81**
3.29.001.1.07.006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	42	5	5	0	00,00	42	42	57.53
3.29.001.1.07.010	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	42	6	42	42	100.00	42	42	100.00
3.29.001.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa kegiatan kantor**	**12**	**12**	**12**	**12**	**100.00**	**12**	**12**	**100.00**
3.29.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan	6000	472	6000	5049	84,15	6000	6000	10.00
3.29.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	12	100.00	12	12	100.00
3.29.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	12	12	100.00	12	12	100.00
3.29.001.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah secara berkala**	**12**	**12**	**12**	**12**	**100.00**	**12**	**12**	**100.00**
3.29.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39	39	39	39	100.00	39	39	100.00
3.29.001.1.09.006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	85	5	70	70	100.00	85	85	100.00
3.29.001.1.09.009	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	35	35	35	35	100.00	35	35	100.00
3.29.002	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan**	**38,38%**	**27,50**	**33,64**	**29,50**	**87,70**	**35%**	**38,38%**	**100.00**
3.29.002.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan**	**2**	**0**	**1**	**1**	**100.00**	**1**	**2**	**100.00**
3.29.002.1.01.001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah titik pengambilan data	33	0	15	15	100.00	33	33	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.002.1.01.002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah CAT yang dievaluasi	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.002.1.01.003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Peta batuan pada CAT Peta geologi untuk air tanah pada CAT Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan Batuan	1 1 1	0 0 0	1 1 1	1 1 1	100.00 100.00 100.00	1 1 1	1 1 1	100.00 100.00 100.00
3.29.002.1.02	**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan**	**120**	**0**	**120**	**120**	**100.00**	**120**	**120**	**100.00**
3.29.002.1.02.001	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah SOP Perizinan Air Tanah	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.002.1.02.002	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Prov	Jumlah Rekomendasi TeknisPerizinan air Tanah	100	0	100	100	100.00	100	100	100.00
3.29.002.1.02.003	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Prov	Jumlah Pelaksanaan Perizinan Air Tanah yang dikendalikan dan diawasi	150	0	150	150	100.00	150	150	150.00
3.29.002.1.03	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Jumah Aturan tekait Nilai Perolehan Air Tanah**	**1**	**0**	**1**	**1**	100.00	**1**	**1**	**100.00**
3.29.002.1.03.001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah data dan Informasi NPA Kabupaten/Kota yang terkumpul dan diolah	10	0	10	10	100.00	10	10	100.00
3.29.002.1.03.002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Kabupaten/Kota	0	0	1	0	00,00	0	1	100,00
3.29.002.1.03.003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah perusahaan Pemakaian air Tanah yang dikendalikan dan diawasi	120	120	120	120	100,00	120	120	100,00
3.29.003	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**	**50%**	**35%**	**50%**	**70,46%**	**140,92%**	**50%**	**50%**	**100.00**
3.29.003.1.01	**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	**Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi**		**1**	**1**	**1**	**100,00**	**1**	**1**	**100,00**
3.29.003.1.01.002	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada WIUP Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Inventarisasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.003.1.01.003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Data dan Informasi Pemanfaatan WIUP	9	0	9	9	100.00	9	9	100.00
3.29.003.1.01.004	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Verifikasi Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	4	0	4	4	100.00	4	4	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.003.1.01.005	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka PMDN yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi Khusus Untuk Pengelolaan dan pemurnian	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.003.1.01.006	Penatausahaan IUJP dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Data Izin Usaha Jasa Penunjang Pertambangan Dalam 1 Daerah Provinsi	0	0	1	1	100.00	0	0	00,00
3.29.003.1.01.007	Penetapan Harga Patokan MBLB	Standarisasi Harga Acuan MBLB Wilayah Provinsi	10	0	10	10	100.00	10	10	100.00
3.29.003.1.01.008	Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha pertambangan Operasi produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka PMDN	12	0	12	12	100.00	12	12	100,00
3.29.003.1.02	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah**	**Inventarisasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara**	**15**	**15**	**15**	**15**	**100,00**	**15**	**15**	**100,00**
3.29.003.1.02.001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada WIUP Daerah	Jumlah perusahaan CnC yang menerapkan efisiensi bahan bakar dan penggunaan biodiesel 20%	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.003.1.02.003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar K3 dan Lingkungan	9	0	9	9	100.00	9	9	100.00
3.29.003.1.02.004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka PMDN Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah Pengawasan Perusahaan yang mengikuti Kaidah Pertambangan Yang Baik	15	0	15	15	100.00	15	15	100.00
3.29.003.1.03	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	**Surat Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan**	**3**	**0**	**3**	**3**	**100.00**	**3**	**3**	**100.00**
3.29.003.1.03.001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka PMDN pada WIUP Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Data dan Informasi Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.003.1.03.003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka PMDN pada WIUP Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	25	0	25	25	100.00	25	25	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.003.1.03.005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah pengawasan perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik	65	0	55	55	100.00	65	65	100.00
3.29.003.1.04	**Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	**Jumlah Verifikasi Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam WPR**	**1**	**0**	**1**	**1**	**100.00**	**1**	**1**	**100.00**
3.29.003.1.04.001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Tersedianya Data dan Informasi Prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat	1	0	1	1	100.00	1	1	100,00
3.29.003.1.04.002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Data dan Informasi Wilayah Pertambangan Rakyat dalam daerah provinsi	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.003.1.04.004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah pengawasan perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.003.1.04.005	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Luas lahan yang direklamasi dan revegetasi	-	-	-	-	-	-	-	-
3.29.003.1.05	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama**	**Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi Khusus Untuk Pengelolaan dan pemurnian**	**1**	**0**	**1**	**1**	**100.00**	**1**	**1**	**100.00**
3.29.003.1.05.001	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan IUP OPK untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	Tersedianya Data dan Informasi Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian	1	0	1	1	100.00	0	0	-
3.29.003.1.05.003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan OPK untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka PMDN yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	Jumlah Perusahaan yang diawasi	20	0	20	20	100.00	20	20	100.00
3.29.003.1.07	**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**Standarisasi Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi**	**10**	**0**	**10**	**10**	**100.00**	**10**	**10**	**100.00**
3.29.003.1.07.001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Tersedianya Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	10	0	9	9	100.00	10	10	100.00
3.29.003.1.07.002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dikunci	SK Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	10	0	10	10	100.00	10	10	100.00
3.29.003.1.07.003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dikunci	Jumlah Perusahaan yang menerapkan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	20	0	20	20	100.00	20	20	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.003.1.08	**Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Izin Usaha pertambangan Operasi produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka PMDN**	**12**	**0**	**12**	**12**	**100.00**	**12**	**12**	**100.00**
3.29.003.1.08.001	Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan	Jumlah Perusahaan yang diawasi	12	0	12	12	100.00	12	12	100.00
3.29.005	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**Pemanfaatan EBT**	**8,40**	**6,53**	**7,34%**	**7,27%**	**99,05**	**7.34%**	**8,40**	**100,00**
3.29.005.1.01	**Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan**	**Jumlah potensi dan pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan**	**1**	**0**	**1**	**1**	**100.00**	**0**	**1**	**100,00**
3.29.005.1.01.001	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	0	1	1	100.00	0	1	100,00
3.29.005.1.01.002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.005.1.01.003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan PelaksanaanPerizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	0	1	1	100.00	1	1	100,00
3.29.005.1.02	**Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah potensi dan pemanfaatan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1**	**0**	**1**	**1**	**100.00**	**1**	**1**	**100,00**
3.29.005.1.02.001	Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Prosedur dan Pesyaratan SKT IUJP Dalam Daerah Provinsi	1	0	1	1	100.00	0	0	100,00
3.29.005.1.02.002	Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Teknis	1	0	1	1	100.00	0	0	100,00
3.29.005.1.02.003	Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SKT IUJP Dalam Daerah Provinsi yang dikendalikan dan diawasi	1	0	1	1	100.00	0	0	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.005.1.03	**Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun**	**Jumlah potensi dan pemanfaatan Biofuel sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun**	**1**	**0**	**1**	**1**	**100.00**	**1**	**1**	**100.00**
3.29.005.1.03.001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Dengan Kapasitas 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1	0	1	1	100.00	1	1	100,00
3.29.005.1.03.002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000	Jumlah rekomendasi Teknis Perizinan Bahan Bakar Nabati Kapasitas 10.000 Ton Per Tahun	1	0	1	1	100.00	1	1	100,00
3.29.005.1.03.003	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Perizinan Bahan Bakar Nabati Kapasitas 10.000 Ton Pertahun	1	0	1	1	100.00	1	1	100,00
3.29.005.1.03.004	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Pelaksanaan Perizinan Bahan Bakar Nabati Kapasitas 10.000 Ton Pertahun yang dikendalikan dan diawasi	1	0	1	1	100.00	0	0	100,00
3.29.005.1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air**	**1**	**0**	**1**	**1**	**100.00**	**1**	**1**	**100.00**
3.29.005.1.04.001	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	SOP pelaksanaan konservasi energi	2	0	1	1	100.00	2	2	100.00
3.29.005.1.04.002	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Sosialisasi Penghematan Energi dan Air pada Usia dini	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.005.1.04.003	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Sosialisasi penghematan energi pada pengelola gedung Pemerintah	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.005.1.04.004	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang dibangun Instalasi biogas	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.005.1.04.006	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah Peserta Pengelolaan Pelaksanaan Konservasi Energi	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.005.1.04.007	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan KE dan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.006	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**Jumlah KK Berlistrik**	**1200000**	**0**	**1.165.000**	**1.197.475**	**102,79**	**1200000**	**1200000**	**100,00**
3.29.006.1.01	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)**	**15**	**0**	**40**	**40**	**100.00**	**15**	**15**	**100,00**
3.29.006.1.01.003	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non BUMN dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pemegang izin non BUMN	15	0	40	40	100.00	15	15	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.006.1.02	**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)**	**60**	**0**	**60**	**60**	**100.00**	**60**	**60**	**100.00**
3.29.006.1.02.001	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah badan usaha/ instansi pemerintah yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO) Jumlah badan usaha/instansi pemerintah yang mengajukan permohonan Izin Operasi (IO)	15	0	50	50	100.00	15	15	100,00
3.29.006.1.02.002	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah badan usaha/ instansi pemerintah yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	15	0	50	50	100.00	15	15	100,00
3.29.006.1.02.003	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang menerapkan keselamatan ketenagalistrikan	15	0	50	50	100.00	15	15	100,00
3.29.006.1.03	**Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi**	**Jumlah Perusahaan yang mendapat rancangan PerGub untuk penetapan tarif tenaga listrik**	**0**	**0**	**5**	**5**	**100.00**	**0**	**0**	**0**
3.29.006.1.03.002	Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan penetapan tarif tenaga listrik	0	0	5	5	100.00	0	0	0
3.29.006.1.05	**Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri**	**Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)**	**15**	**0**	**15**	**15**	**100.00**	**15**	**15**	**100.00**
3.29.006.1.05.001	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan pemegang izinv	15	0	15	15	100.00	15	15	100.00
3.29.006.1.05.002	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis IUJPTL	0	0	15	15	100.00	0	0	0,00
3.29.006.1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana**	**Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Pedesaan**	**1**	**0**	**1**	**1**	**100.00**	**1**	**1**	**100.00**
3.29.006.1.06.001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Data warga yang belum berlistrik d isekitar jaringan Listrik PLN	0	0	1	1	100.00	0	0	0,00
3.29.006.1.06.003	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana	Jumlah Lokasi yang dilakukan sosialisasi keselamatan Listrik	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.006.1.06.004	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana	Data Penyediaan Tenaga Listrik Perdesaan	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.006.1.06.005	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana	Laporan Koordinasi/Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.006.1.06.006	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana	Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS dan Jaringan Distribusi Listrik	6	0	5	5	100.00	8	6	100.00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sehubungan bidang urusan energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pilihan sehingga tidak memiliki SPM dan juga tidak memiliki standar sebagai tolok ukur pencapaian kinerja. Kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral diukur dengan menggunakan indikator dengan target kinerja yang telah disepakati secara internal sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023. Capaian kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Tahun 2022 digambarkan dalam Tabel T-C.30.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas nergi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
			Thn 2019 (thn n-5)	Thn 2020 (thn n-4)	Thn 2021 (thn n-3)	Thn 2022 (thn n-1)	Thn 2023 (thn n)	Thn 2019 (thn n-5)	Thn 2020 (thn n-4)	Thn 2021 (thn n-3)	Thn 2022 (thn n-1)	Thn 2023 (thn n)	
Terpenuhinya Kebutuhan Energi Daerah	***Rasio Elektrifikasi***	%	***85,5***	***87,5***	***91,5***	***93***	***95***	***88.93***	***90.21***	***91.98***	***93,09***	***95.00***	
1. Terwujudnya pemanfaatan SDA secara berkelanjutan	Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	%	-	-	0,58	2,00	2,00	-	-	0,75	2,98	2,00	
	Persentase jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan produksi	%	38,86	42,75	46,63	54,4	59,59	38,86	42,75	46,63	77,27	59,59	Triwulan I
2. Meningkatnya rasio elektrifikasi rumah tangga pengguna listrik	Persentase Rasio Elektrifikasi	%	85.50	87.50	91.50	93.00	95.00	88.93	90.21	91.50	93,09	93,87	Triwulan II
3. Terpenuhinya kebutuhan energi di daerah terpencil	Rasio Desa Besrlistrik	%	99.00	99.13	99.33	99.52	100.00	99.13	100,00	100,00	100,00	100.00	

Capaian kinerja Tahun 2023 (tahun n) yang merupakan periode kelima Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur diproyeksikan tercapai 100% sebagaimana target pada Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2019-2023. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai oleh stakeholder lainnya terkait pemenuhan kebutuhan energy listrik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 (lima) Periode Tahun 2019-2023 dengan melakukan identifikasi melalui kebijakan dan kegiatan pembangunan yang mempengaruhi visi dan misi kepala daerah, output, biaya dan atau menajemen. Hasil dari identifikasi diharapkan akan dapat menentukan keputusan dan arah kebijakan bagaimana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur melakukan perencanaan, realisasi dan pengawasan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral.

Isu strategis menjadi dasar penetapan kebijakan strategis pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral adalah sebagai berikut :

1. Potensi energi baru terbarukan di Kalimantan Timur cukup besar, namun pemanfaatannya masih sedikit, karena potensi energi terbarukan terdapat pada lokasi yang jauh dari pengguna/penerima manfaat, mahalnya biaya investasi, harga jual beli energi secara ekonomi kurang menarik serta terbatasnya saran infrastruktur pendukung di lokasi tersebut.

   Adapun potensi tersebut diantaranya adalah :

   - Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terdapat pada 33 lokasi dengan total potensi kapasitas sebesar 2.118,8 Mega Watt (berdasarkan hasil survei Japan International Cooperation Agency (JICA) dan PT. PLN tahun 1983).
   - Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terdapat pada 32 lokasi dengan total potensi kapasitas sebesar 3,112 Mega Watt.

- Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terdapat pada 32 lokasi dengan total potensi kapasitas sebesar 3,112 Mega Watt.
- Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas dari limah gas pabrik sawit (POME) terdapat pada 75 lokasi dengan total kapasitas sebesar 170.5 Mega Watt.
- Potensi biogas untuk keperluan rumah tangga (memasak) yang tersebar di 10 kabupaten/kota dengan total kapasitas sebesar 30.887 M^3.
- Bila radiasi sinar matahari di kalimantan Timur sama dengan rata-rata radiasi sinar matahari di Indonesia yakni sekitar 4.8 KWh/m2, maka potensi enrgi yang dapat dimanfaatkan terhadap 10% dari seluruh wilayah daratan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 61 Giga Watt peak (GWp).

2. Rasio Elektrifikasi dan efisiensi penggunaan listrik di Kalimantan Timur belum optimal; Sementara potensi energi baru terbarukan cukup besar untuk mendukung listrik pedesaan.
   - Kapasitas terpasang pembangkit listrik PT PLN (Persero) Distribusi Kalimantan Timur sampai akhir Desember 2017 mencapai 1.229 MW, dengan. Panjang Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi 1.025 kms, panjang Jaringan Tegangan Menengah 4.717 Kms; Panjang Jaringan Tegangan Rendah 4.650 Kms; dan total Gardu Induk 1.310 MVA, Total Gardu Distribusi 765 MVA.

3. Terjadinya kerusakan lahan akibat kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI)

   Komoditas tambang batubara memunculkan Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Provinsi Kalimantan Timur yang tersebar di Kab/Kota, dengan luasan pada tahun 2020 sebesar 2,25 Hektar.

4. Belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan usaha pertambangan dalam meningkatkan nilai tambah dan kontribusi terhadap PDRB dan banyak terjadi pemanfaatan lahan ganda antara kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan usaha sektor lain.

Pengelolaan mineral dan batubara adalah usaha pertambangan mineral dan batubara yang telah dilakukan di KalimantanTimur baik berupa kegiatan sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyelidikan umum, Eksplorasi, Studi kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Permurnian, Pengangkutan dan Penjulan serta kegiatan pasca tambang. Di Provinsi Kalimantan Timur jumlah izin usaha pertambangan (IUP) yang telah dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebanyak 1.404 IUP yang terdiri dari : IUP Eksplorasi 491 izin ; IUP Operasi Produksi sebanyak 154 izin; IUP-OP Khusus Pengangkutan Penjualan sebanyak 4 izin; Izin Usaha Jasa Pertambangan sebanyak 139 izin; Izin Gudang Handak sebanyak 5 izin; Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebanyak 210 izin; Rekomendasi Pembelian Handak sebanyak 19 izin; Pengangkatan Kepala Teknik Tambang sebanyak 104 izin, dan Kartu Izin Meledakkan (KIM) sebanyak sebanyak 51 izin. Sedangkan jumlah IPR yang diterbitkan sebanyak 116 Izin.

Dari penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan tersebut, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Iuran Produksi dan Iuran Tetap) KalimantanTimur (Prov/Kab/Kota) tahun 2017 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 35% dari periode Tahun sebelumnya. Komoditas tambang dari hasil kegiatan penambangan yang ada di Provinsi KalimantanTimur sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar luar negeri dan dalam negeri dan sebagian dipergunakan sendiri oleh perusahaan sebagai sumber pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri.

5. Belum optimalnya informasi geologi dalam rangka meningkatkan investasi di bidang sumber daya geologi dan pengembangan wilayah.

Berdasarkan kondisi geologi wilayah Provinsi Kalimantan Timur merupakan rangkaian perbukitan struktural sebagai pembatas dan cekungan sedimen yang kaya sumber daya mineral baik logam maupun non logam serta suberdaya energi baik batubara maupun

minyakbumi dan gasbumi. Yang secara fisografi secara umum dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) Cekungan Sedimen, yaitu :

- Cekungan Kutai, pelamparannya dimulai dari Wilayah Kabupaten Mahakam Hulu di sisi Barat hingga Delta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara di sisi Timur dan dibatasi oleh Tinggian Mangkalihat di bagian Utara, Zona Sesar Adang di sebelah Selatan, Tinggian Kuching di bagian Barat dan Palung Sulawesi di bagian Timurnya.
- Cekungan Tarakan yang meliputi Kabupaten Berau yang terdiri dari Sub-Cekungan Berau dan Sub-Cekungan Muara, pelamparan cekungan ini mulai dari Kecamatan Segah hingga Kecamatan Sambaliung (Sub-Cekungan Berau) dan dari Kecamatan Biatan hingga Kecamatan Biduk Biduk. Pada sisi Utara berbatasan dengan Sub-Cekungan Tarakan, sisi Barat berbatasan dengan Tinggian Kuching dan sisi Selatan berbatasan dengan Tinggian Mangkalihat.
- Cekungan Pasir, meliputi wilayah sebelah selatan Sesar Adang di daerah Kuaro, Kabupaten Paser hingga Daratan Mikro Kontinen Partenoster di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dan disisi barat berbatasan dengan tinggian Pegunungan Meratus.

Informasi geologi secara menyeluruh sangat diperlukan dalam upaya pengembangan wilayah, namun demikian keberadaan informasi geologi di KalimantanTimur masih sangat terbatas.

6. Belum optimalnya informasi terhadap mitigasi bencana geologi dan lingkungan geologi.

Akibat dari suatu kegiatan pembangunan akan timbul berbagai dampak terhadap lingkungan setempat baik dampak positif maupun dampak negatif, yang sangat erat berkaitan dengan pemanfaatan dan produktivitas sumber daya alam serta kondisi geologi setempat. Apabila tidak ditanggulangi dengan baik kegiatan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan yang tidak teratur dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan intensitas terjadinya bencana (geologi) seperti longsor dan lain-lain. Disamping itu, dengan seringnya terjadi bencana tanah longsor baik pada daerah dengan

kerentanan gerakan tanah tinggi maupun sedang, maka kedepan diperlukan pemetaan resiko bencana kegeologian.

Dalam beberapa tahun terakhir ini pembangunan berbagai bidang di KalimantanTimur berlangsung dengan pesat, sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Interaksi dari lajunya pembangunan ini harus didukung oleh ketersediaan lahan (wilayah) yang baik. Sedangkan keberadaan suatu lahan diatas bumi ini tidak terlepas dari pengaruh faktor- faktor geologi, baik sebagai produk yang menguntungkan maupun yang merugikan. Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitian geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi diharapkan dapat memberikan masukan atau memecahkan masalah terutama untuk perencanaan pengembangan wilayah.

Isu – isu strategis tersebut merupakan akumulasi isu – isu strategis dari unit - unit yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KalimantanTimur, antara lain :

A. Bidang Energi Baru dan Terbarukan

Isu Strategis dalam bidang pemanfaatan energi baru terbarukan adalah biaya teknologi pemanfaatan energi baru terbarukan relatif mahal/tinggi, daerah yang belum memiliki infrastruktur energi lokasinya terletak di daerah terpencil, terluar dan tertinggal, harga jual beli energi baru terbarukan secara ekonomi kurang menarik serta terbatasnya sarana infrastruktur pendukung di lokasi tersebut. Untuk itu diperlukan peran serta Pemerintah dalam membangun infrastruktur dimaksud, melalui porgram dan pendanaan yang memadai.

B. Bidang Ketenagalistrikan

Dibidang Ketenagalistrikan isu strategisnya adalah : 2,5% masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur belum menikmati listrik PLN, karena Rasio Elektrifikasi (RE) sekitar 97,5% Tahun 2018, Efisiensi penggunaan energy listrik belum optimal. Potensi energy terbarukan cukup besar untuk mendukung listrik pedesaan

namun proses pengembangannya memerlukan dukungan infrastruktur dan pendanaan yang tidak sedikit.

Isu strategis bidang ini adalah Belum tertatanya sistem dan manajemen penyediaan listrik di Kalimantan Timur, Belum meratanya jaringan listrik antarwilayah yang dapat menjangkau daerah perdesaan, pedalaman dan perbatasan, Belum optimalnya pemanfaatan batubara dan sumber energi lainnya sebagai alternatif pembangkit tenaga listrik, Belum berkembangnya kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan pembangkit dan jaringan listrik. Cakupan pelayanan infrastruktur kelistrikan di Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal, mengingat masih rendahnya akses listrik masyarakat. Sampai tahun 2017 rasio elektrifikasi rumah tangga baru mencapai 84.07%. Namun demikian tingkat elektrifikasi perdesaan telah mencapai 96,92%. Beberapa upaya telah dilakukan antara lain pembangunan pembangkit listrik oleh swasta dan PT. PLN (Persero) dan pengembangan sumber energi terbarukan. Sedangkan meningkatnya pemanfaatan POME dikarenakan mempunyai prospek yang baik sebagai energi alternatif untuk penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat.

C. Bidang Geologi dan Air Tanah

Isu strategis bidang ini adalah Masih banyak wilayah rawan bencana yang belum terpetakan, Secara geografis sebagian wilayah di Kalimantan Timur rawan terhadap bencana geologi, seperti tanah longsor, banjir bandang dan potensi tsunami. Kegiatan penatagunaan lahan dan penyusunan Percepatan peningkatan produksi gas bumi untuk pasokan gas di kawasan industry Kalimantan Timur. Dalam hal ketersediaan energy, pertambanhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan semakin bertambahnya kebutuhan energy terutama minyak dan gas bumi. Kebutuhan energy tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan penyediaan energy dikarenakan cadangan energy utamanya energy (bahan bakar) fosil cadangannya semakin kecil yang pada akhirnya akan dihadapkan pada masalah kerentanan energy yang berpotensi terhadap terjadinya krisis

energy. Hal ini merupakan ancaman serius yang dapat mengganggu proses pembangunan di Kalimantan Timur.

D. Bidang Mineral dan Batubara

Isu strategis sector mineral dan batubara adalah Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan ekonomi sehingga meningkat pula konsumsi bahan tambang sebagai material dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jalan tol, jembatan, bangunan, perumahan dan lain-lain, sementara masih banyak komoditas dari hasil pertambangan yang dijual dalam bentuk raw material. Disamping itu masih juga terdapat kegiatan pertambangan tanpa ijin yang marak di setiap Kabupaten dan Kota yang berkedok pada pemanfaatan/pematangan lahan untuk kepentingan tanah kavling dan lainnya.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah. Potensi Sumber Daya Alam yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Timur semestinya tidak menjadi kekhawatiran, justru menginspirasi dan memotivasi Perangkat Daerah untuk melakukan terobosan mengolah kekayaan dan potensi sumber daya alam serta potensi sumber energy terbarukan untuk mengganti sumber energi yang tidak dapat diperbaharui (renewable). Saatnya kita berpaling untuk memanfaatkan kekayaan dan potensi energi yang sumbernya beragam seperti tenaga surya/sinar matahari dan sumber-sumber energy alternative lainnya. Berikut beberapa tantangan dan peluang yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan perangkat daerah antara lain :

Bidang Energi Baru dan Terbarukan

Tantangan	Peluang
Lokasi terpencil, terluar dan tertinggal, tidak memiliki akses terhadap energi.	Pembangunan dalam rangka penyediaan energi dengan memanfaatkan potensi eenrgi setempat.
Harga jual energi listrik yang berasal dari Energi Baru terbarukan masih belum kompetitif	Pemerintah memberikan insentif yang cukup terhadap pemanfaatan energi baru terbarukan dan berperan serta dalam menyediakan infrastruktur melalui pengadaan lahan dan lain-lain
Lokasi yang memiliki potensi energi terbarukan jenis tenaga air, biogas dan biomassa terletak didaerah terpencil	Mendorong perluasan jaringan transmisi dan distribusi energi hingga mencapai daerah yang memiliki potensi energi terbarukan atau menciptakan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi pada lokasi-lokasi yang dekat dengan daerah yang memiliki potensi energi terbarukan tersebut.
Kurangnya budaya dan kesadaran serta pengetahuan tentang hemat energi	Penyebar luasan informasi dan pengetahuan hemat energi pada masyarakat dan industri yang belum menggunakan energui secara efisien.

Infrastruktur, kemampuan jasa dan industri EBT di Prov. Kaltim belum berkembang	Terbuka peluang usaha dalam infrastruktur, jasa dan industri bidang EBT

Bidang Ketenagalistrikan

Tantangan	Peluang
Banyaknya potensi energi baru terbarukan yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan masih tingginya ketergantungan pembangkit listrik pada bahan bakar minyak	Pengembangan sumber energi listrik alternatif
Minimnya infrastruktur energi listrik untuk mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan, peningkatan produktivitas masyarakat, peningkatan dunia usaha, dan pengembangan berbagai kegiatan berbasis teknologi yang memerlukan pasokan listrik secara memadai	Penyediaan energi listrik diarahkan pada pembangunan pusat-pusat pembangkit listrik, pengembangan sumber energi listrik alternatif, peningkatan efisensi dalam manajamen sumber daya listrik, dan perluasan jaringan terpasang

Bidang Geologi dan Air Tanah

Tantangan	Peluang
Belum termanfaatkannya data dan informasi mengenai pengelolaan air tanah, lingkungan geologi dan kawasan pertambangan dan peta daerah rawan bencana geologi serta pengembangan dan perencanaan tata ruang wilayah	Optimalisasi pengelolaan air tanah, inventarisasi dan pemetaan sumberdaya geologi
Bencana alam tidak dapat diramalkan kapan terjadinya	Upaya preventif dengan early warning sistem
Pola penanggulangan bencana alam masih bersifat parsial, kurang terpadu dan kurangnya koordinasi antar semua pihak	Peningkatan sinergi para pihak
Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap mitigasi bencana alam dan kurangnya sarpras dalam penanggulangan bencana alam	Peningkatan Sumberdaya Manusia dan saprasnya
Potensi air tanah di Kalimantan Timur cukup besar tetapi penyediaan air bersih bersumber dari pengeboran air tanah untuk kebutuhan masyarakat di daerah sulit air belum maksimal dilaksanakan	Pengusahaan Pengeboran Air Tanah
Belum terpetakannya daerah sulit air di Provinsi Kailamntan Timur	
Regulasi pemanfaatan air tanah belum berjalan optimal	Penerapan regulasi pemanfaatan air tanah untuk meningkatkan retribusi/nilai perolehan air

Bidang Mineral dan Batubara

Tantangan	Peluang
Percepatan penataan IUP Bahan Galian Batubara Provinsi Kalimantan Timur	Kepastian hukum dalam kegiatan usaha pertambangan minerba serta menjamin pemenuhan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi
Kontribusi sektor pertambangan pada PDRB masih rendah	Membangun sentra-sentra unit usaha kemasayarakat melalui program CSR sebagai penyokong ekonomi kerakyatan
Kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) yang tersebar di Kabupaten/Kota	
Sulitnya dilakukan penertiban terhadap kegiatan PETI dikarenakan penambangan tanpa izin di beberapa daerah dilakukan oleh masyarakat setempat dan sudah menjadi mata pencaharian	Penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan wilayah berbasis potensi local (perkebunan, pertanian, perikanan dll) dengan fasilitasi perusahaan melalui CSR.
Banyak lokasi pertambangan batubara yang telah ditinggalkan oleh pengusaha	Mengelola asset perusahaan yang ditinggalkan menjadi komoditi yang dapat meningkatkan nilai tambah pendapatan daerah melalui upaya sector pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata

Formulasi isu-isu penting

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Menyediakan pasokan energi untuk daerah terluar tertinggal dan terpencil	Terpenuhinya kebutuhan energi didaerah terluar, tertinggal dan terpencil.	- Inventarisasi potensi energi terbarukan - Pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan - Pembinaan pengawasan dan pengelolaan energi terbarukan	- Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber energi setempat . - Meningkatkan dan mendorong investasi sebagai upatya pengembangan energi terbarukan.
Menyediakan pasokan listrik yang aman dan ramah lingkungan	- Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi penduduk daerah pedesaan, daerah terpencil dan wilayah kepulauan - Meningkatnya elektrifikasi rumah tangga tidak mampu - Terpenuhinya kebutuhan pasokan listrik untuk kegiatan industri	- Pengembangan infrastruktur jaringan di wilayah pedesaan, kepulauan yang belum terjangkau layanan listrik - Pengembangan pembangkit listrik tersebar untuk wilayah-wilayah pedesaan terpencil, kepulauan. - Pembinaan dan pengawasan pengelolaan ketenagalistrikan	- Meningkatkan aksesibilitas masyarakat khususnya pedesaan, daerah terpencil dan wilayah kepulauan terhadap pelayanan listrik yang murah dan berkualitas - Meningkatkan pelayanan listrik pada rumah tangga kurang mampu - Meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik
Terpenuhinya kebutuhan industri pemakai komoditas tambang yang ada di Kalimantan Timur	- Menyediakan komoditas tambang bagi pelaku industri pemakai komoditas tambang (PLTU) - Meningkatkan PDRB sektor pertambangan	Menarik investor dalam rangka Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Tambang	Memberikan kemudahan perizinan sektor pertambangan dan dukungan infrastruktur serta menjamin ketersediaan energi
Peningkatan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efesien dan efektif yang ramah lingkungan	Pengendalian eksploitasi bahan tambang untuk menjaga cadangan dalam jangka panjang	Pembinaan dan Pengawasan produksi batubara Kalimantan Timur	Penetapan Perda/pergub dan instrument aturan lainnya

Terwujudnya pengelolaan air tanah yang ber wawasan keseimbangan lingkungan.	Meningkatnya pemanfaatan air tanah yang berorientasi pada aspek konservasi Terlindunginya wilayah resapan sebagai daerah imbuhan air tanah. Meningkatkan penyediaaan air bersih dari air tanah bagi daerah sulit air	- Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pemanfaatan air tanah. - Melakukan Penelitian zona konservasi dan pemanfaatan air tanah - Melakukan penelitian dan penataan fungsi lahan untuk mempertahankan siklus hidrologi dengan baik - Melakukan penyelidikan, eksplorasi dan eksploitasi air tanah.	- Mendayagunakan dan meningkatkan penyelenggaraan dan pengelolaan pemanfaatan air tanah - Meningkatkan kajian lingkungan guna eksistensi air tanah tetap terjaga - Meningkatkan penyelidikan potensi air tanah , eksplorasi dan pembangunan sumur bor air tanah
Terwujudnya peningkatan penyediaan database sumberdaya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	Meningkatnya penyediaan data dan informasi sumberdaya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi	- Melakukan penyelidikan, inventarisasi dan pengkajian sumberdaya geologi, geologi lingkungan. - Melakukan sosialisasi dan mitigasi bencana geologi.	Meningkatkan ketersediaan informasi sumberdaya geologi & pemanfaatan Sumberdaya geologi serta pemetaan Geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Rancangan Akhir RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan fokus dan tema pembangunan ***"Reformasi struktural dan penguatan daya saing daerah dalam rangka menyambut IKN"*** merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada Tahun 2023.

Serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional serta isu-isu strategis dan permasalahan yang akan dihadapi pada Tahun 2023. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam bidang urusan energi dan sumberdaya mineral sebagaimana pada Tabel T-C.31. berikut :

Tabel T-C.31.

Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Timur

PD : Energi dan Sumber Daya Mineral

No	RANCANGAN RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**	**%**	**84**	**26.178.324.462**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**	**84**	**23.720.800.000**	
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran**	**Dokumen**	**6**	**1.409.900.000**	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran**	**6**	**1.850.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	476.400.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	650.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	20.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	20.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	17.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	20.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	20.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	12.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	20.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Berau.Kelay. Long Duhung Kab. Berau. Kelay. Long Lamcin Kab. Berau. Pulau Derawan. Teluk Semanting Kab. Berau. Maratua. Teluk Alulu Kab. Kutai Barat. Long Iram. Ujoh Halang Kab. Kutai Timur. Bengalon. Tepian Indah Kab. Kutai Timur. Sandaran. Sandaran Kab. Kutai Timur. Rantau Pulung. Tepian Makmur Kab. Paser. Batu Sopang. Rantau Buta Kab. Paser. Batu Sopang. Rantau Layung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18	873.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Berau.Kelay. Long Duhung Kab. Berau. Kelay. Long Lamcin Kab. Berau. Pulau Derawan. Teluk Semanting Kab. Berau. Maratua. Teluk Alulu Kab. Kutai Barat. Long Iram. Ujoh Halang Kab. Kutai Timur. Bengalon. Tepian Indah Kab. Kutai Timur. Sandaran. Sandaran Kab. Kutai Timur. Rantau Pulung. Tepian Makmur Kab. Paser. Batu Sopang. Rantau Buta Kab. Paser. Batu Sopang. Rantau Layung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	1.100.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Akuntable**	**Dokumen**	**1**	**15.918.356.322**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Akuntable**	**1**	**16.661.800.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	74	15.378.836.322	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74	16.000.000.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	539.520.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	661.800.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah ASN**	**Pegawai**	**131**	**324.109.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah ASN**	**131**	**450.000.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	126.752.500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	200.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota. Semua	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Orang	40	197.356.500	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota. Semua	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	40	250.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai**	**Bulan**	**12**	**4.572.828.760**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai**	**12**	**1.609.000.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	11	24.735.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	35.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	52	3.108.605.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	52	78.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	19.994.700	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	25.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	30.568.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	31.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	23.270.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	24.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	6	6.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6	10.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	99.840.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	106.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	1.259.814.760	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	1.300.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah jasa kegiatan kantor**	**Bulan**	**12**	**3.455.805.080**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah jasa kegiatan kantor**	**12**	**2.604.000.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	27.390.800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	24.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	243.297.400	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	280.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3.185.116.880	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2.300.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah secara berkala**	**Bulan**	**12**	**497.325.300**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah secara berkala**	**12**	**546.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	39	246.167.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39	291.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	17	82.560.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17	110.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	168.597.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	145.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		**Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan**	**%**	**38.38**	**2.280.786.700**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**		**Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan**	**38.38**	**2.863.862.000**	
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		**Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan**	**Dokumen**	**1**	**1.838.641.800**	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**		**Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan**	**1**	**2.338.862.000**	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Kab. Kutai Kartanegara. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Balikpapan. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Bontang. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Samarinda. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	1	882.284.800	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Kab. Kutai Kartanegara. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Balikpapan. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Bontang. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Samarinda. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1	1.200.000.000	
	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Kab. Kutai Kartanegara. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Balikpapan. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Bontang. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Samarinda. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provins	Dikumen	1	60.000.000	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Kab. Kutai Kartanegara. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Balikpapan. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Bontang. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Samarinda. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provins	1	95.000.000	
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Semua Kab/Kota. Semua	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	1	896.357.000	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Semua Kab/Kota. Semua	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1	1.043.862.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penatausahaan Izin Pengeboran. Izin Penggalian. Izin Pemakaian. dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		**Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan**	**Perusahaan**	**120**	**312.144.900**	**Penatausahaan Izin Pengeboran. Izin Penggalian. Izin Pemakaian. dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**		**Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan**	**120**	**525.000.000**	
	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran. Izin Penggalian. Izin Pemakaian. dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Semua Kab/Kota. Semua	Jumlah Rekomendasi Teknis perizinan pemanfaatan air tanah	Rekomtek	100	160.000.000	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran. Izin Penggalian. Izin Pemakaian. dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Semua Kab/Kota. Semua	Jumlah Rekomendasi Teknis perizinan pemanfaatan air tanah	100	200.000.000	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran. Penggalian. Pemakaian. dan Pengusahaan Air Tanah	Semua Kab/Kota. Semua	Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan	Perusahaan	120	152.144.900	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran. Penggalian. Pemakaian. dan Pengusahaan Air Tanah	Semua Kab/Kota. Semua	Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan	120	325.000.000	
	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		**Jumah Aturan tekait Nilai Perolehan Air Tanah**	**SK**	**1**	**130.000.000**	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**		**Jumah Aturan tekait Nilai Perolehan Air Tanah**	**1**	**0**	
	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Semua Kab/Kota. Semua	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	1	130.000.000	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Semua Kab/Kota. Semua	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1	0	
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		**Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**	**%**	**50**	**1.573.175.808**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**		**Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**	**50**	**1.590.152.000**	
	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		**Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi**	**Dokumen**	**1**	**247.000.000**	**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**		**Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi**	**1**	**120.000.000**	
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota. Semua	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam. Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Laporan	1	247.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota. Semua	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam. Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1	120.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah		**Inventarisasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara**	**Dokumen**	**3**	**397.960.000**	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah**		**Inventarisasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara**	**3**	**411.552.000**	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar K3 dan Lingkungan	IUP	15	106.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar K3 dan Lingkungan	15	120.000.000	
	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Laporan perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan perundangan yang berlaku	Laporan	16	291.960.000	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Laporan perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan perundangan yang berlaku	16	291.552.000	
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		**Surat Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan**	**Dokumen**	**3**	**336.599.808**	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**		**Surat Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan**	**3**	**338.600.000**	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka PMDN pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan	1	99.999.808	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka PMDN pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1	100.000.000	
	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka PMDN pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota. Semua	Jumlah perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan perundangan yang berlaku	Laporan	16	236.600.000	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka PMDN pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota. Semua	Jumlah perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan perundangan yang berlaku	16	238.600.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam. Batubara. Mineral Bukan Logam. dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat		**Jumlah Verifikasi Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Komoditas Mineral Logam. Batubara. Mineral Bukan Logam. dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	**Dokumen**	**4**	**92.616.000**	**Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam. Batubara. Mineral Bukan Logam. dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**		**Jumlah Verifikasi Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Komoditas Mineral Logam. Batubara. Mineral Bukan Logam. dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	**4**	**120.000.000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan	1	92.616.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1	120.000.000	
	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		**Standarisasi Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi**	**Kab/Kota**	**10**	**499.000.000**	**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**		**Standarisasi Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi**	**10**	**600.000.000**	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Semua Kab/Kota. Semua	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen	1	125.000.000	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Semua Kab/Kota. Semua	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	1	200.000.000	
	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dikunci	Semua Kab/Kota. Semua	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen	1	100.000.000	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dikunci	Semua Kab/Kota. Semua	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	1	200.000.000	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dikunci	Semua Kab/Kota. Semua	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Laporan	20	274.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dikunci	Semua Kab/Kota. Semua	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	20	200.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN		**Pemanfaatan EBT**	**%**	**8.4**	**5.795.245.500**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**		**Pemanfaatan EBT**	**8.4**	**5.170.000.000**	
	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan		**Inventarisasi Potensi Aneka Energi Baru Terbarukan**	**Kab/Kota**	**4**	**702.810.500**	**Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan**		**Inventarisasi Potensi Aneka Energi Baru Terbarukan**	**6**	**900.000.000**	
			Jumlah potensi dan pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	**Dokumen**	**1**				**Jumlah potensi dan pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan**	**1**		
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Kab. Berau. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Paser. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Dokumen	1	702.810.500	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Kab. Berau. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Paser. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	1	900.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penatausahaan Izin. Pembinaan. dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun		**Jumlah potensi dan pemanfaatan Biofuel sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun**	**Dokumen**	**1**	**471.435.000**	**Penatausahaan Izin. Pembinaan. dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun**		**Jumlah potensi dan pemanfaatan Biofuel sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun**	**1**	**775.000.000**	
	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Kab. Berau. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Paser. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Laporan	1	471.435.000	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Kab. Berau. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Paser. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1	775.000.000	
	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi		**Penerbitan Instruksi. Edaran. Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air**	**Dokumen**	**1**	**4.621.000.000**	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**		**Penerbitan Instruksi. Edaran. Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air**	**1**	**3.495.000.000**	
	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pembuatan Dokumen Peraturan Gubernur	Dokumen	2	55.000.000	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pembuatan Dokumen Peraturan Gubernur	2	75.000.000	
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Kab. Berau. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Balikpapan. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Samarinda. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi Kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur	Sekolah Kegiatan	4 2	276.000.000	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Kab. Berau. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Balikpapan. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Samarinda. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi Kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur	4 2	200.000.000	
	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Kab. Kutai Barat. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pembangunan Instalasi Biogas Pembangunan PJUTS Pembangunan PLTS Atap Perencanaan DED PLTS Atap	Unit Unit Unit Paket	28 100 1 1	4.120.000.000	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Kab. Kutai Barat. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pembangunan Instalasi Biogas Pembangunan PJUTS Pembangunan PLTS Atap Perencanaan DED PLTS Atap	36 100 1 1	3.000.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengawasan Konservasi Energi dan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi	Kegiatan	3	170.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengawasan Konservasi Energi dan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi	3	220.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		**Jumlah KK Berlistrik**	**KK**	**1200000**	**60.248.834.460**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**		**Jumlah KK Berlistrik**	**1200000**	**56.200.000.000**	
	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		**Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)**	**Perusahaan**	**20**	**300.000.000**	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**		**Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)**	**20**	**300.000.000**	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Kota Balikpapan. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Bontang. Semua Kecamatan. Semua	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Laporan	1	300.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Kota Balikpapan. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Bontang. Semua Kecamatan. Semua	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1	300.000.000	
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		**Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)**	**Perusahaan**	**60**	**800.000.000**	**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**		**Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)**	**60**	**1.300.000.000**	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah perusahaan pemegang IUPTLS yang dilakukan pembinaan Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	Perusahaan Perusahaan	20 30	300.000.000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah perusahaan pemegang IUPTLS yang dilakukan pembinaan Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	20 30	300.000.000	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah perusahaan pemegang izin non BUMN	Perusahaan	15	500.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah perusahaan pemegang izin non BUMN	15	1.000.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri		**Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)**	**Perusahaan**	**12**	**300.000.000**	**Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri**		**Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)**	**12**	**300.000.000**	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Perusahaan	12	300.000.000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	12	300.000.000	
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu. Pembangunan Sarana		**Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Pedesaan**	**Dokumen**	**1**	**58.848.834.460**	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu. Pembangunan Sarana**		**Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Pedesaan**	**1**	**54.300.000.000**	
	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	968.682.000	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1	1.500.000.000	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang. Daerah Terpencil dan Perdesaan	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dokumen	1	298.400.000	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang. Daerah Terpencil dan Perdesaan	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1	500.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang. Daerah Terpencil dan Perdesaan	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Laporan	20	300.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang. Daerah Terpencil dan Perdesaan	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	20	300.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang. Daerah Terpencil dan Perdesaan	Kab. Berau. Kelay. Long Sului Kab. Berau. Pulau Derawan. Pegat Batumbuk Kab. Kutai Barat. Bongan. Deraya Kab. Kutai Timur. Sandaran. Tanjung Mangkaliat Kab. Paser. Muara Komam. Swan Slutung Kab. Mahakam Ulu. Long Hubung. Matalibaq	Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS	Lokasi	7	57.281.752.460	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang. Daerah Terpencil dan Perdesaan	Kab. Berau. Kelay. Long Sului Kab. Berau. Pulau Derawan. Pegat Batumbuk Kab. Kutai Barat. Bongan. Deraya Kab. Kutai Timur. Sandaran. Tanjung Mangkaliat Kab. Paser. Muara Komam. Swan Slutung Kab. Mahakam Ulu. Long Hubung. Matalibaq	Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS	7	52.000.000.000	
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang. Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	7				Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang. Daerah Terpencil dan Perdesaan	7		
TOTAL PAGU						**96.076.366.930**					**89.544.814.000**	

Sasaran RKPD Tahun 2023 sebagaimana tersebut di atas diharapkan akan tercapai dengan melaksanakan program prioritas di bidang urusan energi dan sumberdaya mineral dengan target kinerja sebagaimana pada Tabel T-C.31.

Untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah sebagaimana disebut di atas, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 juga telah menggariskan program/kegiatan pendukung dalam bidang urusan energi dan sumber daya mineral yang akan dilaksanakan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019.

Dari hasil review dan klarifikasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan baik prioritas maupun pendukung dalam RKPD tersebut ditemukan bahwa rumusan program/kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, besaran pagu indikatif, serta prakiraan maju Tahun 2023 telah sesuai dengan kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengumpulan informasi maupun pengamatan selama pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan musrenbang Provinsi Kalimantan Timur terdapat usulan program/kegiatan dari masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya yang langsung ditujukan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Kegiatan yang diusulkan/diminta oleh masyarakat tersebut terutama menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar yaitu :

- pemasangan sambungan rumah gratis bagi keluarga tidak mampu
- permintaan pemasangan PLTS di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan jaringan listrik PLN
- permintaan pembangunan instalasi biodigester untuk masyarakat
- permintaan pembuatan sumur bor eksplorasi/eksploitasi air di daerah-daerah krisis air bersih dan daerah pesisir

Usulan kegiatan tersebut di atas sebagian yang dapat terakomodir di dalam rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023, sebagaimana juga telah digariskan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pengelolaan Ketenagalistrikan	1. Desa Pegat Betumbuk (seberang) Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau. 2. Desa Long Sului/Long Pelay Kecamatan Kelay Kabupaten Berau. 3. Desa Tanjung Mangkaliat Kec. Sandaran Kabupaten Kutai Timur. 4. Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu 5. Desa Lemper dan Desa Deraya Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat *6.* Dusun Mului Desa Swanselutung Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser	– Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS – Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	6 Lokasi 6 Unit	Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid dan Revitalisasi PLTS Terpusat
2	Pengelolaan Energi Terbarukan	1. Kampung Tumbit Dayak & Kampung Bebanir Bangun Kec. Sambaliung Kab. Berau (16 Unit) 2. Desa Sambera Baru Kec. Marangkayu, Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kab. Kukar (20 Unit).	Pembangunan Instalasi Biogas	36 Unit	Pembangunan Biogas

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 yang terkait dengan bidang urusan energi dan sumber daya mineral sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 3
Identifikasi Kebijakan Nasional (*bidang urusan ESDM*)

No.	Tema RKP Nasional	Sumber	Keterangan
1.	Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas	RKP Thn 2019	
2.	Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas	RKP Thn 2020	
3.	"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"	RKP Thn 2021	
4.	"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"	RKP Thn 2023	

Prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan kebijakan nasional sebagaimana diuraikan pada Tabel-5 berpengaruh cukup besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah Kalimantan Timur, khususnya dalam fokus/prioritas peningkatan kapasitas dan tingkat pelayanan infrastruktur energy, pemantapan infrastruktur sumber daya air, pembangunan sumber daya air, perlindungan sumber air dan ekosistemnya, pemenuhan kebutuhan air serta peningkatan peranan EBT di dalam bauran energi. Hal ini juga berpengaruh sangat besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan tugas dan fungsi dalam bidang urusan energi dan sumber daya mineral.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana tujuan dan sasaran yang tercantum pada Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur pada akhir Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan pemanfaatan energy baru terbarukan;;

2. Terwujudnya pengusahaan ketenagalistrikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berdaya saing tinggi;
3. Meningkatnya pertumbuhan industri berbasis mineral dan batubara;
4. Terwujudnya Peningkatan Status dan Kualitas Data Dasar Geologi, Sumber Daya Geologi, Penataan Ruang Berbasis Geologi, serta Mitigasi Bencana Geologi bagi semua sector pengguna;

Sasaran-sasaran yang ditetapkan selama 5 tahun (Tahun 2019 – 2023) dalam rangka pencapaian tujuan diatas adalah :

1. Menurunnya penggunaan energi fosil yang tidak terbarukan ke energi terbarukan
2. Meningkatnya efisiensi penggunaan energy
3. Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan bioenergy
4. Meningkatnya infrastruktur energi dan ketenagalistrikan bagi sector pengguna
5. Terpenuhinya kebutuhan listrik di pedesaan
6. Terwujudnya pengusahaan ketenagalistrikan yang aman, andal dan ramah lingkungan
7. Meningkatnya kualitas perusahaan sesuai kaidah pertambangan yang berlaku
8. Terwujudnya rehabilitasi lahan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan
9. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan yang ramah lingkungan dan rendah emisi
10. Penyiapan dan Penyediaan Data, Informasi dan Rekomendasi Pengelolaan Air Tanah, Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan untuk Penataan Ruang dan Infrastruktur untuk keperluan sector pengguna
11. Peningkatan Kualitas Data Keprospekan Sumber Daya, Batubara, Migas dan Mineral
12. Mengoptimalkan pemanfatan air melalui penerapan cara-cara penggunan air, memelihara jumlah, waktu aliran, dan kualitas air secara efisien

3.3. Program dan Kegiatan

Sasaran dan tujuan sebagaimana disebut diatas diharapkan akan tercapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi program penunjang/kesekretariatan dan program strategis/teknis. Uraian

program dan kegiatan tersebut mengacu pada Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 maupun Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Secara rinci program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 terdiri atas 5 program dan 24 kegiatan serta 61 sub kegiatan sebagai berikut :

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (PILIHAN) :

Sekretariat :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

8) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

10) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
11) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

12) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17) Penyediaan Bahan/Material
18) Fasilitasi Kunjungan Tamu
19) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

20) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
21) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

23) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
24) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Bidang Geologi dan Air Tanah

2. PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN

7. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

26) Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
27) Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah

28) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah

8. Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

29) Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah

30) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah

9. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

31) Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah

Bidang Mineral dan Batubara

3. PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

10. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

32) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

11. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah

33) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah

34) Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah

12. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

35) Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

36) Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

13. Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat

37) Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat

14. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama

38) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama

15. Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

39) Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

40) Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dikunci

41) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dikunci

Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

4. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN

16. Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan

42) Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan

17. Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun

43) Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan
sampai dengan 10.000

18. Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi

44) Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
45) Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
46) Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
47) Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi

Bidang Ketenagalistrikan

5. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

19. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

48) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

20. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

49) Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
50) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

21. Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri

51) Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri

22. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana

52) Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
53) Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
54) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum

Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
55) Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

Rumusan program dan kegiatan yang meliputi indikator kinerja, jumlah pagu indikatif, sumber dana, dan prakiraan maju Tahun 2023 sebagaimana pada Tabel T-C.33.

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Timur

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBYUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**		**84**	**26.178.324.462**			**84**	**23.720.800.000**
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran**		**6**	**1.409.900.000**			**6**	**1.850.000.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	1	476.400.000			1	650.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	1	15.000.000			1	20.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	1	7.500.000			1	20.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	1	17.500.000			1	20.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	1	7.500.000			1	20.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	1	12.500.000			1	20.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Berau.Kelay. Long Duhung Kab. Berau. Kelay. Long Lamcin Kab. Berau. Pulau Derawan. Teluk Semanting Kab. Berau. Maratua. Teluk Alulu Kab. Kutai Barat. Long Iram. Ujoh Halang Kab. Kutai Timur. Bengalon. Tepian Indah Kab. Kutai Timur. Sandaran. Sandaran Kab. Kutai Timur. Rantau Pulung. Tepian Makmur Kab. Paser. Batu Sopang. Rantau Buta Kab. Paser. Batu Sopang. Rantau Layung	18	873.500.000			18	1.100.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Akuntable**		**1**	**15.918.356.322**			**1**	**16.661.800.000**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	74	15.378.836.322			74	16.000.000.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	1	539.520.000			1	661.800.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah ASN**		**131**	**324.109.000**			**131**	**450.000.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	3	126.752.500			3	200.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Semua Kab/Kota. Semua	40	197.356.500			40	250.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai**		**12**	**4.572.828.760**			**12**	**1.609.000.000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	11	24.735.900			11	35.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	52	3.108.605.000			52	78.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	1	19.994.700			1	25.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	4	30.568.000			4	31.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	1	23.270.400			1	24.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	6	6.000.000			6	10.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	12	99.840.000			12	106.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	60	1.259.814.760			60	1.300.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah jasa kegiatan kantor**		**12**	**3.455.805.080**			**12**	**2.604.000.000**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	12	27.390.800			12	24.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	12	243.297.400			12	280.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	12	3.185.116.880			12	2.300.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah secara berkala**		**12**	**497.325.300**			**12**	**546.000.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	39	246.167.700			39	291.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	17	82.560.000			17	110.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	3	168.597.600			3	145.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	**Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan**		**38.38**	**2.280.786.700**			**38.38**	**2.863.862.000**
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	**Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan**		**1**	**1.838.641.800**			**1**	**2.338.862.000**
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Kab. Kutai Kartanegara. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Balikpapan. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Bontang. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Samarinda. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	1	882.284.800			1	1.200.000.000
	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provins	Kab. Kutai Kartanegara. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Balikpapan. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Bontang. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Samarinda. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	1	60.000.000			1	95.000.000
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota. Semua	1	896.357.000			1	1.043.862.000
	Penatausahaan Izin Pengeboran. Izin Penggalian. Izin Pemakaian. dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	**Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan**		**120**	**312.144.900**			**120**	**525.000.000**
	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran. Izin Penggalian. Izin Pemakaian. dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Rekomendasi Teknis perizinan pemanfaatan air tanah	Semua Kab/Kota. Semua	100	160.000.000			100	200.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran. Penggalian. Pemakaian. dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan	Semua Kab/Kota. Semua	120	152.144.900			120	325.000.000
	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	**Jumah Aturan tekait Nilai Perolehan Air Tanah**		**1**	**130.000.000**			**1**	**0**
	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota. Semua	1	130.000.000			1	0
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	**Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**		**50**	**1.573.175.808**			**50**	**1.590.152.000**
	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	**Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi**		**1**	**247.000.000**			**1**	**120.000.000**
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam. Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota. Semua	1	247.000.000			1	120.000.000
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah	**Inventarisasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara**		**3**	**397.960.000**			**3**	**411.552.000**
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar K3 dan Lingkungan	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	15	106.000.000			15	120.000.000
	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah Laporan perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	16	291.960.000			16	291.552.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	**Surat Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan**		**3**	**336.599.808**			**3**	**338.600.000**
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka PMDN pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	1	99.999.808			1	100.000.000
	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka PMDN pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota. Semua	16	236.600.000			16	238.600.000
	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam. Batubara. Mineral Bukan Logam. dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	**Jumlah Verifikasi Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Komoditas Mineral Logam. Batubara. Mineral Bukan Logam. dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**		**4**	**92.616.000**			**4**	**120.000.000**
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	1	92.616.000			1	120.000.000
	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	**Standarisasi Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi**		**10**	**499.000.000**			**10**	**600.000.000**
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	Semua Kab/Kota. Semua	1	125.000.000			1	200.000.000
	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dikunci	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	Semua Kab/Kota. Semua	1	100.000.000			1	200.000.000
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dikunci	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Semua Kab/Kota. Semua	20	274.000.000			20	200.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	**Pemanfaatan EBT**		**8.4**	**5.795.245.500**			**8.4**	**5.170.000.000**
	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	**Inventarisasi Potensi Aneka Energi Baru Terbarukan** **Jumlah potensi dan pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan**		**4** **1**	**702.810.500**			**6** **1**	**900.000.000**
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Kab. Berau. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Paser. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	1	702.810.500			1	900.000.000
	Penatausahaan Izin. Pembinaan. dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	**Jumlah potensi dan pemanfaatan Biofuel sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun**		**1**	**471.435.000**			**1**	**775.000.000**
	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Kab. Berau. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Paser. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	1	471.435.000			1	775.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	**Penerbitan Instruksi. Edaran. Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air**		**1**	**4.621.000.000**			**1**	**3.495.000.000**
	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Pembuatan Dokumen Peraturan Gubernur	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	2	55.000.000			2	75.000.000
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi	Kab. Berau. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Balikpapan. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Samarinda. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	4	276.000.000			4	200.000.000
		Kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur		2				2	
	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Pembangunan Instalasi Biogas	Kab. Kutai Barat. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	28	4.120.000.000			36	3.000.000.000
		Pembangunan PJUTS		100				100	
		Pembangunan PLTS Atap		1				1	
		Perencanaan DED PLTS Atap		1				1	
	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Konservasi Energi dan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	3	170.000.000			3	220.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	**Jumlah KK Berlistrik**		**1200000**	**60.248.834.460**			**1200000**	**56.200.000.000**
	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	**Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)**		**20**	**300.000.000**			**20**	**300.000.000**
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Kota Balikpapan. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Bontang. Semua Kecamatan. Semua	1	300.000.000			1	300.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	**Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)**		**60**	**800.000.000**			**60**	**1.300.000.000**
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pemegang IUPTLS yang dilakukan pembinaan Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	20 30	300.000.000			20 30	300.000.000
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pemegang izin non BUMN	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	15	500.000.000			15	1.000.000.000
	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	**Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)**		**12**	**300.000.000**			**12**	**300.000.000**
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	12	300.000.000			12	300.000.000
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu. Pembangunan Sarana	**Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Pedesaan**		**1**	**58.848.834.460**			**1**	**54.300.000.000**
	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	1	968.682.000			1	1.500.000.000
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang. Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	1	298.400.000			1	500.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang. Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	20	300.000.000			20	300.000.000
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang. Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang. Daerah Terpencil dan Perdesaan	Kab. Berau. Kelay. Long Sului Kab. Berau. Pulau Derawan. Pegat Batumbuk Kab. Kutai Barat. Bongan. Deraya Kab. Kutai Timur. Sandaran. Tanjung Mangkaliat Kab. Paser. Muara Komam. Swan Slutung Kab. Mahakam Ulu. Long Hubung. Matalibaq	7 7	57.281.752.460			7 7	52.000.000.000
Total					96.076.366.930				96.076.366.930

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung Kalimantanb pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya mengalir kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan teknis tahunan, sebagai implementasi dari Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Renstra Dinas ESDM) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.

Perubahan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 memuat tentang program, kegiatan dan target-target capaian sasaran yang harus dicapai pada tahun 2023. Rencana Kerja ini selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf kearah yang lebih baik dimasa datang.

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur seperti pada Tabel dibawah.

Tabel 4
Rincian Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBYUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**		**84**	**26.178.324.462**			**84**	**23.720.800.000**
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran**		**6**	**1.409.900.000**			**6**	**1.850.000.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	1	476.400.000			1	650.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	1	15.000.000			1	20.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	1	7.500.000			1	20.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	1	17.500.000			1	20.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	1	7.500.000			1	20.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	1	12.500.000			1	20.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Berau.Kelay. Long Duhung Kab. Berau. Kelay. Long Lamcin Kab. Berau. Pulau Derawan. Teluk Semanting Kab. Berau. Maratua. Teluk Alulu Kab. Kutai Barat. Long Iram. Ujoh Halang Kab. Kutai Timur. Bengalon. Tepian Indah Kab. Kutai Timur. Sandaran. Sandaran Kab. Kutai Timur. Rantau Pulung. Tepian Makmur Kab. Paser. Batu Sopang. Rantau Buta Kab. Paser. Batu Sopang. Rantau Layung	18	873.500.000			18	1.100.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Akuntable**		**1**	**15.918.356.322**			**1**	**16.661.800.000**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	74	15.378.836.322			74	16.000.000.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	1	539.520.000			1	661.800.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah ASN**		**131**	**324.109.000**			**131**	**450.000.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	3	126.752.500			3	200.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Semua Kab/Kota. Semua	40	197.356.500			40	250.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai**		**12**	**4.572.828.760**			**12**	**1.609.000.000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	11	24.735.900			11	35.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	52	3.108.605.000			52	78.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	1	19.994.700			1	25.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	4	30.568.000			4	31.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	1	23.270.400			1	24.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	6	6.000.000			6	10.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	12	99.840.000			12	106.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	60	1.259.814.760			60	1.300.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah jasa kegiatan kantor**		**12**	**3.455.805.080**			**12**	**2.604.000.000**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	12	27.390.800			12	24.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	12	243.297.400			12	280.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	12	3.185.116.880			12	2.300.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah secara berkala**		**12**	**497.325.300**			**12**	**546.000.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	39	246.167.700			39	291.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	17	82.560.000			17	110.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda. Samarinda Ulu. Air Putih	3	168.597.600			3	145.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	**Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan**		**38.38**	**2.280.786.700**			**38.38**	**2.863.862.000**
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	**Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan**		**1**	**1.838.641.800**			**1**	**2.338.862.000**
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Kab. Kutai Kartanegara. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Balikpapan. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Bontang. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Samarinda. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	1	882.284.800			1	1.200.000.000
	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provins	Kab. Kutai Kartanegara. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Balikpapan. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Bontang. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Samarinda. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	1	60.000.000			1	95.000.000
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota. Semua	1	896.357.000			1	1.043.862.000
	Penatausahaan Izin Pengeboran. Izin Penggalian. Izin Pemakaian. dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	**Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan**		**120**	**312.144.900**			**120**	**525.000.000**
	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran. Izin Penggalian. Izin Pemakaian. dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Rekomendasi Teknis perizinan pemanfaatan air tanah	Semua Kab/Kota. Semua	100	160.000.000			100	200.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran. Penggalian. Pemakaian. dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan	Semua Kab/Kota. Semua	120	152.144.900			120	325.000.000
	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	**Jumah Aturan tekait Nilai Perolehan Air Tanah**		**1**	**130.000.000**			**1**	**0**
	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota. Semua	1	130.000.000			1	0
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	**Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**		**50**	**1.573.175.808**			**50**	**1.590.152.000**
	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	**Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi**		**1**	**247.000.000**			**1**	**120.000.000**
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam. Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota. Semua	1	247.000.000			1	120.000.000
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah	**Inventarisasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara**		**3**	**397.960.000**			**3**	**411.552.000**
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar K3 dan Lingkungan	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	15	106.000.000			15	120.000.000
	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah Laporan perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	16	291.960.000			16	291.552.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	**Surat Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan**		**3**	**336.599.808**			**3**	**338.600.000**
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka PMDN pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	1	99.999.808			1	100.000.000
	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka PMDN pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota. Semua	16	236.600.000			16	238.600.000
	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam. Batubara. Mineral Bukan Logam. dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	**Jumlah Verifikasi Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Komoditas Mineral Logam. Batubara. Mineral Bukan Logam. dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**		**4**	**92.616.000**			**4**	**120.000.000**
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	1	92.616.000			1	120.000.000
	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	**Standarisasi Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi**		**10**	**499.000.000**			**10**	**600.000.000**
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	Semua Kab/Kota. Semua	1	125.000.000			1	200.000.000
	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dikunci	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	Semua Kab/Kota. Semua	1	100.000.000			1	200.000.000
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dikunci	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Semua Kab/Kota. Semua	20	274.000.000			20	200.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	**Pemanfaatan EBT**		**8.4**	**5.795.245.500**			**8.4**	**5.170.000.000**
	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	**Inventarisasi Potensi Aneka Energi Baru Terbarukan** **Jumlah potensi dan pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan**		**4** **1**	**702.810.500**			**6** **1**	**900.000.000**
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Kab. Berau. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Paser. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	1	702.810.500			1	900.000.000
	Penatausahaan Izin. Pembinaan. dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	**Jumlah potensi dan pemanfaatan Biofuel sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun**		**1**	**471.435.000**			**1**	**775.000.000**
	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Kab. Berau. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Paser. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	1	471.435.000			1	775.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	**Penerbitan Instruksi. Edaran. Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air**		**1**	**4.621.000.000**			**1**	**3.495.000.000**
	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Pembuatan Dokumen Peraturan Gubernur	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	2	55.000.000			2	75.000.000
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi	Kab. Berau. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat. Semua Kecamatan. Semua	4	276.000.000			4	200.000.000
		Kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur	Kelurahan Kota Balikpapan. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Samarinda. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	2				2	
	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Pembangunan Instalasi Biogas	Kab. Kutai Barat. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	28	4.120.000.000			36	3.000.000.000
		Pembangunan PJUTS		100				100	
		Pembangunan PLTS Atap		1				1	
		Perencanaan DED PLTS Atap		1				1	
	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Konservasi Energi dan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	3	170.000.000			3	220.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	**Jumlah KK Berlistrik**		**1200000**	**60.248.834.460**			**1200000**	**56.200.000.000**
	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	**Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)**		**20**	**300.000.000**			**20**	**300.000.000**
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Kota Balikpapan. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Bontang. Semua Kecamatan. Semua	1	300.000.000			1	300.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	**Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)**		**60**	**800.000.000**			**60**	**1.300.000.000**
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pemegang IUPTLS yang dilakukan pembinaan Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	20 30	300.000.000			20 30	300.000.000
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pemegang izin non BUMN	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	15	500.000.000			15	1.000.000.000
	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	**Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)**		**12**	**300.000.000**			**12**	**300.000.000**
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	12	300.000.000			12	300.000.000
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu. Pembangunan Sarana	**Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Pedesaan**		**1**	**58.848.834.460**			**1**	**54.300.000.000**
	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	1	968.682.000			1	1.500.000.000
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang. Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	1	298.400.000			1	500.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang. Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	20	300.000.000			20	300.000.000
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang. Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang. Daerah Terpencil dan Perdesaan	Kab. Berau. Kelay. Long Sului Kab. Berau. Pulau Derawan. Pegat Batumbuk Kab. Kutai Barat. Bongan. Deraya Kab. Kutai Timur. Sandaran. Tanjung Mangkaliat Kab. Paser. Muara Komam. Swan Slutung Kab. Mahakam Ulu. Long Hubung. Matalibaq	7 7	57.281.752.460			7 7	52.000.000.000
Total					96.076.366.930				96.076.366.930

BAB V
PENUTUP

Sebagaimana digariskan dalam Rancangan Perubahan RKPD 2023 Provinsi Kalitamtan Timur bahwa tema pembangunan pada Tahun 2023 ditekankan pada "***Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Menuju Kesejahteraan Masyarakat dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat***", dengan prioritas pembangunan adalah Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi dan air. Oleh karena itu penting untuk memberikan perhatian yang lebih fokus baik menyangkut kerangka pendanaan maupun teknis pelaksanaan terhadap program/kegiatan prioritas yang secara langsung terkait dalam pencapaian target kinerja sasaran pembangunan tersebut.

Disusunnya Perubahan Renja DESDM Tahun 2023 diharapkan menjadi bahan bagi Aparatur DESDM Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggung Kalimantanban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, program, dan Kegiatan yang telah ditetapkan bersama untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Perubahan Renja DESDM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 ini tentunya tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami nantikan guna perbaikan kinerja organisasi dimasa yang akan datang.

Demikian semoga Perubahan Renja ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur khususnya, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya.

Samarinda, Agustus 2023

KEPALA

MUNAWWAR, ST, M.Si
Pembina Utama Madya/IVC
NIP. 19671129 1998303 1 003

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan merupakan langkah awal penetapan kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan salah satu instrumen pertanggung jawaban. Kesalahan dalam pembuatan Rencana Kerja Perubahan dapat berakibat tidak berjalannya tugas pokok dan fungsi pada satuan kerja perangkat daerah. Oleh karena itu Rencana Kerja Perubahan harus dibangun berdasarkan kondisi yang ada, dan didukung oleh berbagai instansi dan lembaga – lembaga yang ada dalam lingkup Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur ini bersinergi dan mengacu pada program Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi & UKM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja PerubahanTahunan ini, antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
17. Peraturan Presiden R.I Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terakhir Perubahan dengan peraturan Presiden R.I Nomor 95 Tahun 2007;
18. Peraturan Presiden RI Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, sebagai pedoman dalam

pengembangan industri nasional dan sebagai dasar pemberian fasilitas pemerintah;

19. Peraturan Presiden RI No. 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Perindustrian No.13/MIND/PER/1/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian No.111/MIND/PER/ 10/2009 Tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Penganti Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja PerubahanPemerintah Daerah
25. Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

27. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 000.7.2.4/12994/Bapp-II tentang Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023 .

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2023 dimaksudkan untuk menyesuaikan program dan kegiatan tahunan didasarkan pada rencana yang telah disusun, capaian pelaksanaan dan perubahan lingkungan strategis, terutama dalam pencapaian visi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur di sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Sedangkan tujuan penyusunan ini sebagai berikut :

a) Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan capaian pembangunan bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.
b) Mensinergikan rencana pembangunan bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM pada level nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota.
c) Merumuskan rencana program/kegiatan tahun 2023 beserta pendanaannya dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.
d) Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja PerubahanTahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran PD (RKA PD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD (DPA PD) Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kaltim.

I.4. Sistematika Penulisan

Penyajian rencana kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

I.2. Landasan Hukum

I.3. Maksud dan Tujuan

I.4. Sistematika Penulisan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023 Semester I

Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dalam Perubahan Rencana Kerja tahun 2023

III.1. Program dan Kegiatan dalam Perubahan 2023

III.2 Perubahan Target Indikator

Bab IV : Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023

II.1. Evaluasi Triwulan II Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023

Adapun yang menjadi tujuan strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kaltim dalam menetapkan rencana strategik selama 5 (lima) tahun berdasarkan Perubahan RPJMD Kalimantan Timur, adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Non Batubara.**
2. **Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan non Batubara.**
3. **Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM**

Dalam upaya untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah dirumuskan maka ditetapkan indikator kinerja.Indikator kinerja yang ditetapkan beserta target pencapaian dalam rencana kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1 Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET Renja 2023	TARGET P-RENJA 2023	S/D REALISASI TW II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1	**Meningkatnya kontribusi Sektorindustri pengolahan Non Migas dan NonBatubara**					
	Indikator Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan non Batubara thd PDRB (%)			9,86	9,86	8,24*
		1. Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan non migas dan non batubara	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%)	4,51%	4,51%	7,43%*
2	**Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan non Batubara**					
	Indikator : Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US$)			1,89	1,89	1,75 s.d Mei 2023
		2. Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas dan non batubara	Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor kaltim	18,97%	18,97%	28,59
			Disparitas harga antar wilayah (%)	17%	17%	20%

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET Renja 2023	TARGET P-RENJA 2023	S/D REALISASI TW II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
		3. Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	54	54	Realisasi di akhir tahun
3	**Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM**					
	Indikator : Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)			13,50%	13,50%	*15,13%
		4. Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Nilai Omzet Koperasi	1,05 Trilliun	1,05 Trilliun	Rp 754 Milyar
			Nilai Omzet UKM	52 T	52 T	Rp 135.7 milyar

***. Penjelasan Bab III**

Dalam Formulir E.55 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II Tahun 2023 sebagai Berikut :

Tabel 2
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur
Triwulan II Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023		Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dab Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah										
3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah										
2.17.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90	%	-	89	88,07	99	89	-	-
2.17.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitasi Kinerja PD	73	nilai	-	71	72,98	103	77	-	-
2.17.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	5	6	6,00	100	6	5	83
2.17.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen	2	4	4,00	100	4	2	50
2.17.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Laporan yang disusun sesuai Ketentuan	100	%	40	100	100,00	100	100	40	40
2.17.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	orang/bulan	80	12	12,00	100	70	80	100
2.17.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25	Dokumen	7	12	12,00	100	12	7	28
2.17.001.1.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023		Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dab Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
2.17.001.1.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaandan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3	Dokumen	1	4	4,00	100	4	1	33
2.17.001.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	Laporan	1	14	14,00	100	14	1	7
2.17.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	60	orang	27	12	12,00	100	60	27	45
2.17.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	2	-	-		-	2	200
2.17.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	orang	10	-	-		30	10	33
2.17.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	bulan	6	12	12,00	100	12	6	50
2.17.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	paket	1	107	28,00	26	36	1	33

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023		Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dab Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
2.17.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8.000	paket	4	12.007	6.560,00	55	12.007	4	0
2.17.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	3	30	30,00	100	-	3	150
2.17.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.920	Dokumen	1	1.224	860,00	70	1.224	1	0
2.17.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	25	unit	1	25	15,00	60	-	1	4
2.17.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	unit	-	-	-		-	-	-
2.17.001.1.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	paket	1	1	1,00	100	-	1	100
2.17.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	unit	-	1	-	-	1	-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023		Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dab Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
2.17.001.1.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	unit	1	1	2,00	200	1	1	50
2.17.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12	bulan	6	12	12,00	100	12	6	50
2.17.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	1	1.500	1.500,00	100	1.500	1	8
2.17.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	18	5.609.009	4.206.807,00	75	5.609.009	18	50
2.17.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	6	12	12,00	100	12	6	50
2.17.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12	bulan	6	12	12,00	100	12	6	50
2.17.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35	unit	8	35	35,00	100	35	8	23

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023		Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dab Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
2.17.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	unit	4	200	140,00	70	200	4	20
2.17.003	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10	%	2	10	13,00	130	-	2	20
2.17.003.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	30	Koperasi	3	100	100,00	100	-	3	10
2.17.003.1.01.002	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20	unit usaha	2	106	106,00	100	-	2	10
2.17.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih (DAK)	520	Koperasi dan UKM	103	300	300,00	100	300	103	20
2.17.005.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah peserta Pelatihan Koperasi dan UKM (DAK)	500	orang	103	600	285,00	48	300	103	21
2.17.005.1.01.001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (DAK)	500	orang	103	900	770,00	86	300	103	21
2.17.006	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi berkualitas	10	Koperasi	2	10	9,00	90	10	2	20
2.17.006.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah Koperasi yang Melakukan RAT	25	koperasi	7	20	13,00	65	15	7	28

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023		Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dab Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
2.17.006.1.01.002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	150	Unit Usaha		150	150,00	100	150		-
2.17.007	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1	%	0	1	4,84	484	1	0	25
2.17.007.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wira Usaha Pemula	10	Wirausaha Pemula	3	10	242,00	2.420	10	3	30
2.17.007.1.01.001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	200	unit usaha	50	175	494,00	282	150	50	25
2.17.008	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3	%	2	3	36,20	1.207	3	2	50
2.17.008.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah wira usaha mandiri	1	wirausaha	8	1	191,00	19.100	1	8	800
2.17.008.1.01.001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50	unit usaha	25	60	50,00	83	50	25	50
3.30.002	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Eksportir yang aktif menggunakan SKA	260	Eksportir	314	57	55,25	97	-	314	121
3.30.002.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai	jumlah SKA yang diterbitkan	4.000	lembar	1.777	3.500	3.814,00	109	-	1.777	44

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023		Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dab Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
	Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)										
3.30.002.1.04.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3.500	Dokumen	1.777	5	3,00	60	-	1.777	51
3.30.004	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga bapokting	80	%	72	300	71,15	24	300	72	90
3.30.004.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Laporan Ketersediaan Bapokting	12	bulan	6	12	12,00	100	12	6	50
3.30.004.1.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	6	kegiatan	3	5	3,00	60	5	3	50
3.30.004.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Komoditi Bapokting yang Dipantau	21	jenis komoditi	21	21	21,00	100	-	21	100
3.30.004.1.02.001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12	Laporan	6	15	15,00	100	-	6	50
3.30.004.1.02.002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10	Laporan	8	10	10,00	100	10	8	80
3.30.005	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5	%	-13	5	15,85	317	5	-13	- 257
3.30.005.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)	2	orang	1	2	2,00	100	2	1	50
3.30.005.1.01.003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2	Pelaku Usaha	-	2	2,00	100	-	-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023		Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dab Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
3.30.005.1.01.005	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	2	pelaku usaha	29	4	3,00	75	4	29	1.450
3.30.006	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa SNI wajib yang diawasi	15	%	14	15	15,00	100	-	14	93
3.30.006.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	konsumen yang telah diberikan edukasi	1.000	orang	195	1.000	1.142,00	114	100	195	20
3.30.006.1.01.001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3	BPSK	3	1.000	1.142,00	114	100	3	100
3.30.006.1.01.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	20	Pengaduan	2	15	6,00	40	15	2	10
3.30.006.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah barang dan jasa yang sesuai Ketentuan	27	jenis	26	24	24,00	100	21	26	96
3.30.006.1.03.001	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawa si	3	Laporan	1	100	101,00	101	100	1	33
3.30.007	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran	5	Produk	5	5	5,00	100	5	5	100
3.30.007.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pemasaran	10	pelaku usaha	5	10	10,00	100	10	5	50
3.30.007.1.02.001	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	14	UMKM	5	14	10,00	71	14	5	36
3.31.002	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2	Industri	2	2	2,00	100	2	2	100
3.31.002.1.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5	Dokumen	3	5	5,00	100	5	3	60

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023		Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dab Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
3.31.002.1.01.002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3	Dokumen	1	3	3,00	100	3	1	33
3.31.002.1.01.003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	Dokumen	1	7	1,00	14	-	1	100
3.31.002.1.01.005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5	Dokumen	2	1	1,00	100	-	2	40
3.31.002.1.01.006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	Dokumen	-	1	1,00	100	-	-	-
3.31.003	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata	5	%	3	5	5,00	100	5	3	65
3.31.003.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah industri yang dilakukan pemantauan dan pengawasan dalam penerbitan perizinan	22	industri	11	17	17,00	100	13	11	50

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dab Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
3.31.003.1.01.001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	7 Dokumen		5	5,00	100	3		-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023		Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dab Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
3.31.003.1.01.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danSinkronisasi Pengawasan Perizinan Di BidangIndustri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri,Perizinan Perluasan Usaha Industri, PerizinanKawasan Industri dan Perizinan PerluasanKawasan Industri Kewenangan Provinsi	10	Dokumen	7	12	12,00	100	6	7	70
3.31.004	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya	10	Industri	7	10	12,00	120	5	7	70
3.31.004.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	jumlah industri yang memiliki IUI, IPUI,IUKI dan IPKI kewenangan provinsi	10	industri	7	10	5,00	50	3	7	70
3.31.004.1.01.001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4	Dokumen	-	300	340,00	113	-	-	-
3.31.004.1.01.002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1	Dokumen	-	1	1,00	100	1	-	-
3.31.004.1.01.003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	5	Dokumen	4	50	127,00	254	-	4	80

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023		Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dab Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
3.31.3.30.2.17.01.0002	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang										
3.30.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90	%	-	89	96,46	108	88	-	-
3.30.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan	100	%	50	100	100,00	100	100	50	50
3.30.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	183	Dokumen	12	14	14,00	100	24	12	7
3.30.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	10	Orang	-	11	10,00	91	60	-	-
3.30.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	orang	-	11	10,00	91	20	-	-
3.30.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	bulan	6	12	12,00	100	12	6	50
3.30.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	-	12	12,00	100	-	-	-
3.30.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	paket	7	20	20,00	100	29	7	35
3.30.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.500	paket	8	310	310,00	100	-	8	1

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023		Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dab Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
3.30.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	paket	3	8	8,00	100	-	3	10
3.30.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	6	20	20,00	100	-	6	120
3.30.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	25	unit	23	27	53,00	196	-	23	92
3.30.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	paket		52	53,00	102	-		-
3.30.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12	bulan	6	12	12,00	100	-	6	50
3.30.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50	Laporan	6	500	500,00	100	500	6	12
3.30.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	6	12	12,00	100	12	6	17
3.30.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	6	12	12,00	100	12	6	50
3.30.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12	bulan	6	12	12,00	100	12	6	50
3.30.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	unit	4	4	4,00	100	1	4	80
3.30.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	unit	16	25	25,00	100	12	16	160
3.30.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	-	12	12,00	100	12	-	-
3.30.006	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase capaian target sertifikat mutu barang	100	%	59	90	100,00	111	-	59	59
3.30.006.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk	100	%	59	90	100,00	111	85	59	59
3.30.006.1.02.001	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	3	komoditi	-	2	2,00	100	2	-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023		Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dab Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
3.30.006.1.02.002	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	60	Dokumen	51	50	143,00	286	-	51	85
3.30.006.1.02.003	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	1	Sertifikat	1	1	1,00	100	-	1	100
3.30.006.1.02.004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2.215	Sertifikat	1.093	2.100	2.811,00	134	1.225	1.093	49
3.31.3.30.2.17.01.0003	**UPTD Pelatihan Koperasi**										
2.17.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90	%	45	89	99,00	111	88	45	50
2.17.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan	100	%	56	100	10,00	10	100	56	56
2.17.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	6	20	20,00	100	-	6	50
2.17.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS/NONPNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	25	orang	4	20		-	60	4	16
2.17.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	Orang	4	35		-	35	4	57
2.17.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	bulan	6	12	12,00	100	12	6	50
2.17.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	2	12	12,00	100	12	2	17
2.17.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	paket	2	12	12,00	100	12	2	29
2.17.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	paket	2	12	12,00	100	12	2	50
2.17.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dokumen	6	30	30,00	100	12	6	25
2.17.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	25	unit	5	30	30,00	100	12	5	20
2.17.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21	unit	5	12	12,00	100	-	5	24

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023		Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dab Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
2.17.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12	bulan	6	12	12,00	100	12	6	50
2.17.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400	Laporan	250	12	12,00	100	12	250	63
2.17.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	6	12	12,00	100	12	6	50
2.17.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Disperindagkop	12	bulan	6	12	12,00	100	12	6	50
2.17.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	unit	3	12	-	-	12	3	100
2.17.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	unit	40	12	12,00	100	12	40	50
2.17.001.1.09.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2	unit	2	12	12,00	100	12	2	100
2.17.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih	300	Koperasi dan UKM	120	300	300,00	100	60	120	40
2.17.005.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah Koperasi dan UKM yang Mengikuti Pelatihan	300	Koperasi dan UKM	120	660	600,00	91	160	120	40
2.17.005.1.01.001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	240	orang	120	270	150,00	56	90	120	50

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

III.1 Rencana Kerja Dalam Perubahan Renja II 2023

Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Oleh sebab itu, Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 disusun dengan bentuk matriks yang berisikan penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan , beserta indikator kinerja, target, Renja sebelum Perubahan dan APBD 2023 dan sesudah perubahan untuk Tahun 2023 dan Matriks Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan evaluasi triwulan II terdapat perubahan indikator dan jumlah pendanaan.

Berdasarkan dengan surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000.7.2.4/12488/Bapp-II tanggal 31 Juli 2023 Perihal Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan jumlah 18 Program 36 kegiatan dan 75 subkegiatan dari Pagu APBD murni sebesar Rp 94.613.373.340 menjadi Rp 102.364.702.441,00 atau Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 7.566.232.001 terdiri dari usulan Belanja Tambahan sebesar Rp 5.919.945.101 dan terdapat Usulan Pokok Pikiran 2 Anggota DPRD Provinsi Kalimantan timur sebesar Rp 1.831.384.000,- , uraian bisa dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3
Resume Belanja Anggaran Belanja Tambahan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Sisa Pembayaran Pembangunan Gedung Galeri UMKM Provinsi Kalimantan Timur	3.048.873.001
2	Kelengkapan Kantor pendukung kearsipan	384.046.100
3	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	44.880.000
4	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) Pembangunan Galeri UMKM	39.840.000
5	Honorarium Pejabat Pengguna Barang / Asset	21.360.000
6	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	45.840.000
7	Honor konsultan PLUT dan KLIB	744.528.000
8	Operasi Pasar Murah	173.093.200
9	Belanja diserahkan Kepada Masyarakat(kekurangan Pembayaran Pengadaan Bantuan UKM)	39.000.000
10	perluasan pasar UKM Pameran Expo (pokir)	579.516.000
11	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	790.000.000
12	Kekurangan pembayaran Belanja Tagihan Air UPTD Pelkop	8.968.800
Total Anggaran Belanja Tambahan (ABT)		**5.919.945.101**

Tabel 4
Usulan Pokok Pikiran (Pokir)
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pelatihan/Bimtek SDM Bidang UMKM 6 kegiatan (anggota DPRD Prov Kaltim Fraksi PPP Rusman Ya'qub, S.Pd, M.Si)	1.293.334.000,00
2	Penyediaan Mesin dan Peralatan UKM Dr. H. (anggota DPRD Prov Kaltim Fraksi PPP Rusman Ya'qub, S.Pd, M.Si)	280.000.000,00
3	Penyediaan Mesin dan Peralatan UKM (anggota DPRD Prov Kaltim Fraksi PAN Sukmawati	258.050.000,00
Total Pokok Pikiran (POKIR)		**1.831.384.000,**

III.2 Perubahan Target Indikator

Program Prioritas ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pengembangan industri, pemberdayaan UMKM, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan UMKM. Perubahan rencana pada indikator-indikator tersebut menunjukkan upaya untuk mengintensifkan mencapai target

Perubahan target dilakukan karena pada triwulan II target yang ditetapkan telah tercapai sehingga perlu dilakukan peningkatan dari target awal.

Tabel 5 Perubahan target pada Indikator Tujuan

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN			TARGET Renja 2023	TARGET P-RENJA 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM				
	Indikator : Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)			13,50%	*15,13%

Tabel 6 Perubahan Target Program Prioritas

PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas			
Program Perencanaan DanPembangunan Industri	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri (industri)	2 Industri	3 Industri
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas (%)	1%	3%
Program Pengembangan Umkm	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital (%)	3 %	10%

Adapun hasil resume pada SIPD perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 7
Program Kegiatan Indikator dan Pendanaan Renja- Perubahan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Renja Tahun 2023		APBD 2023	Renja Perubahan Tahun 2023			Bertambah/ berkurang	Keterangan
							Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu		
3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				48.739.761.000	**94.625.377.240**			**102.364.702.441**	**7.566.232.001**	
3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				41.650.598.750	**82.547.220.125**			**88.362.176.526**		
2.17.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM		90 %	31.565.598.750	**65.931.823.690**	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90%	**70.358.386.891**		
2.17.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitasi Kinerja PD		73 nilai	1.408.585.000	1.424.495.600	Nilai Akuntabilitasi Kinerja PD	73nilai	1.424.495.600		
2.17.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Smd. Luar Kota	6 Dokumen	718.985.000	859.696.100	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6Dokumen	859.696.100	-	
2.17.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 kab/kota dan Luar Kota	4 Dokumen	689.600.000	564.799.500	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4Dokumen	564.799.500	-	
2.17.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Laporan yang disusun sesuai Ketentuan		100 %	20.592.501.279	17.022.372.350	persentase Laporan yang disusun sesuai Ketentuan	100%	17.174.292.350	151.920.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Renja Tahun 2023		APBD 2023	Renja Perubahan Tahun 2023			Bertambah/ berkurang	Keterangan
							Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu		
2.17.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	samarinda	80 orang/bulan	14.948.802.995	16.071.100.350	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang/bulan	16.071.100.350	-	
2.17.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	samarinda	25 Dokumen	5.604.058.784	422.280.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25Dokumen	574.200.000	151.920.000	
2.17.001.1.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Smd. Luar Kota	2 Laporan	10.000.000	255.192.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2Laporan	255.192.000	-	
2.17.001.1.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaandan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Smd. Luar Kota	3 Dokumen	9.930.000	203.120.000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaandan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3Dokumen	203.120.000	-	
2.17.001.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Smd. Luar Kota	14 Laporan	19.709.500	70.680.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14Laporan	70.680.000	-	
2.17.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek		60 orang	1.212.200.000	2.037.491.000	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	60orang	2.037.491.000		
2.17.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Smd. Luar Kota	1 paket	212.500.000	362.961.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1paket	362.961.000	-	
2.17.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Smd. Luar Kota	30 orang	999.700.000	1.674.530.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30orang	1.674.530.000	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Renja Tahun 2023		APBD 2023	Renja Perubahan Tahun 2023			Bertambah/ berkurang	Keterangan
							Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu		
2.17.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 bulan	674.937.000	1.356.176.690	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12bulan	1.356.176.690		
2.17.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Smd. Luar Kota	3 paket	106.864.000	768.525.100	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3paket	768.525.100	-	
2.17.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Smd. Luar Kota	8.000 paket	390.083.000	152.627.400	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8000paket	152.627.400	-	
2.17.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Smd. Luar Kota	2 paket	150.000.000	411.753.790	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2paket	411.753.790	-	
2.17.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Smd. Luar Kota	1.920 Dokumen	27.990.000	23.270.400	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1920Dokumen	23.270.400	-	
2.17.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop		25 unit	4.024.099.000	34.524.640.330	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	25unit	37.945.555.531	3.420.915.201	
2.17.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	smd	2 unit	494.410.000	492.610.000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2unit	492.610.000	-	
2.17.001.1.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	smd	1 paket	2.988.670.000	2.248.958.200	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1paket	2.248.958.200	-	
2.17.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	smd	1 unit	535.937.000	501.624.030	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1unit	873.666.230	372.042.200	
2.17.001.1.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	smd dan Balikpapan	2 unit	5.082.000	31.281.448.100	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2unit	34.330.321.101	3.048.873.001	
2.17.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop		12 bulan	2.146.680.576	8.415.264.920	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12bulan	9.268.992.920		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Renja Tahun 2023		APBD 2023	Renja Perubahan Tahun 2023			Bertambah/ berkurang	Keterangan
							Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu		
2.17.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	smd	12 laporan	10.000.000	4.722.300	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12laporan	4.722.300	-	
2.17.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	smd	36 Laporan	814.134.576	876.699.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36Laporan	876.699.000	-	
2.17.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Smd. Luar Kota	12 laporan	1.322.546.000	7.533.843.620	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12laporan	8.387.571.620	853.728.000	
2.17.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop		12 bulan	1.506.595.895	1.151.382.800	jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12bulan	1.151.382.800		
2.17.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	smd	35 unit	546.589.000	455.153.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35unit	455.153.000	-	
2.17.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	smd	20 unit	960.006.895	696.229.800	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20unit	696.229.800	-	
2.17.003	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat		10 %	583.040.000	**583.040.000**	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10%	583.040.000	-	
2.17.003.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan		30 Koperasi	583.040.000	583.040.000	jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	30Koperasi	583.040.000	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Renja Tahun 2023		APBD 2023	Renja Perubahan Tahun 2023			Bertambah/ berkurang	Keterangan
							Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu		
2.17.003.1.01.002	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Smd. Luar Kota	20 unit usaha	583.040.000	583.040.000	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20unit usaha	583.040.000	-	
2.17.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih (DAK)		520 Koperasi dan UKM	1.000.000	**2.373.641.000**	jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih (DAK)	520Koperasi dan UKM	1.248.241.000	- 1.125.400.000	
2.17.005.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah peserta Pelatihan Koperasi dan UKM (DAK)		500 orang	1.000.000	2.373.641.000	jumlah peserta Pelatihan Koperasi dan UKM (DAK)	500orang	1.248.241.000	- 1.125.400.000	
2.17.005.1.01.001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (DAK)	Smd. Luar Kota	500 orang	1.000.000	2.373.641.000	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (DAK)	500orang	1.248.241.000	- 1.125.400.000	
2.17.006	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi berkualitas		10 Koperasi	874.660.000	**1.593.231.000**	Jumlah Koperasi berkualitas	10Koperasi	1.632.231.000	39.000.000	
2.17.006.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah Koperasi yang Melakukan RAT		25 koperasi	874.660.000	1.593.231.000	jumlah Koperasi yang Melakukan RAT	25koperasi	1.632.231.000	39.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Renja Tahun 2023		APBD 2023	Renja Perubahan Tahun 2023			Bertambah/ berkurang	Keterangan
							Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu		
2.17.006.1.01.002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Smd. Luar Kota	150 Unit Usaha	874.660.000	1.593.231.000	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	150Unit Usaha	1.632.231.000	39.000.000	
2.17.007	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas		1 %	463.700.000	**463.700.000**	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	3%	721.750.000	258.050.000	
2.17.007.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wira Usaha Pemula		10 Wirausaha Pemula	463.700.000	463.700.000	Jumlah Wira Usaha Pemula	10 Wirausaha Pemula	721.750.000	258.050.000	
2.17.007.1.01.001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Smd. Luar Kota	200 unit usaha	463.700.000	463.700.000	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	200unit usaha	721.750.000	258.050.000	
2.17.008	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital		3 %	327.600.000	**327.600.000**	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	10%	2.371.250.000	2.043.650.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Renja Tahun 2023		APBD 2023	Renja Perubahan Tahun 2023			Bertambah/ berkurang	Keterangan
							Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu		
2.17.008.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah wira usaha mandiri		1 wirausaha	327.600.000	327.600.000	Jumlah wira usaha mandiri	16 wirausaha	2.371.250.000	2.043.650.000	
2.17.008.1.01.001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Smd. Luar Kota	50 unit usaha	327.600.000	327.600.000	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50unit usaha	2.371.250.000	2.043.650.000	
3.30.002	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Jumlah Eksportir yang aktif menggunakan SKA**		**260 Eksportir**	**208.820.000**	**202.398.600**	**Jumlah Eksportir yang aktif menggunakan SKA**	**260Eksportir**	**202.398.600**		
3.30.002.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	jumlah SKA yang diterbitkan		4.000 lembar	208.820.000	202.398.600	jumlah SKA yang diterbitkan	4000lembar	202.398.600		
3.30.002.1.04.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal		3.500 Dokumen	208.820.000	202.398.600	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3500Dokumen	202.398.600		
3.30.004	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase stabilitas harga bapokting**		**80 %**	**968.489.000**	**967.510.100**	**Persentase stabilitas harga bapokting**	**80%**	**1.140.603.300**	**173.093.200**	
3.30.004.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Laporan Ketersediaan Bapokting		12 bulan	345.382.000	356.893.300	Laporan Ketersediaan Bapokting	12bulan	356.893.300		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Renja Tahun 2023		APBD 2023	Renja Perubahan Tahun 2023			Bertambah/ berkurang	Keterangan
							Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu		
3.30.004.1.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Smd. Luar Kota	6 kegiatan	345.382.000	356.893.300	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	6kegiatan	356.893.300	-	
3.30.004.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Komoditi Bapokting yang Dipantau		21 jenis komoditi	623.107.000	610.616.800	Jumlah Komoditi Bapokting yang Dipantau	21jenis komoditi	783.710.000		
3.30.004.1.02.001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Smd. Luar Kota	12 Laporan	538.182.000	524.025.800	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12Laporan	524.025.800	-	
3.30.004.1.02.002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Smd. Luar Kota	10 Laporan	84.925.000	86.591.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10Laporan	259.684.200	173.093.200	
3.30.005	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara**		**5 %**	**792.800.000**	**1.671.425.175**	**Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara**	**5%**	**1.671.425.175**		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Renja Tahun 2023		APBD 2023	Renja Perubahan Tahun 2023			Bertambah/ berkurang	Keterangan
							Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu		
3.30.005.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)		2 orang	792.800.000	1.671.425.175	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)	2orang	1.671.425.175		
3.30.005.1.01.003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Smd. Luar Kota	2 Pelaku Usaha	421.610.000	1.309.981.875	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2Pelaku Usaha	1.309.981.875	-	
3.30.005.1.01.005	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Smd. Luar Kota	2 pelaku usaha	371.190.000	361.443.300	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	2pelaku usaha	361.443.300	-	
3.30.006	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa SNI wajib yang diawasi**		**15 %**	**2.000.000.000**	**4.668.554.700**	**Persentase peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa SNI wajib yang diawasi**	**15%**	**4.668.554.700**		
3.30.006.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	konsumen yang telah diberikan edukasi		1.000 orang	1.462.000.000	4.104.974.700	konsumen yang telah diberikan edukasi	1000orang	4.104.974.700		
3.30.006.1.01.001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	Smd. Luar Kota	3 BPSK	780.000.000	865.877.400	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3BPSK	865.877.400	-	
3.30.006.1.01.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Smd. Luar Kota	20 Pengaduan	682.000.000	3.239.097.300	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	20Pengaduan	3.239.097.300	-	
3.30.006.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah barang dan jasa yang sesuai Ketentuan		27 jenis	538.000.000	563.580.000	jumlah barang dan jasa yang sesuai Ketentuan	27jenis	563.580.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Renja Tahun 2023		APBD 2023	Renja Perubahan Tahun 2023			Bertambah/ berkurang	Keterangan
							Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu		
3.30.006.1.03.001	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Smd. Luar Kota	3 Laporan	538.000.000	563.580.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	3Laporan	563.580.000	-	
3.30.007	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran**		**5 Produk**	**679.891.000**	**681.397.860**	**Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran**	**5Produk**	**681.397.860**		
3.30.007.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pemasaran		10 pelaku usaha	679.891.000	681.397.860	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pemasaran	10 pelaku usaha	681.397.860		
3.30.007.1.02.001	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Smd. Luar Kota	14 UMKM	679.891.000	681.397.860	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	14UMKM	681.397.860	-	
3.31.002	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri**		**2 Industri**	**1.983.000.000**	**1.958.039.000**	**Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri**	**3Industri**	**1.958.039.000**		
3.31.002.1.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi		5 Dokumen	1.983.000.000	1.958.039.000	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5Dokumen	1.958.039.000		
3.31.002.1.01.002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan,	Smd. Luar Kota	3 Dokumen	316.402.000	295.608.500	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan,	3Dokumen	295.608.500	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Renja Tahun 2023		APBD 2023	Renja Perubahan Tahun 2023			Bertambah/ berkurang	Keterangan
							Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu		
		Penyebaran dan Perwilayahan Industri					Penyebaran dan Perwilayahan Industri				
3.31.002.1.01.003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Smd. Luar Kota	1 Dokumen	112.890.000	112.890.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1Dokumen	112.890.000	-	
3.31.002.1.01.005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Smd. Luar Kota	5 Dokumen	1.417.294.000	1.413.148.500	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5Dokumen	1.413.148.500	-	
3.31.002.1.01.006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Smd. Luar Kota	1 Dokumen	136.414.000	136.392.000	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1Dokumen	136.392.000	-	
3.31.003	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata**		**5 %**	**721.000.000**	**670.858.000**	**Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata**	**5%**	**670.858.000**		
3.31.003.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah industri yang dilakukan pemantauan dan pengawasan dalam penerbitan perizinan		22 industri	721.000.000	670.858.000	Jumlah industri yang dilakukan pemantauan dan pengawasan dalam penerbitan perizinan	22industri	670.858.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Renja Tahun 2023		APBD 2023	Renja Perubahan Tahun 2023			Bertambah/ berkurang	Keterangan
							Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu		
3.31.003.1.01.001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Smd. Luar Kota	7 Dokumen	250.000.000	197.872.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	7Dokumen	197.872.000	-	
3.31.003.1.01.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danSinkronisasi Pengawasan Perizinan Di BidangIndustri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri,Perizinan Perluasan Usaha Industri, PerizinanKawasan Industri dan Perizinan PerluasanKawasan	Smd. Luar Kota	10 Dokumen	471.000.000	472.986.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danSinkronisasi Pengawasan Perizinan Di BidangIndustri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri,Perizinan Perluasan Usaha Industri, PerizinanKawasan Industri dan Perizinan PerluasanKawasan Industri Kewenangan Provinsi	10Dokumen	472.986.000	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Renja Tahun 2023		APBD 2023	Renja Perubahan Tahun 2023			Bertambah/ berkurang	Keterangan
							Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu		
		Industri Kewenangan Provinsi									
3.31.004	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Jumlah industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya**		**10 Industri**	**481.000.000**	**454.001.000**	**Jumlah industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya**	**10Industri**	**454.001.000**		
3.31.004.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	jumlah industri yang memiliki IUI, IPUI,IUKI dan IPKI kewenangan provinsi		10 industri	481.000.000	454.001.000	jumlah industri yang memiliki IUI, IPUI,IUKI dan IPKI kewenangan provinsi	10industri	454.001.000		
3.31.004.1.01.001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Smd. Luar Kota	4 Dokumen	117.008.000	117.006.500	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4Dokumen	117.006.500	-	
3.31.004.1.01.002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Smd. Luar Kota	1 Dokumen	97.000.000	96.994.500	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1Dokumen	96.994.500	-	
3.31.004.1.01.003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Smd. Luar Kota	5 Dokumen	266.992.000	240.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	5Dokumen	240.000.000	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Renja Tahun 2023		APBD 2023	Renja Perubahan Tahun 2023			Bertambah/ berkurang	Keterangan
							Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu		
3.31.3.30.2.17.01.0002	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang				4.035.264.308	**8.557.726.615**			**8.557.726.615**		
3.30.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM		90 %	2.606.248.308	**3.020.087.010**	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90%	**3.020.087.010**		
3.30.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan		100 %	1.394.337.248	445.540.000	persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan	100%	445.540.000		
3.30.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	smd	183 Dokumen	1.394.337.248	445.540.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	183Dokumen	445.540.000	-	
3.30.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek		10 Orang	100.800.000	104.100.000	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	10Orang	104.100.000		
3.30.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Smd. Luar Kota	10 orang	100.800.000	104.100.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10orang	104.100.000	-	
3.30.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 bulan	148.172.440	159.817.035	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12bulan	159.817.035		
3.30.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	smd	1 paket	10.290.810	10.003.900	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1paket	10.003.900	-	
3.30.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	smd	20 paket	68.856.630	61.092.735	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20paket	61.092.735	-	
3.30.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	smd	1.500 paket	20.160.000	40.200.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1500paket	40.200.000	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Renja Tahun 2023		APBD 2023	Renja Perubahan Tahun 2023			Bertambah/ berkurang	Keterangan
							Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu		
3.30.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	smd	30 paket	45.025.000	46.581.200	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30paket	46.581.200	-	
3.30.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	smd	5 Dokumen	3.840.000	1.939.200	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5Dokumen	1.939.200	-	
3.30.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop		25 unit	138.946.380	139.500.295	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	25unit	139.500.295		
3.30.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	smd	1 paket	138.946.380	139.500.295	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1paket	139.500.295	-	
3.30.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop		12 bulan	460.539.800	1.783.964.280	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12bulan	1.783.964.280		
3.30.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	smd	50 Laporan	10.000.000	8.336.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50Laporan	8.336.000		
3.30.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	smd	36 Laporan	150.558.800	179.996.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36Laporan	179.996.600		
3.30.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Smd. Luar Kota	12 Laporan	299.981.000	1.595.631.680	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12Laporan	1.595.631.680		
3.30.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop		12 bulan	363.452.440	387.165.400	jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12bulan	387.165.400		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Renja Tahun 2023		APBD 2023	Renja Perubahan Tahun 2023			Bertambah/ berkurang	Keterangan
							Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu		
3.30.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	smd	5 unit	80.249.000	79.633.300	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5unit	79.633.300		
3.30.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	smd	10 unit	126.870.000	170.912.700	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10unit	170.912.700		
3.30.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	smd	4 unit	156.333.440	136.619.400	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4unit	136.619.400		
3.30.006	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase capaian target sertifikat mutu barang**		**100 %**	**1.429.016.000**	**5.537.639.605**	**Persentase capaian target sertifikat mutu barang**	**100%**	**5.537.639.605**		
3.30.006.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk		100 %	1.429.016.000	5.537.639.605	persentase pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk	100%	5.537.639.605		
3.30.006.1.02.001	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Smd. Luar Kota	3 komoditi	297.624.000	295.829.335	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	3komoditi	295.829.335		
3.30.006.1.02.002	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Smd. Luar Kota	60 Dokumen	259.884.000	2.820.149.120	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	60Dokumen	2.820.149.120		
3.30.006.1.02.003	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	Smd. Luar Kota	1 Sertifikat	271.000.000	327.981.700	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	1Sertifikat	327.981.700		
3.30.006.1.02.004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Smd. Luar Kota	2.215 Sertifikat	600.508.000	2.093.679.450	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2215 Sertifikat	2.093.679.450		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Renja Tahun 2023		APBD 2023	Renja Perubahan Tahun 2023			Bertambah/ berkurang	Keterangan
							Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu		
3.31.3.30.2.17.01.0003	UPTD Pelatihan Koperasi				3.053.897.942	**3.520.430.500**			**5.444.799.300**	1.924.368.800	
2.17.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM		90 %	2.553.061.942	**3.006.160.500**	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90%	**3.805.129.300**	798.968.800	
2.17.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan		100 %	1.409.397.792	250.200.000	persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan	100%	250.200.000		
2.17.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	smd	12 Dokumen	1.409.397.792	250.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12Dokumen	250.200.000		
2.17.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS/NONPNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek		25 orang	59.804.000	67.080.000	Jumlah PNS/NONPNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	25orang	67.080.000		
2.17.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	smd	7 Orang	59.804.000	67.080.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7Orang	67.080.000		
2.17.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 bulan	131.305.750	1.509.255.800	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12bulan	1.509.255.800		
2.17.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	smd	12 paket	21.510.000	21.517.700	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12paket	21.517.700		
2.17.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	smd	7 paket	67.955.750	1.382.660.900	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7paket	1.382.660.900		
2.17.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	smd	4 paket	38.000.000	103.138.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4paket	103.138.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Renja Tahun 2023		APBD 2023	Renja Perubahan Tahun 2023			Bertambah/ berkurang	Keterangan
							Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu		
2.17.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	smd	24 Dokumen	3.840.000	1.939.200	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24Dokumen	1.939.200		
2.17.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop		25 unit	99.375.000	319.318.400	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	25unit	319.318.400		
2.17.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	smd	21 unit	99.375.000	319.318.400	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21unit	319.318.400		
2.17.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop		12 bulan	194.990.800	205.405.600	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12bulan	214.374.400		
2.17.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	smd	400 Laporan	4.000.000	4.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400Laporan	4.000.000		
2.17.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	smd	12 Laporan	190.990.800	201.405.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12Laporan	210.374.400	8.968.800	
2.17.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Disperindagkop		12 bulan	658.188.600	654.900.700	jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Disperindagkop	12bulan	1.444.900.700		
2.17.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	smd	3 unit	71.006.000	70.009.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3unit	70.009.000		
2.17.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	smd	80 unit	85.705.000	75.158.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80unit	865.158.000	790.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Renja Tahun 2023		APBD 2023	Renja Perubahan Tahun 2023			Bertambah/ berkurang	Keterangan
							Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu		
2.17.001.1.09.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	smd	2 unit	501.477.600	509.733.700	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2unit	509.733.700		
2.17.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih		300 Koperasi dan UKM	500.836.000	**514.270.000**	Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih	300 Koperasi dan UKM	1.639.670.000		
2.17.005.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah Koperasi dan UKM yang Mengikuti Pelatihan		300 Koperasi dan UKM	500.836.000	514.270.000	jumlah Koperasi dan UKM yang Mengikuti Pelatihan	300 Koperasi dan UKM	1.639.670.000		
2.17.005.1.01.001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Smd. Luar Kota	240 orang	500.836.000	514.270.000	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	240 0orang	1.639.670.000	1.125.400.000	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun 2023. Dalam upaya menyelesaikan target tahun 2023, seluruh perubahan yang terjadi dalam program dan kegiatan tahun 2023 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaan hingga akhir tahun 2023. Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat mempedomani isi dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Kepala Dinas,

Heni Purwaningsih, S. Si, M. Si
NIP. 19730314 199803 2 009

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Seiring dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Timur, maka Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan, yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 menunjukkan adanya program dan kegiatan yang perlu penambahan anggaran di tahun 2023 untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Tahapan proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahapan ini dilakukan dengan:
   a. membentuk Tim Penyusun Rancangan Perubahan Renja berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah;
   b. melaksanakan koordinasi pada biro-biro lingkup Sekretariat Daerah mengenai Rancangan Perubahan Renja;
   c. mengumpulkan data evaluasi capaian kinerja tahun berjalan dan usulan yang disesuaikan dengan pagu pada P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
2. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pada tahap ini dilakukan analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah dan mengevaluasi capaian Renja tahun berjalan 2023.
3. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dilakukan setelah dikeluarkannya Surat Sekretaris Daerah Kalimantan Timur tentang Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023, yang mengacu pada P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
4. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah. Tahap ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam rumusan program, kegiatan dan pagu indikatif. Rancangan Akhir Perubahan Renja disusun dengan sistematika:
   I. Pendahuluan
   II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan III Tahun 2023
   III. Rencana Kerja dan Pendanaan
   IV. Penutup

5. Penetapan Perubahan Rencana Kerja Rancangan akhir Rencana Kerja disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan berpedoman pada tahapan dimaksud, maka diharapkan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi komitmen bersama guna meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah, serta menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan tetap mempertimbangkan prioritas-prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
19. Surat Edaran Gubernur Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 050/6401/B.PPEPD-Bapp/2022, tanggal 11 Juli 2022, Perihal Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022;
20. Surat Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Nomor 000.7.2.4/11823/Bapp-II tanggal 12 Juli 2023 Perihal Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan Perubahan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan berdasarkan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

Menjaga konsistensi capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut:

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Pelaksanaan evaluasi yang dijabarkan dalam Bab Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Berjalan, dimaksudkan sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Dokumen Rencana Kerja.

Evaluasi yang dimaksud untuk mengetahui:

1. Target kinerja yang tidak tercapai, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi juga dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut :

Tabel 2. 1
Rekaptulasi Rvaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur s/d Triwulan II Tahun 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					BIRO PEMERINTAHAN DAN OTAONOMI DAERAH									
	1				Urusan …...									
	1	01			Bidang Urusan ….....									
				1	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM**	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100						
				2	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Keungan**		**100**						
				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD yang tersusun		2						
				4	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Keungan**		**100**						
				5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Tenaga Teknis/Non Teknis		12						

				6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pelaksanaan Pengelola Keuangan		12						
				7	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah**		**100**						
				8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis		2						
				9	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah**		**100**						
				10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai		30						
				11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12						
				12	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**						
				13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat		12						
				14	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik**		**100**						
				15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Kelengkapan Kerja		40						
				16	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi dalam Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah**		**65**						
				17										
				18										

				19	**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**Presentase Tapal Batas Wilayah Kab/Kota Yang di Sepakati**		**85**						
				20	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Laporan Koordinasi penyelenggaraan UrusanPemerintahan		3						
				21	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah penegasan Batas Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota Se Kalimantan timur secara jelas danpasti		4						
				22	**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi,fasilitasi dan konsultasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah**		**85**						
				23	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Laporan kedinasan pejabat negara		3						
				24	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Laporan Koordinasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		4						
				25	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan		3						
				26	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti**		**100**						
				27	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Pemerintah		1						
				28	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Badan Usaha/Swasta		1						

				29	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama		1						
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro POD**			**83 %**	**83 %**	**100**			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan			100 %	100 %	100			
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran			2 Dokumen	2 Dokumen	100			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan			98 %	98 %	100			
					Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelola Keuangan			12 Laporan	12 Laporan	100			
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah			100 %	100 %	100			
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Bimbingan Teknis			6 Orang	6 Orang	100			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah			100 %	100 %	100			
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan peralatan Alat tulis kantor			12 Laporan	12 Laporan	100			
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah laporan barang cetakan dan penggandaan			12 Bulan	12 Bulan	100			

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi SKPD			90 OT	90 OT	100			
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi			100 %	100 %	100			
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12 Unit	12 Unit	100			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	100 %	100			
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan			350 Lembar	350 Lembar	100			
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis			12 Dokumen	12 Dokumen	100			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik			100 %	100 %	100			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional			9 Unit	9 Unit	100			
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara			12 Laporan	12 Laporan	100			
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	**Persentase meningkatnya kualitas Pemerintahan Daerah**			**87 %**	**87 %**	**100**			
						Persentase pengendalian penerapan SPM			**100 %**	**100 %**	**100**			
						Persentase terlaksananya koordinasi dalam bidang			**87 %**	**87 %**	**100**			

						Pemerintahan dan Otonomi Daerah								
					Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Tapal Batas Wilayah Kab/Kota yang disepakati			100 %	100 %	100			
					Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Koodinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			3 Laporan	3 Laporan	100			
					Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Laporan Fasilitasi Penataan Wilayah			4 Laporan	4 Laporan	100			
					Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentasen Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah			100 %	100 %	100			
					Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Pejabat Negara			3 Laporan	3 Laporan	100			
					Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Laporan Korrdinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan			4 Laporan	4 Laporan	100			
					Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			3 Laporan	3 Laporan	100			
					Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Usulan Kerja Sama yang ditindaklanjuti			95 %	95 %	100			
					Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama antar pemerintah			4 laporan	4 laporan	100			
					Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama badan usaha/swasta			4 laporan	4 laporan	100			
					Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan kegiatan evaluasi pelaksanaan kerjasama			1 laporan	1 laporan	100			

					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**						**100**		
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan**						**100**		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan						2		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Keuangan**						**98**		
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaa keuangan						12		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah**						**100**		
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang telah mengkuti bimtek						6		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase laporan pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah**						**100**		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						12		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah laporan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan						12		

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi SKPD						90		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**						**100**		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumalh benda pos yang tersedia						350		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**100**		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya						12		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional						9		
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	**Persentase Kabupaten/Kota yang memperoleh predikat EKPPD "tinggi"**						**80**		
					Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	**Presentase tapal batas wilayah Kab/Kota yang disepakati**						**100**		
					Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum						3		
					Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah laporan fasilitasi penataan wilayah						4		

					Pelaksanaan Otonomi Daerah	**Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah**						**100**		
					Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah laporan fasilitasi pejabat negara						3		
					Pengembangan otonomi dan penataan urusan	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan						4		
					Evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah						3		
					Fasilitasi Kerjasama Daerah	**Presentase kerjasama yang ditindak lanjuti**						**100**		
					Fasilitasi kerjasama antar pemerintah	Jumlah laporan kerjasama antar pemerintah						1		
					Fasilitasi kerjasama badan usaha/swasta	Jumlah laporan kerjasama antar badan usaha/swasta						1		
					Evaluasi pelaksanaan kerjasama	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan kerjasama						1		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100**							
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pereangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan**	**100%**							
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen (RKA, RKA-P)							
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen (DPA, DPA-P)							

					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Keuangan**	**95%**						
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 laporan (Keu, barang)						
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah**	**100%**						
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang						
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah**	**100%**						
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan						
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 laporan						
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan						
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi**	**100%**						
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit						

					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**							
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 Lembar							
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan							
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik**	**100%**							
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit							
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Laporan							
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1. Persentase LPPD yang dilaporkan	100%							
						2. Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah								
						3. Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi								
					Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	**Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan**	**100%**							
					Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintah Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen (Unras, SPM, HUT RI)							

					Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen (Pengadaan Tanah bagi pembangunan Utk Kepentingan Umum, Penegasan Batas Daerah, Penyelenggaraan Nama Rupabumi)							
					Pelaksanaan Otonomi Daerah	**Persentasen Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**95%**							
					Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen							
					Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen							
					Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan							
					Fasilitasi Kerja Sama Daerah	**Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti**	**100%**							
					Fasilitasi Kerja Sama Daerah Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen							
					Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	20 Dokumen							
					Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Evaluasi Kerja Sama	3 Laporan							
					BIRO HUKUM									

	1				Urusan …...										
	1	01			Bidang Urusan ….....										
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Indeks Kualitasi Layanan Kesekretariatan**	87	0	0	0				
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	0	4	2	2	100	2	2	100
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100	100	100	100	100	100	42	42
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	12	12	100	12	6	50
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	50	50
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD	12	12	12	12	100	12	6	50
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100	0	0	0	0	100	0	0
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	0	3	0	0	3	0	0
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi	100	100	100	100	100			

						Umum pada Perangkat Daerah								
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0	12	12	12	100	12	6	50
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	0	0	0	0			
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	0	12	12	12	100	12	6	50
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	0	0	0	0			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	45	40	40	100			
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100			
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	8	5	12	240			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100			
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	100	12	5	42
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	12	12	12	12	100	12	5	42

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	100	100	100	100		50	50
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	25	25	25	100	30	15	50
					Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	**Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi, Kab/Kota serta Penangganan Litigasi dan Non litigasi dan HAM**	**0**	**100**	**109**	**132**	**121,10**			
					Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Rancangan Peroduk Hukum yang diharminisasi	0	100	80	51	63,75			
						Persentase Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang di harmonisasi	100	0	0	0	0			
					Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan	0	675	600	973	162,17			
						Persentase Keputusan Gubernur yang ditetapkan	100	0	0	0	0			
					Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum Daerah yang di Publikasikan	0	739	680	1024	150,59			
						Persentase produk hukum Provinsi yang dipublikasikan	100	0	0	0	0			
					Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi, Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota	0	360	300	352	117,33			
						Persentase Produk Hukum pengaturan Kab/kota yang difasilitasi/ evaluasi	100	0	0	0	0			
					Fasilitasi Bantuan Hukum	**Persentase Penanganan Litigasi Kepada UnsurUnsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**			

						Diselesaikan Di Setiap Tingkat								
					Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Perkara/Kasus	0	10	10	10	100			
						Persentase penanganan Perkara Litigasi	100	0	0	0	0			
						Persentase Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin	100	0	0	0	0			
					Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Kab/Kota yang diikutkan dalam penilaian kriteria Kab/Kota Peduli HAM	0	2	2	2	100			
						Persentase masalah Non Litigasi	100	0	0	0	0			
						Jumlah Laporan Rencana Aksi HAM dan Kabupate/Kota Peduli HAM	4	0	0	0	0			
					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT									
	1				Urusan …...									
	1	01			Bidang Urusan ….....									
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat**		75	**84**	**83**	98,81	**84%**	0%	0
						Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti	**100**							
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentese Realisasi Keuangan**	**93**	**90**	**90,00%**	**90,00%**	**100**	**93,61%**	**50,00**	**53,41**
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	93	2	2 dokumen	2 dokumen	100	3 Dokumen	1 dokumen	33,33

					Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	2	2 dokumen	2 dokumen	100	1 Laporan	1 laporan	100
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu**	**100**	**100**	**90%**	**90%**	**100**	**84%**	**50%**	**59,52**
					Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	0	4 orang	4 orang	100	4 orang	2 orang	50
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Palaksanaan Administrasi Umum**	**12**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100**	**12 Bulan**	**5 bulan**	**23,37**
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6	12 laporan				17 paket	2 paket	11,76
						Jumlah laporan pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12 Laporan	12 laporan	100			
					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12					12 paket	3 paket	25
						Jumlah laporan barang cetakan dan penggandaan		12	12 Laporan	12 Laporan	100			
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12	12	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	4 laporan	33,33
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang**	**12**	**12**	**12**	**12**	**100**	**12 bulan**	**4 bulan**	**33,33**

					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	4 laporan	33,33
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	4 laporan	33,33
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	4 laporan	33,33
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**85**	**90%**	**90**	**100**	**100%**	**16,67**	**16,67**
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	10	25 Unit	25 Unit	100	10 Unit	2 unit	20
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	25	11 Unit	11 Unit	100	20 Unit	3 unit	15
					PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang ditindaklanjuti**	**100%**	85	**90%**	90%	100	**90%**		
						Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang ditindaklanjuti	100					**100%**		
					Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	**Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi**	**100**	**85**	**90%**	**90%**	**100%**	**100%**	**20**	**20,00**
					Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	200					100 Unit	20 unit	20

						Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Sarana dan Prasarana Spiritual		1	10 Dokumen	10 dokumen	100			
					Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10	1				10 Lembaga	2 lembaga	20
						Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Bina Mental Spiritual			13 Dokumen	10 dokumen	100			
					Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	**Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti**	**100**	**85%**	**90%**	**90%**	**100**	**100%**	**30%**	**30%**
					Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	12	2 dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100	13 Dokumen	0	0
					Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	12	1 dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	100	12 Dokumen	2 dokumen	16,67
					Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	12	2 dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100	13 Dokumen	2 dokumen	15,38
					Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	**Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti**	**100**	**85%**	**90%**	**90%**	**100**	**100%**	**0**	**0**

					Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	12	3	11 Dokumen	11 Dokumen	100	13 Dokumen	0	0
					Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12	3	13 Dokumen	13 Dokumen	100	20 Dokumen	0	0
					Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	12	3	10 Dokumen	10 Dokumen	100	12 Dokumen	0	0
					BIRO PEREKONOMIAN									
	1				Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan									
	1	01			Sekretariat Daerah									
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi	**Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Perekonomian**	-	80	83	87	105%	84	168,05	168,05
						Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81	-	-	-	-	-	-	-

					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**3,00**
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	-	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	12	12,00
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	12	12,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Keuangan**	**95%**	**90%**	**92%**	**92%**	**100%**	**100%**	**282%**	**296,84**
					Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	12 daftar	12 laporan	12 laporan	100%	3 dokumen	27	9,00
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**3,00**
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan BMD	-	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3	3,00
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**200%**	**2,00**
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	28 laporan	26 laporan	93%	25 dokumen	79	79,00
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat	-	-	14 orang	9 orang	64%	3 orang	12	12,00
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	41 paket	-	-	-	-	-	-	-

					Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah**	**90%**	**100%**	**100%**	**100%**	**99,43%**	**100%**	**300%**	**333,33**
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	7 unit	12 laporan	12 laporan	99,84%	50 paket	69	575,00
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	600 Porsi	-	600 porsi	540 porsi	90%	25 paket	565	94,17
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Laporan	1600 lembar	12 laporan	12 laporan	97,47%	2 paket	1614	13450,00
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/surat kabar	12 Laporan	4 terbitan	12 laporan	12 laporan	100%	96 dokumen	112	933,33
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	120 Laporan	45 kali	153 OT	124 OT	99,81%	120 laporan	289	3468000,00
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**200%**	**200,00**
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 paket	-	-	-	-	-	-	-
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Kantor	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	4 unit	5	500,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300,00**
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos	120 lembar	200 lembar	120 lembar	114 lembar	95%	1 laporan	315	262,50
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak non teknis	12 Laporan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 laporan	36	43200,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300,00**

					Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik**							
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3	150,00
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	25 unit	12 unit	12 laporan	12 laporan	100%	25 unit	49	18,99
					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi**	81%	80%	95	96,77	102%	100%	98,57	12169,14
						Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	90%	-	-	-	-	-	-	-
					Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	**Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 laporan**	**1 laporan**	**100%**	**3 dokumen**	**5,00**	**500,00**
					Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Laporan	1 Laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 dokumen	5,00	250,00
					Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 dokumen	3,00	300,00
					Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	**Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 laporan**	**1 laporan**	**100%**	**7 laporan**	**9,00**	**900,00**
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	6 Laporan	1 Laporan	6 laporan	6 laporan	100%	3 dokumen	5,00	83,33

					Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Laporan	1 Laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 dokumen	5,00	250,00
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Laporan	1 Laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 dokumen	5,00	250,00
					Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	**Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 laporan**	**1 laporan**	**100%**	**3 dokumen**	**5,00**	**500,00**
					Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	4 Laporan	1 Laporan	4 laporan	4 laporan	100%	10 dokumen	15,00	375,00
					Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	**Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 laporan**	**1 laporan**	**100%**	**1 dokumen**	**3,00**	**300,00**
					Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 dokumen	3,00	300,00
					BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80%						
						Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan			83%	84,03%	101,24%	84%	84,75%	100,89%

						Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	80%							
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**		**1 Dokumen**						
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD		1 Dokumen						
	01	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen keuangan daerah**		**1 Dokumen**						
						Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja (Biro Administrasi Pembangunan)			**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**			
						Dokumen Administrasi Keuangan Biro Administrasi Pembangunan						**1 Dokumen**	**0**	**0**
						Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100%**							
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Tugas		5 Laporan						
	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pelaksanan Pengelolaan Keuangan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%			
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen	0	0
	01	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian**		**2 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**			
						Persentase Terlaksananya Administrasi	**100%**					**100%**		

						Kepegawaian Perangkat Daerah							
	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian pegawai			33 Stel	33 Stel	100%		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Stel					15 Paket	52 Paket	346,67%
	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Pendidikan		2 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%			
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang					10 Orang	10 orang	100,00%
	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Sosialisasi		5 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%			
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang					10 Orang	5 Orang	50,00%
	01	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi umum**		**0 Dokumen**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**100%**	**3 Dokumen**		
						Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**80%**							
	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor untuk meningkatkan kinerja Pegawai		54 Unit	32 Unit	32 Unit	100%			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan					12 Laporan	0	0
	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan dan Kebijakan		100 Buku	10 Buku	10 Buku	100%			

						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						10 Paket	5 Paket	50%
						Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Laporan							
	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi		20 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100%			
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	4 Laporan					15 Laporan	11 Laporan	73%
	01	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang**	**90%**					**85%**		
	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit					20 Unit		
	01	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**meningkatnya pelayanan kantor**		**85%**				**85%**	**50%**	**59%**
						Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**100%**			
						Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**80%**	**90%**						
	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan					12 Laporan	6 Laporan	50%

	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan					12 Laporan	6 Laporan	50%
	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		25 Orang	25 Orang	25 Orang	100%			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan					12 Laporan	6 Laporan	50%
	01	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dalam kondisi baik**		**80%**						
						Jumlah BMD yang terpelihara			**30 Unit**	**30 Unit**	**100%**			
						Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	**85%**					**85%**	**75%**	**88%**
	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan		8 Unit	1 Unit	1 Unit	100%			
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit					1 Unit	1 unit	100%
	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak		4 Unit	3 Unit	3 Unit	100%			

					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit					3 Unit	3 unit	100%
	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharaannya Peralatan dan Kelengkapan Kerja		20 Unit	30 Unit	30 Unit	100%		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit					30 Unit	20 unit	67%
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Terlaksananya Koordinasi dalam Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah		100%						
					Pelaksanaan Otonomi Daerah	**Tersusunnya Dokumen LPPD**		**1 Dokumen**						
					Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen Evaluasi dan Penyelenggaran Pemerintah		1 Dokumen						
	01	8			PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	80%	70%						
						Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik, administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan			100%	100%	100%	100%	50,00%	50,00%
						Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan			75%	85,37%	113,83%	80%	30,00%	37,50%
	01	**08**	**1.01**			**Tersusunnya Dokumen Pengendalian**		**3 Dokumen**						

					Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	**Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**								
						Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**100%**	**3 Dokumen**	**0**	**0**
						Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	**80%**							
						Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	**80%**							
	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		12 Laporan	12 Laporan	6	50%			
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan					12 Laporan	6 Laporan	50%
	01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%			
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan					12 Laporan	6 Laporan	50%
	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan wilayah I, Wilayah II dan Wilyah III		36 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	3 Laporan	50%
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I	2 Laporan							
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi	2 Laporan							

						Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II								
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III	2 Laporan							
	01	**08**	**1.02**		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**		**3 Dokumen**						
						Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**100%**	**3 Dokumen**	**0**	**0**
						Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	**80%**							
	01	08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan Analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan		12 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%			
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen					1 Dokumen	0	0
	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Pelaksanaan pembangunan daerah		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan					12 Laporan	6 Laporan	50%
	01	08	1.02	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Laporan Fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembanguan yang telah dilaksanakan		2 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen					1 Dokumen	0	0

					BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA									
	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pengadaan Barang & Jasa	-	82.07	83	81,36	98,02	84	-	-
						Indek Kualitas Layanan Keskretariatan Biro PBJ	71	-	-	-	-	-	-	-
	01	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tercapainya laporan keuangan yang akuntabel**	**-**	**-**	**90**	**90**	**100**			**-**
						Tercapainya laporan keuangan yang akuntabel		**-**				**90**	**90**	**-**
						Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	**85**							**-**
	01	01	1.02	03	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Tugas	-	-	5	0	-	-	-	-
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	-	-	-	-	1	-	-
	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pelaksanan Pengelolaan Keuangan	-	-	12	12	100	-	-	-
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	-	-	-	-	1	-	-
	01	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kapasitas pegawai**		**-**	**80**	**80**	**100**	**80**	**160**	**-**
						Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	**50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	01	01	1.05	02		Jumlah Pakaian dinas untuk ASN	-	-	70	70	100	-	-	-

					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	-	-	-	-	1	1	-
	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Pendidikan	-	-	34	43	126,5	-	-	-
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	-	-	-	-	20	-	-
	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Sosialisasi	-	-	12	2	16,7	-	-	-
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	-	-	-	-	5	-	-
	01	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningatnya pelayanan Administarsi Umum**	**-**	**-**	**80**	**80**	**100**	**90**	**-**	**-**
						Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	**50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor untuk meningkatkan kinerja Pegawai	-	-	36	36	100	-	-	-
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	-	-	-	-	1	-	-
	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan dan	-	-	50	30	60	-	-	-
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	-	-	-	-	2	-	-
	01	01	1.06	09		Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	-	-	70	72		20	-	-

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	-	-	-	-	-	-	-
	01	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**meningkatnya pelayanan kantor**	**-**	**-**	**85**	**85**	**100**	**85**	**-**	**-**
						Presentase prasarana kantor yang terpenuhi	**85**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kerja	-	-	96	96	100	-	-	-
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	-	-	-	-	68	-	-
	01	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningatnya pelayanan Administarsi Umum**	**-**	**-**	**85**	**85**	**100**	**85**	**-**	**-**
						Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat	-	12	1	1	100	-	-	-
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	-	-	-	-	4	-	-
	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi/Internt yang tersedia	-	-	12	12	100	-	-	-
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	-	-	-	-	12	-	-
	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	-	-	12	12	100	-	-	-

						Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	12	-	-	-	-	12	-	-
	01	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dalam kondisi baik**	**-**	**-**	**85**	**85**		**85**	**-**	**-**
						Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	**80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	-	-	1	1	100	-	-	-
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	-	-	-	-	1	-	-
	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	1	0	n/a	-	-	-
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	-	-	-	-	-	-	-
	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharaannya Peralatan dan Kelengkapan Kerja	-	-	22	17	77,27	-	-	-
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	-	-	-	-	22	-	-
	01	**07**			**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN**	**Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-'**	**-**	**-**

					PENGADAAN BARANG DAN JASA	**Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)**	**-**	**(8/9)**	**3 (9/9)**	**(8/9)**	**89%**	**3**	**-**	**-**
						Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia	**30**	**0**	**0**	**10%**	**n/a**	**-**	**-**	**-**
	01	**07**	**1.01**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**-**	**-**	**3**	**3**	**100**	**-**	**-'**	**-**
						Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**88**	**-**	**-**
						Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan strategi pengadaan yang barang dan jasa yang dilaksanakan	-	12	1	1	100	-	-	-
						Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1	-	-	-	-	1	-	-
	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket yang di tender	-	650	-	-	-	-	-	-
						Jumlah sanggah lelang melalui LPSE	-	5	-	-	-	-	-	-
						laporan Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa	-	12	-	-	-	-	-	-
						Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa tender dan non tender	-	-	2	2	100	-	-	-

						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	-	-	-	-	2	-	-
	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	laporan pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	-	12	-	-	-	-	-	-
						Jumlah laporan monitoring pengadaan barang dan jasa	-	-	2	2	100	-	-	-
						Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	-	-	-	-	2	-	-
	01	**07**	**1.02**		**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**-**	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						Persentase layanan Pengadaan secera elektronik		**-**	**95**	**95**	**100**	**95**	**-**	**-**
						Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektonik	-	12	-	-	-	-	-	-
						Jumlah Layanan LPSE	-	-	700	535	76,4	-	-	-
						Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1	-	-	-	-	2	-	-
	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	laporan pelaksanan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa (3 Sistem)	-	12	2	2	100,0	-	-	-
						Jumlah Laporan Pengembangan Sistem	1	-	-	-	-	2	-	-

						Informasi Pengadaan Barang dan Jasa								
	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pengadaan elektronik yang dilayani	-	700	-	-	-	-	-	-
						Laporan pelaksanaan pengelolan informasi pengadaan barang dan jasa	-	12	-	-	-	-	-	-
						Jumlah User yang dilayani	-	700	-	-	-	-	-	-
						Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	-	-	-	-	2	-	-
	01	**07**	**1.03**		**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**Tersusunnya Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**-**	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						Persentase Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	**-**	**-**	**80**	**80**	**100**	**87,5**	**-**	**-**
						Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDM yang diberi Pembinaan	-	100	250	292	116,8	-	-	-
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	1	-	-	-	-	200	-	-
	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	laporan pelaksanan pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan	-	12	11	11	100	-	-	-
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan	1	-	-	-	-	1	-	-

						Pengadaan Barang dan Jasa								
	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	laporan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan	-	12	9	6	66,67	-	-	-
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1	-	-	-	-	1	-	-
					Biro Organisasi									
	4.01.0.00.0.00.03.0000				**Sekretariat Daerah**									
	4.01.0.00.0.00.03.0004				**Biro Organisasi**									
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Organisasi**	**0**	**82**	**83**	**83**	**100,00**	**84**	**0**	
						Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	**82**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan**	**0**	**90**	**100**	**92**	**92,00**	**0**	**0**	
						Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	
						Persentase realisasi anggaran	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Administrasi Keuangan	0	12	12	12	100,00	0	0	

					Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	0	0	0	0,00	1	0	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**0**	**0**	
						Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan BMD	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	0	0	0	0	1	0	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7**	**0**	
						Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	2	0	0	0	0,00	2	0	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	0	7	0	0,00	9	0	

					Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah**	**0**	**100**	**100**	**95**	**95,00**	**0**	**0**	
						Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro Organisasi	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100**	**0**	
						Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	**100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	100	35	35,00	0	0	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	0	0	0	0,00	3	0	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	0	0	1580	1200	75,95	0	0	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	0	0	0	0,00	2	0	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan		12	12	12	100,00	0	0	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	0	0	0	0,00	2	0	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	0	95	95	60	63,16	0	0	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	0	0	0	0,00	1	0	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	0	0	164	162	98,78	0	0	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	0	0	0	0,00	1	0	

					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	0	0	0	0,00	2	0	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**0**	**0**	
						Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Organisasi)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100**	**0**	
						Persentase pemenuhan BMD	**100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	0	10	10	100,00	15	0	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0**	**100**	**100**	**75**	**75,00**	**0**	**0**	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12**	**0**	
						Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	**100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Surat Masuk dan Keluar	0	1	1	0	0,00	0	0	
						umlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	0	0	0	0,00	1	0	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	1	1	1	100,00	0	0	

					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	0	1	12	12	100,00	0	0	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	0	0	0	0,00	1	0	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**0**	**0**	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100**	**0**	
						Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	**100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	0	16	12	12	100,00	0	0	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	0	0	0	0,00	18	0	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor	0	10	20	20	100,00	0	0	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21	0	0	0	0,00	21	0	
					PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	**Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)**	**0**	**92**	**95**	**91,89**	**96,73**	**97**	**0**	
						Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (Baik)	**0**	**77**	**79**	**77,89**	**98,59**	**81**	**0**	

						Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	0	0	0	0	0,00	89	0	
						Indeks Kelembagaan	72	0	0	0	0,00	0	0	
						Indeks Kematangan Organisasi	44	0	0	0	0,00	0	0	
						Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	1	0	0	0	0,00	0	0	
						Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	40	0	0	0	0,00	0	0	
						Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	86	0	0	0	0,00	0	0	
					Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Indeks Kematangan Organisasi	0	42	42	42	100,00	0	0	
						Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaan Organisasinya sesuai ketentuan	0	0	0	0	0,00	100	0	
						Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	0	0	0	0	0,00	96	0	
						Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian	100	0	0	0	0,00	0	0	

						Mandiri Indeks Kelembagaan								
						Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi	**100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
					Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Kelembagaannya	0	37	37	37	100,00	0	0	
						Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyampaikan Hasil Evaluasi Kematangan Organisasi	0	37	37	37	100,00	0	0	
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	2	0	0	0	0,00	1	0	
					Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kelembagaannya	0	10	10	10	100,00	0	0	
						Persentase Usulan Fasilitasi Kelembagaan Kab / Kota yang ditindaklanjuti	0	100	50	50	100,00	0	0	
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0,00	1	0	
					Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	0	37	37	37	100,00	0	0	
						Laporan Evaluasi Jabatan	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap	0	10	10	10	100,00	0	0	

						Pelaksanaan Anjab dan ABK nya								
						Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Pelaksanaan Standar Kompetensi	0	10	10	10	100,00	0	0	
						Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Penyusunan Formasi Pegawai	0	10	10	10	100,00	0	0	
						Persentase Usulan Anjab dan ABK Kab Kota yang dilakukan Validasi	0	100	50	50	100,00	0	0	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2	0	0	0	0,00	1	0	
					Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	**Rata - rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**0**	**65**	**65**	**78,1**	**120,15**	**0**	**0**	
						Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan sesuai aturan / Ketentuan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100**	**0**	
						Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	**90**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
						Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan	**100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
					Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019 - 2023	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Laporan Fasilitasi Evaluasi Reformasi Birokrasi	0	1	1	1	100,00	0	0	

						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	0	0	0	0,00	1	0	
					Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penyusunan LKJiP	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Jumlah PD yang difasilitasi Evaluasi AKIP	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Jumlah PD yang difasilitasi Penerapan / Penguatan SAKIP	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Jumlah Kab / Kota yg dilakukan Monitoring dan Pembinaan SAKIP	0	10	10	10	100,00	0	0	
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3	0	0	0	0,00	1	0	
					Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan penerapan Budaya Kerja	0	37	37	37	100,00	0	0	
						Jumlah Perangkat Daerah yang membentuk Kelompok Budaya Kerja	0	37	37	37	100,00	0	0	
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1	0	0	0	0,00	1	0	
					Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Laporan Fasilitasi Evaluasi SOP Perangkat Daerah	0	1	1	1	100,00	0	0	

						Dokumen peta Proses Bisnis	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Laporan Fasilitasi Tata Naskah Dinas	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Laporan Fasilitasi Pakaian Dinas	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	3	0	0	0	0,00	1	0	
					Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Fasilitasi dan Evaluasi standar pelayanan terhadap Perangkat Daerah	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Fasilitasi dan evaluasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Fasilitasi Evaluasi Unit Pelayanan Publik	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Laporan Binwas dan Monitoring terhadap Kab/Kota penyelenggaraan Pelayanan Publik	0	1	1	1	100,00	0	0	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	3	0	0	0	0,00	1	0	
					Biro Umum									
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01				SEKRETARIAT DAERAH									
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum**	**84,00**	**79,81**	**83**	**83,3**	**100,36%**	**84**	**84,37**	**100,44%**

						Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Biro Umum**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**50,00%**	**50,00%**
4	01	01	1.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00%
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**75,00%**	**75,00%**
4	01	01	1.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	373 Orang/Bulan	500 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	373 Orang/Bulan	373 Orang / Bulan	100,00%
4	01	01	1.02	003	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	500 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50,00%
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50,00%**	**50,00%**
4	01	01	1.03	004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	200 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
4	01	01	1.03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		-	-	100%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**33,64%**	**33,64%**

4	01	01	1.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	400 Stel	358 Stel	358 Stel	100%	3 Paket	1 Paket	33,33%
4	01	01	1.05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	300 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00%
4	01	01	1.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	125 Orang	100 orang	3 Laporan	3 Laporan	100%	125 Orang	22 Orang / Bulan	17,60%
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**44,53%**	**44,53%**
4	01	01	1.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	100%	6 Paket	3 Paket	50,00%
4	01	01	1.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	102 Jenis	12 Laporan	12 Laporan	100%	6 Paket	2 Paket	33,33%
4	01	01	1.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	385 Paket	261600 Porsi	12 Laporan	12 Laporan	100%	225 Paket	112 Paket	49,78%
4	01	01	1.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	14 Paket	4 Paket	28,57%
4	01	01	1.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
4	01	01	1.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1920 Laporan	750 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	100%	1920 Orang/Perjalanan	960 Orang / Perjalanan	50,00%
4	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	1500 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00%

4	01	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	450 Orang	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00%
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**40,11%**	**40,11%**
4	01	01	1.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	20 Unit	12 Unit	25 Unit	25 Unit	100%	111 Unit	55 Unit	49,55%
4	01	01	1.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 Unit	-	-	-	-	-	-	-
4	01	01	1.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	150 Unit	200 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100%	150 Unit	46 Laporan	30,67%
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50,00%**	**50,00%**
4	01	01	1.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1000 Surat	2100 Lembar	2100 Lembar	100%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
4	01	01	1.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1000 Mbps 155736 M3 1337616 Kwh	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
4	01	01	1.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
4	01	01	1.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	137500 m2	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%

						Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**31,45%**	**31,45%**
4	01	01	1.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	200 Unit	150 Unit	150 Unit	150 Unit	100%	80 Unit	40 Unit	50,00%
4	01	01	1.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	447 Unit	-	-	-	-	447 Unit	222 Unit	49,66%
4	01	01	1.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100%	13 Unit	2 Unit	15,38%
4	01	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	325 Unit	150 Unit 150 Jenis	150 Unit	150 Unit	100%	325 Unit	35 Unit	10,77%
4	**01**	**01**	**1.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**62,50%**	**62,50%**
4	01	01	1.11	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	24 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Orang/Bulan	2 Orang / Bulan	100,00%
4	01	01	1.11	002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	-	-	-	100%	8 Paket	2 Paket	25,00%

4	01	01	1.11	003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	-	-	-	100%	8 Orang	2 Orang	25,00%
4	01	01	1.11	004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	-	-	-	100%	2 Orang/Bulan	2 Orang / Bulan	100,00%
4	**01**	**01**	**1.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**45,66%**	**45,66%**
4	01	01	1.12	001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	17 Paket	100 Kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	100%	17 Paket	8 Paket	47,06%
4	01	01	1.12	002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	100 Kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	100%	17 Paket	8 Paket	47,06%
4	01	01	1.12	003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	28 Paket	100 Kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	100%	28 Paket	12 Paket	42,86%
					Biro Administrasi Pimpinan									
	1				Urusan									
	1	01			Bidang Urusan									
					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	**Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan**	**86**	**83**	**84**	**84**	**100**	**85**	**27**	**31,40**
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**90**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**25**	**27,78**

					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	2	2	9	450	2	2	22,22
					Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja lingkup Setda	4	4	4	4	100	4	2	50,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan baik**	**90**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**25**	**27,78**
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan ASN	12	12	12	12	100	12	5	41,67
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah**	**90**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**25**	**27,78**
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan hasil pendidikan dan pelatihan	4	4	4	4	100	4	2	50,00
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Setda	2	2	2	2	100	2	1	50,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**90**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**111,11**
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan peralatan Alat tulis kantor	12	12	12	12	100	12	5	41,67
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah laporan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	12	12	12	12	100	15	6	50,00
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	160	160	160	160	100	160	70	43,75
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang diadakan	1000	1000	1000	627	62,7	1000	450	45,00

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**90**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**111,11**
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	5	5	5	5	100	5	2	40,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**111,11**
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya (STNK) dan dipelihara	15	15	15	15	100	15	6	40,00
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	12	12	12	12	100	12	5	41,67
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**111,11**
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	12	12	12	12	100	12	5	41,67
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Listrik, dan Sumber Daya Air yang terbayarkan	12	12	12	12	100	12	5	41,67
					Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	**Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**
					Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah dokumen naskah pidato dan presentasi	12	12	12	12	100	12	5	41,67
					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah dokumen yang terpublikasi	12	12	12	12	100	12	5	41,67

					Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah dokumen penyediaan data yang terdokumentasi	12	12	12	12	100	12	5	41,67
					Fasilitasi Keprotokolan	**Tersedianya Fasilitas Keprotokolan Sekretariat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**
					Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah dokumen koordinasi acara kegiatan Pemda	4	4	4	4	100	4	2	50,00
					Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dokumen kunjungan tamu yang terlayani	2	2	2	2	100	2	1	50,00
					Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah dokumen administrasi keprotokolan	2	2	2	2	100	2	1	50,00

Sumber : Kompilasi data Biro-Biro di lingkup Setda Prov. Kaltim

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Misi ke-5 yang diampu oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik. Misi ini akan diuraikan lagi menjadi tujuan dan sasaran.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah untuk dipahami serta dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3. 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien		Nilai Akuntabilitas Kinerja	76.55	76.60	76.65	77.00	78.00
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3.07	3.08	3.095	3.10	3.15
			Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	85.00	90.00	90.00	92.50	95.00
			Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi			100.00	100.00	100.00
			Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	80.00	85.00	85.00	87.00	90.00
		Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan daerah di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti			90	95	100
			Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama	0	0	70	75	80
			Indeks tata kelola pengadaan			70 (cukup)	75 (baik)	80 (baik)
		Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal (B)	70	75	77	79	81
			Indeks Kelembagaan		65.64 (peringkat 4)	66 (peringkat 4)	67 (peringkat 4)	69 (peringkat 4)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat	81.50	82.00	82.30	82.50	83.00
		Meningkatnya kualitas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	76.61 (B/Baik)	77.00 (B/Baik)	77.10 (B/Baik)	77.50 (B/Baik)	77.80 (B/Baik)
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan	76.90	77.05	77.20	77.35	77.50
			Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	67	68	69	70	71

3.2 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Sekretariat Daerah melaksanakan 8 (delapan) program, 30 (tiga puluh) kegiatan dan 98 (sembilan puluh delapan) sub kegiatan. Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   4) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   1) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
   2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
   5) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
   6) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
   9) Fasilitasi Kunjungan Tamu

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

h. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

i. i. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

j. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

k. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
1) Penyiapan Materi Pimpinan
2) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
3) Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan

l. Fasilitasi Keprotokolan
1) Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
2) Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3) Pengelolaan Hubungan Keprotokolan

2. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

a. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
2) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
4) Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

b. Fasilitasi Bantuan Hukum
1) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
2) Fasilitasi Penataan Wilayah

3. Program Penataan Organisasi

a. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
1) Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi

2) Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
3) Penataan Analisis Jabatan

b. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
1) Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2) Monitoring dan Evaluasi Akuntabiliras Kinerja
3) Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
4) Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
5) Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

4. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah a.

a. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
1) Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
2) Fasilitasi Penataan Wilayah

b. Pelaksanaan Otonomi Daerah 1)
1) Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
2) Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
3) Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan

c. Fasilitasi Kerjasama Daerah
1) Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
2) Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
3) Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

5. Program Kesejahteraan Rakyat

a. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
1) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
2) Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual

b. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
1) Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
2) Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
3) Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial

c. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
1) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
2) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan.

6. Program Perekomomian dan Pembangunan

a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

1) Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
2) Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro

b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
1) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
2) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
3) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

7. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
2) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
3) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah

b. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1) Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
2) Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
3) Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah

8. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1) Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
2) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
3) Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa

b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
1) Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
2) Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
3) Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
1) Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
2) Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
3) Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

3.3 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD 2023

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tujuan meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas, dan meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu didukung dengan program dan kegiatan yang mendukung.

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD 2023 adalah membandingkan antara Rancangan P-RKPD dengan hasil kebutuhan Perangkat Daerah. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam Rancangan P-RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Data tersebut sedianya dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3. 2
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
A					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
A	01				SEKRETARIAT DAERAH							184,843,468,000	241,577,245,743	264,746,405,994							188,782,752,073	
A	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Umum	%		%	84 %	84 %	184,843,468,000	241,577,245,743	264,746,405,994						84 %	188,782,752,073	
A	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Biro Umum	%		%	100 %	100 %	556,298,000	1,000,000	1,000,000						100 %	550,000,000	
A	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.				10 Dokumen	10 Dokumen	556,298,000	1,000,000	1,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Biro Umum	10 Dokumen	550,000,000	Sekretariat Daerah
A	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Biro Umum terlaksana dengan baik	%		%	100 %	100 %	60,023,539,568	70,346,509,537	70,346,509,537						100 %	90,297,521,241	
A	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				373 Orang/Bulan	595 Orang/Bulan	77,827,745,568	77,828,082,037	77,828,082,037	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kebutuhan daerah	ASN Sekretariat Daerah	373 Orang/Bulan	88,503,051,641	Sekretariat Daerah
A	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Perselisihan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2,199,794,000	1,518,427,500	1,518,427,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kebutuhan daerah	ASN Sekretariat Daerah	12 Dokumen	1,766,699,600	Sekretariat Daerah
A	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Biro Umum	%		%	100 %	100 %	1,266,630,000	1,165,320,000	1,169,020,000						100 %	1,240,270,600	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	554,000,000	522,900,000	522,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Terkait	12 Laporan	579,095,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	912,620,000	643,320,000	647,020,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN Terkait	12 Laporan	661,183,600	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Biro Umum	%		%	100 %	100 %	**2,259,007,000**	**2,559,004,000**	**2,219,684,000**						100 %	**2,277,017,000**	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	494,950,000	340,660,000	340,660,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN Terkait	3 Paket	330,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	1,187,477,000	1,331,668,000	1,980,668,000	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN Terkait	4 Dokumen	1,342,017,600	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				125 Orang	125 Orang	567,580,000	667,656,800	887,656,800	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN Terkait	125 Orang	385,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum pada Biro Umum	%		%	100 %	100 %	**24,872,819,863**	**22,311,914,950**	**93,316,174,450**						100 %	**18,940,171,019**	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	7 Paket	660,755,645	270,245,500	283,939,400	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN Terkait	7 Paket	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	848,108,000	497,666,100	497,666,100	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN Terkait	6 Paket	875,700,800	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				221 Paket	275 Paket	7,889,512,000	5,951,119,000	7,951,119,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN Terkait	275 Paket	2,750,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	776,700,000	733,290,000	733,290,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN Terkait	14 Paket	762,520,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1920 Orang	Orang	Perjalan8,743,625,363	14,387,196,050	20,300,596,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Terkait	2100 Orang	Perjalan4,275,857,219	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	730,541,415	210,828,800	210,828,800	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN Terkait	4 Dokumen	660,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	326,760,440	261,764,500	261,764,500	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN Terkait	4 Dokumen	440,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Umum	%		%	100 %	100 %	**9,271,797,000**	**56,417,206,489**	**62,668,641,089**						100 %	**8,250,000,000**	
4	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				111 Unit	122 Unit	4,825,940,000	49,407,597,640	53,750,587,640	Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN & Stakeholder Terkait	122 Unit	5,500,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				150 Unit	200 Unit	4,445,057,030	7,009,608,849	8,910,043,449	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN & Stakeholder Terkait	200 Unit	2,755,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Biro Umum	%		%	100 %	100 %	**26,715,690,869**	**26,808,206,440**	**28,519,383,640**						100 %	**23,071,252,073**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	82,000,000	83,700,000	83,700,000	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN Terkait	12 Laporan	88,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proktiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9,400,000,000	9,774,001,000	10,574,001,800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN Terkait	12 Laporan	9,491,752,075	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2,550,641,600	2,609,160,400	2,659,168,400	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN Terkait	12 Laporan	841,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14,693,049,269	14,291,357,040	15,202,433,440	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN Terkait	12 Laporan	12,650,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**16,749,820,862**	**16,989,971,045**	**22,670,965,045**						100 %	**15,451,459,673**	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				80 Unit	100 Unit	7,411,870,050	7,241,459,200	9,241,459,200	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN Terkait	100 Unit	5,835,555,140	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				477 Unit	553 Unit	1,714,607,800	856,184,000	2,561,184,800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN Terkait	553 Unit	1,100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehab Blasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	13 Unit	7,338,333,032	10,660,077,845	10,816,071,845	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN Terkait	13 Unit	8,141,096,733	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehab Blasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Laporan	4 Laporan	284,150,000	232,250,000	232,250,800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN Terkait	4 Laporan	835,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan baik	%		%	100 %	100 %	**11,188,410,768**	**13,577,979,684**	**14,699,691,555**						100 %	**12,508,060,667**	
4	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	8 Orang/Bulan	250,252,396	250,252,232	350,252,232	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	2 Orang/Bulan	275,277,636	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	187,600,000	185,476,000	185,476,800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	6 Paket	207,360,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				6 Orang	6 Orang	870,000,000	870,000,000	870,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	6 Orang	957,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Dana Penunjang Operasional KDH WKDH Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan 0 Orang/ Bulan	9,878,566,392	12,068,251,452	13,389,903,301	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	12 Laporan 0 Orang/ Bulan	10,860,423,031	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.12		**Fasilitasi Kesemuhtanggaan Sekretariat Daerah**	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Kesemuhtanggaan Sekretariat Daerah	%		%	100 %	100 %	**11,950,460,000**	**20,599,253,200**	**22,138,214,100**						100 %	**15,400,000,000**	
4	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				17 Paket	20 Paket	5,120,061,000	7,934,010,800	8,161,958,280	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	20 Paket	4,950,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	4,525,145,000	5,955,584,000	5,999,584,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	17 Paket	4,950,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				28 Paket	44 Paket	1,907,254,000	7,125,658,800	8,018,671,820	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	44 Paket	5,500,000,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**13,793,261,000**	**21,150,358,648**	**22,050,358,648**							**10,858,593,000**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Adpim	%		%	85 %	85 %	**13,793,261,000**	**21,150,358,648**	**22,050,358,648**						85 %	**10,858,593,000**	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	**818,550,000**	**752,750,000**	**752,750,000**						5 Dokumen	**919,023,000**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	726,658,000	555,600,000	555,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Dokumen	816,358,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	91,700,000	197,150,000	197,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Laporan	102,665,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	**158,520,000**	**447,340,000**	**447,340,000**						12 Dokumen	**253,520,000**	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	158,520,000	447,340,000	447,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	12 Dokumen	253,520,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	20 Orang	20 Orang	**588,404,000**	**551,706,000**	**551,706,000**						20 Orang	**437,980,947**	
4	01	01	1.05	08	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				5 dokumen	5 dokumen	318,404,000	382,320,000	382,320,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 dokumen	314,972,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	170,000,000	169,426,000	169,426,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	20 Orang	113,008,947	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Penataan dan Penyelenggaran Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	150 Paket	150 Paket	**1,645,006,198**	**1,942,959,168**	**1,942,959,168**						150 Paket	**906,291,921**	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"				150 Paket	150 Paket	139,248,050	345,304,220	245,304,220	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment			0	150 Paket	228,725,150	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	123,312,000	72,072,000	72,072,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	50 Paket	115,048,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	26,304,274	10,477,818	10,477,818	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	15 Paket	125,660,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	1,368,141,874	1,615,105,150	1,615,105,150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	150 Laporan	476,653,471	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	20 Unit	20 Unit	**107,200,000**	**613,223,000**	**845,087,000**						20 Unit	**693,363,000**	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 unit	20 unit	107,200,000	613,223,000	845,087,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment			0	20 unit	693,363,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**1,524,477,232**	**1,965,267,288**	**1,965,267,288**						12 Laporan	**1,524,477,232**	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25,700,400	25,642,800	25,642,800	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	25,700,400	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,498,776,832	1,879,624,480	1,879,624,480	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	1,498,776,832	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit	**148,219,000**	**53,397,000**	**53,397,000**						10 Unit	**88,173,000**	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 unit	5 unit	49,619,000	46,365,000	46,365,000	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 unit	40,703,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 unit	10 unit	98,800,000	9,032,000	9,032,000	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan-Non Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment			0	10 unit	27,470,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.13		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	**6,830,660,000**	**12,066,292,200**	**12,334,425,200**						12 Dokumen	**5,101,650,000**	
4	01	01	1.13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				12 dokumen	12 dokumen	580,880,000	659,464,000	659,464,800	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 dokumen	300,155,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				6 Laporan	6 Laporan	3,930,000,000	5,466,700,200	6,154,836,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degredation (REDD+) Results Based Payment			0	6 Laporan	2,422,010,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	2,749,980,000	6,540,128,000	6,540,128,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	2,570,467,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.14		**Fasilitasi Keprotokolan**	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**1,474,416,570**	**2,217,396,000**	**2,217,396,000**						12 Laporan	**729,714,000**	
4	01	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				12 Laporan	12 Laporan	1,395,580,000	1,395,792,000	1,395,792,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terlaksanany a Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keprotokola n	12 Laporan	281,220,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				6 Laporan	6 Laporan	696,020,000	548,592,000	548,592,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terlaksanany a Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keprotokola n	6 Laporan	300,550,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	253,008,570	273,000,000	273,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terlaksanany a Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keprotokola n	12 Laporan	155,944,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**5,555,666,000**	**6,281,732,808**	**6,281,732,808**							**5,555,666,000**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Layanan Biro Hukum	%		%	84 %	84 %	**1,555,666,000**	**1,857,882,808**	**1,857,882,808**						84 %	**1,481,666,000**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**3,540,000**	**3,840,000**	**3,840,000**						2 Dokumen	**4,410,000**	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	5,540,000	3,840,000	3,840,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Pegawai dilingkup Biro Hukum Setda Prov. Kaltim	2 Dokumen	4,410,800	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Biro Hukum	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**103,920,000**	**103,920,000**	**103,920,000**						1 Dokumen	**103,920,000**	
4	01	01	1.02	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	103,920,000	103,920,000	103,920,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pegawai dilingkup Biro Hukum Setda Prov. Kaltim	1 Dokumen	103,920,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah laporan penatausahaan BMD	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**7,680,000**	**7,680,000**	**7,680,000**						12 Laporan	**7,680,000**	
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD				12 Laporan	12 Laporan	7,680,000	7,680,000	7,680,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Pegawai dilingkup Biro Hukum Setda Prov. Kaltim	12 Laporan	7,680,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/Kimtek/Diklat	Orang		Orang	2 Orang	2 Orang	**72,000,000**	**25,689,000**	**25,689,000**						2 Orang	**50,000,000**	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	72,000,000	25,689,000	25,689,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Pegawai dilingkup Biro Hukum Setda Prov. Kaltim	2 Orang	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Pengadaan ATK	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**752,054,656**	**938,603,248**	**938,603,248**						12 Laporan	**642,687,551**	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	101,906,000	112,555,000	112,555,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Pegawai dilingkup Biro Hukum Setda Prov. Kaltim	12 Laporan	61,875,351	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan				300 Porsi	300 Porsi	66,920,000	7,200,000	7,200,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Pegawai dilingkup Biro Hukum Setda Prov. Kaltim	300 Porsi	60,952,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Laporan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	27,428,656	40,123,737	40,123,737	Kota Samarinda, Semarinda Ulu, Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Pegawai dilingkup Biro Hukum Setda Prov. Kaltim	12 Laporan	20,060,200	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi				51 Laporan	51 Laporan	535,800,000	778,724,511	778,724,511	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Pegawai dilingkup Biro Hukum Setda Prov. Kaltim	51 Laporan	500,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Hukum	%		%	100 %	100 %	**108,912,000**	**130,052,000**	**130,052,000**						100 %	**199,255,505**	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	108,912,000	130,052,000	130,052,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Pegawai dilingkup Biro Hukum Setda Prov. Kaltim	10 Unit	199,255,505	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Hukum)	%		%	100 %	100 %	**500,009,344**	**626,798,560**	**626,798,560**						100 %	**430,762,944**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan				500 Lembar	500 Lembar	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Pegawai dilingkup Biro Hukum Setda Prov. Kaltim	500 Lembar	5,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis				12 Dokumen	12 Dokumen	495,009,344	621,798,560	621,798,560	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Pegawai dilingkup Biro Hukum Setda Prov. Kaltim	12 Dokumen	455,762,944	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Hukum)	%		%	100 %	100 %	**25,550,000**	**21,300,000**	**21,300,000**						100 %	**24,750,000**	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	80 Unit	25,550,000	21,300,000	21,300,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai dilingkup Biro Hukum Setda Prov. Kaltim	80 Unit	24,750,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	05			**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	Persentase terlaksana Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi, Kab/Kota serta Penanganan Litigasi dan Non Litigasi dan HAM	%		%	100 %	100 %	**4,000,000,000**	**4,423,850,000**	**4,423,850,000**						100 %	**4,084,000,000**	
4	01	05	1.01		**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Provinsi dan Kab/Kota	%		%	100 %	100 %	**2,600,000,000**	**2,744,350,000**	**2,744,350,000**						100 %	**2,650,000,000**	
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				80 Dokumen	80 Dokumen	800,000,000	884,350,000	884,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan daerah	Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	80 Dokumen	850,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				650 Dokumen	650 Dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan daerah	Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	650 Dokumen	400,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				740 Dokumen	740 Dokumen	800,000,000	800,000,000	800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan daerah	Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	740 Dokumen	800,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				350 Dokumen	350 Dokumen	800,000,000	860,000,000	860,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan daerah	Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	350 Dokumen	800,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.02		**Fasilitasi Bantuan Hukum**	Jumlah dokumen penanganan perkara/sengketa hukum	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	**1,400,000,000**	**1,679,500,000**	**1,679,500,000**						10 Dokumen	**1,444,000,000**	
4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				15 Kasus	15 Kasus	900,000,000	1,119,500,000	1,119,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukkamtam Dan Transformasi Pelayanan Public	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan daerah	Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	15 Kasus	900,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	05	1.02	D2	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				5 Kasus	5 Kasus	500,000,000	560,000,000	560,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kebudayaan daerah	Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	5 Kasus	544,000,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	01				**SEKRETARIAT DAERAH**							**6,472,183,000**	**9,282,223,894**	**9,282,223,894**							**11,337,087,220**	
4	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Organisasi	%		%	84 %	84 %	**1,917,183,000**	**2,217,199,394**	**2,217,199,394**						84 %	**4,562,676,655**	
4	01	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**110,000,000**	**115,440,200**	**115,440,200**						1 Laporan	**216,990,310**	
4	01	01	1.02	D1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000	115,440,200	115,440,200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kebudayaan daerah	Pengelolaan Keuangan Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim	1 Dokumen	216,990,310	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diperiksa	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**10,250,000**	**10,250,000**						100 %	**41,440,000**	
4	01	01	1.03	D6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,250,000	10,250,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kebudayaan daerah	BMD pada Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim	1 Laporan	41,400,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	7 Orang	7 Orang	**108,960,000**	**176,897,500**	**176,897,500**						7 Orang	**261,950,000**	
4	01	01	1.05	D2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	27,200,000	80,217,500	80,217,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kebudayaan daerah	ASN pada Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim	2 Paket	27,200,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	D5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				9 Orang	9 Orang	81,760,000	116,180,000	116,180,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kebudayaan daerah	ASN pada Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim	3 Orang	234,450,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Layanan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro Organisasi	%		%	100 %	100 %	**1,176,984,000**	**1,185,674,800**	**1,185,674,800**						100 %	**3,230,536,165**	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				3 Paket	3 Paket	55,121,800	37,473,800	37,473,800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	5 Paket	57,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	301,000,000	278,350,000	278,350,000	Kota Samarinda, Semua kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	2 Paket	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	21,028,000	16,500,000	16,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	2 Paket	49,708,585	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Layanan	1 Layanan	51,980,000	47,700,000	47,700,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	1 Layanan	24,980,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	708,700,000	707,250,000	707,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	1 Laporan	2,020,680,580	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	79,155,000	98,401,000	98,401,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	2 Dokumen	79,155,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Organisasi	%		%	100 %	100 %	**104,780,000**	**229,512,500**	**229,512,500**						100 %	**230,000,000**	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	104,350,000	229,532,500	229,532,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempercepat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	15 Unit	250,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	**335,625,000**	**419,330,994**	**419,550,394**						12 Dokumen	**433,403,280**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5,600,000	1,000,000	1,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	1 Laporan	17,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	330,923,000	418,330,394	418,330,394	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	1 Laporan	416,403,280	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	%		%	100 %	100 %	**70,556,000**	**80,594,800**	**80,594,800**						100 %	**28,686,900**	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	52,406,000	61,812,000	61,812,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	18 Unit	15,956,900	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	18,150,000	18,782,800	18,782,800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	21 Unit	14,730,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02			**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (BAK) Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei kepuasan Masyarakat (SKM)	% % %		% % %	81 % 97 % 80 %	81 % 97 % 80 %	**4,555,000,000**	**7,065,124,500**	**7,065,124,500**						81 % 97 % 80 %	**6,774,836,565**	
4	01	02	1.01		**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaan Organisasinya sesuai ketentuan Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	% %		% %	100 % 96 %	100 % 96 %	**1,805,000,000**	**2,742,084,500**	**2,742,084,500**						100 % 96 %	**2,567,851,369**	
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	750,000,000	954,519,500	954,519,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kelestarian daerah	ASN	1 Dokumen	1,145,703,125	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	425,000,000	737,780,000	737,780,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kelestarian daerah	ASN	1 Dokumen	621,548,440	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban kerja, dan Evaluasi Jabatan				1 Dokumen	1 Dokumen	430,000,000	1,049,895,000	1,049,895,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kelestarian daerah	ASN	1 Dokumen	795,600,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.02		**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan sesuai aturan / Ketentuan	%		%	100 %	100 %	**2,950,000,000**	**4,323,000,000**	**4,323,000,000**						100 %	**4,206,485,000**	
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kelestarian daerah	ASN	1 Dokumen	1,333,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02	1.02	01	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				1 Dokumen	1 Dokumen	900,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	1 Dokumen	1,201,825,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.02	01	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	1 Laporan	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	1 Laporan	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	800,000,000	596,050,000	596,050,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	1 Dokumen	500,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	636,960,000	636,960,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	1 Dokumen	884,668,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	01				**SEKRETARIAT DAERAH**							**5,672,269,000**	**18,800,677,218**	**18,800,677,218**							**19,980,641,752**	
4	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	%		%	84 %	84 %	**1,896,516,128**	**2,665,839,188**	**2,665,839,188**						84 %	**2,988,932,720**	
4	01	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**5,696,000**	**5,696,000**	**5,696,000**						100 %	**6,200,000**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5,696,000	5,696,000	5,696,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	4 Dokumen	6,200,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Realisasi Keuangan Biro POD	%		%	100 %	100 %	**147,900,000**	**151,800,000**	**151,800,000**						100 %	**177,000,000**	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	147,960,000	151,800,000	151,800,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemendirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	12 Dokumen	177,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Biro POD	%		%	100 %	100 %	**12,150,000**	**79,891,500**	**79,891,500**						100 %	**87,000,000**	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	7 Orang	12,150,000	79,891,500	79,891,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemendirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	7 Orang	87,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro POD	%		%	100 %	100 %	**855,890,590**	**2,141,159,000**	**2,141,159,000**						100 %	**2,142,500,000**	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	82,000,000	82,000,000	82,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemendirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	1 Paket	90,200,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45,290,590	45,290,590	45,290,590	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemendirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	1 Paket	52,100,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	90 Laporan	828,600,000	2,013,848,676	2,013,848,676		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemendirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	90 Laporan	2,200,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro POD)	%		%	100 %	100 %	**200,214,410**	**413,737,900**	**413,737,900**						100 %	**450,000,000**	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	200,214,410	413,737,900	413,737,900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemendirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	15 Unit	450,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro POD)	%		%	100 %	100 %	**596,713,720**	**795,662,720**	**795,662,720**						100 %	**796,332,720**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,850,000	3,850,000	3,850,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Non ASN	1 Laporan	4,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	592,863,720	791,832,720	791,832,720	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Non ASN	12 laporan	791,832,720	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro POD)	%		%	100 %	100 %	**77,882,000**	**77,882,900**	**77,882,000**						100 %	**90,100,000**	
4	01	01	1.09	02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	9,000,000	9,500,000	9,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	7 Unit	11,400,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	68,392,000	68,392,000	68,392,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN	12 Unit	78,700,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor		Skor	3150 Skor	3150 Skor	**3,676,752,472**	**15,134,838,832**	**15,134,838,832**						3150 Skor	**15,901,715,032**	
4	**01**	**03**	1.01		**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	Persentase meningkatnya kualitas Pemerintahan Daerah	%		%	90 %	90 %	**1,056,674,472**	**7,925,026,232**	**7,925,026,232**						90 %	**8,351,148,232**	
4	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				3 Dokumen	3 Dokumen	606,674,472	7,156,148,232	7,156,148,232		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	OPD Terkait	3 Dokumen	7,856,148,232	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				4 Dokumen	4 Dokumen	450,000,000	700,070,000	768,870,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Terkait	4 Dokumen	455,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	03	1.02		**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	Persentase terlaksanaya koordinasi dalam bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	%		%	90 %	90 %	**1,620,078,000**	**4,425,270,987**	**4,425,270,987**						90 %	**4,686,033,987**	
4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				5 Dokumen	5 Dokumen	450,053,000	1,525,045,000	1,525,045,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	OPD Terkait	5 Dokumen	1,429,045,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	600,000,000	2,652,988,987	2,652,988,987	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	OPD Terkait	4 Dokumen	2,652,988,987	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	570,045,000	649,245,000	649,245,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	OPD Terkait	3 Laporan	610,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.03		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	Persentase dokumen kerja sama dan laporan evaluasi kerja sama	%		%	100 %	100 %	**1,000,000,000**	**2,784,512,813**	**2,784,512,813**						100 %	**2,984,512,813**	
4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	1,322,469,073	1,322,469,073	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	OPD Terkait	1 Dokumen	1,422,469,073	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	616,956,000	616,956,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	OPD Terkait	1 Dokumen	678,956,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				2 Laporan	2 Laporan	350,000,000	845,087,740	845,087,740	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	OPD Terkait	2 Laporan	845,087,740	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	01				**SEKRETARIAT DAERAH**							**57,729,985,000**	**71,752,148,322**	**71,752,148,322**							**47,951,000,000**	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat	%		%	84 %	84 %	**2,782,112,264**	**3,050,928,822**	**3,050,928,822**						84 %	**2,481,000,000**	
4	01	01	1.01		**Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**149,934,000**	**191,034,000**	**191,034,000**						100 %	**116,000,000**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	26,724,000	22,814,000	22,814,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Administrasi Pimpinan, BPKAD Prov. Kaltim dan Bappeda Prov. Kaltim	2 Dokumen	20,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	52,116,000	102,116,000	102,116,800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Administrasi Pimpinan, BPKAD Prov. Kaltim dan Bappeda Prov. Kaltim	2 Dokumen	25,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	22,178,000	20,132,000	20,132,800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Administrasi Pimpinan, BPKAD Prov. Kaltim dan Bappeda Prov. Kaltim	2 Dokumen	25,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	48,816,000	45,972,000	45,972,800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Administrasi Pimpinan, BPKAD Prov. Kaltim dan Bappeda Prov. Kaltim	3 Laporan	40,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Realisasi Keuangan	%		%	92 %	92 %	**277,960,000**	**320,133,000**	**320,133,000**						92 %	**355,000,000**	
4	01	01	1.02	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	259,262,000	301,510,000	301,510,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah		12 Dokumen	340,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	18,698,000	18,623,000	18,623,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah		1 Laporan	15,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	**51,260,000**	**34,089,000**	**34,089,000**						100 %	**35,000,000**	
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	31,260,000	34,089,000	34,089,000	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah		4 Orang	35,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**1,415,880,000**	**1,449,679,782**	**1,449,679,782**						12 Bulan	**860,000,000**	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				53 Paket	53 Paket	607,725,000	619,666,282	619,666,282	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah		52 Paket	150,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	60,000,000	56,390,500	56,390,500	Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah		12 Paket	60,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	748.160.000	773.623.000	773.623.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah		12 Laporan	750.000.000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Penunjang	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**779.380.264**	**928.605.840**	**929.605.840**						12 Bulan	**785.000.000**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah		12 Laporan	20.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	44.880.000	12.480.000	12.480.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah		12 Laporan	15.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				17 Laporan	17 Laporan	711.860.264	897.125.840	897.125.840	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah		17 Laporan	750.000.000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang Kategori Baik	%		%	80 %	80 %	**118.725.000**	**126.287.000**	**126.287.000**						80 %	**150.000.000**	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	89.705.000	89.205.000	89.205.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah		10 Unit	125.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	21.020.000	37.162.000	37.162.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah		20 Unit	25.000.000	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	04			**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Prosentase kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	%		%	90 %	90 %	**54,967,872,736**	**68,701,219,700**	**68,701,219,700**						90 %	**45,550,000,000**	
4	01	04	1.01		**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	Prosentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti	%		%	90 %	90 %	**38,125,607,861**	**36,647,272,400**	**36,647,272,400**						90 %	**28,500,000,000**	
4	01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				100 Unit	100 Unit	25,444,021,861	19,439,086,000	19,439,086,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah		100 Unit	30,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				10 Lembaga	10 Lembaga	7,681,886,000	17,208,186,400	17,208,186,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah		10 Lembaga	8,500,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	04	1.02		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	Prosentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	%		%	90 %	90 %	**17,942,274,000**	**28,693,657,000**	**28,693,657,000**						90 %	**3,700,000,000**	
4	01	04	1.02	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				13 Dokumen	13 Dokumen	1,966,242,000	11,516,216,800	11,516,216,800	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah		13 Dokumen	1,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	589,910,000	749,353,000	749,353,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah		12 Dokumen	850,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				13 Dokumen	13 Dokumen	15,826,122,000	15,818,087,200	15,818,087,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah		13 Dokumen	850,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	04	1.03		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	Prosentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	%		%	90 %	90 %	**3,899,690,875**	**3,970,290,500**	**3,970,290,500**						90 %	**3,350,000,000**	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	04	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kependudukan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kependudukan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				13 Dokumen	13 Dokumen	1,896,502,875	1,896,464,300	1,896,464,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah		13 Dokumen	1,300,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	04	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				20 Dokumen	20 Dokumen	1,332,084,800	1,399,228,000	1,399,228,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Dokumen	1,300,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	04	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				12 Dokumen	12 Dokumen	671,104,800	674,578,000	674,578,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah		12 Dokumen	750,000,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	01				**SEKRETARIAT DAERAH**							**4,220,717,000**	**6,126,751,038**	**10,718,151,038**							**5,287,951,472**	
4	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Perekonomian	%		%	84 %	84 %	**1,668,717,000**	**2,081,561,158**	**2,091,561,158**						84 %	**2,097,951,472**	
4	01	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan (Biro Perekonomian)	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**45,822,000**	**45,188,200**	**45,188,200**						8 Dokumen	**80,838,800**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran				4 dokumen	4 dokumen	34,462,800	34,323,200	34,323,200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN dan stake holder terkait	4 dokumen	48,392,300	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 laporan	4 laporan	10,860,000	10,860,000	10,860,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN dan stake holder terkait	4 laporan	11,946,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**112,650,000**	**112,614,000**	**112,614,000**						3 Laporan	**131,175,000**	
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 dokumen	3 dokumen	112,650,000	112,614,000	112,614,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN dan stake holder terkait	3 dokumen	131,175,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Biro Perekonomian yang disusun sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**12,440,000**	**13,440,000**	**12,440,000**						100 %	**14,784,000**	
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 laporan	1 laporan	13,440,000	13,440,000	13,440,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN, Stakeholder terkait	1 laporan	14,784,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pelaporan Administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**22,980,000**	**22,867,500**	**22,867,500**						100 %	**28,553,872**	
4	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				25 dokumen	25 dokumen	1,200,000	1,200,000	1,200,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN Biro Perekonomian	25 dokumen	1,320,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 orang	5 orang	29,700,000	32,667,500	32,667,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN Biro Perekonomian	5 orang	25,233,872	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro Perekonomian	%		%	100 %	100 %	**728,286,000**	**957,782,858**	**957,782,858**						100 %	**968,713,600**	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	D2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 paket	50 paket	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN dan stake holder terkait	50 paket	51,788,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	D4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 paket	25 paket	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN dan stake holder terkait	25 paket	55,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	D5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 paket	2 paket	18,016,000	18,016,000	18,016,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN dan stake holder terkait	2 paket	19,817,600	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	D6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				96 eksemplar	96 eksemplar	7,680,000	7,756,800	7,756,800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN dan stake holder terkait	96 eksemplar	6,448,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	D9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 laporan	125 laporan	655,600,000	852,010,058	882,010,058	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN dan stake holder terkait	125 laporan	855,560,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Perekonomian)	%		%	100 %	100 %	**51,164,000**	**50,356,500**	**50,356,500**						100 %	**138,415,520**	
4	01	01	1.07	D6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 unit	4 unit	51,164,800	50,356,500	50,356,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN biro perekonomian	4 unit	138,415,520	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Perekonomian)	%		%	100 %	100 %	**812,930,000**	**791,764,080**	**791,764,080**						100 %	**698,554,680**	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan	1 laporan	4,200,000	4,200,000	4,200,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN Biro Perekonomian	1 laporan	1,452,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 dokumen	12 dokumen	628,730,000	787,564,080	787,564,080	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN Biro Perekonomian	12 dokumen	697,102,680	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Perekonomian)	%		%	100 %	100 %	**14,015,000**	**50,555,900**	**16,555,000**						100 %	**59,416,500**	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	25,765,000	38,303,000	38,303,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN Biro Perekonomian	1 Unit	38,341,900	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	18,250,000	18,250,000	18,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN Biro Perekonomian	25 Unit	20,005,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**08**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase Terkoordinasinya koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian	%		%	100 %	100 %	**2,560,000,000**	**6,095,189,900**	**16,626,569,900**						100 %	**3,190,000,000**	
4	**01**	**08**	1.01		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	Jumlah dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**640,000,000**	**1,291,140,900**	**1,511,140,000**						6 Dokumen	**787,500,000**	
4	01	08	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				3 dokumen	3 dokumen	320,000,000	809,140,000	809,140,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	3 dokumen	338,750,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				3 dokumen	3 dokumen	320,000,000	462,000,000	702,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	3 dokumen	990,750,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**06**	1.02		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**960,000,000**	**1,601,000,400**	**11,842,400,400**						7 Dokumen	**1,196,250,000**	
4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan				3 dokumen	5 dokumen	320,000,000	723,000,000	10,964,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regular-Gedung Olahraga Pemberian atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN, Stakeholder terkait	5 dokumen	990,750,000	Sekretariat Daerah
4	01	06	1.02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				2 dokumen	2 dokumen	320,000,000	415,000,000	415,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN, Stakeholder terkait	2 dokumen	990,750,000	Sekretariat Daerah
4	01	06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				2 dokumen	2 dokumen	320,000,000	463,000,400	463,000,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	ASN, Stakeholder terkait	2 dokumen	990,750,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**06**	1.03		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**960,000,000**	**3,173,049,500**	**2,273,049,500**						3 Dokumen	**1,196,250,000**	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				10 Dokumen	0 Dokumen 10 Dokumen	320,000,000	2,187,049,800	2,222,049,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kebutuhan daerah	Perangkat Daerah, BUMD dan BLUD terkait	0 Dokumen 10 Dokumen	998,750,000	Sekretariat Daerah
4	01	06	1.03	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	320,000,000	-414,000,000	444,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kebutuhan daerah	Perangkat Daerah, BUMD dan BLUD terkait	0 Dokumen 1 Dokumen	998,750,000	Sekretariat Daerah
4	01	06	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	320,000,000	571,999,700	606,999,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kebutuhan daerah	Perangkat Daerah, BUMD dan BLUD terkait	0 Dokumen 1 Dokumen	998,750,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	01				**SEKRETARIAT DAERAH**							**7,411,699,000**	**12,788,465,244**	**12,788,465,244**							**12,886,445,464**	
4	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan	%		%	84 %	84 %	**2,629,907,464**	**4,766,530,844**	**4,766,530,844**						84 %	**4,886,445,464**	
4	01	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Dokumen Administrasi Keuangan Biro Administrasi Pembangunan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**195,000,000**	**257,160,000**	**257,160,000**						1 Dokumen	**300,000,000**	
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	195,000,000	257,160,000	257,160,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	300,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Biro Administrasi Pembangunan	%		%	100 %	100 %	**84,200,000**	**552,972,100**	**552,972,100**						100 %	**580,000,000**	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				53 Paket	53 Paket	75,000,000	89,739,600	89,739,600	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	53 Paket	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 orang	25 orang	18,000,000	376,232,500	376,232,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	25 orang	400,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	54,800,000	87,000,000	87,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Orang	90,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Umum	%		%	100 %	100 %	**816,221,100**	**1,941,260,664**	**1,941,260,664**						100 %	**1,700,000,000**	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	6,781,600	130,588,400	130,588,400	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Paket	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	809,669,080	1,810,672,264	1,810,672,264	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	15 Laporan	1,300,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	%		%	85 %	85 %	**175,351,900**	**237,885,600**	**237,885,600**						85 %	**200,000,000**	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	175,351,900	237,885,600	237,885,600	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	17 Unit	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	85 %	85 %	**1,181,332,384**	**1,631,685,480**	**1,631,685,480**						85 %	**1,313,883,464**	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2,000,000	2,760,000	2,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	15,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dimonitoring				12 Bulan	12 Bulan	47,544,200	295,959,800	208,559,800	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan	160,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dimonitoring				12 Laporan	12 Laporan	1,131,988,784	1,420,745,680	1,420,745,680	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	1,138,883,464	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	%		%	85 %	85 %	**177,792,000**	**145,367,000**	**145,367,000**						85 %	**580,562,000**	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	17,000,000	11,499,000	11,499,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Unit	40,562,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	121,882,000	102,018,000	102,018,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Unit	250,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	45 Unit	29,310,000	21,850,000	21,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	45 Unit	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**08**			**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik, administrasi Perencanaan Daerah dan Pengendalian Kawasan Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan	% %		% %	100 % 80 %	100 % 80 %	**4,781,587,536**	**8,016,934,400**	**8,016,934,400**						100 % 80 %	**8,050,000,000**	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	08	1.01		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%		%		60 %	**3,488,767,536**	**5,545,759,200**	**5,545,759,200**						80 %	**5,500,000,000**	
4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				12 Laporan	12 Laporan	520,134,000	1,021,846,000	1,021,846,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	1,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				12 Laporan	12 Laporan	456,500,000	519,293,600	519,293,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	600,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III				6 Laporan	6 Laporan	2,934,053,536	4,004,619,600	4,004,619,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	6 Laporan	4,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	08	1.02		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	Terlaksananya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%		%		80 %	**1,292,800,000**	**2,471,175,200**	**2,471,175,200**						80 %	**2,550,000,000**	
4	01	08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Dievaluasi				1 Dokumen	1 Dokumen	346,200,000	719,592,600	719,592,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	750,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	634,000,000	1,206,291,000	1,206,291,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	1,250,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	08	1.02	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	312,600,000	345,291,600	345,291,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	550,000,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	01				**SEKRETARIAT DAERAH**							**7,563,561,000**	**10,797,870,960**	**10,797,870,960**							**7,557,107,708**	
4	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pengadaan Barang & Jasa	%		%	84 %	84 %	**2,562,838,100**	**3,555,969,060**	**3,555,969,060**						84 %	**5,582,107,708**	
4	01	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Dokumen Pelaksanaan Keuangan Biro	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**134,278,000**	**134,278,000**	**134,278,000**						1 Dokumen	**134,278,000**	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	134,270,000	134,270,000	134,270,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Seluruh Pegawai Biro	1 Dokumen	134,270,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Dokume Administrasi Kepegawaian Biro	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**217,600,000**	**222,220,000**	**222,220,000**						1 Dokumen	**514,600,000**	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	56,800,000	71,040,000	71,040,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Pegawai Biro	1 Paket	81,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 orang	20 orang	85,800,000	85,780,000	85,780,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Pegawai Biro	20 orang	420,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				11 orang	11 orang	75,000,000	65,400,000	65,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Pegawai Biro	11 orang	63,180,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum Biro	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**565,081,500**	**667,655,820**	**667,655,820**						1 Dokumen	**568,460,500**	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	140,880,000	141,054,320	141,054,320	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Pegawai Biro	2 Paket	176,988,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	55,799,500	56,379,500	56,379,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Pegawai Biro	2 Paket	16,902,500	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
A	01	01	1.06	03	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelanggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	368,372,000	690,202,000	690,202,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Pegawai Biro	20 Laporan	372,570,000	Sekretariat Daerah
A	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Dokumen Pengadaan BMD 6lin	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**203,300,000**	**562,709,605**	**562,709,605**						1 Dokumen	**851,251,651**	
A	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan				125 Unit	125 Unit	243,300,000	562,709,605	562,709,605	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Pegawai Biro	125 Unit	851,251,651	Sekretariat Daerah
A	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Dokumen Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**1,141,399,600**	**1,466,427,635**	**1,465,427,635**						1 Dokumen	**1,131,521,557**	
A	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	5,250,000	5,222,800	5,222,800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	4 Laporan	5,250,000	Sekretariat Daerah
A	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	82,767,200	82,470,700	82,470,700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	12 Laporan	77,013,800	Sekretariat Daerah
A	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan				12 Laporan	12 Laporan	1,059,900,400	1,379,734,535	1,379,734,535	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	12 Laporan	1,049,257,757	Sekretariat Daerah
A	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Dokumen Pelaksanaan Pemeliharaan BMD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**61,199,000**	**60,696,000**	**60,696,000**						1 Dokumen	**103,916,000**	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	14.000.000	13.499.000	13.499.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Pegawai Biro	1 Unit	38.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	13.499.000	13.499.000	13.499.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Pegawai Biro	1 Unit	32.216.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	33.700.000	33.700.000	33.700.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Pegawai Biro	22 Unit	33.700.000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**07**			**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Level		Level	PKP-PB Pro Aktif Level	PKP-PB Pro Aktif Level	**5,201,142,000**	**7,460,901,000**	**7,463,901,000**						PKP-PB Pro Aktif Level	**4,255,000,000**	
4	**01**	**07**	1.01		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan PBJ	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**1,462,438,000**	**2,275,962,000**	**2,275,962,000**						3 Dokumen	**1,347,256,000**	
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	356.640.000	417.852.000	417.852.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	1 Laporan	354.634.600	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				2 Laporan	2 Laporan	725.998.000	679.570.000	679.570.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	2 Laporan	607.830.000	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				2 Laporan	2 Laporan	379.800.000	978.540.000	978.540.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	2 Laporan	884.750.000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**07**	1.02		**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan LPSE	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**1,404,348,400**	**2,633,962,900**	**2,633,962,900**						3 Dokumen	**1,348,528,400**	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				2 Laporan	2 Laporan	838,640,400	1,184,267,900	1,184,267,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	2 Laporan	700,040,400	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				2 Laporan	2 Laporan	512,600,000	755,300,000	755,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	2 Laporan	330,300,000	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.02	05	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				8 Laporan	8 Laporan	865,100,000	894,415,000	894,415,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	11 Laporan	358,180,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**07**	1.03		**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	Dokumen Pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi PBJ	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**2,114,372,500**	**2,553,957,000**	**2,553,957,000**						1 Dokumen	**1,519,215,000**	
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				200 orang	200 orang	776,140,000	894,522,000	894,522,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	200 orang	421,440,000	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	677,215,000	971,875,000	971,875,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	629,811,000	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	681,017,500	887,560,000	887,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	467,960,900	Sekretariat Daerah
									TOTAL			**288,272,625,000**	**800,552,573,877**	**435,218,134,126**							**309,555,170,689**	

3.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta Upaya yang dilakukan untuk mengetahi capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedang program dimaksudkan sebagai Kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan seuatu program yang dapat dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, penjabaran rinci tentang Langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Penjabaran kegiatan yang terdapat di dalam program harus memiliki rincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dibutuhkan dalam uraian kebijakan tersebut. Program yang dirumuskan sebaiknya memnuhi kriteria yang merupakan penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana, bentuk penjabaran lebih rinci Langkah-langkah yang diambuil untuk menjabarkan kebijakan serta mengikat/mengelompokkan kegiatan sejenis.

Rencana kerja dan pendanaan secretariat daerah provinsi Kalimantan timur tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasarana sebagaimana telah ditetapkan dalam P-Renstra 2019-2023, serta mendukung Rancangan Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) 2023. Rumusan Rancana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabael 3.3 dibawah ini ;

Tabel 3. 3
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							184,843,468,890	241,577,245,745	265,549,630,065							188,792,752,973	
4	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Umum	%		%	84 %	84 %	**184,843,468,890**	**241,577,245,745**	**265,549,630,065**						84 %	**188,792,752,973**	
4	01	01	1.01		**Penyusunan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penyusunan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Biro Umum	%		%	100 %	100 %	**550,288,080**	**1,906,080**	**1,906,080**						100 %	**550,080,000**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Penyusunan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perangkat Daerah				18 Dokumen	18 Dokumen	550,288,080	1,906,080	1,906,080	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Biro Umum	18 Dokumen	550,080,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Biro Umum terlaksana dengan baik	%		%	100 %	100 %	**68,829,539,560**	**79,346,509,537**	**79,346,509,537**						100 %	**98,297,521,241**	
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				273 Orang/Bulan	273 Orang/Bulan	71,827,783,080	77,839,282,037	77,839,282,037	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Sekretariat Daerah	273 Orang/Bulan	88,303,031,881	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1,195,784,080	1,516,407,580	1,516,407,580	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Sekretariat Daerah	12 Dokumen	1,794,489,400	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Biro Umum	%		%	100 %	100 %	**1,266,629,800**	**1,165,520,080**	**1,169,820,080**						100 %	**1,240,278,800**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	504.800.000	522.800.000	522.800.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Terkait	12 Laporan	575.095.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	912.820.000	643.320.000	647.820.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Terkait	12 Laporan	693.395.660	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Biro Umum	%		%	100 %	100 %	**2,250,007,800**	**2,559,864,880**	**5,330,580,880**						100 %	**2,277,017,680**	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	494.850.000	340.660.000	454.156.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Terkait	3 Paket	550.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	1,107,477,000	1,331,556,000	1,388,560,000	Semua Kota/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Terkait	4 Dokumen	1,342,017,660	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				125 Orang	125 Orang	567,180,000	882,856,000	887,556,000	Semua Kota/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Terkait	125 Orang	385.000.000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Tersedianya Perlunjang Administrasi Umum pada Biro Umum	%		%	100 %	100 %	**24,072,815,863**	**22,311,914,550**	**30,338,174,450**						100 %	**19,949,171,819**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan				6 Paket	7 Paket	600.753.645	270.249.540	283.109.400	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Terkait	7 Paket	585.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Perlatihan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatihan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	645.103.000	457.486.100	457.486.100	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Terkait	6 Paket	675.795.800	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				225 Paket	275 Paket	7.889.312.000	5.951.319.000	2.951.119.000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Terkait	275 Paket	2.750.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	726.708.000	732.290.000	732.290.000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Terkait	14 Paket	762.520.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1920 Orang	[illegible]	Perjalan5.741.623.301	14.387.590.650	20.380.598.850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Terkait	2100 Orang	Perjalan4.275.837.219	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Sebelum	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	750,541,413	210,828,800	210,828,800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Terkait	4 Dokumen	693,800,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	526,788,440	261,764,500	261,764,500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Terkait	4 Dokumen	440,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terselenggara Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Umum	%		%	100 %	100 %	**9,271,797,093**	**50,417,206,409**	**62,679,246,088**						100 %	**8,250,000,000**	
4	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				111 Unit	122 Unit	6,825,980,000	39,607,597,600	53,760,597,600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN III, Stakeholder Terkait	122 Unit	5,500,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				150 Unit	200 Unit	4,445,057,031	7,009,838,849	8,828,646,449	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN III, Stakeholder Terkait	200 Unit	2,750,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Biro Umum	%		%	100 %	100 %	**26,715,690,869**	**26,888,206,440**	**26,541,453,448**						100 %	**23,071,252,073**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	92,000,000	83,700,000	83,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Terkait	12 Laporan	88,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proksiman Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Proksiman Rkpp Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9,400,000,000	9,774,001,000	10,574,801,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Terkait	12 Laporan	9,491,752,075	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2,550,641,600	2,655,198,400	2,559,168,800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Terkait	12 Laporan	841,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14,668,049,209	14,791,317,040	15,224,583,680	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Terkait	12 Laporan	12,693,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**16,749,820,882**	**16,989,971,949**	**26,127,988,056**						100 %	**15,451,890,875**	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				80 Unit	100 Unit	7,411,670,050	7,241,059,200	9,241,459,200	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Terkait	100 Unit	5,609,335,140	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proklirasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Proklirasi Mapu Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				477 Unit	550 Unit	1,714,667,800	856,184,000	2,381,184,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Terkait	550 Unit	1,100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	15 Unit	7,339,333,032	10,680,077,845	14,275,945,856	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Terkait	15 Unit	8,141,095,733	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Laporan	4 Laporan	286,150,000	232,250,000	232,250,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Terkait	4 Laporan	403,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan baik	%		%	100 %	100 %	**11,186,418,788**	**13,377,979,054**	**14,699,691,533**						100 %	**12,506,000,667**	
4	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	350,252,356	350,252,252	350,252,252	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	2 Orang/Bulan	275,277,636	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	187,600,000	189,470,000	189,470,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	8 Paket	207,960,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
4	01	01	1.11	02	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				6 Orang	0 Orang	870.000.000	870.000.000	870.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Menyelesaikan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	0 Orang	957.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Dana Penunjang Operasional KDH-WKDH Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan, 0 Orang/ Bulan	9.678.568.392	12.868.251.452	13.389.983.381	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Menyelesaikan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	12 Laporan 0 Orang/ Bulan	10.066.423.031	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%		%	100 %	100 %	**11.950.460.000**	**20.599.253.290**	**22.136.216.190**						100 %	**15.400.000.000**	
4	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				17 Paket	20 Paket	5.120.061.800	7.534.010.900	8.161.958.251	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	20 Paket	4.950.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	4.023.143.800	5.899.584.000	5.899.584.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	17 Paket	4.950.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				28 Paket	34 Paket	1.907.254.800	7.125.058.390	8.034.673.051	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	34 Paket	5.500.000.000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**12.793.261.000**	**21.150.358.640**	**25.249.993.913**							**10.650.593.000**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Adpem	%		%	65 %	65 %	**12.793.261.000**	**21.150.358.640**	**25.249.993.913**						65 %	**10.650.593.000**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	**819.858.000**	**752.750.000**	**964.150.000**						5 Dokumen	**919.828.000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Proyeksi Rkpd Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	724,658,000	550,000,000	782,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Dokumen	816,538,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	91,700,000	197,150,000	197,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Laporan	152,645,800	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	**158,520,000**	**447,340,900**	**455,500,000**						12 Dokumen	**253,920,000**	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	158,520,000	447,340,000	455,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	12 Dokumen	253,920,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai Berlesarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	20 Orang	20 Orang	**560,494,000**	**551,746,900**	**823,847,500**						20 Orang	**427,399,947**	
4	01	01	1.05	01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 dokumen	5 dokumen	418,494,000	382,320,000	562,969,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 dokumen	314,972,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berlesarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berlesarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	170,000,000	169,426,000	298,478,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	20 Orang	113,008,947	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Penataan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	150 Paket	150 Paket	**1,645,096,150**	**1,942,959,168**	**2,164,884,833**						150 Paket	**946,291,821**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.00	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"				150 Paket	150 Paket	129,048,040	245,304,220	345,304,220	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik; Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment			0	150 Paket	228,725,356	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.00	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	30 Paket	123,342,000	72,072,000	72,072,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	50 Paket	115,040,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.00	05	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	25,504,274	10,477,818	10,477,818	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	15 Paket	125,865,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.00	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	1,396,141,874	1,615,105,150	1,857,030,899	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	150 Laporan	476,655,477	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	20 Unit	20 Unit	**107,200,000**	**613,223,000**	**845,007,000**						20 Unit	**633,363,000**	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 unit	20 unit	107,200,000	613,223,000	845,087,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment			0	20 unit	633,363,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.05		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**1,524,477,232**	**1,965,267,200**	**1,939,071,200**						12 Laporan	**1,524,477,232**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Konservasi, Sumber Daya Air dan Lahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konservasi, Sumber Daya Air dan Lahan yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	23.780.400	23.842.800	23.842.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	23.780.400	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.498.776.833	1.870.604.480	1.864.428.480	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	1.498.776.833	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit	**148,219,000**	**55,397,800**	**60,591,800**						10 Unit	**68,173,600**	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 unit	5 unit	46.419.000	44.365.000	71.359.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 unit	40.743.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 unit	10 unit	98.800.000	9.032.000	9.832.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment			0	10 unit	27.470.800	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.13		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	**6.830.660.000**	**12.666.292.200**	**15.375.670.200**						12 Dokumen	**5.101.950.000**	
4	01	01	1.13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				12 dokumen	12 dokumen	560.660.000	650.464.000	655.464.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 dokumen	360.155.000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proklamasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.13	X2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				6 Laporan	6 Laporan	1,500,000,000	5,466,706,203	6,134,895,203	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment			01	6 Laporan	2,422,070,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.13	X2	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	2,749,800,000	8,540,123,000	8,581,370,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	2,379,467,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.14		**Pasilitasi Keprotokolan**	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**1,974,416,570**	**2,217,984,000**	**2,610,584,000**						12 Laporan	**723,714,000**	
4	01	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				12 Laporan	12 Laporan	1,033,800,000	1,386,792,000	1,386,792,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keprotokolan	12 Laporan	281,232,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.14	X2	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				6 Laporan	6 Laporan	686,026,000	546,592,000	635,592,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keprotokolan	6 Laporan	308,592,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	254,590,570	271,066,000	379,930,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keprotokolan	12 Laporan	133,890,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	01				**SEKRETARIAT DAERAH**							**5,555,666,000**	**6,261,732,000**	**6,821,792,888**							**5,555,666,000**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Layanan Biro Hukum	%		%	84 %	84 %	**1,533,066,000**	**1,857,882,000**	**2,281,002,888**						84 %	**1,461,999,000**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**3,540,000**	**8,840,000**	**8,840,000**						2 Dokumen	**4,410,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	5,540,000	3,840,000	3,040,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	4,410,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Biro Hukum	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**103,920,000**	**103,920,000**	**103,920,000**						1 Dokumen	**103,920,000**	
4	01	01	1.02	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	103,920,000	103,920,000	103,920,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Dokumen	103,920,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah laporan penatausahaan BMD	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**7,680,000**	**7,680,000**	**7,680,000**						12 Laporan	**7,680,000**	
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD				12 Laporan	12 Laporan	7,680,000	7,680,000	7,680,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	0	12 Laporan	7,680,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat	Orang		Orang	2 Orang	2 Orang	**72,000,000**	**25,689,000**	**25,689,000**						2 Orang	**50,000,000**	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	72,000,000	25,689,000	25,689,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	0	2 Orang	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Pengadaan ATK	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**732,654,656**	**538,603,248**	**1,281,603,248**						12 Laporan	**642,087,551**	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	901,006,000	112,555,000	142,555,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Provinsi Kalimantan Timur dan Luar Provinsi	12 Laporan	81,875,551	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Pos Makanan dan Minuman yang disediakan				800 Pos	800 Pos	66,000,000	7,200,000	15,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Provinsi Kalimantan Timur dan Luar Provinsi	800 Pos	60,450,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Laporan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	27,426,656	40,123,737	40,123,737	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Provinsi Kalimantan Timur dan Luar Provinsi	12 Laporan	33,050,200	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi				51 Laporan	51 Laporan	135.800.000	778.224.511	1.084.324.511	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Stabilitas Politik/Keamanan Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Provinsi Kalimantan Timur dan Luar Provinsi	51 Laporan	500.000.000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Hukum	%		%	100 %	100 %	**108.912.000**	**130.052.000**	**130.052.000**						100 %	**169.255.505**	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan				10 Unit	10 Unit	108.912.000	124.052.000	130.052.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	0	10 Unit	169.255.505	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Hukum)	%		%	100 %	100 %	**530.000.344**	**626.798.560**	**626.798.560**						100 %	**458.782.944**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bendaloss yang disediakan				500 Lembar	500 Lembar	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	0	500 Lembar	5.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis				12 Dokumen	12 Dokumen	495.035.544	621.798.560	621.798.560	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	0	12 Dokumen	453.782.944	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Hukum)	%		%	100 %	100 %	**25.550.000**	**21.380.000**	**21.380.000**						100 %	**24.750.000**	
4	01	01	1.09	08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	25.550.000	21.380.000	21.380.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	30 Unit	24.750.000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**05**			**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	Persentase terlaksana Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi, Kab/Kota serta Penanganan Litigasi dan Non Litigasi dan HAM	%		%	100 %	100 %	**4.000.000.000**	**4.423.850.000**	**4.620.710.000**						100 %	**4.094.000.000**	
4	**01**	**05**	1.01		**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Provinsi dan Kab/Kota	%		%	100 %	100 %	**2.600.000.000**	**2.144.350.000**	**2.766.350.000**						100 %	**2.660.000.000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				90 Dokumen	90 Dokumen	880.000.000	884.350.000	904.350.000	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	90 Dokumen	850.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				650 Dokumen	650 Dokumen	390.000.000	930.000.000	300.000.000	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	650 Dokumen	800.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Bahan Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				160 Dokumen	160 Dokumen	680.000.000	680.000.000	600.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	160 Dokumen	600.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				350 Dokumen	350 Dokumen	880.000.000	950.000.000	800.000.000	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	350 Dokumen	880.000.000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**05**	1.02		**Fasilitasi Bantuan Hukum**	Jumlah dokumen penanganan perkara/sengketa hukum	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	**1,400,000,000**	**1,070,500,000**	**1,070,502,000**						10 Dokumen	**1,444,000,000**	
4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				15 Kasus	15 Kasus	880.000.000	1,119,500,000	1,316,160,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dalam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Pemda	15 Kasus	880.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				5 Kasus	5 Kasus	580.000.000	560.000.000	560.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dalam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Pemda	5 Kasus	544.000.000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**6,472,150,000**	**9,282,823,894**	**9,282,823,894**							**11,837,007,220**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Organisasi	%		%	84 %	84 %	**1.917.150.000**	**2.217.199.394**	**2.217.199.394**						84 %	**4.562.670.655**	
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**110.000.000**	**115.440.200**	**115.440.200**						1 Laporan	**215.990.110**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000	115,440,200	115,440,200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Stabilitas Politik,Hukum dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Pengelola Keuangan Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim	1 Dokumen	216,990,310	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**10,230,000**	**10,230,000**						100 %	**41,400,000**	
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,230,000	10,230,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Stabilitas Politik,Hukum dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	BMD pada Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim	1 Laporan	41,400,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	7 Orang	7 Orang	**108,960,000**	**170,997,500**	**170,997,500**						7 Orang	**201,850,000**	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	27,200,000	60,217,500	60,217,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN pada Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim	2 Paket	27,200,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	5 Orang	81,760,000	110,780,000	110,780,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN pada Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim	5 Orang	234,450,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro Organisasi	%		%	100 %	100 %	**1,174,984,000**	**1,183,674,800**	**1,183,674,800**						100 %	**2,200,580,160**	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				3 Paket	3 Paket	53,121,800	57,473,800	57,473,800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	5 Paket	37,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	281,000,800	278,930,000	278,930,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	2 Paket	833,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	D5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	21.928.000	16.500.000	16.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	2 Paket	49.700.585	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	D8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	31.900.000	41.790.000	41.790.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	1 Laporan	24.982.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	D9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	106.700.000	107.250.000	107.250.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	1 Laporan	2.039.684.580	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	T1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	79.155.000	98.401.000	98.401.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	2 Dokumen	79.155.000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Organisasi)	%		%	100 %	100 %	**104.760.000**	**229.552.500**	**229.552.500**						100 %	**250.000.000**	
4	01	01	1.07	D6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	104.760.000	229.552.500	229.552.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Stabilitas Politik,Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	15 Unit	250.000.000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	**335.923.000**	**419.330.394**	**419.330.394**						12 Dokumen	**433.483.280**	
4	01	01	1.08	D1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.800.000	1.680.000	1.680.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	1 Laporan	17.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	D4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	330.123.000	418.330.394	418.330.394	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	1 Laporan	416.483.280	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Proyeksi Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
4	01	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	%		%	100 %	100 %	**70,556,000**	**80,594,000**	**80,594,000**						100 %	**28,696,000**	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	32,400,000	81,812,000	61,812,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	18 Unit	13,896,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	38,150,000	18,782,000	18,782,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	21 Unit	14,740,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**			**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	Persentase Perangkat Daerah/Nilai SAKIP nya meningkat/oleh Predikat Minimal (BAIK) Persentase Perangkat Daerah yang diberlakukan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	% % %		% % %	81 % 97 % 80 %	81 % 97 % 80 %	**4,555,000,000**	**7,065,124,500**	**7,065,124,500**						81 % 97 % 80 %	**6,774,336,565**	
4	**01**	**02**	1.01		**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaan Organisasinya sesuai Ketentuan Persentase Perangkat Daerah yang diberlakukan sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	% %		% %	100 % 96 %	100 % 96 %	**1,805,000,000**	**2,742,094,500**	**2,742,094,500**						100 % 96 %	**2,987,851,565**	
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	750,000,000	950,219,500	950,219,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	1 Dokumen	1,145,703,125	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	425,000,000	737,780,000	737,780,000	Semua Kota/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	1 Dokumen	63,549,440	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proiksian Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban kerja, dan Evaluasi Jabatan				1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	1,049,995,000	1,349,995,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	1 Dokumen	798,600,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**	1.02		**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan sesuai aturan / ketentuan	%		%	100 %	100 %	**2,000,000,000**	**4,323,010,000**	**6,323,010,000**						100 %	**4,200,685,000**	
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	1 Dokumen	1,320,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				1 Dokumen	1 Dokumen	900,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	1 Dokumen	1,201,821,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	1 Laporan	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	1 Laporan	600,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatausaha Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	534,050,000	534,050,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	1 Dokumen	500,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	636,960,000	636,960,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	1 Dokumen	484,600,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**5,673,269,000**	**10,800,677,218**	**10,800,677,218**							**19,910,647,752**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	%		%	84 %	84 %	**1,990,516,520**	**3,665,039,186**	**3,665,039,186**						84 %	**3,948,952,720**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2022	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**5,696,000**	**5,696,000**	**5,696,000**						100 %	**6,200,000**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5,696,000	5,696,000	5,696,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	4 Dokumen	6,200,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Realisasi Keuangan Biro POD	%		%	100 %	100 %	**147,960,000**	**151,800,000**	**151,800,000**						100 %	**177,000,000**	
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	147,960,000	151,800,000	151,800,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	12 Dokumen	177,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Biro POD	%		%	100 %	100 %	**12,150,000**	**79,891,500**	**79,891,500**						100 %	**87,000,000**	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	7 Orang	12,150,000	79,891,500	79,891,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	7 Orang	87,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro POD	%		%	100 %	100 %	**955,990,350**	**2,141,139,000**	**2,141,139,000**						100 %	**2,342,100,000**	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	82,000,000	82,000,000	82,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	1 Paket	90,200,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45,230,350	45,230,350	45,230,350	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	1 Paket	52,100,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	90 Laporan	820,800,000	2,013,848,676	2,013,848,676	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	90 Laporan	2,200,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bmn PODI)	%		%	100 %	100 %	**200.214.410**	**413.737.900**	**413.737.900**						100 %	**450.000.000**	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan				15 Unit	15 Unit	200,214,410	413,737,900	413,737,900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	15 Unit	450,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bmn PODI)	%		%	100 %	100 %	**596.711.720**	**795.682.720**	**795.682.720**						100 %	**796.332.720**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,092,800	1,650,000	1,650,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Non ASN	1 Laporan	1,650,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	592,063,720	791,832,720	791,832,720	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Non ASN	12 laporan	791,832,720	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Bmn PODI)	%		%	100 %	100 %	**77.892.000**	**77.092.000**	**77.892.000**						100 %	**90.900.000**	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	9,500,800	9,500,000	9,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	7 Unit	11,400,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	68,592,900	68,592,000	68,592,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN	12 Unit	78,700,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proklamasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Proklamasi Misi Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	01	00			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	Persentase meningkatnya kualitas Pemerintahan Daerah Persentase pengendalian penerapan SPIP Persentase terlaksananya koordinasi dalam bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	% % %		% % %		90 % 100 % 90 %	3,878,752,072	19,134,038,012	19,138,838,012						80 % 100 % 80 %	19,801,715,012	
4	01	03	1.01		**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	Persentase meningkatnya kualitas Pemerintahan Daerah	%		%	90 %	90 %	1,056,634,472	7,925,026,232	7,925,926,232						80 %	8,251,148,232	
2	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				6 Dokumen	3 Dokumen	856,674,472	7,156,140,232	7,156,148,232	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	OPD Teknis	3 Dokumen	7,816,148,232	Sekretariat Daerah
2	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				4 Dokumen	4 Dokumen	800,000,000	788,870,000	788,878,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Teknis	4 Dokumen	435,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.02		**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	Persentase terlaksananya koordinasi dalam bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	%		%	90 %	90 %	1,620,878,000	4,425,278,987	4,425,278,987						80 %	4,686,833,987	
2	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				6 Dokumen	3 Dokumen	850,003,000	1,323,085,000	1,323,085,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Stabilitas Politik dan Keamanan Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	OPD Teknis	3 Dokumen	1,323,085,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Difasilitasikan				4 Dokumen	4 Dokumen	600,000,000	2,452,988,987	2,452,988,987	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Stabilitas Politik dan Keamanan Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	OPD Teknis	4 Dokumen	2,452,988,987	Sekretariat Daerah
2	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	570,045,000	649,245,000	649,245,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Stabilitas Politik dan Keamanan Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	OPD Teknis	3 Laporan	610,080,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.03		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	Persentase dokumen kerja sama dan laporan evaluasi kerja sama	%		%	100 %	100 %	1,000,000,000	2,784,532,613	2,784,532,613						100 %	2,944,532,613	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	1.322.469.073	1.322.469.073	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	OPD Terkait	1 Dokumen	1.422.469.073	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	616.956.000	616.956.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	OPD Terkait	1 Dokumen	679.956.000	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				2 Laporan	2 Laporan	310.000.000	885.087.740	885.087.740	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	OPD Terkait	2 Laporan	885.087.740	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	01				**SEKRETARIAT DAERAH**							**57,729,955,000**	**71,752,148,322**	**85,690,408,322**							**67,951,000,000**	
4	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat	%		%	84 %	84 %	**2,762,112,264**	**3,050,928,622**	**3,050,928,622**						84 %	**2,401,000,000**	
4	01	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang sepat waktu	%		%	100 %	100 %	**149,934,000**	**191,934,000**	**191,934,000**						100 %	**116,000,000**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	26,724,000	22,814,000	22,814,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Administrasi Pimpinan, BPKAD Prov. Kaltimtara, Bappeda Prov. Kaltim	2 Dokumen	28,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	52,116,000	102,116,000	102,116,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Administrasi Pimpinan, BPKAD Prov. Kaltimtara, Bappeda Prov. Kaltim	2 Dokumen	25,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	22.178.000	20.132.000	20.132.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Administrasi Pimpinan, BPKAD Prov. Kaltim dan Bappeda Prov. Kaltim	2 Dokumen	25.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	49.974.000	45.972.000	45.972.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Administrasi Pimpinan, BPKAD Prov. Kaltim dan Bappeda Prov. Kaltim	3 Laporan	40.000.000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Realisasi Keuangan	%		%	90 %	92 %	**277.960.000**	**220.122.000**	**220.122.000**						92 %	**455.000.000**	
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	250.262.000	301.510.000	301.510.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		12 Dokumen	340.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.686.000	18.623.000	18.623.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	15.000.000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	**31.260.000**	**24.989.000**	**24.989.000**						100 %	**25.000.000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.03	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	31,260,000	34,088,000	34,089,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		4 Orang	35,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.36		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**1,415,291,000**	**1,609,679,782**	**1,449,679,782**						12 Bulan	**960,000,000**	
4	01	01	1.36	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				53 Paket	53 Paket	667,725,000	619,666,282	619,666,282	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		53 Paket	150,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.36	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	60,000,000	56,990,500	56,990,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		12 Paket	60,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.36	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	748,100,000	773,623,000	773,625,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		12 Laporan	750,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.38		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Penunjang	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**778,140,264**	**829,825,860**	**629,005,860**						12 Bulan	**705,000,000**	
4	01	01	1.38	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		12 Laporan	20,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.38	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	44,850,000	12,488,000	12,490,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		12 Laporan	15,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.38	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				17 Laporan	17 Laporan	713,490,264	897,125,840	697,125,840	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		17 Laporan	750,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
4	01	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang Kategori Baik	%		%	90 %	90 %	**110,725,000**	**126,287,000**	**126,287,000**						90 %	**150,000,000**	
4	01	01	1.09	02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	89,725,000	89,287,000	89,287,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		10 Unit	125,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	21,000,000	37,162,000	37,162,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		20 Unit	25,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	04			**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Prosentase kebijakan di bidang kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	%		%	90 %	90 %	**54,967,872,716**	**65,701,219,784**	**92,639,479,700**						90 %	**45,550,000,000**	
4	01	04	1.01		**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	Prosentase rumusan kebijakan di bidang binamental spiritual yang ditindaklanjuti	%		%	90 %	90 %	**33,125,987,861**	**36,647,272,400**	**59,980,492,400**						90 %	**38,500,000,000**	
4	01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				100 Unit	100 Unit	25,604,031,861	19,339,084,000	41,864,084,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		100 Unit	30,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				10 Lembaga	10 Lembaga	7,081,686,000	17,308,188,400	18,034,408,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		10 Lembaga	8,500,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	04	1.03		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	Prosentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	%		%	90 %	90 %	**17,962,274,000**	**20,893,657,000**	**28,292,197,000**						90 %	**8,700,000,000**	
4	01	04	1.03	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				13 Dokumen	13 Dokumen	1,368,342,000	11,516,216,000	11,731,156,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		13 Dokumen	2,000,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proklamasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	04	1.03	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	709,910,000	709,910,000	709,910,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		12 Dokumen	800,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	04	1.02	01	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				12 Dokumen	12 Dokumen	13,826,122,000	15,816,067,200	15,816,067,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		12 Dokumen	850,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**04**	1.05		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	Presentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang diimplementasikan	%		%	90 %	90 %	**3,899,690,875**	**3,970,290,500**	**4,558,790,500**						90 %	**5,550,000,000**	
4	01	04	1.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kependudukan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kependudukan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				13 Dokumen	13 Dokumen	1,896,532,875	1,896,484,500	2,284,984,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		13 Dokumen	1,300,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	04	1.05	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				20 Dokumen	20 Dokumen	1,352,884,000	1,399,228,000	1,399,228,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Dokumen	1,300,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	04	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perlabuhan	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perlabuhan				12 Dokumen	12 Dokumen	671,150,000	674,378,000	674,378,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		12 Dokumen	750,000,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**4,228,717,800**	**6,126,751,030**	**18,718,151,030**							**5,287,551,472**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proklamasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Perekonomian	%		%	84 %	84 %	**1,668,717,000**	**2,061,561,136**	**2,051,561,136**						84 %	**2,097,551,472**	
4	01	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan (Biro Perekonomian)	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**45,322,000**	**45,183,200**	**45,183,200**						8 Dokumen	**60,338,300**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran				4 dokumen	4 dokumen	34,462,000	34,323,200	34,323,200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN dan stake holder terkait	4 dokumen	48,338,300	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 laporan	4 laporan	10,860,000	10,860,000	10,860,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN dan stake holder terkait	4 laporan	11,046,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**112,650,000**	**112,614,000**	**112,614,000**						3 Laporan	**121,173,000**	
4	01	01	1.02	06	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyajian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penyajian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 dokumen	3 dokumen	112,650,000	112,614,000	112,614,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN dan stake holder terkait	3 dokumen	101,173,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah Biro Perekonomian yang disusun secara Lengkap	%		%	100 %	100 %	**13,440,000**	**13,440,000**	**13,440,000**						100 %	**14,784,000**	
4	01	01	1.03	08	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 laporan	1 laporan	13,440,000	13,440,000	13,440,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN, Stakeholder terkait	1 laporan	14,784,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**50,900,000**	**55,867,500**	**55,867,500**						100 %	**26,553,072**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proklamasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Proklamasi Misi Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pegawai				25 dokumen	25 dokumen	1,200,000	1,200,000	1,200,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Biro Perekonomian	25 dokumen	1,320,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 orang	3 orang	25,700,000	32,867,500	32,867,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Biro Perekonomian	3 orang	25,235,872	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro Perekonomian	%		%	100 %	100 %	**728,286,000**	**957,782,858**	**957,782,858**						100 %	**968,718,600**	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 paket	93 paket	59,000,000	52,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN dan stake holder terkait	50 paket	51,788,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 paket	25 paket	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN dan stake holder terkait	25 paket	33,340,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 paket	3 paket	18,016,000	18,016,000	18,016,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN dan stake holder terkait	2 paket	19,817,600	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				96 eksemplar	96 eksemplar	7,660,000	7,756,800	7,756,800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN dan stake holder terkait	96 eksemplar	8,440,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 laporan	125 laporan	833,000,000	852,010,000	852,010,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN dan stake holder terkait	125 laporan	855,340,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Perekonomian)	%		%	100 %	100 %	**51,164,000**	**50,356,500**	**50,356,500**						100 %	**138,455,920**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.07	XX	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan				4 unit	4 unit	51,164,000	50,356,500	50,356,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Biro perekonomian	4 unit	138,415,320	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Perekonomian)	%		%	100 %	100 %	**632,998,000**	**751,764,980**	**751,764,000**						100 %	**698,554,680**	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan	1 laporan	4,200,000	4,200,000	4,200,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Biro Perekonomian	1 laporan	1,452,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadakan				12 dokumen	12 dokumen	626,798,000	787,564,080	787,564,080	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Biro Perekonomian	12 dokumen	697,102,680	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Perekonomian)	%		%	100 %	100 %	**66,000,000**	**66,000,000**	**66,000,000**						100 %	**69,450,000**	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinnya				1 Unit	1 Unit	35,785,000	38,303,000	38,303,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Biro Perekonomian	1 Unit	30,341,500	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	XX	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	18,298,000	18,350,000	18,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Biro Perekonomian	25 Unit	20,075,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**06**			**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN**	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian	%		%	100 %	100 %	**2,560,000,000**	**6,893,189,900**	**10,626,589,900**						100 %	**3,190,000,000**	
4	**01**	**06**	1.01		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	Jumlah dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**640,000,000**	**1,291,140,000**	**1,511,140,000**						6 Dokumen	**797,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				3 dokumen	3 dokumen	320,000,000	800,140,000	800,140,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	3 dokumen	388,750,000	Sekretariat Daerah
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				3 dokumen	3 dokumen	320,000,000	482,000,000	702,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	3 dokumen	388,750,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**06**	1.02		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**960,000,000**	**1,401,000,400**	**11,982,400,400**						7 Dokumen	**1,196,250,000**	
4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, kehutanan, kelautan dan Perikanan				3 dokumen	5 dokumen	320,000,000	725,000,000	10,964,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik Bidang Pendidikan Regular-lanjutan Olahraga Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN, Stakeholder terkait	3 dokumen	388,750,000	Sekretariat Daerah
4	01	06	1.02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				2 dokumen	2 dokumen	320,000,000	415,000,000	415,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN, Stakeholder terkait	2 dokumen	388,750,000	Sekretariat Daerah
4	01	06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				2 dokumen	2 dokumen	320,000,000	453,000,400	403,000,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	ASN, Stakeholder terkait	2 dokumen	388,750,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**06**	1.03		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**960,000,000**	**3,173,049,500**	**3,273,049,500**						3 Dokumen	**1,196,250,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	08	1.03	D1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha					10 Dokumen	120,000,000	2,167,849,000	2,222,849,000	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, BUMD dan BLUD terkait	10 Dokumen	330,750,000	Sekretariat Daerah
4	01	08	1.03	D2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi					1 Dokumen	520,000,000	414,000,000	444,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, BUMD dan BLUD terkait	1 Dokumen	330,750,000	Sekretariat Daerah
4	01	08	1.03	D4	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah					1 Dokumen	520,000,000	571,999,700	606,999,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, BUMD dan BLUD terkait	1 Dokumen	330,750,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**7,411,495,000**	**12,783,465,244**	**14,383,465,244**							**12,443,883,464**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan	%		%	84 %	84 %	**2,625,907,464**	**4,760,550,844**	**5,018,758,694**						84 %	**4,595,883,464**	
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Dokumen Administrasi Keuangan Biro Administrasi Pembangunan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**191,000,000**	**257,160,000**	**257,160,000**						1 Dokumen	**300,000,000**	
4	01	01	1.02	D3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	191,000,000	257,160,000	257,160,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksanaanya Administrasi Kepegawaian pada Biro Administrasi Pembangunan	%		%	100 %	100 %	**84,300,000**	**552,972,100**	**552,972,100**						100 %	**580,000,000**	
4	01	01	1.05	D2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				53 Paket	53 Paket	15,000,000	88,739,600	88,739,600	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	53 Paket	90,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	D9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 orang	25 orang	14,400,000	478,213,500	478,213,500	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	25 orang	480,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	54.800.000	87.800.000	87.800.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Orang	90.000.000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Pemngkat Daerah**	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Umum	%		%	100 %	100 %	**816,261,180**	**1,941,260,864**	**2,118,072,914**						100 %	**1,700,000,000**	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	6,787,800	130,585,400	130,585,400	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Paket	280,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	03	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	609,440,900	1,018,872,264	1,987,484,514	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	15 Laporan	1,100,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Bln Aslinya	%		%	85 %	85 %	**175,351,900**	**217,885,600**	**237,885,600**						85 %	**200,000,000**	
4	01	01	1.07	08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	175,351,900	217,885,600	237,885,600	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	17 Unit	280,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	**1.09**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	85 %	85 %	**1,181,332,334**	**1,631,885,480**	**1,631,885,480**						85 %	**1,813,203,464**	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2,930,000	2,780,000	2,780,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	15,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	47,344,200	208,359,000	208,359,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan	160,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,131,988,134	1,420,743,880	1,420,743,880	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	1,138,880,464	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik (Biro Administrasi Pembangunan)	%		%	85 %	85 %	**177,792,000**	**145,967,000**	**220,742,000**						85 %	**100,000,000**	
4	01	01	1.01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	17,000,000	11,499,000	16,874,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	121,887,000	102,018,000	152,518,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Unit	210,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	45 Unit	89,410,000	31,950,000	51,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	45 Unit	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**08**			**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik, administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan	% %		% %	100 % 80 %	100 % 80 %	**4,781,587,536**	**6,016,954,400**	**9,344,747,150**						100 % 80 %	**8,050,000,000**	
4	01	08	1.01		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%		%		80 %	**3,488,787,536**	**5,545,758,200**	**8,066,811,200**						80 %	**5,500,000,000**	
4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				12 Laporan	12 Laporan	528,254,000	1,821,848,000	1,117,246,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	1,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				12 Laporan	12 Laporan	498,500,000	519,293,800	569,393,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	500,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III				6 Laporan	0 Laporan 6 Laporan	2.564.033.336	4.804.619.800	4.460.171.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	6 Laporan 6 Laporan	4.000.000.000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**08**	1.02		**Pelaporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%		%		50 %	**1.252.000.000**	**2.471.175.200**	**3.277.935.959**						80 %	**2.550.000.000**	
4	01	08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Dievaluasi				1 Dokumen	1 Dokumen	346.200.000	719.592.600	719.592.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	750.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	634.000.000	1.206.291.600	1.588.851.713	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	1.250.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	08	1.02	03	Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	312.800.000	545.291.600	970.291.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	550.000.000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**7.563.981.900**	**10.797.870.900**	**10.832.070.959**							**7.557.197.700**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pengadaan Barang & Jasa	%		%	84 %	84 %	**2.362.836.100**	**3.333.968.000**	**3.368.069.060**						84 %	**3.302.197.700**	
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Dokumen Pelaksanaan Keuangan Biro	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**134.270.000**	**134.270.000**	**134.270.000**						1 Dokumen	**134.270.000**	
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	134.270.000	134.270.000	134.270.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Biro	1 Dokumen	134.270.000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Dokumen Administrasi Kepegawaian Biro	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**217.600.000**	**222.220.000**	**222.220.000**						1 Dokumen	**514.680.000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	56.800.000	71.040.000	71.040.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Pegawai Biro	1 Paket	31.500.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 orang	20 orang	85.800.000	85.780.000	85.780.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Pegawai Biro	20 orang	420.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				11 orang	11 orang	74.000.000	66.480.000	66.480.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Pegawai Biro	11 orang	66.180.000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum Biro	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**565,061,100**	**887,655,820**	**887,655,820**						1 Dokumen	**566,460,300**	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	140.890.000	141.654.320	141.654.320	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Pegawai Biro	2 Paket	170.588.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	53.790.500	56.379.500	56.379.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Pegawai Biro	2 Paket	16.982.500	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	368.372.000	698.282.000	698.282.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Pegawai Biro	20 Laporan	572.570.800	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Dokumen Pengadaan BMD Biro	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**243,300,000**	**562,709,605**	**597,709,605**						1 Dokumen	**851,251,651**	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				125 Unit	126 Unit	243.300.000	562.709.605	597.709.605	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Pegawai Biro	126 Unit	851.251.651	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Dokumen Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**1,143,399,600**	**1,468,427,635**	**1,466,427,635**						1 Dokumen	**1,151,521,557**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.00	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	5,250,000	5,232,400	5,232,400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	4 Laporan	5,250,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.00	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibiayakan				12 Laporan	12 Laporan	82,767,200	82,470,700	82,470,700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	12 Laporan	77,015,800	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.00	06	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan				12 Laporan	12 Laporan	1,053,080,400	1,078,744,535	1,078,744,535	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	12 Laporan	1,049,217,757	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Dokumen Pelaksanaan Pemeliharaan BMD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**61,199,000**	**60,698,000**	**60,698,000**						1 Dokumen	**103,916,000**	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	14,000,000	13,499,000	13,499,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Pegawai Biro	1 Unit	38,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	15,099,000	13,499,000	13,499,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Pegawai Biro	1 Unit	32,216,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	33,700,000	33,700,000	33,700,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Pegawai Biro	22 Unit	33,700,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**07**			**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (LKPBJ)	Level		Level	PKP-PB Pra Akhir Level	PKP-PB Pra Akhir Level	**5,201,142,000**	**7,463,901,900**	**7,463,901,900**						PKP-PB Pra Akhir Level	**4,255,000,000**	
4	**01**	**07**	1.01		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan PBJ	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**1,462,430,000**	**2,275,962,000**	**2,275,962,000**						3 Dokumen	**1,347,256,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	350,640,000	417,052,000	417,052,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	1 Laporan	354,634,000	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				2 Laporan	2 Laporan	725,990,000	875,570,000	875,570,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	2 Laporan	607,810,000	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				3 Laporan	2 Laporan	879,800,000	970,500,000	970,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	2 Laporan	884,792,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**07**	1.02		**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan UPBJ	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**1,604,340,400**	**2,633,562,900**	**2,633,562,900**						5 Dokumen	**1,380,528,400**	
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				2 Laporan	2 Laporan	808,640,400	1,384,267,900	1,384,267,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	2 Laporan	700,040,400	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				2 Laporan	2 Laporan	312,600,000	755,300,000	755,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	2 Laporan	330,360,000	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				3 Laporan	3 Laporan	493,100,000	694,415,000	694,415,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	3 Laporan	350,188,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**07**	1.03		**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	Dokumen Pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi PBJ	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**2,124,372,500**	**2,353,557,000**	**2,353,557,000**						1 Dokumen	**1,319,219,000**	
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				200 orang	200 orang	776,140,500	894,502,000	894,502,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	200 orang	421,640,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	677.215.000	971.875.000	971.875.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	629.815.000	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.03	03	Penyelenggaran, konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggran, konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	681.017.500	687.360.000	687.360.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	467.960.000	Sekretariat Daerah
									TOTAL			293.272.025.000	400.552.573.677	468.129.313.402							393.514.688.000	

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja yang berupa penambahan anggaran ini dususun dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, dan isu-isu strategis dalam mengakomodir seluruh program dan kegiatan Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Tambahan anggaran yang dimaksud dipergunakan agar dapat merealisasikan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun 2023 guna menghasilkan outcome dan dalam rangka perbaikan SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Melalui Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 guna mencapai target program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sinergitas pihak yang terkait dengan Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian dokumen perencanaan ini disusun dan semoga dapat menjadi acuan serta pertimbangan dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sebagai bahan evaluasi Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Samarinda, September 2023

SEKRETARIS DAERAH

Dra.SRI WAHYUNI, MPP
Pembina Utama Madya IV/d
NIP197012291990032003

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) adalah serangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang berisikan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, yaitu meliputi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Untuk kegiatan yang menyangkut aktivitas kedewanan belum dapat dilaksanakan karena adanya pengurangan anggaran sehingga belum dapat mengakomodir seluruh kegiatan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, baik pada bidang pembentukan peraturan daerah provinsi, penganggaran, maupun pengawasan.

Seluruh aktivitas Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2023 lebih difokuskan pada kegiatan yang bersifat rutinitas kesekretariatan. Oleh karena itu, agar dapat mendukung tugas dan fungsi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 serta pelaksanaan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, maka diharapkan adanya penambahan anggaran pada Tahun Anggaran 2023 ini.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini berdasarkan landasan hukum sebagai dasar penyusunannya sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Akhir Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
13. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023:

1.3. Maksud dan Tujuan

- *Maksud*
    1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.
    2. Pengoptimalan tugas dan fungsi serta peranan Sekretariat DPRD Kalimantan timur dalam menunjang kegiatan kedewanan

seperti Pembentukan Perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) Sekretariat DPRD untuk merumuskan dan memaparkan arah program dan kegiatan untuk Tahun 2023 yang efektif dan efisien untuk mewujudkan tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) 2022 telah memperhitungkan besaran organisasi dan memperhitungkan faktor – faktor antara lain :

a. Kemampuan Keuangan Daerah.
b. Cakupan tugas yang meliputi sasaran kegiatan yang harus dicapai.
c. Jenis dan banyaknya tugas.
d. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis.
e. Potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani.
f. Fasilitasi kegiatan kedewanan.
g. Sarana dan prasarana penunjang tugas kedewanan.

- *Tujuan*

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja dalam pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Tujuan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran dari misi yang ada di RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Untuk Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur menjabarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur yaitu misi 5 “Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik”.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. Pendahuluan;

II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan (Renja - P);
III. Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Perangkat Daerah;
IV. Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TA 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Proses penyusunan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 merupakan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai program pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dimana program ini diharapkan dapat menyesuaikan dengan Renstra Perubahan (2019-2023), visi dan misi serta program kerja dan disesuaikan dengan pagu anggaran indikatif pada Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah (RKPD - P) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Renja ini juga tidak lepas dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu yang mengacu pada hasil laporan kinerja/realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur ditunjang dengan Urusan Perangkat Daerah dengan ruang lingkup kegiatannya. Selanjutnya evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah itu sendiri adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk evaluasi perencanaan periode 1 tahun. Evaluasi pelaksanaan rencana yang dimaksud disini adalah evaluasi program dan kegiatan Tahun 2023 didasarkan pada hasil penetapan APBD - Perubahan tahun 2023 Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

TABEL 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur.

Laporan Renja Triwulan 2 2023 Sekretariat DPRD Provinsi											
Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Dan Pagu 2022 Renja**			**Target Kinerja Dan Pagu 2023 Renja**			**Realisasi 2023**		**Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023**	
								Triwulan 2			
1	**2**	**3**			**4**			**5**		**6**	
		K		**RP**	**K**		**RP**	**K**	**RP**	**K**	**RP**
Sekretariat DPRD Provinsi				0			Rp200.000.000.000,00		Rp124.807.149.061,00		62,40357
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD		00	0	81	00	Rp117.838.471.000,00	83,35	Rp63.849.745.788,00	102,90123	54,184126
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	0	100	%	Rp1.306.492.400,00	43	Rp791.089.230,00	43	60,550619
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen	0	9	Dokumen	Rp263.900.000,00	2	Rp217.070.950,00	22,222222	82,255002

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	1	Dokumen	Rp21.219.600,00	0	Rp97.816.200,00	0	460,97099
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	0	1	Dokumen	Rp47.720.000,00	0	Rp94.127.620,00	0	197,24983
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	0	1	Dokumen	Rp20.994.000,00	1	Rp13.370.000,00	100	63,684862
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	0	1	Dokumen	Rp33.600.000,00	0	Rp0,00	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan	0	1	laporan	Rp449.059.000,00	1	Rp175.001.460,00	100	38,970705

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	0	2	Laporan	Rp469.999.800,00	1	Rp193.703.000,00	50	41,213422
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	0	100	%	Rp13.854.483.362,00	50	Rp6.538.267.927,00	50	47,192434
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang / Bulan	0	980	Orang / Bulan	Rp12.307.643.762,00	490	Rp5.746.633.846,00	50	46,691584
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen	0	12	Dokumen	Rp948.640.000,00	6	Rp438.411.502,00	50	46,214739
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen	0	12	Dokumen	Rp260.395.800,00	6	Rp158.026.300,00	50	60,686962
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan	0	12	Laporan	Rp337.803.800,00	6	Rp195.196.279,00	50	57,78392
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara		%	0	100	%	Rp689.100.000,00	75	Rp569.241.676,00	75	82,606541

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	64	Dokumen	0	64	Dokumen	Rp689.100.000,00	3	Rp569.241.676,00	4,6875	82,606541
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	0	100	%	Rp845.280.000,00	60	Rp410.828.280,00	60	48,602626
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	290	Unit	0	290	Unit	Rp65.385.000,00	0	Rp4.880.000,00	0	7,4634855
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Paket	0	1	Paket	Rp9.745.000,00	1	Rp14.060.000,00	100	144,27912
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen	0	1	Dokumen	Rp127.200.000,00	0	Rp0,00	0	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		orang	0	41	orang	Rp510.450.000,00	41	Rp323.070.768,00	100	63,291364
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang	0	10	Orang	Rp132.500.000,00	10	Rp68.817.512,00	100	51,937745
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	0	100	%	Rp1.559.215.500,00	62	Rp1.490.127.500,00	62	95,569054

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5803	Paket	0	250	Paket	Rp199.993.000,00	13	Rp128.550.000,00	5,2	64,27725
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	457	Paket	0	1	Paket	Rp14.835.000,00	5	Rp554.612.500,00	500	3738,5406
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Paket	0	2	Paket	Rp20.600.000,00	1	Rp354.415.000,00	50	1720,4612
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25	Paket	0	712	Paket	Rp717.565.000,00	2	Rp114.000.000,00	0,2808989	15,887062
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	0	5	Paket	Rp250.000.000,00	1	Rp333.450.000,00	20	133,38
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen	0	1	Dokumen	Rp10.000.000,00	1	Rp5.100.000,00	100	51
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	0	1	Laporan	Rp346.222.500,00	0	Rp0,00	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		%	0	100	%	Rp6.884.455.740,00	80	Rp2.166.392.910,00	80	31,467889

	Pemerintah Daerah										
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Unit	0	4	Unit	Rp1.549.750.000,00	1	Rp0,00	25	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	0	5	Unit	Rp183.350.000,00	8	Rp1.192.677.910,00	160	650,49245
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Paket	0	1	Paket	Rp5.135.314.740,00	1	Rp0,00	100	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	77	Unit	0	1	Unit	Rp10.170.000,00	47	Rp973.715.000,00	4700	9574,3854
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	0	1	Unit	Rp5.871.000,00	0	Rp0,00	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan		%	0	100	%	Rp16.336.824.016,00	25	Rp9.896.213.324,00	25	60,576115
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	0	24000	Laporan	Rp10.000.000,00	6	Rp1.375.000,00	0,025	13,75

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	0	12	Laporan	Rp4.571.859.744,00	6	Rp2.653.937.374,00	50	58,049405
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	0	2	Laporan	Rp50.000.000,00	0	Rp0,00	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	0	12	Laporan	Rp11.704.964.272,00	6	Rp7.240.900.950,00	50	61,861795
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Pemerintah Daerah yang dipelihara		%	0	100	%	Rp8.065.723.964,00	66	Rp4.973.706.000,00	66	61,664719
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8	Unit	0	45	Unit	Rp318.080.000,00	4	Rp231.513.330,00	8,8888889	72,784623
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49	Unit	0	152	Unit	Rp1.848.917.800,00	50	Rp899.558.930,00	32,894737	48,653268

Lapangan											
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit	0	1	Unit	Rp9.750.000,00	0	Rp0,00	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	495	Unit	0	276	Unit	Rp2.322.735.200,00	698	Rp1.386.177.000,00	252,89855	59,67865
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	0	5	Unit	Rp1.470.900.000,00	6	Rp912.272.350,00	120	62,021371
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	0	5	Unit	Rp1.293.294.000,00	5	Rp1.364.313.050,00	100	105,49133
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	0	1	Unit	Rp2.000.000,00	1	Rp99.958.000,00	100	4997,9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	0	1	Unit	Rp800.046.964,00	1	Rp79.913.340,00	100	9,9885811
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		%	0	100	%	Rp52.640.525.018,00	54	Rp25.640.867.600,00	54	48,709369

Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		Orang / Bulan	0	770	Orang / Bulan	Rp51.650.525.018,00	440	Rp25.341.695.100,00	57,142857	49,063771
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	110	Paket	0	55	Paket	Rp440.000.000,00	3	Rp299.172.500,00	5,4545455	67,99375
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		Orang	0	55	Orang	Rp550.000.000,00	2	Rp0,00	3,6363636	0
Layanan Adminstrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD		%	0	100	%	Rp15.656.371.000,00	46	Rp11.373.011.341,00	46	72,641427
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Dokumen	0	12	Dokumen	Rp837.795.000,00	4	Rp227.260.107,00	33,333333	27,12598
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		Laporan	0	12	Laporan	Rp197.482.000,00	6	Rp0,00	50	0
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Laporan	0	12	Laporan	Rp9.571.170.000,00	6	Rp7.126.133.734,00	50	74,454155
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12	Paket	0	48	Paket	Rp5.049.924.000,00	6	Rp4.019.617.500,00	12,5	79,597584
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD		00	0	82	00	Rp82.161.529.000,00	83,35	Rp60.957.403.273,00	101,64634	74,192148
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang di Fasilitasi		%	0	100	%	Rp19.753.915.000,00	18	Rp15.855.843.021,00	18	80,266838

Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Dokumen	0	5	Dokumen	Rp18.008.420.000,00	0	Rp15.585.493.217,00	0	86,545589
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda		Dokumen	0	1	Dokumen	Rp225.650.000,00	0	Rp0,00	0	0
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3	Dokumen	0	1	Dokumen	Rp656.240.000,00	0	Rp0,00	0	0
Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		Dokumen	0	3	Dokumen	Rp591.705.000,00	1	Rp194.750.000,00	33,333333	32,913361
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		Dokumen	0	1	Dokumen	Rp271.900.000,00	0	Rp75.599.804,00	0	27,804268
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kebijakan Anggaran yang dibahas		%	0	100	%	Rp723.490.000,00	0	Rp131.051.501,00	0	18,113796
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		Dokumen	0	1	Dokumen	Rp158.345.000,00	0	Rp0,00	0	0
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Dokumen	0	1	Dokumen	Rp158.345.000,00	0	Rp0,00	0	0
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		Dokumen	0	1	Dokumen	Rp165.600.000,00	0	Rp112.119.501,00	0	67,705013

Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD		Dokumen	0	1	Dokumen	Rp165.600.000,00	0	Rp18.932.000,00	0	11,432367
Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		Dokumen	0	1	Dokumen	Rp75.600.000,00	0	Rp0,00	0	0
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		%	0	100	%	Rp1.828.516.000,00	58	Rp906.705.010,00	58	49,586933
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Laporan	0	5	Laporan	Rp278.100.000,00	3	Rp142.898.959,00	60	51,38402
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Laporan	0	5	Laporan	Rp278.100.000,00	3	Rp107.706.191,00	60	38,729303
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Laporan	0	6	Laporan	Rp317.100.000,00	3	Rp126.138.500,00	50	39,778776
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Laporan	0	6	Laporan	Rp278.100.000,00	3	Rp111.264.400,00	50	40,008774
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Laporan	0	5	Laporan	Rp174.700.000,00	3	Rp37.071.000,00	60	21,219805

Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Dokumen	0	1	Dokumen	Rp67.200.000,00	0	Rp18.340.000,00	0	27,291667
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		Dokumen	0	6	Dokumen	Rp68.016.000,00	2	Rp17.774.000,00	33,333333	26,132087
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Dokumen	0	1	Dokumen	Rp367.200.000,00	1	Rp345.511.960,00	100	94,093671
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD		%	0	100	%	Rp16.736.175.000,00	82	Rp23.546.497.422,00	82	140,69223
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	136	Dokumen	0	110	Dokumen	Rp1.386.000.000,00	1	Rp420.890.551,00	0,9090909	30,367284
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12	Dokumen	0	300	Dokumen	Rp7.697.205.000,00	590	Rp12.732.676.550,00	196,66667	165,41948
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Orang	0	16	Orang	Rp1.040.000.000,00	16	Rp451.185.147,00	100	43,383187
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		Orang	0	8	Orang	Rp520.000.000,00	8	Rp240.000.000,00	100	46,153846
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Dokumen	0	6	Dokumen	Rp5.866.570.000,00	4	Rp9.567.187.081,00	66,666667	163,07974

Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		Dokumen	0	1	Dokumen	Rp226.400.000,00	1	Rp134.558.093,00	100	59,433787
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPRD		%	0	100	%	Rp28.862.052.000,00	44	Rp12.225.592.676,00	44	42,358709
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		Laporan	0	12	Laporan	Rp11.524.800.000,00	6	Rp6.515.610.159,00	50	56,535559
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		Dokumen	0	2	Dokumen	Rp76.800.000,00	1	Rp21.172.000,00	50	27,567708
Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		Dokumen	0	165	Dokumen	Rp17.260.452.000,00	55	Rp5.688.810.517,00	33,333333	32,958642
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		%	0	100	%	Rp244.190.000,00	3	Rp24.613.200,00	3	10,079528
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		Dokumen	0	1	Dokumen	Rp196.500.000,00	0	Rp24.613.200,00	0	12,525802
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		Laporan	0	1	Laporan	Rp47.690.000,00	0	Rp0,00	0	0
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang dibahas		%	0	100	%	Rp616.848.000,00	68	Rp405.079.253,00	68	65,669217
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi. Verifikasi. dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		Dokumen	0	10	Dokumen	Rp264.000.000,00	7	Rp179.020.469,00	70	67,810784

Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		Dokumen	0	9	Dokumen	Rp352.848.000,00	6	Rp226.058.784,00	66,666667	64,066902
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi		%	0	100	%	Rp13.396.343.000,00	53	Rp7.862.021.190,00	53	58,687816
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Dokumen	0	12	Dokumen	Rp13.122.000.000,00	6	Rp7.707.453.987,00	50	58,736885
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		Laporan	0	3	Laporan	Rp54.000.000,00	1	Rp17.100.000,00	33,333333	31,666667
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Dokumen	0	24	Dokumen	Rp220.343.000,00	18	Rp137.467.203,00	75	62,387824

Pada Tahun 2023 menyesuaikan dengan PERMENDAGRI 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Permendagri ini merupakan penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yarg disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

2.2 Permasalahan dan Penyelesaian masalah dalam pelaksanaan hasil Renja Tahun 2023

a. Permasalahan

1. Jadwal kegiatan DPRD yang telah disusun dalam jadwal Badan Musyawarah sering mengalami perubahan sehingga mempengaruhi target kinerja dan realisasi Keuangan;
2. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan tidak dapat mengakomodir seluruh kegiatan kedewanan yang masuk dalam Rencana Kerja DPRD.

b. Penyelesaian Masalah

Memprioritaskan kegiatan Kedewanan yang diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.3 Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD untuk pelaksanaan Tahun 2023, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						
KODE	URAIAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU RANCANGAN PERUBAHAN RENJA 2023 (Rp.)	KODE	URAIAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**332.944.619.274**	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**337.944.619.274**	
4.02	**Sekretariat DPRD**				**332.944.619.274**	4.02	**Sekretariat DPRD**				**337.944.619.274**	
4.02 . 01	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI***	**KALIMANTAN TIMUR**	**Persentase Pelayanan Publik pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD**	**81%**	**169.705.357.738**	4.02 . 01	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI***	**KALIMANTAN TIMUR**	**Persentase Pelayanan Publik pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD**	**81%**	**169.705.357.738**	
4.02 . 01 . 1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**KALIMANTAN TIMUR**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***100%***	***1.327.325.948***	***4.02 . 01 . 1.01***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**KALIMANTAN TIMUR**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***100%***	***1.327.325.948***	
4.02 . 01 . 1.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	306.153.248	4.02 . 01 . 1.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	306.153.248	

4.02 . 01 . 1.01 . 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	120.219.600		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	120.219.600	
4.02 . 01 . 1.01 . 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	115.641.600	4.02 . 01 . 1.01 . 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	115.641.600	
4.02 . 01 . 1.01 . 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	20.994.000	4.02 . 01 . 1.01 . 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	20.994.000	
4.02 . 01 . 1.01 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	33.600.000	4.02 . 01 . 1.01 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	33.600.000	

4.02 . 01 . 1.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	353.563.000	4.02 . 01 . 1.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	353.563.000	
4.02 . 01 . 1.01 . 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	377.154.500	4.02 . 01 . 1.01 . 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	377.154.500	
4.02 . 01 . 1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**KALIMANTAN TIMUR**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***100%***	***13.842.117.280***	***4.02 . 01 . 1.02***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**KALIMANTAN TIMUR**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***100%***	***13.842.117.280***	
4.02 . 01 . 1.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980	12.253.622.430	4.02 . 01 . 1.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN	980	12.253.622.430	
4.02 . 01 . 1.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	990.280.000	4.02 . 01 . 1.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	990.280.000	
4.02 . 01 . 1.02 . 03	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	260.411.050	4.02 . 01 . 1.02 . 03	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	260.411.050	

4.02 . 01 . 1.02 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	337.803.800	4.02 . 01 . 1.02 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	337.803.800	
4.02 . 01 . 1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara***	***100%***	***839.902.400***	***4.02 . 01 . 1.03***	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***100%***	***839.902.400***	
4.02 . 01 . 1.03 . 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	839.902.400	4.02 . 01 . 1.03 . 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	839.902.400	
4.02 . 01 . 1.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***100%***	***1.797.392.000***	***4.02 . 01 . 1.05***	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***100%***	***1.797.392.000***	
4.02 . 01 . 1.05 . 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	313	59.972.000	4.02 . 01 . 1.05 . 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	313	59.972.000	
4.02 . 01 . 1.05 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	971.290.000	4.02 . 01 . 1.05 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	971.290.000	

4.02 . 01 . 1.05 . 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	127.160.000	4.02 . 01 . 1.05 . 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	127.160.000	
4.02 . 01 . 1.05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41	510.525.000	4.02 . 01 . 1.05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41	510.525.000	
4.02 . 01 . 1.05 . 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	128.445.000	4.02 . 01 . 1.05 . 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	128.445.000	
4.02 . 01 . 1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	***14.256.971.780***	***4.02 . 01 . 1.06***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	***14.256.971.780***	
4.02 . 01 . 1.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	313.356.600	4.02 . 01 . 1.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	313.356.600	
4.02 . 01 . 1.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	9.483.498.200	4.02 . 01 . 1.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	9.483.498.200	

4.02 . 01 . 1.06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1.344.811.000	4.02 . 01 . 1.06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1.344.811.000	
4.02 . 01 . 1.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	1.728.017.300	4.02 . 01 . 1.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	1.728.017.300	
4.02 . 01 . 1.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	863.236.180	4.02 . 01 . 1.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	863.236.180	
4.02 . 01 . 1.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	5.200.000	4.02 . 01 . 1.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	5.200.000	
4.02 . 01 . 1.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	518.852.500	4.02 . 01 . 1.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	518.852.500	
4.02 . 01 . 1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***	***20.833.330.600***	***4.02 . 01 . 1.07***	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***	***20.833.330.600***	
4.02 . 01 . 1.07 . 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	524.430.000	4.02 . 01 . 1.07 . 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	524.430.000	

4.02 . 01 . 1.07 . 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8	1.209.350.000	4.02 . 01 . 1.07 . 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8	1.209.350.000	
4.02 . 01 . 1.07 . 05	Pengadaan Mebel	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	12.132.540.100	4.02 . 01 . 1.07 . 05	Pengadaan Mebel	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	12.132.540.100	
4.02 . 01 . 1.07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	47	1.099.964.700	4.02 . 01 . 1.07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	47	1.099.964.700	
4.02 . 01 . 1.07 . 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	5.867.045.800	4.02 . 01 . 1.07 . 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	5.867.045.800	
4.02 . 01 . 1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan***	***100%***	***20.797.388.480***	***4.02 . 01 . 1.08***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan***	***100%***	***20.797.388.480***	
4.02 . 01 . 1.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	10.008.000	4.02 . 01 . 1.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	10.008.000	
4.02 . 01 . 1.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	6.075.760.800	4.02 . 01 . 1.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	6.075.760.800	

4.02 . 01 . 1.08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	105.120.000	4.02 . 01 . 1.08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	105.120.000	
4.02 . 01 . 1.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	14.606.499.680	4.02 . 01 . 1.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	14.606.499.680	
4.02 . 01 . 1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara***	***100%***	***19.284.459.300***	***4.02 . 01 . 1.09***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara***	***100%***	***19.284.459.300***	
4.02 . 01 . 1.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10	865.898.000	4.02 . 01 . 1.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10	865.898.000	

4.02 . 01 . 1.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90	1.765.034.200	4.02 . 01 . 1.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90	1.765.034.200	
4.02 . 01 . 1.09 . 05	Pemeliharaan Mebel	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	9.750.000	4.02 . 01 . 1.09 . 05	Pemeliharaan Mebel	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	9.750.000	
4.02 . 01 . 1.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1396	3.663.077.900	4.02 . 01 . 1.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1396	3.663.077.900	
4.02 . 01 . 1.09 . 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6	7.420.822.000	4.02 . 01 . 1.09 . 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6	7.420.822.000	
4.02 . 01 . 1.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5.279.877.200	4.02 . 01 . 1.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5.279.877.200	
4.02 . 01 . 1.09 . 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	100.000.000	4.02 . 01 . 1.09 . 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	100.000.000	

4.02 . 01 . 1.09 . 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	180.000.000	4.02 . 01 . 1.09 . 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	180.000.000	
4.02 . 02 . 1.15	***Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD***	***100%***	***52.842.376.770***	***4.02 . 02 . 1.15***	***Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD***	***100%***	***52.842.376.770***	
4.02 . 02 . 1.15 . 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	770	51.689.796.770	4.02 . 02 . 1.15 . 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	770	51.689.796.770	
4.02 . 02 . 1.15 . 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3	517.660.000	4.02 . 02 . 1.15 . 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3	517.660.000	
4.02 . 02 . 1.15 . 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55	634.920.000	4.02 . 02 . 1.15 . 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55	634.920.000	
4.02 . 02 . 1.16	***Layanan Administrasi DPRD***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Layanan Adminitrasi DPRD***	***100***	***23.884.093.180***	***4.02 . 02 . 1.16***	***Layanan Administrasi DPRD***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Layanan Adminitrasi DPRD***	***100***	***23.884.093.180***	
4.02.02. 1.16.1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	12	837.795.000	4.02.02.1. 16.1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	12	837.795.000	

4.02 . 02 . 1.16 . 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12	195.108.000	4.02 . 02 . 1.16 . 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12	195.108.000	
4.02 . 02 . 1.16 . 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	14.803.070.180	4.02 . 02 . 1.16 . 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	14.803.070.180	
4.02 . 02 . 1.16 . 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	6	8.048.120.000	4.02 . 02 . 1.16 . 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	6	8.048.120.000	
4.02 . 02	***PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD***	**KALIMANTAN TIMUR**	**Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD**	**82**	**163.239.261.536**	**4.02 . 02**	***PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD***	**KALIMANTAN TIMUR**	**Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD**	**82**	**168.239.261.536**	
4.02 . 02 . 1.01	***Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi***	***100%***	***36.360.542.700***	***4.02 . 02 . 1.01***	***Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi***	***100%***	***36.360.542.700***	
4.02 . 02 . 1.01 . 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	34.614.258.000	4.02 . 02 . 1.01 . 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	34.614.258.000	

4.02 . 02 . 1.01 . 02	Pembahasan Rancangan Perda	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	1	225.659.600	4.02 . 02 . 1.01 . 02	Pembahasan Rancangan Perda	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	1	225.659.600	
4.02 . 02 . 1.01 . 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4	656.509.100	4.02 . 02 . 1.01 . 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4	656.509.100	
4.02 . 02 . 1.01 . 04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3	592.536.000	4.02 . 02 . 1.01 . 04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3	592.536.000	
4.02 . 02 . 1.01 . 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	271.580.000	4.02 . 02 . 1.01 . 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	271.580.000	
4.02 . 02 . 1.02	***Pembahasan Kebijakan Anggaran***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Kebijakan Anggaran yang dibahas***	***100%***	***962.756.000***	***4.02 . 02 . 1.02***	***Pembahasan Kebijakan Anggaran***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Kebijakan Anggaran yang dibahas***	***100%***	***962.756.000***	
4.02 . 02 . 1.02 . 01	Pembahasan KUA dan PPAS	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	172.980.000	4.02 . 02 . 1.02 . 01	Pembahasan KUA dan PPAS	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	172.980.000	
4.02 . 02 . 1.02 . 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	157.806.000	4.02 . 02 . 1.02 . 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	157.806.000	
4.02 . 02 . 1.02 . 03	Pembahasan APBD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	411.130.000	4.02 . 02 . 1.02 . 03	Pembahasan APBD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	411.130.000	

4.02 . 02 . 1.02 . 04	Pembahasan Perubahan APBD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1	145.240.000	4.02 . 02 . 1.02 . 04	Pembahasan Perubahan APBD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1	145.240.000	
4.02 . 02 . 1.02 . 05	Pembahasan Laporan Semester	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2	75.600.000	4.02 . 02 . 1.02 . 05	Pembahasan Laporan Semester	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2	75.600.000	
4.02 . 02 . 1.03	***Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Capaian Kegiatan Pengawasan Pemerintah***	***100%***	***1.714.030.400***	***4.02 . 02 . 1.03***	***Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Capaian Kegiatan Pengawasan Pemerintah***	***100%***	***1.714.030.400***	
4.02 . 02 . 1.03 . 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	5	278.100.000	4.02 . 02 . 1.03 . 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	5	278.100.000	
4.02 . 02 . 1.03 . 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	5	278.100.000	4.02 . 02 . 1.03 . 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	5	278.100.000	
4.02 . 02 . 1.03 . 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	6	278.100.000	4.02 . 02 . 1.03 . 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	6	278.100.000	
4.02 . 02 . 1.03 . 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	6	278.100.000	4.02 . 02 . 1.03 . 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	6	278.100.000	

4.02 . 02 . 1.03 . 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	5	69.700.000	4.02 . 02 . 1.03 . 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	5	69.700.000	
4.02 . 02 . 1.03 . 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	76.170.000	4.02 . 02 . 1.03 . 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	76.170.000	
4.02 . 02 . 1.03 . 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	6	60.600.000	4.02 . 02 . 1.03 . 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	6	60.600.000	
4.02 . 02 . 1.03 . 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	395.160.400	4.02 . 02 . 1.03 . 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	395.160.400	
4.02 . 02 . 1.04	***Peningkatan Kapasitas DPRD***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD***	***100%***	***60.031.815.996***	***4.02 . 02 . 1.04***	***Peningkatan Kapasitas DPRD***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD***	***100%***	***60.031.815.996***	
4.02 . 02 . 1.04 . 02	Pendalaman Tugas DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2	2.583.900.000	4.02 . 02 . 1.04 . 02	Pendalaman Tugas DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2	2.583.900.000	

4.02 . 02 . 1.04 . 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	734	21.728.395.996	4.02 . 02 . 1.04 . 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	734	21.728.395.996	
4.02 . 02 . 1.04 . 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20	1.100.550.000	4.02 . 02 . 1.04 . 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20	1.100.550.000	
4.02 . 02 . 1.04 . 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8	520.260.000	4.02 . 02 . 1.04 . 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8	520.260.000	
4.02 . 02 . 1.04 . 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	33.872.310.000	4.02 . 02 . 1.04 . 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	33.872.310.000	
4.02 . 02 . 1.04 . 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	226.400.000	4.02 . 02 . 1.04 . 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	226.400.000	
4.02 . 02 . 1.05	***Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD***	***100%***	***36.580.512.000***	***4.02 . 02 . 1.05***	***Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD***	***100%***	***36.580.512.000***	
4.02 . 02 . 1.05 . 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	18.958.800.000	4.02 . 02 . 1.05 . 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	18.958.800.000	
4.02 . 02 . 1.05 . 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2	90.060.000	4.02 . 02 . 1.05 . 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2	90.060.000	

4.02 . 02 . 1.05 . 03	Pelaksanaan Reses	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	165	17.531.652.000	4.02 . 02 . 1.05 . 03	Pelaksanaan Reses	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	165	17.531.652.000	
4.02 . 02 . 1.06	***Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD***	***100%***	***429.816.000***	***4.02 . 02 . 1.06***	***Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD***	***100%***	***429.816.000***	
4.02 . 02 . 1.06 . 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	426.216.000	4.02 . 02 . 1.06 . 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	426.216.000	
4.02 . 02 . 1.06 . 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	3.600.000	4.02 . 02 . 1.06 . 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	3.600.000	
4.02 . 02 . 1.07	***Pembahasan Kerja Sama Daerah***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Kerjasama Daerah yang dibahas***	***100%***	***899.448.000***	***4.02 . 02 . 1.07***	***Pembahasan Kerja Sama Daerah***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Kerjasama Daerah yang dibahas***	***100%***	***899.448.000***	
4.02 . 02 . 1.07 . 01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi. Verifikasi. Dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	10	496.200.000	4.02 . 02 . 1.07 . 01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi. Verifikasi. Dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	10	496.200.000	
4.02 . 02 . 1.07 . 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	50	403.248.000	4.02 . 02 . 1.07 . 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	50	403.248.000	
4.02 . 02 . 1.08	***Fasilitasi Tugas DPRD***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi***	***100%***	***26.260.340.440***	***4.02 . 02 . 1.08***	***Fasilitasi Tugas DPRD***	**KALIMANTAN TIMUR**	***Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi***	***100%***	***31.260.340.440***	

4.02 . 02 . 1.08 . 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	25.859.997.440	4.02 . 02 . 1.08 . 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	30.859.997.440	
4.02 . 02 . 1.08 . 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3	54.000.000	4.02 . 02 . 1.08 . 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3	54.000.000	
4.02 . 02 . 1.08 . 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	24	346.343.000	4.02 . 02 . 1.08 . 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	**KALIMANTAN TIMUR**	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	24	346.343.000	
					332.944.619.274		**TOTAL**				**337.944.619.274**	

BAB III
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan dan Sasaran Renja yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk menunjang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan (Renstra - P) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, Yaitu

Adapun Tujuan yang dituangkan adalah **Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.**

b. Sasaran

Sasaran adalah sesuatu yang terarah dan terukur dari tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah "**Meningkatkan pelayanan terhadap Anggota DPRD**".

3.2 Program dan Kegiatan

Kegiatan adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi perangkat daerah atau pun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Penetapan prioritas Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu diselaraskan dengan perkembangan makro ekonomi dan perkembangan kehidupan nasional secara umum. Sedangkan perkembangan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan terwujudnya pelayanan yang sesuai standar terhadap tri fungsi DPRD (fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan) yang dijadikan landasan terhadap penyusunan prioritas program kerja. Karena itu perencanaan program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan inventarisasi dan evaluasi dari program dan Kegiatan yang telah ada sebelumnya khususnya untuk memberikan penajaman

terdapat beberapa program yang masih perlu dilanjutkan, dikembangkan dan bahkan diperluas cakupannya.

Dalam prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih bernuansa pada pemadatan kegiatan agar mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang berdampak atau member manfaat kepada pelayanan dan pemberian dukungan terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Memperhatikan masalah-masalah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka pelayanan atas tugas pokok dan fungsi DPRD dapat mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran-sasaranya telah ditetapkan khususnya juga agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu ditentukan strategi dan kebijakan yang dituangkan kedalam program - program dan kegiatan - kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebagai berikut :

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain :

a. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD

Sub Kegiatannya :

1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
2) Pembahasan Rancangan Akhir Perda.
3) Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan.
4) Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik.
5) Penyusunan Tata Tertib DPRD.

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Sub Kegiatannya :

1) Pembahasan KUA dan PPAS.
2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
3) Pembahasan APBD.
4) Pembahasan Perubahan APBD.
5) Pembahasan Laporan Semester.

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Sub Kegiatannya :

1) Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum.
2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur.
3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat.
4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian.
5) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam.
6) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
7) Pengawasan Penggunaan Anggaran.
8) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

d. Peningkatan Kapasitas DPRD

Sub Kegiatannya :

1) Pendalaman Tugas DPRD.
2) Publikasi dan Dokumentasi Dewan.
3) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli,
4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.
5) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.
6) Penyusunan Program Kerja DPRD.

e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Sub Kegiatannya :

1) Kunjungan Kerja Dalam Daerah.
2) Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD.
3) Pelaksanaan Reses.

f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Sub Kegiatannya :

1) Penyusunan Kode Etik DPRD.
2) Pengawasan Kode Etik DPRD.

g. Pembahasan Kerja Sama Daerah

Sub Kegiatannya :

1) Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah.
2) Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.

h. Fasilitasi Tugas DPRD

Sub Kegiatannya :

1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
2) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD.
3) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

Program Penunjang dan Kegiatannya. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas pada setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatannya :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD.
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatannya :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3) Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

c. Administrasi BarangMilik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatannya :

1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatannya :

1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.
2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya.
3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
5) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatannya :

1) Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2) Penyediaan Peratalat dan Perlengkapan Kantor.
3) Penyediaan Peralatan RumahTangga.
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
6) Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang – Undangan.
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatannya :

1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan.
2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan.
3) Pengadaan Mebel.
4) Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya.
5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnnya.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatannya :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
3) Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor.
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Sub Kegiatannya :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
3) Pemeliharaan Mebel.
4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
5) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
8) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Sub Kegiatannya :

1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.
2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD.
3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

j. Layanan Administrasi DPRD.

Sub Kegiatannya :

1) Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan
2) Fasilitasi Fraksi DPRD.
3) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.
4) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD.

3.3 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran Perubahan RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023. Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) berupa program, kegiatan dan sub kegiatan

pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2023.

3.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Kerja pada tahun berjalan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**							**200,000,000,000**	**270,829,367,234**	**337,944,619,274**							**252,943,918,243**	
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	00		00	81 00	81 00	**117,838,471,000**	**140,622,267,178**	**169,705,357,738**						81 00	**129,622,317,868**	
4	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,306,492,400**	**1,327,325,948**	**1,327,325,948**						100 %	**1,437,141,640**	
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2 Dokumen	263,900,000	306,153,248	306,153,248	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Dokumen	290,290,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	21,219,600	120,219,600	120,219,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	23,341,560	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	47,720,000	115,641,600	115,641,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	52,492,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20,994,000	20,994,000	20,994,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	23,093,400	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	33,600,000	33,600,000	33,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	36,960,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 laporan	1 laporan	449,059,000	353,563,000	353,563,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 laporan	493,964,900	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	469,999,800	377,154,500	377,154,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Laporan	516,999,780	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**13,854,483,362**	**13,797,477,280**	**13,842,117,280**						100 %	**15,239,931,464**	
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				980 Orang/ Bulan	980 Orang/ Bulan	12,307,643,762	12,253,622,430	12,253,622,430	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	980 Orang/ Bulan	13,538,407,904	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	948,640,000	945,640,000	990,280,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Dokumen	1,043,504,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.02	05	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	260,395,800	260,411,050	260,411,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Dokumen	286,435,380	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	337,803,800	337,803,800	337,803,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	[illegible]	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara	%		%	100 %	100 %	**689,100,000**	**830,402,400**	**839,902,400**						100 %	**758,010,000**	
4	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	689,100,000	830,402,400	839,902,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Dokumen	758,010,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**845,280,000**	**840,242,000**	**1,797,392,000**						100 %	**929,808,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				313 Unit	313 Unit	65,385,000	59,972,000	59,972,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	313 Unit	71,923,500	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	9,745,000	14,140,000	971,290,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	10,719,500	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	127,200,000	127,160,000	127,160,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	139,920,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				41 orang	41 orang	510,450,000	510,525,000	510,525,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	41 orang	561,495,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	132,500,000	128,445,000	128,445,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Orang	145,750,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,559,215,500**	**2,747,300,880**	**14,256,971,780**						100 %	**1,715,137,050**	
4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	199,993,000	200,169,800	313,356,600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	20 Paket	219,992,300	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	14,835,000	890,767,500	9,483,498,200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	9 Paket	16,318,500	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,600,000	357,297,600	1,344,811,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	22,660,000	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	717,565,000	296,677,300	1,728,017,300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Paket	789,321,500	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	250,000,000	478,336,180	863,236,180	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Paket	275,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	5,200,000	5,200,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	11,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	346,222,500	518,852,500	518,852,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	380,844,750	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**6,884,455,740**	**20,833,330,600**	**20,833,330,600**						100 %	**7,572,901,314**	
4	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1,549,750,000	524,430,000	524,430,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Unit	1,704,725,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	183,350,000	1,209,350,000	1,209,350,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	8 Unit	201,685,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	5,135,314,740	12,132,540,100	12,132,540,100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Paket	5,648,846,214	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				47 Unit	47 Unit	10,170,000	1,099,964,700	1,099,964,700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	47 Unit	11,187,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5,871,000	5,867,045,800	5,867,045,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Unit	6,458,100	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	%		%	100 %	100 %	**16,336,824,016**	**20,737,362,800**	**20,797,388,480**						100 %	**17,970,506,419**	
4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	12 Laporan	10,000,000	10,008,000	10,008,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	11,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4,571,859,744	6,075,760,800	6,075,760,800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	5,029,045,719	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	105,120,000	105,120,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	55,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11,704,964,272	14,546,474,000	14,606,499,680	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	12,875,460,700	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Pemerintah Daerah yang dipelihara	%		%	100 %	100 %	**8,065,723,964**	**8,184,509,300**	**19,284,459,300**						100 %	**8,872,296,361**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	318,080,000	745,898,000	865,898,000	Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Unit	349,888,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				126 Unit	90 Unit	1,848,917,800	1,765,034,200	1,765,034,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	90 Unit	2,033,809,580	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	9,750,000	9,750,000	9,750,000	Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Unit	10,725,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1396 Unit	1396 Unit	2,322,735,200	2,548,407,900	3,663,077,900	Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1396 Unit	2,555,008,720	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	1,470,900,000	1,470,822,000	7,420,822,000	Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	6 Unit	3,030,713,400	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	1,293,294,000	1,364,597,200	5,279,877,200	Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Unit	9,900,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Unit	2,200,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	800,046,964	180,000,000	180,000,000	Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Unit	880,051,661	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**02**	**01**	1.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%		%	100 %	100 %	**52,640,525,018**	**52,842,376,770**	**52,842,376,770**						100 %	**57,904,577,520**	
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				770 Orang / Bulan	770 Orang / Bulan	51,650,525,018	51,689,796,770	51,689,796,770	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	770 Orang / Bulan	56,815,577,520	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	440,000,000	517,660,000	517,660,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Paket	484,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				55 Orang	55 Orang	550,000,000	634,920,000	634,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	55 Orang	605,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	1.16		**Layanan Administrasi DPRD**	Persentase Layanan Administrasi DPRD	%		%	100 %	100 %	**15,656,371,000**	**18,481,939,200**	**23,884,093,180**						100 %	**17,222,008,100**	
4	02	01	1.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	837,795,000	837,795,000	837,795,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Dokumen	921,574,500	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	197,482,000	195,108,000	195,108,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	217,230,200	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	9,571,170,000	11,400,916,200	14,803,070,180	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	10,528,287,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	5,049,924,000	6,048,120,000	8,048,120,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	6 Paket	5,554,916,400	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	00		00	82 00	82 00	**82,161,529,000**	**130,207,100,056**	**168,239,261,536**						82 00	**123,321,600,375**	
4	**02**	**02**	1.01		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang di Fasilitasi	%		%	100 %	100 %	**19,753,915,000**	**36,360,542,700**	**36,360,542,700**						100 %	**21,729,306,500**	
4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				5 Dokumen	1 Dokumen	18,008,420,000	34,614,258,000	34,614,258,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	19,809,262,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				1 Dokumen	1 Dokumen	225,650,000	225,659,600	225,659,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	248,215,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				4 Dokumen	4 Dokumen	656,240,000	656,509,100	656,509,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Dokumen	721,864,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				3 Dokumen	3 Dokumen	591,705,000	592,536,000	592,536,000	Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Dokumen	650,875,500	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	271,900,000	271,580,000	271,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	299,090,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	1.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Persentase Kebijakan Anggaran yang dibahas	%		%	100 %	100 %	**723,490,000**	**715,047,000**	**962,756,000**						100 %	**794,667,500**	
4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	158,345,000	158,345,000	172,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	176,550,000	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	158,345,000	149,902,000	157,806,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	175,862,500	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	165,600,000	196,200,000	411,130,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	179,547,500	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	165,600,000	135,000,000	145,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	179,547,500	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	1 Dokumen	75,600,000	75,600,000	75,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	83,160,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	1.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%		%	100 %	100 %	**1,828,516,000**	**1,677,099,800**	**1,714,030,400**						100 %	**5,411,379,600**	
4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				5 Laporan	5 Laporan	278,100,000	278,100,000	278,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Laporan	305,910,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				5 Laporan	5 Laporan	278,100,000	278,100,000	278,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Laporan	305,910,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				6 Laporan	6 Laporan	317,100,000	278,100,000	278,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	6 Laporan	348,810,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	278,100,000	278,100,000	278,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	6 Laporan	3,438,567,000	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	1.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				5 Laporan	5 Laporan	174,700,000	69,700,000	69,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Laporan	192,170,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	67,200,000	67,200,000	76,170,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	323,730,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				6 Dokumen	6 Dokumen	68,016,000	60,600,000	60,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	6 Dokumen	74,817,600	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	367,200,000	367,199,800	395,160,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	421,465,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	1.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	%		%	100 %	100 %	**16,736,175,000**	**31,242,004,796**	**60,031,815,996**						100 %	**47,502,979,750**	
4	02	02	1.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	1,386,000,000	1,722,600,000	2,583,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Dokumen	2,423,025,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				734 Dokumen	734 Dokumen	7,697,205,000	16,257,354,796	21,728,395,996	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	734 Dokumen	7,511,996,250	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				16 Orang	20 Orang	1,040,000,000	1,040,520,000	1,100,550,000	Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	20 Orang	1,144,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	8 Orang	520,000,000	520,260,000	520,260,000	Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	8 Orang	572,000,000	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	1.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				6 Dokumen	12 Dokumen	5,866,570,000	11,474,870,000	33,872,310,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Dokumen	35,565,925,500	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	226,400,000	226,400,000	226,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	286,033,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	1.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPRD	%		%	100 %	100 %	**28,862,052,000**	**35,086,452,000**	**36,580,512,000**						100 %	**31,748,257,200**	
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	11,524,800,000	17,749,200,000	18,958,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	12,677,280,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	76,800,000	76,800,000	90,060,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Dokumen	84,480,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				165 Dokumen	165 Dokumen	17,260,452,000	17,260,452,000	17,531,652,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	165 Dokumen	18,986,497,200	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	1.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	%		%	100 %	100 %	**244,190,000**	**396,341,000**	**429,816,000**						100 %	**309,417,075**	
4	02	02	1.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	196,500,000	392,741,000	426,216,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	239,522,250	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	1 Laporan	47,690,000	3,600,000	3,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	69,894,825	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Keqiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 02 1.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	Persentase Kerjasama Daerah yang dibahas	%		%	100 %	100 %	**616,848,000**	**616,848,000**	**899,448,000**						100 %	**1,099,282,800**	
4 02 02 1.07 01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi. Verifikasi. dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	264,000,000	264,000,000	496,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Dokumen	711,150,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 1.07 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				9 Dokumen	10 Dokumen	552,848,000	552,848,000	403,248,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Dokumen	388,132,800	Sekretariat DPRD
4 02 02 1.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**13,396,343,000**	**24,112,764,760**	**31,260,340,440**						100 %	**14,726,309,950**	
4 02 02 1.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	13,122,000,000	23,838,421,760	30,859,997,440	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	14,434,200,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 1.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				3 Laporan	3 Laporan	54,000,000	54,000,000	54,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	3 Laporan	49,732,650	Sekretariat DPRD
4 02 02 1.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				24 Dokumen	24 Dokumen	220,343,000	220,343,000	346,343,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	24 Dokumen	242,377,300	Sekretariat DPRD
	TOTAL							**200,000,000,000**	**270,829,367,234**	**337,944,619,274**							**252,943,918,243**	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 merupakan suatu dokumen perencanaan yang bersifat taktis dan strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dokumen Renja memiliki jangka waktu satu tahun yang merupakan pedoman bagi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yaitu sebagai unsur pelayanan untuk kelancaran kegiatan DPRD.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur ini meliputi : Bagian Persidangan dan Perundang - Undangan, Bagian Umum dan Keuangan dan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. Ketiga bagian tersebut masing-masing memiliki fungsi dan program yang jelas dan rasional, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, tidak tumpang tindih dan fokus pada permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hal-hal diatas, diharapkan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini dapat menjadi acuan dan pedoman bagi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pemecahan masalah mendasar sehingga hasilnya dapat dinikmati secara lebih merata dan lebih adil bagi seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan Renja ini pula diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan *stake holders* sehingga nantinya akan tercipta sasaran hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian laporan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, mudah-mudahan laporan ini dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

Samarinda, Agustus 2023

Sekretaris DPRD

DRA. HJ. NORHAYATI US, M.SI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660531 198609 2 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, yaitu jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan yang disusun untuk melaksanakan rencana tahun kelima Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2023. Renja dan Renstra merupakan dokumen yang disusun untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian target pembangunan yang telah direncanakan pada RPJMD tahun 2019-2023 dan RKPD tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Hal ini juga sejalan dengan bunyi pasal 343 ayat 1 Pemendagri 86 tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan

apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi :

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuagan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau
b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun berjalan sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

selain itu perubahan Renja juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja dilakukan secara simultan dengan Perubahan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada :

a. Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Bappeda hingga triwulan II tahun 2023.

Proses penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan yakni : a) penyusunan rancangan perubahan Renja; b) perumusan rancangan akhir perubahan Renja; dan c) penetapan perubahan Renja.

Dokumen Perubahan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sehingga penetapan target tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renja harus mendukung percepatan pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023. Selanjutnya Perubahan Renja dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2023 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 melalui penetapan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Kalimanran Timur Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja adalah untuk melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan Program/Kegiatan/Sub kegiatan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Selain untuk menyesuaikan target kinerja dan pagu program/kegiatan/sub kegiatan, penyusunan Perubahan Renja juga bertujuan sebagai pedoman perangkat daerah dalam Menyusun perubahan RKA dan dasar dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Prov. Kaltim hingga akhir tahun anggaran 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun dengan sistematika dan penjelasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan;

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen Perubahan Renja.

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023;

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 pada Triwulan I dan Triwulan II.

BAB III Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah;

Memuat Tujuan dan Sasaran perangkat daerah serta program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2023 yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV Penutup.

Memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2023.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan Bappeda melalui pencapaian target tujuan dan sasaran perangkat daerah pada tahun 2023 serta capaian program/ kegiatan/subkegiatan yang telah ditetapkan pada Renja tahun 2023. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 diharapkan mampu mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan pada dokumen perencanaan menengah perangkat daerah yakni Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kelima Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 yang dilaksanakan melalui pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan ini harus mengedepankan konsistensi pelaksanaan perencanaan perangkat daerah yang telah ditetapkan, terhadap perubahan kemampuan sumber daya pada pelaksanaan akan berdampak pada penyesuaian target yang telah direncanakan.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 yang dilaksanakan bertujuan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan antara dengan RKA-PD dan Renja-PD; memastikan realisasi target kinerja (output) dan penyerapan dana sub kegiatan Renja; mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran Renja; melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan serta akselerasi atas keterlambatan dalam realisasi pelaksanaan Renja.

Konsistensi pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 20223 terhadap pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran pada Renstra dan Renja
BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Pada Tahun 2023		Reliasasi Tahun 2023
			Renstra	Renja	
1	2	3	4	5	6
1	Tujuan : Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	78	78	-*
2	Sasaran 1 : Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	Persentase Prioritas Pembangunan yang mencapai target	95	95	-*
3	Sasaran 2 : Rencana Program dan Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Persentase program/ kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PSDM dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	95	95	99,35**
4	Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda secara Internal dan Eksternal	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Prov. Kaltim	79,55	79,55	81,64**

Keterangan :

* = capaian indikator diukur pada akhir pelaksanaan renja

** = capaian sementara hingga semester pertama

Terdapat kesesuaian tujuan dan sasaran serta target kinerja yang telah ditetapkan pada pada tahun kelima Renstra (tahun 2023) dengan yang ditetapkan pada Renja 2023. Hal ini sebagai upaya dalam menjaga keselarasan dalam pencapaian target pembangunan perangkat daerah.

Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 diharuskan untuk selaras dengan yang akan dilaksanakan melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023. Program/ Kegiatan/Subkegiatan yang dilaksanakan pada APBD tahun anggaran 2023 harus telah direncanakan pada Renja tahun 2023 dan tidak ada penambahan program/kegiatan/subkegiatan. Secara rinci gambaran pelaksanaan Renja tahun 2023 pada APBD Tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut berikut:

Tabel 2.2
Konsistensi Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Bappeda Tahun 2023 dengan APBD Bappeda Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun Aggaran 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				**54.381.973.000**			**60.867.730.869**	
5.01.001	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Skor Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda**	**90%**	**31.338.747.940**	**Skor Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda**	**90%**	**36.810.523.269**	**Konsisten**
5.01.001.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Bappeda yang tepat waktu, tepat proses***	***95%***	***606.750.000***	***Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Bappeda yang tepat waktu, tepat proses***	***95%***	***807.098.500***	***Konsisten***
5.01.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	87.810.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	307.145.000	Inkonsistensi pada Target Kinerja
5.01.001.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	31.101.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	48.332.500	Konsisten
5.01.001.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	36.358.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	48.905.000	Konsisten
5.01.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	132.027.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	167.190.000	Konsisten

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun Aggaran 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	319.454.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	235.526.000	Inkonsistensi pada Target Kinerja
5.01.001.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur***	***96%***	***18.259.201.608***	***Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur***	***96%***	***18.345.066.758***	***Konsisten***
5.01.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mernerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	17.321.401.608	Jumlah Orang yang Mernerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	17.321.466.758	Konsisten
5.01.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	933.121.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.018.921.000	Konsisten
5.01.001.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	4.679.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	4.679.000	Konsisten
5.01.001.1.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi***	***50%***	***667.040.000***	***Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi***	***50%***	***243.450.000***	***Konsisten***
5.01.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	277.040.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	63.630.000	Inkonsistensi pada Target Kinerja
5.01.001.1.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	390.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27 Orang	179.820.000	Inkonsistensi pada Target Kinerja

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun Aggaran 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.001.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang Berfungsi Baik***	***95%***	***3.080.108.000***	***Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang Berfungsi Baik***	***95%***	***4.868.022.200***	***Konsisten***
5.01.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	267.843.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	100.034.500	Inkonsistensi pada Target Kinerja
5.01.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	302.648.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2.077.349.300	Inkonsistensi pada Target Kinerja
5.01.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	383.156.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	262.918.200	Inkonsistensi pada Target Kinerja
5.01.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	185.953.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	187.368.000	Konsisten
5.01.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Disediakan	1 Dokumen	59.520.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Disediakan	1 Dokumen	60.115.200	Konsisten
5.01.001.1.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24.912.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24.912.000	Konsisten
5.01.001.1.06.009	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.485.600.000	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.896.600.000	Konsisten
5.01.001.1.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik SKPD	4 Dokumen	370.476.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik SKPD	4 Dokumen	258.725.000	Konsisten
5.01.001.1.07	***Pengadaaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Tersedianya Sarana dan Prasarana***	***12 Bulan***	***546.797.100***	***Tersedianya Sarana dan Prasarana***	***12 Bulan***	***1.670.618.300***	***Konsisten***

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun Aggaran 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	546.797.100	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	1.670.618.300	Inkonsistensi pada Target Kinerja
5.01.001.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Jasa Penunjang tepat waktu***	***95%***	***6.082.224.232***	***Persentase Jasa Penunjang tepat waktu***	***95%***	***6.845.432.400***	***Konsisten***
5.01.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000	Konsisten
5.01.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.465.312.560	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.465.736.400	Konsisten
5.01.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.601.911.672	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.364.696.000	Konsisten
5.01.001.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Barang Milik Daerah yang Digunakan dan Berfungsi Baik***	***90%***	***2.096.627.000***	***Persentase Barang Milik Daerah yang Digunakan dan Berfungsi Baik***	***90%***	***4.030.835.111***	***Konsisten***
5.01.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	79.998.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	100.064.000	Konsisten
5.01.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya	47 Unit	908.276.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya	69 Unit	918.702.000	Inkonsistensi pada Target Kinerja
5.01.001.1.09.005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Dipelihara	25 Unit	19.200.000	Jumlah Mebel Dipelihara	20 Unit	19.200.000	Inkonsistensi pada Target Kinerja

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun Aggaran 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	53.865.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	144.444.000	Inkonsistensi pada Target Kinerja
5.01.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabiltasi	1 Unit	704.318.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabiltasi	1 Unit	2.675.925.111	Konsisten
5.01.001.1.09.010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	330.970.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	172.500.000	Konsisten
5.01.002	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan**	**80%**	**12.593.225.060**	**Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan**	**80%**	**13.085.713.100**	**Konsisten**
5.01.002.1.01	***Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan***	***Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan***	***95%***	***4.758.439.000***	***Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan***	***95%***	***5.202.317.300***	***Konsisten***
5.01.002.1.01.001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJPD/RPJMD	1 Dokumen	408.600.000	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJPD/RPJMD	1 Dokumen	301.898.000	Konsisten
5.01.002.1.01.003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	591.431.000	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	584.861.000	Konsisten
5.01.002.1.01.005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Murenbang Provinsi	2 Berita Acara	662.181.000	Jumlah Berita Acara Murenbang Provinsi	1 Berita Acara	567.335.000	Inkonsistensi pada Target Kinerja
5.01.002.1.01.006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	5 Dokumen	3.096.227.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	3 Dokumen	3.748.223.300	Inkonsistensi pada Target Kinerja

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun Aggaran 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.002.1.02	***Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***	***Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan***	***98%***	***1.699.999.900***	***Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan***	***98%***	***1.779.672.800***	***Konsisten***
5.01.002.1.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data pembangunan	2 Dokumen	670.098.400	Jumlah Dokumen Analisis Data pembangunan	2 Dokumen	766.771.300	Konsisten
5.01.002.1.02.002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	92 Orang	578.618.500	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	92 Orang	578.618.500	Konsisten
5.01.002.1.02.003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	30 Orang	276.818.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	30 Orang	276.818.000	Konsisten
5.01.002.1.02.004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	3 Dokumen	174.465.000	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	3 Dokumen	157.465.000	Konsisten
5.01.002.1.03	***Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***	***Persentase Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan***	***90%***	***6.134.786.160***	***Persentase Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan***	***90%***	***6.103.723.000***	***Konsisten***
5.01.002.1.03.001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	4.407.195.160	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	4.447.516.000	Konsisten
5.01.002.1.03.003	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	806.985.000	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	791.985.000	Konsisten

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun Aggaran 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.002.1.03.004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/ Evaluasi	4 Dokumen	920.606.000	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/ Evaluasi	4 Dokumen	864.222.000	Konsisten
5.01.003	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran**	**95%**	**10.450.000.000**	**Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran**	**95%**	**10.971.494.500**	**Konsisten**
5.01.03.1.01	***Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***	***Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran***	***100%***	***2.950.000.000***	***Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran***	***100%***	***3.408.670.000***	***Konsisten***
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	670.809.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	631.856.100	Konsisten
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra /Renja Bidang Pemerintahan	10 Perangkat Daerah	259.457.000	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra /Renja Bidang Pemerintahan	10 Perangkat Daerah	346.845.700	Konsisten

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun Aggaran 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang pemerintahan	1 Laporan	169.734.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang pemerintahan	1 Laporan	357.962.700	Konsisten
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	925.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	1.126.368.500	Konsisten
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	925.000.000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	945.637.000	Konsisten
5.01.03.1.02	***Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)***	***Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran***	***97%***	***4.600.000.000***	***Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran***	***97%***	***4.503.446.500***	***Konsisten***

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun Aggaran 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	638.974.000	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	579.498.000	Konsisten
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra /Renja Bidang Perekonomian	9 Perangkat Daerah	182.146.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra /Renja Bidang Perekonomian	9 Perangkat Daerah	177.766.000	Konsisten
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	928.880.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	959.880.000	Konsisten
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	327.330.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	325.329.800	Konsisten
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	176.970.000	Jumlah perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	131.827.500	Konsisten
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Dokumen	2.345.700.000	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Dokumen	2.329.145.200	Konsisten

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2023			APBD Tahun Aggaran 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.03.1.03	***Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan***	***Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran***	***97%***	***2.900.000.000***	***Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran***	***97%***	***3.059.378.000***	***Konsisten***
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	934.709.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1.046.429.000	Konsisten
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	1.032.891.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	1.018.849.000	Konsisten
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	932.400.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	994.100.000	Konsisten

Berdasarkan Renja Bappeda Tahun 2023, terdapat 3 program, 13 kegiatan dan 53 sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada APBD tahun anggaran 2023. Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan pada Renja dilaksanakan pada APBD. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Gambaran Konsistensi Progam/Kegiatan/Subkegiatan Renja Bappeda Tahun 2023 dengan APBD Bappeda Tahun 2023

No	Uraian	Program	Kegiatan	Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Konsisten	3	13	40
2	Inkonsistensi pada indikator dan target kinerja	0	0	0
3	Inkonsistensi pada Indikator Kinerja	0	0	0
4	Inkonsistensi pada target kinerja	0	0	13
5	Tidak dilaksanakan	0	0	0
	Jumlah	3	13	53

Berdasarkan tabel di atas, terdapat inkonsistensi pada 13 sub kegiatan karena adanya perbedaan target kinerja pada dokumen renja dengan pelaksanaan APBD. Adapun penyebab inkonsistensi yang terjadi pada pelaksanaan renja yang dimaksud karena :

1. Terdapat peningkatan alokasi pagu anggaran pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 6.485.757.869 atau sebesar 11,93 persen yang menyebabkan adanya penambahan pagu pada beberapa sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas Bappeda;
2. Inkonsistensi dikarenakan kesalahan dalam perumusan target kinerja pada tahap penyusunan Renja tahun 2023;

Adanya inkonsistensi dalam pelaksanaan Renja BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 pada APBD Tahun Anggaran 2023 akan menjadi catatan yang harus diperbaiki dan ditindak lanjuti dalam perubahan Renja tahun 2023 serta menjadi catatan dalam penyusunan Renja tahun berikutnya. Konsistensi perencanaan dengan penganggaran harus

diwujudkan untuk menjamin perencanaan yang dilakukan lebih berkualitas, tepat dan terarah.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 bertujuan untuk memastikan pagu indikatif yang telah dianggarkan pada APBD tahun 2023 atau DPA tahun 2023 telah efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja (output) yang telah direncanakan pada Renja serta memastikan target kinerja sub kegiatan yang telah direncanakan efektif dalam pencapaian target kinerja pada kegiatan dan program.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 sampai dengan triwulan II ini diharapkan akan menjadi bahan untuk penyusunan perubahan Renja tahun 2023, sehingga rencana pembangunan yang ditetapkan dapat direalisasikan pada tahun 2023.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 sampai dengan triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023			Realisasi 2023				Rasio/Tingkat Capaian Realisasi 2023		Predikat s.d. Juni	
						Maret		Juni		Juni			
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				**64.567.730.869**		**8.057.716.906**		**22.021.807.422**		**34,11**		**SR**
5.01.001	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Skor Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda**	**90**	**%**	**36.810.523.269**	**83,4**	**5.496.598.534**	**81,64**	**14.625.916.284**	**90,71**	**39,73**	**T**	**SR**
5.01.001.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Bappeda yang tepat waktu, tepat proses***	***95***	**%**	***807.098.500***	**28,57**	***190.542.313***	**42,86**	***349.470.265***	**45,12**	**43,30**	**SR**	**SR**
5.01.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	307.145.000	0	103.726.600	1	189.513.972	33,33	61,70	SR	R
5.01.001.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	48.332.500	1	3.210.000	1	3.210.000	50,00	6,64	SR	SR
5.01.001.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	48.905.000	1	3.180.000	1	3.180.000,00	50,00	6,50	SR	SR
5.01.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	167.190.000	1	80.425.713	1	106.643.193	50,00	63,79	SR	R
5.01.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	235.526.000	0	-	0	46.923.100	0,00	19,92	SR	SR
5.01.001.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur***	***96***	**%**	***18.345.066.758***	**13,24**	***2.708.189.388***	**40,79**	***7.483.649.462***	**42,49**	**40,79**	**SR**	**SR**
5.01.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mernerima Gaji dan Tunjangan ASN	90	Orang/ Bulan	17.321.466.758	84	2.489.070.768	84	7.004.856.542	93,33	40,44	ST	SR
5.01.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	1.018.921.000	3	218.641.120	3	476.680.920	25,00	46,78	SR	SR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023			Realisasi 2023				Rasio/Tingkat Capaian Realisasi 2023		Predikat s.d. Juni	
						Maret		Juni		Juni			
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
5.01.001.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	18	Laporan	4.679.000	4	477.500	4	2.112.000	22,22	45,14	SR	SR
5.01.001.1.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi***	***50***	**%**	***243.450.000***	**22,22**	***36.000.000***	**100**	***163.321.950***	**200**	**67,09**	**ST**	**S**
5.01.001.1.05.002	Pengadaan Pakainan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	63.630.000	0	0	1	61.321.950	100	96,37	ST	ST
5.01.001.1.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27	Orang	179.820.000	6	36.000.000	27	102.000.000	100	56,72	ST	R
5.01.001.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang Berfungsi Baik***	***95***	**%**	***4.868.022.200***	**90**	***1.058.562.184***	**90**	***2.586.235.171***	**94,74**	**53,13**	**ST**	**R**
5.01.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13	Paket	100.034.500	13	47.173.500	13	88.688.000	100	88,66	ST	T
5.01.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	2.077.349.300	5	647.622.200	5	1.717.510.050	83,33	82,68	T	T
5.01.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	262.918.200	5	94.891.700	5	160.575.350	100	61,07	ST	R
5.01.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	187.368.000	5	32.495.000	5	51.064.000	100	27,25	ST	SR
5.01.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Disediakan	1	Dokumen	60.115.200	0	9.272.000	1	23.360.000	100	38,86	ST	SR
5.01.001.1.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	24.912.000	0	0	0	0	0	0,00	SR	SR
5.01.001.1.06.009	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	1.896.600.000	0	227.107.784	0	545.037.771	0	28,74	SR	SR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023			Realisasi 2023				Rasio/Tingkat Capaian Realisasi 2023		Predikat s.d. Juni	
						Maret		Juni		Juni			
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
5.01.001.1.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik SKPD	4	Dokumen	258.725.000	0	0	0	0	0	0,00	SR	SR
5.01.001.1.07	***Pengadaaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Tersedianya Sarana dan Prasarana***	***12***	**Bulan**	***1.670.618.300***	**3**	***0***	**6**	***495.100.000***	**50**	**29,64**	**SR**	**SR**
5.01.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Disediakan	6	Unit	1.670.618.300	0	0	1	495.100.000	16,67	29,64	SR	SR
5.01.001.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Jasa Penunjang tepat waktu***	***95***	**%**	***6.845.432.400***	**95**	***1.384.240.148***	**100**	***3.119.305.615***	**105,26**	**45,57**	**ST**	**SR**
5.01.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	15.000.000	0	4.500.000	1	15.000.000	100	100	ST	ST
5.01.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1.465.736.400	0	217.710.976	1	416.826.765	100	28,44	ST	SR
5.01.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	5.364.696.000	0	1.162.029.172	1	2.687.478.850	100	50,10	ST	SR
5.01.001.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Barang Milik Daerah yang Digunakan dan Berfungsi Baik***	***90***	%	***4.030.835.111***	**75**	***119.064.501***	**60**	***428.833.821***	**66,67**	**10,64**	**R**	**SR**
5.01.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	Unit	100.064.000	2	0	2	5.950.000	100	5,95	ST	SR
5.01.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya	69	Unit	918.702.000	69	58.299.501	50	281.743.967	72,46	30,67	S	SR
5.01.001.1.09.005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Dipelihara	20	Unit	19.200.000	0	0	0	0	0	0,00	SR	SR
5.01.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	Unit	144.444.000	20	0	18	14.590.000	60	10,10	R	SR
5.01.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabiltasi	1	Unit	2.675.925.111	1	0	1	47.764.854	100	1,78	ST	SR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023			Realisasi 2023				Rasio/Tingkat Capaian Realisasi 2023		Predikat s.d. Juni	
						Maret		Juni		Juni			
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
5.01.001.1.09.010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	Unit	172.500.000	2	60.765.000	4	78.785.000	100	45,67	ST	SR
5.01.002	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan**	**80**	%	**13.085.713.100**	**0**	**1.383.180.117**	**62,21**	**3.866.118.290**	**77,76**	**29,54**	**T**	**SR**
5.01.002.1.01	***Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan***	***Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan***	***95***	%	***5.202.317.300***	**0**	***260.726.400***	**97,64**	***1.342.744.250***	**102,78**	**25,81**	**ST**	**SR**
5.01.002.1.01.001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJPD/RPJMD	1	Dokumen	301.898.000	0	0	0	0	0	0	SR	SR
5.01.002.1.01.003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3	Berita Acara	584.861.000	2	77.250.000	2	381.996.000	65,31	65,31	R	R
5.01.002.1.01.005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Murenbang Provinsi	2	Berita Acara	567.335.000	0	0	1	115.257.000	20,32	20,32	SR	SR
5.01.002.1.01.006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	3	Dokumen	3.748.223.300	0	183.476.400	2	845.491.250	22,56	22,56	SR	SR
5.01.002.1.02	***Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***	***Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan***	***98***	%	***1.779.672.800***	**0**	***178.981.880***	**0**	***456.906.905***	**0**	**25,67**	**SR**	**SR**
5.01.002.1.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data pembangunan	2	Dokumen	766.771.300	0	159.397.080	0	183.775.105	0	23,97	SR	SR
5.01.002.1.02.002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	92	Orang	578.618.500	92	0	92	73.022.500	100	12,62	ST	SR
5.01.002.1.02.003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	30	Orang	276.818.000	30	19.584.800	30	192.353.300	100	69,49	ST	S

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023			Realisasi 2023				Rasio/Tingkat Capaian Realisasi 2023		Predikat s.d. Juni	
						Maret		Juni		Juni			
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
5.01.002.1.02.004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	3	Dokumen	157.465.000	0	0	0	7.756.000	0	4,93	SR	SR
5.01.002.1.03	***Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***	***Persentase Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan***	***90***	%	***6.103.723.000***	**0**	***943.471.837***	**89**	***2.066.467.135***	**98,89**	**33,86**	**ST**	**SR**
5.01.002.1.03.001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3	Laporan	4.447.516.000	0	943.471.837	1	2.016.547.135	33,33	45,34	SR	SR
5.01.002.1.03.003	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2	Laporan	791.985.000	0	0	0	24.710.000	0	3,12	SR	SR
5.01.002.1.03.004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/ Evaluasi	4	Dokumen	864.222.000	0	0	2	25.210.000	50,00	2,92	SR	SR
5.01.003	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran**	**90**	%	**14.671.494.500**	**0**	**1.177.938.255**	**99,35**	**3.529.772.848**	**110,39**	**24,06**	**ST**	**SR**
5.01.03.1.01	***Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***	***Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran***	***100***	%	***3.908.670.000***	**0**	***429.876.354***	**99,74**	***1.250.611.126***	**99,74**	**32,00**	**ST**	**SR**
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	631.856.100	0	113.937.208	0	355.410.804	0	56,25	SR	R
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra /Renja Bidang Pemerintahan	10	Perangkat Daerah	346.845.700	10	52.929.096	10	138.453.490	100	39,92	ST	SR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023			Realisasi 2023				Rasio/Tingkat Capaian Realisasi 2023		Predikat s.d. Juni	
						Maret		Juni		Juni			
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang pemerintahan	1	Laporan	357.962.700	0	18.734.010	1	141.722.770	100	39,59	ST	SR
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	1.626.368.500	0	122.635.640	0	349.142.402	0	21,47	SR	SR
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	Laporan	945.637.000	0	121.640.400	0	265.881.660	0	28,12	SR	SR
5.01.03.1.02	***Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)***	***Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran***	***97***	%	***7.703.446.500***	**0**	***493.577.177***	**99,34**	***1.436.730.980***	**102,41**	**18,65**	**ST**	**SR**
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	579.498.000	0	74.318.400	0	231.788.798	0	40,00	SR	SR
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra /Renja Bidang Perekonomian	9	Perangkat Daerah	177.766.000	9	33.687.200	9	67.284.000	100	37,85	ST	SR
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Perekonomian	2	Laporan	959.880.000	0	69.531.529	0	203.009.998	0	21,15	SR	SR
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	325.329.800	0	62.912.619	0	158.726.717	0	48,79	SR	SR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023			Realisasi 2023				Rasio/Tingkat Capaian Realisasi 2023		Predikat s.d. Juni	
						Maret		Juni		Juni			
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	3	Perangkat Daerah	131.827.500	3	0	3	19.594.500	100	14,86	ST	SR
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	Dokumen	5.529.145.200	0	253.127.429	0	756.326.967	0	13,68	SR	SR
5.01.03.1.03	***Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan***	***Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran***	***97***	%	***3.059.378.000***	**0**	***254.484.724***	**97,1**	***842.430.742***	**100,10**	**27,54**	**ST**	**SR**
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	1.046.429.000	0	98.706.000	0	298.768.700	0	28,55	SR	SR
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2	Perangkat Daerah	1.018.849.000	2	63.723.020	2	230.123.638	100	22,59	ST	SR
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	Laporan	994.100.000	0	92.055.704	0	313.538.404	0	31,54	SR	SR

Berdasarkan tabel 2.4 di atas masih terdapat beberapa kegiatan/sub kegiatan belum optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat sebagai berikut:

1. Adanya penyesuaian penggunaan aplikasi SIPD dalam penatausahaan yang masih belum berjalan maksimal, juga terdapat beberapa fitur realisasi per belanja pada masing-masing sub kegiatan yang belum tersedia sehingga untuk mendapat data realisasi keuangan per belanja pada masing-masing sub kegiatan masih dilakukan secara manual atau tidak *by sistem*
2. Terdapat rencana kegiatan yang selalu mengalami pergeseran jadwal yang disebabkan penyesuaian agenda pimpinan
3. Padatnya jadwal kegiatan bidang PPEPD yang mengakibatkan beberapa pelaksanaan kegiatan pada seluruh bidang mengalami penundaan
4. Adanya kelebihan pagu anggaran pembayaran gaji dan tunjangan yang berefek pada tingkat realisasi keuangan Bappeda Prov. Kaltim
5. Kurang sesuainya proporsi pembagian Uang Persediaan (UP) kepada setiap KPA yang mengakibatkan lambatnya perputaran UP sehingga berimbas kepada terhambatnya pelaksanaan kegiatan di setiap bidang
6. Adanya beberapa belanja yang perlu dilakukan pergeseran anggaran, seperti belanja penyusunan rancangan teknokratik RPJMD yang tidak jadi dilaksanakan di tahun 2023 dan beberapa pekerjaan rehab dokumen RAB dan standar harga yang disusun belum sesuai dengan SHS.

Berdasarkan faktor penghambat yang menyebabkan rendahnya realisasi kinerja dan keuangan hingga triwulan II tahun 2023, beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian dan memaksimalkan penggunaan anggaran untuk belanja yang lebih berkualitas yaitu:

1. Melakukan penyesuaian terhadap penggunaan aplikasi SIPD penatausahaan yang sebelumnya dilaksanakan melalui FMIS, begitu juga halnya mengenai rekap realisasi keuangan belanja per masing-masing sub kegiatan kiranya dapat dilakukan secara baik dengan koordinasi yang baik antara penghubung dan bendahara pembantu masing-masing bidang

2. Koordinasi pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara baik dengan protokol pimpinan
3. Dalam mengatasi padatnya jadwal yang berpotensi berbenturannya kegiatan antar bidang maka perlu dilakukan penyusunan agenda kerja setiap masing-masing bidang untuk efektivitas kegiatan
4. Melakukan rasionalisasi terhadap belanja perjalanan dinas yang selanjutnya digeser ke belanja lain yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas
5. Melakukan perhitungan dan pergeseran anggaran terhadap kelebihan anggaran pembayaran gaji dan tunjangan yang disebabkan oleh sistem untuk dimanfaatkan ke belanja lain yang dibutuhkan
6. Perlu adanya kaji ulang oleh Tim TAPD untuk menindaklanjuti proporsi pembagian Uang Persediaan (UP) yang belum proporsional antara UP berdasarkan pagu anggaran dan intensitas kegiatan yang dilaksanakan
7. Melakukan pergeseran anggaran pada beberapa belanja yang belum dapat dilaksanakan serta mengusulkan SHS baru untuk beberapa belanja yang SHS nya masih belum sesuai.

Secara garis besar anggaran Bappeda Prov. Kaltim hingga triwulan II tahun 2023 masih belum terealisasi secara maksimal yang disebabkan oleh faktor-faktor penghambat yang telah dijelaskan pada paragraph di atas. Untuk memaksimal anggaran yang tersedia dan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran maka Bappeda Prov. Kaltim melakukan Langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seperti merasionalisasi dan menggeser beberapa belanja ke belanja yang lebih dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas guna keberhasilan pencapaian sasaran strategis Bappeda.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran ouput kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja serta pagu indikatif yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

Secara rinci, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							**54.381.973.000**	**64.749.564.857**
5.01.001	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Skor Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda**	**Skor Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda**	**90%**	**90%**	**Provinsi dan Luar Daerah**	**31.338.747.940**	**36.992.357.258**
5.01.001.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Bappeda yang tepat waktu, tepat proses***	***Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Bappeda yang tepat waktu, tepat proses***	***95%***	***95%***	***Provinsi dan Luar Daerah***	***606.750.000***	***807.098.500***
5.01.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	3 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	87.810.000	307.145.000
5.01.001.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	31.101.000	48.332.500
5.01.001.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	36.358.000	48.905.000
5.01.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	132.027.000	167.190.000
5.01.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	319.454.000	235.526.000
5.01.001.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur***	***Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur***	***96%***	***96%***	***Provinsi dan Luar Daerah***	***18.259.201.608***	***18.526.900.747***
5.01.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mernerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mernerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	90 Orang/ Bulan	Samarinda	17.321.401.608	17.450.140.747

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	933.121.000	1.072.081.000
5.01.001.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	4.679.000	4.679.000
5.01.001.1.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi***	***Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi***	***50%***	***50%***	***Provinsi dan Luar Daerah***	***667.040.000***	***243.450.000***
5.01.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	1 Paket	Samarinda	277.040.000	63.630.000
5.01.001.1.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	27 Orang	Provinsi dan Luar Daerah	390.000.000	179.820.000
5.01.001.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang Berfungsi Baik***	***Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi baik***	***95%***	***95 %***	***Provinsi dan Luar Daerah***	***3.080.108.000***	***4.868.022.200***
5.01.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	13 Paket	Samarinda	267.843.000	100.034.500
5.01.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6 Paket	Samarinda	302.648.000	2.077.349.300
5.01.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	5 Paket	Samarinda	383.156.000	262.918.200
5.01.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Samarinda	185.953.000	187.368.000
5.01.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Samarinda	59.520.000	60.115.200

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.001.1.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Samarinda	24.912.000	24.912.000
5.01.001.1.06.009	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	1.485.600.000	1.896.600.000
5.01.001.1.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	Samarinda	370.476.000	258.725.000
5.01.001.1.07	***Pengadaaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Tersedianya Sarana dan Prasarana***	***Tersedianya Sarana dan Prasarana***	***12 Bulan***	***12 Bulan***	***Samarinda***	***546.797.100***	***1.670.618.300***
5.01.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	6 Unit	Samarinda	546.797.100	1.670.618.300
5.01.001.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Jasa Penunjang tepat waktu***	***Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu***	***95%***	***95%***	***Samarinda***	***6.082.224.232***	***6.845.432.400***
5.01.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Samarinda	15.000.000	15.000.000
5.01.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Samarinda	1.465.312.560	1.465.736.400
5.01.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Samarinda	4.601.911.672	5.364.696.000
5.01.001.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Barang Milik Daerah yang Digunakan dan Berfungsi Baik***	***Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik***	***90%***	***90 %***	***Samarinda***	***2.096.627.000***	***4.030.835.111***
5.01.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	Samarinda	79.998.000	100.064.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	69 Unit	Samarinda	908.276.000	918.702.000
5.01.001.1.09.005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	20 Unit	Samarinda	19.200.000	19.200.000
5.01.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	30 Unit	Samarinda	53.865.000	144.444.000
5.01.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabiltasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Samarinda	704.318.000	2.675.925.111
5.01.001.1.09.010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	Samarinda	330.970.000	172.500.000
5.01.002	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan**	**Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan**	**80%**	**80 %**	**Provinsi dan Luar Daerah**	**12.593.225.060**	**13.085.713.100**
5.01.002.1.01	***Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan***	***Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan***	***Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan***	***95%***	***95 %***	***Provinsi dan Luar Daerah***	***4.758.439.000***	***5.202.317.300***
5.01.002.1.01.001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJPD/RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	408.600.000	301.898.000
5.01.002.1.01.003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	3 Berita Acara	Provinsi dan Luar Daerah	591.431.000	584.861.000
5.01.002.1.01.005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Murenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	1 Berita Acara	Provinsi dan Luar Daerah	662.181.000	567.335.000
5.01.002.1.01.006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	3 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	3.096.227.000	3.748.223.300

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pembangunan Daerah Provinsi							
5.01.002.1.02	***Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***	***Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan***	***Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan***	***98%***	***98 %***	***Provinsi dan Luar Daerah***	***1.699.999.900***	***1.779.672.800***
5.01.002.1.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data pembangunan	Jumlah dokumen analisis data pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	670.098.400	766.771.300
5.01.002.1.02.002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	92 Orang	92 Orang	Provinsi dan Luar Daerah	578.618.500	578.618.500
5.01.002.1.02.003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	30 Orang	30 Orang	Provinsi dan Luar Daerah	276.818.000	276.818.000
5.01.002.1.02.004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen profil pembangunan daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	174.465.000	157.465.000
5.01.002.1.03	***Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***	***Persentase Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan***	***Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen perencanaan***	***90%***	***90%***	***Provinsi dan Luar Daerah***	***6.134.786.160***	***6.103.723.000***
5.01.002.1.03.001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	3 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	4.407.195.160	4.447.516.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.002.1.03.003	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	806.985.000	791.985.000
5.01.002.1.03.004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/ Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang difasilitasi/dievaluasi	4 Dokumen	4 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	920.606.000	864.222.000
5.01.003	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran**	**Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran**	**95%**	**95 %**	**Provinsi dan Luar Daerah**	**10.450.000.000**	**14.671.494.499**
5.01.03.1.01	***Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***	***Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran***	***Persentase program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran***	***100%***	***100 %***	***Provinsi dan Luar Daerah***	***2.950.000.000***	***3.908.669.999***
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	670.809.000	631.856.100
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra /Renja Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	259.457.000	346.845.700
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	169.734.000	357.962.700

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	925.000.000	1.626.368.499
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	925.000.000	945.637.000
5.01.03.1.02	***Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)***	***Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran***	***Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran***	***97%***	***97 %***	***Provinsi dan Luar Daerah***	***4.600.000.000***	***7.703.446.500***
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	638.974.000	579.498.000
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra /Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	9 Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	182.146.000	177.766.000
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	928.880.000	959.880.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	327.330.000	325.329.800
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	3 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	176.970.000	131.827.500
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Dokumen	4 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	2.345.700.000	5.529.145.200
5.01.03.1.03	***Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan***	***Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran***	***Persentase Program/kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD,RKPD,RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran***	***97%***	***97 %***	***Provinsi dan Luar Daerah***	***2.900.000.000***	***3.059.378.000***
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	934.709.000	1.046.429.000
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	1.032.891.000	1.018.849.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	932.400.000	994.100.000

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan perubahan kebijakan umum anggaran dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi perangkat daerah di tahun anggaran 2023.

Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Badan Perencanaan Pembanguan Daerah provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 16 Agustus 2023

Kepala,

Yusliando
NIP. 19671005 199803 1 009

PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Konsep otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membentuk sistem bagi Pemerintahan didaerah yang membuka peluang, tantangan dan kendala terutama pada daerah untuk lebih leluasa mengelola pembangunan didaerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya demi meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tersebut diperlukan pembiayaan yang memadai, dimana daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan ditegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang demikian juga pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk melaksanakan pungutan sebagaimana tersebut diatas pada Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia telah dibentuk Instansi/Lembaga sebagai leading sektor untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang Pajak Daerah, Retribusi dan lain-lain. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur,

maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang menyelenggarakan hal tersebut.

Fenomena pada tahun–tahun sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber–sumber pendapatan disebabkan antara lain oleh faktor–faktor sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, batasan hukum, regulasi serta kondisi geografis.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemerintah Daerah harus memanfaatkan peluang yang ada ataupun menggali potensi–potensi yang baru dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah diantaranya membangun networking dengan wajib pajak, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sebagai suatu wujud nyata Otonomi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama ini merupakan sumber pendapatan yang dominan, dan masih dapat dikembangkan peningkatan penerimaannya dari berbagai komponen yang mendukung.

Untuk menindaklanjuti peluang - peluang dimaksud perlu ditunjang dengan soliditas aparatur pelaksana operasional pendapatan, pelayanan yang mudah nyaman dan aman, pengelolaan seluruh potensi pendapatan daerah yang makin rasional dan terukur dengan terus memperkuat spirit yaitu komitmen, jujur, profesional serta penuh inovasi dan bertanggungjawab.

1.2. LANDASAN HUKUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dimana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain – lain, Dana Perimbangan,

Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan yang berada dibawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam kewenangan desentralisasi adalah dalam bentuk pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur bagian kedua paragraf 1 pasal 4 untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan sistem informasi pendapatan;
c. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah;
d. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang penerimaan bukan pajak daerah;
e. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain itu dibentuk juga UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang

didalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana teknis operasional Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Baliknama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Retribusi;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Baliknama Kendaraan Bermotor, Pajak Air dan Retribusi;
c. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Baliknama Kendaraan Bermotor, Pajak Air dan Retribusi;
d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dasar hukum pelaksanaan program dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah pada Bidang pendapatan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

1.1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.2. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan telah dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan telah dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan.

1.4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan.

1.5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan.

1.6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perbahan kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air.

1.7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

1.8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Timur untuk pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur

Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Timur untuk pemerintah Kabupaten/Kota.

1.9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rokok.

1.10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

1.11. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 970/K.26/Penda-V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

1.12. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 973/06/Penda-VI/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

1.13. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 973/15/Penda-VI/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

1.14. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 973/16/Penda-VI/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan.

1.15. Surat Keputusan Bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Direktur Lalu Lintas Polda Kaltim Nomor : 973/461/Penda-II/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk teknis Mekanisme/prosedur Pungutan PKB/BBNKB Alat-Alat Berat/Besar di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Retribusi Daerah

2.1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 130, Tambahan Lembar Negara RI No. 5049).

2.2. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2012 No. 1).

2.3. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2012 No. 2).

2.4. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2012 No. 3).

2.5. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga.

2.6. Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

2.7. Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

2.8. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan tertentu.

2.9. Perjanjian dasar Kerjasama Pembangunan Komp. Lembuswana Samarinda serta beberapa fasilitas penunjang lainnya (BOT 30 Tahun dari tanggal 26 Juli 1996 s/d Juli 2026) tentang Parkir Mall Lembuswana.

2.10. Addendum Perjanjian Dasar Kerjasama Pembangunan Komp. Lembuswana Samarinda tanggal 23 Januari 2003 tentang denda keterlambatan pembangunan kios makanan souvenir dan tempat bermain.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

3.1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000 tentang pembentukan perusahaan daerah pertambangan Provinsi Kalimantan Timur.

3.2. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang pembentukan perusahaan daerah kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

3.3. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2004 tentang perusahaan daerah melati bhakti satya Provinsi Kalimantan Timur.

3.4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur.

3.5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusda Perkebunan menjadi Perseroan Terbatas Agro Kaltim Utama.

3.6. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

3.7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusda Ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Timur.

3.8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada PT. Asuransi bangun ASKRIDA.

3.9. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang perseroan terbatas penjamin kredit daerah Provinsi Kalimantan Timur.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4.1. Addendum Perjanjian Dasar Kerjasama Pembangunan Komplek Hiburan Taman Bina Ria Samarinda serta beberapa fasilitas penunjang lainnya tanggal 26 Juli 1996.

4.2. Addendum Perjanjian Dasar Kerjasama Pembangunan Komplek Mall Lembuswana Samarinda serta beberapa fasilitas penunjang lainnya tanggal 23 Januari 2006.

4.3. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

5. Dana Perimbangan

5.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5.2. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.3. PeraturanPemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

5.4. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5.5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Maksud dari disusunnya Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.
2. Mengoptimalkan Tugas dan Fungsi serta Peranan Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan lain – lain.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur kedalam program dan kegiatan yang rinci, terarah, dan terukur.
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur.
3. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Menciptakan Iklim Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa guna mewujudkan Good Governance dalam rangka Peningkatan Pendapatan Daerah yang berorientasi kepada kepuasan publik.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan Rencana Kerja Perubahan ini diawali dari:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu.

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2. 3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2. 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2. 5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Lampiran – Lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan konstribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indiktator kinerja. Tujuan lainnya ialah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan.

Didalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (2019 – 2023) Perubahan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diaplikasi kedalam Rencana Kerja Perubahan Bapenda Prov. Kaltim tahun 2021 guna mendukung program kegiatan RPJMD Perubahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 adalah : ***Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Pemerintah.***

Evaluasi dan analisis capaian kinerja adalah hasil-hasil perhitungan dari pengukuran kinerja yang ditetapkan berbanding dengan realisasi pelaksanaannya, dimana untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat diketahuinya pencapaian target yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi yang telah dicapai, serta kemajuan – kemajuan yang dialami dan

kendala yang ditemukan dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan program serta kegiatan yang telah ditetapkan.

Secara umum pencapaian penetapan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 dan 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan komitmen pejabat eselon II dengan Bapak Gubernur Kalimantan Timur, dapat dijelaskan melalui evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

PENGUKURAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021 S/D 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah	Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.396 Miliar	5.986 Miliar	6.190 Miliar	8.997 Miliar	114,70 %	150,30 %
2. Penambahan potensi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak penghasilan bagi wajib pajak yang melakukan usaha/ pekerjaan di provinsi kalimantan timur	Jumlah Realisasi Dana Transfer dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.193 Miliar	5.052 Miliar	3.887 Miliar	7.807 Miliar	92,69 %	154,83 %

Perkiraan realisasi target tahun berjalan (2023) sampai dengan Triwulan III* / per 18 Agustus 2023 sudah mencapai Rp. 8.811.984.665.027,78 / 60,27

Persen dari target sebesar Rp. 14.621.856.687.105,20 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 8.045.500.965.105,20 dan pendapatan transfer Rp. 6.562.497.042.000. Diharapkan pada akhir tahun nantinya bisa mencapai 100 %.

Pencapaian Sasaran Strategis tersebut tidak lepas dari pencapaian sasaran Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rumusan sesuai dengan Pergub. No. 77 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yaitu : Direncanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan dengan menggunakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dilaksanakan oleh Bidang Pajak Daerah dengan menggunakan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Bidang Bukan Pajak Daerah dengan menggunakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah serta dibantu oleh UPTD se Kaltim dengan menggunakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dikendalikan dan dievaluasi oleh Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan dengan menggunakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Pencapaian Program dan Kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Renja			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Renja			Realisasi 2022		Realisasi 2023				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan	
											Triwulan 1		Triwulan 2					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	
			K		RP	K		RP	K	RP	K	RP	K	RP			K	RP
5.02.0.00.0.00 01.0000	Badan Pendapatan Daerah				0			271.575.433.000		41.481.704.420		4,148E+10		87.022.378.617				35,73
5.02.0.00.0.00 01.0000	Badan Pendapatan Daerah				0			251.703.892.702		34.525.164.388		3,453E+10		73.005.737.414				34,10
5.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	Persen	0	100	Persen	218.564.592.702	0	33.792.075.154	29,37	3,378E+10	50,8	78.655.739.368			50,8	35,14
		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan	89	Persen		90	Persen		0		0		90,78				100,86667	
5.02.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, Radalok, Tapra, LKIP, Evaluasi Renja dan Renstra	9	Dokumen	0	25	Dokumen	726.275.000	0	109.234.970	11	106034970	16	220.078.282	Tidak ada	Tersedianya fasilitas dan SDM yang mencukupi	64	30,30
5.02.001.1.01. 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	0	5	Dokumen	280.000.000	0	25.380.800	2	25380800	2	61.825.224			66,666667	50,91
5.02.001.1.01. 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	1	Dokumen	58.625.000	0	3.660.000	1	3660000	1	29.958.000			100	51,10
5.02.001.1.01. 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	0	1	Dokumen	58.325.000	0	-	0	0	0	-			0	0,00
5.02.001.1.01. 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	0	1	Dokumen	9.225.000	0	7.910.000	1	7910000	1	7.910.000			100	85,75
5.02.001.1.01. 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	0	1	Dokumen	8.725.000	0	-	0	0	0	-			0	0,00
5.02.001.1.01. 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	Laporan	0	17	Laporan	288.350.000	0	60.280.460	4	60280400	9	108.381.548			52,941176	37,89
5.02.001.1.01. 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	0	3	Laporan	107.125.000	0	12.003.710	3	12003710	3	12.003.710			100	11,21
5.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	13	umen/ Lap	0	13	Dokumen/ Laporan	161.214.817.507	0	31.578.320.118	3	3,158E+10	6	84.642.032.921	Aplikasi Perlatausahaan Keuangan yang digunakan (SIPD) tidak mengakomodir fitur ekspor laporan keuangan yang lengkap sehingga terjadi kesulitan dalam monitoring realisasi keuangan dan pelaporan sisa anggaran pada waktu tertentu.	Tersedianya fasilitas dan SDM yang mencukupi	46,153846	40,10

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Renja			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Renja			Realisasi 2022		Realisasi 2023				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan	
											Triwulan 1		Triwulan 2					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	
			K		RP	K		RP	K	RP	K	RP	K	RP			K	RP
5.02.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	Orang / Bula	0	587	Orang / Bulan	161.008.617.907	0	31.522.295.423	77	3,152E+10	154	64.524.485.436			50,79525281	40,08
5.02.001.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15	Laporan	0	15	Laporan	206.200.000	0	56.026.695	3	56026695	7	117.665.095			46,66666667	57,06
5.02.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrsi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	12	Dokumen	0	12	Dokumen	400.600.000	0	55.294.704	3	55294704	6	150.732.825	Tidak ada	Tersedianya fasilitas dan SDM yang memadai	50	26,80
5.02.001.1.03.003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10	Laporan	0	10	Laporan	520.000.000	0	25.285.600	2	25285600	5	94.520.000			50	17,04
5.02.001.1.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	Laporan	0	10	Laporan	280.600.000	0	30.009.104	2	30009104	5	105.212.825			50	37,50
5.02.001.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	30,2	Miliar Rupia	0	23,5	Miliar Rupiah	2.066.220.000	0	174.176.743	5,287	1743176743	18,146	652.464.686	1. Belum optimalnya pelaksanaan digitalisasi untuk pemungutan retribusi daerah 2. kurangnya pemahaman pihak terkait terhadap Kebijakan Retribusi Daerah	1. Telah pulihnya kegiatan perekonomian Kalimantan Timur pasca pandemi Covid-19 2. Transparan dan akuntabel dalam mengelola retribusi daerah guna meningkatkan kesadaran masyarakat	43,17666667	21,60
5.02.001.1.04.001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2	Dokumen	0	2	Dokumen	456.200.000	0	24.015.202	1	24015202	1	65.440.926			50	20,91
5.02.001.1.04.002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1	Dokumen	0	1	Dokumen	300.000.000	0	2.529.100	0	2529100	1	2.529.100			100	0,84
5.02.001.1.04.003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	9	Laporan	0	9	Laporan	400.000.000		45.196.078	2	45196078	2	100.662.900			50	25,17
5.02.001.1.04.005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1	Laporan	0	1	Laporan	410.575.000		49.321.757	0	49321757	2	164.734.221			200	40,14
5.02.001.1.04.006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	3	Dokumen	0	3	Dokumen	310.257.000		40.036.105	0	40036105	2	65.260.805			66,66666667	21,03
5.02.001.1.04.007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	Laporan	0	4	Laporan	189.000.000		12.878.500	1	12878500	2	23.826.600			50	12,61
5.02.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72	Persen	0	72	Persen	2.272.500.000	0	136.197.919	0	136197919	0	298.031.296	Sedang dalam proses	Tersedianya fasilitas dan SDM yang memadai	0	13,11

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Renja			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Renja			Realisasi 2022		Realisasi 2023				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan	
											Triwulan 1		Triwulan 2					
(1)	(2)	(3)	(4)			(6)			(8)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	
			K		RP	K		RP	K	RP	K	RP	K	RP			K	RP
5.02.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3	Paket	0	3	Paket	700.400.000	0	-	0	0	0	-			0	0,00
5.02.001.1.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	12	Dokumen	0	10	Dokumen	1.121.100.000	0	100.489.938	3	100489938	6	246.186.255			60	21,96
5.02.001.1.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	Orang	0	60	Orang	451.000.000	0	35.707.981	5	35707981	7	51.834.981			11,666667	11,49
5.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	291	Buah	0	291	Buah	7.105.318.623	0	498.580.283	20	498580283	31	778.782.632	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik sedang dalam proses, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dalam proses	Tersedianya fasilitas dan SDM yang memadai	10,652921	10,98
5.02.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	0	1	Paket	75.787.920	0	-	0	0	0	-			0	0,00
5.02.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	Paket	0	6	Paket	1.080.562.500	0	-	0	0	7	151.781.000			116,66667	14,05
5.02.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2	Paket	0	2	Paket	2.421.960.000	0	-	0	0	0	-			0	0,00
5.02.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240	Dokumen	0	240	Dokumen	19.200.000	0	2.368.000	32	2368000	70	5.538.000			29,166667	28,84
5.02.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63	Laporan	0	63	Laporan	5.905.808.205	0	496.312.283	9	496312283	12	621.433.632			19,047619	17,73
5.02.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	103	Unit	0	103	Unit	33.121.000.890	0	-	0	0	40	6.888.451.000	Sedang dalam proses	Tersedianya fasilitas dan SDM yang memadai	38,834951	20,80
5.02.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2	Unit	0	5	Unit	2.052.000.000	0	-	0	0	5	2.204.000.000			100	116,67
5.02.001.1.07.003	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	Paket	0	4	Paket	692.898.000	0	-	0	0	0	-			0	0,00
5.02.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	80	Unit	0	64	Unit	3.575.695.800	0	-	0	0	10	2.623.561.000			15,625	73,37
5.02.001.1.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4	Unit	0	2	Unit	26.206.969.650	0	-	0	0	2	1.970.880.000			100	7,73
5.02.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2	Unit	0	2	Unit	2.581.427.441	0	-	0	0	0	-			0	0,00
5.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	0	6	Jenis Jasa	9.316.167.680	0	1.174.910.054	1	1,175E+09	2	2.890.328.565	Sedang dalam proses	Tersedianya fasilitas dan SDM yang memadai	33,333333	31,02

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Renja			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Renja			Realisasi 2022		Realisasi 2023				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan	
											Triwulan 1		Triwulan 2					
(1)	(2)	(5)	(6)			(6)			(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	
			K		RP	K		RP	K	RP	K	RP	K	RP			K	RP
5.02.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	0	12	Laporan	50.000.000	0	-	0	0	6	2.080.000			50	20,00
5.02.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	0	12	Laporan	1.715.856.120	0	340.808.894	3	340808894	6	676.727.505			50	39,44
5.02.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	0	5	Laporan	2.580.311.560	0	834.101.160	1	834101560	3	2.211.681.200			60	39,53
5.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	359	Unit	0	359	Unit	1.743.593.000	0	65.358.364	11	65358364	67	323.839.295	Sedang dalam proses	Tersedianya fasilitas dan SDM yang memadai	18,662953	18,57
5.02.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	0	25	Unit	378.795.000	0	17.243.568	2	17243568	6	89.391.741			24	23,60
5.02.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	332	Unit	0	336	Unit	764.880.000	0	48.114.796	16	48114796	3	234.427.552			1,2711864	30,65
5.02.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	0	4	Unit	599.918.000	0	-	0	0	0	-			0	0,00
5.02.002	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim	739	Wajib Pajak	0	777	Wajib Pajak	1.282.270.000	0	100.615.592	0	100615592	268	392.521.242			31,917633	30,37
		Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100	Persen		100	Persen				17,39		17,39				17,39	
5.02.002.1.01	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK	1,816	Hilan Rupiah	0	2,595	Triliun Rupiah	554.520.000	0	38.760.583	0,287	38760583	0,581	151.072.483	1. Belum optimalnya penyetoran Deviden dari Perusda/BUMD karena masih proses audit laporan keuangan dari masing-masing Perusda/BUMD 2. Belum Sinkronisasinya Data Penerimaan Lain-lain antara Bapenda Prov. Kaltim dan UPTD PPRD Se-Kaltim serta BPKAD karena penginputan data masih dilakukan secara manual.	1. Adanya Penerimaan Deviden dari Perusda/BUMD yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kaltim. 2. Terlaksanaanya koordinasi melalui kegiatan rekonsiliasi data Penerimaan Lain Lain antara Bapenda Provinsi Kaltim dengan UPTD PPRD Se-kaltim dan BPKAD Prov. Kaltim.	22,38921	27,24
5.02.002.1.01.005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4	Dokumen	0	4	Dokumen	554.520.000	0	38.760.583	1	38760583	2	151.072.483			50	27,24

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2022 Penja			Target Kinerja dan Pagu 2023 Kerja			Realisasi 2022		Realisasi 2023				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan	
											Triwulan 1		Triwulan 2					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	
			a		Rp	a		Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp			a	Rp
5.02.002.1.05.	Penarikan Urusan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil	1,322	Hasil Kajian	0	4,525	Triliun Rupiah	737,850,000	0	62,850,000	1,141	61859899	1,356	241,448,759	1. Untuk penyaluran realisasi DBH Pajak Penghasilan (PPh) masih Rp 0, dikarenakan belum terpenuhinya syarat salur yang berupa Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran Pajak Pusat Semester II Tahun 2022 2. Masih terdapat Perpaluran Kurang Bayar dan Pengembalian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil ke pemerintah daerah yang dilakukan secara berlahan 3. Penyaluran Pertahan Melalui kewenangan Deficeit Kurang Bayar dan Lebih Bayar menunggu hasil Audit dari BPK RI serta penyalurannya menunggu ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan.	4. Terjalinnya Penerimaan Dana Transfer ke Daerah 2. Terlaksananya koordinasi rekonsi kegiatan rekonsiliasi DBH dengan Pemerintah Pusat, Instansi Terkait di Kesarpila Kab/Kota 3. Terlaksananya koordinasi rekonsi kegiatan Sosialisasi Kerja PMK 105 Alhamdulillah dan Hilgas dengan Pemerintah Pusat, Instansi Terkait & Kesarpila kab/kota 4. Kondisi Penerimaan Negara 5. Dikeluarkannya peraturan PMK Cerficeit 58 dan Penyelesaian LB yang telah disidik BPK RI	55.5400000	32,72
5.02.002.1.05.0000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4	Laporan	0	4	Laporan	737,850,000	0	62,850,000	1	61859899	2	241,448,759			50	32,72
5.02.069	INDIKATOR PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase terrapanya target pendapatan asli daerah	100	Persen	0	100	Persen	12,346,530,000	0	642,475,643	27,68	643475643	58,36	1,957,476,854			58,36	15,98
5.02.006.1.01	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5,816	Hasil Kajian	0	6,800	Triliun Rupiah	12,346,530,000	0	642,475,643	2,588	643475643	4,633	1,957,476,854	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah secara dipbd	1. Telah adanya kegiatan pendownloan Kalimantan Timur yang pandemi Covid-19 2. Terlaksananya akuisisi Kalimantan timur yang pandi tetangga timur lain menyangkut, meningkat 3. Adanya Kelakuan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur	66,180843	15,98
5.02.006.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	Dokumen	0	1	Dokumen	200,000,000		63,410,278	1	63410278	1	153,870,349			90	58,73
5.02.006.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	1	Dokumen	0	1	Dokumen	700,000,000	0	44,995,150	0	44995150	2	144,446,864			330	58,54
		Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4	Laporan	0	4	Laporan		0		0		4				400	
5.02.006.1.01.0003	Pemrosesan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelesaian dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0	Laporan	0	0	Laporan	600,800,000		88,300,500	2	38383300	2	83,138,334			12,221013	13,07
5.02.006.1.01.0004	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelayanan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelayanan Basis Data Pajak Daerah	3	Laporan	0	3	Laporan	1,200,100,000		142,220,317	1	143220317	2	274,491,617			66,666667	20,69
5.02.006.1.01.0012	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	Dokumen	0	12	Dokumen	1,200,000,000		66,000,300	0	66683300	0	177,886,537			75	14,82
5.02.006.1.01.0018	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Diselesaikan dan Belum Diselesaikan	3	Laporan	0	3	Laporan	8,125,400,000	0	500,314,858	1	100314858	2	671,171,063			330	33,98
5.02.006.1.01.0019	Pendataan dan Verifikasi Data Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Pendataan dan Verifikasi Data Pelayanan Pajak Daerah	9	Dokumen	0	9	Dokumen	900,000,000		54,333,900	1	54332900	2	129,651,651			90	33,98
5.02.006.1.01.0021	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah diselesaikan	9	Dokumen	0	9	Dokumen	900,000,000		24,691,300	1	24691300	2	27,410,300			90	6,85

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Belum Perubahan			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Setelah Perubahan			Realisasi 2023			Realisasi 2023						Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan	
												Triwulan I			Triwulan II						
												(1)			(2)						
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)			(8)			(9)	(10)	(11)	
3.02.009.1.01.053	Pengendalian, Pemeliharaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan	1	Dokumen Hasil	0	1	Dokumen Hasil	800.000.000		58.000.000	0	0	0	0	570.000.000				100	71,25	
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	0	Laporan		0	Laporan				0	0		0					0,000000		
3.02.009.1.01.054	Pemeriksaan dan Pengawasan Pemanfaatan dan Penyimpanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Pemanfaatan Penyimpanan Pajak Daerah	0	Laporan	0	0	Laporan	400.000.000		69.622.650	0	69.622.650		0	132.791.300				33,200000	33,19	
3.04.0.00.0.00.01.0000	LAYU Pendapatan Daerah Prov. Kalbar di Sanggau				0			6.731.438.432		1.216.436.331		1,3196+09			3.812.707.334					56,79	
3.02.004	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Belanja Operasi	100	Persen	0	100	Persen	6.955.795.918		3.441.751.001	24,37	1,4496+09	0	24,0	4.560.586.648				24,0	57,84	
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Perangkat Daerha (nilai hasil evaluasi Inspektorat)	80	Persen		80	Persen				0			81,15					101,27778		
3.02.004.1.01	Perencanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan Laporan yang Terevaluasi (dan Laporan yang Terverifikasi hasil audit)	0	Dokumen	0	0	Dokumen	90.000.000	0		0	0	0	0	1.002.000		Masih adanya dokumen dan laporan yang terlambat disampaikan	Masih dilaksanakan dengan cepat	100	0,00	
3.02.004.1.01.021	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dokumen	0	1	Dokumen	30.000.000	0		0	0	1	1.002.000					100	6,68	
3.02.004.1.01.023	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Dokumen	0	1	Dokumen	30.000.000	0		0	0	1	-					100	0,00	
3.02.004.1.02	Administrasi Kepegawai Daerah, Mutasi, Pensiun, Pendidikan Pegawai Daerah	Jumlah rutilasi pensiunan rutilasi dikirim	453	Bilan Rilasi	0	0,5	Bilan Rilasi	45.000.000	0		3,167	0	10,135	14.700.000	Tidak ada		Koordinasi lancar	63,33333	32,67	
3.02.004.1.02.001	Pengadaan Data Terpusat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan, Pendistribusian, dan Pelayanan data terpusat daerah	0	Laporan	0	0	Laporan	68.600.000	0		0	0	0	59.700.000				0%	87,03	
3.02.004.1.05.001	Pelayanan Pengadaan Arsip Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Arsip Daerah	13	Laporan	0	13	Laporan	27.000.000	0		3	0	0	-				23	0,00	
3.02.004.1.10	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN sangat tinggi (91-95) dan tinggi (86-90)	72	Persen	0	72	Persen	30.000.000			0	0	0	10.002.300	Sedang dalam proses	JSPP sudah mengikuti dan sesuai dengan peraturan	0	90,00	
3.02.004.1.10.013	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	Orang	0	3	Orang	30.000.000	0		0	0	0	10.002.300				100	00,00	
3.02.004.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan umum	5	Dokumen	0	5	Dokumen	544.000.000	0	56.500.000	1	59548884	1	600.000.000	Keterlambatan di tidak roll	Fasilitas dan barang tersedia	20	10,93	
3.02.004.1.06.001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpelihara	1	Paket	0	1	Paket	9.010.000	0		0	0	1	9.010.000				100	100,00	
3.02.004.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	0	3	Paket	219.570.000	0	600.000	1	650000	1	127.377.300				33	58,06	
3.02.004.1.06.003	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	0	1	Paket	50.000.000	0	5.233.200	0	0133000	1	8.003.100				100	10,67	
3.02.004.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	0	12	Dokumen	3.000.000	0	430.000	4	430000	0	600.000				0%	00,00	
3.02.004.1.06.009	Pemeliharaan Rutin Berkala dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin Berkala dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD	10	Laporan	0	10	Laporan	238.998.000	0	89.423.500	2	87823584	0	190.897.825				20	100,00	
3.02.004.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	14	Jenis/Unit	0	14	Paket/Unit	209.000.000	0		0	0	10	170.002.000	6 Paket sudah dilelang 6 Belum dilelang	Penyedia sudah memahami dengan baik	71,428571	113,13	
3.02.004.1.07.003	Pengadaan Mobil	Jumlah Paket Mobil yang Disediakan	1	Paket	0	1	Paket	130.100.000	0		0	0	1	170.002.000				100	208,24	
3.02.004.1.07.004	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	0	1	Unit	74.900.000	0		0	0	0	-				0	0,00	
3.02.004.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan (Jasa Kebersihan, Jasa Keamanan, dll. Kirim, Sewa)	5	Jenis Jasa	0	5	Jenis Jasa	3.857.385.552	0	1.171.636.110	0	1,2750+09	0	3.888.805.575	Tidak ada	Koordinasi lancar	33,333333	97,83	
3.02.004.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	0	12	Laporan	2.500.000	0	600.000	3	300000	0	600.000				0%	00,00	
3.02.004.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	0	12	Laporan	1.998.001.100	0	450.987.200	0	1000000	0	352.805.910				0%	00,00	
3.02.004.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	0	5	Laporan	1.998.201.012	0	700.348.800	1	2000000	1	1.426.100.660				40	00,83	
3.02.004.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan,perawatan dan gedung dipelihara	60	Unit	0	60	Unit	801.000.000	0	53.870.000	1	13070000	20	64.870.070	Tidak ada	Koordinasi lancar	48	00,43	
3.02.004.1.09.003	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	Unit	0	60	Unit	110.002.000	0	30.267.700	1	10000700	0	38.770.525				00	00,00	
3.02.004.1.09.004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Unit	0	60	Unit	91.000.000	0	9.582.100	0	0082100	60	24.000.750				00	00,00	
3.02.004.1.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	0	2	Unit	150.000.000	0		0	0	0	-				0	0,00	
3.02.004	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH	Persentase terealisasi Target pendapatan asli Daerah	100	Persen	0	100	Persen	171.750.000	0	10.664.198	27,28	19664198	54,9	192.000.916				54,9	45,55	
3.02.004.1.01	Register Pendataan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	3,810	Wajib Pajak	0	3,810	Wajib Pajak	171.750.000		10.664.198	2,286	19664198	4,010	192.000.916	Register ganda Pajak	Sistem terkomputerisasi dengan baik	80,136007	45,55	
3.02.004.1.01.009	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	0	12	Laporan	685.914.000	0	23.331.000	3	23333333	3	53.004.100				25	00,00	
3.02.004.1.01.029	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Diidentifikasi dan Solusi Diselesaikan	0	Laporan	0	4	Laporan	258.000.000	0	18.097.011	1	18097013	1	97.017.306				25	37,50	
3.02.004.1.01.030	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	33	Dokumen	0	33	Dokumen	150.000.000	0	33.333.334	9	33333334	9	198.313.473				25	33,33	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Renja			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Renja			Realisasi 2022		Realisasi 2023				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian (Rasio)
											Triwulan I		Triwulan II				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)
				a	Rp	a		Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp			a
5.02.0.00.0.00.01.0000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalbar di Bpkd Sbdr				0			3.683.899.588		982.360.249		982360249		1.701.553.500			
5.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100	Persen	0	100	Persen	3.443.900.588	0	333.740.410	25,27	1027950410	34,0	1.369.690.910			34,0
		Nilai kepuasan masyarakat terhadap urusan Perangkat	80	Persen		90	Persen		0		0		82,47				91,8888889
5.02.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen RKA	2	Dokumen	0	2	Dokumen	41.500.000	0	11.100.740	1	11100740	1	30.992.010	Dokmi Prioritas Pelaksanaan Kegiatan	Sesuai	50
5.02.001.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	1	Dokumen	39.750.000	0	5.600.000	1	5600000	1	30.857.350			100
5.02.001.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	0	1	Dokumen	32.750.000	0	5.741.660	0	5741660	0	30.673.980			0
5.02.001.1.06	Administrasi Pendapatan Daerah Kecamatan (Perangkat Daerah)	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	82,2	persen/ Lapo	0	13,5	Dokumen/ Laporan	167.900.000	0	93.718.800	6,183	9371880	10,146	90.932.000	Masih Dalam Pengentrian Data	Sesuai	83,176988
5.02.001.1.10.0004	Verifikasi dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Pajak Daerah	1	Dokumen	0	1	Dokumen	32.200.000	0	24.718.800	0	24718800	1	91.368.750			100
5.02.001.1.10.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pendaftaran dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	Laporan	0	4	Laporan	44.500.000	0	10.000.000	1	10000000	1	30.515.000			50
5.02.001.1.04.0012	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Laporan	0	12	Laporan	69.000.000	0	15.000.000	1	15000000	1	89.410.800			50
5.02.001.1.10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72	Persen	0	72	Persen	42.800.000	0	33.750.150	0	33750150	0	85.720.110	Sedang dalam proses	Sesuai	0
5.02.001.1.10.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Orang	0	1	Orang	42.800.000	0	33.750.150	1	33750150	1	85.720.110			100
5.02.001.1.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan perangkat daerah	5	Fasilitas	0	5	Fasilitas	456.245.500	0	93.616.484	1	93616484	1	386.916.000	Dokmi Prioritas Pembayaran	Sesuai	40
5.02.001.1.08.0011	Pengadaan Kelengkapan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	0	1	Paket	13.400.000	0	2.484.000	0	2484000	1	3.484.000			100
5.02.001.1.08.0021	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	0	3	Paket	103.034.000	0	16.773.000	1	16773000	1	77.304.411			66,6666667
5.02.001.1.08.0029	Pemeliharaan Barang Cadangan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Barang Cadangan dan Perlengkapan yang Disediakan	4	Paket	0	4	Paket	33.000.000	0		0	0	0				50
5.02.001.1.08.0030	Pemeliharaan Rutin Kendaraan dan Peralatan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Rutin Kendaraan dan Peralatan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	0	12	Dokumen	10.000.000	0	8.203.000	1	8203000	1	8.203.000			25
5.02.001.1.06.0031	Pemeliharaan Rutin Kendaraan dan Peralatan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin Kendaraan dan Peralatan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Laporan	0	12	Laporan	221.600.000	0	62.356.984	1	62356984	1	121.690.121			8,8888333
5.02.001.1.01.0032	Pelaksanaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bahasan dan peralatan disiapkan	20	Paket/Unit	0	20	Paket/Unit	262.000.000	0		0	0	0	40.344.000	Dokmi Prioritas SKI	Sesuai	10,05
5.02.001.1.01.0033	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	0	1	Paket	70.070.000	0		0	0	1	66.665.000			100
5.02.001.1.07.0035	Pengadaan/Kontrak/ Sewa Kendaraan dan Mesin-Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan dan Mesin-Lainnya yang Disediakan	28	Unit	0	28	Unit	186.212.095	0		0	0	43	30.879.000			153,57143
5.02.001.1.08.0036	Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa Gedung dan pos	9	bulan Jasa	0	9	bulan Jasa	1.000.000.000	0	200.000.000	1	200000000	4	797.888.000	Dokmi Prioritas SKI	Sesuai	44,44444
5.02.001.1.08.0037	Pemeliharaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	0	12	Laporan	5.000.000	0	1.000.000	1	1000000	4	1.000.000			33,333333
5.02.001.1.08.0038	Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	0	12	Laporan	874.350.885	0	98.354.885	1	98354885	4	135.338.853			33,333333
5.02.001.1.08.0039	Pemeliharaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	0	5	Laporan	1.000.512.288	0	995.019.840	1	995019840	1	564.166.798			40
5.02.001.1.09.0040	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	71	Paket/Unit	0	71	Paket/Unit	317.480.000	0	95.241.620	8	9524162	25	300.665.188	Paket Pemeliharaan Gedung Dalam Proses Pengerjaan	SIMV Mendukung	35,211268
5.02.001.1.08.0042	Penyediaan Jasa Pendaftaran, Biaya Pendaftaran, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Memiliki dan Melengkapi Pajak dan Perizinannya	11	Unit	0	11	Unit	280.000.000	0	62.351.000	2	6235000	0	101.185.595			63,636364
5.02.001.1.08.0043	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60	Unit	0	60	Unit	326.140.000	0	43.880.720	13	13880720	31	98.318.730			23
5.02.001.1.08.0044	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	0	1	Unit	111.000.000	0		0	0	1				100
5.02.004	PENGADAAN PERALATAN DAN PERMESINAN DINAS	Persentase ketersediaan target pengadaan peralatan	100	Persen	0	100	Persen	227.200.000	0	39.621.200	17,26	3962120	58,48	61.372.490			58,48
5.02.004.1.01	Register Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.810	Lembar/ Laporan	0	6.845	Dokumen/ Laporan	227.200.000	0	39.621.200	3.188	3962120	4.331	61.372.490	Dokmi Prioritas SKI	Sesuai	63,2846
5.02.004.1.01.0035	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	0	12	Laporan	61.220.000	0	21.021.200	1	2102120	0	27.120.000			41,666667
5.02.004.1.01.0036	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan yang Telah Dilaksanakan dan Jenis Dilayanikan)	4	Laporan	0	4	Laporan	73.800.000	0	8.000.000	1	8000000	1	19.794.000			50
5.02.004.1.01.0037	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tunggakan yang Ditagihkan	12	Dokumen/WP	0	12	Dokumen/ WP	73.380.000	0		0	0	5	38.453.800			41,666667

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Awal			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Awal			Realisasi 2022		Realisasi 2023				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan	
											Triwulan I		Triwulan II					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	
			K		RP	K		RP	K	RP	K	RP	K	RP			K	RP
5.02.001.0.01.01.0001	UPTD Pendapatan Wilayah Timur Kabupaten Solok Barat				0			2.747.456.222		664.900.822		84.000.000		1.001.120.000				100,43
5.02.002	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi belanja langsung	100	Persen	0	100	Persen	6.562.589.222	0	572.000.822	48,62	72.000.822	100	1.200.100.000			100,0	72,09
		Nilai kepuasan masyarakat terhadap urusan kewenangan	80	Persen		80	Persen		0		0		85,17				106,462500	
5.02.002.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang Terkendali dan tepat waktu	2	Dokumen	0	2	Dokumen	83.400.000	0	-	2	0	2		pelaksanaan PBB perubahan mengikuti pedoman waktu terjadwal	terlaksananya anggaran 2023	50	0,00
5.02.002.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	1	Dokumen	13.100.000	0	-	1	0	1	-			100	0,00
5.02.002.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	0	1	Dokumen	12.300.000	0		0	0	0				0	0,00
5.02.002.1.02	Administrasi Pendapatan Daerah, Perbendaharaan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Belanja Daerah	80,0	Miliar Rupiah	0	83,0	Miliar Rupiah	83.000.000	0	10.000.000	5,181	10000000	10,130	00.000.000	belum geografis dan lokasi berdekatan rawan dengan cuaca	meningkatnya realisasi retribusi	63,570000	100,57
5.02.002.1.06	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	Dokumen	0	1	Dokumen	17.650.000	0	6.642.000	0	6650000	1	22.114.700			100	100,19
5.02.002.1.04.0001	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelayanan Data Retribusi Daerah	4	Laporan	0	4	Laporan	18.000.000	0	-	1	0	1	400.000			25	2,22
5.02.002.1.04.0002	Pelayanan Pengaduan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengaduan Retribusi Daerah	12	Laporan	0	12	Laporan	23.800.000	0	10.017.600	3	10017200	6	10.009.600			50	63,99
5.02.002.1.10	Administrasi Kesejahteraan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN Kategori Tinggi (81-90) dan target Sangat Tinggi (91-100)	10	Persen	0	10	Persen	12.000.000	0	10.108.111	0	10118000	0	00.113.000	Tenaga kerja asn	peningkatan ASN	0	100,11
5.02.002.1.10.0001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	Orang	0	4	Orang	12.000.000	0	10.108.111	0	10118000	4	00.113.000			100	100,11
5.02.002.1.10	Administrasi Aksara Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Sesuai Kompetensi	5	Ratio	0	5	Ratio	832.130.000	0	92.125.120	1	92125120	2	100.225.507	terbatasi sinyal wilayah terjauh	terselenggaranya pelayanan publik	40	40,87
5.02.002.1.06.0001	Pengadaan Pengurus Istalah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pengurus Istalah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	0	1	Paket	8.000.000	0	1.100.000	0	1100000	1	5.840.000			100	97,07
5.02.002.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	0	2	Paket	120.000.000	0	24.101.171	1	24101270	2	00.823.000			100	33,69
5.02.002.1.06.0003	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	0	1	Paket	10.000.000	0	1.000.700	0	1000700	1	5.164.700			100	26,62
5.02.002.1.08.0001	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	0	12	Dokumen	6.000.000	0	-	3	0	3	000.000			50	25,08
5.02.002.1.08.0002	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	0	10	Laporan	233.501.500	0	33.370.001	3	33370001	10	130.845.757			98,897500	53,63
5.02.002.1.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	10	Paket/Unit	0	10	Paket/Unit	347.140.000	0	-	0	0	10	340.388.580	Unit rusak berat/hilang	Terlaksananya SKPD yang di sebutkan	110,70	98,05
5.02.002.1.07.0001	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	0	1	Paket	19.000.000	0	-	0	0	4	72.153.180			400	379,75
5.02.002.1.07.0002	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	0	10	Unit	172.400.000	0	-	0	0	10	100.510.500			100	58,29
5.02.002.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	Unit Jasa	0	0	Unit Jasa	0.000.000.922	0	913.677.001	3	91367700	3	1.101.000.311	terbatasi waktu terbatasi	terlaksana layanan umum yang optimal	00	11,11
5.02.002.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Layanan	0	12	Layanan	9.000.000	0	-	3	0	3	3.164.000			50	08,24
5.02.002.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Layanan	0	12	Layanan	575.000.000	0	141.700.000	4	141700000	6	000.110.000			50	00,12
5.02.002.1.08.0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Layanan	0	1	Layanan	1.444.007.930	0	261.072.000	1	261072000	0	000.110.000			100	100,47
5.02.002.1.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit/set dan/atau luas/m2 pemeliharaan	55	Paket/Unit	0	55	Paket/Unit	650.267.930	0	88.570.821	0	88570821	16	121.730.000			291,000000	28,13
5.02.002.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional dan Lapangan yang Disediakan dan Dipelihara, Pajak dan Perizinannya	11	Unit	0	11	Unit	699.999.999	0	93.180.001	0	93180001	11	110.105.001			100	100,00
5.02.002.1.09.0003	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29	Unit	0	29	Unit	75.000.000	0	0.000.000	0	0000000	11	10.020.000			91,720100	10,00
5.02.002.1.09.0004	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	0	1	Unit	189.700.000	0	-	0	0	0				0	0,00
5.02.004	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase penerbitan tepat penagihan ke daerah	100	Persen	0	100	Persen	420.700.000	0	43.114.900	23,28	43114900	38,28	103.178.104			100,10	00,00
5.02.004.1.01	Koleksi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penerimaan dan Pendataan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	0,810	Miliar Rupiah	0	0,849	Triliun Rupiah	424.700.000	0	43.114.900	1,188	43114900	4,211	103.178.104	terbatasi perindahan lokasi ini	terlaksananya target PAD dan RPJMD	00,100000	00,00
5.02.004.1.01.0001	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	0	12	Laporan	170.000.000	0	9.000.000	3	9050000	8	01.862.000			00,000007	00,17
5.02.004.1.01.0002	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan yang Telah Diselesaikan dan Rekap Pelayanan	4	Laporan	0	4	Laporan	70.500.000	0	11.000.000	1	11000000	4	00.000.000			100	100,00
5.02.004.1.01.0003	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tunggakan yang Berhasil Ditagih Pajak	12	Dokumen	0	12	Dokumen	170.000.000	0	11.000.000	3	11040000	8	01.112.000			00,000007	00,73

Kode	Perangkat Daerah / Kegiatan / Indikator	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Kerja			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Kerja			Realisasi 2022		Realisasi 2023				Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tingkat Capaian Kinerja Dan	
											Triwulan 1		Triwulan 2					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	
					(a)			(b)		(a)	(b)			(a)	(b)			(a)	(b)
5.02.0.00.0.00.01.0000	DPPA Pendapatan Daerah Prov. Kalbar di Kalbarpost				0			0,000,000,000		000,000,000		00,000,000		0,000,000,000					00,00
5.02.005	PROGRAM PENDAPATAN DAERAH DAN PEMBIAYAAN	Persentase realisasi penerimaan Daerah	100	Persen	D	100	Persen	0,314,000,000	0	000,000,000	00,00	00,000,000	00,00	0,000,000,000			00,0		00,00
		Nilai kepatuhan pemerintah terhadap aturan Keuangan	00	Persen		00	Persen		0		00,00		00,00				000,00000		
5.02.005.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen (prioritas pokok (50 anggaran yang Direncanakan telah sudah)	0	Dokumen	D	0	Dokumen	00,000,000	0	-	0	0	0	0,000,000	Ketersediaan Anggaran Belanja(ke Provinsi yang perlu dilengkapi)	Sesuai	00		00,00
5.02.005.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dokumen	D	1	Dokumen	00,000,000	0	-	1	0	1	0,000,000			000		00,00
5.02.005.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Dokumen	D	1	Dokumen	0,000,000	0	-	0	0	0	-			0		0,00
5.02.005.1.01.004	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah tradisi administrasi verifikasi Realisasi	00,0	Nilai Rupiah	D	00,0	Nilai Rupiah	00,000,000	0	-	0,000	0	00,0 00	0,000,000	Sistem aman SPJ	Sesuai	00,0 00000		0,00
5.02.005.2.04.004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pendapat Daerah	Jumlah Data (dan, Input dan Wajib Retribusi Daerah	1	Dokumen	D	0	Dokumen	00,000,000	0		0	0	00,00	0,000,000			1000		0,00
5.02.005.1.04.005	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hard Penggabung, Pemeliharaan, dan Validasi Data Retribusi Daerah	0	Laporan	D	0	Laporan	00,000,000	0	-	0	0	0				0		0,00
5.02.005.1.05.002	Pelayanan Pengaduan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengaduan Retribusi Daerah	00	Laporan	D	00	Laporan	00,000,000	0		0	0	0				0		0,00
5.02.005.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90 dan rangan tinggi 91-100)	00	Laporan	D	00	Laporan	00,000,000	0	-	0	0	0	0,000,000	Sesuai kompetensi (pendapat) tahun yang diikuti oleh ASN.	Sesuai	0		0,00
5.02.005.1.05.001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	D	0	Orang	00,000,000	0		0	0	0	0,000,000			00,000007		0,00
5.02.005.1.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang terfungsi dengan baik	0	Fasilitas	D	0	Fasilitas	00,000,000	0	00,000,000	0	0	0	0,000,000	Sebelumnya pengadaan sudang (dalam proses yang belum dan SP)	Sesuai	00		00,00
5.02.005.1.08.003	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	D	1	Paket	0,000,000	0	0,000,000	0	000000	00	0,000,000			0000		00,00
5.02.005.1.08.004	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket	D	0	Paket	000,000,000	0	-	0	0	0				0		0,00
5.02.005.1.08.005	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Paket Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara	1	Paket	D	1	Paket	00,000,000	0		0	0	0				0		0,00
5.02.005.1.09.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	00	Laporan	D	00	Laporan	000,000,000	0	00,000,000	0	000000	00	000,000,000			000		00,00
5.02.005.1.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	00	Paket/Unit	D	00	Paket/Unit	000,000,000	0	-	0	0	00	000,000,000	Tidak ada	Pengadaan sepatan dengan hak kompensasi dengan kekurangan (000).	000,00000		00,00
5.02.005.1.01.005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	00	Unit	D	00	Unit	000,000,000	0	-	0	0	00	000,000,000			000,00000		00,00
5.02.005.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	Jenis Jasa	D	0	Jenis Jasa	0,000,000,000	0	000,000,000	0	000000000	0	0,000,000,000	Mahasiswa kompetensi satu orang dalam proses yang sedang dijalankan.	Sesuai	00		00,00
5.02.005.1.08.002	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Layanan	D	12	Layanan	0,000,000	0	-	0	0	0	000,000			00		00,00
5.02.005.1.08.003	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Layanan	D	12	Layanan	0,000,000,000	0	000,000,000	0	000000000	0	000,000,000			00		00,00
5.02.005.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	Layanan	D	0	Layanan	0,000,000,000	0	000,000,000	0	000000000	0	0,000,000,000			00		00,00
5.02.005.1.10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang/aset peralatan kantor, kendaraan	000	Paket/Unit	D	000	Paket/Unit	000,000,000	0	00,000,000	0	00000000	00	000,000,000	Beberapa kegiatan rekanan/kerja sedang dalam proses, surat, belum dan SP.	Sesuai	00,000000		00,00
5.02.005.1.08.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang tersedia	0	Unit	D	0	Unit	000,000,000	0	00,000,000	0	00000000	00	000,000,000			000		00,00
5.02.005.1.10.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	00	Unit	D	00	Unit	000,000,000	0	000,000	0	000000	0	0,000,000			0,000000		00,00
5.02.005.1.09.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	D	0	Unit	000,000,000	0		0		0%	000,000,000			0000		00,00
5.02.005	PROGRAM PENUNJANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase terlaksana target penagihan pajak daerah	000	Persen	D	000	Persen	00,000,000	0	00,000,000	00,00	00000000	00,00	00,000,000			00,00		00,00
5.02.004.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6,810	Objek Pajak	D	6,840	Objek Pajak	00,000,000	0	00,000,000	2,188	00100700	0,000	00,000,000	Dalam proses SP2.	Sesuai	00,000000		00,00
5.02.005.1.01.005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	D	12	Laporan	00,000,000	0	0,000,000	0	0000000	0	0,000,000			00		00,00
5.02.005.1.01.006	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Formulasikan yang telah Dikembangkan dan Belum Dikembangkan	0	Laporan	D	0	Laporan	00,000,000	0	00,000,000	0	0000000	0	00,000,000			00		00,00
5.02.005.1.01.000	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggak (60 yang Disetdik Objek Pajak	12	Dokumen (60)	D	12	Dokumen (60)	000,000,000	0	0,000,000	0	0000000	0	00,000,000			00		0,00

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Tolok Ukuran Dan Pagu 2022 Renja			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Renja			Realisasi 2022			Realisasi 2023				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Renaksi Ke-1	
												Triwulan II		Triwulan III					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	
			K	RP		K	RP		K	RP		K	RP	K	RP			K	RP
5.02.0.00.0.00.01.0000	UPTD Pendapatan Daerah Pos Sabet di Bontang				D			3.433.199.864		559.350.356			510.950.556		1.505.308.100				98,83
5.02.003	PROGRAM PEMUNGUTAN PAJAK PENERIMAAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi penerimaan pajak	100	Persen	D	100	Persen	3.658.809.864	0	867.149.356	26,37	0	1.377.120.000	100	1.377.120.000			100	99,88
		Nilai kepatuhan wajib pajak terhadap pajak	80	Persen		80	Persen		0		0			86,21				107,8500937	
5.02.003.1.01	Perencanaan, Pengelolaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang Terkoordinir dan sesuai waktu	3	Dokumen	D	3	Dokumen	55.000.000	0	-	1	0	0			Anggaran dikembalikan Triwulan II	Sesuai	0	0,00
5.02.003.1.01.001	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koreksi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	D	1	Dokumen	13.200.000	0	-	1	0	0					0	0,00
5.02.003.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koreksi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	D	1	Dokumen	13.200.000	0		0	0	0					0	0,00
5.02.003.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	22,2	Miliar Rupiah	D	22,2	Miliar Rupiah	22.200.000	0	2.280.000	4,107	2280000	10,346	5.400.000	Tidak ada		Terlaksana dalam waktu tersedia	46,13244608	99,99
5.02.003.1.05.004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	Dokumen	D	1	Dokumen	8.880.000	0	2.280.000	1	2568000	1	2.600.000				100	99,57
5.02.003.1.05.005	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemutakhiran, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	Laporan	D	4	Laporan	8.880.000	0	-	0	0	0					0	0,00
5.02.003.1.05.007	Pelayanan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Layanan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Layanan	D	12	Layanan	8.880.000	0	-	0	0	0	5.580.000				85	99,74
5.02.003.1.10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan ASN yang memiliki rekam jejak Profesionalitas ASN sangat tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72	Persen	D	72	Persen	33.283.281	0	33.283.281	2	33283281	2	33.583.281	Sedang dalam proses	Pembahasan Kualitas SAPK		2,7777778	81,09
5.02.003.1.10.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	Orang	D	4	Orang	33.283.281	0	33.283.281	2	33283281	2	33.583.281				100	81,09
5.02.003.1.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas perkantoran/umum kantor yang terfungsi/terpelihara	5	Fasilitas	D	5	Fasilitas	281.000.000	0	89.344.800	1	89344800	4	211.492.899	Tidak ada		Ketersediaan fasilitas yang memadai	80	37,08
5.02.003.1.06.002	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kendaraan Dinas/Operasional Roda/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	D	1	Paket	6.300.000	0	1.247.800	1	1247800	1	1.247.800				100	100,00
5.02.003.1.06.003	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	D	5	Paket	284.693.695	0	-	0	0	1	19.800.000				33,3333333	6,96
5.02.003.1.06.005	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	D	1	Paket	13.000.000	0	-	0	0	0	900.000				0	1,67
5.02.003.1.09.006	Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	D	12	Dokumen	2.880.695	0	-	0	0	3	900.000				25	23,44
5.02.003.1.09.008	Penyelenggaraan Kapal Navigasi dan Kendaraan SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kapal Navigasi dan Kendaraan SKPD	12	Laporan	D	12	Laporan	432.299.000	0	97.597.000	3	97597000	3	180.594.660				41,90411	99,16
5.02.003.1.10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dihibahkan	10	Paket/Unit	D	10	Paket/Unit	170.041.000	0	-	0	0	0	-	Proses Pembayaran Barang telah dilaksanakan	Sesuai		0	0,00
5.02.003.1.11.009	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	D	10	Unit	170.041.000	0	-	0	0	0					0	0,00
5.02.003.1.08	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	bulan Jasa	D	6	bulan Jasa	1.550.700.604	0	378.680.635	1	378680635	3	870.762.099	Tidak ada	Sesuai		50	99,93
5.02.003.1.08.001	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	D	12	Laporan	3.000.000	0	1.500.000	4	1500000	5	1.500.000				0	50,00
5.02.003.1.08.002	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	D	12	Laporan	615.567.000	0	94.070.155	4	94070155	6	188.138.375				50	99,99
5.02.003.1.08.004	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	Laporan	D	6	Laporan	1.338.170.864	0	318.661.444	3	318661444	3	705.167.724				50	99,84
5.02.003.1.10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang dan peralatan kantor terpelihara	55	Paket/Unit	D	55	Paket/Unit	444.478.500	0	44.501.800	5	44501800	10	89.940.800	Pemeliharaan Holding sedang dalam proses Kontrak	Sesuai		9,0090045	21,06
5.02.003.1.10.003	Pemeliharaan Jalan Inventarisasi, Rigid Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya	10	Unit	D	10	Unit	183.076.700	0	44.501.800	2	44501800	4	87.942.800				40	48,04
5.02.003.1.09.005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	D	10	Unit	39.500.000	0	-	0	0	33	11.348.000				91,8400607	22,84
5.02.003.1.09.006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	Unit	D	7	Unit	154.989.000	0	-	0	0	0					0	0,00
5.02.004	PROGRAM PENGELOLAAN PENERIMAAN DAERAH	Persentase terhadap target penyelesaian sisi piutang	100	Persen	D	100	Persen	333.000.000	0	9.600.000	27,49	9600000	58,44	99.586.000				58,44	27,84
5.02.004.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	3,444	Miliar Rupiah	D	6,849	Triliun Rupiah	333.000.000	0	9.600.000	3,188	9600000	5,334	99.586.000	Masih rendahnya kesadaran wajib pajak	Terlaksananya pemeriksaan pbb dan lainnya		99,3999911	27,84
5.02.004.1.01.005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	D	12	Laporan	80.000.000	0	2.500.000	3	2500000	4	16.180.000				40	20,23
5.02.004.1.01.008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan Permasalahan yang Telah Diselesaikan dan Bebas Dikeluhkan	4	Layanan	D	4	Layanan	100.000.000	0	2.500.000	3	2500000	3	27.406.000				99	99,74
5.02.004.1.01.010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tunggakan WP yang Memiliki Piutang Pajak	12	Dokumen WP	D	12	Dokumen WP	153.000.000	0	4.600.000	1	4600000	1	45.257.000				25	27,63

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Tingkat Kinerja Dan Pagu 2022 Kerja			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Kerja			Realisasi 2022		Realisasi 2023				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan	
											Triwulan 1		Triwulan 2					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2024 Awal Kerja			Target Kinerja dan Pagu 2025 Kerja			Realisasi 2024			Realisasi 2025						Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Target Capaian Kinerja Dan
												Triwulan 1			Triwulan 2					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)			(8)			(9)	(10)	(11)	
				R	RP		R	RP	R	RP		R	RP	R	RP					R	RP
5.02.0.00.0.00.01.0000	UPTD Pendidikan Dalam Pos Kabupaten Pasir				0			5.555.599.772		953.947.708			212947708		3.472.992.000						91,74
5.02.001	PROGRAM PENDIDIKAN MENGAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase partisipasi Kabupaten Daerah	100	Persen	0	100	Persen	2.992.129.772	0	999.522.500	90,97	99999999	90,9	3.999.827.819				90,9		90,93
		Nilai kinerja pengelolaan terhadap standar nasional	85	Persen		90	Persen		0		0		85,42						90,977778	
5.02.001.1.01	Perencanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan pengawasan yang disinkronkan (opd sudah	1	Dokumen	0	1	Dokumen	33.900.000	0		1	0	0			Jaya Wijaya opd sudah ada perencanaan pengawasan untuk tahun anggaran tahun depan	Terlambatnya Verifikasi dari SIMA yang terverifikasi	0	0,00
5.02.001.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dokumen	0	1	Dokumen	10.400.000	0		1	0	0					0	0,00
5.02.001.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Dokumen	0	1	Dokumen	10.600.000	0		0	0	0					0	0,00
5.02.001.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Pemerangkat Perangkat Daerah	Jumlah realisasi pendapatan retribusi daerah	100	Rupiah	0	100	Miliar Rupiah	10.800.000	0		5.997	0	25,240	4.344.800		Masih dalam proses pengerjaankan data	Terlambatnya Verifikasi dari SIMA yang terverifikasi	42,240000	24,67
5.02.001.1.05	Pengelolaan data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pendapatan dari Pelayanan Data Retribusi Daerah	4	Laporan	0	4	Laporan	8.900.000	0		4	0	0					0	0,00	
5.02.001.1.04	Pelayanan Pengaduan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengaduan Retribusi Daerah	12	Laporan	0	12	Laporan	8.400.000	0		0	0	0	4.344.800				25	40,24	
5.02.001.1.05	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	Persentase OPD yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	70	Laporan	0	72	Laporan	11.900.000	0	5.999.000	0	5999999	0	5.421.000		tidang dalam proses	Terlambatnya Verifikasi SIMA	0	50,75	
5.02.001.1.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Orang	0	1	Orang	11.400.000	0	5.600.000	1	5600000	0	5.421.600				100	22,74	
5.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan dalam kantor yang terfungsi dengan baik	5	Fasilitas	0	5	Fasilitas	987.955.500	0	155.555.555	5	155555555	0	882.888.445	Tidak ada		Terlambatnya Verifikasi dari SIMA yang terverifikasi	90	95,95	
5.02.001.1.06	Pengadaan Komputer Terpadu/Perangkat Desktop/Personal Komputer Beserta yang Terhubung	Jumlah Paket Komputer Terpadu/Perangkat Desktop/Personal Komputer Beserta yang Terhubung	1	Paket	0	1	Paket	10.321.300	0		0	0	1	3.190.000				100	30,44	
5.02.001.1.06.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi	4	Paket	0	4	Paket	695.548.000	0		0	0	0	191.780.500				100	50,50	
5.02.001.1.06.003	Pengadaan Barang Cendera dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cendera dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	0	1	Paket	981.324.000	0	1.322.000	0	1322000	1	1.920.000				100	1,42	
5.02.001.1.06.005	Pemeliharaan Rutin Berkala dan Sirekturi Peralatan Lainnya	Jumlah Dokumen Rutin Berkala dan Sirekturi Peralatan Lainnya yang Terpelihara	12	Dokumen	0	12	Dokumen	2.980.000	0	995.000	0	995000	0	990.000				50	67,84	
5.02.001.1.06.009	Pemeliharaan Rutin Kendaraan dan Kendaraan SKPD	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin Kendaraan dan Kendaraan SKPD	20	Laporan	0	20	Laporan	240.562.000	0	101.713.000	0	101713000	10	101.001.000				50	99,83	
5.02.001.1.07	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola	10	Paket/Unit	0	10	Paket/Unit	95.600.000	0		0	0	0	497.000	Tidak ada		Terlambatnya Verifikasi dari SIMA yang terverifikasi	50	5,00	
5.02.001.1.07.003	Pengadaan Aset/Inventaris	Jumlah Aset/Inventaris yang Diverifikasi	1	Paket	0	1	Paket	95.600.000	0		0	0	1	497.000				100	0,99	
5.02.001.1.08	Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	0	6	Jenis Jasa	5.980.568.572	0	998.655.777	1	998655777	0	991.111.000	Tidak ada		Terlambatnya Verifikasi dari SIMA yang terverifikasi	99,999997	99,83	
5.02.001.1.08.001	Pengelolaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	0	12	Laporan	5.000.000	0	999.999	0	999999	0	5.000.000				50	99,99	
5.02.001.1.08.003	Pengelolaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	0	12	Laporan	900.988.100	0	180.988.807	2	88888807	0	222.040.800				50	20,72	
5.02.001.1.08.004	Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	0	5	Laporan	970.568.970	0	990.699.000	1	99999999	0	991.001.000				50	99,99	
5.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/inventaris kantor yang dipelihara	70	Paket/Unit	0	73	Paket/Unit	821.519.200	0	27.098.200	0	27098200	25	101.961.794	rusak ringan belum proses pemeliharaan		Terlambatnya Verifikasi dari SIMA yang terverifikasi	35,340171	35,31	
5.02.001.1.10.002	Pengelolaan Gaji Pensiun dan Tunjangan Lainnya, Tabungan Perumahan, Asuransi Kesehatan, Pemberian Pensiun Bantuan Hidup Lainnya	Jumlah Pembayaran Biaya Operasional atau Lainnya yang Disalurkan dan Dilaporkan Pajak dan Pelaporannya	10	Unit	0	10	Unit	105.899.000	0	20.535.100	0	9987100	0	91.237.700				50,000000	50,50	
5.02.001.1.10.004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	14	Unit	0	14	Unit	41.100.000	0	2.900.000	0	2900000	12	10.100.000				24,074074	31,04	
5.02.001.1.10.005	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	0	1	Unit	105.000.000	0		0	0	0					0	0,00	
5.02.003	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase terealisasinya target penerimaan retribusi	100	Persen	0	100	Persen	639.870.000	0	99.725.108	27,28	69231038	58,58	191.717.552				98,18	98,84	
5.02.003.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.800	Unit Kasus	0	5.800	Tidak Sesuai	609.870.000	0	99.725.108	1.582	1582000	3.553	191.717.552		masih terdapat kendala wajib pajak dalam membayar pajak	Terlambatnya Verifikasi dari SIMA yang terverifikasi dalam rentang waktu pajak	99,999999	99,99	
5.02.004.1.01.003	Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	0	12	Laporan	90.600.000	0		0	0	0	3.000.000				50	3,30	
5.02.004.1.01.004	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemanfaatan yang Telah Ditindaklanjuti dari Bukan Ditindaklanjuti	8	Laporan	0	8	Laporan	870.800.000	0	93.896.638	1	93896638	0	190.997.362				50	50,63	
5.02.004.1.01.005	Pengelola Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tunggakan PAD yang Memiliki Dukung Pajak	12	Dokumen SPT	0	12	Dokumen SPT	120.870.000	0	17.838.700	0	17838700	0	94.000.300				50	58,50	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 Awal			Target Kinerja dan Pagu 2025 Revisi			Realisasi 2025			Realisasi 2026				Faktor Pengungkit	Faktor Penghambat	Tingkat Capaian Kinerja (%)	
												Triwulan 4		Triwulan 5					
(1)	(2)	(3)	K	(4)	(5)	K	(6)	(7)	K	(8)	(9)	K	(10)	K	(11)	(12)	(13)	K	(14)
5.02.5.05.0.00.01.0000	UPTD Pengelolaan Sarana Pos, Kantor dan Rumah				0			0.000.000.000		000.000.000			0.000.000		0.000.000.000				000,00
5.02.5.05	Program Pemenuhan Upaya Pelaksanaan Layanan Prioritas (Program Prioritas)	Jumlah Jenis Layanan Prioritas yang Tersedia (Jenis Layanan)	100	Jenis	0	100	Jenis	0.000.000.000	0	000.000.000		0	0.000.000	000	0.000.000.000			000	000,00
		Jumlah Penerima Layanan Prioritas (Orang)	84	Orang	0	80	Orang		0			0	0.000.000	0,00				0,00	
5.02.5.05.1.00	Pelaksanaan, Pengelolaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan yang Disusun dan Dievaluasi	1	Dokumen	1	1	Dokumen	00.000.000				1	0	0		Kegiatan Administrasi di Tw IV	Sinsal	0	0,00
5.02.5.05.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	1	Dokumen	00.000.000	0			1	0	0				0	0,00
5.02.5.05.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Evaluasi RKA SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Perangkat Daerah dan Evaluasi RKA SKPD	1	Dokumen	1	1	Dokumen	00.000.000				0	0	0				0	0,00
5.02.5.05.1.04	Administrasi Kepegawaian Daerah Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah aparatur pemerintah terlatih	33,3	Ribu Rupiah	0	33,5	Ribu Rupiah	00.000.000				7,007	0	33,190	00.000.000	Objek retribusi yang terukur (kriteria subyek, obyek, tarif) sehingga dapat ditetapkan dan ditagih oleh petugas/wajib retribusi	Terdapatnya unsur kebijakan yang mempengaruhi	00,124000	00,00
5.02.5.05.1.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pendapat Daerah	Jumlah data objek, subjek dan wajib Retribusi Daerah	1	Dokumen	0	1	Dokumen	00.000.000	0			0	0	0	00.000.000			0	0,00
5.02.5.05.1.06	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pendataan, pendaftaran dan Retribusi Daerah	4	Laporan	4	4	Laporan	00.000.000	0			1	0	1	00.000.000			00	00,00
5.02.5.05.1.07	Pelayanan Pengaduan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Pengaduan Retribusi Daerah	12	Laporan	0	12	Laporan	00.000.000	0			3	0	0	00.000.000			00	00,00
5.02.5.05.1.10	Administrasi Pemungutan Pendapat Daerah	Jumlah Pelaporan dan sosialisasi (Hal Tokoh Pelaporan, PPP tangan (hal 10 Sosialisasi Hasil Pelaporan)	72	Pemen	0	72	Pemen	00.000.000		0.000.000		0	0000000	0	00.000.000	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009	Pertimbangan Politis/ Jaya	0	00,00
5.02.5.05.1.11	Pendapat Tahun Pemerintah Pendapat Pendapat Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendapat Tahun Pemerintah Undangan (Undang)	1	Orang	0	1	Orang	00.000.000	0	0.000.000		1	0000000	1	00.000.000			00	00,00
5.02.5.05.1.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelayanan umum kantor yang terlayani dengan baik	0	Laporan	0	0	Laporan	000.000.000	0	000.000.000		1	0000000	0	000.000.000	Tidak ada	Terdapatnya kendala dari SDM yang mempengaruhi	00	00,00
5.02.5.05.1.00	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terpelihara	1	Paket	0	1	Paket	0.000.000	0	0.000.000		0	0000000	0	0.000.000			0	00,00
5.02.5.05.1.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	1	Paket	0	1	Paket	000.000.000	0	000.000.000		0	0000000	0	000.000.000			0	00,00
5.02.5.05.1.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	0	1	Paket	000.000.000	0	0.000.000		0	0000000	0	0.000.000			0	00,00
5.02.5.05.1.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koleksi Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	0	12	Dokumen	0.000.000	0	000.000		1	000000	0	0.000.000			00	00,00
5.02.5.05.1.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	00	Laporan	0	00	Laporan	000.000.000	0	00.000.000		00	0000000	00	000.000.000			00	00,00
5.02.5.05.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang tersedia	00	Paket/Unit	0	00	Paket/Unit	000.000.000	0	000.000.000		00	0000000	00	000.000.000	Proses Pembayaran dilewati tidak efektif	Terdapatnya Kendala dari OPD yang terkendala	000,000000	00,00
5.02.5.05.1.07	Pengadaan Mobil	Jumlah Roda Mobil yang Dipelihara	1	Paket	0	1	Paket	00.000.000	0			0	0	1				000	0,00
5.02.5.05.1.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	00	Unit	0	00	Unit	000.000.000	0	000.000.000		00	0000000	00	000.000.000			000,000000	00,00
5.02.5.05.1.08	Pengelolaan Jaringan Komunikasi Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah	0	Jenis Jasa	0	0	Jenis Jasa	1.000.000.000	0	000.000.000		1	0000000	0	000.000.000	Tidak ada	Terdapatnya Kendala dari OPD yang terkendala	000,000000	00,00
5.02.5.05.1.08	Pengelolaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Surat Menyurat	00	Laporan	0	00	Laporan	00.000.000	0	0.000.000		0	0000000	0	00.000.000			00	00,00
5.02.5.05.1.08	Pengelolaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	00	Laporan	0	00	Laporan	000.000.000	0	00.000.000		0	0000000	0	000.000.000			00	00,00
5.02.5.05.1.08	Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	Laporan	0	0	Laporan	0.000.000.000	0	000.000.000		0	0000000	0	000.000.000			00	00,00
5.02.5.05.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	00	Unit	0	00	Unit	000.000.000	0	000.000.000		00	0000000	00	000.000.000	Tidak ada	Terdapatnya Kendala dari OPD yang terkendala	00,000000	00,00
5.02.5.05.1.09	Pemeliharaan Perlengkapan, Mesin Pendingin, Peralatan Kantor dan Peralatan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang dipelihara dan Pengadaan Meja dan Kursi Kantor dan Perlengkapan	00	Unit	0	00	Unit	00.000.000	0	0000000		00	0000000	00	000.000.000			00,000000	00,00
5.02.5.05.1.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	00	Unit	0	00	Unit	00.000.000	0	0.000.000		00	0000000	00	00.000.000			00,000	00,00
5.02.5.05.1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	0	1	Unit	00.000.000	0	0000000		0	0000000	0	000.000.000			0	00,00
5.02.5.05	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	Persentase terpenuhinya target penerimaan pendapatan	100	Persen	0	100	Persen	000.000.000		00.000.000		00,00	00.000.000	00,00	000.000.000			00,00	00,00
5.02.5.05.2.00	Register Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak-pajak dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0,010	Ribu Rupiah	0	0,040	Triliun Rupiah	404.400.000		00.000.000		0,000	00.000.000	0,010	000.000.000	Lingkup Wilayah pemungutan pajak Pajak di kabupaten lampung, dan beberapa objek ke kota/ provinsi masih dikenakan	Terdapatnya unsur kebijakan yang mempengaruhi	00,00000	00,00
5.02.5.05.2.01	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	0	12	Laporan	00.000.000	0	0000000		0	0000000	0	00.000.000			00	00,00
5.02.5.05.2.02	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemanfaatan yang telah Ditindaklanjuti dan Hasil Pemutakhiran	0	Laporan	0	0	Laporan	00.000.000	0	00.000.000		1	0000000	1	00.000.000			00	00,00
5.02.5.05.2.03	Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemberkasan Pengelolaan Pajak Daerah, Jumlah Dokumen Terselesaikan WP yang Memiliki Sistem Pajak	12	Dokumen	0	12	Dokumen	000.000.000	0	0.000.000		0	0000000	0	00.000.000			00	00,00
			12	Dokumen	0	12	Dokumen		0			0		0				00	

2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN SKPD

Secara garis besar capaian kinerja pelayanan SKPD pada Bapenda Provinsi Kalimantan Timur terjadi fluktuatif, ini disebabkan karena kondisi pandemi covid 19 yang berimbas kepada pelemahan ekonomi global dan ekonomi nasional, dan menghambat investasi serta terhentinya sektor-sektor usaha yang berdampak pada turunnya pendapatan daerah dari semua sektor. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel T-C.30

Capaian Kinerja Pelayanan Renstra Bapenda Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2019 - 2023 Perubahan

No	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci	Target Renstra PD					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	Capaian s/d 18 Agustus 2023	2023	
1	Persentase peningkatan pendanaan pembangunan daerah setiap tahunnya	3,84%	3,84%	-	-		7,81%	-9,45%	-				
2	Persentase tercapainya target Pendapatan Asli Daerah	-	-	100%	100%	100%	-	-	114,70%	150,30%	72,04%	100%	
3	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	-	-	100%	100%	100%	-	-	92,98%	154,83%	45,79%	100%	
4	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim	-	-	685 WP	739 WP	777 WP	-	-	692 WP	697 WP	739 WP	777 WP	

Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki cakupan wilayah operasional seluas 127.346,92 km^2 dengan 7 Kabupaten dan 3 Kota, 103 Kecamatan, serta 1.038 Desa / Kelurahan dengan jumlah penduduk 3.766.039 Jiwa. Secara keseluruhan jumlah Unit Pelaksana Teknis berjumlah 132 unit Kantor Bersama Samsat. Sedangkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang dimiliki berjumlah 605 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 317 orang, Pegawai Honorer dan atau Tenaga Outsourcing sejumlah 288 orang.

Dalam rangka upaya meningkatkan Pelayanan Publik pada pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka dilaksanakan layanan unggulan pada 9 Kantor Bersama (KB) SAMSAT di seluruh Kalimantan Timur dan pengembangannya antara lain:

a) Samsat Pembantu :

- Samarinda, berlokasi di :
  - Loa Bakung
  - Samarinda Utara
  - Sambutan
  - Mall Pelayanan Publik
- Balikpapan, berlokasi di :
  - Kebun Sayur
  - Kelurahan Graha Indah
  - Kelurahan Gunung Samarinda Baru
  - Kelurahan Tritib
- Kutai Kartanegara, berlokasi di :
  - Jl. Cut Nyak Dien
  - Muara Jawa
  - Kota Bangun
- Kutai Barat,berlokasi di :
  - Melak
  - Muara Tae
  - Pesat Bongan
  - Mahulu

- Paser, berlokasi di :
  - Long Ikis
- Berau, berlokasi di :
  - Pasar Sanggam Adji Dilayas
- Kutai Timur berlokasi di :
  - Muara Wahau
  - Bengalon
  - Muara Bengkal
- Bontang berlokasi di :
  - Loktuan

b) Samsat Drive Thru :
- Kantor Bapenda Prov. Kaltim Di Samarinda
- Jenderal Sudirman Balikpapan
- Penajam Paser Utara

c) Samsat Corner berlokasi di :
- Mall Mesra Indah, Samarinda
- Mall Plaza, Balikpapan
- Balikpapan Super Block (BSB)

d) Samsat Payment Point :
- Samarinda berlokasi di :
  - KCP Karang Asam
  - KCP Palaran
  - KCP Temindung Permai
  - KCP Sungai Dama
  - KCP Pasar Merdeka
- Kutai Kartanegara berlokasi di :
  - KCP Loa Duri
  - KCP Anggana
  - KCP Muara Muntai

- KCP Sebulu
- KCP Kembang Janggut
- KCP Muara Badak
- KCP Sp3
- KCP Muara Kaman
- KCP Marang Kayu
- KCP Tabang
- KCP Sanga Sanga

- Balikpapan berlokasi di :
  - KCP Manggar
- Penajam Paser Utara berlokasi di :
  - KCP Sepaku
  - KCP Babulu
  - KCP Sotek
  - KCP Waru
  - KCP Maridan
- Paser berlokasi di :
  - KCP Kuaro
  - KCP Tanah Grogot
  - KCP Batu Kajang
  - KCP Long Kali
  - KCP Muara Komam
- Berau berlokasi di :
  - KCP Talisayan
  - KCP Tanjung Batu
  - KCP Segah
  - KCP Batu Putih
- Kutai Timur berlokasi di :
  - KCP Muara Bengkal

- KCP Sangkulirang
- KCP Teluk Pandan
- KCP Bengalon
- KCP Muara Wahau
- KCP Kaliorang

- Kutai Barat berlokasi di :
  - KCP Tering
  - KCP Simpang Raya
  - KCP Muara Lawa
- Bontang berlokasi di :
  - KCP Telihan

e) Samsat Keliling (Mobil) berlokasi di :
- Samsat Keliling Samarinda
- Samsat Keliling Balikpapan
- Samsat Keliling Penajam Paser Utara
- Samsat Keliling Kutai Kartanegara
- Samsat Keliling Paser Jempol

f) Samsat Delivery :
- Samsat Kaltim Delivery
- Samsat Delivery POS

g) Samsat Desa berlokasi di :
- Desa Margahayu Kutai Kartanegara
- Desa Sangata Selatan Kutai Timur
- Desa Sri Mulyo Kutai Barat

h) Samsat Jelajah berlokasi di :
- Kutai Kartanegara
- Kutia Timur
- Kutai Barat

i) Samsat Paten berlokasi di :
   - Kecamatan Batu Engau Paser
   - Kecamatan Linggang Bigung Kutai Barat
   - Kecamatan Kaubun Kitua Timur
   - Kecamatan Loa Janan Ilir Samarinda

j) Samsat Terapung / Speed Boat berlokasi di :
   - Kutai Barat

k) Samsat Pojok Kantor Pos berlokasi di :
   - Balikpapan

l) E Samsat
   - PT Pos Indonesia
   - Bankaltim
   - Bank BTN
   - Bank BCA
   - Bank BNI
   - Bank Mandiri
   - Bank BRI Syariah
   - Indomaret
   - Pegadaian
   - Bhabinkamtibmas
   - Tokopedia
   - Gojek
   - LinkAja

m) Samsat bersertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008
   - Balikpapan
   - Samarinda
   - Kutai Kartanegara
   - Paser
   - Kutai Barat

n) Samsat Bus berlokasi di Samarinda

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Menjelaskan isu-isu strategis yang dihadapi berdasarkan evaluasi dan analisis berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023 Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk itu perlu diantisipasi dengan menyikapi beberapa isu-isu strategis dalam melaksanaan tugas-tugas pengawasan berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas :

1. Terbitnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)
2. Terbitnya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang berada di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Dengan kondisi geografis Provinsi Kalimantan Timur belum semua Samsat Pembantu dapat melaksanakan layanan pembayaran 5 tahunan, sehingga wajib pajak dalam menyelesaikan Pajak 5 tahunan perlu waktu dan biaya yang cukup besar untuk menuju Samsat Penuh.
4. Untuk daerah tertentu seperti perbatasan dalam memberikan layanan (samsat pembantu) masih sering mengalami kendala yang menyangkut jaringan yang masih kadang-kadang putus (Gangguan jaringan / blank spot).

5. Pemetaan Potensi PBBKB lintas Provinsi.
6. Masih banyaknya tunggakan PKB yang belum terealisasi, sementara penegakan hukum melalui razia kendaraan tidak bisa lagi dilaksanakan oleh kepolisian sesuai kebijakan Kapolri.
7. Dengan selalu berkembangnya teknologi informasi khususnya IT kesamsatan, menyebabkan perlunya selalu diadakan inovasi-inovasi yang bertujuan untuk memudahkan birokrasi dan layanan kepada wajib pajak.
8. Masih dalam tahap pemulihan ekonomi akibat dari pandemi covid 19 berimbas pada perlemahan ekonomi global dan ekonomi nasional, dan menghambat investasi serta terhentinya sektor-sektor usaha yang berdampak pada turunnya pendapatan daerah khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Terdapat sumber - sumber pendapatan baru pada Perangkat Daerah namun belum didukung dengan sarana prasarana serta regulasinya.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) dikaitkan dengan Rencana Kerja Perubahan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan analisis kebutuhan, untuk program dan kegiatan yang telah

direncanakan dan diusulkan telah sesuai dengan dokumen Renstra SKPD Tahun 2019 – 2023 Perubahan dan Rancangan Awal RKPD Perubahan.

Tahun 2023 Bapenda mengusulkan rumusan program dan kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka memudahkan pengukuran kinerja serta mendukung tema RKPD tahun 2023 Sedangkan mengenai besaran anggaran yang berbeda, hal ini didasarkan atas adanya kemampuan keuangan daerah yang dalam hal ini APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR				HASIL ANALISA KEBUTUHAN BAPENDA PROVINSI KALTIM TAHUN 2023 PERUBAHAN			
		INDIKATOR			PENDANAAN	INDIKATOR			PENDANAAN
		URAIAN	SATUAN	TARGET		URAIAN	SATUAN	TARGET	
	BAPENDA PROV. KALTIM				**264.005.275.732**				**255.306.871.451**
5 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Persen	90	**246.208.581.432**	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Persen	90	**232.782.504.151**
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	Persen	100		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	Persen	100	
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen / Laporan	45	**1.038.454.390**	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen / Laporan	45	**1.038.454.390**
5 02 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	201.184.350	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	201.184.350
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	10	236.014.040	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	10	236.014.040
5 02 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	10	191.831.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	10	191.831.000
5 02 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	9.225.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	9.225.000
5 02 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.725.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.725.000
5 02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	17	286.350.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	17	286.350.000
5 02 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	107.125.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	107.125.000
5 02 01 1.02	**Administrasi Keuangan**	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Laporan / ASN	333	**160.019.659.913**	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Laporan / ASN	333	**142.652.059.923**
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	317	159.768.459.913	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	317	142.400.859.923
5 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	15	251.200.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	15	251.200.000
5 02 01 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat D**	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	Laporan	20	**596.600.000**	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	Laporan	20	**596.600.000**
5 02 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	10	318.000.000	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	10	318.000.000
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	10	278.600.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	10	278.600.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR				HASIL ANALISA KEBUTUHAN BAPENDA PROVINSI KALTIM TAHUN 2023 PERUBAHAN			
		INDIKATOR			PENDANAAN	INDIKATOR			PENDANAAN
		URAIAN	SATUAN	TARGET		URAIAN	SATUAN	TARGET	
5 02 01 1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Milyar Rupiah	23,50	**3.110.266.900**	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Milyar Rupiah	23,50	**3.110.266.900**
5 02 01 1.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2	940.390.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2	940.390.000
5 02 01 1.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	1	300.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Analisa serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	1	300.000.000
5 02 01 1.04 03	Penyuluhan dan Pengebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Pengebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	4	400.000.000	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Pengebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	4	400.000.000
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	9	195.700.000	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	9	195.700.000
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	37	579.512.500	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	37	579.512.500
5 02 01 1.04 06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen	3	310.356.400	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen	3	310.356.400
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	112	384.218.000	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	112	384.218.000
5 02 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	Persen	72	**2.623.704.000**	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	Persen	72	**2.623.704.000**
5 02 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	707.404.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	707.404.000
5 02 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	10	1.121.100.000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	10	1.121.100.000
5 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-U	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	78	795.200.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	78	795.200.000
5 02 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	Buah	309	**13.300.027.329**	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	Buah	309	**13.664.850.829**
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Paket	10	165.430.800	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Paket	10	180.503.800
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	28	3.442.647.449	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	28	3.657.397.949
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	12	2.816.131.540	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	12	2.816.131.540
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-u	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Dokumen	348	50.067.600	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Dokumen	348	50.067.600
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	253	6.825.749.940	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	253	6.960.749.940

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR				HASIL ANALISA KEBUTUHAN BAPENDA PROVINSI KALTIM TAHUN 2023 PERUBAHAN			
		INDIKATOR			PENDANAAN	INDIKATOR			PENDANAAN
		URAIAN	SATUAN	TARGET		URAIAN	SATUAN	TARGET	
5 02 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Unit	210	**20.117.648.420**	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Unit	210	**22.981.378.082**
5 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Unit	5	4.831.760.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Unit	5	4.831.760.000
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diadakan	Paket	13	1.227.259.700	Jumlah Paket Mebel yang Diadakan	Paket	13	1.471.851.200
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Unit	187	5.169.670.320	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Unit	187	5.467.258.120
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	3	8.610.564.800	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	3	11.132.115.162
5 02 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	2	78.393.600	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	2	78.393.600
5 02 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	6	**38.364.572.592**	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	6	**38.512.903.612**
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	120	60.405.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	120	60.405.500
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	120	8.340.016.422	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	120	8.370.427.822
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	50	29.964.150.670	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	50	30.082.070.290
5 02 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Unit	1.278	**7.037.647.888**	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Unit	1.278	**7.602.286.415**
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	146	2.640.867.188	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	146	2.695.942.188
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	1.119	1.414.855.400	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	1.119	1.457.943.400
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	2.981.926.300	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	3.448.398.827
5 02 02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase terpenuhinya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Persen	100	**1.292.370.000**	Persentase terpenuhinya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Persen	100	**1.292.370.000**
		Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	Wajib Pajak	777		Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	Wajib Pajak	777	
5 02 02 1.03	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK	Triliun Rupiah	1,747	**554.520.000**	Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK	Triliun Rupiah	1,747	**554.520.000**
5 02 02 1.03 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	4	554.520.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	4	554.520.000
5 02 02 1.05	**Kegiatan Penunjang Urusan**	Jumlah realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	Triliun Rupiah	3,525	**737.850.000**	Jumlah realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	Triliun Rupiah	3,525	**737.850.000**
5 02 02 1.05 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	4	737.850.000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	4	737.850.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR				HASIL ANALISA KEBUTUHAN BAPENDA PROVINSI KALTIM TAHUN 2023 PERUBAHAN			
		INDIKATOR			PENDANAAN	INDIKATOR			PENDANAAN
		URAIAN	SATUAN	TARGET		URAIAN	SATUAN	TARGET	
5 02 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Persen	100	**16.504.327.300**	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Persen	100	**21.231.997.300**
5 02 04 1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Triliun Rupiah	6,839	**16.504.327.300**	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Triliun Rupiah	6,839	**21.231.997.300**
5 02 04 1.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2	610.180.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2	610.180.000
5 02 04 1.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	Dokumen	1	700.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	Dokumen	1	700.000.000
		Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1		Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1	
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daer	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	9	636.820.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	9	636.820.000
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	108	1.006.600.000	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	108	1.099.720.000
5 02 04 1.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	3	1.326.509.700	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	3	5.776.009.700
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	12	1.200.000.000	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	12	1.200.000.000
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	Laporan	38	7.213.572.000	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	Laporan	38	7.293.672.000
5 02 04 1.01 09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	4	400.000.000	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	4	400.000.000
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	108	1.810.555.600	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	108	1.915.595.600
5 02 04 1.01 11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen Surat Persetujuan/Penolak	5	400.000.000	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen Surat Persetujuan/Penolak	5	400.000.000
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Dae	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	okumen LH	1	800.000.000	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	okumen LH	1	800.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	9		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	9	
5 02 04 1.01 13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Dae	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	9	400.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	9	400.000.000

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Pendapatan Asli Daerah, dengan kontribusi penerimaan terbesarnya berasal dari Pajak Daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), didalam pelaksanaan pemungutan dua sektor pajak daerah tersebut melibatkan para pihak yang memiliki kewenangan dalam rangkaian proses penyelenggaraan SAMSAT, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Rangkaian proses pembayaran PKB dan BBNKB diawali dengan kegiatan registrasi dan identifikasi yang merupakan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia bidang lalu lintas, setelah itu dilanjutkan dengan penetapan pajak dan pembayarannya oleh Bapenda Kaltim, kemudian penarikan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Bentuk sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas masing-masing pihak terkait diimplementasikan melalui forum koordinasi rutin Tim Pembina SAMSAT untuk menggali isu strategis.

TABEL T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023

NO	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100%	**RAKOR SAMSAT**
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6,839 Triliun	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	38 Laporan	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dikaitkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka penetapan program dan kegiatan yang berkait dengan hal tersebut dalam rangka optimalisasi Peningkatan Penerimaan Daerah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan.

Asumsi Makro perekonomian nasional yang telah diusulkan dan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2023

INDIKATOR	KONSULTASI PUBLIK RKPD PROV. KALTIM
a. Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)	5,3-5,9 %
b. Inflasi (%,yoy)	2-4%
c. Tingkat Suku Bunga SBN 10 tahun (%)	7,34-9,16%
d. Nilai Tukar (Rp/USD)	14.300-14.800
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barel)	90-110
f. Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	660-680
g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.050-1.150

Sumber data : Kemenkeu.go.id

Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan trend realisasi pendapatan, perkembangan asumsi makro ekonomi, perkembangan kebijakan dan kondisi keuangan negara, kondisi riil dan kebijakan daerah.

Kebijakan Pemerintah Pusat sangat berpengaruh terhadap perencanaan target penerimaan dari Dana Perimbangan. Pada Tahun 2023, komponen penerimaan masih didominasi dari sektor Minerba dan Migas. Proyeksi penghitungan atas Royalty Batubara dan lifting migas didasarkan oleh harga

komoditi dan kurs rupiah terhadap dolar yang relatif sulit diprediksi dan berfluktuatif.

Dampak pandemi COVID-19 yang melanda secara global di seluruh dunia sejak akhir Desember 2019 masih memberikan guncangan yang sangat signifikan terhadap perekonomian dunia. Akibatnya perekonomian global dan nasional mengalami kontraksi yang cukup parah pada tahun 2020, dan hingga triwulan I tahun 2021 juga masih memberikan pengaruh yang sangat besar. Perekonomian negara berkembang diperkirakan masih tertahan akibat peningkatan beban kasus COVID-19, hambatan untuk vaksinasi, dan penarikan dukungan. Kondisi ini membuat output global diprediksi masih 2 persen di bawah proyeksi pra-pandemi. Sekitar dua pertiga dari ekonomi pasar negara berkembang juga masih belum menutupi kerugian pendapatan per kapita tahun lalu. Tekanan pandemi COVID-19 ini terutama paling terasa di negara-negara yang memiliki ketergantungan besar terhadap perdagangan global, pariwisata, ekspor komoditas dan pembiayaan eksternal.

Kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada triwulan III tahun 2021 masih memiliki tren perbaikan meskipun mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan III tahun 2021 yang mencapai 4,51% (y-o-y) yang merupakan pertumbuhan positif kali kedua semenjak pandemi. Capaian ini melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,76% (y-o-y) sebagai salah satu dampak base effect mulai membaiknya perekonomian pada triwulan III tahun 2020 di tengah kasus COVID-19 yang kembali meningkat secara nasional di triwulan III tahun 2021.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur, hampir seluruh provinsi di Kalimantan melanjutkan tren perbaikan kinerja perekonomian meski melambat. Berdasarkan pangsanya, Kalimantan Timur masih menjadi provinsi dengan ekonomi terbesar di Kalimantan dengan pangsa mencapai 50,20% terhadap total perekonomian Kalimantan. Selaras dengan hal tersebut, Perbaikan perekonomian nasional juga mengalami tren perbaikan meskipun mengalami perlambatan seperti perekonomian Kalimantan Timur dan Kalimantan. Laju pertumbuhan ekonomi nasional triwulan III tahun 2021 mencapai 3,51% (y-o-y), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh lebih tinggai mencapai 6,28% (y-o-y).

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu institusi yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan lain – lain, sejalan dengan tugas dan fungsi itu maka tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perubahan ini adalah :

"**Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Pemerintah**"

Indikator Tujuan	Target	Satuan
Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah	17.998	Miliar Rp.

Untuk mewujudkan tujuan dimaksud, Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur juga menyesuaikan target sasarannya yaitu :

No.	Sasaran	Indikator		
		Uraian	Target	Satuan
1	Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah	Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8.775.100.052.106,05	Rupiah
2	Penambahan potensi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak penghasilan bagi wajib pajak yang melakukan usaha/ pekerjaan di provinsi kalimantan timur	Jumlah Realisasi Dana Transfer dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	9.223.558.479.661,4	Rupiah

Sesuai dengan sasaran tersebut maka Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur berupaya dengan beberapa strategi antara lain :

- Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui sistem informasi berbasis digitalisasi.
- Optimalisasi penerimaan dengan memaksimalkan peranan UPTD, mitra kerja dan kualitas SDM yang tersedia.

- Secara berkala melakukan sosialisasi atas peraturan terbaru dan pemberian penghargaan pada masyarakat yang taat pajak serta memberikan relaksasi pajak sehingga menumbuhkan dukungan masyarakat.
- Peningkatan sarana prasarana gedung kantor dan peralatan serta kelengkapannya agar lebih representatif dan mudah dijangkau oleh wajib pajak.
- Memaksimalkan koordinasi dengan mitra kerja lain dalam hal intensifikasi/ekstensifikasi Penerimaan Lain – Lain dan Dana Bagi Hasil.
- Menggali potensi sumber penerimaan baru bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Pengendalian dan pengawasan terhadap penerimaan yang melibatkan / bekerja sama dengan Instansi / Dinas terkait.

Adapun kebijakan yang ditempuh Bapenda Provinsi Kaltim adalah sebagai berikut :

- Kerjasama dengan Polda Kaltim mengembangkan layanan yang berbasis teknologi informasi
- Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM Aparatur.
- Pembangunan / pengadaan gedung kantor, pengadaan peralatan dan pengadaan perlengkapan kantor dalam upaya pelayanan prima.
- Kerjasama dengan perbankan dan dunia usaha terkait dengan inovasi pelayanan pajak daerah.
- Kerjasama dengan Perbankkan, OPD Pemungut terkait dengan Inovasi layanan pembayaran retribusi daerah melalui elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETP)
- Memaksimalkan koordinasi dengan mitra kerja lain dalam hal intensifikasi / ekstensifikasi penerimaan lain – lain dan Dana Bagi Hasil.
- Melakukan kajian secara holistic untuk seluruh potensi pendapatan daerah di seluruh lingkup perangkat daerah.
- Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak
- Optimalisasi penanganan pemungutan piutang pajak dan retribusi melalui inventarisasi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan Instansi Vertikal, SKPD dan pemerintah Kabupaten/Kota;
- Pembaharuan regulasi melalui revisi kebijakan terhadap peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah

- Upaya penyesuaian dividen dari Perusda/BUMD untuk Pemerintah Provinsi melalui hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BUMD
- Mendorong akses informasi yang lebih luas bagi daerah dalam rangka menjamin transparansi dan pertanggung jawaban data lifting yang lebih akurat sebagai dasar pembagian DBH Migas.
- Koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat terkait kebijakan penetapan penyaluran kurang bayar dengan memperhitungkan pemotongan lebih bayar DBH dapat dilakukan secara bertahap sehingga stabilitas belanja daerah dapat terjaga
- Koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan penyaluran DBH Dana Reboisasi ke daerah agar dilakukan pada awal tahun sehingga tidak mempengaruhi belanja daerah khususnya belanja kegiatan Dana Reboisasi.
- Melakukan pengendalian dan Pengawasan terhadap penjualan/distribusi BBM sektor Industri oleh Tim Inspektorat, BPKP Perwakilan Prov. Kaltim, dan Kepolisian terhadap penerimaan dari Wajib Pungut;
- Penertiban ijin wajib pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Melaksanakan Penyesuaian Penghitungan Besaran Perolehan Air Permukaan berdasarkan rumusan perhitungan dari tim PUPR, terkait penetapan besaran tarif nilai perolehan air permukaan (NPA).
- Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Melakukan cleansing data base kendaraan bermotor melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama serta Pemerintah Kabupaten Kota Se Kaltim dalam upaya peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu program sebanyak 3 dan kegiatan sebanyak 12 serta sub kegiatan sebanyak 51 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

REKAP PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BAPENDA PROVINSI KALTIM

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
5	**02**	**01**	**1.01**		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan**
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
5	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5	**02**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**
5	02	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
5	02	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
5	02	01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
5	02	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah
5	02	01	1.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
5	**02**	**02**	**1.03**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
5	**02**	**02**	**1.05**		**Kegiatan Penunjang Urusan**
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

5 02 04 1.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

5 02 04 1.01 07 Penetapan Wajib Pajak Daerah

5 02 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

5 02 04 1.01 09 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

5 02 04 1.01 10 Penagihan Pajak Daerah

5 02 04 1.01 11 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

5 02 04 1.01 12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

5 02 04 1.01 13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Mengacu kepada Perda No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda No. 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi kalimantan timur, pasal 6 Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2016 tentang susunan, tugas, fungsi, dan tatakerja Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah dibidang Pajak Daerah, Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Pada Tahun 2023 Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 17,998 Trilyun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 8,775 Trilyun dan Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 557,339 Milyar serta Dana Perimbangan sebesar Rp. 8,666 Trilyun.

Dengan semakin berkembangnya teknologi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dituntut untuk melakukan inovasi pelayanan, dimana inovasi pelayanan yang prima memerlukan pembiayaan yang tinggi, didalam rencana kerja tahun 2023 dititik beratkan kepada Isu terbitnya Undang – Undang tentang HKPD dan Undang – Undang tentang IKN serta kemudahan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar Pajak ataupun Retribusi dalam rangka optimalisasi pendapatan.

Untuk mendukung program kerja yang menjadi skala prioritas dan penunjang tersebut diatas, diperlukan dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebesar Rp. 255.306.871.451,-

Yang mana dari besaran usulan belanja tersebut meliputi Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur dan 9 (sembilan) UPTB yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan besaran pagu dana untuk masing – masing
UPTD sesuai dengan kebutuhan dimasing – masing UPTD. Adapun besarannya adalah sebagai berikut :

REKAP PENDANAAN TA 2023 PERUBAHAN			
UNIT	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4
Bapenda Provinsi	217.624.772.713	207.809.249.212	- 9.815.523.501
UPTD PPRD Samarinda	8.136.212.720	8.868.919.320	732.706.600
UPTD PPRD Kukar	6.919.893.660	7.110.223.660	190.330.000
UPTD PPRD Kutim	4.191.811.740	4.191.811.740	-
UPTD PPRD Kubar	4.353.868.150	4.410.268.150	56.400.000
UPTD PPRD Balikpapan	6.590.717.400	6.590.717.400	-
UPTD PPRD Bontang	3.999.410.130	4.014.760.130	15.350.000
UPTD PPRD PPU	3.992.998.339	3.992.998.339	-
UPTD PPRD Paser	4.038.587.380	4.038.587.380	-
UPTD PPRD Berau	4.157.006.500	4.279.336.120	122.329.620
Jumlah	**264.005.278.732**	**255.306.871.451**	- **8.698.407.281**

Page 1

Dari pagu pendanaan yang sudah ditetapkan tersebut juga telah dirincikan sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada masing – masing pengampunya. Hal ini bisa dilihat pada tabel rencana kerja dan pendanaan berikut ini:

RENCANA KINERJA PIMPINAN TINGGI PRATAMA (JPT) (Eselon II) TAHUN 2023 PERUBAHAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA			PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah					**264.005.278.732**	**255.306.871.451**	**- 8.698.407.281**
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90	Persen	246.208.581.432	232.782.504.151	- 13.426.077.281
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	Persen			
5 2 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100	Persen	1.292.370.000	1.292.370.000	-
		Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	777	Wajib Pajak			
5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	Persen	16.504.327.300	21.231.997.300	4.727.670.000

RENCANA KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR (Eselon III) TAHUN 2023 PERUBAHAN

KODE	KEGIATAN	INDIKATOR			PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		Uraian	Target	Satuan			
SEKRETARIS					201.185.274.113	186.920.250.612	- 14.265.023.501
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	27	Dokumen / Laporan	760.279.350	760.279.350	-
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	333	Laporan / ASN	160.019.659.913	142.652.089.923	- 17.367.599.990
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrsi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	20	Laporan	596.600.000	596.600.000	-
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72	Persen	2.279.504.000	2.279.504.000	-
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	309	Buah	7.458.377.440	7.657.275.440	198.898.000
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	94	Unit	17.716.926.730	20.204.951.692	2.488.024.962
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29	Jenis	10.185.634.580	10.185.634.580	-
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	365	Unit	2.168.292.100	2.583.945.627	415.653.527
KABID BUKAN PAJAK					2.202.198.900	2.202.198.900	-
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23,50	Milyar Rupiah	909.828.900	909.828.900	-
5 02 02 1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK	1,75	Triliun Rupiah	554.520.000	554.520.000	-
5 02 02 1.05	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	3,53	Triliun Rupiah	737.850.000	737.850.000	-
KABID PAJAK					8.123.400.000	8.123.400.000	-
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6,84	Triliun Rupiah	8.123.400.000	8.123.400.000	-
KABID PPSIP					3.877.079.700	8.326.579.700	4.449.500.000
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23,50	Milyar Rupiah	1.240.390.000	1.240.390.000	-
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6,84	Triliun Rupiah	2.636.689.700	7.086.189.700	4.449.500.000
KABID PEP					2.236.820.000	2.236.820.000	-
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23,50	Milyar Rupiah	400.000.000	400.000.000	-
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6,84	Triliun Rupiah	1.836.820.000	1.836.820.000	-

RENCANA KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR (Eselon III) TAHUN 2023 PERUBAHAN

KODE	KEGIATAN	INDIKATOR			PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		Uraian	Target	Satuan			
KA UPT PPRD SAMARINDA					8.136.212.720	8.868.919.320	732.706.600
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2	Dokumen	52.800.000	52.800.000	-
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23,50	Milyar Rupiah	45.024.000	45.024.000	-
5 02 01 1.05	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72	Persen	26.400.000	26.400.000	-
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7	Buah	556.675.840	591.251.340	34.575.500
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	7	Unit	440.491.600	816.196.300	375.704.700
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis	5.955.954.780	6.005.636.180	49.681.400
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	134	Unit	451.250.500	492.225.500	40.975.000
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6,84	Triliun Rupiah	607.616.000	839.386.000	231.770.000
KA UPT PPRD KUTAI KARTANEGARA					6.919.893.660	7.110.223.660	190.330.000
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2	Dokumen	21.000.000	21.000.000	-
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23,50	Milyar Rupiah	69.600.000	69.600.000	-
5 02 01 1.05	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72	Persen	34.800.000	34.800.000	-
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7	Buah	851.923.500	983.273.500	131.350.000
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	10	Unit	210.420.500	210.420.500	-
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis	4.620.089.460	4.628.249.460	8.160.000
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	230	Unit	576.816.600	627.636.600	50.820.000
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6,84	Triliun Rupiah	535.243.600	535.243.600	-
KA UPT PPRD KUTAI TIMUR					4.191.811.740	4.191.811.740	-
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2	Dokumen	41.500.000	41.500.000	-
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23,50	Milyar Rupiah	154.760.000	154.760.000	-
5 02 01 1.05	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72	Persen	43.800.000	43.800.000	-
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7	Buah	430.127.500	430.127.500	-
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	16	Unit	375.656.500	375.656.500	-
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis	2.347.449.840	2.347.449.840	-
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	64	Unit	550.667.900	550.667.900	-
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6,84	Triliun Rupiah	239.850.000	239.850.000	-

RENCANA KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR (Eselon III) TAHUN 2023 PERUBAHAN

KODE	KEGIATAN	INDIKATOR			PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		Uraian	Target	Satuan			
KA UPT PPRD KUTAI BARAT					4.353.868.150	4.410.268.150	56.400.000
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2	Dokumen	30.400.000	30.400.000	-
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23,50	Milyar Rupiah	81.600.000	81.600.000	-
5 02 01 1.05	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72	Persen	42.000.000	42.000.000	-
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7	Buah	432.137.600	432.137.600	-
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	6	Unit	247.148.300	247.148.300	-
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis	2.641.546.562	2.641.546.562	-
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	65	Unit	454.247.688	464.247.688	10.000.000
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6,84	Triliun Rupiah	424.788.000	471.188.000	46.400.000
KA UPT PPRD BALIKPAPAN					6.590.717.400	6.590.717.400	-
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2	Dokumen	17.883.040	17.883.040	-
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23,50	Milyar Rupiah	41.400.000	41.400.000	-
5 02 01 1.05	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72	Persen	20.400.000	20.400.000	-
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7	Buah	659.736.200	659.736.200	-
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	10	Unit	399.938.200	399.938.200	-
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis	4.170.049.760	4.170.049.760	-
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	121	Unit	960.740.200	960.740.200	-
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6,84	Triliun Rupiah	320.570.000	320.570.000	-
KA UPT PPRD BONTANG					3.999.410.130	4.014.760.130	15.350.000
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2	Dokumen	26.400.000	26.400.000	-
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23,50	Milyar Rupiah	25.200.000	25.200.000	-
5 02 01 1.05	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72	Persen	44.400.000	44.400.000	-
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7	Buah	781.057.900	781.057.900	-
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	7	Unit	170.576.490	170.576.490	-
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis	2.122.958.740	2.131.118.740	8.160.000
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	76	Unit	474.477.000	481.667.000	7.190.000
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6,84	Triliun Rupiah	354.340.000	354.340.000	-

RENCANA KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR (Eselon III) TAHUN 2023 PERUBAHAN

KODE	KEGIATAN	INDIKATOR			PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		Uraian	Target	Satuan			
KA UPT PPRD PENAJAM PASER UTARA					3.992.998.339	3.992.998.339	-
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2	Dokumen	25.920.000	25.920.000	-
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23,50	Milyar Rupiah	25.680.000	25.680.000	-
5 02 01 1.05	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72	Persen	51.000.000	51.000.000	-
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7	Buah	716.470.949	716.470.949	-
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	7	Unit	69.820.400	69.820.400	-
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis	2.160.791.090	2.160.791.090	-
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	64	Unit	464.117.900	464.117.900	-
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6,84	Triliun Rupiah	479.198.000	479.198.000	-
KA UPT PPRD PASER					4.038.587.380	4.038.587.380	-
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2	Dokumen	20.800.000	20.800.000	-
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23,50	Milyar Rupiah	16.800.000	16.800.000	-
5 02 01 1.05	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72	Persen	41.400.000	41.400.000	-
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7	Buah	896.018.000	896.018.000	-
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	16	Unit	20.597.500	20.597.500	-
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis	2.101.143.680	2.101.143.680	-
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	129	Unit	421.008.200	421.008.200	-
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6,84	Triliun Rupiah	520.820.000	520.820.000	-
KA UPT PPRD BERAU					4.157.006.500	4.279.336.120	122.329.620
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2	Dokumen	41.472.000	41.472.000	-
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23,50	Milyar Rupiah	99.984.000	99.984.000	-
5 02 01 1.05	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72	Persen	40.000.000	40.000.000	-
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7	Buah	517.502.400	517.502.400	-
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	17	Unit	466.072.200	466.072.200	-
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis	2.058.954.100	2.141.283.720	82.329.620
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	114	Unit	508.029.800	548.029.800	40.000.000
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6,84	Triliun Rupiah	424.992.000	424.992.000	-

RENCANA KINERJA PEJABAT PENGAWAS (Eselon IV) TAHUN 2023 PERUBAHAN

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR			PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		Uraian	Target	Satuan			
BAPENDA PROV. KALTIM					217.624.772.713	207.809.249.212	- 9.815.523.501
SUBAG PROGRAM					760.279.350	760.279.350	-
5 02 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	201.184.350	201.184.350	
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	91.345.000	91.345.000	
5 02 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	58.325.000	58.325.000	
5 02 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	9.225.000	9.225.000	
5 02 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	6.725.000	6.725.000	
5 02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	Laporan	286.350.000	286.350.000	
5 02 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	107.125.000	107.125.000	
SUBAG KEUANGAN DAN ASET					186.938.328.743	172.538.305.242	- 14.400.023.501
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	317	Orang / Bulan	159.768.459.913	142.400.859.923	- 17.367.599.990
5 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1	Laporan	-	-	
5 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15	Laporan	251.200.000	251.200.000	
5 02 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10	Laporan	318.000.000	318.000.000	
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	Laporan	278.600.000	278.600.000	
5 02 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	Paket	707.404.000	707.404.000	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	75.715.500	75.715.500	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	Paket	1.111.628.500	1.175.526.500	63.898.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR			PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		Uraian	Target	Satuan			
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2	Paket	2.410.365.000	2.410.365.000	
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	240	Dokumen	17.452.800	17.452.800	
5 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	5	Unit	4.831.760.000	4.831.760.000	
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Paket	617.110.800	617.110.800	
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	80	Unit	3.379.097.530	3.545.572.130	166.474.600
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	3	Unit	8.810.564.800	11.132.115.162	2.321.550.362
5 02 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2	Unit	78.393.600	78.393.600	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	2.114.284.200	2.114.284.200	
5 02 01 1.09 02	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	391.161.000	391.161.000	
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	236	Unit	731.035.000	731.035.000	
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	1.046.096.100	1.461.749.627	415.653.527
SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN					13.486.666.020	13.621.666.020	135.000.000
5 02 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10	Dokumen	1.121.100.000	1.121.100.000	
5 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	Orang	481.000.000	481.000.000	
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63	laporan	3.843.215.640	3.978.215.640	135.000.000
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	10.000.000	10.000.000	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	laporan	8.061.350.380	8.061.350.380	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR			PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		Uraian	Target	Satuan			
SUBID PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN					2.827.079.700	7.326.579.700	4.449.500.000
5 02 01 1.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2	Dokumen	940.390.000	940.390.000	
5 02 04 1.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2	Dokumen	610.180.000	610.180.000	
5 02 04 1.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3	Laporan	1.326.509.700	5.776.009.700	4.449.500.000
SUBID ANALISIS PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAN PELAYANAN					1.000.000.000	1.000.000.000	-
5 02 01 1.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1	Dokumen	300.000.000	300.000.000	
5 02 04 1.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	1	Dokumen	700.000.000	700.000.000	
		Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	Laporan		-	
SUBID RETRIBUSI DAERAH					909.828.900	909.828.900	-
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1	Laporan	410.374.500	410.374.500	
5 02 01 1.04 06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	3	Dokumen	310.356.400	310.356.400	
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	Laporan	189.098.000	189.098.000	
SUBID PENERIMAAN LAIN - LAIN					554.520.000	554.520.000	-
5 02 02 1.03 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4	Dokumen	554.520.000	554.520.000	
SUBID BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK					737.850.000	737.850.000	-
5 02 02 1.05 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4	Laporan	737.850.000	737.850.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR			PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		Uraian	Target	Satuan			
SUBID PENDATAAN, ADMINISTRASI DAN KEBERATAN PAJAK					800.000.000	800.000.000	-
5 02 04 1.01 09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4	Dokumen	400.000.000	400.000.000	
5 02 04 1.01 11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	5	Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan	400.000.000	400.000.000	
SUBID PKB DAN BBNKB					6.123.400.000	6.123.400.000	-
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	2	Laporan	6.123.400.000	6.123.400.000	
SUBID PAJAK DAERAH LAINNYA					1.200.000.000	1.200.000.000	-
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	Dokumen	1.200.000.000	1.200.000.000	
SUBID PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN					1.200.000.000	1.200.000.000	-
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	1	Dokumen LHP	800.000.000	800.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9	Laporan		-	
5 02 04 1.01 13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	9	Laporan	400.000.000	400.000.000	
SUBID KAJIAN HUKUM DAN PERUNDANG UNDANGAN					1.036.820.000	1.036.820.000	-
5 02 01 1.04 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4	Laporan	400.000.000	400.000.000	
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9	Laporan	636.820.000	636.820.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR			PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		Uraian	Target	Satuan			
UPTD PPRD WILAYAH SAMARINDA					8.136.212.720	8.868.919.320	732.706.600
SUBAG TATA USAHA					7.483.973.720	7.984.509.320	500.936.600
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	27.600.000	27.600.000	
5 02 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	25.200.000	25.200.000	
5 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	26.400.000	26.400.000	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	6.918.600	21.991.600	15.073.000
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	256.693.400	276.195.900	19.502.500
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	52.156.640	52.156.640	
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	1.939.200	1.939.200	
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	laporan	238.968.000	238.968.000	
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	277.027.000	521.618.500	244.591.500
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	Unit	163.464.000	294.577.200	131.113.200
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	3.000.000	3.000.000	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	1.011.663.300	1.042.074.700	30.411.400
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	laporan	4.941.291.480	4.960.561.480	19.270.000
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	155.712.500	160.787.500	5.075.000
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	121	Unit	45.454.800	81.354.800	35.900.000
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	250.083.200	250.083.200	
SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN					383.868.000	510.598.000	126.730.000
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	Dokumen		-	
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	Laporan	18.144.000	18.144.000	
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	106.900.000	199.930.000	93.030.000
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4	Laporan	258.824.000	292.524.000	33.700.000
SEKSI PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN					268.773.000	373.812.000	105.040.000
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Laporan	26.880.000	26.880.000	
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen	241.892.000	346.932.000	105.040.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR			PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		Uraian	Target	Satuan			
UPTD PPRD WILAYAH KUTAI KARTANEGARA					6.919.883.660	7.110.223.660	190.330.000
SUBAG TATA USAHA					6.315.050.060	6.505.380.060	190.330.000
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	12.600.000	12.600.000	
5 02 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	8.400.000	8.400.000	
5 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	34.800.000	34.800.000	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	6.052.000	6.052.000	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	557.274.200	688.624.200	131.350.000
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	24.822.900	24.822.900	
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	3.878.400	3.878.400	
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14	laporan	259.896.000	259.896.000	
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	64.210.600	64.210.600	
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	Unit	146.209.900	146.209.900	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	2.528.100	2.528.100	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	1.068.114.200	1.068.114.200	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	laporan	3.549.447.160	3.557.607.160	8.160.000
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	392.738.800	392.738.800	
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	214	Unit	83.647.900	83.647.900	
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.630.000	191.250.000	90.620.000
SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN					258.750.000	258.750.000	-
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	Dokumen	25.800.000	25.800.000	
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	Laporan	17.400.000	17.400.000	
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	158.550.000	158.550.000	
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4	Laporan	57.000.000	57.000.000	
SEKSI PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN					346.093.600	346.093.600	-
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Laporan	26.400.000	26.400.000	
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen	319.693.600	319.693.600	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR			PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		Uraian	Target	Satuan			
UPTD PPRD WILAYAH KUTAI TIMUR					4.191.811.740	4.191.811.740	-
SUBAG TATA USAHA					3.797.201.740	3.797.201.740	-
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	20.750.000	20.750.000	
5 02 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	20.750.000	20.750.000	
5 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	43.800.000	43.800.000	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	22.095.000	22.095.000	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	144.712.500	144.712.500	
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	31.686.000	31.686.000	
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	10.019.200	10.019.200	
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23	laporan	221.614.800	221.614.800	
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	98.069.600	98.069.600	
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Unit	277.586.900	277.586.900	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	5.000.000	5.000.000	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	733.245.600	733.245.600	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	laporan	1.609.204.240	1.609.204.240	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Ope	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	280.493.500	280.493.500	
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54	Unit	126.924.400	126.924.400	
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	151.250.000	151.250.000	
SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN					273.160.000	273.160.000	-
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	Dokumen	60.400.000	60.400.000	
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	Laporan	46.360.000	46.360.000	
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	133.650.000	133.650.000	
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4	Laporan	32.750.000	32.750.000	
SEKSI PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN					121.450.000	121.450.000	-
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Laporan	48.000.000	48.000.000	
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen	73.450.000	73.450.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR			PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		Uraian	Target	Satuan			
UPTD PPRD WILAYAH KUTAI BARAT					4.353.868.150	4.410.268.150	56.400.000
SUBAG TATA USAHA					3.847.480.150	3.857.480.150	10.000.000
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	13.100.000	13.100.000	
5 02 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	17.300.000	17.300.000	
5 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	42.000.000	42.000.000	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	6.000.000	6.000.000	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	150.860.000	150.860.000	
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	20.220.900	20.220.900	
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	3.555.200	3.555.200	
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19	laporan	251.501.500	251.501.500	
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	74.699.000	74.699.000	
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Unit	172.449.300	172.449.300	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	5.000.000	5.000.000	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	575.951.602	575.951.602	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	laporan	2.060.594.960	2.060.594.960	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	229.999.688	239.999.688	10.000.000
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57	Unit	74.450.000	74.450.000	
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	149.798.000	149.798.000	
SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN					305.600.000	352.000.000	46.400.000
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	Dokumen	37.800.000	37.800.000	
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	Laporan	18.000.000	18.000.000	
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	174.880.000	174.880.000	
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4	Laporan	74.920.000	121.320.000	46.400.000
SEKSI PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN					200.788.000	200.788.000	-
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Laporan	25.800.000	25.800.000	
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen	174.988.000	174.988.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR			PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		Uraian	Target	Satuan			
UPTD PPRD WILAYAH BALIKPAPAN					6.590.717.400	6.590.717.400	-
SUBAG TATA USAHA					6.228.747.400	6.228.747.400	-
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	9.003.040	9.003.040	
5 02 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	8.080.000	8.080.000	
5 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	20.400.000	20.400.000	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	5.855.000	5.855.000	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	173.774.200	173.774.200	
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	18.275.000	18.275.000	
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen		-	
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29	laporan	461.832.000	461.832.000	
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket		-	
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	Unit	399.938.200	399.938.200	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	1.500.000	1.500.000	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	1.193.854.000	1.193.854.000	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	laporan	2.574.695.760	2.574.695.760	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	Unit	440.930.200	440.930.200	
5 02 01 1.09 05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	114	Unit	120.510.000	120.510.000	
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	399.300.000	399.300.000	
SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN					147.270.000	147.270.000	-
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	Dokumen	23.400.000	23.400.000	
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	Laporan	9.600.000	9.600.000	
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	38.970.000	38.970.000	
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4	Laporan	75.300.000	75.300.000	
SEKSI PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN					214.700.000	214.700.000	-
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Laporan	8.400.000	8.400.000	
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen	206.300.000	206.300.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR			PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		Uraian	Target	Satuan			
UPTD PPRD WILAYAH BONTANG					3.999.410.130	4.014.760.130	15.350.000
SUBAG TATA USAHA					3.619.870.130	3.635.220.130	15.350.000
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	13.200.000	13.200.000	
5 02 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	13.200.000	13.200.000	
5 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	44.400.000	44.400.000	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	6.244.000	6.244.000	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	284.505.000	284.505.000	
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	54.142.500	54.142.500	
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	3.878.400	3.878.400	
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19	laporan	432.288.000	432.288.000	
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket		-	
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	170.576.490	170.576.490	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	3.000.000	3.000.000	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	315.567.300	315.567.300	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	laporan	1.804.391.440	1.812.551.440	8.160.000
5 02 01 1.09 02	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	183.077.000	183.077.000	
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	67	Unit	36.500.000	43.690.000	7.190.000
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	254.900.000	254.900.000	
SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN					207.340.000	207.340.000	-
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	Dokumen	8.400.000	8.400.000	
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	Laporan	8.400.000	8.400.000	
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	60.940.000	60.940.000	
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4	Laporan	129.600.000	129.600.000	
SEKSI PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN					172.200.000	172.200.000	-
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Laporan	8.400.000	8.400.000	
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen	163.800.000	163.800.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR			PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		Uraian	Target	Satuan			
UPTD PPRD WILAYAH PENAJAM					3.992.998.339	3.992.998.339	-
SUBAG TATA USAHA					3.488.120.339	3.488.120.339	-
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	17.280.000	17.280.000	
5 02 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	8.640.000	8.640.000	
5 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	51.000.000	51.000.000	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	14.351.700	14.351.700	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	337.177.849	337.177.849	
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	18.583.000	18.583.000	
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	3.078.400	3.078.400	
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	laporan	342.480.000	342.480.000	
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	5.474.600	5.474.600	
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	64.345.800	64.345.800	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	9.425.000	9.425.000	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	394.588.320	394.588.320	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	laporan	1.756.777.770	1.756.777.770	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	224.293.800	224.293.800	
5 02 01 1.09 05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48	Unit	60.104.100	60.104.100	
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	179.660.000	179.660.000	
SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN					279.668.000	279.668.000	-
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	Dokumen		-	
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	Laporan	12.840.000	12.840.000	
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	111.200.000	111.200.000	
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4	Laporan	155.628.000	155.628.000	
SEKSI PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN					225.210.000	225.210.000	-
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Laporan	12.840.000	12.840.000	
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen	212.370.000	212.370.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR			PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		Uraian	Target	Satuan			
UPTD PPRD WILAYAH PASER					4.038.587.380	4.038.587.380	-
SUBAG TATA USAHA					3.500.967.380	3.500.967.380	-
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	10.400.000	10.400.000	
5 02 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	10.400.000	10.400.000	
5 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	41.400.000	41.400.000	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	16.201.000	16.201.000	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	301.021.800	301.021.800	
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	103.562.800	103.562.800	
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	2.072.400	2.072.400	
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	laporan	473.160.000	473.160.000	
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	20.597.500	20.597.500	
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Unit		-	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	4.960.800	4.960.800	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	605.585.800	605.585.800	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	laporan	1.490.597.080	1.490.597.080	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	Unit	164.818.900	164.818.900	
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112	Unit	61.189.300	61.189.300	
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	195.000.000	195.000.000	
SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN					286.150.000	286.150.000	-
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	Dokumen		-	
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	Laporan	8.400.000	8.400.000	
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	46.600.000	46.600.000	
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4	Laporan	231.150.000	231.150.000	
SEKSI PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN					251.470.000	251.470.000	-
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Laporan	8.400.000	8.400.000	
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen	243.070.000	243.070.000	

-

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR			PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		Uraian	Target	Satuan			
UPTD PPRD WILAYAH BERAU					4.157.006.500	4.279.336.120	122.329.620
SUBAG TATA USAHA					3.632.036.500	3.754.360.120	122.329.620
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	20.736.000	20.736.000	
5 02 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	20.736.000	20.736.000	
5 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	40.000.000	40.000.000	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	5.900.000	5.900.000	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	125.000.000	125.000.000	
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	82.316.800	82.316.800	
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	3.393.600	3.393.600	
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	laporan	300.794.000	300.794.000	
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	70.070.600	70.070.600	
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Unit	396.001.600	396.001.600	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	15.991.600	15.991.600	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	327.162.100	327.162.100	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	laporan	1.715.800.400	1.798.130.020	82.329.620
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	Unit	177.641.800	217.641.800	40.000.000
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96	Unit	74.980.000	74.980.000	
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	255.408.000	255.408.000	
SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN					319.984.000	319.984.000	-
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	Dokumen	39.990.000	39.990.000	
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	Laporan	29.994.000	29.994.000	
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	175.000.000	175.000.000	
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4	Laporan	75.000.000	75.000.000	
SEKSI PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN					204.992.000	204.992.000	-
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Laporan	30.000.000	30.000.000	
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen	174.992.000	174.992.000	

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Sedangkan penyusunan program dan kegiatannya mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan lagi dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta mengacu pada RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2019 – 2023 Perubahan.

Dengan terbitnya Permendagri 90 tahun 2019 tersebut sangat diperlukan adanya perubahan SOTK agar perumusan kinerja program, kegiatan bisa selaras dengan tugas pokok pada masing – masing jabatan sehingga tercipta kaidah-kaidah didalam perumusan rencana kerja Bapenda Prov. Kaltim. Beberapa hal yang dapat sampaikan meliputi :

- Analisis gambaran umum kondisi Badan Pendapatan Daerah;
- Perumusan permasalahan dan analisis isu strategis Badan Pendapatan Daerah;
- Perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok;
- Perumusan strategi dan arah kebijakan;
- Perumusan program dan kegiatan

Terkait Alokasi Anggaran digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang keuangan sebagaimana tupoksi Badan Pendapatan Provinsi Kaltim sesuai Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah No. 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pergub Nomor 77 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur serta Pergub Nomor 15 Tahun

2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pendanaan dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan serta sub kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan pendanaan untuk setiap program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yang memuat penjelasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan disusun berpedoman kepada Renstra Bapenda Tahun 2019 – 2023 Perubahan.

Demikian diharapkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yang telah disusun dapat menjadi penunjang untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan RKPD Perubahan Kalimantan Timur tahun 2023 serta berguna dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Samarinda, 23 Agustus 2023

KEPALA BADAN,

Dra. Hj. ISMIATI, M.Si

NIP. 19650914 199012 2 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perangkat daerah dari perencanaan sebelumnya untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen perubahan rencana tahunan perangkat daerah, perubahan renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah. Penyusunan perubahan rencana kerja dilakukan dari evaluasi yang telah direncanakan terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang agar disusun secara terpadu guna mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Perubahan rencana kerja perangkat daerah adalah perubahan dokumen perencanaan SKPD dari perencanaan sebelumnya untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam perubahan renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 mengacu kepada rencana program pada rancangan awal perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan perubahan renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur selaras dengan Renstra Perubahan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan perubahan rencana kerja (Renja) BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4287;
2. Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

8. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005 -2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya perubahan Renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

a. Menyelaraskan perubahan RKPD dengan Renstra PD yang diturunkan dalam kegiatan penganggaran ;
b. Meningkatkan akuntabilitas dan pemanfaatan sumber daya dan keuangan;

Tujuan antara lain :

a. Menjabarkan Perubahan RENSTRA ke dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur;
c. Sebagai Upaya mewujudkan efesiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan program, kegiatan pada BPKAD Provinsi Kaltim;

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Perubahan Renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan
Bab ini memuat :
1. 1 Latar Belakang
1. 2 Landasan Hukum
1.3 Maksud Tujuan dan
1. 4 Sistematika Penulisan.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
2.4 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat :

1.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

1.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja PD

1.3. Program dan Kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.2 Pagu Anggaran untuk program dan kegiatan

4.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Bab V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk menjaga konsistensi terhadap capaian target kinerja antara perencanaan dengan pelaksanaan dan untuk mengambil Langkah-langkah penyempurnaan perlu dilakukan review terhadap Realisasi Renja PD Tahun 2022 yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bila dibandingkan dengan Renstra dan perkiraan capaian kinerja pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) tahun berjalan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran terlebih dahulu perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan salah satu sarana untuk mengukur pengeluaran belanja dengan kinerja yang dihasilkan atau yang disebut dengan metode penganggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistem dan terukur dalam penyusunan anggaran yang dilakukan suatu organisasi sektor publik dengan menggunakan indikator kinerja yang diharapkan dapat acuan dalam menyusun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta pagu indikatif.

Pagu belanja tahun 2022 sebesar Rp. 5.065.343.522.960 dan Realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 4.479.990.618.694 atau sebesar 88,44 % yang terdiri dari :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
   Pagu program sebesar Rp 55.331.155.148
   Realisasi sebesar Rp 44.915.900.888 atau sebesar 81,18 %
2. **Program Pengelolaan Keuangan Daerah**
   Pagu program sebesar Rp. 5.003.289.730.312
   Realisasi sebesar Rp. 4.428.852.855.721 atau sebesar 88,52 %

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pagu program sebesar Rp. 6.722.637.500

Realisasi sebesar Rp. 6.221.862.085 atau sebesar 92,55 %

Adapun Capaian dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai Tahun 2022 antara lain sebagaimana tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja BPKAD Prov. Kaltim Tahun 2022

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program (Renstra PD) Thn. 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2022					Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023) (Target APBD)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S.D Tahun Berjalan		
							Target Kinerja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S.D Tahun Berjalan		Realisasi Tingkat Capaian Target
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		8= (7/6)	(9)		(10)=(5+7+9)		11=(10/4)
5.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan	80,00%		81,18%		80,00%		81,18%		101,48 %	90,00%		196,19%		82%
5.02.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.001.1.01. 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	6	Dokumen	100%

5.02.001.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
5.02.001.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
5.02.001.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
5.02.001.1.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
5.02.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100%	2	Laporan	6	Laporan	100%

5.02.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100%	7	Laporan	21	Laporan	100%
5.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124	Orang/Bulan	124	Orang/Bulan	124	Orang/Bulan	124	Orang/Bulan	100%	124	Orang/Bulan	372	Orang/Bulan	100%
5.02.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400	Dokumen	400	Dokumen	400	Dokumen	400	Dokumen	100%	400	Dokumen	1.200	Dokumen	100%
5.02.001.1.02.003	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400	Dokumen	400	Dokumen	400	Dokumen	400	Dokumen	100%	400	Dokumen	1.200	Dokumen	100%
5.02.001.1.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	Dokumen	100%

5.02.001.1.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Laporan	100%
5.02.001.1.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	3	Dokumen	9	Dokumen	100%
5.02.001.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100%	3	Laporan	9	Laporan	100%
5.02.001.1.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
5.02.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%

5.02.001.1.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
5.02.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	3	Paket	100%
5.02.001.1.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	Dokumen	100%
5.02.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140	Orang	140	Orang	140	Orang	140	Orang	100%	140	Orang	420	Orang	100%
5.02.001.1.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140	Orang	140	Orang	140	Orang	140	Orang	100%	140	Orang	420	Orang	100%

5.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100%	12	Paket	36	Paket	100%
5.02.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100%	12	Paket	36	Paket	100%
5.02.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100%	12	Paket	36	Paket	100%
5.02.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100%	12	Paket	36	Paket	100%
5.02.001.1.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	100%	6	Laporan	18	Laporan	100%

5.02.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
5.02.001.1.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	Dokumen	100%
5.02.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tesedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	3	Unit	100%
5.02.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	20	Unit	20	Unit	20	Unit	100%	20	Unit	60	Unit	100%
5.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%

5.02.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
5.02.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
5.02.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
5.02.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
5.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	100%	6	Unit	18	Unit	100%

5.02.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	25	Unit	25	Unit	25	Unit	100%	25	Unit	75	Unit	100%
5.02.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	12	Unit	12	Unit	12	Unit	100%	12	Unit	36	Unit	100%
5.02.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	100%	5	Unit	15	Unit	100%
5.02.002	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perda dan PerGub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	80,00%		80,00%		100,00%		89%		89%	80%		198,67%		83%
5.02.002.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.002.1.01.001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Koordinasi Penyusunan KUA PPAS	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%

5.02.002.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
5.02.002.1.01.003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi RKA SKPD	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
5.02.002.1.01.004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37	Dokumen	37	Dokumen	37	Dokumen	37	Dokumen	100%	37	Dokumen	111	Dokumen	
5.02.002.1.01.005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	37	Dokumen	37	Dokumen	37	Dokumen	37	Dokumen	100%	37	Dokumen	111	Dokumen	

5.02.002.1.01.006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
5.02.002.1.01.007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD dan Perda tentang Penjabaran APBD	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
5.02.002.1.01.008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	0		0		0		0		0%	0		0		
5.02.002.1.01.009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
5.02.002.1.01.011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%

5.02.002.1.01.013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah dan Pemerintah Provinsi	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
5.02.002.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.002.1.02.002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD KAb/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
5.02.002.1.02.003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
		Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	0		0		0		0		0,00	0		0		

5.02.002.1.02.004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	100%	10	Laporan	30	Laporan	100%
5.02.002.1.02.006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	12	Laporan	12	Laporan	12	B,	12	B,	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
5.02.002.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		100		1.929.905.457
5.02.002.1.03.001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	Dokumen	100%
5.02.002.1.03.002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Laporan	100%

5.02.002.1.03.003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	460	Dokumen	460	Dokumen	460	Dokumen	460	Dokumen	100%	460	Dokumen	1.380	Dokumen	100%
5.02.002.1.03.004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
5.02.002.1.03.005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16	Dokumen	16	Dokumen	16	Dokumen	16	Dokumen	100%	16	Dokumen	48	Dokumen	100%
5.02.002.1.03.006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	6	Dokumen	100%
5.02.002.1.03.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%

		Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
5.02.002.1.03.008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	Dokumen	100%
5.02.002.1.03.009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12.000	Dokumen	12.000	Dokumen	12.000	Dokumen	12.000	Dokumen	100%	12.000	Dokumen	36.000	Dokumen	100%
5.02.002.1.03.010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
5.02.002.1.03.011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10	Orang	10	Orang	10	Orang	10	Orang	100%	10	Orang	30	Orang	100%

5.02.002.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.002.1.04.001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100%	4	Laporan	12	Laporan	100%
5.02.002.1.04.002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	84	Dokumen	84	Dokumen	84	Dokumen	84	Dokumen	100%	84	Dokumen	252	Dokumen	100%
5.02.002.1.04.003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
5.02.002.1.04.004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	48	Laporan	48	Laporan	48	Laporan	48	Laporan	100%	48	Laporan	144	Laporan	100%
5.02.002.1.04.005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	106	Dokumen	106	Dokumen	106	Dokumen	106	Dokumen	100%	106	Dokumen	318	Dokumen	100%

	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi														
5.02.002.1.04.006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100%	6	Dokumen	18	Dokumen	100%
5.02.002.1.04.008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	576	Dokumen	576	Dokumen	576	Dokumen	576	Dokumen	100%	576	Dokumen	1.728	Dokumen	100%
5.02.002.1.04.009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
5.02.002.1.04.010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
5.02.002.1.04.011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	480	orang	480	orang	480	orang	480	orang	100%	480	orang	1.440	orang	100%

5.02.002.1.04.012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	6	Lembaga	6	Lembaga	6	Lembaga	6	Lembaga	100%	6	Lembaga	18	Lembaga	100%
5.02.002.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.002.1.05.002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100%	2	Laporan	6	Laporan	100%
5.02.002.1.05.008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	100%	10	Laporan	30	Laporan	100%
5.02.002.1.05.009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21	Laporan	21	Laporan	21	Laporan	21	Laporan	100%	21	Laporan	63	Laporan	100%
5.02.002.1.05.010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	16	Laporan	16	Laporan	16	Laporan	16	Laporan	100%	16	Laporan	48	Laporan	100%

5.02.002.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.002.1.06.002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
5.02.003	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset Tetap (Tanah & Bangunan) Daerah yang Diamankan	90%		90%		80%		92,55%		116%	90%		221,11%		82%
5.02.003.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.003.1.01.001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
5.02.003.1.01.002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%

5.02.003.1.01.003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
5.02.003.1.01.004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
5.02.003.1.01.005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	0	0	0	0	0	0	0%	1	Laporan	1	Laporan	100%
5.02.003.1.01.006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	Laporan	0	0	0	0	0	0	0%	1	Laporan	1	Laporan	100%
5.02.003.1.01.007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100%	2	Laporan	6	Laporan	100%
5.02.003.1.01.008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3	Laporan	0	0	0	0	0	0	0%	3	Laporan	3	Laporan	100%

5.02.003.1.01.009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	laporan	0	0	0	0	0	0	0%	1	laporan	1	laporan	100%
5.02.003.1.01.010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	20	Dokumen	20	Dokumen	20	Dokumen	20	Dokumen	100%	20	Dokumen	60	Dokumen	300%
5.02.003.1.01.011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100%	8	Laporan	24	Laporan	100%
5.02.003.1.01.012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Laporan	100%
5.02.003.1.01.013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50	Orang	50	Orang	50	Orang	50	Orang	100%	50	Orang	150	Orang	100%

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal SKPD dapat digunakan beberapa metode antara lain :

1. SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats)
2. RAD (Rapid, Application, Development)
3. EUD (End, User, Development)
4. PEST (Political, Economic, Social and Technological)
5. CSF (Critical, Success, Factor)

Dari beberapa metode tersebut dipilih analisis SWOT karena dipandang paling sesuai untuk diaplikasikan. Analisis kondisi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dapat diketahui dengan menggunakan analisa dan metode SWOT:

2.2.1 Strength (kekuatan) Internal

1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sebagai wakil Pemerintah Pusat yang melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/ Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota serta Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/ Perubahan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota;

2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

3. Sebagai mediator antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/ kota terkait dengan distribusi belanja bagi hasil pajak daerah;

4. Memiliki sarana prasarana dan sistem informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

5. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 04 Juli 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga diperlukan sosialisasi kepada stakeholder.

2.2.2 Weaknesses (kelemahan), internal

1. Penerbitan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan diterbitkannya petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;

2. Adanya lembaga/ instansi yang masih memiliki sikap egosektoral dalam menjalankan suatu program dan kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor lain yang ada;

3. Masih adanya sebagian ASN yang kurang memiliki komitmen dalam memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi BPKAD serta masih rendahnya disiplin kerja;

4. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/ informal yang disebabkan kompleksitas (pengelolaan keuangan dan aset daerah) ritme dan intensitas pekerjaan yang cukup tinggi dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.

5. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan aset serta rendahnya tingkat kemauan dan wawasan, terutama dibidang keuangan dan aset daerah.

2.2.3 Opportunities (Peluang) external

1. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan APBD/ rancangan perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD, Surat Perintah Pembayaran, dan melakukan pembayaran permintaan Pengguna Anggaran (PA) atas beban rekening kas umum daerah, untuk itu BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitasi SKPD melakukan penganggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2019 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;

3. Sesuai pasal 3 ayat (5) angka 19 huruf a Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi mengatur realokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada Kab/Kota tertentu untuk kesimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat;

4. Adanya beberapa peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka BPKAD Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.2.4 Threats (ancaman) external

1. Banyaknya aplikasi-aplikasi dalam proses penyelenggaraan Pemerintahaan pada umumnya dan pengelolaan keuangan dan asset pada khususnya, yang mana antar aplikasi satu dengan lainnya tidak terkoneksi dengan baik sehingga menyebabkan ketidaklancaran dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset.

2. Semangat yang berlebihan (euphoria) terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, yang seringkali menimbulkan pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya berakibat kurang memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika yang berkembang.

Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel.2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

No.	Indikator Kinerja	SPM	IKK	Target Renstra PD				Proyeksi				Catatan Analisis
				Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Perda dan Pergub Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Yang ditetapkan tepat waktu	-	-	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Meningkatkan Kontrol dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kepada Perangkat Daerah dan Masyarakat.
2.	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola Dengan Baik	-	-	90%	90%	90%	90%	90%	90 %	90%	90%	
3.	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Keuangan	-	-	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.

Sesuai pasal 5 ayat (3) huruf a dan pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa kekuasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, didalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat isu-isu strategis dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Dalam melakukan pemanfaatan barang milik daerah dilakukan berdasarkan nilai yang wajar, sementara dalam pencatatan berdasarakan nilai perolehan/ kontrak
2. Pada Sebagian besar asset tetap berupa tanah belum dilengkapinya bukti kepemilikan barang milik daerah
3. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai.
4. Untuk melakukan pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah diperlukan data yang akurat terkait barang milik daerah;
5. Belum tersosialisasinya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Tidak adanya kebijakan yang tegas mengatur pembagian tugas dan wewenang antara BPKAD dengan Biro Perekonomian terkait pengelolaan BUMD;
7. Belum ada juga kebijakan yang spesifik mengatur pengelolaan barang milik daerah yang merupakan barang yang dibawah kewenangan pengelola (barang milik daerah Provinsi)
8. Penyusunan RKA - SKPD dan DPA- SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen Perencanaan Daerah;
9. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

Berdasarkan hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah ke depan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan daaerah;
3. Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
4. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal;
5. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta aset;
6. Integrasi sistem antar pengelolaan keuangan dengan pengelolaan aset (barang milik daerah) merupakan suatu yang menjadi sangat urgen dalam mendukung terciptanya optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset. Integrasi system ini juga sangat urgen dalam hal fungsi penatausahaan dengan aplikasi perbankan dalam pelaksanaan transaksi non tunai.
7. Penyusunan peta proses bisnis BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang dikuti dengan penyempurnaan dan peningkatan implementasi..
8. Upaya pembentukan Lembaga yang nantinya sebagai institusi untuk operasionalisasi/pengelola BMD yang berada dibawah kewenangan pengelola barang, dalam hal ini adalah UPTD Pengamanan Dan Pemanfaatan BMD.

2.4 **Review terhadap Rancangan Akhir RKPD**

Berdasarkan rancangan akhir RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program, kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana tabel 2.4 sebagai berikut

Tabel.2.4 **Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**

Rancangan Awal						Hasil analisis kebutuhan (Perubahan)					
No	**Program/ Keg**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (ribuan)**	**Program/ Keg**	Lokasi	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (ribuan)**	**Catatan Penting**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**Kaltim**	**Skor Kepuasan Masyarakat terhadap urusan keuangan**	90 %		**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	Kaltim	**Skor Kepuasan Masyarakat terhadap urusan keuangan**	90 %		
a.	Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kaltim	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.061.085.464	Perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kaltim	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.200.961.664	
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	32.187.225.593	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	32.187.225.593	
c.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kaltim	**Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah**	100 %	922.200.000	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	Kaltim	**Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah**	100 %	922.200.000	
d.	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kaltim	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.879.010.600	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kaltim	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.879.010.600	
e.	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	21.492.915.790	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	23.063.665.189	
f.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kaltim	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	5.982.285.200	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kaltim	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	7.365.978.200	

g.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kaltim	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	16.918.195.674	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kaltim	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	12.409.260.674	
h.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	10.210.551.216	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	11.745.193.816	
2.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Kaltim	Perda dan PerGub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	80 %	5.540.936.891.552	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Kaltim	Perda dan PerGub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	80 %	6.982.708.810.097	
a.	**Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Kaltim	**Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	100 %	7.011.568.089	**Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah**	Kaltim	**Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	100 %	8.639.192.089	
b.	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota**	Kaltim	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	753.364.000	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota**	Kaltim	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	893.924.000	
c.	**Koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	6.275.277.885	**Koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	6.738.751.165	
d	**Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.166.231.160	**Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.521.492.870	
e.	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Kaltim	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.520.265.915.418	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Kaltim	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	6.959.457.831.773	

f.	**Pengelolaan Data Dan Implementasi System Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Kaltim**	**Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**100 %**	**1.464.535.000**	**Pengelolaan Data Dan Implementasi System Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Kaltim**	**Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**100 %**	**1.468.618.200**	
3.	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Kaltim**	**Presentase Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola Dengan Baik**	**90 %**	**6.973.836.564**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Kaltim**	**Presentase Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola Dengan Baik**	**90 %**	**8.664.301.564**	
a.	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Kaltim**	**Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**6.973.836.564**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Kaltim**	**Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**8.664.301.564**	
			Jumlah		**5.639.564.197.653**			**Jumlah**		**7.083.146.607.397**	

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa pembandingkan antara program/kegiatan, lokasi indikator, target dan pagu DPA BPKAD Provinsi Kaltim dengan Rencana Perubahan RKPD Tahun 2023 dalam menjalankan visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BPKAD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dibidang keuangan

Dalam pelaksanaan tugasnya BPKAD Provinsi Kalimantan Timur tidak bersentuhan langsung terhadap pelayanan masyarakat. Namun dalam melaksanakan fungsi tersebut, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur berupaya untuk transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut, usulan-usulan program dan kegiatan masyarakat yang disampaikan melalui BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku kepentingan Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kaltim/Luar Kaltim	Perda Dan Pergub Tentang APBD Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Ditetapkan Tepat Waktu	-	-
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kaltim/Luar Kaltim	Presentase Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola Dengan Baik		
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Kaltim/Luar Kaltim	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Keuangan		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyakarat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas merupakan rencana induk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut, perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program Nasional dan untuk mensinergikan pelayanan program pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dangan mengacu kepada Propenas dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, masing-masing pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan

program pembangunan daerah (Propeda), walaupun dimungkinkan adanya perbedaan prioritas menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan bersifat strategis dengan tujuan mewujudkan pemerintah yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan pembangunan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk mewujudkan dan sebagian pernyataan tentang keadaan diwaktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektivitas yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyakarat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Perubahan Renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 antara lain

a. Memanfaatkan dana yang tersedia secara maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyakarat/ ASN

b. Memusatkan tujuan/arah perencanaan anggaran, program dan kegiatan prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang;

c. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar SKPD, pemerintah daerah dengan pemerintah pusat;

d. Meningkatkan komunikasi dan integrasi data dalam pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;

e. Inventarisasi jumlah dan jenis pembayaran sesuai sumber pendanaan (DAU, DAK).

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Perubahan Renja BPKAD Prov.Kaltim Tahun 2023

Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran organisasi yaitu :

a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan anggaran, program, kegiatan dan pengelolaan APBD.

b. Meningkatnya aspek transparansi, partisipasi, responsibilitas dan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.

c. Meningkatnya jumlah dan jenis sumber-sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Progam adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyakarat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sararan dan tuju Pembangunan Daerah. Program Kerja BPKAD Provinsi Kalimatan Timur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dalam hal ini BPKAD mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang APBD/ Perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Terbitnya Permendagri nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur utamanya dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
b. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
c. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

d. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
e. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
f. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3.4 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Beserta Anggaran

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dokumen Perubahan Renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 merupakan penjabaran dari dokumen Perubahan Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan Rencana Kerja (RENJA) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan untuk kegiatan tahun 2023 merupakan implementasi dari Perubahan Renstra Tahun 2019-2023

Rencana Kerja dan Pendanaan Kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan tertuang dalam Perubahan Renja Tahun 2023 sebagaimana pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Lokasi	Tahun 2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
				Target		Pagu	
5.02.5.02.5.02.02.0000	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**					**Rp**	**7.970.166.837.650,00**
5.02.001	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan**		**90**	**%**	**Rp**	**91.644.345.737,00**
5.02.001.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kalimantan Timur**	**100**	**%**	**Rp**	**2.200.961.664,00**
5.02.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	2	Dokumen	Rp	876.179.664,00
5.02.001.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	207.120.000,00
5.02.001.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	80.832.400,00
5.02.001.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	220.852.400,00
5.02.001.1.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	109.052.400,00
5.02.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kalimantan Timur	2	Laporan	Rp	354.113.400,00
5.02.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	7	Laporan	Rp	352.811.400,00
5.02.001.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kalimantan Timur**	**100**	**%**	**Rp**	**32.187.225.593,00**
5.02.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kalimantan Timur	124	Orang/ Bulan	Rp	29.223.668.593,00

5.02.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kalimantan Timur	400	Dokumen	Rp	1.827.960.000,00
5.02.001.1.02.003	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kalimantan Timur	400	Dokumen	Rp	464.453.000,00
5.02.001.1.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kalimantan Timur	12	Dokumen	Rp	105.672.000,00
5.02.001.1.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kalimantan Timur	1	Laporan	Rp	128.620.000,00
5.02.001.1.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kalimantan Timur	3	Dokumen	Rp	286.104.000,00
5.02.001.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kalimantan Timur	3	Laporan	Rp	85.748.000,00
5.02.001.1.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	65.000.000,00
5.02.001.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah**	**Kalimantan Timur**	**100**	**%**	**Rp**	**922.200.000,00**
5.02.001.1.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kalimantan Timur	12	Laporan	Rp	922.200.000,00
5.02.001.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kalimantan Timur**	**100**	**%**	**Rp**	**1.879.010.600,00**
5.02.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kalimantan Timur	1	Paket	Rp	249.048.600,00
5.02.001.1.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kalimantan Timur	12	Dokumen	Rp	96.912.500,00
5.02.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kalimantan Timur	140	Orang	Rp	1.360.841.000,00
5.02.001.1.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kalimantan Timur	140	Orang	Rp	172.208.500,00
5.02.001.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kalimantan Timur**	**100**	**%**	**Rp**	**22.018.500.190,00**
5.02.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kalimantan Timur	12	Paket	Rp	139.661.240,00

5.02.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kalimantan Timur	12	Paket	Rp	16.327.412.940,00
5.02.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kalimantan Timur	12	Paket	Rp	1.350.279.000,00
5.02.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kalimantan Timur	12	Paket	Rp	382.750.000,00
5.02.001.1.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kalimantan Timur	6	Laporan	Rp	610.686.500,00
5.02.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kalimantan Timur	12	Laporan	Rp	996.214.510,00
5.02.001.1.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kalimantan Timur	12	Dokumen	Rp	2.211.496.000,00
5.02.001.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kalimantan Timur**	**100**	**%**	**Rp**	**7.221.897.200,00**
5.02.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kalimantan Timur	1	Unit	Rp	2.077.034.000,00
5.02.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kalimantan Timur	20	Unit	Rp	5.144.863.200,00
5.02.001.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kalimantan Timur**	**100**	**%**	**Rp**	**13.469.356.674,00**
5.02.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kalimantan Timur	12	Laporan	Rp	68.480.000,00
5.02.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kalimantan Timur	12	Laporan	Rp	6.803.978.700,00
5.02.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kalimantan Timur	12	Laporan	Rp	117.054.800,00
5.02.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kalimantan Timur	12	Laporan	Rp	6.479.843.174,00
5.02.001.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kalimantan Timur**	**100**	**%**	**Rp**	**11.745.193.816,00**
5.02.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kalimantan Timur	6	Unit	Rp	98.258.400,00

5.02.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kalimantan Timur	25	Unit	Rp	863.074.500,00
5.02.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kalimantan Timur	12	Unit	Rp	521.760.000,00
5.02.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kalimantan Timur	5	Unit	Rp	10.262.100.916,00
5.02.002	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Perda dan PerGub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu**		**80**	**%**	**Rp**	**7.869.858.190.349,00**
5.02.002.1.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Kalimantan Timur**	**100**	**%**		**8.639.192.089,00**
5.02.002.1.01.001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Koordinasi Penyusunan KUA PPAS	Kalimantan Timur	12	Bulan		162.100.000,00
5.02.002.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS	Kalimantan Timur	12	Bulan		153.700.000,00
5.02.002.1.01.003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi RKA SKPD	Kalimantan Timur	12	Bulan		1.111.380.000,00
5.02.002.1.01.004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Kalimantan Timur	12	Bulan		937.720.000,00
		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kalimantan Timur	37	Dokumen		
5.02.002.1.01.005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kalimantan Timur	12	Bulan		432.156.000,00
		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kalimantan Timur	37	Dokumen		
5.02.002.1.01.006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Kalimantan Timur	12	Bulan		427.956.000,00
5.02.002.1.01.007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD dan Perda tentang Penjabaran APBD	Kalimantan Timur	12	Bulan		274.460.000,00
5.02.002.1.01.008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kalimantan Timur	12	Bulan		176.060.000,00

	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kalimantan Timur	0	Dokumen		
5.02.002.1.01.009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kalimantan Timur	12	Bulan		302.760.000,00
5.02.002.1.01.011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kalimantan Timur	12	Bulan		4.573.160.089,00
5.02.002.1.01.013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah dan Pemerintah Provinsi	Kalimantan Timur	12	Bulan		87.740.000,00
5.02.002.1.02	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kalimantan Timur**	**100**	**%**		**893.924.000,00**
5.02.002.1.02.002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD KAb/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	Kalimantan Timur	12	Bulan	Rp	227.812.000,00
5.02.002.1.02.003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	Kalimantan Timur	12	Bulan	Rp	210.712.000,00
		Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kalimantan Timur	0	Laporan		
5.02.002.1.02.004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kalimantan Timur	10	Laporan	Rp	304.000.000,00
5.02.002.1.02.006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Kalimantan Timur	12	Bulan	Rp	151.400.000,00
5.02.002.1.03	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Kalimantan Timur**	**100**	**%**	**Rp**	**6.727.751.165,00**
5.02.002.1.03.001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kalimantan Timur	12	Dokumen	Rp	685.490.000,00
5.02.002.1.03.002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kalimantan Timur	1	Laporan	Rp	78.200.000,00

5.02.002.1.03.003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kalimantan Timur	460	Dokumen	Rp	86.672.000,00
5.02.002.1.03.004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	86.758.000,00
5.02.002.1.03.005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kalimantan Timur	16	Dokumen	Rp	1.157.010.985,00
5.02.002.1.03.006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kalimantan Timur	2	Dokumen	Rp	354.947.100,00
5.02.002.1.03.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kalimantan Timur	12	Laporan	Rp	1.481.941.800,00
5.02.002.1.03.008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kalimantan Timur	12	Dokumen	Rp	343.520.000,00
5.02.002.1.03.009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kalimantan Timur	25000	Dokumen	Rp	1.048.425.080,00
5.02.002.1.03.010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	143.926.200,00
5.02.002.1.03.011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kalimantan Timur	10	Orang	Rp	1.260.860.000,00

5.02.002.1.04	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Kalimantan Timur**	**100**	**%**	**Rp**	**5.521.492.870,00**
5.02.002.1.04.001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kalimantan Timur	4	Laporan	Rp	200.000.000,00
5.02.002.1.04.002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kalimantan Timur	84	Dokumen	Rp	1.747.183.710,00
5.02.002.1.04.003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kalimantan Timur	12	Laporan	Rp	125.000.000,00
5.02.002.1.04.004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kalimantan Timur	48	Laporan	Rp	200.000.000,00
5.02.002.1.04.005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Kalimantan Timur	106	Dokumen	Rp	800.000.000,00
5.02.002.1.04.006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kalimantan Timur	6	Dokumen	Rp	300.000.000,00
5.02.002.1.04.008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kalimantan Timur	576	Dokumen	Rp	250.000.000,00
5.02.002.1.04.009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	150.000.000,00
5.02.002.1.04.010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	100.000.000,00
5.02.002.1.04.011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Kalimantan Timur	480	Orang	Rp	1.060.078.000,00
5.02.002.1.04.012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Kalimantan Timur	6	Lembaga	Rp	589.231.160,00
5.02.002.1.05	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Kalimantan Timur**	**100**	**%**	**Rp**	**7.846.707.212.025,00**

5.02.002.1.05.002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	2	Laporan	Rp	11.138.100,00
5.02.002.1.05.008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kalimantan Timur	10	Laporan	Rp	1.198.383.612.300,00
5.02.002.1.05.009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kalimantan Timur	21	Laporan	Rp	159.018.877.998,00
5.02.002.1.05.010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Kalimantan Timur	16	Laporan	Rp	6.489.293.583.627,00
5.02.002.1.06	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Kalimantan Timur**	**100**	**%**	**Rp**	**1.368.618.200,00**
5.02.002.1.06.002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kalimantan Timur	12	Bulan	Rp	1.368.618.200,00
5.02.003	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Presentase jumlah barang milik daerah yang dikelola dengan baik**		**90**	**%**	**Rp**	**8.664.301.564,00**
5.02.003.1.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Kalimantan Timur**	**100**	**%**	**Rp**	**8.664.301.564,00**
5.02.003.1.01.001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	748.252.000,00
5.02.003.1.01.002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	99.503.400,00
5.02.003.1.01.003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	168.676.000,00
5.02.003.1.01.004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	149.060.000,00
5.02.003.1.01.005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	1	Laporan	Rp	644.023.000,00
5.02.003.1.01.006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	1	Laporan	Rp	196.274.000,00
5.02.003.1.01.007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	2	Laporan	Rp	2.541.536.900,00

5.02.003.1.01.008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	15	Laporan	Rp	511.404.000,00
5.02.003.1.01.009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	1	Laporan	Rp	167.564.000,00
5.02.003.1.01.010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	20	Dokumen	Rp	2.196.072.364,00
5.02.003.1.01.011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	8	Laporan	Rp	857.724.300,00
5.02.003.1.01.012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kalimantan Timur	1	Laporan	Rp	150.071.600,00
5.02.003.1.01.013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kalimantan Timur	50	Orang	Rp	234.140.000,00

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, disusun berdasarkan Perubahan RENSTRA BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah serta target dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu Perubahan Renja-SKPD BPKAD Provinsi Kalimantan Timur juga merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan :

Perubahan Renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu sarana tata kelola organisasi yang dapat dipergunakan untuk :

a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan;
b. Merumuskan program dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan;
c. Merencanakan program/ kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan kegiatan yang telah disusun;
e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.

5.2 Rencana tindak lanjut

Dengan tersusunnya Perubahan Renja BPKAD Provinsi Kaltim ini, maka rekomendasi untuk pengelola keuangan Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan;

b. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar PD sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan keuangan dan aset daerah;
c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BPKAD Provinsi Kaltim yang dijabarkan dengan mewujudkan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan pada masing-masing bidang.

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instansi Pemerintah dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada saat ini semakin dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan instansi pemerintah dalam suatu wadah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyiapkan, menyusun Rencana Kerja dan menyampaikan Informasi Kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga sebagai perwujudan normatif pertanggungjawabannya.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan dokumen perencanaan BKD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja BKD Prov. Kaltim merupakan terjemahan perencanaan tahunan di bidang kepegawaian, sehingga bersifat lebih operasional yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan manajemen kepegawaian. Kebijakan perencanaan kepegawaian tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan percepatan perwujudan aparatur yang profesional, handal dan religious.

Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur diawali dengan persipan penyusunan Renja BKD Prov. Kaltim yang meliputi pembentukan Tim Penyusun Renja BKD, Orientasi mengenai Renja BKD, penyusunan agenda kerja dan pengumpulan data dan informasi. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja BKD dan diserahkan kepada Bappeda Prov. Kaltim untuk diverifikasi. Hasil verifikasi kemudian akan

ditindaklanjuti menjadi Rancangan Renja BKD dan Rancangan Akhir Renja BKD yang meliputi tahap perumusan dan tahap penyajian rencana kerja BKD. Proses penyusunan Renja BKD Prov. Kaltim diakhiri dengan hasil verifikasi rancangan akhir renja oleh Bappeda Prov. Kaltim, dengan melampirkan hasil berita acara pelaksanaan forum perangkat daerah sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Seluruh dokumen rencana pembangunan merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, dimulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan anggaran. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Rencana Kerja BKD Prov. Kaltim mempunyai kedudukan yang startegis yaitu menjembatani antara perencanaan pada BKD Prov. Kaltim dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra BKD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Rencana Kerja BKD disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKD Prov. Kaltim, untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan sebagai dasar pengusulan Program/Kegiatan yang akan dibiayai APBD Pemprov. Kaltim.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja BKD Prov. Kaltim, disusun untuk melaksanakan program/kegiatan dan juga sebagai acuan untuk mengetahui realisasi pelaksanaan program/kegiatan dari Kasubbag di Sekretariat dan Kasubbid pada bidang-bidang dilingkungan BKD Prov. Kaltim yang telah ditetapkan. Adapun dasar penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023;
14. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 000.7.2.4/12994/Bapp-II tentang Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai acuan untuk menjalankan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan sebagai alat kontrol dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan masing-masing bagian berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKD Prov. Kaltim adalah untuk memaparkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta untuk penetapan Prioritas Kinerja Perangkat Daerah dalam kaitannya dengan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I **PENDAHULUAN,** Berisi penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja BKD, antara lain memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan;

BAB II **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA HINGGA TRIWULAN II TAHUN 2020,** Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Berisi tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah beserta pagu pendanaan dalam menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA HINGGA TRIWULAN II
TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi kinerja merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa mendatang. Sebagai suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja menyediakan informasi mengenai kinerja yang berkaitan terhadap tujuan dan sasaran.

Evaluasi terhadap kegiatan Instansi adalah bentuk paling kecil dari evaluasi kinerja organisasi. Seluruh atau sebagian kegiatan dapat dievaluasi menurut prioritas manajemen Instansi. Tingkat pentingnya evaluasi sangat ditentukan oleh pentingnya kegiatan itu sendiri. Jika kegiatan itu merupakan kegiatan pokok atau kegiatan utama yang merupakan ciri organisasi Instansi dalam pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan yang cukup dominan dalam rangka menjalankan tugas pokok Instansi, dapat dikatakan bahwa kegiatan itu penting. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja BKD sebgai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan :
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Kepegawaian Daerah :
    a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
    b. Mutasi dan Promosi ASN;

c. Pengembangan Kompetensi ASN;
d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah (UPTD Penkom)
   a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   b. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
4. Program Kepegawaian Daerah (UPTD Penkom)
   a. Pengembangan Kompetensi ASN.

Sesuai Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Provinsi Kalimantan Timur, untuk Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim mendapatkan anggaran sebesar Rp 46.263.493.532,- yang terdiri dari :

- BKD Prov. Kaltim sebesar Rp 43.553.781.620,-
- UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai sebesar 2.709.711.912,-

Dari hasil data anggaran tersebut menunjukkan bahwa laporan realisasi belanja hingga triwulan II tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

A. Realisasi Belanja Hingga Triwulan II Tahun 2023

Realiasasi Kegiatan dan Sub Kegiatan pada **Badan Kepegawaian Daerah** Prov. Kaltim dengan anggaran sebesar Rp 43.553.781.620,- kemudian terealisasi sebesar Rp 24.569.054.081,- dengan rincian sebagai berikut :

- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :**
  1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari pagu anggaran Rp 489.500.000,- kemudian direalisasikan sebesar Rp 260.776.332,- sehingga diperoleh capaian kegiatan dengan presentase 53,27 % dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan total pagu anggaran sebesar Rp 60.000.000,- kemudian terealisasikan sebesar Rp 34.130.000 dengan capaian presentase sebesar 56,88%;

b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan total pagu anggaran sebesar Rp 226.646.332 sehingga terealisasikan sebesar Rp 84.485.300,00 dengan capaian presentase sebesar 52,77%%.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari pagu anggaran sebesar Rp 14.648.495.190 kemudian direalisasikan sebesar Rp 6.529.925.100 sehingga diperoleh capaian kegiatan dengan presentase 44,58%;

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 639.197.000 terealisasi sebesar Rp 561.596.820 sehingga capaian presentase sebesar 87,86% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan pagu anggaran sebesar Rp 558.989.000 dengan realisasi sebesar Rp 556.341.820 dengan capaian presentase sebesar 99,53%.

b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan pagu anggaran sebesar Rp 80.208.000 terealisasi sebesar Rp 5.255.000 sehingga capaian presentase sebesar 6,55%%

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.613.467.100 dengan realisasi sebesar Rp 1.724.922.863 sehingga capaian presentase sebesar 66,00% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.163.372.950 dengan

realisasi sebesar Rp 606.987.225 dengan capaian presentase sebesar 52,17%;

b) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu sebesar Rp 30.993.440 terealisasi sebesar Rp 30.990.000 dengan capaian sebesar 99,99 %

c) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.419.100.710 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.086.945.638 sehingga capaian presentase sebesar 76,59%

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.021.203.660 dengan realisasi sebesar Rp 1.464.131.521 sehingga capaian presentase sebesar 48,46%.

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu sebesar Rp 21.036.600 yang terealisasi sebesar Rp 8.427.500 sehingga capaian presentase sebesar 40,06 %.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu sebesar Rp 713.470.500 terealisasi sebesar Rp 269.567.507 sehingga capaian presentase sebesar 37,78%.

c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu sebesar Rp 2.286.696.560 terealisasi sebesar Rp 1.186.136.514 sehingga capaian presentase sebesar 51,87%

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.674.894.000 dengan realisasi sebesar Rp 583.546.972 sehingga capaian presentase sebesar 34,84% dengan rincian sebagai berikut :

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas dengan Pagu sebesar Rp 390.934.000,00 dengan realisasi sebesar Rp

120.113.312 dengan capaian presentase sebesar 30,72%

b) Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp 1.283.960.000 dengan realisasi Rp 463.433.660 sehingga capaian presentase sebesar 36,09%

● **Program Kepegawaian :**

1) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.878.695.690 dengan realisasi sebesar Rp 1.677.126.328 dengan capaian presentase sebesar 34,38% dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp 477.414.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 357.941.500 sehingga capaian presentase sebesar 74,97%;

b) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dengan pagu anggaran sebesar Rp 647.585.200 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 289.461.106 sehingga capaian presentase sebesar 44,70%;

c) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN dengan

pagu anggaran sebesar Rp 529.299.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 371.041.003 sehingga capaian presentase sebesar 70,10%

d) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp

2.794.789.390 dengan realisasi anggaran Rp 432.693.526 sehingga capaian presentase sebesar 15,48%

e) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan pagu anggaran sebesar Rp 67.500.000 hingga triwulan II belum terealisasi;

f) Pengelolaan Data Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp 362.107.100 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 225.989.193 dengan capaian presentase sebesar 62,41%

2) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.379.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 804.309.278 dengan capaian target sebesar 58,33% dengan rincian sebagai berikut :
   a) Pengelolaan Mutasi ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp 444.000.000 terealisasi sebesar Rp 255.154.497 dengan capaian presentase sebesar 57,47%
   b) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp 350.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 136.329.639 dengan target capaian sebesar 38,95%
   c) Pengelolaan Promosi ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp 585.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 412.825.142 sehingga target capaian presentase sebesar 70,57%
3) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.895.056.080 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.900.754.972 dengan capaian target presentase sebesar 42,07%
   a) Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.078.393.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 419.353.868 dengan capaian target presentase sebesar 38,89%
   b) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.378.663.080 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.300.674.599 dengan capaian presentase sebesar 42,77%
   c) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional dengan pagu anggaran sebesar Rp

438.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 180.726.505 dengan capaian target presentase 41,26%

4) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp 7.314.272.900 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.565.705.423 dengan capaian target presentase sebesar 89,77%
   a) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp 106.730.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 62.758.754 dengan capaian presentase sebesar 58,80%
   b) Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.532.956.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.314.002.186 dengan capaian presentase sebesar 96,65%
   c) Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp 178.648.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 39.420.000 dengan capaian presentase sebesar 22,07%
   d) Pembinaan Disiplin ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp 267.294.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 81.541.347 dengan capaian presentase sebesar 30,51%
   e) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp 113.680.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 25.107.541 dengan capaian presentase sebesar 22,09%
   f) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp 114.964.900 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 42.875.595 dengan capaian presentase sebesar 37,29%

Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan pada **UPTD Penilaian Kompetensi** Pegawai pada BKD Prov.Kaltim dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.709.711.912,- kemudian terealisasi sebesar Rp 2.120.046.742,- dengan rincian sebagai berikut :

1) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 24.543.000,- hingga triwulan II belum terealisasi dengan rincian sub kegiatan diantaranya :
   a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan anggaran sebesar Rp 24.543.000,- hingga triwulan II belum terealisasi;
2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 829.361.100,- terealisasi sebesar Rp 545.264.376,- sehingga capaian keuangan sebesar 65,75% dengan rincian diantaranya :
   a) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 477.989.530,- terealisasi sebesar Rp 295.560.270,- sehingga capaian presentase fisik dan keuangan sebesar 61,83%;
   b) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp 81.803.570,- dengan realisasi sebesar Rp 30.602.089,- dengan capaian presentase sebesar 37,41%;
   c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp 269.568.000,- yang terealisasi sebesar Rp 219.102.017,- sehingga capaian presentase fisik keuangan sebesar 81,28%,
3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 868.098.412,00,- terealisasi sebesar Rp 450.216.533,00,- sehingga capaian presentase keuangan sebesar 51,86% dengan rincian sub kegiatan diantaranya :
   a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp 2.692.500 terealisasi sebesar Rp 1.643.000.- sehingga capaian presentase sebesar 61,02%

b) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp 161.778.300,- dan terealisasi sebesar Rp 107.231.101,- sehingga capaian presentase sebesar 66,28%

c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp 703.627.612,- dan terealisasi sebesar Rp 341.342.432,- sehingga capaian presentase sebesar 48,51%.

4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 328.021.400,- dan terealisasi sebesar Rp 23.545.826,- sehingga capaian presentase fisik dan keuangan sebesar 7,18% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dengan anggaran sebesar Rp 22.895.000,- terealisasi sebesar Rp 8.965.826,- sehingga capaian presentase sebesar 39,16%;

b) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 305.126.400,- terealisasi sebesar Rp 14.580.000,- sehingga capaian presentase fisik dan keuangan sebesar 4,78%.

5) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN mempunyai sub kegiatan pegelolaan asessment center dengan pagu anggaran sebesar Rp 659.688.000,- terealisasi sebesar Rp 477.231.737,- sehingga capaian presentase sebesar 72,34%.

Secara keseluruhan dari anggaran Belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebesar Rp 46.263.493.532,- kemudian direalisasikan sebesar Rp. 24.569.054.081,- sehingga diperoleh persentase pencapaian rencana tingkat capaian keuangan sebesar 53,11%. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah berjalan sesuai dokumen perencanaan yang telah disusun.

2.2 Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKD Prov. Kaltim

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd		Realisasi 2023			
					Triwulan 1		Triwulan 2	
(1)	(2)	(3)	(6)		(8)		(9)	
			K	RP	K	RP	K	RP
5.03.0.00.0.00.01.0000	**Badan Kepegawaian Daerah**			**46.263.456.932**		**7.786.937.861**		**24.569.054.081**
5.03.0.00.0.00.01.0000	**Badan Kepegawaian Daerah**			**43.553.745.020**		**6.990.206.953**		**23.072.795.609**
5.03.001	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)**	**92 Nilai**	**23.086.720.350**	**0**	**4.263.555.928**	**0**	**11.124.899.608**
5.03.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	59 dokumen	489.500.000	23	116.947.328	23	260.776.332
5.03.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31 Dokumen	60.000.000	18	3.054.500	18	34.130.000
5.03.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47 Laporan	429.500.000	7	113.892.828	7	226.646.332

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023			
						Triwulan 1		Triwulan 2	
(1)	(2)	(3)	(6)			(8)		(9)	
			K		RP	K	RP	K	RP
5.03.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	1	Dokumen	14.648.495.190	0	2.637.327.218	0	6.529.925.100
5.03.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	Orang / bulan	14.648.495.190	0	2.637.327.218	210	6.529.925.100
5.03.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur	100	%	639.197.000	1	5.255.000	87	561.596.820
5.03.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	529	Stel	558.989.000	0	-	540	556.341.820
5.03.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11	Orang	80.208.000	9	5.255.000	12	5.255.000
5.03.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100	%	2.613.467.100	20	665.535.798	66	1.724.922.863
5.03.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	229	unit	1.163.372.950	58	278.050.000	190	606.987.225
5.03.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	5	paket	30.993.440	0	-	120	30.990.000

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd		Realisasi 2023			
					Triwulan 1		Triwulan 2	
(1)	(2)	(3)	(6)		(8)		(9)	
			K	RP	K	RP	K	RP
		Disediakan						
5.03.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDan (untuk rapat, kegiatan/pelatihan dan tamu)	2 Laporan	1.419.100.710	0	387.485.798	1	1.086.945.638
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		0		1	
5.03.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan administrasi yang diselesaikan tepat waktu	2 Laporan	3.021.167.060	0	625.920.515	0	1.464.131.521
5.03.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	21.000.000	0	3.515.500	0	8.427.500
5.03.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	713.470.500	0	26.247.258	1	269.567.507
5.03.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1 Laporan	2.286.696.560	0	596.157.757	0	1.186.136.514

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023			
						Triwulan 1		Triwulan 2	
(1)	(2)	(3)	(6)			(8)		(9)	
			K		RP	K	RP	K	RP
		Kantor yang Disediakan							
5.03.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang layak pakai	90	%	1.674.894.000	12	212.570.069	36	583.546.972
5.03.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	unit	390.934.000	10	71.880.569	13	120.113.312
5.03.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	1.283.960.000	2	140.689.500	2	463.433.660
5.03.002	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Berbasis Skor Indeks Merit**	**100**	**%**	**20.467.024.670**	**0**	**2.726.651.025**	**0**	**11.947.896.001**
5.03.002.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	50	%	4.878.695.690	0	681.441.545	16	1.677.126.328

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023			
						Triwulan 1		Triwulan 2	
(1)	(2)	(3)	(6)			(8)		(9)	
			K		RP	K	RP	K	RP
5.03.002.1.01.002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	477.414.500	1	125.440.000	1	357.941.500
5.03.002.1.01.003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen	647.585.200	0	103.088.941	0	289.461.106
5.03.002.1.01.006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	Dokumen	529.299.500	0	176.987.349	0	371.041.003
5.03.002.1.01.008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga	2.794.789.390	0	168.537.493	0	432.693.526
5.03.002.1.01.010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	67.500.000	0	-	0	-
5.03.002.1.01.011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	Dokumen	362.107.100	0	107.387.762	0	225.989.193
5.03.002.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan	88	%	1.379.000.000	0	367.925.528	0	804.309.278

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023			
						Triwulan 1		Triwulan 2	
(1)	(2)	(3)	(6)			(8)		(9)	
			K		RP	K	RP	K	RP
5.03.002.1.02.001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1	Dokumen	444.000.000	0	141.080.624	0	255.154.497
5.03.002.1.02.002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	Laporan	350.000.000	0	51.262.400	0	136.329.639
5.03.002.1.02.003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	Dokumen	585.000.000	0	175.582.504	0	412.825.142
5.03.002.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah dikembangkan kompetensinya	85	%	6.895.056.080	0	1.468.742.585	0	2.900.754.972
5.03.002.1.03.003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	Dokumen	1.078.393.000	0	142.888.325	0	419.353.868
5.03.002.1.03.004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1	Dokumen	5.378.663.080	0	1.220.192.215	0	2.300.674.599
5.03.002.1.03.014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1	Dokumen	438.000.000	0	105.662.045	0	180.726.505

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023			
						Triwulan 1		Triwulan 2	
(1)	(2)	(3)	(6)			(8)		(9)	
			K		RP	K	RP	K	RP
5.03.002.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	90	%	7.314.272.900	0	208.541.367	89	6.565.705.423
5.03.002.1.04.002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	106.730.000	0	58.371.274	0	62.758.754
5.03.002.1.04.004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	250	Orang	6.532.956.000	0	48.872.370	97	6.314.002.186
5.03.002.1.04.005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	550	Orang	178.648.000	0	23.350.000	260	39.420.000
5.03.002.1.04.007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100	orang	267.294.000	0	37.802.182	43	81.541.347
5.03.002.1.04.008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	Laporan	113.680.000	0	22.647.541	1	25.107.541
5.03.002.1.04.009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1	Dokumen	114.964.900	0	17.498.000	0	42.875.595
5.03.0.00.0.00.01.0002	**UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai**				**2.709.711.912**		**796.730.908**		**1.496.258.472**
5.03.001	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah**	**92**	**Nilai**	**2.050.023.912**	**0**	**538.280.251**	**0**	**1.019.026.735**

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023			
						Triwulan 1		Triwulan 2	
(1)	(2)	(3)	(6)			(8)		(9)	
			K		RP	K	RP	K	RP
		(SKM)							
5.03.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur	100	%	24.543.000	0	-	0	-
5.03.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	stel	-	0	-	0	-
5.03.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	24.543.000	0	-	0	-
5.03.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100	%	829.361.100	8	345.141.849	65	545.264.376
5.03.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	477.989.530	12	246.541.370	5	295.560.270
5.03.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	paket	81.803.570	46	30.602.089	46	30.602.089
5.03.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	3	Laporan	269.568.000	0	67.998.390	0	219.102.017

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023			
						Triwulan 1		Triwulan 2	
(1)	(2)	(3)	(6)			(8)		(9)	
			K		RP	K	RP	K	RP
		Konsultasi SKPD							
5.03.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan administrasi yang diselesaikan tepat waktu	1	Laporan	868.098.412	0	187.976.537	0	450.216.533
5.03.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	2.692.500	0	-	0	1.643.000
5.03.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	161.778.300	0	61.475.321	0	107.231.101
5.03.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	703.627.612	3	126.501.216	3	341.342.432
5.03.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang layak pakai	100	%	328.021.400	1	5.161.865	0	23.545.826
5.03.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Unit	22.895.000	1	5.161.865	1	8.965.826

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023			
						Triwulan 1		Triwulan 2	
(1)	(2)	(3)	(6)			(8)		(9)	
			K		RP	K	RP	K	RP
5.03.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	305.126.400	0	-	0	14.580.000
5.03.002	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Berbasis Skor Indeks Merit**	**100**	**%**	**659.688.000**	**0**	**258.450.657**	**0**	**477.231.737**
5.03.002.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	8	%	659.688.000	0	258.450.657	8	477.231.737
5.03.002.1.03.002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	Dokumen	659.688.000	1	258.450.657	1	477.231.737

Sumber data : Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim selaku perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan memiliki tugas memfasilitasi urusan administrasi kepegawaian kepada PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pendanaan kegiatan pada APBD murni belum sepenuhnya terakomodir untuk mencapai target pada Tahun 2019. Untuk menunjang kegiatan tersebut agar dapat berjalan sesuai rencana diperlukan ketersediaan anggaran yang akan dialokasikan dalam belanja teknis kegiatan dan belanja operasional serta belanja pendukung sarana dan prasarana.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada sistem anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, dimana penganggaran kegiatan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dicapai untuk mendukung fungsi perangkat daerah.

3.1. Belanja Pemerintah Daerah Menurut Perangkat Daerah

Belanja pemerintah daerah menurut organisasi dialokasikan melalui Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran untuk mendukung pencapaian tujuan tahun 2023.

Sesuai surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 000.7.2.4/11723/Bapp-II tentang Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan Perubahan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pemetaan terhadap anggaran sementara yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung pencapaian target kinerja dari Program Kepegawaian Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan seleksi PPPK sebanyak 4.427 formasi antara lain untuk tenaga guru sebanyak 2.493 formasi, tenaga kesehatan sebanyak 1.600 formasi dan tenaga teknis sebanyak 334 formasi;
2) Pengukuran kompetensi kepada 160 PNS Pemprov. Kaltim;
3) Pengiriman PNS untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (5 orang), pelatihan Asesor SDM Aparatur (7 orang), pelatihan manajemen talenta (30 orang);

4) Pelaksanaan seleksi terbuka kepada 2 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang kosong;
5) Menyusun kebutuhan jabatan fungsional analis SDM Aparatur/Pranata SDM Aparatur di seluruh perangkat daerah khususnya yang berada di sekretariat/pengelola kepegawaian perangkat daerah;
6) Sosialisasi Peraturan BKN 3 tahun 2023 tentang tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional yang memberikan penjelasan atas Permen PANRB 1 2023 tentang jabatan fungsional;
7) Monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan;
8) Pemberian penghargaan kepada PNS sebanyak 390 PNS;
9) Medical Check up sebagai penunjang seleksi PNS berprestasi untuk 430 PNS;
10) Rekonsiliasi/pemutakhiran data kepegawaian;
11) Penambahan sarana dan prasarana pendukung operasional kantor;
12) Perencanaan pengadaan lift untuk UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai;

Tabel 3.1
Anggaran sementara Perubahan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

URAIAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		
		APBD 2023	RANCANGAN P-APBD 2022	SELISIH (BERTAMBAH)
Badan Kepegawaian Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23,086,756,950	26,586,622,150	3.499.865.200
	Kepegawaian Daerah	20,467,024,670	21,963,147,670	1.496.123.000
UPTD	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2,050,023,912	2,231,772,012	181.748.100
	Kepegawaian Daerah	659,688,000	949,688,000	290.000.000
	TOTAL	**46.263.493.532**	**51.731.229.832**	**5.467.736.300**

TABEL 3.2
RINCIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHAPAN RANCANGAN APBD PERUBAHAN TAHUN 2023

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**23,086,756,950**	**26,586,622,150**	
5	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**489,500,000**	**489,500,000**	
5	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	92 Nilai	92 Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31 Dokumen	31 Dokumen	Tersedianya Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	78 Dokumen	78 Dokumen	Kota Samarind Samarind Ulu, Gunung Kelua	60,000,000	60,000,000	
5	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	92 Nilai	92 Nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47 Laporan	47 Laporan	Tersedianya Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	78 Dokumen	78 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata Semua Kelurahan	429,500,000	429,500,000	
5	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**14,648,495,190**	**14,648,495,190**	

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5	03 01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	92 Nilai	92 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang / bulan	85 Orang / bulan	Tersedianya dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Samarind Semua Kecamata Semua Kelurahan	14,648,495,190	14,648,495,190	
5	**03 01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**639,197,000**	**639,197,000**	
5	03 01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Tingkat kepuasan	92 Nilai	92 Nilai	Jumlah Paket Pakaian Dinas	529 Stel	529 Stel	Tersedianya pemenuhan	100 %	100 %	Kota Samarind	558,989,000	558,989,000	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Kelengkapannya	pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)			Beserta Atribut Kelengkapan			kebutuhan peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur			Semua Kecamata Semua Kelurahan			
5 03 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	92 Nilai	92 Nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	11 Orang	Tersedianya pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur	100 %	100 %	Kota Samarind Semua Kecamata Semua Kelurahan	80,208,000	80,208,000	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
503 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**2,613,467,100**	**5,868,332,300**	
503 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	92 Nilai	92 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	229 unit	41 paket	Terpenuhinya fasilitas kerja ASN	100 %	100 %	Kota Samarind Semua Kecamata Semua Kelurahan	1,163,372,950	4,418,238,150	
503 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	92 Nilai	92 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5 paket	Terpenuhinya fasilitas kerja ASN	100 %	100 %	Kota Samarind Semua Kecamata Semua Kelurahan	30,993,440	30,993,440	
503 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	92 Nilai	92 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	2 Laporan 2 Laporan	2 Laporan 2 Laporan	Terpenuhinya fasilitas kerja ASN	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata Semua Kelurahan	1,419,100,710	1,419,100,710	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
					dan Konsultasi SKPDan (untuk rapat, kegiatan/pelatihan dan tamu)								
503 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**3,021,203,660**	**3,196,203,660**	
503 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	92 Nilai	92 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	2 Laporan	2 Laporan	Kota Samarind Semua Kecamata Semua Kelurahan	21,036,600	21,036,600	
503 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	92 Nilai	92 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	48 Laporan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	2 Laporan	2 Laporan	Kota Samarind Semua Kecamata Semua Kelurahan	713,470,500	888,470,500	
503 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	92 Nilai	92 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	2 Laporan	2 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata Semua Kelurahan	2,286,696,560	2,286,696,560	
503 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,674,894,000**	**1,744,894,000**	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas		92 Nilai	92 Nilai		10 unit	10 unit	Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik	90 %	90 %	Kota Samarind Semua Kecamata Semua Kelurahan	390,934,000	390,934,000	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Operasional atau Lapangan	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
5 03 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	92 Nilai	92 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bang Lainnya yang Dipelihara/Direha	nan2 unit ilitasi	2 unit	Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik	90 %	90 %	Kota Samarind Semua Kecamata Semua Kelurahan	1,283,960,000	1,353,960,000	
503 02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**											**20,467,024,670**	**21,963,147,670**	
503 02 1.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**											**4,878,695,690**	**5,657,765,690**	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5.03 02 1.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	Terwujudnya pemenuhan ASN yang transparan, objektif, dan akuntabel	95 %	95 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata Semua Kelurahan	477,414,500	477,414,500	
5.03 02 1.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	Terwujudnya pemenuhan ASN yang transparan, objektif, dan akuntabel	95 %	95 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata Semua Kelurahan	647,585,200	647,585,200	
5.03 02 1.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Terwujudnya pemenuhan ASN yang transparan, objektif, dan	95 %	95 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata	529,299,500	529,299,500	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Administrasi Pemberhentian			akuntabel			Semua Kelurahan			

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 03 02 1.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	Terwujudnya pemenuhan ASN yang transparan, objektif, dan akuntabel	95 %	95 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata Semua Kelurahan	2,794,789,390	3,369,789,390	
5 03 02 1.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	Terwujudnya pemenuhan ASN yang transparan, objektif, dan akuntabel	95 %	95 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata Semua Kelurahan	67,500,000	67,500,000	
5 03 02 1.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	Terwujudnya pemenuhan ASN yang transparan, objektif, dan akuntabel	95 %	95 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata Semua Kelurahan	362,107,100	566,177,100	
503 02 1.02	**Mutasi dan Promosi ASN**											**1,379,000,000**	**1,571,400,000**	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5 03 02 1.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Meningkatnya akuntabilitas mutasi kepegawaian sesuai kebutuhan	88 %	88 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata Semua Kelurahan	444,000,000	444,000,000	
5 03 02 1.02 02	Pengelolaan Kenaikan	Persentase Berbasis Skor	100 %	100 %	Jumlah Pengelolaan	1 Laporan	1 Laporan	Meningkatnya akuntabilitas	88 %	88 %	Semua Kab/Kota,	350,000,000	350,000,000	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Pangkat ASN	Indeks Merit			Kenaikan Pangkat ASN			mutasi kepegawaian sesuai kebutuhan			Semua Kecamata Semua Kelurahan			
5 03 02 1.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	2 Dokumen	Meningkatnya akuntabilitas mutasi kepegawaian sesuai kebutuhan	88 %	88 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata Semua Kelurahan	585,000,000	777,400,000	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
503 02 1.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**											**6,895,056,080**	**7,267,056,080**	
5 03 02 1.03 03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai dengan standar kompetensi jabatan	85 %	85 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata Semua Kelurahan	1,078,393,000	1,450,393,000	
5 03 02 1.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai dengan standar kompetensi jabatan	85 %	85 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata Semua Kelurahan	5,378,663,080	5,378,663,080	
5 03 02 1.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen	1 Dokumen	Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai dengan standar kompetensi jabatan	85 %	85 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata Semua Kelurahan	438,000,000	438,000,000	
503 02 1.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**											**7,314,272,900**	**7,466,925,900**	
5 03 02 1.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan	1 Dokumen	1 Dokumen	Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur	90 %	90 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata	106,730,000	106,730,000	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)	Keterangan
		Indikator	Target	Output Sub Kegiatan	Target	Hasil Kegiatan	Target			

		Kinerja	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
					Evaluasi Kinerja Aparatur						Semua Kelurahan			
5 03 02 1.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	100 %	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	250 Orang	397 Orang	Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur	90 %	90 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata Semua Kelurahan	6,532,956,000	6,685,609,000	
5 03 02 1.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	100 %	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	550 Orang	550 Orang	Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur	90 %	90 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata Semua Kelurahan	178,648,000	178,648,000	
5 03 02 1.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	100 %	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 orang	100 orang	Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur	90 %	90 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata Semua Kelurahan	267,294,000	267,294,000	
5 03 02 1.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan	Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur	90 %	90 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata Semua Kelurahan	113,680,000	113,680,000	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	03 02 1.04 09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	1 Dokumen	Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur	90 %	90 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata Semua Kelurahan	114,964,900	114,964,900	
											TOTAL	**43,553,781,620**	**48,549,769,820**	

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**2,050,023,912**	**2,231,772,012**	
5	**03**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**24,543,000**	**24,543,000**	
5	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM)	92 Nilai	92 Nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	Meningkatnya integritas kerja ASN	100 %	100 %	Kota Samarind Semua Kecamata Semua Kelurahan	24,543,000	24,543,000	
5	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**829,361,100**	**927,361,100**	
5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM)	92 Nilai	92 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	26 paket	Terpenuhinya fasilitas kerja ASN	100 %	100 %	Kota Samarind Semua Kecamata Semua Kelurahan	477,989,530	575,989,530	
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM)	92 Nilai	92 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3 paket	Terpenuhinya fasilitas kerja ASN	100 %	100 %	Kota Samarind Semua Kecamata Semua Kelurahan	81,803,570	81,803,570	

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat	92 Nilai	92 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Terpenuhinya fasilitas kerja ASN	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata Semua Kelurahan	269,568,000	269,568,000	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		daerah (SKM)												
503 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**868,098,412**	**951,846,512**	
5 03 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM)	92 Nilai	92 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 Laporan	1 Laporan	Kota Samarind Semua Kecamata Semua Kelurahan	2,692,500	2,692,500	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM)	92 Nilai	92 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	48 Laporan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 Laporan	1 Laporan	Kota Samarind Semua Kecamata Semua Kelurahan	161,778,300	245,526,400	
5 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM)	92 Nilai	92 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 Laporan	1 Laporan	Kota Samarind Semua Kecamata Semua Kelurahan	703,627,612	703,627,612	
503 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**328,021,400**	**328,021,400**	
5 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		92 Nilai	92 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik	100 %	100 %	Kota Samarind Semua Kecamata Semua Kelurahan	22,895,000	22,895,000	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Lapangan	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM)												
5 03 01 1.09 10	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM)	92 Nilai	92 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bang Lainnya yang Dipelihara/Direha	nan1 Unit ilitasi	1 Unit	Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik	100 %	100 %	Kota Samarind Semua Kecamata Semua Kelurahan	305,126,400	305,126,400	
503 02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**											**659,688,000**	**949,688,000**	
503 02 1.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**											**659,688,000**	**949,688,000**	
5 03 02 1.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1 Dokumen	Terwujudnya pengembangan ASN berbasis kompetensi	8 %	8 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata Semua Kelurahan	659,688,000	949,688,000	
											TOTAL	**2,709,711,912**	**3,181,460,012**	

Sumber data : Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan antara lain Kepala Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun Anggaran 2023.

Salah satu faktor pendukung penentu sukses tidaknya pelaksanaan kegiatan adalah faktor pendanaan. Jumlah anggaran yang diperoleh Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Timur akan berpengaruh terhadap pelaksanaan lanjutan kegiatan manajemen Kepegawaian dalam rangka pembinaan dan pengembangan manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan tersusunnya Perubahn RENJA BKD Prov. Kaltim tahun Anggaran 2023, menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun Anggaran 2023.

Demikian Perubahan Rencana Kerja tahun anggaran 2023 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Samarinda, 18 Agustus 2023
Kepala BKD Prov. Kaltim

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196709271988031013

PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BAB 1
P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran pelaksanaan tahun kelima yang merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2019-2023, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD 2023 ini selanjutnya dijadikan sebagai pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Penyusunan RKPD 2023 juga mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, serta menerapkan peraturan perundangan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

RKPD 2023 akan difokuskan pada penguatan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat secara merata, yang didukung dengan peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur, upaya pelestarian lingkungan, serta kemandirian birokrasi dalam rangka mencapai Kalimantan Timur yang berdaulat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BPSDM Prov. Kaltim) mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA PD merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA - PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2023.
3. RENJA PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis RENJA PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi RENJA Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil RENJA perangkat daerah tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Provinsi KalimantanTimur Tahun 2018 - 2023;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah meliputi :

a. Persiapan penyusunan;

b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan
d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (APBD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJD, RPJMD dan RKPD;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005- 2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
13. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Gubernur Pprovinsi Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

1.3 MAKSUD TUJUAN

a. Maksud

Maksud disusunnya RENJA Perubahan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah untuk dapat mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan

atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya RENJA Perubahan BPSDM adalah sebagai pedoman :

1) Mengevaluasi terhadap program dan kegiatan tahun sebelumnya sehingga dapat ditentukan apakah program dan kegiatan tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan untuk tahun yang akan datang;
2) Mengumpulkan rancangan atau usulan program serta kegiatan darisubbidang dalam lingkungan kerja BPSDM Prov. Kaltim;
3) Memilih, memilah dan menelaah rancangan atau usulan programserta kegiatan yang disusun berdasarkan skala prioritas;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

RENJA Perubahan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusundengansistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu padahasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok

ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

   Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; dan
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PerangkatDaerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkandengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

   Misal:

   1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
   2. Pencapaian SDGs,
   3. Pengentasan kemiskinan,
   4. Pencapaian NSPK dan SPM,
   5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
   6. Pengembangan daerah terisolir,
   7. Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

   - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
   - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang

tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokuspada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB 2
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instalasi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi targetataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai dengan target kinerja dalam Renja Perubahan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 didasarkan pada Renstra BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019- 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019- 2023, untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra BPSDM Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2022
Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	**04**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase Kepuasan Pelayanan Publik pada BPSDM**	Permen 13	Permen 13	**85**	**88,16**	**88,16**	**103%**	103%	103
5	**04**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan**			**100**	**100**	**100**	**100**	100	100
5	04	001	1	01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capain Kinerja			1	1	100	1 dokumen	1 dokumen	100
5	04	001	1	01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1	1	100			
5	**04**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksananaan Kegiatan Administasi**			1	1	100			
5	04	001	1	02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			57	57 Orang/Bulan	100			
5	04	001	1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi			1	1	100			
5	04	001	1	02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Akuntansi SKPD			10	10	100			
5	04	001	1	02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan HAsil Keuangan Akhir Tahun SKPD			1	1	100	1 laporan	1 laporan	100

5	**04**	**001**	**1**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan kegiatan administrasi Barang Milik Daerah Pada BPSDM**	Permen 13	Permen 13	**100**	**100**	**100**	**100%**		
5	04	001	1	03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada BPSDM			1	1	100	1 Laporan		
5	04	001	1	03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1	1	100	1 Laporan		
5	**04**	**001**	**1**	**04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah pada BPSDM**			**100**	**100**	**100**	**100%**		
5	04	001	1	04	007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			1	1	100	1 Laporan		
5	**04**	**001**	**1**	**05**		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian			100	100	100	100%		
5	04	001	1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			1	1	1 Paket	100%		
5	04	001	1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			5	5	5 Orang	100%		
5	04	001	1	05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan			2	2	2 Orang	100%		
5	**04**	**001**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Pada BPSDM**			100	100	100	100%		
5	04	001	1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1	1	1 Paket	100%		
5	04	001	1	06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1	1	1 Paket	100%		
5	04	001	1	06	007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			8	8	8 Paket	100%		

5	04	001	1	06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			**1**	**1**	**1**	**100%**		

5	04	001	1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Permen 13	Permen 13	2	2	2 Laporan	100%		
5	04	001	1	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1	1	1 Dokumen	100%		
5	04	001	1	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1	1	1 Dokumen	100%		
5	**04**	**001**	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah pada BPSDM**			**100**	**100**	**100**	**100%**		
5	04	001	1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			193	193	193 Unit	100%		
5	**04**	**001**	**1**	**08**		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Layanan Penunjang Pada BPSDM			100	98	98	100%		
5	04	001	1	08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1	1	1 Laporan	100%		
5	04	001	1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1	1	1 Laporan	100%		
5	04	001	1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor			1	1	1 Laporan	100%		
5	**04**	**001**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada BPSDM**			**100**	**100**	**100**	**100%**		
5	04	001	1	09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			8	8	8 Unit	100%		
5	04	001	1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya			8	8	8 Unit	100%		

5	04	001	1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			174	174	174 Unit	100%		

5	04	001	1	09	007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Permen 13	Permen 13	1	1	1 Unit			
5	04	001	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			8	8	8 Unit	100%		
5	**04**	**002**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Peningkatan Kapasitas Pengembangan Komptensi SDM/ASN**			**85**	**85**	**85%**	**106,25%**		
5	04	002	1	01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis			0	80	80	100%		
5	04	002	1	01	003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis			150	630 Orang	420	100%		
5	04	002	1	02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kelembagaan, Sertifikasi Komptensi dan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			80	80	100	100%		
5	04	002	1	02	001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi.			1	1	1 Dokumen	100%		
5	04	002	1	02	002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi			1	1	1 Dokumen	100%		
5	04	002	1	02	003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi			139	108		77,69%		
5	04	002	1	02	004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar			**5**	**5**	**5 Laporan**	**100%**		

5	04	002	1	02	005	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga			10	10	10 Dokumen	100%		
5	04	002	1	02	007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			190	400	400 Orang			
5	04	002	1	02	008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan			1	3	300	100%		

c

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2022
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	**04**	**01**				**Urusan Penunjang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)**	**85**	**82,5**	Permen 90	Permen 90	Permen 90	Permen 90		
5	**04**	**01**	**1**	**01**		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran								
5	**04**	**01**	**1**	**01**	**01**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Unit Kerja PD yang memiliki kinerja Pelayanan Tepat Waktu**	**4**	**4**						
5	04	01	1	01	02	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya sarana dan prasarana								
5	04	01	1	01	04	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana								
5	**04**	**01**	**1**	**01**	**06**	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah**	**Persentase ASN Internal yang memiliki Standar Kompetensi**	**92%**	**80,97%**						

5	04	01	1	01	07	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan			Permen 90	Permen 90	Permen 90	Permen 90		
5	**04**	**01**	**1**	**02**		**Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja PD**	**81**	**-**						
5	04	01	1	02	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran								
5	04	01	1	02	02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Pelatihan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan								
5	**04**	**01**	**1**	**02**	**04**	**Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan**	**Persentase ASN yang telah memiliki sertifikasi kompetensi**	**75**	**60,25**						
5	04	01	1	02	05	Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi	Jumlah Peserta Uji Kompetensi								
5	04	01	1	02	07	Sertifikasi Kompetensi	Jumlah kegiatan pengelolaan kelembagaan								
5	**04**	**01**	**1**	**02**	**08**	**Program Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi Teknis**	**15**	**22,7**						
5	04	01	1	03		Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi	Jumlah ASN yang memperoleh Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi								
5	04	01	1	03	01	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi	Jumlah ASN yang memperoleh kompetensi Inti Jabatan Administrasi								
5	04	01	1	03	03	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang	Jumlah ASN yang memperoleh kompetensi Inti Jabatan Administrasi								

5	04	01	1	03	05	Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi (Kontribusi)	Jumlah ASN yang memperoleh Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi			Permen 90	Permen 90	Permen 90	Permen 90		
						Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi (Kontribusi)	Jumlah ASN yang memperoleh kompetensi Inti Jabatan Administrasi								
5	04	01	1	03	06	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan ADministrasi Perangkat Daerah Penunjang (Kontribusi)	Jumlah ASN yang memperoleh kompetensi Inti Jabatan Administrasi								
5	**04**	**01**	**1**	**04**		**Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	60	40,34						
5	04	01	1	04	07	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN yang lulus/menyelesaikan Diklat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan								
5	04	01	1	05		Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi	Jumlah ASN yang lulus/menyelesaikan Diklat Pengembangan Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi								
5	04	01	1	05	01	Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang lulus/menyelesaikan Diklat Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional								
5	04	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang mendapat pakaian dinas								
5	04	01	1	05	09	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan (Kontribusi)	Jumlah ASN yang lulus/menyelesaikan Diklat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan								
5	04	01	1	05	10	Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi (Kontribusi)	Jumlah ASN yang lulus/menyelesaikan Diklat Pengembangan Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi								

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2023, disimpulkan capaian kinerja target dan realisasi 2 (dua) Program pada Renja Tahun 2023, yaitu meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ProvinsiKegiatan :
   1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
   4) Adminstrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   5) Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   6) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   9) Pemeliharaan Barang Milih Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah
2. Program Pengembangan Sumber Daya ManusiaKegiatan :
   1) Pengembangan Kompetensi Teknis
   2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (Indikator Kinerja)	Target Resntra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (SKM)			85	86	87	88	82,50	-	-	-	
2	Unit PD yang memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu			4	4	4	4	4	-	-	-	
3	Persentase Internal yang memiliki Standar Kompetensi			92%	93%	95 %	97%	80,97%	-	-	-	
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD			81	82	83	84	-	-	-	-	
5	Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi			75%	80%	85 %	90%	60,25%	-	-	-	
6	Persentase ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi Teknis			15%	20%	25%	30%	22,70%	-	-	-	
7	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			60%	70%	80%	90%	40,34%	-	-	-	
8	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan BPSDM			-	80	80	85	-	87,57	85	88	
9	Peningkatan Kapasitas Pengembangan Kompetensi SDM/ASN			-	15	80	85	-	125%	80%	85%	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Asumsi yang berkembang dan mengemuka di masyarakat berkaitan dengan sumber daya aparatur atau tentang kepegawaian adalah bahwa sampai saat ini, sebagian besar pegawai negeri masih dianggap tidak kompeten (incompetence) dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya khususnya pelayanan publik, ASN yang ada belum berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas-fungsi jabatan yang diduduki (mismatch), ASN yang ada tidak terdayagunakan secara optimal (under empolyment) serta kinerjanya masih terbilang rendah (under performance).

Persepsi masyarakat terhadap kondisi ASN tersebut jika kita cermati adalah wajar, mengingat belum adanya sistem pembinaan ASN yang dapat mewujudkan ASN sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Sistem manajemen yang ada belum didukung oleh sub-sub sistem atau komponen manajemen kepegawaian yang memadai. Kondisi nyata yang ada mengenai kelemahan ASN antara lain sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengembangan karir jabatan ASN belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, dan Pola Karier ASNyang jelas;
2. Evalusi kinerja ASN belum berlandaskan pada Sistem Penilaian Kinerja Berbasis Merit Sytem yang didukung dengan pola karir yang jelas, yang memungkinkan capaian kinerja individu pegawai dapat mendorong peningkatan karirnya dan memungkinkan pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan prestasi pegawai sesuai dengan bobot jabatannya (Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja);
3. Belum terbangunnya Sistem Perencanaan dan Rekrutmen ASN berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya, mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai secara tidak merata;
4. Berbagai regulasi dan kebijakan pembinaan ASN (peraturan perundang-undangan kepegawaian) sebagaian besar belum disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pembinaan dalam rangka perumusan kebijakan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian belum

sepenuhnya didukung data dan informasi (database) kepegawaian yang memadai.

5. Belum adanya rangkaian prosedur dan sumber daya untuk melakukan proses Sertifikasi yang sesuai dengan Skema Sertifikasi.
6. Proses penilaian aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku kinerja berdasarkan penguasaaan kompetensi, kualifikasi dan sesuai berdasarkan skema sertifikasi.

Adapun tantangan dalam meningkatkan pelayanan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, antara lain adalah :

1. Pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan *Good Governance* dan *Clean Governance*.
2. Kesiapan aparatur daerah dalam mengantisipasi proses demokratisasi agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi publik;
3. Perkembangan birokrasi yang menghendaki aparat semakinprofesional;
4. Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi;
5. Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja pegawai dan profesionalisme pegawai;
6. Intervensi berlebihan atau adanya vested interest dalam bidang kepegawaian yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
7. Optimalisasi Peta Jalan (*Road Map*) penyelenggara LembagaSertifikasi Pemerintahan Pemeirntah Dalam Negeri (LSP-PDN).
8. Pengelolaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintah Dalam Negeri yang dapat berjalan optimal dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan peluang-peluang dalam meningkatkan pelayanan dilingkungan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, diantaranya :

1. Terbukanya kesempatan untuk pengembangan lembaga pendidikandan pelatihan pegawai;
2. Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatankualitas sumber daya manusia;

3. Tersedianya dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur yangmemadai;
4. Adanya komitmen pimpinan;
5. Pengembangan sistem karier berdasarkan prestasi kerja;

Dalam mengatasi segala kekurangan yang ada, dengan mempertimbangkan berbagai faktor penghambat, tantangan dan peluang sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan isu-isu penting yang strategis yang menjadi acuan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam 5 (lima) tahun ke depan (2019-2023) adalah sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator.
2. Adanya Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.
3. Adanya Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
4. Peningkatan kualitas tenaga pengajar/widyaiswara dengan pendidikandan pelatihan berjenjang sesuai dengan bidangnya.
5. Meningkatkan pengkajian dan pengembangan kediklatan serta identifikasi kebutuhan Diklat Teknis, Fungsional dan Pejabat Pimpinan Tinggi dan Daerah Penunjang yang sesuai dengan kompetensinya.
6. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pengawas serta Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.

2.4 REVIEW TERHADAP RKPD

Berdasarkan RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas program kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja BadanPengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.3
Review terhadap RKPD Tahun 2023 Terhadap Rencana Kerja Perubahan RKPD-P

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**smd**	**Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan BPSDM**	**85%**	**21.477.118.757**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**smd**	**Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan BPSDM**	**85%**		
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	smd	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B	224.722.000	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	smd	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	88.402.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	650.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				18.940.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				125.039.610	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				117.380.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				265.000.000	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	smd	Terlaksananya Fungsi Penatausahaan	100%	13.340.130.000	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	smd	Terlaksananya Fungsi Penatausahaan Keuangan	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.942.820.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.238.172.901	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				353.390.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				451.410.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				42.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				42.260.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.920.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.920.000	

3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	smd	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	6.310.000	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	smd	Terlaksanany a Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD				6.310.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD				6.310.000	
4	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	smd	Capaian Target Pendapatan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	3.210.000	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	smd	Capaian Target Pendapatan Daerah pada Perangkat Daerah	100%		
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada SKPD				3.210.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada SKPD				45.210.000	
5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	smd	Terlaksananya Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	154.110.000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	smd	Terlaksananya Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengakapannya				65.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengakapannya				495.039.800	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				66.250.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				234.900.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				22.860.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				171.814.500	
6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	smd	Terlaksananya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100%	1.633.090.305	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	smd	Terlaksanany a Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				62.933.890	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				77.255.500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				58.260.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				75.560.000	
	Penyediaan Bahan/Material				260.939.000	Penyediaan Bahan/Material				372.329.100	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.392.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu				24.040.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.175.569.415	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.739.330.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8.800.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8.774.000	

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				41.196.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			73.680.000	
7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	smd	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	652.799.000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	smd	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				546.920.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.505.914.100	
	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel				
8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	smd	Tersedianya Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	3.402.218.452	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	smd	Tersedianya Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.920.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6.709.200	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.788.147.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.491.498.690	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.607.150.752	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.500.790.000	
9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penungjang Urusan Pemerintah Daerah**	smd	Terpeliharanya Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah	100%	2.060.529.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penungjang Urusan Pemerintah Daerah**	smd	Terpeliharanya Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				59.767.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			88.769.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				127.982.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			142.481.600	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				187.960.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			665.092.300	
	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya				1.225.420.000	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya			2.007.960.000	
	Pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				550.082.560	Pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			9.308.640.240	

II.	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**smd**	**Persentase Sumber Daya Manusia yang Profesional dalam Pelayanan Publik**	**80%**		**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**smd**	**Persentase Sumber Daya Manusia yang Profesional dalam Pelayanan Publik**	**80%**		
	Pengembangan Kompetensi Teknis	smd	Meningkatnya Pemenuhan Hak SDM/ASN untuk Memperoleh Bangkom Teknis minimal 20 Jam Pelajaran/Tahun	100%		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	smd	Meningkatnya Pemenuhan Hak SDM/ASN untuk Memperoleh Bangkom Teknis minimal 20 Jam Pelajaran/Tahun	100%		
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagia Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				5.246.107.428	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagia Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				5.228.922.900	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	smd	Meningkatnya SDM/ASN yang tersertifikasi dan Pemenuhan Hak SDM/ASN untuk Memperoleh Bangkom Manajerial dan Fungsional minimal 20 Jam Pelajaran/Tahun	85%		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	smd	Meningkatnya SDM/ASN yang tersertifikasi dan Pemenuhan Hak SDM/ASN untuk Memperoleh Bangkom Manajerial dan Fungsional minimal 20 Jam Pelajaran/Tahun	85%		
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta jabatan fungsional				100.000.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta jabatan fungsional				198.300.000	
	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri				515.262.000	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri				178.866.400	
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota				515.262.000	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota				426.786.000	

	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar				683.887.500	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar				2.737.669.600	
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga				512.299.000	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga				220.202.200	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, JabatanFungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan				6.403.950.815	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, JabatanFungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan				11.706.387.049	
	Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan				599.989.500	Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan				441.097.000	
J U M L A H					**58.825.277.650**	**J U M L A H**				**59.538.378.080**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 merupakan hasil analisis sesuai kebutuhan. Rumusan berdasarkan hasil Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi pelaksanaan program tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.

Program dan Kegiatan merupakan analisis dan penelaahan Usulan pemangku kepentingan maupun hasil pengumpulan informasi dan pengamatan hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur

Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan merupakan penjabaran pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pada suatu anggaran berjalan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur

Usulan Program dan Kegiatan dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Corporate University (CorPu)	Kalimantan Timur	1. Terselenggaranya budaya aktifitas non kediklatan 2. Terkelolanya Manajemen Pengetahuan Instansi / Perangkat Daerah 3. Tersusunnya Manajemen Talenta ASN 4. Tersusunnya Manajemen Karir ASN 5. Tersusunnya Analisa Kinerja Organisasi 6. Tersusunnya Analisa Gap Kompetensi dan Kinerja ASN 7. Tersusunnya Desain Kurikulum Pelatihan	1.318.046.000	

BAB 3
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selaindidasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelahaan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

BPSDM Provinsi Kalimantan Timur sebagai lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi sesuai dengan Tupoksinya, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPSDM Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut,terdapat beberapa peraturan baru yang kesemuanya menuntut adanya peningkatan kaulitas pendidikan dan pelatihan SDM aparatur yang pada akhirnya diharapkan berkorelasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Adapun regulasi dan Peraturan-peraturan baru yang menjadi pertimbangan dlam penyelenggaraan pegembangan SDM Aparaturtersebut adalah sbb:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang

Kompetensi Pemerintahan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri;
8. Peraturan Menpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standart Kompetensi Jabatan ASN

Secara spesifik program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis merupakan upaya untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sinkronisasi antara program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis akan memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan. Disisi lainya Rencana Kerja BPSDM Provinsi Kaltim 2019-2023, dalam implementasinya tidak dapat dipisahkan dari norma, peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pembinaan aparatur sipil negara yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Lembaga Administrasi Negara serta Badan Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu Rencana Kerja BPSDM Provinsi Kaltim, secara nasional juga memiliki hubungan yang signifikan dengan dokumen Rencana Strategis kementerian/kelembagaan. Dalam hal ini program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja BPSDM Provinsi Kaltim 2019-2023, disinkronisasikan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dari Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan.

Adapun Telaahan terhadap Rencana Strategis kementerian/kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pembina aparatur sipil negara Kementerian PAN-RB memiliki visi “Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompeten dan Melayani” dan misi “Penggerak Utama Reformasi Birokrasi”. Hal ini dicapai dengan tujuan strategis, yaitu:

a. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien;
b. Terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan kompetitif;
c. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani;
d. Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas korupsi,kolusi dan nepotisme serta akuntabel;
e. Mewujudkan aparatur Kementerian PAN-RB yang profesional dan berkinerja tinggi.

Tujuan strategi ini dicapai dengan strategi percepatan reformasibirokrasi, yaitu:

a. Penataan struktur birokrasi;
b. Penataan jumlah, dan distribusi pegawai negeri sipil;
c. Sistem seleksi calon pegawai negeri sipil dan promosi pegawai negeri sipil secara terbuka
d. Profesionalisasi pegawai negeri sipil;
e. Pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-government)
f. Peningkatan pelayanan publik;
g. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur;
h. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri;
i. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawainegeri sipil.

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan program Badan Pengembangan SDM Aparatur, yaitu:

1. Program pengembangan Kompetensi Teknis,
2. Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

2. Lembaga Administrasi Negara RI (LAN-RI),

LAN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil. Visi yang ingin diwujudkan LAN adalah “Menjadi Institusi Yang Handal Dalam Pengembangan Sistem Administrasi Negara Dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Negara”. Sedangkan misi adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui:

a. Perumusan kebijakan dalam bidang administrasi negara;
b. Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi negara;
c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
d. Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;

e. Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara;

f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi;

Peningkatan kapasitas organisasi LAN. Dengan mengacu pada rencana strategis LAN diketahui bahwa program dan kegiatan peningkatan program pendidikan kedinasan Aparatur Sipil Negara dan program pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rencana strategis BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, mempedomani pembinaan pelaksanaan pendidikan aparatur negara yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia KementerianDalam Negeri Republik Indonesia.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang merupakan salah satu unit organisasi dari Kementerian Dalam Negeri, memiliki visi "Penyelenggaraan Pengembangan Yang Profesional danBerkesinambungan" yang dicapai melalui 7 (tujuh) misi yaitu:

a. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan;

b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tenaga kediklatan;

c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan;

d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasaranapendidikan dan pelatihan;

e. Melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

f. Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;

g. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan telaahan kementrian/lembaga, Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga sebagaimana dipaparkan diatas, maka dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur, serta mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat di bidang aparatur maka isu-isu strategis ditingkat Pemerintah Pusatatau nasional yang terkait dengan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur adalah:

a. Mengembangkan Kompetensi Teknis;

b. Mengembangkan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;

c. Mengembangkan Kompetensi Pemerintahan.

d. Mengembangkan sistem pendaftaran peserta Pelatihan

e. Optimalisasi sistem Pelatihan berbasis informasi teknologi

f. Melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi di tingkat pusat dan daerah secara bertahap;
g. Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana BPSDM, Pelatihan Daerah Provinsi Kaltim untuk meningkatkan status Akreditasi;
h. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian, melalui identifikasi kebutuhan Pelatihan dan penyusunan standart pelayanan;
i. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kuncikeberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokusyang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada APBD tahun 2023 bagi tiap bagian dan bidang di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

Adapun sasaran Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan program dan kegiatan yang ada untuk mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang termuat dalam RJPMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
2. Tersusunnya Program dan Kegiatan dokumen Perencanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur;

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan 2023 BPSDM Provinsi KalimantanTimur direncanakan berjumlah 2 Program, 11 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan yang sebagian besar merupakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan koordinasi dengan total pagu dana/pagu indikatif sebesar **Rp. 33.820.440.000,-**

A. Rincian program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 9 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator jumlah dokumen Perangkat Daerah.
      b. Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
      c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan indikator Jumia dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
      c. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD
   3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah
   5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya dengan

indikator Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan

b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan indikator Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

6. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indikator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

c. Penyediaan bahan/material dengan indikator Jumia paket Bahan/material yang disediakan

d. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan indikator Jumia Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya

8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dengan indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
    b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
    c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
    d. Pemeliharaan Aset tetap lainnya dengan indikator Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara
    e. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

B. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
    1. Pengembangan kompetensi, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan Penyelenggaraan pengembangan kompetensi Teknis Umum, imti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
    2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :
        a. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemipinan dan Prajabatan serta jabatan fungsional dengan indikator Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi.

b. Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri dengan indikator Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi.
c. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi
d. Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar dengan indikator Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi. dan Sumber Belajar
e. Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dengan indikator Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga.
f. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan dengan indikator Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan
g. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga PengembangKompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

3.4. Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur (BPSDM) mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dengan demikian, BPSDM Provinsi Kalimantan Timur termasuk

kedalam salah satu Perangkat Daerah yang memenuhi unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yang dibawahi dalam Lembaga Teknis Daerah (kategori huruf c).

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur merupakan Perangkat Daerah yang mendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengembangan Sumber Daya Manusia, khususnya para aparatur dilingkungan Pemerintah Kalimantan Timur. Oleh karena itu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur juga wajib membuat Rancangan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerahlima (5) tahunan.

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Perangkat Daerah disusun berdasarkan acuan dari Rancangan P-RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah, yang perumusannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah merupakan Rencana Strategis Daerah (Renstrada). Berkaitan dengan pembuatan RPJM Daerah (Renstrada), setiap Perangkat Daerah wajib membuat dan memiliki Renstra Perangkat Daerah, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada P-RPJM Daerah (Renstrada) dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur atau disebut juga BPSDM Provinsi Kaltim mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah dibidang pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, BPSDM Provinsi Kaltim menyelenggarakan fungsinya sebagai:

a. Penyusunan Kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan Sumber Daya Manusia;
b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi dilingkungan Pemerintah Provinsi;
c. Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi dilingkungan Pemerintah Provinsi;
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Aparatur di Provinsi;
e. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, adalah sebagaiman berikut :

Tabel 3.1
Kegiatan Prioritas BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kegiatan	Target	Lokasi	Rekening	Sub Kegiatan	Rp.
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	100%	Samarinda	1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	5.228.922.900
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	85%	Samarinda	1.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	198.300.000
		Samarinda	1.02.02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri	175.866.400
		Samarinda	1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Komptensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	426.786.000
		Samarinda	1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	2.737.669.600
		Samarinda	1.02.05	Pengembang Kompetensi, Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	220.202.200
		Samarinda	1.02.07	Sumber Belajar, Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	11.760.387.049
		Samarinda	1.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	441.097.000

BAB 4
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan sertapagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis BPSDM Prov. Kalimantan Timur untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
BPSDM Prov. Kaltim Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5.04	**Pendidikan dan Pelatihan**		**SMD**		**59.538.378.080**			**62.762.516.092**
5.04.01	**Program Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase Kepuasan Pelayanan Publik pada BPSDM**	**SMD**		**38.349.146.931**			**41.211.039.692**
5.04.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**SMD**		**573.286.000**			**934.652.700**
5.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan pada SKPD	SMD		175.599.000			557.000.000
5.04.01.1.01.06	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja dan Realisasi Kinerja	SMD		133.040.000			112.652.700

5.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja	SMD		264.647.000			265.000.000
5.04.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Fungsi Penatausahaan Keuangan**	**SMD**		**14.733.762.901**			**16.705.841.472**
5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPJ Gaji dan Tunjangan	SMD		14.238.172.901			16.233.391.922
5.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai yang melaksanakan administrasi perkantoran	SMD		451.410.000			432.470.000
5.04.01.1.02.04	Koordinasi dan PelaksaanAkuntansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Akuntansi	SMD		42.000.000			0
5.04.01.1.02.05	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Pelaporan dan Koordinasi Keuangan	SMD		1.920.000			39.979.550
5.04.01.1.03	**Administrasi Barang MilikDaerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**SMD**		**6.310.000**			**6.310.350**
5.04.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan BMD	SMD		6.310.000			6.310.350
5.04.01.1.04	**Administrasi PendapatanDaerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Capaian Target Pendapatan Daerah pada Perangkat Daerah**	**SMD**		**45.210.000**			**45.209.590**

5.04.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Retribusi Daerah	SMD		45.210.000			45.209.590
5.04.01.1.05	**Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah**	**Terlaksananya Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**SMD**		**901.754.300**			**508.019.000**
5.04.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang mendapat pakaian dinas	SMD		495.039.800			166.769.000
5.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas fungsi	SMD		234.900.000			341.250.000
5.04.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi undang-undang	SMD		171.814.500			0
5.04.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan UmumPerangkat Daerah**	**SMD**		**2.370.968.600**			**1.974.964.100**
5.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Kantor	SMD		77.255.500			49.125.200

5.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	SMD		75.560.000			76.759.900
5.04.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/material	SMD		372.329.100			339.561.800
5.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu BPSDM	SMD		24.040.000			24.680.000
5.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi, rakernis dan sosialiasi	SMD		1.739.330.000			1.305.828.000
5.04.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis	SMD		8.774.000			29.153.200
5.04.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik padaSKPD	Fasilitas yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik	SMD		73.680.000			149.856.000
5.04.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah**	**Terlaksananya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**	**SMD**		**2.421.262.300**			**3.406.040.100**
5.04.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	SMD		0			1.465.983.900
5.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin	SMD		2.421.262.300			2.828.599.980
5.04.01.1.08	**Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Layanan Penunjang Perangkat Daerah**	**SMD**		**4.998.997.890**			**4.563.012.780**
5.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMD		6.709.200			6.771.600
5.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	SMD		1.491.498.690			1.727.641.200
5.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Tersedianya jasa layanan umum kantor	SMD		3.500.790.000			2.828.599.980

5.04.01.1.09	**Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpeliharanya aBarang Milik Daerah di Perangkat Daerah**	**SMD**		**12.212.943.140**			**13.066.989.600**
5.04.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Tersedianya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	SMD		88.769.000			59.780.000
5.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional	SMD		142.481.600			128.030.000
5.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin	SMD		665.092.300			357.940.000
5.04.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya aset tetap pada SKPD	SMD		2.007.960.000			2.083.335.600
5.04.01.1.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	SMD		9.308.640.240			10.437.904.000
5.04.02	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Persentase Sumber Daya Manusia yang Profesional dalam Pelayanan Publik**	SMD		**21.189.231.149**			**21.551.476.400**
5.04.02.1.01.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Meningkatnya Pemenuhan Hak SDM/ASN untuk memperoleh Bangkom Teknis minimal 20 Jampel/Tahun**	**SMD**		**5.228.922.900**			**6.529.540.000**

5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	SMD		5.228.922.900			6.529.540.000
5.04.02.1.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Meningkatnya Pemenuhan Hak SDM/ASN untuk memperoleh Bangkom Teknis minimal 20 Jampel/Tahun**	**SMD**		**15.960.308.249**			**15.021.936.400**
5.04.02.1.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi	SMD		198.300.000			258.000.000

		Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional						
5.04.02.1.02.02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri	Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	SMD		175.866.400			222.000.000
5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Komptensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	SMD		426.786.000			508.103.600
5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Komptensi dan Sumber Belajar	SMD		2.737.669.600			2.738.837.000
5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga	SMD		220.202.200			134.000.000
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	SMD		11.760.387.049			11.160.995.800

		Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional						
5.04.02.1.02.02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri	Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	SMD		175.866.400			222.000.000
5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Komptensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	SMD		426.786.000			508.103.600
5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Komptensi dan Sumber Belajar	SMD		2.737.669.600			2.738.837.000
5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga	SMD		220.202.200			134.000.000
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	SMD		11.760.387.049			11.160.995.800

BAB 5
P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra-P) Tahun2019- 2023 program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimaan tercantum dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, akan dilakukan penyesuaian- penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap bepedoman padaperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-Perubahan) BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani anatara perencanaan pada perangkat daerah dengan rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (JMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaianvisi dan misi Daerah.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur BPSDM Prov. Kaltim berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan serta sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Renja Tahun 2023 dengan efektif dan efisien.
2. Rencana Kerja P e r u b a h a n tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2023, dimana Rencana Kerja telah dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BPSDM, seluruh aparatur BPSDM secara berjenjang wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA 2023.
4. Tata cara penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja PemerintahDaerah.

5. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapunlangkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkanhingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan evisien dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan H.A.M.M Rifaddin No.88 Samarinda Seberang
Telp: 0541-7270207 Fax: 0541-7270208, email: bpsdm@kaltimprov.go.id
Bpsdm.kaltimprov@gmail.com website: http://bpsdm.kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 700.1.1/ 044 / SK/BPSDM-

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov.Kaltim Tahun 2023, maka dipandang perlu membentuk satu Tim Kerja.

b. Bahwa karena itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimntan Timur;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPSDM Provinsi Kalimantan Timur;

Memperhatikan

MEMUTUSKAN :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2023 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2023 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas Melaksanakan indentifikasi dan inventarisasi data dan informasi untuk bahan naskah penyusunan Renja Perubahan, Mengumpulkan bahan/informasi yang relevan berdasarkan hasil identifikasi untuk dijadikan bahan penyusunan Renja Perubahan Tahun 2023 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 21 Agustus 2023

Kepala

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dra. Nina Dewi, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660928 198609 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim di Samarinda;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Prov. Kaltim di Samarinda;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN
KEPALA BADAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 700.1.1/ 044 / SK/ BPSDM-I
TANGGAL : 21 Agustus 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2023 PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Dra. Nina Dewi, M.AP 19660928 198609 2 001	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2.	Anna Midawaty., S.Kom., M.M 19730521 199803 2 005	Sekretaris	Ketua
3.	Salasiah, S.E 19741226 200212 2 011	Kasubbag Perencanaan Program & Keuangan	Sekretrais
4.	Siti Djaitun, S.Sos., M.Si 19700331 199403 2 003	Kabid Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Anggota
5.	Apriyana Rachmawaty, S.Psi 19770417 100112 2 001	Kabid Pengembangan Kompetensi Teknis	Anggota
6.	Rina Kushariyanti. S.STP., M.M 19810731 200012 2 001	Kabid Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Anggota
7.	Samsul Qamar, S.Sos	Kasubbag Umum	Anggota
8.	Ilham Wahyu Anggara, S.Tr.IP	Pengolah Data Perencanaan	Anggota
9.	Eva Indah Purnama	Pengolah Data Perencanaan	Anggota
10	Aditya	Pengadministrasi Umum	Anggota

Kepala

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dra. Nina Dewi, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660928 198609 2 001

KATA PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini merupakan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Review Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Samarinda, 21 Agustus 2023

Kepala

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dra. Nina Dewi, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660928 198609 2 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB I PENDAHULUN

1.1. Latar Belakang

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah segera melakukan perumusan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dimaksud berpedoman kepada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur hingga triwulan II tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dimaksud, dirumuskan dengan menyesuaikan perkembangan aktual yang terjadi pada perubahan target program/kegiatan/sub kegiatan dan pagu indikatif yang bersifat penting untuk dilakukan perubahan.

Perubahan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud selanjutnya disampaikan kepada Kepala BAPPDA Provinsi Kalimantan Timur untuk diverifikasi dan selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. Selanjutnya Perubahan Renja dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2023 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan inovasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Renja adalah untuk melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan Program/Kegiatan/Subkegiatan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 serta penyesuaian target tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renja adalah untuk menyesuaikan target kinerja dan pagu program/kegiatan/subkegiatan, menjadi dokumen perencanaan perangkat daerah yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun 2023, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2023 dan menjaga konsistensi capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun dengan sistematika dan penjelasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan;

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen Perubahan Renja.

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023;

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 pada Triwulan I dan Triwulan II.

BAB III Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah;

Memuat Tujuan dan Sasaran perangkat daerah serta program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2023 yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV Penutup.

Memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2023.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Evaluasi merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan melalui pencapaian target tujuan dan sasaran perangkat daerah pada tahun 2023 serta capaian program/ kegiatan/subkegiatan yang telah ditetapkan pada Renja tahun 2023.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 diharapkan mampu mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan pada dokumen perencanaan menengah perangkat daerah yakni Perubahan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Pelaksanaan Rancangan Akhir perubahan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kelima Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 yang dilaksanakan melalui pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 yang dilaksanakan bertujuan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan antara dengan RKA-PD dan Renja PD; memastikan realisasi target kinerja (output) dan penyerapan dana sub kegiatan Renja; mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran Renja; melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan serta akselerasi atas keterlambatan dalam realisasi pelaksanaan Renja. Konsistensi pelaksanaan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 terhadap pelaksanaan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran pada Renstra dan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Pada Tahun 2023		Realisasi Tahun 2023
			Renstra	Renja	
1	2	3	4	5	6
1	Tujuan : Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B (70)	B (70)	-
2	Sasaran : Terwujudnya Kinerja Kelitbangan yang Dimanfaatkan Untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dan Mendukung Ibu Kota Negara	Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dan Mendukung Ibu Kota Negara	100%	100%	85%*

Keterangan :

* = Realisasi kinerja sementara sampai dengan triwulan II Tahun 2023

Nilai tersebut merupakan akumulasi dari tahun 2019 sampai dengan triwulan II Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisa keterkaitan sasaran Perangkat Daerah dengan sasaran di dalam RPJMD Tahun 2019-2023 pada Forum Koordinasi Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, disepakati bahwa terdapat kesesuaian tujuan dan sasaran serta target kinerja yang telah ditetapkan pada pada tahun kelima Renstra (tahun 2023) dengan yang ditetapkan pada Renja 2023.

Adapun untuk perolehan realisasi tercapainya persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dan Mendukung Ibu Kota Negara sebesar 85% diperoleh dari perhitungan hasil pemanfaatan riset/kajian dalam disitasi Jurnal Riset Pembangunan (85 judul riset/kajian disitasi dari target 99 judul riset/kajian). Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada APBD tahun anggaran 2023 telah direncanakan pada Renja Tahun 2023 dan tidak ada penambahan program/kegiatan/subkegiatan. Secara rinci gambaran pelaksanaan Renja Tahun 2023 pada APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut berikut:

Tabel 2.2

Konsistensi Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Balitbangda Tahun 2023 dengan APBD Balitbangda Tahun 2023

Kode	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RENJA TAHUN 2023			APBD TA 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah			19.727.019.000			31.802.815.364	Inkosistensi pada pagu
5.05.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas Balitbangda	98%	16.121.375.000	Persentase pelayanan publik pada tugas Balitbangda	98%	19.644.945.664	Inkosistensi pada pagu
5.05.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja PD yang direalisasikan tepat waktu	31 Dokumen	130.250.000	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja PD yang direalisasikan tepat waktu	31 Dokumen	481.290.000	Inkosistensi pada pagu
5.05.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	41.350.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	79.950.000	Inkosistensi pada pagu
5.05.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan penyusunan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21 laporan	88.900.000	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan penyusunan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	24 Laporan	401.340.000	Inkosistensi pada target dan pagu
5.05.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	14 Dokumen	10.352.255.260	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	14 Dokumen	10.036.736.114	Inkosistensi pada pagu
5.05.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 orang/bulan	10.352.255.260	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	46 orang/bulan	10.036.736.114	Inkosistensi pada target dan pagu

Kode	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RENJA TAHUN 2023			APBD TA 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
5.05.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	20	64.600.000	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	20 Dokumen	96.112.500	Inkosistensi pada pagu
5.05.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 orang	64.600.000	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25 orang	96.112.500	Inkosistensi pada target dan pagu
5.05.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	12 Bulan	2.470.647.000	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	12 Bulan	3.870.311.650	Inkosistensi pada pagu
5.05.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	28.108.000	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	19.121.100	Inkosistensi pada pagu
5.05.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	274.650.000	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	48.492.400	Inkosistensi pada pagu
5.05.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralataan rumah tangga yang disediakan	1 paket	51.752.000	jumlah paket peralataan rumah tangga yang disediakan	1 paket	34.620.400	Inkosistensi pada pagu
5.05.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakaan	1 paket	180.592.000	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakaan	1 paket	208.495.750	Inkosistensi pada pagu
5.05.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.935.545.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.559.582.000	Inkosistensi pada pagu
5.05.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	58 Unit	469.362.000	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	58 Unit	1.182.666.000	Inkosistensi pada pagu
5.05.001.1.07.005	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	69.320.000	jumlah paket mebel yang disediakan	2 paket	68.112.600	Inkosistensi pada target dan pagu

Kode	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RENJA TAHUN 2023			APBD TA 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
5.05.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JUmlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	31 unit	339.022.000	JUmlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	30 Unit	428.814.500	Inkosistensi pada target dan pagu
5.05.001.1.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	6 unit	61.020.000	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	40 Unit	685.738.900	Inkosistensi pada target dan pagu
5.05.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	12 Bulan	2.051.891.540	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	12 Bulan	2.966.951.000	Inkosistensi pada pagu
5.05.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan jasa surat menyurat	12 Laporan	20.000.000	Jumlah laporan jasa surat menyurat	12 Laporan	17.385.000	Inkosistensi pada pagu
5.05.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	266.191.604	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	293.720.800	Inkosistensi pada pagu
5.05.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13 laporan	1.765.699.936	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	31 Laporan	2.655.845.200	Inkosistensi pada target dan pagu
5.05.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah	5 Kegiatan	582.369.200	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah	5 Kegiatan	1.010.878.400	Inkosistensi pada pagu
5.05.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	198.139.200	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	272.124.400	Inkosistensi pada pagu

Kode	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RENJA TAHUN 2023			APBD TA 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
5.05.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	62 unit	50.760.000	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	61 Unit	30.274.000	Inkosistensi pada target dan pagu
5.05.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	199.650.000	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	599.530.000	Inkosistensi pada pagu
5.05.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	75 unit	35.020.000	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	10.150.000	Inkosistensi pada target dan pagu
5.05.001.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	98.800.000	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	98.800.000	Konsisten
5.05.002	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	3.605.644.000	Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	12.157.869.700	Inkosistensi pada pagu
		Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN)	100%		Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN)	100%		
5.05.002.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100%	665.194.000	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100%	2.549.781.000	Inkosistensi pada pagu

Kode	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RENJA TAHUN 2023			APBD TA 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
5.05.002.1.01.002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	75.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	4 Laporan	1.643.057.000	Inkosistensi pada target dan pagu
5.05.002.1.01.003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	128.867.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	259.032.000	Inkosistensi pada pagu
5.05.002.1.01.004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	75.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2 Laporan	147.180.000	Inkosistensi pada target dan pagu
5.05.002.1.01.005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	2 Laporan	286.327.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	3 Laporan	402.762.000	Inkosistensi pada target dan pagu
5.05.002.1.01.012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	100.000.000	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	97.750.000	Inkosistensi pada pagu
5.05.002.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	100%	334.810.000	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	100%	926.470.000	Inkosistensi pada pagu

Kode	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RENJA TAHUN 2023			APBD TA 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
5.05.002.1.02.002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 dokumen	170.904.500	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4 Dokumen	570.870.000	Inkosistensi pada target dan pagu
5.05.002.1.02.003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 dokumen	163.905.500	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	2 Dokumen	355.600.000	Inkosistensi pada target dan pagu
5.05.002.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100%	1.225.000.000	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100%	3.901.000.000	Inkosistensi pada pagu
5.05.002.1.03.001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	250.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 Dokumen	550.000.000	Inkosistensi pada target dan pagu
5.05.002.1.03.002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	200.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen	650.000.000	Inkosistensi pada target dan pagu
5.05.002.1.03.004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	350.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	350.000.000	Inkosistensi pada pagu
5.05.002.1.03.006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	25.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	7 Dokumen	1.541.000.000	Inkosistensi pada target dan pagu

Kode	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RENJA TAHUN 2023			APBD TA 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
5.05.002.1.03.010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	200.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	2 Dokumen	330.000.000	Inkosistensi pada target dan pagu
5.05.002.1.03.012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	200.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	3 Dokumen	480.000.000	Inkosistensi pada target dan pagu
5.05.002.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Lomba Penjaringan Peserta Inovasi Kreativitas Pelayanan Perangkat daerah (PEPES IKAN PEDA)	100%	1.380.640.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Lomba Penjaringan Peserta Inovasi Kreativitas Pelayanan Perangkat daerah (PEPES IKAN PEDA)	100%	4.780.618.700	Inkosistensi pada pagu
5.05.002.1.04.001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 dokumen	587.123.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 Dokumen	2.021.672.500	Inkosistensi pada target dan pagu
5.05.002.1.04.002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	149.979.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	744.261.000	Inkosistensi pada target dan pagu
5.05.002.1.04.003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	293.580.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	4 Laporan	1.541.543.200	Inkosistensi pada target dan pagu

Kode	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RENJA TAHUN 2023			APBD TA 2023			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
5.05.002.1.04.004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 laporan	249.978.000	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	311.564.000	Inkosistensi pada pagu
5.05.002.1.04.005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 laporan	99.980.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	161.578.000	Inkosistensi pada pagu

Berdasarkan Renja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, terdapat 2 program, 11 kegiatan dan 39 sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada APBD tahun anggaran 2023. Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan pada Renja dilaksanakan pada APBD. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Rekapitulasi Gambaran Konsistensi Progam/Kegiatan/Subkegiatan Renja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan APBD Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Konsisten	0	0	1
2.	Inkonsistensi pada target dan pagu	0	0	22
3.	Inkonsistensi pada pagu	2	11	16
	Jumlah	2	11	39

Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan Renja tahun 2023 pada APBD tahun 2023, terdapat 1 sub kegiatan yang konsisten pada sub kegiatan, terdapat inkonsistensi pada sub kegiatan dengan rincian 22 sub kegiatan yang inkonsistensi karena perbedaan target kinerja dan pagu pada pelaksanaan APBD, 16 sub kegiatan yang inkonsistensi karena perbedaan pagu pada APBD. Adapun penyebab inkonsistensi yang terjadi pada pelaksanaan renja yang dimaksud karena :

1. Terdapat penambahan alokasi pagu anggaran pada APBD Tahun 2023 setelah ditetapkannya RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, penambahan sebesar Rp. 12.075.796.364,- atau sebesar 62% dari pagu Renja 2023.
2. Penambahan pagu tersebut menyebabkan perbedaaan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan antara Renja 2023 dan APBD Tahun 2023, atau inkonsistensi, namun masih bersifat positif karena tidak mengurangi target kinerja pada Renja 2023.
3. Sebanyak 1 (satu) sub kegiatan yang konsisten pada target dan pagu pada APBD tahun 2023;
4. Adanya inkonsistensi dalam pelaksanaan Renja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 pada APBD Tahun Anggaran 2023 akan menjadi catatan yang harus diperbaiki dan ditindak lanjuti dalam perubahan Renja tahun 2023 dan menjadi catatan dalam penyusunan

Renja tahun berikutnya.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 bertujuan untuk memastikan pagu indikatif yang telah dianggarkan pada APBD tahun 2023 atau DPA tahun 2023 telah efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja (output) yang telah direncanakan pada Renja serta memastikan target kinerja sub kegiatan yang telah direncanakan .

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023		Predikat	
						Triwulan-I		Triwulan-II							
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	
			K		RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah				19.727.019.000	-	2.813.858.780	-	10.421.237.259	-	10.421.237.259	-	52,83	SR	R
5.05.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas Balitbangda	98	%	16.121.375.000	12,009	2.424.790.392	53,67	8.046.645.886	53,67	8.046.645.886	54,77	49,91	R	SR
5.05.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja PD yang direalisasikan tepat waktu	31	Dokumen	130.250.000	3	8.647.000	18	27.997.000	18	27.997.000	58,06	21,49	R	SR
5.05.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dokumen	41.350.000	2	8.647.000	7	27.997.000	7	27.997.000	70	67,71	S	S
5.05.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan penyusunan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21	Laporan	88.900.000	1	-	11	-	11	-	52,38	0	R	SR
5.05.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	14	Dokumen	10.352.255.260	3	1.475.595.063	8	4.318.205.475	8	4.318.205.475	57,14	41,71	R	SR
5.05.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45	orang/bulan	10.352.255.260	0	1.475.595.063	0	4.318.205.475	0	4.318.205.475	0	41,71	SR	SR
5.05.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	20	Dokumen	64.600.000	0	-	9	3.500.000	9	3.500.000	45	5,42	SR	SR
5.05.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20	orang	64.600.000	0	-	9	3.500.000	9	3.500.000	45	5,42	SR	SR

5.05.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	12	Bulan	2.470.647.000	3	294.775.269	6	1.712.428.488	6	1.712.428.488	50	69,31	SR	S
5.05.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	paket	28.108.000	-	6.000.000	0	7.650.000	0	7.650.000	0	27,22	SR	SR
5.05.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	paket	274.650.000	0	-	0	4.937.500	0	4.937.500	0	1,8	SR	SR
5.05.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralataan rumah tangga yang disediakan	1	paket	51.752.000	0	-	0	17.432.000	0	17.432.000	0	33,68	SR	SR
5.05.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakaan	1	paket	180.592.000	0	2.505.000	0	18.179.500	0	18.179.500	0	10,07	SR	SR
5.05.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	1.935.545.000	3	286.270.269	6	1.664.229.488	6	1.664.229.488	50	85,98	SR	T
5.05.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	58	Unit	469.362.000	5	48.500.000	34	470.890.000	34	470.890.000	58,62	100,33	R	ST
5.05.001.1.07.005	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	1	paket	69.320.000	0	-	1	-	1	-	100	0	ST	SR
5.05.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JUmlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	31	Unit	339.022.000	5	48.500.000	30	424.390.000	30	424.390.000	96,77	125,18	ST	ST
5.05.001.1.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	6	Unit	61.020.000	0	-	4	46.500.000	4	46.500.000	66,67	76,2	S	T
5.05.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	12	Bulan	2.051.891.540	3	571.476.338	6	1.363.948.895	6	1.363.948.895	50	66,47	SR	S
5.05.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan jasa surat menyurat	12	Laporan	20.000.000	3	350.000	6	3.910.000	6	3.910.000	50	19,55	SR	SR
5.05.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	12	Laporan	266.191.604	3	55.662.178	6	126.326.335	6	126.326.335	50	47,46	SR	SR
5.05.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13	Laporan	1.765.699.936	3	515.464.160	6	1.233.712.560	6	1.233.712.560	46,15	69,87	SR	S

5.05.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah	5	Kegiatan	582.369.200	0	25.796.722	2	149.676.028	2	149.676.028	40	25,7	SR	SR
5.05.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	198.139.200	3	22.941.722	2	105.071.028	2	105.071.028	33,33	53,03	SR	R
5.05.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	62	Unit	50.760.000	5	2.855.000	11	7.605.000	11	7.605.000	17,74	14,98	SR	SR
5.05.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	Unit	199.650.000	0	-	1	27.000.000	1	27.000.000	50	13,52	SR	SR
5.05.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	75	Unit	35.020.000	0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1,33	28,56	SR	SR
5.05.001.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	98.800.000	0	-	1	-	1	-	100	0	ST	SR
5.05.002	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100	%	3.605.644.000	3,19	389.068.388	64,14	2.374.591.373	64,14	2.374.591.373	64,14	65,86	R	R
		Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN)	100	%		3,19		64,14		64,14		64,14		R	
5.05.002.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100	%	665.194.000	0	38.044.400	42,22	264.537.963	42,22	264.537.963	42,22	39,77	SR	SR
5.05.002.1.01.002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1	Laporan	75.000.000	0	11.456.000	2	107.013.049	2	107.013.049	200	142,68	ST	ST

5.05.002.1.01.003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1	Laporan	128.867.000	0	312.000	1	42.511.240	1	42.511.240	100	32,99	ST	SR
5.05.002.1.01.004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1	Laporan	75.000.000	0	-	1	17.792.000	1	17.792.000	100	23,72	ST	SR
5.05.002.1.01.005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	2	Laporan	286.327.000	0	25.964.400	2	26.420.400	2	26.420.400	100	9,23	ST	SR
5.05.002.1.01.012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1	Dokumen	100.000.000	0	312.000	1	70.801.274	1	70.801.274	100	70,8	ST	S
5.05.002.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	100	%	334.810.000	0	18.461.200	51,56	196.142.000	51,56	196.142.000	51,56	58,58	R	R
5.05.002.1.02.002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Laporan	170.904.500	0	2.280.000	2	79.408.000	2	79.408.000	200	46,46	ST	SR
5.05.002.1.02.003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	Laporan	163.905.500	0	16.181.200	1	116.734.000	1	116.734.000	100	71,22	ST	S
5.05.002.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100	%	1.225.000.000	-	221.076.308	53,24	1.225.959.686	53,24	1.225.959.686	53,24	100,08	R	ST
5.05.002.1.03.001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Dokumen	250.000.000	0	-	1	57.883.120	1	57.883.120	100	23,15	ST	SR
5.05.002.1.03.002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	Dokumen	200.000.000	0	42.715.108	1	187.189.608	1	187.189.608	100	93,59	ST	ST

5.05.002.1.03.004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	Dokumen	350.000.000	0	14.325.000	1	114.608.820	1	114.608.820	100	32,75	ST	SR
5.05.002.1.03.006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Dokumen	25.000.000	0	104.370.000	1	535.474.977	1	535.474.977	100	2141,9	ST	ST
5.05.002.1.03.010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1	Dokumen	200.000.000	0	9.255.000	1	122.260.000	1	122.260.000	100	61,13	ST	R
5.05.002.1.03.012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1	Dokumen	200.000.000	0	50.411.200	2	208.543.161	2	208.543.161	200	104,27	ST	ST
5.05.002.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Lomba Penjaringan Peserta Inovasi Kreativitas Pelayanan Perangkat daerah (PEPES IKAN PEDA)	100	%	1.380.640.000	0	111.486.480	48,05	687.951.724	48,05	687.951.724	48,05	49,83	SR	SR
5.05.002.1.04.001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2	Dokumen	587.123.000	0	-	3	68.039.685	3	68.039.685	150	11,59	ST	SR
5.05.002.1.04.002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1	Laporan	149.979.000	0	-	1	32.262.126	1	32.262.126	100	21,51	ST	SR
5.05.002.1.04.003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	Laporan	293.580.000	0	42.723.180	2	424.716.593	2	424.716.593	200	144,67	ST	ST
5.05.002.1.04.004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3	Laporan	249.978.000	0	17.254.800	2	90.265.780	2	90.265.780	66,67	36,11	S	SR
5.05.002.1.04.005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1	Laporan	99.980.000	0	51.508.500	1	72.667.540	1	72.667.540	100	72,68	ST	S

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan antara lain :

1. Capaian sasaran strategis
   - Hasil riset/kajian belum optimal di publikasikan dalam jurnal-jurnal nasional dan internasional.
   - Hasil riset/kajian belum optimal didaftarkan untuk hak cipta di Kementerian Hukum dan HAM RI.
2. Bidang Sosial Pemerintahan
   - Kegiatan Panji-panji Keberhasilan, Tokoh-tokoh berjasa dan Perangkat Daerah Terbaik dilaksanakan pada triwulan IV sehingga realisasi masih kecil.
   - Kegiatan Survey Remaja Stunting yang sebelumnya direncanakan berbagi dana dengan Dinas Kesehatan namun ternyata tidak dianggarkan oleh Dinas Kesehatan sehingga diputuskan untuk dilaksanakan oleh Balitbangda sendiri.
3. Bidang Inovasi dan Teknologi
   - Telah dilaksanakan kajian se-Kalimantan dan Sulawesi serta koordinasi mengenai Pembangunan Iradiator dengan melibatkan Bappeda, BPKAD, Dinas Perindagkop, Dinas Pangan TPH, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan.
   - Kegiatan pengadaan alat minyak goreng kepada kelompok tani di Muara Badak terkendala tidak tersedianya SSH dan telah diusulkan di perubahan anggaran dengan nilai Rp 650.000.000,-.
   - Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi terkendala MoU pada Studi Kelayakan Pembangunan Iradiator dengan melibatkan Kementerian Perekonomian RI dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan
   - Kegiatan penelitian pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan terkendala pada sinkronisasi waktu dengan tenaga ahli.
5. Sekretariat
   - Realisasi pengadaan pada Aplikasi TEPRA masih rendah.

Berdasarkan beberapa penghambat yang menjadi penyebab dalam rendahnya realisasi kinerja keuangan hingga triwulan II tahun 2023, beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian dan memaksimalkan penyerapan anggaran antara lain :

1. Melakukan evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi dalam jurnal riset pembangunan.
2. Melakukan penjaringan produk-produk riset dan inovasi untuk didaftarkan hak ciptanya yang secara sistem dalam IRIS (Innovation and Research Information System).
3. Melakukan evaluasi realisasi belanja yang dilakukan secara periodik kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selaku pelaksana kegiatan yang disesuaikan dengan rencana realisasi kegiatan dan rencana aliran kas.
4. Melakukan percepatan pelaksanaan belanja modal dan belanja barang jasa pada masing-masing sub kegiatan.
5. Agar dilakukan percepatan pada proses penerbitan MoU pada Studi Kelayakan Pembangunan Iradiator
6. Agar dilakukan koordinasi secara intens terkait sinkronisasi waktu dengan tenaga ahli
7. Update pembaharuan informasi pada aplikasi TEPRA, termasuk data realisasi pengadaan.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran ouput kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Adapun uraian program/kegiatan/sub kegiatan beserta anggaran pada perubahan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu		Lokasi
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah				31.802.815.364	33.471.543.612	
5.05.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas Balitbangda	98%	98%	19.644.945.664	20.747.173.912	Provinsi Kaltim dan luar daerah
5.05.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja PD yang direalisasikan tepat waktu	31 Dokumen	31 Dokumen	481.290.000	271.290.000	Samarinda
5.05.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	79.950.000	79.950.000	Samarinda
5.05.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan penyusunan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	24 Laporan	24 Laporan	401.340.000	191.340.000	Samarinda
5.05.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	14 Dokumen	14 Dokumen	10.036.736.114	10.036.736.114	Samarinda
5.05.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	46 orang/bulan	46 orang/bulan	10.036.736.114	10.036.736.114	Samarinda
5.05.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	20 Dokumen	20 Dokumen	96.112.500	180.691.500	Provinsi Kaltim dan luar daerah
5.05.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25 orang	47 Orang	96.112.500	180.691.500	Provinsi Kaltim dan luar daerah
5.05.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	3.870.311.650	3.701.779.850	Samarinda

Kode	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu		Lokasi
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5.05.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	19.121.100	19.121.100	Samarinda
5.05.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	48.492.400	48.492.400	Samarinda
5.05.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralataan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1 paket	34.620.400	34.620.400	Samarinda
5.05.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakaan	1 paket	1 paket	208.495.750	123.344.050	Samarinda
5.05.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	3.559.582.000	3.476.201.900	Provinsi Kaltim dan luar daerah
5.05.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	58 Unit	58 Unit	1.182.666.000	2.413.152.100	Samarinda
5.05.001.1.07.005	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	2 paket	2 paket	68.112.600	68.112.600	Samarinda
5.05.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	30 Unit	30 Unit	428.814.500	428.814.500	Samarinda
5.05.001.1.07,01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	3 Unit	-	1.123.750.000	Samarinda
5.05.001.1.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	40 Unit	12 Unit	685.738.900	792.475.000	Samarinda
5.05.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	2.966.951.000	3.102.036.948	Samarinda
5.05.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	17.385.000	17.385.000	Samarinda

Kode	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu		Lokasi
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5.05.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	293.720.800	329.576.748	Samarinda
5.05.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	31 Laporan	31 Laporan	2.655.845.200	2.755.075.200	Samarinda
5.05.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1.010.878.400	1.041.487.400	Samarinda
5.05.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	9 Unit	272.124.400	302.733.400	Samarinda
5.05.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	61 Unit	61 Unit	30.274.000	30.274.000	Samarinda
5.05.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	599.530.000	599.530.000	Samarinda
5.05.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.150.000	10.150.000	Samarinda
5.05.001.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	98.800.000	98.800.000	Samarinda
5.05.002	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	12.157.869.700	12.724.369.700	Semua kecamatan, semua Kab/Kota, semua kelurahan, luar daerah
		Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN)	100%	100%			
5.05.002.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100%	100%	2.549.781.000	2.549.781.000	Semua kecamatan, semua Kab/Kota, semua kelurahan, luar daerah
5.05.002.1.01.002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	4 Laporan	4 Laporan	1.643.057.000	1.643.057.000	Semua kecamatan, semua Kab/Kota, semua kelurahan, luar daerah

Kode	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu		Lokasi
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5.05.002.1.01.003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	1 Laporan	259.032.000	259.032.000	Semua kecamatan, semua Kab/Kota, semua kelurahan, luar daerah
5.05.002.1.01.004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2 Laporan	2 Laporan	147.180.000	147.180.000	Semua kecamatan, semua Kab/Kota, semua kelurahan, luar daerah
5.05.002.1.01.005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	3 Laporan	3 Laporan	402.762.000	402.762.000	Semua kecamatan, semua Kab/Kota, semua kelurahan, luar daerah
5.05.002.1.01.012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	97.750.000	97.750.000	Semua kecamatan, semua Kab/Kota, semua kelurahan, luar daerah
5.05.002.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	100%	100%	926.470.000	926.470.000	Semua kecamatan, semua Kab/Kota, semua kelurahan, luar daerah
5.05.002.1.02.002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4 Laporan	4 Laporan	570.870.000	570.870.000	Semua kecamatan, semua Kab/Kota, semua kelurahan, luar daerah
5.05.002.1.02.003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	2 Laporan	2 Laporan	355.600.000	355.600.000	Semua kecamatan, semua Kab/Kota, semua kelurahan, luar daerah
5.05.002.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100%	100%	3.901.000.000	4.467.500.000	Semua kecamatan, semua Kab/Kota, semua kelurahan, luar daerah
5.05.002.1.03.001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 Dokumen	2 Dokumen	550.000.000	716.500.000	Semua kecamatan, semua Kab/Kota, semua kelurahan, luar daerah
5.05.002.1.03.002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen	2 Dokumen	650.000.000	650.000.000	Semua kecamatan, semua Kab/Kota, semua kelurahan, luar daerah

Kode	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu		Lokasi
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5.05.002.1.03.004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000	350.000.000	Semua kecamatan, semua Kab/Kota, semua kelurahan, luar daerah
5.05.002.1.03.006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	7 Dokumen	7 Dokumen	1.541.000.000	1.741.000.000	Semua kecamatan, semua Kab/Kota, semua kelurahan, luar daerah
5.05.002.1.03.010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	2 Dokumen	2 Dokumen	330.000.000	330.000.000	Semua kecamatan, semua Kab/Kota, semua kelurahan, luar daerah
5.05.002.1.03.012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	3 Dokumen	3 Dokumen	480.000.000	680.000.000	Semua kecamatan, semua Kab/Kota, semua kelurahan, luar daerah
5.05.002.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Lomba Penjaringan Peserta Inovasi Kreativitas Pelayanan Perangkat daerah (PEPES IKAN PEDA)	100%	100%	4.780.618.700	4.780.618.700	Semua kecamatan, semua Kab/Kota, semua kelurahan, luar daerah
5.05.002.1.04.001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 Dokumen	5 Dokumen	2.021.672.500	2.021.672.500	Semua kecamatan, semua Kab/Kota, semua kelurahan, luar daerah
5.05.002.1.04.002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	2 Laporan	744.261.000	744.261.000	Semua kecamatan, semua Kab/Kota, semua kelurahan, luar daerah
5.05.002.1.04.003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	4 Laporan	4 Laporan	1.541.543.200	1.541.543.200	Semua kecamatan, semua Kab/Kota, semua kelurahan, luar daerah
5.05.002.1.04.004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	3 Laporan	311.564.000	311.564.000	Semua kecamatan, semua Kab/Kota, semua kelurahan, luar daerah
5.05.002.1.04.005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan	161.578.000	161.578.000	Semua kecamatan, semua Kab/Kota, semua kelurahan, luar daerah

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 32 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Perubahan RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENGHUBUNG

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di waktu yang akan datang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 263 disebutkan bahwa, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2018-2023 yang akan berakhir pada Desember 2023, sesuai berakhirnya masa akhir jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk melakukan evaluasi dan analisis pendahuluan atas kinerja pembangunan, kapasitas keuangan daerah, permasalahan pembangunan dan isu strategis dalam rangka peningkatan sinergitas, sinkronisasi, dan integrasi pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, Untuk mendukung hal tersebut selanjutnya setiap Perangkat Daerah menyusun rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan (Renja) berpedoman pada RPJMD yang masih dalam bentuk Kajian Awal Rancangan Teknokratik RPJMD

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 (Pedoman/Panduan Penyusunan Visi Dan Misi Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 82 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penghubung Prov. Kalimantan Timur, Badan Penghubung mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan hubungan antar lembaga; promosi dan informasi; pelayanan dan pengelolaan Anjungan Kaltim serta Mess.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Badan Penghubung mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan Badan Penghubung sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang hubungan antar lembaga, promosi dan informasi, pelayanan dan pengelolaan Anjungan Kaltim serta Mess;
3. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan hubungan antar lembaga, promosi dan informasi, pelayanan dan pengelolaan Anjungan Kaltim serta Mess;
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian hubungan antar lembaga;
5. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian promosi dan informasi serta pengelolaan Anjungan Kaltim;
6. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian pelayanan dan pengelolaan Mess;
7. Melaksanakan urusan ketatausahaan;
8. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rancangan akhir Renja 2023 ini disusun dengan memperhatikan Peraturan dan Kebijakan penyusunan dokumen perencanaan seperti:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mengalami perubahan sehingga dapat dijadikan dasar perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renja yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKAP) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 serta dijadikan panduan untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023.

Sedang tujuan disusunnya Renja Perubahan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur adalah merumuskan kebijakan guna mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 dan juga memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUPA-PPAS).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 LANDASAN HUKUM

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1 URAIAN GARIS BESAR TENTANG PERTIMBANGAN RUMUSAN, DAN REKAPITULASI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENJELASAN PENDANAAN DAN KESESUAIAN DENGAN RKPD

BAB 5 PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pada APBD tahun 2023 Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur mendapat pagu anggaran sebesar Rp 27.473.058.552,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 21.664.434.052,- dan belanja modal sebesar Rp. 5.808.624.500,-. Realisasi belanja Badan Penghubung sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2023 mencapai 34,33% atau sebesar Rp 9.431.718.398,-. Berdasarkan pagu anggaran dan realisasi, maka secara umum capaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja dapat dikatakan kurang baik, hal ini disebabkan karena adanya kendala pada beberapa proses pengadaan barang/jasa yang baru dapat terlaksana sehingga secara fisik telah tercapai, tetapi realisasi keuangan masih dalam proses.

Sesuai program kegiatan dapat dijelaskan tentang capaian pelaksanaan Renja pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Capaian Program Kegiatan pada Renja s.d. TW II TA. 2023

NAMA PROGRAM	INDIKATOR	Dana 1 Tahun	REALISASI KEUANGAN	
			Rp.	%
Penunjang Urusan-Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pelayanan Publik pada Tugas Badan Penghubung Provinsi	20.475.032.352,-	6.955.278.684,-	33,96
Pelayanan Penghubung	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi	6.998.026.200,-	2.476.439.714,-	35,38

Sumber data : Laporan Pengawasan Anggaran Definitif per Kegiatan s.d TW II TA.2023

Pada tataran sistem pengukuran kinerja, ukuran keberhasilan pencapaian sasaran lebih tinggi dari pada pencapaian program dan kegiatan, karena program merupakan serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Oleh karena itu, pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian target kinerja APBD digunakan pengukuran kinerja pencapaian sasaran, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian dengan target atau rencana yang telah ditetapkan.

Pencapaian target kinerja APBD tahun anggaran 2023 pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari pendapatan dan belanja. Pendapatan melalui retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp 450.000.000,- dan realisasinya sampai dengan triwulan II sebesar Rp 460.261.200,- atau sebesar 102,28%. Sedangkan belanja operasi dan belanja modal dianggarkan sebesar Rp 27.473.058.552,- dan realisasinya sampai dengan triwulan II sebesar Rp 9.431.718.398,- atau sekitar 34,33%. Anggaran dan realisasi target kinerja APBD pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi APBD s.d. TW II TA. 2023

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Prosentase (%)
I.	PENDAPATAN	450.000.000,-	460.261.200,-	102,28
	1. Pendapatan Retribusi Daerah	450.000.000,-	460.261.200,-	102,28
	2. Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,-	0,-	
	3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0,-	0,-	
II.	BELANJA	27.473.058.552,-	9.431.718.398,-	34,33
	1. Belanja Operasi	21.664.434.052,-	8.549.000.373,-	39,46
	a. Belanja Pegawai	2.865.041.141,-	1.062.210.000,-	37,07
	b. Belanja Barang dan Jasa	18.799.392.911,-	7.486.790.373,-	39,82
	2. Belanja Modal	852.610.240,-	882.718.025,-	15,19
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.447.856.900,-	588.949.950,-	24,05
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.190.767.600,-	293.768.075,-	9,20
	c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	170.000.000,-	0,-	0
SURPLUS/(DEFISIT)		**(27.023.058.552)**	**(8.971.457.198)**	**33,19**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		**(27.023.058.552)**	**(8.971.457.198)**	**33,19**

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah s.d. 30 Juni 2023

Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
    a. Bappeda Prov. Kaltim :
        1) Asistensi RKA/DPA APBD Murni Tahun 2024
        2) Asistensi Penyusunan RENSTRA.
        3) Koordinasi Penyusunan RENJA
        4) Forum PD dan Musrenbang Prov. Kaltim
    b. Inspektorat Prov. Kaltim :
        1) Asistensi dan preview LKjIP Tahun 2022
        2) Koordinasi dan konsultasi.
    c. Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim, koordinasi dan konsultasi masalah kepegawaian
    d. Sekretariat DPRD Prov. Kaltim :
        1) Rapat dengar pendapat mengenai tindak lanjut pembangunan Anjungan Kaltim TMII.
        2) Fasilitasi anggota DPRD Kaltim di Jakarta.
    e. Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim, koordinasi dan konsultasi masalah retribusi sarana dan prasarana pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dan pelaporannya.
    f. Dinas Pariwisata Prov. Kaltim dan Dinas Pariwisata Kabupatan/Kota se Kaltim, koordinasi dan konsultasi masalah promosi kebudayaan dan pariwisata daerah Kaltim.
    g. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim, koordinasi dan konsultasi masalah pembangunan Anjungan Kaltim TMII.
    h. BPKAD Prov. Kaltim ;
        1) Pergeseran Anggaran APBD Tahun 2023
        2) Asistensi RKA/DPA APBD Murni Tahun 2024.
        3) Mengurus usulan APBD pada bagian anggaran.
        4) Mengurus pencairan SP2D pada bagian perbendaharaan.
        5) Mengurus usulan SK PPKD-SKPD pada bagian BAKD.
        6) Menyampaikan Laporan Keuangan pada bagian akuntansi.
        7) Entry data dan pelaporan barang milik daerah (BMD).
        8) Koordinasi dan konsultasi masalah pembangunan Anjungan Kaltim TMII.

i. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltim :
   1) Asistensi RKA/DPA APBD Murni 2024.
   2) Mengurus usulan program dan kegiatan pada APBD.
   3) Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok).
   4) Entry data dan pelaporan TEPRA.
   5) Koordinasi dan konsultasi masalah pembangunan Anjungan Kaltim TMII.
   6) Pelaporan realisasi anggaran dan fisik setiap bulan
j. Biro Pengadaan Barang Jasa :
   1) Penyusunan RUP.
   2) Kaji ulang dokumen pemilihan tender.
   3) Konsultasi dan koordinasi mengenai pengadaan barang dan jasa.
k. Biro Umum Setda Prov. Kaltim, koordinasi dan konsultasi masalah tugas pokok dan fungsi.
l. Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim :
   1) Penyusunan analisis jabatan dan beban kerja PNS.
   2) Penyusunan Laporan Penerapan Budaya Kerja Aparatur.
   3) Penyusunan SOP.
   4) Penyusunan LKjIP.
   5) Koordinasi dan konsultasi masalah tugas pokok dan fungsi.
m. Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kaltim, koordinasi dan konsultasi masalah kehumasan dan keprotokolan.
n. Biro Hukum Setda Prov. Kaltim :
   1) Mengurus usulan Perda Retribusi Penerimaan Sewa sarana dan prasarana pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur.
o. Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kaltim, koordinasi dan konsultasi masalah keamanan pengamanan asset pada Badan Penghubung, Mess, Rumah Jabatan dan Anjungan Kaltim TMII.
p. Seluruh PD dilingkungan Pemprov. Kaltim, koordinasi dan konsultasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kebijakan-kebijakan Gubernur Kalimantan Timur.

2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
   a. Seksi Promosi dan Informasi

      Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur khususnya Seksi Promosi dan Informasi bertugas memfasilitasi kegiatan Promosi Potensi Kaltim baik produk unggulan, pelestarian seni budaya Kaltim,

pariwisata dan potensi investasi Kaltim, dan juga sebagai "*Duta Besar*" bagi Provinsi Kalimantan Timur yang ada di Jakarta.

Anjungan Kaltim juga digunakan untuk promosi kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan guna memperkenalkan tentang budaya dan seni, pariwisata, perdagangan dan potensi investasi Kaltim pada masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Seksi Promosi dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan-bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian promosi dan informasi, mempromosikan dan menginformasikan kepada masyarakat dan para calon investor untuk lebih mengenal Kalimantan Timur dan potensi-potensi yang ada di Kalimantan Timur baik dari segi investasi, pariwisata, seni dan budaya, produk unggulan serta potensi-potensi lainnya serta pengelolaan Anjungan Kaltim TMII di Jakarta.

Seksi Promosi dan Informasi juga memfasilitasi Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Pusat dalam hal menginformasikan potensi yang ada di Kalimantan Timur, namun dalam hal teknis akan dikoordinasikan kepada Perangkat Daerah terkait.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Seksi Promosi dan Informasi terdiri dari:

1. Kegiatan promosi di Anjungan Kaltim berupa tarian daerah, musik daerah, lagu daerah dan fashion show baju daerah
2. Kegiatan promosi di TMII berupa kegiatan seni budaya pada rangkaian HUT TMII, Ragam Budaya, Pekan Lebaran, kuliner khas Kaltim, produk kriya/wastra khas Kaltim
3. Kegiatan promosi di DKI Jakarta berupa tampilan seni budaya di pameran JCC, Jiexpo dan sekolah-sekolah
4. Kaltim Exhibition di Sarinah Jakarta, berupa kegiatan promosi seni budaya, kriya, wastra dan kuliner khas Kaltim yg diikuti kabupaten/kota se- Kalimantan Timur
5. Koordinasi dengan Dinas Pariwisata Prov. Kaltim serta Kabupaten/Kota se- Kalimantan Timur dalam rangka promosi di Anjungan Kaltim TMII Jakarta
6. Koordinasi dengan DPMPTSP Prov. Kaltim dalam rangka informasi dan promosi investasi Kaltim
7. Koordinasi dengan Disperindakop Prov. Kaltim dalam rangka gelar produk guna promosi UMKM di Anjungan Kaltim

8. Koordinasi dengan Dinas PUPR Prov. Kaltim terkait revitalisasi Anjungan Kaltim

Berikut ini disajikan data pengunjung pada Anjungan Kaltim TMII Jakarta selama tahun 2019–2023.

Tabel 2.3

Data Pengunjung pada Anjungan Kaltim TMII Tahun 2019 - 2023

No.	Data Kunjungan	2019	2020	2021	2022	2023
PENGUNJUNG						
1.	Wisatawan Domestik	11.262	744	606	1089	1185
2.	Wisatawan Asing	1.625	30	10	31	20
3.	Tamu Khusus	1.194	-	60	5	3
JUMLAH		14.078	774	676	1125	1208

Sumber data : Data Pengunjung di Anjungan Kaltim TMII Jakarta Januari s.d. Juni 2023

Tabel 2.4

Program Kegiatan pada Anjungan Kaltim TMII Tahun 2023

NO	KEGIATAN	WAKTU/PELAKSANAAN	TEMPAT KEGIATAN	KETERANGAN
1.	PROMOSI DI ANJUNGAN KALTIM			
	1. Acara Rutin Anjungan			
	a. Gelar Pentas Kesenian Kaltim b. Kaltim Festival	Januari s.d. Desember 2023	Anjungan Kaltim TMII	1x/ 1 bulan (10 kegiatan) 1x
	2. Kegiatan di TMII			
	a. HUT TMII b. Ragam Budaya c. Etnic Fashion Festival d. Changing Guard	Januari s.d. Desember 2023	Kawasan TMII	1x 1x 1x 1x
2	PROMOSI DI JABODETABEK			
	Kegiatan di Jodetabek			
	Promosi Kaltim di Jabodetabek	Januari s.d. Desember 2023	1. JCC 2. SMPN 139 Jkt 3.JIEXPO 4.Merlin Hotel	4x 1 tahun
3	PROMOSI DAN FASILITASI DILUAR ANJUNGAN			
	Kaltim Exhibition	23 – 25 Juni 2023	Sarinah Mall	1x
	Guide Wisata Investasi	September 2023	Berau	1x

b. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan-bahan koordinasi, pembinaan, pelayanan dan pengelolaan Mess. Berkenaan dengan tugas pokok tersebut Seksi

Pelayanan mengelola Mess sebagai salah satu sarana akomodasi bagi para perangkat daerah yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta, juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah melalui retribusi sewa kamar, maka seksi pelayanan berusaha memberikan pelayanan sesuai SOP, melalui peningkatan kualitas Pelayanan bagi aparatur dan Masyarakat dalam melakukan kedinasan ke Jakarta maupun dalam penyewaan kamar sehingga adanya peningkatan tingkat kamar, Mess Kaltim berusaha untuk memberikan kepuasan bagi para tamu, melalui upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan sehingga diharapkan adanya peningkatan tingkat hunian kamar dari tahun ke tahun sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Juga memfasilitasi pejabat daerah yang dateng ke Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur.

Berikut ini disajikan data instansi dan jumlah tamu yang menginap serta hasil retribusi Mess berdasarkan tarif Mess yang disetor ke Kas daerah selama tahun anggaran 2023.

Tabel 2.5

Data Instansi dan Jumlah Tamu Mess s.d. TW II Tahun 2023

No.	Asal Tamu	Jumlah (Orang)
1.	Prov. Kalimantan Timur	388
2.	Samarinda	327
3.	Balikpapan	32
4.	Bontang	1
5.	Tarakan	0
6.	Kutai Kartanegara	17
7.	Kutai Barat	14
8.	Kutai Timur	13
9.	Paser	0
10.	Penajam Paser Utara	0
11.	Berau	10
12.	Bulungan	6
13.	Malinau	0
14.	Nunukan	9
15.	Tana Tidung	0
16.	Kaltara	30
	Jumlah ……..	**847**

Sumber data : Daftar Tamu Pemerintah Provinsi, Kotamadya/Kabupaten Januari s.d. Juni 2023

Tabel 2.6

Hasil Retribusi Mess berdasarkan Tarif Kamar Sesuai Perda No 4 Tahun 2021

ESELON	JUMLAH HARI	TARIF KAMAR		TOTAL	
01 Juli s.d. 31 Desember 2021					
EXECUTIVE	639	Rp	350.000	Rp	223.650.000
VIP I	69	Rp	275.000	Rp	18.975.000
VIP II	100	Rp	250.000	Rp	25.000.000
STANDART I	603	Rp	230.000	Rp	138.690.000
STANDART II	316	Rp	100.000	Rp	31.600.000
EXTRABED	65	Rp	75.000	Rp	4.875.000
Sewa Tempat ATM	1 Tahun	Rp	12.471.200	Rp	12.471.200
SEWA RUMAH DINAS	6 bulan	Rp	400.000	Rp	2.400.000
Sewa Panggung TMII	1 hari	Rp	2.500.000	Rp	2.500.000
Denda Sewa Panggung		Rp	100.000	Rp	100.000
TOTAL				**Rp**	**460.261.200**

Sumber data : Daftar Tamu Pemerintah Provinsi, Kotamadya/ Kabupaten Januari s.d. Juni 2023

Hasil retribusi mess sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah mencapai 102,28% dari target retribusi mess yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 450.000.000,-. Karena itu telah dilakukan reviu target pendapatan yaitu menaikkan target yang akan disampaikan kepada perangkat daerah terkait. Badan Penghubung juga telah menerapkan kuisioner untuk mengetahui kepuasan pelanggan/tamu terhadap pelayanan Mess Badan Penghubung dalam rangka peningkatan pelayanan Mess Badan Penghubung.

Pendapatan retribusi tarif sewa kamar Mess tahun 2023 yang disetor ke kas daerah terealisasi sebesar Rp. 460.261.200,- atau sebesar 102,28% dari target pendapatan yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 450.000.000,-. Pada triwulan II realisasi telah melampaui target yang ditetapkan, hal ini terjadi karena mess telah beroperasi secara normal setelah pemberlakuan PPKM dicabut dan Badan Penghubung telah melakukan perbaikan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana yang memadai serta melakukan promosi terhadap pemanfaatan mess Provinsi Kaltim di Jakarta sebagai sarana akomodasi bagi ASN atau masyarakat Kaltim yang bertugas/berkunjung ke Jakarta. Oleh karena itu, Badan Penghubung telah melakukan reviu terhadap target pendapatan retribusi tarif sewa kamar mess.

c. Seksi Hubungan Antar Lembaga

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan-bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian hubungan antar lembaga.

1. Pelayanan pejabat dalam rangka keprotokolan dan fasilitas pejabat daerah ke Jakarta, seperti: antar jemput pejabat di Jakarta, koordinasi dengan lembaga pemerintah departemen dan non departemen serta mengurus izin-izin administrasi.
2. Pelayanan pejabat dalam rangka keprotokolan dan fasilitas pejabat pusat ke daerah Kaltim, seperti : fasilitas kunjungan kerja, pejabat pusat ke Kaltim dan koordinasi antar pusat dan daerah.
3. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dan kerjasama serta Pembinaan masyarakat/warga Kaltim (KMKT) dan mahasiswa/pelajar Kaltim di Jakarta, seperti: sarasehan masyarakat Kaltim di Jakarta.
4. Kerjasama dan koordinasi antar Badan Penghubung se-Indonesia di Jakarta.

   Pada tahun 2023 kegiatan sosial kemasyarakatan terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan, seperti sunatan massal, sarasehan dengan warga Kaltim (KMKT) dan pertemuan dengan mahasiswa Kaltim di Jakarta (KPMKT).

   Kegiatan kerjasama dan koordinasi antar Badan Penghubung se Indonesia atau FORKAPPSI dapat terpenuhi dengan diadakannya kegiatan Forum Keprotokolan serta menghadiri undangan-undangan rapat koordinasi dengan FORKAPPSI.

Sampai dengan triwulan II tahun 2023 kegiatan keprotokolan dan fasilitasi pejabat daerah/pusat terealisasi sebanyak 45 kunjungan dengan adanya kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda di Jakarta.

Tabel 2.7

Keprotokolan dan Fasilitas Pejabat s.d. TW II Tahun 2023

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	KETERANGAN
1	18 Januari	Memfasilitasi Gubernur Pertemuan Dengan Menteri PAN-RB	Kementerian PAN-RB	Gubernur

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	KETERANGAN
2	30 Januari	Memfasilitasi Sekretasris Daerah Prov Kaltim Acara Penandatangan Surat Pernyataan Kesediaan Pem.Prov Kaltim menjadi Piloting Implementasi Sistem Kerja	Hotel Century, Jakarta	Sekda
3	02 Februari	Memfasilitasi Sekretasris Daerah Prov Kaltim Acara FORSESDASI	Swiss Bellin Kemayoran	Sekda
4	09 Februari	Memfasilitasi Wakil Gubernur acara Pengukuhan Guru Besar Institut Tazkiam Prof. Dr. Muhammad Syafii Antonio	Institut Tazkia, Bogor	Wakil Gubernur
5	15 Februari	Memfasilitasi Sekretaris Daerah Prov Kaltim acara Audensi Penyampaian Kaltim sebagai Tuan Rumah MTQ Nasional	Kementerian Agama	Sekda
6	16 Februari	Memfasilitasi Wakil Gubernur Acara Penganugrahan KPPU Award 2023	Hotel Kepinsky Jakarta	Wakil Gubernur
7	17 Februari	Memfasilitasi Gubernur dalam Rakor Kepala Daerah 2023	SICC Sentul	Gubernur
8	19 Februari	Memfasilitasi Gubernur Acara Wisuda Universitas Gunadarma	JCC Jakarta	Gubernur
9	26 Januari	Memfasilitasi Gubernur dalam rangka Interview di Kedubes USA	Kedubes USA	Gubernur
10	28 Februari	Memfasilitasi Gubernur Acara Penandatanganan Perjanjian Insentif Untuk Prov Kaltim dalam rangka REDD + Nprogram FCPF antara BPDLH dengan Gubernur Kaltim	Kementerian Lingkungan Hidup	Gubernur
11	28 Februari	Memfasilitasi Asisten I Acara Rakor Perencanaan Pembangunan Tahun 2023	Hotel Borobudur Jakarta	Asisten 1I
12	28 Februari	Memfasilitasi kegiatan Sekretaris Daerah acara Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023	Menara Bappenas	Sekda
13	29 Februari	Memfasilitasi kegiatan Gubernur acara Ususlan Perubahan Kawasan Hutan dalam rangka review rencana tata ruang wilayah Provinsi Kaltim	Kementerian Lingkungan Hidup	Sekda

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	KETERANGAN
14	01 Maret	Memfasilitasi Sekretaris Daerah acara Penyusunan Rancangan Renstra Sekretariat Daerah Prov. Kaltim	Gran Alia Hotel Jakarta	Gubernur
15	02 Maret	Memfasilitasi Asisten III acara Rakornas Penangulangan Bencana Tahun 2023	JL Expo Kemayoran	Asisten III
16	09 Maret	Memfasilitasi Sekretaris Daerah acara pertemuan dengan World Bank Membahas Progra Emission Reduction Prov. Kaltim	Mandarin Hotel Jakarta	Sekda
17	14 Maret	Memfasilitasi Kegiatan Wakil Gubernur acara Penandatanganan Komitmen Pembentukan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik dengan Kemenpan RB	Sheraton Grand Jakarta	Wakil Gubenur
18	15 Maret	Memfasilitasi Gubernur Acara Business Marching Tahap V Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri	Istora Senayan	Gubernur
19	16 Maret	Memfasilitasi Gubernur Acara APBD Award dan Rakor Keuangan Daerah Tahun 2023	Mercure Hotel, Jakarta	Gubernur
20	16 Maret	Memfasilitasi Gubernur Kaltim acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Kaltim dan Kaltara	Hotel Mulia Senayan	Gubernur
21	18 Maret	Memfasilitasi Wakil Gubernur Kaltim Acara Wisuda Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komuter Jakarta	Graha Jaya Puspita, Jakarta	Wakil Gubernur
22	20 Maret	Memfasilitasi Wakil Gubernur mendapatkan Penghargaan Terbaik I Katagori Pengendalian Pandemi	Gedung Dhanapala, Jakarta	Wakil Gubernur
23	21 Maret	Memfasilitasi Gubernur acara Rakor Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP Tahun 2023	Rizt Carlton Mega Kuningan	Gubernur
24	21 Maret	Memfasilitasi Wakil Gubernur Acara Penganugrahan Baznas AWARD 2023	Hotel Sahid Jakarta	Wakil Gubernur
25	29 Maret	Memfasilitasi Gubernur acara Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU BULD DPD RI dengan APPSI, APKSI Dan APEKSI Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	DPD RI, Jakarta	Gubernur

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	KETERANGAN
26	03 April 2023	Memfasilitasi Gubernur acara Wawancara Nominasi Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2023	Badan Penghubung Kaltim	Gubernur
27	07 April 2023	Memfasilitasi Gubernur acara Focus Discussion (FGD) Percepatan Participating 10 % Wilayah Kerja Minyak dan Gas yang ada di pertamina Group	Hotel Grand Sahid Jaya	Gubernur
28	29 April 2023	Memfasilitasi Gubernur acara Verifikasi Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya dari Kementerian Pertanian kepada Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si. di	Hotel Grand Sahid Jaya	Gubernur
29	05 Mei 2023	Kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas fungsi antara Badan Penghubung dan Dinas Sosial Prov. Kaltim dalam pemulangan mahasiswa penyintas konflik Sudan	Bandara Soekarno Hatta	Mahasiswa Kaltim
30	10 Mei 2023	Memfasilitasi Sekretaris Daerah dalam rangka melakukan koordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)	Kementrian Pemuda dan Olahraga	Sekda
31	17 Mei 2023	Memfasilitasi Ibu Wakil Gubernur di Bandara Soekarno Hatta	Bandara Soekarno Hatta	Ibu Wakil Gubernur
32	22 Mei 2023	Memfasilitasi Gubernur Kaltim dalam acara Silaturrahim dengan Kerukunan Masyarakat Kaltim (KMKT) dan Asrama Mahasiswa Kaltim (AMKT)	Yogyakarta	Gubernur
33	23 Mei 2023	Memfasilitasi Sekretaris Daerah dalam membuka kegiatan Pelatihan Digital Leadership 2023 yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Prov. Kaltim	Hotel Grand Mercure Gatot Subroto	Sekda
34	30 Mei 2023	Memfasilitasi Gubernur Kaltim acara Peluncuran Logo Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang di laksanakan	Istana Negara Jakarta	Gubernur
35	06 Juni 2023	Memfasilitasi Ibu Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hj. Erni Makmur selaku Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Timur bersama Bunda PAUD Kabupaten/Kota se-Kaltim menghadiri Acara Komitmen Bersama Bunda Mendukung Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan	Grand Ballroom Sultan Hotel Jakarta	Ibu Wakil Gubernur

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	KETERANGAN
36	07 Juni 2023	Memfasilitasi acara Forum Investasi Daerah 2023 yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur (DPMPTSP Kaltim)	Hotel Ashley Menteng Jakarta	Kepala DPMPTSP Kaltim
37	08 Juni 2023	Memfasilitasi Asisten III dalam acara Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang diadakan oleh Badan Penghubung Kaltim	Mercure Hotel Ancol Jakarta	Asisten III Prov. Kaltim
38	12 Juni 2023	Memfasilitasi Sekretaris Daerah dalam acara rapat Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga dan Stakeholder dalam rangka persiapan pelaksanaan The Organization of Islamic Cooperation Cultural Activities (OIC-CA) Tahun 2023, oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga	Wisma Kemenpora Jakarta	Sekda
39	13 Juni 2023	Memfasilitasi Gubernur dalam rangka Pertemuan Gubernur H. Isran Noor dengan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto	Gedung Wisma Mulia Jakarta	Gubernur
40	14 Juni 2023	Memfasilitasi Asisten I dalam acara Sosialisasi dan pelatihan aplikasi sentral analitik data serta launching aplikasi "Senada" oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur	Hotel Harris Vertu Harmoni Jakarta	Asisten I Prov. Kaltim
41	17 Juni 2023	Memfasilitasi Wakil Gubernur dalam rangka menghadiri undangan Founder ESQ, Ari Ginanjar Agustian dalam pembukaan Training ESQ Executive Batch 192 yang dilaksanakan	Menara 165 Jakarta	Wakil Gubernur
42	17 Juni 2023	Memfasilitasi Wakil Gubernur Dalam rangka Silaturrahim dan halal bil halal komunitas Balikpapan Jaman Dulu (Bajadul) Jabodetabek dan Bandung bersama Wakil Gubernur Kalimantan Timur	Badan Penghubung Kaltim	Wakil Gubernur
43	19 Juni 2023	Memfasilitasi Gubernur dalam rangka Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2023 dan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	Hotel Harris Vertue Harmoni	Gubernur
44	21 Juni 2023	Memfasilitasi Wakil Gubernur dalam rangka kunjungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Timur ke FKUB Provinsi Jawa Tengah	Kantor Gubernur Jawa Tengah	Wakil Gubernur
45	23 - 25 Juni 2023	Memfasilitasi Sekretaris Daerah dalam rangka acara Kaltim Exhibition 2023	Sarinah Mall	Sekda

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	1			**Badan Penghubung**									
5	**1**	**7**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	***Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)***	**90 persen**							
5	1	7	1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	*Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran*	60 bulan	24						

5	**1**	**8**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	***Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu***	**4**	unit							
5	1	8	2	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	*Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor*	102	Jenis	44						
				Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	*Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana*	60	bulan	24						
5	**1**	**9**		**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**	***Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi***	**65**	**persen**							
5	1	9	1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	*Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah*	427	kegiatan	137						
					Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	60	bulan	24						
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek*	225	orang	76						
					Jumlah pakaian dinas	1281	stel	420						

5	**1**	**12**		**Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan**	***Nilai Akuntabilitas Kinerja PD***	**80**	**67,63**						
5	1	12	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	*Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran*	50 dokumen	20						
				Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	*Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan*	20 laporan	8						
5	**1**	**37**		**Program Informasi Pembangunan Potensi dan Peluang Investasi**	***Jumlah wisatawan/ pengunjung yang mengisi form survey kepuasan***	**1800 orang**	**932**						
5	1	37	1	Promosi di Anjungan Kaltim dan TMII	*Jumlah kegiatan promosi di Anjungan Kaltim dan TMII dalam setahun*	490 kegiatan	39						
5	1	37	2	Promosi dalam daerah DKI Jakarta	*Jumlah kegiatan promosi dalam daerah DKI Jakarta dalam setahun*	43 Kegiatan	7						

5	1	37	3	Propaganda Penerangan	*Jumlah laporan kegiatan propaganda penerangan*	5	laporan	2					
5	**1**	**38**		**Program Peningkatan Manajemen Kerja**	***Tingkat kepuasan pelayanan Badan Penghubung***	**100**	**persen**	**100**					
5	1	38	1	Keprotokolan dan Fasilitasi Pejabat Daerah/Pusat	*Jumlah kunjungan pejabat daerah/pusat yang difasilitasi*	360	kunjungan	121					
					Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan dalam setahun	84	kegiatan	16					
5	1	38	2	Pelayanan Mess	*Jumlah pengunjung mess yang mengisi form survey kepuasan*	700	orang	200					
5	1	38	3	Pengelolaan Administrasi Keuangan	*Jumlah dokumen administrasi keuangan yang selesai tepat waktu*	5385	dokumen	1270					

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						**2**	**3**	4	5	6	7	8= 7/6*100	9	10	11= 10/4*100
05	07	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase pelayanan publik pada tugas Badan Penghubung Provinsi**	93%	91,56%	92%	91.56%	99,52	93%		
05	07	01	1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 Dokumen	32 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	100	16 Dokumen	45 Dokumen	93,75

05	07	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27 Dokumen	18 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100	9 Dokumen	26 Dokumen	96,30
05	07	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100
05	07	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	66,67
05	07	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100
05	07	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	66,67
05	07	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	9 Dokumen	100
05	07	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	30 Bulan	83,33
05	07	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ Bulan	24 Orang/Bulan	25 Orang/ Bulan	24 Orang/ Bulan	96	25 Orang/ Bulan	19 Orang/ Bulan	76

05	07	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	171 Dokumen	110 Dokumen	61 Dokumen	61 Dokumen	100	61 Dokumen	141 Dokumen	82,46
05	07	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kompetensi	60%	77%	60%	77%	128,33	60%	63,16	105,27
05	07	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	4 Paket	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	5 Paket	83,33
05	07	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	194 Orang	131 Orang	63 Orang	63 Orang	100	63 Orang	168 Orang	86,60
05	07	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	36 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	30 Bulan	83,33
05	07	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	100
05	07	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 Paket	18 Paket	8 Paket	8 Paket	100	25 Paket	32 Paket	74,42
05	07	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	100
05	07	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	6 Paket	3 Paket	3 Paket	100	3 Paket	9 Paket	100

05	07	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288 Laporan	254 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	100	102 Laporan	299 Laporan	103,82
05	07	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	336 Unit	153 Unit	79 Unit	79 Unit	100	181 Unit	262 Unit	77,98
05	07	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	336 Unit	153 Unit	79 Unit	79 Unit	100	181 Unit	262 Unit	77,98
05	07	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	30 Bulan	83,33
05	07	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	6 Laporan	100
05	07	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	96 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100	48 Laporan	120 Laporan	83,33
05	07	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	30 Bulan	83,33

05	07	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	40 Unit	40 Unit	40 Unit	100	40 Unit	25 Unit	51,24
05	07	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	457 Unit	364 Unit	367 Unit	367 Unit	100	457 Unit	126 Unit	42,37
05	07	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100	4 Unit	4 Unit	13,73
05	07	02				**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**Tingkat kepuasan pelayanan Badan Penghubung**		91,64%	82	91.64%		85	-	
							Indeks Kepuasan Mitra Kerja terhadap Pelayanan Badan Penghubung	85							
05	07	02	1	01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	3 Kegiatan	3 Kegiatan	34,33
05	07	02	1	01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	5 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	4 Laoran	80,00
05	07	02	1	01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	9 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	8 Laporan	88,89

05	07	02	1	01	03		Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	54 Laporan	35 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100	19 Laporan	43 Laporan	79,62
05	07	02	1	01	04		Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	16 Laporan	9 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100	7 Laporan	12 Laporan	75,00
05	07	02	1	01	05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	9 Laporan	6 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	3 Laporan	8 Laporan	88,89

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Mess

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, sehingga survei menggunakan 9 (sembilan) unsur pelayanan sebagai dasar penilaian antara lain:

a. Persayaratan Pelayanan
b. Prosedur
c. Waktu Pelayanan
d. Biaya/Tarif
e. Produk Layanan
f. Kompetensi pelayanan
g. Perilaku Pelaksana
h. Penangan saran dan Masukan
i. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : **93,12** dengan angka Indeks sebesar **3,725** maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan 88,31 – 100,00. Hal ini berarti rata-rata unsur pelayanan yang sudah sangat baik, tetapi tetap harus mempertahankan dan melakukan perbaikan pelayanan agar semakin maksimal.

Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

Kategorisasi Mutu Pelayanan

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 2,60	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK
2,60 – 3,06	65,00 - 76,60	C	KURANG BAIK
3,06 – 3,53	76,61 - 88,30	B	BAIK
3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Dari keseluruhan kuesioner (374 kuisioner) dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut. Dari hasil pengolahan terhadap kuesioner yang telah terisi tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2.9
Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasaan Masyarakat
(IKM) 9 Unsur Pelayanan

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	IKM
U1	Persyaratan pelayanan	3,695	92,38
U2	Prosedur	3,701	92,51
U3	Waktu Pelayanan	3,690	92,25
U4	Biaya atau Tarif	3,837	95,92
U5	Produk Layanan	3,703	92,58
U6	Kompetensi Pelayanan	3,719	92,98
U7	Perilaku Pelaksanaan	3,735	93,38
U8	Penanganan Saran dan Masukan	3,738	93,45
U9	Sarana dan Prasarana	3,706	92,65

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval IKM ≥3,53 atau SANGAT BAIK merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan.

Dari Tabel 2.9 dapat dilihat bahwa semua unsur memiliki Nilai (NRR) pada interval 3,53 – 4,00 yang artinya SANGAT BAIK yang merupakan unsur yang harus dipertahankan dan masih perlu ditingkatkan.

2.2.2 Survey kepuasan pejabat daerah/pusat yang difasilitasi

Survei ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan Badan Penghubung dalam hal pelayanan terhadap pejabat pusat/daerah yang dilaksanakan oleh Seksi Hubungan Antar Lembaga dengan menggunakan kuesioner keluhan/saran, sekaligus sebagai wadah bagi pejabat yang telah diberikan pelayanan untuk memberikan masukan positif kepada Badan Penghubung agar di kemudian hari kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki untuk mewujudkan peningkatan pelayanan sesuai yang diharapkan.

Dari keseluruhan kuesioner (119 kuisioner) dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut. Dari hasil pengolahan terhadap kuesioner yang telah terisi tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2.10
Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasaan Masyarakat
(IKM) 9 Unsur Survei Fasilitasi Pejabat

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata	IKM
U1	Persyaratan	3,57	89,25
U2	Prosedur	3,66	91,39
U3	Waktu Pelayanan	3,65	91,18
U4	Biaya/ Tarif	3,82	95,59
U5	Produk Layanan	3,61	90,13
U6	Kompetensi Pelaksana	3,69	92,23
U7	Perilaku Pelaksana	3,71	92,65
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,66	91,60
U9	Sarana dan Prasarana	3,63	90,76

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : **90,73** dengan angka Indeks sebesar **3,63** maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan 88,31 – 100,00. Hal ini berarti disamping adanya unsur pelayanan yang sudah baik, masih ada unsur pelayanan lainnya yang perlu ditingkatkan.

2.2.3 Survey kepuasan atas informasi potensi dan peluang investasi di Kaltim yang didapatkan

Survei untuk mengukur kepuasan wisatawan terhadap informasi yang didapatkan dimaksudkan untuk mengukur kepuasan wisatawan terhadap informasi mengenai pembangunan, potensi dan peluang investasi yang ada di Kalimantan Timur. Survei ini adalah salah satu dari 3 (tiga) survei yang dijadikan dasar perhitungan pencapaian target kinerja pada IKU Badan Penghubung yaitu “Kepuasan terhadap Pelayanan Badan Penghubung”.

Pada tahun 2023 Seksi Promosi dan Informasi menggunakan 9 (sembilan) unsur pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Tabel 2.11

Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Survei Kepuasan Wisatawan terhadap Informasi yang didapatkan

No.	**UNSUR PELAYANAN**	**NILAI RATA-RATA**	IKM
U1	Persyaratan pelayanan	98,333	3,933
U2	Prosedur	97,667	3,907
U3	Waktu Pelayanan	98,454	3,938
U4	Biaya atau Tarif	99,667	3,987
U5	Produk Layanan	98,711	3,948
U6	Kompetensi Pelayanan	98,969	3,959
U7	Perilaku Pelaksanaan	98,667	3,947
U8	Penanganan Saran dan Masukan	98,333	3,933
U9	Sarana dan Prasarana	98,625	3,945

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : **98,50** dengan angka Indeks sebesar **3,940** maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan 88,31 – 100,00. Artinya pelayanan Badan Penghubung khususnya pelayanan informasi terhadap wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara telah memenuhi standar pelayanan secara keseluruhan, dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan agar lebih maksimal.

Secara garis besar dapat dilihat dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penghubung di Jakarta di bawah ini:

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penghubung di Jakarta

Provinsi Kalimantan Timur

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Mess			81,26	81,26	81,26	81,26	87,27	0	81,26	81,26	
2	Survey kepuasan pejabat daerah/pusat yang difasilitasi			100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
4	Survey kepuasan atas informasi potensi dan peluang investasi di Kaltim yang didapatkan			81,26	81,26	81,26	81,26	96,17	0	81,26	81,26	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 mendapatkan pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp 27.473.058.552,-. Dengan anggaran tersebut sudah dapat menunjang program kegiatan pada Subbag Tata Usaha, Seksi Pelayanan, Seksi Promosi dan Informasi dan Seksi Hubungan Antar Lembaga.

Pelayanan Mess menunjukkan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) sebesar 93,12 (Sangat Baik) dari range 88,31-100. Artinya, pelayanan Badan Penghubung telah memenuhi standar pelayanan secara keseluruhan. Meskipun demikian, unsur-unsur pelayanan tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Badan Penghubung terutama dalam hal pelayanan Mess adalah semakin banyaknya hotel-hotel *low budget* di sekitar Mess Kaltim dan aturan *ad cost* dalam hal penginapan bagi PNS yang bertugas ke luar daerah/Jakarta sehingga pelayanan Mess dan fasilitas harus selalu ditingkatkan agar tamu-tamu dari luar daerah khususnya dari Kaltim tetap memilih menginap di Mess Kaltim dan selalu '*feel at home*'. Tantangan lain adalah jumlah kamar Mess yang terbatas dan perlu adanya perbaikan/pemeliharaan sehingga tidak dapat menerima tamu dalam jumlah besar serta kualitas SDM yang belum memenuhi standar dalam pengelolaan Mess agar dapat bersaing dengan hotel-hotel/penginapan di sekitar Mess Kaltim.

Peluang lain adalah lokasi Badan Penghubung/Mess Kaltim yang strategis dan tepat berada di pusat kota Jakarta dan dekat dengan pusat pemerintahan (Istana Presiden dan kantor-kantor Kementerian). Selain itu dekat dengan pusat-pusat grosir dan perbelanjaan (Pasar Tanah Abang, Thamrin City, Mangga Dua, Cempaka Mas, dll) sehingga menjadi daya tarik bagi tamu-tamu dari Kalimantan Timur.

Fasilitasi pejabat (kelembagaan, sosial masyarakat dan keprotokolan) terutama untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda sudah terlaksana dengan baik, serta fasilitasi pejabat yang telah dilaksanakan mulai tahun ini bukan hanya diperuntukkan untuk kepala daerah saja tetapi juga untuk seluruh OPD di lingkungan Pemprov. Kaltim. Hal tersebut sebagai upaya nyata dalam mendukung Visi Kalimantan Timur Berdaulat 2023 yaitu 'Berani Untuk

Kalimantan Timur Berdaulat' dalam mewujudkan Misi ke-5 yaitu "Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik".

Promosi dan Informasi khususnya Anjungan Kaltim TMII adalah *show window* Kalimantan Timur yang berada di Jakarta, sehingga kegiatan promosi merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk menginformasikan kepada masyarakat dan investor untuk lebih mengenal Kalimantan Timur dan potensi-potensi yang ada di Kalimantan Timur baik dari segi investasi, wisata, seni dan budaya, UMKM dan potensi lainnya sehingga masyarakat dan investor tertarik mengunjungi dan berinvestasi di Kalimantan Timur. Seksi Promosi dan Informasi juga memfasilitasi OPD terkait dengan Pemerintah Pusat dalam hal menginformasikan potensi-potensi yang ada di Kalimantan Timur.

Tantangannya adalah masih banyaknya ketidakpahaman terkait peran Badan Penghubung sebagai *show window* Kalimantan Timur pada Seksi Promosi dan Informasi khususnya di Anjungan Kalimantan Timur TMII.

Isu strategis pemindahan Ibukota Negara baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur berdampak pada banyaknya investor yang ingin mendapatkan informasi tentang Potensi Investasi yang ada di Kalimantan Timur termasuk antusiasme masyarakat baik dari pelajar, wisatawan nusantara maupun mancanegara juga ingin mengetahui potensi wisata, seni budaya dan UMKM yang terdapat di Kalimantan Timur. Hal tersebut memberikan peluang bagi Badan Penghubung untuk meningkatkan pelayanannya sesuai visi dan visi Kepala Daerah.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD PERUBAHAN

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan tahun 2023

Provinsi Kalimantan Timur

No	RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Idikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Luar Prov. Kaltim**	**Persentase pelayanan publik pada tugas Badan Penghubung Provinsi**	**98%**	**20.768.587.352**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Luar Prov. Kaltim**	**Persentase pelayanan publik pada tugas Badan Penghubung Provinsi**	**98%**	**20.768.587.352**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Luar Prov. Kaltim**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**16 Dokumen**	**604.660.700**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Luar Prov. Kaltim**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**16 Dokumen**	**604.660.700**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	166.187.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	166.187.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	64.220.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	64.220.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	55.220.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	55.220.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	55.220.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	55.220.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	55.220.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	55.220.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	208.593.300	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	208.593.300	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Luar Prov. Kaltim**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**6.634.581.951**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Luar Prov. Kaltim**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**6.634.581.951**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/Bulan	2.344.971.151	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang	2.344.971.151	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61 Dokumen	4.289.610.800	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61 Dokumen	4.289.610.800	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Luar Prov. Kaltim**	**Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kompetensi**	**60%**	**572.234.900**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Luar Prov. Kaltim**	**Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kompetensi**	**60%**	**572.234.900**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	337.252.500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	337.252.500	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	77 Orang	234.982.400	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	77 Orang	234.982.400	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Luar Prov. Kaltim**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**3.152.770.658**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Luar Prov. Kaltim**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**3.152.770.658**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	98.749.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	98.749.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	1.280.511.258	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	1.280.511.258	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	92.200.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	92.200.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	103.622.900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	103.622.900	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112 Laporan	1.577.687.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112 Laporan	1.577.687.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Luar Prov. Kaltim**	**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**181 Unit**	**1.871.136.300**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Luar Prov. Kaltim**	**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**181 Unit**	**1.871.136.300**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	181 Unit	1.871.136.300	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	181 Unit	1.871.136.300	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Luar Prov. Kaltim**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**1.611.103.800**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Luar Prov. Kaltim**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**1.611.103.800**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	11.560.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	11.560.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	1.599.543.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	1.599.543.800	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Luar Prov. Kaltim**	**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**6.322.099.043**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Luar Prov. Kaltim**	**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**6.322.099.043**	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	1.150.932.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	1.150.932.200	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	552 Unit	445.250.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	552 Unit	445.250.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4.725.916.843	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4.725.916.843	
	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	**Luar Prov. Kaltim**	**INDEKS KEPUASAN MITRA KERJA TERHADAP PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG**	**85%**	**7.250.026.200**	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**Luar Prov. Kaltim**	**INDEKS KEPUASAN MITRA KERJA TERHADAP PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG**	**85%**	**7.250.026.200**	
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	**Luar Prov. Kaltim**	**Jumlah Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan**	**3 Kegiatan**	**7.250.026.200**	**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	**Luar Prov. Kaltim**	**Jumlah Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan**	**3 Kegiatan**	**7.250.026.200**	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2 Laporan	641.744.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2 Laporan	641.744.000	
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	688.495.700	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	688.495.700	

	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	19 Laporan	3.767.716.300	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	19 Laporan	3.767.716.300	
	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	7 Laporan	1.728.024.000	502.146.000	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	7 Laporan	1.728.024.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	3 Laporan	424.046.200	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	3 Laporan	424.046.200	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGHUBUNG

Dengan mempertimbangkan dokumen pendukung dalam rangka penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Penghubung Prov. Kaltim di Jakarta dan juga mendukung misi ke-5 yaitu “Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik” dalam rangka mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penghubung adalah “**Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Badan Penghubung**”.

Tabel 2.12

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN PENGHUBUNG PROV. KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA TAHUN 2019 - 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Penjelasan dan Formulasi	Cara Penghitungan	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya pelayanan Badan Penghubung yang Efektif dan Efisien terhadap Mitra Kerja	Indeks Kepuasan Mitra Kerja terhadap Pelayanan Badan Penghubung	Skor	Untuk menggambarkan kepuasan Pejabat/instansi/lembaga pusat/daerah sebagai mitra kerja terhadap pelayanan Badan Penghubung Prov. Kaltim di Jakarta	1. Laporan rekap data hasil kuisioner terhadap Pejabat/instansi/ lembaga pusat/daerah sebagai mitra kerja yang di fasilitasi (Pelayanan Mess) 2. Laporan rekap data hasil kuisioner terhadap instansi/ lembaga pusat/daerah sebagai mitra kerja yang di fasilitasi (Promosi dan Informasi) 3. Laporan rekap data hasil kuisioner terhadap Pejabat/instansi/ lembaga pusat/daerah sebagai mitra kerja yang di fasilitasi (Hubungan antar Lembaga)	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Badan Penghubung Prov. Kaltim di Jakarta dilakukan dengan melakukan Survey terhadap 3 (tiga) aspek pelayanan sesuai tugas dan fungsi Badan Penghubung antara lain: **1. Survey kepuasan Pelayanan Badan Penghubung (Pelayanan Mess)** Formulasi: Tabel Pengolahan IKM per Responden per Unsur Pelayanan **2. Survey kepuasan Pelayanan Badan Penghubung (Promosi dan Informasi)** Formulasi: Tabel Pengolahan IKM per Responden per Unsur Pelayanan **3. Survey kepuasan Pelayanan Badan Penghubung (Hubungan Antar Lembaga)** Formulasi: Tabel Pengolahan IKM per Responden per Unsur Pelayanan	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Badan Penghubung = Average (IKM Survey 1 + IKM Survey 2 + IKM Survey 3)	Seksi Pelayanan Seksi Promosi & Informasi Seksi Hubungan Antar Lembaga
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung Provinsi	Persentase pelayanan publik pada tugas Badan Penghubung Provinsi	%	Untuk menggambarkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Prov. Kaltim di Jakarta	Laporan rekap data hasil kuisioner terhadap pelayanan Badan Penghubung Prov. Kaltim terhadap masyarakat Kaltim yang bertugas ke Jakarta	**Survey kepuasan Pelayanan Badan Penghubung (Tata Usaha)** Formulasi: Tabel Pengolahan IKM per Responden per Unsur Pelayanan	Persentase capaian indeks kepuasan pelayanan	Subbag Tata Usaha

Tabel T-C.32.

Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Luar Prov. Kaltim**	**Persentase pelayanan publik pada tugas Badan Penghubung Provinsi**	**98%**	
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Luar Prov. Kaltim**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**16 Dokumen**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	
1.1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Luar Prov. Kaltim**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/Bulan	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61 Dokumen	
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Luar Prov. Kaltim**	**Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kompetensi**	**60%**	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	77 Orang	

1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Luar Prov. Kaltim**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102 Laporan	
1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Luar Prov. Kaltim**	**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**181 Unit**	
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	181 Unit	
1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Luar Prov. Kaltim**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	
1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Luar Prov. Kaltim**	**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	552 Unit	
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	
2	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**Luar Prov. Kaltim**	**INDEKS KEPUASAN MITRA KERJA TERHADAP PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG**	**85%**	
2.1	**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	**Luar Prov. Kaltim**	**Jumlah Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan**	**3 Kegiatan**	
2.1.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2 Laporan	

2.1.2	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	
2.1.3	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	19 Laporan	
2.1.4	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	7 Laporan	
2.1.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	3 Laporan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra PD. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada galibnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun mendatang.

A. Tujuan

Adapun tujuan Renja Badan Penghubung Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien.
   Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:
   - Meningkatnya pelayanan Badan Penghubung yang Efektif dan Efisien terhadap Mitra Kerja.
2. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.
   Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:
   - Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung Provinsi.

B. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan Badan Penghubung yang Efektif dan Efisien terhadap Mitra Kerja.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung Provinsi.

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal

ini tujuan dan sasaran Renstra Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Penghubung

Program ini merupakan program teknis yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pelaksanaan Pelayanan Penghubung dan 5 sub kegiatan antara lain :

a) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
b) Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat
c) Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
d) Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
e) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi

Program ini merupakan program yang dapat digunakan oleh setiap perangkat daerah baik secara teknis maupun manajerial, antara lain :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
   f) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 3.1

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya pelayanan Badan Penghubung yang Efektif dan Efisien terhadap Mitra Kerja	**Program Pelayanan Penghububung** **Pelaksana Pelayanan Penghubung** - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat - Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat - Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya - Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung Provinsi	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **Administrasi Umum Perangkat Daerah** - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1 Uraian Garis Besar Tentang Pertimbangan Rumusan, dan Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Serta Penjelasan Pendanaan dan Kesesuaian dengan RKPD

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra OPD. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada dasarnya adalah untuk mencapai sasaran.

Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun mendatang. Dengan adanya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Badan Penghubung mengalami penyesuaian.

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan pada satu tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (output) dan hasil (outcome) dari program dan kegiatan perencanaan dan kajian strategi pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan sampai dengan sub kegiatan selanjutnya dilengkapin dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Pagu Indikatif Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur pada RKPD tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 27.473.058.552, dan Pagu Penyesuaian untuk Rancangan KUPA PPAS 2023 sebesar Rp. 545.555.000, sehingga total Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 28.018.613.552. Penambahan pagu indikatif Badan Penghubung Prov. Kaltim diharapkan dapat mendukung terselenggaranya kegiatan sesuai tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel T-C.33.

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
05.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK PADA TUGAS BADAN PENGHUBUNG PROVINSI**	**Luar Prov. Kaltim**	**98 %**	**20.768.587.352**	**APBD**			
		INDEKS KUALITAS LAYANAN KESEKRETARIATAN	**Luar Prov. Kaltim**			**APBD**		**82.5**	**11.379.437.866**
05.07.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Luar Prov. Kaltim**	**16 Dokumen**	**604.660.700**	**APBD**			
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	**Luar Prov. Kaltim**			**APBD**		**100%**	**445.428.650**
05.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	9 Dokumen	166.187.400	APBD		9 Dokumen	166.187.400
05.07.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Luar Prov. Kaltim	1 Dokumen	64.220.000	APBD		2 Dokumen	64.220.000

05.07.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Luar Prov. Kaltim	1 Dokumen	55.220.000	APBD		1 Dokumen	64.220.000
05.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Luar Prov. Kaltim	1 Dokumen	55.220.000	APBD		1 Dokumen	55.220.000
05.07.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Luar Prov. Kaltim	1 Dokumen	55.220.000	APBD		1 Dokumen	55.220.000
05.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	3 Laporan	208.593.300	APBD		3 Laporan	40.401.250
05.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Luar Prov. Kaltim**	**12 Bulan**	**6.634.581.951**	**APBD**			
		Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	**Luar Prov. Kaltim**			**APBD**		**100%**	**3.203.097.700**
05.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Luar Prov. Kaltim	25 Orang/Bulan	2.344.971.151	APBD		25 Orang/Bulan	2.965.137.700
05.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Luar Prov. Kaltim	61 Dokumen	4.289.610.800	APBD		24 Dokumen	237.960.000
05.07.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kompetensi**	**Luar Prov. Kaltim**	**60%**	**572.234.900**	**APBD**			
		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	**Luar Prov. Kaltim**			**APBD**		**74,04 %**	**572.234.900**
05.07.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Luar Prov. Kaltim	2 Paket	337.252.500	APBD		2 Paket	337.252.500
05.07.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Luar Prov. Kaltim	63 Orang	234.982.400	APBD		63 Orang	234.982.400

05.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Luar Prov. Kaltim**	**12 Bulan**	**3.152.770.658**	**APBD**			
		Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	**Luar Prov. Kaltim**			**APBD**		**100%**	**1.466.143.901**
05.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Luar Prov. Kaltim	1 Paket	98.749.500	APBD		2 Paket	103.686.975
05.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Luar Prov. Kaltim	8 Paket	1.280.511.258	APBD		16 Paket	521.580.526
05.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Luar Prov. Kaltim	1 Paket	92.200.000	APBD		2 Paket	88.200.000
05.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Luar Prov. Kaltim	3 Paket	103.622.900	APBD		2 Paket	103.622.900
05.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Prov. Kaltim	67 Laporan	1.577.687.000	APBD		56 Laporan	649.053.500
05.07.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Luar Prov. Kaltim**	**127 Unit**	**1.871.136.300**	**APBD**			
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	**Luar Prov. Kaltim**			**APBD**		**100%**	**249.800.000**
05.07.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Luar Prov. Kaltim	127 Unit	1.871.136.300	APBD		23 Unit	249.800.000
05.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Luar Prov. Kaltim**	**12 Bulan**	**1.611.103.800**	**APBD**			
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	**Luar Prov. Kaltim**			**APBD**		**100%**	**1.839.142.800**
05.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Luar Prov. Kaltim	2 Laporan	11.560.000	APBD		2 Laporan	11.560.000

05.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Luar Prov. Kaltim	48 Laporan	1.599.543.800	APBD		62 Laporan	1.827.582.800
05.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Luar Prov. Kaltim**	**12 Bulan**	**6.322.099.043**	**APBD**			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan baik	**Luar Prov. Kaltim**			**APBD**		**88%**	**3.603.589.915**
05.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Luar Prov. Kaltim	40 Unit	1.150.932.200	APBD		43 Unit	744.804.478
05.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Luar Prov. Kaltim	552 unit	445.250.000	APBD		713 Unit	354.905.000
05.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Luar Prov. Kaltim	4 Unit	4.725.916.843	APBD		4 Unit	2.503.880.437
05.07.02	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**INDEKS KEPUASAN MITRA KERJA TERHADAP PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG**	**Luar Prov. Kaltim**	**85%**	**7.250.026.200**	**APBD**			
		PERSENTASE KELUHAN PENGGUNA LAYANAN MESS YANG DITINDAKLANJUTI	**Luar Prov. Kaltim**			**APBD**		**100%**	**986.376.200**
		PERSENTASE KELUHAN PENGGUNA LAYANAN FASILITASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA YANG DITINDAKLANJUTI	**Luar Prov. Kaltim**			**APBD**		**100%**	**1.264.933.410**
		PERSENTASE KELUHAN PENGGUNA LAYANAN FASILITASI PROMOSI DAN INFORMASI YANG DITINDAKLANJUTI	**Luar Prov. Kaltim**			**APBD**		**100%**	**2.684.233.789**
5.07.02.1.01	**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	**Jumlah Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan**	**Luar Prov. Kaltim**	**3 Kegiatan**	**7.250.026.200**	**APBD**			
		Persentase Pelayanan Penghubung yang Dilaksanakan	**Luar Prov. Kaltim**			**APBD**		**100%**	**4.935.543.399**

05.07.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	Luar Prov. Kaltim	2 Laporan	641.744.000	APBD		2 Laporan	876.700.000
05.07.02.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Luar Prov. Kaltim	4 Laporan	688.495.700	APBD		3 Laporan	824.844.410
05.07.02.1.01.03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Luar Prov. Kaltim	16 Laporan	3.767.716.300	APBD		2 Laporan	956.209.789
05.07.02.1.01.04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Luar Prov. Kaltim	7 Laporan	1.728.024.000	APBD		3 Laporan	1.728.024.000
05.07.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Luar Prov. Kaltim	4 Laporan	424.046.200	APBD		6 Laporan	549.765.200

BAB V PENUTUP

Secara umum pelaksanaan program kegiatan pada Renja PD Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan triwulan II tahun 2023 dapat dikategorikan masih blum maksimal. Oleh karena itu, masih perlu adanya komitmen dan konsistensi dari pimpinan agar keputusan/kebijakan yang ditetapkan dapat mendukung pelaksanaan program kegiatan pada masing-masing PD sehingga mendukung kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang akan disusun menyesuaikan serta untuk mendukung program Pemerintah Daerah yang akan datang yaitu periode 2018-2023, sehingga nantinya akan terwujud sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, sasaran dan target kinerja/hasil keluaran yang semakin baik yang dapat dipertanggungjawabkan dari tahun ke tahun.

Dengan adanya Renja Perubahan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama PD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun PD yang membidangi fungsi lainnya.

Jakarta, 18 Agustus 2023
Kepala Badan Penghubung

Raihan Fida Nuzband
Pembina
NIP 19740704 200701 1 030

PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

a. Pengertian Rencana Kerja

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan,dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Kepemimpinan yang baik (good governance) saat ini merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi public. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu tuntutan itu merupakan hak yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Menghadapi hal tersebut, organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan transparan, sehingga dapat memberikan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun salah satu bentuk perwujudan sikap tersebut adalah dengan menyusun Rencana Strategik *(Strategic plan)*, Rencana Kinerja *(Performance Plan)* serta laporan pertanggung jawaban kinerja *(Performance Accountability Report)* organisasi yang dapat mencerminkan azas keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas kinerja.

Rencana Kinerja Ini merupakan suatu dokumen yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan uraian lebih mendetail dari rencana-rencana strategis, penetapan kinerja, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Rencana Kinerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2023 sebagai langkah untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga dapat diperbaiki dan ditingkatkan pencapaian kinerjanya sesuai dengan tuntutan perubahan dari masyarakat maupun stakeholders dan mampu menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang semakin cepat dan pesat.

Pada akhir tahun Rencana Kinerja tersebut diukur capaian kinerjanya *(performance result)* sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi./ OPD. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja *(Performance Gap)* untuk perbaikan kinerja dimasa datang.

b. Proses Penyusunan Renja

Proses Penyusunan Rencana Kerja Proses penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada, baik secara formal maupun non

formal serta dengan memperhatikan hasil pelaksanaan kinerjanya di tahun 2021 yang menjadi acuan sebagai bahan evaluasi kinerja.

Garis besar proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah : 1) Tahap Persiapan Kegiatan penyusunan rancangan Renja Inspektorat dimulai sebelum Rancangan Awal RKPD diterima, atau segera setelah RAPBD tahun 2023 disahkan menjadi APBD. Langkah-langkah pada kegiatan persiapan mencakup identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim penyusun Renja PD, penyiapan kelembagaan forum PD, pengisian formulir, penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 2) Tahap Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen Kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap rancangan awal RKP Nasional dan RKPD Provinsi, review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra PD, kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD, meminta/menerima rancangan awal RKPD secara resmi dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. 3) Tahap Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja Kegiatan ini dilaksanakan setelah PD menerima secara resmi dokumen Rancangan Awal RKPD dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD kemudian menjadi acuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi selanjutnya ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

c. Keterkaitan Renja dengan RKPD

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berpedoman kepada RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. RKPD Provinsi Kalimantan Timur yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program setiap bidang kewenangan atau fungsi tugas pemerintahan untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dengan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan yang telah ditetapkan dengan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur No. 050/1390/B.PPED-Bapp/2023 tanggal 2 Maret 2023 Tentang Penyempurnaan Rencangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2023.

d. Keterkaitan Renja dengan Renstra

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berpedoman kepada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program setiap bidang kewenangan atau fungsi tugas pemerintahan khususnya pada bidang pengawasan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun oleh PD dan berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

e. Keterkaitan Renja dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Kabupaten/Kota.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga memperhatikan dan menindaklanjuti visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program dan kegiatan dari Kementerian Dalam Negeri khususnya Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPK-RI , BPKP dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota khususnya Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui berbagai proses pembahasan dengan baik, yang bersifat internal maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang dalam hal ini Bappeda Provinsi Kalimantan dan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang nanti diharapkan sebagai tindak lanjutnya dituangkan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2023.

2.2. Landasan Hukum

Landasan konstitusional Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Timur adalah Pancasila, dan UUD 1945, selanjutnya landasan operasionalnya adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tetang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;

12. Permedagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025.
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 43 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksana Evaluasi AKIP SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;

19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; (sudah direvisi)
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 89 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
23. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 893.3/K.699/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksanaan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
24. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur No. 050/1390/B.PPED-Bapp/2023 tanggal 2 Maret 2023 Tentang Penyempurnaan Rencangan Awal Rencana Kerja (RENJA) menjadi Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2023.
25. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 050/6143/B.PPED-Bapp/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Penyusunan Rancangan Akhir RENJA PD Tahun 2023.

2.3. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kalimantan Timur yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka pernyusunan Rencana Kerja ini telah memperhitungkan besaran organisasi dan sekurang-kurangnya telah mempertimbangkan faktor-faktor antara lain :

a. Kemampuan keuangan daerah.
b. Kebutuhan daerah.
c. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus dicapai.
d. Jenis dan banyaknya tugas
e. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis
f. Jumlah dan kepadatan penduduk
g. Potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani.
h. Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan.
i. Sarana dan prasarana penunjang tugas.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini antara lain adalah :

(1) Sebagai penjabaran dari Rencana Strategik (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.
(2) Mengoptimalkan tugas dan fungsi serta peranan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

(1) Menjabarkan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ke dalam program dan kegiatan pengawasan yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2023.

(2) Sebagai satu acuan resmi bagi seluruh PNS Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

(3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan baik antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hubungan dalam pelaksanaan tugas – tugas pengawasan.

(4) Sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 .

(5) Menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mewujudkan Good Governance.

(6) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.

1.4. Sistematikan Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendallian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

Dalam penulisan Rencana Kerja Perubahan ini terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang.

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD.

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.

3.3. Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Bab V Penutup

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Sebagaimana diketahui Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan stratejik instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana stratejik.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi dan misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit

organisasi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Sesuai revisi Renstra yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak pula revisi terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023

Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian/Penetapan Kinerja dengan capaian sebesar ***90,52 %*** sebagiaman tabel berikut :

Tabel 1
Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Prov. Kaltim Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Opini Atas LKPD Pemprov kaltim	Opini	WTP	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	WTP	WTP	100
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	-	-	-
		Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik	PD	4	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	4	2	50
					Triwulan IV	-	-	-

		Persentase Capaian Pogram dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	95	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	
					Triwulan III	-	-	
					Triwulan IV	95	75,00	78,94
		Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level	3	Triwulan I	-	-	
					Triwulan II	-	-	
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	3	3	100
		Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori $\geq$ B	PD	31	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	31	29	93,55
					Triwulan IV	-	-	-
		Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	85	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	
					Triwulan IV	85	81	95,30
		Persentase Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti/ ditangani	%	85	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	85	75	88,24
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemda Kab/ Kota yang mendapat predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD	Kab/ Kota	6	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	6	6	100
		Jumlah Pemda Kab/Kota yang evaluasi SAKIP Katagori B	Kab/ Kota	6	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	6	8	133,34
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	100	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	100	100	100
		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN	%	70	Triwulan I	70	81	115,72
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	-	-	-
		Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Lapo ran	20	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-

					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	20	14	70
		Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor	75	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	75	66,35	88,47
		Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/ WBBM	PD	1	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	1	1	100
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai/ Bobot	36,30	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	36,30	24,12	66,45
4.	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesionalisme APIP	Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	55	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	55	46	83,64
		Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	3	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	3	3	100

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2021, yaitu terdapat 4 sasaran dengan 17 indikator sasaran yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran dan SDM, maka pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan terhadap 4 sasaran dan 17 indikator telah dicapai sebesar ***90,52 %.*** Pencapaian pengukuran kinerja ini dapat dilihat pada hasil analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100

Pencapaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2021 dari target WTP dan telah dicapai Opini WTP dengan capaian 100%, hal ini menunjukkan bahwa Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Priovinsi Kalimantan Timur telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian ini didasarkan bahwa Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) meliputi : realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan akuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal lain yang mempengaruhi capaian Opini WTP ini adalah selain yang tersebut diatas, juga disebabkan adanya usaha-usaha kiat-kiat menuju WTP yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga telah dilakukan upaya-upaya antara lain melakukan perbaikan penatausahaan persediaan dengan melakukan rekonsiliasi setiap 3 bulan melalui Simda BMD, melakukan perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah yang dikuasai pihak lain, sertifikasi tanah pemda, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan yang disesuai dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual dan meningkatnya penyelesaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan baik BPK maupun APIP serta melakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam hal penataan keuangan daerah.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik	PD	4	2	50

Jumlah Perangkat Daerah yang berkinerja Baik pada tahun 2021 ditergetkan sebanyak 4 perangkat daerah dan telah dicapai sebanyak 1 (satu) perangkat daerah dengan capaian 25%. Pencapaian ini berdasarkan hasil Audit Kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada 6 perangkat daerah yang menjadi sample, yaitu BPSDM, Biro Umum, RSJD Atma Husada Mahakam, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Keluatan dan Perikanan. Audit Kinerja Pada Perangkat Daerah ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Pedoman Audit Kinerja yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor :700/2043/Itprov/2018 tanggal

26 Desember 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan kriteria penilaian meliputi : Sangat Tinggi (skor 90-100), Tinggi (skor 70-89), Sedang (skor 60-69), Rendah (skor 51-59) dan Sangat Rendah (skor <50). Dari hasil Audit Kinerja yang dilakukan pada 6 (enam) perangkat daerah tersebut, yaitu 5 (lima) perangkat daerah rata-rata nilai capaiannya adalah " Sedang" (skor 60-69) dan 1 (satu) perangkat daerah RSDJ Atma Husada Mahakam capaiannya " Tinggi " (skor 70-89). Dari hasil audit kinerja yang dilaksanakan terhadap 6 perangkat daerah diperoleh 2 perangkat daerah dengan capaian tinggi san sangat tinggi. Tidak tercapaianya target, hal ini disebabkan antara lain masih terdapat rekomendasikan, yaitu : Merumuskan pendelegasian wewenang dan kebijakan mendukung terciptanya akuntabiltas dan pengendalian; b. Membuat kebijakan atau Standar Operasional Prosedur mekanisme pengumpulan data dan monitoring pelaksanaan program/kegiatan serta pendokumentasian atas pelaksanaan keglatan agar dilaksanakan dengan tertib. Dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah diperlukan komitmen dari Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya dan juga salah faktor tidak tercapainya kinerja yang baik salah satunya adalah pedoman yang dibuat kemungkinan terlalu tinggi sehingga sulit untuk dicapai untuk perangkat kinerja yang baik, hal ini dperlukan adanya revisi atas pedoman tersebut.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	95	75	78,94

Pencapaian Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2021 ditergetkan sebesar 95 % dan telah dicapai sebesar 75,00 % dengan capaian sebesar 78,94%, hal ini menunjukkan bahwa capaian atas program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebesar 75,00% dari target yang ditetapkan sebesar 95,00%, hal ini menunjukkan bahwa target tidak tercapai, dan hal ini disebabkan adanya anggaran yang semula direfocusing dikembalikan lagi pada bulan Oktober 2021 yang mengakibatkan ada perubahan rencana penyerapan anggaran, masih adanya pendemi covid-19 karenanya banyak pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting / Vartual dan keterbatasan SDM pengawasan dan luasnya cakupan pengawasan

yang direncanakan, sehingga hal ini berpengaruh terhadap capaian program dan kegiaiatan dalam rangka mendukung penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
4.	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level	3	3	100

Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2021 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dimana yang akan dinilai dan dievaluasi meliputi antara lain : Efektivitas dan Efisiensi, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau ***Terdefinisi*** yaitu pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3), Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5.

Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilan nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas ***Terdefinisi***, maka kerakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pememerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan praktek secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi. Penilaian dan Evaluasi Maturitas SPIP dilaksanakan terhadap perangkat daerah sampel sebanyak 11 Perangkat Daerah, yaitu Inspektorat, Bappeda, BPSDM, BPKAD, Dinas Perindagkop UKM, Disnakertrans, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Sosial. Pada tahun 2021 ini sebenarnya penilaian maturitas SPIP Terintegrasi yang harus dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan, namun belum dilaksanakan hal ini disebabkan belum adanya sosialisasi dan Bimtek SPIP kepada perangkat daerah yang akan ditetapkan sebagai pilot project Maturitas SPIP Terintegrasi.

Namun demikian masih ditemukan beberapa kendala pada saat dilakukan evaluasi atas Maturitas SPIP antara lain :

1. Belum dilakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi, terhadap : (1). Aturan Perilaku PNS (Kode Etik) dalam rangka menilai efektivitas implementasi peraturan tersebut, (2) Standar Kompetensi dan Kesesuaian penempatan pejabat serta Struktur Organisasi dan Uraian Tata Laksananya pada

Organisasi/Unit Kerja, (3) Prosedur dan hasil pelaksanaan pendelegasian wewenang, (4) Kebijakan pembinaan SDM, kesesuaian pelaksanaan rekrutmen, evaluasi kinerja pegawai sampai dengan pemberhentiannya, (5) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait dan mekanisme saling uji data antar unit kerja/ rekonsiliasi, (6) Pengamanan Asset Daerah, (7) Penerapan pemisahan tanggung jawab dan tugas, (8) Otoritas dan kejadian penting, (9) Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional.

2. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan pemantauan otomatis melalui sistem berbasis aplikasi komputer atas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan publik.
3. Belum seluruh perangkat daerah melakukan identifikasi risiko dan melakukan tindak pengendalian atas dokumen penilaian risiko.
4. Pemprov Kaltim belum mengembangkan Whistle Blowing System (WBS) dan Informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang terintegrasi.

Dari hasil evaluasi tersebut disarankan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, antara lain :

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi.
2. Mengembangkan sistem informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang terintegrasi.
3. Melakukan identifikasi risiko dan pengendalian yang telah direncanakan dalam Rencana Tindak Pengendalian Risiko dan implementasinya.
4. Mengembangankan Whistle Blowing System (WBS) pada Website Pemda.

Pada tahun 2021 terbitkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan baru akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan melakukan Sosialisasi dan Bimtek Maturitas SPIP Terintegrasi dan selanjutnya pelaksanaan evaluas kepada 11 perangkat daerah tersebut dan tidak menutup kemungkinan untuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemda Prov. Kaltm.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
5.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori $\geq$ B	PD	31	29	93,55

Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori ≥ B pada tahun 2021 ditarget sebanyak 31 perangkat daerah dengan realisasi sebanyak 29 perangkat dengan capaian 93,55%. Pencapaian ini belum sesuai dengan target yang yang telah ditetapkan, yaitu dari 31 target dan dicapai 29 perangkat daerah. Evaluasi dilaksanakan terhadap 37 PD dengan hasil evaluasi sebagai berikut : 15 PD dengan katagori BB/Sangat Baik, 14 PD dengan katagori B/Baik, dan 8 PD dengan katagori CC/Cukup. Dari hasil evaluasi keseluruhan terhadap SAKIP 37 Perangkat Daerah pada tahun 2021 menunjukan adanya peningkatan dengan hasil evaluasi 78,38 % dengan katagori BB/Sangat Baik dan B/Baik. Penilaian ini didasarkan atas hasil evaluasi atas 5 (lima) indikator penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yaitu dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi evaluasi klinerja serta pencapaian kinerja. Untuk menindaklanjuiti hasil evaluasi tersebut telah dilakukan berbagai upaya-upaya perbaikan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah dibuat yaitu, diantaranya dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi dan membuat rencana aksi, pertemuan dan sosialisasi/diklat penguatan SAKIP Perangkat Daerah dan diharapkan upaya-upaya yang telah dilakukan akan berdampak dan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaian skor/nilainya pada tahun-tahun berikutnya.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
6.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	85	81	95,30

Pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dari target 85% dan telah dicapai 81% dengan capaian sebesar 95,30%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini didasarkan pada laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam Laporan Hasil Pengawasan tersebut terdapat temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh Obrik/Entitas. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini masih rendah dan belum signifikan dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan adanya jumlah rekomendasi temuan yang setiap tahun selalu bertambah sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan, masih

terdapat rekomendasi temuan yang sudah lama dan berlarut-larut atau sulit untun ditindaklanjuti, masih kurangnya kesadaran dan respon dari obrik/auditan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa akan ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan dan masih kurangnya pemahaman Obrik/Entitas terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya dan belum adanya reward dan punishment/sanksi. Upaya-upaya lain agar tingkat penyelesaian tindak lanjut terus meningkat adalah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan setahun 2 kali serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekonsilsiasi TLHP dan apabila dimungkinkan adanya pemberian reward dan punishment/sanksi dan mengupayakan penyelesaiannya melalui Majelis TPTGR. Diharapkan dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan dapat meningkta dan terus meningkat, karena hasil pengawasan/ pemeriksaan yang dilakukan tidak berarti apa-apa apabila tidak ada penyelesaian tindak lanjutnya.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
7.	Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindaklanjuti / Ditangani	%	85	75	88,24

Pencapaian persentase pelanggaran disiplin ASN yang ditindaklanjuti / ditangani dari target 85 % dan telah ditindaklanjuti 75 % dari rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari 4 pengaduan masyarakat terkait dispilin ASN yang telah ditindak lanjuti dengan penjatuhan disiplin ASN, namun dari 4 pengaduan tersebut, ada 3 rekomendasinya sudah dibuatkan Surat Keputusan Penjatuhan Dispilin ASN, 1 rekomnendasi dalam proses. Hal ini menujukkan bahwa capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan, karena dari 4 rekomendasi terkait hukuman disiplin, 3 sudah ditindak lanjuti dan 1 rekomendasi dalam proses pembuatan surat ketetapan/keputusan atas status hukuman yang diberikan. Namun dalam rangka meningkatkan tindak lanjut atas rekomendasi penjatuhan disiplin ASN tersebut, konsultasi dan koordinasi dengan BKD Provinsi Kalimantan Timur perlu ditingkatkan yang fungsinya membuat surat ketetapan atas status hukuman yang diberikan kepada ASN yang dijatuhi hukuman disiplin. Pada tahun 2021 ini menunjukan bahwa terjadi penurunan kasus

pelanggaran disiplin ASN yang dilakukan oleh ASN, dan hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran pegawai untuk mentaati peraturan-peraturan yang berkenaan dengan disiplin PNS, hukuman disiplin yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera serta adanya kontrol dari atasan langsung terhadap Pegawai/ASN yang bersangkutan. Dalam rangka menurunkan kasus pelanggaran disiplin pegawai/ASN telah dilakukan beberapa upaya antara lain dengan meningkatkan pengendalian internal oleh Atasan Langsung, meningkatkan kesadaran pegawai/PNS akan arti pentingnya disiplin pegawai/ASN dalam rangka pembentukan kerakter pegawai/PNS dan memberikan sanksi yang tegas dan tepat terhadap para pelanggar disiplin pegawai/PNS yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai/PNS.

Sasaran 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “Sangat Tinggi” dalam Evaluasi KPPD	Kab/Kota	6	6	100

Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 6 Kab/Kota dengan capaian sebesar 100%, hal ini menujukkan bahwa capaian tersebut telah sesuai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 Evaluasi atas LPPD Kab/Kota dilaksanakan pada 10 Kabupaten/Kota, yaitu Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser dan Kabupaten Mahakam Ulu. Dari hasil evaluasi terdapat 6 Kabupaten/Kota yang mendapat nilai/predikat “ Sangat Tinggi “, yaitu Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan 4 Kabupaten/Kota mendapat nilai/predikat “Tinggi” yaitu : Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Pencapaian hasil evaluasi ini juga dipergaruhi oleh adanya komitmen dari Pemda Kab Kab/Kota untuk meningkatkan capai kinerja yang didukung dengan data pendukung yang disampaikan oleh Pemerintah Kab/Kota dan adanya perubahan – perubahan yang terjadi pada template penilaian/evaluasi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam

rangka peningkatkan pencapaian hasil evaluasi upaya – upaya yang sudah dilakukan antara lain adalah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan data pendukung dan kooordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tim Nasional Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B	Kab/Kota	6	8	133,34

Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 8 Kab/Kota dengan capaian sebesar 133,34%. Capaian ini didasarkan atas hasil Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB melaui daring/virtual zoom, hal ini dilakukan dikarenakan masih adanya pendemi Covid-19. Terhadap capaian ini, diharapkan pada tahun –tahun mendatang dapat ditingkatkan lagi dengan melakukan rancana aksi dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam hasil evaluasi, diantaranyha adalah : meningkatkan capaian baik pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja belum maksimal dan masih dibawah target yang telah ditetapkan, tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaiannya.

Sasaran 3 : Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	100	100	100

Pencapaian persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani dari target 100% dan telah dicapai 100% dengan capaian sebesar 100%, hal ini menujukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dimana dari 17 (tujuh belas) pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat ditangani dan dilakukan

pemeriksaan atas kebenaran pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Tertanganinya pengaduan masyarakat ini disebabkan karena adanya dukungan anggaran dan SDM serta perubahan Struktur Organisasi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat satu bidang yaitu Pengawasan Bidang Khusus yang bertugas menangani semua kasus/pengaduan masyarakat yang masuk untuk dilakukan penanganannya dalam rangka mencari kebenaran atas pengaduan yang disampaikan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Persentase Tingkat Kepatuhan Pemyampaian				
	LHKPN	%	70	74,17	105,96
	LHKASN	%	70	76,92	110,00

Pencapaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN dari target 70% telah dicapai, yaitu kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar 74,17% dengan capaian 105,96% dan kepetuhan penyampaian LHKASN sebesar 76,92% dengan capaian 75,55 s.d. 80,00%%. Pencapaian ini berdasarkan hasl evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dimana dari jumlah yang wajib LHKPN sebanyak 816 orang dan yang telah Melaporkan sebanyak 742 orang, tepat waktu sebanyak 726 orang, terlambat sebanyak 16 orang dan yang belum menyampaikan sebanyak 0 orang. Sedangkan untuk LHKASN dari yang wajib LHKASN sebanyak 4.639 orang sebagimana yang telah ditetapkan, yang sudah lapor sebanyak 3.539 orang dan yang belum laporan sebanyak 1.100 orang. Dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN ini telah dilakukan sosialisasi dan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, namun hal yang penting lagi adalah pemberian sanksi sesuai peraturan perundangan- undangan yang berlaku kepada Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN yang tidak menyampaikan laporan kekayaannya.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Laporan	20	14	70

Pencapaian jumlah Pelaporan Gratifikasi di tahun 2021 dari target 20 laporan dan telah dicapai 14 laporan yang sudah menyampaikan dengan capaian sebesar 70%, hal ini menujukkan bahwa pelaporan penerimaan dan penolakan gratifikasi masih rendah, hal ini sebabkan kurangnya kesadaran untuk melakukan pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi, atau juga kurangnya pengetahuan si penerima gratifikasi apa kriteria yang termasuk gratifikasi. Dalam rangka mendorong dan meningkatkan kesadaran atas pelaporan gratifikasi ini telah dibuat Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 56 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Pengendalian Grattifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimatan Timur, dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 356/K.413/2018 tanggal 2 Agustus 2019, sosialisasi terkait pelaporan dan penolakan gratifikasi dan dibentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPD) yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan usaha lain juga diharapkan juga setiap perangkat daerah dapat membentuk unit-unit pengendalian gratifikasi. Sampai dengan tahun 2021 ini baru ada 3 UPG pada Perangkat Daerah yaitu : RSJD Atma Husada Mahakam, RSUD Kanujoso dan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
4.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Nilai	75	66,35	88,47

Pada tahun 2021 pelaksanaan survey penilaian integritas (SPI) dilaksanakan oleh KPK-RI dengan bekerjasama dengan Pihak Ketiga, penilaian dilakukan melalui aplikasi e-SPI KPK-RI. Berdasarkan Laporan Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda/KL yang dibuat oleh Tim Penyusun Survey KPK hasil survey penilaian integritas pemda Kalimantan Timur Tahun 2021 dicapai pada skor/nilai 66,35 dari yang ditarget tahun 2021 sebesar 75 skor/nilai. Kegiatan survey penilaian integritas pemda ini sebenarnya sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan pada tahun 2020 tidak dilaksanakan karena pendemi Covid-19. Pada tahun 2021 kegiatan SPI ini dimulai dengan sosialisasi, entery meeting, pengumpulan data dan wawancara terhadap responden pada perangkat daerah di lingkungan Pemda Prov. Kaltim, Pengguna Layanan dan Ekspert yang dipilih secara acak dan dilakukan penilaian oleh Tim KPK RI.

Ada beberapa permasalahan integritas yang paling menonjol di lingkungan seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 adalah antara lain: (1). Risiko korupsi ditemukan hampir di seluruh instansi peserta SPI. (2). Risiko korupsi yang paling banyak ditemukan adalah : 15% responden kalangan pegawai meyakini bahwa risiko penerimaan gratifikasi/suap ditemui di banyak instansi peserta SPI, 5% dari responden eksternal dan 18% responden eksper, (3). Risiko adanya perdagangan pengaruh (trading in influence) ditemukan di banyak instansi peserta SPI 2021. Sekitar 1 dari 4 responden pegawai berpendapat keberadaan risiko trading in influence, baik dalam bentuk penentuan program dan kegiatan, perizinan, hingga penentuan pemenang pengadaan pemerintah. (4). Berdasarkan 29% responden pegawai, permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa juga ditemukan di berbagai instansi peserta SPI 2021 baik dalam bentuk nepotisme hingga gratifikasi dalam proses pengadaan. (5). Satu dari 2 pegawai menyatakan pemanfaatan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi pun masih terjadi di hampir seluruh instansi dan 29% responden eksper (6). 9% dari responden pegawai juga menilai bahwa penyalahgunaan anggaran dalam perjalanan dinas masih terjadi di berbagai instansi peserta SPI 2021.

Beberapa upaya pencegahan korupsi dengan fokus prioritas sebagai berikut :

1. Prioritas pertama dan yang paling utama adalah penguatan sistem pencegahan korupsi yang ada agar lebih terintegrasi dan berdaya guna. Efektivitas sosialisasi antikorupsi dapat dikuatkan melalui pendidikan, kampanye, pengawasan, dan penegakan secara simultan. Upaya ini perlu dikomunikasikan secara aktif di internal pegawai dan seluruh pemangku kepentingan.

2. Meningkatkan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan konflik kepentingan hingga implementasinya pada proses promosi/mutasi. Tujuannya untuk mendapatkan pegawai/pejabat yang sesuai dengan kebutuhan instansi. Selain itu, instansi perlu memperkuat dan mengoptimalkan kemampuan sistem dan sumber daya internal untuk mendeteksi risiko kejadian korupsi secara proaktif pada proses promosi/mutasi tersebut.

3. Pengembangan program sosialisasi dan kampanye antikorupsi pada pengguna layanan serta upaya dan capaian program antikorupsi oleh instansi. Program bertujuan untuk mempengaruhi perubahan perilaku terutama kepada pengguna layanan agar tidak memberi suap/gratifikasi dan melaporkan bila ada pelanggaran.

4. Perdagangan pengaruh (trading in influence) dapat diminimalisir dengan mendorong transparansi pada proses pelaksanaan tugas dan pemberian layanan. Contohnya dengan optimalisasi penggunaan teknologi, keterbukaan dan kemudahan akses informasi, pemangkasan birokrasi yang menghambat, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Selain itu, instansi perlu mengatur pengelolaan benturan kepentingan untuk mengurangi intervensi pihak-pihak tertentu dalam pencegahan korupsi. Cakupan yang diatur meliputi area rawan dalam pemberian layanan, perizinan, PBJ, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM, dan pengelolaan anggaran.

5. Yang tak kalah penting adalah optimalisasi penggunaan teknologi, misalnya layanan online atau bentuk lain yang sudah dijalankan. Selanjutnya, meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses untuk mengurangi peran perantara ketika memberi layanan. Terakhir, memperkuat peran mitra untuk meningkatkan kualitas layanan yang transparan dan akuntabel

Upaya dan pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa mengakibatkan kejadian tindak pidana.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
5.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai pilot project ZI Menuju WBK/ WBBM	PD	1	1	100

Pencapaian Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pliot Project ZI Menuju WBK/WBBM dari target 1 perangkat daerah dan telah dicapai 1 perangkat daerah, dengan capaian 100% yaitu RSUD Abdul Wahab Syahrani. Pada tahun 2021 ini telah diusulkan untuk di tetapkan sebagai pilot project ZI menuju WBK pada RSUD AWS Samarinda, namun berdasarkan hasil evaluasi ternyata masih belum memenuhi angka hasil evaluasi untuk diusulkan sebagai Perangkat Daerah ZI

Menuju WBK, diharapkan pada tahun 2023 selain RSUD AW. Syahrani dapat juga ditambah dengan perangkat daerah lain yang sudah berkomitmen untuk melaksanakan ZI menuju WBK/WBBM dapat dusulkan menjadi ZI menuju WBK/WBBM dengan beberapa aksi yang telah dilakukan antara lain melakukan beberapa perbaikan dan pemenuhan dokumen sesuai dengan hasil rekomendasi evaluasi yang telah dilaksanakan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
6.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	36,30	24,12	66,45

Pencapaian nilai reformasi birokrasi perangkat daerah pada tahun 2021 mencapai 24,12 skor/nilai (67,11%) dari skor/nilai standar 36,30. Hal ini belum tercapai terhadap target yang ditetapkan sebesar 36,30 skor/nilai. Penilaian dilaksanakan pada 10 Perangkat Daerah yaitu Inspektorat, Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan, Bappeda, BKD, Disperindagkop, RSUD AWS, RSUD Kanujoso dan RSJD Atma Husada Mahakam. Penilaian meliputi terhadap aspek pengungkit dan reform, dari hasil penilaian diperoleh angka rata-rata nilai reformasi birokrasi atas 10 PD tersebut mencapai 24,12 nilai. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Penilaian			Bobot	Nilai Rata-Rata
Pengungkit			**36,30**	**24,12**
1.	Pemenuhan		14,60	10,72
	1.	Manajemen Perubahan	2,00	1,24
	2.	Deregulasi Kebijakan	1,00	0,60
	3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,53
	4.	Penataan Tata Laksana	1,00	0,77
	5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,17
	6.	Penguatan Akuntabiltas	2,50	2,24
	7.	Penguatan Pengawasan	2,50	1,41
	8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publi	2,50	1,65
2.	Reform		21,.70	13,64
	1.	Reform	21,70	13,64

Hasil rekomendasi penilaian RB perangkat daerah tersebut adalah antara lain : (a) membantuk Tim RB, (b). Menyusun dan Memformalkan Rencana Kerja, (c). Konsensus Assesor PMPRB, (d). Pembentukan Agent of Change, (e). Identifikasi dan Harmonisasi Peraturan/Kebijakan, (f). Pengukuran Berjenjang, Kesesuaian Struktur Organisasi, Kesesuaian Mandat/Kewenangan, (g). Penyederhanaan birokrasi, (h). Menyusun Peta Proses Bisnis dan melakukan evaluasi atas SOP, (i). Monev Keterbukaan Informasi Publik, (j). Penilaian Risiko unit kerja, (k). Penanganan Gratifikasi, WBS, Benturan Kepentingan, SPI, dan ZI (l). Maklumat standar pelayanan, budaya pelayanan prima, dan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan nilai capaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah perlu dilakukan upaya – upaya diantaranya melakukan sosialisasi / bimtek RB pada Perangkat Daerah, Pendampingan dalam pelaksanaan RB dan melakukan perbaikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah yang akan berdampak pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sasaran 4 : Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesionalisme dan Profesional APIP

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	3	3	100

Pada tahunn 2021 penilaian kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak dilakukan, tetapi selama tahun tersebut yang dilakukan adalah penyelesaian atas sara/rekomendasi yang disampaikan pada laporan hasil evaluasi. Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat dari target level 3 dan telah dicapai pada level 3 dengan capaian sebesar 100%, capaian ini telah sesuai dengan target yang dicanangkan secara Nasional yaitu pada Level 3. Berdasarkan Laporan Hasil Penjamin Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : LQAPIP-43/PW17/6/2020 tanggal 16 Maret 2020, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dari hasil QA disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah berada pada level 3 untuk semua elemen sebagai berikut :

No	Elemen	Level
1.	Peran dan Layanan	3
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3
3.	Praktik Profesional	3
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6.	Struktur Tata Kelola	3

2. Berdasarkan hasil QA tersebut, terdapat rekomendasi untuk menjadi perhatian dan perlu tindak lanjut yaitu :
   a. Mendorong manajemen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan mendorong APIP mengimpelementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektivitas pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
   b. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui Workshop/Bimtek /Diklat untuk mendukung kegiatan pengawasan khususnya di bidang Audit Kinerja, Keivestigasian, PPBR, Pengelolaan Risiko serta Sertifikasi Profesi antara lain CRMP.
   c. Memutakhirkan peta auditan dan menggunakan *risk register* yang telah disusun oleh Perangkat Daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusunan PPBR.
   d. Menekankan substansi hasil pengawasan *Management Oversight* untuk perbaikan kapasitas internal APIP serta ketaatan, kinerja dan *Governance Risk Control (GRC)* Pemerintah Daerah.
   e. Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada Level 3 dengan mengimplementasikan *key process area* (KPA) secara baik dan terus menerus (*institutionalized*) serta mulai mempersiapkan diri untuk menuju level kapabilitas yang lebih tinggi.
   f. Melakukan *self assessment* secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP level 3.

Berkenaan dengan rekomendasi dari hasil QA tersebut, diharapkan kepada Tim Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur membuat rencana

kerja / rencana aksi atas beberapa rekomendasi yang disampaikan dan selanjutnya melaksanakan rencana kerja/rencana aksi tersebut dalam rangka mempertahankan kapabilitas level 3 dan mempersiapkan untuk menuju level kapabilitas yang lebih tinggi lagi.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2	Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	55	46	83,64

Pada tahun 2021 pencapaian Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat dari target 55 orang dan telah dicapai 46 Orang dengan capaian sebesar 83,64%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, jumlah Aparatur pengawasan yang bersertifat dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mencapai 46 orang, hal ini terjadi peningkatan jumlah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Bersertifikat baik fungsional pengawasan Auditor maupun P2UPD disebabkan antara lain adalah dari Calon PNS, alih tugas dan inpassing jabatan fungsional pengawasan serta mutasi PNS dari Perangkat Daerah Prov. Kaltim atau dari Pemda Kab/Kota ke Provinsi. Upaya-upaya lain yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat adalah antara lain dengan mengikutsertakan Fungsional Pengawasan (Auditor dan P2UPD) dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan, Workshop dan Seminar terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan juga beberapa Aparatur Pengawasan yang dididik dan dilatih untuk menjadi auditor/P2UPD yang berkualitas, bersertifikat, kompeten dan berintegritas atau adanya upaya lain seperti melakukan rekrutmen melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada pegawai/calon pegawai yang berminat menjadi auditor/tenaga fungsional pengawasan. Pada tahun 2021 ini juga ada penambahan SDM Aparatur Pengawasan dari STAN sebanyak 8 orang yang berstatus sebagai calon Auditor.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2020	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Prog/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022		Catatan
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Urusan Pilhan											
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100,00%	
	1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah administrasi perkentoran yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100,00%	Pada tahun 2021 Program dan Kegiatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Masih dalam Proses Pelaksanaan Kegiatan, sehingga capaian belum dapat disampaikan. Akan disampaikan pada akhir Desember 2022
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	52 unit	52 unit	58 unit	52 unit	100%	52 unit	52 unit	100,00%	
	1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana	30 unit	30 unit	45 unit	30 unit	100%	30 unit	30 unit	100,00%	
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan kantor Gedung Kantor yang tersedia	12 unit	12 unit	13 unit	12 unit	100%	12 unit	12 unit	100,00%	

3	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda**		Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemda									
	1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemda	Jumlah korodinasi dan konsultasi kelembagaan yang	36 Kegiatan	36 Kegiatan	36 Kegiatan	36 Kegiatan	100%	36 Kegiatan	16 Kegiatan	44.45%	
			dilaksanakan									
	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya	76 orang	60 orang	76 orang	76 orang	100%	76 orang	76 orang	100,00%	
			Aparatur									
4	**Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan**		Tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan Evaluasi	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	9 Dokumen	100,00%	
	1	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	9 Dokumen	100,00%	
		Kegiatan	kegiatan yang dibuat									

5	**Program Peningkatan Kapabilitas APIP**		Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%	
	1	Pelatihan di Kantor Sendiri	Jumlah pelatihan di kantor sendiri yang dilaksanakan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%	12 Kegiatan	8 Kegiatan	66.67%	
	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan	Jumlah SDM aparatur pengawasan yang mengikuti Diklat	55 Orang	45 Orang	55 Orang	45 Orang	97,37%	55 Orang	30 orang	54.55%	
	3	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%	
6	**Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal**		Terwujudnya Pengendalian Internal	38 OPD	38 OPD	37 OPD	37 OPD	100%	37 OPD	36 OPD	95,00%	
	1	Pemeriksaan Operasional OPD	Jumlah Laporan pemeriksaan operasional OPD	25 Laporan	25 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	100%	21 Laporan	21 Laporan	100%	
	2	Pemeriksaan Kinerja OPD	Jumlah Laporan Pemeriksaan Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	75%	4 Laporan	2 Laporan	50%	
	3	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	8 Laporan	66.67%	
	4	Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan	Jumlah Laporan Reviu, Monitoring dan Evaluasi	38 Laporan	38 Laporan	38 Laporan	38 Laporan	100%	38 Laporan	35 Laporan	92.11%	
			Pengawasan									
	5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	80%	75%	80%	81%	101,25%	80%	76%	95.00%	
	6	Pemberian Advis dan Konsultasi	Jumlah pemberian advis dan konsultasi yang dilakukan	20 Advis	20 Advis	20 Advis	17 Advis	85%	20 Advis	10 Advis	50.00%	
	7	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Jumlah penilaian mandiri reformasi birokrasi OPD	5 Laporan	5 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	100%	11 Laporan	11 Laporan	100%	
7	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota**		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pemda	10 Kab/Kota	9 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	
			Kab/Kota									
	1	Evaluasi EKPPD Kab/Kota	Jumlah Laporan EKPPD Pemda Kab/Kota	10 Laporan	9 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	10 Kab/Kota	100%	
	2	Evaluasi SAKIP Kab/Kota	Jumlah Laporan SAKIP Pemda	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	-	-	

			Kab/Kota									
	3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah Pemda Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan	6 Kab/Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	100%	5 Kab/Kota	3 Kab/Kota	60.00%	
		Daerah	pengawasan									
8	**Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja**		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemprov	Skor A	Skor BB	Skor A	Skor BB	90%	Skor A	Skor BB	90.00%	
	1	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	Jumlah Laporan Kinerja Pemprov dan SKPD yang	38 Laporan	38 Laporan	38 Laporan	38 Laporan	100%	38 Laporan	37 Laporan	90.00%	
			dievaluasi									
9	**Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan**		Opini atas Laporan Keuangan Pemda	Opini WTP	Opini WTP	Opini WTP	Opini WTP	100%	Opini WTP	Opini WTP	100%	
	1	Reviu Atas Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu atas Laporan Keuangan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Laporan	13 Laporan	97.37%	
10	**Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**		Skor / Nilai Penilaian Integritas Pemda	65 Skor	60 Skor	70 Skor	66,67 Skor	95,25%	70 Skor	66,76	95.38%	
	1	Pemeriksaan Khusus/Investigatif	Jumlah Laporan Pemeriksaan Khusus/Investigatif	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	17 Laporan	85%	20 Laporan	10 Laporan	50.00%	
	2	Pembangunan Zona Integritas	Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI	1 OPD	1 OPD	1 OPD	1 OPD	100%	1 OPD	1 OPD	100%	
	3	Aksi Pencegahan Korupsi	Jumlah kegiatan Aksi Pencegahan Korupsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	2 Kegiatan	50.00%	
	4	Pengendalian Gratifikasi	Jumlah Laporan Gratifikasi yang diterima	20 Laporan	27 Laporan	20 Laporan	4 Laporan	20%	20 Laporan	14 Laporan	70.00%	
	5	Pengendalian Whistle Blower System (WBS) dan Benturan	Jumlah WBS dan Benturan Kepentingan	2 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0%	2 Laporan	1 Laporan	50.00	
		Kepentingan										
	6	Monev LHKPN dan LHKASN	Persentase Kepatuhan LHKPN dan LHKASN	65%	75%	65%	65%	75%	65%	75%	115%	
	7	Koordinasi Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah	Jumlah kegiatan kegiatan koordinasi TP4D, APIP, APH	6 Kegiatan	5 Kegiatan	6 Kegiatan	4 Kegiatan	66,67%	6 Kegiatan	4 Kegiatan	66.67%	

		(TP4D), APIP dan APH									
	8	Operasional SABERPUNGLI	Jumlah kegiatan Saberpungli yang dilaksanakan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	3 Kegiatan	75%	4 Kegiatan	2 Kegiatan	50.00%	
	9	Survey Penilaian Integritas	Skor / Nilai Penilaian Integritas	65 Skor/Nilai	60 Skor/Nilai	70 Skor	66,67 Skor	95,25%	70 Skor	66,67 skor	95.25%	
	10	Pembangunan Budaya Integritas	Pembagunan Budaya Integritas	2 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	2 Kegiatan	-	-	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara garis besar capai kinerja pelayanan SKPD pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur belum mempunyai indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Prima (SPM) maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 telah disajikan pada 2.1 yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah seperti pada tabel 2.1.

Kajian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terkait indikator kinerja yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam hal ini berkenaan dengan tugas-tugas pengawasan yaitu telah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 700/005.A/Itprov/I/2021 tentang Standar Pelayanan, antara lain meliputi :

1. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/Penanganan Pengaduan Masyarakat/Pemeriksaan Khusus
2. Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Operasional Terfokus
3. Reviu LKPD
4. Reviu LAKIP Pemda
5. Reviu RKA SKPD dan PPKD
6. Evaluasi LAKIP
7. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
8. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
9. Pengelolaan LHKPN
10. Pengelolaan LHKASN
11. Pemberian Advisory
12. Surat Keterangan Bebas Temuan

Sedangkan untuk penentuan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah yang disesuaikan dengan Penetapan Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja

Utama (IKU) dapat disampaikan alasan – alasan atas penetapan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Dalam rangka mempertahankan Opini atas LKPD Pemprov Kaltim	Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Pemprov. Kaltim sesuai SAP, Pengendalian Intern dan kepatuhan atas Peraturan Perundang-Undangan	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Buku I
Jumlah Perangkat Daerah Yang berkinerja " Tinggi "	Belum optimalnya kinerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan/Audit.	Jumlah Perangkat Daerah yang Berkinerja " Tinggi " sesuai hasil pemeriksaan/Audit	Laporan Hasil Audit / Pemeriksaan
Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim.	Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat organisasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi BPKP terhadap Tingkat Maturitas SPIP di Pemda Prov. Kaltim	Laporan Hasil Evaluasi BPKP
Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindak Lanjuti	Belum optimalnya tindak lanjut tas pelanggaran disiplin.	Jumlah rekomendasi temuan atas atas pelanggaran disiplin yang ditindak lanjuti di bagi jumlah rekomendasi temuan pemeriksan di kali 100%.	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin
Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Belum optimalnya capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan operasional	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Peangkat Daerah di bagi pagu anggaran Program dan Kegiatan di kali 100%	Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional
Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori $\geq$ B	Belum optimal Implementasi SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah hasil Evaluasi SAKIP katagori B dari jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Belum optimalnya perangkat daerah yang menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindak lanjuti dibagi jumlah rekomendasi temuan APIP dikali 100%.	Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat " Sangat Tinggi" dalam Evaluasi KPPD	Belum optimalnya hasil LPPD pada Pemda Kab/Kota.	Jumlah EKPPD hasil Evaluasi Predikat Sangat Tinggi dari jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi KPPD Pemda kab/Kota
Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori " B "	Belum optimalnya Implementasi SAKIP pada Pemda Kab.Kota.	Jumlah Pemda Kab/Kota hasil Evaluasi SAKIP katagori B dari jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
Persentase Penanganan	Perlunya peningkatan	Jumlah pengaduan	Laporan Hasil

Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	pelayanan Inspektorat Daerah Prov. Kaltim atas pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan Pemda.	masyarakat yang ditangani/diperiksa di bagi dengan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima di kali 100%.	Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat
Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN	Belum optimalnya kepatuhan atas pelaporan LHKPN dan LHKASN	Jumlah penyampaian atas kepatuhan LHKPN dan LHKASN di bagi jumlah wajib LHKPN dan LHKASN di kali 100%.	Rekapitulasi atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN
Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Belum optimalnya pelaporan atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi	Jumlah Laporan Yang Masuk dan ditangani oleh UPG	Rekapitulasi Laporan Gratifikasi
Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Amanat Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.	Melakukan survey atas unsur-unsur integritas.	Laporan Hasil Survey
Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	Belum semau perangkat daerah pelayanan yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Melakukan evaluasi atas Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project Sebagai ZI Menuju WBK/WBBM oleh Tim Internal dan Eksternal.	Laporan Hasil Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Belum optimalnya nilai/skor penilaian atas RB pada Perangkat Daerah	Nilai / Skor RB yang didapat setelah dilakukan evaluasi melalui LKE RB	Laporan Hasil Penilaian RB PD
Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Perlunya peningkatan Kapabilitas APIP	Evaluasi oleh BPKP terhadap tingkat Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP
Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Belum optimalnya dukungan SDM Pengawasan atas pelaksanaan pengawasan terutama terhadap cakupan pengawasan	Jumlah Jabatan Fungsional Yang Bersertifikat.	Data Kepegawaian

Analisis atas pencapaian kinerja pelayanan pada Inspektorat Daerah Proivinsi Kalimantan Timur berdasarkan atas standar pelayanan yang ditetapkan sebagai penetapan kinerja sebagai Indikator Kinerja Utama adalah dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut :

2.2.
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (2019 - 2023)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
INDIKATOR KINERJA UTAMA :																	
1	Opini atas LKPD Pemprov Kaltim	Opini	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP		
2	Jumlah Perangkat Daerah yang Berkinerja Tinggi	2	80	-	-	4	-	0	6	0	0	8	4	50	10		
3	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	90	87	96,66	92	96,38	104,72	95	72,55	76,37	98	40	40,82	100		
4	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level	3	3	-	3	3	100	3	3	100	3	3	100	4		
5	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori ≥ B	PD	29	28	96,56	29	29	100	33	32	97	34	15	44,12	36		
6	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	80	80	100	80	81	101,25	90	82	86,32	95	75	78,95	100		
7	Jumlah Pemda Kab/Kota yang Mendapat Predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD	Kab/Kota	5	8	160	6	6	100,00	6	6	100	6	6	100	7		
8	Jumlah Pemda Kab/Kota yang Evaluasi SAKIP Katagori " B "	Kab/Kota	5	4	80	6	6	100,00	6	6	100	6	6	100	7		
9	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
10	Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindak Lanjuti	%	80	62	77,50	85	65	76,47	90	85	99	95	30	31,58	100		

11	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN	%	60	58,71	97,85	65	86,87	133,65	75	76	98.69	75	95	126	80		
12	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Laporan	15	15	100	20	4	20,00	25	14	56	30	2	6,66	35		
13	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor	65	66,76	100	70	66,76	95	75	66,76	89,02	80	71	88,75	85		
14	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM	PD	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1		
15	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	36,30	22,30	61,44	36,30	24,36	67,11	36,30	24,35	67,08	36,30	24,60	648	36,30		
16	Tenaga Fungsional Pengawasan yang Bersertifikat	Orang	50	44,0	88	55	46	83,64	55	46	84	60	46	76,67	65		
17	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	3	3	100	3	3	100,00	3	3	100	3	3	100	4		
18	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	Skor	80	80	100	85	85	100,00	90	90	100	95	60	63,16	100		
19	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Memiliki Pelayanan Tepat Waktu	Unit	1	1	100	2	2	100,00	3	3	100	4	4	100	5		
20	Persentase ASN yang memiliki Standar Kompetensi	%	80	80	100	85	85	100,00	90	90	100	95	95	100	100		
21	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Skor	76	78,84	103	78	79	101,48	80	78,35	98	81	81	100	82		

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi dan analisis sesuai Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023, maka dapat disikapi beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas-tugas dibidang pengawasan hal ini berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan berdasarkan hambatan-hambatan/permasalahan dan solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).
b. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh entitas/obrik.
c. Prioritas tahun 2019 – 2023 lingkup Pengawasan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
d. Masih terbatasnya tenaga yang profesional, khususnya dibidang pengawasan terkait dengan jabatan fungsional auditor.

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :

a. Optimalisasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
b. Meningkatkan koordinasi dan monitoring serta evaluasi penyelesaian tindak lanjut.
c. Mensinergitaskan program pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal melalui peningkatan koordinasi dibidang pengawasan serta meningkatkan peranan pengawasan dan pembinaan kepada satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk

asistensi yang bertujuan untuk menjamin mutu pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dan meningkatkan cakupan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

d. Mengikutsertakan pejabat fungsional auditor ataupun calon auditor / aparatur fungsional pengawasan pada pendidikan dan pelatihan teknis sesuai bidang tugas masing – masing dalam rangka memenuhi tenaga pengawasan yang profesional baik dari kuantitas dan kualitas.

Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2019 s.d. 2023 yang sesuai visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019 s.d. 2023, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berfokus pada misi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance*) dan bebas KKN yaitu ***Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.***

Terhadap capaian RPJMD Tahun 2022 yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu berkenaan Maturitas SPIP capaian dengan Level 3, Kapabilitas APIP capaian dengan Level 3 dan Survey Penilaian Integritas capaian dengan 71,00 skor. Hal tersebut sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Aparatur Pengawasan. Jika dilihat dari berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dalam pelaksanaan/pencapaian misi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penghambat.

Beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

a. belum semua aparatur pengawasan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya;

b. perlu adanya perubahan paradigma pengawasan dengan mengedepankan pembinaan dan perbaikan kerja;

c. sarana dan prasarana pendukung pemeriksa yang belum memadai dan mencukupi; dan

d. belum berfungsinya Sistem Pengendalian Intern (SPI) di setiap PD yang menyebabkan sering terjadinya penyimpangan.

Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan pada Perangkat Daerah sesuai dengan analisis strategis dalam rangka menentukan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah dibagi dua yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan (faktor intern) lebih mudah dibanding mengidentifikasikan faktor ekstern terutama merumuskan ancaman. Lingkungan internal terdiri dari kekuatan *(Strengths*) dan kelemahan *(Weaknesses*). Kekuatan yaitu faktor-faktor yang ada dalam organisasi yang bersifat membanggakan dan menjadi potensi untuk dikembangkan dalam organisasi, sedangkan kelemahan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah di dalam organisasi.

1. Tantangan

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, memahami perkembangan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan profesionalisme supaya tetap dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan maksud tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

1) Adanya pergeseran peran Inspektorat dari *watchdog* menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*) menuntut

peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;

2) Adanya tuntutan mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD;
3) Peningkatan tingkat maturitas SPIP menuju level 3;
4) Adanya tuntutan peningkatan level kapabilitas APIP menuju level 3;
5) Adanya amanah pelaksanaan kegiatan *Early Warning System* (EWS), Benturan Kepentingan, dan *Consulting Center*;
6) Terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengawasan;
7) Kurangnya pengendalian internal di lingkungan Inspektorat;
8) Kurang sinkronnya antar dokumen perencanaan daerah dan kebijakan yang lebih tinggi;
9) Terbatasnya sarana dan prasarana di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Peluang

Secara umum terdapat 3 (tiga) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

1) Adanya mandat penguatan peran Inspektorat

Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan.

2) Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari *Good Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui (1) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) mempertahankan peraihan opini WTP; (3) senantiasa melakukan antisipasi terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan (4) perlunya penguatan peran Inspektorat.

3) Sumber Daya Manusia yang berintegritas.

Inspektorat telah memiliki aparat yang telah menjunjung tinggi kode etik, menghindari/menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan, berintegritas dan terus meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2023 adalah : 1. Ketersediaan data dan kelengkapan pemeriksaan sangat diperlukan untuk mempertahankan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Level 3 (menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah telah selaras dengan standar, dengan outcome, APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi/advis pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern). 2. Penambahan ASN khususnya pada Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD untuk memenuhi kekurangan personel

pemeriksa, penambahan peserta dan pelaksanaan Diklat dan SDM Aparatur Pengawasan penunjang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review terhadap RKPD dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi yang riil serta menghindari adanya program dan kegiatan yang tidak diperlukan. Berdasarkan hasil reviu, semua program kegiatan yang direncanakan telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di RKPD Tahun 2023. Penjabaran program kegiatan berdasarkan reviu terhadap RKPD Tahun 2023 tertuang pada Tabel 2.3 berikut :

2.3 . REVIU TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2023

NO						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Dalam /Luar**	**Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah**	**98 %**	**45.420.305.435**	**I**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Dalam /Luar**	**Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah**	**98 %**	**45.420.305.435**	Hasil Verifikasi dan analisis Kebutuhan Renja pada tahun 2023 telah sesuai dengan RKPD Tahun 2023
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Skor/Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	**82 Skor**	**387.252.000**	**1**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Skor/Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	**82 Skor**	**387.252.000**	
1.a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Smd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Dok	387.252.000	1.a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Smd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Dok	387.252.000	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Laporan Keuangan PD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**)**	**1 Lap**	**16.979.012.075**	**2**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Laporan Keuangan PD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**)**	**1 Lap**	**16.979.012.075**	
2.a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 org/bln	16.484.712.075	2.a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 org/bln	16.484.712.075	
2.b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 dok	494.300.000	2.b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	494.300.000	

			Pelaksanaan Tugas ASN								
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dalam /Luar**	**Persentase ASN yang memiliki Standar Kompetensi**	**95 %**	**6.143.211.300**	**3**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dalam /Luar**	**Persentase ASN yang memiliki Standar Kompetensi**	**95 %**	**6.143.211.300**
3.a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	118 pkt	531.771.000	3.a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	118 pkt	531.771.000
3.b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam / Luar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	122 org	5.611.440.300	3.b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam / Luar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	122 org	5.611.440.300
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terselenggaranya pelayanan umum perangkat Daerah**	**12 Laporan**	**2.407.188.600**	**4**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terselenggaranya pelayanan umum perangkat Daerah**	**12 Laporan**	**2.407.188.600**
4.a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 paket	1.198.316.500	4.a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 paket	1.198.316.500
4.b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Smd	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	378.982.100	4.b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Smd	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	378.982.100
4.c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	145.666.000	4.c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	145.666.000
4.d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam / Luar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Lap	784.224.000	4.d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam / Luar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Lap	784.224.000
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terlayaninya urusan Pemerintah Daerah**	**12 Laporan**	**2.083.778.160**	**5**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terlayaninya urusan Pemerintah Daerah**	**12 Laporan**	**2.083.778.160**
5.a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	13.000.000	5.a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	13.000.000
5.b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	193.707.600	5.b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	193.707.600

5.c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Lap	1.876,170.560	5.c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Lap	1.876,170.560
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**	**30 unit**	**417.068.400**	**6**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**	**30 unit**	**417.068.400**
6.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	177.540.400	6.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	177.540.400
6.b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	49.528.000	6.b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	49.528.000
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	190.000.000	6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	190.000.000
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Dalam/Luar**	**Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**	**95 %**	**13.583.424.700**	**II**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Dalam /Luar**	**Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**	**95 %**	**13.583.424.700**
1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**		**Level maturitas SPIP Pemda**	**Level 3**	**4.784.880.900**	1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**		**Level maturitas SPIP Pemda**	**Level 3**	**4.784.880.900**
1.a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Smd	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Lap	615.899.000	1.a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Smd	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Lap	615.899.000
1.b	Reviu Laporan Keuangan	Smd	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	30 Lap	1.006.795.300	1.b	Reviu Laporan Keuangan	Smd	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	30 Lap	1.006.795.300
1.c	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	10 Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	30 Lap	1.408.642.000	1.c	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	10 Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	30 Lap	1.408.642.000
1.c	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil	Dalam /	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan	4 Dok	1.753.544.500	1.c	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil	Dalam / Luar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi	4 Dok	1.753.544.500

	Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Luar	Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
2	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Dalam/ Luar**	**Tertanganinya Pengaduan Masyarakat melalui Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**100%**	**8.798.543.800**	**2**	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Dalam/ Luar**	**Tertanganinya Pengaduan Masyarakat melalui Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**100%**	**8.798.543.800**	
2.a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Smd	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Lap	221.683.200	2.a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Smd	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Lap	221.683.200	
2.b	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam / Luar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	38 Lap	8.756.860.600	2.b	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam / Luar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	38 Lap	8.756.860.600	
III	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Dalam/Luar**	**Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)**	**95 %**	**3.519.370.200**	**III**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Dalam /Luar**	**Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)**	**95 %**	**3.519.370.200**	
1	**Pendampingan dan Asistensi**		**Presentase Capaian Pencagahan KKN**	**95%**	**3.519.370.200**	1	**Pendampingan dan Asistensi**		**Presentase Capaian Pencagahan KKN**	**95%**	**3.519.370.200**	
1.a	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Smd	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	25 PD	822.738.900	1.a	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Smd	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	25 PD	822.738.900	
1.b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dalam / Luar	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	14 Keg	2.696.631.300	1.b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dalam / Luar	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	14 Keg	2.696.631.300	
	Jumlah				**45.420.305.435**		**Jumlah**				**45.420.305.435**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam mencari usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengikuti forum PD yang melibatkan stakeholder guna melaksanakan pembangunan yang lebih baik pada tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 sasarannya tidak melibatkan kelompok masyarakat sesuai dengan isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan

Tabel. 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Program Pendampingan dan Asistensi				
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Samarinda dan Balikpapan	Skor / Nilai Hasil Reformasi Birokrasi	552.491.000,00 22 Laporan	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pemda Kab/Kota se Kaltim dan Luar Kaltim	Monev Aksi Pencegahan Korupsi	Rp. 135.440.000,00 4 Laporan	
			Jumlah Laporan Gratifikasi	Rp. 134.500.000,00 25 Laporan	
			Evaluasi WBS dan Benturan Kepentingan	Rp. 134.500.000,00 2 Laporan	
			Kegiatan Operasional Saberpungli	Rp. 1.171.000.000,00 4 Laporan	
			Hasil Survey Penilaian Integritas	Rp. 134.000.000,00 Hasil Survey 70	
2.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda dan Balikpapan serta Luar Provinsi	Maturitas SPIP	Rp. 390.000.000,00 Level 3	
		Samarinda dan Balikpapan serta Luar Provinsi	Kapabilitas APIP Inspektorat	Rp. 390.000.000,00 Level 3	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku Instansi Pengawasan, maka penetapan program dan kegiatan yang berkait dengan hal tersebut dalam rangka menunjang program Nasional khususnya dalam bidang pengawasan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meningkatkan pengendalian internal dalam hal pelaksanaan Maturitas SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan dalam rangka percepatan pemberantasan KKN dan Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Menindaklanjuti hal tersebut telah dibentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah menyusun aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023 yang juga dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalimantan Timur dan kegiatan lainya seperti Kegiatan Tim Saberpungli dan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum.

Sedangkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi , Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan inputing berkaitan dengan aplikasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online dan sampai saat ini baru ada

1 yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK yaitu pada RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan serta pada tahun 2021 akan diusulkan 2 OPD sebagai Pliot Project Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Sedangkan pada tahun 2023 ini yang menjadi pilot project Zona Integritas menuju WBK adalah RSUD AW Syahrani, RSDJ Atma Husada Mahakam dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, dan pilot project untuk Zona Integritas menuju WBBM adalah RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara akuntabel, efektif dan efisien.

Tujuan dan sasaran pada Renja 2023 yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk menunjang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku instansi pengawasan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023, yaitu :

a. Tujuan :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih dari KKN.
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP.

Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut akan dicapai melalui beberapa sasaran.

b. Sasaran :

1. Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kabupaten/ Kota.
3. Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP.

3.3. Program dan Kegiatan

Pemilihan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja ini adalah merupakan penjabaran dari visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur perpilih periode 2019 s.d. 2023 terutama pada misi nomor 5 yaitu ***Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan public*** dan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran serta Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023. Pemilihan Program dan Kegiatan ini juga didasarkan pada Standar Pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai perannya selaku aparatur pengawasan sangat diperlukan untuk mendorong setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar selalu mentaati hukum yang berlaku dalam melaksanakan program dan kegiatannya, yang akan bermuara pada penegakan hukum di Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan perubahan paradigma pengawasan dari hanya sekedar *watch dog* menjadi *quality assurance*, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mau tidak mau harus merubah paradigma pengawasannya dengan mengedepankan pembinaan daripada memberikan

vonis salah atau benar kepada obyek pemeriksaannya. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga harus bisa memberikan solusi dari permasalahan yang didapatkan pada saat pemeriksaan, yaitu bersama-sama dengan obyek pemeriksaannya berusaha menemukan permasalahan yang ada serta mencari solusi yang terbaik bagi keberlanjutan organisasi dalam mencapai tujuan. Tujuan utama dari kondisi yang diharapkan tersebut adalah aparat birokrasi yang bersih, profesional dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi lebih berkualitas.

Dari berbagai alasan pemilihan program dan kegiatan tersebut, maka agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan pada tahun 2023 ada 3 program dengan 9 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan sebagaimana yang telah disesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dan telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023, yaitu :

a. Program :

Program kerja operasional Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2023, diimana Inspektorat sebagai Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan telah ditetapkan sebanyak 3 Program, baik program penunjang dan program prioritas, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

b. Kegiatan dan Sub Kegiatan :

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2023, yaitu ada 9 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

   Kegiatan dan Sub Kegiatan :

   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

      a.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Raelisasi Kinerja.

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

      b.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

      c.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

      c.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

      d.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

      d.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

      d.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

      d.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

      f.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

      f.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

      f.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

g.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

g.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

a.1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

a.2. Reviu Laporan Keuangan

a.3. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota

a.4. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

b.1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

b.2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

a. Pendampingan dan Asistensi

a.1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

a.2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

c. Lokasi Penyebaran Progam, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai dengan rancangan rencana kerja tahun 2023, lokasi pelaksanaan dan penyebaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut terfokus pada Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

d. Kebutuhan Anggaran Progam, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mendukung program kerja yang menjadi skala prirotas dan penunjang tersebut diatas, diperlukan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Perubahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebesar Rp. 45.420.305.435,00 Dari anggaran sebesar Rp. 45.420.305.435,00 di alokasikan untuk belanja :

- Belanja Kegiatan Pengawasan : Rp. 14.406.163.600,00
- Belanja Kegiatan Pencegahan KKN : Rp.2.696.631.300,00
- Belanja Peningkatan Kapasitas SDM dan Kapabilitas APIP : Rp. 5.611.440.300,00
- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN : Rp. 16.484.712.075,00
- Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 1.198.316.500,00
- Belanja Penunjang Lainnya : Rp. 5.023.041.660,00

Pagu indikatif untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 yang telah ditetapkan sesuai RKPD Tahun 2023 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

NO					
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Dalam /Luar**	***Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah***	**98 %**	**28.317.510.535**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Skor/Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	**82 Skor**	**287.252.000**
1.a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Smd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	287.252.000
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Laporan Keuangan PD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*)*	**1 Lap**	**16.979.012.075**
2.a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 org/bln	16.484.712.075
2.b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	494.300.000
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dalam /Luar**	**Persentase ASN yang memiliki Standar Kompetensi**	**95 %**	**6.143.211.300**
3.a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	118 pkt	531.771.000
3.b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam / Luar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	122 org	5.611.440.300
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terselenggaranya pelayanan umum perangkat Daerah**	**12 Laporan**	**2.407.188.600**
4.a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 paket	1.198.316.500
4.b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Smd	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	278.982.100
4.c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	145.666.000
4.d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam / Luar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Lap	784.224.000
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terlayaninya urusan Pemerintah Daerah**	**12 Laporan**	**2.083.778.150**
5.a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	13.900.000

5.b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	193.707.600
5.c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Lap	1.876.170.560
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**	**30 unit**	**417.068.400**
6.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	177.540.400
6.b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	49.508.000
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	190.000.000
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Dalam/Luar**	**Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**	**95 %**	**13.583.424.700**
1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**		**Level maturitas SPIP Pemda**	**Level 3**	**4.784.880.900**
1.a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Smd	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Lap	615.899.000
1.b	Reviu Laporan Keuangan	Smd	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	30 Lap	1.006.795.300
1.c	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	10 Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	30 Lap	1.408.642.000
1.c	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dalam / Luar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dok	1.753.544.600
2	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Dalam/ Luar**	**Tertanganinya Pengaduan Masyarakat melalui Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**100%**	**8.798.543.800**
2.a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Smd	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Lap	221.683.200
2.b	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam / Luar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	38 Lap	8.576.860.000
III	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Dalam/Luar**	**Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)**	**95 %**	**3.519.370.200**
1	**Pendampingan dan Asistensi**		**Presentase Capaian Pencagahan KKN**	**95%**	**3.519.370.200**
1.a	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Smd	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi,	25 PD	822.738.900

			Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
1.b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dalam / Luar	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	14 Keg	2.696.631.300
	Jumlah				**45.420.305.435**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja berfokus dari pembangunan kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Rencana kerja ini mencerminkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan seperti halnya pencapaian visi dan misi kepala daerah, prioritas pembangunan, dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Plafon Anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2023 sejumlah Rp.45.420.305.435,00 yang terdiri dari 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka disajikan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana table 4.1 berikut :

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Kode					Urusan/Bidang	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
6					***Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan***								
6	*1*				***Inspektorat Daerah***								
6	1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah***	**Dalam/ Luar**	**98 %**	**28.317.510.535**	**APBD**		**98 %**	**27.620.413.920**
6	1	1	1. 01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Skor/Nilai Akuntabilitas Kinerja PD		**82 Skor**	**287.252.000**	**APBD**		**82 Skor**	**455.103.770**
6	1	1	1. 01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	9 Laporan	287.252.000	**APBD**		9 Dok	455.103.770
6	1	1	1. 02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Laporan Keuangan PD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*)*		**1 Lap**	**16.979.012.075**	**APBD**		**1 Lap**	**18.448.322.560**

6	1	1	1. 02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	87 org/bln	16.484.712.075	APBD		87 org/bln	17.729.340.650
6	1	1	1. 02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	12 dok	494.300.000	APBD		12 dok	718.981.900
6	1	1	1. 05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang memiliki Standar Kompetensi**		**95 %**	**6.143.211.300**	APBD		**95 %**	**4.143.577.000**
6	1	1	1. 05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Samarinda	118 pkt	531.771.000	APBD		122 pkt	422,337,000
6	1	1	1. 05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dalam Daerah / Luar Daerah	122 org	5.611.440.300	APBD		122 org	3.721.240.000
6	1	1	1. 06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya pelayanan umum perangkat Daerah**		**12 Laporan**	**2.407.188.600**	APBD		**12 Laporan**	**3.428.922.000**
6	1	1	1. 06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	25 paket	1.198.316.500	APBD		25 paket	1,982,962,000
6	1	1	1. 06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 paket	278.982.100	APBD		12 paket	239.414.500
6	1	1	1. 06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	12 paket	145.666.000	APBD		12 paket	148.945.500
6	1	1	1. 06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam Daerah / Luar Daerah	36 Lap	784.224.000	APBD		36 Lap	1.057.600.000

6	1	1	1. 08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlayaninya urusan Pemerintah Daerah**		**12 Laporan**	**2.083.778.150**	**APBD**		**12 Laporan**	**784.178.590**
6	1	1	1. 08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	12 Lap	13.900.000	**APBD**		12 Lap	40,000,000
6	1	1	1. 08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	12 Lap	193.707.600	**APBD**		12 Lap	139.764.360
6	1	1	1. 08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	13 Lap	1.876.170.560	**APBD**		13 Lap	604,414,230
6	1	1	1. 09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**		**30 unit**	**417.068.400**	**APBD**		**30 unit**	**360.310.000**
6	1	1	1. 09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Samarinda	18 unit	177.540.400	**APBD**		18 unit	272.560.000
6	1	1	1. 09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Samarinda	12 unit	49.508.000	**APBD**		12 unit	69.750.000
6	1	1	1. 09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	1 unit	190.000.000	**APBD**		1 unit	18.000.000
6	1	2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**	**Dalam/ Luar**	**95 %**	**13.583.424.700**	**APBD**		**95 %**	**10.457.305.970**

6	1	2	1. 01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Level maturitas SPIP Pemda**		**Level 3**	**4.784.880.900**	**APBD**		**Level 3**	**3.410.987.440**
6	1	2	1. 01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Samarinda	10 Lap	615.899.000	**APBD**		10 Lap	302.050.000
6	1	2	1. 01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Samarinda	30 Lap	1.006.795.300	**APBD**		30 Lap	837.515.000
6	1	2	1. 01	5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	10 Kab/Kota	30 Lap	1.408.642.000	**APBD**		30 Lap	1.402.252.440
6	1	2	1. 01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dalam Daerah / Luar Daerah	4 Dok	1.753.544.600	**APBD**		4 Lap	869.150.000
6	1	2	1. 02		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Tertanganinya Pengaduan Masyarakat melalui Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	Dalam Daerah / Luar Daerah	**100%**	**8.798.543.800**	**APBD**		**100%**	**7.046.338.530**
6	1	2	1. 02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Samarinda	12 Lap	221.683.200	**APBD**		12 Lap	285.550.000
6	1	2	1. 02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Dalam Daerah / Luar Daerah	38 Lap	8.576.860.000	**APBD**		38 Lap	6,760,788,530
6	1	3			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme**	**Dalam/ Luar**	**95 %**	**3,519.370.200**	**APBD**		**95 %**	**2.842.262.500**

						(KKN)						
6	1	3	1. 02		**Pendampingan dan Asistensi**	**Presentase Capaian Pencagahan KKN**	**Dalam/ Luar**	**95%**	**3.519.370.200**	**APBD**		**95%**	**2.842.262.500**
6	1	3	1. 02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Samarinda	25 PD	822.738.900	**APBD**		25 PD	588.041.000
6	1	3	1. 02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dalam Daerah / Luar Daerah	14 Keg	2.696.631.300	**APBD**		14 Keg	2.254.221.500
					Jumlah				**45.420.305.435**				**40.919.982.390**

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur merupakan arah pelaksanaan program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan sasaran dan kebijakan daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan. Output Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah Program Kerja Pangawasan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program Inspektorat.

5.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Inspektorat sebagai pemilik fungsi pengendalian intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah, senantiasa meningkatkan kualitas pengawasannya sehingga dapat mengurangi resiko pada perangkat daerah dengan pola penyelenggaraan pengawasan berdasarkan manajemen resiko. Manajemen resiko berasal dari pemilihan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah yang memiliki resiko tertinggi dan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis resiko yang diusulkan dalam suplemen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran audit kinerja dalam rangka menjaga sinkronisasi dan konsistensi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

a. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan - kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka percepatan penyelesaian temuan dan rekomendasi.
b. Melaksanakan asitensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan BPK-RI/APIP dan pendampingan terhadap laporan keuangan, pemeriksaan/ audit kinerja dan pemeriksaan operasional serta manajemen risiko terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
c. Melaksanakan asistensi dan pembinaan terhadap 45 perangkat daerah termasuk UPTD serta Pembinaan terhadap 10 Inspektorat Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dimana Gubernur Sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat.
d. Membuka layanan klinik konsultasi pengawasan dan pemberian advisory
e. Bekerjasama dengan KPK-RI dan Badan Statistik dalam Rangka Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI)
f. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pengawasan, Sarana dan Prasarana dalam rangka mendukung tugas-tugas di bidang pengawasan.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yang memuat pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi skala prioritas dan penunjang untuk dilaksanakan pada tahun 2023 yang disesuaikan dengan RKPD Perubahan Tahun 2023.

Diharapkan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 yang telah disusun dapat diimplementasikan dalam kegiatan pengawasan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan yang sesuai dengan rencana kerja dan pendanaan yang telah dalam penetapan

kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2023 dan diharapkan dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengawasan secara konsisten.

Samarinda, 18 Agustus 2023

Inspektur,

Dr. H. M. Irfan Prananta, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19740818 199703 1 006

PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 000.7.2.4/12994/Bapp-II tentang Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Sesuai amanat Surat Edaran tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai satuan kerja perangkat daerah wajib menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan yang berisi penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan telah dievaluasi seiring berjalannya Tahun Anggaran 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam perencanaan pembangunan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki, memecahkan berbagai permasalahan, konflik dan tantangan serta melayani atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dituntut untuk siap dan sanggup membuat atau menyusun suatu perencanaan yang baik. Proses penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 didasarkan kepada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

RENJA-SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) instansi, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. RENJA merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja satuan kerja perangkat daerah.

Mengingat arti strategis dokumen RENJA SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun bagan alur tahapan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

ALUR TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA

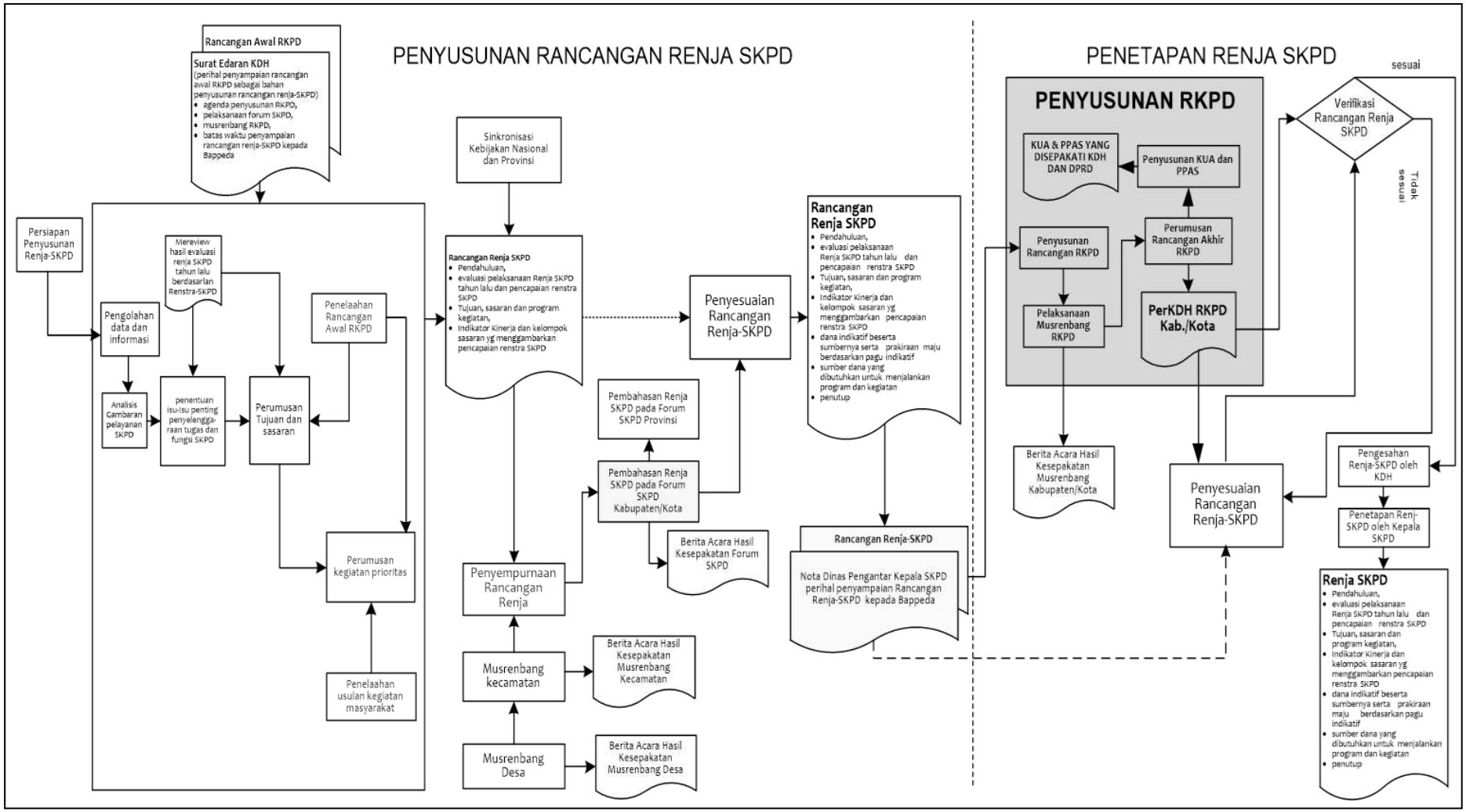

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang menjadiu acuan dalam perencanaan dan penganggaran SKPD.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
15. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
18. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatern/Kota;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
29. Pemerintah Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Budaya;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tenaga Kerja Asing di Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
47. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
48. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi;
49. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
50. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
51. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
52. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
53. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur ini adalah sebagai pedoman dalam

mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, dengan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan yang meliputi penyesuaian sub kegiatan, indikator dan pagu anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah:

1. Menjadi acuan bagi Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur untuk penyesuaian program, kegiatan, sub kegiatan, target indikator dan pagu anggaran Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
2. Menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Tahun 2024;
3. Sebagai alat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan (Triwulan II)

Pada Tahun 2023 ada 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan yang menjadi garapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mewujudkan visi **"Berani Untuk Kaltim yang Berdaulat".**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur seluruhnya bersifat non fisik, yaitu berupa sosialisasi dan penyuluhan baik itu yang dilaksanakan di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Kalimantan Timur.

Adapun evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (KINERJA)
Tahun Anggaran 2023 Triwulan II
Provinsi Kalimantan Timur

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI PER TW 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB	
				TARGET	SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
08.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur**	**Pelayanan Publik pada Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Persentase Pelayanan Publik pada Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**99,00**	**%**	**91,50**	**92,42%**	**SEKRETARIAT**	
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,00	Bulan	6,00	50,00%	SEKRETARIAT	
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,00	Dokumen	3,00	42,86%	SEKRETARIAT	
8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,00	Laporan	4,00	44,44%	SEKRETARIAT	
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,00	Bulan	6,00	50,00%	SEKRETARIAT	
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40,00	Orang	40,00	100,00%	SEKRETARIAT	
8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,00	Dokumen	0,00	0,00%	SEKRETARIAT	
8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3,00	Laporan	0,00	0,00%	SEKRETARIAT	
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	12,00	Bulan	6,00	50,00%	SEKRETARIAT	
8.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,00	Laporan	2,00	50,00%	SEKRETARIAT	

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI PER TW 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
				TARGET	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,00	Bulan	6,00	50,00%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60,00	Paket	55,00	91,67%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12,00	Bulan	6,00	50,00%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17,00	Paket	10,00	58,82%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6,00	Paket	6,00	100,00%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7,00	Laporan	5,00	71,43%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2,00	Dokumen	0,00	0,00%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpenuhi	2,00	Unit	8,00	400,00%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	18,00	Unit	12,00	66,67%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12,00	Bulan	6,00	50,00%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	Laporan	6,00	50,00%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	Laporan	6,00	50,00%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12,00	Bulan	6,00	50,00%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5,00	Unit	2,50	50,00%	SEKRETARIAT

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI PER TW 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
				TARGET	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
8.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28,00	Unit	14,00	50,00%	SEKRETARIAT
08.01.02	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Meningkatnya pelajar yang mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase meningkatnya penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**8,00**	**%**	**7,04**	**88,01%**	**BID. BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER**
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pelajar SLTA yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah pelajar SLTA yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12187,00	Orang	10.726,00	88,01%	BID. BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	14547,00	Orang	11.571,00	79,54%	BID. BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER
8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	27,00	Orang	10,00	37,04%	BID. BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER
8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4,00	Laporan	2,00	50,00%	BID. BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER
08.01.03	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan**	**Meningkatnya penggunaan hak-hak politik masyarakat**	**Persentase penggunaan hak-hak poliitk masyarakat**	**75,50**	**%**	**20,00**	**26,49%**	**BID. POLDAGRI**

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI PER TW 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
				TARGET	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengembangan Etika Serta Budaya Politik							
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatnya Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan	Tingkat Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan	56,85	%	40,00	70,36%	BID. POLDAGRI
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1315,00	Orang	438,00	33,31%	BID. POLDAGRI
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	33,00	Orang	10,00	30,30%	BID. POLDAGRI
8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Terlaksananya Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan	4,00	Laporan	2,00	50,00%	BID. POLDAGRI

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI PER TW 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
				TARGET	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
08.01.04	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Meningkatnya Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat**	**Persentase pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan Ormas se Kaltim**	**40,05**	**%**	**23,70**	**59,18%**	**BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS**
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang terbina	Jumlah Organisasi Masyarakat yang terbina	147,00	Ormas	87,00	59,18%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	620,00	Orang	115,00	18,55%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	27,00	Orang	15,00	55,56%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4,00	Laporan	2,00	50,00%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
08.01.05	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**Tersusunnya rekomendasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama**	**Persentase rekomendasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama**	**100,00**	**%**	**50,00**	**50,00%**	**BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS**

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI PER TW 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
				TARGET	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tersusunnya rekomendasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	4,00	Rekomendasi	2,00	50,00%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	560,00	Orang	107,00	19,11%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30,00	Orang	13,00	43,33%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4,00	Laporan	2,00	50,00%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
08.01.06	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur**	**Persentase penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur**	**33,00**	**%**	**9,57**	**29,00%**	**BID. PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL**
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penurunan Jumlah Konflik Ipoleksosbud	Jumlah Konflik Ipoleksosbud	100,00	Konflik	32,00	32,00%	BID. PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama	969,00	Orang	295,00	30,44%	BID. PENANGANAN KONFLIK DAN

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI PER TW 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB	
				TARGET	SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah					KEWASPADAAN NASIONAL	
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	33,00	Orang	10,00	30,30%	BID. PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL	
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	4,00	Laporan	2,00	50,00%	BID. PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL	
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1,00	Dokumen	1,00	100,00%	BID. PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL	

Tabel 2.1.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (KEUANGAN)
Tahun Anggaran 2023 Triwulan II
Provinsi Kalimantan Timur

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI PER TRIWULAN 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
08	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**111.878.505.813**	**94.054.273.086**	**84,07%**	**BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM**
08.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur**	**20.278.873.813**	**10.875.907.874**	**53,63%**	**SEKRETARIAT**
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	985.224.000	540.793.270	54,89%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	690.559.000	495.267.270	71,72%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	294.665.000	45.526.000	15,45%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.088.553.463	4.099.598.188	40,64%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.574.575.963	3.880.377.388	40,53%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	388.200.000	176.040.000	45,35%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	125.777.500	43.180.800	34,33%	SEKRETARIAT

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI PER TRIWULAN 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
	Triwulanan/Semesteran SKPD				
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.090.000	-	0,00%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	36.090.000	-	0,00%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.440.000	39.600.000	89,11%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44.440.000	39.600.000	89,11%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.030.256.150	1.076.673.193	35,53%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	822.694.650	31.088.400	3,78%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.640.000	8.721.650	14,62%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.733.621.500	1.036.863.143	59,81%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	414.300.000	-	0,00%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.955.296.000	4.613.200.000	93,10%	SEKRETARIAT

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI PER TRIWULAN 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.955.296.000	4.613.200.000	93,10%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	969.987.200	465.045.697	47,94%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.606.000	44.829.514	24,42%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	786.381.200	420.216.183	53,44%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.027.000	40.997.526	24,26%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	151.947.000	36.747.526	24,18%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.080.000	4.250.000	24,88%	SEKRETARIAT
08.01.02	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**1.879.494.500**	**938.381.870**	**49,93%**	**BID. BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER**
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	1.879.494.500	938.381.870	49,93%	BID. BINA IDEOLOGI, WAWASAN

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI PER TRIWULAN 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				KEBANGSAAN DAN KARAKTER
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.388.694.500	683.725.150	49,24%	BID. BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER
8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	243.000.000	91.214.920	37,54%	BID. BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER
8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	247.800.000	163.441.800	65,96%	BID. BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER
08.01.03	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan**	**12.377.372.500**	**10.006.037.458**	**80,84%**	**BID. POLDAGRI**

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI PER TRIWULAN 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
	Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	12.377.372.500	10.006.037.458	80,84%	BID. POLDAGRI
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11.707.172.500	9.745.570.393	83,24%	BID. POLDAGRI
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	288.000.000	65.284.847	22,67%	BID. POLDAGRI

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI PER TRIWULAN 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	382.200.000	195.182.218	51,07%	BID. POLDAGRI
08.01.04	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**72.202.966.500**	**71.009.463.534**	**98,35%**	**BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS**
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	72.202.966.500	71.009.463.534	98,35%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI PER TRIWULAN 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	71.748.766.500	70.825.925.500	98,71%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	214.800.000	98.206.034	45,72%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	239.400.000	85.332.000	35,64%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
08.01.05	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**906.220.000**	**170.749.430**	**18,84%**	**BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS**
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	906.220.000	170.749.430	18,84%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI PER TRIWULAN 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
	Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	489.820.000	22.373.000	4,57%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	231.600.000	94.637.630	40,86%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	184.800.000	53.738.800	29,08%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
08.01.06	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan**	**4.233.578.500**	**1.053.732.920**	**24,89%**	**BID. PENANGANAN KONFLIK DAN**

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI PER TRIWULAN 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial				**KEWASPADAAN NASIONAL**
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4.233.578.500	1.053.732.920	24,89%	BID. PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.160.568.500	256.626.400	22,11%	BID. PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	288.000.000	90.532.020	31,43%	BID. PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI PER TRIWULAN 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	340.200.000	132.824.500	39,04%	BID. PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2.444.810.000	573.750.000	23,47%	BID. PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Secara garis besar capaian kinerja pelayanan SKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur

Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
Persentase Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			5,00%	6,00%	7,00%	8,00%	1,99%	3,97%	7,00%	8,00%	
Persentase Hak-Hak Politik Masyarakat			67,00%	67,50%	68,00%	68,50%	66,27%	64,56 %	68,00%	68,50%	
Persentase Pembinaan, Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas Se Kaltim			120Ormas	27,25%	32,70%	40,05%	178 Ormas	22,07 %	27,25%	32,70%	
Persentase Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama			-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	75,00 %	100,00 %	100,00 %	
Persentase Penanganan Konflik Sosial di Kalimantan Timur			102 Konflik	33,66%	33,33%	33,00%	70Konflik	21,45 %	33,33%	33,00%	

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yakni Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebjakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan serta terbatasnya sumber daya manusia yang ada
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi, hal ini perlu dilakukan dan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mendorong agar partisipasi lebih meningkat.
4. Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa, bagi semua elemen masyarakat terutama pelajar yang ada di Kalimantan Timur.
5. Peningkatan Pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemberdayaan organisasi masyarakat, dengan demikian kondusifitas daerah dapat terus dimantapkan.
6. Peningkatan, pembinaan dan penanganan ketentraman dan ketertiban sehingga dapat mewujudkan suasana lingkungan yang terbebas dari berbagai gangguan keamanan dan konflik sosial yang berkepanjangan. Terwujudnya suasana lingkungan yang terbebas dari berbagai macam gangguan keamanan dan konflik sosial menjadi modal dasar dalam keberhasilan pembangunan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Ranwal RKPD dan hasil Analisa kebutuhan pelaksanaan tahun 2023, dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.4.1.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Timur

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			RENCANA PERUBAHAN 2023		
			2023			2023		
			TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)	TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
08.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur**	**Persentase Pelayanan Publik pada Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**99,00**	**%**	**20.278.873.813**	**99,00**	**%**	**20.726.696.413**
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,00	Bulan	985.224.000	12,00	Bulan	1.000.324.000
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,00	Dokumen	690.559.000	7,00	Dokumen	690.559.000
8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,00	Laporan	294.665.000	9,00	Laporan	309.765.000
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,00	Bulan	10.088.553.463	12,00	Bulan	10.124.913.463
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40,00	Orang	9.574.575.963	40,00	Orang	9.574.575.963
8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,00	Dokumen	388.200.000	1,00	Dokumen	424.560.000
8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	3,00	Laporan	125.777.500	3,00	Laporan	125.777.500

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			RENCANA PERUBAHAN 2023		
			2023			2023		
			TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)	TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Triwulanan/Semesteran SKPD	SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	12,00	Bulan	36.090.000	12,00	Bulan	36.090.000
8.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,00	Laporan	36.090.000	4,00	Laporan	36.090.000
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,00	Bulan	44.440.000	12,00	Bulan	44.440.000
8.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60,00	Paket	44.440.000	60,00	Paket	44.440.000
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12,00	Bulan	3.030.256.150	12,00	Bulan	3.396.518.750
8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17,00	Paket	822.694.650	17,00	Paket	1.098.957.250
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6,00	Paket	59.640.000	6,00	Paket	59.640.000
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7,00	Laporan	1.733.621.500	7,00	Laporan	1.823.621.500
8.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	2,00	Dokumen	414.300.000	2,00	Dokumen	414.300.000

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			RENCANA PERUBAHAN 2023		
			2023			2023		
			TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)	TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpenuhi	2,00	Unit	4.955.296.000	2,00	Unit	4.955.296.000
8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	18,00	Unit	4.955.296.000	18,00	Unit	4.955.296.000
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12,00	Bulan	969.987.200	12,00	Bulan	1.000.087.200
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	Laporan	183.606.000	12,00	Laporan	213.706.000
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	Laporan	786.381.200	12,00	Laporan	786.381.200
8.01.01.1.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12,00	Bulan	169.027.000	12,00	Bulan	169.027.000
8.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5,00	Unit	151.947.000	5,00	Unit	151.947.000
8.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	28,00	Unit	17.080.000	28,00	Unit	17.080.000

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			RENCANA PERUBAHAN 2023		
			2023			2023		
			TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)	TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						
08.01.02	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase meningkatnya penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**8,00**	**%**	**1.879.494.500**	**8,00**	**%**	**3.079.494.500**
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah pelajar SLTA yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12187,00	Orang	1.879.494.500	12187,00	Orang	3.079.494.500
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	14547,00	Orang	1.388.694.500	14547,00	Orang	2.588.694.500
8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	27,00	Orang	243.000.000	27,00	Orang	243.000.000
8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela	4,00	Laporan	247.800.000	4,00	Laporan	247.800.000

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			RENCANA PERUBAHAN 2023		
			2023			2023		
			TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)	TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						
08.01.03	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Persentase penggunaan hak-hak poliitk masyarakat**	**75,50**	**%**	**12.377.372.500**	**75,50**	**%**	**191.479.236.142**
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tingkat Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan	56,85	%	12.377.372.500	56,85	%	191.479.236.142

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			RENCANA PERUBAHAN 2023		
			2023			2023		
			TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)	TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1315,00	Orang	11.707.172.500	1315,00	Orang	190.809.036.142
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	33,00	Orang	288.000.000	33,00	Orang	288.000.000
8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik. Etika	4,00	Laporan	382.200.000	4,00	Laporan	382.200.000

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			RENCANA PERUBAHAN 2023		
			2023			2023		
			TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)	TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						
08.01.04	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan Ormas se Kaltim**	**40,05**	**%**	**72.202.966.500**	**40,05**	**%**	**73.202.966.500**
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang terbina	147,00	Ormas	72.202.966.500	147,00	Ormas	73.202.966.500
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	620,00	Orang	71.748.766.500	620,00	Orang	72.748.766.500

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			RENCANA PERUBAHAN 2023		
			2023			2023		
			TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)	TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	27,00	Orang	214.800.000	27,00	Orang	214.800.000
8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4,00	Laporan	239.400.000	4,00	Laporan	239.400.000
08.01.05	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**Persentase rekomendasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama**	**100,00**	**%**	**906.220.000**	**100,00**	**%**	**906.220.000**
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	4,00	Rekomendasi	906.220.000	4,00	Rekomendasi	906.220.000
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi	560,00	Orang	489.820.000	560,00	Orang	489.820.000

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			RENCANA PERUBAHAN 2023		
			2023			2023		
			TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)	TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30,00	Orang	231.600.000	30,00	Orang	231.600.000
8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4,00	Laporan	184.800.000	4,00	Laporan	184.800.000

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			RENCANA PERUBAHAN 2023		
			2023			2023		
			TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)	TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
08.01.06	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur**	**33,00**	**%**	**4.233.578.500**	**33,00**	**%**	**4.233.578.500**
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik Ipoleksosbud	100,00	Konflik	4.233.578.500	100,00	Konflik	4.233.578.500
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	969,00	Orang	1.160.568.500	969,00	Orang	1.160.568.500
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing.	33,00	Orang	288.000.000	33,00	Orang	288.000.000

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			RENCANA PERUBAHAN 2023		
			2023			2023		
			TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)	TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah						
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	4,00	Laporan	340.200.000	4,00	Laporan	340.200.000
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1,00	Dokumen	2.444.810.000	1,00	Dokumen	2.444.810.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan

Penelaahan usulan program dan kegiatan pemangku kepentingan dapat dijelaskan dari tabel berikut

Tabel 2.5.1
Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan
Provinsi Kalimantan Timur

NO	NAMA PEMOHON	MAKSUD USULAN	JUMLAH USULAN SETELAH VERIFIKASI
1	BAWASLU Provinsi Kalimantan Timur	Dukungan Pemilukada 40%	Rp 53.603.464.800
2	KPU Provinsi Kalimantan Timur	Dukungan Pemilukada 40%	Rp 120.366.113.842
3	KPU Provinsi Kalimantan Timur	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi penyelenggara Pemilu	Rp 622.108.373
4	KERUKUNAN DAYAK KENYAH LEBUQ TIMAI KALIMANTAN TIMUR [Belanja Hibah Uang]	-	Rp 200,000,000.00
5	KATAN CENDEKIAWAN DAYAK NASIONAL KALIMANTAN TIMUR [Belanja Hibah Uang]	-	Rp 200,000,000.00

NO	NAMA PEMOHON	MAKSUD USULAN	JUMLAH USULAN SETELAH VERIFIKASI
6	GERAKAN ARAH BARU INDONESIA (GARBI) [Belanja Hibah Uang]	-	Rp 200,000,000.00
7	IKATAN KELUARGA BESAR SULAWESI TENGAH (IKABST) [Belanja Hibah Uang]	-	Rp 200,000,000.00
8	iCare Kalimantan Timur [Belanja Hibah Uang]	-	Rp 200,000,000.00

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka memperkuat pemerintahan agar dapat berjalan dengan sesuai harapan dan dapat mencapai target yang dicapai, maka pada masa pemerintahan tahun 2020-2024 mempunyai Visi, Misi dan beberapa agenda prioritas yang tercantum sebagai berikut:

VISI: "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

MISI:

1. Peningkatan Kualitas Manusian Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD

Sesuai Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2023 telah ditetapkan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Timur Yang Demokratis, dengan tujuan:**
   - Terwujudnya Masyarakat Kaltim yang Demokratis

2. **Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Timur Yang Berwawasan Kebangsaan, dengan tujuan:**
   - Terwujudnya Masyarakat Kaltim Khususnya Pelajar SLTA yang Berwawasan dan Berkarakter Kebangsaan

3. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, dengan tujuan:

- Terwujudnya Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kalimantan Timur

4. Mewujudkan Kewaspadaan dan Kondusifitas di Kalimantan Timur, dengan tujuan:

- Terwujudnya Kewaspadaan dan Kondusifitas di Kalimantan Timur

Berdasarkan visi dan misi beserta penjelasannya, diatas maka sasaran pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran yang hendak dicapai **Misi: Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Timur Yang Demokratis**, dengan sasaran:
   - Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi
2. Sasaran yang hendak dicapai **Misi: Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Timur Yang Berwawasan Kebangsaan**, dengan sasaran:
   - Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Khususnya Pelajar SLTA di Kalimantan Timur
3. Sasaran yang hendak dicapai **Misi: Mewujudkan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan**, dengan sasaran:
   - Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
4. Sasaran yang hendak dicapai **Misi: Mewujudkan Kewaspadaan dan Kondusifitas di Kalimantan Timur**, dengan sasaran:
   - Meningkatnya Kewaspadaan Dalam Menjaga Kondusifitas yang Tertib, Aman dan Nyaman di Kalimantan Timur

3.3 Program dan Kegiatan

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2023 terdapat 6 Program, 12 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan dengan total pagu Rp 413.170.594.417,00.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
        3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD
        4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
        5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
        3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
        4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
        5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
        6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
    c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
        1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
        2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
        3) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

3) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
      1) Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
      2) Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
      3) Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
      1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
      2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
      3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
    a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
        1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
        2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
        3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
        4) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Tabel 4.1.
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Timur

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			RENCANA PERUBAHAN 2023		
			2023			2023		
			TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)	TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
08.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur**	**Persentase Pelayanan Publik pada Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**99,00**	**%**	**20.278.873.813**	**99,00**	**%**	**20.726.696.413**
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,00	Bulan	985.224.000	12,00	Bulan	1.000.324.000
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,00	Dokumen	690.559.000	7,00	Dokumen	690.559.000
8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,00	Laporan	294.665.000	9,00	Laporan	309.765.000
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,00	Bulan	10.088.553.463	12,00	Bulan	10.124.913.463
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40,00	Orang	9.574.575.963	40,00	Orang	9.574.575.963
8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,00	Dokumen	388.200.000	1,00	Dokumen	424.560.000
8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	3,00	Laporan	125.777.500	3,00	Laporan	125.777.500

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			RENCANA PERUBAHAN 2023		
			2023			2023		
			TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)	TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	12,00	Bulan	36.090.000	12,00	Bulan	36.090.000
8.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,00	Laporan	36.090.000	4,00	Laporan	36.090.000
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,00	Bulan	44.440.000	12,00	Bulan	44.440.000
8.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60,00	Paket	44.440.000	60,00	Paket	44.440.000
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12,00	Bulan	3.030.256.150	12,00	Bulan	3.396.518.750
8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17,00	Paket	822.694.650	17,00	Paket	1.098.957.250
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6,00	Paket	59.640.000	6,00	Paket	59.640.000
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7,00	Laporan	1.733.621.500	7,00	Laporan	1.823.621.500
8.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	2,00	Dokumen	414.300.000	2,00	Dokumen	414.300.000

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			RENCANA PERUBAHAN 2023		
			2023			2023		
			TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)	TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpenuhi	2,00	Unit	4.955.296.000	2,00	Unit	4.955.296.000
8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	18,00	Unit	4.955.296.000	18,00	Unit	4.955.296.000
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12,00	Bulan	969.987.200	12,00	Bulan	1.000.087.200
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	Laporan	183.606.000	12,00	Laporan	213.706.000
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	Laporan	786.381.200	12,00	Laporan	786.381.200
8.01.01.1.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12,00	Bulan	169.027.000	12,00	Bulan	169.027.000
8.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5,00	Unit	151.947.000	5,00	Unit	151.947.000
8.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	28,00	Unit	17.080.000	28,00	Unit	17.080.000

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			RENCANA PERUBAHAN 2023		
			2023			2023		
			TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)	TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						
08.01.02	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase meningkatnya penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**8,00**	**%**	**1.879.494.500**	**8,00**	**%**	**3.079.494.500**
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah pelajar SLTA yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12187,00	Orang	1.879.494.500	12187,00	Orang	3.079.494.500
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	14547,00	Orang	1.388.694.500	14547,00	Orang	2.588.694.500
8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	27,00	Orang	243.000.000	27,00	Orang	243.000.000
8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela	4,00	Laporan	247.800.000	4,00	Laporan	247.800.000

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			RENCANA PERUBAHAN 2023		
			2023			2023		
			TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)	TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						
08.01.03	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Persentase penggunaan hak-hak poliitk masyarakat**	**75,50**	**%**	**12.377.372.500**	**75,50**	**%**	**191.479.236.142**
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tingkat Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan	56,85	%	12.377.372.500	56,85	%	191.479.236.142

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			RENCANA PERUBAHAN 2023		
			2023			2023		
			TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)	TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1315,00	Orang	11.707.172.500	1315,00	Orang	190.809.036.142
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	33,00	Orang	288.000.000	33,00	Orang	288.000.000
8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik. Etika	4,00	Laporan	382.200.000	4,00	Laporan	382.200.000

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			RENCANA PERUBAHAN 2023		
			2023			2023		
			TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)	TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						
08.01.04	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan Ormas se Kaltim**	**40,05**	**%**	**72.202.966.500**	**40,05**	**%**	**73.202.966.500**
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang terbina	147,00	Ormas	72.202.966.500	147,00	Ormas	73.202.966.500
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	620,00	Orang	71.748.766.500	620,00	Orang	72.748.766.500

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			RENCANA PERUBAHAN 2023		
			2023			2023		
			TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)	TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	27,00	Orang	214.800.000	27,00	Orang	214.800.000
8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4,00	Laporan	239.400.000	4,00	Laporan	239.400.000
08.01.05	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**Persentase rekomendasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama**	**100,00**	**%**	**906.220.000**	**100,00**	**%**	**906.220.000**
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	4,00	Rekomendasi	906.220.000	4,00	Rekomendasi	906.220.000
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi	560,00	Orang	489.820.000	560,00	Orang	489.820.000

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			RENCANA PERUBAHAN 2023		
			2023			2023		
			TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)	TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30,00	Orang	231.600.000	30,00	Orang	231.600.000
8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4,00	Laporan	184.800.000	4,00	Laporan	184.800.000

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			RENCANA PERUBAHAN 2023		
			2023			2023		
			TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)	TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
08.01.06	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur**	**33,00**	**%**	**4.233.578.500**	**33,00**	**%**	**4.233.578.500**
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik Ipoleksosbud	100,00	Konflik	4.233.578.500	100,00	Konflik	4.233.578.500
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	969,00	Orang	1.160.568.500	969,00	Orang	1.160.568.500
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing.	33,00	Orang	288.000.000	33,00	Orang	288.000.000

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			RENCANA PERUBAHAN 2023		
			2023			2023		
			TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)	TARGET	SATUAN	Rp (Ribu)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah						
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	4,00	Laporan	340.200.000	4,00	Laporan	340.200.000
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1,00	Dokumen	2.444.810.000	1,00	Dokumen	2.444.810.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini merupakan suatu dokummen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar untuk memandu dan memfasilitasi perubahan yang diinginkan dalam organisasi, dengan memberikan kerangka kerja yang jelas, rencana tindakan, dan ukuran keberhasilan yang dapat diukur. Hal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dalam jangka menengah dan bergerak maju dengan lebih efisien dan efektif.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran Visi dan Misi instansi, diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun SKPD yang membidangi fungsi lain.

Samarinda, Agustus 2023

Kepala Badan,

Drs.Sufian Agus, M.Si.

NIP. 19660204 198803 1 016

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 32 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Perubahan RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SEKRETARIAT DAERAH

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009